



Menuju Jaringan Logistik Global Melalui Lompatan Besar —

A Big Leap Towards Global Logistics Network

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("Perseroan" atau "Pelindo 1") tahun 2020 ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Pelindo 1 yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perseroan menjalankan kegiatannya. Pelindo 1 tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu persis sesuai yang diharapkan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Pelindo 1" atau "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) secara umum.

Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh dalam situs web resmi Perseroan dengan alamat www.pelindo1.co.id.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Hereinafter referred to as "Company" or "Pelindo 1") 2020 Annual Report contained reports on Pelindo 1 financial state, operation results, policies, projections, plans, strategies, and aims classified as statements on the Company's future in accordance with the prevailing laws, with exception of historical matters. Such statements may have risk prospects, uncertainties, and may cause actual material developments different from those which were reported.

Prospective statements within this Annual Report were written based on various assumptions on the actual and future situations well as the business environment in which the Company conducts its activities. Pelindo 1 could not guarantee that the confirmed documents would bring exactly the expected results.

This Annual Report contained the terms "Pelindo 1" and "Company" which are to be understood as PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Sometimes the word "we" is used in order to more easily refer to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

This Annual Report can be read and downloaded on our official Company websites at www.pelindo1.co.id.



TEMA SAMPUL MUKA FRONT COVER THEME



Menuju Jaringan Logistik Global Melalui Lompatan Besar

A Big Leap Towards Global Logistics Network

Dengan kapasitas dan kompetensi di sektor kepelabuhanan dan maritim melalui pengelolaan beberapa pelabuhan, Pelindo 1 berupaya untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki. Optimalisasi ini dilakukan melalui berbagai cara, baik dengan prioritas investasi khususnya di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, maupun melalui berbagai sinergi dan kerja sama dengan pihak lainnya.

Salah satunya adalah sinergi dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kuala Tanjung Port & Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE) dengan BUMN lain. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah bagi Pelabuhan Kuala Tanjung untuk dapat menjadi *Indonesia's Logistic & Supply Chain Hub*. Dan juga persiapan pengoperasian Terminal Petikemas Belawan Fase 2 yang akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan Pelabuhan Belawan.

Seluruh upaya ini tentu tak lepas dari keinginan besar Pelindo 1 untuk menjadi bagian penting dari jaringan logistik global. Dengan modal pelabuhan strategis yang dimiliki, Pelindo 1 berkeyakinan mampu mewujudkan keinginan tersebut, dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa-masa mendatang.

With capacity and competency in port and maritime sector thanks to the experience of managing several ports, Pelindo 1 endeavors to optimize its assets. This optimization is carried out in many ways, be that by prioritizing investments especially amidst the uncertainties due to COVID-19 pandemic, or through synergy and cooperation with other parties.

An example of such synergy is the development of Kuala Tanjung Port & Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE) National Strategic Project (PSN) with other SOEs. This synergy is expected to increase the value of the Kuala Tanjung Port in its bid of becoming *Indonesia's Logistic & Supply Chain Hub*. Likewise, the operational preparation of Belawan Container Terminal Phase 2 is expected to bring positive impacts for the management of the port of Belawan.

All of these efforts certainly constitute an inseparable part of Pelindo 1's big aspiration to become an important part of global logistics networks. With strategic ports at disposal, Pelindo 1 is confident to be able to fulfill that goal, and contribute to Indonesian economic growth in the future.

DAFTAR ISI

CONTENTS

PERFORMA 2020

PERFORMANCE 2020

12	Ikhtisar Data Keuangan Penting Summary of Important Financial Data
18	Ikhtisar Operasi dan Organisasi Summary of Operation and Organization
20	Ikhtisar Saham Summary of Shares
22	Ikhtisar Obligasi, Sukuk Atau Obligasi Konversi Summary of Bond, Sukuk or Convertible Bond
23	Informasi Tentang Sumber Pendanaan Lainnya Information on Other Sources of Funding
24	Kilas Peristiwa 2020 2020 In Events

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORTS

28	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report
40	Laporan Direksi Board of Directors Report

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

62	Identitas Perusahaan Company Identity
64	Riwayat Singkat Perusahaan Company Brief History
66	Jejak Langkah Milestones
67	Filosofi Logo Perusahaan Company Logo Philosophy
68	Bidang Usaha Business Area
70	Peta Wilayah Operasional dan Fasilitas Pelabuhan Operational Area Map and Port Facilities
82	Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan Vision, Mission, and Company Code of Conduct
92	Struktur Organisasi Organization Structure
94	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioner Profiles
100	Profil Direksi Board of Directors Profile
108	Profil Pejabat Eksekutif Executive Officers Profiles
116	Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi Employees Demography and Competencies Development
140	Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition

142	Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi Subsidiaries and/or Association Entities
157	Struktur Grup Group Structure
158	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham Share Issuance and/or Recording Chronology
158	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya Other Effect Issuance and/or Recording Chronology
159	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Supporting Institutions and/or Professions
161	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications
166	Daftar Entitas Anak dan/atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Subsidiaries and/or Branches or Representatives
168	Informasi Pada Situs Web Perusahaan Information on Company Website
171	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Education and/or Training for Board of Commissioner, Director, Committees, Corporate Secretaries, and Internal Audit Unit

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

182	Tinjauan Perekonomian dan Industri Overview of the Economy and the Industry
192	Kebijakan Strategis 2020 Strategic Policies in 2020
194	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Overview of Operations in Each Business Segment
206	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
208	Tinjauan Keuangan dan Informasi Material Lainnya Overview of Finance and Other Material Information
289	Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information
291	Tingkat Kesehatan Perusahaan Company's Health Level
293	Peta Jalan Usaha: Rencana Jangka Panjang Business Road Map: Long-Term Plan

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

298	Pernyataan Penerapan GCG Secara Berkelanjutan Statement of Sustainable GCG Implementation
302	Penerapan GCG Secara Berkelanjutan Sustainable GCG Implementation
314	Struktur dan Mekanisme GCG GCG Structure and Mechanism



318	Rapat Umum Pemegang Saham General Meetings of Shareholders
347	Dewan Komisaris The Board of Commissioners
368	Komisaris Independen Independent Commissioner
371	Direksi The Board of Directors
383	Transparansi Informasi Aspek Dewan Komisaris dan Direksi Information Transparency on the Aspect of the Board of Commissioners and the Board of Directors
401	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors
423	Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama Disclosure of Affiliations Between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Majority Shareholders
425	Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi Management of Conflicts of Interest of the Board of Commissioners and the Board of Directors
427	Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Disclosure of Shares Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors
428	Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Competency Development of the Board of Commissioners and the Board of Directors
429	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of the Board of Commissioners
449	Organ Pendukung Direksi the Board of Directors Supporting Organs
462	Akuntan Publik Public Accountants
463	Manajemen Risiko Risk Management
476	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
483	<i>Corporate Social Responsibility</i>
484	Perkara Penting Important Matters
491	Akses Data dan Informasi Perusahaan Company Data and Information Access
493	Teknologi Informasi Information Technology
502	Kode Etik Code of Conduct
505	Kebijakan Anti Korupsi Anti Corruption Policy
506	Komitmen Anti Penyuapan Anti Bribery Commitment
507	Pengelolaan Gratifikasi Gratuity Management
510	Informasi Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik Information on Funding for Political Activities
511	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Organizer Wealth Report (LHKPN)
514	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Policy on Goods and Services Procurement
515	<i>Whistleblowing System</i>
517	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Diversity of the Composition of the Boards of Commissioners and Directors
544	Transparansi Praktik <i>Bad Governance</i> Transparency In Bad Governance Practices

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

528	Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Management
538	Tanggung Jawab Atau Komitmen Perusahaan Terhadap Hak Asasi Manusia The Companys Responsibility and Commitment Towards Human Rights
541	Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Operasi yang Adil The Company Responsibility Towards Fair Operating Practices
544	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup Corporate Social Responsibility Concerning the Environment
554	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Corporate Social Responsibility Concerning Labor and Occupational Health and Safety
566	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Konsumen atau Pelanggan Corporate Social Responsibility Concerning the Customers
572	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Corporate Social Responsibility Concerning Social Development and Community Empowerment

LAMPIRAN APPENDIX

582	Laporan Keuangan Financial Report
724	Referensi Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016: OJK Reference No. 29/POJK.04/2016:





TRANSFORMASI DAN DIGITALISASI PELINDO 1

PELINDO 1 TRANSFORMATION AND DIGITALIZATION



PELINDO 1 MENDORONG PEMANFAATAN DIGITALISASI DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN OPERASI DAN BISNISNYA, YANG DITERJEMAHKAN KE DALAM TRANSFORMASI PERSEROAN. PELINDO 1 ENCOURAGES DIGITALIZATION IN OPERATION MANAGEMENT AND BUSINESS, WHICH IN ESSENCE, TRANSFORMING THE COMPANY

TRANSFORMASI PERUSAHAAN | COMPANY TRANSFORMATION PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)



TRANSFORMASI APLIKASI & INFRASTRUKTUR

APPLICATION & INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION

1. Aspek Fungsional Aplikasi | Functionality
2. Integrasi Aplikasi | Integration
3. Manajemen Data | Data Management
4. Infrastruktur | Infrastructure

TRANSFORMASI TATA KELOLA TI

IT MANAGEMENT TRANSFORMATION

1. Strategi TI | IT Strategy
2. Kebijakan dan Prosedur | Policies & Procedures
3. Operasional TI | IT Operation
4. Pengembangan TI | IT Development
5. Keamanan TI | IT Security

TRANSFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

HUMAN RESOURCES TRANSFORMATION

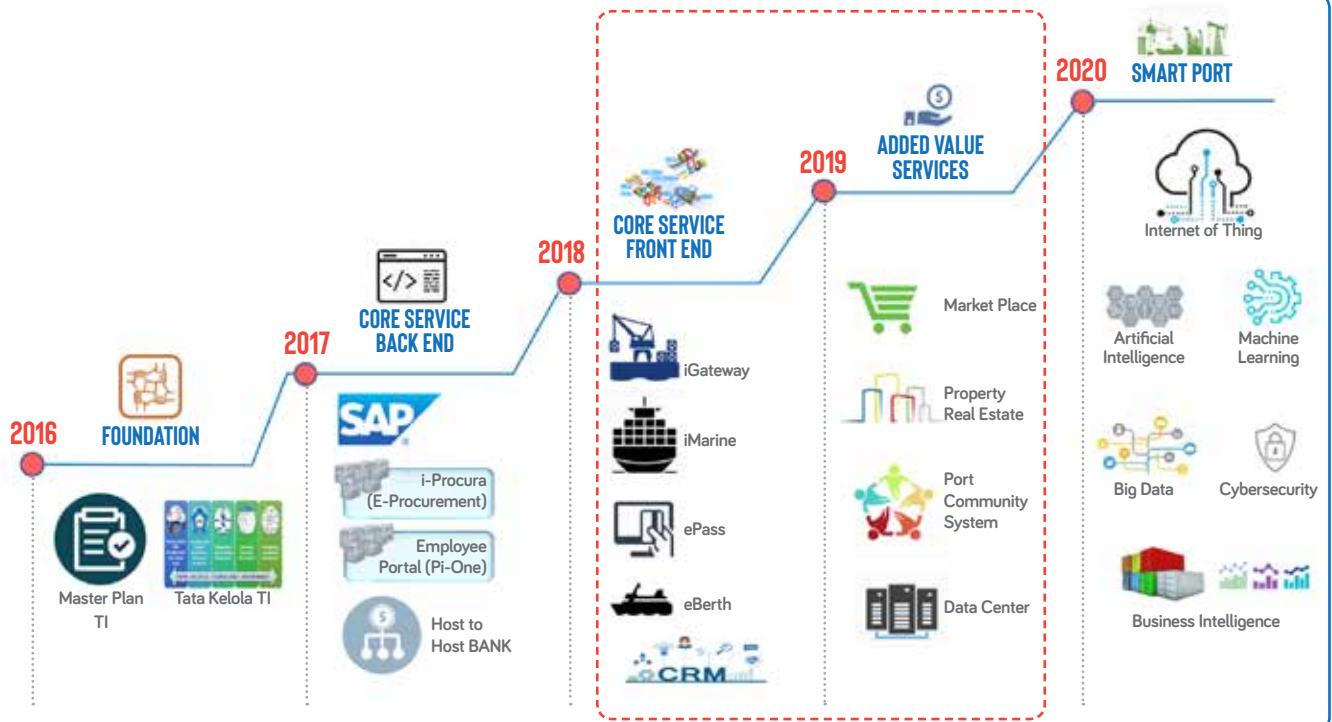
1. Struktur Organisasi | Organization
2. Kapasitas SDM TI | IT Resources Capacity
3. Kompetensi SDM TI | IT Resources Competencies

Inisiatif Perusahaan untuk melakukan Transformasi Perusahaan:

1. Tinjauan Strategi Perusahaan
2. Pengembangan Target Operating Model (TOM)
3. Rekomendasi Peta Jalan Transformasi Bisnis

Company Initiatives for Transformation:

1. Company Strategy Review
2. Target Operating Model (TOM) Development
3. Business Transformation Roadmap Recommendation



MENGELOLA GERBANG LOGISTIK INDONESIA

MANAGING INDONESIA'S LOGISTIC GATE



PELINDO 1 MENGELOLA BEBERAPA PELABUHAN YANG MEMILIKI LOKASI STRATEGIS DI INDONESIA, YANG BERADA DI SALAH SATU JALUR PERDAGANGAN TERSIBUK DI DUNIA YAITU SELAT MALAKA.

PELINDO 1 MANAGES SEVERAL STRATEGICALLY LOCATED PORTS IN INDONESIA, ON ONE OF THE BUSIEST TRADE ROUTE IN THE WORLD, THE STRAIT OF MALACCA.



Pelabuhan Kuala Tanjung, salah satu pelabuhan yang dikelola Pelindo 1, merupakan *deep sea port* yang berfungsi sebagai *Hub Port* Indonesia.

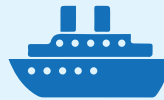
Pelindo 1 mengelola Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Dumai yang menjadi pelabuhan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di Pulau Sumatera.

Kuala Tanjung, one of the Port managed by Pelindo 1, is one of the Deep Sea Ports which functions as Indonesian Hub Port.

Pelindo 1 manages the Belawan Port, and Dumai Port which are among the largest exporting port of Crude Palm Oil (CPO) in Sumatera

PENCAPAIAN KINERJA 2020

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS



22,10%

Kenaikan tonase kunjungan kapal, dari 131,58 juta GT di tahun 2019 menjadi 160,66 juta GT di tahun 2020. Increase on ship call tonnages, from 131.58 million GT in 2019 to 160.66 million GT in 2020.



7,25%

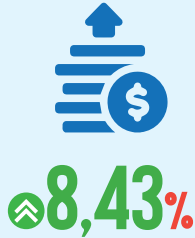
Kenaikan jumlah bongkar muat petikemas, dari 1,08 juta Box di tahun 2019 menjadi 1,16 juta Box di tahun 2020. Dalam satuan Teus, bongkar muat petikemas juga mengalami peningkatan sebesar 6,38%, dari 1,33 juta Teus di tahun 2019 menjadi 1,42 juta Teus di tahun 2020. Increase in Container Loading/Unloading from 1.08 million Box in 2019 to 1.16 million Box in 2020. In Teus, there's also an 6.38% increase from 1.33 million Teus in 2019 to 1.42 million Teus in 2020.





Menghadapi pandemi COVID-19 dan imbas ketidakpastian, Pelindo 1 tetap berupaya untuk menjaga kelangsungan usahanya, termasuk memetakan potensi risiko yang timbul dari adanya kejadian luar biasa ini, serta mengoptimalkan kapasitas yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa Pelindo 1 memiliki fondasi yang kuat, yang dapat menghadapi situasi sesulit apapun.

Facing COVID-19 pandemic and the resulting uncertainties, Pelindo 1 strives to sustain its business, including mapping the risks which occurred out of this extraordinary event, and optimising current capacity. This shows how Pelindo 1 has a strong foundation able to withstand any situation, no matter how harsh.



Kenaikan Laba Bersih per Saham, dari Rp167.802 per lembar saham di tahun 2019 menjadi Rp181.940 per lembar saham di tahun 2020. Increase on Net Profit per Share from Rp167.802 per share in 2019 to Rp181.940 per share in 2020.



Laju Pertumbuhan Majemuk Rata-rata Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate (CAGR)* Jumlah Aset Pelindo 1 dalam 5 (lima) tahun terakhir. Compound Annual Growth Rate (CAGR) on Pelindo 1 Assets for the last 5 (five) years.



MARGIN laba usaha tahun 2020, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 10,61%. Operating profit margin 2020 increased from 10.61% in 2019.



Rasio liabilitas terhadap ekuitas, atau *Debt to Equity Ratio (DER)* tahun 2020, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 157,76%. Pengelolaan kemampuan pendanaan menjadi salah satu fokus dari kebijakan strategis Perseroan. Debt to Equity Ratio (DER) in 2020 decreased compared to 157.76% in 2019. Management of funding was one of the foci of the Company strategic policy.



95,63
"SANGAT BAIK" | VERY GOOD

Skor Assessment*) penerapan GCG tahun 2020, meningkat dari skor tahun 2019 sebesar 94,42 juga dengan predikat "Baik". Kenaikan skor ini menunjukkan komitmen Pelindo 1 untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG berdasarkan praktik terbaik.

GCG Implementation Assessment*) score of 2020 increased from 94.42% in 2019, which belonged in "Good" category. This increase in score showed Pelindo 1 commitment to further improve GCG implementation quality based on best practices.

*) Assesment menggunakan metode berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

*) Assesment was carried out using the methods specified in the Copy Of Ministry of SOE Secretary's Decision No. SK-16/S.MBU/2012 of 6 June 2012 on GCG Assessment and Evaluation Indicator/Parameters for SOEs.



15,16
MILIAR RUPIAH | BILLION

Realisasi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Program Kemitraan tahun 2020. Program ini diberikan kepada 244 Mitra Binaan yang tersebar di berbagai wilayah di Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Meskipun pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pada sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan, Pelindo 1 berkomitmen untuk terus mengembangkan agenda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam rangka tumbuh bersama seluruh pemangku kepentingan.

Corporate Social Responsibility fund realisation through 2020 Partnership Program. This program was intended for the 244 Development Partners spread throughout Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatera, and Riau Islands. Despite COVID-19 causing a slowdown in the transportation and warehousing sector, Pelindo 1 is committed to develop CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY agenda to grow together with all stakeholders.



7,50
MILIAR RUPIAH | BILLION

Realisasi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Program Bina Lingkungan tahun 2020. Penyaluran Program Bina Lingkungan dilakukan melalui berbagai program unggulan seperti pengembangan kampung wisata ramah anak di Belawan yang meliputi penghijauan melalui pertanian hidroponik, penyediaan fasilitas rumah baca, pengembangan usaha ternak lele, batik daun *ecoprint*, layanan kesehatan termasuk untuk penanggulangan COVID-19, dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kampung Wisata Ramah Anak.

Corporate Social Responsibility fund realisation through 2020 Environmental Assistance Program. The fund distribution was carried out through many select programs, such as the development of child friendly tourism village in Belawan which covers reforestation through hydroponic farm, library, catfish farming, Batik Daun *ecoprint*, health service including COVID-19 mitigation, and the establishment of Tourism Awareness Group in Child Friendly Tourism Village.





01

— Performa 2020

Performance 2020 —

Meskipun menghadapi tantangan yang luar biasa akibat pandemi COVID-19, Pelindo 1 masih tetap dapat menjaga profitabilitasnya dengan cukup baik.

Despite facing extraordinary challenges due to the COVID-19 pandemic, Pelindo 1 is still able to maintain its profitability

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

SUMMARY OF IMPORTANT FINANCIAL DATA

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

PROFIT (LOSS) AND OTHER CONSOLIDATED COMPREHENSIVE REVENUES

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In Million Rupiah, Unless Stated Otherwise	2020	2019*)	2018*)	2017	2016	YoY 2019-2020 (%)	CAGR 2016-2020 (%)
Pendapatan Operasi Business Revenues							
Pendapatan Pelayanan Peti Kemas Container Service Revenues	1.478.312	1.449.964	1.547.033	1.307.243	1.092.952	1,96%	7,84%
Pendapatan Pelayanan Barang Non Peti Kemas Revenue from Non-Container	412.241	436.106	405.022	363.403	301.953	-5,47%	8,09%
Pendapatan Pelayanan Kapal Goods Services	359.724	382.819	363.545	362.240	322.536	-6,03%	2,77%
Pendapatan Pelabuhan Tersus/Pelus/Dersus/ Terminal UKS Vessels Service Revenue Tersus/Pelus/Dersus/ Terminal UKS Port Revenues	407.710	313.738	338.203	314.690	304.537	29,95%	7,57%
Pendapatan Sewa Lahan dan Bangunan/Bagian Bangunan Land and Building Rental Income/part of Building	131.936	146.633	128.720	98.576	89.660	-10,02%	10,14%
Pendapatan Pelayanan Logistik/Konsolidasi dan Distribusi Barang Logistic Service Revenues/Goods Consolidation and Distribution	60.193	67.072	82.214	73.297	52.619	-10,26%	3,42%
Pendapatan Sewa Aset, Peralatan dan Ruangan (Non PI) Asset Rental Income, Equipment and Room	49.603	44.081	41.481	42.923	44.240	12,53%	2,90%
Pendapatan Jasa Listrik/Power Plant dan Air Electricity/power Plant and Water Service Revenues	52.957	44.050	45.233	52.337	56.359	20,22%	-1,54%
Pendapatan Jasa Kesehatan (Poliklinik dan Rumah Sakit) Revenue from Health Care Service (Polyclinic and Hospital)	30.513	58.929	25.902	12.600	22.295	-48,22%	8,16%
Pendapatan Pelayaran Shipping Income	4.830	3.996	8.256	2.791	-	20,88%	N/a
Pendapatan Galangan (Dock) Kapal Shipyards Revenue (Dock)	938	633	408	2.300	9.074	48,31%	-43,29%
Lain-lain Others	94.889	156.213	128.462	118.705	112.675	-39,26%	-4,20%
Jumlah Pendapatan Operasi Total Operating Revenues	3.083.847	3.104.233	3.114.480	2.751.107	2.408.900	-0,66%	6,37%
Reduksi Pendapatan Revenues Reduction	(81)	(187)	(70)	-	-	-56,87%	N/a
Pendapatan Bersih Net Income	3.083.766	3.104.046	3.114.410	2.751.107	2.408.900	-0,65%	6,37%
Pendapatan Konstruksi Construction Revenues	758.144	2.535.336	1.483.753	-	-	-70,10%	N/a
Beban Operasi Operating expenses	(2.407.778)	(2.505.837)	2.907.911	1.705.546	1.383.867	-3,91%	N/a
Beban Konstruksi Construction Expenses	(758.144)	(2.535.336)	513.699	-	-	-70,10%	N/a
Laba usaha Business Profits	675.988	598.209	1.176.552	1.045.560	1.025.032	13,00%	-9,88%
Pendapatan (beban) non-usaha - bersih Non-Business Net Revenues (Expenses)	10.623	(29.984)	372.422	125.333	38.263	135,43%	-27,41%
Rugi penjualan aset tidak lancar lainnya Other Non-Current Assets Sales Loss	(2.870)	(1.242)	-	-	-	131,12%	N/a

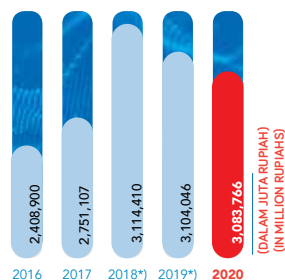


Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In Million Rupiah, Unless Stated Otherwise	2020	2019*)	2018*)	2017	2016	YoY 2019- 2020 (%)	CAGR 2016-2020 (%)
Pendapatan keuangan Financial Revenues	54.805	83.524	-	-	-	-34,38%	N/a
Beban Keuangan Financial Revenues	(526.995)	(361.774)	(153.281)	(100.799)	(69.785)	45,67%	65,77%
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi Association Entities Profit (Loss)	272	(757)	(2.643)	(2.693)	(2.336)	135,93%	N/a
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit Before Corporate Tax	211.823	287.978	1.127.589	1.067.401	995.846	-26,44%	-32,09%
Beban Pajak Penghasilan Badan Corporate Tax Cost	(28.702)	(81.801)	(243.681)	(262.256)	(262.544)	-64,91%	-42,50%
Laba Tahun Berjalan Current Year Profit	183.120	206.176	883.908	805.145	733.302	-11,18%	-29,31%
Penghasilan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Revenues	(1.914)	(63.202)	(28.082)	(12.250)	(7.185)	-96,97%	-28,16%
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Current Year Comprehensive Profit	181.207	142.974	855.827	792.895	726.117	26,74%	-29,32%
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Current Year Profit (Loss) Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Parent Entity Owners	309.298	285.263	892.686	803.621	733.602	8,43%	-19,42%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	(126.178)	(79.087)	(8.777)	1.524	(300)	59,54%	352,86%
	183.120	206.176	883.908	805.145	733.302	-11,18%	-29,31%
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Current Year Comprehensive Profit (Loss) Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Parent Entity Owners	307.389	222.070	864.604	791.371	726.417	38,42%	-19,35%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	(126.183)	(79.096)	(8.777)	1.524	(300)	59,53%	352,87%
	181.207	142.974	855.827	792.895	726.117	26,74%	-29,32%
Laba Bersih per Saham Dasar (Rupiah penuh) Net Profit per Share (Rupiah)	181.940	167.802	525.109	465.512	427.304	8,43%	-19,22%

*) Disajikan kembali

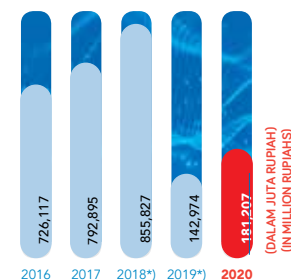
*) Reserved

Pendapatan Bersih 2016-2020 Net Income 2016-2020



*) Disajikan kembali | *) Reserved

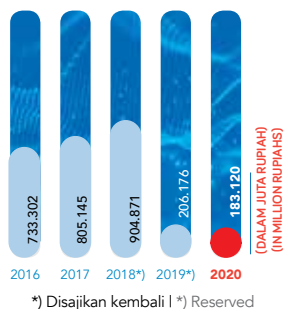
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan 2016-2020 (Rp-juta) Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan 2016-2020 (Rp-juta)



*) Disajikan kembali | *) Reserved

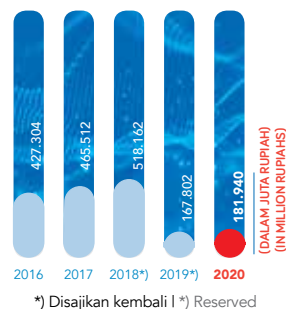
Laba Tahun Berjalan 2016-2020

Current Year Profit 2016-2020



Laba Bersih per Saham Dasar 2016-2020

Net Profit per Share 2016-2020



POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED FINANCIAL STATUS

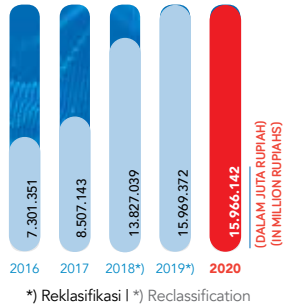
Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In million Rupiah, unless stated otherwise	2020	2019*)	2018*)	2017	2016	YoY 2019-2020 (%)	CAGR 2016-2020 (%)
Aset Assets							
Kas dan Setara Kas Cash & Cash Equivalents	1.565.081	1.767.549	1.999.188	1.872.411	2.200.770	-11,45%	-8,17%
Aset Tetap Fixed Assets	6.173.832	6.118.441	5.714.241	4.637.927	3.750.635	0,91%	13,27%
Investasi pada Entitas Asosiasi Investments on Association Entities	49.377	49.105	50.362	52.505	44.426	0,55%	2,68%
Investasi pada Pengendalian Bersama Entitas Investments on Joint Controlled Entities	-	-	-	1.163.988	900.759	-	-
Aset Lancar Current Assets	2.046.355	2.601.862	2.622.950	2.209.548	2.481.343	-21,35%	-4,70%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	13.919.787	13.367.510	11.204.089	6.297.595	4.820.008	4,13%	30,36%
Jumlah Aset Total Assets	15.966.142	15.969.372	13.827.039	8.507.143	7.301.351	-0,02%	21,60%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities & Equities							
Liabilitas Jangka Pendek Short Term Liabilities	2.193.720	2.414.559	2.676.898	1.823.138	1.511.587	-9,15%	9,76%
Liabilitas Jangka Panjang Long Term Liabilities	7.511.890	7.359.251	4.830.694	1.779.782	1.488.588	2,07%	49,88%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	9.705.610	9.773.810	7.507.592	3.602.920	3.000.175	-0,70%	34,11%
Jumlah Ekuitas Total Equities	6.260.533	6.195.562	6.319.447	4.904.224	4.301.176	1,05%	9,84%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities & Equities	15.966.142	15.969.372	13.827.039	8.507.143	7.301.351	-0,02%	21,60%

*) Reklasifikasi

*) Reclassified

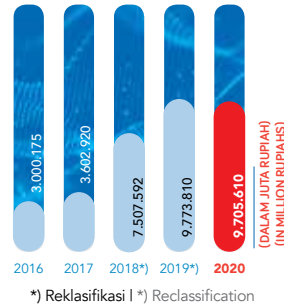


Jumlah Aset 2016-2020
Total Assets 2016-2020



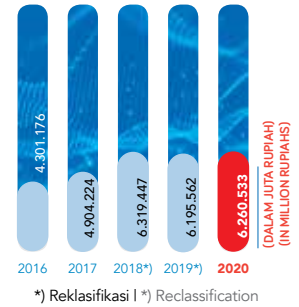
*) Reklasifikasi | *) Reclassification

Jumlah Liabilitas 2016-2020
Total Liabilities 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

Jumlah Ekuitas 2016-2020
Total Equities 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

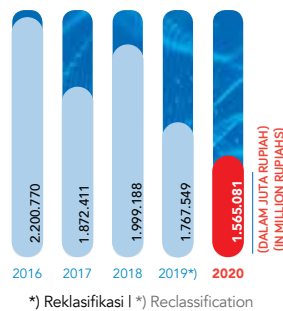
ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED CASH FLOWS

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In million Rupiah, unless declared differently	2020	2019*)	2018	2017	2016	YoY 2019-2020 (%)	CAGR 2016-2020 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Operation Cash Flows	540.791	568.290	977.781	2.036.974	1.628.768	-4,84%	-24,09%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Investment Cash Flows	(800.105)	(2.503.408)	(2.380.457)	(2.393.365)	(1.320.398)	-68,04%	N/A
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Funding Cash Flows	56.846	1.703.479	1.529.452	28.032	413.016	-96,66%	-39,09%
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Cash & Cash Equivalents Net Increase	(202.468)	(231.639)	126.777	(328.359)	721.385	-12,59%	N/A
Saldo Awal Kas dan Setara Kas Cash & Cash Equivalents Starting Balance	1.767.549	1.999.188	1.872.411	2.200.770	1.479.384	-11,59%	4,55%
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas Cash & Cash Equivalents Closing Balance	1.565.081	1.767.549	1.999.188	1.872.411	2.200.770	-11,45%	N/A

*) Reklasifikasi
 *)Reclassified

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 2016-2020
Cash & Cash Equivalents Closing Balance 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

RASIO-RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIOS

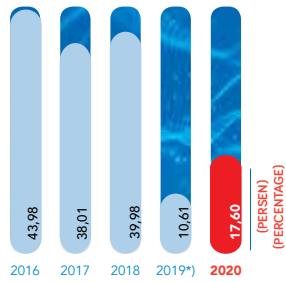
	2020	2019*)	2018*)	2017	2016	YoY 2019-2020 (%)	CAGR 2016-2020 (%)
Rasio Operasional Operational Ratio							
Perputaran Aset, atau <i>Total Assets Turn Over</i> (TATO) (%) Total Assets Turn Over (TATO) (%)	(0,24)	(21,10)	2,06	0,41	0,39	-98,86%	N/A
<i>Return on Capital Employed</i> (ROCE) (%) Return on Capital Employed (ROCE) (%)	4,71	4,30	11,43	16,16	16,38	9,53%	-26,77%
Kolektibilitas Piutang, atau <i>Collection Period</i> (hari) Collection Period (days)	6,33	18,66	15,41	26,61	18,99	-66,08%	-24,02%
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio							
Marjin Laba Usaha (%) Business Profit Margin (%)	17,60	10,61	39,98	38,01	43,98	65,87%	-20,47%
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	4,77	3,66	29,06	29,27	30,44	30,37%	-37,10%
Imbal Hasil, atau <i>Return on Equity</i> (ROE) (%) Return on Equity (ROE) (%)	3,21	4,03	30,30	29,39	26,90	-20,35%	-41,23%
Imbal Aset, atau <i>Return on Assets</i> (ROA) (%) Return on Assets (ROA) (%)	1,15	1,29	6,54	9,46	10,04	-11,16%	-41,87%
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio							
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	93,28	107,76	97,98	121,19	164,15	-13,43%	-13,18%
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	71,34	73,20	74,68	102,70	145,59	-2,54%	-16,33%
Rasio Solvabilitas Solvability Ratio							
Liabilitas Terhadap Ekuitas, atau <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) (%) Debt to Equity Ratio (DER) (%)	105,61	157,76	68,52	73,47	69,75	-33,06%	22,10%
Liabilitas Terhadap Aset, atau <i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR) (%) Debt to Asset Ratio (DAR) (%)	60,79	61,20	54,30	42,35	41,09	-0,68%	10,29%
Aset Terhadap Liabilitas (%) Assets on Liabilities (%)	164,50	163,39	184,17	236,12	243,36	0,68%	-9,33%
Aset Terhadap Ekuitas (%) Assets on Equities (%)	255,03	257,76	218,80	173,47	169,75	-1,06%	10,71%
Rasio Pertumbuhan Growth Ratio							
Pendapatan Bersih (%) Business Revenue (%)	(31,87)	81,12	13,17	14,21	2,91	-139,29%	N/A
Laba Usaha (%) Business Profit (%)	(13,00)	(51,95)	19,07	(1,31)	18,56	-125,03%	-8,52%
Laba Tahun Berjalan (%) Current Year Profit (%)	(11,18)	(77,21)	12,39	9,80	4,70	-85,52%	N/A
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	26,74	(83,29)	7,94	9,20	1,51	132,10%	105,08%
Aset (%) Assets (%)	(0,02)	15,49	62,53	16,51	32,95	-100,13%	N/A
Liabilitas (%) Liabilities (%)	(0,70)	30,19	108,38	20,09	62,02	-102,31%	N/A
Ekuitas (%) Equities (%)	1,05	(1,96)	28,86	14,02	18,16	-153,49%	-50,98%

*) Disajikan kembali

*) Restated

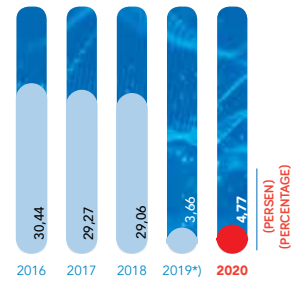


Marjin Laba Usaha 2016-2020 Business Profit Margin 2016-2020



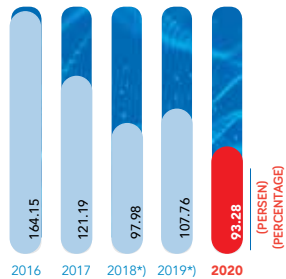
*) Disajikan kembali | *) Reserved

Marjin Laba Bersih 2016-2020 Net Profit Margin 2016-2020



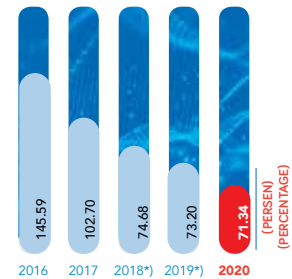
*) Disajikan kembali | *) Reserved

Rasio Lancar 2016-2020 Current Ratio 2016-2020



*) Disajikan kembali | *) Reserved

Rasio Kas 2016-2020 Cash Ratio 2016-2020



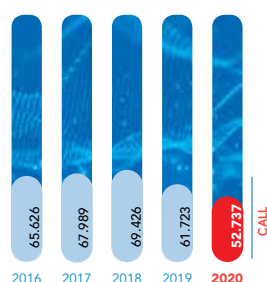
*) Disajikan kembali | *) Reserved

IKHTISAR OPERASI DAN ORGANISASI

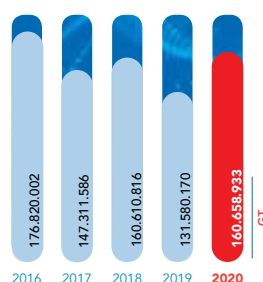
SUMMARY OF OPERATION AND ORGANIZATION

Ikhtisar Operasi Operation Summary	Satuan Unit	2020	2019	2018	2017	2016	YoY 2019-2020 (%)	CAGR 2016-2020 (%)
Kunjungan Kapal Ship Calls	Call	52.737	61.723	69.426	67.989	65.626	-14,56%	-5,32%
	GT	160.658.933	131.580.170	160.610.816	147.311.586	176.820.002	22,10%	-2,37%
Bongkar Muat Barang Goods Loading/Unloading	Ton	32.591.292	44.022.113	42.777.373	49.890.399	54.832.851	-25,97%	-12,20%
Bongkar Muat Petikemas Container Loading/Unloading	Box	1.162.781	1.084.180	1.057.610	949.176	952.059	7,25%	5,13%
	Teus	1.417.979	1.332.974	1.293.094	1.146.944	1.151.942	6,38%	5,33%
Arus Penumpang Passenger Flow	Orang People	2.487.151	5.480.147	5.316.860	5.022.971	5.440.151	-54,62%	-17,77%

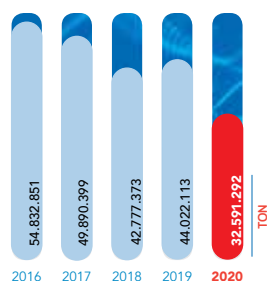
Kunjungan Kapal 2016-2020
Total Equities 2016-2020



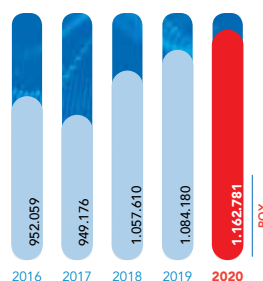
Kunjungan Kapal 2016-2020
Ship Call 2016-2020



Bongkar Muat Barang 2016-2020
Goods Loading/Unloading 2016-2020

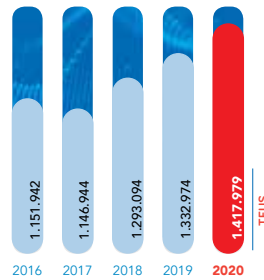


Bongkar Muat Petikemas 2016-2020
Container Loading/Unloading 2016-2020

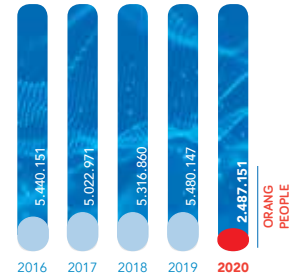




Bongkar Muat Petikemas 2016-2020 Business Profit Margin 2016-2020



Arus Penumpang 2016-2020 (ORANG) Passenger Flow 2016-2020 (PEOPLE)



Ikhtisar Organisasi Organization Summary	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Karyawan (orang)* Total Employees (people)*	1.341	1.376	1.401	1.428	1.134
Kecelakaan Kerja (kejadian) Working Accident (events)	0	0	0	0	0
Jumlah Mitra Binaan dari Program Kemitraan (mitra)** Total Number of Development Partners in Partnership Program (partners)**	244	226	275	393	262
Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Rp-juta)** Funds Distribution for Partnership and Environmental Assistance Program (Rp-million)**	22.654.670.623	32.597.217.782	30.266.221.012	37.773.713.749	24.428.935.610
Penilaian Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Evaluation	95,63	94,42	94,60	94,30	94,23
Penilaian Kontrak Manajemen Contract Management Evaluation	98,7	91,01	101,60	101,15	100,77
Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Financial Health Level	74,90	84,00	95,00	95,00	92,77

*) Jumlah karyawan

**) Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

***) Penilaian penerapan GCG menggunakan metode berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

*****) Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

*) Total Employees

**) The Partnership and Environmental Assistance Program was carried out in accordance with SOE Minister Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 for Second Amendment on SOE Minister Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership and Environmental Assistance Program of the State Owned Enterprises

***) GCG Implementation Evaluation was done using method based on Copy Of Ministry of SOE Secretary's Decision No. SK-16/S.MBU/2012 of 6 June 2012 on Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation on the good implementation of Good Corporate Governance in SOE

*****) Company's Financial Health Level assessment was based on Minister of State Owned Enterprises Decision No. KEP-100/MBU/2002 on State Owned Enterprise Health Level.

IKHTISAR SAHAM

SUMMARY OF SHARES

JUMLAH SAHAM

Jumlah saham Perusahaan sebanyak 1.700.000 lembar saham, dengan kepemilikan 100% atau seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan tidak menerbitkan sahamnya untuk dimiliki oleh publik maupun oleh manajemen atau karyawan.

INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI

Di sepanjang tahun 2019 dan 2020, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

DIVIDEN SAHAM

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 2020, pemegang saham memutuskan tentang penggunaan laba bersih konsolidasian yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp359.511.714.451, sebagai berikut:

- Sebesar 16,25% dari laba bersih atau sebesar Rp60.050.953.594 ditetapkan sebagai dividen.
- Sebesar 83,75% dari Laba bersih atau sebesar Rp309.460.760.856 ditetapkan sebagai cadangan.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2019, pemegang saham memutuskan tentang penggunaan laba bersih Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Dividen sebesar 35% atau Rp319.135.000.000.
- Cadangan sebesar 65% atau Rp592.679.406.602.

Pembagian Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2019 yang dilakukan di tahun 2020, dan Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2018 yang dilakukan di tahun 2019, adalah sebagai berikut:

TOTAL SHARES

The Company has a total of 1,700,000 shares, which are 100% or entirely owned by the Government of the Republic of Indonesia. The Company does not list its shares in any stock exchange, neither does it offer ownership to management or employees.

INFORMATION ON CORPORATE ACT

Throughout 2019 and 2020, the Company did not issue any corporate action such as Stock Split, Reverse Stock, Bonus Stock, or decrease in stock nominal value.

SHARE DIVIDENDS

Based on the Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) for fiscal year 2019 held on July 6th 2020, the shareholders decided to distribute the 2019 fiscal year consolidated net profit of Rp359,511,714,451 to the parent entity owner, as follows:

- 16,25% of net profit or Rp60,050,953,594 was set as dividend.
- 83,75% of net profit or Rp309,460,760,856 was set as reserve.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) for fiscal year 2018 held on April 29th 2019, the shareholders decided to allocate the company net profit as follows:

- 35% Dividend or Rp319,135,000,000.
- 65% Reserve or Rp592,679,406,602.

Distribution of Share Dividends for business result for 2019 fiscal year which was done in 2020, and Share Dividends for business results fiscal year 2018 which was done in 2019 were as follows:



Dividen Saham Share Dividends	2020 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2019) 2020 (for 2019 Fiscal Year Dividend)	2019 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2018) 2019 (for 2018 Fiscal Year Dividend)	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp-juta) Current Year Profits Attributable to Subsidiary Owners (Rp-million)	285.263	911.814	-68,71%
Jumlah Dividen yang Dibagikan (Rp-juta) Total Distributed Dividends (Rp-million)	60.051	319.315	-81,19%
Dividen Kas per Saham*) (Rp) Cash Dividend per Share*) (Rp)	35.324	187.832	-81,19%
Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Distribution Ratio (%)	21,05%	35,02%	-38,89%
Tanggal Pengumuman Date of Announcement	6 Juli 2020 July 6 th , 2020	29 April 2019 April 29 th , 2019	
Tanggal Pembayaran Date of Payment	3 Agustus 2020 August 3 rd , 2020	28 Mei 2019 May 28 th , 2019	

*) Dividen Kas per Saham dihitung dengan membagi Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dengan jumlah saham Perseroan.

*) Cash dividends per share are calculated dividing the Current Year Profits Attributable to Parent Entity Owners by the Company's total shares.

IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI

SUMMARY OF BOND, SUKUK OR CONVERTIBLE BOND



PENERBITAN OBLIGASI PIGN

Perusahaan menerbitkan surat utang obligasi sejak tahun 2016 dalam rangka memperkuat struktur pendanaan jangka panjang.

PIGN BOND ISSUANCE

The Company issued bonds since 2016 in order to strengthen long term funding structure.

OBLIGASI YANG MASIH BEREDAR DI TAHUN 2019-2020

BOND IN CIRCULATION 2019-2020

Nama Obligasi Bond Name	Nilai Obligasi (Rp-juta) Bond Value (Rp-millions)	Tanggal Penerbitan Date of Issuance	Tenor (Tahun) Tenure (Year)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%) Annual Interest Rate (%)	Peringkat Rank	Status Pembayaran Payment Status	Bursa Efek Stock Exchange
Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara Bond 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara								
Seri B B Series	500.000	21 Juni 2016 June 21, 2016	5	21 Juni 2021 June 21, 2021	9,00	AA	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid Off	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
Seri C C Series	400.000	21 Juni 2016 June 21, 2016	7	21 Juni 2023 June 21, 2023	9,25	AA	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid Off	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
Seri D D Series	50.000	21 Juni 2016 June 21, 2016	10	21 Juni 2026 June 21, 2026	9,50	AA	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid Off	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
950.000								

Di samping itu, di tahun 2019 Perusahaan melakukan pelunasan Obligasi dengan keterangan sebagai berikut:

Aside from that, in 2019, the Company paid Bond with information as follows:

OBLIGASI YANG TELAH DILUNASI DI TAHUN 2019-2020

PAID BOND 2019-2020

Nama Obligasi Bond Name	Nilai Obligasi (Rp-juta) Bond Value (Rp-millions)	Tanggal Penerbitan Date of Issuance	Tenor (Tahun) Tenure (Year)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%) Annual Interest Rate (%)	Status Pembayaran Payment Status	Bursa Efek Stock Exchange
Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara - Seri A Bond 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara - Series A	50.000	21 Juni 2016 June 21, 2016	3	21 Juni 2019 June 21, 2019	8,25	Lunas Paid	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange



INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION ON OTHER SOURCES OF FUNDING

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak memiliki sumber pendanaan lainnya selain melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai penyertaan modal Perusahaan, termasuk Tambahan Modal Disetor lainnya sebagai ekuitas yang berasal dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS), yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I tanggal 22 Februari 2019; melalui penerbitan obligasi seperti yang telah disampaikan di atas; serta fasilitas pinjaman perbankan. Perusahaan tidak menerbitkan pendanaan alternatif seperti Surat Utang Jangka Menengah atau *Medium Term Notes* maupun instrumen keuangan pendanaan lainnya.

As of the end of 2020, the Company had no other sources of funding aside from State Equity Participation (PMN), including Additional Paid-in Capital as equity, which came from Undefined Status Government Assistance, based on Indonesian Government Regulation No. 10 of 2019 on Additional Capital Shares Ownership by Republic of Indonesia in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) of February 22nd 2019 through abovementioned bond issuance; as well as bank loans. The Company did not issue any alternative funding such as Medium Term Notes or other financial instruments.

KILAS PERISTIWA 2020

2020 IN EVENTS



4 JANUARI 2020

JANUARY 4, 2020

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kunjungi TPK Belawan Fase 2

Minister of Transportation Budi Karya Sumadi visited TPK Belawan Phase 2



6 FEBRUARI 2020

FEBRUARY 6, 2020

Rapat Dinas Pengamanan Target RKAP 2021
Business Meeting on Securing the Company Budget Plan Target 2021



18 FEBRUARI 2020

FEBRUARY 18, 2020

Pelindo 1 Bergabung dengan Kamar Dagang & Industri Indonesia
Pelindo 1 joined Indonesian Chamber of Commerce & Industry



20 APRIL 2020

APRIL 20, 2020

Pergantian Jajaran Dewan Komisaris
New Board of Commissioner appointment



29 MARET 2020

MARCH 29, 2020

Pelayaran Petikemas Internasional Perdana Pelabuhan Kuala Tanjung
First International Container Service Kuala Tanjung



27 FEBRUARI 2020

FEBRUARY 27, 2020

Penandatanganan Sponsorship dengan PSMS Medan
Sponsorship signature with PSMS Medan



10 JUNI 2020

JUNE 10, 2020

Penyerahan Penlok Kuala Tanjung dengan Pemkab Batubara
Kuala Tanjung Location Designation with Batubara Regency Rep



15 JUNI 2020

JUNE 15, 2020

Penandatanganan MoU Kerja sama dengan PT FKS
MoU Cooperation signature with PT FKS



22 JUNI 2020

JUNE 22, 2020

Pergantian Jajaran Dewan Direksi
New Board of Directors appointment



7 JULI 2020
JULY 7, 2020
Rangkaian Audiensi Jajaran
Direksi Pelindo 1
Pelindo 1 Board of Directors audiences



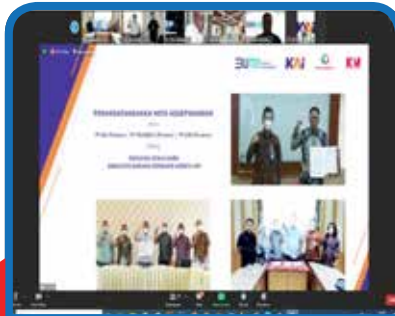
24 JULI 2020
JULY 24, 2020
Bedah Buku BUMN Ber-Akhlak bersama
Kementerian BUMN
Book Discussion "BUMN Ber-Akhlak" With
the Ministry of SOE



30 AGUSTUS 2020
AUGUST 30, 2020
Direktur Keuangan
Henri Panggabean Tutup Usia
Director of Finance
Henri Panggabean passed away



1 DESEMBER 2020
DECEMBER 1, 2020
Pelindo 1 Rayakan HUT ke-28 Tahun
Pelindo 1 celebrated 28th birthday



20 NOVEMBER 2020
NOVEMBER 20, 2020
Sinergi BUMN antara Pelindo 1,
KAI, dan KIM
SOE Synergy between Pelindo 1,
KAI, and KIM



9 OKTOBER 2020
OCTOBER 9, 2020
Deputi Kementerian Koordinator
Kemaritiman & Investasi Kunjungi KTMT
Vice Minister of Maritime Coordination &
Investment visited KTMT



4 DESEMBER 2020
DECEMBER 4, 2020
Sinergi dengan Pertamina bangun TBBM
Kuala Tanjung
Synergy with Pertamina build TBBM Kuala
Tanjung





02

Laporan Manajemen Management Reports

Inovasi dan pergerakan yang lincah menjadi kunci untuk dapat mengarungi tantangan yang terjadi di sepanjang tahun 2020.

Innovation and agility are the keys to sail through the challenges occurring throughout 2020.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT



Dewan Komisaris memandang bahwa Dewan Direksi telah merumuskan kebijakan strategis dan melakukan berbagai upaya sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Komisaris yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja perusahaan

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has formulated strategic policies and made various efforts as a follow-up to the recommendations of the Board of Commissioners which ultimately have a positive impact on the company's performance

ACHMAD DJAMALUDIN

Komisaris Utama

President Commissioner



Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyebar di seluruh dunia berdampak terhadap kondisi perekonomian secara global. Berdasarkan laporan OECD *Economic Outlook* edisi Juni 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 berkontraksi menjadi defisit 6% hingga 7,6%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi Bank Dunia sebesar defisit 5,2%. Tak hanya itu, ekonomi global yang terpuak menyebabkan tingkat pengangguran global meningkat menjadi 10% dan perdagangan global berkontraksi 11,4%.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia tak terhindari dari perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tekanan pada perekonomian sepanjang semester I tahun 2020 terutama disebabkan adanya pembatasan sosial di tingkat daerah secara masif untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19, yang kemudian terlihat pada menurunnya konsumsi masyarakat di sektor transportasi, restoran dan hotel, juga rendahnya realisasi investasi. Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kuartal III tahun 2020 menunjukkan tren membaik dibanding triwulan II 2020, di mana pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2020 tercatat sebesar 2,97% jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yang biasanya dicapai Indonesia di kisaran 5%. Angka ini berada di bawah asumsi RKAP 2020 yang sebesar 5,30%. Untuk laju inflasi Semester I tahun 2020 rata-rata sebesar 2,55% atau masih lebih rendah dibandingkan asumsi RKAP 2020 sebesar 3,10%, sedangkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS semester I 2020 ditutup pada level Rp14.307,- per USD yang berarti melemah dan berada di bawah asumsi RKAP 2020 yang ditetapkan sebesar Rp14.400,- per USD.

Tren negatif perekonomian global dan nasional tentunya berdampak terhadap perdagangan dunia. Hal ini berimbas langsung pada sektor industri pelabuhan. Mengutip data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sektor lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi yang cukup dalam di sepanjang tahun 2020, dari 7,55% pada kuartal IV-2019, menjadi 1,30% pada kuartal I-2020, kembali terkoreksi cukup dalam hingga defisit 30,80% pada kuartal II-2020, mengalami perbaikan pada kuartal III-2020 menjadi defisit 16,71%, kemudian menjadi defisit 13,42% pada kuartal IV-2020.

Di luar angka-angka statistik di atas, atas nama seluruh insan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), disebut juga "Perseroan" atau "Pelindo 1", Dewan Komisaris menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi luar biasa yang tak pernah terjadi sebelumnya. Laporan Tahunan tahun buku 2020 ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja Perseroan di sepanjang tahun 2020, khususnya dalam menghadapi situasi yang kurang menggembirakan dan penuh keprihatinan.

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

The 2019 *Corona Virus Disease* (COVID-19) pandemic ravaging the whole world has impacted the global economy. According to the June 2020 edition of the OECD *Economic Outlook* report, the global economic growth in 2020 was projected to contract by 6% to 7.6%. The projected economic growth is far lower than the 5.2% projected by the World's Bank. Additionally, the impaired global economy also saw global unemployment rate rise to 10% and global trade contract by 11.4%.

As a developing nation, Indonesia couldn't avoid the impact of global economic slowdown. Pressure to the economy in semester I of 2020 was mainly due to the social distancing measures taken in regional level to contain the spread of the COVID-19 pandemic, which in turn cause the public consumption in the transportation, restaurant and hotel sectors to decrease. The Ministry of Finance forecast that the economic growth in Quarter III of 2020 would show improvement compared to Quarter II of 2020, whereas the economic growth during Semester I of 2020 was recorded at 2.97%, far lower than the usual 5% achieved in previous years. This was far below the 5.30% growth targeted in 2020 Work Plan and Budget. The average inflation rate in Semester I of 2020 was 2.55%, lower than the assumed 3.10% in 2020 Work Plan and Budget, while the exchange rate of Rupiah against US Dollar in Semester I of 2020 was closed at Rp14,307,- for USD 1, meaning that it was weakened to a rate below the assumed exchange rate of Rp14,400,- per USD in 2020 Work Plan and Budget.

The negative trend in global and national economy certainly affects the world's trade. This brings a direct impact on the port industry. According to the data released by Statistics Indonesia (BPS), the Transport and Storage business sectors contracted considerably throughout 2020, from 7.55% in Quarter IV of 2019 to 1.30% in Quarter I of 2020, experienced a significant correction to a deficit of 30.80% in Quarter II of 2020, improved to a deficit of 16.71% in Quarter III of 2020, and finally to a deficit of 13.42% in Quarter IV of 2020.

Outside of the statistics above, on behalf of everyone within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), also referred to as "Company" or "Pelindo 1", the Board of Commissioners would like to express their sympathy concerning this unprecedented force majeure event. This 2020 Annual Report is hoped to give a comprehensive picture on the Company's performance throughout 2020, especially with regard to this unpleasant and unwelcome situation.

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS, HUBUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI, DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS ATAS INISIATIF STRATEGIS DIREKSI

Peran dan fungsi pengawasan merupakan tugas yang diemban oleh Dewan Komisaris, khususnya dalam memberikan pandangan yang sejalan dengan aspirasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dibangun melalui kesamaan pandangan untuk mencapai visi Perseroan.

Peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Gabungan secara berkala setiap bulan. Dalam fungsi pengawasan, Dewan Komisaris bertugas untuk memberikan persetujuan atas hal-hal yang dimintakan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Kelola Perseroan. Dewan Komisaris juga menyampaikan laporan secara tertulis tentang usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), laporan pengawasan menyeluruh atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi, mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi, serta pemantauan dan saran atas penerapan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Rapat Gabungan menjadi forum strategis bagi Dewan Komisaris untuk mendapatkan informasi komprehensif tentang kemajuan Perseroan. Di sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris menggelar 16 kali Rapat Gabungan dengan Direksi. Rapat ini membahas beberapa hal strategis, di mana Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh melalui rapat tersebut. Di samping itu, Dewan Komisaris juga melaksanakan 14 kali rapat internal dalam rangka membahas berbagai perkembangan Perseroan, baik dari sisi eksternal maupun internal.

Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris merupakan bagian dari amanat pemegang saham yang telah diputuskan melalui mekanisme RUPS. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Dewan Komisaris menjadi representasi atas kepentingan pemegang saham untuk mengawasi pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Kompetensi anggota Dewan Komisaris memungkinkan untuk memberikan masukan kepada Direksi terkait arah dan strategi pengurusan Perseroan; tentunya dengan batas-batas hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi.

THE SUPERVISORY FUNCTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, WORKING RELATIONSHIP WITH THE BOARD OF DIRECTORS, AND BOARD OF COMMISSIONERS' RECOMMENDATIONS ON THE BOARD OF DIRECTORS' STRATEGIC INITIATIVES

The supervisory role and function fall under the responsibility of the Board of Commissioners, especially with regard to recommendations concerning the aspirations of the shareholders and the stakeholders. In performing its supervisory function, a good working relationship between the Boards of Commissioners and Directors is built upon a shared belief to achieve the Company's vision.

The supervisory role and function of the Board of Commissioners are carried out through monthly Joint Meetings. In its supervisory function, the Board of Commissioners has the power to approve the requests of the Board of Directors in accordance with the stipulations of the Articles of Association and Code of Corporate Governance. The Board of Commissioners writes a report on the recommended Work Plan and Budget (RKAP), comprehensive supervisory report on Company management carried out by the Board of Directors, gives recommendations concerning the Board of Directors' remuneration according to the prevailing laws and regulations and the Board of Directors' performance, and performs monitoring and provides recommendations on the implementation of the prevailing laws and regulations.

The Joint Meetings are a strategic forum for the Board of Commissioners to get comprehensive information concerning the Company's progress. Throughout 2020, the Board of Commissioners held 16 Joint Meetings with the Board of Directors. The meetings discussed several strategic matters, in which the Commissioners performs its comprehensive supervisory function. Additionally, the Board of Commissioners held 14 internal meetings to discuss external and internal developments concerning the Company.

The supervisory function performed by the Board of Commissioners is part of the mandate by shareholders decided by the General Meetings of Shareholders. The Board of Commissioners directly and indirectly represents the interests of the shareholders to monitor the Company's management by the Directors. The competency of the Board of Commissioners allows for suggestions to the Board of Directors concerning the Company's direction and strategy; without prejudice to the rights, authority and obligations of the Boards of Commissioners and Directors.





Melalui mekanisme rapat serta surat-menyurat dengan Direksi, Dewan Komisaris memberikan berbagai saran, masukan, dan rekomendasi sekaligus sebagai bagian dari tanggapan atas kinerja Perseroan di sepanjang tahun 2020. Beberapa tanggapan dan rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi adalah:

- Tanggapan dan rekomendasi atas usulan Perubahan Struktur Organisasi Cabang, di mana pada prinsipnya Dewan Komisaris menyetujui atas rencana untuk melakukan penyatuan kembali Belawan International Container (BICT) dan Terminal Petikemas Domestik Belawan (TPKDB) menjadi sebuah unit baru yaitu Terminal Petikemas Belawan;
- Persetujuan untuk penerbitan *Domestic Bond* pada tahun 2020;
- Persetujuan pengangkatan Sekretaris Perusahaan;
- Tanggapan atas revisi rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I;
- Tanggapan dan rekomendasi atas usulan re-organisasi Unit Galangan Kapal (UGK);
- Tanggapan dan rekomendasi atas usulan penghapusbukuan piutang usaha;
- Tanggapan dan rekomendasi atas usulan penghapusbukuan Aset Tetap Perseroan, baik di tingkat pusat maupun cabang;
- Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit independen tahun 2020;
- Rekomendasi atas usulan Calon Dewan Komisaris dan Direksi entitas anak;
- Tanggapan dan rekomendasi atas pemberian pinjaman pemegang saham kepada entitas anak;
- Tanggapan dan rekomendasi atas usulan/permohonan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN);
- Tanggapan atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021;
- Tanggapan atas aksi korporasi berupa akuisisi saham mitra di entitas anak;
- Tanggapan atas pelaksanaan *Right Issue* PT Prima Pengembangan Kawasan (PT PPK).

Dari berbagai masukan tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah merumuskan kebijakan strategis serta melakukan berbagai upaya untuk dapat berfokus pada hal-hal yang terkait dengan rekomendasi Dewan Komisaris, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja Perseroan.

Through meetings and correspondence with the Board of Directors, the Board of Commissioners provides a number of suggestions, ideas, and recommendations which also served as feedback to the Company's performance throughout 2020. Below are the feedbacks and recommendations given by the Board of Commissioners to the Board of Directors:

- Feedback and recommendation on suggested Change to Branch Organizational Structure, in which the Board of Commissioners agreed in principle with the plan to reintegrate Belawan International Container Terminal (BICT) and Belawan Domestic Container Terminal (TPKDB) into a new unit, namely Belawan Container Terminal;
- Approval for the issuance of Domestic Bond in 2020;
- Approval for Company Secretary appointment;
- Feedback on revision to the issuance of Sustainable Bond I;
- Feedback and recommendation on Shipyard Unit (UGK);
- Feedback and recommendation on proposed account receivable write-off;
- Feedback and recommendation on proposed Company Fixed Asset write-off at Head Office and branch levels;
- Selection of Public Accounting Firm (KAP) for 2020 independent audit;
- Recommendations on suggested Commissioner and Director Candidates of subsidiary entities;
- Feedback and recommendation on shareholders' loan to subsidiary entities;
- Feedback and recommendation on proposal/request to utilize State-Owned Assets (BMN);
- Feedback on the proposed 2021 Company Work Budget and Plan (RKAP);
- Feedback on corporate action of acquisition of partner's shares in subsidiary entities;
- Feedback on implementation of Right Issue of PT Prima Pengembangan Kawasan (PT PPK).

As reflected by these recommendations, the Board of Commissioners is of the opinion that the Board of Directors has formulated strategic policies and made efforts to focus on matters related to the Board of Commissioners' recommendations, which eventually impacted the Company's performance in positive terms.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DASAR PENILAIAN SERTA APRESIASI OLEH DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Direksi melekat pada *Key Performance Indicator* (KPI) korporasi yang telah disusun di awal tahun dan disepakati dengan pemegang saham sebagai kontrak manajemen. KPI bertujuan sebagai panduan bagi Direksi untuk dapat mengarahkan dan mengelola seluruh sumber daya Perseroan secara sistematis. Bagi Dewan Komisaris, KPI berguna sebagai panduan pemantauan dalam melakukan tugas pengawasan.

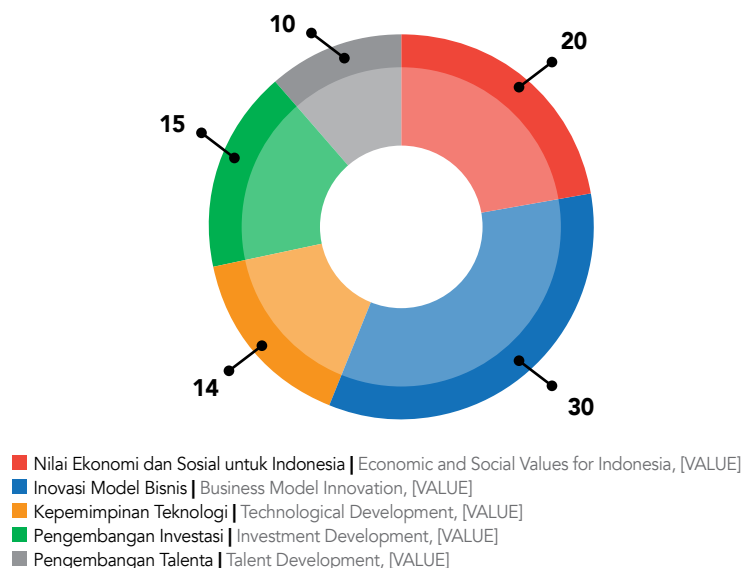
Sebagai BUMN, penilaian KPI Direksi yang melekat pada KPI korporat dengan aspek-aspek yang telah diatur oleh Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham pengendali, yang terdiri dari 5 (lima) perspektif, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Talenta. Melalui KPI inilah Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan, termasuk pencapaian KPI sebagai alat *monitoring* pencapaian kinerja Perseroan. Bagan di bawah ini memberikan informasi tentang komposisi KPI berdasarkan 5 (lima) perspektif.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE AND BASIS OF EVALUATION AND APPRECIATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The assessment on Board of Directors' performance is based on the Corporate Key Performance Indicators (KPI) as decided at the beginning of the year and agreed upon with the shareholders as part of management contract. The KPIs are intended as guidance for the Board of Directors to guide and manage the resources at the Company's disposals systemically. For the Board of Commissioners, the KPIs are useful as a monitoring tool in performing its supervisory task.

As an SOE, the KPI assessment on the Board of Directors based on corporate KPIs with aspects as stipulated by the Ministry of SOE as the controlling shareholders consisting of 5 (five) perspectives, namely Economic and Social Values for Indonesia, Business Model Innovation, Technological Leadership, Investment Development and Talent Development. With these KPIs, the Board of Commissioners is able to perform its supervisory task, including KPI achievement as monitoring tool for Company's performance. Below is the illustration of KPI composition based on 5 (five) perspectives.

ASPEK KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) KORPORASI
CORPORATE KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) ASPECTS



KPI Korporat Pelindo 1 tahun 2020 merupakan Revisi RKAP yang telah memperhitungkan dampak pandemi COVID-19 terhadap risiko bisnis dan keuangan Perseroan. Revisi ini sesuai dengan Surat Kementerian BUMN No. S-46/Wk2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Perubahan RKAP 2020 BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN II, dan Surat Asisten Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN No. S-8/Wk2.MBU.F/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Revisi

2020 Pelindo 1 Corporate KPIs was a Revision to Work Plan and Budget which has taken into account the COVID-19 pandemic effects towards the business and financial risks faced by the Company. This revision was made in accordance with Ministry of SOE Decision Letter No. S-46/Wk2.MBU/06/2020 of 4 June 2020 concerning Change to 2020 RKAP of SOE under Vice Minister of SOE II, and Letter of Assistant Deputy for Transport Facilities and Infrastructures of Ministry of SOE



RKAP Tahun 2020. Revisi RKAP ini kemudian tertuang sebagai kontrak manajemen antara Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris, dimana di dalam RKAP tersebut juga tercantum Rencana Investasi, Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) tahun 2020, serta penetapan indikator Aspek Operasional untuk perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2020.

Berikut disampaikan capaian KPI Korporat di akhir tahun 2020 yang melekat sebagai penilaian Direksi.

No. S-8/Wk2.MBU.F/07/2020 of 22 July 2020 on Revision to 2020 RKAP. This RKAP revision is expressed as a management contract between the Shareholders and the Boards of Directors and Commissioners containing Investment Plan, Partnership and Environmental Assistance Program Work Plan and Budget (RKA-PKBL) for 2020, and establishment of Operational Aspect indicators for the calculation of 2020 Company's Financial Health Level.

Below are 2020 Corporate Key Performance Indicator achievements which constituted a part of Board of Directors' Assessment.

CAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR TAHUN 2020 2020 KEY PERFORMANCE INDICATOR RESULTS

No.	Perspektif Perspective	Jumlah Indikator Number of Indicators	Bobot Weight (%)	Capaian KPI KPI Results (%)
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Values for Indonesia	7	42,00	40,48
2	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	3	22,00	22,12
3	Kepemimpinan Teknologi Technological Leadership	4	6,00	6,00
4	Pengembangan Investasi Investment Development	3	10,00	10,56
5	Pengembangan Talenta Talent Development	3	20,00	19,54
Jumlah Total			100,00	98,70
Kriteria Criteria			"Baik" "Good"	

Dari tabel KPI di atas, dapat dilihat bahwa KPI Korporat tercatat mencapai 98,70, sedikit di bawah bobot target sebesar 100. Terdapat 3 (tiga) perspektif yang menyamai dan/atau melampaui target bobot, yaitu perspektif Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, dan Pengembangan Investasi. Sedangkan perspektif Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia serta Pengembangan Talenta masih sedikit di bawah target, yang akan menjadi evaluasi bagi perbaikan ke depan. Atas pencapaian kinerja tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas upaya, langkah perbaikan dan kerja keras yang telah dilakukan oleh Direksi dalam rangka memenuhi target-target yang telah ditetapkan pada tahun 2020.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA TAHUN 2021

Optimisme sektor kepelabuhanan dan maritim tahun 2021 harus disambut dengan proyeksi kinerja positif dari Perseroan. Hadirnya vaksin COVID-19 di tahun 2021 akan mendorong tumbuhnya optimisme tersebut, terutama dengan keinginan kuat Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui proyeksi pertumbuhan berbagai sektor ekonomi.

Dewan Komisaris memandang proyeksi rencana kerja serta kinerja bisnis dan keuangan Perseroan tahun 2021 akan dapat tercapai dengan baik. Rencana-rencana strategis yang telah disusun dan dituangkan dalam RKAP tahun 2021 yang telah disahkan bersama-sama dengan pemegang saham melalui forum RUPS

As can be seen in the KPI table above, the Corporate KPI result was 98.70, a little below the targeted weight of 100. There were 3 (three) perspectives in which the results equaled and/or exceeded the targeted weight, namely the perspective of Business Model Innovation, Technological Leadership, and Investment Development. Whereas the perspectives of Economic and Social Values for Indonesia as well as Talent Development were still a bit below the target, which should provide opportunities for improvement in the future. For this performance achievement, the Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' efforts, improvement measures and hard work in achieving the targets set for 2020.

PERSPECTIVE ON 2021 BUSINESS PROSPECT

The optimism in the ports and maritime industry in 2021 shall be welcomed by the Company with positive performance projection. The delivery of COVID-19 vaccine in 2021 is the catalyst for such optimism, especially with the Government of Indonesia's strong wish to accelerate national economic recovery through growth projections in various economic sectors.

The Board of Commissioners views that the 2021 projection of work plan as well as business and financial performance of the Company is achievable. The strategic plans prepared and contained in the 2021 RKAP, which had been ratified by the shareholders during the General Meeting of Shareholders on

tanggal 29 Januari 2021 menjadi kerangka bagi Direksi bersama-sama Dewan Komisaris untuk membawa Perseroan mencapai aspirasi pemegang saham. Agenda merger atau integrasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam sebuah skema *holding* Pelindo juga akan memberikan dampak besar bagi Perseroan, khususnya dalam memperkuat agenda Integrasi Bisnis Kepelabuhanan baik dalam lingkup *core business* maupun *non-core business* Pelindo.

Proyeksi peningkatan volume kunjungan kapal dan arus penumpang tak lepas dari optimisme Perseroan untuk melihat proses *recovery* perekonomian di tahun 2021. Dengan optimisme tersebut, pendapatan usaha Perseroan diproyeksikan mampu tumbuh 7,05% sedangkan laba usaha dapat tumbuh hingga 64,06% sejalan dengan pola efisiensi biaya yang telah dijalankan Direksi di tahun 2020. Pada posisi keuangan, nilai Aset diharapkan mampu meningkat 24,17% sesuai dengan proyeksi investasi yang telah diperhitungkan. Dewan Komisaris memandang, proyeksi ini cukup realistis dan berkeyakinan akan dapat dicapai di akhir tahun 2021.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dorongan *regulator* kepada seluruh pelaku usaha untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) patut diapresiasi. Dewan Komisaris patut berbangga, bahwa seluruh elemen Perseroan berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik GCG dengan harapan Perseroan memiliki fondasi organisasi yang kokoh, transparan dan akuntabel. Sebagai salah satu organ utama, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengambil peran dalam penerapan GCG di lingkup Perseroan. Fungsi pengawasan yang berjalan beriringan dengan fungsi pengelolaan oleh Direksi menjadi catatan penting agar konsep keseimbangan 2 (dua) badan dalam entitas Perseroan Terbatas dapat terwujud.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko, serta Sekretaris Dewan Komisaris. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Perseroan. Komite Audit juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas jalannya manajemen Perseroan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dijiwai oleh nilai-nilai dan etika Perusahaan yang baik, sekaligus untuk meminimalisir risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

29 January 2021, are meant to be a framework for the Board of Directors and the Board of Commissioners to drive the Company to achieve the shareholders' aspirations. The agenda of merger or integration between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into a single Pelindo holding scheme will also significantly impact the Company, especially in strengthening the agenda of Ports Businesses Integration in the scope of both Pelindo's core businesses and non-core businesses.

The projection of increase in the volume of ship calls and passenger traffic stems from the Company's optimism to see the economy recovers in 2021. With such optimism, the Company's operating revenues are projected to grow by 7.05%, while the operating profits are projected to grow by up to 64.06% in line with the pattern of cost efficiency enforced by the Board of Directors in 2020. As regards financial position, the Asset value are expected to increase up to 24.17% in line with the calculated investment projection. The Board of Commissioners is of the opinion that these projections are quite realistic and in a good faith that they will have been achieved by the end of 2021.

PERSPECTIVE ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The regulator's push for the business actors to implement Good Corporate Governance (GCG) principles is well appreciated. The Board of Commissioners is proud that all elements within the Company are committed to implement GCG best practices for the purpose of providing the Company with strong, transparent and accountable foundation. As one of the main corporate organs, the Board of Commissioners is held responsible to take part in GCG implementation within the Company. The supervisory function performed in line with the management function of the Board of Directors is paramount for the balance of the 2 (two) bodies within a Limited Company entity.

In performing its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee and the Secretary to the Board of Commissioners. The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in supervising the financial management of the Company. The Audit Committee also provides recommendations to the Board of Commissioners in the process of appointing a Public Accounting Firm (KAP). Whereas, the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in supervising the management of the Company so that it runs in accordance with GCG principles inspired by good corporate values and ethics, as well to minimize the Company risk.





Dewan Komisaris memandang, penerapan GCG di lingkup Perseroan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta aspirasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal, hingga audit internal, telah dijalankan dengan tujuan menciptakan proses bisnis yang akuntabel. Perseroan juga menerapkan proses audit independen oleh akuntan publik atas laporan keuangan Perseroan. Agar independensi akuntan publik terjaga, mekanisme penunjukan akuntan publik dilakukan hingga level persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Mekanisme ini diharapkan dapat menciptakan proses audit yang lepas dari benturan kepentingan. Laporan keuangan teraudit yang telah disertai opini dari akuntan publik akan menjadi laporan dasar yang dapat mencerminkan kinerja Perseroan yang telah disesuaikan dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas evaluasi dan pemantauan penerapan GCG yang dilakukan secara periodik tahunan. Dengan memanfaatkan metode pengukuran penerapan GCG yang mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN, Perseroan memiliki potensi yang besar untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan serta peningkatan penerapan GCG di setiap tahunnya. Adanya peningkatan dari skor penilaian tahun 2019 sebesar 94,42 menjadi skor 95,63 di tahun 2020 menunjukkan perbaikan yang terus dilakukan oleh seluruh organ dan perangkat GCG di lingkup Perseroan.

Dewan Komisaris sungguh berharap agar tata kelola organisasi Perseroan yang kuat dapat memberikan wadah bagi perkembangan Perseroan hingga masa-masa yang akan datang.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko, serta Sekretaris Dewan Komisaris.

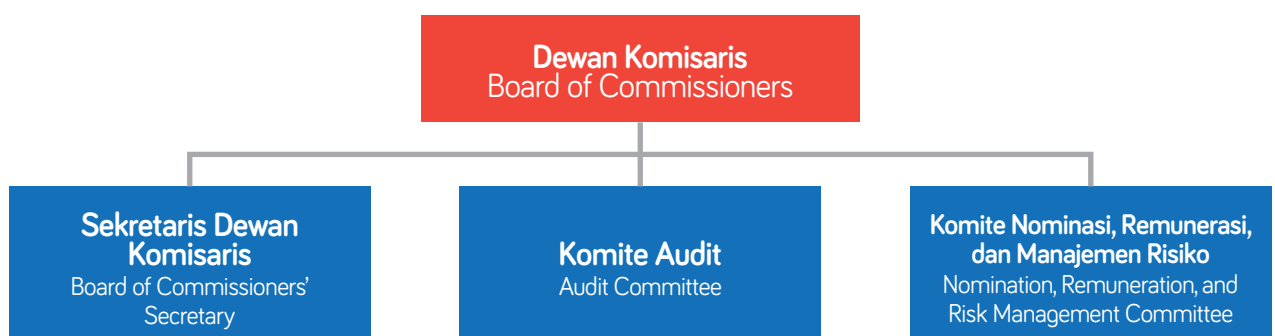
The Board of Commissioners views that the GCG implementation within the Company conforms to the prevailing stipulations as well as the aspirations of the shareholders and stakeholders. The risk management, internal control system, and internal audit have been performed in line with the goal of creating accountable business practices. The Company also had independent audit performed on the Company's financial statement. In order to ensure the independence of the public accountant, the mechanism for appointment of public accountant requires approval of the shareholders in the General Meeting of Shareholders. Such mechanism is expected to ensure that the audit process is free of conflict of interest. The audited financial statement with the opinion of the public accountant is to reflect the Company's performance adapted to the financial reporting standards valid in Indonesia.

The Board of Commissioners appreciates the annual GCG implementation evaluation and monitoring. Using the GCG implementation measuring method in accordance with Copy of Decision of Ministry of SOE Secretary No. SK-16/S.MBU/2012 of 6 June 2012 on Assessment and Evaluation Indicators/Parameters of GCG Implementation for SOEs, the Company has a significant potential to keep performing self-evaluation and year-to-year improvement of GCG implementation. The increase in assessment score from 94.42 in 2019 to 95.63 in 2020 reflects the improvement achieved by GCG organs and instruments within the Company.

The Board of Commissioners wishes that strong corporate governance within the Company may become the basis for further development in future times.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

As mentioned above, in performing its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee and Board of Commissioners' Secretary.



Sekretaris Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dengan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki tugas untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan Perseroan, termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam Melakukan Pengawasan atas Jalannya Manajemen Perseroan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dijiwai oleh nilai-nilai dan etika Perusahaan yang baik, sekaligus untuk meminimalisir risiko yang dihadapi oleh Perseroan

PANDANGAN ATAS PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) SERTA PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM SISTEM WBS PERUSAHAAN

Perkembangan praktik GCG tak lepas dari kemampuan Perseroan untuk menghadirkan proses dan mekanisme GCG yang dapat mawadahi penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Salah satu proses atau mekanisme GCG yang cukup penting adalah pemberlakuan Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistleblowing System (WBS)*. Sistem ini memungkinkan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan pelapor.

Di lingkup Perseroan, WBS telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. PS.80/2/2/ PI-19. TU tanggal 22 November 2019 tentang Pedoman Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*). Tata cara pengelolaan penanganan pengaduan bagi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak yang berkepentingan dalam hubungan dengan perusahaan, agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiaannya dan kasus yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti. Pedoman pengaduan pelanggaran ini sebagai salah satu bentuk peningkatan perlindungan terhadap para pemangku kepentingan dan perlindungan nama baik Perusahaan.

Dalam pelaksanaan mekanisme WBS, Perseroan membentuk Unit Pengelola Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS) yang dikelola secara mandiri oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.02.03/00/01/2014/082 tanggal 22 Januari 2014.

The Board of Commissioners' Secretary is appointed to help the Board of Commissioners perform its tasks and is held responsible for the administrative and secretarial matters related to the Board of Commissioners' activities. The Audit Committee is tasked to assist the Board of Commissioners in performing monitoring on the Company's management, including giving recommendations to the Board of Commissioners with regard to the appointment of Public Accounting Firm (KAP). On the other hand, the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee is tasked to assist the Board of Commissioners in the Supervision of the Company's Management, with the purpose of ensuring its adherence to GCG principles inspired by good corporate values and ethics and minimizing the potential risks faced by the Company at the same time.

PERSPECTIVE ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES AND WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGEMENT (WBS) AND THE ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN COMPANY'S WHISTLEBLOWING SYSTEM

The development of GCG practices is strongly related to the Company's ability to implement GCG process and mechanism that can accommodate 5 (five) GCG basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Among the most important GCG processes and mechanisms is the implementation of a Whistle Blowing System (WBS). The system allows for a reporting mechanism that ensures the confidentiality of the whistle blower.

Within the Company, WBS was established by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Board of Directors Regulation No. PS.80/2/2/ PI-19. TU of 22 November 2019 on Guidance on Whistleblowing System Implementation. The management of the whistleblowing system for the Board of Commissioners, the Board of Directors, the employees and other parties concerned emphasizes guarantee of confidentiality of the whistleblower and guarantee of follow-up actions of the reports. This whistleblowing system guidance is a form of protection for the stakeholders and the Company's image.

As regards the implementation of WBS mechanism, the Company has established a Whistleblower System Management Unit that is managed independently by the Internal Control Unit in accordance with Board of Directors Decision Letter No. KEP.02.03/00/01/2014/082 of 22 January 2014.





Di sepanjang tahun 2020 Perseroan tidak mendapatkan adanya laporan yang masuk melalui mekanisme WBS yang tersedia.

Throughout 2020 the Company did not receive any incoming reports through the available WBS mechanism.

INFORMASI PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham, Pemerintah Republik Indonesia, No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), pemegang saham melakukan perubahan jumlah dan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Berikut disampaikan kronologi susunan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2020 dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020.

INFORMATION ON CHANGE TO BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION

In accordance with Decision Letter of Minister of SOE in quality of representative of the Shareholder, namely the Government of the Republic of Indonesia, No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020 on the Termination and Appointment of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Board of Commissioners' Members, the shareholder performed change to the composition of the Board of Commissioners. Below is the chronology of changes to the composition of the Board of Commissioners in 2020 and the Board of Commissioners' composition as of 31 December 2020.

KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DI SEPANJANG TAHUN 2020

CHRONOLOGY OF CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS THROUGHOUT 2020

Periode 1 Januari - 20 April 2020 January 1 - April 20, 2020 Period	Periode 20 April - 31 Desember 2020 April 20 - December 31, 2020 Period	Keterangan Remark
Refly Harun (Komisaris Utama) (President Commissioner)		Refly Harun tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 20 April 2020 sesuai dengan keputusan pemegang saham. Refly Harun no longer served as President Commissioner since April 20, 2020 in accordance with the shareholder's decision.
Bambang Setyo Wahyudi (Komisaris) (Commissioner)		Bambang Setyo Wahyudi tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak 20 April 2020 sesuai dengan keputusan pemegang saham. Bambang Setyo Wahyudi no longer served as Commissioner since April 20, 2020 in accordance with the shareholder's decision.
Winata Supriatna (Komisaris) (Commissioner)	Winata Supriatna (Komisaris) (Commissioner)	-
Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris) (Commissioner)		Lukita Dinarsyah Tuwo tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sejak 20 April 2020 sesuai dengan keputusan pemegang saham. Lukita Dinarsyah Tuwo no longer served as Commissioner since April 20, 2020 in accordance with the shareholder's decision.
Heryadi (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)		Heryadi tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 20 April 2020 sesuai dengan keputusan pemegang saham. Heryadi no longer served as Independent Commissioner since April 20, 2020 in accordance with the shareholder's decision.
	Achmad Djamaludin (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Achmad Djamaludin menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 20 April 2020 Achmad Djamaludin was appointed President Commissioner on April 20, 2020.
	Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)	Arman Depari menjabat sebagai Komisaris sejak 20 April 2020 Arman Depari was appointed Commissioner on April 20, 2020.
	Irma Suryani Chaniago (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Irma Suryani Chaniago menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 20 April 2020. Irma Suryani Chaniago was appointed Independent Commissioner on April 20, 2020.

KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DI SEPANJANG TAHUN 2020
CHRONOLOGY OF CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
THROUGHOUT 2020

Periode 1 Januari - 20 April 2020 January 1 - April 20, 2020 Period	Periode 20 April - 31 Desember 2020 April 20 - December 31, 2020 Period	Keterangan Remark
	Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Herbert Timbo Parluhutan Siahaan menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 20 April 2020. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan was appointed Independent Commissioner on April 20, 2020.
	Ahmad Perwira Mulia (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Ahmad Perwira Mulia menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 20 April 2020. Ahmad Perwira Mulia was appointed Independent Commissioner on 20 April 2020.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2020
BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION
AS OF 31 DECEMBER 2020

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Term
Achmad Djamaludin	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 Decision Letter of Minister of SOE in quality of Shareholder's Representative No. SK-123/MBU/04/2020 of April 20, 2020	20 April 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 April 20, 2020 up to General Meeting of Shareholders held in 2025	Ke-1 1 st
Arman Depari	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 Decision Letter of Minister of SOE in quality of Shareholder's Representative No. SK-123/MBU/04/2020 of April 20, 2020	20 April 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 April 20, 2020 up to General Meeting of Shareholders held in 2025	Ke-1 1 st
Winata Supriatna	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-250/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 Decision Letter of Minister of SOE in quality of Shareholder's Representative No. SK-250/MBU/11/2017 of November 21, 2017	21 November 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2022 November 21, 2017 up to General Meeting of Shareholders held in 2022	Ke-1 1 st
Irma Suryani Chaniago	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 Decision Letter of Minister of SOE in quality of Shareholder's Representative No. SK-123/MBU/04/2020 of April 20, 2020	20 April 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 April 20, 2020 up to General Meeting of Shareholders held in 2025	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan) 1 st (previously never served in Company's Board of Commissioners)
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 Decision Letter of Minister of SOE in quality of Shareholder's Representative No. SK-123/MBU/04/2020 of April 20, 2020	20 April 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 April 20, 2020 up to General Meeting of Shareholders held in 2025	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan) 1 st (previously never served in Company's Board of Commissioners)
Ahmad Perwira Mulia Tarigan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 Decision Letter of Minister of SOE in quality of Shareholder's Representative No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020	20 April 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 April 20, 2020 up to General Meeting of Shareholders held in 2025	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan) 1 st (previously never served in Company's Board of Commissioners)



Tidak terdapat pergantian Dewan Komisaris sejak 31 Desember 2020 sampai dengan disahkannya laporan tahunan ini. Pergantian susunan Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi hak dari pemegang saham, Pemerintah Republik Indonesia.

APRESIASI

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Pemerintah Republik Indonesia, seluruh pemangku kepentingan, para investor, pelanggan, dan mitra usaha, atas kerja sama yang telah terjalin. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada Direksi Perseroan dan seluruh jajaran Pelindo 1 atas dedikasi, kerja keras dan loyalitas yang telah ditunjukkan. Semoga Pelindo 1 terus dapat bertumbuh untuk mewujudkan visi dan misinya, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan.

No change occurred to the Board of Commissioners since 31 December 2020 up to the approval of this annual report. The shareholder, The Government of the Republic of Indonesia, reserves the right to change the composition of the Board of Commissioners.

APPRECIATION

The Board of Commissioners would like to express its gratitude towards the Ministry of SOE as representative of the shareholder, the Government of Republic of Indonesia, the stakeholders, the investors, customers, and business partners for the cooperation. The Board of Commissioners would like to express its appreciation towards the Board of Directors and everyone within Pelindo 1 for their dedication hard work and loyalty. May Pelindo 1 keep growing to achieve its vision and mission, which shall bring added values to the shareholder and the stakeholders.

Jakarta, 30 April 2021

Atas nama jajaran Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero),
On behalf of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Board of Commissioners,

Achmad Djamaludin
Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS REPORT



Situasi yang penuh ketidakpastian justru menjadi momentum bagi Pelindo 1 untuk dapat melihat keunggulan kompetitifnya, dan bersiap untuk memperkuat fondasinya untuk tumbuh di masa yang akan datang

The uncertain situation actually served as a momentum for Pelindo 1 to see its competitive advantages, and to prepare to strengthen its foundation for future growth

PRASETYO

Direktur Utama
President Director



Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan jasa kepelabuhanan dan maritim, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), disebut juga "Perseroan" atau "Pelindo 1" berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitasnya untuk dapat mewujudkan visi "Menjadi Gerbang Utama Indonesia ke Jaringan Logistik Global". Hal ini tentu bukanlah hal mudah, terutama dengan kondisi di sepanjang tahun 2020 yang didera pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* hingga akhirnya Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak terhadap arus barang dan arus manusia dari satu tempat ke tempat lainnya.

Namun, justru di tengah situasi penuh tantangan inilah, kekuatan fondasi dan keberlanjutan Perseroan akan terlihat. Laporan tahunan ini menjadi sebuah dokumen pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perseroan di tahun 2020, sekaligus menjadi dokumentasi perjalanan Perseroan dalam mengaruhi kondisi penuh ketidakpastian akibat pandemi *COVID-19* yang melanda di sepanjang tahun 2020.

PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI TAHUN 2020, SERTA INISIASI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PELINDO 1

Pandemi *COVID-19* yang menyebar di seluruh dunia berdampak terhadap kondisi perekonomian secara global. Sejalan dengan situasi tersebut, perekonomian Indonesia di tahun 2020 mengalami perlambatan yang tercermin dari stagnansi berbagai industri dan korporasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi *Year on Year (YoY)* pada kuartal I-2020 sebesar 2,97%, kuartal II-2020 sebesar defisit 5,32%, kuartal III-2020 sebesar defisit 3,49%, dan kuartal IV-2020 sebesar defisit 2,19%.

Perekonomian global yang terpukul akibat pandemi *COVID-19* berdampak langsung terhadap transaksi perdagangan dunia serta nilai ekspor dan impor. Hal ini kemudian berimbas pada sektor industri pelabuhan. Menurut data BPS, sektor lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor yang terdampak cukup signifikan atas kondisi perekonomian yang lesu di sepanjang tahun 2020. Sektor ini mengalami koreksi di sepanjang tahun 2020, dari 7,55% pada kuartal IV-2019, menjadi 1,30% pada kuartal I-2020, kembali terkoreksi cukup dalam hingga defisit 30,80% pada kuartal II-2020, mengalami perbaikan pada kuartal III-2020 menjadi defisit 16,71%, kemudian menjadi defisit 13,42% pada kuartal IV-2020.

Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

As a State-Owned Enterprise (SOE) providing port and maritime services, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), also referred to as "Company" or "Pelindo 1", is committed to improve its capacity in order to achieve the vision "To Become Indonesia's Main Gateway to Global Logistics Network". This certainly will not be easy, especially with the *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pandemic reaching Indonesia in 2020, for which the Indonesian Government imposed Large Scale Social Restrictions (PSBB), which in turn impacted the flow of commodities and passengers from one place to another.

But such unfavorable circumstances had a silver lining: this was the right time to see how strong and sustainable the Company really is. This annual report is a formal proof of accountability for the performance of the Board of Directors in managing the Company in 2020, as well as a documentation of the Company's journey in overcoming precarious situations resulting from the *COVID-19* pandemic in 2020.

ECONOMY AND INDUSTRY IN 2020, AND PELINDO 1 INITIATIVES AND STRATEGIC POLICIES

The *COVID-19* pandemic that spread throughout the world impacted the global economy. Considering the situation, the Indonesian economy in 2020 contracted, as reflected by the stagnation in various industries and corporations. According to the data released by Statistics Indonesia (BPS), the *Year on Year (YoY)* Indonesian economic growth was 2.97% in Quarter I of 2020, while in Quarter II, III and IV, deficits of 5.32%, 3.49% and 2.19% were recorded respectively.

The *COVID-19* hit to the global economy directly impact global trade transactions as well as the total export and import volumes. This in turn impacted the port industry. According to the data released by BPS, the Transport and Storage business sectors contracted considerably throughout 2020, from 7.55% in Quarter IV of 2019 to 1.30% in Quarter I of 2020, experienced a significant correction to a deficit of 30.80% in Quarter II of 2020, improved to a deficit of 16.71% in Quarter III of 2020, and finally to a deficit of 13.42% in Quarter IV of 2020.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Perseroan melakukan optimalisasi bisnis *existing*. Sejumlah strategi telah dilakukan untuk mendongkrak arus barang/penumpang, di antaranya implementasi relaksasi penumpukan di terminal pelabuhan untuk menurunkan biaya logistik. Kebijakan tersebut diharapkan membantu meringankan beban pelanggan.

Strategi lain yang dilakukan melalui peningkatan kerjasama dengan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (Tersus) untuk memperluas pasar Perseroan. Dengan memetakan kekuatan wilayah kerja Pelindo 1 yang merupakan wilayah dengan TUKS dan Tersus terbesar di Indonesia, implementasi strategi ini telah meningkatkan pertumbuhan pendapatan pelayanan kapal. Begitu juga kerjasama mitra baru untuk bongkar muat curah kering, cair dan *general cargo* yang menambah trafik barang Pelindo 1 di masa pandemi COVID-19. Sebagai contoh kerja sama mitra pemanfaatan dan pengoperasian Terminal Curah Kering di Pelabuhan Belawan. Strategi peningkatan arus penumpang dilakukan dengan kerjasama terpadu antara Pelindo 1 dengan berbagai pemangku kepentingan serta meningkatkan pelayanan prima salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan pandemi COVID-19 di seluruh terminal penumpang.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan bisnisnya, di tahun 2020 Perseroan melakukan prioritas investasi dan restrukturisasi portofolio keuangan. Ketidakpastian bisnis yang semakin tinggi di masa pandemi COVID-19 disiasati Perseroan dengan melakukan verifikasi kembali atas kebutuhan investasi dan relevansinya terhadap kontinuitas bisnis, sehingga merubah anggaran investasi. Ketersediaan *cashflow* juga dijaga tetap dalam batas *covenant* yang sehat dengan melakukan efisiensi biaya.

Dari sisi strategi pengembangan bisnis, Perseroan melakukan penguatan internal dengan mengimplementasi langkah taktis untuk pengembangan bisnis *marine*, curah cair, dan logistik melalui intensifikasi pelayanan dan diversifikasi bisnis. Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan *traffic* dan pasar di wilayah kerja dan mulai mendapatkan peluang bisnis dari wilayah sekitarnya.

Salah satu fokus utama pengembangan bisnis yang dilakukan Perseroan di tahun 2020 adalah penguatan kelompok usaha melalui pembentukan entitas anak yang diharapkan dapat menjadi mesin penggerak dari kinerja finansial. Strategi pengembangan yang diambil adalah strategi aliansi dengan menggandeng mitra bisnis baik sesama BUMN maupun swasta sebagai penggerak perekonomian nasional. Dalam melaksanakan rencana pengembangan ini, tentu saja identifikasi risiko dalam melakukan investasi di bisnis pelabuhan dan logistik telah dipertimbangkan oleh Perseroan, antara lain

Faced with such circumstances, the Company had to optimize its existing business. Several strategies were adopted to improve the flow of goods/passengers, including relaxation of stacking at port terminals to reduce the logistics costs. The policy is expected to ease the customers' burden.

Another strategy implemented was to update the cooperation agreement with Private Interest Terminals (TUKS) and Special Terminals (Tersus) to expand the Company's market. By mapping the strength of the Pelindo 1 operating areas that house the highest numbers of private interest terminals and special terminals, this strategy has proven capable of increasing the revenue stream from ship services. Likewise, cooperation agreements with new partners for dry bulk, liquid bulk and general cargo loading/unloading has added to Pelindo 1 traffic during the COVID-19 pandemic. To mention just one example, the cooperation agreement with partner for the utilization and operation of the Dry Bulk Terminal at the Port of Belawan. The strategy to increase the flow of passengers took shape with the integrated cooperation between Pelindo 1 and stakeholders as well as implementation of COVID-19 health protocols in all passenger terminals.

To further improve the effectiveness and efficiency of its business management, in 2020 the Company prioritized investment and restructuring of financial portfolio. The ever increasing business uncertainty during the COVID-19 pandemic pushed the Company to perform reverification to its investment needs and their relevance with business continuity, for which the investment budget had to be altered.

As regards business development strategy, the Company did an internal strengthening by implementing various tactical measures for the development of marine, liquid bulk, and logistics businesses through service intensification and business diversification. This strategy was intended to increase the traffic and market growth in the operating areas and to identify business opportunities in the nearby areas.

One of the main foci of the business development carried out by the Company in 2020 was to strengthen the business group by establishing subsidiary entities expected to be the catalysts of financial performance improvement. The implemented development strategy was alliance with business partners and fellow SOEs as well as private companies as the driving forces of the national economy. In the implementation of this development plan, the Company had to put a particular focus on risk identification concerning investment in port and logistics business, which among others is dependent on the





ketepatan waktu dan kompetensi mitra dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas serta pengoperasian sehingga potensi pasar yang ada dapat segera diraih.

Oleh karena itu, Perseroan terus melakukan pengembangan dan inovasi pada cabang-cabang dan anak perusahaan andalannya antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Proyek Strategis Nasional Kuala Tanjung Port & Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE) terdiri dari:
 - a. Pelindo 1 telah memperoleh Penetapan Lokasi (Penlok) seluas 1.128 Ha untuk Pengembangan pelabuhan Hub Internasional dan Kawasan Industri Kuala Tanjung;
 - b. Sinergi dengan PT Pertamina (Persero) terkait Pembangunan terminal BBM di Pelabuhan Kuala Tanjung;
 - c. Sinergi dengan PT Pertamina (Persero) terkait Kerjasama fasilitas *bunkering* di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;
 - d. Sinergi dengan PT Pertamina (Persero) terkait Sinergi kerjasama energi di Pelabuhan Kuala Tanjung.
2. Pengembangan Kerja sama *E-Fulfillment* dengan perusahaan berbasis *e-Commerce* di Lingkungan Perseroan.
3. Persiapan Pembangunan Terminal Petikemas Fase 1 dan Pengoperasian Terminal Petikemas Belawan Fase 1 dan 2.
 - a. Persiapan administrasi perizinan pemasangan *sheetpile* fase 1 untuk memproteksi kolam pelabuhan dan sekitarnya;
 - b. Pengerukan kolam fase 2 untuk operasional pelayanan sandar kapal petikemas di terminal Petikemas Belawan Fase 2;
 - c. Persiapan administrasi perizinan dari regulator dan penyampaian proposal terminal test Fase 2 ke Kementerian Perhubungan Cq Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
 - d. Pelindo 1 akan melanjutkan pembangunan TPK Belawan Fase 1 dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Sewa Barang Milik Negara (BMN) Fase 1 pada akhir Oktober 2021;
 - e. Dimulainya proses pemilihan mitra untuk pengoperasian dan pengembangan Terminal Petikemas untuk Terminal Petikemas Belawan Fase 1 dan 2.
4. Investasi di Lingkungan Perseroan untuk Mendukung Pengembangan Bisnis.
 - a. Pekerjaan pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Belawan;
 - b. Penataan terminal penumpang Tanjung Balai Karimun;
 - c. Pembangunan Gudang Baru di Pelabuhan Belawan;
 - d. Pekerjaan Lapangan Penumpukan dan Pembuatan *Sheet Pile Dermaga Beaching* Pelabuhan Rengat;

punctuality and competency of partners in facility construction and operation to seize the market potential as soon as possible.

For the above reasons, the Company constantly push for development and innovation for its most reliable branches and subsidiaries, namely:

1. The Development of the National Strategic Project of Kuala Tanjung Port & Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE) consists of:
 - a. Pelindo I has obtained the location determination of a land of 1,128 ha for the development of International Hub port and Kuala Tanjung Industrial Estate;
 - b. Synergy with PT Pertamina (Persero) regarding the construction of fuel terminal at the Port of Kuala Tanjung;
 - c. Synergy with PT Pertamina (Persero) regarding cooperation on bunkering facilities at Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;
 - d. Synergy with PT Pertamina (Persero) regarding cooperation on energy at the Port of Kuala Tanjung.
2. Cooperation in Development of E-Fulfillment with e-Commerce based companies within the Company
3. Phase 2 of Preparation for Belawan Container Phase 2 Operation
 - a. Preparation for permit application for sheetpile installation phase 1 to protect port basin and surrounding areas.
 - b. Dredging of Basin Phase 2 of Basin Dredging for Phase 2 of container ship dock services at Belawan Container Terminal Phase 2;
 - c. Preparation for permit application to regulator and delivery of test terminal proposal to Ministry of Transport Cq Belawan Main Port Office;
 - d. Pelindo 1 will continue the development of Belawan Container Terminal Phase 1 since the State-Owned Assets Lease Agreement Phase 1 has been signed at the end of October 2021.
 - e. Partner selection process for the operation and development of Container Terminal at the Belawan Container Terminal Phase 1 and 2 has been commenced.
4. Investment within the Company to support business development
 - a. Dredging works for Belawan Port Waterways and Basin;
 - b. Reorganization of Tanjung Balai Karimun passenger terminal;
 - c. Construction of new storage at Port of Belawan;
 - d. Works for Container Yard and Construction of Beaching Dock Sheet Pile at Port of Rengat;

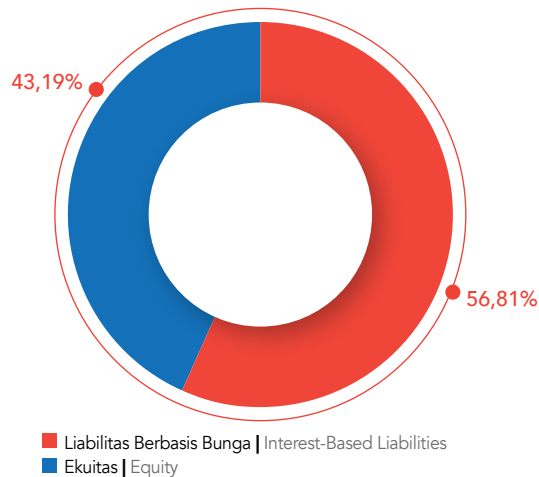
- e. Pengadaan Kapal Pandu dan Kapal Tunda untuk Cabang Belawan, Cabang Pekanbaru dan Cabang Dumai.

- e. Procurement of Pilot Ships and Delay Ships for Belawan, Pekanbaru and Dumai Branches.

Pengelolaan pendanaan turut menjadi perhatian manajemen. Hingga akhir tahun 2020, struktur permodalan Perseroan terdiri dari liabilitas berbasis bunga sebesar 56,81%, sedangkan sisanya sebesar 43,19% merupakan ekuitas atau permodalan sendiri.

Management paid special attention to financing. As of the end of 2020, the Company's capital structure consisted of 56.81% interest-based liabilities, while the remaining 43.19% were equity.

KOMPOSISI PERMODALAN TAHUN 2020
2020 CAPITAL COMPOSITION



Pengelolaan permodalan khususnya pada liabilitas dilakukan dengan mempertimbangkan rencana bisnis jangka panjang serta kebutuhan modal kerja jangka pendek yang terutama didapatkan dari pinjaman perbankan serta penerbitan obligasi.

Capital management, particularly as regards liabilities, was carried out taking into account the long term business plans and short term working capital needs that were provided by bank loans and bond issuance.

Dengan kondisi yang telah dipaparkan di atas, secara umum total produksi bongkar muat Petikemas tahun 2020 terealisasi sebesar 1,16 juta *box* dan 1,42 juta *Teu's*, masing-masing meningkat 7,25% dan 6,38% dibanding jumlah bongkar muat petikemas pada tahun 2019 sebesar 1,08 juta *box* dan 1,33 juta *Teu's*. Seluruh kinerja produksi bongkar muat Petikemas mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, baik bongkar muat Petikemas Belawan (Internasional dan Domestik), Petikemas Perawang, maupun Petikemas lainnya.

Considering the above circumstances, the total container loading/unloading volume in 2020 amounted to 1.16 million boxes and 1.42 million teu's, which increased by 7.25% and 6.38% respectively from the total container loading/unloading volume of 1.08 million boxes and 1.33 teu's in 2019. The container loading/unloading volumes increased from the previous year at all branches, namely Belawan Container Terminal (International and Domestic), Perawang Container Terminal and other container terminals.

Pada pengelolaan kepelabuhanan, baik volume kunjungan kapal, volume bongkar muat barang, maupun jumlah arus penumpang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kunjungan kapal tahun 2020 sebanyak 52.737 *Call*, turun 14,56% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 61.723 *Call*; volume bongkar muat barang tahun 2020 sebanyak 32,59 juta ton, turun 25,97% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 44,02 juta ton; sedangkan jumlah arus penumpang tahun 2020 sebanyak 2,49 juta orang, turun hingga 54,62% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 5,48 juta orang. Penurunan ini disebabkan kebijakan PSBB yang harus diterapkan Pemerintah Indonesia

As regards port management, the ship call, goods loading/unloading and passenger flow volumes all decreased from the previous year. The ship call in 2020 numbered 52,737 calls, declining by 14.56% from the 61.723 calls recorded in 2019; the goods loading/unloading volume in 2020 was 32.59 million tons, decreasing by 25.97% from the 44.02 million tons recorded in 2019; whereas the total passenger flow in 2020 was 2.49 million people, decreasing by a steep 54.62% from 5.48 million in 2019. This comprehensive decrease in performance was caused by the policy of large scale social restrictions adopted by the Indonesian Government to prevent the spread



dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID-19, maupun kebijakan *lockdown* dari negara asal kapal datang.

Di sisi lain, tonase kunjungan kapal tahun 2020 sebanyak 160,66 juta GT, meningkat 22,10% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 131,58 juta GT. Peningkatan ini disebabkan bertambahnya pangsa pasar jasa pelayanan kapal di dermaga khusus/TUKS di wilayah cabang Dumai dan Batam khususnya, seiring dengan upaya manajemen untuk menambah kerja sama dengan pemilik tersus/TUKS dan agen pelayaran dalam hal pelayanan pemanduan dan penundaan.

Dengan capaian kinerja operasi dan pemasaran tersebut, Perseroan membukukan pendapatan usaha tahun 2020 sebesar Rp3,84 triliun, turun 31,78% dibandingkan pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp5,64 triliun. Laba usaha tahun 2020 sebesar Rp675,99 miliar, meningkat 13,00% dari tahun 2019 sebesar Rp598,21 miliar. Kenaikan laba usaha didapatkan dari efisiensi pada beban usaha yang mampu ditekan lebih rendah dibandingkan penurunan pendapatan. Hal ini kemudian berdampak pada laba bersih tahun berjalan tahun 2020 tercatat sebesar Rp183,12 miliar, mengalami penurunan 11,18% dari laba bersih tahun berjalan tahun 2019 sebesar Rp206,18 miliar. Adanya penurunan laba bersih ini terutama disebabkan meningkatnya beban keuangan.

Dengan adanya kerugian komprehensif lainnya, di tahun 2020 Perseroan mencatat jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp181,21 miliar, meningkat 26,74% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp142,97 miliar, yang disebabkan penurunan kerugian kerugian komprehensif lain tahun berjalan-setelah pajak yang cukup signifikan.

Pada posisi keuangan, Jumlah aset Perseroan di akhir tahun 2020 sebesar Rp15,966 triliun, turun 0,02% dari tahun sebelumnya sebesar Rp15,969 triliun. Penurunan jumlah aset Perseroan terutama disebabkan penurunan pada kas dan setara kas serta pajak dibayar di muka. Jumlah liabilitas di akhir tahun 2020 sebesar Rp9,70 triliun, turun 0,70% dari tahun sebelumnya sebesar Rp9,77 triliun. Penurunan liabilitas terutama disebabkan berkurangnya nilai utang usaha. Sedangkan ekuitas Perseroan di akhir tahun 2020 sebesar Rp6,26 triliun, meningkat 1,05% dari tahun sebelumnya sebesar Rp6,19 triliun, yang terutama disebabkan adanya kenaikan saldo laba dari laba tahun sebelumnya.

of COVID-19 pandemic, as well as by the lockdown policies of ships' countries of origin.

On the other hand the tonnage of ship calls in 2020 amounted to 160.66 million GT, increasing by 22.10% from the 131.58 million GT figure recorded in 2019. This was thanks to the expansion of ship service market to special docks/private interest terminals in particularly at Dumai and Batam branches, which was given rise by the management effort to seal more cooperation agreements with special/private interest terminals and sailing agents with regard to pilotage and towage services.

From the operation and marketing achievements, the Company recorded a total business revenue of Rp3.84 trillion in 2020, decreasing by 31.78% from the Rp5.64 trillion recorded in 2019. However, in the breakdown of revenues by segment, it is shown that the revenues from container and ports services increased, will all other segments showed a decline. The business profit in 2020 amounted to Rp675.99 billion, increasing by 13.00% from Rp598.21 billion in 2019. The increase in business profit was thanks to efficiency in operating expenses, which was pushed down to a level below the revenue decrease. This then impacted the 2020 current year net profit amounting to Rp183.12 billion, decreasing by 11.18% from the 2019 current year net profit of Rp206.18 billion. This decrease in net profit was due to the increasing financial expenses.

Taking into account other comprehensive losses, in 2020 the Company recorded a total comprehensive profit of the year at Rp181.21 billion, an increase of 26.74% from 2019 of Rp142.97 billion, which was due to significant decrease in other comprehensive losses of the year after tax.

With regard to financial position, the Company's total assets in 2020 amounted to Rp15.966 trillion, decreasing by just 0.02% from Rp15.969 trillion in the previous year. The Company's decreasing total assets was caused by the decrease in cash and cash equivalents and prepaid tax. The total liabilities at the end of 2020 amounted to Rp9.70 trillion, decreasing by 0.70% from the Rp9.77 trillion in the previous year. This decrease in liabilities was caused by the decreasing account payables. The Company's equity at the end of 2020 was Rp6.26 trillion, increasing by 1.05% from the Rp6.19 trillion in the previous year, which was primarily caused by the increasing retained earnings from the previous year.

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2020

Untuk rencana kerja dan target kinerja RKAP tahun 2020, Perseroan melakukan revisi pada semester II-2020 dalam rangka penyesuaian akibat pandemi COVID-19 dan berbagai perkembangan yang terjadi pada perekonomian dan industri secara nasional, khususnya pada sektor pengangkutan dan transportasi. Revisi RKAP tahun 2020 tersebut disusun berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-46/Wk2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Perubahan RKAP 2020 BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN II, dan Surat Asisten Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN No. S-8/Wk2.MBU.F/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Revisi RKAP Tahun 2020.

Revisi RKAP tahun 2020 dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan situasi hingga pertengahan tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 berimbas pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) nasional serta kebijakan *lockdown* oleh berbagai negara. Revisi RKAP Tahun 2020 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Adanya perubahan asumsi makro yang cukup signifikan;
- Adanya dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh signifikan terhadap operasional Perseroan;
- Prioritas pada investasi yang langsung *men-generate* pendapatan.

Berikut disampaikan pencapaian target Perseroan tahun 2020:

BIDANG OPERASI DAN PEMASARAN

- Bongkar Muat Petikemas Internasional
Realisasi Bongkar Muat Petikemas Internasional hingga akhir tahun 2020 mencapai 92,15% untuk *box* dan 95,44% dalam satuan TEUs. Pencapaian trafik Bongkar Muat Petikemas Internasional ini sejalan dengan belum tercapainya trafik petikemas internasional di TPK Belawan, PMT, dan PTP.
- Bongkar Muat Petikemas Domestik
Realisasi Bongkar Muat Petikemas Domestik hingga akhir tahun 2020 melebihi target, yaitu sebesar 104,07% untuk *box* dan 103,80% untuk ukuran TEUs. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kebutuhan *consumer good* pada saat pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) waktu itu untuk masyarakat Pekanbaru dan mulai masuknya petikemas *empty* internasional (dari Singapura) sebagai upaya intensifikasi pasar.

2020 TARGET ACHIEVEMENTS

The Company revised 2020 Work Plan and Budget in the middle of semester II of 2020 in order to adapt to COVID-19 pandemic and other developments occurring in the national economy and industry, especially in the shipping and transport sectors. The 2020 RKAP revision was made in accordance with Ministry of SOE Decision Letter No. S-46/Wk2.MBU/06/2020 of 4 June 2020 concerning Change to 2020 RKAP of SOE under Vice Minister of SOE II, and Letter of Assistant Deputy for Transport Facilities and Infrastructures of Ministry of SOE No. S-8/Wk2.MBU.F/07/2020 of 22 July 2020 on Revision to 2020 RKAP.

The 2020 RKAP revision was made taking into account the latest conditions and developments until mid-2020, during which time the COVID-19 pandemic pushed the Government to implement Large Scale Social Restrictions as well as lockdown policies by various countries. The 2020 RKAP revision took into account the following:

- Significant change in macro assumptions.
- Impacts of COVID-19 that significantly affect the Company's operations
- Priority on investment that can generate income directly.

Below are 2020 target achievements of the Company:

OPERATIONS AND MARKETING

- International Container Loading and Unloading
Realization of International Container Unloading by the end of 2020 reached 92.15% for boxes and 95.44% in Teu's units. The achievement of the International Container Loading and Unloading traffic is in line with the unachieved international container traffic at TPK Belawan, PMT, and PTP.
- Loading and Unloading of Domestic Containers
The realization of domestic container loading and unloading by the end of 2020 exceeded target, namely 104.07% for boxes and 103.80% for Teu's unit. This was due to an increase in the need for consumer goods when Large-Scale Social Restrictions (PSBB) was implemented by the people of Pekanbaru and the entry of empty international containers (from Singapore) as an effort to intensify the market.





Pencapaian Bongkar Muat Petikemas Domestik di atas target tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam melihat peluang yang ada, dan mampu memanfaatkannya untuk menciptakan hasil positif di tengah kondisi penuh tantangan tahun 2020 khususnya bagi sektor logistik.

These domestic container loading/unloading achievements, which surpass the target, show the Company's ability to see the existing opportunities, and seize them to bring about positive results in the midst of challenging situations, especially for the logistics sector, in 2020.



- **Kunjungan Kapal**

Realisasi kunjungan kapal hingga akhir tahun 2020 mencapai 88,36% untuk target volume dalam satuan *Call*, dan 104,91% untuk tonase dalam satuan GT. Penurunan kunjungan kapal penumpang disebabkan adanya *physical distancing* dan kebijakan PSBB dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 baik di pelabuhan tujuan/asal dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk kapal cargo di pelabuhan umum cenderung mengalami penurunan jumlah kunjungan kapal sejalan dengan trafik barang yang dibawa.

Namun secara Tonase Kapal mencatat pencapaian di atas target yang disebabkan bertambahnya pangsa pasar jasa pelayanan kapal di dermaga khusus/TUKS di wilayah cabang Dumai dan Batam khususnya. Hal ini seiring dengan upaya manajemen untuk menambah kerja sama dengan pemilik tersus/TUKS dan agen pelayaran dalam hal pelayanan pemanduan dan penundaan.

- **Volume Bongkar Muat Barang**

Realisasi bongkar muat barang di Pelabuhan umum hingga akhir tahun 2020 mencatat pencapaian 87,21% dibandingkan target, yang dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Melemahnya pertumbuhan ekonomi wilayah terutama Sumatera Utara karena aktivitas produksi di pabrik tidak berjalan seperti biasa mengingat adanya kebijakan PSBB;
- Berkurangnya permintaan barang/komoditi dari negara-negara yang juga menerapkan *lockdown* sehingga arus barang yang lewat pelabuhan juga berkurang.

- **Arus Penumpang**

Realisasi Arus Penumpang hingga akhir tahun 2020 mencapai 94,04% dari target tahun 2020, yang disebabkan kebijakan PSBB akibat pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap trafik penumpang. Pada awal triwulan IV-2020, trafik arus penumpang mulai mengalami peningkatan, meskipun belum sepenuhnya normal terutama untuk pelayaran luar negeri.

- **Ship Call**

The realized ship call as of end of 2020 amounted to 88.36% of the target volume as measured in calls and 104.91% of the tonnage in GT. The reduced ship call were due to physical distancing and large-scale restriction policy intended to prevent the spread of COVID-19 that were implemented at domestic and international ports of destination/origin. Whereas cargo ship call at general ports decreased in line with decreasing traffic.

However, as measured in tonnage, the realized figure exceeded the target due to expansion to ship service market at special/private interest terminals, particularly in Dumai and Batam branch areas. In line with management's efforts to increase cooperation with owner of tersus/TUKS and shipping agent in terms of service guiding and delays.

- **Goods Loading/Unloading Volume**

As of the end of 2020, the realization of goods loading/unloading at general Ports amounting to 87.21% of the target, influenced by the following factors:

- Regional economic slowdown, particularly in North Sumatera due to reduction in production activities at factories resulting from the large-scale social restriction policy.
- Reduced demand for goods/commodities from countries with lockdown policies, which caused the commodity traffic through ports to decrease accordingly.

- **Passenger Flow**

The realization of passenger flow as of the end of 2020 was 94.04% of 2020 target, due to the large-scale social restriction policy to prevent the spread of COVID-19, which impacted the passenger traffic. In the beginning of Quarter IV of 2020, the passenger traffic started showing a positive sign, albeit normal flow was still far-off for international traffic.

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan Perseroan adalah pencapaian Indikator Kinerja Kunci atau *Key Performance Indicator* (KPI). Realisasi KPI Korporat tahun 2020 mencapai 98,70 dari bobot target sebesar 100. Secara umum, target-target keuangan masih sedikit di bawah target. Namun beberapa target pengelolaan operasi dan proses bisnis dapat tercapai dengan sangat baik, seperti Pangsa Pasar Pelabuhan, Retensi pelanggan, *Number of Ship/Customer Served*, maupun Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan.

Terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target, yang menjadi catatan bagi evaluasi manajemen untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.

KENDALA DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSINYA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi pengelolaan pelabuhan yang dilakukan Perseroan. Hal ini menjadi tantangan bagi manajemen untuk dapat mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimiliki, baik pengelolaan biaya, prioritas investasi, maupun prosedur tetap untuk dapat menjalankan kegiatan operasi di tengah pandemi COVID-19 yang berisiko terhadap karyawan Perseroan di lapangan. Secara khusus Direksi menghaturkan terima kasih atas seluruh kerja cerdas yang telah dilakukan oleh insan Pelindo 1 di tengah kondisi yang penuh risiko. Perjalanan tahun 2020 menjadi bukti, bahwa Perseroan mampu melalui tantangan penuh ketidakpastian, dengan kelangsungan usaha yang tetap terjaga pada level yang diharapkan.

PROSPEK USAHA TAHUN 2021

Prospek tahun 2021 sangat bergantung pada *recovery* atas dampak pandemi COVID-19. Indonesia telah memulai tahun 2021 dengan optimisme yang cukup baik, yang ditunjukkan dari telah dimulainya proses vaksin secara bertahap. Meskipun belum sepenuhnya kembali seperti sedia kala, program vaksin ini diharapkan mampu menggerakkan kembali roda perekonomian di sepanjang tahun 2020 mengalami stagnasi dan ketidakpastian.

Dalam RKAP tahun 2021 yang telah disahkan bersama-sama dengan pemegang saham melalui forum RUPS tanggal 29 Januari 2021, Perseroan memandang optimis tahun 2021 untuk dapat melakukan *recovery* dengan baik. Walaupun kondisi tahun 2021 belum lepas dari pandemi COVID-19, Perseroan merencanakan berbagai langkah strategis, seperti *cost effectiveness*, *revenue enhancement* melalui perikatan kerja sama pelayanan *marine service* di TUKS-TUKS dan di wilayah perairan Selat Malaka serta negosiasi peningkatan tarif pelayanan kerjasama Bongkar Muat (B/M) petikemas dan negosiasi perjanjian persewaan lahan; penyesuaian *Capital Expenditure* (CAPEX), serta optimalisasi aset tetap milik sendiri.

KEY PERFORMANCE INDICATOR ACHIEVEMENTS

One of the tell-tale signs of success in Company management is Key Performance Indicators (KPI). The Corporate KPI realization in 2020 was 98.70 out of the targeted 100. In general, the realized financial figures were slightly below the targets. But some targets in operational management and business process were reached, such as Ports Service Market Share, Customer Retention, Number of Ships/Customers Served, Digitalization and Service Integration.

On the other hand, the Company failed to achieve some targets, which shall be evaluated for basis of improvement in future times.

PROBLEMS AND CHALLENGES FACED AND THE SOLUTIONS

As mentioned above, the COVID pandemic significantly impacted the Company's port management. This constituted a challenge to management i.e. how to optimize the existing potential and capacity, including cost management, investment priority, and standard operating procedures to keep the operations running during the COVID-19 pandemic, which posed certain risks to the on-field employees. The Board of Directors would like to express its gratitude particularly for the astute work by every man and woman within Pelindo 1 during these uncertain times. Our journey throughout 2020 to overcome challenges was proof that the Company is capable to withstand uncertainties, with the business running at the expected level.

2021 BUSINESS PROSPECTS

The prospects in 2021 depend on the economic recovery from COVID-19 pandemic. Indonesia started 2021 with optimism as shown in the gradual delivery of the vaccine. Even though there is still much to do to achieve normalcy, the vaccine program is expected to catalyze the economy that experienced stagnation and uncertainty throughout 2020.

In the 2021 RKAP agreed upon by the shareholders in the General Meeting of Shareholders of 29 January 2021, the Company is optimistic that the economy will recover in 2021. Even though the COVID-19 pandemic still lingers in 2021, the Company has planned several strategic measures, including cost effectiveness, revenue enhancement through marine service cooperation agreement with private interest terminals and for the waters of the Strait of Malacca as well as negotiation for fee increase in container Loading/Unloading agreement and negotiation in land lease agreements; Capital Expenditure (CAPEX) adjustment and optimization of own fixed assets.





Salah satu fokus utama dari aset sendiri yang akan dioptimalkan adalah pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung. Dengan posisinya yang cukup strategis, pelabuhan Kuala Tanjung menawarkan sebuah pelabuhan dengan kemudahan bagi pelanggan, sekaligus mampu memberikan tingkat kompetisi yang lebih tinggi bagi Indonesia di jaringan logistik global. Tak hanya itu, adanya kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan di Kuala Tanjung Port & Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE) dapat memberikan nilai tambah bagi layanan yang ditawarkan Perseroan.

Dengan asumsi *recovery* pandemi COVID-19 pada Q4 tahun 2020 serta telah diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71 tentang "Instrumen Keuangan", 72 tentang "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dan 73 tentang "Sewa", Perseroan memproyeksikan *call* Kunjungan Kapal pada pelabuhan Umum dapat meningkat 26,56%, sedangkan *call* Kunjungan Kapal pada TUKS dapat meningkat 40,17%. Volume ton Bongkar Muat Barang tahun 2021 diproyeksikan sedikit di bawah realisasi tahun 2020, terutama dengan proyeksi impor yang belum menunjukkan *recovery* dalam waktu cepat. Sedangkan jumlah Arus Penumpang diharapkan mampu meningkat hingga 65,42% dari realisasi tahun 2020.

Dari proyeksi operasi dan pemasaran tersebut, pendapatan usaha diproyeksikan mampu tumbuh 7,05% sedangkan laba usaha dapat tumbuh hingga 64,06% sejalan dengan metode efisiensi biaya yang telah dijalankan sejak tahun 2020. Pada posisi keuangan, nilai Aset diharapkan mampu meningkat 24,17% sesuai dengan proyeksi investasi yang telah diperhitungkan.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai BUMN yang berstatus sebagai emiten, Perseroan memiliki kewajiban untuk menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) dengan 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan dilakukan mulai dari pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku melalui perangkat kebijakan serta pembentukan organ-organ GCG, pengelolaan hubungan kerja antara organ GCG yang tertuang dalam prosedur dan mekanisme GCG, hingga internalisasi dan evaluasi atas kemajuan penerapan prinsip GCG di lingkup Perseroan.

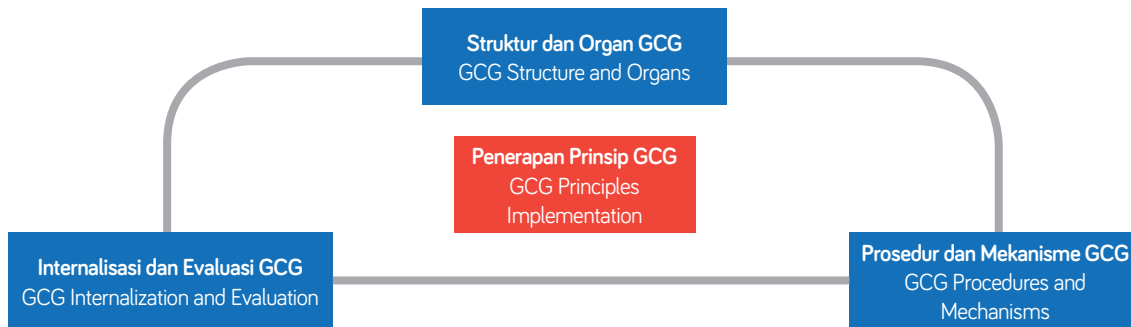
One of the main focuses regarding own assets to be optimized is the development of Port of Kuala Tanjung. Situated in a strategic location, the Port of Kuala Tanjung offers a port with ease to the customers, which also provides much higher competitiveness for Indonesia in the global logistics network. In addition to that, the presence of an industrial estate integrated with a port, as seen through the Kuala Tanjung Port & Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE), also provides added-values to the services offered by the Company.

Assuming COVID-19 pandemic recovery during Q4 of 2020 and implementation of Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 71 on "Financial Instruments", No. 72 on "Income from Contracts with Customers", and No. 73 on "Lease", the Company projected ship visit calls at general ports to increase by 26.56%, while the ship visit calls at private interest terminals were projected to improve by 40.17%. The goods loading/unloading tonnage volume in 2021 was projected to slightly decrease from the 2020 realization, particularly with regard to import projection which had shown no sign of recovery. Whereas the passenger flow was expected to increase by up to 65.42% from the 2020 realization.

Coming from the operational and marketing projections, the business revenues were projected to grow by 7.05%, while the retained earnings were projected to grow by 64.06% in line with the cost efficiency method applied since 2020. As regards financial position, the value of the total assets was expected to rise by 24.17% in line with the projected investment.

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

As a State-Owned Enterprise with an Issuer status, the Company is obliged to implement Good Corporate Governance (GCG) with 5 (five) basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The implementation starts with compliance with the prevailing laws and regulations by policy instruments and establishment of GCG organs, management of working relationship between GCG organs as expressed in GCG procedures and mechanisms, and internalization and evaluation on the progress of GCG principle implementation within the Company.



Keberadaan 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, telah sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Anggaran Dasar Perseroan. Kemitraan strategis melalui pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan seluruh organ pendukungnya berdampak positif pada pengelolaan Perseroan hingga menjadi lebih berimbang. Meskipun dimiliki 100% oleh Pemerintah Indonesia, Perseroan memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan RUPS sebagai forum bagi pemegang saham untuk dapat mengambil keputusan strategis. Penyelenggaraan RUPS turut mendorong praktik penerapan prinsip GCG yang berlandaskan pada pemenuhan hak pemegang saham sebagai salah satu pemangku kepentingan Perseroan.

Prosedur dan mekanisme GCG juga telah dikembangkan sejalan dengan standar yang berlaku yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Pedoman-pedoman hingga *Standard Operational Procedure (SOP)* atau *Prosedur Tetap* telah dikembangkan dan diperbaharui untuk dapat menjawab kebutuhan akan pengembangan operasi yang adil di lingkup Perseroan. Termasuk manajemen risiko dan pengendalian internal yang berfungsi memberikan pendeteksian dini atas kemungkinan-kemungkinan risiko yang dihadapi Perseroan.

Transparansi informasi kepada pemegang saham juga menjadi perhatian manajemen. Perseroan menyadari transparansi informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan keberlanjutan dari dunia usaha yang ditopang oleh keterikatan pemangku kepentingan dalam proses pengawasan tidak langsung. Transparansi informasi yang komprehensif juga dilakukan melalui penyajian Laporan Keuangan Teraudit, yang telah melalui proses audit independen oleh akuntan publik. Penunjukan akuntan publik juga telah melalui rangkaian mekanisme berjenjang, yang melibatkan pemegang saham melalui RUPS. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi akuntan publik, yang pada akhirnya akan memberikan opini yang sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

The existence of the 3 (three) main organs, namely the General Meetings of Shareholders (RUPS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors conforms to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as well as the Company's Articles of Association. Strategic partnership with the supervision of the Board of Commissioners and its supporting organs positively impacts the balance of the Company's management. Albeit 100% owned by the Indonesian Government, the Company meets its obligation to hold General Meetings of Shareholders as a forum to decide on strategic decisions. The General Meetings of Shareholders boost the practices of GCG principles based on fulfillment of the rights of shareholders as one of the Company's stakeholders.

GCG procedures and mechanism have been developed in line with the prevailing standards adjusted to the Company's needs. Guidances and Standard Operational Procedures have been developed and updated to accommodate the needs for fair operational development within the Company. Including risk management and internal control which provide early detection of risks that potentially arise.

Information transparency to the shareholders is also one of management's top priorities. The Company understands that information transparency is an inseparable part of sustainable development in a business boosted by rapport with the stakeholders in the indirect monitoring process. Comprehensive information transparency is practiced in form of Notice of Audited Financial Statement written independently by public accountant. The appointment of public accounting firm is carried out through a series of mechanisms involving the shareholders in the General Meetings of Shareholders. This is intended to ensure the independence of the public accounting firm, which would give its opinion in accordance with the prevailing Indonesian Accounting Standards.



Evaluasi dan pemantauan terhadap pengukuran penerapan GCG juga dilakukan secara periodik tahunan. Dalam pelaksanaannya, *assessment* terkait penerapan GCG dalam lingkungan Perseroan dilakukan oleh pihak independen maupun *self assessment* yang dilakukan tim internal, yang hasilnya akan menjadi rujukan dalam evaluasi dan masukan bagi perbaikan penerapan prinsip GCG di lingkup Perseroan. Sebagai BUMN, metode pengukuran penerapan GCG mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN.

Metode ini dikembangkan melalui alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta Aspek Lainnya. Hasil *assessment* tahun 2020 menunjukkan skor 95,63 dengan predikat "Sangat Baik", meningkat dari skor tahun 2019 sebesar 94,42 juga dengan predikat "Baik". Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan GCG dalam rangka memberikan fondasi yang kokoh bagi perkembangan di masa-masa mendatang.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Manajemen menyadari, kemajuan serta keberhasilan kinerja Perseroan tak lepas dari dampak lingkungan dan sosial yang timbul atas kegiatan operasi yang dilakukan di pelabuhan. Dampak, atau akibat yang muncul dari kegiatan usaha, telah menjadi faktor yang diperhitungkan Perseroan dalam seluruh skema operasi dan bisnis yang dikembangkannya, baik itu akibat atau imbas yang terjadi, maupun pemangku kepentingan yang memiliki kaitan dengan dampak yang muncul dari kegiatan yang dilakukan Perseroan dan entitas anak.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* ("CSR"), atau disebut juga Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta berbagai peraturan dan perundang-undangan lainnya yang mengikat Perseroan dalam melakukan kegiatan operasi dan usahanya. Selain itu, Perseroan juga melakukan pemetaan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui pendekatan

GCG evaluation and monitoring are carried out along with regular GCG assessments. In its implementation, GCG implementation assessment within the Company is carried out by an independent party as well as through self-assessment by an internal team, the results of which will be the basis for evaluation and suggestion for improvement of GCG principle implementation within the Company. As a State-Owned Enterprise, the GCG implementation measuring method is in accordance with Copy of Decision of Ministry of SOE Secretary No. SK-16/S.MBU/2012 of 6 June 2012 on Assessment and Evaluation Indicators/Parameters of GCG Implementation for SOEs.

This method was developed with measuring tools consisting of 6 (six) aspects, namely Commitment towards Sustainable Good Corporate Governance Implementation, the Shareholders and General Meetings of Shareholders/Owner's Equity, Board of Commissioners/Supervisory Board, Board of Directors, Information Disclosure and Transparency, and other Aspects. The 2020 assessment result showed a score of 95.63, with a "Very Good" label, increasing from the score of 94.42 in 2019, with the same "Good" label. The Company is committed to boosting the GCG implementation in order to provide a strong foundation for future development.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Management realizes that the progress and success of the Company are strongly correlated with the environmental and social impacts resulting from the operating activities taking place in ports. The impacts resulting from business activities constitute an important factor taken into account by the Company in all its operation and business schemes, be it the impacts of events, or the impacts to the stakeholders related to the Company and subsidiary entities' business activities.

The implementation of Corporate Social Responsibility or Social and Environmental Responsibility is based on compliance with the prevailing laws and regulations, particularly Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Government Regulation No. 47 of 2012 on Limited Liability Companies' Social and Environmental Responsibility, and other laws and regulations to which the Company is subject in its operating and business activities. Furthermore, the Company mapped the economic, social, and environmental impacts with the sustainability approach, namely participation in global-scale sustainable development goals. The Company believes that its business activities have the potential to support the 17 Social Development Goals (SDGs) as stipulated by the Indonesian

untuk mencapai tujuan keberlanjutan, yakni partisipasi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan skala global dalam SDGs. Perseroan meyakini, kegiatan usaha yang dijalankan dapat mendukung pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dirumuskan dalam 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang telah dirumuskan oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Agar pelaksanaan program TJSL di lingkup Perseroan memiliki acuan, proses dan tujuan yang jelas, Perseroan mengadopsi ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial dalam pelaksanaan program TJSL-nya.

ISO ini menekankan pada 7 (tujuh) subjek inti, yaitu tata kelola organisasi (*organizational governance*); hak asasi manusia (*human rights*); praktik ketenagakerjaan (*labour practices*); Lingkungan (*the environment*); prosedur operasi yang wajar (*fair operating procedures*); isu konsumen (*consumer issues*); dan pelibatan dan pengembangan masyarakat (*community involvement and development*). Perseroan juga melakukan upaya pemetaan sosial atas dampak dan risiko dari kegiatan operasi dan usaha yang dilakukan, yang dilakukan melalui pemetaan atas pemangku kepentingan yang terkait dalam rantai kegiatan operasi dan usaha serta potensi dampak dan risiko dari hubungan Perseroan dengan masing-masing pemangku kepentingan. Uji tuntas ini merupakan komitmen Perseroan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang mempersyaratkan adanya kebijakan yang terencana dalam memetakan hubungan pelaku usaha dengan pemangku kepentingan serta dampak dan risiko dari kegiatan operasi dan usaha.

Pada lingkup pengelolaan lingkungan hidup, Perseroan bersama entitas anak melakukan berbagai upaya pemantauan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari kegiatan pengelolaan pelabuhan. Secara khusus manajemen telah menetapkan SOP tata kelola lingkungan yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. PP.27/1/10/PI-15.TU tanggal 23 Oktober 2015 tentang Pedoman Penerapan *Green Port* di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Sertifikasi ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan di beberapa pelabuhan. Hal ini memberikan kerangka yang jelas tentang pengelolaan pelabuhan dengan pendekatan *Green Port*, yang dipadukan dengan proses audit berkala dari pemenuhan sertifikasi.

Secara khusus, Perseroan menempatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3LH) sebagai prioritas utama dalam semua kegiatan yang dilakukan. Di samping memenuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3, Perseroan juga menempatkan hak-hak pemangku

government in Presidential Regulation No. 59 of 2017 on Sustainable Development Goals.

To ensure that the implementation of Social and Environmental Responsibilities within the Company is equipped with clear reference, process and goal, the Company adopts ISO 26000 standards on Social Corporate Responsibility.

The ISO standards emphasize 7 (seven) core subjects, namely organizational governance; human rights; labor practices; the environment; fair operating procedures; consumer issues; and community involvement and development. The Company also develops a social mapping of the impacts and risks of the operating and business activities, which was done with help of concerned stakeholders in the chain of operating and business activities as well as the potential impacts and risks resulting from the Company's relationship with each stakeholder. This due diligence is a demonstration of the Company's commitment to achieve sustainable development, which requires planned policies in order to map the relationships between business actors and stakeholders as well as the impacts and risks of operating and business activities.

With regard to environmental management, the Company along with its subsidiary entities endeavors to monitor the potential environmental impacts of port management activities. Management has in particular established environmental management SOP in Board of Directors' Decision No. PP.27/1/10/PI-15.TU of 23 October 2015 on Guidelines on Green Port Implementation within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and ISO 14001 Certification on Environmental Management System at several Ports. This gave a clear framework concerning port management with the Green Port approach, which is integrated with regular audits as requirements for the certification.

In particular, the Company prioritizes Occupational Health and Safety in its activities. Aside from compliance with the prevailing laws and regulations and other requirements related to Occupational Health and Safety, the Company also prioritizes the stakeholders' rights, among which is Occupational Health





kepentingan sebagai hal yang prioritas, salah satunya adalah K3. Kecelakaan kerja menjadi salah satu sorotan bagi manajemen untuk dapat menentukan keberhasilan pengelolaan Perseroan.

Kepada konsumen, Perseroan berupaya untuk terus meningkatkan mutu produk dan layanan yang diberikan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kepuasan konsumen terus dilakukan oleh Perseroan, baik melalui survei kepuasan dan keterikatan pelanggan, maupun layanan pengaduan atau keluhan atas layanan yang diberikan.

Salah satu komitmen penting dari Perseroan dalam pengelolaan hubungan dengan konsumen atau pelanggan adalah peningkatan *Service Level Agreement* (SLA), maupun upaya sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengaduan jika terjadi pelanggaran etika bisnis dalam pengelolaan operasi di lapangan. Hal ini menjadi penting, tidak hanya untuk memperkuat fondasi GCG Perseroan, namun juga memenuhi hak pelanggan untuk mendapatkan layanan yang prima dan bersih dari praktik-praktik kecurangan.

INFORMASI TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham, Pemerintah Republik Indonesia, No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, pemegang saham melakukan perubahan susunan Direksi Perseroan. Secara khusus, dapat disampaikan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 telah meninggal dunia Direktur Keuangan Henri Panggabean yang baru diangkat pada 22 Juni 2020. Seluruh insan Pelindo 1 berduka atas berpulangnya beliau.

Berikut disampaikan kronologi perubahan susunan Direksi di sepanjang tahun 2020 dan susunan Direksi per 31 Desember 2020.

and Safety. Work accident is highlighted by management as one of the factors determining Company's success in this regard.

As for the customers, the Company endeavors to keep improving the quality of provided goods and services. The Company takes various measures to improve customer satisfaction, among others customer satisfaction and engagement surveys and complaint handling procedures.

One of the most important commitments of the Company with regard to relationship with consumers or customers is improvement in Service Level Agreement (SLA) and awareness campaign intended for the stakeholders encouraging them to submit a complaint should a violation to business ethics occur during the operating management on the field. Not only is this important to strengthen the GCG foundation of the Company, this is also intended to fulfill the customer's rights to receive quality services free of fraud services.

INFORMATION ON CHANGES TO BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

In accordance with Minister of SOE Decision Letter in quality of Representative of the Shareholder, the Government of the Republic of Indonesia, No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020 on the Termination, Change to Position Nomenclature and Appointment of the Members of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Board of Directors, the Shareholder wished to change the composition of the Company's Board of Directors. In particular, due to the fact that the Director of Finance appointed on 22 June 2020, Henri Panggabean, passed away on 30 August 2020. We at Pelindo 1 would like to express our deepest condolences on his passing.

Below is the Chronology of changes to the composition of the Board of Directors in 2020 and the Board of Directors' composition as of 31 December 2020.

KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DI SEPANJANG TAHUN 2020 CHRONOLOGY OF CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS THROUGHOUT

Periode 1 Januari - 22 Juni 2019 1 January - 22 June 2019 Period	Periode 22 Juni - 30 Agustus 2020 22 June - 30 August 2020	Periode 30 Agustus - 22 Oktober 2020 30 August - 22 October 2020 Period	Periode 22 Oktober - 31 Desember 2020 22 October - 31 December 2020 Period	Keterangan Remark
Dian Rachmawan (Direktur Utama) (President Director)				Dian Rachmawan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak 22 Juni 2020 sesuai dengan keputusan pemegang saham. Dian Rachmawan no longer served as President Director since 22 June 2020 in accordance with the decision of the shareholder.

KRONOLOGI PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DI SEPANJANG TAHUN 2020

CHRONOLOGY OF CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS THROUGHOUT

Periode 1 Januari - 22 Juni 2019 1 January - 22 June 2019 Period	Periode 22 Juni - 30 Agustus 2020 22 June - 30 August 2020	Periode 30 Agustus - 22 Oktober 2020 30 August - 22 October 2020 Period	Periode 22 Oktober - 31 Desember 2020 22 October - 31 December 2020 Period	Keterangan Remark
Syahputera Sembiring (Direktur Operasi & Komersial) (Director of Operations and Commercial)				Syahputera Sembiring tidak lagi menjabat sebagai Direktur Operasi & Komersial sejak 22 Juni 2020 sesuai dengan keputusan pemegang saham. Syahputera Sembiring no longer served as Director of Operations and Commercial since 22 June 2020 in accordance with the decision of the shareholder.
Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik) (Director of Engineering)	Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik) (Director of Engineering)	Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik) (Director of Engineering)	Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik) (Director of Engineering)	-
Ihsanuddin Usman (Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis) (Director of Business Transformation & Development)				Ihsanuddin Usman tidak lagi menjabat sebagai Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis sejak 22 Juni 2020 sesuai dengan keputusan pemegang saham. Ihsanuddin Usman no longer served as Director of Business Transformation and Development since 22 June 2020 in accordance with the decision of the shareholder.
M. Hamied Wijaya (Direktur SDM) (Director of HR)				M. Hamied Wijaya tidak lagi menjabat sebagai Direktur SDM sejak 22 Juni 2020 sesuai dengan keputusan pemegang saham. M. Hamied Wijaya no longer served as Director of HR since 22 June 2020 in accordance with the decision of the shareholder.
M. Nur Sodik (Direktur Keuangan) (Director of Finance)				M. Nur Sodik tidak lagi menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak 22 Juni 2020 sesuai dengan keputusan pemegang saham. M. Nur Sodik no longer served as Director of Finance since 22 June 2020 in accordance with the decision of the shareholder.
	Dani Rusli Utama (Direktur Utama) (President Director)	Dani Rusli Utama (Direktur Utama) (President Director)	Dani Rusli Utama (Direktur Utama) (President Director)	Dani Rusli Utama menjabat sebagai Direktur Utama sejak 22 Juni 2020 Dani Rusli Utama has served as President Director since 22 June 2020.
	Ridwan Sani Siregar (Direktur Operasi & Komersial) (Director of Operations & Commercial)	Ridwan Sani Siregar (Direktur Operasi & Komersial) (Director of Operations & Commercial)	Ridwan Sani Siregar (Direktur Operasi & Komersial) (Director of Operations & Commercial)	Ridwan Sani Siregar menjabat sebagai Direktur Operasi & Komersial sejak 22 Juni 2020 Ridwan Sani Siregar has served as Director of Operations & Commercial since 22 June 2020.
	Prasetyo (Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis) (Director of Business Transformation & Development)	Prasetyo (Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis) (Director of Business Transformation & Development)	Prasetyo (Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis) (Director of Business Transformation & Development)	Prasetyo menjabat sebagai Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis sejak 22 Juni 2020 Prasetyo has served as Director of Business Transformation and Development since 22 June 2020.
	Henry Nardi (Direktur SDM & Umum) (Director of HR & General Affairs)	Henry Nardi (Direktur SDM & Umum) (Director of HR & General Affairs)	Henry Nardi (Direktur SDM & Umum) (Director of HR & General Affairs)	Henry Nardi menjabat sebagai Direktur SDM & Umum sejak 22 Juni 2020 Henry Nardi has served as Director of HR & General Affairs since 22 June 2020.
	Henri Panggabean (Direktur Keuangan) (Director of Finance)			<ul style="list-style-type: none"> Henri Panggabean menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak 22 Juni 2020. Pada 30 Agustus 2020, Henri Panggabean meninggal dunia. Henri Panggabean served as Director of Finance since 22 June 2020 On 30 August 2020, Henri Panggabean passed away.
			Roy Leonard (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	Roy Leonard menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak 22 Oktober 2020 Roy Leonard has served as Director of Finance since 22 October 2020.



SUSUNAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2020

BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION AS OF 31 DECEMBER 2020

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Term
Dani Rusli Utama	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 Decision Letter of Minister of SOE in quality of representative of the shareholder No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020	22 Juni 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 22 June 2020 up to the General Meeting of Shareholders to be held in 2025	Ke-1 1 st
Ridwan Sani Siregar	Direktur Operasional & Komersial Director of Operations & Commercial	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 Decision Letter of Minister of SOE in quality of representative of the shareholder No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020	22 Juni 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 22 June 2020 up to the General Meeting of Shareholders to be held in 2025	Ke-1 1 st
Hosadi Apriza Putra	Direktur Teknik Director of Engineering	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-288/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 Decision Letter of Minister of SOE in quality of representative of the shareholder No. SK-288/MBU/11/2018 of 5 November 2018	5 November 2018 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2023 5 November 2018 up to the General Meeting of Shareholders to be held in 2023	Ke-1 1 st
Prasetyo	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Director of Business Transformation and Development	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 Decision Letter of Minister of SOE in quality of representative of the shareholder No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020	22 Juni 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 22 June 2020 up to the General Meeting of Shareholders to be held in 2025	Ke-1 1 st
Henry Naldi	Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Director of Human Resources & General Affairs	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 Decision Letter of Minister of SOE in quality of representative of the shareholder No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020	22 Juni 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 22 June 2020 up to the General Meeting of Shareholders to be held in 2025	Ke-1 1 st
Roy Leonard	Direktur Keuangan Director of Finance	Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-345/MBU/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 Decision Letter of Minister of SOE in quality of representative of the shareholder No. SK-345/MBU/10/2020 of 22 October 2020	22 Oktober 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 22 October 2020 up to the General Meeting of Shareholders to be held in 2025	Ke-1 1 st

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-81/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat Dani Rusli Utama sebagai Direktur Utama Perseroan sesuai dengan keputusan pemegang saham.
- Mengangkat Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Prasetyo menjadi Direktur Utama.
- Mengangkat Joko Noerhudha sebagai Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis yang baru.

Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan pada saat laporan tahunan ini disahkan adalah sebagai berikut.

According to Decision Letter of Ministry of SOE in quality of representative of the shareholder No. SK-81/MBU/03/2021 of 15 March 2021 on the Termination, Transfer of Position and Appointment of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Board of Directors' Members, the shareholder has taken the decision to make changes to the Board of Directors' composition as follows:

- Honorable Discharge of Dani Rusli Utama as Company's President Director in accordance with the decision of the shareholder.
- Appointment of Director of Business Transformation and Development, Prasetyo, as President Director.
- Appointment of Joko Noerhudha as new Director of Business Transformation and Development.

Therefore, the Board of Directors' composition at the time of signing of this annual report is as follows.

SUSUNAN DIREKSI PER 30 APRIL 2021

BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION AS 30 APRIL 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Masa Jabatan Term	Periode Jabatan Period of Term
Prasetyo	Direktur Utama President Director	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai Direktur Utama: Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-81/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 Sebagai Direktur: Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 As President Director: Decision Letter of Minister of SOE in quality of representative of the shareholder No. SK 81/MBU/03/2021 of 15 March 2021 As Director: Decision Letter of Minister of SOE in quality of representative of the shareholder No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020 	<p>15 Maret 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026</p> <p>15 March 2021 up to the General Meeting Shareholder to be held in 2026</p>	Ke-1 1 st
Ridwan Sani Siregar	Direktur Operasional & Komersial Director of Operations & Commercial	<p>Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020</p> <p>Decision Letter of Minister of SOE in quality of representative of the shareholder No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020</p>	<p>22 Juni 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025</p> <p>22 June 2020 up to the General Meeting Shareholder to be held in 2025</p>	Ke-1 1 st
Hosadi Apriza Putra	Direktur Teknik Director of Engineering	<p>Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-288/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018</p> <p>Decision Letter of Minister of SOE in quality of representative of the shareholder No. SK-288/MBU/11/2018 of 5 November 2018</p>	<p>5 November 2018 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2023</p> <p>5 November 2018 up to the General Meeting Shareholder to be held in 2023</p>	Ke-1 1 st
Joko Noerhudha	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Director of Business Transformation and Development	<p>Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-81/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021</p> <p>Decision Letter of Minister of SOE in quality of representative of the shareholder No. SK-81/MBU/03/2021 of 15 March 2021</p>	<p>15 Maret 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026</p> <p>15 March 2021 up to the General Meeting Shareholder to be held in 2026</p>	Ke-1 1 st
Henry Naldi	Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Director of Human Resources & General Affairs	<p>Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020</p> <p>Decision Letter of Minister of SOE in quality of representative of the shareholder No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020</p>	<p>22 Juni 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025</p> <p>22 June 2020 up to the General Meeting Shareholder to be held in 2025</p>	Ke-1 1 st
Roy Leonard	Direktur Keuangan Director of Finance	<p>Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-345/MBU/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020</p> <p>Decision Letter of Minister of SOE in quality of representative of the shareholder No. SK-345/MBU/10/2020 of 22 October 2020</p>	<p>22 Oktober 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025</p> <p>22 October 2020 up to the General Meeting Shareholder to be held in 2025</p>	Ke-1 1 st

Susunan Direksi sepenuhnya menjadi hak dari pemegang saham, Pemerintah Republik Indonesia.

The Government of Republic of Indonesia reserves the right over the Board of Directors' composition.





AKHIR KATA

Atas seluruh kinerja yang telah ditorehkan di tahun 2020 penuh tantangan, izinkan Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris, serta kepada Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih juga diucapkan kepada regulator, pelanggan, investor, pemasok, dan seluruh mitra usaha, atas kerja sama yang telah tercipta. Kepada seluruh insan Pelindo 1, Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras yang telah ditunjukkan. Semoga perjalanan tahun 2020 akan menjadi bahan evaluasi bagi Perseroan, dan mampu menginspirasi seluruh pihak untuk dapat terus mengoptimalkan kemampuannya dan menjadi modal Perseroan untuk dapat tumbuh hingga ke masa-masa yang akan datang.

CONCLUSIONS

The Board of Directors would like to express its gratitude and deepest respect to the Board of Commissioners for the performance in the challenging year of 2020 and to the Ministry of SOE in quality of representative of the shareholder, the Government of the Republic of Indonesia. We would like to express our gratitude to the regulators, customers, investors, suppliers, and business partners for the fruitful collaboration. To the men and women working for Pelindo 1, the Board of Directors would like to express its highest appreciation for the hard work. May the journey in 2020 provide a basis for evaluation for the Company, and inspire all concerned parties to optimize their respective abilities in order to enhance the growth of the Company in future times.

Jakarta, 30 April 2021

Atas nama jajaran Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero),
On behalf of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Board of Directors

Prasetyo
Direktur Utama
President Director

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 April 2021

Anggota Direksi,
Members of the Board of Directors,



PRASETYO
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR



RIDWAN SANI SIREGAR
DIREKTUR OPERASIONAL & KOMERSIAL
DIRECTOR OF OPERATIONS & COMMERCIAL



HOSADI APRIZA PUTRA
DIREKTUR TEKNIK
DIRECTOR OF ENGINEERING



JOKO NOERHUDHA
DIREKTUR TRANSFORMASI DAN
PENGEMBANGAN BISNIS
DIRECTOR OF BUSINESS
TRANSFORMATION AND
DEVELOPMENT



HENRY NALDI
DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA & UMUM
DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES &
GENERAL AFFAIRS



ROY LEONARD
DIREKTUR KEUANGAN
DIRECTOR OF FINANCE





STATEMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS CONCERNING RESPONSIBILITY FOR THE 2020 ANNUAL REPORT PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

We, the undersigned, declare that all the information in the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annual Report 2020 has been completely prepared and are fully responsible for the correctness of the Company's Annual Report.

This statement is made truthfully and to be used accordingly.

Jakarta, 30 April 2021

Anggota Komisaris,
Members of the Board of Commissioners,

ACHMAD DJAMALUDIN
KOMISARIS UTAMA
PRESIDENT COMMISSIONER

ARMAN DEPARI
KOMISARIS
COMMISSIONER

WINATA SUPRIATNA
KOMISARIS
COMMISSIONER

IRMA SURYANI CHANIAGO
KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONER

AHMAD PERWIRA MULIA TARIGAN
KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONER

HERBERT TIMBO PARLUHUTAN SIAHAAN
KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONER





03

— Profil Perusahaan

Company Profile —

Maksud dan tujuan pendirian Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

The purpose and objective of the establishment of the Company is to run the businesses in the field of ports service development and operation, as well as to optimize the utilization of the Company's resources to produce high quality and highly competitive goods and/or services.

IDENTITAS PERUSAHAAN

COMPANY IDENTITY





Nama Perusahaan Company Name	:	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I disingkat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, abbreviated as PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Tanggal Pendirian Date of Establishment	:	1 Desember 1992 1 December 1992
Jenis/Badan Hukum Perusahaan Type of Company	:	Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara Limited Liability Company, State Owned Enterprise
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis	:	Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2- 8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 November 1994, tambahan No. 87. Deed No. 1 1 December 1992 of Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta, approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on Decree No. C2- 8519.HT.01.01 year 1992 dated 1 June 1992 and had been announced in State Gazette Republic of Indonesia No. 8612 1 November 1994, addendum No. 87.
Izin Usaha Business Licence	:	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Badan Usaha pelabuhan yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Minister of Transportation Decree No. KP 133 year 2011 date 2 March 2011 on Business Licencing to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as Port Enterprise effected as port service provider and other business which supports company target achievement.
Bidang Usaha Business Sector	:	Kepelabuhanan Port
Produk dan Jasa Goods & Services	:	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Port Service
Kepemilikan Saham Share Ownership	:	Negara Republik Indonesia : 100% Republic of Indonesia : 100%
Modal Dasar Authorised Capital	:	Rp6.800.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Up Capital	:	Rp1.700.000.000.000
Total Aset Total Assets	:	Rp15.966.142.261.786
Jumlah Karyawan Total Employees	:	1.341 orang (2020) 1,341 employees (2020)
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	:	GRHA Pelindo Satu Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan - 20411 Sumatera Utara – Indonesia Telp. : (+62-61) 41000055 Fax. : (+62-61) 88800059 Surel : pelabuhanan1@pelindo1.co.id Situs Web : http://www.pelindo1.co.id
Kontak Perusahaan Contact	:	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Imron Eryandy E-mail : ierandy@pelindo1.co.id
Whistleblowing System	:	Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) u.p Pengelola Pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan Formulir Pengaduan Online: https://www.pelindo1.co.id/id/gcg/Pages/Form-Pengaduan.aspx Email: pelaporan@pelindo1.co.id PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Board of Directors u.p Report Manager on fraud suspicion Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan Online Complaint Form: https://www.pelindo1.co.id/id/gcg/Pages/Form-Pengaduan.aspx email: pelaporan@pelindo1.co.id
Jaringan Network	:	1 Kantor Pusat, 15 Cabang, 1 Kantor Perwakilan, dan 8 Kawasan 1 Head Office, 15 Branches, 1 Representative, and 8 Areas
Entitas Anak Subsidiaries	:	Entitas Anak: Subsidiaries : <ul style="list-style-type: none">• PT Prima Terminal Petikemas• PT Prima Indonesia Logistik• PT Prima Multi Terminal• PT Prima Pengembangan Kawasan• PT Prima Husada Cipta Medan Kepemilikan Tidak Langsung melalui PT Prima Indonesia Logistik: Indirect Ownership through PT Prima Indonesia Logistik: <ul style="list-style-type: none">• PT Prima Tangki Indonesia• PT Prima Multi Peralatan Entitas Asosiasi: Associated Entity: PT Terminal Petikemas Indonesia

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

COMPANY BRIEF HISTORY

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I disingkat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan Perseroan Terbatas dengan kepemilikan saham 100% oleh Negara Republik Indonesia. Secara resmi, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdiri pada 1 Desember 1992 melalui Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2- 8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 November 1994, tambahan No. 87.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau disebut juga Perseroan memiliki sejarah panjang sejak zaman penjajahan Belanda. Ketika itu, Perseroan bernama "*Haven Bedrijf*". Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada periode 1945-1950, Perseroan berubah status dan nama menjadi Jawatan pelabuhan.

Pada tahun 1969, Jawatan pelabuhan mengalami perubahan status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama Perusahaan Negara pelabuhan disingkat PN pelabuhan. Pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1983, PN pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan pelabuhan disingkat BPP.

Pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1983 BPP, Perseroan berubah menjadi Perseroan Umum pelabuhan I disingkat Perumpel I. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991 Perumpel I kembali berubah nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan nama tersebut berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 November 1994, tambahan No. 87.

Selanjutnya, Anggaran Dasar Perusahaan pun mengalami perubahan, berdasarkan Akta Notaris No. 207 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), yang berisi peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05403.40.20.2014 tertanggal 11 Juli 2014.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I abbreviated as PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), is a Limited Liability Company with 100% share ownership by the Republic of Indonesia. Officially, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) was established on 1 December 1992 with Deed No. 1 of 1 December 1992, attested by Notary Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta, approved by Minister of Justice of Republic of Indonesia by Decree number C2- 8519.HT.01.01 of 1992 dated 1 June 1992, and had been announced in State Gazette of Republic of Indonesia No. 8612 1 November 1994, addendum No. 87.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) or the Company for short, has a long history since the Dutch colonial age. At that time, the Company was called "*Haven Bedrijf*". After the Independence of Indonesia, between 1945-1950, the Company changed status and name into Jawatan pelabuhan.

In 1969, Jawatan pelabuhan changed its status into State Owned Enterprise with status as State Company under the name Perusahaan Negara pelabuhan, abbreviated as PN pelabuhan. Between 1969 to 1983, PN pelabuhan turned into Lembaga Pengusaha pelabuhan under the name Badan Pengusahaan pelabuhan, abbreviated to BPP.

In 1983, based on Government Regulation No. 11 of 1983 BPP, the Company turned into Perseroan Umum pelabuhan I, abbreviated as Perumpel I. Then under Government Regulation No. 56 of 1991, Perumpel I was given another name as PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

The change was based on Deed No. 1 of 1 December 1992 of Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta, approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on Decree No. C2- 8519.HT.01.01 of 1992 dated 1 June 1992 and had been announced in State Gazette Republic of Indonesia No. 8612 1 November 1994, addendum No. 87.

After that, Company's Articles of Association went into another changes based on Notarial Deed No. 207 of 30 June 2014 attested by Risna Rahmi Arifa, S.H., in Medan on the Minutes of General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), which discussed increase in shared capital, allocated capital and fully paid off capital. The change was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in accordance with Regulation No. AHU-05403.40.20.2014 dated 11 July 2014.





Pada tahun 2001, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001, kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham pada Persero/Perusahaan Terbatas dialihkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, sedangkan pembinaan teknis operasional berada di Departemen Perhubungan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

In 2001, based on Government Regulation No. 64 of 2001, the position, duties, and authorities of Minister of Finance as Shareholders on the Company were transferred to the Minister of State Owned Enterprise, while guidance on technical operation falls under the responsibility of the Department of Transportation and performed by General Directorate of Sea Transportation.

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 17 tanggal 13 September 2019 yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris yang berkedudukan di Medan dan telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.0079552.AH.01.02. tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I.

The Company's Articles of Association went through several changes, of which the last change was made according to Deed No. 17 of 13 September 2020 attested by Risna Rahmi Arifa, S.H., Notary in Medan and had been approved with the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia Approval No. AHU.0079552.AH.01.02. of 2019 on Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I Articles of Association changes.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

INFORMATION ON NAME CHANGES

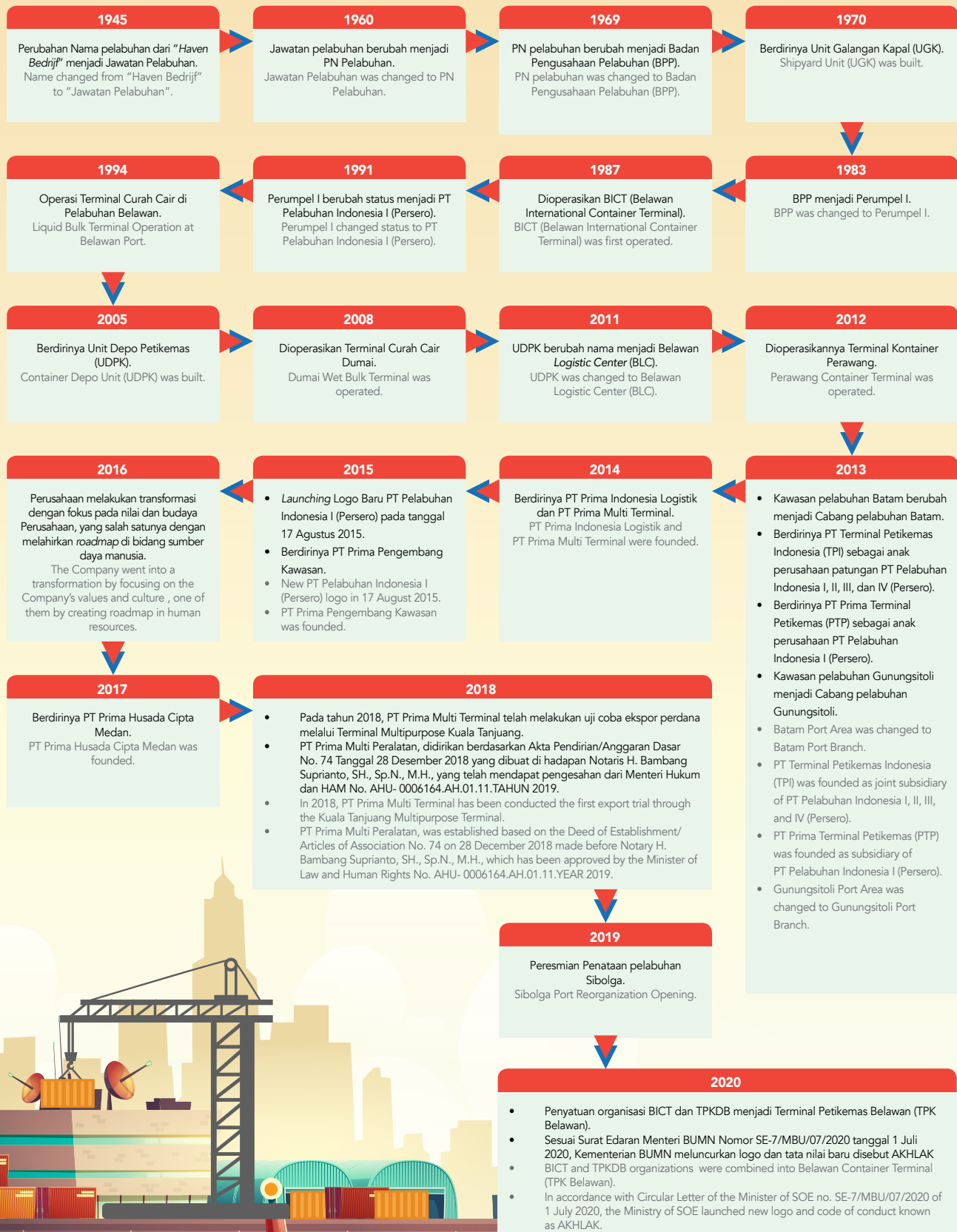
Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi perkembangan Perseroan, maka sejak awal berdiri, Perseroan mengalami beberapa kali perubahan nama, sebagaimana dijelaskan melalui bagan berikut:

Due to social, economic, and political events throughout the Company's history, since its establishment, the Company changed its name several times as explained below:

Penjajahan Belanda Dutch Colonial Era	1945-1950	1969	1969-1983	1983	1992	1998	2008	2019
Haven Bedrijf	Jawatan pelabuhan	Perusahaan Negara pelabuhan (PNP)	Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP)	Perusahaan Umum Pelabuhan I (Perumpel I)	PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I atau disingkat PT Pelabuhan I (Persero)	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I atau disingkat PT Pelindo I (Persero)	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I atau disingkat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

JEJAK LANGKAH

MILESTONES





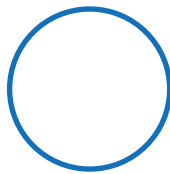
FILOSOFI LOGO PERUSAHAAN

COMPANY LOGO PHILOSOPHY



Logo Pelindo 1 mencerminkan semangat seluruh insan Pelindo 1 dalam melakukan perubahan menuju *Global Company*. Seiring dengan perubahan tersebut, Pelindo 1 terus berupaya mengembangkan bisnis di bidang logistik dan kepelabuhanan dengan berbasis nilai budaya perusahaan yang menjadi spirit kerja Pelindo 1. Adapun filosofis dari logo Pelindo 1 sebagai berikut:

Pelindo 1 reflects the spirits of everybody within in transforming into a *Global Company*. With said transformation, Pelindo 1 is always striving to develop business in with the fields of logistics and port according to the company culture, which is also Pelindo 1 working spirit. The philosophical meaning of Pelindo 1 logo are as follows:



LINGKARAN | CIRCLE

Bentuk ini melambangkan arah perubahan Pelindo 1, yaitu menuju *Global Company*, menjadi salah satu pelabuhan yang mampu melayani pasar global dengan performa terbaik, menyeluruh, dan berdedikasi luhur.

This shape represents Pelindo 1 transformation direction into a *Global Company* by becoming a Port able to serve the global market with the best, comprehensive, and noble performance.



MATA PANAH | ARROW

Terus melakukan perubahan dan bergerak ke depan, melesat, menuju masa depan yang lebih baik.

Keep on changing and moving forward, dashing to a better future.



DYNAMIC MOVEMENT

Gerakan dinamis yang bersinergi untuk terus memberikan *multiplier effects* di bisnis kepelabuhanan dan *logistic*.

Synergised dynamic movement to keep on giving multiplier effects in port and logistics business.

PELINDO 1

INDONESIA GATEWAY

KONSTRUKSI HURUF
LETTER CONSTRUCTION
Keteguhan dan Semangat
Steadfastness and Spirit

NAMA PELINDO 1
PELINDO 1 NAME
Identitas Perusahaan dan Semangat menjadi yang terdepan (nomor 1) di bisnis kepelabuhanan Indonesia.
Company identity and Fervor to be number 1 in Indonesia Port Business.

CAPITAL CASE
Kepercayaan Diri
Confidence

TAGLINE INDONESIA GATEWAY
INDONESIA GATEWAY TAGLINE
Pintu Menghubung Indonesia ke dalam dan luar gerbang pintu masuk Indonesia, penghubung ke jalur perdagangan laut terpadat (Selat Malaka).
Indonesia's gateway in and out and hub to busiest sea trade route (the Strait of Malacca).

WARNA MERAH PUTIH
RED & WHITE COLOUR
Nasionalisme Kerja
Working Nationalism

BIDANG USAHA

BUSINESS AREA

MAKSUD DAN TUJUAN PERUSAHAAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3, maksud dan tujuan pendirian Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

AIMS & OBJECTIVES

In accordance with Articles of Association Article 3, Company Aims & Objectives is through business in port service and resource optimization to produce goods and/or services of high quality and competitive to obtain/pursue profit to increase company value by implementing Limited Liability Company principles.

In order to realize aims & objectives above, the Company provided business activities as follows:

Kegiatan Usaha Business Activities	Telah Dijalankan Carried out	Belum Dijalankan Not yet carried out
Utama Primary		
1. Penyediaan dan/atau jasa pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal. Procuring and/or servicing Port basin and waters for ship traffic and docking.	v	
2. Penyediaan dan/atau jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (<i>pilotage</i>) dan penundaan kapal. Procuring and/or servicing pilotage and towage.	v	
3. Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat Petikemas, curah cair, curah kering, <i>multipurpose</i> , barang termasuk hewan (<i>general cargo</i>), dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan. Procuring and/or servicing docks and other facilities for mooring, container loading/unloading, liquid bulk, dry bulk, multi purpose, general cargo, and passengers and/or vehicles transportation.	v	
4. Penyediaan jasa bongkar muat, Petikemas, curah cair, curah kering (<i>general cargo</i>), dan kendaraan. Loading/unloading, container, liquid bulk, dry bulk, and vehicles service.	v	
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal Petikemas, curah cair, curah kering, <i>multipurpose</i> , penumpang, pelayaran rakyat, dan RO-RO. Procuring and/or servicing container terminal, dry bulk, liquid bulk, multipurpose, passenger, public line, and RO-RO.	v	
6. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. Procuring and/or servicing warehouses and Yard Areas and tanks, port transport, loading/unloading equipment and port equipment.	v	
7. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/ bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda. Procuring and/or servicing land for buildings and fields, industry in line with multi mode transportation flow.	v	
8. Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum, dan instalasi limbah serta pembuangan sampah. Procuring and/or servicing electricity, drinking water, waste installation, and trash disposal.	v	
9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian bahan bakar minyak untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan. Procuring and/or servicing refueling station for ships and vehicles within the Ports.	v	
10. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan. Procuring and/or servicing consolidation and distribution of goods including animals.	v	
11. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan. Procuring and/or servicing consultation, education, and training on Ports.	v	
12. Pengusahaan dan penyelenggaraan Depo Petikemas dan perbaikan, <i>cleaning</i> , fumigasi serta pelayanan logistik. Development and Administration on Container Depo and repairing, cleaning, fumigating and logistics service.	v	

V = Telah dijalankan, X= Belum dijalankan
V = Carried Out, X= Not Yet Carried Out





PRODUK DAN/JASA LAYANAN

Kegiatan usaha berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Badan Usaha pelabuhan yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan meliputi, penyediaan dan/atau pelayanan meliputi:

1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
2. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar minyak dan pelayanan air bersih;
3. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas;
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang, tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
6. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
7. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
8. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang;
9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

PRODUCTS AND/OR SERVICES

Business activities are based on Minister of Transportation Decision No. KP 133 of 2011 dated 2011 on Business Permit for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as Port Business Agency conducting port service and other businesses supporting Company achievements which cover procuring and/or servicing as follows:

1. Docks for mooring;
2. Refueling and clean water service;
3. Passengers and/or vehicles embarkation/disembarkation facilities;
4. Docks for container loading/unloading;
5. Warehousing, stockpiling, loading/unloading equipment and port equipment;
6. Container terminal, liquid bulk, dry bulk, and Ro-Ro Service;
7. Goods loading/unloading;
8. Goods distribution & consolidation center;
9. Ship towage service.

PETA WILAYAH OPERASIONAL DAN FASILITAS PELABUHAN

OPERATIONAL AREA MAP AND PORT FACILITIES

Jangkauan wilayah operasional Pelindo 1 meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Riau, dan Kepulauan Riau. Pelindo 1 mengelola 15 (lima belas) cabang pelabuhan, 8 (delapan) Kawasan pelabuhan, 1 (satu) unit usaha dan 5 (lima) anak perusahaan yang berlokasi di 4 provinsi di Pulau Sumatera, di mana cabang-cabangnya sebagian besar tersebar di Selat Malaka yang merupakan selat tersibuk di dunia. Hinterland Pelindo 1 didominasi oleh produk pertanian, perkebunan dan pertambangan.

Pelindo 1 operational area covers provinces of Aceh, North Sumatera, Riau, and Riau Islands. Pelindo 1 manages 15 Port branches, 8 Port areas, 1 business unit and 5 subsidiaries located in 4 provinces of Sumatera where its branches are located in the Strait of Malacca, the busiest strait in the world. Pelindo 1 hinterland is dominated with agriculture, plantation and mining products.

**PETA JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI
PER 31 DESEMBER 2020**
BUSINESS NETWORK AND OPERATIONAL AREA MAP
PER 31 DECEMBER 2020





TABEL JARINGAN KANTOR SELAMA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR
OFFICE NETWORK IN THE PAST 5 YEARS

Jenis Kantor Type	2020	2019	2018	2017	2016
Kantor Pusat Head Office	1	1	1	1	1
Kantor Cabang Branches	15	16	16	16	17
Kantor Perwakilan Representative	1	1	1	1	1
Unit Usaha Business Unit	1	1	1	1	2
Kawasan Areas	8	8	8	10	11

CABANG PELABUHAN DAN KAWASAN PELINDO 1
PELINDO 1 PORT BRANCHES AND AREAS

	Cabang pelabuhan Port Branch	Kelas Cabang Class	Kawasan Area	Provinsi Province
1	Pelabuhan Belawan Belawan Port	Utama	Pangkalan Susu/Brandan	Sumatera Utara North Sumatera
2	Pelabuhan Dumai Dumai Port	Kelas I	Bagan Siapi-api, Bengkalis	Riau
3	Terminal Petikemas Belawan Belawan Container Terminal	Kelas I	-	Sumatera Utara North Sumatera
4	Pelabuhan Pekanbaru Pekanbaru Port	Kelas II A	-	Riau
5	Pelabuhan Tanjungpinang Tanjungpinang Port	Kelas II B	Sei Kolak Kijang, Tanjung Uban	Kepulauan Riau Riau Islands
6	Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Tanjung Balai Karimun Port	Kelas II B	Selat Panjang	Kepulauan Riau Riau Islands
7	Pelabuhan Kuala Tanjung Kuala Tanjung Port	Kelas II B	-	Sumatera Utara North Sumatera
8	Pelabuhan Batam Batam Port	Kelas III	Pulau Sambu	Kepulauan Riau Riau Islands
9	Pelabuhan Sei Pakning Sei Pakning Port	Kelas III	-	Riau
10	Pelabuhan Sibolga Sibolga Port	Kelas III	-	Sumatera Utara North Sumatera
11	Pelabuhan Malahayati Malahayati Port	Kelas IV	Meulaboh	Aceh
12	Pelabuhan Lhokseumawe Lhokseumawe Port	Kelas IV	Kuala Langsa	Aceh
13	Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Tanjung Balai Asahan Port	Kelas IV	-	Sumatera Utara North Sumatera
14	Pelabuhan Tembilahan Tembilahan Port	Kelas V	Kuala Enok, Rengat	Riau
15	Pelabuhan Gunungsitoli Gunungsitoli Port	Kelas V	-	Sumatera Utara North Sumatera

PROFIL DAN FASILITAS PELABUHAN YANG DIKELOLA OLEH PELINDO 1

PELABUHAN BELAWAN

Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan utama di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan pelabuhan terbesar di Pulau Sumatera. pelabuhan Belawan terletak pada posisi 030-47'-20" LU 980-42'- 08" BT, dengan panjang alur pelayaran 9 mil, pasang surut 3 mLWS, kecepatan arus 0,2-2 knot dan kecepatan angin 4-8 knot. Kantor Kawasan yaitu pelabuhan Pangkalan Susu.

Fasilitas layanan bisnis utama di pelabuhan Belawan adalah terminal curah cair, terminal curah kering, bongkar muat cargo, Petikemas, Terminal Penumpang, jasa pandu dan tunda serta penyewaan lahan, alat, dan gudang di lingkungan pelabuhan.

Fasilitas pelabuhan Belawan:

Panjang Dermaga	: 3.513,96 m
Lapangan Penumpukan	: 137.834,35 m ²
Kedalaman Air	: -3 mLWS s.d. -9 mLWS
Gudang	: 34.350,72 m ²

Alat di pelabuhan Belawan:

- 9 unit *Mobile Crane*
- 1 unit *Mobile Crane Tadano*
- 1 unit *Forklift No. 13*
- 3 unit *Forklift No. 14, 15, dan 16*
- 1 unit *excavator*
- 4 unit *Graps*
- 4 unit *Hopper*
- 5 unit *Dump Truck*

Kapal di pelabuhan Belawan:

- 8 unit Kapal Tunda
- 12 unit Kapal Pandu
- 1 unit Kapal Kepil
- 1 unit Kapal Gandeng
- 1 unit Tongkang Air

Sertifikat:

- ISPS Code;
- Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk Jasa Pelayanan Kapal dan Barang;
- Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 untuk Jasa Pelayanan Kepelabuhanan (Kapal, Barang, dan Penumpang) Bendera Emas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

FACILITIES AND PROFILES OF PORTS MANAGED BY PELINDO 1

BELAWAN PORT

Belawan Port is the main port within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), which is also the largest port in Sumatera Island. This port is located on 030-47'-20" NL 980-42'- 08" EL, with waterway length of 9 miles, tides of 3 mLWS, current velocity of 0,2-2 knots & wind velocity of 4-8 knots. Regional Office is located at Pangkalan Susu Port.

The primary business service facilities in Belawan Port are liquid bulk terminal, dry bulk terminal, cargo loading/unloading, container, passenger terminal, pilotage service, towage service and land, equipment, and warehousing rental within the port area.

Belawan Port Facilities:

Quay Length	: 3,513.96 m
Yard Area	: 137,834.35 m ²
Water Depth	: -3 mLWS to -9 mLWS
Warehouse	: 34,350.72 m ²

Belawan Port Equipments:

- 9 Mobile Cranes
- 1 Mobile Crane Tadano
- 1 Forklift No. 13
- 3 Forklift No. 14, 15, and 16
- 1 excavator
- 4 Graps
- 4 Hoppers
- 5 Dump Trucks

Belawan Port Boats:

- 8 Tugboats
- 12 Pilot Boats
- 1 Mooring Boat
- 1 Trailer Boat
- 1 Barge

Certificates:

- ISPS Code;
- ISO 9001:2015 Quality Management for Ship & Goods Service;
- ISO 14001:2015 Environment Management for Port Service (Ship, Goods, and Passengers) Occupational Safety & Health System Gold Flag.





TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN

Terminal Petikemas Belawan (TPK Belawan) adalah terminal kontainer terbesar di Sumatera baik untuk kegiatan internasional maupun domestik. Berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), No. PR.02/1/6/P1-20.TU, tanggal 06 Januari 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja TPK Belawan. TPK Belawan merupakan gabungan dari dua Cabang Pelindo 1 yaitu Belawan International Container Terminal (BICT) dan Terminal Petikemas Domestik Belawan (TPKDB) terletak di pelabuhan Belawan pada posisi 03°-43'-00" LU & 98°-42'-08" BT, dengan panjang alur pelayaran 9 mil, pasang surut 3 mLWS, kecepatan arus 0,2-2 knot dan kecepatan angin 4-8 knot.

Fasilitas TPK Belawan:

Panjang Dermaga	: 950 m
Lapangan Penumpukan	: 257.871 m ²
Kedalaman Air	: -7 mLWS s.d. -10 mLWS
Gudang	: -

Alat di TPK Belawan:

- 6 unit *Container Crane* No. 01,07,08,09,10 dan 11 (TPK-A)
- 4 unit *Container Crane* No. 02,03,12 dan 13 (TPK-B)
- 2 unit *Container Crane* No. 05 dan 06 (TPK-B)
- 20 unit *Terminal Tractor* (TPK-A)
- 20 unit *Terminal Tractor* (TPK-B)
- 10 unit *Headtruck* (TPK-A)
- 3 unit *Headtruck* Ferari No. 15, 18 dan 19 (TPK-A)
- 18 unit *Headtruck* (TPK-B)
- 16 unit *Rubber Tyred Gantry Crane* (TPK-A)
- 2 unit *Rubber Tyred Gantry Crane* (TPK-A)
- 9 unit *Rubber Tyred Gantry Crane* (TPK-B)
- 3 unit *Rubber Tyred Gantry Crane* (TPK-A)
- 1 unit *Reach Stacker* No. 02 (TPK-A)
- 1 unit *Reach Stacker* No. 05 (TPK-A)
- 1 unit *Reach Stacker* No. 08 (TPK-B)
- 1 unit *Reach Stacker* No. 10 (TPK-B)
- 1 unit *Reach Stacker* No. 06 (TPK-B)
- 1 unit *Side Loader* (TPK-A)
- 1 unit *Side Loader* (TPK-B)
- 1 unit *Side Loader* (TPK-B)
- 2 unit *Forklift* (1 TPK-A dan 1 TPK-B)
- 1 unit *Harbour Mobile Crane*

Sertifikat:

- ISPS Code;
- Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk Jasa Pengelolaan Terminal Internasional Petikemas;
- Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 untuk Jasa Pelayanan Bongkar Muat Petikemas;
- Sertifikat Bendera Perak Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BELAWAN CONTAINER TERMINAL

Belawan Container Terminal (TPK Belawan) is the largest container terminal in Sumatera both for international & domestic activities. Based on Directors' Orders PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), No. PR.02/1/6/P1-20.TU of 06 January 2020 on Belawan Container Terminal Organization and Workflow. Belawan Container Terminal is a combination from 2 Pelindo 1 branches namely Belawan International Container Terminal (BICT) and Belawan Domestic Container Terminal (TPKDB) located in Belawan Port on coordinate 03°-43'-00" NL & 98°-42'-08" EL, with waterway length of 9 miles, 3 mLWS tide, current velocity of 0,2-2 knots and wind velocity of 4-8 knots.

Belawan Facilities:

Quay Length	: 950 m
Yard Area	: 257.871 m ²
Water Depth	: -7 mLWS s.d. -10 mLWS
Warehouse	: -

Equipments of TPK Belawan:

- 6 *Container Cranes* No. 01, 07, 08, 09, 10 & 11 (TPK-A)
- 4 *Container Cranes* No. 02, 03, 12 & 13 (TPK-B)
- 2 *Container Cranes* No. 05 & 06 (TPK-B)
- 20 *Terminal Tractors* (TPK-A)
- 20 *Terminal Tractors* (TPK-B)
- 10 *Headtrucks* (TPK-A)
- 3 *Ferari Headtrucks* No. 15, 18 & 19 (TPK-A)
- 18 *Headtrucks* (TPK-B)
- 16 *Rubber Tyred Gantry Cranes* (TPK-A)
- 2 *Rubber Tyred Gantry Cranes* (TPK-A)
- 9 *Rubber Tyred Gantry Cranes* (TPK-B)
- 3 *Rubber Tyred Gantry Cranes* (TPK-A)
- 1 *Reach Stacker* No. 02 (TPK-A)
- 1 *Reach Stacker* No. 05 (TPK-A)
- 1 *Reach Stacker* No. 08 (TPK-B)
- 1 *Reach Stacker* No. 10 (TPK-B)
- 1 *Reach Stacker* No. 06 (TPK-B)
- 1 *Side Loader* (TPK-A)
- 1 *Side Loader* (TPK-B)
- 1 *Side Loader* (TPK-B)
- 2 *Forklifts* (1 at TPK-A and 1 at TPK-B)
- 1 *Harbour Mobile Crane*

Certificates:

- ISPS Code;
- ISO 9001:2008 Quality Management for International Container Terminal Management Service;
- ISO 14001:2004 Environment Management for Container Loading/Unloading Service;
- Occupational Safety & Health System Silver Flag.

PELABUHAN DUMAI

Pelabuhan Dumai terletak pada posisi 01°-41'-14" LU & 101°-27'-42,1" BT, dengan panjang alur pelayaran 55 mil, pasang surut 3,4 mLWS, kecepatan arus 2,5-3 knot dan kecepatan angin 8-20 knot.

Pelabuhan Dumai mempunyai komoditi dominan adalah CPO (*Crude Palm Oil*) dan turunannya serta komoditi curah kering yaitu PKE (*Palm Kernel Expeller*), PKS (*Palm Kernel Shell*) serta pupuk.

Pelabuhan Dumai memiliki kantor kawasan yaitu pelabuhan Bengkalis.

Fasilitas pelabuhan Dumai:

Panjang Dermaga	: 2.063 m
Lapangan Penumpukan	: 51.722 m ²
Kedalaman Air	: -2 mLWS s.d. -13 mLWS
Gudang	: 36.262 m ²

Alat Produksi di pelabuhan Dumai:

- 1 unit *Harbour Mobile Crane*
- 2 unit *Mobile Crane (Sennebogen)*
- 1 unit *Mobile Crane (grove)*
- 2 unit *Mobile Crane*
- 1 unit *Reach Stacker*
- 3 unit *Forklift*
- 1 unit *Forklift*
- 4 unit *Excavator*
- 8 unit *Wheel Loader*
- 2 unit *Wheel Loader*
- 13 unit *Dump Truck*
- 1 unit *Mini Dozer*
- 1 unit *Grap*
- 1 unit *Hopper*
- 3 unit *Portable Conveyor*

Kapal di pelabuhan Dumai:

- 9 unit *Kapal Tunda*
- 8 unit *Kapal Pandu*
- 1 unit *Speed Boat*

Sertifikat:

- ISPS Code: SoCPF;
- Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk Jasa Pelayanan Kapal dan Barang;
- Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 untuk Jasa Pelayanan Kepelabuhanan (Kapal, Barang dan Penumpang);
- OHSAS 18001:2007;
- Bendera Emas & Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

DUMAI PORT

Dumai Port is located in coordinate of 01°-41'-14" LU & 101°-27'-42.1" EL, with waterway length of 55 miles, 3.4 mLWS tide, current velocity of 2.5-3 knot & wind velocity of 8-20 knot.

Dumai Port has dominant commodities like CPO (*Crude Palm Oil*) and its derivatives and also dry bulk commodities like PKE (*Palm Kernel Expeller*), PKS (*Palm Kernel Shell*), and fertilizers.

Dumai Port regional office is located at Bengkalis Port.

Dumai Port Facilities:

Quay Length	: 2,063 m
Yard Area	: 51,722 m ²
Water Depth	: -2 mLWS to -13 mLWS
Warehouse	: 36,262 m ²

Production Equipments in Dumai Port:

- 1 *Harbour Mobile Crane*
- 2 *Mobile Cranes (Sennebogen)*
- 1 *Mobile Crane (grove)*
- 2 *Mobile Cranes*
- 1 *Reach Stacker*
- 3 *Forklifts*
- 1 *Forklift*
- 4 *Excavators*
- 8 *Wheel Loaders*
- 2 *Wheel Loaders*
- 13 *Dump Trucks*
- 1 *Mini Dozer*
- 1 *Grap*
- 1 *Hopper*
- 3 *Portable Conveyors*

Dumai Port Boats:

- 9 *Tug Boats*
- 8 *Pilot Boats*
- 1 *Speed Boat*

Certificates:

- ISPS Code: SoCPF;
- ISO 9001 Quality Management: 2015 for Ship & Goods Service;
- ISO 14001 Environment Management: 2015 for Port Service (Ships, Goods & Passengers);
- OHSAS 18001:2007;
- Occupational Safety & Health System Gold Flag.





PELABUHAN PEKANBARU

Pelabuhan Pekanbaru terletak di dalam kota yang merupakan pelabuhan sungai. Pelabuhan Pekanbaru berada di posisi 00°-32'-30" LU & 101°-26'-30"BT, dengan panjang alur pelayaran 96 mil, pasang surut 3,4 mLWS, kecepatan arus 2,5 knot, dan kecepatan angin 5-15 knot.

Pelabuhan Pekanbaru memiliki Terminal Petikemas Perawang.

Fasilitas pelabuhan Pekanbaru:

Panjang Dermaga	: 468 m
Lapangan Penumpukan	: 45.244 m ²
Kedalaman Air	: -5 mLWS s.d. -9 mLWS
Gudang	: 600 m ²

Alat di pelabuhan Pekanbaru:

- 1 unit *Mobile Crane (Sennebogen)*
- 1 unit *Harbour Mobile Crane*
- 10 unit *Headtruck* No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 35, 53, 57, dan 59
- 6 unit *Headtruck* No. 24, 33, 37, 39, 41, dan 45
- 2 unit *Reach Stacker* No. 01 dan 03
- 1 unit *Reach Stacker* No. 04
- 1 unit *Side Loader*
- 2 unit *Forklift*
- 1 unit *Portable Conveyor*

Kapal di pelabuhan Pekanbaru:

- 1 unit *Speed Boat*
- 1 unit *Pilot Boat*

Sertifikat:

- ISPS Code;
- Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk Jasa Pelayanan Kapal dan Barang;
- Bendera Perak Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PELABUHAN MALAHAYATI

Pelabuhan Malahayati terletak di Teluk Krueng Raya Pantai Utara Aceh. Secara administratif pelabuhan ini berada di Kabupaten Aceh Besar berjarak 38 km dari Kota Banda Aceh.

Pelabuhan Malahayati berada di posisi 05°-36'-50" LU & 95°-30'-50" BT, dengan pasang surut 2 mLWS, kecepatan arus 0,5-0,7 knot dan kecepatan angin 4-16 knot.

Fasilitas pelabuhan Malahayati:

Panjang Dermaga	: 380 m
Lapangan Penumpukan	: 33.319 m ²
Kedalaman Air	: -5 mLWS s.d. -9 mLWS
Gudang	: 800 m ²

PEKANBARU PORT

Pekanbaru Port is located in a river port city. It is located in coordinate 00°- 32'-30" NL & 101°-26'-30" EL, with waterway length of 96 miles, 3.4 mLWS tide, current velocity of 2.5 knot, & wind velocity of 5-15 knot.

Pekanbaru Port has Perawang Container Terminal.

Pekanbaru Port Facilities:

Quay Length	: 468 m
Yard Area	: 45,244 m ²
Water Depth	: -5 mLWS to -9 mLWS
Warehouse	: 600 m ²

Pekanbaru Port Equipments:

- 1 Mobile Crane (Sennebogen)
- 1 Harbour Mobile Crane
- 10 Headtrucks No. 01,02,03,04,05,06,35,53,57, and 59
- 6 Headtrucks No. 24,33,37,39,41, and 45
- 2 Reach Stackers No. 01 & 03
- 1 Reach Stacker No.04
- 1 Side Loader
- 2 Forklifts
- 1 Portable Conveyor

Pekanbaru Port Boats:

- 1 Speed Boat
- 1 Pilot Boat

Certificates:

- ISPS Code;
- ISO 9001:2008 Quality Management for Ship & Goods Service;
- Occupational Safety & Health System Silver Flag.

MALAHAYATI PORT

Malahayati Port is located in Krueng Raya Port, Aceh Northern Beach. This port is situated in Greater Aceh Regency, 38 km from Banda Aceh.

Malahayati Port is located at 05°-36'-50" NL & 95°-30'-50" EL, with 2 mLWS tide, current velocity of 0.5-0.7 knot & wind velocity of 4-16 knots.

Malahayati Port Facility:

Quay Length	: 380 m
Yard Area	: 33,319 m ²
Water Depth	: -5 mLWS to -9 mLWS
Warehouse	: 800 m ²

Alat di pelabuhan Malahayati:

- 1 unit *Harbour Mobile Crane*
- 4 unit *Headtruck*
- 2 unit *Headtruck* (bantuan)
- 1 unit *Reach Stacker* (bantuan)
- 1 unit *Mobile Crane*
- 6 unit *Forklift*
- 3 unit *Forklift* (bantuan)
- 2 unit *Forklift*
- 1 unit *Mobile Crane* (Meulaboh) bantuan
- 2 unit *Forklift* (Meulaboh) bantuan Kapal di pelabuhan Malahayati
- 1 unit Kapal Tunda 2.400 HP

Pelabuhan Malahayati memiliki kawasan yaitu pelabuhan Meulaboh.

Alat di pelabuhan Meulaboh:

- 1 unit *Mobile Crane*
- 2 unit *Forklift*

Sertifikat:

- ISPS Code

PELABUHAN SIBOLGA

Pelabuhan Sibolga berada pada posisi 01°-44'-23" LU & 98°-46'-04" BT, dengan pasang surut 1,4 mLWS, kecepatan arus 0,1-0,2 knot dan kecepatan angin 4-10 knot.

Kegiatan utama pelabuhan ini selain melayani angkutan barang juga menghubungkan jalur *ferry* ke daerah kunjungan wisata Pulau Nias. Komoditi dominan dari daerah *hinterland*-nya adalah karet, kopra, *polywood* serta bungkil.

Fasilitas pelabuhan Sibolga:

Panjang Dermaga	: 213,5 m
Lapangan Penumpukan	: 6.061 m ²
Kedalaman Air	: -5 mLWS s.d. -9 mLWS
Gudang	: 2.984,88 m ²

Alat pelabuhan Sibolga:

- 1 unit *Fix Crane*

PELABUHAN TEMBILAHAN

Pelabuhan Tembilahan berada di Kabupaten Indragiri Hilir, ±600 km dari Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru. pelabuhan Tembilahan berada pada posisi 00°-19'-30" LS & 103°-09'-41" BT dengan pasang surut 6 mLWS, kecepatan arus 3,5 knot dan kecepatan angin 3-16 knot.

Malahayati Port Equipments:

- 1 Harbour Mobile Crane
- 4 Headtrucks
- 2 Headtrucks (loan)
- 1 Reach Stacker (loan)
- 1 Mobile Crane
- 6 Forklifts
- 3 Forklifts (loan)
- 2 Forklifts
- 1 Mobile Crane (meulaboh)
- 2 Forklifts (Meulaboh)
- 1 Tug Boat 2,400 HP

Malahayati Port has a regional port which is Meulaboh Port.

Meulaboh Port Equipment:

- 1 Mobile Crane
- 2 Forklifts

Certificate:

- ISPS Code

SIBOLGA PORT

Sibolga Port is located in 01°-44'-23" NL & 98°-46'-04" EL, with 1.4 mLWS tide, current velocity of 0.1-0.2 knot & wind velocity of 4-10 knots.

The primary activity of this port, aside from accommodating goods transport, is also serving ferry lines to Nias Island tourism area. The dominant commodities from its hinterland are rubber, kopra, *polywood* & cotton seed.

Sibolga Port Facility:

Quay Length	: 213.5 m
Yard Area	: 6,061 m ²
Water Depth	: -5 mLWS to -9 mLWS
Warehouse	: 2,984.88 m ²

Sibolga Port Equipment:

- 1 Fix Crane

TEMBILAHAN PORT

Tembilahan Port is located in Indragiri Hilir County, ±600 km from Riau Province Capital of Pekanbaru. Tembilahan Port is located on coordinate 00°-19'-30" SL & 103°-09'-41" EL with 6 mLWS tide, current velocity of 3.5 knots & wind velocity of 3-16 knots.





Daerah *hinterland*nya potensial untuk industri perkebunan kelapa sawit. Jenis komoditi yang dikapalkan melalui pelabuhan ini antara lain kopra, karet, gapek, minyak kelapa sawit, dan *moulding*. pelabuhan Tembilahan memiliki Kantor kawasan yaitu pelabuhan Kuala Enok dan pelabuhan Rengat.

Fasilitas pelabuhan Tembilahan:

Panjang Dermaga	: 225 m
Lapangan Penumpukan	: 2.500 m ²
Kedalaman Air	: -3 mLWS s.d. -11 mLWS
Gudang	: 850 m ²

PELABUHAN TANJUNG BALAI ASAHAN

Pelabuhan Tanjung Balai Asahan terletak berhadapan langsung dengan pelabuhan negara tetangga Malaysia atau Port Klang. pelabuhan Tanjung Balai Asahan berada pada posisi 02°-28'-00" LU & 99°-48'-00" BT, dengan pasang surut 3 mLWS, kecepatan arus 1,5-3 knot dan kecepatan angin 1-16 knot.

Fasilitas pelabuhan Tanjung Balai Asahan:

Panjang Dermaga	: 364 m
Lapangan Penumpukan	: 7.700 m ²
Kedalaman Air	: -2 mLWS s.d. -4 mLWS
Gudang	: 3.820 m ²

Sertifikat:

- ISPS Code

PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berada pada titik koordinat 00°-59'-17" LU & 103°-26'-14" BT. pelabuhan ini berada pada posisi dan pasang surut 3,6 mLWS.

Pelabuhan ini berada di Pulau Karimun yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Singapura. Perairan ini merupakan salah satu area pelayaran terpadat dan tersibuk di dunia. pelabuhan Tanjung Balai Karimun mempunyai Kantor Kawasan yaitu pelabuhan Selat Panjang.

Fasilitas pelabuhan Tanjung Balai Karimun:

Panjang Dermaga	: 154 m
Lapangan Penumpukan	: -
Kedalaman Air	: -3 mLWS s.d. -9 mLWS
Gudang	: 1.200 m ²

Kapal di pelabuhan Tanjung Balai Karimun:

- 2 unit Kapal Pandu
- 2 unit Kapal Tunda

Sertifikat:

- ISPS Code

Its *hinterland* has the potential for palm plantation industry. Commodities shipped through this port are copra, rubber, gapek, palm oil, and moulding. Tembilahan Port has regional offices in Kuala Enok Port & Rengat Port.

Tembilahan Port Facilities:

Quay Length	: 225 m
Yard Area	: 2,500 m ²
Water Depth	: -3 mLWS to -11 mLWS
Warehouse	: 850 m ²

TANJUNG BALAI ASAHAN PORT

Tanjung Balai Asahan is located directly facing Malaysia's Port Klang. Tanjung Balai Asahan is located on coordinates of 02°-28'-00" NL & 99°-48'-00" BT, with 3 mLWS tide, current velocity of 1.5-3 knots & wind velocity of 1-16 knots.

Tanjung Balai Asahan Port Facilities :

Quay Length	: 364 m
Yard Area	: 7,700 m ²
Water depth	: -2 mLWS to -4 mLWS
Warehouse	: 3,820 m ²

Certificate:

- ISPS Code

TANJUNG BALAI KARIMUN PORT

Tanjung Balai Karimun Port is located on coordinates of 00°-59'-17" NL & 103°-26'-14" EL. This port's tide is at 3.6 mLWS.

This port is located on Karimun Island which is directly adjacent to the Strait of Malacca and Singapore Strait. These waters are one of the most crowded and busiest sailing areas in the world Tanjung Balai Karimun Port has a regional office in Selat Panjang Port.

Tanjung Balai Karimun Port Facilities:

Quay Length	: 154 m
Yard Area	: -
Water Depth	: -3 mLWS to -9 mLWS
Warehouse	: 1,200 m ²

Tanjung Balai Karimun Port Boats:

- 2 Pilot Boats
- 2 Tug Boats

Certificate:

- ISPS Code

PELABUHAN SEI PAKNING

Pelabuhan Sei Pakning berada di posisi 00° 32' 30" LU & 101° 26' 30" BT dan pasang surut 3,6 mLWS.

Fasilitas pelabuhan Sei Pakning:

Panjang Dermaga : 30 m
Lapangan Penumpukan : -
Kedalaman Air : -

Kapal di pelabuhan Sei Pakning:

- 2 unit Kapal Pandu

Sertifikat :

- ISPS Code Compliant

PELABUHAN TANJUNGPINANG

Pelabuhan Tanjungpinang terdiri dari pelabuhan Sri Bintang Pura, Pelabuhan Sri Payung Batu Anam dan Pelabuhan Sei Kolak Kijang.

Pelabuhan Sri Bintang Pura posisi 00055'55" LU, 104046'00" BT, dengan pasang surut 2,6 mLWS, kecepatan arus 0,9-1 knot dan kecepatan angin 5-15 knot, panjang dermaga 120 m, kedalaman -3,5 s.d. -4 mLWS.

Pelabuhan Sri Payung Batu Anam berada pada posisi 00055'40" LU, 104028'40" BT, dengan pasang surut 2,6 mLWS, kecepatan arus 0,9-1 knot dan kecepatan angin 5-15 knot, panjang dermaga 210,25 m, kedalaman -3,5 s.d. -4 mLWS, dan gudang 2.000 m².

Pelabuhan Sei Kolak Kijang berada pada posisi 00051'55" LU, 104036'55" BT dengan pasang surut 2,6 mLWS, kecepatan arus 0,9-1 knot dan kecepatan angin 5-15 knot, panjang dermaga 330 m dan kedalaman -9 mLWS.

Fasilitas di pelabuhan Tanjungpinang:

Panjang Dermaga : 650 m
Lapangan Penumpukan : 7.263 m²
Kedalaman Air : -3 mLWS s.d. -9 mLWS
Gudang : 2.000 m²

Peralatan di pelabuhan Tanjungpinang:

- 4 unit Headtruck
- 2 unit Mobile Crane
- 1 unit Mobile Crane
- 2 unit Forklift Diesel
- 3 unit Forklift Diesel
- 1 unit Reach Stacker No. 01
- 1 unit Reach Stacker No. 03
- 1 unit Fix Crane

SEI PAKNING PORT

Sei Pakning Port is located on the coordinates of 00° 32' 30" NL & 101° 26' 30" EL with 3.6 mLWS tide.

Sei Pakning Port Facilities:

Quay Length : 30 m
Yard Area : -
Water Depth : -

Sei Pakning Boats:

- 2 Pilot Boats

Certificate:

- ISPS Code Compliant

TANJUNGPINANG PORT

Tanjungpinang Port comprises Sri Bintang Pura Port, Sri Payung Batu Anam Port and Sei Kolak Kijang Port.

Sri Bintang Pura is at 00055'55" NL, 104046'00" EL, with 2.6 mLWS tide, current velocity of 0.9-1 knot & wind velocity of 5-15 knots, Quay Length of 120 m, water depth of -3.5 to -4 mLWS.

Sri Payung Batu Anam is at 00055'40" NL, 104028'40" EL, with 2.6 mLWS tide, current velocity of 0.9-1 knot and wind velocity of 5-15 knots, Quay Length of 210.25 m, water depth of -3.5 to -4 mLWS, and 2,000 m² warehouse.

Sei Kolak Kijang Port is located at 00051'55" NL, 104036'55" EL with 2.6 mLWS tide, current velocity of 0.9-1 knot & wind velocity of 5-15 knots, Quay Length of 330 m & water depth of -9 mLWS.

Tanjungpinang Port Facilities:

Quay Length : 650 m
Yard Area : 7,263 m²
Water Depth : -3 mLWS to -9 mLWS
Warehouse : 2,000 m²

Tanjungpinang Port Equipments:

- 4 Headtrucks
- 2 Mobile Cranes
- 1 Mobile Crane
- 2 Diesel Forklifts
- 3 Diesel Forklifts
- 1 Reach Stacker No. 01
- 1 Reach Stacker No. 03
- 1 Fix Crane





Kapal di pelabuhan Tanjungpinang:

- 1 unit Kapal Pandu
- 1 unit Kapal Patroli

Sertifikat:

- ISPS Code;
- Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
- Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
- Sertifikat Bendera Emas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PELABUHAN KUALA TANJUNG

Pelabuhan Kuala Tanjung berada pada posisi 03° 22' 30" LU & 99° 26' 00" BT, dengan pasang surut 3,2 mLW dan kecepatan arus 1,5 knot.

Pelabuhan Kuala Tanjung terletak di Selat Malaka dan merupakan Jalur *Main Line Operator* (MLO). Arus petikemas yang menyinggahi Selat Malaka setiap tahunnya mencapai 80 juta TEUs dan merupakan pasar *transshipment* yang potensial.

Pelabuhan Kuala Tanjung akan berperan sebagai Pintu Masuk Pulau Sumatera dan pelabuhan *Hub* Internasional Indonesia Bagian Barat. Kuala Tanjung akan menjadi salah satu kawasan pelabuhan dan Industri terbesar di Indonesia.

Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dilakukan secara bertahap. Pembangunan tahap I merupakan terminal *multipurpose* yang berkapasitas 600.000 TEUs, tahap II Pengembangan Kawasan Industri 3.000 Ha, tahap III Pengembangan *Dedicated/Hub Port* dan tahap IV Pengembangan Kawasan Industri Terintegrasi.

Fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung:

Panjang Dermaga : 500 m
Lapangan Penumpukan : 60.000 m²
Kedalaman : 17 mLWS

Kapal di Pelabuhan Kuala Tanjung:

- 1 unit Kapal Pandu
- 1 unit Kapal Tunda

Sertifikat:

- ISPS Code

Tanjungpinang Port Boats:

- 1 Pilot Boat
- 1 Patrol Boat

Certificate:

- ISPS Code;
- ISO 9001:2015 Quality Management for Port Service;
- ISO 14001:2015 Environment Management for Port Service (Ship, Goods & Passengers);
- Occupational Safety & Health System Gold Flag.

KUALA TANJUNG PORT

Kuala Tanjung Port is located at coordinates of 03° 22' 30" NL & 99° 26' 00" EL, with a tide of 3.2 mLW and current velocity of 1.5 knots.

Kuala Tanjung Port is located at Malacca Strait and is a Main Line Operator. Container flow to Malacca Strait reached 80 million TEUs annually, making it a potential transshipment market.

Kuala Tanjung Port will play a role as Sumatera's entrance and Western Indonesia International Hub. Kuala Tanjung will be one of the largest Port and Industrial areas in Indonesia.

Kuala Tanjung Port will be developed periodically. Phase I is multipurpose terminal with 600,000 TEUs, phase II is 3,000 Ha Industrial Area construction, phase III is Dedicated Hub Port construction and phase IV is Integrated Industrial Area construction.

Kuala Tanjung Port Facilities:

Quay Length : 500 m
Yard Area : 60,000 m²
Depth : 17 mLWS

Kuala Tanjung Port Boats:

- 1 Pilot Boat
- 1 Tug Boat

Certificate:

- ISPS Code

PELABUHAN LHOKEUMAWE

Pelabuhan Lhokseumawe berada pada posisi 05°-10'-00" LU & 97°-02'-00" BT dengan pasang surut 2 mLWS dan kecepatan arus 1,46 knot. Bernama lengkap pelabuhan Krueng Geukueh Lhokseumawe, pelabuhan ini beroperasi sejak 1994, serta melayani komoditas utama berupa LNG, kondensat, pupuk, amonia, kertas, pinang. Serta memiliki tiga dermaga: *Multipurpose*, *Curah Kering*, dan *Curah Cair*.

Fasilitas pelabuhan Lhokseumawe:

Panjang Dermaga	: 854 m
Lapangan Penumpukan	: 25.158 m ²
Kedalaman	: -7 mLWS s.d. -11 mLWS
Gudang	: 2.600 m ²

Alat di pelabuhan Lhokseumawe:

- 1 unit *Reach Stacker*
- 1 unit *Mobile Crane*
- 5 unit *Forklift Diesel*
- 1 unit *Forklift Diesel*
- 2 unit *Forklift* (Langsa)

Kapal di pelabuhan Lhokseumawe:

- 1 unit Kapal Tunda
- 2 unit Kapal Pandu
- 1 unit Kapal Kepil

Pelabuhan Lhokseumawe memiliki kawasan yaitu pelabuhan Kuala Langsa.

Fasilitas pelabuhan Kuala Langsa:

Panjang dermaga	: 300 m
Lapangan Penumpukan	: 1.000 m ²
Gudang	: 3.500 m ²

Sertifikat:

- ISPS Code

CABANG BATAM

Posisi Pelindo 1 Cabang Batam yang terletak sangat strategis ini berada di jalur (Pertemuan) lintas pelayaran dunia yaitu Selat Malaka. Pelayanan Bisnis Utama cabang ini adalah *Marine Service* yaitu Pemanduan, Penundaan, dan *Ship to Ship* (STS) di berbagai perairan pelabuhan di wilayah Batam. pelabuhan Batam mempunyai Kantor Kawasan di Kawasan pelabuhan Sambu.

Pelabuhan Batam resmi menjadi cabang pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada tanggal 28 Januari 2013. Sebelumnya pelabuhan Batam adalah kantor kawasan pelabuhan Tanjungpinang.

LHOKEUMAWE PORT

Lhokseumawe is located on coordinates of 05°-10'-00" NL & 97°-02'-00" EL with 2 mLWS tide & current velocity of 1.46 knots. Its full name is Krueng Geukueh Lhokseumawe Port. This port has been operating since 1994 and it serves main commodities like LNG, condensates, fertilizers, ammonia, paper & arecas. It has 3 docks: *Multipurpose*, *Liquid Bulk*, and *Dry Bulk* docks.

Lhokseumawe Port Facilities:

Quay Length	: 854 m
Yard Area	: 25,158 m ²
Depth	: -7 mLWS to -11 mLWS
Warehouse	: 2,600 m ²

Lhokseumawe Port Equipments:

- 1 *Reach Stacker*
- 1 *Mobile Crane*
- 5 *Diesel Forklifts*
- 1 *Diesel Forklift*
- 2 *Forklifts* (Langsa)

Lhokseumawe Port Boats:

- 1 *Tug Boat*
- 2 *Pilot Boats*
- 1 *Mooring Boat*

Lhokseumawe Port has a regional office in Kuala Langsa Port.

Kuala Langsa Port Facilities:

Quay Length	: 300 m
Yard Area	: 1,000 m ²
Warehouse	: 3,500 m ²

Certificate:

- ISPS Code

BATAM BRANCH

Pelindo 1 Batam Branch is strategically located in world transport line junction of Malacca Strait. This branch main service are *Marine Services* like *Pilotage*, *Towage*, and *Ship to Ship* (STS) in various water ports in Batam region. Batam Port has a regional office in Sambu Port Region.

Batam Port became an official branch of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) on 28 January 2013. Previously, the regional office was in Tanjungpinang Port.





Kapal di pelabuhan Batam:

- 5 unit Kapal Pandu
- 1 unit *Speed Boat*
- 3 unit Kapal Tunda

PELABUHAN GUNUNGSITOLI

Pelabuhan Gunungsitoli resmi menjadi cabang pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada tahun 2013. Sebelumnya pelabuhan Gunungsitoli sebagai kawasan pelabuhan Sibolga.

Fasilitas pelabuhan Gunungsitoli:

Panjang Dermaga	: 292 m
Lapangan Penumpukan	: 3.081 m ²
Kedalaman Air	: -8 mLWS s.d. -16 mLWS
Gudang	: 737 m ²

Alat di pelabuhan Gunungsitoli:

- 1 unit *Mobile Crane*
- 1 unit *Forklift*
- 2 unit *Forklift* (kerja sama)
- 2 unit *Headtruck*

Batam Port Boats:

- 5 Pilot Boats
- 1 Speed Boat
- 3 Tug Boats

GUNUNGSITOLI PORT

Gunungsitoli Port became an official branch of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in 2013. Previously, the branch was in Sibolga Port.

Gunungsitoli Port Facilities:

Quay Length	: 292 m
Yard Area	: 3,081 m ²
Water Depth	: -8 mLWS to -16 mLWS
Warehouse	: 737 m ²

Gunungsitoli Port Equipments:

- 1 Mobile Crane
- 1 Forklifts
- 2 Forklifts (cooperation)
- 2 Headtrucks

VISI, MISI, DAN TATA NILAI PERUSAHAAN

COMPANY VISION, MISSION, AND CODE OF CONDUCT

Visi dan Misi Pelindo 1 ditetapkan dan diberlakukan melalui kajian secara mendalam dengan melibatkan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, jajaran Perseroan dan para pemangku kepentingan, kemudian disahkan oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dengan Peraturan Direksi No. KP.32/2/20/PI-20.TU tanggal 16 Oktober 2020 tentang Visi, Misi, dan Tata Nilai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Rencana Jangka Panjang PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 2020-2024.

Pelindo 1 Vision & Mission are designated and enforced through deep analysis involving the Shareholders, Board of Commissioners & Directors, the Company officials and the Stakeholders, which was then approved by the shareholders through General Meeting of Shareholders based on Directors' Regulation No. KP.32/2/20/PI-20.TU of 16 October 2020 concerning PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Vision, Mission, Code of Conduct, and the Long Term Plan of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 2020-2024.

► VISI VISION

MENJADI GERBANG UTAMA INDONESIA KE JARINGAN LOGISTIK GLOBAL

TO BE A MAJOR GATEWAY OF INDONESIA TO THE GLOBAL LOGISTICS NETWORK

PENJABARAN VISI

Visi merupakan pernyataan cita-cita Perseroan untuk menjadi perusahaan dengan *market share* terbesar di Indonesia pada bisnis curah cair, logistik, dan *marine*, yang ditargetkan akan terwujud di tahun 2024. Cita-cita ini dilandasi oleh potensi keunggulan geografis, peluang bisnis serta kebijakan nasional yang membuka peluang Perusahaan untuk merealisasikan visi tersebut.

VISION ELABORATION

Our vision is the declaration of the Company's goal of becoming the Company with the largest market share in the liquid bulk, logistics, and marine service industry, targeted to be realized in 2024. This goal is based on geographical advantages, business opportunities, and national policies opportune for the Company to realize such vision.





► MISI MISSION

MENYEDIKAN JASA KEPELABUHANAN DAN MARITIM YANG HANDAL DAN TERINTEGRASI DENGAN KAWASAN INDUSTRI UNTUK Mendukung Jaringan Logistik Indonesia dan Global dengan Memaksimalkan Manfaat Ekonomi Selat Malaka

OUR MISSION IS TO PROVIDE PORTS & MARITIME SERVICES THAT ARE RELIABLE & INTEGRATED WITH INDUSTRIAL ESTATES TO SUPPORT INDONESIA & GLOBAL LOGISTICS NETWORKS BY MAXIMIZING THE ECONOMIC BENEFITS OF THE MALACCA STRAIT.

Pernyataan Misi Perseroan mengandung 4 (empat) dimensi tujuan manajerial, yaitu:

1. Mewujudkan layanan kepelabuhanan, maritim, dan logistik yang cepat, aman, dan berkualitas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan;
2. Mewujudkan kerjasama mitra strategis dalam pengembangan integrasi kepelabuhanan dan kawasan industri;
3. Mewujudkan kerjasama dengan *Global Port Operator* untuk memperluas jaringan logistik nasional dan global;
4. Meningkatkan *market share* bisnis *marine* di Selat Malaka untuk memaksimalkan manfaat ekonomi.

The Company's Mission Declaration contains 4 (four) managerial objective dimensions, namely:

1. Providing swift, safe and quality ports, maritime, and logistics services to improve customer satisfaction level;
2. Realizing strategic partner cooperation in the development of integrated ports and industrial estates;
3. Realizing cooperation with *Global Port Operator* to broaden the national and global logistics network;
4. Increasing marine business market share at the Strait of Malacca in order to make the most of its economic benefits.

REVIU VISI MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Visi dan Misi Perseroan senantiasa ditelaah/direviu secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis serta tantangan yang dihadapi oleh Perseroan. Di tahun 2020, Manajemen Pelindo 1 telah melakukan reviu Visi dan Misi dan menyatakan bahwa Visi dan Misi Perseroan masih relevan dengan lingkungan bisnis dan tantangan yang dihadapi Perseroan sehingga ditetapkan kembali melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No.KP.32/2/20/PI-20.TU tentang Visi, Misi, dan Tata Nilai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

VISION & MISSION REVIEW BY BOARD OF COMMISSIONER & DIRECTORS

The Company's Vision & Mission are constantly assessed/reviewed to ensure their relevance with business environment development & challenges which the Company has to encounter. In 2020, Pelindo 1 Management has reviewed Vision & Mission and concluded that they are still relevant with current issues & challenges, thus by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Directors' Regulation No KP.32/2/20/PI-20.TU on Vision, Mission, and Code of Conduct of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), they are reinstated.



STRATEGI PENCAPIAN VISI DAN MISI PERUSAHAAN

ARAH PENGEMBANGAN PERUSAHAAN

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di industri kepelabuhanan memiliki peran penting sebagai pintu gerbang perekonomian. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan bagian dari ekosistem transportasi dan logistik, dan memiliki peran strategis dalam pertumbuhan industri dan perdagangan serta berkontribusi bagi perekonomian Indonesia Barat dan nasional. Perusahaan beraspirasi untuk menjadi gerbang utama Indonesia ke jaringan logistik global pada tahun 2024. Strategi utama untuk mencapai visi Perseroan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2020-2024 terdiri dari 3 (tiga) tema yaitu:

1. Penguatan Bisnis Utama (*Core Business Enhancement*)
Dalam lima tahun ke depan, perusahaan akan melakukan penguatan bisnis utama dengan cara meningkatkan kualitas dan skala bisnis dalam pelayanan kapal, barang, penumpang termasuk jasa logistik dan *freight forwarding*.
2. Diversifikasi Bisnis Berbasis *Hinterland* (*Hinterland-Based Business Diversification*)
Untuk mengoptimalkan kapabilitas Perseroan dalam ekosistem pelabuhan, Perseroan akan mengembangkan bisnis penunjang dan bisnis *adjacencies* baik untuk kebutuhan internal dan untuk memaksimalkan potensi pasar eksternal. Diversifikasi bisnis didasarkan pada *differentiating capabilities* Perseroan dan kebutuhan pasar, sehingga diversifikasi yang dilakukan Perseroan adalah berbasis kawasan (*hinterland*).
3. Keunggulan Operasional dan Layanan (*Operational and Service Excellence*)
Dalam upaya meningkatkan daya saing, Perseroan akan melakukan serangkaian inisiatif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keunggulan layanan di seluruh lini bisnis dalam ekosistem pelabuhan, yang meliputi peningkatan kapasitas pelabuhan, implementasi *customer relationship management*, optimasi sinergi bisnis antar cabang dan integrasi layanan kepelabuhanan.

Untuk mewujudkan aspirasi Pelindo 1 menjadi gerbang utama Indonesia ke jaringan logistik global pada tahun 2024, terdapat beberapa *milestone* yang perlu dicapai dan dituangkan dalam *Corporate Roadmap* sebagaimana dipetakan dalam bagan berikut:

COMPANY'S VISION & MISSION REALIZATION STRATEGIES

COMPANY DEVELOPMENT DIRECTION

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is one of the State Owned Enterprises which operates in ports industry and has the important role as an economic gateway. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is a part of transportation & logistics ecosystem, and has strategic role in economic & trade growth and contributes to West Indonesia's national economy as a whole. The Company aspires to be the Indonesia's main gate towards global logistics network in 2024. In order to achieve the Company vision in the 2020-2024 Long Term Plan, there are 3 themes:

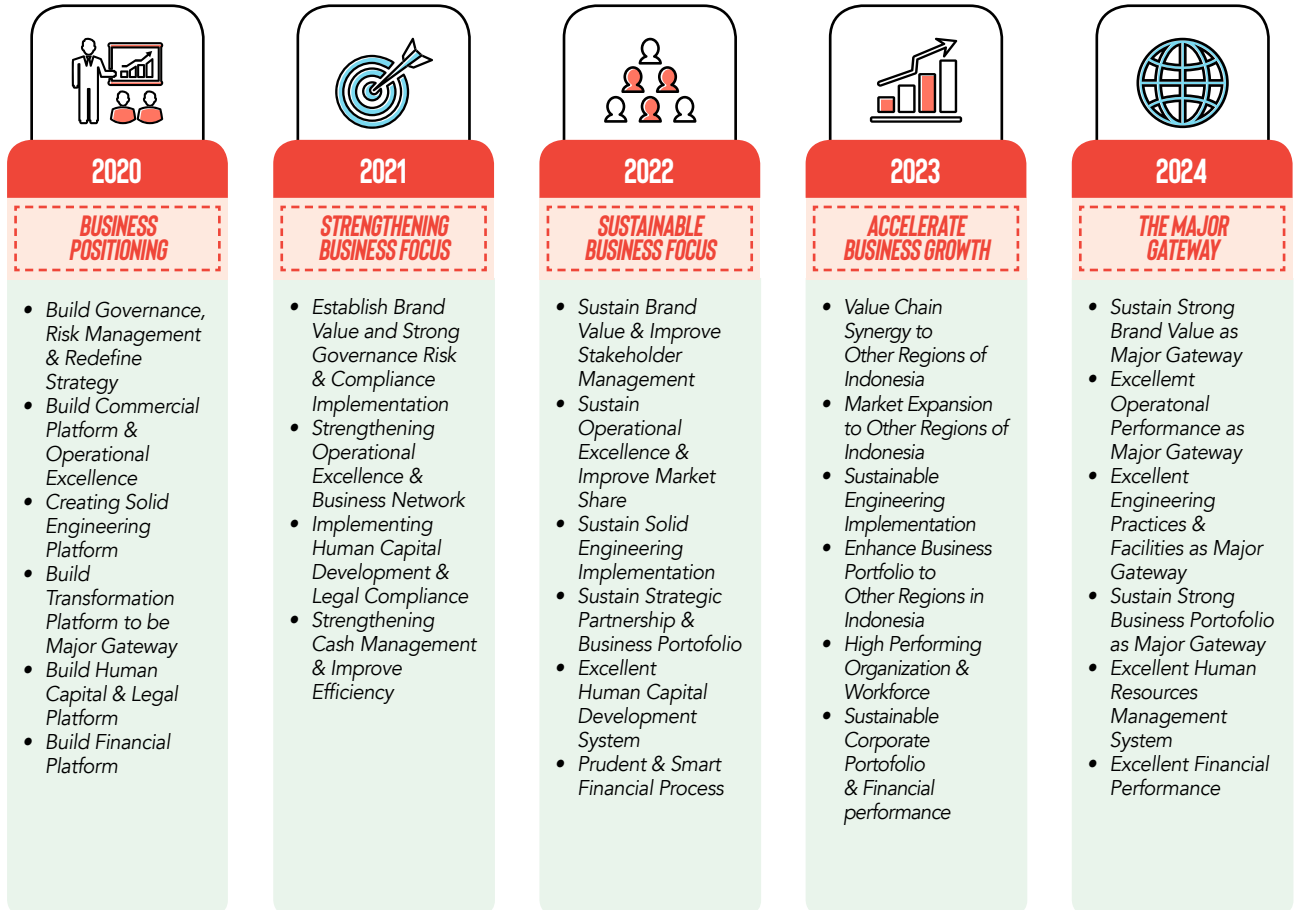
1. Core Business Enhancement
For the next 5 years, the Company will perform Core Business Enhancement by increasing the business quality & scale in ship, goods, & passenger services, including logistics & freight forwarding services.
2. Hinterland-Based Business Diversification
In order to optimize Company's capabilities in port ecosystem, the Company will develop supporting business & adjacencies business both for internal needs & to maximise external market potentials. Business diversification is based on Company's differentiating capabilities & market needs, hence the Company will apply Hinterland-based business diversification.
3. Operational and Service Excellence
To increase competitiveness, the Company will perform a series of initiatives to increase operational efficiencies & service advantages throughout all business lines within port ecosystem, which include port capacity increase, customer relationship management implementation, business synergy optimization between branches and ports services integration.

To realize Pelindo 1 aspiration to be Indonesia's main gate towards global logistics network in 2024, there are several milestones which need to be achieved & written on Corporate Roadmap as explained below:





CORPORATE ROADMAP



Dengan mengimplementasikan tiga tema strategi dan *milestone* tiap tahun maka aspirasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk menjadi gerbang utama Indonesia menuju jaringan logistik global diharapkan dapat tercapai.

By implementing these 3 strategy themes and milestones every year, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) aspiration to be Indonesia's main gate towards global logistics network is expected to be achieved.

PERNYATAAN TATA NILAI PERUSAHAAN

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan di BUMN, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi, maka pada tahun 2020, Perseroan menetapkan perubahan Budaya Perusahaan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.32/2/20/PI-20.TU tentang Visi, Misi, dan Tata Nilai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Budaya Perseroan & Panduan Perilaku Pelindo 1 adalah sebagai berikut:

COMPANY CODE OF CONDUCT DECLARATION

Referring to Minister of State Owned Enterprise Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020 1 July 2020 on Core Values of State Owned Enterprise Human Resources of AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif/Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive & Collaborative), as the identity & work culture adhesive supporting sustainable performance increase in SOE, Subsidiaries, Consolidated Affiliated Companies, in 2020, the Company declared Corporate Culture revision by Directors' Regulation No. KP.32/2/20/PI-20.TU on Vision, Mission, and Code of Conduct of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

The corporate culture & behavior guidance of Pelindo 1 are as follows:

Nilai Perusahaan Company Value	Kata Kunci Keyword	Definisi Definition	Perilaku Kunci Key Behaviour	Perilaku yang Diharapkan Expected Attitude
Amanah Trustworthy	a. Integritas b. Tulus c. Konsisten d. Dapat dipercaya a. Integrity b. Sincerity c. Consistency d. Reliable	Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan We hold everything entrusted to us dearly	a. Memenuhi janji dan komitmen Fulfilling promises & commitments b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan Responsible for duties, decisions and actions performed c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika Adhering moral values and ethics	a. Berperilaku dan bertindak selaras dengan perkataan Acting accordingly with words said b. Menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab Being a dependable & responsible person c. Bertindak jujur dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika secara konsisten Being honest & adhering moral & ethics consistently.
Kompeten Competent	a. Kinerja Terbaik b. Sukses c. Keberhasilan d. Learning Agility e. Ahli di Bidangnya a. Best Performance b. Success c. Accomplishment d. Learning Agility e. Expertise	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas We will keep learning & expanding capabilities	a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Improving self competencies to answer the ever-changing challenges b. Membantu orang lain belajar Helping others to learn c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik Completing duties with best results	a. Terus menerus meningkatkan kemampuan/kompetensi agar selalu mutakhir Keep on improving to keep up with ages b. Selalu dapat diandalkan dengan memberikan kinerja terbaik Always be reliable by giving best performance c. Menghasilkan kinerja dan prestasi yang memuaskan Contributing satisfactory performance & achievements
Harmonis Harmonious	a. Peduli b. Perbedaan a. Mindful b. Tolerant	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan We care for each other & honor differences	a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Appreciating everyone regardless of background b. Suka menolong orang lain Helping others c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif Building conducive working environment	a. Berperilaku saling membantu dan mendukung selama insan organisasi maupun masyarakat Helping & supporting both the organization & society b. Selalu menghargai pendapat, ide atau gagasan orang lain Always appreciating other's ideas or opinions c. Menghargai kontribusi setiap orang dari berbagai latar belakang Appreciating everyone's contribution regardless of background



Nilai Perusahaan Company Value	Kata Kunci Keyword	Definisi Definition	Perilaku Kunci Key Behaviour	Perilaku yang Diharapkan Expected Attitude
Loyal Loyal	a. Komitmen b. Dedikasi c. Kontribusi a. Commitment b. Dedication c. Contribution	Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara We are dedicated and prioritizing the Nation's interest	a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara Maintaining Maintaining the good reputation of and between employees, leaders, SOE, and the State b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar Willing to sacrifice for the greater good c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika Obedient as long as it isn't against the law & ethics	a. Menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan Displaying strong commitment to reach goals b. Bersedia berkontribusi lebih dan rela berkorban dalam mencapai tujuan Willing to contribute more & willing to sacrifice to reach the goals c. Menunjukkan kepatuhan kepada organisasi dan negara Displaying obedience to the organization & the State
Adaptif Adaptive	a. Inovasi b. Antusias terhadap perubahan c. Proaktif a. Innovation b. Enthusiastic towards change c. Proactive	Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan We will keep on innovating & enthusiastic in moving & facing changes	a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik Quickly adapting to be better b. Terus-menerus melakukan perbaikan dan mengikuti perkembangan teknologi Consistently improving with technologies c. Bertindak proaktif Proactive	a. Melakukan inovasi secara konsisten untuk menghasilkan yang lebih baik Consistently innovating to produce better results b. Terbuka terhadap perubahan, bergerak lincah, cepat dan aktif dalam setiap perubahan untuk menjadi lebih baik Open to change, move agilely, swiftly & actively with every change to adapt into a better person c. Bertindak proaktif dalam menggerakkan perubahan Proactive in forwarding changes
Kolaboratif Collaborative	a. Kesiediaan bekerja sama b. Sinergi untuk hasil yang lebih baik a. Willing to cooperate b. Synergy for better result	Kami membangun kerja sama yang sinergis We will build synergistic cooperations	a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Giving others opportunities to contribute b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah Being open in cooperating to produce added value c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama Utilizing resources for common goals	a. Terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak Open to cooperation with various parties b. Mendukung terjadinya sinergi untuk mendapatkan manfaat dan nilai tambah Endorsing synergy to gain benefits & added values c. Bersinergi untuk mencapai tujuan bersama Synergizing to reach common goals

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI TATA NILAI PERUSAHAAN

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah menyusun *roadmap* transformasi perusahaan selama 1 (satu) tahun yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh *stakeholder* di Pelindo 1 yang dibagi menjadi 4 tahapan yaitu tindak lanjut evaluasi tahun 2020, *Capacity Building*, *Merger Preparation* dan *Performance Monitoring*.

Dalam upaya mensukseskan *core values* agar menjadi Budaya di Pelindo 1, keterlibatan seluruh level merupakan salah satu kunci keberhasilan internalisasi budaya. Beberapa program pun disusun antara lain:

1. Penandatanganan Deklarasi AKHLAK;
2. Pembagian buku AKHLAK UNTUK NEGERI kepada seluruh pejabat Struktural Pelindo 1;
3. Pembentukan tim Internalisasi Budaya Perusahaan;
4. Kompetisi Inovasi;
5. Evaluasi dan Perbaikan proses bisnis;

COMPANY'S CODE OF CONDUCT SOCIALIZATION & INTERNALIZATION

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has written a company transformation roadmap for 1 (one) year involving the entire stakeholders in Pelindo 1 which can be divided into 4 phases, namely, 2020 evaluation follow up, *Capacity Building*, *Merger Preparation* and *Performance Monitoring*.

To successfully implement core values in Pelindo 1, involvement in all levels is one of the key for culture internalisation. Several programs are planned, namely:

1. AKHLAK Declaration signing;
2. AKHLAK UNTUK NEGERI book sharing to all Pelindo 1 structural officers;
3. Company Culture Internalization Team establishment;
4. Innovation competition;
5. Business process evaluation and improvement;

6. *Leaders Talk/Webinar* Budaya oleh BOD dan pejabat struktural;
 7. Program Penguatan budaya melalui artefak, kuis, gamifikasi, komik, video;
 8. Penyelarasan *core values* dalam produk hukum Perseroan;
 9. *Branding* dan Sosialisasi *awareness* melalui seluruh *channel* aplikasi korporat;
 10. Pelaksanaan *e-learning* budaya Perseroan;
 11. Penyelarasan pencapaian tujuan perusahaan melalui penilaian *core values* secara bulanan (*Report AKHLAK*);
 12. Pelaksanaan survei budaya perusahaan dengan fokus pada *Organizational Health/Growth*.
6. Cultural Leaders Talk/Webinar by BOD & structural officers;
 7. Culture Strengthening Programs through artifacts, quizzes, gamification, comics, videos;
 8. Synchronization of core values through the Company's legal instruments;
 9. Branding & awareness Socialization through all corporate application channels;
 10. Company culture e-learning;
 11. Company goal synchronization through monthly core values assessment (AKHLAK Report Card);
 12. Company culture surveys focusing on Organizational Health/Growth.



PENANDATANGANAN DEKLARASI AKHLAK, PENYERAHAN BUKU "AKHLAK BUMN UNTUK NEGERI" DAN APRESIASI LOMBA INOVASI AKHLAK DECLARATION SIGNING, "AKHLAK BUMN UNTUK NEGERI" BOOK SHARING AND INNOVATION COMPETITION APPRECIATION



PENYELARASAN AKHLAK DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PERUSAHAAN AKHLAK SYNCHRONISATION IN ACHIEVING COMPANY GOALS



CORE VALUES AKHLAK DALAM KEBIJAKAN PERUSAHAAN AKHLAK CORE VALUES IN COMPANY'S POLICIES



CHALLENGE KUIS TIK TOK TIK TOK QUIZ CHALLENGE



KUIS MELALUI INSTAGRAM QUIZ ON INSTAGRAM



LAUNCHING AKHLAK LAUNCHING OF AKHLAK

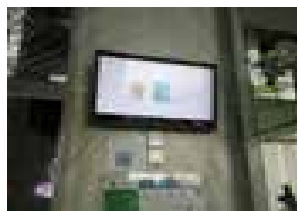


MEDIA INTERNALISASI AKHLAK
AKHLAK INTERNALIZATION MEDIA

OBROLAN SEPUTAR AKHLAK
AKHLAK DIALOGUE



DIGITAL CAMPAIGN TV
DIGITAL CAMPAIGN TV



BOD TALKS



LEADER BERAKHLAK
LEADER BERAKHLAK



SOSIALISASI DI PORTAL
PORTAL SOCIALIZATION



E-FLYERS



SOCIALIZATION ON CORPORATE SOCMED
SOCIALIZATION ON CORPORATE SOCMED



STICKERS



E-LEARNING



PROGRAM KEBIJAKAN SDM
HR PROGRAMS



GAMES



SOSIALISASI KEPADA PENGGUNA JASA
SOCIALIZATION TO SERVICE USERS



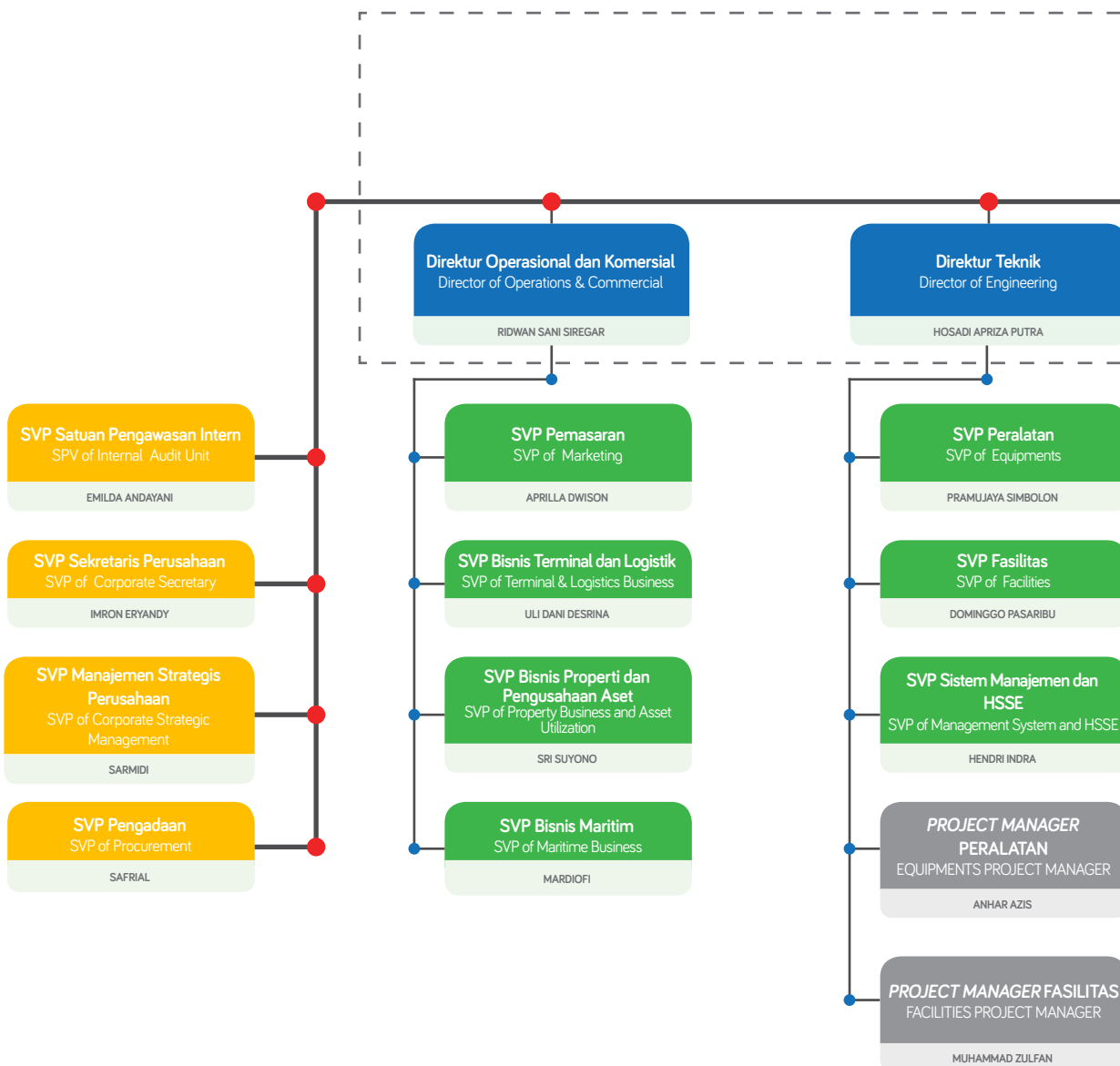




STRUKTUR ORGANISASI

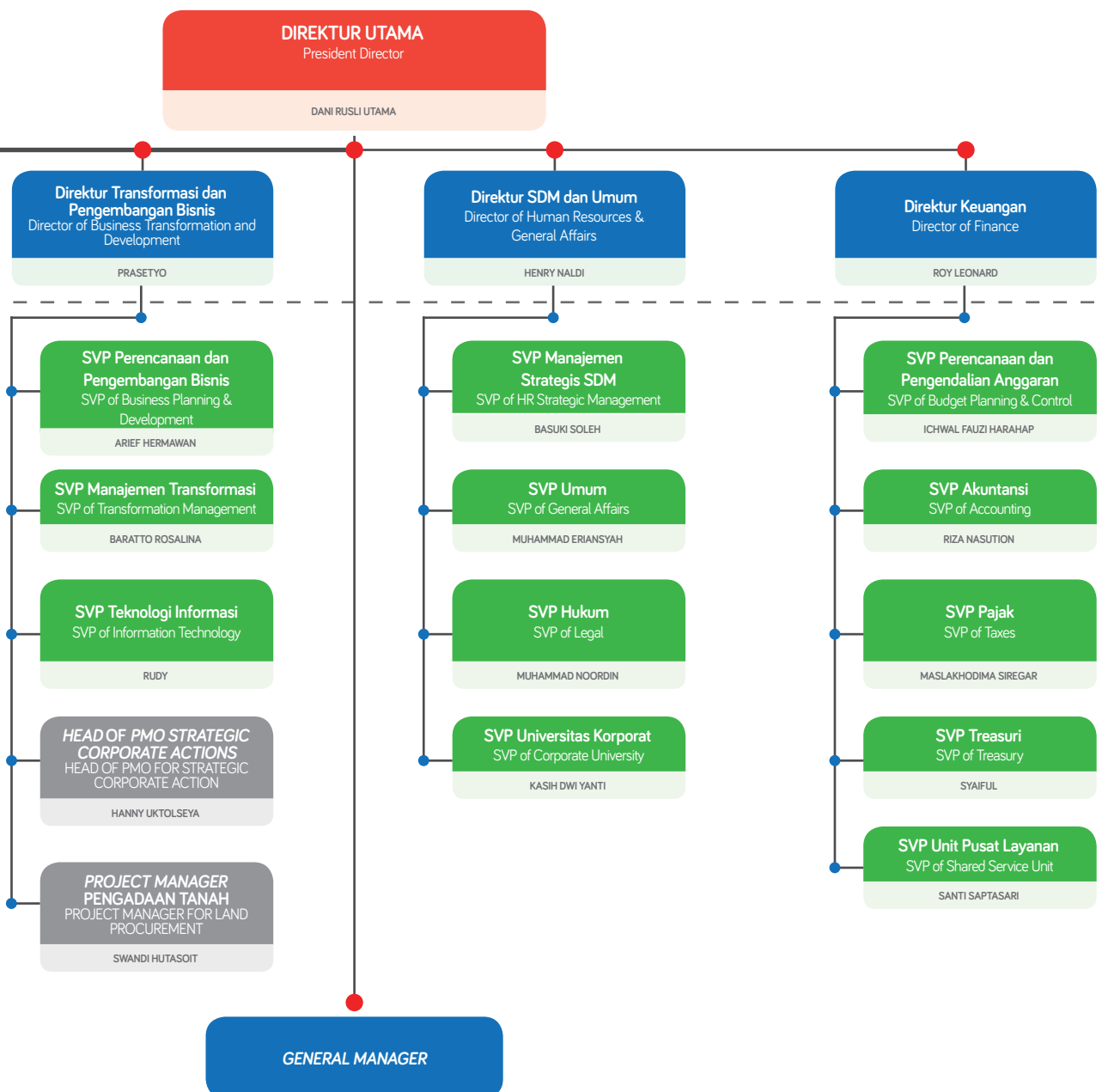
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Sejalan dengan dinamika bisnis yang terjadi sekaligus mendukung penguatan organisasi Perseroan, pada tahun 2020 penetapan struktur organisasi telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. PR.02/7/10/PI-19.TU tanggal 11 Desember 2019 tentang Perubahan Peraturan Direksi No. PR.02/5/1/PI-19.TU tanggal 27 Agustus 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Dengan demikian, Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:





In line with existing business dynamics while supporting the Company's organizational strengthening, in 2020, the establishment of the Company's organizational structure has been approved by the Board of Commissioner & finalized through PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Board of Directors' Regulation No. PR.02/7/10/PI-19. TU 11 December 2019 on the Revision to the Board of Directors' Regulation No. PR.02/5/1/PI-19.TU of 27 August 2019 on the Organization & Work Order at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office. Therefore, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) organizational structure per 31 December 2020 is as follows:



PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILES



**ACHMAD
DJAMALUDIN**

Komisaris Utama | President Commissioner

Periode Jabatan:

20 April 2020 – 2025, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 58 tahun per Desember 2020
Kelahiran Kudus, 13 Juli 1962

Domisili

DKI Jakarta

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020

Pendidikan

- (1980-1984) Pendidikan militer di Akademi Angkatan Laut
- (1995) Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) Ang-14 dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Ang-35
- (1999) Sesko TNI Ang-35
- (2013) Lemhanas PPSA

Pengalaman Kerja

- (1984) Asisten Pateksen KRI Nala 0363
- (1996) Kajor TMNI STAAL Kodikal
- (2002) Kasubpok Sista Sahli Kasal E Teklog
- (2011) Komandan STTAL Kobangdikal
- (2012) Bandep Lingstra Regional, Dejiandra Setjen Wantannas
- (2014) Waasrenal Kasal
- (2016) PA Sahli Tk.II Bid. Intekmil Panglima TNI
- (2017) Staf Khusus Panglima TNI dan Deputi Bidang Koordinasi Hanneg Kemenko Polhukam
- (2019) Sekretaris Jenderal Wantannas

Informasi Rangkap Jabatan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya

Period:

20 April 2020 – 2025, 1st Period

Personal Data

Indonesian Citizen
58 Years old per December 2020
Born in Kudus, 13 July 1962

Domicile

DKI Jakarta

Appointment History

Minister of SOE Decision as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020

Education

- (1980-1984) Military education at Indonesian Navy Academy
- (1995) Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) 14th Batch & Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) 35th Batch
- (1999) Sesko TNI 35th Batch
- (2013) Lemhanas PPSA

Work Experience

- (1984) Senior Technical Officer Assistant on KRI Nala 0363
- (1996) Kajor TMNI STAAL Kodikal
- (2002) Kasubpok Sista Sahli Kasal E Teklog
- (2011) Commander of STTAL Kobangdikal
- (2012) Bandep Lingstra Regional, Dejiandra Setjen Wantannas
- (2014) Waasrenal Kasa
- (2016) PA Sahli Tk.II Bid. Intekmil Panglima TNI
- (2017) Special Staff for TNI Commander & Deputy of Coordination on National Defense of Coordinating Ministry of Political, Legal & Security Affairs
- (2019) General Secretary of Wantannas

Information on Concurrent Positions

-

Affiliation

No affiliation with the Board of Directors nor any other members of the Board of Commissioners



AHMAD PERWIRA MULIA

Komisaris Independen | Independent Commissioner

Periode Jabatan:

20 April 2020 – 2025, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 54 tahun per Desember 2020
Kelahiran Medan, 17 April 1966

Domisili

Medan, Sumatera Utara

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020

Pendidikan

- (1990) S1 *Geodetic Engineering* di Institut Teknologi Bandung
- (1996) S2 *Coastal Engineering* di University of Florida, USA
- (2020) S3 *Coastal Engineering/Civil Engineering* di Universiti Teknologi Malaysia

Pengalaman Kerja

- (1992) Staf Pengajar di Departemen Teknik Sipil USU
- (2005-2008) Sekretaris Departemen Teknik Sipil USU
- (2009-2010) Kepala Laboratorium Ilmu Ukur Tanah dan Geospasial di Laboratorium Ilmu Ukur Tanah Departemen Teknik Sipil USU
- (2010-2016) Wakil Dekan III Fakultas Teknik USU
- (2017) Ketua Program Studi S2/S3 Fakultas Teknik USU

Informasi Rangkap Jabatan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya

Period:

20 April 2020 - 2025, 1st Period

Personal Data

Indonesian Citizen
54 year old per December 2020
Born in Medan, 17 April 1966

Domicile

Medan, North Sumatera

Appointment History

Minister of SOE Decision as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor SK-123/MBU/04/2020

Education

- (1990) S1 *Geodetic Engineering* at Bandung Institute of Technology
- (1996) S2 *Coastal Engineering* at University of Florida, USA
- (2020) S3 *Coastal Engineering/Civil Engineering* at Universiti Teknologi Malaysia

Work Experience

- (1992) Lecturer Staff at USU Civil Engineering Department
- (2005-2008) USU Civil Engineering Department Secretary
- (2009-2010) Head of Laboratory of Land Surveying & Geospatial Sciences at USU Laboratory of Land Surveying of Civil Engineering Department
- (2010-2016) Vice Dean III at USU Faculty of Engineering
- (2017) Head of Study Program for Master/Doctoral at USU Faculty of Engineering

Information on Concurrent Positions

-

Affiliation

No affiliation with the Board of Directors nor any other members of the Board of Commissioners



HERBERT TIMBO PARLUHUTAN SIAHAAN

Komisaris Independen | Independent Commissioner

Periode Jabatan:

20 April 2020 – 2025, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 61 tahun per Desember 2020
Kelahiran Medan, 18 November 1959

Domisili

DKI Jakarta

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020

Pendidikan

(1979) Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja

- (2002-2003) Redaktur Pelaksana Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)
- (2003-2004) Direktur Utama Majalah Pilar
- (2005-Sekarang) Pemimpin Redaksi Jak TV
- (2010-Sekarang) Managing Partner di Kantor Hukum Timbo Siahaan & Associates
- (2015-2018) Komisaris Utama PT Citilink Indonesia
- (2018-2020) Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Tbk

Informasi Rangkap Jabatan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya

Period:

20 April 2020-2025, 1st Period

Personal Data

Indonesian Citizen
61 year old per December 2020
Born in Medan, 18 November 1959

Domicile

DKI Jakarta

Appointment History

Minister of SOE Decision as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020

Education

(1979) Bachelor Degree in Law from Faculty of Law University of Indonesia

Work Experience

- (2002-2003) Acting Editor at Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)
- (2003-2004) President Director at Pilar Magazine
- (2005-Present) Jak TV Editor in Chief
- (2010-Present) Managing Partner at Timbo Siahaan & Associates Law Firm
- (2015-2018) President Commissioner at PT Citilink Indonesia
- (2018-2020) Independent Commissioner at PT Garuda Indonesia Tbk

Information on Concurrent Positions

-

Affiliate

No affiliation with the Board of Directors nor any other members of the Board of Commissioners



IRMA SURYANI CHANIAGO

Komisaris Independen | Independent Commissioner

Periode Jabatan:

20 April 2020 – 2025, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 54 tahun per Desember 2020
Kelahiran Metro, 06 November 1966

Domisili

DKI Jakarta

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020

Pendidikan

- (1986-1990) Manajemen Diploma, dari Akademi Manajemen Perusahaan Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (AMP/YKPN) Yogyakarta
- (1999-2001) Ekonomi Manajemen STIE Jakarta

Pengalaman Kerja

- (1990-1992) Kepala Cabang PT Kemusuk Tri Dharma
- (1998-2014) *General Affair* di PT Jakarta International Container Terminal
- (2011-Sekarang) Direktur Utama PT Maninjau Putra Persada
- (2014-2019) Anggota DPR/MPR RI Fraksi Nasdem

Informasi Rangkap Jabatan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya

Period:

20 April 2020 – 2025, 1st Period

Personal Data

Indonesian Citizen
54 Years old per December 2020
Born in Metro, 06 November 1966

Domicile

DKI Jakarta

Appointment History

Minister of SOE Decision as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020

Education

- (1986-1990) Diploma in Management, from Akademi Manajemen Perusahaan Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (AMP/YKPN) Yogyakarta
- (1999-2001) Management, STIE Jakarta

Work Experience

- (1990-1992) Head of Branch at PT Kemusuk Tri Dharma
- (1998-2014) General Affairs at PT Jakarta International Container Terminal
- (2011-Present) President Director at PT Maninjau Putra Persada
- (2014-2019) House of Representatives Member, Nasdem Faction

Information on Concurrent Positions

-

Affiliate

No affiliation with the Board of Directors nor any other members of the Board of Commissioners



WINATA SUPRIATNA

Komisaris | Commissioner

Periode Jabatan:

21 November 2017 - 2022, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 61 tahun per Desember 2020
Kelahiran Karawang, 09 Desember 1959

Domisili

Tangerang, Banten

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-250/MBU/11/2017

Pendidikan

- (1984) Sarjana di Universitas Padjajaran jurusan Ekonomi Manajemen
- (1999) Magister Manajemen di Universitas Satyagama

Pengalaman Kerja

- (1999) Kepala Bagian Anggaran Pembangunan di Biro Anggaran Sekretariat Sekretaris Negara
- (2011) Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dan Kepala Sekretaris Presiden
- (2014) Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Otonomi Daerah Kementerian Sekretariat Negara
- (2015) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Maritim, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Kementerian Sekretaris Negara

Informasi Rangkap Jabatan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya

Period:

21 November 2017 – 2022, 1st Period

Personal Data

Indonesian Citizen
61 years old per December 2020
Born in Karawang, 09 December 1959

Domicile

Tangerang, Banten

Appointment History

Minister of SOE Decision as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-250/MBU/11/2017

Education

- (1984) Bachelor Degree in Management from Padjajaran University
- (1999) Magister of Management from Universitas Satyagama

Work Experience

- (1999) Head of Development Budget Division at Budgeting Bureau of State Secretariat
- (2011) Head of Presidential Housekeeping & Presidential Chief Secretary
- (2014) Expert Staff on State Apparatus & Regional Autonomy of Ministry of State Secretary
- (2015) Expert Staff on Economy, Maritime, Human Development, and Culture of Ministry of State Secretary

Information on Concurrent Positions

-

Affiliate

No affiliation with the Board of Directors nor any other members of the Board of Commissioners



ARMAN DEPARI

Komisaris | Commissioner



Periode Jabatan:

20 April 2020 – 2025, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 58 tahun per Desember 2020
Kelahiran Brastagi, 01 Agustus 1962

Domisili

DKI Jakarta

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020

Pendidikan

- (1985) Akademi Kepolisian
- (1996) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
- (2000) Sespimpol
- (2009) Sespati

Pengalaman Kerja

- (1985) Ipda
- (1991) AKP
- (2000) AKBP
- (2002) Kasatkrimum Polda Riau dan Polda Sumatera Utara, dan diangkat sebagai Kapolres Langkat
- (2006) Kaden 88 / AT Polda Sumatera Utara dan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya
- (2009) Dertipidnarkoba Bareskrim Polri
- (2014) Kapolda Kepulauan Riau
- (2016) Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI

Informasi Rangkap Jabatan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya

Period:

20 April 2020 – 2025, 1st Period

Personal Data

Indonesian Citizen
58 years old per December 2020
Born in Brastagi, 01 August 1962

Domicile

DKI Jakarta

Appointment History

Minister of SOE Decision as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020

Education

- (1985) Police Academy
- (1996) Police University (PTIK)
- (2000) Police Leadership School
- (2009) Higher Officer School

Work Experience

- 1985) Ipda
- (1991) AKP
- (2000) AKBP
- (2002) Kasatkrimum at Polda of Riau and Polda of North Sumatera and appointed as Kapolres of Langkat
- (2006) Kaden 88 / AT at Polda of North Sumatera, and Dirresnarkoba Polda Metro Jaya
- (2009) Dertipidnarkoba Bareskrim Polri
- (2014) Kapolda of Riau Islands
- (2016) Deputy of Drug Eradication at National Drug Agency (BNN)

Information on Concurrent Positions

-

Affiliate

No affiliation with the Board of Directors nor any other members of the Board of Commissioners

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



**DANI RUSLI
UTAMA**

Direktur Utama | President Director

Periode Jabatan

22 Juni 2020 – 15 Maret 2021, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 49 tahun per Desember 2020
Kelahiran Bandung, 14 Januari 1971

Domisili

Bandung, Jawa Barat

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-213/MBU/06/2020

Pendidikan

- (1994) Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung
- (1999) *Master* Manajemen Infrastruktur dari Yokohama National University, Jepang

Pengalaman Kerja

- (2009-2010) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai General Manager Cabang Pelabuhan Palembang
- (2010-2011) Direktur SDM di PT Jakarta International Container Terminal
- (2011-2012) Kepala Biro Strategi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
- (2012-2015) Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
- (2015-2016) Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal
- (2016-2019) Direktur Teknik & Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
- (2019-2020) Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Informasi Rangkap Jabatan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya

Period:

22 June 2020 – 15 March 2021, 1st Periode

Personal Data

Indonesian Citizen
49 years old per December 2020
Born in Bandung, 14 January 1971

Domicile

Bandung, Jawa Barat

Appointment History

Minister of SOE Decision as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/06/2020

Education

- (1994) Bachelor Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology
- (1999) Master of Infrastructure Management from Yokohama National University, Japan

Work Experience

- (2009-2010) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) General Manager for Palembang Port Branch
- (2010-2011) Director of Human Resources at PT Jakarta International Container Terminal
- (2011-2012) Head of Corporate Strategy Bureau at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
- (2012-2015) President Director at PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
- (2015-2016) President Director at PT Jakarta International Container Terminal
- (2016-2019) Director of Engineering & Risk Management PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
- (2019-2020) Direktur of Engineering at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Information on Concurrent Positions

-

Affiliate

No affiliation with the Board of Directors nor any other members of the Board of Commissioners



PRASETYO

Direktur Utama | President Director

Periode Jabatan

15 Maret 2021 - 2026, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 50 tahun per Desember 2020
Kelahiran Mojokerto, 16 Mei, 1970

Domisili

Surabaya, Jawa Timur

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-81/MBU/03/2021

Pendidikan

- (1994) Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- (2019) *Master of Business Administration* dari SBM ITB

Pengalaman Kerja

- (2009) *Manager Teknik* Cabang Gresik di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2010) *Assistant Senior Manager* Perencanaan Usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2011) *Assistant Senior Manager* Pemeliharaan Bangunan dan Assistant Kepala Biro Perencanaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2013) *General Manager* Pelabuhan Benoa dan *Senior Manager* Supervisi Teknik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2014) *Direktur Utama* PT Pelindo Properti Indonesia
- (2017-2020) *Kepala Biro* Perencanaan Strategis dan Kinerja Korporat

- (2020) *Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis* Pelindo 1

Informasi Rangkap Jabatan

Komisaris Utama PT Prima Terminal Petikemas

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya

Period:

15 March 2021 – 2026, 1st Period

Personal Data

Indonesian Citizen
50 years old per December 2020
Born in Mojokerto, 16 May 1970

Domicile

Surabaya, East Java Jawa Timur

Appointment History

Minister of SOE Decision as the General Meeting of Shareholders No. SK-81/MBU/03/2021

Education

- (1994) Bachelor in Architecture Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- (2019) *Master of Business Administration* from SBM ITB

Work Experience

- (2009) *Engineering Manager* at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Gresik Branch
- (2010) *Assistant Senior Manager* for Business Planning at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2011) *Assistant Senior Manager* for Building Maintenance & Head Assistant of Planning Bureau at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2013) *General Manager* at Benoa Port & *Senior Manager* of Engineering Supervision at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2014) *President Director* at PT Pelindo Properti Indonesia
- (2017-2020) *Chief of Bureau* of Strategic Planning & Corporate Performance
- (2020) *Director of Business Transformation & Development* at PT Pelindo 1

Information on Concurrent Positions

President Commissioner at PT Prima Terminal Petikemas

Affiliate

No affiliation with the Board of Directors nor any other members the Board of Commissioners



RIDWAN SANI SIREGAR

Direktur Operasional dan Komersial | Director of Operations & Commercial

Periode Jabatan

22 Juni 2020 - 2025, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 50 tahun per Desember 2020
Kelahiran Medan, 1 September 1970

Domisili

Medan, Sumatera Utara

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-213/MBU/06/2020

Pendidikan

- (1995) Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara
- (2001) *Magister* Manajemen dari Universitas Sumatera Utara

Pengalaman Kerja

- (2010-2014) *Manager* Logistik di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan
- (2014-2015) *Senior Manager* Bina Usaha dan *General Manager* Belawan International Container Terminal
- (2015-2019) *SVP Management Asset Pelindo 1*
- (2019-2020) *Direktur Utama* PT Prima Terminal Petikemas

Informasi Rangkap Jabatan

Komisaris PT Prima Indonesia Logistik

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya

Period:

22 June 2020 – 2025, 1st Period

Personal Data

Indonesian Citizen
50 years old per December 2020
Born in Medan, 1 September 1970

Domicile

Medan, North Sumatera

Appointment History

Minister of SOE Order as Shareholder No SK-213/MBU/06/2020

Education

- (1995) Bachelor Degree in Economics from Islamic University of North Sumatera
- (2001) *Magister* of Management from University of North Sumatera

Work Experience

- (2010-2014) *Logistics Manager* at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan Branch
- (2014-2015) *Senior Manager* for Business Development & *General Manager* of Belawan International Container Terminal
- (2015-2019) *SVP* of Asset Management at Pelindo 1
- (2019-2020) *President Director* at PT Prima Terminal Petikemas

Information on Concurrent Positions

Commissioner at PT Prima Indonesia Logistik

Affiliation

No affiliation with the Board of Directors nor any other members the Board of Commissioners



HOSADI APRIZA PUTRA

Direktur Teknik | Director of Engineering

Periode Jabatan

5 November 2018 - 2023, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 48 tahun per Desember 2020
Kelahiran Padang, 7 April 1972

Domisili

Medan, Sumatera Utara

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-288/MBU/11/2018

Pendidikan

- (1996) Sarjana di Institut Teknologi Bandung
- (2020) S2 di Universitas Islam Sumatera Utara

Pengalaman Kerja

- (2011-2012) Asisten Manajer Fasilitas di BICT
- (2012-2013) Manajer Teknik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pekanbaru
- (2013) Sekretaris PMO Pengembangan TPK Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung
- (2013-2014) Koordinator PMO Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung
- (2014-2018) Direktur Utama PT Prima Multi Terminal
- (2018) Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Informasi Rangkap Jabatan

Komisaris PT Prima Pengembangan Kawasan

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya

Period:

05 November 2018 – 2023, 1st Period

Personal Data

Indonesian Citizen
48 years old per December 2020
Born in Padang, 7 April 1972

Domicile

Medan, North Sumatera

Appointment History

Minister of SOE Decision as the General Meeting of Shareholders No. SK-288/MBU/11/2018

Education

- (1996) Bachelor Degree from Bandung Institute of Technology
- (2020) Master Degree from Islamic University of North Sumatera

Work Experience

- (2011 - 2012) Assistant Facility Manager at BICT
- (2012 - 2013) Engineering Manager at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Pekanbaru Branch
- (2013) PMO Secretary for TPK Belawan & Kuala Tanjung Port Development
- (2013 - 2014) PMO Coordinator for Kuala Tanjung Port Development
- (2014 - 2018) President Director at PT Prima Multi Terminal
- (2018) Director of Engineering at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Information on Concurrent Positions

Commissioner at PT Prima Pengembangan Kawasan

Affiliation

No affiliation with the Board of Directors nor any other members the Board of Commissioners



**JOKO
NOERHUDHA**

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis | Director of Business Transformation and Development

Periode Jabatan

15 Maret 2021 - 2026, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 47 tahun per Desember 2020
Kelahiran Surabaya, 17 April 1973

Domisili

Surabaya, Jawa Timur

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-81/MBU/03/2021

Pendidikan

(1998) Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Sepuluh Noverber

Pengalaman Kerja

- (2011) *Manager* Teknik Cabang Tanjung Emas Semarang
- (2012) *Senior Manager* Rancang Bangun PT Pelabuhan Indonesia III
- (2013) Kepala Biro Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III
- (2016) *General Manager* Cabang Tanjung Perak Surabaya
- (2017) *President Director* PT Terminal Petikemas Surabaya
- (2018-2020) *Direktur Teknik* PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2020-2021) Staf Khusus *Direktur Utama (Head of Technical & Safety)* Kawasan Industri JIPE – Manyar Gresik, Jawa Timur

Informasi Rangkap Jabatan

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya

Period:

15 March 2021 – 2026, 1st Period

Personal Data

Indonesian Citizen
47 years old per December 2020
Born in Surabaya, 17 April 1973

Domicile

Surabaya, East Java

Appointment History

Minister of SOE Decision as the General Meeting of Shareholders No. SK-81/MBU/03/2021

Education

(1998) Engineering Degree from Institut Teknologi Sepuluh November

Work Experience

- (2011) Engineering Manager at Tanjung Emas Semarang Branch
- (2012) Senior Manager for Design & Build at PT Pelabuhan Indonesia III
- (2013) Head of Bureau of Corporate Strategic Planning & Performance at PT Pelabuhan Indonesia III
- (2016) General Manager at Tanjung Perak Surabaya Branch
- (2017) President Director at PT Terminal Petikemas Surabaya
- (2018-2020) Director of Engineering at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2020-2021) Special Staff for President Director (Head of Technical & Safety Department) in JIPE Industrial Area – Manyar Gresik, East Java

Information on Concurrent Positions

-

Affiliation

No affiliation with the Board of Directors nor any other members the Board of Commissioners



PRASETYO

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis | Director of Business Transformation and Development

Periode Jabatan

22 Juni 2020 - 15 Maret 2021, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 50 tahun per Desember 2020
Kelahiran Mojokerto, 16 Mei 1970

Domisili

Surabaya, Jawa Timur

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-213/MBU/06/2020

Pendidikan

- (1994) Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- (2019) *Master of Business Administration* dari SBM ITB

Pengalaman Kerja

- (2009) *Manager* Teknik Cabang Gresik di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2010) *Assistant Senior Manager* Perencanaan Usaha di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2011) *Assistant Senior Manager* Pemeliharaan Bangunan dan Ass Kepala Biro Perencanaan di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2013) *General Manager* pelabuhan Benoa dan Senior Manajer Supervisi Teknik di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2014) Direktur Utama PT Pelindo Properti Indonesia
- (2017-2020) Kepala Biro Perencanaan Strategis dan Kinerja Korporat di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Informasi Rangkap Jabatan

Komisaris Utama PT Prima Terminal Petikemas

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya

Period:

22 June 2020 – 15 March 2021, 1st Period

Personal Data

Indonesian Citizen
50 years old per December 2020
Born in Mojokerto, 16 May 1970

Domicile

Surabaya, East Java

Appointment History

Minister of SOE Regulation as the General Meeting of Shareholders No. SK-213/MBU/06/2020

Education

- (1994) Architecture Engineering Degree from Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- (2019) *Master of Business Administration* from SBM ITB

Work Experience

- (2009) *Engineering Manager* at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Gresik Branch
- (2010) *Assistant Senior Manager* for Business Planning at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2011) *Assistant Senior Manager* for Building Maintenance & Assistant Head of Bureau of Planning at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2013) *General Manager* at Benoa Port & Senior Manager for Engineering Supervision at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- (2014) *President Director* at PT Pelindo Properti Indonesia
- (2017-2020) *Head of Bureau of Corporate Strategic Planning & Performance* at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Information on Concurrent Positions

President Director at PT Prima Terminal Petikemas

Affiliation

No affiliation with the Board of Directors nor any other members the Board of Commissioners



HENRY NALDI

Direktur SDM & Umum | Director of Human Resources & General Affairs

Periode Jabatan

22 Juni 2020 - 2025, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 53 tahun per Desember 2020
Kelahiran Medan, 29 September 1967

Domisili

Medan, Sumatera Utara

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-213/MBU/06/2020

Pendidikan

- (1992) Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung
- (2001) Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara

Pengalaman Kerja

- (2003-2006) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai *Manager* Teknik pada Cabang pelabuhan Belawan
- (2006-2008) Pengawas Bidang pada Satuan Pengawas Intern Pelindo 1
- (2008-2009) *Senior Manager* Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu Pelindo 1
- (2009-2015) *Senior Manager* Teknologi Informasi Pelindo 1
- (2015-2019) Kepala *Strategic Management Office* Pelindo 1
- (2020) SVP Manajemen Transformasi serta SVP Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pelindo 1

Informasi Rangkap Jabatan

Komisaris Utama PT Prima Husada Cipta Medan

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya

Period:

22 June 2020 – 2025, 1st Period

Personal Data

Indonesian Citizen
53 years old per December 2020
Born in Medan, 29 September 1967

Domicile

Medan, North Sumatera

Appointment History

Minister of SOE Regulation as the General Meeting of Shareholders No. SK-213/MBU/06/2020

Education

- (1992) Bachelor Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology
- (2001) Magister of Management from Universitas Sumatera

Work Experience

- (2003-2006) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as Engineering Manager at Belawan Port Branch
- (2006-2008) Field Supervisor at Internal Audit Unit Pelindo 1
- 2008-2009) Senior Manager for Risk Management & Quality Management Pelindo 1
- 2009-2015) Senior Manager for Information Technology Pelindo 1
- (2015-2019) Head of Strategic Management Office Pelindo 1
- (2020) SVP of Transformation Management & SVP of Business Planning & Development Pelindo 1

Information on Concurrent Positions

President Commissioner of PT Prima Husada Cipta Medan

Affiliation

No affiliation with the Board of Directors nor any other members the Board of



**ROY
LEONARD**

Direktur Keuangan | Director of Finance

Periode Jabatan

22 Oktober 2020 - 2025, Periode Ke-1

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 42 tahun per Desember 2020
Kelahiran Jakarta, 29 Juli 1978

Domisili

DKI Jakarta

Riwayat Penunjukan

Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. SK-345/MBU/10/2020

Pendidikan

(2002) Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja

- (2002-2003) Auditor di KPMG
- (2003-2014) Auditor sampai dengan Assurance Senior Manager di PricewaterhouseCoopers Jakarta
- (2009-2011) Assurance Manager di PricewaterhouseCoopers Helsinki, Finlandia
- (2014-2015) CFO/Executive Vice President di Lazada Group Indonesia
- (2015-2020) CFO/Direktur di New Priok Container Terminal One, Indonesia

Informasi Rangkap Jabatan

Komisaris Utama PT Prima Multi Terminal

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi maupun dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya

Period:

22 October 2020 – 2025, 1st Period

Personal Data

Indonesian Citizen
42 years old per December 2020
Born in Jakarta, 29 July 1978

Domicile

DKI Jakarta

Appointment History

Minister of SOE Decision as the General Meeting of Shareholders No. SK-345/MBU/10/2020

Education

(2002) Bachelor Degree in Economics from University of Indonesia

Work Experience

- (2002-2003) Auditor at KPMG
- (2003-2014) Auditor up to Assurance Senior Manager at PricewaterhouseCoopers Jakarta
- (2009-2011) Assurance Manager at PricewaterhouseCoopers Helsinki, Finland
- (2014-2015) CFO/Executive Vice President at Lazada Group Indonesia
- (2015-2020) CFO/Director at New Priok Container Terminal One, Indonesia

Information on Concurrent Positions

President Commissioner at PT Prima Multi Terminal

Affiliation

No affiliation with the Board of Directors nor any other members the Board of Commissioners

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE OFFICERS PROFILES

KANTOR PUSAT

HEAD OFFICE

NO	KETERANGAN JABATAN POSITION	NAMA NAME	SK Pengangkatan APPOINTMENT ORDER	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION	UNIVERSITAS ALMA-MATER	TAHUN KELULUSAN GRADUATE YEAR
DIREKTORAT UTAMA							
A DIVISI MANAJEMEN STRATEGIS PERUSAHAAN CORPORATE STRATEGIC MANAGEMENT DIVISION							
	SVP Manajemen Strategis Perusahaan SVP of Company Strategic Management	Sarmidi	02 September 2019 September 02, 2019	47 Thn 12 Bln 47 Yrs 12 Mth	S2 Magister Management	Univ Gajah Mada	2003
	VP Perencanaan Strategis VP of Strategic Planning	Sondang Rumiris Patricia	02 September 2019 September 02, 2019	34 Thn 8 Bln 34 Yrs 8 Mth	S2	Erasmus University Rotterdam	2017
	VP Peningkatan Kinerja VP of Performance Improvement	Kurnia Parlindungan Nasution	28 September 2019 September 28, 2019	40 Thn 1 Bln 40 Yrs 1 Mth	S1	Pembangunan Panca Budi	2011
	VP Manajemen Risiko VP of Risk Management	Fawida Hanum Matondang	02 September 2019 September 02, 2019	47 Thn 9 Bln 47 Yrs 9 Mth	S2	Univ Gajah Mada	2003
B DIVISI PENGADAAN PROCUREMENT DIVISION							
	SVP Pengadaan SVP of Procurement	Safrial	02 September 2019 September 02, 2019	49 Thn 9 Bln 49 Yrs 9 Mth	S2 Marketing	Univ Gajah Mada	2003
	VP Pengadaan Infrastruktur VP of Infrastructure Procurement	Zefrinal	02 September 2019 September 02, 2019	49 Thn 2 Bln 49 Yrs 2 Mth	D3	Univ Sumatera Utara	1994
	VP Pengadaan Suprastruktur dan Alat Apung VP of Superstructure & Floating Device Procurement	Agus Rianto	02 September 2019 September 02, 2019	35 Thn 4 Bln 35 Yrs 4 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2009
	VP Administrasi Pengadaan dan Standarisasi Harga VP of Procurement Administration & Price Standardization	Didik Juliyantoro	02 September 2019 September 02, 2019	42 Thn 5 Bln 45 Yrs 5 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2002
C DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY DIVISION							
	SVP Sekretariat Perusahaan SVP of Corporate Secretary	Imron Eryandy	30 Maret 2020 March 30, 2020	45 Thn 8 Bln 45 Yrs 8 Mth	S1 Akuntansi S1 Accounting	Univ Sumatera Utara	2003
	VP Kesekretariatan dan Kepatuhan Perusahaan VP of Corporate Secretary & Compliance	Widya Gustanto	02 September 2019 September 02, 2019	49 Thn 3 Bln 49 Yrs 3 Mth	S1	Univ Gajah Mada	2001
	VP Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga VP of Public Relations & Inter Institutional Relations	Fiona Sari Utami	02 September 2019 September 02, 2019	33 Thn 5 Bln 33 Yrs 5 Mth	S1	Univ Padjadjaran	2009
	VP Kemitraan dan Bina Lingkungan VP of Partnership & Community Empowerment	Fatimah Zuhra	02 September 2019 September 02, 2019	51 Thn 11 Bln 51 Yrs 11 Mth	S2	Univ Sumatera Utara	2008
	VP Kantor Perwakilan Jakarta VP of Jakarta Representative Office	Lisa Pebrina	02 September 2019 September 02, 2019	32 Thn 10 Bln 32 Yrs 10 Mth	D3	Politeknik Negeri Medan	2009



NO	KETERANGAN JABATAN POSITION	NAMA NAME	SK Pengangkatan APPOINTMENT ORDER	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION	UNIVERSITAS ALMA-MATER	TAHUN KELULUSAN GRADUATE YEAR
D SATUAN PENGAWASAN INTERN INTERNAL AUDIT UNIT							
	SVP Satuan Pengawasan Intern SVP of Internal Audit Unit	Emilda Andayani	02 September 2019 September 02, 2019	48 Thn 4 Bln 48 Yrs 4 Mth	S2 Manajemen S2 Management	Univ Gajah Mada	2003
	Deputy SVP Pengawasan Keuangan Deputy SVP of Financial Audit	Syarief Husein	02 September 2019 September 02, 2019	50 Thn 8 Bln 50 Yrs 8 Mth	S1	Univ Syah Kuala	2001
	Deputy SVP Pengawasan Operasional dan Komersial Deputy SVP of Operational & Commercial Audit	Andri Lesmana	02 September 2019 September 02, 2019	48 Thn 9 Bln 48 Yrs 9 Mth	S1	Univ Cut Nyak Dhien	2003
	Deputy SVP Pengawasan Teknik dan Investasi Deputy SVP of Engineering & Investment Audit	Teuku Muhammad Saldi	02 September 2019 September 02, 2019	49 Thn 4 Bln 49 Yrs 4 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	1999
	Deputy SVP Pengawasan SDM dan Umum Deputy SVP of HR & General Affairs Audit	Kamal Akhyar	02 September 2019 September 02, 2019	45 Thn 7 Bln 45 Yrs 7 Mth	S2	Univ Trisakti	2010
DIREKTORAT OPERASI DAN KOMERSIAL OPERATIONS & COMMERCIAL DIRECTORATE							
A DIVISI PEMASARAN MARKETING DIVISION							
	SVP Pemasaran SVP of Marketing	Aprilla Dwison	18 Agustus 2020 August 18, 2020	53 Thn 8 Bln 53 Yrs 8 Mth	S2 Magister Manajemen S2 Magister Management	Univ Gajah Mada	2001
	VP Pengembangan Pelanggan dan Komunitas pelabuhan VP of Customer & Port Community Development	Novia Rezky Rianda Siregar	02 September 2019 September 02, 2019	29 Thn 2 Bln 29 Yrs 2 Mth	S1	Univ Trisakti	2009
	VP Tarif, Promosi dan Strategi Pemasaran VP of Tariff, Promotion & Marketing Strategies	Dewi Novia Nursa	18 Mei 2020 May 18, 2020	33 Thn 1 Bln 33 Yrs 1 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2010
	VP Kerjasama Bisnis dan Sinergi BUMN VP of Business Cooperation & SOE Synergy	Soraya Yohana Siahaan	18 Mei 2020 May 18, 2020	36 Thn 3 Bln 36 Yrs 3 Mth	S1 Manajemen S1 Management	Univ Trisakti	2005
B DIVISI BISNIS TERMINAL DAN LOGISTIK TERMINAL & LOGISTICS BUSINESS DIVISION							
	SVP Bisnis Terminal dan Logistik SVP of Terminal & Logistics Business	Uli Dani Desrina	02 September 2019 September 02, 2019	32 Thn 0 Bln 32 Yrs 0 Mth	S2 Ekonomi Manajemen S2 Economy Management	Univ Sumatera Utara	2016
	VP Terminal Penumpang, Kendaraan, dan Umum VP of Passenger, Vehicles, and General Terminal	Edy Agustri	02 September 2019 September 02, 2019	55 Thn 4 Bln 55 Yrs 4 Mth	S2	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia	2012
	VP Bisnis Logistik VP of Logistics Business	Mikono Azhari	02 September 2019 September 02, 2019	47 Thn 5 Bln 47 Yrs 5 Mth	S2	Univ Harapan Medan	2018
	VP Terminal Petikemas dan Curah VP of Container & Bulk Terminals	Indramawan	02 September 2019 September 02, 2019	47 Thn 10 Bln 47 Yrs 10 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2004

NO	KETERANGAN JABATAN POSITION	NAMA NAME	SK Pengangkatan APPOINTMENT ORDER	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION	UNIVERSITAS ALMA-MATER	TAHUN KELULUSAN GRADUATE YEAR
C DIVISI BISNIS PROPERTI DAN PENGUSAHAAN ASET PROPERTY BUSINESS & ASSET UTILISATION DIVISION							
	SVP Bisnis Properti dan Pengusahaan Aset SVP of Property Business & Asset Utilization	Sri Suyono	18 Agustus 2020 August 18, 2020	47 Thn 11 Bln 47 Yrs 11 Mth	S2 Hukum Bisnis S2 Business Law	USU Univ Sumatera Utara	2004
	VP Pengawasan Aset VP of Assets Supervision	Andy Syafril	02 September 2019 September 02, 2019	45 Thn 9 Bln 45 Yrs 9 Mth	D3	BPLP	1997
	VP Bisnis Properti VP of Property Business	Adhi Kresna Novianto	02 September 2019 September 02, 2019	35 Thn 1 Bln 35 Yrs 1 Mth	S2	Univ Gajah Mada	2014
	VP Pengusahaan Aset VP of Assets Utilization	Jenny Omishari Hasibuan	02 September 2019 September 02, 2019	34 Thn 9 Bln 34 Yrs 9 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2010
D DIVISI BISNIS MARITIM MARITIME BUSINESS DIVISION							
	SVP Bisnis Maritim SVP of Maritime Business	Mardiofi	20 Februari 2020 February 20, 2020	50 Thn 9 Bln 50 Yrs 9 Mth	S1	STIE Teladan Medan	2004
	VP Pelayanan Kapal VP of Ship Services	Yennovin	02 September 2019 September 02, 2019	47 Thn 8 Bln 47 Yrs 8 Mth	S1	STIP	2009
	VP Pelayanan Maritim VP of Maritime Services	Junaidi	02 September 2019 September 02, 2019	51 Thn 6 Bln 51 Yrs 6 Mth	S1	STIE Pelita Bangsa	2013
	VP Bisnis di Selat Malaka VP of Malacca Strait Business	Joko Lamani Putra	02 September 2019 September 02, 2019	48 Thn 7 Bln 48 Yrs 7 Mth	S2	AIP/PLAP	2005
DIREKTORAT TEKNIK ENGINEERING DIRECTORATE							
A DIVISI PERALATAN EQUIPMENT DIVISION							
	SVP Peralatan SVP of Equipment	Pramujaya Simbolon	02 September 2019 September 02, 2019	46 Thn 9 Bln 46 Yrs 9 Mth	S1	Sekolah Tinggi Teknik Harapan	2002
	VP Mesin, Listrik, Air, dan Telekomunikasi VP of Machineries, Electricity, Water, and Telecommunication	Muhamad Heru Kusnanto	02 September 2019 September 02, 2019	34 Thn 1 Bln 34 Yrs 1 Mth	S1	ITS	2009
	VP Alat Bongkar Muat VP of Loading/Unloading Equipment	Fahryanto	02 September 2019 September 02, 2019	34 Thn 9 Bln 34 Yrs 9 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2008
	VP Administrasi dan Pengendalian Proyek Peralatan VP of Equipment Projects Administration & Control	Indri Gunawan	02 September 2019 September 02, 2019	50 Thn 2 Bln 50 Yrs 2 Mth	S1	Sekolah Tinggi Teknik Harapan	2000
	VP Penyiapan Armada VP of Fleet Preparation	Rahmad Hidayat	08 Januari 2020 January 08, 2020	49 Thn 0 Bln 49 Yrs 0 Mth	S2	BP3IP	2008
B DIVISI FASILITAS FACILITIES DIVISION							
	SVP Fasilitas SVP of Facilities	Dominggo Pasaribu	01 Oktober 2019 October 01, 2019	47 Thn 0 Bln 47 Yrs 0 Mth	S2	Univ Sumatera Utara	2007
	VP Rekayasa VP of Engineering	Idris Syahputra Nasution	02 September 2019 September 02, 2019	40 Thn 7 Bln 40 Yrs 7 Mth	S1	Sekolah Tinggi Teknik Harapan	2010
	VP Pemeliharaan Fasilitas VP of Facilities Maintenance	Nailul Abror Pohan	02 September 2019 September 02, 2019	35 Thn 3 Bln 35 Yrs 3 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2009
	VP Administrasi dan Pengendalian Proyek Fasilitas VP of Facilities Projects Administration & Control	Rachmad Junizar	02 September 2019 September 02, 2019	41 Thn 6 Bln 41 Yrs 6 Mth	S1	Sekolah Tinggi Teknik Harapan	2005



NO	KETERANGAN JABATAN POSITION	NAMA NAME	SK Pengangkatan APPOINTMENT ORDER	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION	UNIVERSITAS ALMA-MATER	TAHUN KELULUSAN GRADUATE YEAR
C DIVISI MANAJEMEN DAN HSSE MANAGEMENT & HSSE DIVISION							
	SVP Sistem Manajemen dan HSSE SVP of Management System & HSSE	Hendri Indra	02 September 2019 September 02, 2019	47 Thn 2 Bln 47 Yrs 2 Mth	S2	STIE Bisnis Indonesia	2007
	VP Sistem Manajemen VP of Management System	Susi Nariani	02 September 2019 September 02, 2019	48 Thn 0 Bln 48 Yrs 0 Mth	S1	Univ Amir Hamzah	2010
	VP Pengelolaan Lingkungan VP of Environmental Management	M. Haris	02 September 2019 September 02, 2019	36 Thn 5 Bln 36 Yrs 5 Mth	S1	ITS	2007
	VP HSSE VP of HSSE	Rinandar Thamrin	18 Desember 2020 December 18, 2020	45 Thn 8 Bln 45 Yrs 8 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2002
DIREKTORAT TRANSFORMASI DAN PENGEMBANGAN BISNIS BUSINESS TRANSFORMATION & DEVELOPMENT DIRECTORATE							
A DIVISI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS BUSINESS PLANNING & DEVELOPMENT DIVISION							
	SVP Perencanaan dan Pengembangan Bisnis SVP of Business Planning & Development	Arief Hermawan	18 Agustus 2020 August 18, 2020	50 Thn 1 Bln 50 Yrs 1 Mth	S1	Univ Al Wasliyah	2001
	VP Perencanaan dan Master Plan VP of Planning & Master Planning	Orry Giovanni	02 September 2019 September 02, 2019	33 Thn 9 Bln 33 Yrs 9 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2006
	VP Perencanaan dan Pengelolaan Investasi VP of Investment Planning & Management	Rizki Affandi Nasution	02 September 2019 September 02, 2019	33 Thn 5 Bln 33 Yrs 5 Mth	S2	Univ Sumatera Utara	2020
	VP Pengembangan Bisnis VP of Business Development	Ahmad Fauzi	02 September 2019 September 02, 2019	36 Thn 8 Bln 36 Yrs 8 Mth	S1 Teknik Sipil S1 Civil Engineering	Univ Sriwijaya	2006
B DIVISI MANAJEMEN TRANSFORMASI TRANSFORMATION MANAGEMENT DIVISION							
	SVP Manajemen Transformasi SVP of Transformation Management	Baratto Rosalina	18 Agustus 2020 August 18, 2020	50 Thn 7 Bln 50 Yrs 7 Mth	S1	Univ Muhammadiyah Sumatera Utara	2001
	VP Manajemen Inovasi VP of Innovation Management	Elfi Martha Rosita	01 Desember 2020 December 01, 2020	45 Thn 9 Bln 45 Yrs 9 Mth	S2	Univ Gajah Mada	2003
	VP Manajemen Perubahan VP of Change Management	Rafika Aulia Hasibuan	02 September 2019 September 02, 2019	36 Thn 2 Bln 36 Yrs 2 Mth	S2	Univ Sumatera Utara	2009
C DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION							
	SVP Teknologi Informasi SVP of Information Technology	Rudy	02 September 2019 September 02, 2019	52 Thn 3 Bln 52 Yrs 3 Mth	S1	Univ Dharmawangsa	1999
	VP Perencanaan dan Tata Kelola TI VP of IT Planning & Governance	Wahyu Yuliandri	02 September 2019 September 02, 2019	40 Thn 5 Bln 40 Yrs 5 Mth	S1	STMIK AMIK	2007
	VP Pengembangan TI VP of IT Development	Joko Suzatmiko	02 September 2019 September 02, 2019	44 Thn 6 Bln 44 Yrs 6 Mth	D3	Univ Sumatera Utara	1998
	VP Pelayanan dan Pengoperasian TI VP of IT Service & Operation	Khairi Mahruzar Siregar	02 September 2019 September 02, 2019	50 Thn 8 Bln 50 Yrs 8 Mth	S2	STIE Indonesia Malang	2010
	VP Pengoperasian ERP VP of ERP Operation	Dudi Rahmadiansyah	02 September 2019 September 02, 2019	42 Thn 4 Bln 42 Yrs 4 Mth	S2	ITB	2014

NO	KETERANGAN JABATAN POSITION	NAMA NAME	SK Pengangkatan APPOINTMENT ORDER	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION	UNIVERSITAS ALMA-MATER	TAHUN KELULUSAN GRADUATE YEAR
DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM HUMAN RESOURCE & GENERAL DIRECTORATE							
A DIVISI MANAJEMEN STRATEGIS SDM HR STRATEGIC MANAGEMENT DIVISION							
	SVP Manajemen Strategis SDM SVP of HR Strategic Management	Basuki Soleh	02 September 2019 September 02, 2019	47 Thn 0 Bln 47 Yrs 0 Mth	S2	Univ Sumatera Utara	2004
	VP Perencanaan Strategis Manajemen SDM dan Organisasi VP of HR & Organizational Strategic Planning Management	Dewi Suryani Ekawati	02 September 2019 September 02, 2019	43 Thn 2 Bln 43 Yrs 2 Mth	S2	Univ Sumatera Utara	2014
	VP Pengembangan Karir dan Analisa Pegawai VP of Career Development & Employee Analysis	Lailatul Komariyah	02 September 2019 September 02, 2019	35 Thn 0 Bln 25 Yrs 0 Mth	S2	Netherlands Maritime University	2016
	VP Pengembangan Kapabilitas SDM VP of HR Capabilities Development	Irwansyah	02 September 2019 September 02, 2019	46 Thn 7 Bln 46 Yrs 7 Mth	S2	Universiti Sains Malaysia	2008
	VP Remunerasi dan Kesejahteraan VP of Remuneration & Welfare	Helmi	02 September 2019 September 02, 2019	49 Thn 11 Bln 49 Yrs 11 Mth	S2	Univ Sumatera Utara	2011
B DIVISI UMUM GENERAL AFFAIRS DIVISION							
	SVP Umum SVP of General Affairs	Muhammad Eriansyah	30 Maret 2020 March 30, 2020	48 Thn 8 Bln 48 Yrs 8 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	1997
	VP Tata Usaha dan Pengelolaan Arsip Perusahaan VP of Administrative & Corporate Archives Management	Agusianto	30 Maret 2020 March 30, 2020	45 Thn 4 Bln 45 Yrs 4 Mth	S1	Univ Islam Riau	2005
	VP Kerumahtanggaan dan Keamanan Perusahaan VP of Corporate Housekeeping & Security	Sry Rahmawati	02 September 2019 September 02, 2019	47 Thn 2 Bln 47 Yrs 2 Mth	S1	Univ Tjut Nyak Dhien	2006
C DIVISI HUKUM LEGAL DIVISION							
	SVP Hukum SVP of Legal	Muhammad Noordin	18 Agustus 2020 August 18, 2020	49 Thn 1 Bln 49 Yrs 1 Mth	S2	Univ Sumatera Utara	2005
	VP Penelaahan Hukum VP of Legal Analysis	M.Taufik Fadillah	08 Januari 2020 January 08, 2020	51 Thn 5 Bln 51 Yrs 5 Mth	S2	Univ Gadjah Mada	2003
	VP Perikatan VP of Engagement	Muhammad Yusron	02 September 2019 September 02, 2019	48 Thn 2 Bln 48 Yrs 2 Mth	S2	Univ Gadjah Mada	2003
	VP Hubungan Industrial VP of Industrial Relations	Diah Darmawidiana	02 September 2019 September 02, 2019	52 Thn 11 Bln 52 Yrs 11 Mth	S2	Univ Gadjah Mada	2002
	VP Litigasi VP of Litigation	Fadillah Haryono	02 September 2019 September 02, 2019	35 Thn 4 Bln 35 Yrs 4 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2007



NO	KETERANGAN JABATAN POSITION	NAMA NAME	SK Pengangkatan APPOINTMENT ORDER	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION	UNIVERSITAS ALMA-MATER	TAHUN KELULUSAN GRADUATE YEAR
D DIVISI UNIVERSITAS KORPORAT CORPORATE UNIVERSITY DIVISION							
	SVP Universitas Korporat SVP of Corporate University	Kasih Dwi Yanti	02 September 2019 September 02, 2019	49 Thn 3 Bln 49 Yrs 3 Mth	S1	Univ Dharmawangsa	2004
	VP Pengembangan Pembelajaran Konten Manajemen dan Kepemimpinan VP of Management & Leadership Contents Learning Development	Aufar Ibna	02 September 2019 September 02, 2019	34 Thn 11 Bln 34 Yrs 11 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2009
	VP Pengembangan Pembelajaran Konten Teknikal VP of Technical Contents Learning Development	Zulhendri	02 September 2019 September 02, 2019	48 Thn 10 Bln 48 Yrs 10 Mth	S1 Teknik Industri S1 Industrial Engineering	Sekolah Tinggi Teknik Harapan	2002
	VP Administrasi dan Operasional Pembelajaran VP of Administrative & Operational Learning	Reni Zakaria	02 September 2019 September 02, 2019	45 Thn 7 Bln 45 Yrs 7 Mth	S1	STIE Taman Harapan	2002
DIREKTORAT KEUANGAN FINANCIAL DIRECTORATE							
A DIVISI UNIT PUSAT LAYANAN SHARED SERVICE CENTRE DIVISION							
	SVP Unit Pusat Layanan SVP of Shared Service Centre	Santi Saptasari	30 Maret 2020 March 30, 2020	48 Thn 9 Bln 48 Yrs 9 Mth	S1	Univ. Amir Hamzah	2014
	VP UPL Keuangan VP of UPL for Finance	Rukiah Harahap	02 Oktober 2020 October 02, 2020	49 Thn 11 Bln 49 Yrs 11 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	1993
	VP UPL Sumber Daya Manusia VP of UPL for Human Resource	Auriga	30 Maret 2020 March 30, 2020	36 Thn 2 Bln 36 Yrs 2 Mth	S1	Univ Sebelas Maret	2008
	VP UPL Pengadaan VP of UPL for Procurement	Basrum Arito Banurea	02 September 2019 September 02, 2019	53 Thn 3 Bln 53 Yrs 3 Mth	S1	Institut Teknologi Medan	2007
	VP Pusat Pengembangan UPL VP UPL Development Centre	Syamsuddin	02 September 2019 September 02, 2019	47 Thn 7 Bln 47 Yrs 7 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2006
B DIVISI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN BUDGET PLANNING & CONTROLLING DIVISION							
	SVP Perencanaan dan Pengendalian Anggaran SVP Budget Planning & Control	Ichwal Fauzi Harahap	02 September 2019 September 02, 2019	48 Thn 1 Bln 48 Yrs 1 Mth	S2	Univ Gajah Mada	2003
	VP Anggaran VP Budget	Eko Siswoyo	02 Oktober 2020 02 October 2020	41 Thn 10 Bln 41 Yrs 10 Mth	S1	Univ Muhammadiyah Sumatera	2006
	VP <i>Financial Controller</i> VP Financial Controller	Albert Sihombing	02 September 2019 September 02, 2019	50 Thn 0 Bln 50 Yrs 0 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	1995
C DIVISI AKUNTANSI ACCOUNTING DIVISION							
	SVP Akuntansi SVP Accounting	Riza Nasution	02 September 2019 September 02, 2019	48 Thn 8 Bln 48 Yrs 8 Mth	S2	Univ Gajah Mada	2003
	VP Akuntansi Biaya VP Cost Accounting	Diehl Irdianto	02 September 2019 September 02, 2019	55 Thn 11 Bln 55 Yrs 11 Mth	S2	Univ Gajah Mada	2003
	VP Akuntansi Keuangan VP Financial Accounting	Vanda Sinaga	02 Oktober 2020 October 02, 2020	43 Thn 4 Bln 43 Yrs 4 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2003
	VP Pengelolaan Anak Perusahaan VP Subsidiary Management	Zainuddin	02 September 2019 September 02, 2019	48 Thn 10 Bln 48 Yrs 10 Mth	S1	Univ Dharmawangsa	1994

NO	KETERANGAN JABATAN POSITION	NAMA NAME	SK Pengangkatan APPOINTMENT ORDER	USIA AGE	GELAR PENDIDIKAN EDUCATION	UNIVERSITAS ALMA-MATER	TAHUN KELULUSAN GRADUATE YEAR
D DIVISI PAJAK TAX DIVISION							
	SPV Pajak SPV Tax	Maslahodima Siregar	02 September 2019 September 02, 2019	48 Thn 6 Bln 48 Yrs 6 Mth	S1	Univ Dharmawangsa	2001
	VP PPh VP Income Tax	Rahmaini Hasibuan	02 September 2019 September 02, 2019	49 Thn 9 Bln 49 Yrs 9 Mth	S1	Univ Dharmawangsa	2004
	VP PPhn VP Value Added Tax	Chairy Safrina Nasution	02 Oktober 2020 October 02, 2020	46 Thn 9 Bln 46 Yrs 9 Mth	S1	STT Harapan	2002
E DIVISI TREASURI TREASURY DIVISION							
	SVP Treasuri SVP Treasury	Syaiful	02 September 2019 September 02, 2019	55 Thn 7 Bln 55 Yrs 7 Mth	S1	HKBP Nomensen	1990
	VP Perbendaharaan dan Pendanaan VP Treasury & Funding	Faldi Saputra	02 September 2019 September 02, 2019	33 Thn 7 Bln 33 Yrs 7 Mth	S1	Univ Syiah Kuala	2010
	VP Hutang Piutang VP Accounts Payables & Receivables	Dodi Catur Fitriani	02 September 2019 September 02, 2019	41 Thn 3 Bln 41 Yrs 3 Mth	S2	Univ Islam Sumatera Utara	2020

KANTOR CABANG

BRANCHES

No	Jabatan/Cabang pelabuhan Position/Port Branches	Nama Name	SK Pengangkatan Letter Of Appointment	Usia Age	Gelar Pendidikan Title	Universitas Alma-Mater	Tahun Kelulusan Graduation Year
1	GM Cabang Belawan GM Belawan Branch	Yarham Harid	29 November 2016 November 29, 2019	51 Thn 1 Bln 51 Yrs 1 Mth	Magister Manajemen Magister Management	Univ Gajah Mada	2003
2	GM Cabang Dumai GM Dumai Branch	Joned R.	15 Mei 2019 May 15, 2019	49 Thn 5 Bln 49 Yrs 5 Mth	S2 Transportasi Laut Master of Sea Transportation	STMT Trisakti	2010
3	GM Terminal Petikemas Belawan (TPKB) GM Belawan Container Terminal (TPKB) Branch	Indra Pamulihan	07 Januari 2020 January 07, 2020	47 Thn 11 Bln 47 Yrs 11 Mth	S2	Univ Medan Area	2016
4	GM Cabang Tanjungpinang GM Tanjungpinang Branch	Yusrizal	18 Agustus 2020 August 18, 2020	49 Thn 2 Bln 49 Yrs 2 Mth	S1 Ekonomi Manajemen S1 Economic Management	Univ Dharmawangsa	2007
5	GM Cabang Pekanbaru GM Pekanbaru Branch	I Wayan Wirawan	21 Agustus 2018 August 21, 2018	49 Thn 7 Bln 49 Yrs 7 Mth	S2 Studi Pembangunan S2 Development Studies	Univ Sumatera Utara	2008



No	Jabatan/Cabang pelabuhan Position/Port Branches	Nama Name	SK Pengangkatan Letter Of Appointment	Usia Age	Gelar Pendidikan Title	Universitas Alma-Mater	Tahun Kelulusan Graduation Year
6	GM Cabang Lhokseumawe GM Lhokseumawe Branch	Budi Azmi	21 Agustus 2018 August 21, 2018	46 Thn 3 Bln 46 Yrs 3 Mth	S2 Magister Management S2 Magister Management	Univ Gadjah Mada	2001
7	GM Cabang Tanjung Balai Karimun GM Tanjung Balai Karimun Branch	Agust Deritanto	16 Januari 2020 January 16, 2020	49 Thn 4 Bln 49 Yrs 4 Mth	S1	Univ Malikussaleh	2006
8	GM Cabang Sibolga GM Sibolga Branch	Suhari	12 April 2019 April 12, 2019	54 Thn 6 Bln 54 Yrs 6 Mth	S1	Univ Cut Nyak Dhien	2006
9	GM Cabang Tembilahan GM Tembilahan Branch	Aulia Rahman	18 Agustus 2020 August 18, 2018	49 Thn 9 Bln 49 Yrs 9 Mth	S2	Univ Gadjah Mada	2003
10	GM Cabang Malahayati GM Malahayati Branch	Sam Arifin Wiwi	06 Februari 2018 February 06, 2018	54 Thn 10 Bln 54 Yrs 10 Mth	D3	STIP Jakarta	2002
11	GM Cabang Sungai Pakning GM Sungai Pakning Branch	Arif Indra Perdana	18 Agustus 2020 August 18, 2018	43 Thn 7 Bln 43 Yrs 7 Mth	S2	Medan Area	2014
12	GM Cabang Tanjung Balai Asahan GM Tanjung Balai Asahan Branch	M. Azmi Jauhari	18 Agustus 2020 August 18, 2018	42 Thn 4 Bln 42 Yrs 4 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2001
13	GM Cabang Kuala Tanjung GM Kuala Tanjung Branch	Richard Siahaan	06 Februari 2018 February 06, 2018	51 Thn 10 Bln 51 Yrs 10 Mth	S1	Sekolah Tinggi Teknik Harapan	2000
14	GM Cabang Batam GM Batam Branch	Al Abrar	18 Agustus 2020 August 18, 2018	49 Thn 9 Bln 49 Yrs 9 Mth	S1	Aip/PLAP	2000
15	GM Cabang Gunungsitoli GM Gunungsitoli Branch	Mulyono	30 April 2020 April 30, 2020	53 Thn 2 Bln 53 Yrs 2 Mth	S1	Univ Sumatera Utara	2001
16	GM Unit Galangan Kapal GM Shipyard Branch	Akhmad Yamani	09 September 2016 September 09, 2016	40 Thn 8 Bln 40 Yrs 8 Mth	S1	ITS	2005

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

EMPLOYEES DEMOGRAPHICS AND COMPETENCIES DEVELOPMENT

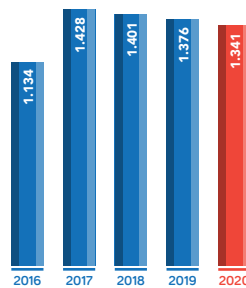
Per 31 Desember 2020, demografi atau jumlah karyawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berjumlah 1.341 orang. Mengalami penurunan sejumlah 35 orang dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2019 yang sebanyak 1.376 orang. Adanya penurunan ini disebabkan oleh pengunduran diri, pensiun, dan meninggal dunia.

Profil demografi karyawan Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini:

Per 31 December 2020, the demographics of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) total employees are 1,341 people. This was a 35 people short compared with the number per 31 December 2019 of 1,376 people. This decrease was due to resignation, retirement, and death.

The Company's demographic profile can be seen on tables & charts below:

PERGERAKAN JUMLAH KARYAWAN DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR
EMPLOYEES MOVEMENT FOR THE LAST 5 YEARS
(ORANG)
(PEOPLE)
2016-2020



DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN UNIT KERJA (ORANG)
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS BASED ON WORKING UNIT (PEOPLE)

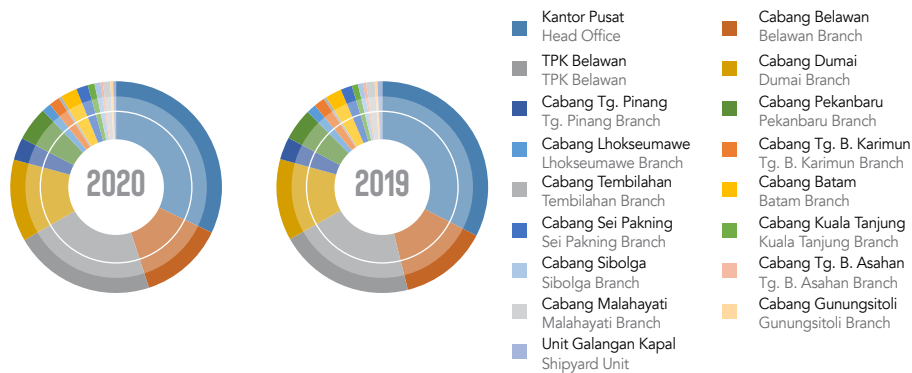
Unit Kerja Working Unit	2020			2019		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Kantor Pusat Head Office	268	162	430	285	163	448
Cabang Belawan Belawan Branch	152	21	173	161	25	186
TPK Belawan TPK Belawan	274	17	291	264	21	285
Cabang Dumai Dumai Branch	150	18	168	155	16	171
Cabang Tg. Pinang Tg. Pinang Branch	38	8	46	38	9	47
Cabang Pekanbaru Pekanbaru Branch	59	11	70	57	10	67
Cabang Lhokseumawe Lhokseumawe Branch	15	4	19	16	4	20
Cabang Tg. B. Karimun Tg. B. Karimun Branch	17	5	22	18	5	23
Cabang Tembilahan Tembilahan Branch	6	-	6	6	-	6
Cabang Batam Batam Branch	31	3	34	31	3	34
Cabang Sei Pakning Sei Pakning Branch	24	-	24	24	-	24



DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN UNIT KERJA (ORANG)
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS BASED ON WORKING UNIT (PEOPLE)

Unit Kerja Working Unit	2020			2019		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Cabang Kuala Tanjung Kuala Tanjung Branch	13	1	14	12	1	13
Cabang Sibolga Sibolga Branch	9	3	12	9	2	11
Cabang Tg. B. Asahan Tg. B. Asahan Branch	5	-	5	6	-	6
Cabang Malahayati Malahayati Branch	13	2	15	16	2	18
Cabang Gunungsitoli Gunungsitoli Branch	6	-	6	6	-	6
Unit Galangan Kapal Shipyards Unit	6	-	6	10	-	10
Jumlah Total	1.085	256	1.341	1.115	261	1.376

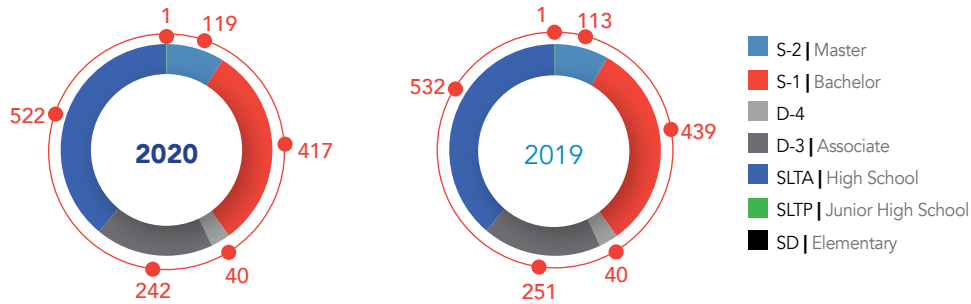
L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN (ORANG)
EMPLOYEES DEMOGRAPHY BASED ON EDUCATION LEVEL (PEOPLE)

Jenjang Pendidikan Education	2020			2019		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
S-2 Master	96	23	119	93	20	113
S-1 Bachelor	301	116	417	321	118	439
D-4	38	2	40	38	2	40
D-3 Associate	187	55	242	192	59	251
SLTA High School	462	60	522	470	62	532
SLTP Junior High School	1	0	1	1	0	1
SD Elementary	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	1.085	256	1.341	1.115	261	1.376

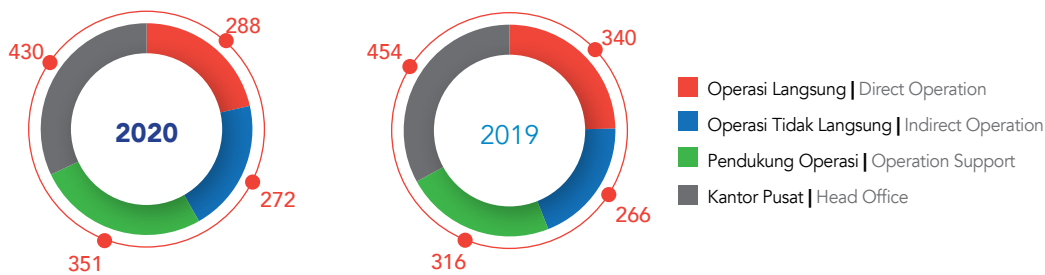
L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN PUSAT PELAYANAN (ORANG)

EMPLOYEE DEMOGRAPHY BASED ON SERVICE CENTER (PEOPLE)

Pusat Pelayanan Service Centre	2020	2019
Operasi Langsung Direct Operation	288	340
Operasi Tidak Langsung Indirect Operation	272	266
Pendukung Operasi Operation Support	351	316
Kantor Pusat Head Office	430	454
Jumlah Total	1.341	1.376

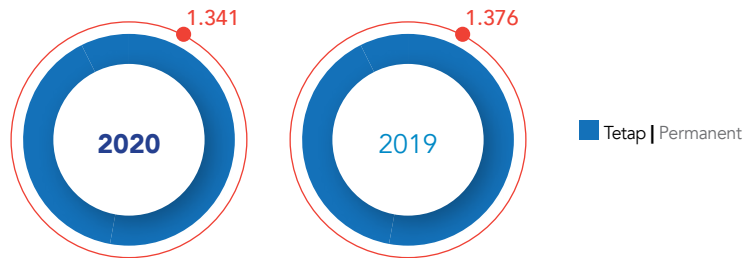


DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN (ORANG)

EMPLOYEE DEMOGRAPHY BASED ON EMPLOYMENT STATUS (PEOPLE)

Status Kepegawaian Employment Status	2020			2019		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Tetap Permanent	1.085	256	1.341	1.115	261	1.376
Jumlah Total	1.085	256	1.341	1.115	261	1.376

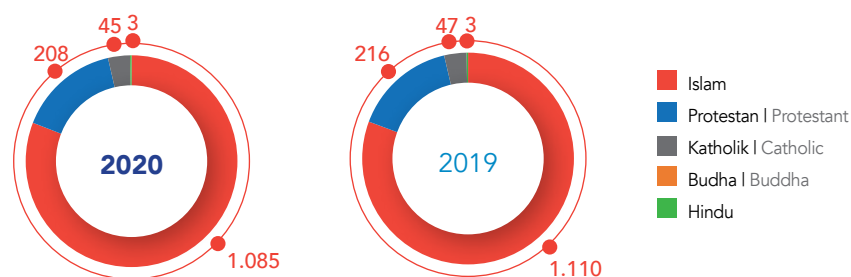
L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN AGAMA (ORANG)
EMPLOYEE DEMOGRAPHY BASED ON RELIGION (PEOPLE)

Agama Religion	2020			2019		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Islam	889	196	1.085	911	199	1.110
Protestan Protestant	161	47	208	168	48	216
Katholik Catholic	35	10	45	36	11	47
Budha Buddha	-	-	0	-	-	0
Hindu	-	3	3	-	3	3
Jumlah Total	1.085	256	1.341	1.115	261	1.376

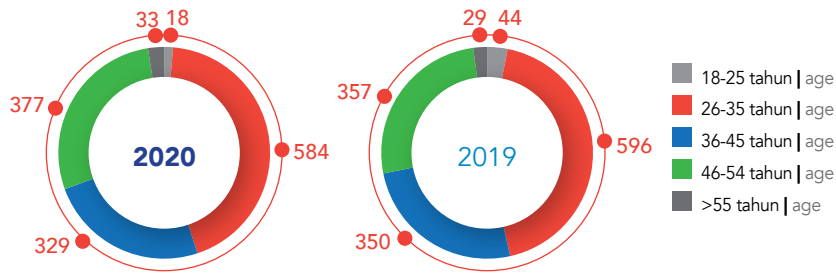
L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN RENTANG USIA (ORANG)
EMPLOYEE DEMOGRAPHY BASED ON AGE (PEOPLE)

Rentang Usia Age Range	2020			2019		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
18-25 tahun age	13	5	18	35	9	44
26-35 tahun age	455	129	584	461	135	596
36-45 tahun age	274	55	329	295	55	350
46-54 tahun age	312	65	377	303	54	357
>55 tahun age	31	2	33	23	6	29
Jumlah Total	1.085	256	1.341	1.117	259	1.376

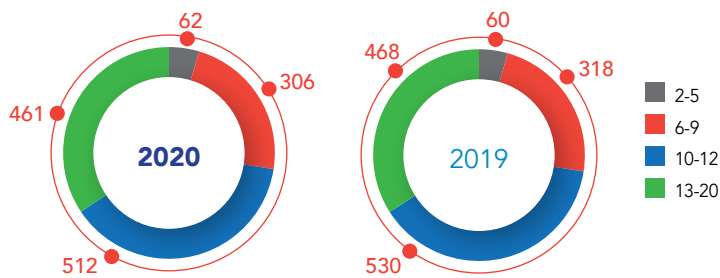
L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN KELAS JABATAN (ORANG)
EMPLOYEE DEMOGRAPHY BASED ON RANK CLASS (PEOPLE)

Kelas Jabatan Class Rank	2020			2019		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
2-5	58	4	62	57	3	60
6-9	242	64	306	252	66	318
10-12	375	137	512	389	141	530
13-20	410	51	461	417	51	468
Jumlah Total	1.085	256	1.341	1.115	261	1.376

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

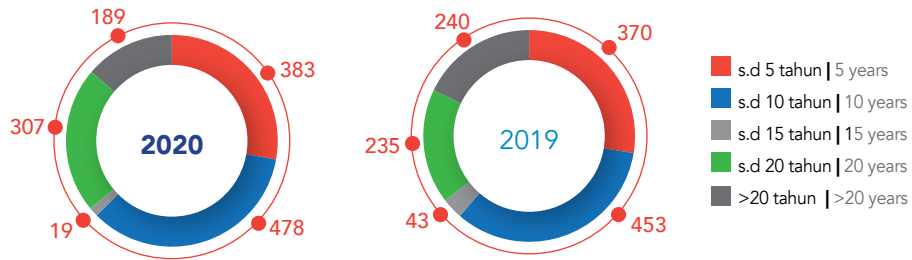


DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA (ORANG)
Employee Demography Based on Work Duration (People)

Masa Kerja Work Duration	2020			2019		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
s.d 5 tahun 5 years	291	79	370	306	77	383
s.d 10 tahun 10 years	355	98	453	380	98	478
s.d 15 tahun 15 years	42	1	43	18	1	19
s.d 20 tahun 20 years	201	34	235	262	45	307
>20 tahun >20 years	196	44	240	151	38	189
Jumlah >20 years	1.085	256	1.341	1.117	259	1.376

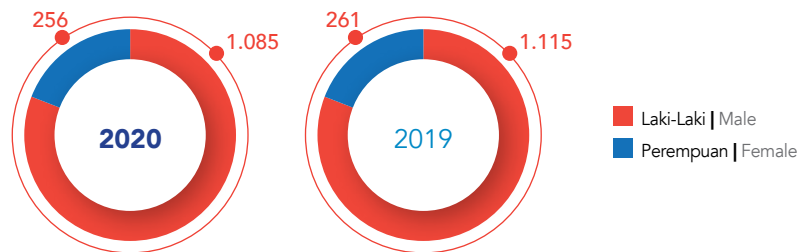
L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female





DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER/JENIS KELAMIN (ORANG)
EMPLOYEE DEMOGRAPHY BASED ON SEX (PEOPLE)

Gender/Jenis Kelamin Gender	2020	2019
Laki-Laki Male	1.085	1.115
Perempuan Female	256	261
Jumlah Total	1.341	1.376



PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

KEBIJAKAN

Demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Perseroan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan andal. Perseroan mengenali sumber daya manusia sebagai mitra utama dan strategis bagi Perseroan demi menuju jasa kepelabuhanan dengan pelayanan yang berstandar internasional. Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi, memiliki kompetensi yang berstandar internasional, produktivitas yang tinggi, serta berorientasi kepada pelayanan pelanggan. Oleh karena itu, Perseroan memberikan pelatihan dan pengembangan di seluruh aspek operasional Perseroan secara terencana dan berkelanjutan melalui SK Direksi Pelindo 1 No. KP.40/3/13/PI-20.TU tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

EMPLOYEES COMPETENCIES DEVELOPMENT

POLICY

In order to achieve set goals, the Company must have human resources with best qualities & reliabilities. The Company recognises human resource as main partner & strategic for the Company to a international standard service for port service. The Company has high commitment to improve human resources with high integrity, internationally competent, high productivity and customer oriented. Therefore, the Company provides planned & sustainable trainings & improvements throughout operational aspects under the Directors' Order Pelindo 1 No. KP.40/3/13/PI-20.TU 20 October 2020 on Employee Education & Training in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Environment.

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan dengan realisasi biaya pelatihan dan diklat yang ditanggung oleh Perseroan.

Throughout 2020, the Company has carried out training programs & improvements both by internal or external parties with Company sanctioned training cost.

KOMPETENSI INTI
CORE COMPETENCIES

No	Judul Training Training Title	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
1.	<i>Creative Problem Solving</i>	139	8 Juni – 1 Juni 2020 8 June–11 June 2020	4	Inti Core	Online
2.	Pelatihan Percakapan Bahasa Inggris Secara Online Online English Conversation Course	8	9 Juni– 7 September 2020 9 June–17 september 2020	9	Inti Core	Online
3.	<i>Problem Solving and Decision Making</i>	103	23 Juni–26 Juni 2020 23 June–26 June 2020	4	Inti Core	Online
4.	<i>E-learning Change</i> Manajemen E-learning Change Management	20	13 Juli–15 Juli 2020 13 July–15 July 2020	3	Inti Core	Online
5.	Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan Wahyudi Port Expert Certification	1	13 Juli–25 Juli 2020 13 July–25 July 2020	13	Inti Core	Online
6.	Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan Port Expert Certification	8	13 Juli–25 July 2020 13 July–15 July 2020	3	Inti Core	Online
7.	Pelatihan Pandu Laut Dalam Angkatan Tahun 2020 Sea Piloting 2020	10	15 Juli–25 Agustus 2020 15 July–25 August 2020	11	Inti Core	Online
8.	<i>E-learning Corporate Value</i> Perseroan E-learning Corporate Value	20	22 Juli–24 Juli 2020 22 July–24 July 2020	3	Inti Core	Online
9.	Diklat Sertifikasi Peningkatan kompetensi ANT II Tahun 2020/2021 (Online) Competencies Improvement Certification Training ANT II 2020/2021 (Online)	10	31 Agustus – 24 Oktober 2020 31 August – 24 October 2020	24	Inti Core	Online
10.	<i>E-Learning</i> Internalisasi AKHLAK Batch 1 E-Learning AKHLAK Internalisation Batch 1	97	5 Oktober – 10 Oktober 2020 5 October – 10 October 2020	6	Inti Core	Online
11.	<i>E-Learning Customer Service Excellence</i>	10	12 Oktober – 17 Oktober 2020 12 October – 17 October 2020	6	Inti Core	Online
12.	<i>E-Learning</i> Internalisasi AKHLAK Batch 2 E-Learning AKHLAK Internalisation Batch 2	206	12 Oktober – 17 Oktober 2020 12 October – 17 October 2020	6	Inti Core	Online
13.	<i>E-Learning</i> Internalisasi AKHLAK Batch 3 E-Learning AKHLAK Internalisation Batch 3	534	19 Oktober – 24 Oktober 2020 19 October – 24 October 2020	6	Inti Core	Online
14.	Pengukuhan Endorsement Sertifikat Pandu Tahun 2020 Batch II Pilot Certificate Endorsement 2020 Batch II	8	21 Oktober – 23 Oktober 2020 21 October – 23 October 2020	3	Inti Core	Kampus I PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) Jalan Raya Puncak – Jl. Beringin I No.1 Gadog, Pandansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat
15.	<i>E-Learning Customer Service Excellence 2</i>	1	21 Oktober – 26 Oktober 2020 21 October – 26 October 2020	6	Inti Core	Online
16.	Diklat Sertifikasi Peningkatan Kompetensi ANT II Tahun 2020/2021 (Praktek) Competencies Improvement Certification Training ANT II 2020/2021 (Practice)	10	26 Oktober – 11 Maret 2021 26 October – 11 March 2021	14	Inti Core	Politeknik Pelayanan Malahayati
17.	<i>Developing Customer Focused Team</i>	65	26 Oktober – 31 Oktober 2020 26 October – 31 October 2020	6	Inti Core	Online



KOMPETENSI INTI
CORE COMPETENCIES

No	Judul Training Training Title	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
18.	E-Learning Internalisasi AKHLAK Batch 4 E-Learning AKHLAK Internalisation Batch 4	520	26 Oktober – 31 Oktober 2020 26 October – 31 October 2020	6	Inti Core	Online
19	Pelatihan Sertifikasi Pandu Tingkat I Angkatan V Tahun 2020 Pilot Certification Training Level I Batch V 2020	9	2 November – 3 Desember 2020 2 November – 3 December 2020	2	Inti Core	Kampus I PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) Jalan Raya Puncak – Jl. Beringin I No.1 Gadog, Pandansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat
20	Penguakuan Endorsement Sertifikat Pandu Tahun 2020 Batch III Pilot Certificate Endorsement 2020 Batch III	7	9 November – 11 November 2020 9 November – 11 November 2020	3	Inti Core	Kampus I PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) Jalan Raya Puncak – Jl. Beringin I No.1 Gadog, Pandansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat
21.	Penguakuan Endorsement Sertifikat Pandu Tahun 2020 Batch IV Pilot Certificate Endorsement 2020 Batch IV	7	11 November – 13 November 2020 11 November – 13 November 2020	3	Inti Core	Kampus I PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) Jalan Raya Puncak – Jl. Beringin I No.1 Gadog, Pandansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat
22.	Diklat Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan (SVP) Port Expert Certification Training (SVP)	15	16 November – 27 November 2020 16 November – 27 November 2020	12	Inti Core	Online
23	Pelatihan Sertifikasi Pandu Tingkat 1 Angkatan IV Tahun 2020 Pilot Certification Training Level I Batch IV 2020	10	16 November - 17 Desember 2020 16 November - 17 December 2020	2	Inti Core	Kampus I PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) Jalan Raya Puncak – Jl. Beringin I No.1 Gadog, Pandansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat
24	Webinar Basic Port Operation Excellence	1	18 November - 18 Desember 2020 18 November - 18 December 2020	1	Inti Core	Online
25	Diklat Sertifikasi Ahli Kepelabuhanan Secara Online Online Port Expert Certification Training	5	7 November - 21 Desember 2020 7 November - 21 December 2020	15	Inti Core	Online
26	Seminar Shipping And Port 2021 Outbook	6	18 Desember – 8 Desember 2020 18 December – 8 December 2020	11	Inti Core	Online
Total		1830		192		

KOMPETENSI MANAJERIAL
MANAGERIAL COMPETENCIES

No	Judul Training Training Name	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
1.	E-learning Supervisory Skills	66	13 April – 16 April 2020 13 April – 16 April 2020	4	Manajerial Managerial	Online
2.	E-Learning E ective Leadership	137	16 April – 20 April 2020 16 April – 20 April 2020	5	Manajerial Managerial	Online
3.	Online Training Strategic Leadership	2	22 April – 23 Mei 2020 22 April – 23 May 2020	2	Manajerial Managerial	Online
4.	E-Learning E ective Leadership Batch 1	101	23 April – 26 April 2020 23 April – 26 April 2020	4	Manajerial Managerial	Online
5.	E-Learning Goals and Priorities Setting	136	27 April – 30 Mei 2020 27 April – 30 May 2020	4	Manajerial Managerial	Online
6.	E-Learning E ective Leadership Batch 2	139	30 April – 03 Mei 2020 30 April – 03 May 2020	4	Manajerial Managerial	Online
7.	Strategic Leadership Batch 1	25	4 Mei 2020 4 May 2020	1	Manajerial Managerial	Online
8.	Strategic Leadership Batch 2	25	8 Mei 2020 8 May 2020	1	Manajerial Managerial	Online
9.	Supervisory Skill	15	8 Mei 2020 8 May 2020	1	Manajerial Managerial	Online
10.	Webinar E ective Team Development	15	11 Mei 2020 11 May 2020	1	Manajerial Managerial	Online
11.	E-Learning E ective Team Development	104	9 Juni – 12 Juni 2020 9 June – 12 June 2020	4	Manajerial Managerial	Online
12.	Followership Skills	44	9 Juni – 12 Juni 2020 9 June – 12 June 2020	4	Manajerial Managerial	Online
13.	E ective Meeting Facilitation	44	15 Juni – 18 Juni 2020 15 June – 18 June 2020	4	Manajerial Managerial	Online
14.	High Impact Presentation Skills	50	16 Juni – 19 Juni 2020 16 June – 19 June 2020	4	Manajerial Managerial	Online
15.	E-Learning Management Skills	66	13 Juli– 19 Agustus 2020 13 July – 19 August 2020	7	Manajerial Managerial	Online
16.	Pelatihan dan Pembelaan Mentor Mentor Training and Defense	30	17 Juli 2020 17 July 2020	1	Manajerial Managerial	Online
17.	E-Learning Sikap Mental dan Etos Kerja Positif E-Learning Mental Attitudes and Positive Work	140	20 Juli – 26 Juli 2020 20 July – 26 July 2020	7	Manajerial Managerial	Online
18.	E-Learning Leading and Managing Self	66	5 Agustus – 11 Agustus 2020 5 August – 11 August 2020	7	Manajerial Managerial	Online
19.	E-Learning Managing Time and Pressure	139	12 Agustus – 18 Agustus 2020 12 August – 18 August 2020	7	Manajerial Managerial	Online
20.	E-Learning Business Transformation	43	19 Agustus – 25 Agustus 2020 19 August – 25 August 2020	7	Manajerial Managerial	Online
21.	E-Learning Achievement Motivation Training	66	21 Agustus – 27 Agustus 2020 21 August – 27 August 2020	7	Manajerial Managerial	Online
22.	E-Learning Assertiveness Skills	140	9 September – 15 September 2020 9 September – 15 September 2020	7	Manajerial Managerial	Online
23.	E-Learning Developing Execution Skills	66	15 September – 22 September 2020 15 September – 22 September 2020	8	Manajerial Managerial	Online
24.	E-Learning Performance Based Coaching and Counseling	45	22 September – 20 September 2020 22 September – 20 September 2020	7	Manajerial Managerial	Online



KOMPETENSI MANAJERIAL
MANAGERIAL COMPETENCIES

No	Judul Training Training Name	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
25.	<i>E-Learning Business Process Improvement</i>	140	22 September – 20 September 2020 22 September – 20 September 2020	7	Manajerial Managerial	Online
26.	<i>E-Learning Pemetaan Strategi Berbasis BSC</i> <i>E-Learning BSC Based Strategy Mapping</i>	10	12 Oktober – 17 Oktober 2020 12 October – 17 October 2020	6	Manajerial Managerial	Online
27.	<i>E-Learning E ective Model Generation</i>	142	19 Oktober – 24 Oktober 2020 19 October – 24 October 2020	6	Manajerial Managerial	Online
28.	<i>E-Learning E ctive Negotiation Skills</i>	11	26 Oktober – 31 Oktober 2020 26 October – 31 October 2020	6	Manajerial Managerial	Online
29.	<i>E-Learning Measuring Training E ctiveness</i>	7	26 Oktober – 31 Oktober 2020 26 October – 31 October 2020	6	Manajerial Managerial	Online
30.	<i>E-Learning Basic Feasibility Study</i>	13	4 November – 10 November 2020 4 November – 10 November 2020	7	Manajerial Managerial	Online
31.	<i>E-Learning Penyusunan Job Description</i> <i>E-Learning Job Description Preparation</i>	5	9 November – 15 November 2020 9 November – 15 November 2020	7	Manajerial Managerial	Online
32.	<i>E-Learning Penyusunan SOP</i> <i>E-Learning Composing SOP</i>	10	11 November – 17 November 2020 11 November – 17 November 2020	7	Manajerial Managerial	Online
33.	<i>E-Learning Workload Analysis</i>	3	16 November – 22 November 2020 16 November – 22 November 2020	7	Manajerial Managerial	Online
34.	<i>E-Learning Menyusun KPI Organisasi</i> <i>E-Learning Composing Organization KPI</i>	9	16 November – 22 November 2020 16 November – 22 November 2020	7	Manajerial Managerial	Online
35.	<i>Online Nasionalis Leadership Transforming Culture Energizing Future</i>	2	17 November 2020 17 November 2020	1	Manajerial Managerial	Online
36.	<i>E-Learning Organization Development</i>	5	16 November – 24 November 2020 16 November – 24 November 2020	7	Manajerial Managerial	Online
37.	<i>E-Learning Customer Relationship Management</i>	11	23 November – 29 November 2020 23 November – 29 November 2020	7	Manajerial Managerial	Online
38.	<i>E-Learning Assessment Centre</i>	65	23 November – 29 November 2020 23 November – 29 November 2020	7	Manajerial Managerial	Online
39.	<i>Pembekelan Assessment Kompetensi Manajerial</i> <i>Change The World</i> <i>Change The World Managerial Competencies</i> <i>Assessment Training</i>	3	18 Desember 2020 18 December 2020	1	Manajerial Managerial	Online
		2140		197		

KOMPETENSI TEKNIKAL
TECHNICAL COMPETENCIES

No	Judul Training Training Name	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
1.	Training Super IGMT	23	6 Januari – 17 Januari 2020 6 January – 17 January 2020	12	Teknikal Technical	Grha Pelindo Satu, Ruang 38.2
2.	Operator Mobile Crane	2	20 Januari – 4 Februari 2020 20 January – 4 February 2020	16	Teknikal Technical	Hotel Miyana, Jl H. Anif Nomor 28 Medan dan Lapangan Terminal Shorebase Cabang Belawan Hotel Miyana, Jl H. Anif Nomor 28 Medan & Belawan Branch Shorebase Terminal Field
3.	Pembelaan Stevedore dan Operator Alat Bongkar Stevedore & Loading Equipment Defence	17	22 Januari – 23 Januari 2020 22 January – 23 January 2020	2	Teknikal Technical	Graha Pelindo Satu Jl. Lingkar pelabuhan No.1 Belawan Lt. 7B.1 (Teater) Graha Pelindo Satu Jl. Lingkar pelabuhan No.1 Belawan Lt. 7B.1 (Theater)
4.	Mekanik RTG RTG Mechanic	10	4 Februari – 7 Februari 2020 4 February – 7 February 2020	4	Teknikal Technical	Terminal Petikemas Belawan Belawan Container Terminal
5.	Maintenance Mobile Crane	9	5 Februari – 12 Februari 2020 5 February – 12 February 2020	8	Teknikal Technical	Hotel Miyana, Jalan H.Arif Nomor 28 Medan
6.	Operator RTG	20	10 Februari – 11 Februari 2020 10 February – 11 February 2020	2	Teknikal Technical	Terminal Petikemas Belawan dan Hotel Miyana Jl H. Anif No.28, Medan
7.	Sertifikasi QIA Tingkat Lanjutan Advanced QIA Certification	1	17 Februari – 29 Februari 2020 17 February – 29 February 2020	13	Teknikal Technical	L Avenue O ce Tower It 17F, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 16, Pancoran – Jakarta Selatan
8.	Workshop Implementasi IDEA IDEA Implementation Workshop	26	17 Februari – 18 Februari 2020 17 February – 18 February 2020	2	Teknikal Technical	Grha Pelindo Satu Lantai 7B 1 (Ruang Teater) Grha Pelindo Satu Lantai 7B 1 (Theatre Room)
9.	Sertifikasi QIA Tingkat Nasional National QIA Certification	1	17 Februari – 27 Februari 2020 17 February – 27 February 2020	11	Teknikal Technical	L Avenue O ce Tower It 17F, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 16, Pancoran – Jakarta Selatan
10.	Pengoperasian dan Perawatan Mesin Kapal Ship Engine Operation & Maintenance	18	25 Februari – 26 Februari 2020 25 February – 26 February 2020	2	Teknikal Technical	Graha Pelindo Satu Jl. Lingkar pelabuhan No.1 Belawan Lt. 7B.1 (Teater) dan Cabang Belawan Graha Pelindo Satu Jl. Lingkar pelabuhan No.1 Belawan Lt. 7B.1 (Theatre) and Belawan Branch
11.	Refreshment Training Modul Project System (PS)	9	26 Februari – 28 Februari 2020 26 February – 28 February 2020	3	Teknikal Technical	Grha Pelindo Satu Lantai 7B 1 (Ruang Teater) Grha Pelindo Satu Lantai 7B 1 (Theatre Room)
12.	Workshop Brainstorming Peluang Bisnis Logistik 1 Workshop Brainstorming Logistical Business Opportunities 1	4	27 Februari 2020 27 February 2020	1	Teknikal Technical	Cabang Tanjungpinang Tanjungpinang Port
13.	UAT Report Business Data Warehouse Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPP) Jasa Pemanduan dan Penunjaan UAT Report Business Data Warehouse Non-Taxes State Revenues from Piloting & Tugging Service	18	27 Februari 2020 27 February 2020	1	Teknikal Technical	Graha Pelindo 1 Lt 7 Ruang 7A.1



KOMPETENSI TEKNIKAL
TECHNICAL COMPETENCIES

No	Judul Training Training Name	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
14.	Implementasi KPKU BUMN SOE KPKU Implementation	2	4 Maret – 6 Maret 2020 4 March – 6 March 2020	3	Teknikal Technical	Park Hotel Cawang Jakarta Timur Jl. Di. Panjaitan No. 5 RT. 7 RW 11 Cawang Jakarta Timur Park Hotel Cawang Jakarta Timur Jl. Di. Panjaitan No. 5 RT. 7 RW 11 Cawang East Jakarta
15.	Workshop Brainstorming Peluang Bisnis Logistik 2 Workshop Brainstorming Logistical Business Opportunities 2	9	5 Maret 2020 5 March 2020	1	Teknikal Technical	Ruang Rapat Cabang pelabuhan Pekanbaru Pekanbaru Port Branch Meeting Room
16.	Certified Risk Management Profesional (CRMP)	1	9 Maret – 13 Maret 2020 9 March – 13 March 2020	5	Teknikal Technical	Jl. Kapten Tendean No.1 Gedung Biru Lantai 4 Jakarta Selatan
17.	Pintar Pajak Smart At Tax	96	9 Maret – 11 Maret 2020 9 March – 11 March 2020	3	Teknikal Technical	Online
18.	IMDG CODE	4	10 Maret – 12 Maret 2020 10 March – 12 March 2020	3	Teknikal Technical	Hotel Santika, Kelapa Gading, Jakarta Utara
19.	Workshop Brainstorming Peluang Bisnis Logistik 3 Workshop Brainstorming Logistical Business Opportunities 3	15	12 Maret 2020 12 March 2020	1	Teknikal Technical	Grha Pelindo Satu Jl. Lingkar pelabuhan No.1 Ruang Rapat 4B 2
20.	Pelatihan dan Pengenalan Kapal Pandu Pilot Ship Introduction & Training	3	16 Maret – 20 Maret 2020 16 March – 20 March 2020	5	Teknikal Technical	Galangan PT Pahala Harapan Lestari Shipyard, Pangkalpinang
21.	Pelatihan Pemeliharaan Kapal Pandu Pilot Ship Maintenance Training	4	21 Maret – 22 Maret 2020 21 March – 22 March 2020	2	Teknikal Technical	Galangan PT Pahala Harapan Lestari Shipyard, Pangkalpinang
22.	E-Learning Pelatihan Dasar Fasilitas Dan Peralatan E-Learning Facilities & Equipment Basic Training	57	26 Maret – 22 Maret 2020 26 March – 22 March 2020	6	Teknikal Technical	Online
23.	E-Learning ISO 9001 dan 14001 E-Learning ISO 9001 and 14001	162	6 April – 10 April 2020 6 April – 10 April 2020	5	Teknikal Technical	Online
24.	E-Learning PKBL	94	20 April – 24 April 2020 20 April – 24 April 2020	5	Teknikal Technical	Online
25.	E-Learning dan Web Seminar (Webinar) Refreshment SAP Modul PM E-Learning and Web Seminar (Webinar) Refreshment SAP Modul PM	84	4 Mei – 8 Mei 2020 4 May – 8 May 2020	5	Teknikal Technical	Online
26.	Finance for Finance 1	22	4 Mei - 6 Mei 2020 4 May - 6 May 2020	3	Teknikal Technical	Online
27.	SMK3	87	11 Mei – 14 Mei 2020 11 May – 14 May 2020	4	Teknikal Technical	Online
28.	Human Resource for Non-Human Resource	16	12 Mei 2020 12 May 2020	1	Teknikal Technical	Online
29.	Public Online Training "Sistem Kendali Kecurangan" Public Online Training "Fraud Control System"	6	18 Mei 2020 18 May 2020	1	Teknikal Technical	Online
30.	Impactful Online Training Design	4	19 Mei – 21 Mei 2020 19 May – 21 May 2020	3	Teknikal Technical	Online
31.	Finance For Non-Finance 2	111	1 Juni – 4 Juni 2020 1 June – 4 June 2020	4	Teknikal Technical	Online
32.	Reinventing Personal GML 1	4	2 Juni 2020 2 June 2020	1	Teknikal Technical	Online

KOMPETENSI TEKNIKAL
TECHNICAL COMPETENCIES

No	Judul Training Training Name	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
33.	<i>E-Learning</i> Perencanaan dan Pengawasan Pembaruan Kapal E-Learning Ship Renewal Planning & Supervising	77	2 Juni – 4 Juni 2020 2 June – 4 June 2020	3	Teknikal Technical	Online
34.	Dasar-Dasar Akuntansi Accounting Basics	48	2 Juni – 5 Juni 2020 2 June – 5 June 2020	4	Teknikal Technical	Online
35.	Awareness ISO 9001-2015 dan ISO 14001-2015 Awareness ISO 9001-2015 and ISO 14001-2015	50	8 Juni – 10 Juni 2020 8 June – 10 June 2020	3	Teknikal Technical	Online
36.	<i>Organization Development Job Profile</i>	29	8 Juni – 10 Juni 2020 8 June – 10 June 2020	3	Teknikal Technical	Online
37.	Pengenalan Jasa Pemanduan Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura Introduction to Extraordinary Piloting Service at Malacca Strait & Singapore Strait	150	9 Juni – 11 Juni 2020 9 June – 11 June 2020	3	Teknikal Technical	Online
38.	<i>Finance for Non-Finance 3</i>	15	10 Juni – 11 Juni 2020 10 June – 11 June 2020	2	Teknikal Technical	Online
39.	Metode Pemilihan Mitra (Kerja sama Usaha) Partner Selection Method for Business Cooperation	33	15 Juni – 17 Juni 2020 15 June – 17 June 2020	3	Teknikal Technical	Online
40.	<i>Web Seminar (Webinar) Feasibility Study in VUCA Era</i>	17	16 Juni – 17 Juni 2020 16 June – 17 June 2020	2	Teknikal Technical	Online
41.	<i>E-Learning dan Web Seminar (Webinar) Pengenalan dan Penerapan Manajemen Risiko</i> E-Learning dan Web Seminar (Webinar) Introduction & Implementation of Risk Management	157	16 Juni – 18 Juni 2020 16 June – 18 June 2020	4	Teknikal Technical	Online
42.	<i>Online Class Training For Trainer 1</i>	2	16 Juni – 19 Juni 2020 16 June – 19 June 2020	3	Teknikal Technical	Online
43.	<i>E-Learning</i> Pemuatan dan Pembongkaran Petikemas E-Learning Container Loading/Unloading	177	22 Juni – 24 Juni 2020 22 June – 24 June 2020	3	Teknikal Technical	Online
44.	<i>Workshop</i> Implementasi <i>Virtual Corporate University</i> dan Pengembangan Fitur LMS Moodle untuk User Workshop Virtual Corporate University Implementation & LMS Moodle Feature Development for User	164	23 Juni – 24 Juni 2020 23 June – 24 June 2020	2	Teknikal Technical	Online
45.	Peran <i>Training</i> dalam Pengembangan SDM Training Role in HR Development	84	24 Juni – 26 Juni 2020 24 June – 26 June 2020	3	Teknikal Technical	Online
46.	<i>Workshop</i> Implementasi IDEA level 3 Workshop IDEA Implementation level 3	27	29 Juni – 1 Juli 2020 29 June – 1 July 2020	3	Teknikal Technical	Online
47.	<i>Webinar Strategic Talent Development</i>	2	30 Juni 2020 30 June 2020	1	Teknikal Technical	Online
48.	<i>Online Class Training For Trainer 2</i>	1	13 Juli – 15 Juli 2020 13 July – 15 July 2020	3	Teknikal Technical	Online
49.	<i>E-Learning</i> Pemeliharaan Peralatan E-Learning Equipment Maintenance	20	14 Juli – 16 Juli 2020 14 July – 16 July 2020	3	Teknikal Technical	Online
50.	<i>E-Learning</i> Pelayanan <i>Delivery</i> Petikemas E-Learning Container Delivery Service	25	15 Juli – 17 Juli 2020 15 July – 17 July 2020	3	Teknikal Technical	Online
51.	<i>Webinar</i> Penyelamatan Arsip Penanganan <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i> Webinar Archive Preservation & Corona Virus Disease (COVID-19) Mitigation	19	16 Juli 2020 16 July 2020	1	Teknikal Technical	Online



KOMPETENSI TEKNIKAL
TECHNICAL COMPETENCIES

No	Judul Training Training Name	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
52.	<i>E-Learning</i> Manajemen Pengadaan E-Learning Procurement Management	22	20 Juli – 22 Juli 2020 20 July – 22 July 2020	3	Teknikal Technical	Online
53.	HR for Non-HR (BOD-2)	122	20 Juli – 26 Juli 2020 20 July – 26 July 2020	7	Teknikal Technical	Online
54.	<i>E-Learning</i> ModulPS	15	21 Juli – 23 Juli 2020 21 July – 23 July 2020	3	Teknikal Technical	Online
55.	<i>E-Learning</i> Pengenalan ERP E-Learning Introduction to ERP	15	27 Juli – 29 Juli 2020 27 July – 29 July 2020	3	Teknikal Technical	Online
56.	HR for Nom HR (BOD-1)	39	27 Juli – 02 Agustus 2020 27 July – 02 August 2020	7	Teknikal Technical	Online
57.	<i>E-Learning</i> Keprotokolan dan Manajemen Pelayanan Tamu E-Learning Protocols & Guest Service Management	17	28 Juli – 30 Juli 2020 28 July – 30 July 2020	3	Teknikal Technical	Online
58.	<i>E-Learning</i> Pengenalan Modul BPC E-Learning Introduction to BPC Modules	20	3 Agustus – 5 Agustus 2020 3 August – 5 August 2020	3	Teknikal Technical	Online
59.	Pelatihan dan Sertifikasi Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Training & Certification for Local Procurement Rate in (TKDN) in Goods/ Service Procurement	2	3 Agustus – 12 Agustus 2020 3 August – 12 August 2020	10	Teknikal Technical	Online
60.	<i>E-Learning</i> Speak Up With Confident	15	5 Agustus – 7 Agustus 2020 5 August – 7 August 2020	3	Teknikal Technical	Online
61.	<i>Webinar</i> Relevansi Jurnal Transaksi Webinar Transaction Journal Relevance	36	6 Agustus 2020 6 August 2020	1	Teknikal Technical	Online
62.	<i>E-Learning</i> Pelayanan Receiving E-Learning Receiving Service	18	10 Agustus – 12 Agustus 2020 10 August – 12 August 2020	3	Teknikal Technical	Online
63.	<i>E-Learning</i> Perancangan Tiang Pancang E-Learning Pile Design	15	12 Agustus – 14 Agustus 2020 12 August – 14 August 2020	3	Teknikal Technical	Online
64.	<i>E-Learning</i> DLKrDKLP	8	18 Agustus – 22 Agustus 2020 18 August – 22 August 2020	5	Teknikal Technical	Online
65.	<i>E-Learning</i> Analisa Kebutuhan Fasilitas pelabuhan E-Learning Port Facility Needs Analysis	15	18 Agustus – 22 Agustus 2020 18 August – 22 August 2020	5	Teknikal Technical	Online
66.	<i>E-Learning</i> Pelayanan Behandle E-Learning Handling Service	15	24 Agustus – 26 Agustus 2020 24 August – 26 August 2020	3	Teknikal Technical	Online
67.	<i>Digital Training</i> Asesor KPKU Digital Training KPKU Assessor	2	6 September – 18 September 2020 6 September – 18 September 2020	13	Teknikal Technical	Online
68.	<i>Digital Training</i> Interpretasi KPKU Digital Training KPKU Interpretation	1	6 September – 18 September 2020 6 September – 18 September 2020	13	Teknikal Technical	Online
69.	<i>E-Learning</i> Pengenalan Shared Service Pelindo 1 E-Learning Introduction to Pelindo 1 Shared Service	30	8 September – 10 September 2020 8 September – 10 September 2020	3	Teknikal Technical	Online
70.	<i>E-Learning</i> Hubungan Industrial E-Learning Industrial Relations	15	9 September – 11 September 2020 9 September – 11 September 2020	3	Teknikal Technical	Online
71.	<i>Training Awareness</i> ISO 370012016	50	10 September – 10 September 2020 10 September – 10 September 2020	1	Teknikal Technical	Online

KOMPETENSI TEKNIKAL
TECHNICAL COMPETENCIES

No	Judul Training Training Name	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
72.	<i>E-Learning "Metode Reklamasi pada Pembangunan pelabuhan"</i> E-Learning "Reclamation Method for Port Construction"	18	16 September – 18 September 2020 16 September – 18 September 2020	3	Teknikal Technical	Online
73.	<i>E-Learning "Penyusunan Rencana Induk pelabuhan"</i> E-Learning "Writing Port Master Plan"	16	16 September – 18 September 2020 16 September – 18 September 2020	3	Teknikal Technical	Online
74.	<i>Training Online Penyusunan Spesifikasi Analisa Pasar dan HPS</i> Training Online Writing Market Analysis Specification & HPS	12	21 September – 23 September 2020 21 September – 23 September 2020	3	Teknikal Technical	Online
75.	<i>Training dan Sertifikasi HR Level Manager Berlisensi BNSP</i> BNSP Licenced Training & Certification for HR Manager Level	6	21 September – 23 September 2020 21 September – 23 September 2020	3	Teknikal Technical	Online
76.	<i>E-Learning Open Stacking</i>	30	28 September – 30 September 2020 28 September – 30 September 2020	3	Teknikal Technical	Online
77.	<i>E-Learning Public Relation</i>	25	28 September – 30 September 2020 28 September – 30 September 2020	3	Teknikal Technical	Online
78.	<i>Uji Sertifikasi HR Level Manager Berlisensi BNSP</i> BNSP Licenced Certification Test for HR Manager Level	7	29 September 2020 29 September 2020	1	Teknikal Technical	Online
79.	<i>Training Sistem Penangkal Petir</i> Training Lightning Rod System	40	30 September 2020 30 September 2020	1	Teknikal Technical	Online
80.	<i>Online Training Supply Chain Management For Maritime Sector</i>	3	1 Oktober 2020 1 October 2020	24	Teknikal Technical	Online
81.	<i>E-Learning Modul Controlling Overview (CO)</i>	30	6 Oktober – 8 Oktober 2020 6 October – 8 October 2020	3	Teknikal Technical	Online
82.	<i>E-Learning Persiapan Penetapan Rencana Induk Tahap II</i> E-Learning Master Plan Confirmation Preparation Phase II	30	7 Oktober – 9 Oktober 2020 7 October – 9 October 2020	3	Teknikal Technical	Online
83.	<i>Training dan Sertifikasi HR Level Staf Berlisensi BNSP</i> BNSP Licenced Training & Certification for HR Staff Level	16	13 Oktober – 14 Oktober 2020 13 October – 14 October 2020	2	Teknikal Technical	Online
84.	<i>E-Learning Manajemen Vendor</i> E-Learning Vendor Management	22	13 Oktober – 16 Oktober 2020 13 October – 16 October 2020	3	Teknikal Technical	Online
85.	<i>International Port Maritime and Logistics Conference "Indonesia Logistics Performance Outward-Inward Looking Perspective and Solutions"</i>	11	14 Oktober 2020 14 October 2020	1	Teknikal Technical	Online
86.	<i>E-Learning Internal Control & Three Line Of Defence</i>	25	14 Oktober – 16 Oktober 2020 14 October – 16 October 2020	3	Teknikal Technical	Online
87.	<i>Pendidikan dan Pelatihan Audit Intern Tingkat Lanjutan (QIA)</i> Courses & Training for Qualified Internal Audit (QIA)	2	19 Oktober – 4 November 2020 19 October – 4 November 2020	17	Teknikal Technical	Online
88.	<i>Pendidikan dan Pelatihan Audit Intern Tingkat Manajerial (QIA)</i> Courses & Training for Qualified Internal Audit (QIA)	1	19 Oktober – 26 Oktober 2020 19 October – 26 October 2020	8	Teknikal Technical	Online



KOMPETENSI TEKNIKAL
TECHNICAL COMPETENCIES

No	Judul Training Training Name	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
89.	Training Online Pelatihan Pelatih Tempat Kerja (PPTK) Online Training for Workplace Trainer (PPTK)	4	19 Oktober – 30 Oktober 2020 19 October – 30 October 2020	12	Teknikal Technical	Online
90.	E-Learning Implementasi Seat Management E-Learning Seat Management Training Implementation	18	20 Oktober – 22 Oktober 2020 20 October – 22 October 2020	3	Teknikal Technical	Online
91.	Uji Sertifikasi HR Level Staf Berlisensi BNSP BNSP Licenced Certification Test for HR Staff Level	16	20 Oktober – 20 Oktober 2020 20 October – 20 October 2020	1	Teknikal Technical	Online
92.	E-Learning Stakeholder Management	18	21 Oktober – 23 Oktober 2020 21 October – 23 October 2020	3	Teknikal Technical	Online
93.	Pelatihan Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 370012016 Internal Audit Training – Anti Bribery System Management ISO 370012016	35	20 Oktober 2020 20 October 2020	1	Teknikal Technical	Online
94.	Workshop IDEA Batch III Tahun 2020	24	26 Oktober – 27 Oktober 2020 26 October – 27 October 2020	2	Teknikal Technical	Online
95.	E-Learning Introducing to Information Technology	25	27 Oktober – 29 Oktober 2020 27 October – 29 October 2020	3	Teknikal Technical	Online
96.	Pelayanan Batal Muat dan Alih Kapal Cancel Loading & Ship Switching Service	35	4 November – 6 November 2020 4 November – 6 November 2020	3	Teknikal Technical	Online
97.	Penyusunan KPI Berbasis Balance Scorecard Balance Scorecard Based KPI Writing	30	4 November – 6 November 2020 4 November – 6 November 2020	3	Teknikal Technical	Online
98.	E-Learning Modul Fund Management	25	10 November – 12 November 2020 10 November – 12 November 2020	3	Teknikal Technical	Online
99.	E-Learning Proses Bisnis Pengadaan E-Learning Procurement Business Process	20	11 November – 13 November 2020 11 November – 13 November 2020	3	Teknikal Technical	Online
100.	Pelatihan Palm Oil Product Knowledge And Handling Palm Oil Product Knowledge & Handling Training	37	16 November – 20 November 2020 16 November – 20 November 2020	10	Teknikal Technical	Online
101.	Pelatihan Aplikasi Dasar Inventaris Ruangan (DIR) Batch 1 Basic Room Inventory Application Training (DIR) Batch 1	8	17 November – 19 November 2020 17 November – 19 November 2020	5	Teknikal Technical	Online
102.	E-Learning Study Kelayakan E-Learning Feasibility Studies	20	18 November – 19 November 2020 18 November – 19 November 2020	3	Teknikal Technical	Online
103.	Workshop Penyusunan Kajian Kelayakan Workshop on Writing Feasibility Studies	21	19 November – 6 November 2020 19 November – 6 November 2020	2	Teknikal Technical	Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan
104.	E-Learning Penyusunan Study Survei Investigasi dan Desain (SID) Fasilitas pelabuhan Laut E-Learning Design & Investigation Survey Studies (SID) on Sea Port Facilities Writing	20	18 November – 20 November 2020 18 November – 20 November 2020	3	Teknikal Technical	Online
105.	Online Course Digital Business Transformation	6	4 November – 29 Januari 2020 4 November – 29 January 2020	11	Teknikal Technical	Online

KOMPETENSI TEKNIKAL
TECHNICAL COMPETENCIES

No	Judul Training Training Name	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
106	Pelatihan Depo Kontainer Container Depot Training	19	23 November – 24 November 2020 23 November – 24 November 2020	2	Teknikal Technical	Gedung Griha Pelindo Satu Jalan Lingkar pelabuhan No.1 Belawan
107.	Online Sertifikasi Insinyur Profesional dan Surat Tanda Registrasi Insinyur Online Professional Engineer Certification & Engineer Registration	20	23 November 2020 23 November 2020	1	Teknikal Technical	Online
108.	E-Learning Distribusi Tenaga Listrik E-Learning Electric Power Distribution	27	24 November – 26 November 2020 24 November – 26 November 2020	3	Teknikal Technical	Online
109.	Pelatihan Online ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko ERM Fundamental ISO 31000 Online Training on ERM Fundamental International Standard Risk Management	1	1 Desember – 3 Desember 2020 1 December – 3 December 2020	3	Teknikal Technical	Online
110.	Workshop Nasional Implementasi Poin-Poin Penting Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan (Omnibus Law) National Workshop on Important Points of Implementation of Omnibus Law	1	2 Desember – 3 Desember 2020 2 December – 3 December 2020	2	Teknikal Technical	Hotel Kartika Chandra Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18-20 Jakarta Selatan
111.	Pelatihan Persiapan Sertifikasi <i>Qualified Risk Management</i> Qualified Risk Management Certification Preparation Training	19	7 Desember – 8 Desember 2020 7 December – 8 December 2020	2	Teknikal Technical	
112.	Program Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi <i>Qualified International Auditor (QIA) Tingkat Lanjutan</i> Courses & Training for Advanced Level Qualified International Auditor (QIA) Certification	4	7 Desember – 19 Desember 2020 7 December – 19 December 2020	13	Teknikal Technical	Online
113.	Uji Sertifikasi <i>Qualified Risk Management</i> Qualified Risk Management Certification Test	19	10 Desember 2020 10 December 2020	1	Teknikal Technical	Online
114.	Ujian Sertifikasi ERMAP – ERMCP ISO 31000 Standar Internasional Manajemen Risiko ERM Fundamental ERMAP – ERMCP ISO 31000 ERM Fundamental International Standard Risk Management Certification Test	1	11 Desember 2020 11 December 2020	1	Teknikal Technical	Online
115.	Pelatihan Aplikasi Dasar Inventaris Ruangan (DIR) Batch 2 Basic Room Inventory Application Training (DIR) Batch 2	6	14 Desember – 16 Desember 2020 14 December – 16 December 2020	3	Teknikal Technical	Graha Pelindo Satu Ruang Rapat Theater Lt 7B
116.	Training Penyusunan Laporan Kepemilikan Modal Capital Ownership Report Compiling Training	16	16 Desember 2020 16 December 2020	1	Teknikal Technical	Selat Malaka Kantor lama pelabuhan Indonesia I (Persero) Jl. Krakatau Ujung No.100 Medan
117.	Bimbingan Teknis Pengguna Jasa Security di Kalangan Perusahaan Technical Guidance on Security Service User in the Company	1	16 Desember 2020 16 December 2020	1	Teknikal Technical	Hotel Emerld Garden Jl. Kol Yos Sdarsno No.1 Medan
Total		3298		473		





PENGEMBANGAN WAWASAN
INSIGHT IMPROVEMENT

No	Judul Training Training Name	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
1.	Baris Berbaris Dalam Rangka Membangun Etos Kerja Pegawai Pelindo 1 Marching to build Pelindo 1 Employees Work Ethics	81	20 Januari 2020 20 January 2020	1	Wawasan Insight	Kantor Pelindo 1 Lama jl. Krakatau Ujung No. 100 Medan
2.	<i>Building Great Teamwork Thru Highly Motivated Workforce</i>	2	4 Maret – 5 Maret 2020 4 March – 5 March 2020	2	Wawasan Insight	Herman Learning Center (HLC) Jl Sei BatuRata No.11 Medan Baru
3.	<i>Web Seminar (Webinar) atau Live Streaming Sosialisasi Sensus Penduduk Online</i> Web Seminar (Webinar) / Live Streaming Online Census Socialization	48	23 Maret 2020 23 March 2020	1	Wawasan Insight	Online
4.	<i>Workshop Implementasi Virtual Corporate University dan Pengembangan Fitur Learning Management System (LMS) Moodle</i> Virtual Corporate University Implementation Workshop & Learning Management System (LMS) Moodle Feature Development	12	26 Maret – 27 Maret 2020 26 March – 27 March 2020	2	Wawasan Insight	Gedung Grha Pelindo SatuRuang Rapat 4A.1 dan Online
5.	<i>Becoming A n E ctive HR Business Partner</i>	1	26 Maret – 27 Maret 2020 26 March – 27 March 2020	2	Wawasan Insight	Jakarta
6.	<i>Webinar How To Communicate E ceveily So That People Say Yes</i>	68	5 Mei 2020 5 May 2020	1	Wawasan Insight	Online
7.	<i>Seminar Online The Power of You</i>	2	6 Mei 2020 6 May 2020	1	Wawasan Insight	Online
8.	<i>Interactive Online Training “Tetap Aktif dan Fit Selama Pandemi”</i> Interactive Online Training “Stay Fit & Active During Pandemic”	35	9 Mei 2020 9 May 2020	1	Wawasan Insight	Online
9.	<i>Webinar Time Management Focus and Priority</i>	25	11 Mei 2020 11 May 2020	1	Wawasan Insight	Online
10.	<i>Webinar Opportunity Makes Creative and Unique Selling Point</i>	30	12 Mei 2020 12 May 2020	1	Wawasan Insight	Online
11.	<i>Online Training “Cara Jitu Bicara Depan Banyak Orang Dengan Meyakinkan”</i> Online Training “How To Speak Convincingly In Front Of Many People”	66	13 Mei 2020 13 May 2020	1	Wawasan Insight	Online
12.	<i>Workshop Implementasi Virtual Corporate University dan Pengembangan Fitur LMS</i> Workshop Implementation of Virtual Corporate University & LMS Feature Development	34	14 Mei 2020 14 May 2020	1	Wawasan Insight	Online
13.	<i>Workshop Implementasi Virtual Corporate University dan Pengembangan Fitur LMS 2</i> Workshop Implementation of Virtual Corporate University & LMS Feature Development 2	35	15 Mei 2020 15 May 2020	1	Wawasan Insight	Online
14.	<i>Interactive Online Training “Sehat dengan Yoga bersama Anjasmara”</i> Interactive Online Training “Healthy Through Yoga with Anjasmara”	34	16 Mei 2020 16 May 2020	1	Wawasan Insight	Online

PENGEMBANGAN WAWASAN
INSIGHT IMPROVEMENT

No	Judul Training Training Name	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
15.	Interactive Online Training "Sajian Sehat dengan Chef Agus Sasirangan" Interactive Online Training "Healthy Food with Chef Agus Sasirangan"	35	16 Mei 2020 16 May 2020	1	Wawasan Insight	Online
16.	Facing COVID-19 Business World	5	30 Mei 2020 30 May 2020	1	Wawasan Insight	Online
17.	Workshop From Home "Digital Start Up Transformation"	3	3 Juni – 4 Juni 2020 3 June – 4 June 2020	2	Wawasan Insight	Online
18.	Workshop From Home "System Transformation"	3	3 Juni – 4 Juni 2020 3 June – 4 June 2020	2	Wawasan Insight	Online
19.	Basic of Data Analytics	30	5 Juni – 11 Juni 2020 5 June – 11 June 2020	7	Wawasan Insight	Online
20.	Ciptakan Rumah Tinggal Sehat Creating Healthy Home	25	6 Juni 2020 6 June 2020	1	Wawasan Insight	Online
21.	Maksimalkan Pekarangan Rumah dengan Bertanam Hidroponik Maximising Porch Through Hydroponics	22	10 Juni – 11 Juni 2020 10 June – 11 June 2020	1	Wawasan Insight	Online
22.	Decision Making and Creative Thinking In Crisis	2	10 Juni – 11 Juni 2020 10 June – 11 June 2020	2	Wawasan Insight	Online
23.	Interactive Online Training "Percaya Diri Berbicara Di Depan Publik" Interactive Online Training "Confident in Front of Public"	27	20 Juni 2020 20 June 2020	1	Wawasan Insight	Online
24.	Interactive Online Seminar "Ide Kreatif dan Inovatif dalam Bisnis Kuliner" Interactive Online Seminar "Ide Kreatif dan Inovatif dalam Bisnis Kuliner"	30	2 Juni 2020 2 June 2020	1	Wawasan Insight	Online
25.	Webinar How To Optimize Zoom	26	1 Juli – 3 Juli 2020 1 July – 3 July 2020	3	Wawasan Insight	Online
26.	Sharing Knowledge BerDering (Berbagi Ide dan Sharing)	27	3 Juli 2020 3 July 2020	1	Wawasan Insight	Ruang Serbaguna Selat Malaka Lantai 7A Multi Purpose Room Selat Malaka 7A Floor
27.	Webinar Melukis Slide Dengan Hati Webinar Painting Slide With Heart	25	6 Juli – 7 Juli 2020 6 July – 7 July 2020	2	Wawasan Insight	Online
28.	Webinar Seputar Akhlak "Budaya Bukan Sekedar Coretan di Dinding! Ini Peranmu" Webinar Akhlak "Culture is not merely a doodle on the wall! This is your role"	225	13 Juli 2020 13 July 2020	1	Wawasan Insight	Online
29.	Pelatihan Percakapan Bahasa Inggris Secara Online Cabang Sungai Pakning Untuk Kelas A Online English Conversation Sungai Pakning Branch for Class A	6	22 Juli – 2 November 2020 22 July – 2 November 2020	12	Wawasan Insight	Online
30.	Pelatihan Percakapan Bahasa Inggris Secara Online Cabang Sungai Pakning Untuk Kelas B Online English Conversation Sungai Pakning Branch for Class B	6	22 Juli – 2 November 2020 22 July – 2 November 2020	12	Wawasan Insight	Online
31.	Pelatihan Basic of Data Analytics Batch 2 tahun 2020 Basic of Data Analytics Batch 2 Training 2020	30	28 Agustus – 2 September 2020 28 August – 2 September 2020	6	Wawasan Insight	Online
32.	Pelatihan Online Pemanfaatan dan Pemakaian Aplikasi Zoom Online Training Zoom Application Utilisation & Usage	15	3 Agustus – 3 September 2020 3 August – 3 September 2020	1	Wawasan Insight	Online





PENGEMBANGAN WAWASAN
INSIGHT IMPROVEMENT

No	Judul Training Training Name	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
33.	Sesi Coaching Pelatihan Basics of Data Analytics Batch 2 Tahun 2020 Coaching Session Basic of Data Analytics Batch 2 Training 2020	30	7 Agustus – 7 September 2020 7 August – 7 September 2020	1	Wawasan Insight	Online
34.	Online Training Literasi Bisnis dan Keselamatan Maritim Pemanduan dan Penundaan Kapal Online Training Business Literacy & Ship Piloting & Tugging Maritime Safety	5	22 Oktober 2020 22 October 2020	1	Wawasan Insight	Online
35.	E-Learning Protokol Kesehatan Bisnis Terminal Logistik dan Pelayanan Marine E-Learning Business Health Protocol & Marine Service	42	26 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020 26 October 2020 – 31 October 2020	6	Wawasan Insight	Online
36.	Pelatihan Identifikasi dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Kegiatan Bisnis dan Penyelesaiannya di Era New Normal Law Risk Identification & Mitigation in Business Practice & its Settlement In New Normal Era	3	31 Oktober 2020 31 October 2020	1	Wawasan Insight	Online
37.	Webinar Mewujudkan pelabuhan Patimban Sebagai pelabuhan Terbesar Kedua di Indonesia Impian dan Harapan Pelaku Utara Webinar on Making Patimban Port As Second Largest Port In Indonesia – Main Actors Dreams & Expectation	1	9 November 2020 9 November 2020	1	Wawasan Insight	Online
38.	Reconcile With O ce Politics and The Future Role of Workers Union	14	10 November 2020 10 November 2020	1	Wawasan Insight	Online
39.	Seminar Entrepreneur Barista Barista Entrepreneur Seminar	8	22 Desember 2020 22 December 2020	1	Wawasan Insight	Barista BBLPK Medan jl. Gatot Subroto Km 7,8 Medan
Total		1118		86		

KOMPETENSI PURNABHAKTI
RETIRED

No	Judul Training Training Name	Jumlah Peserta Participants	Pelaksanaan Date	Durasi Duration	Jenis Diklat Type	Lokasi Location
-	-	-	-	-	-	-
Total		0		0		

REALISASI PELAKSANAAN TRAINING PER UNIT KERJA TAHUN 2020
TRAINING REALISATION PER WORK UNIT 2020

No.	Unit Kerja Work Unit	Jumlah Pegawai Total Employees	Pegawai Sudah Training Employees Trained	Rasio (%) Ratio (%)	Pegawai Belum Training Employees Not Yet Been Trained	Event/ Momen Training Event/ Training Moment	Total Durasi (Hari) Total Duration (Days)	Total Durasi (Jam) Total Duration (Hours)
1.	Kantor Pusat Head Office	430	430	100%	0	182	719	5752
2.	Belawan	173	173	100%	0	126	486	3888
3.	Terminal Petikemas Belawan Belawan Container Terminal	291	291	100%	0	119	441	3528
4.	Dumai	168	168	100%	0	122	493	3944
5.	Pekanbaru	70	70	100%	0	114	453	3674
6.	Kuala Tanjung	14	14	100%	0	66	282	2256
7.	Batam	31	31	100%	0	85	349	2792
8.	Sibolga	12	12	100%	0	73	267	2136
9.	Tanjungpinang	46	46	100%	0	102	496	3218
10.	Tanjung Balai Karimun	77	77	100%	0	81	311	2488
11.	Tanjung Balai Asahan	5	5	100%	0	66	270	2160
12.	Lhokseumawe	19	19	100%	0	73	267	2136
13.	Malahayati	15	15	100%	0	69	252	2016
14.	Gunungsitoli	6	6	100%	0	53	201	1608
15.	Sungaipakning	24	24	100%	0	71	326	2608
16.	Tembilahan	6	6	100%	0	54	216	1728
17.	UGK	6	6	100%	0	40	191	1528
18.	Pegawai Diperbantukan pada Anak Perusahaan PT PHCM Employees on Loan to PT PHCM	7	7	100%	0	11	31	248
19.	Pegawai Diperbantukan pada Anak Perusahaan PT PIL Employees on Loan to PT PIL	11	11	100%	0	20	76	608
20.	Pegawai Diperbantukan pada Anak Perusahaan PT PMP Employees on Loan to PT PMP	3	3	100%	0	9	30	240
21.	Pegawai Diperbantukan pada Anak Perusahaan PT PMT Employees on Loan to PT PMT	8	8	100%	0	15	49	392
22.	Pegawai Diperbantukan pada Anak Perusahaan PT PPK Employees on Loan to PT PPK	11	11	100%	0	13	50	400
23.	Pegawai Diperbantukan pada Anak Perusahaan PT PTP Employees on Loan to PT PTP	13	13	100%	0	19	61	488
	Total	1.394	1.394	100%	0	1.592	6.227	49816



REALISASI PELAKSANAAN TRAINING PER UNIT KERJA TAHUN 2020
TRAINING REALISATION PER WORK UNIT 2020

	Kategori Training Training Category				
	Inti Core	Teknikal Technical	Manajerial Managerial	Wawasan Insight	Purnabhakti Retired
12	94	38	38	0	
14	60	30	22	0	
9	56	32	22	0	
14	61	31	16	0	
13	59	28	14	0	
9	33	16	8	0	
10	40	25	10	0	
6	37	17	13	0	
13	50	26	13	0	
11	43	17	10	0	
7	32	20	7	0	
8	39	15	12	0	
6	38	18	7	0	
4	28	14	7	0	
9	37	16	9	0	
6	26	16	6	0	
5	25	13	5	0	
3	4	3	1	0	
4	9	3	4	0	
3	2	2	2	0	
2	6	1	6	0	
4	5	2	2	0	
3	8	2	6	0	
175	792	385	240	0	

REALISASI TRAINING BERDASARKAN MOMEN TRAINING PER PEGAWAI PER UNIT KERJA TAHUN 2020
TRAINING REALISATION BASED ON TRAINING MOMENT PER EMPLOYEE PER WORK UNIT 2020

No.	Unit Kerja Work Unit	Jumlah Pegawai Total Employees	Event/ Momen Training Event/ Training Moment	Teknikal Technical	Inti Core	Manajerial Managerial	Wawasan Insight
1.	Kantor Pusat Head Office	430	3.508	1.202	599	711	996
2.	Belawan	173	828	314	235	65	214
3.	Terminal Petikemas Belawan Belawan Container Terminal	291	1.263	546	346	112	259
4.	Dumai	168	749	272	242	40	186
5.	Pekanbaru	70	317	170	110	27	110
6.	Kuala Tanjung	14	111	59	19	12	21
7.	Batam	31	174	78	43	15	38
8.	Sibolga	12	123	66	16	18	23
9.	Tanjungpinang	46	283	111	72	24	81
10.	Tanjung Balai Karimun	77	158	74	33	14	37
11.	Tanjung Balai Asahan	5	84	39	10	8	27
12.	Lhokseumawe	19	144	73	24	20	27
13.	Malahayati	15	139	76	20	10	33
14.	Gunungsitoli	6	86	41	10	11	24
15.	Sungaipakning	24	138	65	32	20	21
16.	Tembilahan	6	63	30	9	7	17
17.	UGK	6	77	37	10	4	26
18.	Pegawai Diperbantukan pada Anak Perusahaan PT PHCM Employees on Loan to PT PHCM	7	28	4	13	1	10
19.	Pegawai Diperbantukan pada Anak Perusahaan PT PIL Employees on Loan to PT PIL	11	57	20	22	4	11
20.	Pegawai Diperbantukan pada Anak Perusahaan PT PMP Employees on Loan to PT PMP	3	12	2	6	2	2
21.	Pegawai Diperbantukan pada Anak Perusahaan PT PMT Employees on Loan to PT PMT	8	22	6	9	6	1
22.	Pegawai Diperbantukan pada Anak Perusahaan PT PPK Employees on Loan to PT PPK	11	43	5	25	2	11
23.	Pegawai Diperbantukan pada Anak Perusahaan PT PTP Employees on Loan to PT PTP	13	55	11	26	6	12
	Total	1.394	8.558	3.301	1.931	1.139	2.187



BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai tambah bagi para pegawai yang dibuktikan melalui pelaksanaan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Realisasi biaya pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp3,03 miliar, menurun 69,1% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp9,82 miliar. Besaran biaya pengembangan kompetensi karyawan secara total dapat dilihat pada tabel berikut.

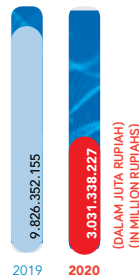
EMPLOYEE COMPETENCIES DEVELOPMENT COSTA

The Company is committed to keep improving employees added values which are proven through sustainable competencies development. Cost realisation for employees competencies development in 2020 was Rp3.03 billion, 69.1% lower compared with Rp9.82 billion. Besaran biaya pengembangan kompetensi karyawan secara total dapat dilihat pada tabel berikut.

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI COMPETENCIES DEVELOPMENT COST

	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Penurunan Decrease	
			Selisih (Rp) Difference (Rp)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendidikan dan Pelatihan Courses & Training	3.031.338.227	9.826.352.155	(6.795.013.928)	-69,1%

Perbandingan Biaya Pengembangan Kompetensi (RP-JUTA) Competencies Development Cost Comparison (RP-MILLION)



Faktor utama terjadinya penurunan biaya pengembangan kompetensi di ruang lingkup PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) disebabkan oleh adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Pemerintah. Oleh karenanya, proses pendidikan dan pelatihan lebih banyak dilakukan secara *online*. Hal ini juga menjadi bentuk dukungan Perseroan terhadap Pemerintah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19.

Main cause of competencies development cost decrease in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) was the Large Scale Quarantine enforced by the Government. Therefore, courses & training processes were done online. This was also the Company's support to government in mitigating COVID-19 Pandemic.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS COMPOSITION

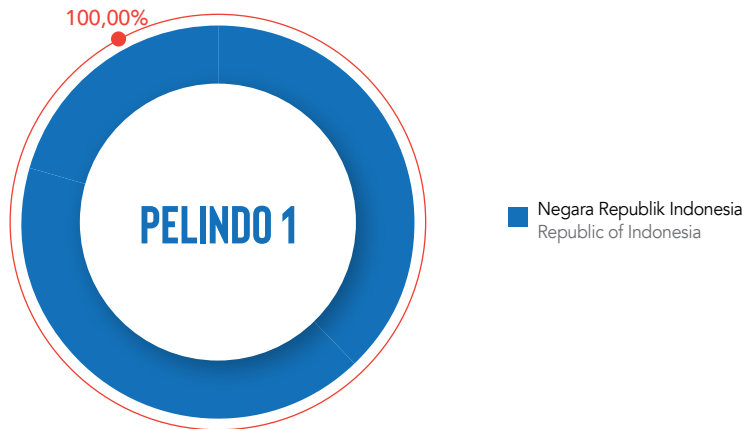
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

COMPANY SHAREHOLDERS COMPOSITION

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) PER 31 DESEMBER 2020

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) SHARES OWNERSHIP
PER 31 DECEMBER 2020

Pemegang Saham Share Owner	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (Shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued & Paid Off Capital (Rp)	Persentase (%) Percentage (%)
Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	1.700.000	1.700.000.000.000	100%



KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

20 LARGEST SHAREHOLDERS

Sampai dengan 31 Desember 2020, Komposisi Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

As of 31 December 2020, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) shares are 100% owned by Republic of Indonesia.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH

SHAREHOLDERS COMPOSITION WITH 5%/MORE

Sampai dengan 31 Desember 2020, Pelindo 1 merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

As of 31 December 2020, Pelindo 1 is a State Owned Enterprise where its shares is 100% owned by Republic of Indonesia. Information on shareholders composition with 5%/more has been explained above.

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT KURANG DARI 5%

SHAREHOLDERS COMPOSITION WITH LESS THAN 5%

Sampai dengan 31 Desember 2020, Pelindo 1 merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

As of 31 December 2020, Pelindo 1 is a State Owned Enterprise where its shares is 100% owned by Republic of Indonesia. Information on shareholders composition with 5%/more has been explained above.



INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN OLEH MANAJEMEN KUNCI

Hingga 31 Desember 2020, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dikarenakan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 100% saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

INFORMATION ON COMPANY SHARE OWNERSHIP BY KEY MANAGEMENT

As of 31 December 2020, Board of Commissioner & Directors has no ownership of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) shares due to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) shares is 100% owned by Republic of Indonesia.

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI HINGGA NAMA PEMILIK AKHIR

Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemilik dan pemegang saham tunggal yang berhak atas 1.700.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.700.000.000.000 dalam Perseroan tersebut yang merupakan keseluruhan saham yang dikeluarkan dan ditempatkan serta disetor penuh dalam Perseroan hingga saat ini.

INFORMATION ON MAJORITY SHAREHOLDER & CONTROLLING SHAREHOLDER TO LAST OWNER NAME

Republic of Indonesia represented by Minister of State Owned Enterprise is the sole owner & holder of 1,700,000 shares with nominal value of Rp1,000,000.00 or in its entirety Rp1,700,000,000,000 in the Company which has been issued & fully paid off in the Company until present.

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI

SUBSIDIARIES AND/OR ASSOCIATION ENTITIES

Hingga 31 Desember 2020, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 5 (lima) Entitas Anak, 1 (satu) Entitas Asosiasi, dan 2 (dua) Entitas Anak Tidak Langsung, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

As of 31 December 2020, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has 5 Subsidiaries, 1 Association Entity, and 2 Indirect Subsidiaries as explained in tables below:

ENTITAS ANAK SUBSIDIARIES

Nama Name	Bidang Usaha Business Area	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year Established	Tahun Beroperasi Komersial Year Commercially Operated	Tahun Penyertaan Modal Year Capital Participation	Kepemilikan oleh Pelindo 1 (%) Ownership By Pelindo 1 (%)		Jumlah Aset (Rp Juta) Total Assets (Rp Million)		Status Operasi Operational Status
						2020	2019	2020	2019	
PT Prima Terminal Petikemas	Jasa Pelayanan Terminal Petikemas Internasional International Container Terminal Service	Sumatera Utara North Sumatera	2013	-	2013	70,00	70,00	3.233.654	3.223.796	Belum Beroperasi Not Yet Operational
PT Prima Indonesia Logistik	Jasa Depo Petikemas dan Jasa Logistik Lainnya dengan pelayanan prima Container Depot Service & Other Logistical Service	Sumatera Utara North Sumatera	2014	2015	2014	99,67	99,00	391.773	372.424	Beroperasi Operational
PT Prima Multi Terminal	Jasa Pelayanan Terminal Curah Cair/Terminal Multi Purpose Liquid Bulk Terminal Service/Terminal Multi Purpose	Sumatera Utara North Sumatera	2014	2019	2014	55,00	55,00	3.971.707	4.232.028	Beroperasi Operational
PT Prima Pengembangan Kawasan	Jasa Penyewaan dan pengelolaan Kawasan industri, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan Kawasan industri beserta sarana dan prasarana fisik infrastruktur wilayah. Rental & Industrial Area management, Facilities & infrastructures operation & maintenance both physical & regional.	Sumatera Utara North Sumatera	2015	2019	2015	90,00	90,00	899.389	898.145	Beroperasi Operational



ENTITAS ANAK
SUBSIDIARIES

Nama Name	Bidang Usaha Business Area	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year Established	Tahun Beroperasi Komersial Year Commercially Operated	Tahun Penyertaan Modal Year Capital Participation	Kepemilikan oleh Pelindo 1 (%) Ownership By Pelindo 1 (%)		Jumlah Aset (Rp Juta) Total Assets (Rp Million)		Status Operasi Operational Status
						2020	2019	2020	2019	
PT Prima Husada Cipta Medan	Kesehatan, rumah sakit, klinik, dan poliklinik, balai pengobatan serta usaha terkait Health, hospital, clinic, polyclinic, dispensary, and other business	Sumatera Utara North Sumatera	2016	2016	2016	99,68	99,00	38.321	22.107	Beroperasi Operational
KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG MELALUI PT PRIMA INDONESIA LOGISTIK INDIRECT OWNERSHIP THROUGH PT PRIMA INDONESIA LOGISTIK										
PT Prima Multi Peralatan	Perawatan Alat Equipment Maintenance	Sumatera Utara North Sumatera	2018	2019	2018	99,00	99,00	28.098	13.148	Beroperasi Operational
PT Prima Tangki Indonesia	Penyediaan Tangki Tank procurement	Sumatera Utara North Sumatera	2013	2019	2013	20,00	20,00	212.363	221.720	Beroperasi Operational
ENTITAS ASOSIASI ASSOCIATION ENTITY										
PT Terminal Petikemas Indonesia	Jasa Pelayanan Terminal Petikemas Internasional International Container Terminal Service	DKI Jakarta	2013	-	2013	25,00	25,00	134.140	133.111	Belum Beroperasi Not Yet Operational

Penjelasan singkat mengenai masing-masing Entitas Anak, Entitas Kepemilikan Tidak Langsung dan Entitas Asosiasi, sebagai berikut:

Below are brief explanations on Subsidiaries, Indirect Ownership Entity & Association Entity:

ENTITAS ANAK

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Riwayat Singkat

PT Prima Terminal Petikemas atau selanjutnya disebut Perusahaan/Perseroan adalah anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 yang merupakan usaha patungan/sindikasi (*Joint Venture Company - JVCo*) antara Pelindo 1, PT Hutama Karya (Persero) atau HK dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA. Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 162 Tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H di Medan dan memperoleh pengesahan Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-46327.AH.01.01 tanggal 3 September 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 33 tanggal 19 November 2020 oleh Henry Tjong, SH. di Medan tentang pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama PT PTP. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0417536 tanggal 10 Desember 2020.

Perusahaan dalam tahap awal pendiriannya akan mengembangkan infrastruktur dermaga pada Terminal Petikemas Internasional Belawan atau Belawan *International Container Terminal* - BICT Fase 2 sepanjang 350 meter. Adapun infrastruktur BICT Fase 1 dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Total panjang dermaga pengembangan BICT adalah 700 meter. Hal ini sejalan dengan Rencana Induk pelabuhan (RIP) Belawan yang telah disahkan oleh Menteri Perhubungan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 21 Tahun 2012.

Perusahaan saat ini masih dalam tahap pembangunan proyek BICT Fase 2 yang meliputi pekerjaan reklamasi, pembangunan dermaga, pembangunan lapangan penumpukan (*container yard*), utilitas dan fasilitas pendukung serta penyediaan mesin peralatan bongkar muat Petikemas yang terintegrasi dengan IT System, direncanakan akan selesai dalam waktu 3 tahun.

Kegiatan Usaha

1. Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat dan bongkar muat petikemas, pelayanan jasa bongkar muat petikemas;
2. Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat petikemas, pelayanan gudang, dan lapangan penumpukan;
3. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, pelayanan jasa angkutan;

SUBSIDIARIES

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Brief History

PT Prima Terminal Petikemas or hereafter will be called as The Company is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) or Pelindo 1 which is a Joint Venture Company – JVCo between Pelindo 1, PT Hutama Karya (Persero) or HK and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk or WIKA. The Company was established based on Establishment Act No. 162 on 30 July 2013 made in front of Notary Rahmad Nauli Siregar, S.H at Medan & has been approved by Legal Agency by Minister of Law & Human Rights Order No. AHU-46327.AH.01.01 on 3 September 2013. Company's Articles of Association has went through some changes with Notary Act No. 33 on 19 November 2020 by Henry Tjong, SH. at Medan on President Director PT PTP Discharge & Appointment being the last. This change has been reported and received by the Minister of Law & Human Rights in Receipt No. AHU-AH.01.03-0417536 on 10 December 2020.

It its early stage of establishment, the Company would developed Docking Infrastructures at Belawan International Container Terminal - BICT Phase 2 fo as long as 350 meter. Whereas BICT Phase 1 infrastructures were made by the Ministry of Transportation. Total BICT Quay Length is 700 meter. This is in compliance of Port Grand Plan which has been approved by the Minister of Transportation in Minister of Transportation Order No. PM 21 Year 2012.

Currently the Company is still constructing BICT Phase 2 which covers reclamation, dock construction, container yard & supporting facilities and loading/unloading equipments procurement integrated with IT System which is planned to be completed in 3 years.

Business Activities

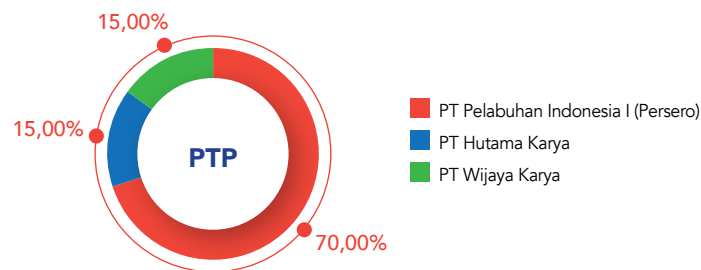
1. Provision and/or procurement at docks and other facilities for container mooring and loading/unloading, as well as container loading/unloading services;
2. Provision of container loading/unloading services, warehouse, and Yard Area services;
3. Provision and/or procurement of container terminal and transport services;





- | | |
|---|---|
| <p>4. Penyediaan dan/atau lapangan pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan;</p> <p>5. Penyediaan jasa lainnya terkait pelayanan terminal petikemas.</p> | <p>4. Provision and/or procurement of warehouse and Yard Area services;</p> <p>5. Provision of other services related to container terminal services.</p> |
|---|---|

Kepemilikan Saham PTP per 31 Desember 2020 PTP Shares Ownership per 31 December 2020



Manajemen Kunci PTP per 31 Desember 2020

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prasetyo
Komisaris : Ir. Yuliandi, M.M
Ir. Adhyasa Yutono

Direksi

Direktur Utama : Sandhy Wijaya, S.E
Direktur : Mokhtar
Agus Wilarso

PTP Key Management per 31 December 2020

Board of Commissioners

President Commissioner : Prasetyo
Commissioner : Ir. Yuliandi, M.M
Ir. Adhyasa Yutono

Board of Directors

President Director : Sandhy Wijaya, S.E
Director : Mokhtar
Agus Wilarso

KINERJA KEUANGAN PTP 2019-2020

PTP FINANCIAL PERFORMANCE 2019-2020

	2020 (Rp-juta) 2020 (Rp-million)	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)
Pendapatan Revenues	758.144	2.228.302
Beban Usaha Business Cost	796.606	2.245.997
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	1.634	(20.795)
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Net (Loss)	1.634	(20.795)
Aset Assets	3.233.654	3.223.795
Liabilitas Liabilities	2.050.998	2.042.774
Ekuitas Equities	1.182.656	1.181.021

PT PRIMA INDONESIA LOGISTIK

Riwayat Singkat

Didirikan berdasarkan akta No.34 yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 26 September 2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27882.40.10.2014 tanggal 06 Oktober 2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Akta Notaris Risna Rahmi Arifa, SH.,SpN. No. 07 tanggal 15 Oktober 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Utama. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0407025 tanggal 12 November 2020.

Kegiatan Usaha

1. Depo Container;
2. Stuffing/Unstuffing;
3. CFS;
4. Rucking;
5. Penyediaan peralatan untuk pelayanan stuffing/unstuffing dan lolo.

PT PRIMA INDONESIA LOGISTIK

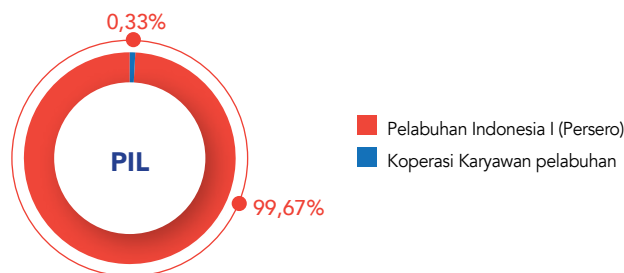
Brief History

The Company was established based on Establishment Act No 34 on 26 September 2014 made in front of Notary Rahmad Nauli Siregar, S.H at Medan & has been approved by Minister of Law & Human Rights Order No. AHU-27882.40.10.2014 on 06 October 2014. Company's Articles of Association has went through some changes with Notary Act, with last being with Risna Rahmi Arifa, SH.,SpN. No. 07 on 15 October 2020 on President Commissioner Discharge & Appointment. This change has been reported and received by the Minister of Law & Human Rights in Receipt No. AHU-AH.01.03-0407025 on 12 November 2020.

Business Activities

1. Depo Container;
2. Stuffing/Unstuffing;
3. CFS;
4. Trucking;
5. Equipment procurement for stuffing/unstuffing and lolo service.

Kepemilikan Saham PIL per 31 Desember 2020 PIL Shares Ownership per 31 December 2020



Manajemen Kunci PIL per 31 Desember 2020

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ridwan Sani Siregar
Komisaris Independen : M. Diddy Budiono

Direksi

Direktur Utama : -
Direktur : Deni Rahayu Santoso
Netty Wati Limbong

PIL Key Management per 31 December 2020

Board of Commissioners

President Commissioner : Ridwan Sani Siregar
Independent Commissioner : M. Diddy Budiono

Board of Directors

President Director : -
Director : Deni Rahayu Santoso
Netty Wati Limbong



KINERJA KEUANGAN PIL 2019-2020
PIL FINANCIAL PERFORMANCE 2019-2020

	2020 (Rp-juta) 2020 (Rp-million)	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)
Pendapatan Revenues	121.325	71.664
Beban Usaha Business Cost	109.678	72.706
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	5.178	1.013
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Net (Loss)	5.103	1.013
Aset Assets	392.104	372.424
Liabilitas Liabilities	142.890	125.882
Ekuitas Equities	249.214	246.543

PT PRIMA MULTI TERMINAL

Riwayat Singkat

PT Prima Multi Terminal (PMT) merupakan anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 yang merupakan usaha patungan/sindikasi (*Joint Venture Company - JVCo*) antara Pelindo 1, PT Waskita Karya dan PT Pembangunan Perumahan (PP). Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 04 yang dibuat di hadapan Tuti Sumarni, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 26 September 2014 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-26883.40.10.2014 tanggal 29 September 2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 9 tanggal 16 Oktober 2020 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., di Medan tentang pemberhentian dan pengangkatan Komisaris PT PMT. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0401701 tanggal 26 Oktober 2020.

Sejak awal berdiri, PMT berfokus pada Pembangunan pelabuhan dan saat ini PMT juga fokus dan siap mengoptimalkan layanan sebagai Operator Terminal Multipurpose baru di Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sebagai Terminal Multipurpose saat ini PMT mengelola Terminal Petikemas dan Terminal Curah Cair khususnya untuk komoditi minyak sawit (CPO), dan turunannya.

PMT memiliki dermaga sepanjang 500 meter dengan *draft* mencapai 18.5 LWS, sehingga bisa menyandarkan kapal atau melayani bongkar muat untuk 2 hingga 3 kapal ukuran sedang dan besar (*Mother Vessel*), secara bersamaan. Dari segi Layanan Bongkar Muat Petikemas, tahap awal PMT memiliki kapasitas 637.553 TEUs/years B/C/H = 30 Box dan untuk layanan Bongkar Muat CPO, PMT saat ini memiliki *Holding Cap* = 720.00 Ton/Year dengan kapasitas Pompa = 250 T/P/H.

PT PRIMA MULTI TERMINAL

Brief History

PT Prima Multi Terminal (PMT) is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) or Pelindo 1 which is a Joint Venture Company – JVCo between Pelindo 1, PT Waskita Karya & PT Pembangunan Perumahan (PP). The Company was established based on Establishment Act No. 04 made in front of Notary Tuti Sumarni, S.H., at Jakarta on 26 September 2014 and has been approved by Minister of Law & Human Rights Order AHU-26883.40.10.2014 on 29 September 2014. Company's Articles of Association has went through some changes with Notary Act, with last being No. 9 on 16 Oktober 2020 by Risna Rahmi Arifa, SH., at Medan on PT PMT President Commissioner Discharge and Appointment. This change has been reported and received by the Minister of Law and Human Rights in Receipt No. AHU-AH.01.03-0401701 on 26 October 2020.

Since its establishment, PMT is focused on Port Construction & currently is optimising service as new Multipurpose Terminal Operator at Kuala Tanjung Port, Batubara County, North Sumatera. PMT currently manages Container Terminal & Liquid Bulk especially for Palm Oil (CPO) Commodities, and its derivatives.

PMT has a 500 meter dock with 18.5 LWS draft, thus enabling ships to dock & able to service for 2/3 medium & large sized ships (*Mother Vessel*) loading/unloading, simultaneously. On Container Loading/Unloading Service, early phase of PMT has capacity of 637,553 TEUs/years B/C/H = 30 Box and for CPO Loading/Unloading Service has Holding Cap = 720,00 Ton/Year with Pump capacity = 250 T/P/H.

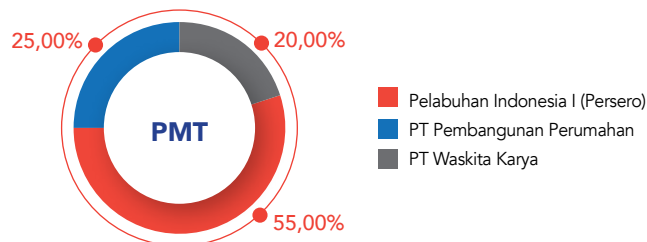
Kegiatan Usaha

1. Penyedia jasa terminal petikemas internasional dan domestik;
2. Penyedia jasa terminal curah cair internasional dan domestik;
3. Penyediaan pergudangan;
4. Kegiatan Industri tertentu dan Jasa penunjang lainnya.

Business Activities

1. International & Domestic Container Terminal Provider;
2. International & Domestic Liquid Bulk Terminal Provider;
3. Warehouse Provider;
4. Certain Industrial activities and other supporting services.

Kepemilikan Saham PMT per 31 Desember 2020 PMT Shares Ownership per 31 December 2020



Manajemen Kunci PMT per 31 Desember 2020

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Roy Leonard
 Komisaris : Nawang Sri Retno K
 Sugiati Santoso

Direksi

Direktur Utama : Robert M. P Sinaga
 Direktur : I Komang Sumita
 Arif Mahmudianto

PMT Key Management per 31 December 2020

Board of Commissioners

President Commissioner : Roy Leonard
 Commissioner : Nawang Sri Retno K
 Sugiati Santoso

Board of Directors

President Director : Robert M. P Sinaga
 Direktur : I Komang Sumita
 Arif Mahmudianto

KINERJA KEUANGAN PMT 2019-2020 PMT FINANCIAL PERFORMANCE 2019-2020

	2020 (Rp-juta) 2020 (Rp-million)	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)
Pendapatan Revenues	61.104	323.748
Beban Usaha Business Cost	156.390	415.091
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(281.598)	(161.847)
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Net (Loss)	(281.608)	(161.866)
Aset Assets	3.971.707	4.232.027
Liabilitas Liabilities	2.956.388	2.935.101
Ekuitas Equities	1.015.319	1.296.926



PT PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN

Riwayat Singkat

PT Prima Pengembangan Kawasan (PPK) merupakan anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 yang merupakan usaha patungan/sindikasi (*Joint Venture Company - JVCo*) antara Pelindo 1 dan PT Prima Multi Terminal. Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Spn Notaris di Medan pada tanggal 8 September 2015 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2455231.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 8 September 2015. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Februari 2020 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., di Medan tentang perubahan anggaran dasar PT PPK. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0122011 tanggal 4 Maret 2020.

Maksud dan tujuan pendirian PT Prima Pengembangan Kawasan adalah melakukan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Industri di Kuala Tanjung, di mana proyek tersebut telah menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional *juncto* Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian pelabuhan, dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan Usaha

1. Konsultan bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri;
2. Jasa pembangunan dan pengelolaan kawasan industri;
3. Jasa penyewaan dan pengelolaan kawasan industri;
4. Jasa pengolahan limbah;
5. Pengadaan instalasi pengolahan air bersih;
6. Penyediaan pembangkit & instalasi listrik, instalasi telepon dan sarana lainnya yang diperlukan dalam menunjang pengelolaan kawasan industri;
7. Kegiatan logistik.

PT PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN

Brief History

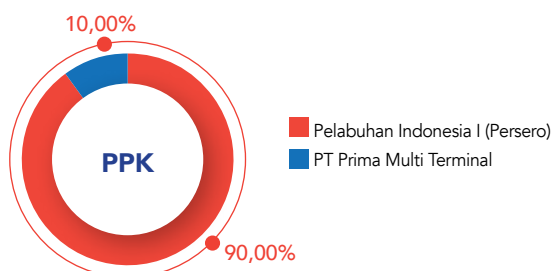
PT Prima Pengembangan Kawasan (PPK) is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) or Pelindo 1 which is a Joint Venture Company – JVCo between Pelindo 1 and PT Prima Multi Terminal. The Company was established based on Establishment Act No. 15 made in front of Notary Risna Rahmi Arifa, S.H., Spn at Medan on 8 September 2015 & has been approved by Minister of Law & Human Rights Order AHU-2455231.AH.01.01.Tahun 2015 on 8 September 2015. Company's Articles of Association has went through some changes with Notary Act, with last being No. 1 on 1 Februari 2020 by Risna Rahmi Arifa, SH., at Medan on PT PPK Articles of Association changes. This change has been reported and received by the Minister of Law and Human Rights in Receipt No. AHU-AH.01.03-0122011 on 4 March 2020.

PT Prima Pengembangan Kawasan is aimed to perform development and management of Kuala Tanjung Industrial Area, where it is also part of National Strategic Project based on Presidential Decree No. 56 Year 2018 on Second Amendment On Presidential Decree No 3 Year 2015 on National Strategic Project Acceleration *juncto* Presidential Decree No. 81 Year 2018 on Port & Industrial Area Construction, and Operation Acceleration in North Sumatera Province.

Business Activities

1. Operation Management Consultant and Industrial Area Maintenance;
2. Industrial Area Construction and Management;
3. Industrial Area Rental and Management;
4. Waste Management Service;
5. Clean Water Processing Installation Procurement;
6. Electrical installation & power plant procurement, telephone installation and other facilities needed to sustain industrial area management;
7. Logistical Activities.

Kepemilikan Saham PPK per 31 Desember 2020 PPK Shares Ownership per 31 December 2020



Manajemen Kunci PPK per 31 Desember 2020

Dewan Komisaris

Komisaris : Hosadi Apriza Putra

Direksi

Direktur Utama : Jansen Sitohang
 Direktur : Saut Fransiswoyo Siagian
 Arif Hutomo

PPK Key Management per 31 December 2020

Board of Commissioners

Commissioner : Hosadi Apriza Putra

Board of Directors

President Director : Jansen Sitohang
 Director : Saut Fransiswoyo Siagian
 Arif Hutomo

KINERJA KEUANGAN PPK 2019-2020

PPK FINANCIAL PERFORMANCE 2019-2020

	2020 (Rp-juta) 2020 (Rp-million)	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)
Pendapatan Revenues	5.952	505
Beban Usaha Business Cost	11.486	8.727
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	11.672	14.239
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Net (Loss)	11.672	14.239
Aset Assets	899.389	898.144
Liabilitas Liabilities	4.744	15.171
Ekuitas Equities	894.645	882.973

PT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN

Riwayat Singkat

Pada tahun 2016, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 mendirikan anak perusahaan dengan nama PT Prima Husada Cipta Medan, yang bergerak dibidang pelayanan jasa kesehatan, pembinaan sarana kesehatan, bisnis pengelolaan rumah sakit, klinik satelit/pratama, klinik estetika, dan layanan peralatan kesehatan (*health care*). Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan pada tanggal 8 November 2016 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0052052.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 7 tanggal 19 November 2020 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., di Medan tentang pemberhentian Direksi PT PHCM. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0421276 tanggal 18 Desember 2020.

PT Prima Husada Cipta mengemban misi menjadi bagian dan sarana Pelindo 1 untuk memajukan dan menyediakan sarana/prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. PT Prima Husada Cipta Medan

PT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN

Brief History

In 2016, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) or Pelindo 1 established a subsidiary under the name of PT Prima Husada Cipta Medan, which engaged in health service, healthcare facilities cultivation, hospital, satellite clinic, esthetical clinic management business, and healthcare equipment service. The Company was established based on Establishment Act No. 4 in front of Risna Rahmi Arifa, S.H., Spn at Medan on 8 November 2016 & has been approved by Minister of Law & Human Rights Order AHU-0052052.AH.01.01.Tahun 2016 on 22 November 2016. Company's Articles of Association has went through some changes with Notary Act, with last being No. 7 on 19 November 2020 by Risna Rahmi Arifa, SH., at Medan PT PHCM Directors Discharge & Appointment. This change has been reported and received by the Minister of Law & Human Rights in Receipt No. AHU-AH.01.03-0421276 on 18 December 2020.

PT Prima Husada Cipta carries mission to be a part and facilities for Pelindo 1 to advance & providing customer's needs oriented quality infrastructures/facilities. PT Prima Husada Cipta Medan presides Medan Port Hospital which changed its name to



membawahi Rumah Sakit pelabuhan Medan yang berganti nama menjadi Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan dan juga Klinik Spesialis Krakatau. Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan yang merupakan anak perusahaan ke-enam milik Pelindo 1 dan satu-satunya rumah sakit terbesar dan terlengkap fasilitas pelayanan kesehatannya di Kecamatan Medan Belawan saat ini.

Prima Husada Cipta Medan Hospital & also Krakatau Specialist Clinic. Prima Husada Cipta Medan Hospital is the 6th owned subsidiaries by Pelindo 1 and currently the only largest & well equipped in Medan Belawan Subdistrict.

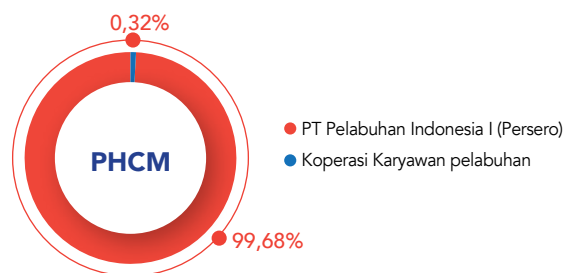
Kegiatan Usaha

Penyedia jasa kesehatan, rumah sakit, klinik dan poliklinik, balai pengobatan serta usaha terkait.

Business Activities

Healthcare service, hospital, clinic, polyclinic, dispensaries provider with adjacent businesses.

Kepemilikan Saham PHCM per 31 Desember 2020 PHCM Shares Ownership per 31 December 2020



Manajemen Kunci PHCM per 31 Desember 2020

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Henry Naldi
Komisaris : Dr. H Azwan Hakmi Lubis, SpA M.Kes

Direksi

Direktur Utama : Rudi Susanto

PHCM Key Management per 31 December 2020

Board of Commissioners

President Commissioner : Henry Naldi
Commissioner : Dr. H Azwan Hakmi Lubis, SpA M.Kes

Board of Directors

President Director : Rudi Susanto

KINERJA KEUANGAN PHCM 2019-2020 PHCM FINANCIAL PERFORMANCE 2019-2020

	2020 (Rp-juta) 2020 (Rp-million)	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)
Pendapatan Revenues	35.074	19.881
Beban Usaha Business Cost	25.573	23.955
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	10.686	(6.439)
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Net (Loss)	10.686	(6.439)
Aset Assets	38.299	22.106
Liabilitas Liabilities	12.003	6.497
Ekuitas Equities	26.296	15.609

KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG

PT PRIMA MULTI PERALATAN

Riwayat Singkat

PT Prima Multi Peralatan (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta No. 74 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Bambang Suprianto, S.H., Sp.N., M.H di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006164.AH.01.01, tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No.22 yang dibuat di hadapan Notaris Abidin S Panggabean, S.H., Notaris di Medan tanggal 11 September 2020 mengenai penambahan maksud dan tujuan Perusahaan.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk berusaha dalam bidang perdagangan umum, jasa, pembangunan (kontraktor), pengangkutan, pertanian, perindustrian, dan percetakan. Kegiatan operasional perusahaan dimulai sejak April 2019 dengan bidang usaha meliputi jasa *maintenance* peralatan pelabuhan, pergantian *sparepart*, dan lainnya terkait dengan perawatan peralatan-peralatan pelabuhan.

INDIRECT OWNERSHIP

PT PRIMA MULTI PERALATAN

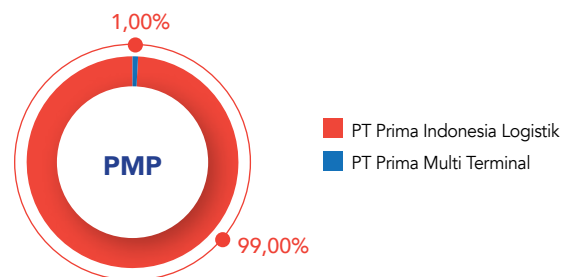
Brief History

PT Prima Multi Peralatan (Company) was established based on Establishment Act No. 74 on 28 December 2018 which was made in front of Notary Hj. Bambang Suprianto, S.H., Sp.N., M.H in Jakarta & has been approved by Minister of Law and Human Rights Order AHU-0006164.AH.01.01, year 2019 on 6 February 2019. Company's Articles of Association has went through some changes with Notary Act, with last being No.22 which was made in front of Notary Abidin S Panggabean, S.H., in Medan on 11 September 2020 for Company's aims & goals addendum.

Business Activities

The Company is established to strive in general trade, service, construction, transportation, agriculture, industry, and printing. Company's operation has been started since April 2019 with its fields covering equipment maintenance service, spareparts repair, and port equipment maintenance.

Kepemilikan Saham PMP per 31 Desember 2020 PMP Shares Ownership per 31 December 2020



Manajemen Kunci PMP per 31 Desember 2020

Dewan Komisaris

Komisaris : Aris Zulkarnain

Direksi

Direktur : Wedy Cahyono

PMP Key Management per 31 December 2020

Board of Commissioners

Commissioner : Aris Zulkarnain

Board of Directors

Director : Wedy Cahyono



KINERJA KEUANGAN PMP 2019-2020
PMP FINANCIAL PERFORMANCE 2019-2020

	2020 (Rp-juta) 2020 (Rp-million)	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)
Pendapatan Revenues	49.528	6.745
Beban Usaha Business Cost	39.029	7.507
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	7.686	(680)
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Net (Loss)	7.686	(680)
Aset Assets	28.070	13.149
Liabilitas Liabilities	8.902	1.329
Ekuitas Equities	19.168	11.820

PT PRIMA TANKI INDONESIA

Riwayat Singkat

PT Prima Tanki Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 12 Desember 2013 oleh Rahmad Nauli Siregar, SH. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU68302.AH.01.01. tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 14 Maret 2014, Tambahan No. 7420/2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 04 tanggal 31 Mei 2017 oleh Gunawati, SH tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah, mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0142810 Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan perubahan pada pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan tersebut, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan terutama meliputi perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau; pergudangan dan penyimpanan; dan aktivitas penunjang angkutan.

PT PRIMA TANKI INDONESIA

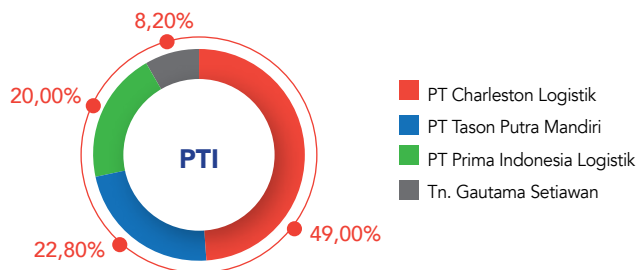
Brief History

PT Prima Tanki Indonesia was established based on Notary Act No. 41 on 12 December 2013 by Rahmad Nauli Siregar, SH. The Company Establishment Act has been approved by Minister of Justice Order No. AHU68302.AH.01.01. year 2013 on 27 December 2013 and has been announced on Republic of Indonesia State Gazette No. 21 on 14 March 2014, Addendum No. 7420/2014. Company's Articles of Association has went through some changes with Notary Act, with last being No. 04 on 31 May 2017 by Gunawati, SH on Articles of Association Revision in compliance to Act No. 40 year 2007 on Limited Liability Company. This change has been reported and received by the Minister of Law and Human Rights in Receipt No No. AHU-AH.01.03-0142810 Year 2017 on 6 June 2017.

Business Activities

In accordance to revision on article 3 Articles of Association, Company's main business area covers large scale food, beverages and tobacco trade; warehousing and storage; and transportation support.

**Kepemilikan Saham PT Prima Tangki Indonesia
per 31 Desember 2020**
Prima Tanki Indonesia Shares Ownership
per 31 December 2020



**Manajemen Kunci PT Prima Tangki Indonesia
per 31 Desember 2020**

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tanri Abeng
Komisaris : Bertha Jusrahja
Sandhy Wijaya

Direksi

Direktur Utama : Gaotama Setiawan
Direktur : Gaotama Setiawan

**Prima Tanki Indonesia Key Management
per 31 December 2020**

Board of Commissioners

President Commissioner : Tanri Abeng
Commissioner : Bertha Jusrahja
Sandhy Wijaya

Board of Directors

President Director : Gaotama Setiawan
Director : Gaotama Setiawan

KINERJA KEUANGAN PT PRIMA TANGKI INDONESIA 2019-2020
PRIMA TANKI INDONESIA FINANCIAL PERFORMANCE 2019-2020

	2020 (Rp-juta) 2020 (Rp-million)	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)
Pendapatan Revenues	36.865	10.224
Beban Usaha Business Cost	33.508	21.820
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	784	(6.038)
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Net (Loss)	784	(6.038)
Aset Assets	212.363	221.720
Liabilitas Liabilities	139.183	149.323
Ekuitas Equities	73.180	72.397



ENTITAS ASOSIASI

PT TERMINAL PETIKEMAS INDONESIA

Riwayat Singkat

PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn. No. 36 tanggal 10 April 2013 dan telah memperoleh pengesahan badan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-21873.AH.01.01. tahun 2013 tanggal 24 April 2013 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M. Kn. No. 1 tanggal 2 Desember 2017.

Kegiatan Usaha

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, meliputi:
 - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang, dan Petikemas;
 - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang, dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal Petikemas;
 - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - Penyediaan dan/atau pusat distribusi, dan konsolidasi barang.
- Jasa berkaitan dengan kepelabuhanan meliputi:
 - Penyediaan depo Petikemas;
 - Pelayanan dan pengisian air tawar dan minyak;
 - Penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 - Pengemasan dan pelabelan;
 - Fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer.
- Pengusahaan terminal.

ASSOCIATION ENTITY

PT TERMINAL PETIKEMAS INDONESIA

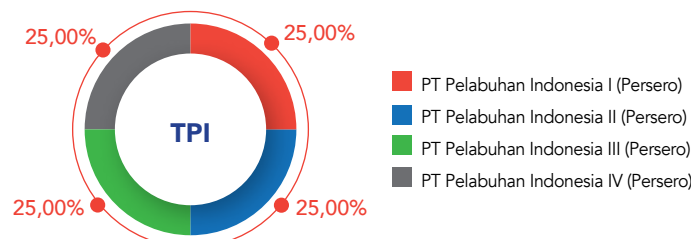
Brief History

PT Terminal Petikemas Indonesia (PT TPI) was established based on Notary Act by Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M. Kn. No. 36 on 10 April 2013 and has been approved by Minister of Law and Human Rights as Legal Bodies under Order No. AHU-21873.AH.01.01. year 2013 on 24 April 2013 has been through several revision with the last being Notary Act by Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn. No. 1 on 2 December 2017.

Business Activities

- Procurement and/or service of ship, passengers, and goods, which cover:
 - Docks for docking;
 - Docking service for goods & container loading, and unloading;
 - Warehousing, stockpiling, loading/unloading equipment & port equipment;
 - Container terminal;
 - Loading/Unloading;
 - Distribution Centre & consolidation.
- Port service which cover:
 - Container depot procurement;
 - Water & petrol refilling service;
 - Cold storage facilities;
 - Packing & labelling;
 - Fumigation & container cleaning/repairing.
- Terminal utilisation.

Kepemilikan Saham TPI per 31 Desember 2020 TPI Shares Ownership per 31 December 2020



Manajemen Kunci TPI per 31 Desember 2020

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : -
 Komisaris : Syahputera Sembiring (Non-Aktif)

Direksi

Direktur Utama : Hadi Mohammad Lukmantyo
 Direktur : Abadi Sembiring (Non-Aktif)

TPI Key Management per 31 December 2020

Board of Commissioners

Board of Commissioner : -
 Commissioner : Syahputera Sembiring (Non-Aktif)

Board of Directors

President Director : Hadi Mohammad Lukmantyo
 Director : Abadi Sembiring (Non-Aktif)

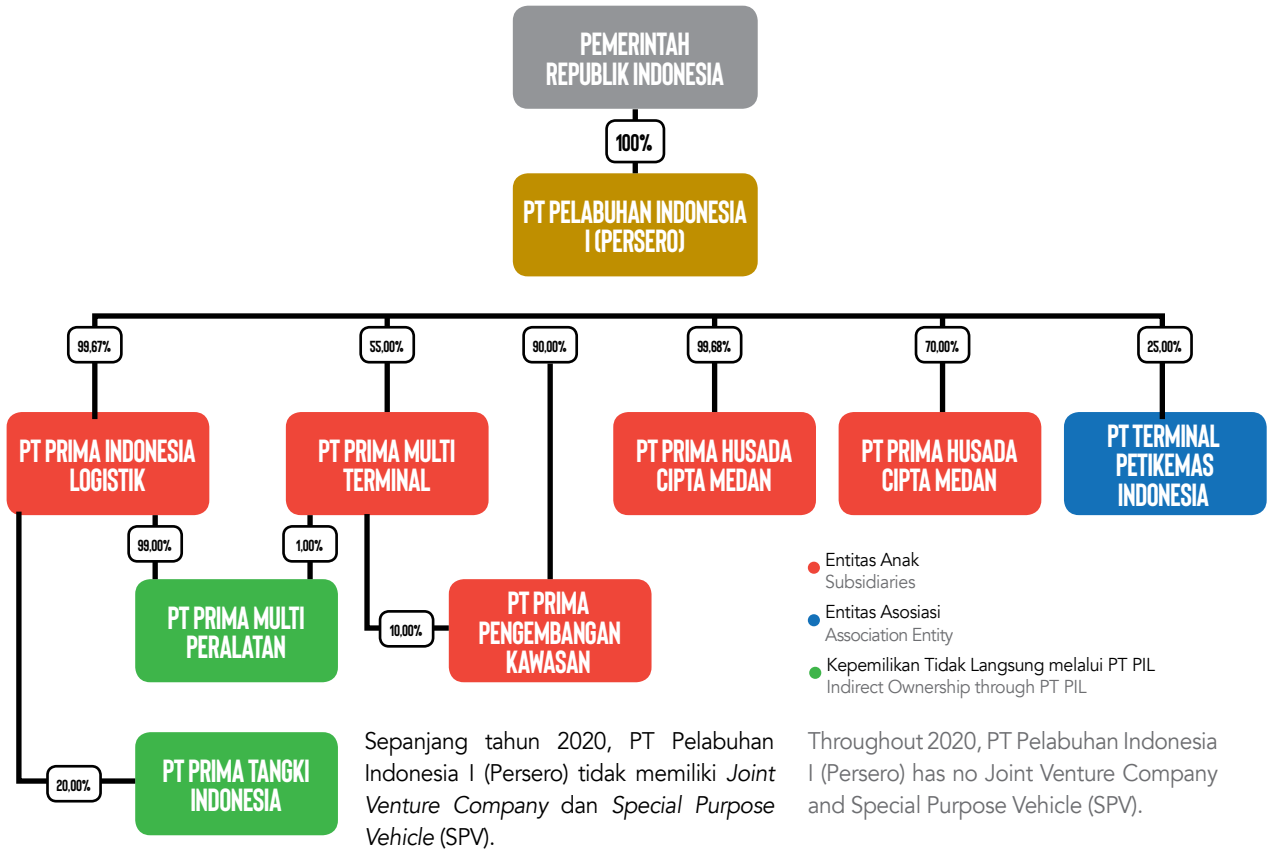
KINERJA KEUANGAN TPI 2019-2020 TPI FINANCIAL PERFORMANCE 2019-2020

	2020 (Rp-juta) 2020 (Rp-million)	2019 (Rp-juta) 2019 (Rp-million)
Pendapatan Revenues	-	-
Beban Usaha Business Cost	5.126	5.379
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	490	2.139
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Net (Loss)	490	2.139
Aset Assets	134.141	133.112
Liabilitas Liabilities	1.159	620
Ekuitas Equities	132.982	132.492



STRUKTUR GRUP

GROUP STRUCTURE



KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN SAHAM

SHARE ISSUANCE AND/OR RECORDING CHRONOLOGY

Sampai dengan 31 Desember 2020, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tidak mencatatkan saham di bursa efek mana pun, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa yang harus diungkapkan.

Until 31 December 2020, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) didn't record any shares at any stock exchange, thus there isn't any information regarding any record, corporate action, total shares mutation, or any stock exchange names which need to be disclosed.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

OTHER EFFECTS ISSUANCE AND/OR RECORDING CHRONOLOGY

Untuk memperkuat struktur pendanaannya, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menerbitkan Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara pada Tahun 2016 tanpa warkat dan dijamin secara kesanggupan penuh sebesar Rp1 triliun. Penerbitan obligasi dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada 21 Juni 2016. Obligasi tersebut terbagi menjadi 4 (empat) seri obligasi, yaitu Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D. Berikut tabel penjelasannya:

To reinforce its funding structure, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) issued Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara in 2016 without any draft & guaranteed fully paid off for the sum of Rp 1 trillion. Bond issuance was done in Indonesia Stock Exchange in 21 June 2016. The bond were classified into 4 series, namely A, B, C, and D. The table below provides explanation:

Nama Penerbitan Name	Jangka Waktu (Tahun) Tenure (Year)	Tanggal Terbit Date of Issuance	Jatuh Tempo Due Date	Rate (%)	Jumlah (Rp Miliar) Amount (Rp Billion)	Rating	Status
Seri A A Series	3	21 Juni 2016 21 June 2016	21 Juni 2019 21 June 2019	8,25	50	AA	Lunas Paid
Seri B B Series	5	21 Juni 2016 21 June 2016	21 Juni 2021 21 June 2021	9	500	AA	Belum Lunas Not yet paid off
Seri C C Series	7	21 Juni 2016 21 June 2016	21 Juni 2023 21 June 2023	9,25	400	AA	Belum Lunas Not yet paid off
Seri D D Series	10	21 Juni 2016 21 June 2016	21 Juni 2026 21 June 2026	9,50	50	AA	Belum Lunas Not yet paid off



LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS AND/OR PROFESSIONS

DAFTAR LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

LIST OF INSTITUTIONS & PROFESSIONS SUPPORTING CAPITAL MARKET

	Nama dan Alamat Name & Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type & Form of Service	Biaya (Rp) Fee (Rp)	Periode Penugasan Assignment Period
Kantor Akuntan Publik Public Accountant Office	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) Plaza Asia, Level 10, Jl. Jend. Sudirman No.59, RT.5/RW.3, Senayan, Jakarta, South Jakarta City, Jakarta 12190 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Associates (RSM Indonesia) Plaza Asia, Level 10, Jl. Jend. Sudirman No.59, RT.5/RW.3, Senayan, Jakarta, South Jakarta City, Jakarta 12190	Melakukan audit umum atas laporan keuangan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pelindo 1 dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 Performing general audit on financial report & partnership program & community empowerment program report of Pelindo 1 & its subsidiaries for until 31 December 2020	Rp1.926.650.000 termasuk pajak Rp1,926,650,000 tax included	2020
Konsultan Hukum Legal Consultant	Prof.Dr. Maria.S.W. Sumardjono.S.H. MCL.,MPA Jl. Sartika No. 7, Yogyakarta APSG Law Firm and Counsellor at Law Jl. Brantas No. 30 A, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Bandung	Konsultan hukum pertanahan Perseroan Company Legal Consultant for Land Law Jasa Hukum Pendampingan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan ruang lingkup pekerjaan non-litigasi meliputi review pelaksanaan kerja sama dengan mitra, pendampingan Perseroan dalam pemenuhan pemanggilan Kepolisian RI, dll. Jasa Hukum Pendampingan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Legal Assistance with non-litigation scope covering cooperation review with partners, assisting Company when summoned by Indonesian Police etc.	Rp540.000.000 termasuk Pajak Rp540,000,000,- tax included Rp360.000.000 termasuk Pajak Rp360,000,000,- tax included	1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 1 January 2020 to 31 December 2020 1 Mei 2020 s.d 31 Desember 2020 1 May 2020 to 31 December 2020
	Kantor Hukum Roni Masa Damanik & Rekan Jl. Pasar II Setiabudi Komp. Gardenia A-6 Tj. Sari, Medan Roni Masa Damanik & Associates Law Firm Jl. Pasar II Setiabudi Komp. Gardenia A-6 Tj. Sari, Medan	Jasa Hukum Pendampingan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi review pelaksanaan kerja sama dengan mitra, pra litigasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) legal assistance with scope covering work performance review with partners & pre litigation	Rp270.000.000 termasuk Pajak Rp270,000,000 tax included	1 April 2020 s.d 31 Desember 2020 1 April 2020 to 31 December 2020

DAFTAR LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
LIST OF INSTITUTIONS & PROFESSIONS SUPPORTING CAPITAL MARKET

Nama dan Alamat Name & Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type & Form of Service	Biaya (Rp) Fee (Rp)	Periode Penugasan Assignment Period
<p>Notaris Notary</p> <p>Notaris & PPAT Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn Royal Palace Blok C/16, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178 A, Jakarta Selatan Notary & Conveyancer Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn (Royal Palace Blok C/16, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178 A, Jakarta Selatan)</p>	<p>Pembuatan Akta Anggaran Perseroan beserta turunannya Making Company Budget Plan & its derivatives</p>	Rp22.000.000	2020
<p>Notaris & PPAT Risna Rahmi Arifa, SH., M.Kn Jl. Ramlan Yatim No. 01, Medan Notary & Conveyancer Risna Rahmi Arifa, SH., M.Kn (Jl. Ramlan Yatim No. 01, Medan)</p>	<p>Pembuatan Akta Anggaran Perseroan beserta turunannya Making Company Budget Plan & its derivatives</p>	Rp50.000.000	2020
<p>Notaris & PPAT Budi Suyono, S.H. Jl. Pangeran Hidayat No. 108 B (simpang A. Yani) Kel. Kota Baru, Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru Notary & Conveyancer Budi Suyono, S.H. (Jl. Pangeran Hidayat No. 108 B (simpang A. Yani) Kel. Kota Baru, Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru)</p>	<p>Pengurusan perubahan nama, peningkatan, serta perpanjangan alas hak pada Perseroan Name change arrangement & Company's notarial deeds revision & extension</p>	Rp 80.000.000 termasuk Uang Pemasukan, biaya pendaftaran tanah, BPHTB, biaya serta pajak berlaku Rp 80,000,000 including Revenues, land registration fee, land tax, costs & taxes	2020
<p>Notaris & PPAT Nyak Raja, SH., M.Kn Jl. Ahmad Yani No. 19, Kota Langsa Notary & Conveyancer Nyak Raja, SH., M.Kn (Jl. Ahmad Yani No. 19, Kota Langsa)</p>	<p>Pengurusan perubahan nama, peningkatan, serta perpanjangan alas hak pada Perseroan Name change arrangement & Company's notarial deeds revision & extension</p>	Rp178.844.400,- termasuk Uang Pemasukan, biaya pendaftaran tanah, BPHTB, biaya serta pajak berlaku Rp 178,844,400 including Revenues, land registration fee, land tax, costs & taxes	2020
<p>Notaris & PPAT Muhammad Taufik Atma, SH., M.Kn Jl. T. Amir Hamzah Desa Perdamaian, Kec. Binjai, Kab. Langkat Notary & Conveyancer Muhammad Taufik Atma, SH., M.Kn (Jl.T. Amir Hamzah Desa Perdamaian, Kec. Binjai, Kab. Langkat)</p>	<p>Pengurusan perubahan nama, peningkatan, serta perpanjangan alas hak pada Perseroan Name change arrangement & Company's notarial deeds revision & extension</p>	Rp347.500.000 termasuk Pajak Rp347,500,000 Tax included	2020



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

PENGHARGAAN DI TAHUN 2020

AWARDS IN 2020

Tanggal Date	Nama Penghargaan Award's Name	Kriteria Penilaian Evaluation Criteria	Diberikan Oleh Given by
Nasional National			
7 Februari 2020 7 February 2020	Gold Winner dalam ajang <i>Inhouse Magazine Awards</i> (InMA) 2020 Gold Winner in Inhouse Magazine Awards (InMA) 2020	Kreativitas dalam pembuatan sampul muka majalah internal perusahaan. Creativity in making company internal magazine front cover.	Serikat Perusahaan Pers (SPS)
4 Maret 2020 4 March 2020	Penghargaan predikat <i>Emerging Industry Leader</i> dalam ajang <i>BUMN Performance Excellence Award</i> (BPEA) 2020 Emerging Industry Leader award in BUMN Performance Excellence Award (BPEA) 2020	Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN sejak 2012. Excellent Performance Evaluation set by Ministry of SOE since 2012.	Forum Ekselen BUMN
20 April 2020 20 April 2020	<i>Silver Winner Sub Kategori Video Profil</i> , <i>Silver Winner Sub Kategori Community Based Development</i> , <i>Bronze Winner Sub Kategori E-Magazine</i> dalam ajang <i>PR Indonesia Award 2020</i> Silver Winner Sub Category Video Profile, Silver Winner Sub Category Community Based Development, Bronze Winner Sub Kategori E-Magazine in PR Indonesia Award 2020	Ide kreatif, <i>branding</i> , desain, konten, PR Values, Efektivitas penyampaian, objektif Program, strategi komunikasi, eksekusi, dan pengukuran. Creative Ideas, branding, design, contents, PR Values, Presentation effectivity, Program objective, communication strategy, execution, and measurement.	Majalah PR Indonesia
29 Juli 2020 29 July 2020	Kategori <i>4 Stars Tp VSR Award</i> dan <i>Top Leader in CSR Commitment</i> dalam <i>Top CSR</i> 4 Stars Category Tp VSR Award and Top Leader in CSR Commitment in Top CSR	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat adopsi CSR Perusahaan terhadap ISO 26000 <i>Social Responsibility</i>. - Keselarasan Program CSR dengan Strategi Bisnis perusahaan. - Bagaimana prinsip-prinsip GCG melandasi pelaksanaan program-program CSR perusahaan. - CSR adoption level to ISO 26000 Social Responsibility. - CSR Program Harmony with Company Business Strategy. - How GCG principles became a foundation for Company CSR programs. 	Top Business Magazine, Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i> , CSR Society
28 September 2020 28 September 2020	Gold Winner kategori <i>Social Economy Contribution</i> pada ajang 2nd RRI iEconomics BUMN <i>Brand Award 2020 "Millenial's Choice"</i> Gold Winner on Social Economy Contribution at 2nd RRI iEconomics BUMN Brand Award 2020 "Millenial's Choice"	<i>Brand awareness</i> , kepuasan pelanggan dan kontribusi sosial ekonomi kepada masyarakat. Brand awareness, customer's satisfaction & socio economic impact to society.	RRI, The iEconomics
26 November 2020 28 September 2020	Penghargaan kategori <i>Pemimpin BUMN Non-Tbk. Terpopuler di Media Digital 2020</i> pada ajang <i>Anugerah Humas Indonesia</i> Award for Most Popular Leader on Digital Media of Non-Public SOE on Anugerah Humas Indonesia	Kalkulasi dan dianalisis berdasarkan jumlah eksposur berita positif di portal-portal berita <i>mainstream</i> di Indonesia sepanjang 2020. Positive exposures in mainstream news channels in Indonesia throughout 2020.	Majalah PR Indonesia

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU HINGGA TAHUN 2020

CERTIFICATIONS VALID UNTIL 2020

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date of Certification	Jenis Sertifikat Type of Certificate	Dikeluarkan Oleh Issued By	Masa Berlaku Hingga Valid Until
Sertifikat K3 OHS Certificate			
Cabang Belawan Belawan Branch			
29 Maret 2019 29 March 2019	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hasil Pencapaian 87,35% untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan Branch has applied Health & Safety Management System. 87.35% Completion for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labour	29 Maret 2022 29 March 2022

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU HINGGA TAHUN 2020

CERTIFICATIONS VALID UNTIL 2020

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date of Certification	Jenis Sertifikat Type of Certificate	Dikeluarkan Oleh Issued By	Masa Berlaku Hingga Valid Until
23 Maret 2018 23 March 2018	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan, dengan ini dinyatakan bahwa fasilitas pelabuhan tersebut diatas menerapkan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan Internasional untuk Keamanan Kapal dan Fasilitas pelabuhan (ISPS Code) bahwa Fasilitas pelabuhan ini telah diverifikasi dan beroperasi sesuai rancangan Keamanan Fasilitas pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan Branch has applied SOLAS 74 chapter XI-2 part A of International Ship & Port Safety (ISPS Code). This Port facilities has been verified & operated according to port facility security plan.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Sea Transportation	11 Maret 2023 11 March 2023
18 Januari 2021 18 January 2021	Sistem Manajemen ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 Management System	TUV NORD Indonesia TUV NORD Indonesia	17 Januari 2024 17 January 2024
30 November 2020 30 November 2020	Sistem Manajemen Anti Penyuaipan ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System	TUV NORD Indonesia TUV NORD Indonesia	29 November 2023
Cabang Lhokseumawe Lhokseumawe Branch			
29 Maret 2019 29 March 2019	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Lhokseumawe telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hasil Pencapaian 85,54% untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Lhokseumawe Branch has applied Health & Safety Management System. 85.54% Completion for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labour	29 Maret 2022 29 March 2022
4 Oktober 2016 4 October 2016	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Lhokseumawe, dengan ini dinyatakan bahwa fasilitas pelabuhan tersebut diatas menerapkan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan Internasional untuk Keamanan Kapal dan Fasilitas pelabuhan (ISPS Code) bahwa Fasilitas pelabuhan ini telah di verifikasi dan beroperasi sesuai rancangan Keamanan Fasilitas pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Lhokseumawe Branch has applied SOLAS 74 chapter XI-2 part A of International Ship & Port Safety (ISPS Code). This Port facilities has been verified & operated according to port facility security plan.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Sea Transportation	5 September 2021
Cabang Malahayati Malahayati Branch			
29 Maret 2019 29 March 2019	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Malahayati telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hasil Pencapaian 88,55% untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Pekanbaru Branch has applied Health & Safety Management System. 88.55% Completion for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labour	29 Maret 2022 29 March 2022
17 Oktober 2016 17 October 2016	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Malahayati, dengan ini dinyatakan bahwa fasilitas pelabuhan tersebut diatas menerapkan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan Internasional untuk Keamanan Kapal dan Fasilitas pelabuhan (ISPS Code) bahwa Fasilitas pelabuhan ini telah diverifikasi dan beroperasi sesuai rancangan Keamanan Fasilitas pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Malahayati Branch has applied SOLAS 74 chapter XI-2 part A of International Ship & Port Safety (ISPS Code). This Port facilities has been verified & operated according to port facility security plan.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Sea Transportation	6 September 2021
Cabang Pekanbaru Pekanbaru Branch			
29 Maret 2019 29 March 2019	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pekanbaru telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hasil Pencapaian 88,55% untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Pekanbaru Branch has applied Health & Safety Management System. 88.55% Completion for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labour	29 Maret 2022 29 March 2022
27 September 2016 27 September 2016	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pekanbaru, dengan ini dinyatakan bahwa fasilitas pelabuhan tersebut diatas menerapkan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan Internasional untuk Keamanan Kapal dan Fasilitas pelabuhan (ISPS Code) bahwa Fasilitas pelabuhan ini telah diverifikasi dan beroperasi sesuai rancangan Keamanan Fasilitas pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Pekanbaru Branch has applied SOLAS 74 chapter XI-2 part A of International Ship & Port Safety (ISPS Code). This Port facilities has been verified & operated according to port facility security plan.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Sea Transportation	7 September 2021



SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU HINGGA TAHUN 2020
CERTIFICATIONS VALID UNTIL 2020

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date of Certification	Jenis Sertifikat Type of Certificate	Dikeluarkan Oleh Issued By	Masa Berlaku Hingga Valid Until
Unit Galangan Kapal Shipyards Unit			
29 Maret 2019 29 March 2019	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Unit Galangan Kapal telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hasil Pencapaian 86,14% untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Shipyards Unit has applied Health & Safety Management System. 86.14% Completion for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI Ministry of Labour	29 Maret 2022 29 March 2022
Cabang TPK Belawan Belawan Container Terminal Branch			
29 September 2020 29 September 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tpk Belawan telah melaksanakan Audit SMK3 pada tanggal 3 September 2020 dan 4 September 2020 dengan hasil pencapaian 94,58% dan direkomendasikan untuk mendapatkan "Tingkat Penilaian Memuaskan" untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan Container Terminal Branch has performed SMK3 Audit on 3 & 4 September 2020 with 94.58% completion & recommended to receive "Satisfactory Evaluation" for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui PT Surveyor Indonesia (Persero) Ministry of Labour through PT Surveyor Indonesia (Persero)	29 September 2022
Cabang Dumai Dumai Branch			
29 September 2020 29 September 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai telah melaksanakan Audit SMK3 pada tanggal 8 September 2020 dan 9 September 2020 dengan hasil pencapaian 93,97% dan direkomendasikan untuk mendapatkan "Tingkat Penilaian Memuaskan" untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Dumai Branch has performed SMK3 Audit on 8 & 9 September 2020 with 93.97% completion & recommended to receive "Satisfactory Evaluation" for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui PT Surveyor Indonesia (Persero) Ministry of Labour through PT Surveyor Indonesia (Persero)	29 September 2022
10 September 2020 10 September 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai, dengan ini dinyatakan bahwa fasilitas pelabuhan tersebut diatas menerapkan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan Internasional untuk Keamanan Kapal dan Fasilitas pelabuhan (ISPS Code) bahwa Fasilitas pelabuhan ini telah diverifikasi dan beroperasi sesuai rancangan Keamanan Fasilitas pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Dumai Branch has applied SOLAS 74 chapter XI-2 part A of International Ship & Port Safety (ISPS Code). This Port facilities has been verified & operated according to port facility security plan.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Sea Transportation	9 Februari 2021 9 February 2021
21 Desember 2020 21 December 2020	Sistem Manajemen ISO 45001:2018 untuk PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang pelabuhan Dumai ISO 45001:2018 Management System for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Dumai Port Branch	TUV NORD Indonesia TUV NORD Indonesia	20 Desember 2023 20 December 2023
Cabang Gunungsitoli Gunungsitoli Branch			
17 November 2020 17 November 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Gunungsitoli telah melaksanakan Audit SMK3 pada tanggal 10 dan 16 September 2020 dengan hasil pencapaian 89,16% dan direkomendasikan untuk mendapatkan "Tingkat Penilaian Memuaskan" untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Gunungsitoli Branch has performed SMK3 Audit on 10 & 16 September 2020 with 89.16% completion & recommended to receive "Satisfactory Evaluation" for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui PT Surveyor Indonesia (Persero) Ministry of Labour through PT Surveyor Indonesia (Persero)	17 November 2022
Cabang Batam Batam Branch			
17 November 2020 17 November 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Batam telah melaksanakan Audit SMK3 pada tanggal 31 Agustus 2020 dan 9 September 2020 dengan hasil pencapaian 87,96% dan direkomendasikan untuk mendapatkan "Tingkat Penilaian Memuaskan" untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Batam Branch has performed SMK3 Audit on 31 August & 9 September 2020 with 87.96% completion & recommended to receive "Satisfactory Evaluation" for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui PT Surveyor Indonesia (Persero) Ministry of Labour through PT Surveyor Indonesia (Persero)	17 November 2022
30 November 2020 30 November 2020	Sistem Manajemen ISO 45001:2018 untuk PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang pelabuhan Batam ISO 45001:2018 Management System for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Batam Port Branch	TUV NORD Indonesia TUV NORD Indonesia	29 November 2023

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU HINGGA TAHUN 2020

CERTIFICATIONS VALID UNTIL 2020

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date of Certification	Jenis Sertifikat Type of Certificate	Dikeluarkan Oleh Issued By	Masa Berlaku Hingga Valid Until
Cabang Sibolga Sibolga Branch			
17 November 2020 17 November 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Sibolga telah melaksanakan Audit SMK3 pada tanggal 8 dan 15 September 2020 dengan hasil pencapaian 89,16% dan direkomendasikan untuk mendapatkan "Tingkat Penilaian Memuaskan" untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sibolga Branch has performed SMK3 Audit on 8 & 15 September 2020 with 89.16% completion & recommended to receive "Satisfactory Evaluation" for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui PT Surveyor Indonesia (Persero) Ministry of Labour through PT Surveyor Indonesia (Persero)	17 November 2022
Cabang Tanjung Balai Asahan Tanjung Balai Asahan Branch			
17 November 2020 17 November 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjung Balai Asahan telah melaksanakan Audit SMK3 pada tanggal 26 Agustus 2020 dan 4 September 2020 dengan hasil pencapaian 90,36% dan direkomendasikan untuk mendapatkan "Tingkat Penilaian Memuaskan" untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Gunungsitoli Branch has performed SMK3 Audit on 26 August & 4 September 2020 with 90.36% completion & recommended to receive "Satisfactory Evaluation" for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui PT Surveyor Indonesia (Persero) Ministry of Labour through PT Surveyor Indonesia (Persero)	17 November 2022
Cabang Tembilahan Tembilahan Branch			
17 November 2020 17 November 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tembilahan telah melaksanakan Audit SMK3 pada tanggal 28 Agustus dan 1 September 2020 dengan hasil pencapaian 89,76% dan direkomendasikan untuk mendapatkan "Tingkat Penilaian Memuaskan" untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tembilahan Branch has performed SMK3 Audit on 28 August & 1 September 2020 with 89.76% completion & recommended to receive "Satisfactory Evaluation" for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui PT Surveyor Indonesia (Persero) Ministry of Labour through PT Surveyor Indonesia (Persero)	17 November 2022
Cabang Tanjung Balai Karimun Tanjung Balai Karimun Branch			
17 November 2020 17 November 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun telah melaksanakan Audit SMK3 pada tanggal 7 dan 10 September 2020 dengan hasil pencapaian 89,76% dan direkomendasikan untuk mendapatkan "Tingkat Penilaian Memuaskan" untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tanjung Balai Karimun Branch has performed SMK3 Audit on 7 & 10 September 2020 with 90.36% completion & recommended to receive "Satisfactory Evaluation" for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui PT Surveyor Indonesia (Persero) Ministry of Labour through PT Surveyor Indonesia (Persero)	17 November 2022
Cabang Kuala Tanjung Kuala Tanjung Branch			
17 November 2020 17 November 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Kuala Tanjung telah melaksanakan Audit SMK3 pada tanggal 25 Agustus 2020 dan 3 September 2020 dengan hasil pencapaian 90,36% dan direkomendasikan untuk mendapatkan "Tingkat Penilaian Memuaskan" untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Kuala Tanjung Branch has performed SMK3 Audit on 25 August & 3 September 2020 with 90.36% completion & recommended to receive "Satisfactory Evaluation" for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui PT Surveyor Indonesia (Persero) Ministry of Labour through PT Surveyor Indonesia (Persero)	17 November 2022
Cabang Sei Pakning Sei Pakning Branch			
17 November 2020 17 November 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Sei Pakning telah melaksanakan Audit SMK3 pada tanggal 27 Agustus 2020 dan 2 September 2020 dengan hasil pencapaian 89,76% dan direkomendasikan untuk mendapatkan "Tingkat Penilaian Memuaskan" untuk Kategori Tingkat Lanjutan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sei Pakning Branch has performed SMK3 Audit on 27 August & 2 September 2020 with 89.76% completion & recommended to receive "Satisfactory Evaluation" for Advanced Level.	Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui PT Surveyor Indonesia (Persero) Ministry of Labour through PT Surveyor Indonesia (Persero)	17 November 2022



SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU HINGGA TAHUN 2020
CERTIFICATIONS VALID UNTIL 2020

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date of Certification	Jenis Sertifikat Type of Certificate	Dikeluarkan Oleh Issued By	Masa Berlaku Hingga Valid Until
Cabang Tanjungpinang Tanjungpinang Branch			
8 Oktober 2020 8 October 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungpinang, dengan ini dinyatakan bahwa fasilitas pelabuhan tersebut diatas menerapkan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan Internasional untuk Keamanan Kapal dan Fasilitas pelabuhan (ISPS Code) bahwa Fasilitas pelabuhan ini telah diverifikasi dan beroperasi sesuai rancangan Keamanan Fasilitas pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tanjungpinang Branch has applied SOLAS 74 chapter XI-2 part A of International Ship & Port Safety (ISPS Code). This Port facilities has been verified & operated according to port facility security plan.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Sea Transportation	23 Mei 2024 23 May 2024
Sei Kolak Kijang Multi Purpose Terminal Sei Kolak Kijang Multi Purpose Terminal			
23 Mei 2018 23 May 2018	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sei Kolak Kijang Multi Purpose Terminal, dengan ini dinyatakan bahwa fasilitas pelabuhan tersebut diatas menerapkan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan Internasional untuk Keamanan Kapal dan Fasilitas pelabuhan (ISPS Code) bahwa Fasilitas pelabuhan ini telah diverifikasi dan beroperasi sesuai rancangan Keamanan Fasilitas pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sei Kolak Kijang Multi Purpose Terminal has applied SOLAS 74 chapter XI-2 part A of International Ship & Port Safety (ISPS Code). This Port facilities has been verified & operated according to port facility security plan.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Sea Transportation	8 Mei 2023 8 May 2023
Cabang Tanjung Balai Asahan Tanjung Balai Asahan Branch			
27 September 2016 27 September 2016	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjung Balai Asahan, dengan ini dinyatakan bahwa fasilitas pelabuhan tersebut diatas menerapkan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan Internasional untuk Keamanan Kapal dan Fasilitas pelabuhan (ISPS Code) bahwa Fasilitas pelabuhan ini telah diverifikasi dan beroperasi sesuai rancangan Keamanan Fasilitas pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tanjung Balai Asahan Branch has applied SOLAS 74 chapter XI-2 part A of International Ship & Port Safety (ISPS Code). This Port facilities has been verified & operated according to port facility security plan.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Sea Transportation	14 September 2021
Cabang Tg. Balai Karimun Tg. Balai Karimun Branch			
4 Januari 2021 4 January 2021	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tg. Balai Karimun, dengan ini dinyatakan bahwa fasilitas pelabuhan tersebut diatas menerapkan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan Internasional untuk Keamanan Kapal dan Fasilitas pelabuhan (ISPS Code) bahwa Fasilitas pelabuhan ini telah diverifikasi dan beroperasi sesuai rancangan Keamanan Fasilitas pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tg. Balai Karimun Branch has applied SOLAS 74 chapter XI-2 part A of International Ship & Port Safety (ISPS Code). This Port facilities has been verified & operated according to port facility security plan.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Sea Transportation	3 Juni 2021 3 June 2021

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN

SUBSIDIARIES AND/OR BRANCHES OR REPRESENTATIVES

Kantor Pusat Head Office

GRHA PELINDO SATU
Jalan Lingkar pelabuhan No. 1 Belawan,
Medan, Sumatera Utara 20411

Kantor Perwakilan & Komisaris Commissioner & Representative Office

Menara Ravindo Lt. 10
Jl. Kebon Sirih Kav. 75 Jakarta Pusat 10340

Kantor Cabang Provinsi Aceh Aceh Province Branch Offices

Cabang pelabuhan Malahayati Malahayati Port Branch	Jl. Laksamana Malahayati KM 32,5 Desa Lamreh Krueng Raya, Kec. Mesjid Raya, Aceh Besar 23301
Kawasan pelabuhan Meulaboh Meulaboh Port Area	Kawasan pelabuhan Meulaboh Jl. Pocut Baren No. SK - III/04, Meulaboh Aceh Barat 23611
Cabang pelabuhan Lhokseumawe Lhokseumawe Port Branch	Jl. Raya pelabuhan KM.9 Talang Jukal, Muara Jambi

Kantor Cabang Provinsi Sumatera Utara North Sumatera Province Branch Offices

Cabang pelabuhan Belawan Belawan Port Branch	Jl. Kapten R. Sulian No. 1 Belawan, Sumatera Utara 20411
Kawasan pelabuhan Pangkalan Susu Pangkalan Susu Port Area	Jl. pelabuhan No. 3 Pangkalan Susu 20858
Terminal Petikemas Belawan Belawan Container Terminal	Jl. Raya pelabuhan Gabion Belawan 20414
Cabang pelabuhan Sibolga Sibolga Port Branch	Jl. Horas pelabuhan Baru, Sibolga 22532
Cabang pelabuhan Gunungsitoli Gunungsitoli Port Branch	Jl. Yos Sudarso, Gunungsitoli
Cabang Pelabuhan Kuala Tanjung Kuala Tanjung Branch	Jl. pelabuhan No. 1 Kuala Tanjung Kec. Sei Suka, Batubara 21257
Cabang pelabuhan Tanjung Balai Asahan Tanjung Balai Asahan Port Branch	Jl. pelabuhan Teluk Nibung

Kantor Cabang Provinsi Riau Riau Province Branch Offices

Cabang pelabuhan Dumai Dumai Port Branch	Jl. Sultan Syarif Kasim No.1, Dumai 28813
Kawasan pelabuhan Bengkalis Bengkalis Port Area	Jl. Jend Sudirman, Bengkalis
Cabang pelabuhan Pekanbaru Pekanbaru Port Branch	Terminal Petikemas Perawang, Jl. Pertiwi Ujung, Desa Pinang Sebatang Timur
Cabang pelabuhan Tembilahan Tembilahan Port Branch	Jl. Jend Sudirman No. 76, Tembilahan 29121
Kawasan pelabuhan Kuala Enok Kuala Enok Port Area	Jl. pelabuhan No. 1, Kuala Enok 29271
Kawasan pelabuhan Rengat Rengat Port Area	Kawasan pelabuhan Rengat, Jl. Raya Kuala Cinaku, Rengat
Cabang pelabuhan Sei Pakning Sei Pakning Port Branch	Jl. Kom.Laut Yos Sudarso No.2, Sei Pakning 28761



Kantor Cabang Provinsi Riau Riau Islands Province Branch Offices	
Cabang pelabuhan Tanjung Balai Karimun Tanjung Balai Karimun Port Branch	Jl. Teluk Air No. 12, Tanjung Balai Karimun 29661
Kawasan pelabuhan Selat Panjang Selat Panjang Port Area	Jl. pelabuhan Beran No.1, Selat Panjang 28753
Cabang pelabuhan Tanjungpinang Tanjungpinang Port Branch	Jl. Sri Bayintan Kijang No. 1 Bintang 29151
Cabang pelabuhan Batam Batam Port Branch	Jl. Kuda Laut No. 8 Batu Ampar, Batam 29452
Kawasan pelabuhan Pulau Sambu Sambu Island Port Branch	Jl. pelabuhan No. 2 Pulau Sambu 29411
Unit Usaha Business Unit	
Unit Galangan Kapal Shipyard Unit	Jl. Sumatera No. 1 Belawan 20411
Anak Perusahaan Subsidiaries	
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS	Grha Pelindo Satu Gedung B Lt.2 Jl. Lingkar pelabuhan No.1 Belawan Medan, Sumatera Utara 20411
PT PRIMA INDONESIA LOGISTIK	Jl. Raya pelabuhan, Pos II Road VI Ujung Baru Belawan 20411
PT PRIMA MULTI TERMINAL	Jl. pelabuhan No. 1 Kuala Tanjung Kec. Sei Suka, Batubara 21257
PT PRIMA PENGEMBANGAN KAWASAN	Grha Pelindo Satu Gedung B Lt.6 Jl. Lingkar pelabuhan No.1 Belawan Medan, Sumatera Utara 20411
PT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN	Jl. Stasiun No. 92 Belawan 20413 T. (061) 6941 927 F. (061) 6940 120 E. rspelabuhanan@pelindo1.co.id

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

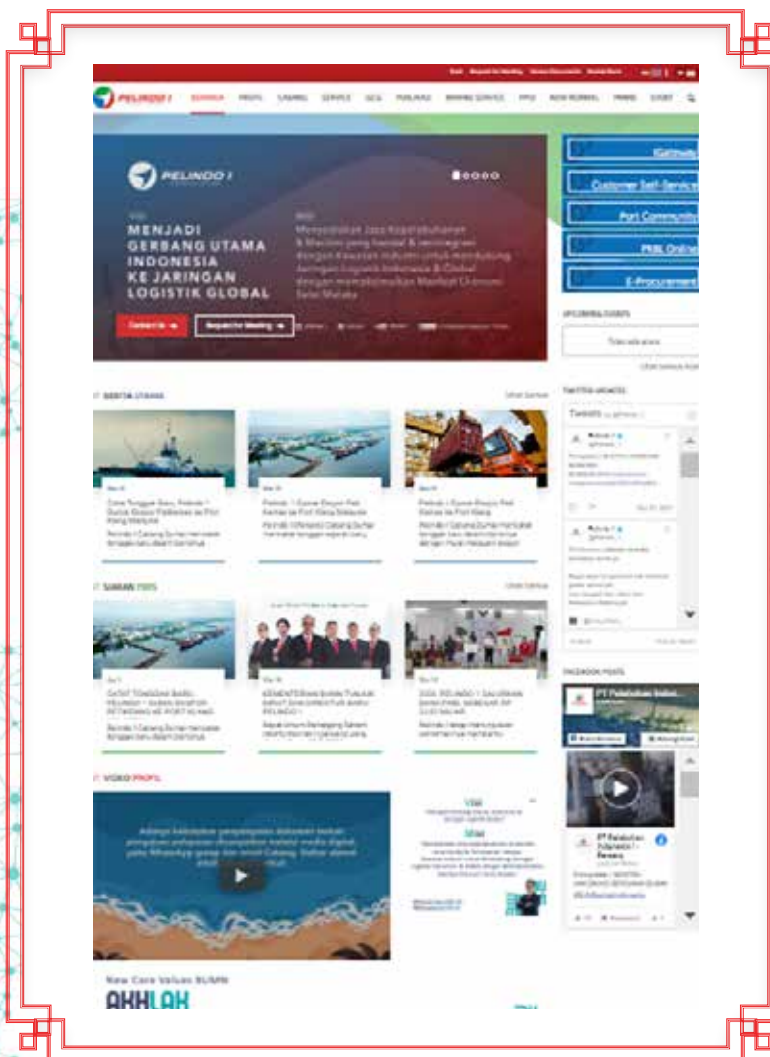
INFORMATION ON COMPANY WEBSITE

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Pasal 9, Ayat 4, menjabarkan bahwa Badan Publik memiliki kewajiban menyebarluaskan informasi publik yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai perusahaan yang melayani publik dalam hal pelayanan jasa kepelabuhanan, telah membangun sarana informasi yang dapat mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas, di antaranya, *website* resmi Pelindo 1: www.pelindo1.co.id.

Website Perseroan merupakan portal digital resmi Perseroan yang menjadi salah satu wujud komitmen Perseroan dalam memenuhi prinsip tata kelola dalam aspek transparansi dan keterbukaan informasi, karena dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perseroan kepada khalayak luas dengan lebih cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana. *Website* Perseroan telah disajikan dengan *bilingual* atau dua bahasa, Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Act No. 14 Year 2008, Article 9, Verse 4, defines that a Public Agency is obligated to spread information using methods easily accessible by public. Therefore, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a public oriented company in port service has built information infrastructure accessible by stakeholders & general public. One of them is Pelindo 1 official website: www.pelindo1.co.id.

Company website is a official company digital portal containing Company's commitment to fulfill governance principles in transparency and information accessibility aiming to providing comprehensive information to broader audience faster, more punctual, cost effective and in simple ways. Company website is displayed bilingually in Bahasa Indonesia and English.





PETA WEBSITE WWW.PELINDO1.CO.ID
WEBSITE MAP OF WWW.PELINDO1.CO.ID

PROFIL PROFILES	CABANG BRANCH	SERVICE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan 2. Sejarah Perusahaan 3. Manajemen 4. Pertumbuhan Perusahaan 5. Laporan Tahunan 6. KPI Perusahaan 7. Struktur Organisasi 8. Anak Perusahaan 9. Agenda Perusahaan 10. Makna Logo Pelindo 1 11. Laporan Keuangan 12. <i>Sustainability Report</i> 13. Kebijakan dan Komitmen Perusahaan 14. Kebijakan Narkoba dan Alkohol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belawan 2. Dumai 3. Terminal Petikemas Belawan 4. Tanjungpinang 5. Pekanbaru 6. Tanjung Balai Karimun 7. Kuala Tanjung 8. Batam 9. Sei Pakning 10. Sibolga 11. Malahayati 12. Lhokseumawe 13. Tanjung Balai Asahan 14. Tembilahan 15. Gunungsitoli 16. Unit Galangan Kapal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Utama 2. Fasilitas 3. Peralatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Main Activities 2. Facilities 3. Equipment
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vision, Mission, and Company Values 2. Company History 3. Management 4. Company Development 5. Annual Report 6. Company KPI 7. Organization Structure 8. Subsidiaries 9. Corporate Agenda 10. Pelindo 1 Logo Philosophy 11. Financial Report 12. Sustainability Report 13. Company Policies & Commitment 14. Drugs & Liquor Policies 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belawan 2. Dumai 3. Belawan Container Terminal 4. Tanjungpinang 5. Pekanbaru 6. Tanjung Balai Karimun 7. Kuala Tanjung 8. Batam 9. Sei Pakning 10. Sibolga 11. Malahayati 12. Lhokseumawe 13. Tanjung Balai Asahan 14. Tembilahan 15. Gunungsitoli 16. Shipyard Unit 	
GCG	PUBLIKASI PUBLICATION	NEW NORMAL
<ol style="list-style-type: none"> 1. ISPS Code 2. Pelindo Clean 3. Form Pengaduan 4. SK GCG 5. Piagam Komite Audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita 2. Siaran Pers 3. Lelang 4. Umum 5. Galeri Foto 6. Video 7. Majalah Gema pelabuhan 	<i>Protokol New Normal</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. ISPS Code 2. Pelindo Clean 3. Complaint Form 4. GCG Order 5. Audit Committee Charter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. News 2. Press Release 3. Auction 4. General 5. Photo Gallery 6. Video 7. Gema pelabuhan Magazine 	

Website Pelindo 1 juga menampilkan aplikasi interaktif, yaitu:

1. *I Gateway*
2. *Customer Self Service*
3. *Port Community*
4. *PKBL Online*
5. *E-Procurement*

Pelindo 1 website also displays interactive applications namely:

1. *I Gateway*
2. *Customer Self Service*
3. *Port Community*
4. *PKBL Online*
5. *E-Procurement*

Informasi-informasi yang terdapat dalam www.pelindo1.co.id antara lain:

Information contained in www.pelindo1.co.id:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Information
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Shareholders Information until last individual owner	v	Informasi Pemegang Saham sampai dengan pemilik akhir individu terintegrasi ke dalam Laporan Tahunan Perseroan yang diterbitkan di <i>website</i> Perseroan mulai dari tahun buku 2011: https://www.pelindo1.co.id/id/profil/Annual-Report.aspx Shareholders Information until last individual owner is integrated into Company Annual Report published in Company website beginning from 2011: https://www.pelindo1.co.id/id/profil/Annual-Report.aspx
Isi Kode Etik Ethical Code	v	https://www.pelindo1.co.id/id/gcg/Pages/SK-GCG.aspx
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan General Meeting of Stakeholders. Covering important points, summary & vital information like announcement date, summoning date, meeting date & meeting summary announcement date	v	Informasi RUPS terintegrasi ke dalam Laporan Tahunan Perseroan yang diterbitkan di <i>website</i> Perseroan mulai dari tahun buku 2011: https://www.pelindo1.co.id/id/profil/Annual-Report.aspx General Meeting of Stakeholders is integrated to Company Annual Report published in Company website beginning from Fiscal Year 2011: https://www.pelindo1.co.id/id/profil/Annual-Report.aspx
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir) Annual Financial Report (Last 5 years)	v	Perseroan yang diterbitkan di <i>website</i> Perseroan mulai dari tahun buku 2017: https://www.pelindo1.co.id/id/profil/Pages/Laporan-Keuangan.aspx Published in Company website beginning from Fiscal Year 2017: https://www.pelindo1.co.id/id/profil/Pages/Laporan-Keuangan.aspx
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioner & Director Profile	v	https://www.pelindo1.co.id/id/profil/Pages/Curriculum-Vitae-Manajemen.aspx
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Board of Commissioner, Director, Committees, and Internal Audit Unit Charter	v	https://www.pelindo1.co.id/id/gcg/Pages/Piagam-Komite-Audit.aspx https://www.pelindo1.co.id/id/gcg/Pages/SK-GCG.aspx
v = Tersedia pada situs <i>web</i> Perseroan x = Belum tersedia pada situs <i>web</i> Perseroan v = Available on Company Website x = Not Yet Available on Company Website		



PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN UNIT AUDIT INTERNAL

EDUCATIONS AND/OR TRAININGS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS,
DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY,
AND INTERNAL AUDIT UNIT

Nama dan Jabatan Name & Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Courses & Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Contents of Courses & Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioner				
Achmad Djamaludin (Komisaris Utama) (President Commissioner)	-	-	-	-
Ahmad Perwira Mulia (Komisaris) (Commissioner)	-	-	-	-
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris) (Commissioner)	-	-	-	-
Irma Suryani Chaniago (Komisaris) (Commissioner)	-	-	-	-
	<i>Great Business Through Great People</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Building Trust As Leaders Main Job For Sustainable Business</i> - <i>HR Outlook 2020-2025 and Trends</i> - <i>Panel Discussion</i> 	The Westin Hotel, Jakarta/ 5 Februari 2020 5 February 2020	CLDI (Corporate Leadership Development Institute)
Winata Supriatna (Komisaris) (Commissioner)	Penyegaran dan Penguatan Kapasitas Komisaris dan Direksi BUMN Refreshing & Reinforcing SOE Commissioner & Directors' Capacity	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Ketahanan Hukum dan GCG dalam upaya pencegahan Korupsi demi Mewujudkan BUMN Bersih dan Unggul - Pencegahan Korupsi dengan Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap (SMAS) di BUMN - Penerapan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - <i>Best Practise</i> ISO 37001 di PT Indonesia Power - Building Legal Resilience & GCG to prevent Corruption to create Clean & Superior SOE - Corruption Prevention with Anti Bribery Management System Implementation within the SOE - ISO 37001 Implementation of Anti Bribery Management System - <i>Best Practise</i> ISO 37001 at PT Indonesia Power 	Fairmont Hotel, Jakarta/ 11 Maret 2020 Jakarta/ 11 March 2020	BUMN Executive Club
	<i>Webinar Radical Change, Innovation and Agility In Disruptive Era</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ambidextrous leadership</i>: Mengelola hari ini dan masa depan - Langkah transformasi digital - Kesiapan pola pikir diri agar dapat berpikir secara 'agile' - Mengadaptasi lingkungan VUCA dengan pemikiran 'gila' - Siap menjadi '<i>unpopular leader</i>' dalam mendorong perubahan - <i>Ambidextrous leadership</i>: Managing today & the future - Digital Transformation - Mindset preparedness for agile thinking - Adapting VUCA environment with 'crazy' ideas - Ready to be unpopular leader to push change 	Zoom Online Meeting/ 9 Juni 2020 9 June 2020	One GML
Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)	-	-	-	-
Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris)* (Commissioner)*	<i>Training</i>	<i>Great Business Through Great People</i>	The Westin Hotel, Jakarta, 5 Februari 2020 5 February 2020	CLDI (Corporate Leadership Development Institute)
Heryadi (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	<i>Training</i>	Penyegaran dan Penguatan Kapasitas Komisaris dan Direksi BUMN Capacity Refreshing and Strengthening for the Board of Commissioners and the Board of Directors of SOE	Fairmont Hotel, Jakarta, 11 Maret 2020 11 March 2020	BUMN Executive Club SOE Executive Club

Nama dan Jabatan Name & Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Courses & Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Contents of Courses & Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Direksi Directors				
Dian Rachmawan (Direktur Utama) (President Director)	Webinar	Radical Change, Innovation, and Agility In Disruptive Era	Online Meeting, 9 Juni 2020 9 June 2020	One GML
Prasetyo (Direktur Utama) (President Director)	Workshop	Sosialisasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Socialization on the Decision of the Minister of SOE no. PER-04/MBU/06/2020 concerning Amendment on the Decision of the Minister of SOE no. PER-03/MBU/2012 on the Guidelines for Appointing Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of SOE Subsidiaries	Zoom Meeting Online/22 Juli 2020 22 July 2020	Kementerian BUMN
	Workshop	Sosialisasi Hak Pengelolaan Terbatas/Limited Concession Scheme Socialization on Limited Concession Scheme	Zoom Meeting Online/23 Juli 2020 23 July 2020	
	Workshop	Virtual 'Global Business Excellence Conversation' dengan tema 'Navigating Excellence in The New Normal' Virtual 'Global Business Excellence Conversation' on 'Navigating Excellence in The New Normal'	Zoom Meeting Online/24 Juli 2020 24 July 2020	Forum Ekselen BUMN SOE Excellence Forum
	Workshop	Sharing Resume Two Speed Execution: Accelerating your Strategy Execution with OKRs	Zoom Meeting Online/14 Agustus 2020 14 August 2020	
	FGD	FGD Informasi dan Kebutuhan Kerjasama dengan Instansi dalam Pengkajian Pengkinaan Pengukuran Biaya Logistik terhadap PDB Information on and Needs for Cooperation with Institutions on Analyzing, Updating and Measuring Logistics Costs against GDP	Zoom Meeting Online/26 Agustus 2020 26 August 2020	Bappenas Ministry of National Development Planning
	Webinar	"Akselerasi Internalisasi Budaya AKHLAK" "Acceleration of AKHLAK Culture Internalization"	Zoom Meeting Online/3 September 2020 3 September 2020	KBUMN Ministry of SOE
	Webinar	"Potret Masa Depan Industri Logistik dan Supply Chain Indonesia di Era New Normal" "Portrait of the Future of Indonesia's Logistics and Supply Chain Sectors in the New Normal Era"	Zoom Meeting Online/18 September 2020 18 September 2020	
	Workshop	Leaders Talk Internalisasi Akhlak and Sharing Session Leaders Talk on the AKHLAK Internalization and Sharing Session	Zoom Meeting Online/23 Oktober 2020 /23 October 2020	PWC
	Training	Zoom Meeting terkait GCG dengan Kementerian BUMN Zoom Meeting regarding GCG with the Ministry of SOE	Zoom Meeting Online/4 November 2020 4 November 2020	Kementerian BUMN
	Webinar	Peluncuran & Bedah Buku TOL LAUT Konektivitas Visi Poros Maritim Indonesia Launching & Review of "TOL LAUT – Konektivitas Visi Poros Maritim Indonesia"	Zoom Meeting Online/4 November 2020 4 November 2020	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation
Seminar	Pertemuan dengan Dubai Port World (DP World) tentang program World Logistics Passport (WLP) Meeting with THE Dubai Port World (DP World) regarding the World Logistics Passport (WLP) program.	Zoom Meeting Online/5 November 2020 5 November 2020	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Coordinating Ministry for Economic Affairs, Deputy for Coordination of Commerce and Industry	



Nama dan Jabatan Name & Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Courses & Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Contents of Courses & Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Ridwan Sani Siregar (Direktur Operasional & Komersial) (Director of Operations & Commercial)	FGD	Optimalisasi Perkeretaapian Railways Optimization	Zoom Meeting Online/12 November 2020 12 November 2020	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation
	Seminar	Forum Seminar AKHLAK "Menjadi CEO Ber-AKHLAK" Seminar on Akhlak: "Becoming A CEO with AKHLAK"	Zoom Meeting Online/17 November 2020 17 November 2020	ACT Consulting
	FGD	FGD dengan Kemenko Marvest FGD with the Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs	Zoom Meeting Online/19 November 2020 19 November 2020	
	Webinar	"Innovation & Digital Transformation Era"	Zoom Meeting Online/26 November 2020 26 November 2020	Pelindo I
	Seminar	"Shipping and Port 2021 Outlook" "Shipping and Port 2021 Outlook"	Zoom Meeting Online/10 Desember 2020 10 December 2020	ABUPI Indonesia Port Business Association (ABUPI)
	Seminar	Hasil Kajian di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Analysis Results within the Deputy for Coordination of Regional Development and Spatial Planning	Zoom Meeting Online/15 Desember 2020 15 December 2020	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Coordinating Ministry for Economic Affairs
	Webinar	"Outlook Pembangunan 2021: Belajar Dari 2020, Bangkit Menuju 2021" "2021 DEVELOPMENT OUTLOOK: LEARNING FROM 2020, RISING TOWARD 2021"	Zoom Meeting Online/22 Desember 2020 2 December 2020	ACT Consulting
	Seminar	Kontribusi Kawasan Berikat Terhadap Perekonomian Nasional dan Produktifitas Industri Lokal Contribution of Bonded Zones to the National Economy and Local Industries Productivity	Zoom Meeting Online/24 Agustus 2020 24 August 2020	
	Seminar	Potret Masa Depan Industri Logistik dan Supply Chain Indonesia di Era New Normal "Portrait of the Future of Indonesia's Logistics and Supply Chain Sectors in the New Normal Era"	Zoom Meeting Online/18 September 2020 18 September 2020	
	Seminar	Executive Briefing Anti Bribery Manajemen System ISO 37001 Executive Briefing on the ISO 37001 Anti-Bribery Management System	Zoom Meeting Online/21 September 2020 21 September 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
	Seminar	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOE	Zoom Meeting Online/4 November 2020 4 November 2020	Kementerian BUMN Ministry of SOE
	Seminar	Forum Seminar AKHLAK Seminar on AKHLAK	Zoom Meeting Online/17 November 2020 17 November 2020	Kementerian BUMN Ministry of SOE
	Training	Pelatihan Ahli Kepelabuhanan Training for Ports Experts	Zoom Meeting Online/17-27 November 2020 17-27 November 2020	PT PMLI
	Training	OMNI MBA Strategic Marketing	Zoom Meeting Online/20 November 2020 20 November 2020	Markplus Institute
Sharing Session	Persaingan Usaha dan BUMN Business Competition and SOE	Zoom Meeting Online/24 November 2020 24 November 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	

Nama dan Jabatan Name & Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Courses & Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Contents of Courses & Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
	Webinar	Innovation and Digital Transformation Era	Zoom Meeting Online/26 November 2020 26 November 2020	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
	Webinar	Shipping & Port 2021 Outlook Shipping & Port 2021 Outlook	Zoom Meeting Online/10 Desember 2020 10 December 2020	INSA_ABUPI Indonesia National Shipowners Association (INSA) & Indonesia Port Business Association (ABUPI)
		Finance for Non-Finance Finance for Non-Finance		Prospero Management
Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik (Director of Engineering))	Webinar Radical Change, Innovation and Agility In Disruptive Era	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ambidextrous leadership</i>: Mengelola hari ini dan masa depan - Langkah transformasi <i>digital</i> - Kesiapan pola pikir diri agar dapat berpikir secara '<i>agile</i>' - Mengadaptasi lingkungan VUCA dengan pemikiran '<i>gila</i>' - Siap menjadi '<i>unpopular leader</i>' dalam mendorong perubahan - <i>Ambidextrous leadership</i>: Managing today & the future - Digital Transformation - Mindset preparedness for agile thinking - Adapting VUCA environment with '<i>crazy</i>' ideas - Ready to be unpopular leader to push change 	Zoom Online Meeting/ 9 Juni 2020 9 June 2020	One GML One GML
Joko Noerhudha (Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis) (Director of Business Transformation & Development)	-	-	-	-
	Webinar	CEO Muda Rumah BUMN "CEO Muda Rumah BUMN"	Via CloudX/11 Agustus 2020 11 August 2020	FHCI
	Webinar	"Akselerasi Internalisasi Budaya AKHLAK" "Acceleration of AKHLAK Culture Internalization"	Zoom Meeting Online/3 September 2020 3 September 2020	KBUMN
	Kuliah Umum Public Lecture	Seri Kuliah Tamu Teknik Sipil ITB "Kecenderungan Terkini Pembiayaan Proyek Infrastruktur" Guest Lecture Series from Civil Engineering Faculty of ITB "The Latest Trends on Infrastructure Projects Financing"	Zoom Meeting Online/7 September 2020 7 September 2020	Ikatan Alumni ITB ITB Alumni Association
	Webinar	Inkindo "Sosialisasi Standar Remunerasi Minimal Inkindo" Inkindo "Socialization on the Standards of Minimum Remuneration of Inkindo"	Zoom Meeting Online/7 September 2020 7 September 2020	INKINDO
Henry Naldi (Direktur SDM & Umum) Director of HR & General Affairs	Webinar	Kadin "INDONESIA - BELGIUM <i>Virtual Business And Investment Dialogue On Port Development</i> " Indonesian Chamber of Commerce & Industry "INDONESIA - BELGIUM Virtual Business and Investment Dialogue on Port Development"	Webex Meeting Online/9 September 2020 9 September 2020	KADIN Indonesian Chamber of Commerce & Industry
	Webinar	"Potret Masa Depan Industri Logistik dan <i>Supply Chain</i> Indonesia di Era <i>New Normal</i> " "Portrait of the Future of Indonesia's Logistics and Supply Chain Sectors in the New Normal Era"	Zoom Meeting Online/18 September 2020 18 September 2020	
	Training	HCM <i>Training Pra-Certification</i> HCM Pre-Certification Training	Zoom Meeting Online/21 September 2020 21 September 2020	
	Webinar	Peluncuran & Bedah Buku TOL LAUT Konektivitas Visi Poros Maritim Indonesia Launching & Review of "TOL LAUT – Konektivitas Visi Poros Maritim Indonesia"	Zoom Meeting Online/12 Oktober 2020 12 October 2020	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation





Nama dan Jabatan Name & Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Courses & Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Contents of Courses & Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
	Seminar	Financial Talk Mandiri Syariah Priority Financial Talk on Mandiri Syariah Priority	Zoom Meeting Online/12 Oktober 2020 12 October 2020	
	Webinar	"Export Financing for Transport Infrastructure Projects in Indonesia"	Zoom Meeting Online/13 Oktober 2020 13 October 2020	Online Workshop EKONID (German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce)
	Webinar	Vaksin Hati "Heart Vaccine"	Zoom Meeting Online/24 Oktober 2020 24 October 2020	ACT Consulting
	Webinar	Port, Shipping, and Logistic Series 2020	Zoom Meeting Online/4 November 2020 4 November 2020	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation
	Seminar	Forum Seminar AKHLAK "Menjadi CEO Ber-AKHLAK" Seminar on Akhlak: "Becoming A CEO with AKHLAK"	Zoom Meeting Online/17 November 2020 17 November 2020	Kementerian BUMN Ministry of SOE
	Training	Pelatihan Ahli Kepelabuhanan Training for Ports Experts	Zoom Meeting Online/24 Oktober 2020 17-27 November 2020	PT PMLI
	Workshop	Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Socialization on the Job Creation Act	Zoom Meeting Online/19 November 2020 19 November 2020	Kementerian BUMN Ministry of SOE
	Sharing Session	"Pengelolaan SDM" "HR Management"	Zoom Meeting Online/20 November 2020 20 November 2020	Pelindo I
	Sharing Session	"Persaingan Usaha dan BUMN" "Business Competition and SOE"	Zoom Meeting Online/24 November 2020 24 November 2020	KADIN Indonesian Chamber of Commerce & Industry
	Webinar	"Innovation & Digital Transformation Era"	Zoom Meeting Online/26 November 2020 26 November 2020	Pelindo I
	Seminar	"Shipping and Port 2021 Outlook"	Zoom Meeting Online/10 Desember 2020 10 December 2020	ABUPI Indonesia Port Business Association (ABUPI)
	Training	Sertifikasi Uji Kompetensi LSP MP SDM Certification on Competency Test by LSP MP SDM	Zoom Meeting Online/11 Desember 2020 11 December 2020	LSP MP SDM
	Webinar	"Outlook Pembangunan 2021: Belajar dari 2020, Bangkit Menuju 2021" "2021 DEVELOPMENT OUTLOOK: LEARNING FROM 2020, RISING TOWARD 2021"	Zoom Meeting Online/22 Desember 2020 22 December 2020	ACT Consulting
	Webinar Terbuka Public Webinar	"Update Informasi Terkini Tentang Vaksin" "Update on the Latest Information about Vaccines"	Zoom Meeting Online/29 Desember 2020 29 December 2020	Ikatan Alumni ITB ITB Alumni Association
M. Hamied Wijaya (Direktur SDM) (Director of HR)	Webinar	Radical Change, Innovation, and Agility In Disruptive Era	Online Meeting, 9 Juni 2020 9 June 2020	One GML
Roy Leonard (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	-	-	-	-

Nama dan Jabatan Name & Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Courses & Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Contents of Courses & Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Henri Panggabean (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	Training	Mergers and Acquisitions As Part of The Corporate Strategy	Online Meeting, 24 Juli 2020 24 July 2020	Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
Komite Audit Audit Committee				
Irma Suryani Chaniago (Ketua) (Chairman)	-	-	-	-
Arman Depari (Wakil Ketua) (Vice Chairman)	-	-	-	-
	Workshop	Great Business Through Great People	The Westin Hotel, Jakarta, 5 Februari 2020 5 February 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
Saiful Bahri (Anggota) (Member)	Training Webinar Teknik Mendeteksi Kebohongan bagi Internal Audit (Part 1) Webinar Lie Detecting Technique for Internal Audit (Part 1)	<ul style="list-style-type: none"> - Fakta-fakta tentang kebohongan - Jenis-jenis kebohongan - Tipe-tipe pembohong - Beberapa area pendeteksian kebohongan - Facts on Lies - Types of Lies - Types of Liars - Lie Detecting Areas 	Zoom Online Meeting/ 18 Mei 2020 18 May 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
	Forensic Accounting and Investigative Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran umum <i>fraud</i> dan <i>fraud universe</i> - <i>Financial statement fraud and fraud scheme</i> - <i>Fraud risk assessment and fraud risk management</i> - Studi kasus - Konsep dasar <i>forensic accounting</i> - Perencanaan <i>forensic accounting</i> dan menyusun prediksi - Teknik pengumpulan bukti, permintaan keterangan dan modus operandi - Pelaporan dan litigasi - <i>Fraud general description & fraud universe</i> - <i>Financial statement fraud and fraud scheme</i> - <i>Fraud risk assessment and fraud risk management</i> - Case study - <i>Forensic accounting basic concept</i> - <i>Forensic accounting planning and making predication</i> - Evidence collecting technique, Remarks requisition & modus operandi - Reporting & litigation 	Zoom Online Meeting/ 30 Juni 2020 30 June 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
	Fraud di Masa Bencana Fraud During Disaster	<ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang <i>fraud</i> - <i>Fraud di masa bencana</i> - <i>Fraud background</i> - <i>Fraud during disaster</i> 	Zoom Online Meeting/ 25 Juli 2020 25 July 2020	Fidelitas Advisors
	Certification in Audit Committee Practices (CACP)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Fundamentals of Audit Committee</i> - <i>Financial Reporting</i> - <i>Internal Audit</i> - <i>External Audit</i> - <i>Internal Control And Risk Management</i> - <i>Legal and Governance</i> 	Zoom Online Meeting/ 22-23 and 25 September 2020 22-23 and 25 September 2020	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)



Nama dan Jabatan Name & Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Courses & Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Contents of Courses & Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Deni Sulistyo (Anggota) (Member)	Workshop	Great Business Through Great People	The Westin Hotel, Jakarta, 5 Februari 2020 5 February 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
	Training Webinar Teknik Mendeteksi Kebohongan bagi Internal Audit (Part 1) Webinar Lie Detecting Technique for Internal Audit (Part 1)	<ul style="list-style-type: none"> - Fakta-fakta tentang kebohongan - Jenis-jenis kebohongan - Tipe-tipe pembohong - Beberapa area pendeteksian kebohongan - Facts on Lies - Types of Lies - Types of Liars - Lie Detecting Areas 	Zoom Online Meeting/ 18 Mei 2020 18 May 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
	Forensic Accounting and Investigative Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran umum fraud dan fraud universe - Financial statement fraud and fraud scheme - Fraud risk assessment and fraud risk management - Studi kasus - Konsep dasar forensic accounting - Perencanaan forensic accounting dan menyusun prediksi - Teknik pengumpulan bukti, permintaan keterangan dan modus operandi - Pelaporan dan litigasi - Fraud general description & fraud universe - Financial statement fraud and fraud scheme - Fraud risk assessment and fraud risk management - Case study - Forensic accounting basic concept - Forensic accounting planning and making predication - Evidence collecting technique, Remarks requisition & modus operandi - Reporting & litigation 	Zoom Online Meeting/ 30 Juni 2020 30 June 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
	Fraud di Masa Bencana Fraud During Disaster	<ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang fraud - Fraud di masa bencana - Fraud background - Fraud during disaster 	Zoom Online Meeting/ 25 Juli 2020 25 July 2020	Fidelitas Advisors
	Certification in Audit Committee Pratices (CACP)	<ul style="list-style-type: none"> - Fundamentals of Audit Committee - Financial Reporting - Internal Audit - External Audit - Internal Control And Risk Management - Legal and Governance 	Zoom Online Meeting/ 22 - 23 dan 25 September 2020 22 - 23 and 25 September 2020	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKA)
Eddy Hary Susanto (Anggota Komite Audit)	Workshop	Great Business Through Great People	The Westin Hotel, Jakarta, 5 Februari 2020 5 February 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
	Training/Webminar	Teknik Mendeteksi Kebohongan Bagi Internal Audit (Part 2)	Online Meeting, 0 10 June 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
	Training	Forensic Accounting and Investigative Audit	30 Juni 2020 30 June 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)

Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko
Nomination, Remuneration & Risk Management Committee

Achmad Djamaludin (Ketua) (Chairman)	-	-	-	-
Ahmad Perwira Mulia (Sekretaris) (Secretary)	-	-	-	-
Winata Supriatna (Anggota) (Member)	-	-	-	-
Herbert TP Siahaan (Anggota) (Member)	-	-	-	-

Nama dan Jabatan Name & Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Courses & Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Contents of Courses & Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Nasrul Chair (Anggota) (Member)	Workshop	Great Business Through Great People	The Westin Hotel, Jakarta, 5 Februari 2020 5 February 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
	Training Webinar Teknik Mendeteksi Kebohongan Bagi Internal Audit (Part 1) Webinar Lie Detecting Technique for Internal Audit (Part 1)	<ul style="list-style-type: none"> - Fakta-fakta tentang kebohongan - Jenis-jenis kebohongan - Tipe-tipe pembohong - Beberapa area pendeteksian kebohongan - Facts on Lies - Types of Lies - Types of Liars - Lie Detecting Areas 	Zoom Online Meeting/ 18 Mei 2020 18 May 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
	Webinar Radical Change, Innovation and Agility In Disruptive Era	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ambidextrous leadership</i>: Mengelola hari ini dan masa depan - Langkah transformasi digital - Kesiapan pola pikir diri agar dapat berpikir secara 'agile' - Mengadaptasi lingkungan VUCA dengan pemikiran 'gila' - Siap menjadi 'unpopular leader' dalam mendorong perubahan - <i>Ambidextrous leadership</i>: Managing today & the future - Digital Transformation - Mindset preparedness for agile thinking - Adapting VUCA environment with 'crazy' ideas - Ready to be unpopular leader to push change 	Zoom Online Meeting/ 9 Juni 2020 9 June 2020	One GML
	Forensic Accounting and Investigative Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran umum <i>fraud</i> dan <i>fraud universe</i> - <i>Financial statement fraud and fraud scheme</i> - <i>Fraud risk assessment and fraud risk management</i> - Studi kasus - Konsep dasar <i>forensic accounting</i> - Perencanaan <i>forensic accounting</i> dan menyusun prediksi - Teknik pengumpulan bukti, permintaan keterangan dan modus operandi - Pelaporan dan litigasi - Fraud general description & fraud universe - Financial statement fraud and fraud scheme - Fraud risk assessment and fraud risk management - Case study - Forensic accounting basic concept - Forensic accounting planning and making predication - Evidence collecting technique, Remarks requisition & modus operandi - Reporting & litigation 	Zoom Online Meeting/ 30 Juni 2020 30 June 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
	Fraud di Masa Bencana Fraud During Disaster	<ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang <i>fraud</i> - <i>Fraud</i> di masa bencana - Fraud background - Fraud during disaster 	Zoom Online Meeting/ 25 Juli 2020 25 July 2020	Fidelitas Advisors
	Certification in Audit Committee Practices (CACP)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Fundamentals of Audit Committee</i> - <i>Financial Reporting</i> - <i>Internal Audit</i> - <i>External Audit</i> - <i>Internal Control And Risk Management</i> - <i>Legal and Governance</i> 	Zoom Online Meeting, 22 - 23 dan 25 September 2020 22 - 23 dan 25 September 2020	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKA)





Nama dan Jabatan Name & Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Courses & Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Contents of Courses & Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
	<i>Training Webinar</i> Teknik Mendeteksi Kebohongan Bagi Internal Audit (Part 1) Webinar Lie Detecting Technique for Internal Audit (Part 1)	<ul style="list-style-type: none"> - Fakta-fakta tentang kebohongan - Jenis-jenis kebohongan - Tipe-tipe pembohong - Beberapa area pendeteksian kebohongan - Facts on Lies - Types of Lies - Types of Liars - Lie Detecting Areas 	<i>Zoom Online Meeting/</i> 18 Mei 2020 18 May 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
Eddy Hary Susanto (Anggota) (Member)	<i>Training Webinar</i> Teknik Mendeteksi Kebohongan Bagi Internal Audit (Part 2) Webinar Lie Detecting Technique for Internal Audit (Part 2)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendeteksian Kebohongan Melalui Perkataan. - Cara Auditee Berbohong - Cara Menangani Kebohongan Tersebut - Metode Hiccup untuk Mendeteksi Kebohongan - Oral Lie Detection. - How Auditee Lies - How To Handle Lies - Hiccup Method To Detect Lies 	<i>Zoom Online Meeting/</i> 10 Juni 2020 10 June 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
	<i>Forensic Accounting and Investigative Audit</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gambaran umum <i>fraud</i> dan <i>fraud universe</i> - <i>Financial statement fraud and fraud scheme</i> - <i>Fraud risk assessment and fraud risk management</i> - Studi kasus - Konsep dasar <i>forensic accounting</i> - Perencanaan <i>forensic accounting</i> dan Menyusun prediksi - Teknik pengumpulan bukti, permintaan keterangan dan modus operandi - Pelaporan dan litigasi - Fraud general description & fraud universe - Financial statement fraud and fraud scheme - Fraud risk assessment and fraud risk management - Case study - Forensic accounting basic concept - Forensic accounting planning - Making predication - Evidence collecting technique, Remarks requisition & modus operandi - Reporting & litigation 	<i>Zoom Online Meeting/</i> 30 Juni 2020 30 June 2020	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)





04

— Analisis dan Pembahasan Manajemen Perusahaan —

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Penurunan perdagangan dan arus penumpang di tahun 2020 berdampak cukup besar bagi Pelindo 1. Meskipun demikian, hal ini menjadi kesempatan bagi Pelindo 1 untuk dapat memperkokoh bisnisnya, baik penguatan fokus bisnis yang ada maupun pengembangan bagi pertumbuhan di masa mendatang.

The decline in trade and passenger flow in 2020 impacts Pelindo 1 quite significantly. However, this is an opportunity for Pelindo 1 to strengthen its business, through strengthening the focus of existing businesses and development for future growth.

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

OVERVIEW OF THE ECONOMY AND THE INDUSTRY

PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL

Perekonomian global 2020 diwarnai oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Upaya kesehatan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 telah menyebabkan terbatasnya mobilitas dan kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan dan gelombang pertumbuhan ekonomi yang kontraktif di dunia.

Ekonomi global berkontraksi pada semester I 2020, dan perlahan membaik pada semester II 2020, didorong oleh kemajuan penanganan pandemi COVID-19, meningkatkan mobilitas dan dampak stimulus kebijakan yang terintegrasi dan bersinergi antar otoritas maupun antar negara. Pandemi COVID-19 juga mengangkat tiga pelajaran penting di perekonomian global pada sistem perdagangan internasional, sistem moneter internasional, dan sistem keuangan dunia yang patut menjadi perhatian guna meningkatkan ketahanan ekonomi global ke depan.

Tiga pelajaran penting tersebut mencakup perilaku banyak negara yang makin berorientasi domestik (*inward looking policy*) dalam sistem perdagangan internasional, dominasi mata uang dolar AS dalam sistem moneter dunia, dan peran besar NBFIs yang memanfaatkan perdagangan algoritma di pasar keuangan global. Permasalahan tersebut dapat meningkatkan kerentanan sistem perdagangan internasional, moneter, dan keuangan dunia, terutama pada saat terjadi tekanan besar ke depan, seperti pada saat puncak pandemi COVID-19.

Di pasar keuangan global, ketidakpastian mereda pada semester II 2020, meskipun masih pada level yang tinggi. Sejalan dengan kemajuan penanganan pandemi COVID-19 dan membaiknya kinerja ekonomi, ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda. Ketidakpastian global makin menurun sejak awal November 2020 pasca hasil pemilihan Presiden di AS, meskipun volatilitasnya perlu tetap diwaspadai di tengah kekhawatiran berlanjutnya gelombang kenaikan dan penurunan pandemi COVID-19 di berbagai belahan dunia. Selain itu, ekspektasi positif terhadap prospek perekonomian global seiring dengan ketersediaan vaksin dan kondisi likuiditas global yang besar turut mendukung penurunan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan tersebut mendorong aliran modal global mulai kembali masuk ke negara berkembang secara bertahap dan mendorong penguatan mata uang negara Asia terhadap dolar AS, termasuk Indonesia.

GLOBAL ECONOMIC GROWTH

Global economy in 2020 was plagued by the COVID-19 pandemic that made an extraordinary impact to the health, humanity, economy, and stability of financial system. The efforts to contain the spread of COVID-19 has posed to limitation to mobility and economic activities, leading to uncertain financial market and waves of economic contraction across the globe.

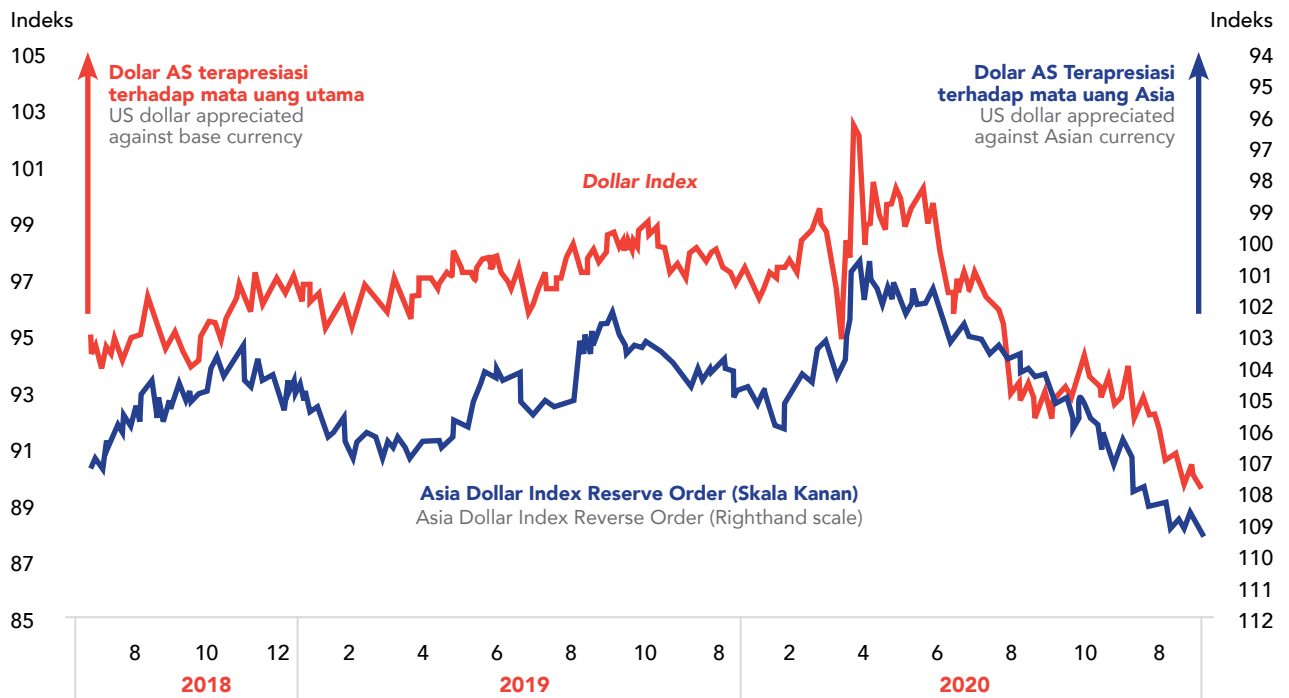
This contraction was in first semester of 2020, which had a recovery in second semester of 2020, driven by progress in the management of the COVID-19 pandemic, decrease of mobility restriction and impact of integrated and synergized policy stimulus between institutions and even between nations. The COVID-19 pandemic also taught three important lessons on global economy in the global trade system, global monetary system, and global financial system that can help bolstering global economic sustainability going forward.

The three lessons cover the behavior of the inward looking policies that become increasingly popular in international trade system, the domination of US dollar in the global monetary system, and the role of NBFIs that made use of algorithm trading in the global financial market. Going forward, these issues can exacerbate the vulnerability of global trading, monetary, and financial system, especially in dealing with big pressure like the peak of the COVID-19 pandemic.

In the global financial system, things became more certain in second semester of 2020, though only in the higher level. With the progress in the management of COVID-19 and the recovery of economic performance, uncertainty in the global financial market has improved. Such a decrease in uncertainty has begun in early November 2020, after the election result was announced in the US, although we should still be wary of volatility as the global cases of COVID-19 continue to fluctuate. Furthermore, positive expectation of the prospect of global economy with the increased availability of vaccines and the increase in liquidity, globally, further helped to combat uncertainty in the global financial market. This development has gradually pushed the flow of global investment in developing countries and driven the strengthening of Asian currencies against the US dollar, including Indonesia.



NILAI TUKAR DOLAR AS TERHADAP MATA UANG US DOLLAR EXCHANGE RATE AGAINST THE CURRENCY



Sumber: Bloomberg, diolah
Source: Bloomberg, processed data

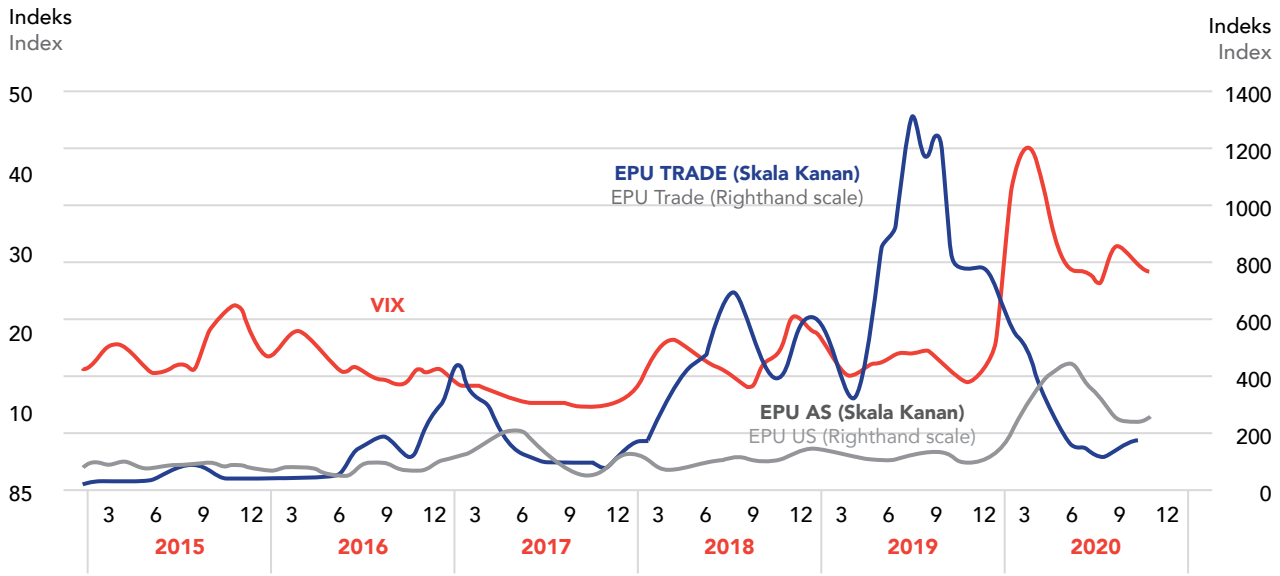
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan harga komoditas yang menurun, tekanan inflasi di berbagai negara tercatat rendah. Inflasi yang rendah terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Di negara maju, kebijakan moneter akomodatif, dan stimulus fiskal yang mendorong konsumsi diperkirakan belum cukup kuat memberikan tekanan pada inflasi. Di AS, inflasi diperkirakan tetap rendah di kisaran 1% (yoy), berada di bawah target inflasi sebesar 2%.

Inflasi di Kawasan Eropa tercatat mengalami deflasi pada 2020 sejalan dengan permintaan yang lemah dan dampak stimulus kebijakan berupa penghapusan pajak pertambahan nilai barang (*Value Added Tax*). Inflasi di negara berkembang cenderung bervariasi, dipengaruhi oleh kondisi masing-masing negara. Inflasi di Tiongkok menurun tajam terutama pada semester II 2020, setelah sempat mencapai puncaknya pada Januari 2020 akibat *swine flu*. Sementara itu, inflasi di India meningkat akibat dampak kenaikan pajak yang diberlakukan sebelum COVID-19 dan gangguan cuaca yang mendorong kenaikan harga hortikultura. (Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia oleh Bank Indonesia)

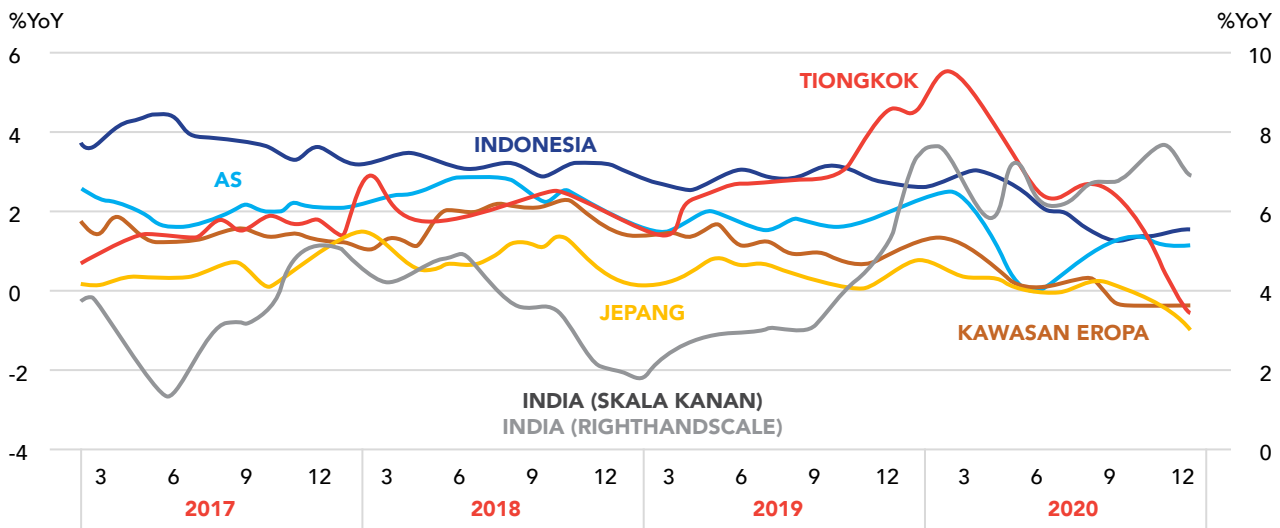
With the slowdown of economic growth and decrease in commodity price, the pressure of inflation in many countries were low. Low inflation has been the case across both developed and developing countries. In developed country, accommodative monetary policy, and fiscal stimulus that stimulated consumption is expected to fall short in pressuring inflation. In the US, inflation is expected to remain low at around 1% (yoy), below the inflation target of 2%.

European countries seemed to undergo deflation in 2020, which corresponded with lower demands and as a result of the policy to remove Value Added Tax. Inflation in developing countries seemed to vary greatly, and was influenced by the relevant conditions in each nation. Inflation in China saw a sharp decline, especially in second semester of 2020, after previously hitting its peak in January 2020 due to swine flu. On the other hand, inflation in Indian sharply increased as a result of tax raise that was implemented before COVID-19 and weather problems that drive the increase of horticulture's price. (Source: Indonesian Economic Report by Bank Indonesia)

**KETIDAKPASTIAN PASAR KEUANGAN GLOBAL
UNCERTAINTY IN THE GLOBAL FINANCIAL MARKET**



**INFLASI DUNIA
GLOBAL INFLATION**



Sumber: Bloomberg, diolah
Source: Bloomberg, processed data





PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Dinamika perekonomian Indonesia 2020 sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 berdampak luar biasa terhadap Indonesia, tidak hanya kepada aspek kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Awal Maret 2020, Indonesia memasuki siklus kasus positif COVID-19, yang dalam waktu singkat menyebar cepat ke berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah, Bank Indonesia dan otoritas terkait segera menempuh sinergi kebijakan luar biasa untuk memitigasi risiko pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Sinergi kebijakan diarahkan untuk meminimalkan dampak pembatasan mobilitas masyarakat terhadap perekonomian nasional. Dalam kaitan ini, bauran kebijakan dilakukan melalui penerbitan landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, sehingga otoritas dapat menempuh langkah-langkah luar biasa secara cepat dan akuntabel dalam mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah menempuh kebijakan fiskal ekspansif melalui pemberian stimulus dalam jumlah besar yang mengakibatkan pelebaran defisit dan peningkatan pembiayaan APBN 2020.

Dinamika perekonomian pada 2020 menunjukkan peran penting sektor prioritas untuk kesinambungan pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19. Dinamika pembatasan sosial yang dilakukan secara global telah menyebabkan kontraksi dalam pertumbuhan ekonomi dan beberapa sektor lapangan usaha (LU) seperti pariwisata yang belum akan pulih dengan cepat. Di tengah pandemi COVID-19, terdapat beberapa sektor dengan dampak ekonomi yang tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja dan *output* perekonomian, yang masih mampu bertahan baik karena permintaan eksternal dan/atau domestik. Sektor-sektor tersebut seperti industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, kehutanan dan penebangan kayu, tanaman hortikultura, perkebunan, serta pertambangan bijih logam. Sektor-sektor ini perlu menjadi prioritas pengembangan sehingga memberikan dampak rambatan yang besar terhadap pemulihan sektor lainnya dan kesinambungan pemulihan ekonomi nasional.

NATIONAL ECONOMIC GROWTH

The dynamics in Indonesia's 2020 economic growth was heavily influenced by the COVID-19 pandemic that hit the entire world. It had extraordinarily impacted Indonesia, not only with regard to health and humanitarian aspect, but also the social and economic aspect. In early 2020, Indonesia entered a cycle of positive COVID-19 cases that quickly spread to all parts of the nation.

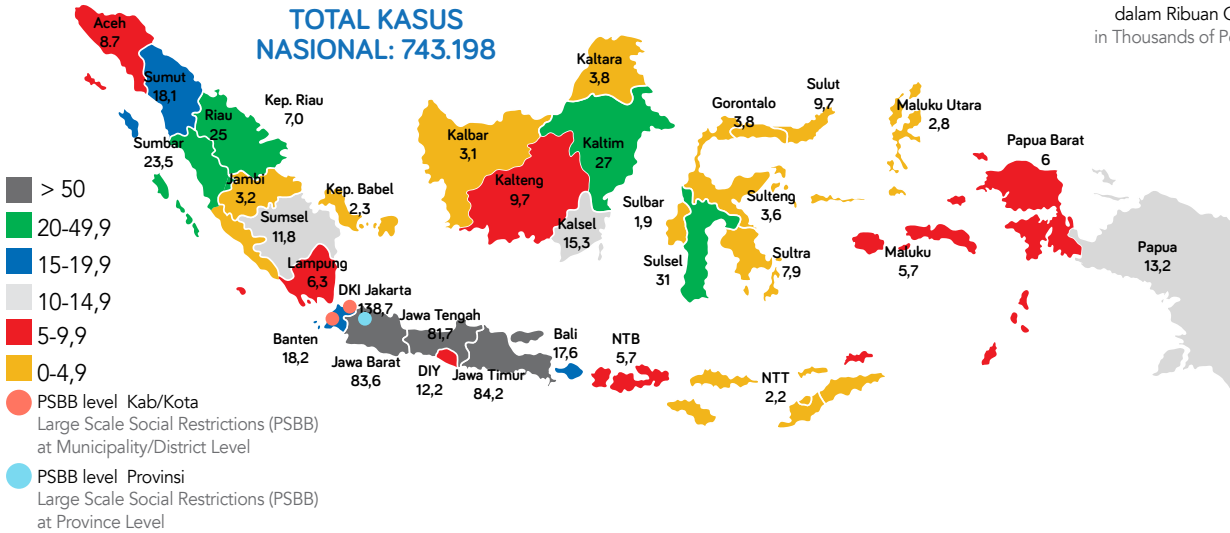
The Indonesian government, Bank Indonesia and related authorities synergized together to implement policies for mitigating the risk of COVID-19 to the nation's economy. The synergized policy was directed towards minimizing the impact of social mobility restriction to the national economy. In this case, the combined policy was formulated by a strong legal basis: Law No. 2 of 2020, which enabled authority to take extraordinary measures, quickly and accountably, in order to manage the pandemic and achieve economic recovery. The government took an expansive fiscal policy in giving a large stimulus that result in even larger deficit and increase in 2020 State Expenditure (APBN 2020).

The dynamics in the 2020 economy has shown the vital role of prioritized sectors in the recovery of the nation's economic growth post-COVID. The dynamics of globally imposed social restriction has resulted in economic contraction in several foreign sectors, such as the tourism sector that is not going to recover anytime soon. In the middle of the COVID-19 pandemic, there are several sectors economically impactful sectors that could still survive and provide jobs and economic outputs, which they owe to external and/or domestic demands. Among these sectors are food and beverage industry, chemicals pharmacy and traditional medication industry, forestry and logging, horticultures, agriculture and metal ore mining. These are sectors whose development need to be prioritized so to bring an impact that would carryover to the recovery of other sectors and the national economic as a whole.

PENYEBARAN PANDEMI COVID-19 DI BERBAGAI WILAYAH INDONESIA
SPREAD OF COVID-19 PANDEMIC ACROSS INDONESIA

TOTAL KASUS NASIONAL: 743.198

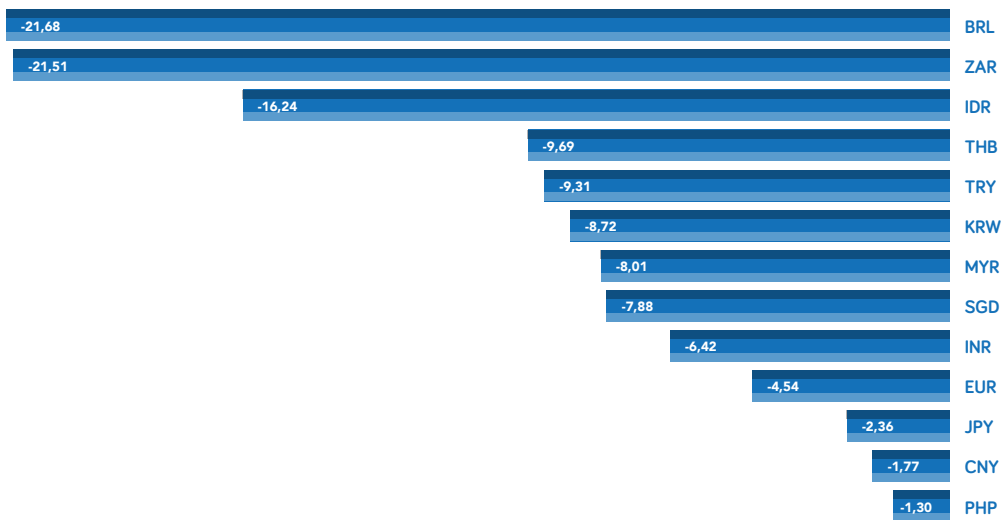
dalam Ribuan Orang
 in Thousands of People



Keterangan: Peta merupakan data total jumlah kasus positif per provinsi (dalam ribu);
Sumber: BNPB; Data s.d. 31 Desember 2020

Explanation: The map shows a total positive case per province (in thousands).
Source: BNPB; Data up to 31 December 2020

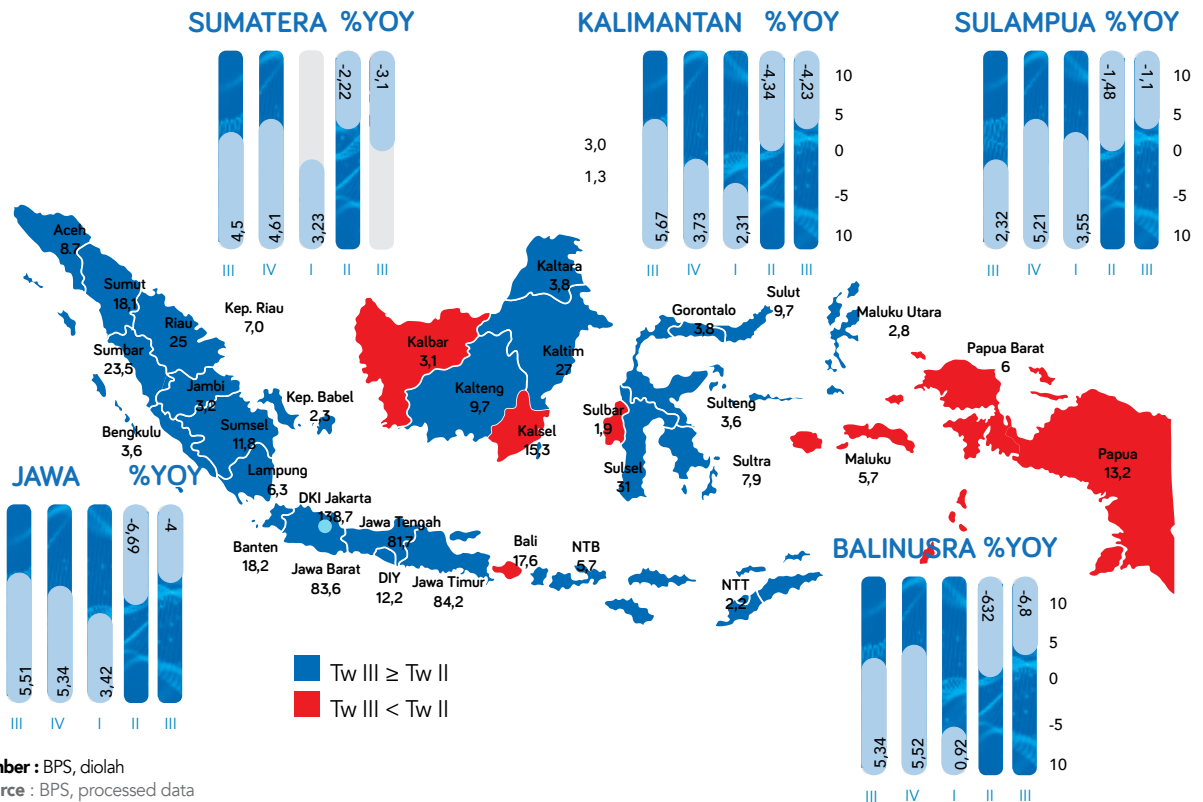
NILAI TUKAR RUPIAH VS BEBERAPA NEGARA
31 DESEMBER 2019 VS 23 MARET 2020
RUPIAH EXCHANGE RATE VS. OTHER COUNTRIES
31 DECEMBER 2019 VS 23 MARCH 2020



Sumber: Reuters dan Bloomberg, diolah
 Source: Reuters and Bloomberg, processed data



PERTUMBUHAN EKONOMI BERBAGAI WILAYAH INDONESIA
ECONOMIC GROWTH ACROSS INDONESIA

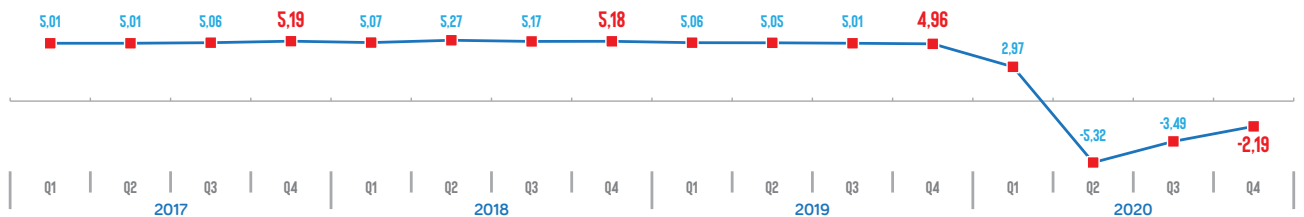


Sumber : BPS, diolah
Source : BPS, processed data

Sejalan dengan situasi tersebut, perekonomian Indonesia di tahun 2020 mengalami perlambatan yang tercermin dari stagnansi berbagai industri dan korporasi. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak rencana dan proyeksi perekonomian baik makro maupun mikro. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi Year on Year (YoY) pada kuartal I-2020 sebesar 2,97%, kuartal II-2020 sebesar defisit 5,32%, kuartal III-2020 sebesar defisit 3,49% dan kuartal IV-2020 sebesar defisit 2,19%.

As a result of this situation, the economy of Indonesia suffered a slowdown that was reflected in the stagnation of various industry and corporations. The Covid-19 Pandemic has altered numerous plannings and economic projections, both micro and macro. Data by the Statistics Indonesia (BPS) recorded a 2.97% Year on Year (YoY) economic growth realization in quarter I of 2020, 5.32% deficit in quarter II of 2020, 3.49% deficit in quarter III of 2020 and 2.19% deficit in quarter IV of 2020.

PERTUMBUHAN EKONOMI PER TRIWULAN, 2017-2019 (YOY)
QUARTERLY ECONOMIC GROWTH, 2017-2019 (YOY)



Sumber: Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), 5 Februari 2021
Source: Official Statistic Report by Statistics Indonesia (BPS), 5 February 2021

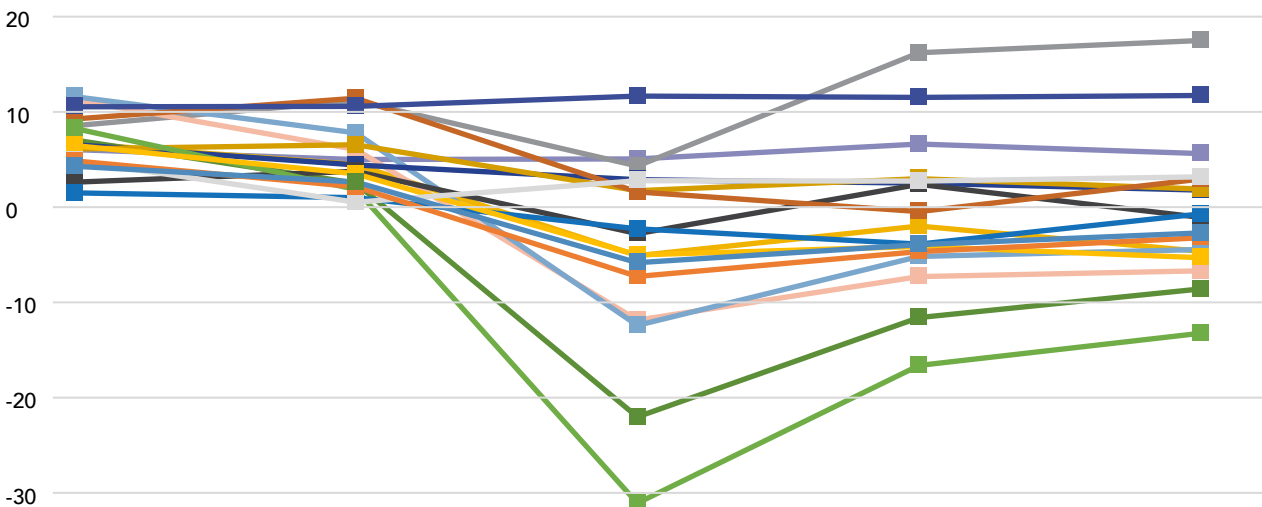
PERKEMBANGAN SEKTOR DAN INDUSTRI DI TAHUN 2020

Meskipun angka resmi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh BPS masih lebih baik dari perekonomian global, perekonomian yang negatif berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan penduduk miskin, khususnya yang terjadi pasca pengurangan tenaga kerja oleh banyak korporasi. Sebagaimana terlihat pada bagan di bawah, hampir seluruh sektor lapangan usaha terkoreksi sejak kuartal I-2020, yang kemudian terkoreksi cukup dalam pada kuartal II-2020 atau di kisaran pertengahan tahun 2020. Hanya sektor lapangan usaha Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang menunjukkan tren pertumbuhan, di mana kedua industri ini menjadi primadona di sepanjang tahun 2020.

INDUSTRY AND SECTOR DEVELOPMENT IN 2020

Although the official figure of Indonesia's economic growth by the BPS is better than the global economy, a negative economy has resulted in the rise of unemployment and poverty, especially after many corporations had to resort to lay-offs. As indicated by the chart below, nearly all sectors of business underwent correction since quarter I of 2020, which was significantly corrected in quarter II of 2020 or around mid-2020. Only Information and Communication, and Health sectors shown an increasing trend of growth, as they continued to be the primadonna throughout 2020.

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN 4-2019 S.D. TRIWULAN 4-2020 (YOY) MENURUT LAPANGAN USAHA
ECONOMIC GROWTH IN QUARTER 4 OF 2019 - QUARTER 4 OF 2020 (YOY) BY BUSINESS FIELDS



Sumber: Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), 5 Februari 2021
 Source: Official Statistical Report by Statistics Indonesia (BPS), 5 February 2021

	T4-2019	T1-2020	T2-2020	T3-2020	T4-2020
Industri Pengolahan Processing Industry	3,67	2,06	-6,18	-4,34	-3,14
Perdagangan Trading	4,22	1,57	-7,59	-5,05	-3,64
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Agriculture, Forestry and Fishery	4,25	0,01	2,2	2,16	2,59
Konstruksi Construction	5,79	2,9	-5,39	-4,52	-5,67
Pertambangan dan Penggalian Mining and Digging	0,94	0,45	-2,72	-4,28	-1,2
Transportasi dan Pergudangan Transportation and Warehousing	7,55	1,3	-30,8	-16,71	-13,42
Informasi dan Komunikasi Information and Communication	9,78	9,82	10,85	10,72	10,91



	T4-2019	T1-2020	T2-2020	T3-2020	T4-2020
● Jasa Keuangan dan Asuransi Financial and Insurance Services	8,51	10,63	1,06	-0,95	2,37
● Administrasi Pemerintahan Government Administration	2,04	3,15	-3,21	1,82	-1,55
● Jasa Pendidikan Education Services	5,44	5,87	1,19	2,41	1,36
● Real Estat Real Estate	5,88	3,81	2,31	1,96	1,25
● Akomodasi dan Makan Minum Accommodation and Food & Beverage	6,36	1,94	-21,97	-11,81	-8,88
● Jasa Lainnya Other Services	10,8	7,09	-12,6	-5,55	-4,84
● Jasa Perusahaan Corporate Services	10,49	5,39	-12,06	-7,61	-7,02
● Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health and Social Activity Services	7,83	10,39	3,71	15,29	16,54
● Pengadaan Listrik dan Gas Electricity and Gas Provider	6,01	3,85	-5,46	-2,44	-5,01
● Pengadaan Air Water Provider	5,38	4,38	4,44	5,94	4,98

Sektor lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebagaimana terlihat pada bagan di atas menjadi sektor yang terdampak cukup besar atas kondisi perekonomian yang lesu di sepanjang tahun 2020. Sektor ini mengalami koreksi di sepanjang tahun 2020, dari 7,55% pada kuartal IV-2019, menjadi 1,30% pada kuartal I-2020, kembali terkoreksi cukup dalam hingga defisit 30,80% pada kuartal II-2020, mengalami perbaikan pada kuartal III-2020 menjadi defisit 16,71%, kemudian menjadi defisit 13,42% pada kuartal IV-2020.

Transportation and Warehousing sector, as shown in the chart above, was among the largely impacted sector by the slowdown of Indonesian economy throughout 2020. This sector had a correction throughout 2020, from 7.55% in quarter IV of 2019 to 1.30% in quarter I of 2020, and had further correction to a 30.80% deficit in quarter II of 2020, another correction in quarter III of 2020 brought it to 16.71% deficit, and then 13.42% in quarter IV of 2020.

Kondisi yang kurang menggembirakan bagi sektor pengelolaan pelabuhan, sektor di mana Perseroan berusaha, juga tercermin dari nilai ekspor dan impor, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

This shows a less appealing condition to port management sector, where Companies conduct their business, which was reflected in the export and import figures in this table below.

TOTAL NETTO EKSPOR 2020 TOTAL NET EXPORT 2020

Periode Period	Netto (Kg) Net (Kg)	Netto (MT) Net (MT)
Jan-20	49.786.399.074	49.786.399
Feb-20	47.851.534.128	47.851.534
Mar-20	52.492.983.287	52.492.983
Apr-20	44.290.004.119	44.290.004
May-20	41.528.263.111	41.528.263
Jun-20	45.729.010.202	45.729.010
Jul-20	45.564.442.862	45.564.443
Aug-20	42.869.850.654	42.869.851
Sept-20	42.642.667.122	42.642.667
Oct-20	45.685.846.674	45.685.847
Nov-20	51.052.581.327	51.052.581
Dec-20	54.510.419.384	54.510.419

TOTAL NETTO IMPOR 2020
TOTAL NET IMPORT 2020

Periode Period	Netto (Kg) Net (Kg)	Netto (MT) Net (MT)
Jan-20	10.995.421.899	10.995.422
Feb-20	20.465.233.189	20.465.233
Mar-20	12.883.870.717	12.883.871
Apr-20	16.660.827.325	16.660.827
May-20	8.601.065.868	8.601.066
Jun-20	10.108.874.322	10.108.874
Jul-20	11.732.669.072	11.732.669
Aug-20	11.962.081.387	11.962.081
Sept-20	20.692.237.122	20.692.237
Oct-20	14.824.528.499	14.824.528
Nov-20	87.98.917.217	8.798.917
Dec-20	11.694.402.174	11.694.402

Komponen Component	Nilai Ekspor Migas-Non-Migas (Juta US\$) Oil and Natural Gas Export Value (in Million US\$)												
	2020												
	Januari January	Februari February	Maret March	April April	Mei May	Juni June	Juli July	Agustus August	September	Oktober October	November	Desember December	Tahunan Yearly
Migas													
Oil and Natural Gas	816,2	805,0	653,4	564,0	560,6	569,4	697,0	598,7	668,4	613,4	762,2	1 018,8	8 309,1
Non-Migas													
Non-Oil and Natural Gas	12 815,9	13 255,9	13 414,6	11 599,2	9 893,7	11 440,0	13 023,6	12 497,1	13 748,9	13 748,9	14 497,1	15 519,5	154 997,4
Jumlah Total	13 632,0	14 060,9	14 067,9	12 163,1	10 454,3	12 009,3	13 702,7	13 095,8	14 362,2	14 362,2	15 259,3	16 538,3	163 306,5

Komponen Component	Nilai Impor Migas-Non-Migas (Juta US\$) Oil and Natural Gas Import Value (in Million US\$)												
	2020												
	Januari January	Februari February	Maret March	April April	Mei May	Juni June	Juli July	Agustus August	September	Oktober October	November	Desember December	Tahunan Yearly
Migas													
Oil and Natural Gas	1 987,1	1 747,6	1 606,6	845,3	657,5	677,1	958,2	949,8	1 173,0	1 078,8	1 085,0	1 481,8	14 256,8
Non-Migas													
Non-Oil and Natural Gas	12 281,6	9 800,5	11 745,6	11 680,9	7 781,1	10 083,3	9 506,1	9 792,6	10 397,1	9 707,2	11 579,4	12 956,6	127 312,0
Jumlah Total	14 268,7	11 548,1	13 352,2	12 535,2	8 438,6	10 760,3	10 464,3	10 742,4	11 570,1	10 786,0	12 664,4	14 438,4	141 568,8

Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/8/1753/2/nilai-ekspor-migas-nonmigas.html>

Data is processed from documents by the General Directorate of Customs and Excise

Source: <https://www.bps.go.id/indicator/8/1753/2/nilai-ekspor-migas-nonmigas.html>

Pemerintah Indonesia telah berupaya mendorong penguatan perekonomian nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sejumlah anggaran dikurangkan untuk dapat mempertahankan perekonomian tidak jatuh semakin dalam, termasuk berbagai stimulus kepada dunia usaha. Namun, berhentinya roda perekonomian serta ketakutan masyarakat akan pandemi COVID-19 menciptakan resesi ekonomi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya.

The Indonesian government has made the efforts to boost the national economy through implementation of the National Economic Recovery (PEN) Program. Budgets were provided to prevent further economic decline, including various stimulus packages to the business sector. However, the severe economic slowdown and the community's fear of the COVID-19 pandemic resulted in a previously unimaginable economic recession.



POSISI PELINDO 1 DALAM INDUSTRI

Sebagai negara kepulauan, peranan pelabuhan sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Kehadiran pelabuhan yang memadai berperan besar dalam menunjang mobilitas barang dan manusia di negeri ini. Pelabuhan menjadi sarana paling penting untuk menghubungkan antar pulau maupun antar negara.

Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi dan logistik.

Terdapat 10 pelabuhan utama untuk ekspor dan impor di Indonesia dan salah satu di antaranya adalah Pelabuhan Belawan yang berada di salah satu wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Pelayanan Pelindo 1 meliputi *Terminal Operator*, *Marine Services*, dan *Logistic Services* dengan aktivitas mencakup pelayanan kapal, pelayanan barang, pelayanan penumpang dan jasa kepelabuhanan lainnya. Pelindo 1 mempunyai lokasi strategis di Selat Malaka, yang merupakan selat tersibuk dalam lalu lintas perdagangan dunia dan saat ini sedang mengembangkan Kuala Tanjung Port & Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE) sebagai *Indonesia's Logistic & Supply Chain Hub*, serta mempunyai pintu utama *eksport CPO* ke seluruh dunia, yaitu melalui pelabuhan Belawan dan Dumai.

Saat ini Pelindo 1 dalam upaya meningkatkan produktivitas pelayanan secara terus-menerus, telah melakukan inovasi dengan menambahkan peralatan dan perpanjangan fasilitas dermaga sehingga untuk meningkatkan produktivitas yang lebih efektif dan efisien.

Pengembangan secara kontinu tersebut juga untuk mendukung suksesnya program pemerintah dalam percepatan pembangunan nasional dan mendukung kebijakan Pemerintah terutama dalam program tol laut untuk memperkuat konektivitas nasional dan menciptakan biaya logistik nasional secara efisien dan efektif serta meningkatkan daya saing nasional.

THE POSITION OF PELINDO 1 IN THE INDUSTRY

As an archipelagic country, ports are very vital to Indonesian economy. Having adequate ports play a very big role in supporting the mobility of goods and people in this country. Ports become the most important infrastructure for connecting between islands and nations.

As the infrastructure of naval transportation, ports play a very vital and strategic role to the growth of the industry and trading, and it serves as a business segment that can contribute to the national economic development as it is integral to the transportation and logistic chain.

There are 10 main ports for export and import purposes in Indonesia, among them is the Belawan Port that is within the area of responsibility of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

The service of Pelindo 1 covers Terminal Operator, Marine Services, and Logistic Services with activities including ship services, cargo shipment, passenger transport, and other port-related services. Pelindo 1 occupies a strategic location in the Malaka Strait, the busiest strait in the world trading traffic, which is currently developing Kuala Tanjung Port & Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE) as an Indonesia's Logistic & Supply Chain Hub, and to serve as the main export gate of CPO to other nations, through Belawan and Dumai Port.

Currently, Pelindo 1 is working to continuously improve the productivity of its service. It has innovated by adding equipment and extending wharfs so to increase productivity and to make the delivery of its service more effective and efficient.

This continuous development is done in order to support the success of government program to accelerate national development and realize its sea-tolls program for improving national connectivity and creating an efficient and effective national logistic cost, and improving national competitiveness.

KEBIJAKAN STRATEGIS 2020

STRATEGIC POLICIES IN 2020

Dalam merespon kondisi perekonomian yang melambat di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, Perseroan melakukan optimalisasi bisnis eksisting. Sejumlah strategi telah dilakukan untuk mendongkrak arus barang/penumpang. Di antaranya implementasi relaksasi penumpukan di terminal pelabuhan untuk menurunkan biaya logistik. Kebijakan tersebut diharapkan membantu meringankan beban pelanggan. Strategi lain yang dilakukan melalui peningkatan kerja sama dengan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (Tersus) untuk memperluas pasar Pelindo 1. Dengan memetakan kekuatan wilayah kerja Pelindo 1 yang merupakan wilayah dengan TUKS dan Tersus terbesar di Indonesia, implementasi strategi ini telah meningkatkan pertumbuhan pendapatan pelayanan kapal sebesar 10% yoy 2019. Begitu juga kerja sama mitra baru untuk bongkar muat curah kering, cair, dan *general cargo* yang menambah trafik barang Pelindo 1 di masa pandemi COVID-19. Sebagai contoh kerja sama mitra pemanfaatan dan pengoperasian Terminal Curah Kering di Pelabuhan Belawan. Strategi peningkatan arus penumpang dilakukan dengan kerjasama terpadu antara Pelindo 1 dengan berbagai pemangku kepentingan serta meningkatkan pelayanan prima salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan pandemi COVID-19 di seluruh terminal penumpang.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan bisnisnya, pada tahun 2020 Perseroan melakukan prioritas investasi dan restrukturisasi portofolio keuangan. Ketidakpastian bisnis yang semakin tinggi di masa pandemi COVID-19 disiasati Perseroan dengan melakukan verifikasi kembali atas kebutuhan investasi dan relevansinya terhadap kontinuitas bisnis, sehingga merubah anggaran investasi menjadi sekitar 32% dari target awal 2020. Ketersediaan *cashflow* juga dijaga tetap dalam batas *covenant* yang sehat dengan melakukan efisiensi biaya yang direalisasikan sampai dengan 11%.

Pada tahun 2020, dari sisi strategi pengembangan bisnis, Perseroan melakukan penguatan internal dengan mengimplementasi langkah taktis untuk pengembangan bisnis *marine*, curah cair, dan logistik melalui intensifikasi pelayanan dan diversifikasi bisnis. Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan trafik dan *market* di wilayah kerja dan mulai mendapatkan peluang bisnis dari wilayah sekitarnya.

Salah satu fokus utama pengembangan bisnis yang dilakukan Perseroan di tahun 2020 adalah penguatan kelompok usaha melalui pembentukan entitas anak yang diharapkan dapat menjadi mesin penggerak dari kinerja finansial. Strategi pengembangan yang diambil adalah strategi aliansi dengan menggandeng mitra bisnis baik sesama BUMN maupun swasta sebagai penggerak perekonomian nasional.

Dalam melaksanakan rencana pengembangan ini, tentu saja identifikasi risiko dalam melakukan investasi di bisnis pelabuhan

In responding to the slowing economy in 2020 due to COVID-19 pandemic, the Company has optimized its existing business. Several strategies have been employed to handle the flow of goods/passengers. Among them is by implementing a relaxation of buildup in port terminals to bring logistic costs down. This policy is expected to reduce the consumer's burden. Another implemented strategy is by improving cooperation with Private Interest Terminal and Special Terminal for expanding the market of Pelindo 1. Through a mapping of Pelindo 1's area of interest, which covers the largest Private Interest Terminal and Special Terminal in Indonesia, the implementation of this strategy has led the growth in revenue of ship service by 10% yoy in 2019. It has also cooperated with new partners for dry, liquid, and general cargo bulk handling during the COVID-19 pandemic, an instance of which is the cooperation with partners for utilizing and operating Dry Bulk Terminal in Belawan Port. The strategy to increase the flow of passengers took shape with the integrated cooperation between Pelindo 1 and stakeholders as well as implementation of COVID-19 health protocols in all passenger terminals.

In order to boost effectiveness and efficiency of its business management, in 2020 the Company conducted an investment prioritization and restructure of financial portfolio. The increasingly uncertain business climate during the COVID-19 pandemic was managed by the Company by doing a re-verification of its investment needs and their relevance to business continuity, this has resulted in the change to business budget to 32% from the initial target in 2020. Cash flow availability was also kept within healthy covenant limit through a budget optimization that has been realized to 11%.

In 2020, with regard to business development, the Company has conducted an internal strengthening by implementing tactical measures for developing marine business, liquid bulk, and logistics by intensifying its service and diversifying its business. This strategy is intended to increase traffic growth and market in the area of interest and to gain business opportunities from its surrounding area.

Among its primary focus in developing business in 2020, the Company has conducted a strengthening of business groups by establishing subsidiary entities that are expected to serve as generator of its financial works. The developmental strategy adopted was by establishing partnership, either with state-owned companies (BUMN), or private companies, in order to boost the national economy.

In performing its development plan, risk identification in investment and conducting port and logistic business have



dan logistik telah dipertimbangkan oleh Perseroan antara lain ketepatan waktu dan kompetensi mitra dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas serta pengoperasian sehingga potensi pasar yang ada dapat segera diraih.

Oleh karena itu, Perseroan terus melakukan pengembangan dan inovasi pada cabang-cabang dan anak perusahaan andalannya antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Proyek Strategis Nasional Kuala Tanjung Port & Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE) terdiri dari:
 - a. Pelindo 1 telah memperoleh Lokasi (Penlok) seluas 1.128 Ha untuk Pengembangan pelabuhan Hub Internasional dan Kawasan Industri Kuala Tanjung;
 - b. Sinergi dengan PT Pertamina (Persero) terkait Pembangunan terminal BBM di Pelabuhan Kuala Tanjung;
 - c. Sinergi dengan PT Pertamina (Persero) terkait Kerjasama fasilitas *bunkering* di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;
 - d. Sinergi dengan PT Pertamina (Persero) terkait Sinergi kerjasama energi di Pelabuhan Kuala Tanjung.
2. Pengembangan Kerja sama *E-Fulfillment* dengan perusahaan berbasis *e-Commerce* di Lingkungan Perseroan.
3. Persiapan Pembangunan Terminal Petikemas Fase 1 dan Pengoperasian Terminal Petikemas Belawan Fase 1 dan 2.
 - a. Persiapan administrasi perizinan pemasangan *sheetpile* fase 1 untuk memproteksi kolam pelabuhan dan sekitarnya;
 - b. Pengerukan kolam fase 2 untuk operasional pelayanan sandar kapal petikemas di terminal Petikemas Belawan Fase 2;
 - c. Persiapan administrasi perizinan dari regulator dan penyampaian proposal terminal test Fase 2 ke Kementerian Perhubungan cq Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
 - d. Pelindo 1 akan melanjutkan pembangunan TPK Belawan Fase 1 dengan telah ditandatangani Perjanjian Sewa Barang Milik Negara (BMN) Fase 1 pada akhir Oktober 2021;
 - e. Dimulainya proses pemilihan mitra untuk pengoperasian dan pengembangan Terminal Petikemas untuk Terminal Petikemas Belawan Fase 1 dan 2.
4. Investasi di lingkungan Perseroan untuk mendukung pengembangan Bisnis
 - a. Pekerjaan pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Belawan;
 - b. Penataan terminal penumpang Tanjung Balai Karimun;
 - c. Pembangunan Gudang Baru di Pelabuhan Belawan;
 - d. Pekerjaan Lapangan Penumpukan dan Pembuatan *Sheet Pile Dermaga Beaching* Pelabuhan Rengat;
 - e. Pengadaan Kapal Pandu dan Kapal Tunda untuk Cabang Belawan, Cabang Pekanbaru, dan Cabang Dumai;

been considered by the Company, such as by assessing the punctuality and competence of the partners in building infrastructures and operating them so to achieve the market potential.

As such, the Company has continued to develop and innovate on its reliable branches and subsidiaries, among them are as follows:

1. The Development of the National Strategic Project of Kuala Tanjung Port & Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE) consists of:
 - a. Pelindo 1 has obtained the location determination of a land of 1,128 ha for the development of International Hub port and Kuala Tanjung Industrial Estate;
 - b. Synergy with PT Pertamina (Persero) regarding the construction of fuel terminal at the Port of Kuala Tanjung;
 - c. Synergy with PT Pertamina (Persero) regarding cooperation on bunkering facilities at Kuala Tanjung Multipurpose Terminal;
 - d. Synergy with PT Pertamina (Persero) regarding cooperation on energy at the Port of Kuala Tanjung.
2. Cooperation in Development of *E-Fulfillment* with *e-Commerce* based companies within the Company
3. Belawan Phase-2 Container Terminal Operational Preparation
 - a. Preparation for permit application for sheetpile installation phase 1 to protect port basin and surrounding areas.
 - b. Dredging of Basin Phase 2 of Basin Dredging for Phase 2 of container Shipyard services at Belawan Container Terminal Phase 2;
 - c. Preparation for permit application to regulator and delivery of test terminal proposal to Ministry of Transport cq Belawan Main Port Office;
 - d. Pelindo 1 will continue the development of Belawan Container Terminal Phase 1 since the State-Owned Assets Lease Agreement Phase 1 has been signed at the end of October 2021.
 - e. Partner selection process for the operation and development of Container Terminal at the Belawan Container Terminal Phase 1 and 2 has been commenced.
4. Investment around the Company's territory for supporting business development
 - a. Dredging works for Belawan Port Waterways and Basin;
 - b. Reorganization of Tanjung Balai Karimun passenger terminal.
 - c. Construction of new storage at Port of Belawan;
 - d. Works for Container Yard and Construction of Beaching Dock Sheet Pile at Port of Rengat;
 - e. Procurement of Pilot Ships and Delay Ships for Belawan, Pekanbaru, and Dumai Branches.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OVERVIEW OF OPERATIONS IN EACH BUSINESS SEGMENT

SEGMENT BERDASARKAN JENIS BISNIS

Segmen usaha Perseroan tercermin dari penyajian segmen operasi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 tentang Segmen Operasi yang tercatat dalam Laporan Keuangan teraudit. Informasi pelaporan segmen operasi disajikan berdasarkan telaah Direksi yang telah diidentifikasi sebagai pengambil keputusan operasional Perseroan dalam mengambil keputusan strategis.

Segmen berdasarkan jenis bisnis mencakup 3 (tiga) segmen, yaitu segmen Petikemas, Kepelabuhanan, dan segmen Lainnya.

SEGMENT BY TYPE OF BUSINESS

The segment of the Company's business is reflected by the presentation of operational segments under the Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) 5 on Operational Segment listed in the audited Financial Report. Information regarding the reporting of operational segment has been presented according to the Board's research, who have been identified as the decision maker of the Company's operational, specifically for making strategic decision.

Segment by type of business covers 3 (three) segments, namely Container, Ports, and Other segments.

SEGMENT BERDASARKAN JENIS BISNIS SEGMENT BY TYPE OF BUSINESS

PETIKEMAS
Container

KEPELABUHANAN
Ports

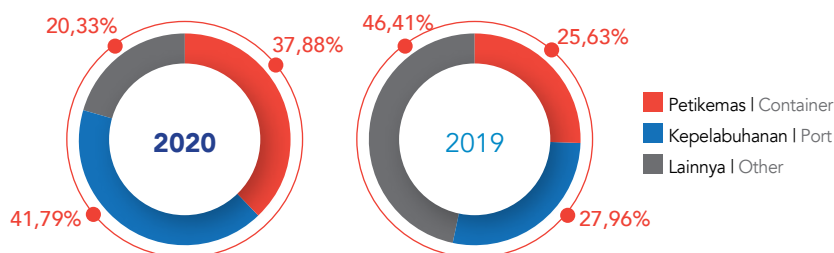
LAINNYA
Others

Untuk memberikan gambaran akan *sizing* bisnis dari segmen, di bawah ini dijelaskan kontribusi segmen atas kinerja pendapatan usaha konsolidasian Perseroan.

To give an overview of the business sizing by segments, below is the contribution to the Company's consolidated business earnings performance by segments.

KONTRIBUSI SEGMENT USAHA TERHADAP PENDAPATAN USAHA CONTRIBUTION OF BUSINESS SEGMENT TO BUSINESS INCOME

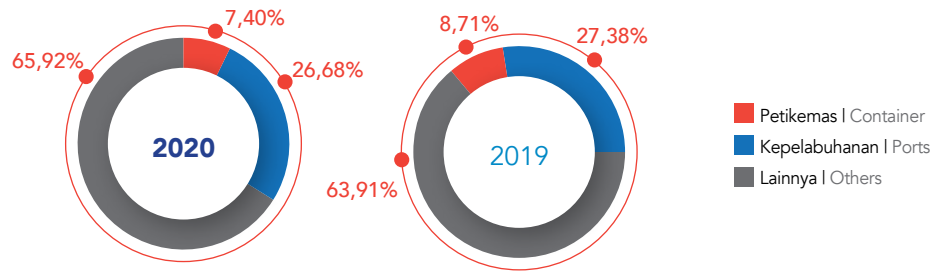
Segmen Segment	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Petikemas Container	1.455.387	37,88	1.445.395	25,63	9.992	0,69%
Kepelabuhanan Ports	1.605.580	41,79	1.576.848	27,96	28.732	1,82%
Lainnya Others	780.943	20,33	2.617.139	46,41	(1.836.197)	-70,16%
Jumlah Pendapatan Usaha Total Business Income	3.841.910	100,00	5.639.383	100,00	(1.797.472)	-31,87%





KONTRIBUSI SEGMENT USAHA TERHADAP JUMLAH ASSET
BUSINESS SEGMENT CONTRIBUTION TO TOTAL ASSETS

Segmen Segment	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Kontribusi (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Petikemas Container	917.112	7,40	1.024.679	8,71	(107.567)	-10,50%
Kepelabuhanan Ports	3.307.266	26,68	3.219.406	27,38	87.860	2,73%
Lainnya Others	8.170.546	65,92	7.514.953	63,91	655.593	8,72%
Jumlah Aset Total Assets	12.394.923	100,00	11.759.038	100,00	635.885	5,41%



Dari tabel dan bagan di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan usaha dari segmen Lainnya berkontribusi terbesar. Meskipun demikian, sektor Kepelabuhanan dan Petikemas menjadi bagian dari bisnis inti Perseroan sebagai pengelola pelabuhan di Indonesia.

From the above table and graph, we can see that the main earnings from Other segments contributed the most. However, Port and Containers are part of the Company's core business as the manager of harbours in Indonesia.

Uraian tentang kinerja masing-masing segmen dapat dilihat di bawah ini.

Below is the explanation of the performance of each business segment.

PETIKEMAS

CONTAINER

Kegiatan dan Kinerja Operasi serta Proses Bisnis Segmen Petikemas

Operational Activities and Performance and Business Process of the Container Segment

Segmen Petikemas mencakup kegiatan usaha antara lain: bongkar muat pada terminal petikemas dan non-terminal petikemas. Adapun kegiatan bongkar muat petikemas dilakukan pada Terminal Petikemas Belawan (Internasional dan Domestik), Terminal Perawang, dan terminal lainnya.

The Container Segment covers the following business activities: cargo handling in container terminal and non-container terminal. Terminal cargo handling is usually done at Belawan Belawan Container Terminal (International and Domestic), Perawang Terminal, and other terminals.

Layanan yang diberikan Perseroan pada segmen Petikemas dibagi menjadi layanan internasional dan domestik, sebagai berikut:

The service provided the Company in the container segment can be divided into international and domestic services as follows:

Pelayanan Petikemas Internasional International Container Services	Pelayanan Petikemas Domestik Domestic Container Services
Operasi Kapal Mencakup <i>Captive Cargo, Shifting, Buka/Tutup Palka, Over Height/Weight/Length, Pembatalan Muat.</i>	Operasi Kapal Mencakup <i>Captive Cargo, Shifting, Buka/Tutup Palka, Over Height/Weight/Length, Uncontainerized, Pembatalan Muat.</i>
Ship Operation Including <i>Captive Cargo, Shifting, Opening/Closing Hatch, Over Height/Weight/Length, Loading Cancellation.</i>	Ship Operation Including <i>Captive Cargo, Shifting, Opening/Closing Hatch, Over Height/Weight/Length, Uncontainerized, Loading Cancellation.</i>
Operasi Lapangan Mencakup <i>Lift On/Off, Gerakan Extra, Reefer Container, Penumpukan Container, Haulage/Trucking.</i>	Operasi Lapangan Mencakup <i>Lift On/Off, Gerakan Extra, Reefer Container, Penumpukan Container, Alih Kapal.</i>
Field Operation Including <i>Lift On/Off, Extra Movement, Reefer Container, Container Piling, Haulage/Trucking.</i>	Field Operation Including <i>Lift On/Off, Extra Movement, Reefer Container, Container Piling, Ship Transfer.</i>
Lainnya Mencakup <i>Behandle, Pas Pelabuhan, dan Petikemas lainnya.</i>	Transshipment Mencakup <i>Stevedoring.</i>
Others Including <i>Behandle, other Port, and Container Passes.</i>	Transshipment Including <i>Stevedoring.</i>
	Lainnya Mencakup <i>Pas Pelabuhan dan Petikemas lainnya.</i>
	Others Including <i>other Port and Container Passes.</i>

Di tahun 2020 Manajemen melakukan perubahan pengukuran kinerja operasi segmen Petikemas, dari sebelumnya melakukan pengukuran per terminal menjadi pengukuran berdasarkan layanan internasional dan domestik. Hal ini dilakukan untuk mempermudah manajemen dalam memantau kinerja segmen Petikemas, mulai dari kinerja operasi di lapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi operasi seperti pemberlakuan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, hingga pemantauan kinerja keuangan dan profitabilitas segmen Petikemas.

Berikut disampaikan kinerja bongkar muat petikemas di tahun 2020.

In 2020, the management conducted a measure of Container segment operational performance, from a previously per-terminal measurement to measurement based on international and domestic services. This was done to make it easy for the management in monitoring the performance of Container segment, from field operational performance, factors that influence operations such as the application of Rupiah's exchange rate against foreign currencies, to monitoring of financial performance and profitability of Container segment.

Below is the container cargo handling performance in 2020.

KINERJA BONGKAR MUAT PETIKEMAS CONTAINER LOADING/UNLOADING PERFORMANCE

Perihal Subject	Satuan Unit	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Increase (Decrease)	
				Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)
		(1)	(2)	(3=1-2)	(3/2)
Terminal Petikemas Internasional	Box	466.835	439.806	27.029	6,15%
International Container Terminal	TEUs	595.198	569.144	26.054	4,58%
Terminal Petikemas Domestik	Box	695.946	644.374	51.572	8,00%
Domestic Container Terminal	TEUs	822.781	763.830	58.951	7,72%
Jumlah	Box	1.162.781	1.084.180	78.601	7,25%
Total	TEUs	1.417.979	1.332.974	85.005	6,38%



Secara umum, total produksi bongkar muat petikemas tahun 2020 terealisasi sebesar 1,16 juta box dan 1,42 juta TEUs, masing-masing meningkat 7,25% dan 6,38% dibanding jumlah bongkar muat petikemas pada tahun 2019 sebesar 1,08 juta box dan 1,33 juta TEUs. Kenaikan ini disebabkan oleh pertumbuhan bongkar muat petikemas pada entitas anak, PT Prima Multi Terminal yang baru beroperasi pada Triwulan 2 tahun 2019 serta kenaikan *throughput* petikemas di TPK Belawan dan Pekanbaru.

Kinerja produksi segmen Petikemas dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kinerja Bongkar Muat Petikemas Internasional
Total produksi bongkar muat petikemas internasional tahun 2020 sebesar 466,83 ribu box dan 595,20 ribu TEUs, masing-masing meningkat 6,15% dan 4,58% dari tahun 2019 sebesar 439,81 ribu box dan 569,14 ribu TEUs. Kenaikan ini disebabkan oleh mulai beroperasinya PT PMT di Triwulan-II 2021.
- b. Kinerja Bongkar Muat Petikemas Domestik
Total produksi bongkar muat Petikemas Domestik tahun 2020 terealisasi sebesar 695,95 ribu box dan 822,78 ribu TEUs, masing-masing meningkat 8,00% dan 7,72% dibandingkan tahun 2019 sebesar 644,37 ribu box dan 763,83 ribu TEUs. Seperti halnya bongkar muat petikemas internasional, kenaikan pada bongkar muat petikemas domestik sejalan dengan pertumbuhan arus petikemas domestik di TPKB dan TPK Perawang imbas kebutuhan masyarakat perihal PSBB, serta peningkatan *traffic* petikemas domestik di PT PMT.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Petikemas

Profitabilitas segmen Petikemas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

In general, the total realized production of container loading/unloading in 2020 is 1.16 million boxes and 1.42 million TEUs. There is an increase of 7.25% and 6.38% respectively compared to the previous year's 1.08 million boxes and 1.33 million TEUs. This increase is influenced by the growth in container loading/unloading by a subsidiary entity, PT Prima Multi Terminal that has only begun operating in Quarter 2 of 2019, along with the increase in container throughput in Belawan and Pekanbaru container ports.

The container segment's production performance can be broken down as follows:

- a. International Container Loading/Unloading Performance
The total of international container loading/unloading production in 2020 amounted to 466.83 thousand boxes and 592.20 thousand TEUs, an increase of 6.15% and 4.58% respectively from the production in 2019 of 439.81 thousand boxes and 569.14 thousand TEUs. This increase was due to the event of PT PMT started to operate in Quarter 2 2021.
- b. Domestic Container Loading/Unloading Performance
The total of domestic container loading/unloading production in 2020 was realized at 695.95 thousand boxes and 822.78 thousand TEUs, an increase of 8.00% and 7.72% respectively from the production in 2019 of 644.37 thousand boxes and 763.83 thousand TEUs. As with the international container loading/unloading, this increase in the domestic container loading/unloading production was in line with the growth of domestic container traffic at the Belawan and Perawang Container Terminal, impacts on the community needs in relation to PSBB, as well as the increase in domestic container traffic at PT PMT.

Container Segment Profitability and Financial Performance

The profitability of Container segment is shown in this table below.

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
			(1)	(2)
Laba (Rugi) Profit (Loss)				
Pendapatan Usaha Business Earnings	1.455.387	1.445.395	9.992	0,69%
Beban Usaha Business Expenses	525.730	584.927	(59.197)	-10,12%
Laba Usaha Business Profit	929.658	860.468	69.189	8,04%

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
			(1)	(2)
Posisi Keuangan Financial position				
Aset Asset	917.112	1.024.679	(107.567)	-10,50%
Liabilitas Liability	131.469	108.453	23.016	21,22%

Adanya kenaikan kinerja trafik bongkar muat petikemas baik dari Terminal Petikemas Belawan (Internasional dan domestik), Perawang maupun Non-Terminal Petikemas mendorong peningkatan pendapatan usaha dari segmen Petikemas. Dengan efisiensi beban usaha yang berhasil dilakukan, laba usaha dari segmen Petikemas meningkat 8,04% dibandingkan tahun sebelumnya.

Aset segmen Petikemas mengalami penurunan, sedangkan liabilitas mencatat kenaikan.

Rencana Pengembangan (Segmen Petikemas)

Di tahun 2021, Perseroan akan mengoperasikan TPK Belawan Fase 2 dan memulai pembangunan TPK Belawan Fase 1. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pelindo 1 untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mengakselerasi pertumbuhan Ekonomi Wilayah sejalan dengan pertumbuhan industri di Sumatera Utara.

TPK Belawan Fase 2 siap untuk dioperasikan dengan memiliki panjang dermaga 350 meter yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat modern seperti 4 unit *Ship to Shore (STS) Crane*, 12 unit *Automatic Rubber Tyred Gantry (ARTG)*, dan 20 Terminal Tractor dengan container yard seluas 350 x 405 meter untuk mendukung aktivitas bongkar muat Petikemas. Sedangkan TPK Belawan Fase 1 akan dibangun dengan memiliki panjang dermaga yang sama seluas 350 meter.

Diharapkan, TPK Belawan Fase 1 dan Fase 2 yang didukung fasilitas dan peralatan modern serta pola operasi dan teknologi yang berstandar internasional, akan memberikan manfaat bagi Perseroan berupa peningkatan kapasitas, produktivitas bongkar muat dan pemanfaatan teknologi. Kapasitas bongkar muat petikemas di Pelabuhan Belawan diproyeksikan akan menampung lebih dari 2 juta TEUs/tahun.

The increase in the performance of container loading and unloading traffics from Belawan Container Terminal (International and Domestic), Perawang Container Terminal as well as from Non-Container Terminals drives an increase in operating revenues from the Container segment. With successful management of operating expense efficiency, the operating profit from the Container segment increased by 8.04% compared to the previous year.

However, there is a decrease in Container segment assets, while liability is showing a surge.

Development Plan (Container Segment)

In 2021, the Company will operate Belawan Container Terminal Phase 2 and begin the construction of Belawan Container Terminal Phase 1. This step is a form of commitment from Pelindo 1 to improve service quality and accelerate economic growth in the region in line with industrial growth in North Sumatera.

Belawan Container Terminal Phase 2 is ready to operate at a pier length of 350 meters along with modern loading and unloading equipment such as 4 units of Ship to Shore (STS) Cranes, 12 units of Automatic Rubber Tyred Gantry (ARTG), and 20 Terminal Tractors with a container yard of 350 x 405 meters to support container loading and unloading activities. Meanwhile, TPK Belawan container terminal Phase 1 will be built at the same pier length, namely 350 meters.

It is expected that Belawan Container Terminal Phase 1 and Phase 2, which are supported by modern facilities and equipment as well as international standard operating patterns and technologies, will provide benefits for the Company in the form of increases in loading/unloading capacity and productivity, as well as technology utilization. The container loading and unloading capacity at Belawan Port is projected to accommodate up to 2 million TEUs/year.



KEPELABUHANAN

Kegiatan dan Kinerja Operasi serta Proses Bisnis Segmen Kepelabuhanan

Segmen Kepelabuhanan mencakup kegiatan pelayanan kunjungan kapal, pelayanan bongkar muat barang dan pelayanan penumpang.

Berikut disampaikan kinerja bongkar muat Petikemas di tahun 2020.

PORT

Operational Activities and Performance and Business Process of the Port Segment

Among others, the Port segment covers ship visit service, container loading/unloading and passenger transportation service.

The following is the performance of container loading/unloading in 2020.

KINERJA BONGKAR MUAT PETIKEMAS CONTAINER LOADING/UNLOADING PERFORMANCE

Perihal On	Satuan Unit	2020 (1)	2019 (2)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Jumlah Total (3=1-2)	Persentase (%) Percentage (%) (3/2)
Kunjungan Kapal Ship Visits					
Pelabuhan Umum (Pelum) General Ports					
Luar Negeri International	Call	5.865	12.177	(6.312)	-51,84%
	GT	26.294.693	24.397.588	1.897.105	7,78%
Dalam Negeri Domestic	Call	27.149	37.152	(10.003)	-26,92%
	GT	33.929.561	29.495.596	4.433.965	15,03%
Sub Jumlah Sub-total	Call	33.014	49.329	(16.315)	-33,07%
	GT	60.224.254	53.893.184	6.331.070	11,75%
TUKS Private Interest Port					
Luar Negeri International	Call	7.340	2.812	4.528	161,02%
	GT	49.832.642	28.389.237	21.443.405	75,53%
Dalam Negeri Domestic	Call	12.383	9.582	2.801	29,23%
	GT	50.602.038	49.297.749	1.304.289	2,65%
Sub Jumlah Sub-total	Call	19.723	12.394	7.329	59,13%
	GT	100.434.679	77.686.986	22.747.693	29,28%
Jumlah Total	Call	52.737	61.723	(8.986)	-14,56%
	GT	160.658.933	131.580.170	29.078.763	22,10%
Bongkar Muat Barang Cargo Loading/Unloading					
Ekspor Export	Ton	12.957.034	17.171.273	(4.214.239)	-24,54%
Impor Import	Ton	4.733.570	7.848.059	(3.114.489)	-39,68%
AP Muat AP Load	Ton	4.049.747	5.307.879	(1.258.132)	-23,70%
AP Bongkar AP Discharge	Ton	10.850.941	13.694.902	(2.843.961)	-20,77%
Jumlah Total	Ton	32.591.292	44.022.113	(11.430.821)	-25,97%

KINERJA BONGKAR MUAT PETIKEMAS
CONTAINER LOADING/UNLOADING PERFORMANCE

Perihal On	Satuan Unit	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)
		(1)	(2)	(3=1-2)	(3/2)
Arus Penumpang Passenger Traffic					
Luar Negeri International	Orang Pax	279.444	1.318.615	(1.039.171)	-78,81%
Dalam Negeri Domestic	Orang Pax	2.207.707	4.161.532	(1.953.825)	-46,95%
Jumlah Total	Orang Pax	2.487.151	5.480.147	(2.992.996)	-54,62%

Secara umum, kinerja segmen Kepelabuhanan tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan yang terutama disebabkan pandemi COVID-19 berdampak terhadap penurunan kunjungan kapal, bongkar muat maupun arus penumpang.

Kinerja produksi segmen Kepelabuhanan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kinerja Pelayanan Kunjungan Kapal
Kunjungan kapal tahun 2020 sebanyak 52.737 *call*, turun 14,56% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 61.723 *call*. Namun secara volume, kunjungan kapal tahun 2020 sebanyak 160,66 juta GT, meningkat 22,10% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 131,58 juta GT.

Adanya penurunan kunjungan kapal dalam satuan *call* sebesar 14,56% disebabkan adanya *physical distancing* dan pembatasan sosial guna pencegahan penyebaran COVID-19 baik di pelabuhan tujuan/asal dalam negeri maupun di luar negeri sehingga kunjungan kapal penumpang mengalami penurunan yang drastis. Untuk kapal cargo di pelabuhan umum cenderung mengalami penurunan jumlah kunjungan kapal karena sejalan dengan trafik barang yang dibawa. Namun tonase kunjungan kapal dalam satuan GT meningkat sebesar 22,10% karena bertambahnya pangsa pasar jasa pelayanan kapal di dermaga khusus/TUKS di wilayah cabang Dumai dan Batam khususnya. Hal tersebut seiring dengan upaya manajemen untuk menambah kerja sama dengan pemilik Tersus/TUKS dan agen pelayaran dalam hal pelayanan pemanduan dan penundaan.

- b. Kinerja Pelayanan Bongkar Muat Barang
Volume bongkar muat barang tahun 2020 sebanyak 32,59 juta ton, turun 25,97% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 44,02 juta ton. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

In general, the performance of Port segment shows a decrease compared to 2019, mainly because the COVID-19 pandemic caused a decreased demands for visit, cargo loading/unloading, and passenger transport.

The production performance of Port segments can be broken down as follows:

- a. Ship Visit Service Performance
There was around 52,737 calls of ship visit in 2020, a 14.56% decrease compared to 2019's 61,723 calls. Volume-wise, however, there were 160.66 million GT of ship visit in 2020, a 22.10% increase compared to 2019's 13.58 million GT.

The decrease in ship visits of 14.56% in call unit was due to physical distancing and social restriction policies that were implemented to prevent the spread of COVID-19 at both domestic and international destination/origin ports, causing passenger ship visits to decrease drastically. As for cargo ships at general ports, their ship visits tended to experience a decrease relative to the traffic of goods carried. However, the tonnage of ship visits in GT unit saw a 22.10% increase due to the increasing market share of ship services in special/private interest ports, particularly in Dumai and Batam branch area. This was in line with the management's effort to improve the cooperation with the owners of special/private interest ports and shipping agents with regard to pilotage and towage services.

- b. Cargo Loading/Unloading Service Performance
The volume of cargo handling in 2020 is 32.59 million ton, which is a 25.97% decrease compared to 2019's 44.02 million ton. There were several causes behind this:



- Melemahnya pertumbuhan ekonomi wilayah terutama Sumatera Utara karena aktivitas produksi di pabrik tidak berjalan seperti biasa mengingat adanya himbauan untuk pembatasan sosial.
 - Berkurangnya permintaan barang/komoditi dari negara-negara yang juga menerapkan *lockdown* sehingga arus barang yang lewat pelabuhan juga berkurang. Untuk komoditi dominan seperti CPO dan turunannya mengalami penurunan permintaan dari negara pengimpor seperti Tiongkok dan India yang juga terdampak akan pandemi COVID-19.
- c. Kinerja Pelayanan Penumpang
- Volume arus penumpang tahun 2020 sebanyak 2,49 juta orang, turun hingga 54,62% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 5,48 juta orang. Arus penumpang melalui kapal laut awal sejak Triwulan II-2020 mengalami penurunan yang drastis yang terimbas pandemi COVID-19 sehingga masyarakat dianjurkan untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Aktivitas arus penumpang mulai terlihat mengalami perbaikan sejak awal Triwulan IV-2020. Namun hingga saat ini belum sepenuhnya normal terutama untuk pelayaran luar negeri.
- The weakened economic growth, especially in Sumatera Utara, because of decreased production activities in their factories due to social restrictions.
 - Decreasing demands of goods/commodities from countries who also implement lockdown policies, which led to the decrease of cargo traffic through ports. There was also a decreased demand of dominant commodities like CPO and its derivatives from importing countries like China and India that were also impacted by the COVID-19 pandemic.
- c. Passenger Service Performance
- Passenger traffic volume in 2020 was around 2.49 million people, a 54.62% decrease compared to 2019's 5.48 million people. Ship passenger traffic saw a dramatic decrease in Quarter II of 2020, due to COVID-19 pandemic that recommended people against conducting activities outside of home. A recovery in this passenger traffic could be seen in Quarter IV of 2020. However, it has yet to reach its normal, pre-pandemic figures, especially for domestic voyage.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Kepelabuhanan

Profitabilitas segmen Kepelabuhanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Port Profitability and Financial Performance

The profitability of Port segment is shown in this table below.

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
			(1)	(2)
Laba (Rugi) Profit (Loss)				
Pendapatan Usaha Business Earnings	1.605.580	1.576.848	28.732	1,82%
Beban Usaha Business Expenses	1.098.724	1.057.924	40.799	3,86%
Laba Usaha Business Profit	506.857	518.924	(12.067)	-2,33%
Posisi Keuangan Financial Position				
Aset Asset	3.307.266	3.219.406	87.860	2,73%
Liabilitas Liability	621.076	669.003	(47.927)	-7,16%

Meskipun kinerja trafik pada kunjungan kapal, bongkar muat barang, maupun arus penumpang mengalami penurunan, pendapatan usaha dari segmen Kepelabuhanan mencatat kenaikan 1,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan laba usaha mengalami penurunan 2,33% sejalan dengan beban usaha yang mengalami kenaikan.

Despite the decrease in traffic performance for ship visit, cargo loading/unloading, and passenger transport, Port segment recorded a 1.82% increase compared to the previous year. Meanwhile, business profit saw a 2.33% decrease, in line with the increase in business expenses.

Aset segmen Kepelabuhanan mengalami kenaikan, sedangkan liabilitas mencatat penurunan.

Rencana Pengembangan (Segmen Kepelabuhanan)

Salah satu proyeksi peningkatan kinerja segmen Kepelabuhanan akan didapatkan dari pengembangan Kuala Tanjung Port & Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE). Dengan lokasi berada di tengah jalur utama Selat Malaka yang dilewati 25% komoditas perdagangan dunia dan didukung *hinterland* yang kuat di 10 provinsi di Pulau Sumatera, menjadikan Kuala Tanjung PIE memiliki posisi strategis dan berpotensi besar sebagai simpul penting dalam jaringan logistik dan *supply chain global*. Kuala Tanjung PIE terdiri dari dua bagian yang saling terintegrasi, yaitu Kawasan Pelabuhan (Kuala Tanjung Multipurpose Terminal) dan Kawasan Industri (Kuala Tanjung Industrial Zone).

Pengembangan Kuala Tanjung PIE ditandai dengan telah beroperasinya kawasan pelabuhan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) sejak 2019. Sejak beroperasi, KTMT mencatat tren pertumbuhan yang positif. Pengembangan Kuala Tanjung PIE juga meliputi Kuala Tanjung Industrial Zone (KTIZ) yang dikembangkan di area seluas 3.400 Ha, memiliki potensi segmen industri yang beragam, baik itu *port associate industry* maupun *non-port associate industry*, di antaranya aluminium, *palm oil, iron & steel, rubber, petrochemical*, produk makanan, serta segmen industri lainnya. Kawasan ini juga akan diperkuat dengan tersedianya berbagai layanan pendukung seperti *bunkering service, logistic service, dan warehousing*, serta dilengkapi juga dengan penyediaan listrik, jaringan pipa gas, air bersih, pengelolaan limbah dan jaringan utilitas lainnya.

Di dalam rencana pengembangan Kuala Tanjung PIE juga terdapat rencana pengembangan Kawasan Business & Residential Area yang didukung oleh akses jaringan transportasi terpadu berupa jalan tol Trans-Sumatera dan jaringan jalur kereta api yang langsung masuk ke dalam Kuala Tanjung PIE. Kuala Tanjung PIE juga terintegrasi dan terhubung langsung dengan Kawasan Industri Sei Mangkei, yang merupakan kawasan industri yang terlebih dahulu ada di Sumatera Utara dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

LAINNYA

Kegiatan dan Kinerja Operasi serta Proses Bisnis Segmen Lainnya

Segmen Lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak dikategorikan dalam segmen Petikemas maupun Kepelabuhanan. Segmen Lainnya yang dimiliki oleh Perseroan terdiri dari:

Port assets saw an increase, while liability recorded a decrease.

Development Plan (Ports Segment)

One of the projected performance improvements in the Ports segment will be obtained from the development of the Kuala Tanjung Port & Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE). Located in the middle of the main route of the Malacca Strait through which 25% of world trade commodities pass, and supported by strong hinterlands in 10 provinces on the island of Sumatera, Kuala Tanjung PIE has a strategic position and great potentials as an important node in the global logistics and supply chain networks. Kuala Tanjung PIE comprises two mutually integrated parts, namely the Port Area (Kuala Tanjung Multipurpose Terminal) and the Industrial Estate (Kuala Tanjung Industrial Zone).

The development of Kuala Tanjung PIE was marked by the operation of the Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) port area since 2019. Since operating, KTMT has recorded a positive growth trend. The development of Kuala Tanjung PIE also encompasses the Kuala Tanjung Industrial Zone (KTIZ), developed in an area of 3,400 hectares, which has potentials for various industrial segments, both port associate industries and non-port associate industries, including aluminum, palm oil, iron & steel, rubber, petrochemicals, food products, as well as other industrial segments. This zone will also be strengthened by the availability of various supporting services such as bunkering services, logistics services and warehousing, as well as the provision of electricity, gas pipelines, fresh water, waste management and other utility networks.

The Kuala Tanjung PIE development plan also contains the development plan for a Business & Residential Area supported by accesses to integrated transportation networks, namely the Trans-Sumatera toll road and a railroad network that directly enters Kuala Tanjung PIE. Kuala Tanjung PIE is also integrated with and directly connected to the Sei Mangkei Industrial Estate, a preceding industrial area in North Sumatera which has been designated as a Special Economic Zone (SEZ).

OTHERS

Operational Activities, Performance and Business Process of Others Segment

Other segment here covers business activities that are not categorized into Container or Port segments. Other segments owned by the Company consist of:



1. Pendapatan Denda/Penalti;
2. Pendapatan Non- Usaha - Jasa Giro;
3. Pendapatan Sewa Properti Investasi Lainnya;
4. Pendapatan Bunga Deposito;
5. Pendapatan Jual Dokumen Lelang;
6. Pendapatan Materai;
7. Laba Penjualan Aset Tidak Tetap Tidak Produktif;
8. Pendapatan Klaim Asuransi;
9. Pendapatan Pembulatan;
10. Laba Selisih Kurs – Realize;
11. Laba Kurs – Unrealize;
12. Pendapatan Non-Usaha – Lainnya.

1. Fine/Penalty Revenue;
2. Non-Business – Giro Service Revenue;
3. Other Investment Property Rent Revenue;
4. Deposit Interest Revenue;
5. Tender Document Sales Revenue;
6. Duty Stamp Revenue;
7. Non-productive and Non-fixed Asset Sales Profit;
8. Insurance Claim Revenue;
9. Rounding Revenue;
10. Exchange Rate – Realize Difference Profit;
11. Exchange Rate – Unrealize Profit;
12. Other Non-business Revenues.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Lainnya

Profitabilitas segmen Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Profitability and Financial Performance of Others Segment

The profitability of other segments is shown in this table below.

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
			(1)	(2)
Laba (Rugi) Profit (Loss)				
Pendapatan Usaha Business Earnings	780.943	2.617.139	(1.836.197)	-70,16%
Beban Usaha Business Expense	1.541.469	3.398.322	(1.856.853)	-54,64%
Laba Usaha Business Profit	(760.526)	(781.183)	20.657	-2,64%
Posisi Keuangan Financial Position				
Aset Asset	8.170.546	7.514.953	655.593	8,72%
Liabilitas Liability	4.842.534	5.051.171	(208.637)	-4,13%

Pendapatan usaha dari segmen Lainnya mencatat penurunan hingga 70,16%.

Business earnings from Others segment recorded a 70.16%.

SEGMENT GEOGRAFIS

Selain segmen berdasarkan jenis bisnis, Perseroan juga menyajikan informasi tentang segmen geografis sebagai salah satu upaya untuk memberikan gambaran tentang penyebaran kegiatan usaha. Perseroan membagi segmen geografis berdasarkan wilayah persebaran kegiatan usaha di Indonesia.

GEOGRAPHICAL SEGMENT

Apart from by business type, the Company also presents information about geographical segment as part of its effort to give an idea of the distribution of business activities. The company divides the geographical segment based on the distribution area of business activities in Indonesia.

Kinerja segmen geografis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

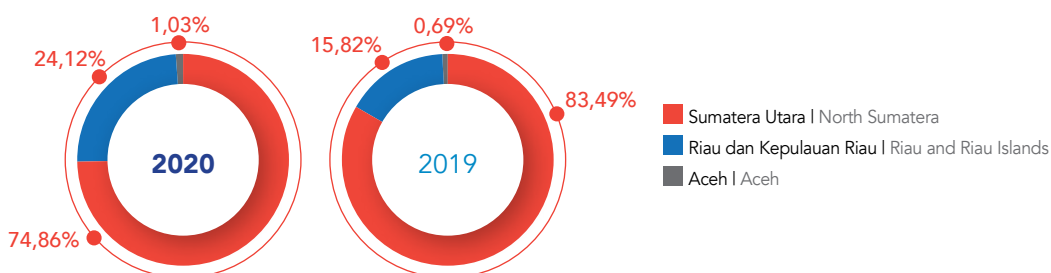
The performance of geographical segment is shown in this table below.

KINERJA SEGMENT GEOGRAFIS BERDASARKAN PENDAPATAN USAHA
GEOGRAPHICAL SEGMENT PERFORMANCE BY BUSINESS EARNINGS

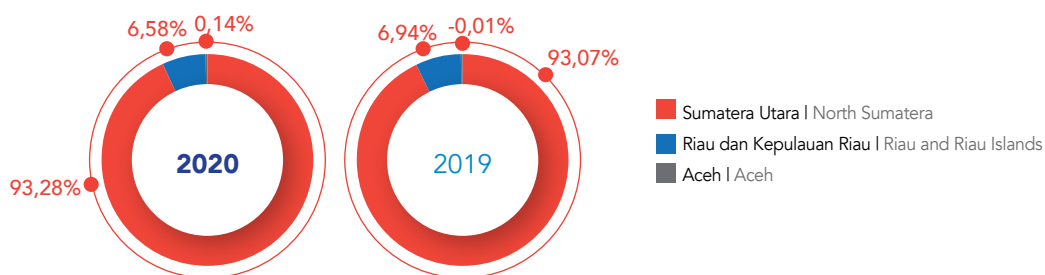
	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-Million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-Million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-Million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Usaha Business Earnings						
Sumatera Utara North Sumatera	2.875.863	74,86	4.708.067	83,49	(1.832.204)	-38,92%
Riau dan Kepulauan Riau Riau and Riau Islands	926.514	24,12	892.184	15,82	34.330	3,85%
Aceh Aceh	39.533	1,03	39.132	0,69	401	1,03%
Jumlah Pendapatan Usaha Total Business Earnings	3.841.910	100,00	5.639.383	100,00	(1.797.472)	-31,87%
Laba Usaha Business Profit						
Sumatera Utara North Sumatera	365.039	54,00	282.366	47,20	82.673	29,28%
Riau dan Kepulauan Riau Riau and Riau Islands	313.443	46,37	313.053	52,33	390	0,12%
Aceh Aceh	(2.494)	-0,37	2.790	0,47	(5.284)	-189,38%
Jumlah Laba Usaha Total Business Profit	675.988	100,00	598.209	100,00	77.779	13,00%
Aset Asset						
Sumatera Utara North Sumatera	14.893.139	93,28	14.863.319	93,07	29.820	0,20%
Riau dan Kepulauan Riau Riau and Riau Islands	1.050.063	6,58	1.107.556	6,94	(57.493)	-5,19%
Aceh Aceh	22.940	0,14	(1.503)	-0,01	24.443	-1.626,28%
Jumlah Aset Total Asset	15.966.142	100,00	15.969.372	100,00	(3.230)	-0,02%
Liabilitas Liability						
Sumatera Utara North Sumatera	9.449.664	97,36	9.476.511	96,96	(26.847)	-0,28%
Riau dan Kepulauan Riau Riau and Riau Islands	238.667	2,46	284.552	2,91	(45.885)	-16,13%
Aceh Aceh	17.279	0,18	12.747	0,13	4.532	35,55%
Jumlah Liabilitas Total Liability	9.705.610	100,00	9.773.810	100,00	(68.200)	-0,70%



KOMPOSISI PERSEBARAN GEOGRAFIS PELINDO 1 BERDASARKAN PENDAPATAN USAHA GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION COMPOSITION OF PELINDO 1 BY BUSINESS EARNINGS



KOMPOSISI PERSEBARAN GEOGRAFIS PELINDO 1 BERDASARKAN ASET GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION COMPOSITION OF PELINDO 1 BY ASSET



Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa operasi dan bisnis Perseroan dominan berada di wilayah Sumatera Utara, yang tercermin dari pendapatan usaha dari wilayah Sumatera Utara sebesar 83,49% dan aset di wilayah Sumatera Utara sebesar 93,07%.

The above table and graph show that the Company has dominant operation and business in North Sumatera, reflected by the 83.49% business earnings and 93.07% of asset for the region.

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECT

STRATEGI PEMASARAN

Pelindo 1 menerapkan konsep yang lebih menitikberatkan kepada pemuasan kebutuhan pelanggan melalui penciptaan dan penyampaian nilai (*value creation and delivery*) dengan menciptakan hubungan yang erat dengan pelanggan. Dalam hal ini Pelindo 1 mengedepankan pendekatan dengan pemilik barang (*cargo owner*) untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Strategi pemasaran dan saluran promosi yang dilakukan Perseroan dapat dijabarkan sebagai berikut.

PRICING

Strategi pemasaran dengan menggunakan pendekatan tarif atau harga dalam memasarkan produk/jasa, antara lain:

1. **Regular pricing**
Tarif yang berlaku umum untuk semua customer.
2. **Competitive pricing**
Penyesuaian tarif berdasarkan apa yang ditagihkan competitor (B to B).
3. **Value-based pricing**
Menentukan tarif sesuai dengan *value* yang didapat oleh customer.
4. **Penetration pricing**
Menetapkan tarif promosi untuk mendapatkan pasar yang kompetitif di awal kemudian perlahan disesuaikan.

PRODUCT

Strategi pemasaran dengan menggunakan pendekatan pelayanan dalam memasarkan produk dan jasa, antara lain:

1. Ekstensifikasi
 - a. Penambahan *market/customer* baru
 - i. Peningkatan jumlah Tersus/TUKS yang dilayani
 - ii. Peningkatan mitra kerja sama aset, *marine UBM*, dan lain-lain
 - b. Peningkatan kerja sama dengan *customer* baru
 - c. Perluasan wilayah layanan/*service*
 - i. Pembukaan rute baru misal pembukaan rute pelayaran TBA - Perak - Malaysia
 - ii. Pembukaan rute untuk petikemas internasional di Dumai
2. Intensifikasi
 - a. *Growth throughput* dari pasar yang ada
 - b. Meningkatkan kualitas layanan
 - c. Optimalisasi aset
 - d. Sinergi dengan unit usaha/cabang/anak perusahaan
3. Diversifikasi
 - a. Penambahan *product/service* yang baru
 - b. *Bundling* layanan/*service*

MARKETING STRATEGY

Pelindo 1 implements a concept that emphasizes on the fulfilment of customers' needs through value creation and delivery, by establishing a close relationship with the customers. In this case, Pelindo 1 always prioritizes its relationship with cargo owners in order to fulfill their needs.

Marketing strategy and promotional channel taken by the Company can be broken down as follows.

PRICING

Marketing strategy using rate or price in marketing products/ services, among others:

1. **Regular pricing**
A rate that generally applies to all customers.
2. **Competitive pricing**
Rate that is adjusted based on what is charged by the competitors (B to B).
3. **Value-based pricing**
Rate that is determined by the value gained by the customers.
4. **Penetration pricing**
Promotional rate that is determined to gain a competitive edge in the beginning, before being adjusted gradually.

PRODUCT

Marketing strategy that utilizes service approach in marketing products/services, among others :

1. Extensification
 - a. Adding new market/customers
 - i. Increasing special/private interest ports being served
 - ii. Increasing asset cooperation partner, marine, UBM, etc
 - b. Increasing asset cooperation partner, marine, UBM, etc
 - c. Extending area of service
 - i. Opening new routes, such as the TBA – Perak – Malaysia voyage route
 - ii. Opening international container route in Dumai
2. Intensification
 - a. *Growth throughput from existing market*
 - b. Improving service quality
 - c. Asset optimization
 - d. Synergy with business unit/branch/subsidiary
3. Diversification
 - a. Adding new products/services
 - b. *Bundling of services*



PROMOTION

Pelindo 1 memiliki produk/jasa yang ditawarkan kepada para pengguna jasa atau calon mitra/investor berupa Jasa Kepelabuhanan (Jasa Kapal, Jasa Barang, dan Jasa Rupa-Rupa). Selain produk/jasa, Pelindo 1 juga menawarkan proyek pengembangan pelabuhan serta pemanfaatan aset perusahaan. Untuk itu saluran promosi yang digunakan oleh Pelindo 1 adalah sebagai berikut:

1. *Personal Selling;*
2. *International shipping exhibitions;*
3. *Representatives;*
4. *Direct mailing;*
5. *Port Community;*
6. *Networking;*
7. *Advertising;*
8. *Speaker at conference.*

PAYMENT

1. *Payment method (Autocollection, Pre-billing, Postbilling, dan Advance Payment);*
2. *Term of Payment (TOP 8 hari, 30 hari);*
3. *Discount/cashback;*
4. *Credit limit management (pengelolaan credit limit berdasarkan transaksi, atau berdasarkan tingkat risiko).*

PANGSA PASAR

Secara keseluruhan pangsa pasar yang dapat dilayani Pelindo 1 untuk bongkar muat petikemas pada tahun 2020 sebesar 1.417.652 TEUs atau 100% dari total realisasi *throughput* yang melewati fasilitas dermaga Pelindo 1 petikemas.

Sedangkan untuk segmen non-petikemas, pangsa pasar bongkar muat yang dilayani oleh Pelindo 1 pada tahun 2020 sebesar 13.908.279 ton atau 55,99% dari total realisasi *throughput* yang melewati fasilitas dermaga Pelindo 1 sebesar 24.838.240 ton.

Dari total realisasi *throughput* tersebut, pangsa pasar petikemas Pelindo 1 tahun 2019 adalah 100% dan non-petikemas 56%.

PROMOTION

Pelindo 1 has products/services that are offered to customers of service or potential partner/investor in the form of Harbour Services, such as Shipping Services, Cargo Services, and Miscellaneous Services. Apart from product/service, Pelindo 1 also offers harbour development project and utilization of the Company's asset. For that reason, the promotional channel used by Pelindo 1 is as follows:

1. *Personal Selling;*
2. *International shipping exhibitions;*
3. *Representatives;*
4. *Direct mailing;*
5. *Port Community;*
6. *Networking;*
7. *Advertising;*
8. *Speaker at conference.*

PAYMENT

1. *Payment method (Autocollection, Pre-billing, Postbilling, dan Advance Payment);*
2. *Term of Payment (8 day, 30 day TOP);*
3. *Discount/cashback;*
4. *Credit limit management (management of credit limits based on transactions, or based on risk levels).*

MARKET SEGMENT

Overall, the Pelindo 1's container loading/unloading market share in 2020 was around 1,417,652 TEUs or 100% of the total realized throughput that passed through Pelindo 1's container wharf facilities.

Meanwhile for non-container, Pelindo 1's non-container loading/unloading market share in 2020 was around 13,908,279 tons or 55.99% of total realized throughput that passed through Pelindo 1's port wharf facilities or around 24,838,240 tons.

Based on the total realized throughput, Pelindo 1's container market share in 2019 was 100% and non-container market share was 56%.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

OVERVIEW OF FINANCE AND OTHER MATERIAL INFORMATION

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan pasar modal yang berlaku.

KINERJA KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

INFORMATION PRESENTATION STANDARD AND COMPLIANCE WITH FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD

Analysis and discussion of financial performance in this annual report shall refer to the Consolidated Financial Reports during periods that end in 31 December 2020 and 31 December 2019 that are audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & co. Public Accountant Office. The Consolidated Financial Report is formulated and presented based on the applicable Financial Accounting Standard in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which covers Statement and Interpretation as issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) of Indonesian Accountant Association and other applicable capital market regulations.

FINANCIAL PERFORMANCE

CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION REPORT



Posisi Keuangan memberikan gambaran sekilas tentang kekuatan aset dan permodalan Perseroan. Di tahun 2020, Jumlah Aset Perseroan mencapai Rp15,97 triliun. Sedangkan pada Liabilitas dan Ekuitas, komposisi terdiri dari Liabilitas sebesar 60,79% dan Ekuitas sebesar 39,21%.

Financial Position gives a general overview of the Company's asset and capital strength. In 2020, the Company's asset value reached Rp15.97 trillion. Meanwhile, for Liability and Equity, Liability made up 60.79% of the composition, while Equity was 39.21%.



Posisi Keuangan Financial Position	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Persentase (%)
Aset Asset				
Aset Lancar Current Asset	2.046.355	2.601.862	(555.507)	-21,35%
Aset Tidak Lancar Non-Current Asset	13.919.787	13.367.510	552.277	4,13%
Jumlah Aset Total Asset	15.966.142	15.969.372	(3.230)	-0,02%
Liabilitas dan Ekuitas Liability and Equity				
Liabilitas Liability				



Posisi Keuangan Financial Position	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Jangka Pendek Short Term Liability	2.193.720	2.414.559	(220.839)	-9,15%
Liabilitas Jangka Panjang Long Term Liability	7.511.890	7.359.251	152.638	2,07%
Jumlah Liabilitas Total Liability	9.705.610	9.773.810	(68.200)	-0,70%
Ekuitas Equity	6.260.533	6.195.562	64.971	1,05%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Totally Liability and Equity	15.966.142	15.969.372	(3.230)	-0,02%

ASET

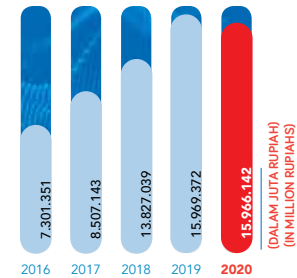
ASSET

Total Aset Perseroan tahun 2020 mencapai Rp15,97 triliun, mengalami penurunan 0,02% dibandingkan Total Aset tahun 2019. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2016-2020*, Total Aset mengalami pertumbuhan 21,60%

Total Asset of the Company in 2020 reached Rp15.97 trillion, a 0.02% decrease compared to its Total Asset in 2019. On the Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2016-2020, Total Asset shown a 21.60% growth.



Total Aset 2016-2020 Total Asset 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

Aset Asset	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Aset Lancar Current Asset	2.046.355	2.601.862	(555.507)	-21,35%
Aset Tidak Lancar Non-current Asset	13.919.787	13.367.510	552.277	4,13%
Jumlah Aset Total Asset	15.966.142	15.969.372	(3.230)	-0,02%

Kinerja Aset dipengaruhi oleh Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar. Dibandingkan tahun 2019, Total Aset Lancar tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 21,35%, sedangkan Total Aset Tidak Lancar tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,13% sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Asset Performance is affected by Current and Non-current Assets. Compared to 2019, there was 21.35% decrease in Total Current Asset in 2020 and 4.13% increase in Total Non-current Asset, as further elaborated below.

Aset Lancar

Current Asset

Aset Lancar Current Asset	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Persentase (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	1.565.081	1.767.549	(202.468)	-11,45%
Piutang Usaha - Bersih Net Business Receivables	49.505	120.690	(71.185)	-58,98%
Persediaan Inventory	24.320	18.285	6.035	33,00%
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	370.872	513.721	(142.848)	-27,81%
Uang Muka Advance Payment	12.298	30.567	(18.269)	-59,77%
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	11.530	10.802	728	6,74%
Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Assets	12.749	140.248	(127.499)	-90,91%
Jumlah Aset Lancar Total Current Asset	2.046.355	2.601.862	(555.507)	-21,35%

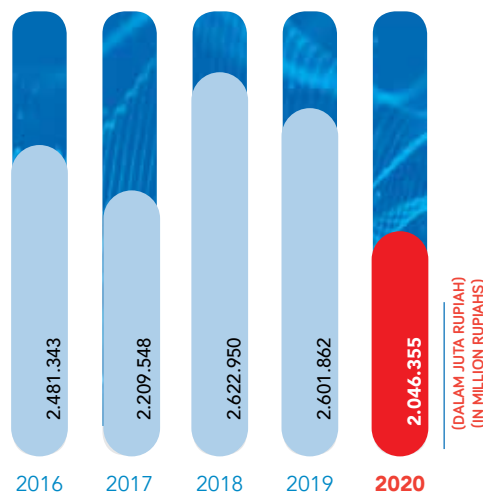
Jumlah Aset Lancar tahun 2020 sebesar Rp2,05 triliun, turun 21,35% atau setara dengan Rp555,5 miliar dibandingkan Jumlah Aset Lancar tahun 2019 sebesar Rp2,60 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan 4 (empat) akun dominan dari tahun lalu yaitu kas dan setara kas, piutang usaha, pajak dibayar di muka, serta aset keuangan lancar lainnya.

The Total Current Asset in 2020 was Rp2.05 trillion, a 21.35% decrease or equivalent to Rp555.5 million compared to the Total Current Asset in 2019 of Rp2.60 trillion. This decrease was a result of the decrease of 4 (four) dominant accounts from previous year, namely cash and cash equivalents, business receivables, prepaid taxes, and other current financial asset.

Perkembangan Jumlah Aset Lancar dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of Total Current Asset can be seen in this chart below.

Aset Lancar 2016-2020 Current Asset 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification



Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Perseroan terdiri dari kas tunai (*cash on hand*), uang tersimpan dalam rekening giro bank (*demand deposit*) dan setara kas yaitu investasi yang sifatnya sangat likuid/berjangka pendek yang dengan sangat cepat dapat dijadikan kas (misal deposito berjangka atau instrumen pasar uang, seperti Sertifikat Bank Indonesia/SBI yang diperoleh).

Kas dan Setara Kas tahun 2020 sebesar Rp1,56 triliun, turun 11,45% atau setara dengan Rp202,47 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,77 triliun. Penurunan ini disebabkan Penurunan saldo kas dikarenakan adanya pembayaran tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo kepada *vendor*.

Piutang Usaha - Bersih

Piutang Usaha - Bersih adalah klaim atas hak yang diperoleh dari penyerahan barang atau jasa yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha normal entitas.

Piutang Usaha - Bersih tahun 2020 sebesar Rp49,50 miliar, turun 58,98% atau setara dengan Rp71,18 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp120,69 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya pelunasan dari *customer* atas optimalisasi penagihan yang telah dilakukan.

Persediaan

Persediaan adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan tahun 2020 sebesar Rp24,32 miliar, meningkat 33,00% atau setara dengan Rp6,03 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp18,28 miliar. Kenaikan ini disebabkan penambahan persediaan BBM/pelumas serta suku cadang yang digunakan untuk proses percepatan pemberian jasa.

Pajak Dibayar di Muka

Pajak Dibayar di Muka adalah pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh) periode berjalan (yang nantinya akan diperhitungkan dengan PPh tahunannya), pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-masukan yang dapat dikreditkan dan akan diperhitungkan dengan PPN keluaran untuk periode yang diperkenankan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, dan sisa/lebih bayar pajak (misal PPh atau PPN) pada akhir periode tahun berjalan yang akan diperhitungkan pada periode tahun berikutnya atau direstitusikan.

Pajak Dibayar di Muka tahun 2020 sebesar Rp370,87 miliar, turun 27,81% atau setara dengan Rp142,85 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp513,72 miliar. Penurunan ini disebabkan

Cash and cash equivalents

Cash and Cash Equivalent of the Company consists of cash on hand, demand deposit, and cash equivalents such as investment that is very liquid/short term in nature and which can be liquidated into cash (such as term deposit or financial market instrument like Bank Indonesia Certificate (SBI) that has been obtained.

The value of Cash and Cash Equivalent in 2020 is Rp1.56 trillion, a 11.45% or Rp202.47 billion decrease compared to 2019's Rp1.77 trillion. The decrease is caused by a decrease in cash balance because of due bills owed to vendors.

Net Business Receivables

Net Business Receivables is a claim on the right that is gained by delivery of goods/services as a part of normal business activity of entity.

The value of Net Business Receivables in 2020 is Rp49.50 billion, a 53.98% or Rp71.18 billion decrease compared to 2019's Rp120.69 billion. The reason for the decrease is payment from customers by carrying out optimized collecting.

Inventory

Inventory refers to assets that are available to sell in formal business activities, in production process for the sale, or in the form of material or equipment to be used in production process or delivery of service.

The value of inventory in 2020 is Rp24.32 billion, a 33.00% or Rp6.03 billion increase compared to 2019's Rp18.28 billion. The increase is caused by a surge in fuel/lubricant reserve and other parts that are used to accelerate the process of service delivery.

Prepaid Taxes

Prepaid Taxes is payment of the ongoing period of Income Tax (PPh) (which will later account for the annual Income Tax), payment of Added Value Tax or input-PPN that can be credited shall be calculated with output-PPN for a period that is allowed under the applicable taxation regulation, and the tax overpayment value (e.g. PPh or PPN) during the end of the ongoing year period that will be calculated in the next year period or restituted.

The value of Prepaid Taxes in 2020 is Rp370.87 billion, a 27.81% or Rp142.85 billion decrease compared to 2019's Rp513.72 billion. This decrease is caused by the decrease of prepaid tax

turun nya saldo pajak dibayar dimuka dikarenakan kompensasi PPN masukan yang diperhitungkan dengan PPN keluarannya.

Uang Muka

Uang Muka adalah pengeluaran kas yang diberikan perusahaan kepada: (1) pihak ketiga dan/atau (2) pihak berelasi sesuai kontrak/perikatan yang berlaku, untuk selanjutnya akan diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan kembali: (i) dengan nilai imbalan yang akan diperoleh pada saat diterimanya barang atau jasa (per termin pembayaran atau seluruhnya sesuai klausul kontrak); atau (ii) telah sampai jangka waktu pertanggungjawaban oleh pihak (unit usaha/personel/karyawan/pejabat) yang bersangkutan, baik berkenaan dengan aktivitas usaha atau non-usaha, sesuai ketentuan perusahaan, atau (iii) disetujuinya penghapusan uang muka oleh pihak yang berkompoten sesuai Anggaran Dasar entitas.

Uang Muka tahun 2020 sebesar Rp12,29 miliar, turun 59,77% atau setara dengan Rp18,27 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp30,57 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya pertanggungjawaban pihak ketiga ataupun pihak berelasi atas uang muka yang telah diambil sebelumnya.

Biaya Dibayar di Muka

Biaya Dibayar di Muka adalah biaya yang telah dibayarkan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau lebih sesuai dengan kontrak/perjanjian, tetapi pembebanannya baru akan dilakukan pada setiap periode ketika manfaatnya telah diterima oleh perusahaan, seperti premi asuransi dibayar dimuka dan sewa dibayar dimuka. Untuk memudahkan pengendalian, akun ini dirinci menurut jenis biaya yang dibayarkan sesuai dengan akun beban menurut kelompok/sub kelompok/jenisnya pada laporan laba ruginya.

Biaya Dibayar di Muka tahun 2020 sebesar Rp11,53 miliar, meningkat 6,74% atau setara dengan Rp 127,49 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp140,25 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya pembayaran biaya asuransi dan biaya sewa dibayar dimuka.

Aset Keuangan Lancar Lainnya

Aset Keuangan Lancar Lainnya adalah aset keuangan yang digunakan untuk mencatat aset lancar yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam akun aset lancar dari komponen utama yang nilainya tidak cukup material untuk disajikan sebagai akun aset lancar yang berdiri sendiri.

Aset Keuangan Lancar Lainnya tahun 2020 sebesar Rp12,75 miliar, turun 90,91% atau setara dengan Rp728 juta dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 10,80 miliar. Penurunan ini disebabkan penurunan saldo piutang lain-lain atas optimalisasi penagihan yang telah dilakukan terhadap saldo piutang macet.

balance by compensation of input-PPN that is calculated with output-PPN.

Advance Payment

Advance Payment is cash expense paid by the Company to: (1) third party and/or (2) related parties to an applicable contract/commitment, which will later be calculated or compensated: (i) by the value of goods or services received (per termin or whole of payment under the contract's clause); or (ii) on the due date of delivery by the relevant party (business unit/personnel/employee/official), whether related to business or non-business activities, according to the Company's terms, or (iii) by the approval to annual advance payment by a competent party under the entity's Articles of Association.

The sum of Advance Payment in 2020 is Rp12.29 billion, a 59.77% or Rp18.27 billion decrease compared to 2019's Rp30.57 billion. The decrease was caused by the delivery of third party or related party for advance payment that has been made before.

Prepaid Expenses

Prepaid Expenses refer to expenses that are paid for 12 (twelve) months or more under a contract/commitment, but will only be charged on each period when the Company has received its benefits, such as prepaid insurance premium and prepaid payment of rent. To make control easier, the account is divided based on the type of expense paid according to the expense account by group/sub-group/type in the profit-loss report.

The sum of prepaid expense in 2020 is Rp11.53 billion, a 6.74% or Rp127.49 billion increase compared to 2019's Rp140.25 billion. The increase is caused by insurance and prepaid expense payments.

Other Current Financial Assets

Other Current Financial Assets cover financial assets used for recording current assets that are not classifiable into current asset account, as the main component value is not considered substantial enough to be presented as a stand-alone current asset account.

The value of Other Current Financial Assets in 2020 is Rp12.75 billion, a 90.91% or Rp728 million decrease compared to 2019's Rp10.80 billion. What caused it is the decrease in other receivables balance and optimization of billing to bad receivables balance.



ASET TIDAK LANCAR

NON-CURRENT ASSET

Aset Tidak Lancar Non-current Asset	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Persentase (%)
Investasi Entitas Asosiasi Associated Entity Investment	49.377	49.105	272	0,55%
Properti Investasi - Bersih Net Investment Property	421.404	416.965	4.439	1,06%
Aset Tetap - Bersih Net Fixed Asset	6.173.832	6.118.441	55.390	0,91%
Aset Tak Berwujud - Bersih Net Intangible Asset	6.803.185	6.649.203	153.982	2,32%
Aset Hak Guna Use Right Asset	185.908	-	185.908	100,00%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Asset	214.615	98.302	116.313	118,32%
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Asset	68.784	33.323	35.461	106,42%
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Financial Asset	2.682	2.171	511	23,55%
Jumlah Aset Tidak Lancar Non-current Asset Total	13.919.787	13.367.510	552.277	4,13%

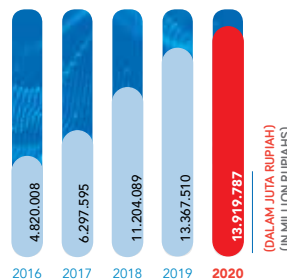
Jumlah Aset Tidak Lancar tahun 2020 sebesar Rp13,92 triliun, meningkat 4,13% atau setara dengan Rp552,28 miliar dibandingkan Jumlah Aset Tidak Lancar tahun 2019 sebesar Rp13,37 triliun. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan hampir seluruh aset tidak lancar perusahaan.

The Total Non-current Asset in 2020 is Rp13.92 trillion, a 4.13% or Rp552.28 billion increase compared to 2019's 13.37 trillion. It is caused by an overall increase in the Company's non-current asset.

Perkembangan Jumlah Aset Tidak Lancar dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of Total Non-current Asset can be seen in this graph below.

Aset tidak Lancar 2016-2020
Non-current Asset 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

Investasi Entitas Asosiasi

Investasi Entitas Asosiasi adalah investasi pada entitas terasosiasi yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan di mana entitas bertindak sebagai investor: (i) mempunyai pengaruh signifikan; dan sebaliknya (ii) mempunyai pengaruh tidak signifikan.

Associated Entity Investment

Associated Entity Investment is investment on associated entities that are established for uncertain period, in which the entity as the investor: (1) has a significant influence; and oppositely (ii) has no significant influence.

Investasi Entitas Asosiasi tahun 2020 sebesar Rp49,38 miliar, meningkat 0,55% atau setara dengan Rp272 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp49,10 miliar. Kenaikan ini disebabkan peningkatan saldo karena penambahan laba atas kegiatan asosiasi yaitu PT Terminal Petikemas Indonesia dan PT Prima Tangki Indonesia.

Properti Investasi - Bersih

Properti Investasi - Bersih adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk: (a) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa atau untuk tujuan administratif atau (b) dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti Investasi - Bersih tahun 2020 sebesar Rp421,40 miliar, meningkat 1,06% atau setara dengan Rp4,44 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp416,97 miliar. Kenaikan ini disebabkan penambahan aset tanah yang akan dikomersilkan.

Aset Tetap - Bersih

Aset Tetap - Bersih adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset Tetap - Bersih tahun 2020 sebesar Rp6,17 triliun, meningkat 0,91% atau setara dengan Rp55,39 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp6,11 triliun. Kenaikan ini disebabkan penambahan aset atas pekerjaan investasi yang telah selesai dilaksanakan.

Aset Tak Berwujud - Bersih

Aset Tak Berwujud - Bersih adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi, tanpa wujud fisik.

Aset Tak berwujud - Bersih tahun 2020 sebesar Rp6,8 triliun, meningkat 2,32% atau setara dengan Rp153,98 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp6,65 triliun. Kenaikan ini disebabkan adanya penerapan ISAK 16 (Aset Konsesi) yang dicatat sebagai aset tak berwujud atas aset tanah konsesi yang diberikan oleh Pemerintah.

Aset Hak Guna

Aset Hak Guna adalah aset yang mempresentasikan hak penyewa untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa.

Aset Hak Guna baru dicatat sebesar Rp185,91 miliar di tahun 2020 atas penerapan PSAK 73 yang wajib diberlakukan per 1 Januari 2020.

The value of Associated Entity Investment in 2020 is Rp49.38 billion, a 0.55% or Rp272 billion increase compared to 2019's 49.10 billion. It is caused by increase in balance from the increase in profit in the business activities by associated entities, namely PT Terminal Petikemas Indonesia and PT Prima Tangki Indonesia.

Net Investment Property

Net Investment Property refers to properties (land or building or a part of a building or both) that are owned (by an owner or lessee through a financing rent) for yielding rent revenue or for the value increase of both and not for: (a) use in production or provision of goods or services for administrative purposes or (b) sold through daily business activities.

The value of Net Investment Property in 2020 is Rp421.40 billion, a 1.06% or Rp4.44 billion increase compared to 2019's Rp416.97 billion. It is caused by the increase in number of land assets that were commercialized.

Net Fixed Asset

Net Fixed Asset is a tangible asset that is used for production or provision of goods and services, for rental by other party, or for administrative purposes and are expected to be used for more than one period.

The value of Net Fixed Asset in 2020 is Rp6.17 trillion, a 0.91% or Rp55.39 billion increase compared to 2019's Rp6.11 trillion. Such increase is caused by increase in asset on completed investment projects.

Net Intangible Asset

Net Intangible Asset is a non-monetary asset that can be identified, though not in tangible form.

The value of Net Intangible Asset in 2020 is Rp6.8 trillion, a 2.32% or Rp153.98 increase compared to 2019's 6.65 trillion. The increase is caused by the implementation of ISAK 16 (Concession Asset) that is recorded as intangible asset on concession asset granted by the Government.

Use Right Asset

Use Right Asset refers to asset that represents the right to use a principal asset during the term of rental of such asset.

There is only Rp185.91 billion of Use Right Asset that has been recorded in 2020 after the implementation of PSAK 73 which became effective on 1 January 2020.



Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan adalah pajak tangguhan yang digunakan untuk mencatat jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya: (i) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan; (ii) akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi; dan (iii) akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengijinkan.

Aset Pajak Tangguhan tahun 2020 sebesar Rp214,61 miliar, meningkat 118,32% atau setara dengan Rp116,31 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp98,3 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya perhitungan perbedaan temporer atas perhitungan cadangan penurunan nilai piutang (PSAK 71) serta perhitungan imbalan pasca kerja (PSAK 24).

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset Tidak Lancar Lainnya adalah akun yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok akun aset tidak lancar yang ada dan tidak material untuk disajikan tersendiri. Pada umumnya, akun ini digunakan untuk menampung penyajian aset yang dikategorikan usul hapus.

Aset Tidak Lancar Lainnya tahun 2020 sebesar Rp68,78 miliar, meningkat 106,42% atau setara dengan Rp35,46 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp33,32 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya pencatatan penghapusan estimasi kelebihan pembebanan tagihan pajak bumi dan bangunan.

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya adalah akun yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok akun aset tidak lancar yang ada dan tidak material untuk disajikan tersendiri.

Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya tahun 2020 sebesar Rp2,68 miliar, meningkat 23,55% atau setara dengan Rp511 juta dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2,17 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya tambahan setoran uang jaminan atas penambahan daya listrik kepada PT PLN (Persero).

Deferred Tax Asset

Deferred Tax Asset refers to deferred tax that is used for posting total income tax that can be reinstated in the next period as a result of: (i) deductible temporary difference; (ii) accumulation of tax loss that are not compensated; and (iii) accumulation of unused tax credit, to the furthest extent allowed by the tax regulations.

The value of Deferred Tax Asset in 2020 is Rp214.61 billion, a 118.32% or Rp116.31 billion increase compared to 2019's 98.3 billion. The increase is caused by a temporary difference on the calculation of reserve receivables value decrease (PSAK 71) and calculation of post-work compensation (PSAK 24).

Other Non-current Assets

Other Non-current Assets is an account of assets that cannot be classified into existing non-current asset groups, and whose value are not substantial to be presented on its own. In general, this account is used to present assets that are categorized as removable.

The value of Other Non-current Assets in 2020 is Rp68.78 billion, a 106.42% or Rp35.46 billion increase compared to 2019's Rp33.32 billion. Such increase is caused by the removal of over-estimated record of payable land and building tax.

Other Non-current Financial Assets

Other Non-current Financial Assets refer to an account of assets that cannot be classified into the existing non-current assets, and whose value are not substantial enough to be presented on its own.

The value of Other Non-current Financial Assets in 2020 is Rp2.68 billion, a 23.55% or Rp511 million increase compared to 2019's Rp2.17 billion. This increase is caused by the increase in the amount of deposit for electricity power upgrading to PT PLN (Persero).

Liabilitas

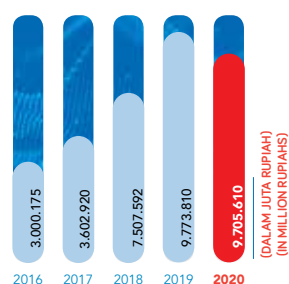
Liabilities

Total Liabilitas Perseroan tahun 2020 mencapai Rp9,70 triliun, mengalami penurunan 0,70% dibandingkan Total Liabilitas tahun 2019 sebesar Rp9,77 triliun.

The Company's Total Liabilities in 2020 reached Rp9.70 trillion, a 0.70% decrease compared to 2019's Rp9.77 trillion.



Total Liabilitas 2016-2020
Total Liabilities 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

Liabilitas Liabilities	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Jangka Pendek Short Term Liabilities	2.193.720	2.414.559	(220.839)	-9,15%
Liabilitas Jangka Panjang Long Term Liabilities	7.511.890	7.359.251	152.638	2,07%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	9.705.610	9.773.810	(68.200)	-0,70%

Jumlah Liabilitas Perseroan dipengaruhi oleh Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Dibandingkan tahun 2019, Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9,15%, sedangkan Liabilitas Jangka Panjang tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,07% sebagaimana diuraikan di bawah ini.

The Company's Total Liability is influenced by Short Term and Long Term Liabilities. Compared to 2019, the value of Short Term Liabilities in 2020 decrease by 9.15%, while Long Term liabilities Increase by 2.07%, as elaborated below.

Liabilitas Jangka Pendek

Short Term Liability

Liabilitas Jangka Pendek Short Term Liability	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Utang Usaha Business debt	798.194	1.890.697	(1.092.503)	-57,78%
Uang Panjar & Uang Titipan Down-Payment and Entrusted Money	30.707	35.678	(4.970)	-13,93%
Beban Akrua Accrued Debts	212.183	126.586	85.597	67,62%
Utang Pajak Tax Debt	73.167	78.534	(5.367)	-6,83%
Utang Lain-lain Other Debts	90.540	5.688	84.852	1.491,90%
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang Current Part of Long Term Liabilities				
Liabilitas Sewa Rent Liability	3.092	-	3.092	100,00%



Liabilitas Jangka Pendek Short Term Liability	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Utang Bank Jangka Panjang Long Term Bank Loan	410.495	214.549	195.946	91,33%
Utang Obligasi Bonds Debt	499.768	-	499.768	100,00%
Pendapatan diterima di muka Prepaid earnings	75.573	62.827	12.746	20,29%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Short Term Liabilities	2.193.720	2.414.559	(220.839)	-9,15%

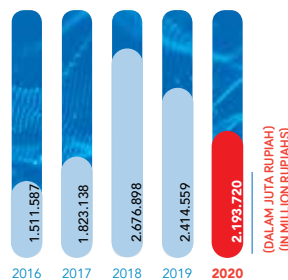
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2020 sebesar Rp2,19 triliun, turun 9,15% atau setara dengan Rp220,84 miliar dibandingkan Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2019 sebesar Rp2,41 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan saldo hutang usaha yang signifikan atas pelunasan tagihan yang sudah jatuh tempo.

Total Short Term Liability in 2020 is Rp2.19 trillion, a 9.15% or Rp220.84 billion decrease compared to 2019's Rp2.41 trillion. The decrease is caused by decrease in significant business debt balance for due bills.

Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Pendek dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of Total Short Term Liabilities can be seen in this graph below.

Liabilitas Jangka Pendek 2016-2020 Short Term Liabilities 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

Utang Usaha

Utang Usaha adalah liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati antara entitas dan pihak lain (*contractual based*) dengan pemasok (*supplier*) dalam rangka kegiatan normal entitas, di mana hak untuk mengendalikan pengelolaan barang dan jasa telah berpindah kepada Perseroan.

Business Debt

Business Debt is liability to pay for goods or services that have been received or supplied and have been billed through an invoice or as contractually agreed by entities and other parties with the suppliers for the normal business conduct of entities, in which the right to control the management of goods and services is transferred to the Company.

Utang Usaha tahun 2020 sebesar Rp798,19 miliar, turun 57,78% atau setara dengan Rp1,09 triliun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,89 triliun. Penurunan ini disebabkan adanya pelunasan saldo utang usaha atas pelunasan tagihan yang sudah jatuh tempo.

The value of Business Debt in 2020 is Rp798.19 billion, a 57.78% or Rp1.09 trillion decrease compared to 2019's Rp1.89 trillion. Such decrease is caused by the payment of business debt balance for due bills.

Uang Panjar dan Uang Titipan

Uang Panjar dan Uang Titipan adalah akun yang digunakan untuk mencatat *down payment* atas jasa yang belum diberikan.

Uang Panjar & Uang Titipan tahun 2020 sebesar Rp30,71 miliar, turun 13,93% atau setara dengan Rp4,97 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp35,68 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya pengurangan saldo uang panjar & uang titipan yang dikompensasikan terhadap jasa yang telah diberikan.

Beban Akruak

Beban Akruak adalah biaya yang telah jatuh tempo atau yang telah diterima manfaatnya oleh perusahaan, tetapi belum diterima penagihannya dan belum dibayar. Termasuk bagian dari biaya yang telah diakru sesuai presentase kemajuan fisiknya pada tanggal akhir periode tahun pelaporan, tetapi biaya secara keseluruhan belum jatuh tempo. Pada umumnya, beban akruak akan diselesaikan dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Beban Akruak tahun 2020 sebesar Rp212,18 miliar, meningkat 67,62% atau setara dengan Rp85,59 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp126,59 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan akruak atas pembebanan yang merupakan biaya tahun 2020.

Utang Pajak

Utang Pajak adalah utang pajak yang berasal dari pemotongan dan pemungutan pajak dari wajib pajak lain yang harus dibayar atau disetor ke kas negara. Sedangkan utang pajak penghasilan terutang merupakan utang pajak penghasilan wajib pajak sendiri, yang dihitung atas penghasilan yang diperolehnya dalam setahun dan harus dibayar setelah memperhitungkan uang muka pajak penghasilan atau kredit pajak.

Utang Pajak tahun 2020 sebesar Rp73,17 miliar, turun 6,83% atau setara dengan Rp5,37 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp78,53 miliar. Penurunan ini disebabkan penurunan pajak terutang atas transaksi yang berdampak terhadap hutang pajak periode Desember 2020 dan akan dibayarkan/dikompensasikan pada periode berikutnya.

Utang Lain-lain

Utang Lain-lain adalah utang kepada pihak ketiga dan berelasi jangka pendek lainnya.

Utang Lain-lain tahun 2020 sebesar Rp90,54 miliar, meningkat 1.491,90% atau setara dengan Rp84,85 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp5,69 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan utang kepada pihak berelasi atas perjanjian fasilitas pinjaman berjangka kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) oleh anak perusahaan PT PMT.

Down Payment and Entrusted Money

Down Payment and Entrusted Money refers to account that is used to record down payment for a service that has not been provided.

The value of Down Payment and Entrusted Money in 2020 is Rp30.71 billion, a 13.93% or Rp4.97 decrease compared to 2019's 35.68 billion. The decrease is caused by the balance decrease of down payment & entrusted money that has been compensated for a service that has been provided.

Accrued Debts

Accrued Debts refer to a debt that is due, or whose benefit has been delivered to the Company, but the collection of which is yet to be performed and as such not yet paid. It includes amount that has been accrued by percentage of physical progress by the due date of a reporting year, though the overall amount of which is not yet due. In general, accrued debts are resolved no later than 3 (three) months.

The Accrued Debts in 2020 are Rp212.18 billion, a 67.62% or Rp85.59 billion increase compared to 2019's Rp126.59 billion. The cause is the accrual increase of debts that are part of 2020's expense.

Tax Debt

Tax Debt refers to tax debt as a result of subtraction and collection of tax from other taxpayer to the state treasury. Meanwhile, income tax debt is a debt for a taxpayer's income tax, calculated by the taxpayers' annual income and must be paid after considering income tax deposit or tax credit.

The Company's tax debt in 2020 is Rp73.17 billion, a 6.83% or Rp5.37 billion decrease compared to 2019's Rp78.53 billion. It is caused by the decrease in tax debt for transactions that impacted the tax debt for December 2020 period, which shall be paid/covered in the following period.

Other Debts

Other Debts are debts to a third party and other short term relations.

The Company's Other Debts in 2020 is Rp90.54 billion, a 1,491.90% or Rp84.85 billion increase compared to 2019's Rp5.69 billion. The increase is caused by increasing debts to a related party for a term loan facility agreement to PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk and PT Waskita Karya (Persero) by subsidiary PT PMT.



Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang

Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang terdiri dari Liabilitas Sewa, Utang Bank Jangka Panjang serta Utang Obligasi.

- **Liabilitas Sewa**
Liabilitas Sewa adalah kewajiban yang timbul akibat dari transaksi suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa yang memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan, ketika penyewa memiliki dua hal berikut ini: (a) hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan (b) hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

Liabilitas Sewa tahun baru dicatat di tahun 2020 sebesar Rp3,09 miliar.

- **Utang Bank Jangka Panjang**
Utang Bank Jangka Panjang adalah utang bank yang jatuh tempo pembayarannya diharapkan terealisasi lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan perjanjian pinjaman setelah dikurangi dengan yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun pada akhir periode pelaporan.

Utang Bank Jangka Panjang tahun 2020 sebesar Rp410,49 miliar, meningkat 91,33% atau setara dengan Rp195,95 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp214,55 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan pinjaman bank kepada Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

- **Utang Obligasi**
Utang Obligasi adalah kewajiban kontraktual kepada pemegang obligasi sehubungan dengan penerbitan obligasi. Biaya emisi obligasi, kecuali obligasi konversi. Merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan wajib dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi tersebut.

Utang Obligasi di tahun 2020 sebesar Rp499,77 miliar yang merupakan kewajiban obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah akun yang digunakan untuk mencatat bagian dari pendapatan diterima di muka/deposit/uang jaminan yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.

Current Part of Long Term Liabilities

Current Part of Long Term Liabilities consist of Rent Liability, Long term bank loan, and Bonds Payable.

- **Rent Liability**
Rent liability is an obligation arising from a contractual transaction that consists of rent that grants a right to control the use of identified asset during a certain period for a compensation, while the rent reserves the following rights: (a) the right to substantially obtain the economic benefit of the use of identified assets and (b) the right to direct the use of identified assets.

The Rent Liability has only been recorded in 2020, with the value of Rp3.09 billion.

- **Long Term Bank Loan**
Long term bank loan refers to bank loan whose due date of payment is expected to realize more than 1 (one) year according to a loan agreement after subtraction of loan that will be due within 1 (one) year by the end of a reporting year period.

The Company's Long Term Bank Loan in 2020 is Rp410.49 billion, a 91.33% or Rp195.95 billion increase compared to 2019's Rp214.55 billion. This increase is caused by the increase in loans made with Bank Mandiri, BRI, and BNI.

- **Bonds Payable**
Bonds Payable is a contractual obligation of a bondholder with regard to the issuance of bonds. Bonds issuance charge, other than convertible bonds, is a transaction charge that shall be directly attributed and deducted from the result of issuance in order to determine the issuance result of the net bonds.

The Company's Bonds Payable in 2020 is Rp499.77 billion, which shall be due in under 1 (one) year.

Prepaid Earnings

Prepaid Earnings refers to an account that is used to record parts of a prepaid earnings/deposit/guarantee that shall be due less than one year or less than 12 months after the end of reporting year.

Pendapatan Diterima di Muka tahun 2020 sebesar Rp75,57 miliar, meningkat 20,29% atau setara dengan Rp12,75 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp62,83 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan jumlah pendapatan persewaan jangka pendek di bawah 1 (satu) tahun.

The Company's Prepaid Earnings in 2020 is Rp75.57 billion, a 20.29% or Rp12.75 billion increase compared to 2019's Rp62.83 billion. This increase is caused by the increase in short term, under 1 (one) year, rent revenue.

Liabilitas Jangka Panjang

Long Term Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang Long Term Liabilities	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Utang Bank Jangka Panjang Long Term Bank Loan	6.149.255	5.751.018	398.237	6,92%
Utang Obligasi Bonds Payable	449.208	948.223	(499.015)	-52,63%
Liabilitas Sewa Rent Liability	174.120	-	174.120	100,00%
Liabilitas Imbalan Kerja Work Compensation Liability	431.080	395.257	35.823	9,06%
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liability	16	-	16	100,00%
Pendapatan Diterima di Muka Prepaid Earnings	211.116	234.343	(23.226)	-9,91%
Provisi Provision	97.094	30.411	66.683	219,28%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Long Term Liabilities	7.511.890	7.359.251	152.638	2,07%

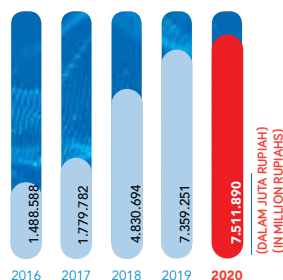
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2020 sebesar Rp7,51 triliun, meningkat 2,07% atau setara dengan Rp152,64 miliar dibandingkan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2019 sebesar Rp7,36 triliun. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan utang bank jangka panjang.

The Company's Total Long Term Liabilities in 2020 is Rp7.51 trillion, a 2.07% or Rp152.64 billion increase compared to 2019's Rp7.36 trillion. The increase is caused the increase in long term bank loans.

Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of Total Long Term Liabilities can be seen in this graph below.

Liabilitas Jangka panjang 2016-2020 Long Term Liabilities 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification



Utang Bank Jangka Panjang

Utang Bank Jangka Panjang adalah utang bank yang jatuh tempo pembayarannya diharapkan terealisasi lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan perjanjian pinjaman setelah dikurangi dengan yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun pada akhir periode pelaporan.

Utang Bank Jangka Panjang tahun 2020 sebesar Rp6,15 triliun, meningkat 6,92% atau setara dengan Rp398,24 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp5,75 triliun. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan pinjaman bank kepada Bank Mandiri, BRI dan BNI.

Utang Obligasi

Utang Obligasi adalah kewajiban kontraktual kepada pemegang obligasi sehubungan dengan penerbitan obligasi. Biaya emisi obligasi, kecuali obligasi konversi. Merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan wajib dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi tersebut.

Utang Obligasi tahun 2020 sebesar Rp449,21 miliar, turun 52,63% atau setara dengan Rp499,01 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp948,22 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya reklasifikasi dari utang obligasi jangka panjang menjadi jangka pendek atas kewajiban yang telah jatuh tempo.

Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa adalah kewajiban yang timbul akibat dari transaksi suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa yang memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan, ketika penyewa memiliki dua hal berikut ini: (1) hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian dan (2) hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

Liabilitas Sewa baru dicatat di tahun 2020 sebesar Rp174,12 miliar atas penerapan PSAK 73 yang berlaku per 1 Januari 2020.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja adalah imbalan kerja (selain dari pesangon pemutusan kontrak kerja) yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya.

Liabilitas Imbalan Kerja tahun 2020 sebesar Rp431,08 miliar, meningkat 9,06% atau setara dengan Rp35,82 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp395,26 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan kewajiban imbalan kerja terutang perusahaan terhadap imbalan kerja pegawai hasil dari perhitungan aktuarial.

Long Term Bank Loans

Long Term Bank Loan refers to a bank loan whose due date is expected to realize more than 1 (one) year according to the loan agreement after subtraction with loans that are within 1 (one) year to the end of reporting year.

The Company's Long Term Bank Loans in 2020 is Rp6.15 trillion, a 6.92% or Rp398.24 billion increase compared to 2019's Rp5.75 trillion. The increase is caused by increased loans made with Bank Mandiri, BRI and BNI

Bonds Payable

Bonds Payable refers to the contractual obligation of a bondholder with regard to issuance of bonds. Bonds issuance charge, other than for convertible bonds, are transaction charges that shall be directly attributed with the issuance and shall be deducted from the result of issuance in order to determine the issuance result of the net bonds.

The Company's Bonds Payable in 2020 is Rp449.21 billion, a 52.63% or Rp499.01 billion decrease compared to 2019's Rp948.22 billion. The decrease is caused by reclassification of long term bonds payable into due short term obligations.

Rent Liability

Rent Liability refers to an obligation arising from a contractual obligation constitutes a rent that grants the right to control the use of identified asset for a certain period to be compensated, while the rent shall reserve the following rights: (1) right to substantially obtain the whole economic benefit from the use of identified asset and (2) right to direct the use of identified asset.

Rent Liability has only been recorded in 2020, with the value of Rp174.12 billion for the implementation of PSAK 73 that became effective as of 1 January 2020.

Work Compensation Liability

Work Compensation Liability is a work compensation (other than severance package) that is due more than 1 (one) year after the end of reporting year when the worker provides a service.

The Company's Work Compensation Liability is Rp431.08 billion, a 9.06% or Rp35.82 billion increase compared to 2019's Rp395.26 billion. This increase is due to the increase in work compensation liability of owed by the Company to the wages of workers, based on actuarial calculation.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dikecualikan atas perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi bukan kombinasi bisnis dan transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak.

Liabilitas Pajak Tangguhan tercatat tahun 2020 sebesar Rp16,14 juta yaitu atas pengakuan liabilitas pajak tangguhan dari PT PTP.

Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah akun yang digunakan untuk mencatat bagian dari pendapatan diterima di muka/ deposit/uang jaminan yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah akhir periode pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka tahun 2020 sebesar Rp211,12 miliar, turun 9,91% atau setara dengan Rp23,23 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp234,34 miliar. Penurunan ini disebabkan adanya reklasifikasi pendapatan diterima di muka jangka panjang menjadi jangka pendek atas pendapatan yang 1 (satu) tahun setelah akhir periode pelaporan.

Provisi

Provisi adalah pengakuan beban yang jumlahnya dapat diestimasi.

Provisi tahun 2020 sebesar Rp97,09 miliar, meningkat 219,28% atau setara dengan Rp66,68 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp30,41 miliar. Kenaikan ini disebabkan akumulasi penambahan provisi *maintenance* atas penerapan ISAK 16 (Aset Konsesi) dan pengerukan alur/kolam pelabuhan yang terjadwal.

Deferred Tax Liability

Deferred Tax Liability is the sum of payable income tax in a future period as a result of taxpayer temporary difference. Deferred tax liability is annulled from taxpayer temporary difference that arises out of goodwill or early asset or liability declaration from non-business combination transaction or transaction that does not affect the accounting profit or taxable profit.

The Company's Deferred Tax Liability in 2020 is Rp16.14 million, which arises from a liability declaration of deferred tax of PT PTP.

Prepaid Earnings

Prepaid Earnings is an account used to record parts of prepaid earnings/deposit/guarantee that shall be due more than 1 (one) year after the end of reporting year.

The Company's Prepaid Earnings in 2020 is Rp211.12 billion, a 9.91% or Rp23.23 billion decrease compared to 2019's Rp234.34 billion. The decrease is caused by a reclassification of long term prepaid earnings into short term prepaid earnings for earnings that shall be due 1 (one) year after the end of reporting year.

Provision

Provision refers to liability whose value can be estimated.

The Company's Provision in 2020 is Rp97.09 billion, a 219.28% or Rp66.68 billion increase compared to 2019's Rp30.41 billion. The increase is caused by the addition of maintenance provisions for implementation of ISAK 16 (Concession Asset) and regular dredging of port channel/basin.



EKUITAS

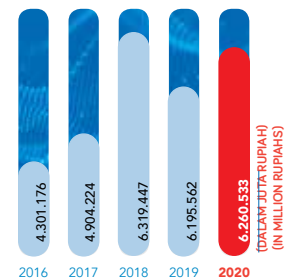
EQUITY

Total Ekuitas Perseroan tahun 2020 mencapai Rp6,26 triliun, mengalami peningkatan 1,05% dibandingkan Total Ekuitas tahun 2019 sebesar Rp6,19 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2016-2020*, Total Ekuitas mengalami pertumbuhan 9,84%.

The Company's Total Equity in 2020 reached Rp6.26 trillion, a 1.05% increase compared to 2019's Rp6.19 trillion. For the Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2016-2020, Total Equity grew by 9.84%.



Total Ekuitas 2016-2020
Total Equity 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

Ekuitas Equity	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Attributable Equity to Parent Entity Owner				
Modal Saham Share Capital	1.700.000	1.700.000	-	0,00%
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-up Capital	527.133	527.133	-	0,00%
Saldo Laba: Profit Balance:				
Ditentukan Penggunaannya Use Determined	3.133.238	2.964.203	169.035	5,70%
Belum Ditentukan Penggunaannya Use Non-Determined	309.298	285.263	24.035	8,43%
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja Post-Work Compensation Reassessment	(221.735)	(219.826)	(1.909)	0,87%
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Total Attributable Equity to Parent Entity Owner	5.447.935	5.256.774	191.161	3,64%
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali Attributable Equity to Non-controlling Interest	812.598	938.788	(126.191)	-13,44%
Jumlah Ekuitas Total Equity	6.260.533	6.195.562	64.971	1,05%

Dibandingkan tahun 2019, Jumlah Ekuitas tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,05% yang terutama disebabkan peningkatan saldo laba Perseroan.

Compared to 2019, there is an increase in Total Equity in 2020 of 1.05%, mostly caused by the increase in the Company's profit balance.

Modal Saham

Modal Saham adalah hak pemilik atas aset entitas yang merupakan kekayaan bersih yang terdiri dari modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh.

Share Capital

Share Capital refers to the owner's right of entity's asset that constitutes a net property that consists of authorized capital and paid-up capital and are paid in full.

Modal Saham tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp1,7 triliun. Tidak terdapat perubahan Modal Saham di sepanjang tahun 2020.

The Company's Share Capital in 2019 and 2020 are Rp1.7 trillion. There is no change to the value of Share Capital throughout 2020.

Tambahan Modal Disetor

Tambahan Modal Disetor adalah tambahan setoran modal yang terdiri dari agio saham, selisih modal dari transaksi saham treasury, selisih kurs atas modal disetor, selisih nilai transaksi dengan entitas sependengali, tambahan modal disetor - tax amnesty dan tambahan modal disetor lainnya.

Tambahan Modal Disetor tahun 2020 sebesar Rp527,13 miliar. Tidak terdapat perubahan Tambahan Modal Disetor di sepanjang tahun 2020 yang sebelumnya merupakan ekuitas yang berasal dari aset Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).

Saldo Laba

Saldo Laba terdiri dari Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya, serta Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya.

- Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya
Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya adalah akumulasi saldo cadangan sampai dengan tahun 2020.

Saldo Laba yang Ditentukan Penggunaannya tahun 2020 sebesar Rp3,13 triliun, meningkat 5,70% atau setara dengan Rp169,04 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2,96 triliun. Kenaikan ini disebabkan adanya penyesuaian saldo cadangan atas restatement laporan tahun 2019 dan 2018.

- Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya
Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya adalah saldo laba tahun berjalan yang belum ditentukan penggunaannya hingga adanya keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya tahun 2020 sebesar Rp309,29 miliar, meningkat 8,43% atau setara dengan Rp24,04 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp285,26 miliar. Kenaikan ini disebabkan penambahan saldo laba tahun 2020.

Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja

Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja adalah penyesuaian akibat perubahan asumsi aktuarial atas Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP). NKKIP yang diakui adalah berdasarkan asumsi aktuarial terkini sehingga apabila nilai tercatat NKKIP menurut pemberi kerja lebih rendah, maka NKKIP harus dinaikkan menjadi nilai berdasarkan asumsi aktuarial terkini. Peningkatan NKKIP tersebut menimbulkan kerugian aktuarial. Sebaliknya jika nilai tercatat NKKIP menurut pemberi kerja lebih tinggi dari pada nilai berdasarkan asumsi aktuarial terkini, maka terjadi penurunan NKKIP sehingga menimbulkan keuntungan aktuarial.

Additional Paid-up Capital

Additional Paid-up Capital refers to the addition to a paid-up capital that consists of paid-in capital, capital difference from a treasury capital transaction, exchange rate difference of paid-up capital, difference in transaction value with a single-controlled entities, additional paid-up capital – tax amnesty, and other additional paid-up capitals.

The Company's Additional Paid-up Capital in 2020 is Rp527.13 billion. There is no change to the Additional Paid-up Capital throughout 2020, which was originally an asset given by the government, whose status is yet to be determined (BPYBDS).

Profit Balance

Profit Balance consists of Use Determined Profit Balance, and Use Non-determined Profit Balance.

- Use Determined Profit Balance
Use Determined Profit Balance refers to the accumulation of reserve balance up to 2020.

The Company's Use Determined Profit Balance in 2020 is Rp3.13 trillion, a 5.70% or Rp169.04 billion increase compared to 2019's Rp2.96 trillion. The increase is caused by an adjustment of reserve balance for the restatement of 2019 and 2018 reports.

- Use Non-determined Profit Balance
Use Non-determined Profit Balance refers to ongoing year profit balance whose use is yet to be determined until there is a decision by the General Meeting of Shareholders (GMS).

The Company's Non-determined Profit Balance in 2020 is around Rp309.29 billion, a 8.43% or Rp24.04 billion increase compared to 2019's Rp285.26 billion. The increase is caused by an increase in profit balance in 2020.

Post-work Compensation Reassessment

Post-work Compensation Reassessment is an adjustment to actuarial assumption of Present Value of Fixed Compensation Obligation (NKKIP). NKKIP that is recognized under current actuarial assumption. As such, if the value of recorded NKKIP is considered lower by an employer, the NKKIP must be increased to a value based on present actuarial assumption. Such increase in NKKIP shall incur an actuarial loss. On the other hand, if the recorded NKKIP of the employer is higher than present actuarial assumption, it can be reduced so to yield an actuarial profit.



Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja tahun 2020 sebesar Rp221,73 miliar, meningkat 0,87% atau setara dengan Rp1,91 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp219,83 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan atas kewajiban imbalan pasca kerja Perseroan kepada pegawai hasil dari perhitungan aktuaria.

Value of Reassessment of Post-work Compensation in 2020 is Rp221.73 billion, a 0.87% or Rp1.91 billion increase compared to 2019's Rp219.83 billion. This increase is caused by increase in post-work compensation obligation of the Company to its employees, based on actuarial calculation.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali

Attributable Equity to Non-Controlling Interest

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali adalah total ekuitas yang dimiliki Kepentingan Non-Pengendali yaitu pemilik selain induk yang muncul akibat adanya laporan keuangan konsolidasi.

Attributable Equity to Non-Controlling Interest is the total equity owned by Non-controlling Interest, which owner other than the parent entity, arising due to consolidated financial statement.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali tahun 2020 sebesar Rp812,59 miliar, turun 13,44% atau setara dengan Rp126,19 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp938,79 miliar. Penurunan ini disebabkan pengakuan rugi atas penyertaan saham minoritas pada entitas anak.

The Company's Attributable Equity to Non-Controlling Interest in 2020 is Rp812.59 billion, a 13.44% or Rp126.19 billion compared to 2019's Rp938.79 billion. The decrease is caused by inclusion of minority shares on subsidiary entities.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

PROFIT-LOSS AND OTHER CONSOLIDATED COMPREHENSIVE REVENUE REPORT



Menghadapi situasi tahun 2020 yang penuh ketidakpastian, Perseroan mampu menjaga profitabilitasnya dan mencatat laba bersih sebesar Rp183,12 miliar.

“Facing the uncertain 2020, the Company managed to maintain its profitability and posted a net profit of Rp183.12 billion.”

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Operasi Operational Revenue	3.083.847	3.104.233	(20.386)	-0,66%
Reduksi Pendapatan Revenue Reduction	(81)	(187)	106	-56,87%
Pendapatan Bersih Net Revenue	3.083.766	3.104.046	(20.280)	-0,65%
Pendapatan Konstruksi Construction Revenue	758.144	2.535.336	(1.777.193)	-70,10%
Beban Operasi Operational Expense	(2.407.778)	(2.505.837)	98.059	-3,91%
Beban Konstruksi Construction Expense	(758.144)	(2.535.336)	1.777.193	-70,10%

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Laba Usaha Business Profit	675.988	598.209	77.779	13,00%
Pendapatan (Beban) Non-Usaha – Bersih Net Non-business Revenue (Expense)	10.623	(29.984)	40.607	(135,43%)
Rugi Penjualan Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-current Asset Sale Loss	(2.870)	(1.242)	(1.628)	131,12%
Pendapatan Keuangan Financial Revenue	54.805	83.524	(28.720)	-34,38%
Beban Keuangan Financial Expense	(526.995)	(361.774)	(165.222)	45,67%
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Associated Entities Profit (Loss) Part	272	(757)	1.029	-135,93%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax Deduction	211.823	287.978	(76.155)	-26,44%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(28.702)	(81.801)	53.099	-64,91%
Laba Tahun Berjalan Ongoing Year Profit	183.120	206.176	(23.056)	-11,18%
Penghasilan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Revenue				
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Posts That Shall Not be Reclassified into Profit Loss				
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Fixed Compensation Program Reassessment	(2.373)	(84.263)	81.890	-97,18%
Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax	460	21.061	(20.601)	-97,82%
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak Other Ongoing Comprehensive Revenue – After Tax Deduction	(1.914)	(63.202)	61.288	-96,97%
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Ongoing Year Comprehensive Profit	181.207	142.974	38.232	26,74%
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada: Ongoing Year Profit That Is Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	309.298	285.263	24.035	8,43%
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interest	(126.178)	(79.087)	(47.091)	59,54%
	183.120	206.176	(23.056)	-11,18%
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada: Total Ongoing Year Comprehensive Profit That Is Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	307.389	222.070	85.319	38,42%
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interest	(126.183)	(79.096)	(47.087)	59,53%
	181.207	142.974	38.232	26,74%
Laba Per Saham Dasar (Rupiah) Profit per authorized share	181.940	167.802	14.138	8,43%



Pendapatan Operasi

Seperti yang telah diuraikan pada bagian Tinjauan Operasi per Segmen Usaha, Pendapatan Perseroan diperoleh dari 3 (tiga) segmen berdasarkan jenis bisnis, yaitu segmen Petikemas, segmen Kepelabuhanan dan segmen Lainnya. Di samping itu, Perseroan juga menyajikan rincian pendapatan usaha sebagai berikut.

Operational Revenue

As elaborated in the Overview of Operation per Business Segment, there are 3 (three) main segments that serve as the Company's source of revenue: Container segment, Port segment and Other segments. Furthermore, the Company also details its business revenue as follows.

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Bruto: Gross Revenue:				
Pendapatan Pelayanan Petikemas Container Service Revenue	1.478.312	1.449.964	28.349	1,96%
Pendapatan Pelayanan Barang Non-Petikemas Non-container Service Revenue	412.241	436.106	(23.865)	-5,47%
Pendapatan Pelayanan Kapal Ship Service Revenue	359.682	382.650	(22.968)	-6,00%
Pendapatan Pelabuhan Tersus/Pelsus/Dersus/Terminal UKS Port Revenue Special Terminal/Special Voyage/Special Wharf/Private Interest Terminal	407.679	313.720	93.959	29,95%
Pendapatan Sewa Lahan & Bangunan/Bagian Bangunan (PI) Land and Building/Part of Building Rent & Revenue (PI)	131.936	146.633	(14.697)	-10,02%
Pendapatan Pelayanan Logistik/Konsolidasi & Distribusi Barang Logistics/Consolidation & Distribution Service Revenue	60.193	67.072	(6.879)	-10,26%
Pendapatan Sewa Aset, Peralatan & Ruang (Non-PI) Asset, Equipment, and Room Rent (Non-PI)	49.603	44.081	5.522	12,53%
Pendapatan Jasa Listrik/Power Plant dan Air Electricity Service/Power Plant and Water Revenue	52.957	44.050	8.907	20,22%
Pendapatan Jasa Kesehatan (Poliklinik & RS) Health Service Revenue (Polyclinic and Hospital)	30.513	58.929	(28.416)	-48,22%
Pendapatan Pelayaran/Marine Service Marine Service/Voyage Revenue	4.830	3.996	834	20,88%
Pendapatan Galangan Kapal Shipyards Revenue	938	633	306	48,31%
Pendapatan Lain-lain Other Revenues	94.882	156.213	(61.331)	-39,26%
Sub Jumlah Sub-total	3.083.766	3.104.046	(20.280)	-0,65%
Reduksi Pendapatan: Revenue reduction:				
Pendapatan Pelayanan Kapal Ship Service Revenue	42	169	(127)	-75,01%
Pendapatan Pelabuhan Tersus/Pelsus/ Dersus/Terminal UKS Port Revenue Special Terminal/ Special Wharf/Private Interest Terminal	31	18	14	76,52%
Pendapatan Usaha Rupa-rupa Miscellaneous Business Revenue	7	-	7	100,00%
Sub Jumlah Sub-total	81	187	(106)	-56,87%
Jumlah Pendapatan Operasi Total Operational Revenue	3.083.766	3.104.046	(20.280)	-0,65%

Pendapatan operasi Perseroan di tahun 2020 sebesar Rp3,08 triliun, mengalami penurunan 0,65% atau setara dengan Rp20,28 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3,10 triliun. Berikut disampaikan kinerja pendapatan operasi Perseroan.

Pendapatan Pelayanan Petikemas

Pendapatan Pelayanan Petikemas mengalami kenaikan 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan kunjungan kapal petikemas beserta *throughput* petikemas di cabang TPK Belawan, Pekanbaru, dan PT PMT. Selain itu manajemen juga memberikan program relaksasi penumpukan kepada pengguna jasa di cabang TPK Belawan sebagai wujud kepedulian terkait dampak pandemi COVID-19.

Pendapatan Pelayanan Barang Non-Petikemas

Pendapatan Pelayanan Barang Non-Petikemas mengalami penurunan 5,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Berkurangnya jumlah kunjungan kapal menyebabkan kegiatan B/M pelayanan barang juga mengalami penurunan yang signifikan. Pembatasan sosial berskala besar dan kebijakan *lockdown* di beberapa negara membuat ekspor CPO terkoreksi turun. Selain itu akibat iklim ekonomi yang belum kondusif menyebabkan ketidakstabilan pasar pada harga komoditas dunia seperti batubara dan bijih besi. Hal ini dapat terlihat dari penurunan pendapatan B/M curah cair dan *general cargo* pada cabang pelabuhan Belawan, Dumai, Tanjung Balai Karimun, Lhokseumawe, Tembilahan, dan Gunungsitoli.

Pendapatan Pelayanan Kapal

Pendapatan Pelayanan Kapal mengalami penurunan 6,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di awal Maret sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah kunjungan kapal-kapal, baik domestik dan internasional. Kebijakan *lockdown* di beberapa negara juga menjadi penyebab turunnya trafik kapal untuk kegiatan ekspor/impor. Hal ini terlihat dari penurunan kunjungan kapal hingga 14,56%, dari 61.723 *call* di tahun 2019 menjadi 52.737 *call* di tahun 2020 mengindikasikan bahwa pelabuhan sebagai pintu gerbang perekonomian merupakan sektor yang terdampak langsung terhadap lesunya ekonomi global dan lokal akibat pandemi COVID-19.

Pendapatan Pelabuhan Tersus/Pelus/Dersus/Terminal UKS

Pendapatan Pelabuhan Tersus/Pelus/Dersus/Terminal UKS mengalami kenaikan 29,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan aktivitas di Lubuk Gaung di mana terdapat kerja sama antara cabang Dumai dengan pihak ketiga dengan mekanisme *sharing* pendapatan pemanduan. Penambahan kegiatan *shifting* kapal di dermaga TUKS juga menambah pendapatan di cabang Pekanbaru.

The Company's operational revenue in 2020 is Rp3.08 trillion, a 0.65% or Rp20.28 billion decrease compared to 2019's Rp3.10 trillion. Here are the details about the Company's revenue performance.

Container Service Revenue

Container Service Revenue increased by 1.96% compared to the previous year. This increase was due to the increase in container ship visits along with container throughput in Belawan and Pekanbaru Container Terminal branches as well as PT PMT. Besides, the management also applied a pile relaxation program to customers at Belawan Container Terminal branch as a form of sympathy concerning the impact of the COVID-19 pandemic.

Non-Container Service Revenue

Revenue from Non-Container Services has decreased by 5.47% compared to the previous year. The reduced number of ship visits caused B/M activities for cargo services also had a significant decrease. Large-scale social restrictions and lockdown policies in several countries caused CPO exports to be corrected downward. In addition, the unstable economic climate has led to market instability in world commodity prices, such as coal and iron ore. This can be seen from the decline in B/M revenue from liquid bulk and general cargo at the port branches of Belawan, Dumai, Tanjung Balai Karimun, Lhokseumawe, Tembilahan, and Gunungsitoli.

Ship Service Revenues

Ship Service Revenue decreased by 6.00% compared to the previous year. This decrease was due to the impact of the COVID-19 pandemic that occurred in early March to the fourth quarter of 2020, which had a significant impact on the decrease in the number of both domestic and international ship visits. Lockdown policy in several countries has also been the cause of the decline in ship traffic for export/import activities. This can be seen from the decline in ship visits by up to 14.56%, from 61,723 calls in 2019 to 52,737 calls in 2020, indicating that port as the gateway to the economy is a sector that is heavily impacted by the slowdown of global and local economy due to the COVID-19 pandemic.

Revenue of Special Terminal/ Special Wharf/Private Interest Terminal.

Revenue of Special Terminal/Special Wharf/Private Interest Terminal has increased by 29.95% compared to the previous year. This increase was due to an increase in activity in Lubuk Gaung where there was cooperation between the Dumai branch and third parties with a guiding revenue sharing mechanism. The addition of ship shifting activities at the TUKS wharf also increased the revenue at Pekanbaru branch. In addition, the



Selain itu peningkatan kunjungan kapal di area Tersus/TUKS (khususnya granit, galangan, dan *oiltanking*) di Tanjung Balai Karimun terdampak dari kebijakan *lockdown* di pelabuhan Singapura dan Malaysia sehingga menjadikan pelabuhan TBK menjadi destinasi tujuan kapal-kapal yang selama ini bersandar di pelabuhan tersebut.

Pendapatan Sewa Lahan & Bangunan/Bagian Bangunan (Properti Investasi/PI)

Pendapatan Sewa Lahan & Bangunan/Bagian Bangunan (PI) mengalami penurunan 10,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa kontrak yang masih dalam proses perpanjangan, misalnya di Cabang Belawan, Pekanbaru, dan Malahayati. Selain itu, terdapat beberapa tenants yang tidak melanjutkan kontrak/pemberhentian kerjasama sewa, salah satunya imbas pandemi COVID-19.

Pendapatan Pelayanan Logistik/Konsolidasi & Distribusi Barang

Pendapatan Pelayanan Logistik/Konsolidasi & Distribusi Barang mengalami penurunan 10,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan ini didapatkan dari kegiatan usaha entitas anak, PT PIL. Penurunan pendapatan pelayanan logistik/konsolidasi & distribusi barang disebabkan beberapa hal, yaitu:

- Adanya kebijakan Perseroan sebagai entitas induk untuk mengalihkan kegiatan bongkar muat kontainer dari Ujung Baru Belawan ke Cabang TPK Belawan sehingga berdampak menurunnya pendapatan dari bongkar muat kontainer dengan PT Meratus yang selama ini sudah dilakukan secara *full handling*.
- Berakhirnya kerja sama pemanfaatan lahan dengan PT Cita Jaya Belawan.
- Penurunan produksi kegiatan pengguna jasa di PT PIL.
- Belum semua kontrak kerja perawatan alat pada PT PMP terealisasi di tahun 2020.

Pendapatan Sewa Aset, Peralatan, dan Ruang (Non-Properti Investasi/PI)

Pendapatan Sewa Aset, Peralatan & Ruang (Non-PI) mengalami kenaikan 12,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya pendapatan sewa alat angkat di cabang Belawan serta adanya penerimaan sewa alat UBM di Tanjungpinang.

Pendapatan Jasa Listrik/Power Plant dan Air

Pendapatan Jasa Listrik/Power Plant dan Air mengalami kenaikan 20,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan Kenaikan ini disebabkan adanya realisasi pendapatan pendapatan dari entitas anak, PT PPK dan PT PMT.

increase in ship visits in the Special/Private Interest Terminal area (especially granite, shipyard, and *oiltanking*) in Tanjung Balai Karimun was affected by the lockdown policy on the ports of Singapore and Malaysia so that TBK port became the destination for ships that had relied leaning on those ports.

Land & Building/Part of Building Lease Revenue (Investment Property/PI)

Revenue from Land & Building/Part Of Building (PI) Lease decreased by 10.02% compared to the previous year. This decrease was due to a number contracts still being in extension process, such as at Belawan, Pekanbaru, and Malahayati branches. In addition to that, a number of tenants did not extend the contract or decided to terminate the lease agreement, in which one of the reasons was the COVID-19 pandemic impact.

Cargo Logistics/Consolidation & Distribution Service Revenue

Revenue for Cargo Logistics/Consolidation & Distribution has decreased by 10.26% compared to the previous year. This revenue is generated from business activities of our subsidiary, PT PIL. The decrease in revenue from cargo logistics/consolidation & distribution service was caused by several factors, namely:

- There is a policy of the Company as the parent entity to divert container loading and unloading activities from Ujung Baru Belawan to Belawan TPK Branch, which led to decreasing revenue from loading and unloading containers with PT Meratus, which so far has been carried out as full handling.
- End of land use cooperation with PT Cita Jaya Belawan.
- Decreased production of service user activities at PT PIL.
- Not all equipment maintenance work contracts at PT PMP have been realized in 2020.

Asset, Equipment, and Room Lease Revenue (Non-Investment Property/PI)

Lease revenue for Assets, Equipment & Space (Non-PI) increased by 12.53% compared to the previous year. This increase was due to the increase in income from lifting equipment rental at the Belawan branch and revenue from loading and unloading business (UBM) equipment rental in Tanjungpinang.

Electricity/Power Plant and Water Service Revenue

Revenue from Electricity/Power Plant and Water Services has increased by 20.22% compared to the previous year. This increase was due to the realization of incomes from subsidiary entities, namely PT PPK and PT PMT.

Pendapatan Jasa Kesehatan (Poliklinik & RS)

Pendapatan Jasa Kesehatan (Poliklinik & RS) mengalami penurunan 48,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan adanya koreksi pendapatan pelayanan farmasi, klinik, dan jasa kesehatan lainnya sebesar Rp21.297.856.980.

Pendapatan Pelayaran/Marine Service

Pendapatan Pelayaran/Marine Service mengalami kenaikan 20,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan tunda kawal sejak bulan Juli 2020 di Cabang Tembilihan dan kegiatan STS (*Ship to Ship*) di Cabang Tanjung Balai Karimun.

Pendapatan Galangan (Dock) Kapal

Pendapatan Galangan (*Dock*) Kapal mengalami kenaikan 48,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya sewa sarana galangan khususnya di bulan Desember 2020.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain mengalami penurunan 39,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan penurunan arus penumpang yang signifikan dikarenakan adanya kebijakan sosial dan *physical distancing* untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan penumpang dalam dan luar negeri sehingga pendapatan pas penumpang dan terminal menurun drastis di cabang Belawan, Dumai, Tanjungpinang, Sibolga, Tembilihan, dan Tanjung Balai Karimun.

Health Service Revenue (Polyclinic & Hospital)

Revenue from Health Services (Polyclinic & Hospital) has decreased by 48.22% compared to the previous year. This decrease was due to a correction in revenue from pharmacy services, clinics, and other health services amounting to Rp21,297,856,980.

Voyage/Marine Service Revenue

Revenue from Voyage/Marine Service increased by 20.88% compared to the previous year. This increase was due to the increase in towage and pilotage since July 2020 at Tembilihan Branch and STS (*Ship to Ship*) activities at Tanjung Balai Karimun Branch.

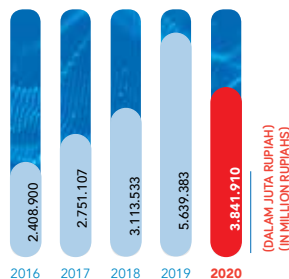
Shipyards Revenue

Shipyards Revenue has increased by 48.31% compared to the previous year. This increase was due to an increase in shipyard facility rent, especially in December 2020.

Other revenues

Other revenues decreased by 39.26% compared to the previous year. This decrease was caused by a significant decrease in passenger traffic due to social and physical distancing policies to break the chain of COVID-19 transmission, which limited the movement of domestic and foreign passengers, causing revenues from passengers and terminals to drastically decrease at Belawan, Dumai, Tanjungpinang, Sibolga, Tembilihan, and Tanjung Balai Karimun branches.

Perkembangan Jumlah Pendapatan Usaha 2016-2020 Development of Total Business Revenue 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

Beban Operasi

Rincian Beban Pokok dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Operational Expense

The details of operational expense can be seen in this table below.



	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and Amortisement	567.779	432.160	135.619	31,38%
Kerja Sama Mitra Usaha Business Partner Cooperation	564.506	627.460	(62.954)	-10,03%
Pegawai Employees	525.595	614.101	(88.506)	-14,41%
Bahan Bakar dan Bahan Habis Pakai Fuel and Consumables	183.276	184.189	(913)	-0,50%
Pemeliharaan Maintenance	153.157	144.003	9.154	6,36%
Umum General	117.812	157.403	(39.591)	-25,15%
Asuransi Insurance	67.441	49.077	18.364	37,42%
Administrasi Kantor Office Administration	61.948	128.935	(66.987)	-51,95%
Penyisihan Penurunan Nilai Allocation of Devaluation	40.289	12.606	27.683	219,60%
Beban Pajak & Retribusi Tax & Retribution	42.234	66.905	(24.671)	-36,88%
Lain-lain (di bawah Rp3 miliar) Others (under Rp3 billion)	83.741	88.999	(5.257)	-5,91%
Jumlah Beban Operasi Total Operational Expense	2.407.778	2.505.837	(98.059)	-3,91%

Beban operasi tahun 2020 sebesar Rp2,41 triliun, turun 3,91% atau setara dengan Rp98,06 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2,51 triliun. Rincian beban operasi adalah sebagai berikut:

Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami kenaikan 31,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan aset tetap di tahun 2020 serta pencatatan beban penyusutan atas penambahan aset tetap di tahun 2019 yang telah dicatat 12 bulan penuh di tahun 2020.

Kerja Sama Mitra Usaha

Beban Kerja Sama Mitra Usaha mengalami penurunan 31,38% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pegawai

Beban Pegawai mengalami penurunan 14,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan lebih rendahnya beban tunjangan kinerja dan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang dipengaruhi oleh penurunan pendapatan cabang. Selain itu kebijakan peleburan cabang TPKDB dan BICT menjadi TPK Belawan yang mempengaruhi jumlah pegawai struktural pada cabang tersebut serta penyesuaian kelas jabatan dan jumlah remunerasi pegawai yang diperbantukan pada entitas anak juga mempengaruhi penurunan beban pegawai.

The Company's operational expense in 2020 is Rp2.41 trillion, a 3.91% or Rp98.06 billion decrease compared to 2019's Rp2.51 trillion. The details of operating expenses are as follows:

Depreciation and Amortization

Depreciation and Amortization expense has increased by 31.38% compared to the previous year. This increase was due to fixed assets addition in 2020 and the recording of depreciation expense for fixed assets addition in 2019 which had been recorded for 12 full months in 2020.

Business Partner Cooperation

The expense for Cooperation For Business Partners has decreased by 31.38% compared to the previous year.

Employees

Employees expense has decreased by 14.41% compared to the previous year. This decrease was due to lower benefit expense and income tax benefit under Article 21, which was influenced by lower branch revenue. In addition, the policy of merging TPKDB and BICT branches into TPK Belawan has affected the number of structural employees at these branches as well as adjustments to the class of positions and amount of remuneration for employees seconded to subsidiaries also affected the reduction in employee expenses.

Bahan Bakar dan Bahan Habis Pakai

Beban Bahan Bakar dan Bahan Habis Pakai mengalami penurunan 0,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan berpengaruh besar terhadap rendahnya beban bahan pokok operasional seperti BBM dan pelumas pada kapal dan alat-alat fasilitas pelabuhan yang mendukung aktivitas operasional.

Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan mengalami kenaikan 6,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan yang signifikan dalam pemeliharaan peralatan MSE tahun 2019-2020, *support* dan *maintenance* aplikasi *master care* dan adanya *renewal* ATS 2020.

Umum

Beban Umum mengalami penurunan 25,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pembayaran bonus pegawai di tahun 2020 sejalan dengan tidak tercapainya target laba tahun 2019.

Asuransi

Beban Asuransi mengalami kenaikan 37,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan pembayaran premi asuransi atas penambahan aset baru seperti Kapal Pandu PKC Sriwijaya, Kapal Pandu Hang Tuah, dan *Mobile Crane* di Cabang Belawan; Kapal Tunda Hang Tuah VI di Cabang Tanjung Balai Karimun, dan Kapal Hang Tuah V di Cabang Batam.

Administrasi Kantor

Beban Administrasi Kantor mengalami penurunan 51,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan adanya efisiensi penggunaan ATK serta peralatan kantor dan adanya kebijakan *paperless* sehingga mengurangi pada beban cetak dan fotokopi.

Penyisihan Penurunan Nilai

Beban Penyisihan Penurunan Nilai mengalami kenaikan hingga 219,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan pembebanan penyisihan piutang usaha sampai dengan Desember 2020 sebagai dampak dari implementasi PSAK 71.

Beban Pajak & Retribusi

Beban Pajak & Retribusi mengalami penurunan 36,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan turunnya pembebanan PBB karena disebabkan adanya penurunan yang signifikan dalam pencatatan beban PBB dan pembebanan PPh *Final*. Saldo minus karena adanya koreksi kelebihan pembayaran PBB di Cabang Belawan.

Fuels and Consumables

Fuel and Consumables expense has decreased by 0.50% compared to the previous year. The decrease in revenue had a major effect on the lower cost of operational staples such as fuel and lubricants for ships and port facilities that support operational activities.

Maintenance

Maintenance expense has increased by 6.36% compared to the previous year. This increase was due to a significant increase in the maintenance of MSE equipment in 2019-2020, support for and maintenance of master care application, and the 2020 ATS renewal.

General

General expense has decreased by 25.15% compared to the previous year. This decrease was due to a decrease in employee bonus payments in 2020 in line with the non-achievement of the 2019 profit target.

Insurance

Insurance expense has increased by 37.42% compared to the previous year. This increase was due to additional insurance premium payments for the addition of new assets such as the PKC Sriwijaya pilot boat, Hang Tuah pilot boat, and Mobile Crane at the Belawan Branch; also The Hang Tuah VI Tug Boat at the Tanjung Balai Karimun Branch, and the Hang Tuah V Ship at Batam Branch.

Office Administration

Office Administration expense has decreased 51.95% compared to the previous year. This decrease was due to the efficient use of office stationery and equipment and the paperless policy, thereby reducing the charges for printing and photocopies.

Allocation of Devaluation

Expense for Allocation Of Devaluation has increased by 219.60% compared to the previous year. This increase was due to the expense from the allowance for account receivables up to December 2020 as a result of PSAK 71 implementation.

Tax & Retribution Expense

Tax & Retribution Expense has decreased 36.88% compared to the previous year. This decrease was due to a decrease in burden of land and building tax due to a significant reduction in the recording of land and building tax expense and the imposition of income tax. The minus balance is due to a correction of overpayment of land and building tax at Belawan Branch.



Lain-lain (di bawah Rp3 miliar)

Beban lain-lain (di bawah Rp3 miliar) mengalami penurunan 5,91% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan dan Beban Konstruksi

Pendapatan dan Beban Konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perseroan dalam pembangunan terminal *multipurpose* di Kuala Tanjung dan terminal petikemas di Belawan Fase 2. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya, yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

Berikut rincian pendapatan dan beban konstruksi.

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Konstruksi Construction Revenue	758.144	2.535.336	(1.777.193)	-70,10%
Beban Konstruksi Construction Expense	(758.144)	(2.535.336)	1.777.193	-70,10%

Pendapatan konstruksi tahun 2020 sebesar Rp758.144 miliar, turun 70,10% atau setara dengan Rp1,78 triliun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2,53 triliun. Penurunan pendapatan konstruksi sejalan dengan beban konstruksi yang meningkat 70,10% atau setara dengan Rp1,78 triliun dibandingkan tahun 2019. Pendapatan dan beban konstruksi merupakan implikasi penerapan ISAK 16/22 pada tahun 2020 atas kontrak konsesi jasa serta seluruh proyek konsesinya dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sejak perjanjian awal konsesi sampai dengan 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya kajian ulang atas proyek konstruksi di mana PT Prima Terminal Petikemas ditunjuk sebagai operator dalam pengadaan Terminal Petikemas Belawan Fase II yang dimulai sejak tahun 2014 dan PT Prima Multi Terminal ditunjuk sebagai operator dalam pengadaan Terminal *multipurpose* Kuala Tanjung yang dimulai sejak tahun 2015.

Pengakuan atas pendapatan konstruksi diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian di mana margin yang terkait dengan kegiatan konstruksi diatribusikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban yang terjadi selama periode pelaporan, dan biaya-biaya terkait perolehan aset tak berwujud termasuk biaya pinjaman yang terkait dengan konstruksi infrastruktur kepelabuhanan atau pengoperasian fasilitas dan *upfront fee* yang dibayarkan kepada kreditur terkait dengan fasilitas pinjaman yang diberikan sebagai bagian dari aktivitas pendanaan proyek konstruksi atau pengoperasian kepelabuhanan dikapitalisasi.

Others (under Rp3 billion)

Other expense (below Rp3 billion) has decreased by 5.91% compared to the previous year.

Construction Revenue and Expense

Construction Revenue and Expense refer to compensation services recognized by the Company in the construction of multipurpose terminal in Kuala Tanjung and container terminal in Belawan Phase 2. Construction revenue is assessed using the cost method, in which all costs are directly attributable as the cost of asset acquisition.

Here are the details of construction revenue and expense.

Construction revenue in 2020 amounted to Rp758,144 billion, a 70.10% or Rp1.78 trillion decrease compared to 2019 's Rp2.53 trillion. The decrease in construction revenue was in line with construction expense which has increased by 70.10% or Rp1.78 trillion compared to 2019. Construction revenue and expense are the implications of implementing ISAK 16/22 in 2020 for service concession contract and all of its concession projects with the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia since the initial concession agreement until 31 December 2020, including a review of the construction projects, in which PT Prima Terminal Petikemas was appointed as the operator in the construction of Belawan Container Terminal Phase II which began in 2014 and in which PT Prima Multi Terminal was appointed operator in construction of Kuala Tanjung Multipurpose Terminal which began in 2015.

Construction revenue is recognized based on the percentage of completion method wherein the margin related to construction activities is attributed to the difference between revenue and expenses incurred during the reporting period, and charges related to the acquisition of intangible assets including borrowing costs related to port infrastructure construction or facilities operational and upfront fees paid to creditors with regard to loan facilities provided as part of the financing activities for capitalized construction projects or port operations.

Demikian pula dengan beban konstruksi, yang muncul karena manajemen melakukan kajian ulang secara menyeluruh terhadap pengakuan aset tetap, aset tak berwujud, beban penyusutan aset tetap, dan beban penyusutan aset tak berwujud, serta seluruh proyek konsesinya dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sejak perjanjian awal konsesi sampai dengan 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya kajian ulang atas proyek konstruksi dan Perseroan juga mengakui provisi seiring dengan penggunaan infrastruktur tersebut. serta biaya-biaya terkait perolehan aset tak berwujud termasuk biaya pinjaman yang terkait dengan konstruksi infrastruktur kepelabuhanan atau pengoperasian fasilitas dan *upfront fee* yang dibayarkan kepada kreditur terkait dengan fasilitas pinjaman yang diberikan sebagai bagian dari aktivitas pendanaan proyek konstruksi atau pengoperasian kepelabuhanan dikapitalisasi.

Laba Usaha

Laba Usaha didapatkan dari akun Pendapatan Usaha yang diakumulasikan dengan Beban Pokok dan Beban Usaha.

Laba Usaha tahun 2020 sebesar Rp675,99 miliar, meningkat 13,00% atau setara dengan Rp77,78 miliar dibandingkan Jumlah Laba Usaha tahun 2019 sebesar Rp598,21 miliar. Kenaikan ini disebabkan penurunan beban operasi yang lebih tinggi dibandingkan penurunan pendapatan Perseroan.

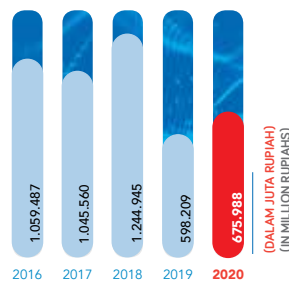
This also applies to construction expense, which arises because management conducts a thorough review of the recognition of fixed assets, intangible assets, depreciation expense for fixed assets, and depreciation expense for intangible assets, as well as all concession projects with the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia from the initial concession agreement until 31 December 2020, including a review of construction projects and the Company also recognizes a provision along the use of this infrastructure, as well as charges related to the acquisition of intangible assets which include borrowing charges related to port infrastructure construction or facility operation and upfront fees paid to creditors with regard to loan facilities provided as part of capitalized construction project financing activities or port operations.

Business Profit

Business Profit is obtained from the Operating Income account, which is accumulated with Main Expenses and Operating Expenses.

Business Profit in 2020 amounted to Rp675.99 billion, a 13.00% or Rp77.78 billion increase compared to the Total Business Profit in 2019 of Rp598.21 billion. This increase was due to the decrease in operating expense which was higher than the decrease in the Company's revenue.

Perkembangan laba Usaha 2016-2020 Development of Business Revenue 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

Pendapatan (Beban) Non-Usaha

Rincian Pendapatan dan Beban Non-Usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Non-Business Revenue (Expense)

Details of Non-Business Revenue and Expense can be seen in the table below.



	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Non-Usaha: Non-business Revenue:				
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih Net Exchange Rate Difference Profit (Loss)	35.174	(6.782)	41.956	-618,66%
Kelebihan Pembayaran PBB Overpayment of Land and Building Tax	44.094	-	44.094	100,00%
Pendapatan Denda/Penalti Fine/Penalty Revenue	5.899	6.395	(497)	-7,76%
Penghapusan Utang Debt Nullification	-	9.940	(9.940)	-100,00%
Jumlah Pendapatan Non-Usaha Total Non-business Revenue	85.167	9.553	75.613	791,50%
Beban Non-Usaha: Non-Business Expense:				
Beban atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-tax State Revenue Expense	(31.714)	(29.830)	(1.884)	6,31%
Beban Konsesi Concession Expense	(47.691)	(52.831)	5.139	-9,73%
Beban Biaya Materai Stamp Duty Fee	(1.298)	(1.440)	141	-9,82%
Lain-lain - Bersih Net Others	6.159	44.563	(38.403)	-86,18%
Jumlah Beban Non-Usaha Total Non-Business Expense	(74.544)	(39.537)	(35.007)	88,54%
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Usaha Total Non-Business revenue	10.623	(29.984)	40.607	-135,43%

Jumlah Pendapatan Non-Usaha tahun 2020 sebesar Rp85,17 miliar, meningkat 791,50% atau setara dengan Rp75,61 miliar dibandingkan Jumlah Pendapatan Non-Usaha tahun 2019 sebesar Rp9,55 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan laba selisih kurs – bersih serta kelebihan pembayaran PBB di tahun 2020.

Sedangkan Jumlah Beban Non-Usaha tahun 2020 sebesar Rp74,54 miliar, meningkat 88,54% atau setara dengan Rp35,01 miliar dibandingkan Jumlah Beban Non-Usaha tahun 2019 sebesar Rp39,54 miliar.

Rugi Penjualan Aset Tidak Lancar Lainnya

Rugi Penjualan Aset Tidak Lancar Lainnya adalah kerugian yang dialami akibat aset dijual mengalami penurunan penjualan.

Rugi Penjualan Aset Tidak Lancar Lainnya tahun 2020 sebesar Rp2,87 miliar, meningkat 131,12% atau setara dengan Rp1,63 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,24 miliar.

Total Non-Business Revenue in 2020 is Rp85.17 billion, a 791.50% or Rp75.61 billion increase compared to 2019's Rp9.55 billion. This increase was mainly due to the gain on net exchange rate difference and overpayment of land and building tax in 2020.

Meanwhile, Total Non-Business Expenses in 2020 is Rp74.54 billion, an 88.54% or Rp35.01 billion increase compared to 2019's Rp39.54 billion.

Loss on Sale of Other Non-Current Assets

Loss on Sale of Other Non-Current Assets is a loss experienced due to a decrease in sales of assets held for sale.

Other Non-Current Asset Sale Loss in 2020 amounted to Rp2.87 billion, a 131.12% or Rp1.63 billion increase compared to 2019's Rp1.24 billion.

Pendapatan Keuangan

Financial Revenue

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Bunga Deposito Berjangka Time Deposit Interest	52.776	81.693	(28.917)	-35,40%
Bunga Bank Bank Interest	2.029	1.831	198	10,79%
Jumlah Pendapatan Keuangan Total Financial Revenue	54.805	83.524	(28.720)	-34,38%

Pendapatan Keuangan tahun 2020 sebesar Rp54,80 miliar, turun 34,38% atau setara dengan Rp28,72 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp83,52 miliar. Penurunan ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penurunan kas dalam bentuk deposito yang digunakan untuk pembayaran kegiatan investasi, baik oleh Perseroan maupun oleh entitas anak.
2. Adanya penurunan tingkat suku bunga deposito di tahun 2020 sejalan dengan kebijakan penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Financial Revenue in 2020 is Rp54.80 billion, down 34.38% or Rp28.72 billion compared to 2019's Rp83.52 billion. This decrease was due to the following:

1. Decrease in cash in the form of deposits used to pay for investing activities, both by the Company and by its subsidiaries.
2. There will be a reduction in deposit interest rates in 2020 in line with the policy of lowering Bank Indonesia's interest rates in order to boost economic growth.

Beban Keuangan

Rincian Beban Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Financial Expense

The details for Financial Expense can be seen in this table below.

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Beban Bunga dari Pinjaman Bank Bank Loan Interest Expense	433.125	271.939	161.186	59,27%
Beban Bunga dari Pinjaman Utang Obligasi Bonds Payable Interest Expense	87.503	89.604	(2.101)	-2,35%
Beban Bunga dari Liabilitas Sewa Lease Liability Interest Expense	4.900	-	4.900	100,00%
Beban Administrasi Bank Bank Administrative Expense	1.467	230	1.237	536,77%
Jumlah Beban Keuangan Total Financial Expenses	526.995	361.774	165.222	45,67%

Beban Keuangan tahun 2020 sebesar Rp526,99 miliar, meningkat 45,67% atau setara dengan Rp165,22 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp361,77 miliar. Kenaikan ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Beban Bunga Pinjaman Bank meningkat disebabkan kenaikan saldo pinjaman bank dari Perseroan dan entitas anak, PT Prima Terminal Petikemas atas pencairan fasilitas kredit untuk pembayaran kegiatan investasi khususnya investasi pembangunan Terminal Petikemas Belawan Fase-II.

Financial Expense in 2020 amounted to Rp526.99 billion, a 45.67% or Rp165.22 billion increase compared to 2019's Rp361.77 billion. This increase was due to the following factors:

1. Bank Loan Interest Expense has increased due to an increase in the balance of bank loans from the Company and its subsidiaries, PT Prima Terminal Petikemas for the disbursement of credit facilities for payment of investment, specifically the construction of Phase-II Belawan Container Terminal.



2. Beban Bunga Obligasi mengalami penurunan disebabkan berkurangnya saldo utang obligasi sebagai imbas telah dilakukannya pembayaran pokok obligasi Seri A sebesar Rp50 miliar pada bulan Juni 2019.
3. Adanya Beban Bunga Liabilitas Sewa pada tahun 2020 disebabkan penerapan PSAK 73 tentang "Aset Hak Guna" atas persewaan aset-aset yang lebih dari 2 (dua) tahun dengan nilai di atas aset bernilai rendah sebesar Rp70 juta seperti persewaan BMN Belawan Fase-I dan kantor perwakilan di Jakarta.
4. Kenaikan Beban Administrasi Bank dipengaruhi oleh adanya pembayaran *agency fee* kepada kreditur sindikasi, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI sebesar Rp990 juta.

2. Bonds Payable Expense has decreased due to a decrease in the balance of bonds payable as a result of the payment of Series-A bonds principal of Rp50 billion in June 2019.
3. Lease Liability Interest Expense in 2020 was caused by the implementation of PSAK 73 on "Asset Use Right" for leasing assets that are more than 2 (two) years with a value above low-value assets of Rp70 million, such as the leasing of BMN Belawan Phase-1. and a representative office in Jakarta.
4. The increase in Bank Administrative Expense was influenced by the payment of agency fees to syndicated creditors, namely Bank Mandiri, BNI, and BRI, amounting to Rp990 million.

Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi

Rincian Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Part of Profit (Loss) of Associated Entities

The details of Part of Profit (Loss) of Associated Entities can be seen in this table below.

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
PT Terminal Petikemas Indonesia	115	381	(266)	-69,79%
PT Prima Tangki Indonesia	157	(1.138)	1.295	113,77%
Jumlah Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Total Part of Profit (Loss) of Associated Entities	272	(757)	1.029	135,93%

Di tahun 2020 Perseroan mencatat laba dari entitas asosiasi sebesar Rp272 miliar, meningkat hingga 135,93% atau setara dengan Rp1,03 miliar dibandingkan tahun 2019 di mana Perseroan membukukan rugi dari entitas asosiasi sebesar Rp757 juta. Kenaikan ini terutama didapatkan dari laba yang diberikan oleh PT Prima Tangki Indonesia yang membukukan keuntungan.

In 2020, the Company recorded a profit from associated entities of Rp272 billion, an increase of up to 135.93% or Rp1.03 billion compared to 2019's Rp757 million. This increase was mainly obtained from the profit of PT Prima Tangki Indonesia, which posted a profit that year.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan didapatkan dari akun Laba Usaha yang diakumulasikan dengan pendapatan (beban) non-usaha, beban keuangan, serta bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama.

Profit Before Corporate Income Tax Deduction

Profit Before Corporate Income Tax Deduction is obtained from the Business Profit account, which is accumulated with non-business revenue (expense), financial expense, and share of profit (loss) from associates and joint ventures.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan tahun 2020 sebesar Rp211,82 miliar, turun 26,44% atau setara dengan Rp76,16 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp287,98 miliar.

Profit Before Corporate Income Tax Deduction in 2020 is Rp211.82 billion, a 26.44% or Rp76.16 billion decrease compared to 2019's Rp287.98 billion.

Beban Pajak Penghasilan

Beban Pajak Penghasilan adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode.

Income Tax Expense

Income Tax Expense is the combined amount of current tax and deferred tax that is calculated in determining profit and loss for a given period.

Beban Pajak Penghasilan tahun 2020 sebesar Rp28,70 miliar, meningkat 64,91% atau setara dengan Rp53,09 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp81,80 miliar.

Income Tax Expense in 2020 amounted to Rp28.70 billion, a 64.91% or Rp53.09 billion increase compared to 2019's Rp81.80 billion.

Laba Tahun Berjalan

Laba Bersih Tahun Berjalan didapatkan dari akun Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan yang diakumulasikan dengan Manfaat (Beban) Pajak.

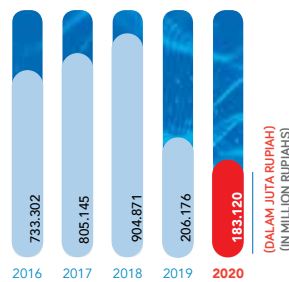
Laba Bersih Tahun Berjalan tahun 2020 sebesar Rp183,12 miliar, mengalami penurunan 11,18% atau setara dengan Rp23,06 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp206,18 miliar. Penurunan laba bersih disebabkan adanya penurunan pendapatan akibat dampak pandemi COVID-19 yang berimbas pada trafik barang dan penumpang di pelabuhan.

Ongoing Year Profit

Net Profit for Ongoing Year is obtained from the Profit Before Corporate Income Tax Deduction that is accumulated with Tax Benefit (Expense).

The Company's Net Profit for 2020 Ongoing Year is Rp183.12 billion, a 11.18% or Rp23.06 billion decrease compared to 2019's Rp206.18 billion. The decrease in net profit was due to a decrease in income due to the impact of the COVID-19 pandemic that has affected the traffic of goods and passengers at the port.

Perkembangan Laba Bersih Tahun Berjalan 2016-2020 Development of Net Ongoing Year Profit 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan Komprehensif Lain terdiri dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba (Rugi), yaitu Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti yang dikurangi Pajak Penghasilan Terkait. Di tahun 2020 Perseroan mencatat Rugi Komprehensif Lain sebesar Rp1,91 miliar, turun 96,97% atau setara dengan Rp61,29 miliar dibandingkan Rugi Komprehensif Lain tahun 2019 sebesar Rp63,20 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan signifikan pada pengukuran kembali program imbalan pasti.

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan didapatkan dari akun Laba Tahun Berjalan yang diakumulasikan dengan Penghasilan Komprehensif Lain.

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2020 sebesar Rp181,21 miliar, meningkat 26,74% atau setara dengan Rp38,23 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp142,97 miliar. Kenaikan ini disebabkan Rugi Komprehensif Lain di tahun 2019 yang lebih besar dibandingkan Rugi Komprehensif Lain tahun 2020.

Other Comprehensive Revenue

Other Comprehensive Revenue consists of items that will not be reclassified into Profit (Loss), namely the Reassessment of the Fixed Compensation Program that is deducted with related Income Taxes. In 2020 the Company posted a Comprehensive Loss of Rp1.91 billion, down 96.97% or Rp61.29 billion compared to 2019's Rp63.20 billion. This decrease was mainly due to a significant decrease in the reassessment of fixed compensation program.

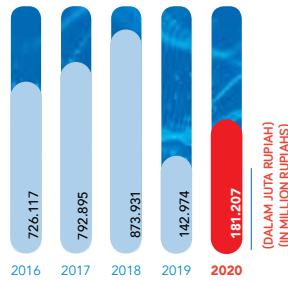
Total Ongoing Year Comprehensive Profit

Total Comprehensive Ongoing Year Profit is obtained from Ongoing Year Profit that is accumulated with Other Comprehensive Revenues.

Total Comprehensive Ongoing Year Profit for 2020 is Rp181.21 billion, a 26.74% or Rp38.23 billion increase compared to 2019's Rp142.97 billion. This increase was due to Other Comprehensive Losses in 2019, whose value was greater than Other Comprehensive Losses in 2020.



Perkembangan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan 2016-2020 Development of Total Comprehensive Ongoing Year Profit 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

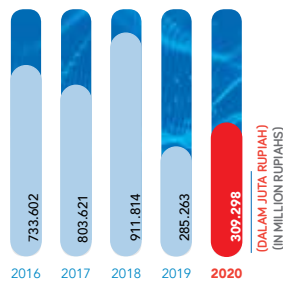
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun 2020 sebesar Rp309,29 miliar, meningkat 8,43% atau setara dengan Rp24,04 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp285,26 miliar.

Ongoing Year Profit Attributable to Parent Entity Owner

Ongoing Year Profit Attributable to Parent Entity Owner in 2020 is Rp309.29 billion, a 8.43% or Rp24.04 increase compared to 2019's Rp285.26 billion.

Perkembangan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 2016-2020 Development of Ongoing Year Profit Attributable to Parent Entity Owner 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali

Rugi Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali tahun 2020 sebesar Rp126,18 miliar, meningkat 59,54% atau setara dengan Rp47,09 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp79,09 miliar. Kenaikan kerugian ini disebabkan besarnya kerugian dari entitas anak PT Prima Multi Terminal (PMT).

Current Year's Profit Attributable to Non-Controlling Interests

Ongoing Year Loss Attributable to Non-controlling Interest in 2020 is Rp126.18 billion, a 59.54% or Rp47.09 billion increase compared to 2019's Rp79.09 billion. This increase in losses was due to the amount of loss experienced by a subsidiary entity, PT Prima Multi Terminal (PMT).

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

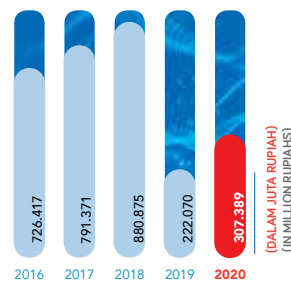
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk di tahun 2020 sebesar Rp307,39 miliar, meningkat 38,42% atau setara dengan Rp85,32 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp222,07 miliar.

Total Comprehensive Ongoing Year Profit Attributable to Parent Entity Owner

Total Comprehensive Ongoing Year Profit Attributable to Parent Entity Owner in 2020 is Rp307.39 billion, a 38.42% or Rp85.32 increase from 2019's Rp222.07 billion.

Perkembangan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 2016-2020

Development of Comprehensive Ongoing Year Profit Attributable to Parent Entity Owner 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali

Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali adalah sebesar Rp126,18 miliar di tahun 2020, meningkat 59,53% atau setara dengan Rp47,09 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp79,09 miliar. Kenaikan kerugian ini disebabkan besarnya kerugian dari salah satu entitas anak, PT Prima Multi Terminal (PMT).

Current Year's Total Comprehensive Income Attributable to Non-Controlling Interests

Total Comprehensive Ongoing Year Loss Attributable to Non-controlling Interests is Rp126.18 billion in 2020, a 59.53% or Rp47.09 billion increase from 2019's Rp79.09 billion. This increase in losses was due to the amount of loss experienced by one of subsidiary entities, namely PT Prima Multi Terminal (PMT).

Laba per Saham Dasar

Perseroan menyajikan Laba per Saham Dasar dengan membagi antara Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Berikut disampaikan perhitungan Laba per Saham Dasar tahun 2020 dan 2019.

Profit per Authorized Share

The Company presents Profit per Authorized Share by dividing Ongoing Year Profit Attributable to Parent Entity Owner with the weighted average number of common share. Below is the calculation of Profit per Authorized Share in 2020 and 2019.

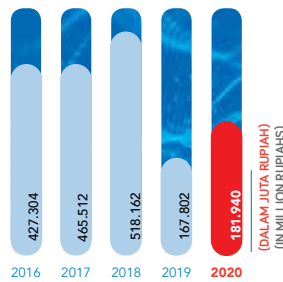
Laba per Saham Dasar Profit per Authorized Share	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rp-juta) Ongoing Year Profit Attributable to Parent Entity Owner (Rp-million)	309.298	285.263	24.035	8,43%
Jumlah saham (juta lembar saham) Number of share (in million shares)	1,70	1,70	-	-
Laba per saham dasar (Rp) Profit per authorized share (Rp)	181.940	167.802	14.138	8,43%

Jumlah Laba Per Saham Dasar tahun 2020 sebesar Rp181.940, meningkat 8,43% atau setara dengan Rp14.138 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp167.802. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk sebagaimana telah disampaikan di atas.

Total Profit per Authorized Share in 2020 is Rp181,940, a 8.43% or Rp14,138 increase from 2019's Rp167,802. This increase was due to the increase in the Ongoing Year Profit Attributable to Parent Owner Entity as stated above.



Perkembangan Laba Bersih per Saham - Dasar 2016-2020 Development of Net Profit per Authorized Share - 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED CASH FLOW REPORT

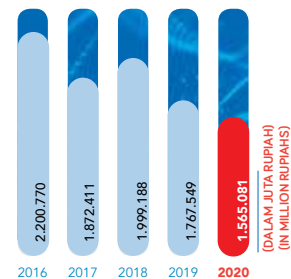
Total Ekuitas Perseroan tahun 2020 mencapai Rp6,26 triliun, mengalami peningkatan 1,05% dibandingkan Total Ekuitas tahun 2019 sebesar Rp6,19 triliun. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2016-2020*, Total Ekuitas mengalami pertumbuhan 9,84%

The Company's Total Equity in 2020 reached Rp6.26 trillion, a 1.05% increase compared to 2019's Rp6.19 trillion. For the Compound Annual Growth Rate (CAGR) 2016-2020, Total Equity grew by 9.84%.



Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun 2016-2020

Balance of Cash and Cash Equivalents at the End of 2016-2020



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

ARUS KAS 2019-2020 CASH FLOW 2019-2020

(Rp-juta)
(Rp-million)

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash flow from Operational Activities	540.791	568.290	(27.499)	-4,84%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash flow from Investment Activities	(800.105)	(2.503.408)	1.703.303	-68,04%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash flow from Funding Activities	56.846	1.703.479	(1.646.633)	-96,66%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	(202.468)	(231.639)	29.171	-12,59%
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Year	1.767.549	1.999.188	(231.639)	-11,59%
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents at the End of Year	1.565.081	1.767.549	(202.468)	-11,45%

Di sepanjang tahun 2020, Kas dan Setara Kas Perseroan mengalami penurunan 11,45% atau setara Rp202,47 miliar, dari Kas dan Setara Kas di akhir tahun 2019 sebesar Rp1,77 triliun menjadi Rp1,56 triliun di akhir tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan signifikan pada arus kas dari aktivitas pendanaan, sebagaimana akan diuraikan secara rinci di bawah ini.

Throughout 2020, the Company's Cash and Cash Equivalents decreased by 11.45% or Rp202.47 billion, from late 2019's Rp1.77 trillion to IDR 1.56 trillion in late 2020. This decrease was mainly due to a significant decrease in cash flows from financing activities, as described in detail below.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operational Activities	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Revenue from Customers	3.093.928	3.154.912	(60.984)	-1,93%
Pembayaran ke Pemasok, Karyawan, dan Lainnya Payment to Suppliers, Employees, and Others	(2.510.783)	(2.473.781)	(37.003)	1,50%
Pembayaran Pajak Penghasilan Payment of Income Tax	(98.165)	(198.399)	100.234	-50,52%
Penghasilan Bunga Interest Income	55.811	85.558	(29.747)	-34,77%
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash from Operating Activities	540.791	568.290	(27.499)	-4,84%

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi tahun 2020 sebesar Rp540,79 miliar, turun 4,84% atau setara dengan Rp27,49 miliar dibandingkan Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi tahun 2019 sebesar Rp568,29 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan turunnya penerimaan kas dari pelanggan, seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

Net Cash Flow from Business Activities in 2020 is Rp540.79 billion, a 4.84% or Rp27.49 billion decrease from 2019 'sa Rp568.29 billion. This decrease was mainly due to lower cash flow from customers, as described below.

Penerimaan Kas dari Pelanggan

Penerimaan Kas dari Pelanggan merupakan penerimaan kas yang diterima oleh pelanggan/konsumen.

Cash Flow from Customers

Cash Flow from Customers are cash flow received from service users of the Company and its subsidiaries.

Penerimaan Kas dari Pelanggan tahun 2020 sebesar Rp3,09 triliun, turun 1,93% atau setara dengan Rp60,98 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3,15 triliun. Penurunan ini disebabkan lesunya kegiatan kunjungan kapal penumpang maupun kapal kargo akibat dampak pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap arus kunjungan kapal di pelabuhan yang dimiliki Pelindo 1, serta penurunan arus barang khususnya di Pelabuhan Umum karena menurunnya produksi dan distribusi barang secara global.

Cash Flow from Customers in 2020 is Rp3.09 trillion, down 1.93% or Rp60.98 billion compared to 2019's Rp3.15 trillion. This decrease was due to the low number of visiting passenger and cargo ships due to the COVID-19 pandemic, which had an impact on the flow of ship visits at the ports owned by Pelindo 1, as well as a decrease in the traffic of goods, especially on public ports due to decreased production and distribution of goods globally.

Pembayaran Ke Pemasok, Karyawan, dan Lainnya

Pembayaran ke pemasok, karyawan, dan lainnya adalah kas yang dikeluarkan untuk membayar pekerjaan eksploitasi kepada pemasok, pegawai, dan beban-beban usaha lainnya.

Payment to Supplier, Employees, and Others

Payment to suppliers, employees, and others are cash expensed to pay exploitation works to suppliers, employees, and other operating expenses.



Pembayaran ke Pemasok, Karyawan, dan Lainnya tahun 2020 sebesar Rp2,51 triliun, meningkat 1,50% atau setara dengan Rp37,00 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2,47 triliun. Kenaikan ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Meningkatnya beban usaha untuk menanggulangi COVID-19 seperti swab test dan pembersihan/sterilisasi gedung.
2. Meningkatnya pengeluaran untuk membayar pemasok atas kegiatan eksploitasi.

Pembayaran Pajak Penghasilan

Pembayaran Pajak Penghasilan adalah pembayaran atas pajak kini dan pajak tangguhan pajak penghasilan.

Pembayaran Pajak Penghasilan tahun 2020 sebesar Rp98,16 miliar, turun 50,52% atau setara dengan Rp100,23 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp198,39 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh diperolehnya insentif perpajakan yaitu fasilitas pengurangan setoran PPh Badan Pasal 25 sebesar 50%.

Penghasilan Bunga

Penghasilan Bunga tahun 2020 sebesar Rp55,81 miliar, turun 34,77% atau setara dengan Rp29,75 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp85,56 miliar. Penurunan ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Di sisi internal, terjadi penurunan kas dalam bentuk deposito yang digunakan untuk pembayaran kegiatan investasi baik di Perseroan maupun entitas anak.
2. Di sisi eksternal disebabkan adanya penurunan tingkat suku bunga deposito di tahun 2020 sejalan dengan kebijakan penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Payment to Suppliers, Employees, and Others in 2020 amounts to Rp2.51 trillion, an increase by 1.50% or equals to Rp37.00 billion compared to 2019 of Rp2.47 trillion. This increase was caused by a number of matters, namely:

1. Increase in operating expenses to handle COVID-19, such as for swab tests and cleaning up/sterilization of buildings.
2. Increase in expenses to pay suppliers for exploitation activities.

Payment of Income Tax

Payment of Income Tax is the payment of current and deferred income tax.

Payment of Income Tax value in 2020 is Rp98.16 billion, down 50.52% or Rp100.23 billion from 2019's Rp198.39 billion. Among the cause of the decrease was tax incentive, which is a facility that gives a 50% reduction of the income tax payment of corporation under Article 25.

Revenue from Interest

Interest Revenue in 2020 is Rp55.81 billion, down 34.77% or Rp 29.75 billion compared to 2019's Rp85.56 billion. This decrease was caused by several factors:

1. On the internal side, there was a decrease in cash in the form of deposits used to pay for investment activities by the Company and its subsidiaries.
2. On the external side, it was due to a decline in deposit rates in 2020 to comply with the Bank Indonesia's policy to lower interest rates in order to stimulate economic growth.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Perolehan Aset Tetap, Properti Investasi, dan Aset Lainnya Acquisition of Fixed Asset, Investment Property, and Other Assets	(507.986)	(681.943)	173.956	-25,51%
Perolehan Aset Tak Berwujud Acquisition of Intangible Asset	(292.119)	(1.821.465)	1.529.346	-83,96%
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi Net Cash for Investment Activities	(800.105)	(2.503.408)	1.703.303	-68,04%

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar Rp800,10 miliar, turun 68,04% atau setara dengan Rp1,70 triliun dibandingkan Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi tahun 2019 sebesar Rp2,50 triliun.

The value Net Cash for Investment Activities in 2020 is Rp800.10 billion, which is a 68.04% or Rp1.70 trillion decrease compared 2019's Rp2.50 trillion. Decrease in Net Cash for Investment Activities is detailed below.

Perolehan Aset Tetap, Properti Investasi, dan Aset Lainnya

Perolehan Aset Tetap, Properti Investasi, dan Aset Lainnya adalah pengeluaran kas yang dialokasikan untuk pembelian/pembangunan aset tetap, properti investasi, dan aset-aset lain baik sebagai fasilitas utama maupun fasilitas pendukung bisnis.

Perolehan Aset Tetap, Properti Investasi, dan Aset Lainnya tahun 2020 sebesar Rp507,98 miliar, turun 25,51% atau setara dengan Rp173,96 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp681,94 miliar. Penurunan ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Adanya revisi penyesuaian program investasi dan penurunan kegiatan investasi.
2. Kegiatan investasi masih dalam kondisi *work in progress*.

Perolehan Aset Tak Berwujud

Perolehan Aset Tak Berwujud adalah pengeluaran kas yang digunakan untuk memperoleh aset tak berwujud seperti aset konsesi, piranti lunak, sertifikasi, konsultan, dan *appraisal*, pendidikan dan sarana, serta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Perolehan Aset Tak Berwujud tahun 2020 sebesar Rp292,12 miliar, turun 83,96% atau setara dengan Rp1,53 triliun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,82 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan pembayaran kegiatan investasi atas hak konsesi di Kuala Tanjung oleh entitas anak, PT Prima Multi Terminal dan Belawan Fase-II oleh PT Prima Terminal Petikemas sudah sebagian besar terealisasi pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 hanya tersisa untuk pembayaran retensi dan pengadaan alat fasilitas pelabuhan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Funding Activities	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Penerimaan Pinjaman Bank Bank Loan Earnings	938.629	2.548.638	(1.610.009)	-63,17%
Pembayaran Pinjaman Bank Payment of Bank Loan	(385.958)	(194.473)	(191.484)	98,46%
Pembayaran Utang Obligasi Payment of Bonds Payable	-	(50.000)	50.000	-100,00%
Pembayaran Beban Keuangan Payment of Financial Expense	(519.875)	(360.751)	(159.123)	44,11%
Penerimaan Setoran Modal pada Entitas Anak Payment of Paid-up Capital to Subsidiary Entities	-	79.200	(79.200)	-100,00%
Pembayaran Dividen Dividen Payment	(60.051)	(319.135)	259.084	-81,18%
Penerimaan Pinjaman Lainnya Other Loan Earnings	84.100	-	84.100	100,00%
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Net Cash from Funding Activities	56.846	1.703.479	(1.646.633)	-96,66%

Acquisition of Fixed Asset, Investment Property, and other Assets

Acquisition of Fixed Asset, Investment Property, and Other Assets are cash disbursements allocated for the purchase/construction of fixed assets, investment properties, and other assets, both as main facilities and business supporting facilities.

The value of Acquisition of Fixed Asset, Investment Property, and Other Assets in 2020 is Rp507.98 billion, down 25.51% or Rp173.96 billion from 2019's Rp681.94 billion. This decrease was caused by several factors:

1. Revision for adjusting investment program and overall decrease in investment activities.
2. Investment activities are still a work in progress condition.

Acquisition of Intangible Asset

Acquisition of Intangible Assets is cash disbursements that are used to acquire intangible assets such as concession assets, software, certification, consultants, and appraisals, education, and facilities, as well as the establishment, and amendments of the Company's Articles of Association.

The Value of Acquisition of Intangible Assets in 2020 is Rp292.12 billion, down 83.96% or Rp1.53 trillion compared to 2019's Rp1.82 trillion. This decrease was mainly due to the payment of investment activities for concession rights in Kuala Tanjung by its subsidiaries, PT Prima Multi Terminal and Belawan Phase-II by PT Prima Terminal Petikemas, which was mostly realized in 2019. Meanwhile for 2020, there was only enough for retention and procurement of port facilities.

CASH FLOW FROM FUNDING ACTIVITIES



Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan tahun 2020 sebesar Rp56,85 miliar, turun 96,66% atau setara dengan Rp1,65 triliun dibandingkan Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan tahun 2019 sebesar Rp1,70 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya penerimaan pinjaman bank, seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

Penerimaan Pinjaman Bank

Penerimaan Pinjaman Bank adalah penerimaan kas untuk pendanaan Perseroan yang berasal dari pinjaman perbankan. Penerimaan Pinjaman Bank tahun 2020 sebesar Rp938,63 miliar, turun 63,17% atau setara dengan Rp1,61 triliun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2,55 triliun. Penurunan ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Menurunnya penerimaan pinjaman bank khususnya pada entitas anak disebabkan karena sudah dimanfaatkan secara maksimal pada tahun 2019 sejalan dengan penyelesaian pembayaran pekerjaan investasi pada PT Prima Multi Terminal dan PT Prima Terminal Petikemas.
2. Adanya optimalisasi pendanaan dari kas internal dan mengurangi pemanfaatan fasilitas kredit sesuai dengan kebutuhan kas Perseroan dalam rangka menekan beban bunga pinjaman.

Pembayaran Pinjaman Bank

Pembayaran Pinjaman Bank adalah pengeluaran kas Perseroan untuk pembayaran kewajiban pokok utang bank yang jatuh tempo.

Pembayaran Pinjaman Bank tahun 2020 sebesar Rp385,96 miliar, meningkat 98,46% atau setara dengan Rp191,48 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp194,47 miliar. Peningkatan ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Mulai bertambahnya kewajiban pembayaran kewajiban pokok Perseroan sejalan dengan dimulainya kewajiban pembayaran kewajiban pokok atas fasilitas kredit investasi tahun 2018.
2. Mulai meningkatnya kewajiban pembayaran kewajiban pokok pada entitas anak, PT Prima Multi Terminal atas pembiayaan investasi pembangunan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal.

Pembayaran Utang Obligasi

Di tahun 2020 Perseroan tidak melakukan pembayaran utang obligasi. Perseroan melakukan pembayaran Utang Obligasi sesuai jadwal jatuh tempo atas masing-masing seri obligasi sebagai berikut:

1. Seri A (3 tahun) sebesar Rp50 miliar, yang telah jatuh tempo pada tahun 2019 dan telah dibayarkan.
2. Seri B (5 tahun) sebesar Rp500 miliar, yang akan jatuh tempo pada tahun 2021.

Net Cash Obtained from Funding Activities in 2020 is Rp56.85 billion, down 96.66% or Rp1.65 trillion compared to 2019's Rp1.70 trillion. This decrease was mainly due to lower bank loan earnings, as shown below.

Bank Loan Earnings

Bank Loan Earnings are cash flow earnings for the funding of the Company that come from bank loans. Bank Loan Earnings in 2020 is Rp938.63 billion, down 63.17% or Rp1.61 trillion compared to 2019's Rp2.55 trillion. This decrease was caused by several things:

1. The decline in bank loan earnings, especially for subsidiaries, is due to the fact that it has been fully utilized in 2019 in line with the payment of investment project at PT Prima Multi Terminal and PT Prima Terminal Petikemas.
2. Optimization of funding from internal cash and decrease of the use of credit facilities in accordance with the Company's cash needs, in order to drive interest down.

Payment of Bank Loan

Bank Loan Payment is Company's cash disbursements to pay due principal loan to the bank.

Bank loan payment in 2020 is Rp385.96 billion, a 98.46% or Rp.191.48 increase compared to 2019's Rp194.47 billion. This increase was due to several things:

1. The increase in the principal of loan owed, in accordance with the commencement of the principal payment obligation for credit facility investment in 2018.
2. The increase in the principal of loan owed by subsidiary entity, PT Prima Multi Terminal, for financing the construction investment of Kuala Tanjung Multipurpose Terminal.

Payment of Bonds Payable

In 2020, the Company did not pay any payment of bonds payable. The Company pays bonds payable according to the maturity date of the following series of bonds:

1. A Series (3 years) with the amount of Rp50 billion, due in 2019 and has been paid.
2. B Series (5 years) with the amount of Rp500 billion, which will be due in 2021.

3. Seri C (7 tahun) sebesar Rp450 miliar, yang akan jatuh tempo pada tahun 2023.
4. Seri C (10 tahun) sebesar Rp50 miliar, yang akan jatuh tempo pada tahun 2026.

Pembayaran Beban Keuangan

Pembayaran Beban keuangan adalah pengeluaran kas Perseroan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan aktivitas pendanaan seperti beban bunga pinjaman bank, beban bunga obligasi dan biaya provisi pinjaman.

Pembayaran Beban Keuangan tahun 2020 sebesar Rp519,87 miliar, meningkat 44,11% atau setara dengan Rp159,12 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp360,75 miliar. Kenaikan ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Meningkatnya pembayaran kewajiban bunga atas pinjaman perbankan pada Perseroan sejalan dengan peningkatan pemanfaatan fasilitas kredit investasi tahun 2018 dan 2019.
2. Meningkatnya pembayaran kewajiban bunga atas pinjaman perbankan pada entitas anak sejalan dengan peningkatan pemanfaatan fasilitas kredit investasi khususnya pada PT Prima Multi Terminal dan PT Prima Terminal Petikemas.

Penerimaan Setoran Modal pada Entitas Anak

Di tahun 2020 Perseroan tidak mendapatkan Penerimaan Setoran Modal pada Entitas Anak.

Pembayaran Dividen

Pembayaran Dividen adalah pengeluaran kas Perseroan untuk pembagian laba sesuai dengan kepemilikan pemegang saham.

Pembayaran Dividen tahun 2020 sebesar Rp60,05 miliar, turun 81,18% atau setara dengan Rp259,08 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp319,13 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan kinerja keuangan Perseroan sesuai dengan jumlah laba komprehensif pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp181 miliar.

Penerimaan Pinjaman Lainnya

Penerimaan Pinjaman Lainnya adalah penerimaan kas untuk pendanaan Perseroan yang bersumber dari luar perbankan.

Penerimaan Pinjaman Lainnya tahun 2020 sebesar Rp84,10 miliar yang didapatkan dari penerimaan *shareholder loan* pada entitas anak, PT Prima Multi Terminal yang diberikan oleh pemegang saham minoritas yaitu PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

3. C Series (7 years) with the amount of Rp450 billion, which will be due in 2023.
4. C Series (10 years) with the amount of Rp50 billion, which will be due in 2026.

Payment of Financial Expense

Payment of Financial Expense refers to Company's cash disbursements for the payment of obligations related to financing activities such as bank loan interest expense, bonds interest expense and loan provision fees.

The value of Payment of Financial Expense in 2020 is Rp519.87 billion, a 44.11% or Rp159.12 billion increase compared to 2019's Rp360.75 billion. This increase was due to:

1. Increased payment of bank loan interest obligations of the Company in line with the increased utilization of investment credit facilities in 2018 and 2019.
2. Increased payments of bank loan interest by subsidiaries in line with the increased use of investment credit facilities, specifically for PT Prima Multi Terminal and PT Prima Terminal Petikemas.

Paid-up Capital Earnings in Subsidiary Entities

In 2020, The Company did not receive Paid-up Capital earnings in its subsidiary entities.

Payment of Dividend

Dividend Payment is the Company's cash disbursement for profit sharing in accordance with shareholder ownership.

Dividend Payment in 2020 is Rp60.05 billion, a 81.18% or Rp259.08 billion decrease compared to 2019's Rp319.13 billion. This decrease was mainly due to a decrease in the Company's financial performance, in accordance with the total comprehensive profit in 2020 with the amount of Rp181 billion.

Other Loan Earnings

Other Loan Receipts are cash receipts for financing the Company from outside banks.

The value of Other Loan Earnings in 2020 is Rp84.10 billion, which came from shareholder loan earnings in subsidiary entity, PT Prima Multi Terminal, that is provided by minority shareholders, namely PT PP (Persero) Tbk and PT Waskita Karya (Persero) Tbk.



KEMAMPUAN PERUSAHAAN DALAM MENGHASILKAN LABA ATAU KEUNTUNGAN

Perseroan memiliki pengukuran atas kemampuan dalam menghasilkan laba atau keuntungan, yang tercermin dari Rasio Profitabilitas serta Rasio Pertumbuhan.

COMPANY'S ABILITY TO GENERATE PROFIT

The Company has a measurement on its ability to generate profit, as reflected in its Profitability Ratio and Growth Ratio.

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Rasio Operasional Operational Ratio				
Perputaran Aset, atau <i>Total Assets Turn Over</i> (TATO) (kali) Asset Turnover, or <i>Total Asset Turn Over</i> (TATO) (times)	(0,24)	(21,10)	(0,12)	-0,63%
<i>Return on Capital Employed</i> (ROCE) (%) Return on Capital Employed (ROCE) (%)	4,71	4,30	0,41	9,53%
Rasio Profitabilitas Profitability Ration				
Marjin Laba Operasi (%) Operating Profit Margin (%)	17,60	10,61	6,99	65,87%
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	4,77	3,66	1,11	30,33%
Imbal Hasil, atau <i>Return on Equity</i> (ROE) (%) Return on Equity (ROE) (%)	3,21	4,03	(0,82)	20,35%
Imbal Aset, atau <i>Return on Assets</i> (ROA) (%) Return on Assets (ROA) (%)	1,15	1,29	(0,14)	-11,16%
Rasio Pertumbuhan Growth Ratio				
Pendapatan Usaha (%) Business Earnings (%)	(31,87)	81,12	(113,00)	-139,29%
Beban Pokok dan Beban Usaha (%) Principal Expense and Business Expense (%)	(37,20)	169,79	(206,98)	-121,91%
Laba (Rugi) Usaha (%) Profit (Loss) of Business (%)	13,00	(51,95)	64,95	125,03%
Laba Tahun Berjalan (%) Ongoing Year Profit (%)	(11,18)	(77,21)	66,03	85,52%
Aset (%) Asset (%)	(0,02)	15,49	(15,51)	-100,13%
Liabilitas (%) Liability (%)	(0,70)	30,19	(30,89)	-102,31%
Ekuitas (%) Equity (%)	1,05	(1,96)	3,01	153,49%

Rasio Operasional

Rasio Operasional menggambarkan efektivitas dan efisiensi beroperasinya Perseroan. Dalam mengukur Rasio Operasional, Perseroan menggunakan Perputaran Aset atau *Total Assets Turn Over* (TATO), serta *Return on Capital Employed* (ROCE).

- **Perputaran Aset**

Perputaran Aset atau *Total Assets Turn Over* (TATO) mengukur sejauh mana efektivitas Perseroan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan.

Operational Ratio

Operational Ratio describe the effectiveness and efficiency of the Company's operations. In measuring the Ratio, the Company uses *Total Assets Turn Over* (TATO) and *Return on Capital Employed* (ROCE).

- **Asset Turnover**

Asset Turnover or *Total Assets Turnover* (TATO) measures the effectiveness of the Company in managing its assets to generate revenue.

$$\text{Rasio Perputaran Aset} = \frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Perputaran Aset tahun 2020 sebesar defisit 0,24 kali, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 sebesar defisit 21,10 kali. Hal ini menunjukkan efektivitas Perseroan yang meningkat dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan.

- **Return on Capital Employed (ROCE)**

ROCE adalah pengukuran profitabilitas dari penggunaan atau investasi dari aset. ROCE dapat mengindikasikan seberapa baik manajemen mengelola investasi yang dimiliki Perseroan baik yang diperoleh dari modal sendiri atau investor dan kreditur. Semakin tinggi ROCE, maka semakin banyak pula tingkat efisiensi Perseroan dalam menggunakan modal dan dana yang dimiliki.

$$\text{Return on Capital Employed (ROCE)} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

ROCE tahun 2020 sebesar 4,71%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,30%. Hal ini menunjukkan kenaikan tingkat efisiensi Perseroan dalam menggunakan modal dan dana yang dimiliki.

Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan Perseroan mendapatkan laba dari pendapatan (*earning*) terkait penjualan, aset, dan ekuitas. Dalam mengukur Rasio Profitabilitas, Perseroan menggunakan Margin Laba Usaha, Margin Laba Bersih, Imbal Hasil Terhadap Ekuitas atau *Return on Equity* (ROE), serta Imbal Hasil Terhadap Aset atau *Return on Assets* (ROA).

- **Margin Laba Operasi**

Margin Laba Operasi merupakan suatu indikator penting karena dapat memberikan informasi kepada manajemen maupun Investor tentang seberapa untungnya kegiatan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan tanpa memperhitungkan biaya tidak langsung.

$$\text{Margin Laba Operasi} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}} \times 100\%$$

Rasio Margin Laba Operasi tahun 2020 sebesar 17,60%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 10,61%. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh laba operasi yang meningkat dibandingkan pendapatan operasi yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

$$\text{Asset Turnover Ratio} = \frac{\text{Business Earnings}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Asset Turnover in 2020 was a deficit of 0.24 times, increasing from 2019 which was a deficit of 21.10 times. This shows the Company's increasing effectiveness in managing its assets to generate revenue.

- **Return on Capital Employed (ROCE)**

ROCE is a measure of the profitability of the use or investment of assets. ROCE can indicate how well the management manages the investments owned by the Company, whether derived from its own capital or from investors and creditors. The higher the ROCE, the more efficient the Company is in using the capital and funds it owns.

$$\text{Return on Capital Employed (ROCE)} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

The ROCE in 2020 was 4.71%, increasing from 2019 of 4.30%. This shows an increase in the Company's efficiency rate in using the capital and funds it owns.

Profitability Ratio

Profitability Ratio is the ratio to determine the Company's ability to generate profit from earnings related to sales, assets, and equity. In measuring the Profitability Ratio, the Company uses Business Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Equity (ROE) and Return on Asset (ROA).

- **Operating Profit Margin**

Operating Profit Margin is an important indicator because it can provide information to management and investors about how profitable a company's business activities are without considering indirect costs.

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Operating Profit}}{\text{Operating Earnings}} \times 100\%$$

The Operating Profit Margin Ratio in 2020 was 17.60%, increasing from 10.61% in 2019. The increase was mainly influenced by the increasing operating profit relative to a decrease in operating income, compared to the previous year.



- **Margin Laba Bersih**

Margin Laba Bersih dapat pula menggambarkan kemampuan Perseroan dalam menetapkan harga jual suatu produk, relatif terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut.

$$\text{Margin Laba Bersih} = \frac{\text{Laba Tahun Berjalan}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

Rasio Margin Laba Bersih tahun 2020 sebesar 4,77%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 3,66%. Peningkatan ini memberikan gambaran kenaikan Perseroan dalam meningkatkan profitabilitasnya.

- **Imbal Hasil Terhadap Ekuitas**

Imbal Hasil Terhadap Ekuitas atau *Return on Equity* (ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Ekuitas}} \times 100\%$$

ROE tahun 2020 sebesar 3,21%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,03%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh laba bersih tahun berjalan yang mengalami penurunan, sedangkan ekuitas mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

- **Imbal Hasil Terhadap Aset**

Imbal Hasil Terhadap Aset atau *Return on Assets* (ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan dalam hal memperoleh laba dari aset yang digunakan. ROA akan menilai kemampuan Perseroan berdasarkan penghasilan keuntungan masa lampau agar bisa dimanfaatkan pada masa atau periode selanjutnya.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Aset}} \times 100\%$$

ROE tahun 2020 sebesar 1,15%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,29%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba bersih tahun berjalan yang lebih besar dibandingkan penurunan jumlah aset dari tahun sebelumnya.

- **Net Profit Margin**

Net Profit Margin can also describe the Company's ability to determine the selling price of a product, relative to the costs incurred to make the product.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Ongoing Year Profit}}{\text{Business Revenue}} \times 100\%$$

The Net Profit Margin Ratio in 2020 was 4.77%, an increase compared to 2019 of 3.66%. This increase illustrates the Company's increase in increasing its profitability.

- **Return on Equity**

Return on Equity (ROE) describes the Company's ability to generate net profit using its own capital and generate net profit available to owners or investors. The ROE in 2020 was 2.92%, decreasing from 2019 of 3.33%. This decrease was mainly caused by a decrease in net profit in the current year, while equity increased compared to the previous year.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Ongoing Year Profit}}{\text{Number of Equity}} \times 100\%$$

ROE tahun 2020 sebesar 3.21%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.03%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh laba bersih tahun berjalan yang mengalami penurunan, sedangkan ekuitas mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

- **Return on Assets**

Return on Assets (ROA) describes the Company's ability to earn profit from the assets used. ROA assesses the Company's ability based on past profit generation so that it can be utilized in the next term or period.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Ongoing Year Profit}}{\text{Number of Asset}} \times 100\%$$

The ROA in 2020 was 1.15%, decreasing from 2019 of 1.29%. This decrease was mainly caused by the decrease in net profit in the current year which was greater than the decrease in total assets in the previous year.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perseroan dalam membayar utang diukur menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perseroan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam membayar utang jangka pendek.

RASIO LIKUIDITAS: KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}}$$

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}}$$

Kemampuan membayar utang jangka pendek Perseroan dicerminkan dengan rasio likuiditas di mana tingkat likuiditas dapat dilihat dari rasio lancar dan rasio kas, sebagaimana terlihat di bawah ini.

Rasio Likuiditas Liquidity Ratio	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	93,28	107,76	(14,47)	-13,43%
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	71,34	73,20	(1,86)	-2,54%

Baik rasio lancar maupun rasio kas mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunya kas dan setara kas maupun aset lancar Perseroan dibandingkan tahun sebelumnya.

RASIO SOLVABILITAS: KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

$$\text{Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

Kemampuan membayar utang jangka panjang maupun jangka pendek Perseroan terlihat dari rasio solvabilitas yang terdiri dari rasio Utang terhadap Ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER), serta rasio Utang terhadap Aset atau *Debt to Asset Ratio* (DAR), sebagaimana terlihat di bawah ini.

ABILITY TO REPAY DEBT

The Company's ability in repaying debt is measured using solvability and liquidity ratio. Solvability ratio is a ration that measures the Company's ability in paying its entire debt, both short term and long term. Meanwhile, liquidity ratio is used to measure the Company's ability to repay short term debt.

LIQUIDITY RATIO: ABILITY TO PAY SHORT-TERM DEBTS

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Short Term Liability}}$$

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash and Cash Equivalents}}{\text{Short Term Liability}}$$

The Company's ability to repay short term debts is reflected by liquidity ration in which liquidity level can be seen from current ratio and cash ration, as shown below.

Both current ratio and cash ratio decreased compared to the previous year. This decrease was influenced by the decrease in the Company's cash and cash equivalents as well as current assets compared to the previous year.

SOLVENCY RATIO: ABILITY TO PAY SHORT-TERM AND LONG-TERM DEBTS

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Equity}}$$

$$\text{Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Equity}}$$

The Company's ability to repay short term and long term debt is reflected in solvability ration which consists of Debt to Equity Ratio and Debt to Asset Ratio, as shown below.



Rasio Solvabilitas Solvability Ratio	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas terhadap Ekuitas, atau Debt to Equity Ratio (DER) (%) Debt to Equity Ratio (DER) (%)	105,61	157,76	(52,15)	33,06%
Liabilitas terhadap Aset, atau Debt to Asset Ratio (DAR) (%) Debt to Asset Ratio (DAR) (%)	60,79	61,20	(0,41)	-0,68%

Baik DER maupun DAR mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai liabilitas Perseroan, yang dibarengi dengan kenaikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban secara keseluruhan.

Both DER and DAR decreased compared to the previous year. This indicates a decrease in the value of the Company's liabilities, accompanied by an increase in the Company's ability to meet its obligations, both short-term obligations and overall liabilities.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan Perseroan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung nilai *collection period*. Semakin kecil nilai *collection period* menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat.

RECEIVABLES COLLECTABILITY RATE

The Company's ability to collect receivables can be measured using the value of collection period. The smaller the value of this variable, the better the Company's ability in collecting receivables.

$$\text{Collection Period} = \frac{\text{Total Piutang}}{\text{Pendapatan Operasi}} \times 365 \text{ hari}$$

$$\text{Collection Period} = \frac{\text{Total Receivables}}{\text{Operating Revenues}} \times 365 \text{ days}$$

	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)
Kolektibilitas Piutang (hari) Receivables Collectability (days)	6,33	18,66	(12,33)	66,08%

Kolektibilitas Piutang tahun 2020 sebesar 6,33 hari, mengalami penurunan 66,08% atau setara dengan 12,33 poin dibandingkan dengan Kolektibilitas Piutang tahun 2019 sebesar 18,66 hari. Penurunan ini menunjukkan perbaikan tingkat kolektibilitas piutang Perseroan. Adanya penurunan ini terutama disebabkan penurunan signifikan dari piutang usaha di tahun 2020.

Collectability of Receivables in 2020 is 6.33 days, a 66.08% or 12.33 point decrease compared to 2019's 18.66 days. This decrease indicates an improvement in the collectability of the Company's receivables. It was mainly due to a significant decrease in trade receivables in 2020.

Untuk dapat menggambarkan piutang usaha jangka pendek dan jangka panjang, berikut disampaikan piutang usaha berdasarkan umur piutang.

In order to illustrate short term and long term business receivables, the following is an explanation of business receivables by age of receivables.

PIUTANG USAHA BERDASARKAN UMUR PIUTANG BUSINESS RECEIVABLES BY AGE OF RECEIVABLES

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Belum Jatuh Tempo Not Yet Due	46.470	74.267	(27.797)	-66,08%

PIUTANG USAHA BERDASARKAN UMUR PIUTANG
BUSINESS RECEIVABLES BY AGE OF RECEIVABLES

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
1 - 30 Hari 1 - 30 Days	42.890	35.504	7.386	20,80%
31 - 90 Hari 31 - 90 Days	13.408	20.055	(6.647)	-33,14%
91 - 180 Hari 91 - 180 Days	4.321	6.806	(2.484)	-36,50%
> 180 Hari > 180 Days	51.596	51.611	(15)	-0,03%
Sub Jumlah Sub-total	158.685	188.242	(29.558)	-15,70%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Devaluation Loss Reserve	(109.180)	(67.552)	(41.628)	61,62%
Jumlah Piutang Usaha - Bersih Net Total Business Receivables	49.505	120.690	(71.185)	-58,98%

Manajemen berkeyakinan bahwa pencadangan penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang.

The Management is certain the receivables devaluation reserve is sufficient to cover the loss from non-receivables.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL SERTA DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGERIAL POLICY ON CAPITAL STRUCTURE AND BASIS OF POLICYMAKING

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

MANAGERIAL POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The Company's objective in managing capital is to protect the Company's ability in order to maintain business continuity and maximize benefits for shareholders and other party of interest, and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Perseroan secara aktif dan rutin menelaah, dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

The Company actively and regularly reviews, and manages its capital to ensure optimal capital structure and returns for shareholders, taking into account the efficient use of capital based on operating cash flows and capital expenditures, and taking into account future capital requirements.

Perseroan memonitor modal berdasarkan rasio pinjaman bank terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi total pinjaman bank dengan total modal. Modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas yang ada sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The Company also monitors capital based on the ratio of bank loans to capital. This ratio is calculated by dividing total bank loans by total capital. Capital consists of all existing equity components as stated in the consolidated report of financial position.

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

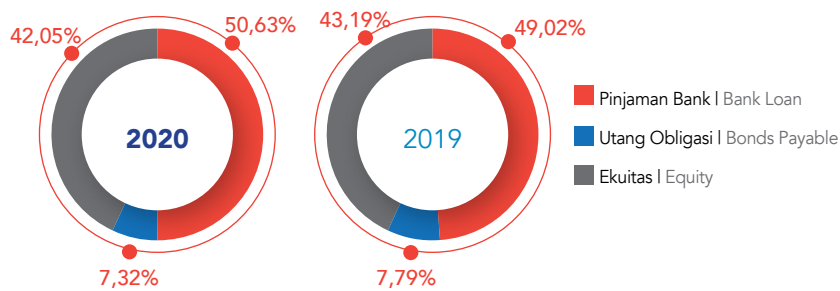
Struktur modal Perseroan yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas dapat dilihat di bawah ini.

COMPANY CAPITAL STRUCTURE

The Company's Capital Structure that consists of interest-based loans and equity can be seen in this table below.



	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Modal Berbasis Utang Loan-Based Capital				
Pinjaman Bank Bank Loan	6.559.750	5.965.567	594.183	9,96%
Utang Obligasi Bonds Payable	948.976	948.223	753	0,08%
Jumlah Modal Berbasis Utang Total Loan-Based Capital	7.508.726	6.913.791	594.936	8,61%
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Parent Entity Owner	5.447.935	5.256.774	191.161	3,64%
Jumlah Modal Total Capital	12.956.661	12.170.564	786.097	6,46%
Rasio Utang terhadap Jumlah Modal (%) Debt to Capital Ratio (%)	57,95%	56,81%	1.15%	2,02%



IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Di tahun 2020 tidak terdapat ikatan material untuk investasi barang modal yang dilakukan oleh Perseroan.

MATERIAL COMMITMENT FOR INVESTMENT OF CAPITAL GOODS

In 2020 there were no material bonds for capital goods investment made by the Company.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

REALIZATION OF INVESTMENT OF CAPITAL GOODS

Investasi Barang Modal Investment of Capital Goods	Tujuan Goals	Nilai (Rp-juta) Nominal (Rp-million)
Bangunan Fasilitas Pelabuhan Port Facilities Building	Pengembangan Usaha Business Development	68.747,53
Kapal Ship	Pengembangan Usaha Business Development	117.654,86
Alat Fasilitas Pelabuhan Port Tool Facilities	Pengembangan Usaha Business Development	22.678,34
Instalasi Fasilitas Pelabuhan Installation of Port Facilities	Pengembangan Usaha Business Development	9.492,77
Jalan dan Bangunan Roads and Buildings	Pengembangan Usaha Business Development	40.882,79
Peralatan Equipment	Operasional Operational	7.600,00
Kendaraan Transportation	Operasional Operational	5.843,58
Penataan/Pengembangan Usaha Structuring/Development of Business	Pengembangan Usaha Business Development	35.055,94

Investasi Barang Modal Investment of Capital Goods	Tujuan Goals	Nilai (Rp-juta) Nominal (Rp-million)
Pengembangan Sistem System Development	Operasional Operational	5.345,31
Jumlah Total		313.301,12

Realisasi Investasi Barang Modal tahun 2020 sebesar Rp313 miliar, turun 82% atau setara dengan Rp1.439 miliar dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.752 miliar. Penurunan ini disebabkan kondisi dan perkembangan situasi hingga pertengahan tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 berimbas pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) nasional serta kebijakan *lockdown* oleh berbagai negara yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pekerjaan investasi tahun 2020.

The value of realization of investment in capital goods in 2020 is Rp313 billion, a 82% or Rp1,439 billion decrease compared to 2019's Rp1,752 billion. This decline was due to conditions and developments in the situation until mid-2020, where the COVID-19 pandemic had an impact on the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) as well as lockdown policies by various countries, which disrupted the implementation of investment projects in 2020.

	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Investment of Capital Goods	313.301,12	1.752.230,00	1.438.929,00	82%

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2020

ASUMSI-ASUMSI YANG DIGUNAKAN SERTA PROSES PERUMUSAN TARGET TAHUN 2020

Rencana kerja dan target kinerja Perseroan tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Untuk RKAP tahun 2020, Perseroan melakukan revisi pada semester II-2020 dalam rangka penyesuaian akibat pandemi COVID-19 dan berbagai perkembangan yang terjadi pada perekonomian dan industri secara nasional, khususnya pada sektor pengangkutan dan transportasi. Revisi RKAP tahun 2020 tersebut disusun berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-46/Wk2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Perubahan RKAP 2020 BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN II, dan Surat Asisten Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN No. S-8/Wk2.MBU.F/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Revisi RKAP Tahun 2020.

Revisi RKAP tahun 2020 dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan situasi hingga pertengahan tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 berimbas pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) nasional serta kebijakan *lockdown* oleh berbagai negara. Revisi RKAP Tahun 2020 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

ACHIEVED TARGETS IN 2020

BASIS OF ASSUMPTIONS AND FORMULATION PROCESS OF TARGETS IN 2020

The work planning and performance targets of the Company are contained in the Work Planning and Corporate Budget (RKAP) document. For the 2020 RKAP, the Company made revisions in the second semester of 2020 in order to adapt to the COVID-19 pandemic and various developments that have occurred in the national economy and industry, particularly in the shipping and transportation sector. The revised RKAP for 2020 was formulated based on the Letter of the Ministry of State Owned Enterprises No. S-46/Wk2.MBU/06/2020 dated 4 June 2020 on the Amendment to the 2020 RKAP for State Owned Enterprises developed by Deputy Minister of BUMN II, and Letter of Assistant Deputy of Transportation Facilities and Infrastructure of the Ministry of State Owned Enterprises No. S-8/Wk2.MBU.F/07/2020 dated 22 July 2020 concerning the Revised RKAP 2020.

The 2020 RKAP revision is carried out in accordance with the conditions and developments up to mid-2020, where the COVID-19 pandemic has an impact on the implementation of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) as well as lockdown policies by various countries. The revision of the 2020 RKAP is carried out with following considerations:



1. Adanya perubahan asumsi makro yang cukup signifikan, yaitu:
 - a) Pertumbuhan ekonomi nasional, dari sebelumnya 5,30% menjadi 2,3%.
 - b) Kurs USD, dari sebelumnya Rp14.400,- per USD menjadi Rp15.500,- per USD.
 - c) Inflasi, dari sebelumnya 3,10% menjadi 3,9%.
2. Adanya dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh signifikan terhadap operasional Perseroan.
3. Prioritas pada investasi yang langsung men-generate pendapatan.

Di bawah ini disajikan pencapaian target tahun 2020 dengan perbandingan antara realisasi tahun 2020 dengan Revisi RKAP tahun 2020.

1. There are significant changes in macro assumptions, namely:
 - a. National economic growth, from previously 5.30% to 2.3%.
 - b. USD exchange rate, from previously Rp14,400 per USD to Rp15,500 per USD.
 - c. Inflation, previously 3.10% to 3.9%.
2. The COVID-19 pandemic had a significant effect on the Company's operation.
3. Priority on investments that directly generates income.

Below is the 2020 target achievements with a comparison between the 2020 realization and the 2020 Revised RKAP.

PENCAPAIAN TARGET OPERASIONAL DAN PEMASARAN TAHUN 2020

OPERATIONAL TARGET AND MARKETING ACHIEVEMENTS IN 2020

Perihal Subject	Satuan Unit	Realisasi 2020	Target 2020	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%)
		Realization 2020	Target 2020	Realization Achievement of 2020 Targets (%)
		1	2	(1:2)
Segmen Petikemas Container Segment				
Terminal Petikemas Internasional	Box	466.835	506.588	92,15%
International Container Terminal	TEUs	595.198	623.662	95,44%
Terminal Petikemas Domestik	Box	695.946	668.706	104,07%
Domestic Container Terminal	TEUs	822.781	792.669	103,80%
Jumlah	Box	1.162.781	1.175.294	98,94%
Total	TEUs	1.417.979	1.416.331	100,12%
Segmen Kepelabuhanan Port Segment				
Kunjungan Kapal Ship Visit				
Pelum Commercial Port (Pelum)				
Luar Negeri	Call	5.865	9.025	64,99%
International	GT	26.294.693	24.780.686	106,11%
Dalam Negeri	Call	27.149	35.225	77,07%
Domestic	GT	33.929.561	29.279.277	115,88%
Sub Jumlah	Call	33.014	44.250	74,61%
Sub Jumlah	GT	60.224.254	54.059.963	111,40%
TUKS Private Interest Port (TUKS)				
Luar Negeri	Call	7.340	5.042	145,58%
International	GT	49.832.642	48.708.736	102,31%
Dalam Negeri	Call	12.383	10.389	119,19%
Domestic	GT	50.602.038	50.376.127	100,45%
Sub Jumlah	Call	19.723	15.431	127,81%
Sub Jumlah	GT	100.434.679	99.084.863	101,36%
Jumlah	Call	52.737	59.681	88,36%
Total	GT	160.658.933	153.144.826	104,91%

Perihal Subject	Satuan Unit	Realisasi 2020	Target 2020	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%)
		Realization 2020	Target 2020	Realization Achievement of 2020 Targets (%)
		1	2	(1:2)
Bongkar Muat Barang				
Goods Loading/unloading				
Ekspor Export	Ton	12.957.034	13.402.475	96,68%
Impor Import	Ton	4.733.570	9.879.007	47,92%
AP Muat AP Loading	Ton	4.049.747	3.284.573	123,30%
AP Bongkar AP Unloading	Ton	10.850.941	10.807.069	100,41%
Jumlah Total	Ton	32.591.292	37.373.124	87,21%
Arus Penumpang				
Passengers Traffic				
Luar Negeri International	Orang Pax	279.444	460.596	60,67%
Dalam Negeri Domestic	Orang Pax	2.207.707	2.184.114	101,08%
Jumlah Total	Orang Pax	2.487.151	2.644.710	94,04%
Pemasaran				
Marketing				
Beban Pemasaran Marketing Expense	Rp-juta Rp-million	10.469	14.115	74,17%
Investasi				
Investment				
Jumlah Investasi Total Investment	Rp-juta Rp-million	474.600	561.572	84,51%

Jika dibandingkan dengan target tahun 2020, kinerja operasi Perseroan tercatat sedikit di bawah target. Pada segmen Petikemas realisasi total produksi bongkar muat petikemas tahun 2020 dalam box dan TEUs masing-masing mencatat pencapaian 98,94% dan 100,12% dibandingkan dengan target, yang terutama disebabkan oleh belum beroperasinya PT Prima Terminal Petikemas yang direncanakan akan beroperasi pada November 2020. Sementara secara TEUs sedikit di atas target yang disebabkan kenaikan pemakaian petikemas 40" di cabang pelabuhan TPK Belawan dan Pekanbaru.

- a. Bongkar Muat Petikemas Internasional
Realisasi Bongkar Muat Petikemas Internasional hingga akhir tahun 2020 mencapai 92,15% untuk box dan 95,44% dalam satuan TEUs. Pencapaian trafik Bongkar Muat Petikemas Internasional ini sejalan dengan belum tercapainya trafik petikemas internasional di TPK Belawan, PMT, dan PTP.
- b. Bongkar Muat Petikemas Domestik
Realisasi Bongkar Muat Petikemas Domestik hingga akhir tahun 2020 melebihi target, yaitu sebesar 104,07% untuk box dan 103,80% untuk ukuran TEUs. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kebutuhan *consumer good* pada saat

When compared to the target in 2020, the Company's operating performance was slightly below target. In the container segment, the total realization of container production in 2020 in box and TEUs recorded an achievement of 98.94% and 100.12% respectively compared to the target, which was mainly due to the inoperation of PT Prima Terminal Petikemas which was expected to operate in November 2020. Meanwhile, TEUs was slightly above target due to the increase in the use of 40" containers at TPK Belawan and Pekanbaru branch.

- a. International Container Loading and Unloading
Realization of International Container Unloading by the end of 2020 reached 92.15% for boxes and 95.44% in Teu's units. The achievement of the International Container Loading and Unloading traffic is in line with the unachieved international container traffic at TPK Belawan, PMT, and PTP.
- b. Loading and Unloading of Domestic Containers
The realization of domestic container loading and unloading by the end of 2020 exceeded target, namely 104.07% for boxes and 103.80% for Teu's unit. This was due to an increase in the need for consumer goods when Large-



pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) waktu itu untuk masyarakat Pekanbaru dan mulai masuknya petikemas *empty* internasional (dari Singapura) sebagai upaya intensifikasi pasar.

Pencapaian target operasi untuk segmen Kepelabuhanan adalah sebagai berikut:

1. Kunjungan Kapal

Realisasi hingga akhir tahun 2020 mencapai 88,36% untuk volume kunjungan kapal dalam satuan *call* dan 104,91% untuk tonase dalam satuan GT. Penurunan kunjungan kapal penumpang disebabkan adanya *physical distancing* dan pembatasan sosial guna pencegahan penyebaran COVID-19 baik di pelabuhan tujuan/asal dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk kapal cargo di pelabuhan umum cenderung mengalami penurunan jumlah kunjungan kapal karena sejalan dengan trafik barang yang dibawa.

Namun secara tonase kapal mencatat pencapaian di atas target yang disebabkan bertambahnya *marketshare* jasa pelayanan kapal di dermaga khusus/TUKS di wilayah cabang Dumai dan Batam khususnya. Hal tersebut seiring dengan upaya manajemen untuk menambah kerja sama dengan pemilik Tersus/TUKS dan agen pelayaran dalam hal pelayanan pemanduan dan penundaan.

2. Bongkar Muat Barang

Realisasi bongkar muat barang di pelabuhan umum hingga akhir tahun 2020 mencatat pencapaian 87,21% dibandingkan target, yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Melemahnya pertumbuhan ekonomi wilayah terutama Sumatera Utara karena aktivitas produksi di pabrik tidak berjalan seperti biasa mengingat adanya himbauan untuk pembatasan sosial.
- Berkurangnya permintaan barang/komoditi dari negara-negara yang juga menerapkan *lockdown* sehingga arus barang yang lewat pelabuhan juga berkurang. Hal ini terlihat dari menurunnya aktivitas ekspor CPO dan turunannya di cabang Pelabuhan Dumai dan Belawan karena berkurangnya permintaan dari luar disebabkan oleh pandemi COVID-19.
- Sudah hampir rampungnya pembangunan jalan tol di beberapa daerah (Pekanbaru dan Kuala Tanjung) sehingga volume bongkar/muat material proyek melalui pelabuhan juga mulai berkurang.

3. Penumpang

Realisasi arus penumpang hingga akhir tahun 2020 mencapai 94,04% dari target tahun 2020, yang disebabkan pemberlakuan pembatasan sosial dan fisik akibat pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap trafik penumpang. Pada awal triwulan IV-2020, trafik arus penumpang mulai

Scale Social Restrictions (PSBB) was implemented by the people of Pekanbaru and the entry of empty international containers (from Singapore) as an effort to intensify the market.

The achievement of operating targets for the Port segment is as follows:

1. Ship Visits

Realization by the end of 2020 reached 88.36% for the volume of ship visits in call units and 104.91% for tonnages in GT units. The decrease in passenger ship visits was due to physical distancing and social restrictions for preventing the spread of COVID-19 at both domestic and international ports of destination/origin. Cargo ships in commercial ports tend have a decrease in the number of ship visits because they travel the same route with the shipment traffic of goods.

However, in terms of ship tonnage, the achievement was above target due to the increase in market share for ship services at special/private interest terminals (TUKS) in Dumai and Batam branch areas. This is in line with management's efforts to increase cooperation with owners of special/private interest terminals and shipping agents in terms of pilotage and towage services.

2. Goods Loading and Unloading

The realization of goods loading and unloading at public ports by the end of 2020 recorded an achievement of 87.21% compared to the target, which was influenced by the following factors:

- The weakening economic growth in the region, especially North Sumatera, because the production activities in factories could not run like it used to, given social restrictions.
- Reduced demand for goods/commodities from countries that are also implementing lockdowns, thus the flow of goods through ports was also reduced. This can be seen from the decline in the exporting activities of CPO and its derivatives at Dumai and Belawan Port branch due to reduced external demand because of the COVID-19 pandemic.
- The construction of toll roads in several areas (Pekanbaru and Kuala Tanjung) is almost complete, so the volume of loading/unloading project materials through the port has also begun to decrease.

3. Passenger

The realization of passenger traffic by the end of 2020 reached 94.04% of the target, which was due to the imposition of social and physical restrictions in the COVID-19 pandemic, which impacted the passenger traffic badly. At the beginning of the quarter IV of 2020,

mengalami peningkatan, meskipun belum sepenuhnya normal terutama untuk pelayaran luar negeri.

Dengan penurunan kegiatan transportasi dan pengangkutan, Perseroan berupaya menekan beban pemasaran, dengan realisasi mencapai 74,17% terhadap anggaran beban pemasaran tahun 2020. Demikian pula pada investasi, di tahun 2020 Perseroan menyerap anggaran investasi sebesar 84,51%. Rendahnya penyerapan anggaran investasi ini tak lepas dari kebijakan efisiensi yang dilakukan di tahun 2020. Di samping itu, Perseroan melakukan optimalisasi aset yang telah dimiliki untuk dapat mendukung kinerja operasi di sepanjang tahun 2020.

passenger traffic began to increase, though it is yet to be fully restored, especially for international shipping.

With such decrease in transportation and transportation activities, the Company seeks to reduce marketing expenses, with the realization reaching 74.17% of 2020 marketing expense budget. The same thing applies to investment, in 2020 the Company obtains an investment budget of 84.51%. The low absorption of the investment budget is inseparable from the efficiency policy implemented in 2020. In addition, the Company has optimized its existing assets to support operating performance throughout 2020.

PENCAPAIAN TARGET SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2020 ACHIEVEMENT OF HUMAN RESOURCE TARGET IN 2020

	Realisasi 2020 Realization 2020	Anggaran 2020 Budget 2020	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%) Realization of Achievement of Target 2020 (%)
	1	2	(1:2)
Jumlah Karyawan (orang) Number of Workers (pax)	1.341	1.352	99,19%
Beban Diklat & Sertifikasi (SDM Operasional) (Rp-juta) Training and Certification Expense (Operational Human Resource) (Rp-million)	377	561	67,11%
Beban Diklat & Sertifikasi (Non-SDM Operasional) (Rp-juta) Training and Certification Expense (Non-operational Human Resources) (Rp-million)	9.115	12.907	70,62%
Beban Kesehatan (SDM Operasional - Mandatory Checkup) (Rp-juta) Health Expense (Operational Human Resources - Mandatory Checkup) (Rp-million)	2.687	3.216	83,53%

Realisasi jumlah karyawan mencapai 99,19% dibandingkan target tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya beberapa karyawan yang telah memasuki masa pensiun dan serta karyawan yang telah meninggal dunia. Di tahun 2020 Perseroan tidak melakukan kebijakan pengurangan tenaga kerja secara massal.

Realization of the number of employees reached 99.19% compared to the 2020 target. This is due to several employees reaching retirement as well as employees who have passed away. In 2020, the Company did not implement any layoff policy.

Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha, Perseroan menerapkan strategi efisiensi biaya yang tercermin dari beban diklat dan sertifikasi mencapai 67,11% untuk SDM Operasional dan 70,62% untuk Non-SDM Operasional. Meskipun demikian, terhadap beban kesehatan bagi karyawan, Perseroan tetap berupaya untuk menciptakan efisiensi bernilai tambah, dengan penyerapan mencapai 83,53% terhadap anggaran tahun 2020.

In order to maintain business continuity, the Company implemented a cost efficiency strategy as reflected in the training and certification expenses reaching 67.11% for Operational HR and 70.62% for Non-operational HR. Even so, regarding the health expense for employees, the Company continues to strive to create value-added efficiency, with absorption reaching 83.53% of the 2020 budget.

PENCAPAIAN TARGET LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN TAHUN 2020 ACHIEVEMENT OF PROFIT (LOSS) TARGET AND OTHER CONSOLIDATED COMPREHENSIVE EARNINGS IN 2020

	Realisasi 2020 (Rp Juta) Realization 2020 (Rp-million)	Anggaran 2020 (Rp Juta) Target 2020 (Rp-million)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%) Achievement Realization of 2020 Target (%)
	1	2	(1:2)
Pendapatan Usaha Business Earnings	3.841.910	3.440.617	111,66%



PENCAPAIAN TARGET LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN TAHUN 2020
ACHIEVEMENT OF PROFIT (LOSS) TARGET AND OTHER CONSOLIDATED COMPREHENSIVE EARNINGS IN 2020

	Realisasi 2020 (Rp Juta) Realization 2020 (Rp-million)	Anggaran 2020 (Rp Juta) Target 2020 (Rp-million)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%) Achievement Realization of 2020 Target (%)
	1	2	(1:2)
Beban Usaha Business Expense	3.165.922	2.532.464	125,01%
Laba Usaha Business Profit	675.988	908.154	74,44%
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax Deduction	211.823	343.272	61,71%
Laba Tahun Berjalan Ongoing Year Profit	183.120	150.176	121,94%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Ongoing Year Comprehensive Profit	181.207	150.176	120,66%

Berikut disampaikan pencapaian kinerja laba rugi Perseroan terhadap target yang tercantum dalam Revisi RKAP tahun 2020.

- **Pendapatan Usaha**
Realisasi pendapatan usaha tahun 2020 mencapai 111,66% terhadap target tahun 2020. Pendapatan usaha terdiri dari pendapatan operasi yang dilakukan Perseroan dan pendapatan konstruksi yang merupakan implikasi penerapan ISAK 16/22 pada tahun 2020 atas kontrak konsesi jasa serta seluruh proyek konsesinya dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sejak perjanjian awal konsesi sampai dengan 31 Desember 2020. Pencapaian target pendapatan usaha terutama disebabkan adanya pendapatan jasa konstruksi yang tidak dicatatkan sebagai target Perseroan. Untuk pendapatan operasi, terdapat beberapa pendapatan yang tercatat berada di atas target, yaitu pendapatan dari Pelabuhan Tersus/Pelsus/Dersus/TUKS serta pendapatan jasa kesehatan (Poliklinik dan Rumah Sakit).

Pendapatan dari Pelabuhan Tersus/Pelsus/Dersus/TUKS membukukan pencapaian 100,98% terhadap target, yang disebabkan peningkatan aktivitas di Lubuk Gaung di mana terdapat kerja sama antara cabang Dumai dengan pihak ketiga dengan mekanisme *sharing* pendapatan pemanduan. Penambahan kegiatan *shifting* kapal di dermaga TUKS juga menambah pendapatan di cabang Pekanbaru. Selain itu peningkatan kunjungan kapal di area Tersus/TUKS (khususnya granit, galangan, dan *oiltanking*) di Tanjung Balai Karimun terdampak dari kebijakan *lockdown* di Pelabuhan Singapura dan Malaysia sehingga menjadikan pelabuhan TBK menjadi destinasi tujuan kapal-kapal yang selama ini bersandar di pelabuhan tersebut.

The following shows the achievement of the Company's profit and loss performance against the target set in the Revised RKAP for 2020.

- **Operating Income**
The realization of business revenues in 2020 reached 111.66% of the 2020 target. Business revenues consisted of operating revenues by the Company and construction revenues, which are the implications of implementing ISAK 16/22 in 2020 for service concession contracts and all concession projects with the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia since the initial concession agreement until December 31, 2020. The achievement of the business revenue target was mainly due to construction service revenue which was not listed as the Company's target. For operating income, there are several revenues recorded to be above the target, namely revenue from the Special Terminal/Port/Private Interest Terminal and revenue from health services (Polyclinics and Hospitals).

Revenue from Special Terminal/Port/Private Interest Terminal (TUKS) achieved 100.98% of the target, which was due to increased activity in Lubuk Gaung where a cooperation was held between the Dumai branch and third parties with a guidance revenue sharing mechanism. The addition of ship shifting activities at the Private Use Terminal pier also increased revenue at Pekanbaru branch. In addition, the increase in ship visits in the TUKS area (especially granite, shipyard, and *oiltanking*) in Tanjung Balai Karimun was impacted by the lockdown policy in Singapore and Malaysia so that TBK port became the prime destination for ships that had been leaning at the port.

Demikian pula pendapatan jasa kesehatan (Poliklinik dan Rumah Sakit) membukukan pencapaian 129,37% terhadap target, yang disebabkan adanya pemeriksaan *Swab Test* bagi masyarakat sekitar RS PHCM maupun kerja sama dengan beberapa perusahaan BUMN dan swasta untuk pemeriksaan *Swab Test* terhadap pegawai, serta kerja sama dengan beberapa Rumah Sakit untuk pemeriksaan *sample Swab Test* yang pemeriksaannya dilakukan di Laboratorium *Bio Safety Level II* RS PHCM sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan Laboratorium dan Klinik Umum. Di samping itu dengan beroperasinya Ruang Isolasi untuk penanganan pasien kasus COVID-19 berdampak pula pada peningkatan pendapatan ruang rawat inap. Peningkatan pendapatan di segmen farmasi sebagai dampak dari peningkatan penjualan obat dan APD. Terdapat juga peningkatan pendapatan *Health Care* yakni pendapatan yang bersumber dari kerja sama JPKP yang penyerapannya untuk biaya perobatan pegawai dan pensiunan terutama di RS PHCM menurun disebabkan kondisi pandemi COVID-19.

Sedangkan pendapatan selain kedua pendapatan di atas tercatat di bawah target. Dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di awal Maret sampai dengan triwulan IV tahun 2020 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah kunjungan kapal-kapal baik domestik dan internasional. Kebijakan *lockdown* di beberapa negara juga menjadi penyebab turunnya trafik kapal untuk kegiatan ekspor/impor, yang kemudian berimbas pada ketidakstabilan pasar pada harga komoditas dunia seperti CPO, batubara, dan bijih besi hingga akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan cabang Pelabuhan Belawan, Dumai, Tanjung Balai Karimun, Lhokseumawe, Tembilahan, dan Gunungsitoli.

- **Beban Usaha**
Realisasi beban usaha tahun 2020 mencapai 125,01% terhadap target tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya beban penurunan nilai aset non-keuangan yang tidak dicatat sebagai target tahun 2020, serta beban amortisasi - aset tak berwujud (Fasar. Kepelabuhanan) yang jauh di atas target. Secara umum, Perseroan berhasil menekan beban pokok dan beban operasi dalam rangka melakukan efisiensi untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang berimbas pada kegiatan operasi dan pencapaian pendapatan tahun 2020.
- **Laba Usaha**
Realisasi laba usaha tahun 2020 mencapai 74,44% terhadap target tahun 2020. Hal ini disebabkan lebih tingginya pencapaian realisasi beban usaha dibandingkan pencapaian realisasi pendapatan usaha terhadap target tahun 2020.

Likewise, health service revenues (Polyclinics and Hospitals) recorded an achievement of 129.37% of the target, which was from the *Swab Test* for the community around the PHCM Hospital as well as collaboration with several state-owned and private companies to conduct *Swab Tests* for employees, as well as collaboration with several Hospitals for examination of *Swab Test* samples whose examinations are carried out at the *Bio Safety Level II* Laboratory of the PHCM Hospital, so that it may generate revenue for the General Laboratory and Clinic. In addition, the operation of Isolation Rooms for handling patients with COVID-19 cases also has an impact on increasing inpatient room revenue. The increase in revenue in the Pharmaceutical segment was due to the increase in sales of drugs and PPE. There was also an increase in Health Care revenue, namely income derived from cooperation with JPKP, whose absorption for medical expenses for employees and retirees, especially at PHCM Hospital, has decreased due to the COVID-19 pandemic conditions.

Meanwhile, revenues other than the two above were recorded below target. The impact of the COVID-19 pandemic between early March and the fourth quarter of 2020 had a significant effect on reducing the number of both international and domestic ship visits. Lockdown policy in several countries was also the cause of the decline in ship traffic for export/import activities, which in turn resulted in market instability for commodity prices such as CPO, coal, and iron ore which ultimately led to a decline in revenue for Port of Belawan, Dumai, Tanjung Balai Karimun, Lhokseumawe, Tembilahan, and Gunungsitoli.

- **Business Expense**
Realization of business expenses in 2020 reached 125.01% of the 2020 target. This was due to an devaluation expense of non-financial assets that were not recorded as part of 2020 target, as well as intangible asset amortization expense (Fasar. Port) which was far above the target. In general, the Company has succeeded in reducing basic expense and operating expenses in order to improve efficiency in dealing with the impact of the COVID-19 pandemic that has affected its operational activities and achievement of revenue target in 2020.
- **Business Profits**
The realization of business profit in 2020 reached 74.44% of the 2020 target. This was due to the higher achievement of business expense realization compared to the achievement of realized business revenue against the 2020 target.



- Laba Sebelum Pajak**
 Realisasi laba sebelum pajak tahun 2020 mencapai 61,71% terhadap target tahun 2020. Hal ini disebabkan beban non-usaha yang mencapai 82,17% terhadap target tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan pencapaian laba usaha terhadap target tahun 2020. Meskipun beban keuangan hanya mencapai 94,73% terhadap target tahun 2020 yang disebabkan penurunan suku bunga pinjaman bank sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memulihkan perekonomian nasional, nilai beban keuangan yang cukup besar berpengaruh terhadap realisasi beban non-usaha tahun 2020.
- Laba Tahun Berjalan**
 Realisasi laba tahun berjalan tahun 2020 mencapai 121,94% terhadap target tahun 2020. Hal ini disebabkan rendahnya realisasi beban pajak penghasilan yang sebesar 14,86% dibandingkan target tahun 2020.
- Laba Komprehensif Tahun Berjalan**
 Realisasi laba komprehensif tahun berjalan tahun 2020 mencapai 120,66% terhadap target tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya realisasi penghasilan komprehensif lain tahun berjalan yang tidak dicatat dalam target tahun 2020.
- Profit Before Tax Deduction**
 The realization of profit before tax deduction in 2020 reached 61.71% of the 2020 target. This was due to non-operating expenses which reached 82.17% of the 2020 target, higher than the achievement of business profit against the 2020 target. Even though the financial expense only reached 94.73% of the 2020 target due to lower bank loan interest rates as part of the Government's policy to restore the national economy, financial expense still has quite a large impact on the realization of non-business expenses in 2020.
- Ongoing Year Profit**
 Realized profit for 2020 reached 121.94% of the target. This was due to the low realization of income tax expense, only 14.86% compared to the 2020 target.
- Comprehensive Ongoing Year Profit**
 Realization of comprehensive profit for the 2020 reached 120.66% of the target. This was due to the realization of other comprehensive revenue for the ongoing year which was not recorded in the 2020 target.

PENCAPAIAN TARGET POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN, STRUKTUR MODAL, DAN DIVIDEN TAHUN 2020
ACHIEVEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION, CAPITAL STRUCTURE, AND DIVIDEND TARGET IN 2020

	Realisasi 2020 (Rp Juta) Realization 2020 (Rp-million)	Anggaran 2020 (Rp Juta) Target 2020 (Rp-million)	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2020 (%) Achievement Realization of 2020 Target (%)
	1	2	(1:2)
Aset Assets			
Aset Lancar Current Asset	2.046.355	2.386.111	85,76%
Aset Tidak Lancar Non-current Asset	13.919.787	14.200.730	98,02%
Jumlah Aset Total Asset	15.966.142	16.586.841	96,26%
Liabilitas dan Ekuitas Liability and Equity			
Liabilitas Liability			
Liabilitas Jangka Pendek Short Term Liability	2.193.720	1.122.120	195,50%
Liabilitas Jangka Panjang Long Term Liability	7.511.890	8.855.954	84,82%
Jumlah Liabilitas Total Liability	9.705.610	9.978.074	97,27%
Jumlah Ekuitas Total Equity	6.260.533	6.608.768	94,73%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liability and Equity	15.966.142	16.586.841	96,26%

Berikut disampaikan pencapaian kinerja posisi keuangan Perseroan terhadap target yang tercantum dalam Revisi RKAP tahun 2020.

1. Aset

Realisasi jumlah aset tahun 2020 mencapai 96,26% dibandingkan target tahun 2020. Berikut disampaikan pencapaian target aset tahun 2020.

- Aset Lancar

Realisasi jumlah aset lancar tahun 2020 mencapai 85,76% dibandingkan target tahun 2020. Hal ini sejalan dengan belum tercapainya target penerimaan kas dari pendapatan usaha serta pengakuan pajak dibayar di muka sejalan dengan aturan tarif pajak penghasilan badan yang baru.

- Aset Tidak Lancar

Realisasi jumlah aset tidak lancar tahun 2020 mencapai 98,02% dibandingkan target tahun 2020. Belum tercapainya jumlah aset tidak lancar terutama disebabkan pencapaian nilai aset lancar yang masih di bawah target sebesar 48,19% yang disebabkan adanya tambahan nilai aset tetap tanah di PT PPK atas reklasifikasi aset yang sebelumnya dicatat sebagai properti investasi. Untuk target penambahan aset tetap dari investasi hanya mencapai 80% dari RKAP Investasi 2020 dan dikurangi dengan penyusutan tahun 2020.

2. Liabilitas

Realisasi jumlah liabilitas tahun 2020 mencapai 97,27% dibandingkan target tahun 2020. Berikut disampaikan pencapaian target liabilitas tahun 2020.

- Liabilitas Jangka Pendek

Realisasi jumlah liabilitas jangka pendek tahun 2020 mencapai 195,50% dibandingkan target tahun 2020. Tingginya realisasi liabilitas jangka pendek terhadap target tahun 2020 disebabkan beberapa hal:

- Terlampauinya target utang usaha kepada pihak ketiga.
- Terlampauinya target bagian lancar atas liabilitas jangka panjang.
- Terlampauinya target liabilitas keuangan jangka pendek lainnya.

- Liabilitas Jangka Panjang

Realisasi jumlah liabilitas jangka panjang tahun 2020 mencapai 84,82% dibandingkan target tahun 2020. Hal ini disebabkan lebih rendahnya realisasi utang bank lembaga keuangan jangka panjang dan utang obligasi terhadap target tahun 2020.

4. Ekuitas

Realisasi jumlah ekuitas tahun 2020 mencapai 94,73% dibandingkan target tahun 2020. Hal ini antara lain disebabkan karena pengaruh penyajian kembali terhadap pengakuan aset tetap, aset tak berwujud, beban penyusutan aset tetap dan tidak berwujud serta seluruh proyek konsesi dengan Kementerian Perhubungan, dan

The following shows the achievement of the Company's financial position performance against the targets set in the Revised RKAP of 2020.

1. Assets

The realization of total assets in 2020 reached 96.26% against the target. The following shows the achievement of the 2020 asset target.

- Current Asset

The realization of total current assets in 2020 reached 85.76% compared to the target. This is in line with the unachieved target of cash earnings from business revenue and the recognition of prepaid taxes is in line with the new corporate income tax regulations.

- Non-current assets

The realization of the number of non-current assets in 2020 reached 98.02% against the target. Non-current assets were not achieved mainly due to the achievement of the current assets value which was still below the target of 48.19% caused by the additional value of land fixed assets at PT PPK on the reclassification of assets previously recorded as investment property. The target of adding fixed assets from investment only reached 80% of the 2020 Investment RKAP and was reduced by 2020 depreciation.

2. Liabilities

The realization of total liabilities in 2020 reached 97.27% against the target. The following shows the achievement of the liability target in 2020.

- Short-term liability

Realization of total short-term liabilities in 2020 reached 195.50% compared to the target. The high realization of short-term liabilities against the 2020 target was caused by the following things:

- Exceeding the target of trade debts to third parties.
- Exceeding the target of the current portion of long-term liability.
- Exceeding the target of other short-term financial liabilities.

- Long-term Liability

The realization of total long-term liability in 2020 reached 84.82% against the target. This was due to the lower realization of bank loans from long-term financial institutions and bonds payable against the 2020 target.

4. Equity

The realization of total equity in 2020 reached 94.73% compared to the target. This was due to the restatement effect on the recognition of fixed assets, intangible assets, depreciation expense for fixed and intangible assets, as well as all concession projects with the Ministry of Transportation, and recalculation of return expense which



perhitungan kembali beban imbalan pasti yang dikoreksi kepada saldo cadangan pada laporan keuangan tahun 2018 dan 2019. Selain itu, lebih rendahnya realisasi nilai ekuitas tahun 2020 terhadap target tahun 2020 juga disebabkan tidak tercapainya target laba sampai dengan triwulan IV tahun 2020.

PROYEKSI TAHUN 2021

PROSPEK USAHA TAHUN 2021 DAN RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan laporan OECD *Economic Outlook* edisi Juni 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 terkontraksi alias minus 6% hingga 7,6%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi Bank Dunia yang minus 5,2%. Kondisi ekonomi global minus 7,6% akibat masih berlanjutnya gelombang wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) kedua yang memukul ekonomi global menjelang akhir tahun ini, dan tingkat pengangguran global naik menjadi 10% dan pertumbuhan perdagangan global terkontraksi 11,4%.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tekanan pada perekonomian sepanjang semester I tahun 2020 terutama disebabkan adanya pembatasan sosial di tingkat daerah secara masif untuk mengendalikan penyebaran COVID-9. Terlihat pada menurunnya konsumsi masyarakat di sektor transportasi, restoran, dan hotel, juga rendahnya realisasi investasi.

Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2020 sudah semakin membaik dibanding triwulan II 2020, di mana pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2020 tercatat sebesar 2,97% jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yang biasanya dicapai Indonesia di kisaran 5%. Dan berada dibawah asumsi RKAP 2020 yang sebesar 5,30%. Untuk laju inflasi semester I tahun 2020 rata-rata sebesar 2,55% atau masih lebih rendah dibandingkan asumsi RKAP 2020 sebesar 3,10%, sedangkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS semester I 2020 ditutup pada level Rp14.307 per USD yang berarti melemah dan berada di bawah asumsi RKAP 2020 yang ditetapkan sebesar Rp14.400 per USD.

Dalam RKAP Pelindo 1 tahun 2021, prospek tahun 2021 tertuang dalam asumsi dasar penyusunan RKAP tahun 2021 dengan menggunakan asumsi yang sama dengan penyusunan RAPBN tahun 2021 dan *outlook* APBN tahun 2020.

was corrected to reserve balance in 2018 and 2019 financial statements. In addition, the lower realization of equity value in 2020 against the target was also due to the failure to achieve the profit target by the fourth quarter of 2020.

PROJECTIONS FOR 2021

BUSINESS PROSPECT AND STRATEGIC PLANNING FOR 2021

Based on June 2020 edition of the OECD Economic Outlook report, the projected global economic growth in 2020 will contract, or minus 6% to 7.6%. The economic growth projection is much lower than the World Bank projection of minus 5.2%. The global economic condition is minus 7.6% as the second wave of COVID-19 outbreak hit global economy towards the end of this year. Global unemployment rate rose to 10% and global trade growth contracted by 11.4%.

Indonesia as a developing country is also experiencing a slowdown in economic growth. Pressure on the economy throughout the first semester of 2020 was mainly due to massive social restrictions at the regional level to control the spread of the COVID-19. It can be seen from the decline in public consumption of services in transportation, restaurant, and hotel sectors, as well as the low realization of investment.

The Ministry of Finance estimates that economic growth in the third quarter of 2020 has improved compared to the second quarter of 2020, where economic growth in the first semester of 2020 was recorded at 2.97%, far below the economic growth usually achieved by Indonesia in the range of 5%. And under the 2020 RKAP assumption of 5.30%. The inflation rate for Semester I 2020 is an average of 2.55% or still lower than the 2020 RKAP assumption of 3.10%, while the Rupiah exchange rate against the US Dollar in the first semester of 2020 is closed at the level of Rp14,307 per USD which means that it has weakened and is under the assumption of the 2020 RKAP which set it at Rp14,400 per USD.

In Pelindo 1's RKAP for 2021, the prospects for 2021 are contained in the basic assumptions for preparing the 2021 RKAP using the same assumptions as for the preparation of the Projected State Budget for 2021 and the outlook for the 2020 State Budget.

Perihal Subject	Tahun 2021 Year 2021
Pertumbuhan Ekonomi Economic Growth	4,30% - 5,50%
Inflasi Inflation	3,00%
Nilai Tukar Exchange Rate	Rp14.600
Suku Bunga Interest Rate	7,90%

Untuk menghadapi kondisi tahun 2021 yang belum lepas dari pandemi COVID-19, Perseroan memproyeksikan berbagai langkah-langkah yang akan, sebagai berikut:

1. Melakukan penghematan beban (*cost effectiveness*) dengan menyeimbangkan kenaikan pendapatan harus lebih tinggi dibanding biaya operasi;
2. Melakukan *revenue enhancement* melalui perikatan kerja sama pelayanan *marine service* di TUKS-TUKS dan di wilayah perairan Selat Malaka, negosiasi peningkatan tarif pelayanan kerja sama Bongkar Muat (B/M) petikemas, dan negosiasi perjanjian persewaan lahan;
3. Menyesuaikan kembali asumsi-asumsi yang digunakan (termasuk asumsi tingkat pengembalian investasi yang diharapkan) terhadap investasi-investasi yang belum terealisasi (mengurangi *capital expenditure*) sehingga hanya investasi yang langsung *generate* pendapatan dan investasi untuk keselamatan pelayanan operasi yang diutamakan;
4. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset tetap milik sendiri;
5. Terjadinya *recovery* pandemi COVID-19 pada Q4 tahun 2020;
6. Sudah diterapkannya PSAK Nomor: 71, 72, dan 73.

Sasaran strategis kualitatif Perseroan tahun 2021 masih menggunakan asumsi pada RJPP periode 2020 - 2024. Sasaran-sasaran ini masih mendukung program-program kerja manajemen, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan bisnis inti (*core business enhancement*) di *hinterland-hinterland* dengan berbasis teknologi, sebagaimana berikut:

- a. *Core Business Enhancement*
 1. Peningkatan kualitas dan pangsa pasar pelayanan kapal (*marine services*);
 2. *Voluntary pilotage services*, STS, dan *Anchorage Service* di Selat Malaka dan Singapura;
 3. Peningkatan pelayanan dan trafik barang;
 4. Pelayanan logistik terintegrasi (pelayanan barang *port-to-end*);
 5. Peningkatan pelayanan penumpang dan bisnis turunannya dari kapal penumpang, *ferry*, dan *cruise*;
 6. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Facing the conditions in 2021 that have not been separated from the COVID-19 pandemic, the Company is projecting various steps that will be, as follows:

1. Optimization of expense (*cost effectiveness*) by balancing the increase in revenue must be higher than operating costs;
2. Conducting *revenue enhancement* through marine service cooperation agreements in private interest terminals (TUKS) and in the waters of the Malacca Strait, negotiating an increase in container loading and unloading service tariffs, and negotiating land lease agreements;
3. Readjusting the assumptions used (including the expected rate of return on investment) against investments that have not been realized (reducing capital expenditure) so that only investments that directly generate income and investments for the safety of operational services are prioritized;
4. Optimizing the use of Company's fixed assets;
5. The recovery from the COVID 19 pandemic in Q4 2020;
6. The implementation of PSAK Numbers: 71, 72, and 73.

The Company's qualitative strategic targets for 2021 still use the assumptions in the RJPP for the 2020-2024 period. These targets still support management work programs, namely improving the quality of core business services (*core business enhancement*) in *hinterland-hinterland* on a technology-based basis, as follows :

- a. *Core Business Enhancement*
 1. Increasing the quality and market share of marine services;
 2. *Voluntary pilotage services*, STS, and *Anchorage Service* in the Straits of Malacca and Singapore;
 3. To improve services and traffic of goods;
 4. Integrated logistics services (*port-to-end goods service*);
 5. Improving passenger services and business derivatives from passenger ships, ferries, and cruises;
 6. Development of the Kuala Tanjung.



b. *Hinterland-Based Diversification*

1. Perawatan kapal dan pengerukan untuk efisiensi perawatan kapal dan kolam pelabuhan;
2. Pengembangan dan pendayagunaan aset properti (tanah dan bangunan);
3. Pengembangan kawasan industri di Kuala Tanjung;
4. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan pangsa pasar dan layanan baru.

c. *Enablers (untuk mendukung operational dan service excellence)*

1. Peningkatan kapasitas pelabuhan (pendalaman alur pelabuhan, penambahan fasilitas, dan peralatan);
2. Standardisasi operasi dan layanan;
3. Penguatan pelaporan kinerja secara sistem;
4. Implementasi *Customer Relationship Management*;
5. Implementasi IT untuk mendukung *Operational and Service Excellent*;
6. Penyelarasan struktur organisasi dan tata kelola;
7. Peningkatan kapabilitas dan *rightsizing* SDM untuk mendukung pertumbuhan bisnis;
8. Peningkatan sinergi bisnis antar Cabang Pelabuhan dan Entitas Usaha;
9. Restrukturisasi portofolio bisnis;
10. Restrukturisasi keuangan untuk penguatan profil rasio finansial;
11. Inisiatif BUMN: Pelindo *Incorporated* dan *Holding Maritim*.

b. *Hinterland-Based Diversification*

1. Ship maintenance and dredging for efficient maintenance of ships and port basins;
2. Development and utilization of property assets (land and buildings);
3. Development of industrial area in Kuala Tanjung;
4. Increasing health services through an increase in market share and new services.

c. *Enablers (to support operations and service excellence)*

1. Increasing port capacity (deepening port channels, adding facilities, and equipment);
2. Standardization of operations and services;
3. Strengthening the performance reporting system;
4. Implementation of *Customer Relationship Management*;
5. IT Implementation to Support *Operational and Excellent Service*;
6. Alignment of organizational structure and governance;
7. Increasing the capability and *rightsizing* of human resources to support business growth;
8. Increasing business synergy between Port Branches and Business Entities;
9. Business portfolio restructuring;
10. Financial restructuring to strengthen the profile of financial ratios;
11. State Owned Enterprise (BUMN) Initiatives: *Pelindo Incorporated* and *Maritime Holding*;

PROYEKSI PENGEMBANGAN BISNIS PELINDO 1 TAHUN 2021

- Perluasan CY dan Penyiapan TPS (Kawasan Pabean) dengan nilai anggaran sebesar Rp6,69 miliar, tujuan investasi adalah untuk mendukung kelancaran pelayanan kegiatan operasional ekspor dan impor.
- Pembuatan RTG Pad di Pelabuhan Perawang dengan nilai anggaran sebesar Rp30 miliar, tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan operasional Terminal Petikemas Pelabuhan Perawang.
- Pembangunan dan pengembangan *Integrated Billing System Corporate* dengan nilai anggaran sebesar Rp3,5 miliar, tujuan investasi adalah untuk pengembangan integrasi dan digitalisasi bisnis Perseroan.
- Pengadaan perangkat pendukung implementasi aplikasi *eMarine* dengan nilai anggaran sebesar Rp4 miliar, tujuan investasi adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kegiatan operasional bisnis *marine services* menggunakan *platform* aplikasi di era *digital* pada revolusi industry 4.0 di lingkungan Perseroan.
- Pemasangan *sheet pile* Fase 1, pengerukan dan pemasangan matras di Fase 2 dengan nilai anggaran sebesar Rp184 miliar, tujuan investasi adalah untuk proteksi kedalaman kolam Pelabuhan Belawan.
- Implementasi Sinergi dan Integrasi Pelindo (*Merger* PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)) dengan nilai anggaran sebesar Rp11,25 miliar, tujuan investasi adalah untuk ikut serta dalam mendukung program Integrasi Bisnis Kepelabuhanan baik dalam lingkup *core business* maupun *non-core business* Pelindo (*merger* PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)).
- Expansion of CY and TPS (Pabean Area) with a budget of Rp6.69 billion, the goal of this investment is to improve delivery of service in export and import operational activities.
- Building of RRG Pad in Parawang Port, with a budget of Rp30 billion, the goal of which is improve performance and operational service of Perawant Port Container Terminal.
- Building and Development of Integrated Billing System Corporate with a budget of Rp3.5 billion, the goal of which is integration development and digitalization of the Company's business.
- Procurement of Supporting Implementing Tools of eMarine Application, with a budget of Rp4 billion, the goal of which is to improve service and business operational activities of marine services using application platform in this Industrial Revolution 4.0 digital era in the Company's area.
- Installation of sheet pile Phase 1, dredging and installation of mattress in Phase-2 with a budget of Rp184 billion, the goal of which is to protect the depth of Belawan Port's basin.
- Implementation of Synergy and Integration of Pelindo (Merger of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)) with a budget of Rp11.25 billion, the goal of which is to support the Port Business Integration, be it in the core business or non-core business scope of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)).

PROYEKSI KINERJA TAHUN 2021

PERFORMANCE PROJECTION 2021

Proyeksi Kinerja Operasional dan Pemasaran Tahun 2021

Operational Performance and Marketing Projections for 2021

Perihal Subject		Realisasi 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2021 Terhadap Realisasi 2020 (%)
		Realization 2020	Projection 2021	Projection 2021 against Realization 2020 (%)
		1	2	(2:1)
Segmen Petikemas Container Segment				
Terminal Petikemas Internasional	Box	466.835	522.474	111,92%
International Container Terminal	TEUs	595.198	682.175	114,61%
Terminal Petikemas Domestik	Box	695.946	773.964	111,21%
Domestic Container Terminal	TEUs	822.781	886.797	107,78%
Jumlah	Box	1.162.781	1.296.438	111,49%
Total	TEUs	1.417.979	1.568.971	110,65%
Segmen Kepelabuhanan Port Segment				
Kunjungan Kapal Ship Visit				



Perihal Subject		Realisasi 2020 Realization 2020	Proyeksi 2021 Projection 2021	Proyeksi 2021 Terhadap Realisasi 2020 (%) Projection 2021 against Realization 2020 (%)
		1	2	(2:1)
Pelabuhan Umum (Pelum) Commercial Port (Pelum)				
Luar Negeri International	Call	5.865	6.461	110,16%
	GT	26.294.693	25.065.145	95,32%
Dalam Negeri Domestic	Call	27.149	35.320	130,10%
	GT	33.929.561	29.413.215	86,69%
Sub Jumlah Sub-total	Call	33.014	41.782	126,56%
	GT	60.224.254	54.478.360	90,46%
TUKS Private Interest Terminal (TUKS)				
Luar Negeri International	Call	7.340	14.775	201,29%
	GT	49.832.642	99.330.235	199,33%
Dalam Negeri Domestic	Call	12.383	17.362	140,21%
	GT	50.602.038	64.286.551	127,04%
Sub Jumlah Sub-total	Call	19.723	32.138	162,95%
	GT	100.434.679	163.616.786	162,91%
Jumlah Total	Call	52.737	73.919	140,17%
	GT	160.658.933	218.095.146	135,75%
Bongkar Muat Barang Cargo Loading/Unloading				
Ekspor Export	Ton	12.957.034	12.604.150	97,28%
Impor Import	Ton	4.733.570	2.498.916	52,79%
AP Muat AP Load	Ton	4.049.747	4.034.531	99,62%
AP Bongkar AP Unload	Ton	10.850.941	11.141.409	102,68%
Jumlah Total	Ton	32.591.292	30.279.006	92,91%
Arus Penumpang Passenger Traffic				
Luar Negeri International	Orang Pax	279.444	624.036	223,31%
Dalam Negeri Domestic	Orang Pax	2.207.707	3.490.223	158,09%
Jumlah Total	Orang Pax	2.487.151	4.114.259	165,42%
Beban Pemasaran Marketing Expense				
Beban Pemasaran Marketing Expense	Rp-juta Rp-million	10.469	15.277	145,93%

Berikut disampaikan rincian proyeksi kinerja operasi dan pemasaran tahun 2021.

1. Segmen Petikemas

Kegiatan bongkar muat petikemas di tahun 2021 secara keseluruhan diharapkan mampu tumbuh, yaitu tumbuh 11,49% untuk satuan box dan tumbuh 10,65% untuk satuan TEUs dibandingkan realisasi tahun 2020.

The following provides details of the projected operational and marketing performance in 2021.

1. Container segment

Overall container loading and unloading activities in 2021 are expected to grow by 11.49% for box units and by 10.65% for TEUs units compared to the realization in 2020.

- Bongkar Muat Petikemas Internasional
Kegiatan bongkar muat petikemas internasional di tahun 2021 diharapkan mampu tumbuh, yaitu tumbuh 11,92% untuk satuan *box* dan tumbuh 14,61% untuk satuan TEUs dibandingkan realisasi tahun 2020. Pertumbuhan ini terutama diproyeksikan dari beberapa hal, yaitu:
 - a. Penambahan *throughput* di PT Prima Terminal Petikemas yang direncanakan akan beroperasi di tahun 2021 secara *stand alone* untuk 1 (satu) triwulan.
 - b. Penambahan *throughput* di PT Prima Multi Terminal.
 - c. Pembukaan pelayanan petikemas Internasional perdana di Dumai.
 - Bongkar Muat Petikemas Domestik
Kegiatan bongkar muat petikemas domestik di tahun 2021 diharapkan mampu tumbuh, yaitu tumbuh 11,21% untuk satuan *box* dan tumbuh 7,78% untuk satuan TEUs dibandingkan realisasi tahun 2020. Kenaikan ini terutama didapatkan dari:
 - a. Penambahan *throughput* di cabang TPK Belawan domestik.
 - b. Penambahan pelayanan petikemas domestik di Tanjungpinang.
 - c. Penambahan *throughput* di Pekanbaru.
4. Segmen Kepelabuhanan
- Kunjungan Kapal
Secara umum, kunjungan kapal diharapkan mampu tumbuh, yaitu 40,17% untuk satuan *call* dan 35,75% untuk satuan GT terhadap realisasi tahun 2020. Pada Pelabuhan Umum, untuk satuan *call* diproyeksikan dapat tumbuh 26,56% dibandingkan realisasi tahun 2020, namun untuk satuan GT diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar 9,54% dibandingkan realisasi tahun 2020. Untuk TUKS, proyeksi pertumbuhan cukup optimistis, yaitu 62,95% untuk satuan *call* dan 62,91% untuk satuan GT. Proyeksi kunjungan kapal ini sejalan dengan fokus bisnis Perseroan yaitu pengembangan bisnis *marine service* yang meliputi pelayanan pemanduan dan penundaan di Tersus/TUKS dan Selat Malaka. Selain itu, kegiatan pelayanan *marine* di Tersus/TUKS cabang Batam dan pelayanan kapal di Tersus/TUKS cabang Pekanbaru serta cabang Dumai diproyeksikan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja kunjungan kapal di tahun 2021. Selain itu, beroperasinya kembali trafik kapal penumpang di pelabuhan umum di cabang pelabuhan Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Sibolga, Gunungsitoli, dan Tembilahan diharapkan juga akan menciptakan potensi bagi peningkatan kunjungan kapal di tahun 2021.
 - International Container Loading and Unloading
International container loading and unloading activities in 2021 are expected to grow by 11.92% for box units and by 14.61% for TEUs units compared to the realization in 2020. This growth is mainly projected based on several things, namely:
 - a. Increased throughput at PT Prima Terminal Petikemas which is planned to operate in 2021 on a stand-alone basis for 1 (one) quarter.
 - b. Increased throughput at PT Prima Multi Terminal.
 - c. The opening of the inaugural international container service in Dumai.
 - Domestic Container Loading and Unloading
Domestic container loading and unloading activities in 2021 are expected to grow by 11.21% for box units and by 7.78% for TEUs units compared to the realization in 2020. This increase was mainly obtained from:
 - a. Increased throughput at domestic Belawan TPK branches.
 - b. Additional domestic container services in Tanjungpinang.
 - c. Increased throughput in Pekanbaru.
4. Port Segments
- Ship Visits
In general, ship visits are expected to grow by 40.17% for call units and by 35.75% for GT units for the 2020 realization. At Public Ports, call units are projected to grow by 26.56% compared to the realization in 2020, however for GT units it is projected to decrease by 9.54% compared to the realization in 2020. For TUKS, the projected growth is quite optimistic, namely by 62.95% for call units and by 62.91% for GT units. The projected ship visits are in line with the Company's business focus, namely the development of the marine service business, which includes pilotage and towage services in Special/Private Interest Terminal (TUKS) and the Malacca Strait. In addition, marine service activities at the Special Terminal/TUKS Batam branch and ship services at Pekanbaru branch of Special Terminal/TUKS and Dumai branch are projected to improve the performance of ship visits in 2021. In addition, the reoperation of passenger ship traffic at public ports at Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Sibolga, Gunungsitoli, and Tembilahan ports are also expected to increase ship visits in 2021.



- **Bongkar Muat Barang**
Produksi bongkar muat barang tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan 7,09% terhadap realisasi tahun 2020. Penurunan terutama akan dirasakan pada bongkar muat impor tahun 2021 yang diproyeksikan mengalami penurunan hingga 47,21% dibandingkan realisasi tahun 2020.
- **Arus Penumpang**
Arus penumpang tahun 2021 diproyeksikan tumbuh 65,42% terhadap realisasi tahun 2020. Arus penumpang luar negeri diharapkan tumbuh 123,31% sedangkan dalam negeri diproyeksikan tumbuh 58,09% dibandingkan realisasi tahun 2020. Perseroan menempatkan asumsi positif, bahwa di tahun 2021 situasi telah cukup normal dengan adanya rencana program vaksinasi di awal tahun 2021 sehingga kunjungan kapal penumpang diprediksi akan normal. Kenaikan proyeksi tahun 2021 terhadap realisasi 2020 diprediksi masih didominasi oleh peningkatan trafik penumpang dalam dan luar negeri di cabang Pelabuhan Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun.
- **Goods Loading and Unloading**
The production of goods loading and unloading in 2021 is projected to decrease by 7.09% compared to the realization in 2020. The decline will mainly be felt in the loading and unloading of goods in 2021 which is projected to decrease by 47.21% compared to the realization in 2020.
- **Passenger Traffic**
Passenger traffic in 2021 is projected to grow by 65.42% compared to the realization in 2020. The traffic of international passengers is expected to grow by 123.31%, while domestic traffic is projected to grow by 58.09% compared to the realization in 2020. The Company makes a positive assumption that in 2021 the situation would be quite normal by the presence of vaccination program plan in early 2021 so passenger ship visits are projected to be back to normal. It is predicted that the increase in the 2021 projection compared to the 2020 realization will still be dominated by the increase in domestic and international passenger traffic at Tanjungpinang Port and Tanjung Balai Karimun branches.

PROYEKSI KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2021
PROJECTION OF HUMAN RESOURCES IN 2021

Uraian Subject	Realisasi 2020 2020 Realization	Proyeksi 2021 2021 Projection	Proyeksi 2021 Terhadap Realisasi 2020 (%) 2021 Projection against 2020 Realization (%)
	1	2	(1:2)
Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees (pax)	1.341	1.311	97,76%
Beban Diklat & Sertifikasi (SDM Operasional) (Rp-juta) Training and Certification Expense (Operational HR) (Rp-million)	377	600	159,28%
Beban Diklat & Sertifikasi (Non-SDM Operasional) (Rp-juta) Trainign and Certification Expense (Non-operational HR) (Rp-million)	9.115	14.274	156,61%
Beban Kesehatan (SDM Operasional - Mandatory Checkup) (Rp-juta) Health Expense (Operational HR - Mandatory Checkup) (Rp-million)	2.687	3.181	118,41%

Dengan asumsi optimis akan kinerja operasi yang akan berdampak terhadap pendapatan, Perseroan memproyeksikan pertumbuhan biaya diklat dan sertifikasi, baik untuk operasional dan non-operasional. Di samping itu, Perseroan juga menganggarkan peningkatan biaya kesehatan berupa *Mandatory Checkup*. Untuk jumlah karyawan diproyeksikan mengalami sedikit penurunan sejalan dengan optimalisasi SDM yang dilakukan Perseroan.

With the optimistic assumption that operating performance will have an impact on revenue, the Company is projecting growth in training and certification expense for both operational and non-operational purposes. In addition, the Company has also budgeted for an increase in health expense in the form of a *Mandatory Checkup*. The number of employees is projected to experience a slight reduction in line with the optimization of human resources carried out by the Company.

PROYEKSI KINERJA LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN TAHUN 2021
PROJECTION OF PROFIT (LOSS) PERFORMANCE AND OTHER CONSOLIDATED COMPREHENSIVE EARNINGS IN 2021

	Realisasi 2020 (Rp-juta) 2020 Realization (Rp-million)	Proyeksi 2021 (Rp-juta) 2021 Projection (Rp-million)	Proyeksi 2021 Terhadap Realisasi 2020 (%) 2021 Projection against 2020 Realization (%)
	1	2	(1:2)
Pendapatan Usaha Business Revenue	3.841.910	4.112.581	107,05%
Beban Usaha Business Expense	3.165.922	3.003.530	94,87%
Laba Usaha Business Profit	675.988	1.109.051	164,06%
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax Deduction	211.823	442.548	208,92%
Laba Tahun Berjalan Ongoing Year Profit	183.120	396.657	216,61%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Ongoing Year Profit	181.207	396.657	218,90%

PROYEKSI KINERJA POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN, STRUKTUR MODAL, DAN DIVIDEN TAHUN 2021
PROJECTION OF CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION, CAPITAL STRUCTURE, AND DIVIDEND PERFORMANCE IN 2021

	Realisasi 2020 (Rp-juta) 2020 Realization (Rp-million)	Proyeksi 2021 (Rp-juta) 2021 Projection (Rp-million)	Proyeksi 2021 Terhadap Realisasi 2020 (%) 2021 Projection against 2020 Realization (%)
	1	2	(1:2)
Aset Assets			
Aset Lancar Current Asset	2.046.355	2.031.419	99,27%
Aset Tidak Lancar Non-Current Asset	13.919.787	17.793.688	127,83%
Jumlah Aset Total Asset	15.966.142	19.825.106	124,17%
Liabilitas dan Ekuitas Liability and Equity			
Liabilitas Liability			
Liabilitas Jangka Pendek Short Term Liability	2.193.720	1.375.295	62,69%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Long Term Liability	7.511.890	11.677.480	155,45%
Jumlah Liabilitas Total Liability	9.705.610	13.052.775	134,49%
Jumlah Ekuitas Total Equity	6.260.533	6.772.332	108,18%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liability and Equity	15.966.142	19.825.106	124,17%

Berikut disampaikan proyeksi kinerja posisi keuangan Perseroan tahun 2021 terhadap realisasi tahun 2020.

1. Aset

Di tahun 2021, Perseroan memproyeksikan jumlah aset dapat tumbuh 24,17% dibandingkan realisasi tahun 2020. Berikut disampaikan proyeksi aset tahun 2021.

The following is the projected performance of the Company's financial position in 2021 against the 2020 realization.

1. Assets

In 2021, the Company projects the number of assets to grow by 24.17% compared to 2020 realization. The following is the asset projection for 2021.



- **Aset Lancar**
Jumlah aset lancar tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan 0,73% dibandingkan realisasi tahun 2020. Hal ini antara lain disebabkan penurunan saldo kas dan setara kas sejalan dengan dilakukannya pembayaran kewajiban-kewajiban dan terlaksananya investasi di entitas anak, PT Prima Pengembangan Kawasan, serta penurunan saldo pajak dibayar di muka.
 - **Aset Tidak Lancar**
Jumlah aset tidak lancar tahun 2020 diproyeksikan meningkat 27,83% dibandingkan realisasi tahun 2020. Peningkatan terutama diproyeksikan pada investasi entitas asosiasi yang disebabkan adanya rencana investasi akuisisi saham para mitra pada entitas anak, PT Prima Terminal Petikemas (PTP) dan PT Prima Multi Terminal (PMT).
2. **Liabilitas**
Di tahun 2021, Perseroan memproyeksikan jumlah liabilitas meningkat 34,49% dibandingkan realisasi tahun 2020. Berikut disampaikan proyeksi liabilitas tahun 2021.
- **Liabilitas Jangka Pendek**
Jumlah liabilitas jangka pendek tahun 2021 mengalami penurunan 37,31% dibandingkan realisasi tahun 2020. Penurunan ini terutama didapatkan dari penurunan utang usaha yang timbul dari kegiatan investasi dan operasional Perseroan.
 - **Liabilitas Jangka Panjang**
Jumlah liabilitas jangka panjang tahun 2020 diproyeksikan meningkat 55,45% dibandingkan realisasi tahun 2020. Hal ini disebabkan antara lain:
 - a. Adanya rencana penerbitan *domestic bond* yang akan digunakan untuk *refinancing* pinjaman bank dan *refinancing* obligasi tahun 2016.
 - b. Adanya tambahan *commercial loan* untuk relaksasi *cash flow* yang akan digunakan untuk akuisisi saham para mitra di entitas anak, SHL dan *chip in* entitas anak, serta *refinancing* pinjaman bank entitas anak, PT PTP.
 - c. Bertambahnya saldo pendapatan diterima di muka jangka panjang atas *up front fee* pengelolaan Belawan Fase 1 dan Fase 2.
4. **Ekuitas**
Di tahun 2021, Perseroan memproyeksikan jumlah aset dapat tumbuh 8,18% dibandingkan realisasi tahun 2020. Hal ini sejalan dengan proyeksi peningkatan saldo cadangan yang bersumber dari laba tahun berjalan tahun 2020.
- **Current Asset**
Total current assets in 2021 is projected to decrease by 0.73% compared to the realization in 2020. This is due, among others, to a decrease in cash and cash equivalents, in line with the payment of obligations and the implementation of investments in subsidiary entity, PT Prima Pembangunan Kawasan, and a decrease in prepaid taxes balance.
 - **Non-current Asset**
Total Non-current assets in 2020 is projected to increase by 27.83% compared to the realization in 2020. The increase is mainly projected for investment in associated entities due to the planned investment to acquire the shares of partners in subsidiaries, PT Prima Terminal Petikemas (PTP) and PT Prima Multi Terminal (PMT).
2. **Liabilities**
In 2021, the Company projects that total liabilities will increase by 34.49% compared to the realization in 2020. The following is the projection of liabilities for 2021.
- **Short-term liabilities**
Total short-term liabilities in 2021 is projected to decrease by 37.31% compared to the realization in 2020. This decrease mainly derived from a decrease in trade payables arising from the Company's investment and operational activities.
 - **Long-term Liabilities**
Total long-term liabilities in 2020 is projected to increase by 55.45% compared to the realization in 2020. This is due to, among others:
 - a. A plan to issue domestic bonds that will be used for bank loan refinancing and bonds refinancing in 2016.
 - b. Additional commercial loans for cash flow relaxation which will be used to acquire shares of partners in subsidiary, SHL and chips in subsidiary, as well as refinancing bank loans of subsidiary, PT PTP.
 - c. Increased balance of long-term prepaid revenue from up-front fees for managing Belawan Phase 1 and Phase 2.
4. **Equity**
In 2021, the Company projects total assets to grow by 8.18% compared to the realization in 2020. This is in line with the projection of an increase in reserve balances that will come from the ongoing profit of 2020.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN KINERJA PERUSAHAAN

Tidak terdapat perubahan tarif yang diberlakukan Perseroan di tahun 2020 yang memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan dan kinerja Perseroan.

INFORMASI TENTANG DAMPAK NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Instrumen keuangan Perseroan yang mempunyai potensi atas risiko nilai tukar mata uang terutama terdiri dari kas dan setara kas, investasi, dan pinjaman.

Perseroan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing. Bagaimanapun juga, fluktuasi dalam nilai tukar Rupiah dan Dolar AS menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai tukar.

Eksposur risiko nilai tukar mata uang terutama disebabkan oleh kas dan setara kas, investasi sementara, piutang usaha, pinjaman bank, dan surat berharga yang diterbitkan.

Dalam mengelola risiko mata uang, Perseroan tidak melakukan *hedging*, karena transaksi dalam valuta asing tersebut dilakukan dalam jangka pendek. Perseroan berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko signifikan atas fluktuasi mata uang asing dalam transaksi tersebut.

Dalam mengatasi risiko fluktuasi mata uang asing, pihak Manajemen melakukan hal sebagai berikut:

- Memperoleh sebagian modal kerja dalam mata uang asing.
- Melakukan pembelian valas secara *spot* atau terhadap yang kemudian ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka mata uang Dolar AS.
- Memperoleh pendapatan dalam mata uang asing yang diharapkan dapat mengkompensasi liabilitas dalam mata uang asing.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Informasi dan fakta material yang terjadi sejak periode tanggal laporan akuntan tanggal 27 Februari 2021 hingga disahkannya laporan tahunan ini pada tanggal 30 April 2021 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham No. SK-81/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas,

IMPACT OF PRICE CHANGE ON COMPANY REVENUE AND PERFORMANCE

No Price Change implemented by the Company in 2020 has significant impact on revenue and performance of the Company.

INFORMATION ON THE IMPACT OF FOREIGN EXCHANGE RATE

Currency exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign currency exchange rates.

The Company's financial instruments that have the potential for exchange rate risk consist mainly of cash and cash equivalents, investments, and loans.

The Company does not have a formal hedging policy for the fluctuation of foreign currency exchange rate. However, fluctuations in the Rupiah and US Dollar exchange rates provide a natural hedge for the exchange rate.

The exposure to currency exchange rate risk is mainly due to cash and cash equivalents, temporary investments, trade receivables, bank loans, and issued securities.

In managing currency risk, the Company does not undertake hedging, because transactions in foreign currencies are carried out in short term. The Company believes that there is no significant risk of fluctuations of foreign currencies in its transactions.

In overcoming the risk of foreign currency fluctuations, the Management shall implement the following steps:

- Obtain part of the working capital in foreign currency.
- Make foreign currency purchases in spot or against which are then placed in the form of time deposits in US Dollars.
- obtain income in a foreign currency that is expected to compensate for liabilities in foreign currency.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER THE ACCOUNTING REPORT DATE

Material information and facts that occurred from the date of the accountant's report dated 27 February 2021 until the ratification of this annual report dated 30 April 2021 are as follows:

1. Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprise (BUMN) as shareholder power No. SK-81/MBU/03/2021 dated 15 March 2021 on Dismissal, Transfer



dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat Dani Rusli Utama sebagai Direktur Utama sesuai dengan keputusan pemegang saham.
- Mengangkat Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Prasetyo menjadi Direktur Utama.
- Mengangkat Joko Noerhudha sebagai Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis yang baru.

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA

KEBIJAKAN DASAR TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, laba bersih dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen setelah penyesuaian dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang-undang. Pembagian dividen harus disetujui oleh pemegang saham melalui keputusan RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Perseroan.

PEMBAGIAN DIVIDEN YANG DILAKUKAN DI TAHUN 2020, DAN KRONOLOGIS PEMBAGIAN DIVIDEN

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 2020, pemegang saham memutuskan tentang penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

- Dividen sebesar 16,25% atau Rp60.050.953.594.
 - Cadangan sebesar 83,75% atau Rp309.460.760.856.
- Manajemen telah menindaklanjuti keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tersebut dengan merealisasikan pembagian Dividen tunai sebagai berikut:

Dividen kas yang dibagikan Distributed cash dividend	Rp60.050.953.594
Dividen per lembar saham Dividend per share	Rp35.324
Rasio pembagian Dividen Ratio of Dividend Distribution	21,05%
Tanggal pengumuman Date of announcement	6 Juli 2020 6 July 2020
Tanggal pembayaran Date of payment	3 Agustus 2020 3 August 2020

Kronologis pembagian dan pembayaran dividen tunai dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), the shareholders decided to change the composition of the Board of Directors of the Company, as follows:

- Honorably dismissed Dani Rusli Utama as President Director in accordance with the shareholder's decision.
- Appointed the Director for Business Transformation and Development, Prasetyo as the President Director.
- Appointed Joko Noerhudha as the new Director of Business Transformation and Development.

DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

BASIC POLICIES REGARDING DIVIDEND DISTRIBUTION

In accordance with the applicable laws of Indonesia and the Company's Articles of Association, net profit may be distributed to Shareholders as dividends after allocation of obligatory reserve fund that are required by the laws. The distribution of dividend must be by the approval of General Meeting of Shareholders based on the Company's recommendation.

DIVIDEND DISTRIBUTION IN 2020, AND CHRONOLOGY OF DIVIDEND DISTRIBUTION

Based on the result of General Meetings of Shareholders of 2019 Financial Year which was held on 6 July 2020, the shareholders decided to use the net profit of the Company for 2019 financial year as follows.

- Dividend of 16.25% or Rp60,050,953,594.
 - Reserve of 83.75% or Rp309,460,760,856.
- The Management has followed-up the decision of the General Meetings of 2019 Financial Year by realizing the distribution of Dividends as follows:

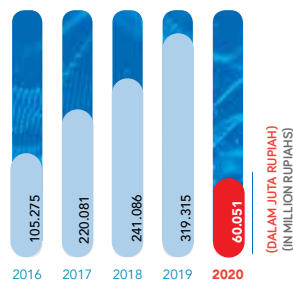
The chronology of dividend payment for the last 5 (five) years is as follows,

Tahun Pembagian Distribution Year	Tahun Dividen Dividend Year	Tanggal Pengumuman Date of Announcement	Tanggal Pembayaran Date of Payment	Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-juta) Distributed Cash Dividend (Rp-juta)	Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Dividend per Share (Rp/share)	Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Distribution Ratio (%)
2020	2019	6 Juli 2020 6 July 2020	3 Agustus 2020 3 August 2020	60.051	35.324	21,05%
2019	2018	29 April 2019 29 April 2019	28 Mei 2019 28 May 2019	319.315	187.832	35,02%
2018	2017	3 April 2018 3 April 2018	2 Mei 2018 2 May 2018	241.086	141.815	30,00%
2017	2016	8 Mei 2017 8 May 2017	6 Juni 2017 6 June 2017	220.081	129.459	30,00%
2016	2015	19 Mei 2016 19 May 2016	17 Juni 2016 17 June 2016	105.275	61.926	15,03%

*) Dividen per Saham dihitung dengan membagi Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk terhadap jumlah lembar saham Perseroan.

*) Dividend per share is calculated by dividing the Current Year's Profit Attributable to the Owners of Parent Entity to the number of shares of the Company.

Perkembangan Dividen Kas yang Dibagikan Tahun 2016-2020 (Rp-juta) Development of Distributed Cash Dividends throughout 2016-2020 (Rp-million)



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

PERPAJAKAN: KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

Perseroan berkomitmen untuk dapat memberikan kontribusi kepada negara, melalui pemenuhan kewajiban perpajakan. Kontribusi pajak dari Perseroan tahun 2020 mencapai Rp597,94 miliar, mengalami penurunan 31,52% dari pembayaran pajak di tahun 2019 sebesar Rp873,19 miliar. Berikut disampaikan tabel kontribusi pajak Perseroan.

TAXATION: CONTRIBUTION TO THE COUNTRY

The Company makes a commitment to provide a contribution to the country, through the fulfilment of tax obligation. The tax contribution of the Company in 2020 is Rp597.94 billion, which is a 31.52% decrease from 2019's Rp873.19 billion. As shown in this Company's tax contribution table.

Jenis Pajak Types of Tax	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Amount (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Disetor ke Pusat Paid to the Central Government				
PPh Badan Corporate Income Tax	94.300	269.060	(174.760)	-64,95%
PPN VAT	310.844	378.958	(68.114)	-17,97%

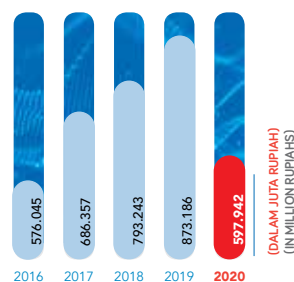


Jenis Pajak Types of Tax	2020 (Rp-juta) (Rp-million)	2019 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) Amount (Rp- million)	Persentase (%) Percentage (%)
PNBP Non-Tax State Revenue	32.767	27.474	5.293	19,26%
Konsesi Concession	47.559	48.176	(617)	-1,28%
Sub Jumlah Pajak yang Disetor ke Pusat Sub-Total of Taxes Paid to the Central Government	485.470	723.668	(238.198)	-32,92%
Disetor ke Pusat Daerah Paid to the Regional Governments				
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	50.478	61.364	(10.886)	-17,74%
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	10.879	11.830	(951)	-8,04%
PPh Pasal 4 ayat (2) Income Tax Article 4 clause (2)	8.414	15.784	(7.370)	-46,69%
PPh Pasal 15 Income Tax Article 15	578	688	(110)	-16,04%
PBB Land and Building Tax	36.921	55.317	(18.396)	-33,26%
Pajak Kendaraan Bermotor Vehicle Tax	1.743	1.185	558	47,08%
PPh 22 Income Tax Article 22	3.459	3.348	111	3,31%
Sub Jumlah Pajak yang Disetor ke Daerah Sub-Total of Taxes Paid to the Regional Government	112.472	149.517	(37.045)	-24,78%
Jumlah Kontribusi Kepada Negara Melalui Perpajakan Total Contribution to the State through Taxes	597.942	873.186	(275.243)	-31,52%

Perkembangan pembayaran pajak yang dipenuhi oleh Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of tax payments fulfilled by the Company in the past 5 (five) years can be seen in the chart below.

Perkembangan Pembayaran Pajak Tahun 2016-2020 (Rp-juta) Development of Tax Payments In 2016-2020 (Rp-million)



*) Reklasifikasi | *) Reclassification

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak melaksanakan Program Kepemilikan Saham baik oleh Manajemen (MSOP) maupun oleh Karyawan (ESOP). Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga exercise.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

INFORMASI TENTANG PENAWARAN UMUM SAHAM

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak melakukan Penawaran Umum Saham di bursa efek manapun.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Di tahun 2016, Perseroan menerbitkan surat utang Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 yang terdiri dari Seri A, B, C, dan D dengan total nilai sebesar Rp1 triliun.

INFORMATION ON STOCK OWNERSHIP PROGRAM BY EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT (ESOP/MSOP)

Until the end of 2020, the Company has yet to implement a Share Ownership by Management (MSOP) or Employee (ESOP) programs. As such, there is no information about ESOP/MSOP and its realization, time period, requirements for eligible employee/management and exercise price.

REALIZATION OF MONEY FROM PUBLIC OFFERING

INFORMATION ABOUT PUBLIC OFFERING OF SHARES

Until the end of 2020, the Company has not made a Public Offering in any stock trading market.

REALIZATION REPORT OF FUND FROM PUBLIC OFFERING OF BONDS

In 2016, the Company issued a bond, Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara tahun 2016, which consists of A, B, C, and D Series, with a total value of Rp1 trillion.

Nama Obligasi Bonds Name	Nilai Obligasi (Rp-juta) Bonds Value (Rp-million)	Tanggal Penerbitan Date of Issue	Tenor (Tahun) Tenor (Year)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%) Annual Interest Rate (%)	Status Pembayaran Status of Payment
Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 Bond I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Year 2016						
Seri A A Series	50.000	21 Juni 2016 21 June 2016	3	21 Juni 2019 21 June 2019	8,25	Lunas Paid
Seri B B Series	500.000	21 Juni 2016 21 June 2016	5	21 Juni 2021 21 June 2021	9,00	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid
Seri C C Series	400.000	21 Juni 2016 21 June 2016	7	21 Juni 2023 21 June 2023	9,25	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid
Seri D D Series	50.000	21 Juni 2016 21 June 2016	10	21 Juni 2026 21 June 2026	9,50	Aktif/Belum Lunas Active/Not Yet Paid
Jumlah Total	1.000.000					

Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 kepada Bursa Efek Indonesia, terakhir melalui surat No. KU.66/1/3/PI-18 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 Posisi per 31 Desember 2017. Melalui surat ini yang telah diunggah pada sistem IDX, per 31 Desember 2017

The Company has delivered a report on realization of a bond, Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 to the Indonesian Stock Exchange, finally through letter No. Ku.66/1/3/PI-18 dated 15 January 2018 on Delivery of Realization Statement of Bond 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 as of 31 December 2017. Through this letter, which was uploaded to IDX system per 31 December 2017,



Perseroan menyatakan telah menggunakan seluruh hasil dana dan tidak lagi memiliki sisa dana dari penerbitan Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016.

the Company states that the Company has used up all of the money, and there is no money remaining from the issuance of Obligasi 1 Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016.

No.	Jenis Penawaran Umum Type of Public Offering	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Realization Value of Public Offering Results			Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Infrastructure Development and Improvement	Pengadaan Peralatan Equipment Procurement	Bina Usaha Business Development
			Jumlah Hasil Penawaran Umum Amount of Public Offering Results	Biaya Penawaran Umum Public Offering Fee	Hasil Bersih Net Results			
1	Efek Bersifat Utang Debt Securities	10 Juni 2016 10 June 2016	1.000.000.000.000	900.000.000	999.100.000.000	540.000.000.000	420.000.000.000	3.000.000.000

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Tidak terdapat informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal yang terjadi di tahun 2020.

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTATION, BUSINESS MERGER, ACQUISITION, AND/OR LOAN/CAPITAL RESTRUCTURIZATION

There is no material information regarding investments, expansions, divestments, business mergers, acquisitions, and/or debt/capital restructuring that took place in 2020.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

KEBIJAKAN TENTANG PIHAK BERELASI

Pemenuhan kebijakan terkait transaksi pihak berafiliasi/berelasi dan transaksi benturan kepentingan mengacu kepada Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Secara definitif sesuai PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi", pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan Perseroan jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perseroan.
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan.
 - iii. Merupakan personel manajemen kunci Perseroan atau entitas induk dari Perseroan.
- b) Suatu entitas berelasi entitas berelasi dengan Perseroan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan Perseroan merupakan anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION THAT INCLUDES CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

POLICY ON RELATED PARTIES

Fulfillment of policies related to affiliated/related party transactions and conflict of interest transactions referring to OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Transactions between Affiliation and Conflict of Interest Transactions and PSAK 7 on "Related Party Disclosures". In definitive accordance with PSAK 7 on "Related Party Disclosures", related parties are defined as people or entities that are related or affiliated to the Company as follows:

- a. A person or his/her close family member has a relationship with the Company if that person:
 - i. Has control or joint control over the Company.
 - ii. Has significant influence over the Company.
 - iii. Is a member of the key management personnel of the Company or parent entity of the Company.
- b. An entity is a related entity with the Company if it meets one of the followings:
 - i. The entity and the Company are members of the same business group (meaning that the parent, subsidiary, and subsequent subsidiaries are related to other entities).



Rencana Penggunaan Dana Funds Utilization Plan		Realisasi Penggunaan Dana Realization of Use of Funds					Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Proceeds from the Limited Public Offering
Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi IT Infrastructure Development	Total Total	Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Development and Infrastructure Development	Pengadaan Peralatan Equipment Procurement	Bina Usaha Business Development	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi IT Infrastructure Development	Total Total	
37.000.000.000	1.000.000.000.000	540.000.000.000	420.000.000.000	3.000.000.000	37.000.000.000	-	

- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah penyelenggara suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perseroan atau entitas yang terkait dengan Perseroan. Jika Perseroan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perseroan.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.i. memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau perusahaan dari entitas).
- viii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

NAMA PIHAK BERTRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Berdasarkan ketentuan di atas, sifat dan jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- ii. Either entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- iii. The two entities are joint ventures of the same third party.
- iv. Either entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- v. The entity is the organizer of a post-employment benefit plan for the benefit of employees of one of the Companies or an entity related to the Company. If the Company is the entity that organizes the program, the sponsoring entity is also related to the Company.
- vi. An entity that is controlled or jointly controlled by the person identified in (a).
- vii. The person identified as referred to in letter a.i. has significant influence over the entity or is the entity's (or the entity's subsidiary's) key management personnel.
- viii. The person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or the parent of the entity).

NAME OF TRANSACTING PARTIES AND NATURE OF AFFILIATION

Based on the stipulation above, the nature and type of a material transaction with a party related or affiliated to the Company is as follows.

Sifat Hubungan Nature of Relation	Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	Transaksi Transaction
Pemegang Saham Shareholders	Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	Hak konsesi atas Terminal <i>Multipurpose</i> Kuala Tanjung dan Terminal Petikemas Belawan, serta sewa lahan Fase 1 Belawan Concession right on Multipurpose Terminal of Kuala Tanjung and Belawan Container Terminal, and Phase 1 land lease in Belawan
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan giro, deposito berjangka, fasilitas kredit, biaya keuangan, dan pendapatan bunga Placement of giro, term deposit, credit facility, financial charge, and interest revenue
Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Related with the Government of Republic of Indonesia	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan giro, deposito berjangka, piutang usaha, fasilitas kredit, pendapatan sewa lahan, biaya keuangan, dan pendapatan bunga Placement of giro, term deposit, credit facility, land lease revenue, financial charge, and interest revenue
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan deposito berjangka, biaya keuangan, dan pendapatan bunga Placement of term deposit, credit facility, and interest revenue
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah	Penempatan deposito berjangka, biaya keuangan, dan pendapatan bunga Placement of term deposit, financial charge, and interest revenue



Sifat Hubungan Nature of Relation	Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	Transaksi Transaction
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan giro, deposito berjangka, piutang usaha, fasilitas kredit, pendapatan sewa lahan, biaya keuangan, dan pendapatan bunga Placement of giro, term deposit, business payables, credit facility, land lease revenue, financial charge, and interest revenue
	PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan giro, deposito berjangka, piutang usaha, fasilitas kredit, pendapatan sewa lahan, biaya keuangan, dan pendapatan bunga Placement of giro, term deposit, business payables, credit facility, land lease revenue, financial charge, and interest revenue
	PT Pertamina (Persero)	Piutang usaha, utang usaha, penjualan jasa kepelabuhanan, sewa lahan, dan suplai bahan bakar Business payable, business debt, port service provision, land lease, and fuel supply
	PT Pertamina Trans Kontinental	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhanan, sewa lahan, dan suplai bahan bakar Business payable, port service provision, land lease, and fuel supply
	PT Perta Arun Gas	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhanan, sewa lahan, dan suplai bahan bakar Business payable, port service provision, land lease, and fuel supply
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Piutang usaha, penjualan usaha rupa-rupa Business payable, miscellaneous business sales
	PT Sarana Agro Nusantara	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhanan, sewa lahan, dan suplai bahan bakar Business payable, port service provision, land lease, and fuel supply
	PT Semen Padang	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhanan, sewa lahan, dan suplai bahan bakar Business payable, port service provision, land lease, and fuel supply
	PT Arun NGL	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhanan, sewa lahan, dan suplai bahan bakar Business payable, port service provision, land lease, and fuel supply
	PT Kereta Api Logistik	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhanan, sewa lahan, dan suplai bahan bakar Business payable, port service provision, land lease, and fuel supply
	PT Brantas Abipraya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan Building and maintenance contractor of port facilities fixed asset and intangible asset
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan Building and maintenance contractor of port facilities fixed asset and intangible asset
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan dan penjualan Building and maintenance contractor of port facilities fixed asset and intangible asset and sales
	PT Wijaya Karya (Persero)Tbk.	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan Building and maintenance contractor of port facilities fixed asset and intangible asset
	PT Hutama Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan Building and maintenance contractor of port facilities fixed asset and intangible asset
	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan Building and maintenance contractor of port facilities fixed asset and intangible asset

Sifat Hubungan Nature of Relation	Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	Transaksi Transaction
	PT Nindya Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan Building and maintenance contractor of port facilities fixed asset and intangible asset
	PT Superintending Company of Indonesia (Persero) (Sucofindo)	Jasa konsultan dan penjualan Consultation service and sales
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Vendor dalam pekerjaan piranti lunak dan penjualan Vendor of software and sales
	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Jasa konsultan dan penjualan Consulting service and sales
	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Jasa konsultan dan penjualan Consulting service and sales
	Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha (BPPU) ITS	Jasa konsultan Consulting service
	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Sharing Biaya Fee Sharing
	PT Danareksa Sekuritas	Jasa konsultan Consulting service
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan Sale of port service and land lease
	PT ASDP Indonesia Ferry	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan Sale of port service and land lease
	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan Sale of port service and land lease
	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan Sale of port service and land lease
	PT Pos Indonesia (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan Sale of port service and land lease
	PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan Sale of port service and land lease
	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan Sale of port service and land lease
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan Sale of port service and land lease
	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan Sale of port service and land lease
	PT Pegadaian (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan Sale of port service and land lease
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pembelian energi listrik, penjualan sewa lahan, dan kerja sama operasi Buying of electrical power, land lease sale, and operational cooperation
	PT Perusahaan Daerah Air Minum	Pembelian air Water Procurement
	TNI/ABRI	Penjualan jasa pelayanan kepelabuhan Sale of port service
	Koperasi Karyawan Pelindo 1	Jasa keamanan Security Service



Sifat Hubungan Nature of Relation	Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	Transaksi Transaction
Entitas Asosiasi	PT Terminal Petikemas Indonesia	Investasi saham Share investment
	PT Prima Tangki Indonesia	Investasi saham Share investment
	PT Prima Pengembangan Kawasan	Investasi saham Share investment
	PT Prima Multi Peralatan	Investasi saham Share investment
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	Penempatan dana imbalan kerja karyawan Placement of employees' compensation

ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga, transaksi Perseroan dengan pihak berelasi dilakukan sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis Perseroan, serta prinsip saling membutuhkan antara Perseroan dengan pihak berelasi.

PENJELASAN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perseroan dengan pihak-pihak berelasi/berafiliasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

REALISASI SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Realisasi saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi terhadap kinerja keuangan Perseroan dapat disampaikan sebagai berikut.

BASIS OF TRANSACTION

Much like transaction with a third party, the Company's transaction with a related party is conducted in accordance with the need of operational development and the Company's business, and the interdependence principle between the Company and the related party.

ELABORATION OF FAIRNESS IN TRANSACTION

The fairness of all transactions by the Company and its related/affiliated parties are disclosed in the financial statement, and are in accordance with the PSAK 7 standard on Related Parties Disclosures. All significant transactions with related parties, whether on the same conditions with a third party, are disclosed as a record in the consolidated financial statement.

REALIZATION OF BALANCE AND TRANSACTIONS OF RELATED PARTIES

Realization and transaction by related parties to the financial performance of the Company can be disclosed as follows.

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Balance of Related Parties in Asset	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
	(1)	(%)	(2)	(%)	(3=1-2)	(3/2)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	1.551.834	9,72%	1.723.578	10,79%	(171.743)	-9,96%
Piutang Usaha Business Payables	11.876	0,07%	18.111	0,11%	(6.235)	-34,43%
Total Aset dari Pihak-Pihak Berelasi Total Assets of Related Parties	1.563.710	9,79%	1.741.689	10,91%	(177.979)	-10,22%
Total Aset Total Assets	15.966.142		15.969.372		(3.230)	-0,02%

Aset dari pihak berelasi Perseroan hanya sebesar 9,79% dari jumlah aset Perseroan. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat penurunan jumlah aset dari pihak berelasi, khususnya pada kas dan setara kas yang ditempatkan pada bank dari pihak berelasi.

Asset of the Company's related parties only make up 9.79% of the Company's total assets. Compared to the previous year, there is a decrease in assets of related parties, especially for cash and cash equivalents placed on related parties banks.

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Balance of Related Parties in Liabilities	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Utang Usaha Business Debt	107.236	1,10%	198.123	2,03%	(90.887)	-45,87%
Utang Bank Bank Loan	5.464.314	56,30%	3.709.362	37,95%	1.754.952	47,31%
Total Liabilitas dari Pihak-Pihak Berelasi Total Liabilities of Related Parties	5.571.550	57,41%	3.907.485	39,98%	1.664.065	42,59%
Total Liabilitas Total Liabilities	9.705.610		9.773.810		(68.200)	-0,70%

Liabilitas dari pihak berelasi Perseroan mencapai 57,41% dari jumlah liabilitas Perseroan. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan jumlah liabilitas dari pihak berelasi, khususnya pada pembiayaan fasilitas perbankan yang didapatkan Perseroan dari bank pihak berelasi.

Liabilities of the Company's related parties has reached 57.41%. There is an increase in related parties' liabilities compared to the previous year, especially with regard to banking facilities financing that the Company obtains from the related parties' banks.

Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan Usaha Transaction of Related Parties in Business Revenue	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Persentase dari Jumlah Aset (%) Percentage of Total Assets (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Pendapatan Usaha dari Pihak Berelasi Business Revenues of Related Parties	19.127	0,50%	42.770	0,76%	(23.643)	-55,28%
Total Pendapatan Usaha dari Pihak-Pihak Berelasi Total Business Revenues of Related Parties	19.127	0,50%	42.770	0,76%	(23.643)	-55,28%
Total Pendapatan Usaha Total Business Revenues	3.841.910		5.639.383		(1.797.472)	-31,87%

Pendapatan dari pihak berelasi Perseroan hanya sebesar 0,50% dari jumlah keseluruhan pendapatan Perseroan. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan pendapatan dari pihak berelasi hingga mencapai 55,28%.

Revenue from the Company's related parties only make up 0.50% of the total revenues of the Company. Compared to the previous year, there is a 55.28% decrease in related parties' revenue.



KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI

Mekanisme review Perseroan atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, khususnya audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik dan dipublikasikan, di mana mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perseroan tahun 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Meskipun pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan di tahun 2020, Perseroan tidak mendapatkan adanya informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di tahun 2020 yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada/atau setelah 1 Januari 2020 yaitu:

PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN

Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan:

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas

COMPANY'S POLICY REGARDING REVIEW MECHANISM ON TRANSACTIONS

Review mechanism of the Company on transactions with Related Parties is performed by auditing process, specifically audit by a public accountant that is later published. This mechanism is outlined in PSAK 7 on "Related Parties Disclosure".

FULFILMENT OF RELATED OBLIGATIONS AND TERMS

Fulfilment of related obligations and terms, as provided by OJK's Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliation Transaction and Conflict of Interest Transaction and Standard of Financial Accounting in Indonesia is performed based on PSAK 7's "Related Parties Disclosures" in the Company's 2020 financial statement that has been audited by a Public Accountant.

FINANCIAL INFORMATION THAT INCLUDES EXTRAORDINARY AND UNLIKELY EVENTS

Despite the significant impact of COVID-19 to the transportation and warehousing business sector in 2020, the Company does not find any financial information that can be classified as extraordinary and unlikely events.

AMENDMENT OF LEGISLATIONS THAT SIGNIFICANTLY IMPACT THE COMPANY

There were no changes in laws and regulations in 2020 that significantly affected the Company.

ACCOUNTING POLICY AMENDMENT AND ITS IMPACTS TO THE COMPANY

The followings are revision, amendment, and adjustment to Standard of Financial Accounting (SAK) and its interpretation that shall be effective for this financial year starting from/after 1 January 2020, which are:

PSAK 71: FINANCIAL INSTRUMENTS

Explanation of the Changes in Accounting Policies:

PSAK 71 shall replace PSAK 55 (2014 Revision) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new regulation for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business

kontraktual, pengakuan, dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Dampak dan Penerapan oleh Perseroan:

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Perseroan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif. Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Perseroan pada awal penerapan PSAK 71.

Berikut adalah tabel nilai tercatat aset keuangan berdasarkan ketentuan PSAK 55 dan PSAK 71, serta penyesuaian saldo laba pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020:

1 Januari 2020 1 January 2020			
	Nilai Tercatat Berdasarkan Ketentuan PSAK 55 Carrying Values Based on the Provisions of PSAK 55	Nilai Tercatat Berdasarkan Ketentuan Ketentuan PSAK 71 Carrying Values Based on the Provisions of PSAK 71	Penyesuaian Saldo Laba Adjustments to Retained Earnings
Piutang Usaha Trade Receivables	120.690.229.140	45.568.047.736	(77.122.181.404)
Dampak Pajak Terkait Related Tax Impact	-	19.504.216.001	19.504.216.001

PSAK 72 "PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN"

Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan:

PSAK 72 menggantikan PSAK 23: "Pendapatan" dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

Dampak dan Penerapan oleh Perseroan:

Perseroan menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Perseroan terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

models and contractual cash flows, recognizing, and measuring financial instrument value impairment loss reserve using an expected credit loss model, which shall replace the existing credit loss model and provide a simpler approach to hedge accounting.

Impact and Implementation by the Company:

In accordance with the transitional requirements of PSAK 71, the Company has opted to retroactively apply with a cumulative impact at the beginning of the application being recognized on 1 January 2020 and shall not conduct a comparative information restatement. The change in approach in calculating the value impairment of financial assets also has had an impact on the recorded value of the Company's financial assets at the beginning of the application of PSAK 71.

The following is a table of the posted value of financial assets based on the provisions of PSAK 55 and PSAK 71, as well as adjustments to retained earnings on the initial application date of 1 January, 2020:

PSAK 72 "REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS"

Explanation of the Changes in Accounting Policies:

PSAK 72 shall replace PSAK 23: "Income" and introduce a 5 (five)-step revenue recognition model and determine the recognition of revenue, which occurs when control over goods has been transferred or when (or while) services are delivered (performance obligations have been fulfilled).

Impact and Implementation by the Company:

The Company has applied PSAK 72 retrospectively with cumulative impact at the beginning of its application recognition on 1 January 2020 and did not conduct a comparative information restatement. Based on a study by the Company on revenue contracts with customers with reference to the 5 (five) stages contained in PSAK 72, there is no significant impact on the financial statements so it does not require adjustments in the initial balance dated 1 January 2020.



PSAK 73: SEWA

Penjelasan atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diberlakukan:

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: "Sewa" yang mensyaratkan Perseroan sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa yang aset dasarnya bernilai rendah.

Dampak dan Penerapan oleh Perseroan:

Perseroan telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020.

Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Perseroan menerapkan cara praktis berikut yang diperkenankan oleh standar:

- Menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- Akuntansi sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
- Pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal;
- Menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa alternatif kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa;
- Untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar; dan
- Mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

Dampak penerapan awal PSAK 73 terhadap saldo awal 1 Januari 2020 untuk aset hak-guna sebesar Rp6.052.035.155, liabilitas sewa sebesar Rp3.381.176.345 dan saldo laba ditahan Rp1.440.899.893.

PSAK 73: LEASE

Explanation of the Changes in Accounting Policies:

PSAK 73 shall replace PSAK 30: "Lease", which requires the Company as the lessee to recognize use-right assets and lease liabilities related to lease transactions previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases where the underlying assets are of low value.

Impact and Implementation by the Company:

The Company has implemented PSAK 73 using a modified retrospective approach without restating the comparative period. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Company's incremental loan interest rate on 1 January 2020.

Utilization assets are measured at the same amount as the lease liability adjusted for the amount of prepayments or lease payments accrued in respect of the lease recognized in the statement of financial position as of 31 December 2019.

In implementing PSAK 73 for the first time, the Company applies the following practical methods permitted by the standard:

- Applying a single discount rate to lease portfolios with fairly similar characteristics;
- Accounting for operating leases whose lease term ends in 12 months from 1 January 2020 is treated as short-term leases;
- Exclusion of initial direct costs from measurement of user rights assets on the date of initial application;
- Using hindsight in determining the alternative period of a contract containing options to extend or terminate a lease;
- Not to separate the non-lease component from the lease component based on the underlying asset class; and
- Rely on assessing whether the lease is burdensome in accordance with PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets" immediately before the initial application date as an alternative to carrying out a value impairment review.

The impact of the initial application of PSAK 73 on the opening balance on 1 January 2020 for use-right assets is to Rp6,052,035,155, while lease liabilities is Rp3,381,176,345, with retained profit balance of Rp1,440,899,893.

Perseroan telah memilih untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak mengandung sewa atau tidak pada tanggal penerapan awal untuk kontrak yang telah ada sebelum tanggal transisi yang di mana Perseroan telah menggunakan penilaian yang dibuat sesuai dengan PSAK 30, "Sewa" dan ISAK 8, "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa".

Di samping itu, Perseroan juga menerapkan revisi, amandemen dan penyesuaian atas SAK serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada/atau setelah 1 Januari 2020 namun tidak tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya, yaitu:

- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi.
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif.
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-Laba.
- PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan.
- PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah.
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan.
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah.
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa.
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

The Company has chosen not to reassess whether a contract contains a lease or not on the date of initial application for contracts that had existed prior to the transition date when the Company begin to the judgments made in accordance with PSAK 30, "Lease" and ISAK 8, "Determination of whether an Agreement Contains a Lease".

In addition, the Company also implements revisions, amendments, and adjustments to SAK as well as interpretation of SAK, which shall be effective for the financial year beginning on/or after 1 January 2020 but shall not result in substantial changes to accounting policies and shall not have a material impact on the financial statements. consolidation in the ongoing or the previous year, namely:

- PSAK 62 (2017 Amendment): Insurance Contract on Application of PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract.
- Amendments to PSAK 15 "Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures".
- PSAK 71 (2018 Amendment): Financial Instruments concerning Early Repayment Features with Negative Compensation.
- ISAK 35: Presentation of Financial Statements for Non-Profit Oriented Entities.
- PSAK 1 (2019 Annual Amendments and Adjustments): Presentation of Financial Statements.
- PSAK 25 (Amendment 2019): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.
- PSAK 102 (2019 Revision): Murabaha Accounting.
- ISAK 101: Recognition of Tangguh Murabahah Income without Significant Risk of Ownership of Inventory.
- ISAK 102: Impairment of Murabahah Receivables.
- ISAK 36: Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases.
- PPSAK 13: Revocation of PSAK 45: Financial Reporting of Non-Profit Entities.
- Amendments to PSAK 71, Amendments to PSAK 55, Amendments to PSAK 60, concerning Benchmark Interest Rate Reforms.



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN DI TAHUN 2020

Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 telah menyebabkan penurunan perekonomian global. Indonesia secara resmi mengalami resesi ekonomi seiring dengan kontraksi ekonomi yang terjadi berturut-turut sebesar -5,32% di kuartal II, -3,49% di kuartal III, dan -2,19 di kuartal IV 2020. Resesi ekonomi juga dialami oleh beberapa mitra dagang utama Indonesia antara lain: Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Jepang. Penurunan ekonomi tersebut berpotensi menyebabkan berkurangnya arus barang dan penumpang yang dapat menyebabkan penurunan kinerja keuangan Perseroan.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN DI TAHUN 2020, SERTA ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT

Manajemen telah melakukan asesmen dan upaya mitigasi yang diperlukan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan identifikasi kapabilitas internal Perseroan serta potensi peluang dan ancaman yang ada, Manajemen meyakini Perseroan akan mampu menjaga kelangsungan usahanya dengan melakukan serangkaian strategi taktis.

Beberapa analisa yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- Di tengah pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2020, kinerja keuangan Perseroan secara umum tidak mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2020, Perseroan tetap mampu mencatatkan peningkatan laba usaha sebesar 13% dan peningkatan laba bersih sebesar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Trafik yang turun signifikan terdapat pada segmen pelayanan penumpang yang bukan merupakan *profit center* utama Perseroan.

MATTERS THAT HAVE A POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY IMPACT THE CONTINUITY OF THE COMPANY'S BUSINESS IN 2020

The COVID-19 pandemic throughout 2020 has caused a decline in global economy. Indonesia has officially experienced an economic recession in line with the economic contraction that has occurred consecutively -5.32% in the second quarter, -3.49% in the third quarter, and -2.91% in fourth quarter of 2020. The economic recession was also experienced by some of Indonesia's main trading partners, including the United States, Australia, Singapore, and Japan. This economic downturn has the potential to cause a reduction in the traffic of goods and passengers, which could lead to a decline in the Company's financial performance.

THE MANAGEMENT'S ASSESMENT ON MATTERS THAT HAVE THE POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY IMPACT BUSINESS CONTINUITY OF THE COMPANY IN 2020, AND THE ASSUMPTION USED BY THE MANAGEMENT IN DOING THE ASSESSMENT.

The Management has carried out necessary assessments and mitigation efforts to deal with the impact of the COVID-19 pandemic. Based on the identification of the Company's internal capabilities as well as the potential opportunities and threats, the Management believes that the Company will be able to maintain its business continuity by implementing a series of tactical strategies.

Some points of analysis that are considered by management in assessing the continuity of the Company's business are as follows:

- During the COVID-19 pandemic and the economic recession that occurred throughout 2020, the Company's financial performance in general did not experience a decline compared to 2019. In 2020, the Company was still able to record an increase in business profit by 13% and an increase in net profit by 8% compared to the previous year. Significantly decreased traffic was found in the passenger service segment, which is not the main source of profit for the Company.

- Kondisi makroekonomi global dan domestik diproyeksikan mengalami pemulihan secara bertahap mulai tahun 2021. Program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan negara-negara lain di dunia diharapkan dapat meningkatkan kembali aktivitas perekonomian yang sebelumnya terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, perubahan peta politik di Amerika Serikat diharapkan dapat mengakhiri perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sehingga dapat berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan dunia.
- Letak geografis Perseroan berada pada wilayah yang strategis dengan didukung oleh potensi *hinterland* yang luas dan terus berkembang. Potensi tersebut menjadi faktor utama dalam mendukung pertumbuhan Perseroan yang akan dimaksimalkan melalui fokus bisnis pada pelayanan *marine*, pelayanan curah cair, dan pelayanan *logistic*.
- Pembentukan Integrasi Layanan Kepelabuhanan merupakan bagian dari Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang didesain untuk meningkatkan kinerja industri kepelabuhanan di Indonesia antara lain melalui standarisasi antar pelabuhan, peningkatan kapabilitas, dan daya saing serta peningkatan efisiensi operasional.
- Global and domestic macroeconomic conditions are projected to experience gradual recovery starting 2021. Vaccination programs carried out by the government and other countries in the world are expected to increase economic activities that were previously affected by the COVID-19 pandemic. In addition, changes in the political map in the United States are expected to end the trade war between the United States and China so that it can have a positive impact on world trade activities.
- The Company's geographic location is in a strategic area, supported by a large and growing hinterland potential. This potential is the main factor in supporting the Company's growth which will be maximized through a business focus on marine services, liquid bulk services, and logistics services.
- The establishment of Port Service Integration is part of the Strategic Plan of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN), which is designed to improve the performance of the port industry in Indonesia, among others through standardization among ports, increasing capability, and competitiveness and increasing operational efficiency.



TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

COMPANY'S HEALTH LEVEL

Di samping hal-hal yang telah dijelaskan di atas, dalam mengukur kelangsungan usaha Perseroan, terdapat pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan. Sebagai BUMN, pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, di mana Tingkat Kesehatan Perusahaan diukur melalui beberapa indikator, yakni aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi.

In addition to the matters described above, in measuring the continuity of the Company's business, there is a measurement of the Company's Health Level. As a State Owned Enterprise (BUMN), the measurement of the Company's Health Level shall refer to the Decree of the Minister of State Owned Enterprise No. KEP-100/MBU/2002 dated 4 June 2002 on the Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises, in which the Health Level of the Company is measured through several indicators, namely financial aspects, operational aspects, and administrative aspects.

Berikut disampaikan Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2020 dibandingkan target RKAP 2020.

The following is the Company Health Level statement for 2020 against the 2020 RKAP target

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN TAHUN 2020

COMPANY'S HEALTH LEVEL IN 2020

No	Uraian Subject	Bobot Weight	RKAP 2020 RKAP 2020		Realisasi Tahun 2020 2020 Realization		Rasio (%) Ratio (%)
			Hasil Result	Skor Score	Hasil Result	Skor Score	7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
A ASPEK KEUANGAN FINANCIAL ASPECT							
1	Imbalan kepada Pemegang Saham/Return on Equity (ROE) Return on Equity	15,00	7,40	7,50	3,21	4,00	53,33
2	Imbalan Investasi/Return on Investment (ROI) Return on Investment	10,00	10,11	5,00	8,38	4,00	80,00
3	Rasio Kas/Cash Ratio (Immediate Solvency) Cash Ratio (Immediate Solvency)	3,00	146,42	3,00	71,34		
4	Rasio Lancar (Current Ratio) Current Ratio	4,00	212,64	3,00	93,28	1,00	33,33
5	Collection Periods	4,00	8,06	4,00	6,33	4,00	100,00
6	Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) Inventory Turnover	4,00	3,24	4,00	2,88	4,00	100,00
7	Perputaran Jumlah Aset (Jumlah Assets Turnover) Total Asset Turnover	4,00	0,22	1,00	(0,24)	1,50	150,00
8	Rasio Modal Sendiri Terhadap Jumlah Aset Equity to Total Asset Ratio	6,00	39,84	6,00	32,82	6,00	100,00
JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN FINANCIAL ASPECT TOTAL SCORE		50,00		33,50		27,50	82,09
B ASPEK OPERASIONAL OPERATIONAL ASPECT							
1	Pelayanan Jasa Kapal Ship Service Provision						
	Waiting Time (WT) for Pilot (Jam)	9,00	BS	9,00	BS	9,00	100,00
	Tingkat Efektivitas Tambahan Petikemas (%) Effectivity of Container Mooring (%)	9,00	BS	9,00	BS	9,00	100,00
	Jumlah Pelayanan Jasa Kapal Total Ship Service Provision	18,00		18,00		18,00	100,00
2	Pelayanan Jasa Barang Cargo service provision						
	Produktivitas Bongkar Muat Petikemas (B/S/H) Productivity of Container Loading/Unloading	9,00	BS	8,00	B	6,40	80,00

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN TAHUN 2020
COMPANY'S HEALTH LEVEL IN 2020

No	Uraian Subject	Bobot Weight	RKAP 2020 RKAP 2020		Realisasi Tahun 2020 2020 Realization		Ratio (%) Ratio (%)
			Hasil Result	Skor Score	Hasil Result	Skor Score	7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Yard Occupancy Ratio Petikemas (%) Container Yard Occupancy Ration	8,00	BS	9,00	BS	9,00	100,00
	Jumlah Pelayanan Jasa Barang Total of Cargo Service Provision	17,00		17,00		15,40	
	JUMLAH SKOR ASPEK OPERASIONAL TOTAL SCORE OF OPERATIONAL ASPECT	35,00		35,00		33,40	95,43
C	ASPEK ADMINISTRATIF ADMINISTRATIVE ASPECT						
1	Laporan Perhitungan Tahunan Annual Calculation Statement	3,00	≤ 4	3,00	≤ 4	3,00	100,00
2	Rencana RKAP RKAP Planning	3,00	≥ 2	3,00	≥ 2	3,00	100,00
3	Laporan Periodik Periodic Report	3,00	≤ 0	3,00	≤ 0	3,00	100,00
4	Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) Performance of Empowerment of Small Enterprises and Cooperatives (PUKK):						
	Efektivitas Penyaluran Distribution Effectiveness	3,00	100,00	3,00	93,43	3,00	100,00
	Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Collectability Of Loan Payables	3,00	83,66	3,00	48,05	2,00	66,67
	JUMLAH SKOR ASPEK ADMINISTRATIF TOTAL SCORE OF ADMINISTRATIVE ASPECT	15,00		15,00		14,00	93,33
	TOTAL SKOR KATEGORI TOTAL SCORE OF CATEGORIES	100,00 SEHAT AAA HEALTHY AAA		83,50 SEHAT AA HEALTHY AA		74,90 SEHAT A HEALTHY A	89,70

Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2020 mendapatkan jumlah skor sebesar 74,90 dari target 83,50, maka Perseroan dapat dikategorikan sebagai perusahaan BUMN "Sehat" dengan klasifikasi kesehatan "A".

The Company's Health Level for 2020 receives a total score of 74.90 from the target of 83.50, so the Company can be categorized as a "Healthy" BUMN company, with a health classification of "A".



PETA JALAN USAHA: RENCANA JANGKA PANJANG

BUSINESS ROAD MAP: LONG-TERM PLAN

Sebagai BUMN yang bergerak di industri kepelabuhanan, Perseroan memiliki peran penting sebagai pintu gerbang perekonomian. Pelindo 1 merupakan bagian dari ekosistem transportasi dan logistik dan memiliki peran strategis dalam pertumbuhan industri dan perdagangan serta berkontribusi bagi perekonomian Indonesia barat dan nasional. Perseroan beraspirasi untuk menjadi gerbang utama Indonesia ke jaringan logistik global pada tahun 2024. Strategi utama untuk mencapai visi Perseroan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan tahun 2020-2024 terdiri dari 3 (tiga) tema yaitu:

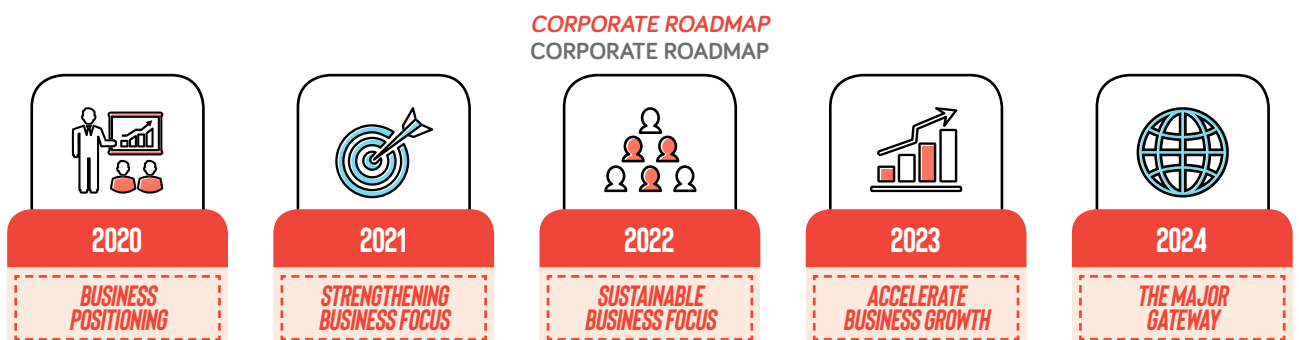
As a BUMN that engages in the port industry, the Company has an important role as a gateway to the economy. Pelindo 1 is part of the transportation and logistics ecosystem and has a strategic role in the growth of industry and trade as well as contributing to the economy of western Indonesia and Indonesia as a whole. The Company aspires to become Indonesia's main gateway to the global logistics network by 2024. The main strategy to achieve the Company's vision in the Company's Long Term Plan 2020-2024 consists of 3 (three) themes, namely:

1. Penguatan Bisnis Utama (*Core Business Enhancement*)
Dalam lima tahun ke depan, Perseroan akan melakukan penguatan bisnis utama dengan cara meningkatkan kualitas dan skala bisnis dalam pelayanan kapal, barang, penumpang termasuk jasa logistik dan *freight forwarding*.
2. Diversifikasi Bisnis Berbasis *Hinterland* (*Hinterland-Based Business Diversification*)
Untuk mengoptimalkan kapabilitas dalam ekosistem pelabuhan, Perseroan akan mengembangkan bisnis penunjang, dan bisnis *adjacencies* baik untuk kebutuhan internal dan untuk memaksimalkan potensi pasar eksternal. Diversifikasi bisnis didasarkan pada *differentiating capabilities* dan kebutuhan pasar, sehingga diversifikasi yang dilakukan Perseroan adalah berbasis kawasan (*hinterland*).
3. Keunggulan Operasional dan Layanan (*Operational and Service Excellence*)
Dalam upaya meningkatkan daya saing, Perseroan akan melakukan serangkaian inisiatif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keunggulan layanan di seluruh lini bisnis dalam ekosistem pelabuhan, yang meliputi peningkatan kapasitas pelabuhan, implementasi *customer relationship management*, optimasi sinergi bisnis antar cabang, dan integrasi layanan kepelabuhanan.

1. Core Business Enhancement
In the next five years, the Company will strengthen its core business by increasing the quality and scale of business in ship, freight and passenger services including logistics and freight forwarding services.
2. Hinterland-Based Business Diversification
To optimize capabilities in the port ecosystem, the Company will develop supporting business and adjacencies business both for internal needs, and to maximize the potential of the external market. Business diversification is based on differentiating capabilities and market needs, so that the Company's diversification is based on area (hinterland).
3. Operational and Service Excellence
In an effort to improve competitiveness, the Company will carry out a series of initiatives to improve operational efficiency and service excellence in all business lines in the port ecosystem, including increasing port capacity, implementing customer relationship management, optimizing business synergies between branches, and integrating port services.

Untuk mewujudkan aspirasi Pelindo 1 menjadi gerbang utama Indonesia ke jaringan logistik global pada tahun 2024, terdapat beberapa *milestone* yang perlu dicapai dan dituangkan dalam *Corporate Roadmap*.

To realize Pelindo 1's aspiration to become Indonesia's main gateway to global logistics network by 2024, there are several milestones that need to be achieved and outlined in the *Corporate Roadmap*.



Dengan mengimplementasikan tiga tema strategi dan *milestone* tiap tahun maka aspirasi Pelindo 1 untuk menjadi gerbang utama Indonesia menuju jaringan logistik global diharapkan dapat tercapai.

Asumsi internal pertumbuhan *throughput* pada 3 (tiga) fokus bisnis adalah sebagai berikut:

1. FOKUS BISNIS: MARINE SERVICES BUSINESS FOCUS: MARINE SERVICES

Parameter	Units	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Marine Services di Selat Malaka Improvement of Marine Services in Malaka Strait						
Asumsi Kapal yang Dilayani di Selat Malaka Assumption of Ships Served in Malaka Strait	Kapal Ship	10	75	86	112	146
Peningkatan Pelayanan Kapal di Dermaga Umum dan TUKS Improvement of Ship Services in Commercial Wharf and Private Interest Terminal						
Asumsi Kapal yang Dilayani di Selat Malaka Assumption of ships served in Malaka Strait	Million GT	150	218	238	259	281
Growth Trafik Kapal: Dermaga Umum Ship Growth Traffic: Commercial Wharf	%	14%	46%	9%	9%	8%

2. FOKUS BISNIS: CURAH CAIR BUSINESS FOCUS: LIQUID BULK

Parameter	Units	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Trafik Curah Cair Increase in Liquid Bulk Traffic						
Trafik Curah Cair Liquid Bulk Traffic	Juta Ton Million Ton	9.1	10.9	12.3	259	281
Growth Curah Cair Liquid Bulk Growth	%	2%	20%	13%	9%	8%

3. FOKUS BISNIS: LOGISTIK BUSINESS FOCUS: LOGISTICS

Parameter	Units	2020	2021	2022	2023	2024
Tambahan Pendapatan dari Inisiatif Strategis PIL Increase of Revenue from PIL Strategic Initiatives	Rp Miliar Rp Billion	-	-	100,466	138,835	173,544

Inisiatif strategis Perseroan tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN tahun 2020-2024 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Penyelarasan Inisiatif Strategis Pelindo 1 dengan rencana Strategis Kementerian BUMN 2020-2024.

By implementing three strategic themes and milestones annually, it is expected that Pelindo 1's aspiration to be Indonesia's main gateway to a global logistics network can be achieved.

The internal assumptions for throughput growth in the 3 (three) business focuses are as follows:

The Company's strategic initiatives for 2020-2024 are in line with the Strategic Plan of the Ministry of BUMN for 2020-2024 as outlined as follows:

Alignment of Pelindo 1's Strategic Initiatives with the Strategic Plan of the Ministry of BUMN 2020-2024.



<p>1</p>	<p>Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dan pangsa pasar pelayanan kapal (<i>marine services</i>). b. <i>Voluntary Pilotage Services</i>, STS, dan <i>Anchorage Service</i> di Selat Malaka dan Singapura. c. Peningkatan pelayanan dan trafik barang. d. Pelayanan logistik terintegrasi (pelayanan barang <i>port-to-end</i>). e. Peningkatan pelayanan penumpang dan bisnis turunannya dari kapal penumpang, <i>ferry</i>, dan <i>cruise</i>. f. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung. g. Pengembangan kawasan industri di Kuala Tanjung. h. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan pangsa pasar dan layanan baru. <ul style="list-style-type: none"> a. Increase in quality and market share of marine services. b. Voluntary pilotage services, STS, and anchorage service in Malaka Strait and Singapore. c. Increase of service and cargo traffic. d. Integrated logistics service (port to end cargo service). e. Improvement of passenger service and its derivative services, such as passenger ship, ferry, and cruise. f. Development of Kuala Tanjung. g. Development of Kuala Tanjung Industrial Area. h. Improvement of Health Services through increase of market share and new services.
<p>2</p>	<p>Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sinergi bisnis antar Cabang Pelabuhan dan Entitas Usaha. b. Restrukturisasi portofolio bisnis. c. Inisiatif BUMN: Pelindo <i>Incorporated</i> dan <i>Holding Maritim</i>. <ul style="list-style-type: none"> a. Improvement of business synergi between Port Branches and Business Entities. b. Restructuring of business portfolion. c. BUMN Inisiative: Pelindo <i>Incorporated</i> and Maritime Holding.
<p>3</p>	<p>Kepemimpinan Teknologi Technological Leadership</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Standardisasi operasi dan layanan. b. Penguatan pelaporan kinerja secara sistem. c. Implementasi <i>Customer Relationship Management</i>. d. Implementasi IT untuk mendukung <i>Operational</i> dan <i>Service Excellent</i>. e. Penyelarasan struktur organisasi dan tata kelola. f. Restrukturisasi keuangan untuk penguatan profil rasio finansial. <ul style="list-style-type: none"> a. Standardization of operation and service. b. Performance report improvement through system. c. Implementation of Customer Relationship Management. d. IT implementation to Support Operational and Service Excellence. e. Synchronizing of organizational structure and management. f. Restructuring of finance to improve financial ratio profile.
<p>4</p>	<p>Peningkatan Investasi Investment Upgrade</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pendayagunaan aset properti (tanah dan bangunan). b. Perawatan kapal dan pengerukan untuk efisiensi perawatan kapal dan kolam pelabuhan. c. Peningkatan kapasitas pelabuhan (pendalaman alur pelabuhan, penambahan fasilitas, dan peralatan). <ul style="list-style-type: none"> a. Development and utilization of property assets (land and building). b. Maintenance of ships and dredge to boost efficiency of ship and port basin maintenance. c. Increase of port capacity (deepening of port channel, increase of facilities, and equipment).
<p>5</p>	<p>Pengembangan Talenta Talent Development</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapabilitas dan <i>rightsizing</i> SDM untuk mendukung pertumbuhan bisnis. <ul style="list-style-type: none"> a. Capability increase and rightsizing of HR to support business growth.

PROGRAM STRATEGIS 2020-2024
STRATEGIC PROGRAMS 2020-2024

**KERJA SAMA MITRA STRATEGIS UNTUK
PENGEMBANGAN & PENGOPERASIAN TERMINAL
PETIKEMAS FASE 1 & FASE 2 BELAWAN**

Cooperation with Strategic Partners for the Development and Operation of Phase I and Phase II Belawan Container Terminal



TUJUAN:

Target:

Meningkatkan utilitas TPK Fase 1 dan 2 Belawan, serta efektivitas kerja sama Fase 1 Belawan dengan Pemerintah

Increasing the utility of Phase 1 and Phase 2 of Belawan Container Terminal, and the effectivity of Phase 1 of Belawan cooperation with the Government

**KERJA SAMA MITRA STRATEGIS UNTUK
PENGEMBANGAN PELABUHAN HUB DAN KAWASAN
INDUSTRI KUALA TANJUNG**

Cooperation with Strategic Partners for the Development of Hub Port and Kuala Tanjung Industrial Estate



TUJUAN:

Target:

Mengintegrasikan pengembangan Pelabuhan & Kawasan Industri untuk percepatan perwujudan PSN

Integrating the development of Port & Industrial Area for the acceleration of PSN realization.

**PENETRASI MARKET MARINE SERVICES DI SELAT
MALAKA & SEKITARNYA**

Marine Services market penetration in Malaka Strait and its surrounding areas.



TUJUAN:

Target:

Memperbesar market share bisnis pemanduan laut dalam di Selat Malaka

Expanding the business market share of deep sea guide in Malaka Strait

**PELAYANAN BISNIS LOGISTIK TERINTEGRASI
(PORT TO END)**

Integrated logistics business service (port to end)



TUJUAN:

Target:

Meningkatkan market share bisnis logistik

Increasing logistics business market share



IMPLEMENTASI CHANNEL FEE DI PELABUHAN BELAWAN

Implementation of Channel Fee at Belawan Port



TUJUAN:
Target:

Menambahkan call kapal yang membutuhkan -12 LWS sehingga dapat meningkatkan trafik barang

Increasing calls of ships that require -12 LWS, in order to boost cargo traffic

PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDONESIA'S LOGISTIC & SUPPLY CHAIN HUB

Acceleration of development of Indonesia's Logistic & Supply Chain Hub



TUJUAN:
Target:

Mempercepat pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung antara lain melalui PMN

Accelerating the development of Kuala Tanjung Industrial Area, among others through PMN

REFINANCING UTANG KORPORASI MELALUI PENERBITAN DOMESTIC BONDS

Refinancing of corporation debt through issuance of Domestic Bonds

TUJUAN:
Target:

Relaksasi cash outflow. Proyeksi pendanaan: Rp3 T

Relaxation of cash outflow. Budget projection: Rp3 T

AKUISISI SAHAM MINORITAS PADA PT PMT DAN PT PTP DAN PENJUALAN KEMBALI SAHAM PT PMT

Acquisition of minority shares in PT PMT, PT PTP, and reselling the shares of PT PMT



TUJUAN:
Target:

Optimalisasi bisnis anak perusahaan. Proyeksi Capex: Rp1 T

Optimization of subsidiary entities' business. Capex projection: Rp1 T

INISIATIF BUMN: INTEGRASI LAYANAN KEPELABUHANAN

KBUMN Initiative: Integration of Port Services



TUJUAN:
Target:

Menyelaraskan strategi bisnis Pelindo 1-IV
Proyeksi Capex: Rp11,25 M

Synchronizing the business strategies of Pelindo I,IV
Capex Projection: Rp11.25 B





05

— Tata Kelola Perusahaan — Good Corporate Governance

Komitmen yang tetap tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG di tengah tantangan situasi telah menciptakan hubungan yang semakin selaras antara Perseroan dengan Pemangku Kepentingan dalam upaya mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan nilai Perseroan kepada Pemangku Kepentingan.

The strong commitment to implement GCG principles in the midst of challenging situations has created a more harmonious relationship between the Company and its Stakeholders in the effort to achieve sustainable growth and increase the Company's value to the Stakeholders.

PERNYATAAN PENERAPAN GCG SECARA BERKELANJUTAN

STATEMENT OF SUSTAINABLE GCG IMPLEMENTATION



Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industri kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 atau Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan. Perseroan sangat menyadari, penerapan prinsip-prinsip GCG yang berkualitas mampu meningkatkan kinerja bisnis Perseroan secara berkelanjutan serta memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan melakukan upaya-upaya perbaikan dalam penerapannya.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan GCG di Perseroan dilakukan sebagai sebuah strategi fundamental dalam melakukan transformasi dan *turnaround*, yang diharapkan dapat menciptakan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai sebuah korporasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkan GCG dengan tujuan:

As a state-owned enterprise which operates in the ports industry, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) or Pelindo 1 or the Company has high commitment in the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently and sustainably. The Company is eagerly aware that the implementation of the principles of quality GCG is able to advance the business performance of the Company sustainably and meet the expectations of all stakeholders. Therefore, the Company always strives to enhance the quality of the GCG implementation by taking attempts for improvement.

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG in the Company is done as a fundamental strategy for transformation and turnaround, in hopes that it would be able to present PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a sustainable corporation. Hence, the Company has high commitment to implement GCG with the following objectives:





1. Mengoptimalkan nilai perusahaan untuk membangun daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, agar dapat menjaga eksistensi dan pertumbuhan secara berkelanjutan;
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien serta efektif selain juga memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ dalam perusahaan;
3. Mengarahkan serta mengendalikan hubungan kerja antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi;
4. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya harus dilandasi nilai moral yang tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial yang tinggi;
5. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional;
6. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada *Stakeholders*;
7. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan;
8. Memperbaiki Budaya Kerja Perseroan;
9. Meningkatkan pencitraan Perseroan (*Image*) yang semakin baik.

Manfaat besar dari penerapan GCG di Perseroan sangat terasa. Secara garis besar, dampak positif dari pelaksanaan GCG dijabarkan menjadi 3 (tiga) garis besar:

- *People* – menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mampu mengadaptasi nilai-nilai GC;
- *Profit* – perusahaan dapat mengoptimalkan peralihan laba dan mencapai pertumbuhan yang tinggi;
- *Planet* – berkontribusi nyata terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

DASAR PENERAPAN GCG

Penerapan GCG di lingkup Perseroan mengacu kepada beberapa peraturan/perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 07 Mei 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang Pelayaran;
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

1. Optimizing the corporate values to build strong competitiveness both nationally and internationally, in order to maintain existence and development sustainably;
2. Encouraging professional, efficient and effective corporate management, as well as empowering the functions and enhancing the self-reliance of the organs in the Company;
3. Directing and controlling the work relationships between the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and Directors;
4. Enforcing every decision making and implementation to be based on high moral values and appropriate with prevailing laws and regulations and high social responsibility;
5. Creating professional human resources;
6. Increasing responsibilities to the Stakeholders;
7. Averting deviations in the management of the Company;
8. Improving the Company's work culture;
9. Improving the Company's image

The great benefits of the GCG implementation in the Company are very perceivable. In general, the positive impacts of the GCG implementation can be elaborated into 3 (three) outlines:

- *People* – generating human resources with competence and ability to adopt the GCG values;
- *Profit* – the Company is able to optimize profits and achieve high growth;
- *Planet* – making real contributions to the environment and society empowerment.

BASIS OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of GCG within the Company refers to a number of prevailing laws/regulations in Indonesia, namely:

1. Law No. 19/2003 of 19 June 2003 on State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40/2007 of 7 May 2007 on Limited Liability Companies;
3. Law No. 17/2008 of 7 May 2008 on Shipping;
4. Government Regulation No. 61/2009 of 20 October 2009 on Port Affairs;
5. Government Regulation No. 56/1991 of 19 October 1991 on Change of Status of Pelabuhan I from Public Company into Limited Liability Company;
6. Government Regulation No. 45/2005 of 25 October 2005 on the Establishment, Management, Supervision, and Dismissal of State-Owned Enterprises;

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
9. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-258/MBU/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan, Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I;
10. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-288/MBU/11/2018 tanggal 05 November 2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I;
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-105/MBU/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I;
12. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-122/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I;
13. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Internalisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman tersebut ke dalam kebijakan internal Perseroan merupakan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh jajaran organisasi Perseroan.

It is the commitment of the Board of Commissioners and the Boards of Directors along with the entire organization within the Company to internalize the aforementioned laws/regulations and guidelines into the Company's internal policies.





Komitmen Pelindo 1 dalam menerapkan GCG ditunjukkan dari Visi, Misi, dan Nilai Budaya Perseroan. Visi Perseroan yaitu menjadi gerbang utama Indonesia ke jaringan logistik global, diwujudkan dalam Misi Perseroan dengan didasarkan pada nilai Budaya Perseroan, yaitu AKHLAK. Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Perseroan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*.

Berdasarkan prinsip-prinsip GCG tersebut, Perseroan mengembangkan struktur GCG yang meliputi organ utama dan organ pendukung guna menjalankan mekanisme GCG sesuai peraturan perundang-undangan serta *best practices* yang ada. Dengan mendasarkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip GCG, diharapkan akan tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

The Company's commitment to implement GCG is shown by its Vision, Mission, and Cultural Values. The Company's Vision is to become Indonesia's main gate to the global logistics network, which is translated into the Company's Mission while being based on the Company's Cultural Value, namely AKHLAK. In manifesting the Vision and performing the Mission, the Company always hold onto the principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and *fairness*.

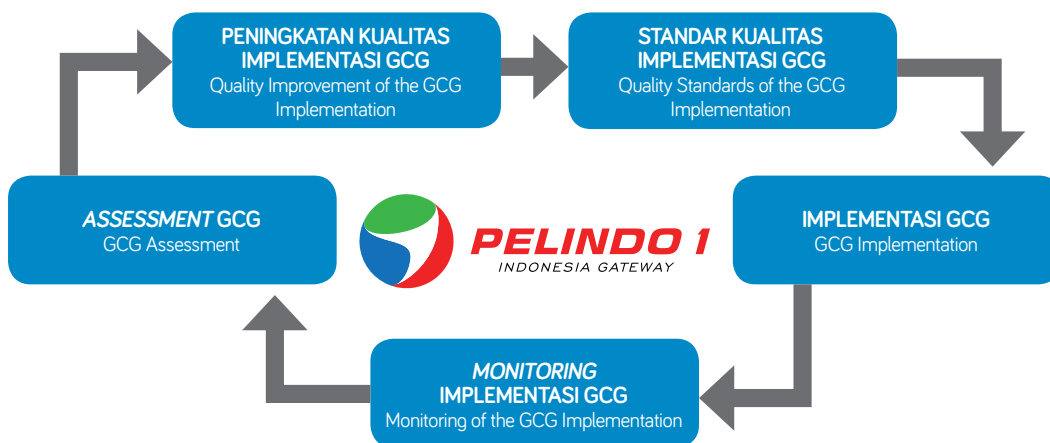
Based on the mentioned principles of GCG, the Company develops a structure of GCG consisting of main and supporting organs in order to perform the GCG mechanism in accordance with the prevailing laws and regulations as well as available best practices. By basing its business activities on the GCG principles, hopefully there would be business sustainability in the long term.

PENERAPAN GCG SECARA BERKELANJUTAN

SUSTAINABLE GCG IMPLEMENTATION

Sejak berstatus badan hukum Perseroan Terbatas dan sebagai Badan Usaha Milik Negara Sektor Perhubungan Laut, Pelindo 1 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Perseroan, *shareholders*, dan *stakeholders*. Ada pun mekanisme pelaksanaan implementasi GCG dapat dijelaskan melalui bagan siklus implementasi berikut:

Ever since possessing the status of Limited Liability Company and as a State-Owned Enterprise in the Sea Transportation Sector, Pelindo 1 commits to implement the GCG principles consistently, systemically, and sustainably in order to protect the interests of the Company, *shareholders*, and *stakeholders*. As for the mechanism of the GCG implementation, it can be explained through below cycle chart:



Tahapan atau siklus penguatan kualitas implementasi GCG Pelindo 1 secara berkelanjutan, sebagaimana dalam bagan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar kualitas implementasi GCG;
2. Implementasi GCG;
3. *Monitoring* implementasi GCG;
4. Pengukuran melalui penilaian dan/atau evaluasi penerapan GCG;
5. Peningkatan kualitas implementasi GCG.

Adapun Penjelasan mengenai masing-masing siklus, sebagai berikut:

PENETAPAN STANDAR KUALITAS PENERAPAN GCG

Standar implementasi GCG di Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Standar penerapan GCG tersebut meliputi:

The stages or cycles of quality improvement of sustainable GCG implementation in Pelindo 1, as seen in the above chart, are:

1. Stipulation of quality standards of the GCG implementation;
2. GCG implementation;
3. Monitoring of the GCG implementation;
4. Measurement through assessment and/or evaluation on the GCG implementation;
5. Quality improvement of the GCG implementation.

Each cycle is elaborated as follows:

STIPULATION OF QUALITY STANDARDS OF GCG IMPLEMENTATION

The quality standards of the GCG implementation in the Company refers to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/2012 of 6 July 2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in SOE and the Decision of the Secretary of the Minister of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 of 6 June 2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on the Implementation of Good Corporate Governance in SOE. The standards include:



1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Aspek Direksi;
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
6. Aspek lainnya yang antara lain meliputi pelaporan keberlanjutan dan kemampuan Perseroan sebagai *benchmark* dalam bidangnya.

Standar implementasi GCG tersebut menjadi acuan dasar Perseroan dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Perseroan.

IMPLEMENTASI GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan dijelaskan dalam tabel berikut:

1. Aspect of Commitment toward Sustainable GCG Implementation
2. Aspect of Shareholders and General Meeting of Shareholders/Capital Owners;
3. Aspect of the Board of Commissioners/Board of Supervisors;
4. Aspect of the Board of Directors;
5. Aspect of Disclosure of Information and Transparency;
6. Other aspects including sustainability reporting and the capability of the Company as the benchmark in its business sector.

Those standards of GCG implementation become the basic reference for the Company in manifesting its Vision and performing its Mission.

GCG IMPLEMENTATION

Implementation of the GCG principles in the Company is elaborated in the below table:

Prinsip-Prinsip GCG GCG Principles	Uraian Description	Penerapan di Lingkup Pelindo 1 Implementation within Pelindo 1
Transparansi Transparency	<p>Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.</p> <p>Openness in the decision-making process and openness in the disclosure of material and relevant information about the Company.</p>	<p>Transparansi diwujudkan Perseroan dengan selalu berusaha memelopori pengungkapan informasi keuangan dan nonkeuangan kepada pihak yang berkepentingan, serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik terbaik <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Sebagai salah satu contoh, Laporan Tahunan Perseroan telah memuat informasi penting dalam pengelolaan Perseroan, antara lain mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perseroan; 2. Penilaian terhadap Perseroan oleh eksternal auditor dan lembaga pemeringkat lainnya; 3. Riwayat hidup anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 4. Sistem remunerasi dan pemberian tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris, dan Direksi; 5. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i>. <p>Transparency is manifested by the Company through constant attempts to spearhead the disclosure of both financial and non-financial information to stakeholders, in which is not limited to mandatory information. Such disclosure of information is conducted without violating the prevailing laws and regulation and is recommended by the best practices of GCG.</p> <p>For example, the Company's Annual Report contains important information about the management of the Company, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Company's objectives, business goals and strategies; 2. Assessment of the Company by external auditors and other rating agencies; 3. Biographies of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors; 4. Remuneration system and provision of allowances for the members of the Board of Commissioners, and the Board of Directors; 5. GCG implementation.

Prinsip-Prinsip GCG GCG Principles	Uraian Description	Penerapan di Lingkup Pelindo 1 Implementation within Pelindo 1
<p>Akuntabilitas Accountability</p>	<p>Prinsip akuntabilitas diwujudkan dalam kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap Organ Perseroan yang bertujuan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.</p> <p>The principle of accountability is manifested through the clarity of functions, conducts and responsibilities of every organ in the Company, for the purpose of achieving sustainable performance.</p>	<p>Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ Perseroan menyadari hak dan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab serta kewenangannya.</p> <p>Terhadap pihak yang berkepentingan, Perseroan selalu mengomunikasikan hak dan kewajiban masing-masing dan selalu mengupayakan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat benar-benar memahami hak dan kewajiban masing-masing tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Sebagai salah satu contoh implementasi prinsip Akuntabilitas, maka di antara Organ Perseroan terjadi pembagian tugas yang tegas. Pembagian tugas tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi memiliki tugas pokok untuk memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan serta menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan; 2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan, rencana kerja, dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham; 3. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan antara lain untuk menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan, menetapkan penggunaan laba bersih. <p>The Company implements accountability by encouraging every individual and/or organ in the Company to realize their rights and obligations, duties and responsibilities as well as authorities.</p> <p>To the stakeholders, the Company always communicate the rights and obligations of each party and constantly strive so that the stakeholders truly comprehend the said rights and obligations in accordance with applicable laws and regulations.</p> <p>As an example of the implementation of the principle of accountability, there is strict division of duties among organs in the Company. In particular:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Directors has the main duty to lead and manage the Company according to its purpose and objectives, and to constantly attempt to increase the efficiency and effectiveness of the Company, as well as to rule, maintain and manage the Company's wealth; 2. The Board of Commissioners has the duty to supervise the management discretion of the Company as performed by the Board of Directors, as well as to give advices to the Board of Directors regarding development plan, annual work plan and budget of the Company, implementation of provisions of the Articles of Association and the General Meeting of Shareholders; 3. The General Meeting of Shareholders is to approve the annual report and ratify the annual calculation, as well as to determine the use of net profits.



Prinsip-Prinsip GCG GCG Principles	Uraian Description	Penerapan di Lingkup Pelindo 1 Implementation within Pelindo 1
<p>Tanggung Jawab Responsibility</p>	<p>Kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, termasuk pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.</p> <p>The compliance in the management of the Company with various applicable laws and regulations and the principles of a healthy corporation, including the implementation of responsibilities to the surrounding community and the environment.</p>	<p>Pertanggungjawaban ini oleh Perseroan diwujudkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu berusaha menjadi warga korporasi yang baik; 2. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Selalu mengusahakan kemitraan dengan semua pihak yang berkepentingan dalam batas-batas etika bisnis yang sehat. <p>Sebagai salah satu contoh implementasi prinsip pertanggungjawaban, maka Perseroan akan selalu berusaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu; 2. Mematuhi undang-undang tentang keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan; 3. Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sekitar, misalnya dengan melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi. <p>The Company manifests these responsibilities by:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Constantly striving to be a good corporate citizen; 2. Abiding by and complying with the prevailing laws and regulations; 3. Constantly trying to partner with all stakeholders within the limits of healthy business ethics. <p>As examples of the implementation of the principle of responsibility, the Company would always strive to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carry out tax obligations properly and on time; 2. Comply with the laws on occupational health and safety and the environment; 3. Fulfill the obligation of developing the surrounding community, namely by nurturing small businesses and cooperatives.
<p>Independensi Independence</p>	<p>Pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsip korporasi.</p> <p>Professional management of the Company without conflicts of interest and influences/pressures from any party which are not in accordance with the prevailing laws and regulations and the principles of the Company.</p>	<p>Kemandirian dalam Perseroan ditekankan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perseroan. Perseroan meyakini bahwa kemandirian merupakan suatu keharusan agar Organ Perseroan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perseroan.</p> <p>Sebagi salah satu contoh implementasi prinsip kemandirian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris, Direksi serta pegawai Perseroan dalam pengambilan keputusan selalu berusaha untuk menghadiri terjadinya benturan kepentingan; 2. Di antara organ Perseroan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing; 3. Selain organ Perseroan pihak lain tidak boleh mencampuri pengurusan Perseroan. <p>Independence in the Company is emphasized by always respecting the rights and obligations, duties, and responsibilities and authorities of each organ in the Company. The Company believes that independence is a must so that the organs in the Company can perform their duties well and make the best decisions for the Company.</p> <p>Examples of the implementation of the principle of independence are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In making decisions, the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees of the Company always try to avoid conflicts of interests; 2. Organs in the Company respect each other's rights, obligations, duties, authorities and responsibilities; 3. Other parties outside the organs of the Company are not allowed to interfere with the management of the Company.

Prinsip-Prinsip GCG GCG Principles	Uraian Description	Penerapan di Lingkup Pelindo 1 Implementation within Pelindo 1
Kewajaran Fairness	<p>Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Justice and equality in fulfilling the rights of the stakeholders which stem from applicable agreements and prevailing laws and regulations.</p>	<p>Perseroan menjamin bahwa setiap yang berkepentingan akan mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Sebagai salah satu contoh implementasi prinsip kewajaran, maka Perseroan akan menjamin bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Saham berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS; 2. Pemegang Saham berhak untuk menerima keuntungan Perseroan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen; 3. Perseroan akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari pengaruh perbedaan suku, agama, ras dan jenis kelamin serta tempat kelahiran dan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja; 4. Perseroan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Perseroan. <p>The company ensures that every stakeholder will receive treatments according to the prevailing laws and regulations.</p> <p>As examples of the implementation of the principle of fairness, the Company guarantees that:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shareholders have the right to attend and cast votes in the GMS; 2. Shareholders have the right to receive profits of the Company designated for them in the form of dividends; 3. The Company would treat every employee fairly and free from the bias resulted from the difference in tribes, religions, races, sexes and places of origin as well as other things which are not related to work performance; 4. The company would provide every employee good and safe working conditions according to the prevailing laws and regulations and the Company's capabilities.

FOKUS PENERAPAN GCG 2020

Selama tahun 2020 Pelindo 1 memfokuskan peningkatan implementasi GCG, melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Assessment GCG;
2. Penandatanganan Pakta Integritas;
3. Pelaporan LHKPN;
4. Pernyataan Benturan Kepentingan oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Pernyataan Independensi oleh Komisaris Independen.

PEMONITORAN IMPLEMENTASI GCG

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN GCG

Berdasarkan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. UM.50/40/17/PI-19.TU tanggal 22 November 2019 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), penerapan GCG di lingkungan Pelindo 1 dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan serta Satuan Pengawas Internal yang bertugas memonitor dan mengevaluasi penerapan praktik GCG di Pelindo 1.

FOCUS OF GCG IMPLEMENTATION IN 2020

Throughout 2020, Pelindo 1 focused on improving the GCG implementation through several activities, namely:

1. GCG Assessment;
2. Signing of Integrity Pact;
3. Submitting the State Officials Wealth Report (LHKPN);
4. Conflict-of-Interest Statement by the Board of Commissioners and the Board of Directors;
5. Independence Statement by Independent Commissioners.

MONITORING OF GCG IMPLEMENTATION

PARTIES IN CHARGE OF GCG IMPLEMENTATION

According to the Regulation of the Board of Directors PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. UM.50/40/17/PI-19.TU of 22 November 2019 on the Implementation of the Practices of Good Corporate Governance in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), the GCG implementation within the Company is coordinated by the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit whose duty is to monitor and evaluate the implementation of the GCG practices in Pelindo 1.



PENGUKURAN/ASSESSMENT PENERAPAN GCG

Pengukuran implementasi GCG di Pelindo 1 bertujuan, antara lain, untuk:

- Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan;
- Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian;
- Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi Perseroan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG;
- Mendorong pengelolaan Perseroan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

KRITERIA ASSESSMENT GCG

Assessment yang dilakukan Perseroan menggunakan parameter yang tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Penilaian penerapan GCG Perseroan meliputi 6 aspek, 43 Parameter, 153 Indikator, dan 568 Faktor Uji Kesesuaian.

Pengukuran terhadap implementasi GCG dilakukan dengan 2 cara, yaitu Penilaian GCG yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun oleh penilai independen dan Evaluasi GCG yang dilakukan pada tahun berikutnya. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh Perseroan (*self assessment*) di mana dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen.

MEASUREMENTS/ASSESSMENTS ON GCG IMPLEMENTATION

Assessments on GCG implementation in Pelindo 1 have the following objectives:

- Assessing and evaluating the GCG implementation through elaboration of conditions of the GCG implementation and comparison with the determined assessment indicators and parameters;
- Providing overview of the assessment results by giving scores regarding the GCG implementation, along with suggested recommendation for improvement, to reduce discrepancy between the practice levels and the assessment indicators and parameters;
- Monitoring the consistency of the GCG implementation within the Company's organizations, and to obtain inputs for the sake of perfection and development of the GCG policies;
- Encouraging professional, transparent and efficient management of the Company, and empowering the functions and increasing the independence of the organs in the Company.

GCG ASSESSMENT CRITERIA

Assessment conducted by the Company uses parameters reflected in the Decision Letter of the Secretary of the Minister of SOE No. SK-16/MBU/2012 on the Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on the Good Corporate Governance in SOE. The assessment on GCG implementation in the Company comprises 6 aspects, 43 parameters, 153 indicators and 568 factors of compliance test.

Measurement of GCG implementation is conducted by 2 methods, namely the periodical GCG assessment carried out every 2 years by independent assessors and GCG evaluation carried out the following year. The evaluation is basically performed by the Company itself (*self-assessment*), in which the Company may request assistance from independent assessors.

PENCAPAIAN HASIL ASSESSMENT PENERAPAN GCG PELINDO 1 6 (ENAM) TAHUN TERAKHIR

Capaian hasil penilaian GCG Pelindo 1 selama 6 (enam) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun Year	Skor Assessment GCG GCG Assessment Score	Predikat Category	Pelaksana Penilai Assessor
2020	95,63	"Sangat Baik" "Excellent"	Self Assessment
2019	94,42	"Baik" "Good"	Independent Assessment
2018	94,60	"Sangat Baik" "Excellent"	Self-Assesment (Pelindo 1)
2017	94,30	"Sangat Baik" "Excellent"	Independent Assessment
2016	94,23	"Sangat Baik" "Excellent"	Self-Assesment (Pelindo 1)
2015	94,19	"Sangat Baik" "Excellent"	Independent Assessment

ASSESSMENT RESULTS ON THE GCG IMPLEMENTATION IN PELINDO 1 IN THE PAST 6 (SIX) YEARS

Assessment results on the GCG implementation in Pelindo 1 in the past 6 (six) years are as follows:

PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2019

Pelaksanaan assessment penerapan GCG tahun 2019 dilakukan oleh assessor independen yaitu PT Pratama Indomitra Konsultan dengan perolehan skor 94,42 dan predikat "Baik".

ASSESSMENT ON THE GCG IMPLEMENTATION IN 2019

Assessment on the GCG implementation in 2019 was conducted by independent assessor, namely PT Pratama Indomitra Konsultan, resulting in score of 94.42 and category of "Good".

Assessment Penerapan GCG Tahun 2019 Assessment on GCG Implementation in 2019	
Jenis Penilaian Assessment Type	: Independent Assessment
Penilai Assessor	: PT Pratama Indomitra Konsultan
Periode Penerapan Implementation Period	: 1 Januari - 31 Desember 2019 1 January - 31 December 2019
Tahun Buku Financial Year	: 2019
Tempat Place	: Kantor Pusat Pelindo 1 Pelindo 1 Head Office
Waktu Pengukuran Assessment Time	: 60 hari kerja 60 working days
Waktu Terbit Laporan Report Issuance Time	: 28 Februari 2020 28 February 2020



Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Assessment Aspect/Indicator/Parameter	Bobot Weight	Pencapaian Tahun 2019 Achievements in 2019		
		Nilai Score	Pencapaian (%) Achievement (%)	Predikat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Category
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment toward Sustainable Good Corporate Governance Implementation	7,00	5,71	81,52	Baik Good
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,17	90,83	Sangat Baik Excellent
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Board of Supervisors	35,00	33,86	96,74	Sangat Baik Excellent
Direksi Board of Directors	35,00	34,53	98,65	Sangat Baik Excellent
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9,00	7,15	79,47	Sangat Baik Excellent
Aspek Lainnya Disclosure of Information and Transparency	5,00	5,00	100,00	Sangat Baik Excellent
Skor Keseluruhan Overall Score	100,00	94,42	94,42	
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG Quality Qualification in GCG Implementation				"Baik" "Good"

Keterangan:
Captions

0-50 : Tidak Baik I (Bad) 50-60 : Kurang Baik I (Poor) 60-75 : Cukup Baik I (Fair) 75-85 : Baik I (Good) 85-100 : Sangat Baik I (Excellent)

Dari hasil *assessment* tersebut, tidak terdapat rekomendasi atau *Area of Improvement* implementasi GCG.

With the assessment results, the assessor made no recommendation and suggested no area of improvement on GCG implementation.

PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2020

Pelaksanaan *assessment* penerapan GCG untuk tahun 2020, dilakukan secara mandiri/*self assessment* oleh Tim Internal Pelindo 1. Hasil *self assessment* untuk tahun 2020 menunjukkan hasil dengan predikat "Sangat Baik" yang mencapai skor sebesar 95,63.

ASSESSMENT ON THE GCG IMPLEMENTATION IN 2020

Assessment on the GCG implementation in 2020 was conducted by Pelindo 1 Internal Team (self assessment). It resulted in a category of "Excellent" and a score of 95.63.

Assessment Penerapan GCG Tahun 2020 Assessment on the GCG Implementation in 2020	
Jenis Penilaian Assessment Type	: Self Assessment
Penilai Assessor	: Tim Internal Pelindo 1 Pelindo 1 Internal Team
Periode Penerapan Implementation Period	: 1 Januari - 31 Desember 2020 1 January - 31 December 2020
Tahun Buku Financial Year	: 2020
Tempat Place	: Kantor Pusat Pelindo 1 Pelindo 1 Head Office
Waktu Pengukuran Assessment Time	: 60 hari kerja 60 working days
Waktu Terbit Laporan Report Issuance Time	: Februari 2021 February 2021

Rincian hasil *assessment* penerapan GCG Perseroan untuk tahun 2020 sebagai berikut:

Details of the GCG assessment results for 2020 are as follows:

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Assessment Aspect/Indicator/Parameter	Bobot Weight	Pencapaian Tahun 2020 Achievements in 2020		
		Nilai Score	Pencapaian (%) Achievement	Predikat Kualitas Penerapan GCG Implementation Quality Category
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment toward Sustainable Good Corporate Governance Implementation	7,00	6,00	85,70	Sangat Baik Excellent
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,46	93,99	Sangat Baik Excellent
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Board of Supervisors	35,00	34,54	98,69	Sangat Baik Excellent
Direksi Board of Directors	35,00	34,35	98,16	Sangat Baik Excellent
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9,00	7,27	80,83	Baik Good
Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	5,00	100,00	Sangat Baik Excellent
Skor Keseluruhan Overall Score	100,00	95,63	95,63	
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG Quality Qualification in GCG Implementation				"Sangat Baik" "Excellent"

Keterangan:
Captions

0-50 : Tidak Baik I (Bad) 50-60 : Kurang Baik I (Poor) 60-75 : Cukup Baik I (Fair) 75-85 : Baik I (Good) 85-100 : Sangat Baik I (Excellent)

REKOMENDASI ASSESSMENT GCG TAHUN BUKU 2020

Area of Improvement atau rekomendasi atas *assessment* penerapan GCG yang dilakukan untuk tahun 2020, serta ada/tidak adanya kesamaan dengan hasil *assessment* untuk tahun buku 2019 dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

ASSESSMENT RECOMMENDATIONS ON THE GCG IMPLEMENTATION IN FINANCIAL YEAR OF 2020

Area of improvement or recommendations from the assessment on the GCG implementation in 2020, as well as the notion of no similarities to the assessment result for financial year of 2019 can be elaborated through the following table:

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 Assessment Recommendations on the GCG Implementation in Financial Year of 2020
1	Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Aspect of Commitment toward Sustainable Good Corporate Governance Implementation
1	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan pedoman perilaku (Code Of Conduct). The Company has the Guidelines for GCG (GCG Code) and Code of Conduct.
2	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten. The Company implements the Guidelines of GCG and the Code of Conduct consistently.
3	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. The Company makes assessment on the GCG implementation.
4	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). The Company coordinates the management and administration of the State Officials Wealth Report (LHKPN).
5	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. The company carries out gratuity control program in compliance with the prevailing provisions.
6	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (<i>Whistleblowing System</i>). The Company implements policies on the reporting system for alleged violations in the company of concern (<i>Whistleblowing System</i>).





No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 Assessment Recommendations on the GCG Implementation in Financial Year of 2020
II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and the GMS/Capital Owners	
1	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi. The GMS/Capital Owners appoints and terminates the Board of Directors.
2	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris. The GMS/Capital Owners appoints and terminates the Board of Commissioners.
3	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. The GMS/Capital Owners makes necessary decisions to protect the business interest of the Company for both long and short term in accordance with the prevailing laws and regulations and/or the Articles of Association.
4	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. The GMS/Capital Owners gives approval of the annual report including ratification of financial report as well as the supervision duty of the Board of Commissioners in accordance with the prevailing laws and regulations and/or the Articles of Association.
5	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan. The GMS/Capital Owners makes accountable decisions through transparent and fair process.
6	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. The Shareholders/Capital Owners implement Good Corporate Governance according to their authorities and responsibilities.
III Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Board of Supervisors	
1	Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. The Board of Commissioners carries out training/learning programs on a continuous basis.
2	Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. The Board of Commissioners divides duties and stipulates necessary factors to support the duty performance of the Board of Commissioners.
3	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. The Board of Commissioners approves the Company's LTP and WPB drafts proposed by the Board of Directors.
4	Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The Board of Commissioners provides direction to the Board of Directors regarding the implementation of the Company's plans and policies.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The Board of Commissioners supervises the Board of Directors regarding the implementation of the Company's plans and policies.
6	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. The Board of Commissioners supervises the implementation of policies regarding the management of subsidiaries and joint ventures.
7	Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolejal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. The Board of Commissioners plays a role in the nomination of the members of the Board of Directors, assesses the performance of the Board of Directors (individual and collegial) and proposes performance incentives/tantiems according to the existing provisions and taking into account the performance of the Board of Directors.
8	Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. The Board of Commissioners takes actions toward the potential conflicts of interest involving itself.
9	Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. The Board of Commissioners monitors and ensures that the GCG principles are implemented effectively and sustainably.
10	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. The Board of Commissioners organizes effective meetings of the Board of Commissioners/the Board of Supervisors and attends these meetings in accordance with the provisions of laws.
11	Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a Secretary of the Board of Commissioners to support secretarial duties of the Board of Commissioners.
12	Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif. The Board of Commissioners has effective Board of Commissioners Committees.

Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 Assessment Recommendations on the GCG Implementation in Financial Year of 2020	
IV	Direksi Board of Directors
1	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. The Board of Directors carries out training/learning programs on a continuous basis.
2	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas. The Board of Directors divides duties/functions, authorities, and responsibilities distinctly.
3	Direksi menyusun perencanaan perusahaan. The Board of Directors creates plannings for the Company.
4	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan. The Board of Directors plays a role in the fulfillment of the Company's performance targets.
5	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The Board of Directors takes financial and operational control over the implementation of the Company's plan and policies.
6	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar. The Board of Directors manages the Company in accordance with the prevailing laws and regulations and the Articles of Association.
7	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>Stakeholders</i> . The Board of Directors makes value-added relationships for the Company and Stakeholders.
8	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi. The Board of Directors monitors and manages potential conflicts of interest among the members of the Board of Directors and its subordinate management.
9	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu. The Board of Directors ensures that the Company implements transparency of information and communication in compliance with the prevailing laws and regulations and that the disclosure of information to the Board of Commissioners is on time.
10	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. The Board of Directors organizes meetings of the Board of Directors and attends the meetings of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of laws.
11	Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. The Board of Directors takes quality and effective internal control.
12	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif. The Board of Directors performs quality and effective functions of the Corporate Secretary.
13	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. The Board of Directors organizes the Annual GMS and other GMS in accordance with laws and regulations.
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency
1	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i> . The Company provides the Stakeholders Company information.
2	Perusahaan menyediakan bagi <i>stakeholder</i> akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala. The Company provides the Stakeholders access to relevant, sufficient and reliable Company information on time and periodically.
3	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. The Company discloses important information in the Annual Report and the Financial Report in accordance with the laws and regulations.
4	Perusahaan memperoleh penghargaan atau <i>award</i> dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya. The Company obtains awards in the aspect of GCG and others.
VI	Aspek Lainnya Other Aspects
1	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia. The GCG practices in the Company become an example or benchmark for other companies in Indonesia.
2	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya. The GCG practices violate the principles of Good Corporate Governance as referenced in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011, the General Guidelines of GCG in Indonesia, and other standards of practices and provisions.



UPAYA PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI GCG

Perseroan memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi GCG akan berjalan dengan baik jika dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan di setiap kegiatannya. Perseroan senantiasa melakukan evaluasi penerapan GCG sehingga penerapan GCG akan selalu mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2020, evaluasi GCG di Perseroan dilakukan antara lain dengan cara:

1. Sosialisasi GCG
2. *E-Learning* GCG
3. *Survey* GCG
4. *Monitoring* pelaksanaan GCG
5. *Assesment* GCG

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI GCG

Upaya lain dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG, Perusahaan melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi GCG di lingkup Pelindo 1.

Sosialisasi dilakukan melalui tatap muka, seperti forum dan rapat-rapat internal, dan juga melalui saluran komunikasi internal seperti intranet, *website*, dan media sosial. Materi yang disosialisasikan berupa:

1. Dasar Pelaksanaan GCG
2. Pengertian GCG
3. Skema GCG
4. Prinsip-prinsip GCG
5. Penanggung Jawab GCG
6. Ruang Lingkup Pedoman GCG
7. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku
8. Evaluasi atas Penerapan GCG
9. Rekomendasi Perbaikan penerapan GCG

Pada tahun 2020, sosialisasi GCG dilaksanakan pada hari Senin, 21 Desember 2020 dan digabung dengan Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

EFFORTS FOR QUALITY IMPROVEMENT OF THE GCG IMPLEMENTATION

The Company views that improvement on the GCG implementation shall run well if executed by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all the employees in each of their activities. The Company constantly evaluates the GCG implementation so that it keeps improving. Throughout 2020, the GCG evaluation in the Company was carried out through:

1. GCG socialization
2. GCG e-learning
3. GCG surveys
4. Monitoring of GCG implementation
5. GCG assessment

GCG SOCIALIZATION AND INTERNALIZATION

As an effort to improve the quality of the GCG implementation, the Company carries out socialization about GCG in order to provide deep understanding about the GCG implementation within Pelindo 1.

The socialization is carried out face to face, such as in internal meetings, and forums, as well as through internal communication channels such as intranet, website, and social media. The materials being disseminated are:

1. Basis of the GCG Implementation
2. GCG Definition
3. GCG Scheme
4. GCG Principles
5. Persons In Charge of GCG
6. Scopes in the GCG Guidelines
7. Guidelines on Business Ethics and Code of Conduct
8. Evaluation on the GCG Implementation
9. Recommendations for Improvement on the GCG Implementation

Sunday, 21 December 2020 and was joined with the Socialization on Anti-Bribery Management System.

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

GCG STRUCTURE AND MECHANISM

STRUKTUR GCG

Mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur keorganisasian sebuah perseroan terbatas mencakup kepentingan pemegang saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya untuk mengelola; serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Pelindo 1 telah memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.

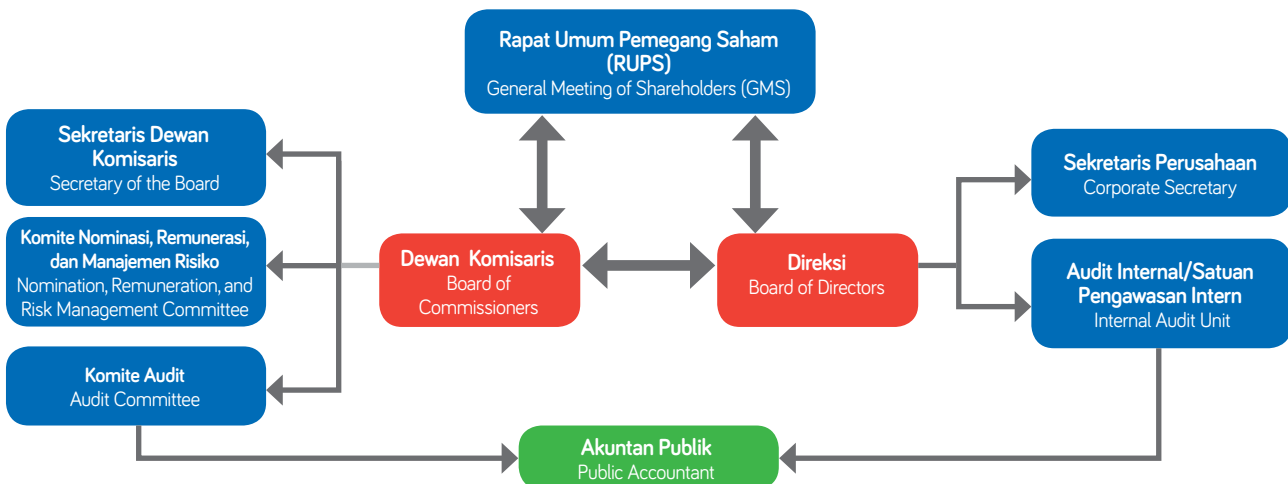
- RUPS
Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
- Dewan Komisaris
Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- Direksi
Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

GCG STRUCTURE

According to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the organizational structure of a limited liability company encompasses the interest of the shareholders as reflected through the General Meeting of Shareholders (GMS); the Board of Directors whose duty is to run the company; and the Board of Commissioners whose function is to supervise the management of the company. Pelindo 1 has all the aforementioned three main organs.

- The GMS
An organ of the Company whose certain authorities are not given to the Board of Directors nor the Board of Commissioners within limits as provisioned in laws and/or the Articles of Association.
- The Board of Commissioners
An organ of the Company whose duty is to conduct general and/or special supervision in accordance with the Articles of Association and to give advices to the Board of Directors.
- The Board of Directors
An organ of the Company which is fully responsible and authorized for running the Company for the Company's interest, is in accordance with the purpose and goals of the Company and is representing the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions in the Article of Association.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PELINDO 1 STRUCTURE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN PELINDO 1

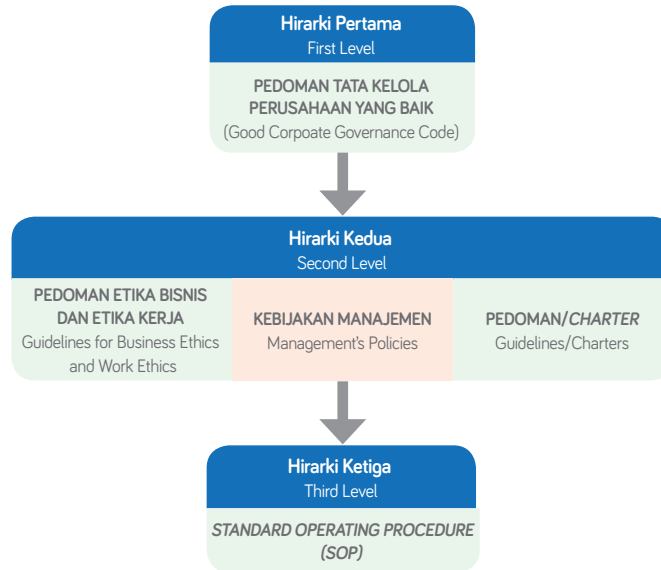




SOFTSTRUKTUR GCG

GCG SOFT STRUCTURE

HIRARKI KEBIJAKAN GCG PELINDO 1 HIERARCHY OF GCG POLICIES IN PELINDO 1



Komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dapat dilihat dari pemenuhan dokumen *soft structure* atau kebijakan-kebijakan yang dimiliki Perseroan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perkembangan Perseroan. Perseroan memiliki hirarki tingkat kebijakan GCG yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat. Tingkat pertama, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG Code; tingkat kedua, Kebijakan Manajemen dan pedoman/*charter*; tingkat ketiga, *Standard Operating Procedure* (SOP).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan induk kebijakan Perseroan yang berisi himpunan pedoman-pedoman pokok pengelolaan perusahaan yang baik, sebagai acuan bagi seluruh kegiatan Perseroan. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja, *Charter*, Kebijakan Manajemen, dan SOP merupakan himpunan kebijakan-kebijakan bisnis yang mengatur kegiatan-kegiatan Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya.

The Company's commitment in implementing Good Corporate Governance can be seen through the completion of documents regarding soft structure or the Company's policies which reflects on the prevailing laws and regulations as well as the Company's development. The Company has a hierarchy of GCG policy levels consisting of 3 (three) levels. The first level is the Guidelines for Good Corporate Governance or the GCG Code; the second level is the management's policies and guidelines/*charter*; and the third level is Standard Operating Procedure (SOP).

The Guidelines for Good Corporate Governance (GCG Code) is the Company's master policy containing a set of basic guidelines for good company management, as a reference for all activities of the Company. The Guidelines for Business Ethics and Work Ethics, *Charters*, the management's policies, and SPO are a set of business policies which organizes the Company's activities in doing its business.

Kebijakan yang dimiliki Perseroan, antara lain:

In particular, the Company's policies are:

No.	Nama Kebijakan GCG GCG Policy Name	Dasar Peraturan Regulatory Basis	Isi Contents
1	Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) Implementation of Good Corporate Governance	Peraturan Direksi Pelindo 1 No. UM.50/40/17/PI-19.TU tanggal 22 November 2019 Regulation of the Board of Directors of Pelindo 1 No. UM.50/40/17/PI-19.TU of 22 November 2019	Mengatur mekanisme hubungan kerja organ Perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi) dalam menjalankan tugas sebagai upaya untuk mewujudkan sistem pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien sebagai wujud nyata pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan. Setting up the working relationship mechanism between the Company organs (GMS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors) in performing their duties as an effort to manifest a professional, transparent, and efficient company management system as a real form of implementation of the GCG principles in the Company.
2	Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris Guidelines for Duty Performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.30/50/23/PI-19. TU tanggal 22 November 2019 Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.30/50/23/PI-19.TU of 22 November 2019	Panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengenai Tata Kerja Dewan yang harus dipedomani pada tingkat kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya untuk meningkatkan penerapan GCG di lingkungan Pelindo 1. Guides for the Board of Commissioners and the Board of Directors on Work Procedures of the Boards which have to be upheld according to their respective authority and responsibility in the efforts of improving the GCG implementation within Pelindo 1.
3	Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) Guidelines on Business Ethics and Code of Conduct	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP. 30/50/22/PI-19.TU tanggal 22 November 2019 Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP. 30/50/22/PI-19.TU of 22 November 2019	Panduan perilaku bagi seluruh insan Perusahaan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas perusahaan, serta mewujudkan hubungan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan dan mewujudkan visi & misi perusahaan secara profesional dan beretika bisnis. Guides on conducts for all the members of the Company that should be adhered to in carrying out all the Company's activities, as well as in establishing harmonious relationship with the stakeholders and in pursuing the Company's vision and mission professionally and ethically.
4	Pedoman Sistem Pengawasan Intern Internal Audit Charter	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. PS.82/2/1/PI-19.TU tanggal 22 November 2019 Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. PS.82/2/1/PI-19.TU of 22 November 2019	Pedoman Sistem Pengawasan Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) ini merupakan salah satu bagian dari Pedoman Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> yang disusun untuk menjadi norma-norma acuan kerja bagi unit Satuan Pengawasan Intern (SPI). Internal Audit Charter is a part of the Guidelines for Good Corporate Governance Implementation which is arranged to be the terms of reference for the Internal Audit Unit (IAU).
5	Pedoman Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan (<i>Whistleblowing System</i>) Guidelines for the Reporting Mechanism for Alleged Violations (<i>Whistleblowing System</i>)	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. PS.80/2/2/PI-19.TU tanggal 22 November 2019 Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. PS.80/2/2/PI-19.TU of 22 November 2019	Tata cara pengelolaan penanganan pengaduan bagi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak yang berkepentingan dalam hubungan dengan perusahaan, agar setiap laporan yang dikirimkan terjaga kerahasiaannya dan kasus yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti. Pedoman pengaduan pelanggaran ini sebagai salah satu bentuk peningkatan perlindungan terhadap para pemangku kepentingan dan perlindungan nama baik Perusahaan. Management procedures of the handling of complaints for the Board of Commissioners, the Board of Directors, employees and stakeholders in relation to the Company, so that every submitted report remains confidential and every reported case can be accounted for and followed up. This guidelines for reporting violations is a form of increased protection for the stakeholders and the Company's good image.
6	Pedoman Sistem Pengendalian Intern Guidelines for Internal Control System	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. PS.80/2/1/PI-19.TU tanggal 22 November 2019 Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. PS.80/2/1/PI-19.TU of 22 November 2019	Sistem Pengendalian Intern adalah serangkaian proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. The Internal Control System is a set of integral processes on actions and activities continuously carried out by the management and all employees to provide sufficient confidence toward the accomplishment of the Company's goals through effective and efficient activities, reliable financial reports, security of company assets and compliance with laws and regulations.



No.	Nama Kebijakan GCG GCG Policy Name	Dasar Peraturan Regulatory Basis	Isi Contents
7	Pedoman Pengisian dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Guidelines for Filling and Submission of the State Officials Wealth Report (LHKPN)	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. UM.50/27/15/PI-15.TU Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. UM.50/27/15/PI-15.TU	Pedoman atau panduan kepada seluruh pejabat di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) agar patuh terhadap peraturan perundang-undangan sehingga mendorong terciptanya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta menciptakan organisasi dan lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang kondusif, bersih, dan bebas korupsi. Guidelines or manuals for all officials within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to comply with laws and regulations in order to manifest the Good Corporate Governance implementation and to create conducive, clean, and corruption-free organization and work environment within the Company.
8	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Guidelines for the Procurement of Goods and Services	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. UM.50/9/13/PI-20.TU Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. UM.50/9/13/PI-20.TU	Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Guidelines for the Procurement of Goods and Services within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

REFERENSI HUKUM

Dasar hukum penyelenggaraan RUPS antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara juncto PER-09/MBU/2012, tanggal 6 Juli 2012, Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Anggaran Dasar Perusahaan.

PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, yang dimaksud Pemegang Saham ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. Saham seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan hanya dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia. Sementara Saham seri B dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Struktur kepemilikan Saham Seri B Pelindo 1, sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

The General Meeting of Shareholders (GMS) is an Organ in the Company whose certain authorities are not given to the Board of Directors nor the Board of Commissioners within limits as provisioned in laws and/or the Articles of Association. The GMS as a Company organ is a medium for the Stakeholders to make important decisions regarding capitals invested in the Company, while taking into account the provisions within the Articles of Association and laws and regulations. Decisions made in the GMS have to be based on the business interests of the Company in the long term.

LEGAL REFERENCES

The legal basis of the organization of the GMS are:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises;
3. Government Regulation No. 45 of 2005 of on the Establishment, Management, Supervision, and Dismissal of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 of 1 August 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises juncto PER-09/MBU/2012 of 6 July 2012 on the Amendment of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
5. The Company's Article of Association.

SHAREHOLDERS

According to the Company's Articles of Association, Shareholders are the holders of the Dichromatic Series A shares and the holders of Series B shares, unless strictly stated otherwise. The Dichromatic Series A shares are shares which give the holders special privileges as set out in the Articles of Association and are exclusively owned by the Republic of Indonesia. Meanwhile, Series B shares can be owned by the Republic of Indonesia and/or individuals.

The ownership structure of Series B shares fully belongs to the Republic of Indonesia. According to the Government Regulation No. 41 of 2003 on the Delegation of Position, Duties, and Authorities of the Minister of Finance upon Limited Liability Companies (Persero), Public Companies (PERUM), and Bureaus (PERJAN) to the Minister of State-Owned Enterprises, and Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises along with State Gazette of the Republic of Indonesia; the Proxy of the Shareholders of the Company lies in the hands of the Ministry of State-Owned Enterprises.





INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

INFORMATION ON THE MAJORITY AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) PER 31 DESEMBER 2020

THE MAJORITY AND CONTROLLING SHAREHOLDERS IN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AS OF 31 DECEMBER 2020



Hingga akhir Desember 2020, Pelindo 1 merupakan perusahaan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Menteri BUMN sebagai representasi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi pemegang saham utama maupun pengendali individu di Pelindo 1.

HAK PEMEGANG SAHAM

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham memiliki hak sebagai wujud timbal-balik kepentingan. Ruang lingkup hak Pemegang Saham terdiri atas penerimaan manfaat permodalan, pengawasan atas jalannya kegiatan operasional yang dilakukan oleh Direksi serta hak-hak lainnya.

Ada pun ketentuan pemberian hak-hak utama Pemegang Saham Perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52, Undang-Undang No. 40 tahun 2007, terdiri dari:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan dari hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak-hak lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, hak-hak Pemegang Saham untuk menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran dasar;
2. Persetujuan perubahan Permodalan;
3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Until the end of December 2020, Pelindo 1 is a SOE whose shares are owned by the Minister of SOE as the representative of the Republic of Indonesia. Therefore, there is no information regarding the majority and controlling shareholders by individuals in Pelindo 1.

RIGHTS OF THE SHAREHOLDERS

In Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Shareholders has rights as a form of reciprocal interests. The scope of the Shareholders rights encompasses reception of capital benefits, supervision on the operational activities carried out by the Board of Directors and other rights.

Regarding the granting of primary rights of the Company Shareholders, the provision is elaborated in Article 52 of Law No. 40 of 2007, comprising:

1. Attending and asserting in the GMS;
2. Receiving the payment of dividend and the remaining assets from liquidation results;
3. Exercising other rights as stipulated in the Law of Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association.

According to the Company's Articles of Association, the Shareholders have the rights in the General Meeting of Shareholders to approve the following matters:

1. Approval of amendments to the Articles of Association;
2. Approval of Capital changes;
3. Approval of appointments and terminations of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran; 5. Permintaan dan pengaksesan data dan dokumen Perusahaan; 6. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 7. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 8. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran dasar perlu persetujuan RUPS; 9. Peretujuan penggunaan laba; 10. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS; 11. Pengusulan agenda RUPS; 12. Pengusulan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Approval regarding mergers, consolidations, acquisitions, separations, and dissolutions; 5. Request for and access to the Company's data and documents; 6. Approval of remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners; 7. Approval of transfer of assets in accordance with the Articles of Association requiring approval from the General Meeting of Shareholders (GMS); 8. Approval regarding equity capital and reductions in the percentage of equity participation (dilutions) in other companies in accordance with the Articles of Association requiring approval from the GMS; 9. Approval of the use of profits; 10. Approval regarding long-term financing and investments in accordance with the Articles of Association requiring approval from the GMS; 11. Proposal for the GMS agenda; 12. Proposal for candidates for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. |
|--|--|

Mekanisme penggunaan hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The mechanism for exercise of the said rights is in accordance with the provisions in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

KEBIJAKAN HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan memiliki komitmen untuk berusaha keras agar Perseroan dapat tumbuh secara berkesinambungan berdasarkan standar etika bisnis yang saling menguntungkan sehingga dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi Pemegang Saham. Berdasarkan *Code of Conduct* Pelindo 1, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dengan investor atau Pemegang Saham, yaitu:

POLICIES ON RELATIONSHIPS WITH THE SHAREHOLDERS

The Company is committed to endeavor so that the Company is able to grow sustainably in accordance with the standards of mutual business ethics, in order to provide optimal added values to the Shareholders. According to the Code of Conduct in Pelindo 1, there are a number of matters that are required and those that are not allowed regarding relationships with investors or Shareholders, namely:

Hal-hal yang harus dilakukan:

1. Memilih kreditur/investor berdasarkan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Senantiasa memenuhi komitmen terhadap kreditur/investor untuk menjaga reputasi Perusahaan;
3. Menyediakan informasi yang lengkap, benar, aktual, prospektif serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan bagi calon kreditur/investor.

Matters that are required:

1. Choosing creditors/investors based on precautionary principle, in accordance with the prevailing regulations and free from corruption, collusion and nepotism (KKN);
2. Constantly fulfilling commitments toward creditors/investors to maintain the Company's reputation;
3. Providing complete, correct, actual and prospective information to potential creditors/investors without points which may lead to misinterpretations.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan:

1. Meminta, menerima dan/atau memberikan suap dan gratifikasi;
2. Memfasilitasi dan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Matters that are not allowed:

1. Asking for, receiving and/or providing bribes and gratuity;
2. Facilitating and taking actions which could result in conflicts of interest.





AKSES INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Pelindo 1 senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi yang akurat, teratur dan terkini kepada Pemegang Saham. Akses informasi yang disediakan untuk Pemegang Saham, antara lain:

1. Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Website resmi Perseroan;
3. Media Sosial:
Twitter : @Pelindo_1
Facebook : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Youtube : Pelindo 1
Instagram : Pelindo1
4. Pertemuan langsung dengan Pemegang Saham.

JENIS-JENIS DAN PENYELENGGARAAN RUPS DI PELINDO 1

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Baik RUPS Tahunan dan RUPSLB memiliki wewenang tertinggi dalam struktur tata kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap Manajemen.

ACCESS TO INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS

As a State-Owned Enterprise, Pelindo 1 always strives to provide accurate, regular, and up-to-date information for the Shareholders. Access to information for the Shareholders are provided through:

1. The General Meeting of Shareholders;
2. The Company's official website;
3. Social media:
Twitter : @Pelindo_1
Facebook : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Youtube : Pelindo 1
Instagram : Pelindo1
4. Direct meeting with the Shareholders.

TYPES AND ORGANIZATIONS OF GMS IN PELINDO 1

According to the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the GMS comprises the Annual GMS and the Extraordinary GMS (EGMS). Both Annual GMS and Extraordinary GMS have the highest authority in the structure of the Company's corporate governance and at the same time become the main forum for the Shareholders to exercise their rights and authorities over the Management.

JENIS RUPS YANG DISELENGGARAKAN PERSEROAN TYPES OF GMS ORGANIZED BY THE COMPANY

RUPS Tahunan Annual GMS (AGMS)	RUPS Luar Biasa (RUPSLB) Extraordinary GMS (EGMS)
Diselenggarakan setiap tahun, selambat-lambatnya pada bulan Juni setelah tutup buku Perusahaan. Organized every year, at the latest on June after closing the Company's books.	Diselenggarakan bila dianggap perlu oleh Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Organized if deemed necessary by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and/or the Shareholders.

RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Dalam RUPS Luar Biasa, Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPSLB. Direksi juga memiliki kewajiban untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB atas permintaan tertulis dari 1 (satu) Pemegang Saham.

RUPS Sirkuler atau Pengambilan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham adalah pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan

The Annual GMS is organized every year, at the latest 6 (six) months after the Company's financial year ends. The Approval of the Annual Report and the Ratification of the Financial Report by the annual GMS are meant to be the discharge and full release of responsibility of the Board of Directors and the Board of Commissioners from the management and supervision carried out during the previous financial year, as long as such actions are reflected in the financial report.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) is a GMS organized at any time as needed. In the Extraordinary GMS, the Board of Directors or the Board of Commissioners is the one with the authority to organize. The Board of Directors also has the obligation to summon and organize the EGMS upon written request from 1 (one) Shareholder.

The Circular GMS or Circular Decision Making of the Shareholders is a decision making carried out without organizing physical GMS, but rather by sending out written proposals to all

diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

RUPS Sirkuler ini diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 91, yang berbunyi: "Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengingat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan."

KEWENANGAN RUPS

1. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan;
4. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

KETENTUAN PENYELENGGARAAN RUPS, PEMBERITAHUAN RUPS DAN CATATAN YANG TERMUAT DALAM SURAT PEMANGGILAN RUPST/RUPSLB

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan RUPS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS tersebut maka RUPS dapat diadakan di manapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat;
4. Direksi menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB dengan didahului pemanggilan RUPS;
5. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan: a) seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah; atau b) Dewan Komisaris;
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya;

shareholders, where the proposals are then approved in writing by all the shareholders.

The Circular GMS is regulated in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, in particular Article 91, which reads: "The Shareholders may also make binding decisions outside the GMS with the conditions that all shareholders with voting rights approve the proposals in writing by signing them."

AUTHORITIES OF THE GMS

1. Appointing and terminating the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. Making necessary decisions to protect the business interests of the Company in both long and short term in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association;
3. Approving the Annual Report including the ratification of the Financial Report and the supervisory duties of the Board of Commissioners in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association;
4. Making decisions through transparent, fair and accountable process;
5. Implementing Good Corporate Governance according to its authorities and responsibilities.

PROVISIONS ON THE ORGANIZATION OF GMS, NOTIFICATIONS FOR GMS, AND NOTES CONTAINED IN THE SUMMONS FOR AGMS/EGMS.

According to the Company's Articles of Association, the GMS requires the following provisions:

1. All GMS are organized in the Company's domicile or in a location where the Company runs its main business activities within the territory of the Republic of Indonesia;
2. If all shareholders are present and/or represented and all shareholders agree to organize the GMS, then the GMS can be organized anywhere within the territory of the Republic of Indonesia;
3. The GMS may make a decision if it is approved unanimously;
4. The Board of Directors organizes the AGMS and EGMS preceded by summoning the GMS;
5. The GMS may also be organized by the request of: a) one or more Shareholders representing at least 1/10 parts of all shares that have been issued by the Company with valid voting rights; or b) the Board of Commissioners;
6. The request for organizing a GMS is submitted to the Board of Directors in a registered letter along with the reason(s);



7. Surat tercatat yang dimaksud disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
8. Alasan permintaan penyelenggaraan RUPS, antara lain namun tidak terbatas pada: a) Direksi tidak melaksanakan RUPST sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau c) dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perusahaan;
9. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka: a) permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b) Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
12. RUPS yang diselenggarakan Direksi hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan terkait dari Direksi dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi;
13. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan terkait dari Dewan Komisaris;
14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu masing-masing 15 hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan;
15. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
16. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
7. Copies of the above registered letter are submitted to the Board of Commissioners;
8. The reasons for requesting a GMS including but not limited to: a) the Board of Directors do not organize the AGMS in accordance with the prevailing provisions; b) the term of office of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners is about to expire; or c) in the event that the Board of Directors is unavailable or there is a conflict of interest between the Board of Directors and the Company;
9. The Board of Directors is required to summon the GMS within a period of no later than 15 days from the date when the request for the GMS is received;
10. In the event that the Board of Directors do not summon the GMS, then: a) the request for the GMS by the Shareholders is reapplied to the Board of Commissioners; or b) the Board of Commissioners summon the GMS on its own;
11. The Board of Commissioners is required to summon the GMS within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date when the request for the GMS is received;
12. The GMS organized by the Board of Directors only discusses issues related to the reasons related to the Board of Directors and other agenda items which are deemed necessary by the Board of Directors;
13. The GMS organized by the Board of Commissioners only discusses issues related to the reasons related to the Board of Commissioners;
14. In the event that the Board of Directors or the Board of Commissioners do not summon the GMS within the a period of 15 days from the date of the request for GMS, the Shareholders who request the GMS may summon the GMS on their own after receiving permission from the Chairman of the District Court whose jurisdiction covers the Company's domicile;
15. Summons for GMS shall be issued no later than 14 days prior to the date of the GMS being organized, without taking into account the date of summons and the date of the GMS;
16. Summons for GMS shall be issued by registered letter and/ or by means of advertisements in newspapers;

17. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;
18. Perusahaan wajib memberikan salinan bahan RUPS kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta; dan
19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu dan isi dalam media penyampaian yang dimaksud dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, keputusan RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

17. The GMS invitation states the date, time, place and agenda items along with a notification that the materials to be discussed in the GMS are available at the Company's office since the date of the summons for the GMS until the date the GMS is organized;
18. The Company is required to provide copies of the GMS materials to the Shareholders free of charge if requested; and
19. In the event that the summons are not in accordance with the terms and conditions regarding the period and content within the submission media and the summons do not comply with the required provisions, the GMS decision remains valid if all Shareholders with valid voting rights are present or represented in the GMS and the decision is approved unanimously.

PENYELENGGARAAN RUPS DI SEPANJANG TAHUN 2020 DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

Sepanjang tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan, yaitu RUPS Tahunan Persetujuan RKAP dan Anggaran PKBL 2020 serta RUPS Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Buku 2019.

RUPS TAHUNAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN TAHUN 2020

Tahapan pelaksanaan RUPS RKAP 2020

Undangan Invitation	Pelaksanaan Organization	Risalah RUPS Minutes of the GMS
Melalui surat dengan No. UM.50/2/12/PI-20 Tanggal 22 Januari 2020 By letter No. UM.50/2/12/PI-20 of 22 January 2020	Rapat diselenggarakan pada Kamis, 23 Januari 2020, pukul 16.15 s.d 17.15 WIB, bertempat di Kementerian BUMN Lantai 6 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat The meeting was held on Thursday, 23 January 2020, from 16.15 to 17.15 WIB, at the 6th Floor of the Ministry of SOE Offices, Medan Merdeka Selatan Street No. 13, Central Jakarta.	Akta No. 4 tanggal 23 Januari 2020 yang Dibuat di Hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Deed No. 4 of 23 January 2020 Made Before Notary Nanda Fauz Iwan, Bachelor of Laws, Master of Notarial Law, a Notary domiciled in South Jakarta.

GMS ORGANIZATIONS THROUGHOUT 2020 AND FOLLOW-UPS BY THE MANAGEMENT

Throughout 2020, the Company held 2 (two) Annual GMS, namely the Annual GMS for Approval of the 2020 RKAP and PKBL Budget as well as GMS for Accountability Report for Financial Year of 2019 and 2 (two) Extraordinary GMS.

THE 2020 ANNUAL GMS FOR APPROVAL OF THE COMPANY'S WORK PLAN AND BUDGET (WPB) AND THE PARTNERSHIP AND ENVIRONMENTAL ASSISTANCE PROGRAMS BUDGET

Stages of organization of the 2020 GMS for WPB



Hari/Tanggal Day/Date	: Kamis, 23 Januari 2020 Thursday, 23 January 2020
Waktu Time	: 16.15 s.d 17.15 WIB 16.15 to 17.15 WIB
Tempat Place	: Kementerian BUMN Lantai 6 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat 6th Floor of the Ministry of SOE Office Medan Merdeka Selatan Street no. 13, Central Jakarta
Kehadiran Attendance	: Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia: The Proxy of Shareholders of the Government of the Republic of Indonesia Liliek Mayasari selaku Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Liliek Mayasari in her authority as the Acting Deputy of Construction and Transportation Facilities and Infrastructure of the Ministry of SOE
	Dewan Komisaris: Board of Commissioners: 1. Refly Harun (Komisaris Utama/Komisaris Independen) I (President Commissioner/Independent Commissioner) 2. Bambang Setyo Wahyudi (Komisaris) I (Commissioner) 3. Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris) I (Commissioner) 4. Winata Supriatna (Komisaris) I (Commissioner) 5. Heryadi (Komisaris Independen) I (Commissioner)
	Direksi: Board of Directors: 1. Dian Rachmawan (Direktur Utama) I (President Director) 2. Syahputra Sembiring (Direktur Operasi dan Komersial) I (Director of Operations and Commercial) 3. Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik) I (Director of Engineering) 4. Ihsanuddin Usman (Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis) I (Director of Business Transformation and Development) 5. Moch Hamied Wijaya (Direktur Sumber Daya Manusia) I (Director of HR) 6. Mohamad Nur Sodik (Direktur Keuangan) I (Director of Finance)

Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

All decisions in the GMS were made by consensus. The GMS decisions and their implementation and follow-ups by the Company's Management until the end of 2020 are as follows:

AGENDA MATA ACARA 1:

Agenda Item 1:

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020.
Ratification of the Company's Work Plan and Budget (WPB) in 2020

Keputusan Mata Acara 1:

Agenda Decisions 1:

1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Approving the Company's Work Plan and Budget (WPB) in 2020 (twenty twenty) of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), with the following points:

a. Laporan Laba (Rugi) Konsolidasi

Consolidated Statement of Profit (Loss)

Pendapatan Usaha	Rp4.000.276 Juta
Operating Income	Rp4,000,276 Million
Laba Bersih	Rp435,342 Juta
Net Profit	Rp435.342 Million

b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

Consolidated Statement of Financial Position

Uraian Description	Jumlah Amount
Total Aset Total Assets	Rp17.883.070 Juta Rp 17,883,070 million
Liabilitas Liabilities	Rp11.217.242 Juta Rp 11,217,242 million
Ekuitas Equities	Rp6.665.828 Juta Rp 6,665,828 million

c. Investasi

Investment

Rencana Investasi Tahun 2020 sebagai berikut:
The 2020 Investment Plan is as follows:

Uraian Description	Satuan Unit	RKAP Tahun 2020 2020 WPB
INDUK PERUSAHAAN PARENT COMPANY	Rp	2.077.384.026.596
ANAK PERUSAHAAN SUBSIDIARIES		
PT Prima Terminal Petikemas	Rp	427.119.725.000
PT Prima Multi Terminal	Rp	142.224.334.178
PT Prima Pengembangan Kawasan	Rp	326.014.000.000
PT Prima Indonesia Logistik	Rp	18.190.263.158
PT Prima Husada Cipta Medan	Rp	15.512.500.000
Jumlah Investasi Anak Perusahaan Total Investments in Subsidiaries	Rp	929.060.822.336
Jumlah Investasi Total Investments	Rp	3.006.444.848.932

2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing 1 program/item investasi, sepanjang tidak merubah program/item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi.

Approving the transfer of authorities to the Board of Commissioners to give approval if there are actions that cause changes in investment budget allocations at maximum of 10% (ten percent) from the value of every 1 investment program/item, as long as not changing the investment program/item and not surpassing the total investment value.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions

Keputusan langsung berlaku.

The decision takes effect immediately.



AGENDA MATA ACARA 2:

Agenda Item 2:

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKAP PKBL) Tahun 2020.
Ratification of the Company's Work Plan and Budget (WPB) for Partnership and Environmental Assistance Programs (PKBL) in 2020.

Keputusan Mata Acara 2:

Agenda Decisions 2:

- Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sesuai dengan Risalah Rapat Nomor: RIS-28/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 18-11-2019.
Approving the Work Plan and Budget for Partnership and Environmental Assistance Programs (PKBL) in 2020 of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as stipulated by Minutes of Meeting no. 28/D7.MBU.3/11/2019 of 18-11-2019.
- Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2020 sebagai berikut:
The Partnership and Environmental Assistance Programs in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in 2020 are as follows:

	Kemitraan Partnership	Bina Lingkungan Community Development
Dana Tersedia Available Funds	Rp15.8000.000.000	Rp10.173.000.000
Penggunaan Dana Allocated Funds	Rp15.8000.000.000	Rp10.173.000.000
Sisa Dana Remaining Funds	Rp -	Rp -

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Telah ditindaklanjuti.

Has been followed up.

AGENDA MATA ACARA 3:

Agenda Decisions 3:

Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020.

Approving and Ratifying the Management Contract (*Key Performance Indicators*) between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders in 2020.

Keputusan Mata Acara 3:

Agenda Item 3:

Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020.

Approving and Ratifying the Management Contract (*Key Performance Indicators*) between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders in 2020.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Telah ditindaklanjuti.

Has been followed up.

AGENDA MATA ACARA 4:

Agenda Item 4:

Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020.

Approval and Ratification of the Management Contract (*Key Performance Indicators*) between the Board of Commissioners and the Shareholders in 2020.

Keputusan Mata Acara 4:

Agenda Decisions 4:

Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020.

Approving and Ratifying the Management Contract (*Key Performance Indicators*) between the Board of Commissioners and the Shareholders in 2020.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Telah ditindaklanjuti.

Has been followed up.

AGENDA MATA ACARA 5:

Agenda Item 5:

Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020.
Establishment of Operational Aspect Indicators for the Measurement the Company's Health Level in 2020.

Keputusan Mata Acara 5:

Agenda Decisions 5:

Menetapkan indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2020 sebagai berikut:
Establishing Operational Aspect Indicators for the Measurement of Health Level of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in 2020, as follows:

No.	Indikator Indicators	Bobot Weight
1	Waiting Time for Pilot (Jam) Waiting Time for Pilots (Hour)	9
2	Tingkat Efektivitas Tambatan Petikemas (%) Container Mooring Effectiveness Rate (%)	9
3	Produktivitas Bongkar Muat Petikemas (B/S/H) Container Loading/Unloading Productivity (B/S/H)	8
4	Yard Occupancy Ratio Petikemas (%) Container Yard Occupancy Ratio (%)	9
Jumlah Bobot Total Weights		35

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Telah ditindaklanjuti.

Has been followed up.

Arahan Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RKAP

RUPS Tahunan RKAP 2019 juga menghasilkan Arahan Pemegang Saham yang telah ditindaklanjuti oleh Manajemen hingga 31 Desember 2020.

Shareholders Directives in the Annual GMS for WPB

The Annual GMS for WPB also brings about Shareholders directives. Details of the Shareholders directives and follow-ups by the Management until 31 December 2020 are as follows:

No	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow up until December 31, 2020
1.	RKAP Tahun 2019 yang telah disahkan agar dirinci menjadi target per bulan dan <i>cascading</i> ke seluruh jajaran perusahaan Dewan Komisaris agar melaporkan hasil rincian dan <i>cascading</i> dimaksud kepada Pemegang Saham dalam triwulan I tahun 2019. The ratified 2019 WPB to be specified to monthly targets and cascading to all members of the Company;The Board of Commissioners to submit the said specifications and cascading to the Shareholders on the 1st quarter of 2019.	Telah dilaporkan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham pada Triwulan I 2020, dengan nomor surat UM.50/032/DK/PP.I/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham pada RUPS RKAP 2020. It has been reported by the Board of Commissioners to the Shareholders in Quarter 1 2020, through letter number UM.50/032/DK/PP.I/III/2020 of 26 March 2020 regarding Follow-Up on the Shareholders' Directives at the 2020 GMS for WPB.



No	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow up until December 31, 2020
2.	<p>Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya (<i>cost reduction</i> program) di semua lini usaha guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien, dan laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen perusahaan.</p> <p>To strive for increase of income and cost control (<i>cost reduction</i> program) on all lines of business in order to manifest more effective and efficient company management, and net profit is the minimum target that shall be achieved by all members of the company management.</p>	<p>Telah direalisasikan dengan: Telah dilakukan penyesuaian Tarif PIPANISASI Cabang Belawan dengan nomor surat US.13/1/13/BLW-20.TU tanggal 6 Oktober 2020; Telah dilakukan penyesuaian Tarif Barang/Dermaga Cabang Sibolga dengan nomor surat UM.50/1/18/SBG-20.TU tanggal 1 Desember 2020; Telah dilakukan penyesuaian Tarif Barang/Dermaga Cabang Sibolga dengan nomor surat UM.50/22/23/DUM-2020 tanggal 23 Desember 2020; Telah dilakukan penyampaian Surat Direksi Operasional dan Komersial untuk tambahan kelengkapan usulan penyesuaian Tarif TPK Belawan dan Dumai dengan nomor surat US.11/2/15/PI-20 tanggal 10 Desember 2020 serta pembahasan dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan tanggal 21-22 Desember 2020; Penandatanganan kerja sama Pemanduan dan Penundaan dengan BP Batam di wilayah kerja BP Batam; Penandatanganan Kerjasama Pemanduan dan Penundaan dengan PT Ben Line di Cabang Dumai; Kerja Sama Pemanduan dan Penundaan dengan PT Samudera Karana Lines di Cabang Dumai.</p> <p>It has been realized through: Pipeline Rate adjustment at Belawan Branch has been made, through letter number US.13/1/13/BLW-20.TU of 6 October 2020; Freight/Dock Rate adjustment at Sibolga Branch has been made, though letter number UM.50/1/18/SBG-20.TU of 1 December 2020; Freight/Dock Rate adjustment at Sibolga Branch has been made, though letter number UM.50/22/23/DUM-2020 of 23 December 2020; Letter of the Director of Operations and Commercial has been submitted as an additional requirement for the proposal for tariff adjustment at Belawan and Dumai container terminal through letter number US.11/2/15/PI-20 of 10 December 2020, and discussion with the Planning Bureau of the Ministry of Transportation has been conducted on December 21-22, 2020; Signing of Pilotage and Towage cooperation with BP Batam in BP Batam's business area; Signing of Pilotage and Towage cooperation with PT Ben Line at the Dumai Branch; Pilotage and Towage cooperation with PT Samudera Karana Lines at the Dumai Branch.</p>

No	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow up until December 31, 2020
3.	<p>Menindaklanjuti kerja sama dan sinergi yang telah dicanangkan dengan BUMN pelabuhan maupun BUMN lainnya dalam hal pengembangan usaha kepelabuhanan, pemanfaatan aset, pengembangan SDM, <i>joint procurement</i>, serta pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.</p> <p>To follow up cooperations and synergies declared with the SOE of Port Affairs and other SOEs in terms of port business development, asset utilization, human resources development, joint procurement, and information technology utilization and development.</p>	<p>Telah direalisasikan dengan: Telah dilakukan kerja sama dan sinergi yang dicanangkan dengan BUMN melalui penandatanganan MoU antara Pelindo 1 dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) No. UM.57/35/2/PI-20.TU dan JKS.01/12/11/1/DIR1/CRS/JPPI-2020 tanggal 12 November 2020 perihal Kerjasama Pengoperasian, Pemeliharaan, Penyediaan Peralatan Bongkar Muat, Jasa Konsultasi dan Penyediaan Suku Cadang Peralatan pelabuhan di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Pelaksanaan Nota Kesepahaman/MoU antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Indonesia Kendaraan Terminal No. UM.57/35/1/PI-20; HK.566/2/15/IKT-20 tanggal 12 November 2020 perihal Rencana Kerja Sama Pengelolaan Terminal Kendaraan, Penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU No. KL.703/XI/5/KA-2020; UM.57/37/20/PI-20.TU; S-90174/CEOF/COS/1120 tanggal 26 November 2020 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan PT Kawasan Industri Medan (Persero) tentang Rencana Kerja Sama Angkutan Barang Berbasis Kereta Api. Telah dilaksanakan sinergi BUMN dalam bentuk kerja sama pemanfaatan tanah di Cabang Pelabuhan Belawan, Cabang Pelabuhan Dumai, Cabang Pelabuhan Sibolga. Telah melakukan pelaksanaan diklat dengan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yaitu PT PMLI pada bulan Oktober dan November sebanyak 22 (dua puluh dua) peserta dan pada bulan November 2020 yang bekerja sama dengan BP3IP dengan 19 (sembilan belas) peserta. Telah dilaksanakan juga pelaksanaan diklat Peningkatan Kompetensi Pelaut ANT III 2020/2021 di Poltekpel Malahayati pada bulan Agustus 2020 s.d April 2021, diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta. Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi SDM dalam berbagai bidang antara lain pelaksanaan Diklat Ahli Kepelabuhanan, Sertifikasi Manajemen Sumber Daya Manusia (Tingkat Manajer), Diklat "Palm Oil Product Knowledge and Handling", persiapan pelaksanaan standarisasi pelayanan petikemas PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Telah dilakukan sinergi BUMN dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dengan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Telah dilakukan sinergi dalam hal pengadaan dengan pelaksana pekerjaan perusahaan BUMN.</p> <p>It has been realized through: Cooperation and synergy declared with SOEs have been made through the signing of MoU between Pelindo 1 and PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) No. UM.57/35/2/PI-20.TU and JKS.01/12/11/1/DIR1/CRS/JPPI-2020 of 12 November 2020 regarding Cooperation in Operation, Maintenance, Provision of Loading and Unloading Equipment, Consulting Services and Provision of Port Equipment Spare Parts in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Implementation of a Memorandum of Understanding/MoU between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with PT Indonesia Kendaraan Terminal No. UM.57/35/1/PI-20; HK.566/2/15/IKT-20 of 12 November 2020 regarding Cooperation Plan for Vehicle Terminal Management, the signing of Memorandum of Understanding/MoU No. KL.703/XI/5/KA-2020; UM.57/37/20/PI-20.TU; S-90174/CEOF/COS/1120 of 26 November 2020 between PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and PT Kawasan Industri Medan (Persero) regarding Cooperation Plan for Rail-Based Freight Transport. Synergy with SOEs has been made through cooperations in land utilization at Belawan Port Branch, Dumai Port Branch, Sibolga Port Branch. Trainings have been organized with PT PMLI, a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), in October and November with 22 (twenty two) participants, and in collaboration with BP3IP in November 2020 with 19 (nineteen) participants. The 2020/2021 ANT III (Nautical Expert Level III) Seafarers Competency Improvement training has also been carried out at Polytechnic Malahayati from August 2020 to April 2021, joined by 10 (ten) participants. Human resources competency improvements have been made in various areas, namely by conducting Ports Expert Training, Human Resources Management Certification (Managerial Level), "Palm Oil Product Knowledge and Handling" Training, as well as preparation for implementing standardization in container services in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Synergy with SOE has been made through information technology utilization and development with PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Synergy in procurement has been made with SOE operators.</p>
4.	<p>Senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja anak perusahaan maupun perusahaan patungan, terutama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan secara konsolidasi.</p> <p>To constantly develop and supervise the performance of subsidiaries and joint ventures, especially those which significantly contribute to the company's performance on a consolidated basis.</p>	<p>Telah dilakukan evaluasi setiap triwulan pada kinerja keuangan masing-masing entitas anak, dan hasil evaluasi tersebut disampaikan ke masing-masing entitas anak melalui surat Direksi yang isinya berupa hal-hal yang perlu dilakukan oleh Direksi entitas anak untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan dan/atau upaya yang harus dilakukan untuk optimalisasi kinerja keuangan.</p> <p>Quarterly evaluations on the financial performance of each subsidiary entity have been conducted, and the evaluation results are conveyed to each subsidiary entity through letters of the Board of Directors containing matters that need to be accomplished by the Board of Directors of subsidiaries to achieve the budget target that has been set and/or efforts to make to optimize financial performance.</p>





No	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow up until December 31, 2020
5.	<p>Memastikan Program pengelolaan dan pengembangan SDM dilakukan secara komprehensif oleh semua fungsi <i>Corporate Human Capital Development</i> (CHCD). Implementasi kebijakan pengembangan SDM, jenjang karier dan <i>talent management</i> untuk mendukung pencapaian target-target perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang agar ditingkatkan, serta dilakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan SDM agar senantiasa sesuai dengan <i>best practice</i>.</p> <p>To ensure that the human resources management and development programs are done comprehensively by all functions of the Corporate Human Capital Development (CHCD). Policy implementation on human resources development, career paths and talent management to support the accomplishment of the company targets both in short and long term shall be improved, and to evaluate the human resources policies to be in accordance with the best practice.</p>	<p>Telah direalisasikan dengan: Pelaksanaan pelatihan/<i>training</i> kepada pegawai secara virtual (<i>e-learning</i>) sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 pada bulan Oktober-Desember 2020 dengan 57 modul pelatihan yang dilaksanakan secara <i>online</i>; Pelaksanaan Asesmen Pegawai pada Band 4-5 pada tanggal 14-27 Oktober 2020, yang diikuti oleh 625 peserta; Penetapan Talent PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2020 pada aplikasi <i>Integrated Career and Talent Management</i> (Metamorph) tanggal 1 Desember 2020 sebanyak 15 peserta; Penugasan Talent terpilih pada Project Bisnis Logistik PT Pelabuhan Indonesia I dan dilanjutkan magang pada perusahaan logistik di Indonesia; Partisipasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada "Online Course Digital Business Transformation" kerja sama Forum Ekselen BUMN dengan Institute of Management Development (IMD) Swiss, pada Desember 2020 dan diikuti oleh 6 (enam) peserta; Lanjutan Ratifikasi Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang terdapat pada Direktorat SDM dan Umum.</p> <p>They have been realized through: Virtual (<i>e-learning</i>) trainings for employees with 57 training modules in October-December 2020 carried out online as a consequence of the COVID-19 Pandemic; Assessment on Band 4-5 Employees on 14-27 October 2020, with 625 participants; Determination of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Talents in 2020 on the Integrated Career and Talent Management (Metamorph) application on 1 December 2020, which amount to 15 participants; Assignment of selected Talents to Logistics Business Projects of PT Pelabuhan Indonesia I and subsequent internships at logistics companies in Indonesia; Participation of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in the "Online Course in Digital Business Transformation", a collaboration between the SOE Excellence Forum and the Swiss Institute of Management Development (IMD), in December 2020, attended by 6 (six) participants; Continuation of Ratification of the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) available in the Directorate of Human Resources and General Affairs.</p>
6.	<p>Direksi agar menyusun laporan keuangan dengan memperhatikan CoA sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perusahaan Pelabuhan Indonesia dan standar akuntansi keuangan.</p> <p>The board of Directors to prepare financial statement by taking into account the Chart of Account (CoA) in accordance with the Company's Accounting Guidelines and financial accounting standards.</p>	<p>Telah direalisasikan dengan: Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan telah menggunakan CoA berdasarkan Kebijakan Akuntansi Perusahaan, dan Laporan Keuangan yang disajikan per 31 Desember 2020, telah mengimplementasikan PSAK terbaru yang efektif berlaku 01 Januari 2020, yaitu PSAK 71 (Instrumen Keuangan), PSAK 72 (Pendapatan dari kontrak pelanggan) dan PSAK 73 (Sewa).</p> <p>The presentation of the Company's Financial Statements has taken into account Chart of Account (CoA) based on the Company's Accounting Policy, and The Financial Statements presented as of 31 December 2020 have implemented the latest PSAK effective from 1 January 2020, namely PSAK 71 (Financial Instruments), PSAK 72 (Revenues from Contracts with Customers) and PSAK 73 (Leases).</p>
7.	<p>Terkait peraturan-peraturan dan isu-isu yang bersinggungan dengan kegiatan usaha Pelindo, Pelindo 1-IV agar dapat berkoordinasi untuk mengadakan <i>workshop</i> dengan mengundang narasumber dari Kementerian/Lembaga terkait.</p> <p>Regarding regulations and issues related to Pelindo business activities, Pelindo 1-IV are expected to coordinate to organize workshops inviting resource persons from relevant Ministries/Institutions.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan Pemegang Saham.</p> <p>It has been implemented in accordance with the Shareholders' Directive.</p>
8.	<p>Direksi agar mengintegrasikan rencana strategis untuk mengoptimalkan TPKDB, BICT, Pelabuhan Belawan Fase 1 yang sedang dalam proses pelimpahan dari Kementerian Perhubungan ke Pelindo 1, serta Pelabuhan Belawan Fase 2 untuk memaksimalkan <i>throughput</i>.</p> <p>The Board of Directors to integrate strategic plans to optimize the TPKDB, BICT, Port of Belawan Phase 1 which currently is under transfer process from the Ministry of Transportation to Pelindo 1, as well as Port of Belawan Phase 2 to maximize throughput.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan Pemegang Saham.</p> <p>It has been implemented in accordance with the Shareholders' Directive.</p>

No	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow up until December 31, 2020
9.	<p>Mengintegrasikan rencana strategis Pelabuhan Kuala Tanjung dengan Kawasan Industri Kuala Tanjung sehingga <i>throughput</i> Pelabuhan Kuala Tanjung dapat <i>di-backup</i> dari Kawasan Industri di sekitarnya antara lain Kawasan Industri Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkei.</p> <p>To integrate strategic plans toward Port of Kuala Tanjung and Kuala Tanjung Industrial Zone so that the throughput of the Port of Kuala Tanjung can be backed up by the surrounding Industrial Zones, namely Kuala Tanjung Industrial Zone and Sei Mangkei Special Economic Zone.</p>	<p>Telah direalisasikan dengan: PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Kementerian Perhubungan telah menandatangani perjanjian sewa dalam rangka penyediaan infrastruktur No: UM.57/33/1/PI-20.TU tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (BMN) Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Dirjenla Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Telah dilakukan pembayaran uang sewa BMN tahap I sebesar Rp14,7 miliar; TPK Belawan Fase 1 dan 2 akan dikonsolidasikan dalam satu operasional terminal, dengan mengajukan Addendum Konsesi Pengusahaan TPK Belawan Fase 2 yang ruang lingkungannya ditambah TPK Belawan Fase 1. Saat ini sedang dilakukan reviu draft Addendum oleh BPKP Sumut; Proses pemilihan mitra internasional untuk pengelolaan TPK Fase I dan 2 untuk memaksimalkan throughput Belawan telah dimulai dengan <i>me-release</i> (RFP) kepada calon mitra pada tanggal 5 Juni 2020. Proposal Penawaran dari calon mitra yang telah dikirimkan ke Pelindo 1 tanggal 30 Agustus 2020 adalah dari China Merchant dan ICTSI (Filipina). Saat ini sedang dilaksanakan proses <i>Best and Final Offer</i> (BAFO) terhadap kedua calon mitra ini untuk meningkatkan kompetisi dan nilai kerja sama.</p> <p>It has been realized through: PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and the Ministry of Transportation have signed the lease contract for provision of infrastructure No: UM.57/33/1/PI-20.TU of 27 October 2020 regarding the Leasing of State y Owned Assets (BMN) in the Framework of Infrastructure Provision At the Main Port Authority Office of Belawan Directorate General of Sea Transportation To PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). The first stage of the BMN rental payment has been made in the amount of Rp14.7 billion; Belawan Container Terminal Phase 1 and 2 will be consolidated into one operational terminal, through proposing an Addendum to the Concession of Belawan Container Terminal Phase 2 wherein its scope is added with Belawan Container Terminal Phase 1's. Currently, the draft Addendum is being reviewed by the BPKP of North Sumatra; The process of selecting international partners in managing Container Terminal Phase 1 and 2 to maximize Belawan throughput has been commenced by releasing RFP to potential partners on 5 June 2020. Bid proposals from potential partners that have been sent to Pelindo 1 as of 30 August 2020 are from China Merchant and ICTSI (the Philippines). Currently, the Best and Final Offer (BAFO) process is being carried out for these two potential partners to increase competition and the cooperation value.</p>
10.	<p>Dalam rangka Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung, Direksi agar segera menyelesaikan izin penetapan dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) sehingga dapat segera dipasarkan dan menarik investor atau mitra strategis.</p> <p>In the framework of the Development od Kuala Tanjung Industrial Zone, the Board of Directors to immediately complete the establishment permit and the Industrial Zone Business Permit (IUKI) so that it can immediately be marketed and attracting strategic investors or partners.</p>	<p>Telah direalisasikan dengan membentuk PMO Pengadaan Tanah (BAKD No HM.70/5/18/PI-20.TU oleh Direksi pada tanggal 3 November 2020) yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab atas proses administrasi terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) di Kabupaten Batubara sekaligus juga berperan sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan tetap berkoordinasi dengan anak perusahaan PT PMT dan PT PPK. PMO Pengadaan tanah akan melaksanakan proses pembebasan lahan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).</p> <p>It has been realized by establishing a PMO for Land Procurement (BAKD No. HM.70/5/18/PI-20.TU by the Board of Directors on 3 November 2020) which has the functions and responsibilities for the administrative process related to land acquisition for public interest carried out by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in Batubara Regency and also acts as the Commitment-Making Officer (PPK) while remaining to coordinate with subsidiaries namely PT PMT and PT PPK. The PMO for Land Procurement will execute the process of land acquisition as it is one of the requirements to obtain an Industrial Estate Business License (IUKI).</p>





No	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow up until December 31, 2020
11.	<p>Direksi agar menindaklanjuti kerja sama pengembangan Pelabuhan Batu Ampar bersama-sama dengan Pelindo 11 dan PT PDIP Batam dan menyelesaikan sesuai dengan target waktu yang telah disepakati.</p> <p>The Board of Directors to follow up the cooperation in the development of Port of Batu Ampar along with Pelindo 11 and PT PDIP Batam, and to complete it according to the agreed target time.</p>	<p>Sesuai hasil kajian dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang disampaikan melalui surat Nomor: KS.03/28/9/1/KRJ/UT/PI.II-2020 tanggal 28 September 2020 maka telah diakhirinya perjanjian awal antara BP Batam dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) maka perjanjian Pendahuluan antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No.KS.01/12/2/1/KRJ/UT/PI.II-2020 dan UM.57/7/4/PI-20.TU dan MOU-DRU/010/11/2020 dan TP.01/03/A.DIR.001631/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Pembentukan Konsorsium Kerja sama Pengoperasian dan Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar beserta Area Pendukungnya juga tidak dapat dilanjutkan dan diusulkan untuk diakhiri dalam suatu dokumen pengakhiran perjanjian.</p> <p>According to the analysis result from PT PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) submitted through letter no. KS.03/28/9/1/KRJ/UT/PI.II-2020 of 28 September 2020, the initial agreement between BP Batam and PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has been terminated, and consequently the Preliminary agreement between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and PT Batam Island Industrial Area (Persero) and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No. KS.01/12/2/1/ KRJ/UT/PI.II-2020 and UM.57/7/4/PI-20.TU and MOU-DRU/010/11/2020 and TP.01/03/A.DIR.001631/2020 of 12 February 2020 concerning the Establishment of Consortium for Cooperation in the Operation and Development of Batu Ampar Port and its Supporting Areas also cannot be continued and is proposed to be terminated in a corresponding document.</p>
12.	<p>Investasi agar dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, didahului dengan kajian yang komprehensif, sesuai standar prosedur operasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kewajaran harganya.</p> <p>Investments shall be made based on priority scale, preceded by comprehensive analysis, in accordance with the standard operating procedures, transparent and accountable in regards of its reasonable price.</p>	<p>Investasi telah dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, didahului dengan kajian yang komprehensif, sesuai standar prosedur operasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kewajaran harganya. Realisasi Investasi sampai dengan Triwulan IV berdasarkan RKAP Revisi telah terealisasi sebagai berikut: Induk sebesar 84,5% atau Rp474.599.867.479,- dari 104 program telah terealisasi 91 program atau 87,5%. Anak Perusahaan sebesar 62,2% atau Rp252.780.233.149,- dari 45 program telah terealisasi 32 program atau 71,1%. Konsolidasi sebesar 75,1% atau Rp727.380.100.628,- dari 149 program telah terealisasi 123 program atau 82,6%.</p> <p>Investments have been made based on priority scale, preceded by comprehensive analysis, in accordance with standard operating procedures, transparent and accountable in regards of its reasonable price. Investments up to Quarter 4 based on the Revised WPB have been realized as follows: Parent amounting to 84.5% or Rp474,599,867,479, - 91 out of 104 programs or 87.5% have been realized. Subsidiaries amounting to 62.2% or Rp252,780,233,149, - 32 out of 45 programs or 71.1% have been realized. Consolidated amounting to 75.1% or Rp727,380,100,628,- 123 out of 149 programs or 82.6% have been realized.</p>

No	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow up until December 31, 2020
13.	<p>Komisaris agar dapat mengawal dan mengawasi pembangunan Proyek Strategis Nasional tepat waktu sehingga target dapat tercapai. The Board of Commissioners to guard and supervise the development of the National Strategic Project to be on time so that the target can be achieved.</p>	<p>Telah direalisasikan dengan: Kuala Tanjung Multipurpose Terminal Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, rata-rata volume/throughput di Kuala Tanjung Multipurposes Terminal adalah sebagai berikut: Container = 4.500 teus Liquid Bulk = 30.508 ton General Cargo = 5.319 ton Dengan jumlah call kapal rata-rata 18 call/bulan Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung Penetapan Lokasi untuk area seluas 1.128 Ha yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara No.163/TAPEM/Tahun 2020 pada tanggal 28 Februari 2020; Pelindo 1, Inalum dan Wika dalam proses negosiasi harga saham Portepel yang ditawarkan oleh PT PPK dalam rangka <i>right issue</i> dan juga proses untuk menyepakati draft Perjanjian Penyertaan Modal Bersyarat (CSSA). Pengembangan Kuala Tanjung Multi Purpose Terminal (KTMT) Sedang dilakukan kajian skema kerja sama yang tepat untuk menjadi mitra strategis PT PMT; Sedang dilakukan finalisasi <i>term sheet</i> kerja sama dan QnA antara Pelindo 1 dan Calon Mitra Strategis; <i>Due diligence</i> & penyusunan proposal bisnis oleh Calon Mitra Strategis; Target <i>Signing</i> Kerja Sama Triwulan II 2021. Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT) Zhejiang Seaport berminat membentuk JV Company dengan Pelindo 1 untuk membebaskan lahan dan mengelola lahan 200 Ha; Pelindo 1 memprioritaskan Zhejiang Seaport sebagai <i>anchor tenant/cluster developer</i> dan bekerja sama dengan PT Prima Pengembangan Kawasan; Sedang dilakukan finalisasi <i>term sheet</i> kerja sama dan QnA antara Pelindo 1 dan Zhejiang Seaport; Target kesepakatan <i>term sheet</i> kerja sama pada Triwulan IV 2021; Target <i>signing</i> perjanjian <i>lease</i> lahan Triwulan IV 2021; Target pembebasan lahan Tahap Awal seluas 50 Ha untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) pada triwulan I tahun 2021; Pelindo 1, Inalum & Wijaya Karya telah menandatangani <i>Head of Agreement</i> untuk bekerja sama dalam pengembangan & pengelolaan Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT) pada tanggal 27 Januari 2020; Target Inalum & Wijaya Karya masuk sebagai pemegang saham PPK Triwulan I tahun 2021; Target <i>groundbreaking tenant</i> di Trw IV 2021.</p> <p>It has been realized by: Kuala Tanjung Multipurpose Terminal As of the fourth quarter of 2020, the average volume/throughput at the Kuala Tanjung Multipurposes Terminal is as follows: Containers = 4,500 TEUs Liquid Bulks = 30,508 tons General Cargo = 5,319 tons With an average number of ship calls at 18 calls/month Development of Kuala Tanjung Industrial Zone Location Determination for an area of 1,128 Ha is determined based on the Decision of the Regent of Batu Bara no.163/TAPEM/Year 2020 on 28 February 2020; Pelindo 1, Inalum and Wika are in the process of negotiating the price of Portepel shares offered by PT PPK in the context of rights issue and also in the process of agreeing on the draft Conditional Sales and Subscription Agreement (CSSA). Development of Kuala Tanjung Multi Purpose Terminal (KTMT) Analysis on the appropriate cooperation scheme to become a strategic partner of PT PMT is being made; Cooperation term sheet and QnA between Pelindo 1 and Strategic Partner Candidates are being finalized; Due diligence & preparation of business proposals by Strategic Partner Candidates; Target of Cooperation Signing in Quarter 2 2021. Development of Kuala Tanjung Industrial Zone (KIKT) Zhejiang Seaport is interested in forming a JV Company with Pelindo 1 to acquire and manage 200 ha of land; Pelindo 1 prioritizes Zhejiang Seaport as an anchor tenant/cluster developer and cooperates with PT Prima Kawasan Pembangunan; Cooperation term sheet and QnA between Pelindo 1 and Zhejiang Seaport is being finalized; Target of cooperation term sheet agreement in Quarter 4 2021; Target of land lease contract signing in Quarter 4 2021; Target of realizing the Initial Stage of acquisition of 50 hectares of land to meet the requirement for obtaining Industrial Estate Business License (IUKI) in Quarter 1 2021; Pelindo 1, Inalum & Wijaya Karya have signed a Head of Agreement to cooperate in the development & management of Kuala Tanjung Industrial Zone (KIKT) on 27 January 2020; Target of Inalum & Wijaya Karya registered as shareholders of PPK in Quarter 1 2021; Target of tenant <i>groundbreaking</i> in Quarter 4 2021.</p>
14.	<p>Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK, auditor independen dan Satuan Pengawasan Intern perusahaan yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2019 dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaian tahun 2020. The Board of Directos to pay attention to findings and recommendations from the BPK, independent auditors and the Company's Internal Audit Unit which have not yet been completed until 2019 and to make them as a target to accomplish in 2020.</p>	<p>Telah dilaksanakan <i>monitoring</i> progres atas tindak lanjut penyelesaian temuan dan rekomendasi baik dari auditor internal maupun eksternal. Posisi tindak lanjut temuan SPI tahun 2019 sebanyak 122 temuan, seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti (100%). Terhadap temuan BPK-RI (lama), telah ditindaklanjuti sesuai surat Direksi kepada BPK dan mengusulkan agar temuan tersebut dikategorikan sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang jelas (Menunggu jadwal pembahasan penyelesaian temuan dengan Pihak BPK-RI). Terhadap temuan BPK-RI (pemeriksaan tahun 2019 dan LHP diserahkan pada 2 September 2020), telah dilaksanakan pembahasan awal dengan Auditor BPK pada tanggal 14 Desember 2020 dan akan dijadwalkan pembahasan lanjutan untuk penyelesaian temuan.</p> <p>Progress on the follow-ups to settle findings and recommendations both from internal and external auditors has been monitored. The IAU brought up 122 findings in 2019, and all of them have been followed up (100%). As for BPK-RI (old) findings, they have been followed up in accordance with the Board of Directors' letter to BPK and it has been proposed to categorize them as findings that cannot be followed up with clear reasons (Waiting for a schedule to discuss the settlement of those findings with BPK-RI). Regarding BPK-RI findings (examination conducted in 2019 and Audit Report submitted on 2 September 2020), initial discussion with BPK Auditors have been organized on 14 December 2020 while further discussions to settle these findings will be scheduled</p>



No	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut sampai dengan 31 Desember 2020 Follow up until December 31, 2020
15.	<p>Buku RKAP, RKA PKBL, RKA Dewan Komisaris dan Key Performance Indicator (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2020 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.</p> <p>The books of WPB, WPB for PKBL, WPB of the Board of Commissioners and KPI (Key Performance Indicators) of the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2020 which have been approved and ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS), are integral parts of this Minutes of GMS Decisions and become the guidelines for the Board of Directors in completing work programs and performance targets in 2020 as well as a means of monitoring and supervision for the Board of Commissioners.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan. Has been implemented in accordance with the Shareholders' Directive.</p>

RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

THE 2019 ANNUAL GMS

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019

Stages of Organization of the 2019 Annual GMS

Undangan Invitation	Pelaksanaan Organization	Risalah RUPS Minutes of GMS
<p>Zoom Meeting ID 835 7475 4659 Zoom Meeting ID 835 7475 4659</p>	<p>Senin, 6 Juli 2020 pukul 13.38 WIB Monday, 6 July 2020, at 13.38 WIB</p>	<p>Akta No. 3 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, SH. SpN.M.Kagn, Notaris yang berkedudukan di Medan</p> <p>Deed No. 3 of 6 July 2020 made before Notary Risna Rahmi Arifa, SH. SpN.M.Kagn, a Notary domiciled in Medan</p>

Hari/Tanggal : Senin, 6 Juli 2020
Day/Date : Monday, 6 July 2020

Waktu : 13.38 WIB
Time

Tempat : Gedung Grha Pelindo 1
Place : Gedung Grha Pelindo 1

Kehadiran : **Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia:**
The Proxy of Shareholders of the Government of the Republic of Indonesia

Yohanes Babtista Proyatmo, Asisten Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Yohanes Babtista Proyatmo, Assistant Deputy of Transportation Facilities and Infrastructure, Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia

Dewan Komisaris:
Board of Commissioners:

1. Achmad Djameluddin (Komisaris Utama) I (President Commissioner)
2. Arman Depari (Komisaris) I (Commissioner)
3. Herbert Timbo P Siahaan (Komisaris Independen) I (Independent Commissioner)
4. Ahmad Perwira Siahaan (Komisaris Independen) I (Independent Commissioner)
5. Irma Suryani (Komisaris Independen) I (Independent Commissioner)
6. Winata Supriatna (Komisaris) I (Commissioner)

Direksi:
Board of Directors:

1. Dani Rusli Utama (Direktur Utama) I (President Director)
2. Prasetyo (Direktur Utama) I (President Director)
3. Ridwan Sani Siregar (Direktur Operasional dan Komersial) I (Director of Operations & Commercial)
4. Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik) I (Director of Engineering)
5. Henry Naldi (Direktur SDM & Umum) I (Director of HR & General Affairs)
6. Henri Panggabean (Direktur Keuangan) I (Director of Finance)

Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

All decisions in the GMS were made by consensus. The GMS decisions and their implementation and follow-ups by the Company's Management until the end of 2020 are as follows:

AGENDA MATA ACARA 1:

Agenda Item 1:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Tahun Buku 2019.

Approval of the Company's Annual Report in 2019, including the Company Activity Report, the Board of Commissioners Supervision Report, and the Ratification of the Consolidated Financial Report of the Company in Financial Year of 2019.

Keputusan Mata Acara 1:

Agenda Decisions 1:

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan sebagaimana dimuat dalam Lapornya No. 0015/2.0459/AU.1/05/0469-1-1-1/2020, tanggal 31-01-2020 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku laporan Perseroan.

Approving the Company's Annual Report in 2019 including the the Board of Commissioners Supervision Report and ratifying the Consolidated Financial Report of the Company in Financial Year of 2019 which had been audited by the Public Accounting Firm (PAF) Heliantono & Partners as stated in their Report No. 0015/2.0459/AU.1/05/0469-1-1-1/2020 of 31-01-2020, by opinion of "fair in all material respects", as well as granting discharge and full release of responsibility (*volledig acquit et decharge*) to the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners from the management and supervision actions carried out throughout the Financial Year ended in 31-12-2019, as long as such actions were not criminal acts and reflected in the Company's report books.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Keputusan langsung berlaku.

The decisions took effect immediately.

AGENDA MATA ACARA 2:

Agenda Item 2:

Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019, serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2019.

Approval of the Annual Report of Work Plan and Budget (WPB) for Partnership and Environmental Assistance Program (PKBL) in Financial Year of 2019, and Ratification of the PKBL Financial Report in Financial Year of 2019.

Keputusan Mata Acara 2:

Agenda Decisions 2:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan sesuai dengan Laporan No. 00089/2.0459/AU.1/05/0469-1/1/1/2020 tanggal 02-02-2020 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan dan tercermin dalam laporan tersebut.

Approving and ratifying the Partnership and Environmental Assistance Programs (PKBL) Annual Report in Financial Year of 2019 including the Partnership and Environmental Assistance Programs (PKBL) Financial Report which had been audited by the Public Accounting Firm (PAF) Heliantono & Partners as stated in Report No. 00089/2.0459/AU.1/05/0469-1/1/1/2020 of 02-02-2020, by opinion of "fair in all material respects", as well as granting discharge and full release of responsibility (*volledig acquit et decharge*) to the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners from the management and supervision actions on the Partnership and Environmental Assistance Programs (PKBL) in Financial Year of 2019, as long as such actions were not criminal acts and reflected in the said report.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Keputusan langsung berlaku.

The decisions took effect immediately.





AGENDA MATA ACARA 3:

Agenda Item 3:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2019.
Determination of the Use of the Company Net Profits for Financial Year of 2019.

Keputusan Mata Acara 3:

Agenda Decisions 3:

Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp369.511.714.451, sebagai berikut:
Determining the use of consolidated net profits distributed to the parent entity owners in Financial Year of 2019, amounting to Rp369,511,714,451, as follows:

- Sebesar 16,25% dari laba bersih atau Rp60.050.953.594, ditetapkan sebagai dividen;
Amounting to 16,25% of net profits or Rp60,050,953,594, determined as dividends;
- Sebesar 83,75% dari laba bersih atau sebesar Rp309.460.760.856, ditetapkan sebagai cadangan.
Amounting to 83,75% of net profits or Rp309,460,760,856, determined as reserves;

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Keputusan langsung berlaku.

The decisions took effect immediately.

AGENDA MATA ACARA 4:

Agenda Item 4:

Penetapan tantiem tahun buku 2019, gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
Determination of tantiems for financial year of 2019, salaries, honorariums and allowances as well as other facilities for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for financial year of 2020.

Keputusan Mata Acara 4:

Agenda Decisions 4:

Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja tahun Buku 2019, akan ditetapkan tersendiri.

Salaries/honorariums along with facilities and other allowances for the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners for Financial Year of 2020 as well as tantiems for the the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their performances in financial year of 2020, would be determined separately.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Telah ditindaklanjuti.

The decision had been followed up.

AGENDA MATA ACARA 5:

Agenda Item 5:

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2020.

Appointment of the Public Accounting Firm (PAF) to audit the Consolidated Financial Report of the Company for financial year of 2020 and the Partnership and Environmental Assistance Programs (PKBL) Report in financial year of 2020.

Keputusan Mata Acara 5:

Agenda Decisions 5:

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun Buku 2020, dilakukan secara tersendiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

The Public Accounting Firm (PAF) to audit the Consolidated Financial Report of the Company for financial year of 2020 and the Partnership and Environmental Assistance Programs (PKBL) Financial Report in financial year of 2020 would be appointed separately by the Minister of State-Owned Enterprise in its authority as the General Meeting of Shareholders according to suggestion by the Board of Commissioners.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Telah ditindaklanjuti.

The decision had been followed up.

PENYELENGGARAAN RUPS DI SEPANJANG TAHUN 2019 DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

Sepanjang tahun 2019, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan, yaitu RUPS RKAP 2019 dan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2018.

RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Januari 2019
Day/Date : Friday, 4 January 2019

Waktu : 14.30 WIB s.d. 15.30 WIB
Time : 14.30 to 15.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai 9 Kementerian BUMN
Place : Meeting Room, 9th Floor Ministry of SOE
Edwin Hidayat as Deputy Energy, Logistics, Regions and Tourism at the Ministry of State-Owned Enterprises Hidayat selaku Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Dewan Komisaris:

Board of Commissioners:

1. Bambang Setyo Wahyudi (Komisaris Utama) I (President Commissioner)
2. Heryadi (Komisaris Independen) I (Independent Commissioner)
3. Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris) I (Commissioner)
4. Winata Supriatna (Komisaris) I (Commissioner)

Direksi:

Board of Directors:

1. Bambang Eka Cahyana (Direktur Utama) I (President Director)
2. Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik) I (Director of Engineering)
3. Mohamad Nur Sodik (Direktur Keuangan) I (Director of Finance)
4. Syahputra Sembiring (Direktur Operasional dan Komersial) I (Director of Operations and Commercial)
5. M. Hamied Wijaya (Direktur SDM) I (Director of HR)
6. Ihsanuddin Usman (Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis) I (Director of Business Transformation and Development)

GMS ORGANIZATIONS THROUGHOUT 2019 AND FOLLOW-UPS BY THE MANAGEMENT

Throughout 2019, the Company held 2 (two) Annual GMS, namely GMS for the 2019 WPB and GMS for the Annual Report for the Financial Year of 2018.

The 2019 Annual GMS for Approval of the Company's Work Plan and Budget (WPB)

Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS Tahunan Persetujuan RKAP 2019 beserta tindak lanjutnya, sebagai berikut:

All decisions in the GMS were made by consensus. The decisions made in the 2019 Annual GMS for Approval of the 2019 WPB and their follow-ups are as follows:



AGENDA MATA ACARA 1:

Agenda Item 1:

Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2019.

Approval/Ratification of the Company's 2019 Work Plan and Budget (WPB) and the Work Plan and Budget for the Partnership and Environmental Assistance Programs (WPB for PKBL).

Keputusan Mata Acara 1:

Agenda Decisions 1:

1. Menyetujui/Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2019 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut:
1. Approving/Ratifying the 2019 Work Plan and Budget (WPB) and the Work Plan and Budget for the Partnership and Environmental Assistance Programs (WPB for PKBL) in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), with the following points:
 - a. Laporan Laba (Rugi) Konsolidasi
 - a. Consolidated Statements of Profit (Loss)

Uraian Description	Jumlah Amount
Pendapatan Usaha Operating Income	Rp3.967.029 Juta Million
Laba Tahun Berjalan Current Year's Profit	Rp914.712 Juta Million
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada Current Year's Profit Attributed To	
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	Rp910.826 Juta Million
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	Rp3.850 Juta Million

- b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi
- b. Consolidated Statements of Financial Position

Uraian Description	Jumlah Amount
Total Aset Total Assets	Rp11.772.254 Juta Million
Liabilitas Liabilities	Rp5.641.745 Juta Million
Ekuitas Equities	Rp6.130.509 Juta Million

AGENDA MATA ACARA 2:

Keputusan

AGENDA MATA ACARA 2:

Agenda Item 2:

Persetujuan dan Pengesahan *Key Performance Indicators* Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019.

Approval and Ratification of Key Performance Indicators of the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2019.

Keputusan Mata Acara 2:

Agenda Decisions 2:

Menetapkan *Key Performance Indicators* (Indikator Kinerja Kunci) Tahun 2019 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen yang ditanda tangani oleh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Stipulating the Key Performance Indicators for 2019 as contained in the Management Contract signed by the Shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Keputusan langsung berlaku.

The decision took effect immediately.

Agenda Mata Acara 3:

Agenda Item 3:

Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2019.

Stipulation of Operational Aspect Indicators for the Measurement of the Company's Soundness Level in 2019.

Keputusan Mata Acara 3:

Agenda Decisions 3:

Menetapkan Indikator Aspek Operasional PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2019, sebagai berikut:

Stipulating the Operational Aspect Indicators in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for the Measurement of the Company's Soundness Level in 2019, as follows:

	Indikator Indicator	Bobot Weight
	Waiting Time for Pilot (Jam) Waiting Time for Pilots (Hour)	9%
	Tingkat Efektivitas Tambatan Petikemas (%) Container Mooring Effectiveness Rate (%)	9%
	Produktivitas Bongkat Muat Petikemas (B/S/H) Container Loading/Unloading Productivity (B/S/H)	8%
	Yard Occupancy Ratio Petikemas (%) Container Yard Occupancy Ratio (%)	9%
	Jumlah Bobot Total Weights	35%

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Keputusan langsung berlaku.

The decision took effect immediately.

Arahan Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RKAP

RUPS Tahunan RKAP 2019 juga menghasilkan Arahan Pemegang Saham yang telah ditindaklanjuti oleh Manajemen hingga 31 Desember 2019.

Shareholders' Directives in the Annual GMS for WPB

The 2019 Annual GMS for WPB also brought about Shareholders directives which had been followed-up by the Management until 31 December 2019.

No.	Arahan RUPS GMS Directives
1	RKAP Tahun 2019 yang telah disahkan agar dirinci menjadi target per bulan dan <i>cascading</i> dimaksud kepada Pemegang Saham dan triwulan I tahun 2019. The ratified 2019 WPB to be broken down into monthly and cascaded targets, to then be submitted to the Shareholders within Quarter 1 2019.
2	Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya (<i>cost reduction program</i>) di semua lini usaha guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien, dan laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen perusahaan. To strive for increase in income and cost control (<i>cost reduction program</i>) on all lines of business in order to realize more effective and efficient company management, and net profit is the minimum target that shall be achieved by all members of the company management.
3	Menindaklanjuti kerja sama dan sinergi yang telah dicanangkan dengan BUMN pelabuhan maupun BUMN lainnya dalam hal pengembangan usaha kepelabuhanan, pemanfaatan aset, pengembangan SDM, <i>Joint Procurement</i> , serta pemanfaatan dan pengembangan IT. To follow up cooperations and synergies declared with SOE of Port Affairs and other SOEs in terms of ports business development, asset utilization, human resources development, Joint Procurement, and IT utilization and development.



c. Investasi | Investments

1. Rencana Investasi tahun 2019 sebagai berikut:
1. Investment Plans in 2019 were as follows:

Uraian Description	Jumlah Amount
Jumlah Investasi Perusahaan Induk Total Investment of Parent Company	Rp3.099.256 Juta Million
Jumlah Investasi Anak Perusahaan Total Investment of Subsidiaries	Rp5.000.735 Jutal Million
Jumlah Investasi Konsolidasi Total Consolidated Investment	Rp8.100.000 Juta Million

2. Melimpahkan kewenangan pada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) program/item dari nilai masing-masing investasi, sepanjang tidak merubah program/item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi.
2. Delegating authority to the Board of Commissioners to approve if there were actions that cause changes in the investment budget allocation at a maximum of 10% (ten percent) of the value of each investment program/item, as long as they did not change the investment program/item and did not exceed the total investment value.

d. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan:

- d. Partnership and Community Development Program:

	Kemitraan Partnership	Bina Lingkungan Community Development
Dana Tersedia Available Fund	Rp17.766 Juta Million	Rp16.585 Juta Million
Penggunaan Dana Allocated Fund	Rp17.766 Juta Million	Rp16.585 Juta Million
Sisa Dana Remaining Fund	-	-

- i. Rencana penyaluran dana Program Kemitraan sebesar dana tersedia yaitu Rp17,766 miliar yang bersumber dari saldo dan Program Kemitraan Rp16,309, serta serta pendapatan dari sumber lainnya sebesar Rp1,457 miliar.
- ii. Rencana penyaluran dan Program Bina Lingkungan sebesar Rp16,585 miliar yang bersumber dari tambahan alokasi dan Bina Lingkungan yang berasal dari beban perusahaan tahun 2019 sebesar Rp16.400 juta, atau diperhitungkan setara/*equivalent* 1,98% dari proyeksi laba tahun 2018 dan Pendapatan Lain sebesar Rp185 juta.
- i. The plan of fund allocation for Partnership Program amounting to Rp17,766 billion, which was derived from the balance of the Partnership Program fund of Rp16.309 billion and income from other sources of Rp1,457 billion.
- ii. The plan of fund allocation for Community Development Program amounting to Rp16,585 billion, which was derived from additional allocation for the Community Development fund from the Company's expenses in 2019 of Rp16,400 million, or calculated equivalent to 1.98% of the projected profit in 2018 and Other Incomes of Rp185 Million.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Keputusan langsung berlaku.

Follow-Ups on the Decisions:

The decision took effect immediately.

No.	Arahan RUPS GMS Directives
4	<p>Senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja anak perusahaan maupun perusahaan patungan, terutama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja perusahaan secara konsolidasi.</p> <p>To constantly foster and supervise the performance of subsidiaries and joint ventures, especially those which significantly contribute to the company's performance on a consolidated basis.</p>
5	<p>Mempersiapkan langkah-langkah pembentukan <i> Holding </i> maritim dan pelaksanaan tahapan pembentukan Pelindo 1 <i> Incorporated </i>, dimulai dengan mengimplementasikan kesepakatan program <i> quick win </i> pada bulan April 2019.</p> <p>To prepare steps for the establishment of maritime holdings and commence the stages in the establishment of Pelindo 1 <i> Incorporated </i>, starting with implementing the agreement in the Quick Win program in April 2019.</p>
6	<p>Memastikan Program pengelolaan dan pengembangan SDM dilakukan secara komprehensif oleh semua fungsi <i> Corporate Human Capital Development </i> (CHCD), Implementasi kebijakan Pengembangan SDM, Jenjang karier dan <i> talent management </i> untuk mendukung pencapaian target target perusahaan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang agar ditingkatkan, serta dilakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan SDM agar senantiasa sesuai dengan <i> best practice </i>.</p> <p>To ensure that human resources management and development programs are done comprehensively by all functions of the Corporate Human Capital Development (CHCD); to improve policy implementation on human resources development, career paths and talent management to support the accomplishment of the Company's targets both in short and long term; and to evaluate human resources policies to be constantly in accordance with the best practice.</p>
7	<p>Pengeluaran investasi agar dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, sesuai standar prosedur operasi, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kewajaran harganya. Investasi tersebut juga memperhitungkan pelaksanaan sinergi dengan BUMN khususnya PT Pertamina (Persero)</p> <p>Investment expenses shall be spent based on priority scale, preceded by comprehensive analysis, in accordance with standard operating procedures, transparent and accountable in regards of their reasonable price. These investments shall also be made by taking into account the synergy with fellow SOEs, especially PT Pertamina (Persero).</p>
8	<p>Terkait PKBL diminta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merealisasikan penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar dana tersedia. 2. Mengupayakan pengembalian piutang mitra binaan secara optimal dengan melibatkan pihak-pihak terkait (baik internal maupun eksternal). 3. Dengan terbitnya peraturan Menteri BUMN Nomor PER/02/MBU/07/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN, maka Direksi diminta untuk menetapkan SOP pelaksanaan PKBL yang telah disesuaikan dengan peraturan Menteri BUMN dimaksud. 4. Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu secara elektronik sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 <i> jo. </i> PER-03/MBU/12/2016 <i> jo. </i> PER-02/MBU/07/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang PKBL BUMN, dan PER-18/MBU/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penyampaian Data, Laporan dan Dokumen BUMN secara Elektronik melalui Portal PKBL (http://pkbl.bumn.go.id). <p>Regarding PKBL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To realize the allocation for Partnership and Community Program as much as the available fund. 2. To strive for optimal settlement of PKBL partners' receivables by involving related parties (both internal and external). 3. By the issuance of the Regulation of the Minister of SOE no. PER/02/MBU/07/2017 concerning the second amendment to the Regulation of the Minister of SOE no. PER-09/MBU/07/2015 on PKBL in SOE, the Board of Directors was demanded to create the SOP for PKBL implementation which has been adjusted to the said regulation. 4. To submit periodic reports electronically in a timely manner as regulated in the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia no. 45 of 2005 regarding the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOE, Regulation of the Minister of SOE no. PER-09/MBU/07/2015 in conjunction with PER-03/MBU/12/2016 in conjunction with PER-02/MBU/07/2018 of 5 July 2018 regarding PKBL in SOE, and PER-18/MBU/2014 of 16 October 2014 on Electronic Submission of SOE Data, Reports and Documents through the PKBL Portal (http://pkbl.bumn.go.id).
9	<p>Segera menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 81 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung dengan menyelesaikan penyusunan rencana Induk Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengelolaan Pelabuhan Hubungan Internasional dan Kawasan Industri Kuala Tanjung.</p> <p>To immediately follow up on the implementation of the Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 81 of 2018 concerning the Acceleration of Development and Operation of the Kuala Tanjung Industrial Zone by completing the preparation of the Master Plan for the Development, Operation, and Management of the Kuala Tanjung Industrial Zone and International Hub Port.</p>
10	<p>Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK, auditor independent dan satuan pengawasan Intern perusahaan yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2018 dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaian pada tahun 2019.</p> <p>The Board of Directos shall pay attention to findings and recommendations from the BPK, independent auditors and the Company's Internal Audit Unit which had not yet been settled until 2018 and to set them as a target to settle in 2019.</p>



No.	Arahan RUPS GMS Directives
11	<p>Buku RKAP, RKA PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2019 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.</p> <p>The books of WPB, WPB for PKBL, WPB of the Board of Commissioners and KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) of the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2019 which had been approved and ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS), were integral parts of these Minutes of GMS and became the guidelines for the Board of Directors in accomplishing work programs and performance targets in 2019 as well as a means of monitoring and supervision for the Board of Commissioners.</p>

RUPS Tahunan Tahun Buku 2018

The 2018 Annual GMS

Hari/Tanggal Day/Date	: Senin, 29 April 2019 : Monday, 29 April 2019
Waktu Time	: 09.00 s/d 10.00 WIB : 09.00 to 10.00 WIB
Tempat Place	: Ruang Rapat Deputy ELKP Lantai 7 Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat Meeting Room of Deputy of ELKP, 7th Floor, Ministry of SOE Medan Merdeka Selatan Street No. 13, Central Jakarta
Kehadiran Attendance	<p>Kuasa Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia: The Proxy of Shareholders of the Government of the Republic of Indonesia Edwin Hidayat selaku Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara Edwin Hidayat in his authority as the Deputy of Energy, Logistics, Regions and Tourism of the Ministry of SOE</p> <p>Dewan Komisaris: Board of Commissioners:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Refly Harun (Komisaris Utama/Komisaris Independen) I (President Commissioner/ Independent Commissioner) 2. Heryadi (Komisaris Independen) I (Independent Commissioner) 3. Bambang Setyo Wahyudi (Komisaris) I (Commissioner) 4. Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris) I (Commissioner) 5. Winata Supriatna (Komisaris) I (Commissioner) <p>Direksi: Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syahputra Sembiring (Direktur Operasi dan Komersial) I (Director of Operations and Commercial) 2. Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik) I (Director of Engineering) 3. Mohamad Nur Sodik (Direktur Keuangan) I (Director of Finance) 4. Ihsanuddin Usman (Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis) I (Director of Business Transformation and Development)

Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 beserta tindak lanjutnya, adalah sebagai berikut:

All decisions in the GMS were made by consensus. The 2018 Annual GMS decisions and their follow-ups are as follows:

AGENDA MATA ACARA 1:

Agenda Item 1:

Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018.

Approval of the 2018 Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending on 31 December 2018, as well as Ratification of the Partnership and Community Development Program Report for the Financial Year of 2018.

Keputusan Mata Acara 1:

Agenda Decisions 1:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana Laporan Auditor Independen No. 00051/2/0459/AU.1/05/1107-1/II/2019 tanggal 11-Februari 2019.

Approving the Company's Annual Report including the the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for the Financial Year ending on 31 December 2018 and ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending on 31 December 2018 which had been audited by the Public Accounting Firm (PAF) Heliantono and Partners by opinion of "fair in all material respects" as stated in the Independent Auditor's Report no. 00051/2/0459/AU.1/05/1107-1/II/2019 of 11 February 2019.

a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

a. Consolidated Statements of Financial Position

Uraian Description	31 Desember 2018 31 December 2018
Aset Assets	
Aset Lancar Current Assets	2.622.950
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	11.397.903
Total Aset Total Assets	14.020.853
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities dan Equities	
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	2.677.741
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	4.863.535
Ekuitas Equities	6.479.577
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equities	14.020.853

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian

b. Consolidated Statements of Profit (Loss) and Comprehensive Income

Uraian Description	31 Desember 2018 31 December 2018
Pendapatan Usaha Operating Income	3.113.533
Beban Usaha Operating Expense	1.868.586
Pendapatan Non-Usaha (Net) Non-Operating Income (Net)	106.960
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	1.244.945
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Taxes	1.195.982
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	904.871
Laba yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Profit Attributed to Owners of Parent Entity	911.814
Laba Kepentingan Non-Pengendalian Profit Attributed to Non-Controlling Interests	(6.944)





2. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 0005/2.0459/AU.2/05/1107-1/1/II/2019, tanggal 11 Februari 2019.

Approving the Financial Report of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year of 2018 ending on 31 December 2018 which was audited by Public Accounting Firm (PAF) Heliantono and Partners as reflected in the Independent Auditor's Report no. 0005/2.0459/AU.2/05/1107- 1/1/ II/2019 of 11 February 2019.

- a. Laporan Posisi Keuangan PKBL:

- a. Statement of PKBL Financial Position:

Uraian Description	31 Desember 2018 31 December 2018
ASET ASSETS	
Aset Lancar Current Assets	39.217.746
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	4.029
Total Aset Total Assets	39.221.775
Liabilitas dan Aset Neto Liabilities and Net Assets	
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	48.122
Aset Bersih Net Assets	39.173.653
Total Liabilitas dan Aset Neto Total Liabilities and Net Assets	39.221.775

- b. Laporan Aktivitas PKBL:

- b. PKBL Activity Report:

Uraian Description	Tahun 2018 2018
Alokasi Dana dari BUMN Pembina Alokasi Dana dari BUMN Pembina Fund Allocation from Patron SOE	11.483.878
Pendapatan Income	4.534.643
Penyaluran, Beban & Pengeluaran Distribution, Expenses & Spending	13.561.796
Kenaikan (Penurunan Aset Bersih) Increase (Decrease) in Net Assets	2.456.725
Aset Bersih Awal Tahun Net Assets at the Beginning of the Year	36.716.927
Aset Bersih Akhir Tahun Net Assets at the End of the Year	39.173.653

Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku pada tanggal 31 Desember 2018, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku pada tanggal 31 Desember 2018 sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku pada tanggal 31 Desember 2018.

By approving the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending on 31 December 2018 as well as the Financial Report of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year ending on 31 December 2018, the GMS therein granted full discharge and release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions taken during the Financial Year ending on 31 December 2018, as long as such actions were not criminal acts and were reflected in the Company's Annual Report, Consolidated Financial Statements and Financial Report of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year ending on 31 December 2018.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Keputusan langsung berlaku.

The decisions took effect immediately.

AGENDA MATA ACARA 2:

Agenda Item 2:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2018

Determination of the Use of Net Profit for the Financial Year of 2018.

Keputusan Mata Acara 2:

Agenda Decisions 2:

Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasi Tahun Buku 2018 sebesar Rp911.814.406.602,00 sebagai berikut:

- Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih atau Rp319.135.000.000,00 ditetapkan sebagai dividen;
- Sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari laba bersih atau Rp592.679.406.602,00 ditetapkan sebagai cadangan.

Determining the use of consolidated net profit for the Financial Year of 2018, amounting to Rp911,814,406,602.00, as follows:

- - Amounting to 35% (thirty five percent) of the net profit or Rp319,135,000,000.00, determined as dividends;
- - Amounting to 65% (sixty five percent) of the net profit or Rp592,679,406,602.00, determined as reserves.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Telah ditindaklanjuti.

The decision had been followed up.

AGENDA MATA ACARA 3:

Agenda Item 3:

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.

Appointment of the Public Accountant Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year of 2019 and Financial Report of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year of 2019.

Keputusan Mata Acara 3:

Agenda Decisions 3:

1. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.
1. Reappointing Public Accounting Firm (PAF) Heliantono and Partners as the auditors who would audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Report of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year of 2019.
2. Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of fees for the audit services and other terms of appointment that were reasonable for the said Public Accounting Firm (PAF).

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Telah ditindaklanjuti.

The decisions had been followed up.

AGENDA MATA ACARA 4:

Agenda Item 4:

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2018, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2019.

Determination of Tantiems for the Financial Year of 2018, Salaries, Honorariums and Allowances as well as Other Facilities for the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2019.

Keputusan Mata Acara 4:

Agenda Decisions 4:

Tantiem Tahun Buku 2018, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2019 ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

Tantiems for the Financial Year of 2018, Salaries, Honorariums and Allowances as well as Other Facilities for the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2019 were determined in separate decisions.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Follow-Ups on the Decisions:

Telah ditindaklanjuti.

The decision had been followed up.



DEWAN KOMISARIS THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris bertugas mengawasi tindakan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris secara teratur bertugas memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu mematuhi Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners is in charge of overseeing the actions of the Board of Directors in running the Company and giving advices to the Board of Directors. The Board of Commissioners is responsible of ensuring that the Board of Directors in any condition has the ability to perform its duties. The Board of Commissioners is regularly tasked with monitoring the effectiveness of the implementation of policies and decision-making processes carried out by the Board of Directors in order to always comply with the Articles of Association or the prevailing laws and regulations.

Dewan Komisaris sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris, dapat menggunakan saran profesional yang mandiri dan/atau membentuk Komite khusus. Pemenuhan hak dan pelaksanaan tugas, tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah.

The Board of Commissioners, in accordance with the procedures determined by the Board of Commissioners, may use independent professional advices and/or form special committees. The fulfillment of the rights and implementation of the duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners are regulated in accordance with the provisions of the laws and regulations and the Articles of Association of the Company. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking actions that have a conflict of interest and taking personal gain from decision-making and/or implementation of the Company's activities other than legal income.

KRITERIA DAN PROSES PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

CRITERIA FOR AND PROCESS OF APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris Legal Basis of Appointment of the Board of Commissioners

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies	Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) Pada Badan Usaha Milik Negara Regulation of the Minister of SOE PER-01/MBU/2011 of 1 August 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises	Anggaran Dasar Perseroan The Company's Articles of Association
---	--	---

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 14, yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

According to the Company's Articles of Association, Article 14, those who may be appointed as the members of the Board of Commissioners are individuals capable of performing legal actions, except those who in 5 (five) years prior to their appointment have been:

- Dinyatakan pailit;
 - Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit; atau
 - Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- Declared bankrupt;
 - Members of the Board of Directors or Board of Commissioners or Board of Supervisors who were declared to be at fault causing a Company to be declared bankrupt; or
 - Sentenced for crimes which caused financial losses to the state and/or which were related to the financial sector.

Calon anggota Dewan Komisaris juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

PROSES PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 14, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Pelindo 1 untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Sepanjang tahun 2020 terdapat pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris. Berikut ini, kronologi susunan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2020 dan komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2020:

Candidates for members of the Board of Commissioners shall also meet additional requirements provisioned by technical agencies pursuant to the prevailing laws and regulations. The fulfillment of such requirements is evidenced by a statement letter signed by the candidates and the letter is kept by the Company.

The appointment of members of the Board of Commissioners is carried out by taking into account integrity, dedication, comprehension of the Company's management issues related to one of management functions, proper knowledge in the Company's business sector and ability to provide sufficient time to perform his/her duties as well as other conditions in accordance with the prevailing laws and regulations.

Appointment of members of the Board of Commissioners who do not satisfy the above criteria and conditions, is null and void by law by the time the other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors discover that those requirements are not met.

THE BOARD OF COMMISSIONERS APPOINTMENT PROCESS

According to the Company's Articles of Association, Article 14, members of the Board of Commissioners are appointed and terminated by the General Meeting of Shareholders and the Decision of the General Meeting of Shareholders has to be approved by the Dichromatic Series A Shareholders.

Members of the Board of Commissioners are appointed from candidates proposed by the Dichromatic Series A Shareholders and the nomination is binding for the General Meeting of Shareholders.

COMPOSITION AND BASIS OF APPOINTMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The composition and number of the members of the Board of Commissioners are provisioned by the GMS by taking into account the vision, mission, and strategic plans of Pelindo 1 to enable effective, efficient, precise and fast decision-making, and capability of acting independently.

Throughout 2020, there were a number of terminations and appointments of the members of the Board of Commissioners. Below is the chronology of the composition of the Board of Commissioners throughout 2020 and the composition of the Company's Board of Commissioners per 31 December 2020:





KRONOLOGI SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DI SEPANJANG TAHUN 2020
CHRONOLOGY OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
THROUGHOUT 2020

1 Januari 2020 – 20 April 2020 1 January 2020 – 20 April 2020	20 April – 31 Desember 2020 20 April – 31 December 2020	Keterangan Description
<p>Refly Harun (Komisaris Utama) (President Commissioner)</p>		<p>Refly Harun tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris per tanggal 20 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Refly Harun diberhentikan dengan alasan sesuai dengan keputusan pemegang saham.</p> <p>Refly Harun no longer served as the member of the Board of Commissioners as of 20 April 2020 according to the Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020 on the Termination and Appointment of the Members of the Board of Commissioners in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Refly Harun was terminated for reasons in accordance with the shareholder's decision.</p>
	<p>Achmad Djamaludin (Komisaris Utama) (President Commissioner)</p>	<p>Achmad Djamaludin menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris per tanggal 20 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).</p> <p>Achmad Djamaludin has been serving as the member of the Board of Commissioners as of 20 April 2020 according to the Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020 on the Termination and Appointment of the Members of the Board of Commissioners in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).</p>
<p>Bambang Setyo Wahyudi (Komisaris) (Commissioner)</p>		<p>Bambang Setyo Wahyudi tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris per tanggal 20 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Bambang Setyo Wahyudi diberhentikan dengan alasan sesuai dengan keputusan pemegang saham.</p> <p>Bambang Setyo Wahyudi no longer served as the member of the Board of Commissioners as of 20 April 2020 according to the Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020 on the Termination and Appointment of the Members of the Board of Commissioners in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Bambang Setyo Wahyudi was terminated for reasons in accordance with the shareholder's decision.</p>
<p>Winata Supriatna (Komisaris) (Commissioner)</p>	<p>Winata Supriatna (Komisaris) (Commissioner)</p>	<p>-</p>
<p>Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris) (Commissioner)</p>		<p>Lukita Dinarsyah Tuwo tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris per tanggal 20 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Lukita Dinarsyah Tuwo diberhentikan dengan alasan sesuai dengan keputusan pemegang saham.</p> <p>Lukita Dinarsyah Tuwo no longer served as the member of the Board of Commissioners as of 20 April 2020 according to the Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020 on the Termination and Appointment of the Members of the Board of Commissioners in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Lukita Dinarsyah Tuwo was terminated for reasons in accordance with the shareholder's decision.</p>
<p>Heryadi (Komisaris Independen)</p>		<p>Heryadi tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris per tanggal 20 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).</p> <p>Heryadi no longer served as the member of the Board of Commissioners as of 20 April 2020 according to the Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020 on the Termination and Appointment of the Members of the Board of Commissioners in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Heryadi was terminated for reasons in accordance with the shareholder's decision.</p>
	<p>Arman Depari (Komisaris) (Commissioner)</p>	<p>Arman Depari menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris per tanggal 20 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).</p> <p>Arman Depari has been serving as the member of the Board of Commissioners as of 20 April 2020 according to the Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020 on the Termination and Appointment of the Members of the Board of Commissioners in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).</p>

KRONOLOGI SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DI SEPANJANG TAHUN 2020
CHRONOLOGY OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
THROUGHOUT 2020

1 Januari 2020 – 20 April 2020 1 January 2020 – 20 April 2020	20 April – 31 Desember 2020 20 April – 31 December 2020	Keterangan Description
	Herbert Timbo Parluhutan Siahna (Komisaris) (Commissioner)	Herbert Timbo Parluhutan menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris per tanggal 20 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Herbert Timbo Parluhutan has been serving as the member of the Board of Commissioners as of 20 April 2020 according to the Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020 on the Termination and Appointment of the Members of the Board of Commissioners in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
	Ahmad Perwira Mulia (Komisaris) (Commissioner)	Ahmad Perwira Mulia menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris per tanggal 20 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Ahmad Perwira Mulia has been serving as the member of the Board of Commissioners as of 20 April 2020 according to the Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020 on the Termination and Appointment of the Members of the Board of Commissioners in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
	Irma Suryani Chaniago (Komisaris) (Commissioner)	Irma Suryani Chaniago menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris per tanggal 20 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Irma Suryani Chaniago has been serving as the member of the Board of Commissioners as of 20 April 2020 according to the Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020 on the Termination and Appointment of the Members of the Board of Commissioners in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PELINDO 1 PER 31 DESEMBER 2020
COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN PELINDO 1 AS OF 31 DECEMBER 2020

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Lulus Fit & Proper Test Passing the Fit & Proper Test	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Term
Achmad Djamaludin	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 Decision Letter of the Minister of SOE No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020	v	20 April 2020 – RUPS Tahun 2025 20 April 2020 – the 2025 GMS	Ke-1 1st
Arman Depari	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 Decision Letter of the Minister of SOE No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020	v	20 April 2020 – RUPS Tahun 2025 20 April 2020 – the 2025 GMS	Ke-1 1st
Winata Supriatna	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-250/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 Decision Letter of the Minister of SOE No. SK-250/MBU/11/2017 of 21 November 2017	v	21 November 2017-RUPS Tahun 2022 21 November 2017 – the 2022 GMS	Ke-1 1st
Irma Suryani Chaniago	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 Decision Letter of the Minister of SOE No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020	v	20 April 2020 – RUPS Tahun 2025 20 April 2020 – the 2025 GMS	Ke-1 1st
Herbert Timbo Parluhutan Siahna	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 Decision Letter of the Minister of SOE No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020	v	20 April 2020 – RUPS Tahun 2025 20 April 2020 – the 2025 GMS	Ke-1 1st
Ahmad Perwira Mulia Tarigan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020 Decision Letter of the Minister of SOE No. SK-123/MBU/04/2020 of 20 April 2020	v	20 April 2020 – RUPS Tahun 2025 20 April 2020 – the 2025 GMS	Ke-1 1st



MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Meski demikian, Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila berdasarkan fakta, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

- Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
- Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara;
- Dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Mengundurkan diri.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham. Keputusan pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan. Selama rencana pemberhentian dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Pemberhentian sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- Meninggal dunia;
- Masa jabatan berakhir;
- Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The term of office of the Board of Commissioners is determined to be 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of office. However, any member of the Board of Commissioners may be terminated at any time based on the General Meeting of Shareholders by mentioning the reasons.

Termination of a member of the Board of Commissioners is carried out if, based on facts, the member in question:

- Is not capable of performing his/her duties properly;
- Does not implementing the provisions in laws and regulations and /or provisions of the Articles of Association;
- Is involved in actions detrimental to the Company and/or the State;
- Takes actions that violate ethics and/or appropriateness that should be respected as a member of the Board of Commissioners in a State-Owned Enterprise;
- Is found guilty in a court decision which has permanent legal force;
- Resigns.

Member of the Board of Commissioners may also be terminated by the General Meeting of Shareholders for other reasons that are deemed appropriate by the General Meeting of Shareholders for the Company's interests and objectives. The plan to terminate a member of the Board of Commissioners is notified in advance to the relevant members of the Board of Commissioners orally or in writing by the Shareholders. The termination decision is taken after the person in question has been given the opportunity to defend himself/herself.

In the event that the termination is carried out outside the General Meeting of Shareholders forum, the defense as referred to above, shall be submitted in writing to the Shareholders within 14 days after the member of the Board of Commissioners in question is notified. While the plan for termination is in process, the concerned member of the Board of Commissioners is obliged to perform his/her duties accordingly. Such termination, as described above, is considered as a dishonorable discharge.

The term of service of a member of the Board of Commissioners ends if:

- He/she dies;
- His/her term of office expires;
- He/she is terminated according to the General Meeting of Shareholders; and/or
- He/she no longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the Company's Articles of Association and other laws and regulations.

PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah memiliki panduan yang tertuang dalam *Board Manual* yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.30/50/23/PI-19.TU tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris (*Board Manual*) pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Board Manual* disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang dan dimutakhirkan secara berkala. Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris menjadi pedoman praktis bagi Dewan Komisaris dalam penerapan GCG di Perseroan yang meliputi:

- Fungsi Dewan Komisaris
- Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris
- Program Pengenalan dan Pendalaman Pengetahuan
- Etika Jabatan
- Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
- Hak/Wewenang Dewan Komisaris
- Rapat Dewan Komisaris
- Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi
- Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi
- Evaluasi kinerja Dewan Komisaris
- Komite-komite Dewan Komisaris
- Sekretariat Dewan Komisaris

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

RESIGNATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his/her position by notifying in writing of his/her intentions to the Company with a copy sent to the Shareholders, other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors no later than 30 days before the date of his/her resignation.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' MANUAL

In performing its supervisory duties, the Board of Commissioners has guidelines contained in the Board Manual which has been ratified by the Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.30/50/20/PI-19.TU on the Guidelines for Implementation of Duties of the Board of Directors and the Board Commissioners (Board Manual) in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). The Board Manual is prepared based on the prevailing laws and regulations and is periodically reviewed and updated. The Board of Commissioners' work guidelines and code of conduct serve as practical guidelines for the Board of Commissioners in implementing GCG in the Company which include:

- Functions of the Board of Commissioners
- Qualifications for and Composition of the Board of Commissioners
- Knowledge Induction and Deepening Program
- Position Ethics
- Duties and Obligations of the Board of Commissioners
- Rights/Authorities of the Board of Commissioners
- Board of Commissioners Meeting
- Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors
- Work Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors
- Evaluation of the Performance of the Board of Commissioners
- Committees of the Board of Commissioners
- Secretariat of the Board of Commissioners

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is an organ of the Company which collectively is in charge of general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners does not participate in making operational decisions. The position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal. The duty of the President Commissioner as *primus inter pares* is to coordinate the activities of the Board of Commissioners.





Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas/kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi:

1. Tugas Dewan Komisaris

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, lingkup pekerjaan Dewan Komisaris antara lain:

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat program kerja pengawasan dan pemberian nasihat, serta mengevaluasi atas kebijakan perusahaan dalam rangka pengurusan perusahaan, termasuk: sistem pengendalian internal, manajemen risiko, sistem teknologi informasi, pengelolaan SDM, kebijakan akuntansi, kebijakan pengadaan barang/jasa, kebijakan mutu pelayanan;
- c. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
- d. Melakukan pembagian tugas di antara Anggota Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan;
- e. Mengawasi investasi yang dilakukan oleh Perusahaan;
- f. Mengawasi dan mengevaluasi arah pengelolaan Anak Perusahaan oleh Direksi;
- g. Menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris;
- h. Melakukan pengawasan dan pengukuran atas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;
- i. Melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi baik secara kolejal maupun secara individual berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam kontrak manajemen;
- j. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut;

The Board of Commissioners is appointed and terminated by the GMS. In performing its duties, the Board of Commissioners is responsible to the GMS. The responsibility of the Board of Commissioners to the GMS is a manifestation of the supervisory accountability for the management of the company in the context of implementing GCG principles.

Details of the duties/obligations and responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:

1. Duties of the Board of Commissioners

To perform its duties and responsibilities, the scopes of work of the Board of Commissioners include:

In carrying out its functions, the Board of Commissioners is tasked with:

- a. Supervising the management policies of the Company made by the Board of Directors as well as providing advices to the Board of Directors including supervision on the implementation of the Company's Long-Term Plan, the Company's Work Plan and Budget, the provisions of the Articles of Association and GMS decisions as well as the prevailing laws and regulations;
- b. Creating work programs for supervision and provision of advice, as well as evaluating company policies in the context of management of the company, including: internal control system, risk management, information technology system, human resource management, accounting policies, goods/services procurement policies, service quality policies;
- c. Complying with the Company's Articles of Association, GMS decisions and prevailing laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness;
- d. Dividing duties among the members of the Board of Commissioners in relation to the implementation of the supervisory function;
- e. Overseeing the investments made by the Company;
- f. Supervising and evaluating the management direction of Subsidiaries by the Board of Directors;
- g. Following up on suggestions, issues or complaints filed directly to the Board of Commissioners;
- h. Supervising and measuring the Board of Directors' compliance with laws and regulations and agreements with third parties;
- i. Assessing the performance of the Board of Directors both collegially and individually based on the performance targets set forth in the management contract;
- j. Studying and examining the Annual Report prepared by the Board of Directors and signing it;

- k. Memantau efektivitas penerapan GCG di Perusahaan termasuk memastikan ditaatinya kebijakan etika berusaha;
 - l. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - m. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;
 - n. Mengusulkan penetapan Auditor Eksternal kepada RUPS berdasarkan usulan dari Komite Audit termasuk menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbai jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut;
 - o. Memantau kinerja Satuan Pengawas Internal;
 - p. Memastikan Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan aset Perusahaan;
 - q. Memastikan Direksi mengungkapkan informasi penting Perusahaan dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif;
 - r. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tanggung jawab Dewan Komisaris
- a. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - 1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab;
 - 2. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Perusahaan;
 - 3. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan Visi dan Misi serta rencana-rencana strategis Perusahaan lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar;
 - 4. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan Direksi;
 - 5. Melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi;
 - 6. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris;
 - 7. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perusahaan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya;
 - k. Monitoring the effectiveness of the GCG implementation in the Company, including ensuring compliance with business ethics policies;
 - l. Providing opinions and suggestions to the GMS regarding the appointment and termination of the Board of Directors;
 - m. Providing opinions and suggestions to the GMS regarding any other issues deemed important for the management of the Company;
 - n. Proposing the appointment of the External Auditors to the GMS based on recommendation from the Audit Committee, including submitting to the GMS the reasons for the nomination and the amounts of honorariums/rewards proposed for the External Auditors;
 - o. Monitoring the performance of the Internal Audit Unit;
 - p. Ensuring that the Board of Directors establishes an effective internal control system to safeguard the Company's assets;
 - q. Ensuring that the Board of Directors discloses important Company information in the Annual Report (including Financial Statements) to other parties in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner;
 - r. Maintaining the confidentiality of information obtained while serving as a Member of the Board of Commissioners in accordance with the prevailing laws and regulations.
2. Responsibilities of the Board of Commissioners
- a. In performing its functions, the Board of Commissioners is responsible of:
 - 1. Supervising and providing advices to the Board of Directors in implementing the management of the Company in good faith, prudently and responsibly;
 - 2. Providing opinions and suggestions to the Board of Directors and all of its members in relation to the management of the Company;
 - 3. Providing opinions and suggestions to the Board of Directors regarding the establishment of the Company's Vision and Mission and other strategic plans as stipulated in the Articles of Association;
 - 4. Studying and examining reports from the Board of Directors;
 - 5. Assessing the performance of the Board of Directors;
 - 6. Studying and examining reports from committees under the Board of Commissioners;
 - 7. Keeping abreast of the Company's activities, both from internal information provided by the Company and from external information originating from the media and from other sources;





8. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perusahaan.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung renteng apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan kerugian Perusahaan;
- c. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas apabila dapat membuktikan:
 1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
 3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Menyetujui atau menolak rencana Direksi untuk:
 - a. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dari Bank atau Lembaga Keuangan lain;
 - b. Memberikan pinjaman jangka menengah/panjang atas nama Perseroan;
 - c. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek;
 - d. Melepaskan dan menghapus aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomi yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
 - e. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi satu tingkat di bawah Direksi.
2. Menyetujui atau menolak rencana dari Direksi untuk mengadakan kerja sama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
3. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
4. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
5. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

8. Making efforts to ensure that the Board of Directors and its members have complied with the provisions of laws and regulations, the Company's Articles of Association, and other regulations in managing the Company.
- b. Each member of the Board of Commissioners is personally and jointly responsible if the Board of Commissioners is guilty or negligent in carrying out its duties, causing losses to the Company;
- c. Members of the Board of Commissioners cannot be held accountable for the Company's losses as referred to in point b above if they can prove that they:
 1. Have carried out supervision duties in good faith and prudently for the benefit of the Company and in accordance with the Company's purpose and objectives;
 2. Have no personal interest, either directly or indirectly, in the management of the Board of Directors which resulted in losses;
 3. Have provided advices to the Board of Directors to prevent the loss from occurring or continuing.

AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is authorized to:

1. Approve or reject the Board of Directors' plans on:
 - a. Receiving medium/long-term loans from Banks or other financial institutions;
 - b. Providing medium/long-term loans on behalf of the Company;
 - c. Putting up fixed assets required as collaterals to make short-term credit withdrawals;
 - d. Releasing and writing-off movable fixed assets with an economic age that commonly applies in the industry in general up to 5 (five) years and writing-off bad debts, dead stock inventory up to a certain value as determined by the GMS;
 - e. Establishing and adjusting the organizational structure one level below the Board of Directors.
2. Approve or reject the Board of Directors' plans to enter into a joint operation or management contract that are valid for a period of not more than 2 (two) years;
3. View accounts, letters and other documents, examine cash flow and other securities for verification purposes and examine the Company's assets;
4. Entering the grounds, buildings and offices used by the Company;
5. Request explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues relating to the management of the Company;

6. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 7. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
 8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
 9. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis disertai dengan alasan dari tindakan itu;
 10. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
 11. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
 12. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 13. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Acknowledge all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
 7. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the the Board of Commissioners' meetings;
 8. Appoint and terminate the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary;
 9. Suspend a member of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations who neglects their obligations or for an urgent reason determined by the Company. This suspension must be notified in writing to the member in question along with the reasons;
 10. Form committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the Company's capabilities;
 11. Use experts for certain matters and within a certain period at the expense of the Company, if deemed necessary;
 12. Carry out management actions of the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association;
 13. Attend the Board of Directors' meetings and provide views on matters being discussed;
 14. Carry out other supervisory authorities as long as it does not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or the General Meeting of Shareholders decisions.

PEMBAGIAN TUGAS ANTAR DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diatur oleh mereka sendiri, secara jelas, serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KP 04 Tahun 2021 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

DIVISION OF DUTIES AMONG MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners divides duties, authorities and responsibilities regulated by themselves, in clarity, and determines the necessary factors to support the implementation of the Board of Commissioners' duties. The Board of Commissioners has the policy on and carries out the division of duties among the members of the Board of Commissioners as stated in the Decree of the Board of Commissioners No. KP 04 of 2021 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).





Adapun pembagian tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut.

The division of supervisory duties of the Board of Commissioners is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Fields of Duty
Achmad Djamaludin	Komisaris Utama President Commissioner	Bertindak sebagai koordinator pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan melakukan pengawasan pada Manajemen Strategis Perseroan, proyek-proyek strategis, permasalahan strategis, hubungan antar lembaga, dan hubungan internasional. Acting as the coordinator of the implementation of the supervisory duties of the Board of Commissioners and supervising the Company's Strategic Management, strategic projects, strategic issues, relations between institutions, and international relations.
Arman Depari	Komisaris Commissioner	Melakukan pengawasan pada bidang dalam lingkup Direktorat Operasi dan Komersial, bidang Pengadaan, serta bertugas sebagai Wakil Ketua Komite Audit. Supervising fields within the scope of the Directorate of Operations and Commercial, Procurement, and serving as Deputy Chairperson of the Audit Committee.
Winata Supriyatna	Komisaris Commissioner	Melakukan pengawasan pada bidang dalam lingkup Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis, serta bertugas sebagai Sekretaris Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko. Supervising fields within the scope of the Directorate of Business Transformation and Development and serving as Secretary of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee.
Irma Suryani Chaniago	Komisaris Independen President Commissioner	Melakukan pengawasan pada bidang dalam lingkup Direktorat Keuangan dan Satuan Pengawasan Internal, serta bertugas sebagai Ketua Komite Audit. Supervising fields within the scope of the Directorate of Finance and the Internal Audit Unit and serving as the Chairperson of the Audit Committee.
Herbert Timbo Parluhutan Siahhan	Komisaris Independen President Commissioner	Melakukan pengawasan pada bidang dalam lingkup Direktorat Sumber Daya Manusia serta bertugas sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko. Supervising fields within the scope of the Directorate of Human Resources and serving as a Member of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee.
Ahmad Perwira Mulia Tarigan	Komisaris Independen President Commissioner	Melakukan pengawasan pada bidang dalam lingkup Direktorat Teknik dan Sekretaris Perusahaan, serta bertugas sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko. Supervising fields within the scope the Directorate of Engineering and Corporate Secretary and serving as the Chairperson of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN BAGI DEWAN KOMISARIS BARU

Perseroan melaksanakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dengan tujuan memberikan pengenalan kepada anggota Dewan Komisaris baru tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris maupun untuk pemahaman tentang proses bisnis Perseroan.

Materi yang diberikan dalam program penenalan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru, antara lain:

- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
- Gambaran mengenai Perseroan yang berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
- Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

COMPANY INDUCTION PROGRAM FOR NEW MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company implements an induction program for new members of the Board of Commissioners with the aim of introducing new members of the Board of Commissioners to various matters relating to the implementation of the Board of Commissioners' duties and for understanding the Company's business processes.

Materials provided in the Company induction program to new members of the Board of Commissioners include:

- Implementation of GCG principles by the Company;
- Overview of the Company relating to the objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
- Information relating to delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
- Explanation on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as matters that are not allowed.

Di tahun 2020, program pengenalan Perseroan kepada Anggota Dewan Komisaris baru dilaksanakan pada tanggal 21 April 2020 melalui *Zoom Meeting* di Grha Pelindo Satu, Belawan Medan. Program ini diikuti oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan diikuti pula oleh seluruh Direksi Perseroan.

FOKUS PENGAWASAN SERTA REALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Fokus kegiatan pengawasan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2020, antara lain:

1. Realisasi atas Pengawasan dan Evaluasi terhadap Laporan Tahunan Tahun 2020 (*Audited*):
Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, selaku Auditor Eksternal Pelaksana Audit atas Laporan Keuangan Perseroan:
 - a) Laporan Akuntan Independen atas Pengendalian Intern Perseroan tahun 2020 menunjukkan bahwa berkaitan dengan unsur yang diuji, Perusahaan mematuhi dan wajar dalam semua hal yang material. Akuntan Independen mencatat tidak terdapat masalah tertentu yang berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan terhadap pasal-pasal tertentu, hukum, peraturan perundang-undangan serta kontrak yang menjadi dasar pengujian.
 - b) Berkaitan dengan Hasil Audit di atas, Dewan Komisaris telah melaksanakan evaluasi terhadap Pengendalian Intern Perusahaan. Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Pengendalian Intern Perusahaan (*Internal Control*) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2020 didasarkan pada hasil reviu yang dilakukan oleh Komite Audit terkait dengan Sistem Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), hasil pemeriksaan/audit dari Auditor Eksternal (BPK/KAP/BPKP), kebijakan dan praktik yang dilakukan oleh Manajemen serta informasi lainnya yang diperoleh dari Satuan Pengawasan Intern (SPI).
 - c) Sistem Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2020 secara garis besar telah efektif yaitu telah distandardisasi dan secara periodik telah dilakukan evaluasi. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang masih perlu dilakukan perbaikan, baik perspektif Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, maupun *Monitoring*.

In 2020, the Company's introduction program to the Board of Directors on June 30, 2020 via Zoom Video Conference at Grha Pelindo Satu, Belawan, Medan. This program followed by all members of the Board of Directors.

FOCUS OF SUPERVISION AND REALIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN 2020

The focus of the Board of Commissioners' supervisory activities throughout 2020 includes:

1. Realization of Supervision and Evaluation of the 2020 Annual Report (*Audited*):
The Board of Commissioners supervised the results of the examination by the Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners, as the External Auditor of the Company's Financial Report:
 - a) The Independent Accountant's Report on the Company's Internal Control in 2020 showed that in regards of the elements tested, the Company is true and fair in all material respects. The Independent Accountant noted that there were no specific problems related to the Company's compliance with certain articles, laws, regulations and contracts that became the basis for testing.
 - b) In relation to the above Audit Results, the Board of Commissioners had evaluated the Company's Internal Control. The evaluation of the Board of Commissioners on the Internal Control of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in 2020 was based on the results of the review conducted by the Audit Committee regarding the Internal Control System of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), the results of the inspection/audit from the External Auditor (BPK/PAF/BPKP), policies and practices implemented by Management as well as other information obtained from the Internal Audit Unit (IAU).
 - c) The Internal Control System of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in 2020 in general had been effective, in terms of being standardized and periodically evaluated. However, there were still rooms for improvement, namely from the perspective of the Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring.





- d) Berdasarkan Laporan Hasil Auditor Independen, Skor tingkat kesehatan Perseroan tahun 2020 adalah sebesar 74,90 point atau "Sehat" dengan kategori "A". Target skor yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun 2020 sebesar 83,50, sehingga realisasi tingkat kesehatan Perseroan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP.
2. Pemantauan Penerapan GCG
Hasil assessment penerapan GCG PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) periode tahun 2020 mencapai total skor sebesar 95,63%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) periode tahun 2020 telah mencapai kualifikasi "Sangat Baik".
3. Kunjungan Kerja ke Cabang/Unit Usaha
Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja ke Cabang pelabuhan/Unit Bisnis sesuai dengan Program yang telah direncanakan, yaitu sebagai berikut:
- Pelabuhan Kawasan Pangkalan Susu dan Pelabuhan Kawasan Kuala Langsa pada tanggal 3 Maret 2020.
 - Cabang Belawan pada tanggal 9 Juli 2020.
 - Cabang Kuala Tanjung pada tanggal 10 Juli 2020.
 - Cabang Batam pada tanggal 11 Juli 2020.
 - Cabang Pekanbaru pada tanggal 9 September 2020.
 - Cabang Dumai dan Sei Pakning pada tanggal 10-11 September 2020
 - Cabang Malahayati pada tanggal 9 s.d 10 Desember 2020.
 - Cabang Lhokseumawe, Pangkalan Susu dan Kuala Langsa pada tanggal 10-11 Desember 2020
 - Cabang Pekanbaru pada tanggal 15 Desember 2020.
 - Cabang Dumai pada tanggal 16 Desember 2020.
 - Cabang Belawan dan Kuala Tanjung pada tanggal 17 Desember 2020.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
Dalam menjalankan fungsi *monitoring* dan *controlling*, serta pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam bentuk:
- Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Laporan Realisasi Indikator Kinerja (Key Performance Indicators/KPI) Dewan Komisaris Tahun 2020 dengan pencapaian total skor sebesar 105,00%.
- d) Based on the Independent Auditor's Report, the Company's health level score in 2020 was 74.90 points or "Healthy" with category "A". The target score set in the 2020 WPB was 83.50, meaning that the realization of the company's health level did not reach the target set in the WPB.
2. Monitoring of the GCG Implementation
The assessment result on the GCG implementation in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in 2020 showed a total score of 95.63%. This shows that the GCG implementation in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in 2020 had achieved the "Excellent" qualification.
3. Working Visits to Branches/Business Units
Throughout 2020, the Board of Commissioners had conducted working visits to Port Branches/ Business Units in accordance with the planned Programs, namely as follows:
- Port of Pangkalan Susu and Port of Kuala Langsa on 3 March 2020.
 - Belawan Branch on 9 July 9 2020.
 - Kuala Tanjung Branch on 10 July 2020.
 - Batam Branch on 11 July 2020.
 - Pekanbaru Branch on 9 September 2020.
 - Dumai and Sei Pakning Branch on 10-11 September 2020.
 - Malahayati Branch on 9-10 December 2020.
 - Lhokseumawe, Pangkalan Susu and Kuala Langsa Branch on 10-11 December 2020.
 - Pekanbaru Branch on 15 December 2020.
 - Dumai Branch on 16 December 2020.
 - Belawan and Kuala Tanjung Branch on 17 December 2020.
4. Reporting and Accountability of the Board of Commissioners
In carrying out its monitoring and controlling functions, as well as providing advices to the Board of Directors, the Board of Commissioners reported and accounted in the form of:
- Minutes of Internal Meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
 - Report on the Realization of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) in 2020 with a total score of 105.00%.

c. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2020, yang di dalamnya tercantum realisasi Program Kerja Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko.

c. Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company in 2020, which included the realization of the Work Program of the Audit Committee and the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee.

TANGGAPAN DEWAN KOMISARIS ATAS USULAN DIREKSI YANG MEMBUTUHKAN REKOMENDASI DAN/ATAU PERSETUJUAN

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi. Bentuk pengawasan melalui pemberian rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi. Sekretaris Dewan Komisaris ditugaskan untuk memonitor pelaksanaan keputusan dan rekomendasi Dewan Komisaris. Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Direksi yang membutuhkan rekomendasi dan/atau Persetujuan adalah sebagai berikut:

RESPONSES FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS TO THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSALS REQUIRING RECOMMENDATIONS AND/OR APPROVAL

As a part of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners continues to supervise the performance of the Board of Directors. The form of supervision is by providing recommendations from the Board of Commissioners to the Board of Directors. The Secretary of the Board of Commissioners is assigned to monitor the implementation of decisions and recommendations of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners' responses to the Board of Directors' proposals that require recommendation and/or approval are as follows:

DAFTAR SURAT REKOMENDASI DAN/ATAU PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS LIST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' RECOMMENDATION AND/OR APPROVAL LETTERS

No.	Perihal On	Surat Direksi Board of Directors' Letters	Surat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Letters	Keterangan Remark
1	Rekomendasi Usulan Perubahan Struktur Organisasi Cabang. Recommendations on the Proposal for Changes of Organizational Structure in Branches.	No. UM.58/1/7/PI-20.TU tanggal 3 Januari 2020 perihal Usulan Perubahan Struktur Organisasi Cabang. No. UM.58/1/7/PI-20.TU of 3 January 2020 on the Proposal for Changes of Organizational Structure in Branches.	No. UM.58/010/DK/PP.I/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Cabang. No. UM.58/010/DK/PP.I/II/2020 of 30 January 2020 on Approval of Changes of Organizational Structure in Branches.	Pada prinsipnya Dewan Komisaris menyetujui atas rencana untuk melakukan penyatuan kembali Belawan International Container (BICT) dan Terminal Petikemas Domestik Belawan (TPKDB) menjadi satu unit baru yaitu Terminal Petikemas Belawan. In principle, the Board of Commissioners approved the plan to reintegrate the Belawan International Container (BICT) and the Belawan Domestic Container Terminal (TPKDB) into one new unit, namely the Belawan Container Terminal.
2	Penyampaian Usulan Calon Direktur Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Proposal for Candidates for Directors of Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).	No. KP.31/1/1/PI-20 tanggal 16 Januari 2020 perihal Usulan Calon Direktur Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). No. KP.31/1/1/PI-20 of 16 January 2020 on Proposal for Candidates for Director of Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).	No. KP.31/011/DK/PP.1/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Rekomendasi atas Usulan Calon Direktur Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). No. KP.31/011/DK/PP.1/II/2020 of 5 February 2020 on Recommendations on the Proposal for Candidates for Directors of Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).	CONFIDENTIAL
3	Persetujuan untuk Penerbitan Domestic Bond pada tahun 2020. Approval for the Issuance of Domestic Bonds in 2020.	No. KU.63/1/8/PI-20 tanggal 10 Januari 2020 perihal Persetujuan untuk Penerbitan Domestic Bond pada tahun 2020. No. KU.63/1/8/PI-20 of 10 January 2020 on Approval for the Issuance of Domestic Bonds in 2020.	No. KU.63/012/DK/PP.I/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Persetujuan untuk Penerbitan Domestic Bond. No. KU.63/012/DK/PP.I/II/2020 of 5 February 2020 on Approval for the Issuance of Domestic Bonds in 2020.	Pada prinsipnya Dewan Komisaris menyetujui rencana penerbitan domestic bond dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yaitu Obligasi PUB II PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan nilai obligasi sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) untuk tahun 2020 dan Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) untuk tahun 2021. In principle, the Board of Commissioners approved the domestic bond issuance plan with Continuous Public Offering (CPO) scheme, namely CPO II Bonds of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with bond value of Rp3,000,000,000,000 (three trillion rupiah) for 2020 and Rp2,000,000,000,000 (two trillion rupiah) for 2021..



DAFTAR SURAT REKOMENDASI DAN/ATAU PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
LIST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' RECOMMENDATION AND/OR APPROVAL LETTERS

No.	Perihal On	Surat Direksi Board of Directors' Letters	Surat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Letters	Keterangan Remark
4	Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Approval for the Appointment of the Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).	No. KP.31/1/4/PI-20 tanggal 23 Maret 2020 perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. No. KP.31/1/4/PI-20 of 23 March 2020 on Request for Approval for the Appointment of the Corporate Secretary.	No. KP.31/031/DK/PP.I/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). No. KP.31/031/DK/PP.I/III/2020 of 26 March 2020 on Approval for the Appointment of the Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).	Dewan Komisaris menyetujui penunjukan Sdr. Imron Eryandy yang saat ini menjabat sebagai SVP Unit Pusat Pelayanan menjadi Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menggantikan Sdr. M. Eriansyah. The Board of Commissioners approved the appointment of Mr. Imron Eryandy, who currently serves as SVP of the Service Center Unit, as the Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), replacing Mr. M. Eriansyah.
5	Tanggapan Dewan Komisaris atas Revisi Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I. Response of the Board of Commissioners on the Revision to the Plan for the Issuance of Continuous Bond I.	No. KU.63/5/23/PI-20 tanggal 2 April 2020 perihal Revisi Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I. No. KU.63/5/23/PI-20 of 2 April 2020 on Revision to the Plan for the Issuance of Continuous Bond I.	No. KU.63/035/DK/PP.I/IV/2020 tanggal 2 April 2020 perihal Persetujuan untuk Revisi Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I. No. KU.63/035/DK/PP.I/IV/2020 of 2 April 2020 on Approval of the Revision to the Plan for the Issuance of Continuous Bond I.	Pada prinsipnya Dewan Komisaris menyetujui atas rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan perusahaan. In principle, the Board of Commissioners approved the plan for the Issuance of Continuous Bonds I as long as it is in accordance with the prevailing laws and regulations and is not detrimental to the company.
6	Usulan Top Talent (BOD & BOD-1) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Nomination of Top Talents (BOD & BOD-1) of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).		No. UM.50/049/DK/PP.I/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Usulan Top Talent (BOD & BOD-1) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). No. UM.50/049/DK/PP.I/IV/2020 of 29 April 2020 on Nomination of Top Talents (BOD & BOD-1) of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).	CONFIDENTIAL
7	Penghapusbukuan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Write-off of Fixed Assets of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).	No. KU.61/1/9/PI-20 tanggal 13 April 2020, No. KU.61/1/7/PI-20 tanggal 9 April 2020, No. KU.61/1/8/PI-20 tanggal 9 April 2020 perihal Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap. No. KU.61/1/9/PI-20 of 13 April 2020, No. KU.61/1/7/PI-20 of 9 April 2020, No. KU.61/1/8/PI-20 of 9 April 2020 on the Proposal for Write-off of Fixed Assets of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	No. KU.61/060/DK/PP.IV/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Penghapusbukuan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). No. KU.61/060/DK/PP.IV/2020 of 8 May 2020 on Write-off of Fixed Assets of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).	Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi atas rencana penghapusbukuan aset tetap berupa 1 (satu) unit Container Crane, Namun terhadap usulan penghapusan aset tetap berupa Jalan dan Bangunan serta kendaraan, Dewan Komisaris belum dapat memberikan rekomendasi dan persetujuan karena perlu dilakukan pengecekan fisik di lapangan terlebih dahulu oleh Tim Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). The Board of Commissioners had provided recommendations on the plan for write-off of a fixed asset namely 1 (one) Container Crane unit. However, regarding the proposal for write-off of fixed assets in the form of roads and buildings and vehicles, the Board of Commissioners had not been able to provide recommendations and approvals because the Board deemed it necessary to conduct physical checks in the field beforehand by the Audit Committee Team of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

DAFTAR SURAT REKOMENDASI DAN/ATAU PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
LIST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' RECOMMENDATION AND/OR APPROVAL LETTERS

No.	Perihal On	Surat Direksi Board of Directors' Letters	Surat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Letters	Keterangan Remark
8	Peretujuan Reorganisasi Unit Galangan Kapal. Approval for Reorganization of Shipyard Units.	No. PR.02/3/8/PI-20 tanggal 11 Mei 2020 perihal Permohonan Peretujuan Reorganisasi Unit Galangan Kapal. No. PR.02/3/8/PI-20 of 11 May 2020 on Request for Approval for Reorganization of Shipyard Units.	No. PR.02/090/DK/PP.IV/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Reorganisasi Unit Galangan Kapal (UGK). No. PR.02/090/DK/PP.IV/2020 of 29 May 2020 on Reorganization of Shipyard Units.	Dewan Komisaris belum dapat menyetujui usulan reorganisasi UGK PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan melakukan penutupan atau pembubaran UGK dimaksud dan selanjutnya Dewan Komisaris merekomendasikan beberapa hal sebagaimana surat Dewan Komisaris No. PR.02/090/DK/PP.IV/2020 tanggal 29 Mei 2020. The Board of Commissioners had not yet been able to approve the proposal for reorganization of shipyard units of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) by closing or dissolving the shipyard units in question and then the Board of Commissioners recommended several matters as stated in the letter of the Board of Commissioners No. PR.02/090/DK/PP.IV/2020 of 29 May 2020.
9	Penghapusbukuan Piutang Usaha. Write-off of Accounts Receivable.	No. KU.63/7/21/PI-20 tanggal 16 Juni 2020 perihal Usulan Penghapusbukuan Piutang Usaha. No. KU.63/7/21/PI-20 of 16 June 2020 on Proposal for Write-off of Accounts Receivable.	No. KU.63/115/DK/PP.IV/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Penghapusbukuan Piutang Usaha. No. KU.63/115/DK/PP.IV/2020 of 19 June 2020 on Write-off of Accounts Receivable.	Dewan Komisaris belum dapat menyetujui usulan penghapusbukuan piutang usaha karena belum memenuhi semua hal yang dipersyaratkan sesuai Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KU.63/6/5/PI-11 tanggal 18 Februari 2011. The Board of Commissioners had not been able to approve the proposal for write-off of accounts receivable because it had not fulfilled all the requirements in accordance with the Guidelines for the Management of Accounts Receivable within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as stated in the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KU.63/6/5/PI-11 of 18 February 2011.
10	Rekomendasi atas Usulan Calon Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas/PT PTP. Recommendations on the Proposal for Candidates for President Director of PT Prima Terminal Petikemas/PT PTP.	No. UM.50/15/I/PI-20 tanggal 29 Juni 2020 perihal Usulan Calon Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas/PT PTP. No. UM.50/15/I/PI-20 of 29 June 2020 on Proposal for Candidates for President Director of PT Prima Terminal Petikemas/PT PTP.	No. UM.50/132/DK/PP.IV/2020 tanggal 3 Juli 2020 perihal Rekomendasi atas Usulan Calon Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas. No. UM.50/132/DK/PP.IV/2020 of 3 July 2020 on Recommendations on the Proposal for Candidates for President Director of PT Prima Terminal Petikemas/PT PTP.	CONFIDENTIAL
11	Penghapusbukuan Aset Tetap Kendaraan Dinas Milik Kantor Pusat, Cabang Kuala Tanjung, BICT, dan Belawan. Write-off of Fixed Assets in the form of Official Vehicles Owned by the Head Office, Kuala Tanjung Branch, BICT, and Belawan Branch.	No. KU.61/1/8/PI-20 tanggal 9 April 2020 perihal Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap. No. KU.61/1/8/PI-20 of 9 April 2020 on Proposal for Write-off of Fixed Assets.	No. KU.61/151/DK/PP.IV/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Penghapusbukuan Aset Tetap Kendaraan Dinas Milik Kantor Pusat, Cabang Kuala Tanjung, BICT dan Belawan. No. KU.61/151/DK/PP.IV/2020 of 27 July 2020 on Write-off of Fixed Assets in the form of Official Vehicles Owned by the Head Office, Kuala Tanjung Branch, BICT and Belawan Branch.	Berdasarkan hasil cek fisik dilapangan, hanya ada beberapa kendaraan dinas yang dapat disetujui untuk dihapus karena secara fisik memang sudah kurang layak, sementara selebihnya masih sangat layak dan tidak perlu dilakukan penghapusbukuan. Based on the results of physical checks in the field, there were only a few official vehicles that could be approved for write-off because they were physically inadequate, while the rest were still very feasible and did not need to be written-off.



DAFTAR SURAT REKOMENDASI DAN/ATAU PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
LIST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' RECOMMENDATION AND/OR APPROVAL LETTERS

No.	Perihal On	Surat Direksi Board of Directors' Letters	Surat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Letters	Keterangan Remark
12	Proses Pemilihan KAP untuk Audit Tahun 2020. Public Accounting Firm (PAF) Selection Process for Audits in 2020.	No. PS.81/1/7/PI-20 tanggal 18 September 2020 perihal Proses Pemilihan KAP untuk Audit Tahun 2020. No. PS.81/1/7/PI-20 of 18 September 2020 on the Public Accounting Firm (PAF) Selection Process for Audits in 2020.	No. PS.81/208/DK/PP.IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Proses Pemilihan KAP untuk Audit Tahun 2020. No. PS.81/208/DK/PP.IX/2020 of 18 September 2020 on the Public Accounting Firm (PAF) Selection Process for Audits in 2020.	Pada prinsipnya Dewan Komisaris menyetujui Proses Pemilihan KAP untuk Audit Tahun 2020 sebagaimana surat Direksi No. PS.81/1/7/PI-20 tanggal 18 September 2020 perihal Proses Pemilihan KAP untuk Audit Tahun 2020. In principle, the Board of Commissioners approved the PAF Selection Process for Audits in 2020 as stated in the Letter of the Board of Directors No. PS.81/1/7/PI-20 of 18 September 2020 on the PAF Selection Process for Audits in 2020.
13	Usulan Calon Komisaris pada Anak Perusahaan PT Prima Multi Terminal. Proposal for Candidates for Commissioners in Subsidiary (PT Prima Multi Terminal).	No. UM.50/18/19/PI-20 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Usulan Calon Komisaris pada Anak Perusahaan PT Prima Multi Terminal. No. UM.50/18/19/PI-20 of 24 August 2020 on the Proposal for Candidates for Commissioners in Subsidiary (PT Prima Multi Terminal).	No. UM.50/211/DK/PP.IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Rekomendasi atas Usulan Calon Komisaris pada Anak Perusahaan (PT Prima Multi Terminal). No. UM.50/211/DK/PP.IX/2020 of 22 September 2020 on Recommendations on the Proposal for Candidates for Commissioners in Subsidiary (PT Prima Multi Terminal).	Dewan Komisaris belum dapat merekomendasikan calon Komisaris PT Prima Multi Terminal, dengan pertimbangan sebagai berikut: • Proses seleksi calon Komisaris Anak Perusahaan belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Syarat lain yang belum dipenuhi oleh ketiga kandidat adalah belum ada bukti keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah (Pasal 4 angka 3 huruf f Peraturan Menteri BUMN No. PER 03/MBU/2012). The Board of Commissioners had not been able to recommend a candidate for Commissioners in PT Prima Multi Terminal, with the following consideration(s): • The selection process for candidates for Commissioners in the Subsidiary had not been carried out in accordance with applicable regulations. • Another requirement that had not been fulfilled by the three candidates was that they did not have the medical fitness certificates from a government hospital (referencing to Article 4 number 3 letter f in the Regulation of the Minister of SOE No. PER 03/MBU/2012).
14	Rekomendasi atas Usulan Calon Komisaris pada Anak Perusahaan PMT. Recommendations on the Proposal for Candidates for Commissioners in Subsidiary (PT Prima Multi Terminal/PMT).	- No. UM.50/18/19/PI-20 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Usulan Calon Komisaris pada Anak Perusahaan PT Prima Multi Terminal. - UM.50/19/14/PI-20 tanggal 9 September 2020 tentang Kelengkapan Dokumen Usulan Penggantian Calon Komisaris PT Prima Multi Terminal. - No. UM.50/18/19/PI-20 of 24 August 2020 on Proposal for Candidates for Commissioners in Subsidiary (PT Prima Multi Terminal/PMT). - UM.50/19/14/PI-20 of 9 September 2020 on the Completeness of Documents within the Proposal for Replacement of Candidates for Commissioners in PT Prima Multi Terminal.	No. UM.50/213/DK/PP.IX/2020 tanggal 24 September 2020 perihal Rekomendasi atas Usulan Calon Komisaris pada Anak Perusahaan PMT. No. UM.50/213/DK/PP.IX/2020 of 24 September 2020 on Recommendations on the Proposal for Candidates for Commissioners in Subsidiary (PT Prima Multi Terminal/PMT).	Pada prinsipnya Dewan Komisaris tidak berkeberatan atas perubahan susunan Komisaris Anak Perusahaan (PT Prima Multi Terminal). In principle, the Board of Commissioners did not object to the change in the composition of the Commissioners in the Subsidiary (PT Prima Multi Terminal).

DAFTAR SURAT REKOMENDASI DAN/ATAU PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
LIST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' RECOMMENDATION AND/OR APPROVAL LETTERS

No.	Perihal On	Surat Direksi Board of Directors' Letters	Surat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Letters	Keterangan Remark
15	Rekomendasi atas Usulan Calon Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas (PTP). Recommendations on the Proposal for Candidates for President Director in PT Prima Terminal Petikemas (PTP).	No. UM.50/19/25/PI-20 tanggal 14 September 2020 tentang Pergantian Usulan Calon Direksi PT Prima Terminal Petikemas. No. UM.50/19/25/PI-20 of 14 September 2020 on Change of Proposal for Candidates for President Director in PT Prima Terminal Petikemas (PTP).	No. UM.50/227/DK/PP.IX/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Rekomendasi atas Usulan Calon Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas (PTP). No. UM.50/227/DK/PP.IX/2020 of 29 September 2020 on Recommendations on the Proposal for Candidates for President Director in PT Prima Terminal Petikemas (PTP).	CONFIDENTIAL
16	Penghapusbukuan Aset Tetap - Kendaraan Dinas Cabang Pekanbaru dan Dumai. Write-off of Fixed Assets - Official Vehicles in Pekanbaru and Dumai Branch.	No. KU.61/1/8/PI-20 tanggal 9 April 2020, KU.61/1/7/PI-20 tanggal 9 April 2020 perihal perihal Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap. No. KU.61/1/8/PI-20 of 9 April 2020, KU.61/1/7/PI-20 of 9 April 2020 on Proposal for Write-off of Fixed Assets.	No. KU.61/229/DK/PP.IX/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Penghapusbukuan Aset Tetap - Kendaraan Dinas Cabang Pekanbaru dan Dumai. No. KU.61/229/DK/PP.IX/2020 of 30 September 2020 on Write-off of Fixed Assets - Official Vehicles in Pekanbaru and Dumai Branch.	Pada prinsipnya Dewan Komisaris dapat memberikan rekomendasi atas rencana penghapusbukuan aset tetap berupa Mess di Perawang dengan nilai buku per 31 Desember 2019 sebesar Rp51.185.670 (lima puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Sedangkan untuk Kantor pelabuhan Umum Perawang dengan nilai buku per 31 Desember 2019 sebesar Rp174.105.946 (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) tidak jadi dihapusbukukan karena akan dimanfaatkan untuk kantor dan mess Bea Cukai. In principle, the Board of Commissioners could provide recommendations on the plan for write-off of a fixed asset namely a Dormitory in Perawang with a book value as of 31 December 2019 of Rp51,185,670 (fifty-one million one hundred eighty-five thousand six hundred and seventy rupiah). As for the General Port Office of Perawang with a book value as of December 31 2019 of Rp174,105,946, - (one hundred seventy-four million one hundred five thousand nine hundred and forty-six rupiah) was not written off because it would be used for office and dormitory by the Customs and Excise Agency.
17	Tanggapan atas Pemberian Pinjaman Pemegang Saham ke Entitas Anak (PT PMT). Response on the Lending of Shareholder Loan to Subsidiary Entity (PT Prima Multi Terminal/PT PMT).	No. UM.50/20/19/PI-20 tanggal 30 September 2020 perihal Laporan Pemberian Pinjaman Pemegang Saham ke Entitas Anak PT Prima Multi Terminal. No. UM.50/20/19/PI-20 of 30 September 2020 on the Report on the Lending of Shareholder Loan to Subsidiary Entity PT Prima Multi Terminal.	No. UM.50/237/DK/PP.IX/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Tanggapan atas Pemberian Pinjaman Pemegang Saham ke Entitas Anak (PT PMT). No. UM.50/237/DK/PP.IX/2020 on 6 October 2020 on Response on the Lending of Shareholder Loan to Subsidiary Entity (PT Prima Multi Terminal/PT PMT).	Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan atas Pemberian Pinjaman Pemegang Saham ke Entitas Anak (PT PMT) sebagaimana surat Dewan Komisaris No. UM.50/237/DK/PP.IX/2020 tanggal 6 Oktober 2020. The Board of Commissioners issued a response on the Lending of Shareholder Loan to Subsidiary (PT PMT) as stated in the letter of the Board of Commissioners No. UM.50/237/DK/PP.IX/2020 of 6 October 2020.



DAFTAR SURAT REKOMENDASI DAN/ATAU PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
LIST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' RECOMMENDATION AND/OR APPROVAL LETTERS

No.	Perihal On	Surat Direksi Board of Directors' Letters	Surat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Letters	Keterangan Remark
18	Usulan atas Sewa Barang Milik Negara (BMN). Proposal for Leasing State Properties.	No. PR.02/5/23/PI-20 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Sewa Barang Milik Negara. No. PR.02/5/23/PI-20 of 21 October 2020 on the Lease of State Properties.	No. PR.02/257/DK/PP.I/XI/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Sewa Barang Milik Negara (BMN). No. PR.02/257/DK/PP.I/XI/2020 of 26 October 2020 on the Lease of State Properties.	Pada prinsipnya Dewan Komisaris tidak keberatan berkenaan dengan usulan/ permohonan untuk melakukan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk sewa BMN dalam rangka optimalisasi lapangan penumpukan petikemas dan penyediaan infrastruktur jasa terminal petikemas berupa 1 (satu) bidang Tanah Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Beton seluas 125.258 m ² (seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan total nilai sewa sebesar Rp1.679.486.255.461 (satu triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) selama jangka waktu 50 (lima puluh tahun) dengan mekanisme pembayaran secara bertahap sebagaimana Surat Direksi No. PR.02/5/23/PI-20 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Sewa Barang Milik Negara. In principle, the Board of Commissioners did not object to the proposal/request for utilization of State Owned Assets through leases in order to optimize container stacking fields and provide infrastructure service in container terminals namely 1 (one) Field for Concrete Construction Goods Hoarding covering an area of 125,258 m ² (one hundred twenty-five thousand two hundred and fifty-eight square meters), with a total rental value of Rp1,679,486,255,461 (one trillion six hundred seventy-nine billion four hundred eighty-six million two hundred and fifty thousand four hundred and sixty one rupiah) for a period of 50 (fifty) years with gradual payment mechanism, as referred to in the Letter of the Board of Directors No. PR.02/5/23/PI-20 of 21 October 2020 on the Lease of State Owned Assets.
19	Rekomendasi atas Usulan Calon Komisaris Utama pada Anak Perusahaan (PT Prima Multi Terminal). Recommendations on the Proposal for Candidates for President Commissioner in Subsidiary (PT Prima Multi Terminal).	No. UM.50/23/8/PI-20 tanggal 4 November 2020 tentang Usulan Calon Komisaris Utama PT Prima Multi Terminal. No. UM.50/23/8/PI-20 of 4 November 2020 on Proposal for Candidates for President Commissioner in PT Prima Multi Terminal.	No. UM.50/270/DK/PP.I/XI/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Rekomendasi atas Usulan Calon Komisaris Utama pada Anak Perusahaan (PT Prima Multi Terminal). No. UM.50/270/DK/PP.I/XI/2020 of 10 November 2020 on Recommendations on the Proposal for Candidates for President Commissioner in Subsidiary (PT Prima Multi Terminal).	CONFIDENTIAL
20	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021. Response of the Board of Commissioners on the Proposal for the Work Plan and Budget (WPB) for 2021.	-	No. UM.50/283/DK/PP.I/XI/2020 tanggal 20 November 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021. No. UM.50/283/DK/PP.I/XI/2020 of 20 November 2020 on Response of the Board of Commissioners on the Proposal for the Company Work Plan and Budget (WPB) for 2021.	Pada prinsipnya Dewan Komisaris menyetujui usulan RKAP Tahun 2021, namun terdapat beberapa hal yang perlu perhatian Direksi sebagaimana surat Dewan Komisaris No. UM.50/283/DK/PP.I/XI/2020 tanggal 20 November 2020. In principle, the Board of Commissioners approved the proposal for the 2021 WPB. However, there were a number of matters to which the Board of Directors should pay attention, as stated in the letter of the Board of Commissioners No. UM.50/283/DK/PP.I/XI/2020 of 20 November 2020.

DAFTAR SURAT REKOMENDASI DAN/ATAU PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
LIST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' RECOMMENDATION AND/OR APPROVAL LETTERS

No.	Perihal On	Surat Direksi Board of Directors' Letters	Surat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Letters	Keterangan Remark
21	Tanggapan Dewan Komisaris atas Akuisisi Saham Mitra di PT PMT. Response of the Board of Commissioners on the Acquisition of Partner Shares in PT Prima Multi Terminal/PT PMT.	No. UM.50/20/20/PI-20 tanggal 30 September 2020 tentang Pemberitahuan Rencana Akuisisi Saham Mitra di PT Prima Multi Terminal. No. UM.50/20/20/PI-20 of 30 September 2020 on Notification of Plan for the Acquisition of Partner Shares in PT Prima Multi Terminal/PT PMT.	No. UM.50/293/DK/PP.I/XI/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Akuisisi Saham Mitra di PT PMT. No. UM.50/293/DK/PP.I/XI/2020 of 30 November 2020 on Response of the Board of Commissioners on the Acquisition of Partner Shares in PT Prima Multi Terminal/PT PMT.	Pada prinsipnya Dewan Komisaris memahami upaya-upaya Direksi dalam melakukan aksi korporasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Namun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direksi sebagaimana surat Dewan Komisaris No. UM.50/293/DK/PP.I/XI/2020 tanggal 30 November 2020. In principle, the Board of Commissioners understood the Board of Directors' efforts in taking corporate actions aimed to the increase of the value of the company. However, there were a number of matters to which the Board of Directors should pay attention, as stated in the letter of the Board of Commissioners No. UM.50/293/DK/PP.I/XI/2020 of 30 November 2020.
22	Tanggapan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Right Issue PT Prima Pengembangan Kawasan (PT PPK). Response of the Board of Commissioners on the Implementation of Rights Issue in PT Prima Pembangunan Kawasan (PT PPK).	No. PR.02/6/18/PI-20 tanggal 23 Nopember 2020 tentang Pelaksanaan Right Issue PT Prima Pengembangan Kawasan. No. PR.02/6/18/PI-20 of 23 November 2020 on the Implementation of Rights Issue in PT Prima Pembangunan Kawasan (PT PPK).	No. PR.02/294/DK/PP.I/XI/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Right Issue PT Prima Pengembangan Kawasan (PT PPK). No. PR.02/294/DK/PP.I/XI/2020 of 30 November 2020 on Response of the Board of Commissioners on the Implementation of Rights Issue in PT Prima Pembangunan Kawasan (PT PPK).	Pada prinsipnya Dewan Komisaris menyetujui right issue PT Prima Pengembangan Kawasan (PT PPK), namun terdapat beberapa hal yang perlu perhatian Direksi sebagaimana surat Dewan Komisaris No. PR.02/294/DK/PP.I/XI/2020 tanggal 30 November 2020. In principle, the Board of Commissioners approved the Rights Issue in PT Prima Pembangunan Kawasan (PT PPK), there were a number of matters to which the Board of Directors should pay attention, as stated in the letter of the Board of Commissioners No. PR.02/ 294/DK/PP.I/XI/2020 of 30 November 2020.
23	Rekomendasi atas Usulan Calon Direksi PT Prima Indonesia Logistik (PIL). Recommendations on the Proposal for Candidates for the Board of Directors in PT Prima Indonesia Logistik (PIL).	UM.50/26/21/PI-20 tanggal 14 Desember 2020 tentang Usulan Calon Direksi PT Prima Indonesia Logistik. UM.50/26/21/PI-20 of 14 December 2020 on Proposal for Candidates for the Board of Directors in PT Prima Indonesia Logistik (PIL).	UM.50/324/DK/PP.I/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Rekomendasi atas Usulan Calon Direksi PT Prima Indonesia Logistik (PIL). UM.50/324/DK/PP.I/XII/2020 of 28 December 2020 Recommendations on the Proposal for Candidates for the Board of Directors in PT Prima Indonesia Logistik (PIL).	CONFIDENTIAL
24	Penghapusbukuan Aset Tetap - Kendaraan Dinas Cabang Malahayati dan Lhokseumawe. Write-off of Fixed Assets - Official Vehicles in Malahayati and Lhokseumawe Branch.	KU.61/1/8/PI-20 tanggal 9 April 2020 perihal Penghapusbukuan Aset Tetap. KU.61/1/8/PI-20 of 9 April 2020 on Write-off of Fixed Assets.	KU.61/325/DK/PP.I/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Penghapusbukuan Aset Tetap - Kendaraan Dinas Cabang Malahayati dan Lhokseumawe. KU.61/325/DK/PP.I/XII/2020 of 30 December 2020 on Write-off of Fixed Assets - Official Vehicles in Malahayati and Lhokseumawe Branch.	

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris, yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris serta 2 (dua) komite, yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris menilai bahwa Organ Pendukung Dewan Komisaris tersebut telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dengan baik.

ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Supporting Organs of the Board of Commissioners, which consist of the Secretary of the Board of Commissioners and 2 (two) committees, namely the Audit Committee and the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee. Throughout 2020, the Board of Commissioners considered that these Supporting Organs had carried out their duties and responsibilities well.





Sekretaris Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dengan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki tugas untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan Perseroan, termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan tujuan pengelolaan manajemen yang sehat dan secara konsisten yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dijiwai oleh nilai-nilai dan etika Perusahaan yang baik.

The Secretary of the Board of Commissioners is appointed to ensure the ease of duties of the Board of Commissioners, with responsibility for carrying out administrative and secretarial activities related to all activities of the Board of Commissioners. The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in supervising the management of the Company, including providing recommendations to the Board of Commissioners in the process of appointing a Public Accounting Firm (KAP). Whereas, the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee is formed to support the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities with the aim for healthy and consistent management in accordance with the GCG principles imbued with noble corporate values and ethics.

KOMISARIS INDEPENDEN

INDEPENDENT COMMISSIONERS

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa 20% komposisi Dewan Komisaris berasal dari independen.

Jika mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dimana setiap perusahaan publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Di tahun 2020, Dewan Komisaris Perseroan tercatat berjumlah 6 (enam) orang dan dari jumlah tersebut terdapat 3 (tiga) orang Komisaris Independen, yaitu Irma Suryani Chaniago, Herbert Timbo Parluhutan Siahaan dan Ahmad Perwira Mulia Tarigan. Dengan demikian komposisi Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Komisaris yang berasal dari luar Perseroan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Keberadaan Komisaris Independen di Perseroan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perseroan menerapkan kriteria Anggota Komisaris Independen. Adapun kriteria Komisaris Independen di sebagai berikut:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi;
2. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
3. Tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who are not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and the controlling shareholders, and are free from business relationships or other relationships that may affect their ability to act independently or act solely for the benefit of the Company.

Based on the Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/2012 on Amendments to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, it is stipulated that 20% of the composition The Board of Commissioners shall derive from independent parties.

Referring to the provisions in the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 33/POJK.04/2014, every public company must have Independent Commissioners of at least 30% of the total members of the Board of Commissioners.

In 2020, the Company's Board of Commissioners of the Company consisted of 6 (six) members and of these were 3 (three) Independent Commissioners, namely Irma Suryani Chaniago, Herbert Timbo Parluhutan Siahaan and Ahmad Perwira Mulia Tarigan. Thus, the composition of the Company's Independent Commissioners had complied with provisions of the prevailing laws and regulations above.

CRITERIA FOR APPOINTMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

Independent Commissioners are members of Commissioners who originate from outside the Company (not affiliated with the company) who are selected transparently and independently, having integrity and proper competence, are free from influence related to personal interests or other parties', and capable of acting objectively and independently based on the principles of GCG.

The presence an Independent Commissioners in the Company constantly ensures that the supervisory mechanism runs effectively and in accordance with laws and regulations. The Company applies criteria for Independent Commissioners as follows:

1. Not serving as a Director in an affiliated company;
2. Not working for the Government, including in any department, agency and the military in the last three years;
3. Not working in the SOE concerned or its affiliates within the last three years;





- | | |
|---|---|
| <p>4. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya;</p> <p>5. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup BUMN.</p> | <p>4. Not having financial relationships, either directly or indirectly, with the SOE concerned or companies that provide services and products for the SOE concerned and its affiliates;</p> <p>5. Free from interests and business activities or other relationships that may obstruct or interfere with the ability of Independent Commissioners from outside the SOE concerned to act or think freely within the SOE scope.</p> |
|---|---|

Kriteria Independensi Independence Criteria	Irma Suryani Chaniago	Herbert Timbo Parluhutan Siahaan	Ahmad Perwira Mulia Tarigan
Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi Not serving as a Director in an affiliated company	√	√	√
Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Not working for the Government, including in any department, agency and the military in the last three years	√	√	√
Tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Not working in the SOE concerned or its affiliates within the last three years	√	√	√
Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya Not having financial relationships, either directly or indirectly, with the SOE concerned or companies that provide services and products for the SOE concerned and its affiliates	√	√	√
Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup BUMN Free from interests and business activities or other relationships that may obstruct or interfere with the ability of Independent Commissioners from outside the SOE concerned to act or think freely within the SOE scope	√	√	√

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Setiap anggota Komisaris Independen membuat pernyataan independensi untuk menyatakan status independensinya dengan menyelenggarakan Daftar Khusus, menandatangani Pakta Integritas, dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) sebagai bentuk komitmen menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Komisaris Independen yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali dan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

STATEMENTS OF INDEPENDENCE BY THE INDEPENDENT COMMISSIONERS

Each member of the Independent Commissioner makes a statement of independence to declare their independence status by organizing the Special Register, signing the Integrity Pact, and submitting the State Officials Wealth Report (LHKPN) as well as a Personal Tax Return (LP2P) as a form of commitment to avoid transactions that may contain conflicts of interest.

The current Independent Commissioners have no family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners, the Board of Directors or the controlling shareholders. They have no financial relationship with the controlling shareholders nor financial relationship with fellow members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.



PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DEWAN KOMISARIS

SURAT PERNYATAAN

TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,


Nama : Ahmad Perwira Mulia
Alamat : Jalan Dr. Mansur Baru Dalam 5 Medan 20155
Jabatan : Komisaris

Sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Saya tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan/atau anak perusahaan yang terkonsolidasi;
- Saya tidak memegang jabatan rangkap sebagai:
 - Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara;
 - Anggota Pengurus Partai Politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Saya tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Anggota Dewan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 April 2020


Ahmad Perwira Mulia



PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DEWAN KOMISARIS

SURAT PERNYATAAN

TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Herbert Timbo Parluhutan Siahaan
Alamat : Tanjung Barat Selatan No. 58 RT 007/001 Tanjung Barat Jagakarsa
Jabatan : Komisaris

Sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Saya tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan/atau anak perusahaan yang terkonsolidasi;
- Saya tidak memegang jabatan rangkap sebagai:
 - Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara;
 - Anggota Pengurus Partai Politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Saya tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Anggota Dewan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 April 2020


Herbert Timbo Parluhutan Siahaan



PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DEWAN KOMISARIS

SURAT PERNYATAAN

TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Irma Suryani
Alamat : Jalan Galur Sari IX/2 RT 014/007 Utan Kayu Utara Matraman
Jabatan : Komisaris

Sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Saya tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan/atau anak perusahaan yang terkonsolidasi;
- Saya tidak memegang jabatan rangkap sebagai:
 - Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara;
 - Anggota Pengurus Partai Politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Saya tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Anggota Dewan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 April 2020


Irma Suryani





DIREKSI

THE BOARD OF DIRECTORS

Direksi dengan itikad baik dan demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham, akan mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Pemenuhan hak dan pelaksanaan tugas, tanggung jawab serta wewenang Direksi diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata-mata. Direksi akan menghindari kondisi di mana tugas dan kepentingan Perseroan berbenturan atau mempunyai potensi benturan dengan kepentingan pribadi. Apabila hal demikian terjadi atau mungkin terjadi, maka anggota Direksi yang bersangkutan akan mengungkapkan benturan atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dan selanjutnya anggota Direksi yang bersangkutan tidak berwenang mewakili Perseroan dan digantikan oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan atau potensi benturan atau potensi benturan kepentingan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Apabila seluruh anggota Direksi mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan maka Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk Dewan Komisaris yang mewakili Perseroan.

Dalam hal penerapan GCG, salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perseroan. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan dan anak perusahaan/perusahaan patungan Perseroan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan. Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

The Board of Directors, in good faith and in the interests of the Company and Shareholders, manages the business and affairs of the Company while remaining to pay attention to the balance between the interests of all stakeholders and the Company's activities. The Board of Directors acts carefully, prudently and by taking into account various important aspects that are relevant in carrying out its duties. The fulfillment of the rights and implementation of the duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors are regulated in accordance with the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association.

The Board of Directors uses its authorities for the sole benefit of the Company. The Board avoids conditions where the duties and interests of the Company conflict or have a potential conflict with its personal interests. If such condition occurs or may occur, then the concerned member of the Board of Directors discloses the conflict or potential conflict of interest to the Board of Commissioners and the Board of Directors, and then the concerned member of the Board of Directors is not authorized to represent the Company and is replaced by another member of the Board of Directors who does not have a conflict or potential conflict of interest after obtaining the approval from the Board of Commissioners. If all members of the Board of Directors have a conflict or potential conflict of interest, then the authority to represent the Company belongs to the Board of Commissioners or individuals appointed by the Board of Commissioners.

In terms of GCG implementation, a member of the Board of Directors is appointed by the Board of Directors' Meeting as the person in charge of implementing and monitoring GCG in the Company. Members of the Board of Directors shall disclose information regarding their identity, main occupations, position as Commissioner in subsidiaries/joint ventures and/or other companies, including meetings attended in one financial year (both internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners), as well as salaries, facilities and/or other allowances received from the Company and its subsidiaries/joint ventures, to be included in the Annual Report. The Board of Directors shall report to the Company regarding ownership of shares by themselves and/or their families (wife/husband and children) in the Company and other companies, including any changes thereof.

KRITERIA DIREKSI

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Direksi. Namun demikian, untuk menjamin Direksi yang memiliki kinerja sesuai yang diharapkan, maka Perseroan menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Direksi yang sesuai kebutuhan.

Kriteria Direksi Perseroan di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi memiliki keahlian yang ditunjukkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang memadai di dalam industri kepelabuhanan atau yang relevan dengan industri kepelabuhanan;
2. Direksi memiliki keahlian khusus yang sangat diperlukan dan bermanfaat bagi Perseroan serta mampu untuk mengimplementasikannya sesuai kepentingan Perseroan;
3. Direksi memiliki integritas yang baik yang ditunjukkan dengan *track record* sebelumnya, seperti tidak pernah terdapat cacat hukum;
4. Direksi memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, jujur, berperilaku yang baik dan berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan;
5. Direksi memahami proses bisnis Perseroan;
6. Direksi memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang yang berlaku termasuk peraturan Perseroan dan arahan Pemegang Saham;
7. Direksi mampu mewakili Perseroan di hadapan publik, Pemegang Saham dan *Stakeholders* lainnya.

NOMINASI ANGGOTA DIREKSI

Nominasi dan pemilihan calon anggota Direksi berdasarkan arahan atau usulan dari Kementerian BUMN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

Di tahun 2020, komposisi Direksi Perseroan mengalami perubahan komposisi keanggotaan Direksi berdasarkan keputusan pemegang saham. Berikut disampaikan komposisi Direksi per 31 Desember 2020.

CRITERIA FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Company is fully aware that the Shareholders through the GMS have the full authority to appoint the Board of Directors. However, to ensure that the Board of Directors performs as expected, the Company establishes a policy on the criteria for members of the Board of Directors according to its needs.

The criteria for the Board of Directors of the Company include the following:

1. The Directors have expertise as shown by proper educational backgrounds and experiences in the ports industry or relevant to the ports industry;
2. The Directors have special expertise that is vital and beneficial to the Company and is capable of implementing it according to the interests of the Company;
3. The Directors have good integrity as evidenced by previous track records, such as never having any legal defects;
4. The Directors have good leadership qualities, are honest, well-behaved and highly dedicated to advancing and developing the Company;
5. The Directors understand the Company's business processes;
6. Directors are committed to comply with applicable laws and regulations, including the Company's regulations and the Shareholders' directives;
7. The Directors are capable of representing the Company before the public, Shareholders and other Stakeholders.

NOMINATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The nomination and selection of candidates for members of the Board of Directors are based on directions or recommendations from the Ministry of SOE in accordance with the prevailing laws and regulations.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2020, the Company's Board of Directors experienced several changes in its composition based on the shareholder's decision. Below is the composition of the Board of Directors as of 31 December 2020.





KRONOLOGIS PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DI SEPANJANG TAHUN 2020
CHRONOLOGY OF CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS
THROUGHOUT 2020

Periode 1 Januari – 22 Juni 2020 Period of 1 January – 22 Juni 2020	Periode 22 Juni – 30 Agustus 2020 Periode 22 Juni – 30 Agustus 2020	Periode 30 Agustus – 22 Oktober 2020 Periode 30 Agustus – 22 Oktober 2020	Periode 22 Oktober - 31 Desember 2020 Periode 22 Oktober - 31 Desember 2020	Keterangan Description
Dian Rachmawan (Direktur Utama) (President Director)				Dian Rachmawan tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi per tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I. Dian Rachmawan no longer served as member of the Board of Directors as of 22 June 2020 according to Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020 on the Termination, Change of Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
	Dani Rusli Utama (Direktur Utama) (President Director)	Dani Rusli Utama (Direktur Utama) (President Director)	Dani Rusli Utama (Direktur Utama) (President Director)	Dani Rusli menjabat dalam jajaran Direksi per tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I. Dani Rusli has been serving as member of the Board of Directors as of 22 June 2020 according to Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020 on the Termination, Change of Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
Syahputera Sembiring (Direktur Operasi & Komersial) (Director of Operations & Commercial)				Syahputera Sembiring tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi per tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I. Syahputera Sembiring no longer served as member of the Board of Directors as of 22 June 2020 according to Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020 on the Termination, Change of Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
	Ridwan Sani Siregar (Direktur Operasi & Komersial) (Director of Operations & Commercial)	Ridwan Sani Siregar (Direktur Operasi & Komersial) (Director of Operations & Commercial)	Ridwan Sani Siregar (Direktur Operasi & Komersial) (Director of Operations & Commercial)	Ridwan Sani Siregar menjabat dalam jajaran Direksi per tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I. Ridwan Sani Siregar has been serving as member of the Board of Directors as of 22 June 2020 according to Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020 on the Termination, Change of Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

KRONOLOGIS PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DI SEPANJANG TAHUN 2020
CHRONOLOGY OF CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS
THROUGHOUT 2020

Periode 1 Januari – 22 Juni 2020 Period of 1 January – 22 Juni 2020	Periode 22 Juni – 30 Agustus 2020 Periode 22 Juni – 30 Agustus 2020	Periode 30 Agustus – 22 Oktober 2020 Periode 30 Agustus – 22 Oktober 2020	Periode 22 Oktober - 31 Desember 2020 Periode 22 Oktober - 31 Desember 2020	Keterangan Description
Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik) (Director of Engineering)	Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik) (Director of Engineering)	Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik) (Director of Engineering)	Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik) (Director of Engineering)	
Ihsanuddin Usman (Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis) (Director of Business Transformation & Development)				Ihsanuddin Usman tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi per tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I. Ihsanuddin Usman no longer served as member of the Board of Directors as of 22 June 2020 according to Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020 on the Termination, Change of Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
	Prasetyo (Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis) (Director of Business Transformation & Development)	Prasetyo (Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis) (Director of Business Transformation & Development)	Prasetyo (Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis) (Director of Business Transformation & Development)	Prasetyo menjabat dalam jajaran Direksi per tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I. Prasetyo has been serving as member of the Board of Directors as of 22 June 2020 according to Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020 on the Termination, Change of Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
M. Hamied Wijaya (Direktur SDM) (Director of HR)				M. Hamied Wijaya tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi per tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I. M. Hamied Wijaya no longer served as member of the Board of Directors as of 22 June 2020 according to Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020 on the Termination, Change of Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).



KRONOLOGIS PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DI SEPANJANG TAHUN 2020
CHRONOLOGY OF CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS
THROUGHOUT 2020

Periode 1 Januari – 22 Juni 2020 Period of 1 January – 22 Juni 2020	Periode 22 Juni – 30 Agustus 2020 Periode 22 Juni – 30 Agustus 2020	Periode 30 Agustus – 22 Oktober 2020 Periode 30 Agustus – 22 Oktober 2020	Periode 22 Oktober - 31 Desember 2020 Periode 22 Oktober - 31 Desember 2020	Keterangan Description
	Henry Nardi (Direktur SDM Umum) Director of HR & General Affairs	& Henry Nardi (Direktur SDM Umum) Director of HR & General Affairs	& Henry Nardi (Direktur SDM Umum) Director of HR & General Affairs	Henry Naldi menjabat dalam jajaran Direksi per tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I. Henry Naldi has been serving as member of the Board of Directors as of 22 June 2020 according to Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020 on the Termination, Change of Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
	Henri Panggabean			<ul style="list-style-type: none"> Henri Panggabean menjabat dalam jajaran Direksi per tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I. Pada 30 Agustus 2020, Henri Panggabean meninggal dunia. Henri Panggabean served as member of the Board of Directors as of 22 June 2020 according to Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020 on the Termination, Change of Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). On 30 August 2020, Henri Panggabean passed away.
M. Nur Sodik (Direktur Keuangan) (Director of Finance)				M. Nur Sodik tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi per tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I. M. Nur Sodik no longer served as member of the Board of Directors as of 22 June 2020 according to Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020 on the Termination, Change of Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
			Roy Leonard (Direktur Keuangan) (Director of Finance)	Roy Leonard menjabat dalam jajaran Direksi per tanggal 22 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. SK-345/MBU/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020. Roy Leonard has been serving as member of the Board of Directors as of 22 October 2020 according to Decision Letter of the Minister of SOE in its authority as the GMS in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. SK-345/MBU/10/2020 of 22 October 2020.

**KOMPOSISI DIREKSI PELINDO 1
PER 31 DESEMBER 2020
COMPOSITION OF PELINDO 1 BOARD OF DIRECTORS
AS OF 31 DECEMBER 2020**

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Lulus Fit & Proper Test Passing Fit & Proper Test	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Term
Dani Rusli Utama	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 Decision Letter of the Minister of SOE No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020	v	22 Juni 2020 – RUPS Tahun 2025 22 June 2020 – the 2025 GMS	Ke-1 1st
Ridwan Siregar	Sani Direktur Operasional & Komersial Director of Operations & Commercial	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 Decision Letter of the Minister of SOE No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020	v	22 Juni 2020 – RUPS Tahun 2025 22 June 2020 – the 2025 GMS	Ke-1 1st
Hosadi Putra	Apriza Direktur Teknik Director of Engineering	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-288/MBU/11/2018 Decision Letter of the Minister of SOE No. SK-288/MBU/11/2018	v	5 November 2018 – RUPS 2023 5 November 2018 - the 2023 GMS	Ke-1 1st
Prasetyo	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Director of Business Transformation and Development	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 Decision Letter of the Minister of SOE No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020	v	22 Juni 2020 – RUPS Tahun 2025 22 June 2020 – the 2025 GMS	Ke-1 1st
Henry Naldi	Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Director of Human Resources & General Affairs	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 Decision Letter of the Minister of SOE No. SK-213/MBU/06/2020 of 22 June 2020	v	22 Juni 2020 – RUPS Tahun 2025 22 June 2020 – the 2025 GMS	Ke-1 1st
Roy Leonard	Direktur Keuangan Director of Finance	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-345/MBU/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 Decision Letter of the Minister of SOE No. SK-345/MBU/10/2020 of 22 October 2020	v	22 Oktober 2020 – RUPS Tahun 2025 22 October 2020 - the 2025 GMS	Ke-1 1st

MASA JABATAN DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan Anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DIREKSI

Mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan paling lama 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Direksi Perseroan memiliki Pedoman Kerja (*Board Manual*) yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya yang selaras dengan praktik-praktik GCG. Dalam *Board Manual* Direksi diatur tata laksana kerja

THE BOARD OF DIRECTORS' TERM OF OFFICE

According to the Company's Articles of Association, the term of office of members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years and allowed for reappointment for 1 (one) term of office. The General Meeting of Shareholders may terminate a Member of the Board of Directors at any time by mentioning the reasons.

POLICIES REGARDING RESIGNATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Referring to the Company's Articles of Association, a member of the Board of Directors has the right to resign from his position by notifying in writing of his intentions to the Company with a copy sent to the Shareholders, the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company no later than 30 days prior to the date of his resignation.

THE BOARD OF DIRECTORS' MANUAL

The Company's Board of Directors has a Board Manual used as a reference in implementing their duties, responsibilities and authorities in line with GCG practices. The Manual of the Board of Directors regulates the work procedures of the Board



Dewan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Board of Director Charter Pelindo 1 disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG .

Isi dari *Board Manual* adalah:

Pedoman dan tata kerja Direksi menjelaskan tentang pola hubungan kerja Direksi dalam melaksanakan tugas, agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, efektif, dan efisien dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan yang tetap mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengatur tata kerja Direksi.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 11, Direksi memiliki tugas, wewenang dan Kewajiban, yaitu:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
 - b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
 - c. Mengatur penyerahan kekuasaan kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;

of Directors and explains the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-understand and in consistent manner, which can be used as a reference for the members of the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's Vision and Mission.

The Board of Director Charter of Pelindo 1 is prepared based on the principles of corporate laws, the provisions of the Articles of Association, the prevailing laws and regulations, directions of the Shareholders and the best practices of Good Corporate Governance.

Content of the Board Manual can be described as follows:

Guidelines and work procedures for the Board of Directors explain the pattern of work relationships of the Board of Directors in implementing their duties, in order to create a professional, transparent, effective, and efficient management of the Company by upholding integrity and honesty in carrying out the Company's business activities while remaining to refer to the prevailing laws and regulations, the Articles of Association and the directions of the Shareholders as stipulated in the General Meeting of Shareholders (GMS) which govern the work procedures of the Board of Directors.

DUTIES, AUTHORITIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Articles of Association of the Company, Article 11, states that the Board of Directors has the following duties, authorities and obligations:

1. The Board of Directors is in charge of taking all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purpose and objectives of the Company, as well as representing the Company both in and outside the court regarding all matters and all events with restrictions as stipulated in the laws and regulations, the Articles of Association and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.
2. In carrying out its duties, the Board of Directors has the authorities to:
 - a. Establish the Company's management policies;
 - b. Arrange the transfer of authorities of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or to represent the Company in and outside the court;
 - c. Arrange the transfer of authorities to one or several Company employees either individually or collectively to represent the Company in and outside the court;

- d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun dan jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;
 - g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun kepemilikan kekayaan Perseroan, mengingat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Kewajiban Direksi, yaitu:
 - a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan Pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - d. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
 - e. Membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perseroan;
 - f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
 - d. Regulate provisions concerning the employment in the Company including the determination of salaries, pensions or retirement plans and other incomes for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations, where the stipulation of salaries, pensions and retirement plans and other incomes for workers that exceed the Company's obligations as stipulated by laws and regulations, must obtain prior approval from the GMS;
 - e. Appoint and terminate Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations;
 - f. Appoint and terminate the Corporate Secretary;
 - g. Take all other actions and deeds on the management and ownership of the Company's assets, considering the Company with other parties and/or other parties with the Company, as well as represent the Company in and outside the court regarding all matters and all events with restrictions as regulated in the laws and regulations, the Articles of Association and/or the General Meeting of Shareholders Decisions.
3. Obligations of the Board of Directors are:
 - a. Striving for and ensuring the implementation of the business and activities of the Company to be in accordance with the Company's purpose and objectives and business activities;
 - b. Preparing in due time the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Budget and changes in them as well as submitting them to the Board of Commissioners and Shareholders to obtain the Ratification of the General Meeting of Shareholders;
 - c. Providing elaborations to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget;
 - d. Creating the shareholder register, special register, minutes of the GMS and minutes of the Board of Directors meetings;
 - e. Preparing annual reports as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as referred to in the Law on Company Documents;
 - f. Preparing Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit them to a Public Accountant for audits;





- g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;
 - h. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
 - i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegagn Saham Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi hukum dan HAM.
 - k. Memelihara daftar pemegang saham, daftar khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya;
 - l. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan Daftar Pemegang Saham, Daftar khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
 - m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan penyimpanan dan pengawasan;
 - n. Memberikan Laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporannya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
 - o. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
 - p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
 - q. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi Perseroan;
 - r. Menjalakan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Unum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - s. Memenuhi permintaan dan pengaksesan data dan dokumen Perseroan yang disampaikan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- g. Submitting Annual Reports including Financial Reports to the GMS for approval and ratification, as well as reports on the rights of the Company which are not recorded in the books, among others as a result of the write-off of accounts receivable;
 - h. Providing elaborations to the GMS regarding the Annual Reports;
 - i. Delivering Balance Sheets and Profit and Loss Reports which have been ratified by the GMS to the Minister in charge of Laws and Human Rights in accordance with the provisions of laws and regulations;
 - j. Delivering reports on changes in the composition of Shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Minister in charge of Laws and Human Rights;
 - k. Maintaining the shareholder register, special register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of the Board of Commissioners Meetings, Minutes of the Board of Directors Meetings, Annual Reports and the Company's financial and other documents;
 - l. Keeping at the Company's domicile the Shareholder Register, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of the Board of Commissioners Meetings and Minutes of the Board of Directors Meetings, Annual Reports and the Company's financial and other documents;
 - m. Developing an accounting system in accordance with the Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, record keeping and supervision;
 - n. Providing periodic reports in manners and time as stipulated by applicable regulations, as well as reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders;
 - o. Setting up an organizational structure of the Company including all specifications and duties;
 - p. Providing explanations on all matters that are inquired or requested by the members of the Board of Commissioners and the Shareholders;
 - q. Preparing and establishing a blue print of the Company's organizations;
 - r. Carrying out other obligations based on provisions stipulated in the Articles of Association and those stipulated by the General Meeting of Shareholders in accordance with laws and regulations;
 - s. Responding to requests for and access to the Company's data and documents submitted by the Dichromatic Series A Shareholders.

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Perseroan melakukan pembagian terkait ruang lingkup masing-masing Direksi, yaitu:

DIVISION OF DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out the duties and responsibilities of the Board of Directors, the Company sets up divisions related to the scope of each member of the Board of Directors, namely:

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Direktur Utama President Director	<ol style="list-style-type: none"> Untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan menerima petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang kebijakan Umum untuk menjalankan tugas pokok Perusahaan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melaksanakan tugas-tugas pokok Perusahaan. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang dilakukan oleh para Direktur. <ol style="list-style-type: none"> For and on behalf of the Board of Directors, as well as representing the Company, receiving instructions from and be responsible to the General Meeting of Shareholders (GMS) regarding general policies for carrying out the Company's main duties and other duties as stipulated by the General Meeting of Shareholders (GMS). Carrying out the main duties of the Company. Controlling the implementation of the Board of Directors' policies carried out by the Directors.
Direktur Operasi & Komersial Director of Operations & Commercial	<p>Membina dan menyelenggarakan fungsi pemasaran, analisis pangsa pasar dan riset pasar, kerja sama dengan mitra strategis dan mitra bisnis, pengembangan bisnis logistik, bisnis properti dan bisnis maritim, pelayanan terminal, penyiapan armada, teknologi informasi, pembangunan dan pengembangan aplikasi front-end serta pengelolaan terminal petikemas perintis.</p> <p>Developing and organizing ports service equipment and facilities, quality management systems, occupational health safety management, environmental management, implementation of management system compliance with regulations, as well as managing and monitoring the acceleration of strategic projects according to the demands of the company's business development.</p>
Direktur Teknik Director of Engineering	<p>Membina dan menyelenggarakan peralatan dan fasilitas jasa kepelabuhanan, sistem manajemen mutu, manajemen keselamatan kesehatan kerja, manajemen lingkungan hidup, implementasi kepatuhan sistem manajemen terhadap regulasi, serta mengelola dan memonitoring percepatan proyek-proyek strategis sesuai tuntutan pengembangan bisnis perusahaan.</p> <p>Developing and organizing port service equipment and facilities, quality management systems, occupational health safety management, environmental management, implementation of management system compliance with regulations, as well as managing and monitoring the acceleration of strategic projects according to the demands of the company's business development.</p>
Direktur Transformasi & Pengembangan Bisnis Director of Business Transformation & Development	<p>Membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pengembangan bisnis potensial, pengelolaan pengembangan bisnis di pelabuhan strategis, perencanaan bisnis di Kawasan Selat Malaka, perencanaan program inisiasi perubahan perilaku pegawai untuk menghadapi transformasi bisnis internal maupun eksternal, perencanaan kerja sama proyek pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan Kuala Tanjung dengan mitra strategis.</p> <p>Developing and implementing the functions of potential business planning and development, management of business development in strategic ports, business plannings in the Malacca Strait Area, plannings on employee behavior change initiation programs to anticipate internal and external business transformations, plannings on joint development projects and operations of the port of Kuala Tanjung with strategic partners.</p>
Direktur SDM Director of HR	<p>Membina, merencanakan dan menyelenggarakan fungsi manajemen strategis sumber daya manusia dan organisasi, umum, Pendidikan dan latihan pegawai, pengesahan administrasi kepegawaian, kemitraan dan bina lingkungan, serta hukum perusahaan baik litigasi maupun non-litigasi sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.</p> <p>Developing, planning and implementing strategic management functions of human and organizational resources, general functions, employee education and training, legalization of personnel administration, partnerships and environmental development, as well as corporate laws both litigation and non-litigation in accordance with applicable policies and regulations.</p>
Direktur Keuangan Director of Finance	<p>Membina dan menyelenggarakan kegiatan divisi akuntansi, manajemen, pembendaharaan perusahaan, akuntansi keuangan, manajemen aset, unit pusat layanan serta pengelolaan anak perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan Perusahaan.</p> <p>Developing and organizing the activities of the divisions of accounting, management, corporate treasury, financial accounting, assets management, service center units and management of subsidiaries in accordance with the business policies established by the Company.</p>

PERBUATAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSERTUJUAN DEWAN KOMISARIS

- Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka Pendek;
- Mengadakan kerja sama dengan baclan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build on Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;

THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIONS REQUIRING APPROVAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

- Putting up fixed assets required as collaterals to make short-term credit withdrawals;
- Cooperating with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, asset leasing, Operational Cooperation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Own Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO) and other collaborations with a certain value or period of time determined by the GMS;



3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
6. Penetapan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN BAGI DIREKSI BARU

Perseroan memiliki Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru dengan tujuan agar Direksi Perseroan yang baru dapat bekerja selaras dengan organ Perseroan yang lain. Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke cabang-cabang atau program lainnya. Tanggung jawab pengadaan program pengenalan ini berada pada Direktur Utama.

Apabila Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab program pengenalan berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang ada. Perseroan akan secara teratur mengadakan program pembelajaran yang berkelanjutan bagi Direksi dengan agenda dan materi sesuai kebutuhan Direksi.

Program pengenalan yang diberikan kepada anggota Direksi yang baru antara lain akan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip dan implementasi *Good Corporate Governance*;
2. Gambaran Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Berbagai Peraturan perundang-undangan yang mengikat Perseroan serta kebijakan Perseroan.

3. Accepting or providing medium/long-term loans, with the exception of loans (debts or receivables) arising from business transactions and loans granted to the Company's subsidiaries provided that loans to the Company's subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;
4. Writing-off bad accounts receivable and dead stock inventory;
5. Disposing of movable fixed assets with an economic age that commonly applies in the industry up to 5 (five) years;
6. Establishing organizational structure down to 1 (one) level below the Board of Directors.

COMPANY INDUCTION PROGRAM FOR NEW MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company has the Company Induction Program for New Members of the Board of Directors with the aim that the new Directors of the Company are able to work in harmony with the Company's other organs. The provided induction program may be in the form of presentations, meetings, visits to the Company's facilities, visits to branches or other programs. The responsibility for organizing these introductory programs lies in the President Director.

In the event that the President Director is unavailable, the responsibility for the induction program lies in the President Commissioner or available members of the Board of Directors. The Company will regularly arrange continuous learning programs for the Board of Directors with agenda and materials according to the needs of the Board of Directors.

The induction program given to new members of the Board of Directors includes the following matters:

1. Principles and implementation of *Good Corporate Governance*;
2. Overview of the Company relating to the objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information relating to delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies as well as the Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
5. Various laws and regulations that bind the Company as well as the Company's policies.

Di tahun 2020, program pengenalan Perseroan kepada Direksi baru dilakukan pada tanggal 30 Juni 2020 melalui *Zoom Video Conference* di Grha Pelindo Satu, Belawan, Medan. Program ini diikuti oleh seluruh anggota Direksi.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SELAMA TAHUN 2020

Laporan singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat dijelaskan melalui berbagai keputusan Direksi, baik di bidang operasional, keuangan, maupun beberapa penunjang usaha melalui perangkat kebijakan berupa Keputusan Direksi, Peraturan Direksi dan Surat Perintah/Instruksi Direksi.

In 2020, the Company's introduction program to the Board of Directors on June 30, 2020 via Zoom Video Conference at Grha Pelindo Satu, Belawan, Medan. This program followed by all members of the Board of Directors.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2020

Brief reports on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors can be explained through various decisions of the Board of Directors in the operational, financial, and several business support sectors through policy instruments in the form of the Board of Directors' Decrees, Regulations and Warrants/Instructions.

Uraian Description	Jumlah Number
Keputusan Direksi The Board of Directors' Decrees	11
Peraturan Direksi The Board of Directors' Regulations	25
Surat Perintah Direksi The Board of Directors' Warrants	318

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Pelindo 1 tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh organ pendukung Direksi, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal, serta satuan kerja yang dipimpin oleh *Senior Vice President/Vice President/General Manager* serta organ fungsional lainnya.

ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Pelindo 1 does not have any committee under the Board of Directors. The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors is supported by the supporting organs of the Board of Directors, namely the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit, as well as a work units led by the *Senior Vice President/Vice President/General Manager* and other functional organs.





TRANSPARANSI INFORMASI ASPEK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

INFORMATION TRANSPARENCY ON THE ASPECT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

KEBIJAKAN TERKAIT HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Penerapan Praktik Tata Kelola yang Baik pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang ditetapkan oleh Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. UM.50/40/17/PI-19-TU tanggal 22 November 2019. Terciptanya hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ dapat bekerja sesuai fungsi masing-masing dengan efektif dan efisien, sehingga mendukung secara kokoh kinerja Perseroan agar dapat tumbuh kuat dan berkelanjutan.

Dalam Pedoman tersebut dijelaskan bahwa Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan pertemuan koordinatif secara teratur dengan Direksi untuk membicarakan masalah bisnis yang relevan. Di luar itu, Komisaris berhak meminta dilaksanakannya pertemuan dengan Direksi manakala situasi dianggap memerlukan.

Dalam setiap pertemuan apapun, informasi dan data yang penting untuk pemahaman Dewan Komisaris akan diberikan secara tertulis sebelum pertemuan untuk menjamin tersedianya waktu bagi Dewan Komisaris dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi akan membuat ringkasan bahan tersebut sepanjang tidak mengurangi esensi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Dewan Komisaris mempunyai akses penuh terhadap Direksi, termasuk terhadap informasi atau dokumen yang relevan yang disimpan oleh Direksi. Pelaksanaan hak Dewan Komisaris ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak boleh mengganggu pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan.

ASSESSMENT PENERAPAN GCG UNTUK ASPEK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai organ utama dalam Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perseroan. *Assessment* atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG yang berlaku untuk BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut, yaitu Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan

POLICY REGARDING WORK RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is regulated in the Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance Practices in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as stipulated by the Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. UM.50/40/17/PI-19-TU of 22 November 2019. The establishment of good work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is one of the most important things so that each organ is able to perform according to its respective functions effectively and efficient, thus solidly supporting the Company's performance to grow strong and sustainably.

The Guidelines elaborates that the Board of Commissioners may regularly organize coordinative meetings with the Board of Directors to discuss relevant business issues. Apart from that, the Commissioner has the right to request a meeting with the Board of Directors when the situation is deemed necessary.

In any meeting, information and data that are important for the understanding of the Board of Commissioners will be provided in writing prior to the meeting to ensure that Board of Commissioners has ample time to understand the issues to be discussed. If necessary, the Board of Directors will make a summary of the materials as long as it does not reduce the essence of information that can influence decision making.

The Board of Commissioners has full access to the Board of Directors, including to relevant information or documents kept by the Board of Directors. The exercise of the rights of the Board of Commissioners is carried out properly so as not to interfere with the implementation of the Company's operational activities.

ASSESSMENT ON THE GCG IMPLEMENTATION IN THE ASPECT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

As the main organs in the Company, the Board of Commissioners and the Board of Directors have a central role in the movements of the Company's growth. Assessment on these two organs is a must, especially because the Company is a State-Owned Enterprise (SOE) which is directed to implement the GCG principles that apply to SOEs as well as to assess the implementation, namely by the Copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 of 6 June 2012 on Indicators/Parameters for

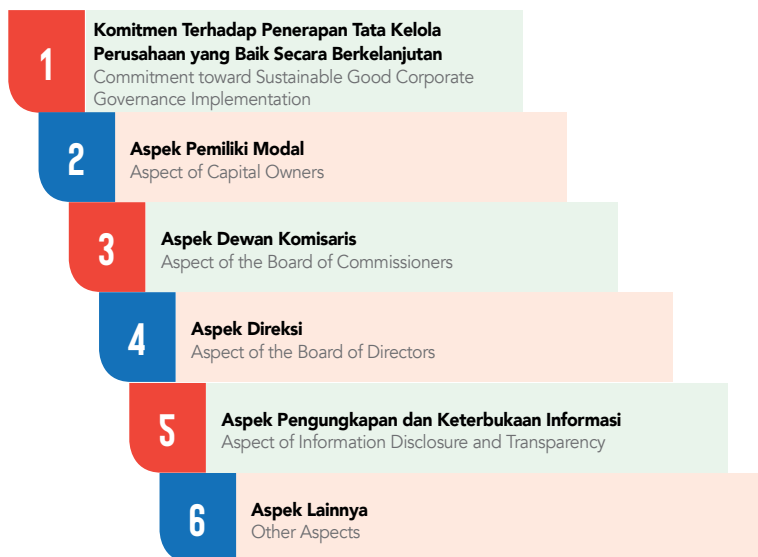
Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan di atas.

Enam aspek tersebut adalah aspek komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, aspek pemilik modal, aspek dewan komisaris, aspek direksi, aspek pengungkapan dan keterbukaan informasi, dan aspek lainnya.

Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The method of assessment and evaluation is by using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with a predetermined weight as stipulated in the above Copy of the Decree.

These six aspects are namely aspect of commitment toward the implementation of sustainable good corporate governance, aspect of capital owners, aspects of the board of commissioners, aspects of the board of directors, aspect of disclosure of information and transparency, and other aspects.

6 (ENAM) ASPEK PENGUKURAN PENERAPAN GCG 6 (SIX) ASPECTS OF MEASUREMENT ON GCG IMPLEMENTATION



Sejalan dengan *assessment* yang bertujuan memberikan evaluasi dan rekomendasi, Manajemen Perusahaan diharapkan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang muncul dari proses *assessment*. Untuk *assessment* penerapan GCG tahun buku 2020, hasil *assessment* memberikan predikat "Sangat Baik" dengan skor mencapai 95,63. Khusus untuk aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, masing-masing meraih skor perolehan 98,69 dan 98,16.

In line with the *assessment*, which aims to provide evaluation and recommendations, the Company's Management is expected to follow up on recommendations arising from the *assessment* process. Regarding the *assessment* on GCG implementation in financial year of 2020, the results of the *assessment* gave the category of "Excellent" with a score of 95.63. In particular, the aspects of the Board of Commissioners/ Board of Supervisors and the Board of Directors achieved the score of 98.69 and 98.16, respectively.



Hasil Assessment Penerapan GCG Aspek Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2020 adalah sebagai berikut:

The Assessment results for the GCG Implementation in the Aspect of the Board of Commissioners and the Board of Directors in Financial Year of 2020 are as follows:

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	Pencapaian Tahun Buku 2020 Achievements in 2020	
		Nilai Achievements in 2020	Pencapaian (%) Achievement (%)
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Board of Supervisors	35,00	34,54	98,69
Direksi Board of Directors	35,00	34,35	98,16

Keterangan:

0-50 : Tidak Baik I (Bad) 50-60 : Kurang Baik I (Poor) 60-75 : Cukup Baik I (Fair) 75-85 : Baik I (Good) 85-100 : Sangat Baik I (Excellent)

Rekomendasi hasil assessment penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2020, sebagai berikut:

Assessment recommendations on the GCG implementation in the aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors financial year of 2020 are as follows:

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 Assessment Recommendations on the GCG Implementation in Financial Year of 2020
Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Board of Commissioners/Board of Supervisors	
1	Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. The Board of Commissioners carries out training/learning programs on a continuous basis.
2	Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. The Board of Commissioners divides duties and stipulates necessary factors to support the duty performance of the Board of Commissioners.
3	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. The Board of Commissioners approves the Company's LTP and WPB drafts proposed by the Board of Directors.
4	Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The Board of Commissioners provides direction to the Board of Directors regarding the implementation of the Company's plans and policies.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The Board of Commissioners supervises the Board of Directors regarding the implementation of the Company's plans and policies.
6	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. The Board of Commissioners supervises the implementation of policies regarding the management of subsidiaries and joint ventures.
7	Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolejal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. The Board of Commissioners plays a role in the nomination of the members of the Board of Directors, assesses the performance of the Board of Directors (individual and collegial) and proposes performance incentives/tantiem according to the existing provisions and taking into account the performance of the Board of Directors.
8	Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. The Board of Commissioners takes actions toward the potential conflicts of interest involving itself.
9	Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. The Board of Commissioners monitors and ensures that the GCG principles are implemented effectively and sustainably.
10	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. The Board of Commissioners organizes effective meetings of the Board of Commissioners/the Board of Supervisors and attends these meetings in accordance with the provisions of laws.
11	Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a Secretary of the Board of Commissioners to support secretarial duties of the Board of Commissioners.
12	Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif. The Board of Commissioners has effective Board of Commissioners Committees.

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 Assessment Recommendations on the GCG Implementation in Financial Year of 2020
Aspek Direksi Aspect of the Board of Directors	
1	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. The Board of Directors carries out training/learning programs on a continuous basis.
2	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. The Board of Directors divides duties/functions, authorities and responsibilities distinctly.
3	Direksi menyusun perencanaan perusahaan. The Board of Directors creates plannings for the Company.
4	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan. The Board of Directors plays a role in the fulfillment of the Company's performance targets.
5	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The Board of Directors takes financial and operational control over the implementation of the Company's plan and policies.
6	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar. The Board of Directors manages the Company in accordance with the prevailing laws and regulations and the Articles of Association.
7	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan Stakeholders. The Board of Directors makes value-added relationships for the Company and Stakeholders.
8	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi. The Board of Directors monitors and manages potential conflicts of interest among the members of the Board of Directors and its subordinate management.
9	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu. The Board of Directors ensures that the Company implements transparency of information and communication in compliance with the prevailing laws and regulations and that the disclosure of information to the Board of Commissioners is on time.
10	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. The Board of Directors organizes meetings of the Board of Directors and attends the meetings of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the laws.
11	Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. The Board of Directors takes quality and effective internal control.
12	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif. The Board of Directors performs quality and effective functions of the Corporate Secretary.
13	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. The Board of Directors organizes the Annual GMS and other GMS in accordance with laws and regulations.

Rekomendasi hasil assessment penerapan GCG untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2019 dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Assessment recommendations on the GCG implementation in the aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors in financial year of 2020 and the follow-ups carried out by the Company in 2020 are as follows:

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 Assessment Recommendations on the GCG Implementation in Financial Year of 2020
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Board of Supervisors	
1	Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. The Board of Commissioners carries out training/learning programs on a continuous basis.
2	Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. The Board of Commissioners divides duties and stipulates necessary factors to support the duty performance of the Board of Commissioners.
3	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. The Board of Commissioners approves the Company's LTP and WPB drafts proposed by the Board of Directors.
4	Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The Board of Commissioners provides direction to the Board of Directors regarding the implementation of the Company's plans and policies.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The Board of Commissioners supervises the Board of Directors regarding the implementation of the Company's plans and policies.
6	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. The Board of Commissioners supervises the implementation of policies regarding the management of subsidiaries and joint ventures.





No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 Assessment Recommendations on the GCG Implementation in Financial Year of 2020
7	Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. The Board of Commissioners plays a role in the nomination of the members of the Board of Directors, assesses the performance of the Board of Directors (individual and collegial) and proposes performance incentives/tantiem according to the existing provisions and taking into account the performance of the Board of Directors.
8	Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. The Board of Commissioners takes actions toward the potential conflicts of interest involving itself.
9	Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. The Board of Commissioners monitors and ensures that the GCG principles are implemented effectively and sustainably.
10	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. The Board of Commissioners organizes effective meetings of the Board of Commissioners/the Board of Supervisors and attends these meetings in accordance with the provisions of laws.
11	Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a Secretary of the Board of Commissioners to support secretarial duties of the Board of Commissioners.
12	Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif. The Board of Commissioners has effective Board of Commissioners Committees.
Aspek Direksi Aspect of the Board of Directors	
1	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. The Board of Directors carries out training/learning programs on a continuous basis.
2	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. The Board of Directors divides duties/functions, authorities and responsibilities distinctly.
3	Direksi menyusun perencanaan perusahaan. The Board of Directors creates plannings for the Company.
4	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan. The Board of Directors plays a role in the fulfillment of the Company's performance targets.
5	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. The Board of Directors takes financial and operational control over the implementation of the Company's plan and policies.
6	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar. The Board of Directors manages the Company in accordance with the prevailing laws and regulations and the Articles of Association.
7	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan Stakeholders. The Board of Directors makes value-added relationships for the Company and Stakeholders.
8	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi. The Board of Directors monitors and manages potential conflicts of interest among the members of the Board of Directors and its subordinate management.
9	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu. The Board of Directors ensures that the Company implements transparency of information and communication in compliance with the prevailing laws and regulations and that the disclosure of information to the Board of Commissioners is on time.
10	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. The Board of Directors organizes meetings of the Board of Directors and attends the meetings of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of laws.
11	Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. The Board of Directors takes quality and effective internal control.
12	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif. The Board of Directors performs quality and effective functions of the Corporate Secretary.
13	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. The Board of Directors organizes the Annual GMS and other GMS in accordance with laws and regulations.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators/KPI*) Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar serta amanat Pemegang Saham. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi KPI kepada para Pemegang Saham/Menteri.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris baik secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris baik selaku Dewan Komisaris secara kelompok maupun individual merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria kinerja Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris berupa KPI, selain itu kriteria evaluasi kinerja individu anggota Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Kehadiran dalam rapat-rapat Dewan Komisaris maupun Komite;
2. Kontribusi dalam proses pengambilan keputusan;
3. Keterlibatan dalam penugasan tertentu;
4. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan;
5. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan, misalnya mengenai benturan kepentingan.

PERFORMANCE ASSESSMENT FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

PERFORMANCE ASSESSMENT FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The performance of the Board of Commissioners is evaluated annually by the Shareholders through the GMS. The Board of Commissioners' performance is evaluated based on the Key Performance Indicators of the Board of Commissioners stipulated by the GMS based on the suggestions of the Board of Commissioners in question.

Key Performance Indicators are an assessment measure on the performance success of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in supervising and providing advices in accordance with the provisions of laws and regulations and/or the Articles of Association as well as the mandate of the Shareholders. The Board of Commissioners is obliged to submit quarterly reports on the progress of the realization of the Key Performance Indicators to the Shareholders/Minister(s).

The evaluation results on the performance of the Board of Commissioners in overall and of each individual member are an integral part of the compensation and incentives scheme for the Board of Commissioners. The evaluation results on the performance of the Board of Commissioners both collectively and individually are a means of assessing and increasing the effectiveness of the Board of Commissioners.

The General Meeting of Shareholders stipulates the performance criteria for the Board of Commissioners and its members in the form of KPI. In addition to that, the criteria in the individual performance evaluation of the members of the Board of Commissioners include:

1. Attendances at the meetings of the Board of Commissioners and its Committees;
2. Contributions in decision-making processes;
3. Participations in certain assignments;
4. Commitment to advancing the Company's interests;
5. Compliance with the prevailing laws and regulations as well as the Company's policies, for example regarding conflicts of interest.





KEY PERFORMANCE INDICATOR DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020
KEY PERFORMANCE INDICATORS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2020

No.	Perspektif Perspectives	Indikator Indicators	Output Indicators	Target Targets	Bobot (%) Weight (%)	Target (%) Target (%)
I Proses Perencanaan Planning Processes					30	30
1		Pelaksanaan Pembahasan Audit KAP atas Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) Tahun Buku 2019. Discussion on the PAF Audits on the Financial Statements (<i>Audited</i>) for the Financial Year of 2019.	Terlaksananya Pembahasan Audit KAP atas Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) Tahun Buku 2019 antara Direksi, Dewan Komisaris dan KAP. Discussion on the PAF Audits on the Financial Statements (<i>Audited</i>) for the Financial Year of 2019 being conducted by the Board of Directors, the Board of Commissioners and PAF.	Selambat-lambatnya Februari 2020. At the latest on February 2020.	5	5
2		Penyampaian Pendapat dan Saran Dewan Komisaris pada RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019. Submission of the Board of Commissioners' Opinions and Suggestions at the GMS for Ratification of the Financial Statements for the Financial Year of 2019.	Tersusunnya Pendapat dan Saran Dewan Komisaris pada RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019. The Board of Commissioners' Opinions and Suggestions at the GMS for Ratification of the Financial Statements for the Financial Year of 2019 being formed.	Selambat-lambatnya Mei 2020. At the latest on May 2020.	5	5
3		Pemberian Aspirasi Dewan Komisaris (<i>Commissioner's Aspiration</i>) RKAP Tahun 2021. (<i>Commissioner's Aspiration</i>) RKAP Tahun 2021 Provision of the Board of Commissioners' Aspirations for the 2021 WPB.	Terlaksananya Pemberian Aspirasi Dewan Komisaris (<i>Commissioner's Aspiration</i>) RKAP Tahun 2021. The Board of Commissioners' Aspirations for the 2021 WPB being provided.	Selambat-lambatnya Oktober 2020. At the latest on October 2020.	5	5
4		Pelaksanaan Pembahasan Usulan RKAP dan RKA PKBL Tahun 2021. Discussion on the 2021 WPB and WPB for PKBL Proposals.	Terlaksananya Pembahasan Usulan RKAP dan RKA PKBL Tahun 2021. Discussion on the 2021 WPB and WPB for PKBL Proposals being conducted.	Selambat-lambatnya Oktober 2020. At the latest on October 2020.	5	5
5		Penyampaian Pendapat dan Saran Dewan Komisaris pada RUPS RKAP Tahun 2021. Submission of the Board of Commissioners' Opinions and Suggestions at the GMS for the 2021 WPB.	Tersusunnya Pendapat dan Saran Dewan Komisaris pada RUPS RKAP Tahun 2021. The Board of Commissioners' Opinions and Suggestions at the GMS for the 2021 WPB being formed.	Selambat-lambatnya Januari 2021. At the latest on January 2021.	5	5
6		Menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun Anggaran 2021. Preparing the Work Plan of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2021.	Tersusunnya Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun Anggaran 2021. The Work Plan of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2021 being prepared.	Selambat-lambatnya Oktober 2020. At the latest on October 2020.	5	5
II Proses Pelaksanaan Usaha Business Impementation Processes					40	40
1		Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris atas Perbuatan-Perbuatan Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Written Approvals from the Board of Commissioners for the Actions of the Board of Directors, in accordance with the Articles of Association of the Company in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).	Jumlah Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris atas Perbuatan-Perbuatan Direksi yang Diberikan Tepat Waktu. Number of Written Approvals from the Board of Commissioners for Actions of the Board of Directors Provided on Time.	Surat mengenai Persetujuan/ Penolakan Tertulis diterbitkan paling lambat 7 hari kalender sejak dokumen lengkap diterima oleh Dewan Komisaris. Letters regarding Written Approvals/ Rejections are issued no later than 7 calendar days after the complete documents are received by the Board of Commissioners.	5	5

KEY PERFORMANCE INDICATOR DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020
KEY PERFORMANCE INDICATORS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2020

No.	Perspektif Perspectives	Indikator Indicators	Output Indicators	Target Targets	Bobot (%) Weight (%)	Target (%) Target (%)
2		Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Perbuatan-Perbuatan Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Letters regarding Written Approvals/ Rejections are issued no later than 7 calendar days after the complete documents are received by the Board of Commissioners.	Jumlah Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Perbuatan-Perbuatan Direksi yang Diberikan Tepat Waktu. Number of Written Responses from the Board of Directors Provided on Time.	Surat mengenai Persetujuan/ Penolakan Tertulis diterbitkan paling lambat 7 hari kalender sejak dokumen lengkap diterima oleh Dewan Komisaris. Letters regarding Written Approvals/ Rejections are issued no later than 7 calendar days after the complete documents are received by the Board of Commissioners.	5	5
3		Pelaksanaan Rapat Internal Dewan Komisaris Sekurang-kurangnya Sekali dalam Sebulan. Organization of Internal Meetings of the Board of Commissioners at least once a month.	Jumlah Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris yang Dihasilkan Sekurang-kurangnya Sekali dalam Sebulan. Number of Minutes of Internal Meetings of the Board of Commissioners Made at Least Once A Month.	Minimal 12 dokumen. At a minimum of 12 documents.	10	10
4		Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris Sekurang-kurangnya Sekali dalam Sebulan. Organization of Joint Meetings of the Board of Commissioners at least once a month.	Jumlah Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris yang Dihasilkan Sekurang-kurangnya Sekali dalam Sebulan. Number of Minutes of Joint Meetings of the Board of Commissioners Made at Least Once A Month.	Minimal 12 dokumen. At a minimum of 12 documents.	10	10
III Proses Monitoring & Controlling Monitoring & Controlling Processes						
1		Penyampaian Pendapat dan Saran Dewan Komisaris Kepada Pemegang Saham atas Laporan Kinerja Triwulanan. Submission of the Board of Commissioners' Opinions and Suggestions to the Shareholders on Quarterly Performance Reports.	Tersusunnya Pendapat dan Saran atas Laporan Kinerja Triwulan I, II dan III. Opinions and Suggestions on Performance Reports in Quarter I, II and III being formed.	Pendapat dan Saran Dewan Komisaris sebanyak 3 dokumen. The Board of Commissioners' Opinions and Suggestions as little as 3 documents.	4	4
2		Penyampaian Pendapat dan Saran Dewan Komisaris Kepada Pemegang Saham atas Laporan Kinerja Tahunan. Submission of the Board of Commissioners' Opinions and Suggestions to the Shareholders on Annual Performance Reports.	Tersusunnya Pendapat dan Saran atas Laporan Kinerja Tahunan. Opinions and Suggestions on Annual Performance Reports being formed.	Pendapat dan Saran Dewan Komisaris sebanyak 1 dokumen. The Board of Commissioners' Opinions and Suggestions as little as 1 document.	4	4
3		Penyampaian Laporan Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Pengendalian Intern Perusahaan (Internal Control) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Submission of the Board of Commissioners' Evaluation Reports on the Company's Internal Control in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).	Tersusunnya Laporan Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Pengendalian Intern Perusahaan (Internal Control) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). The Board of Commissioners' Evaluation Reports on the Company's Internal Control in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) being prepared.	Laporan Evaluasi Dewan Komisaris terhadap Pengendalian Intern Perusahaan (Internal Control) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebanyak 2 dokumen. The Board of Commissioners' Evaluation Reports on the Company's Internal Control in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as little as 2 documents.	4	4
4		Penyampaian Arahan Dewan Komisaris tentang Manajemen Risiko Perusahaan. Delivery of the Board of Commissioners' Directives regarding the Company's Risk Management.	Tersusunnya Arahan Dewan Komisaris berupa Surat dan/atau Risalah Rapat tentang Manajemen Risiko Perusahaan. The Board of Commissioners' Directives in the form of Letters and/or Minutes of Meetings regarding the Company's Risk Management being delivered.	Surat dan/atau Risalah Rapat triwulan sebanyak 2 dokumen. Quarterly Letters and/or Minutes of Meetings as little as 2 documents.	4	4



KEY PERFORMANCE INDICATOR DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020
KEY PERFORMANCE INDICATORS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2020

No.	Perspektif Perspectives	Indikator Indicators	Output Indicators	Target Targets	Bobot (%) Weight (%)	Target (%) Target (%)
5		Penyampaian Arahan Dewan Komisaris tentang Sistem Teknologi Informasi yang Digunakan Perusahaan. Delivery of the Board of Commissioners' Directives regarding the Information Technology System Used by the Company.	Tersusunnya Arahan Dewan Komisaris berupa Surat dan/atau Risalah Rapat tentang Sistem Teknologi Informasi yang Digunakan Perusahaan. The Board of Commissioners' Directives in the form of Letters and/or Minutes of Meetings regarding the Information Technology System Used by the Company being delivered.	Surat dan/atau Risalah Rapat sebanyak 2 dokumen. Letters and/or Minutes of Meetings as little as 2 documents.	4	4
6		Penyampaian Arahan Dewan Komisaris tentang Kebijakan Pengembangan SDM dan Pelaksanaannya. Delivery of the Board of Commissioners' Directives regarding HR Development Policies and Their Implementation.	Tersusunnya Arahan Dewan Komisaris berupa Surat dan/atau Risalah Rapat tentang Kebijakan Pengembangan SDM dan Pelaksanaannya. The Board of Commissioners' Directives in the form of Letters and/or Minutes of Meetings regarding HR Development Policies and Their Implementation being delivered.	Surat dan/atau Risalah Rapat sebanyak 2 dokumen. Letters and/or Minutes of Meetings as little as 2 documents.	4	4
7		Penyampaian Arahan Dewan Komisaris tentang Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya. Delivery of the Board of Commissioners' Directives regarding Procurement Policies and Their Implementation.	Tersusunnya Arahan Dewan Komisaris berupa Surat dan/atau Risalah Rapat tentang Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya. The Board of Commissioners' Directives in the form of Letters and/or Minutes of Meetings regarding Procurement Policies and Their Implementation being delivered.	Surat dan/atau Risalah Rapat sebanyak 2 dokumen. Letters and/or Minutes of Meetings as little as 2 documents.	4	4
8		Penyampaian Arahan Dewan Komisaris tentang Kebijakan Mutu dan Pelayanan serta Pelaksanaannya. Delivery of the Board of Commissioners' Directives regarding Quality and Service Policies and Their Implementation.	Tersusunnya Arahan Dewan Komisaris berupa Surat dan/atau Risalah Rapat tentang Kebijakan Mutu dan Pelayanan serta Pelaksanaannya. The Board of Commissioners' Directives in the form of Letters and/or Minutes of Meetings regarding Quality and Service Policies and Their Implementation being delivered.	Surat dan/atau Risalah Rapat sebanyak 2 dokumen. Letters and/or Minutes of Meetings as little as 2 documents.	4	4
9		Penyampaian Laporan Perkembangan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Kepada Menteri BUMN. Submission of Progress Reports on Key Performance Indicators of the Board of Commissioners to the Minister of SOE.	Laporan Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Dewan Komisaris Kepada Menteri BUMN disampaikan tepat waktu. Reports on the Realization of Key Performance Indicators of the Board of Commissioners to the Minister of SOE submitted on time.	Laporan sebanyak 2 dokumen. Reports as little as 2 documents.	4	4
10		Laporan Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020. Reports on the Realization of the Board of Commissioners' Work Plan in 2020.	Tersusunnya Laporan Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020 (Laporan Tugas Pengawasan). Reports on the Realization of the Board of Commissioners' Work Plan in 2020 (Supervisory Tasks Reports) being prepared.	Laporan sebanyak 2 dokumen. Reports as little as 2 documents.	4	4
Jumlah Total					100	100

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Perseroan menetapkan kriteria evaluasi kinerja Direksi yang didasarkan pada target kinerja dalam perjanjian penunjukan anggota Direksi (*Statement of Corporate Intent*) serta komitmennya di dalam memenuhi arahan Pemegang Saham. Perjanjian penunjukan anggota Direksi ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan pada saat pengangkatan dan dapat diperbaiki setiap tahunnya. Kinerja Direksi akan dievaluasi oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penilaian kinerja Direksi dievaluasi berdasarkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators/KPI*) Direksi yang ditetapkan oleh RUPS. KPI merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar serta amanat Pemegang Saham. Direksi menyampaikan laporan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham/Menteri.

Selain KPI, kriteria evaluasi formal bagi anggota Direksi disampaikan secara terbuka kepada Direksi sejak pengangkatannya. Kriteria evaluasi bagi anggota Direksi mencakup kehadiran dalam rapat-rapat, kontribusi dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam penguasaan tertentu, komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan, serta pemenuhannya terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi untuk Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direksi, baik selaku Direksi maupun sebagai anggota Direksi merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria kinerja Direksi maupun individu anggota Direksi. Kriteria evaluasi kinerja individu Direksi antara lain meliputi:

1. Kehadiran dalam rapat-rapat Direksi;
2. Kontribusi dalam proses pengambilan keputusan;
3. Keterlibatan dalam penugasan tertentu;
4. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan;
5. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan, misalnya mengenai benturan kepentingan.

PERFORMANCE ASSESSMENT FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Company sets up criteria for the Board of Directors' performance evaluation based on the performance targets in the agreement for appointment of members of the Board of Directors (*Statement of Corporate Intent*) as well as their commitment in satisfying the directives of the Shareholders. The agreement for appointment of members of the Board of Directors is signed by the member of the Board of Directors concerned at the time of appointment and can be annually updated. The performance of the Board of Directors is evaluated by the Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).

The Board of Directors' performance is evaluated based on the Key Performance Indicators of the Board of Directors set by the GMS. Key Performance Indicators are an assessment measure on the performance success of the duties and responsibilities of the Board of Directors in accordance with the provisions of laws and regulations and/or the Articles of Association as well as the mandate of the Shareholders. The Board of Directors submits a report on the realization of the Key Performance Indicators to the Shareholders/Minister(s).

In addition to the KPI, the formal evaluation criteria for members of the Board of Directors are submitted openly to the Board of Directors since their appointment. The evaluation criteria for members of the Board of Directors include attendances at meetings, contributions in decision-making processes, involvement in certain authorities, commitment to advancing the Company's interest, and their fulfillment of the determined performance targets.

The evaluation results of the performance of the Board of Directors both collegially and individually an integral part of the compensation scheme for the Board of Directors. The evaluation results on the performance of the Board of Directors, both as a whole and of each of its members, are a means of assessing and increasing the effectiveness of the Board of Directors.

The General Meeting of Shareholders stipulates the performance criteria for the Board of Directors and its members. Criteria in the individual performance evaluation of the members of the Board of Directors include:

1. Attendances at the meetings of the Board of Directors;
2. Contributions in decision-making processes;
3. Participations in certain assignments;
4. Commitment to advancing the Company's interests;
5. Compliance with the prevailing laws and regulations as well as the Company's policies, for example regarding conflicts of interest.





Adapun realisasi KPI Direksi secara kolegal untuk tahun buku 2020 mencapai skor sebesar 98,70 dengan predikat “Baik”

The realization of the Board of Directors’ KPI collegially in financial year of 2020 resulted in a score of 98.70 with “Good” category.

REALISASI KPI DIREKSI SECARA KOLEGIAL TAHUN 2020
REALIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS’ KPI COLLEGIALLY IN 2020

No	Indikator Indicators	Bobot Weight	Satuan Unit	2020		Pencapaian Realisasi Realization Achievement	Nilai Tabel Table Value	Pencapaian KPI KPI Score
				Realisasi Realization	Target Targets			
A. PERSPEKTIF NILAI EKONOMI DAN SOSAL UNTUK INDONESIA PERSPECTIVE OF ECONOMIC AND SOCIAL VALUES FOR INDONESIA								
1	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	5,00	Kali	0,91	1,98	45,90%	45,90%	2,30
2	Debt Equity Ratio (DER)	6,00	Kali	1,20	1,21	101,02%	101,02%	6,06
3	Total Debt To EBITDA	5,00	Kali	5,78	4,99	84,29%	84,29%	4,21
4	Pangsa Pasar pelabuhan	6,00	%	99,60	94,00	105,98%	105,98%	6,36
5	Retensi Pelanggan	10,00	%	11,75	0,31	3796,09%	110,00%	11,00
6	Number of Ship/Customer Served	6,00	GT	60.224.254	54.059.983	111,40%	110,00%	6,60
7	PKBL	4,00	%	93,85	95,00	98,79%	98,79%	3,95
TOTAL PERSPEKTIF NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA		42,00						40,48
B. PERSPEKTIF INOVASI MODEL BISIS PERSPECTIVE OF BUSINESS MODEL INNOVATION								
1	Standarisasi Performansi pelabuhan Standardization of Ports Performance							
1.1	Dwelling Time Terminal Petikemas Container Terminals Dwelling Time	3,00	Hari	2,60	3	113,22%	110,00%	3,30
1.2	TRT Kapal Ships TRT	3,00	JK	35,67	40,16	111,18%	110,00%	3,30
2	Service Level Agreement	10,00	%	95,16	100,00	95,16%	95,16%	9,52
3	Pemenuhan Audit Sertifikasi Fulfillment of Certification Audits	6,00	%	100,00	100,00	100,00%	100,00%	6,00
TOTAL PERSPEKTIF INOVASI MODEL BISNIS UNTUK INDONESIA		22,00						22,12
C. PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI PERSPECTIVE OF TECHNOLOGY LEADERSHIP								
1	Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Digitalization and Integration of Services	6,00	%	100,00	100,00	100,00%	100,00%	6,00
TOTAL PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI UNTUK INDONESIA		6,00						6,00
D. PERSPEKTIF PENGEMBANGAN INVESTASI PERSPECTIVE OF INVESTMENT DEVELOPMENT								
1	Penyerapan Investasi (CAPEX) Capital Expenditure/CAPEX	4,00	%	89,14	90,00	99,05%	99,05%	3,96
2	Sinergi BUMN SOE Synergy	6,00	Rupiah	106.919.593.506	85.000.000.000	125,79%	110,00%	6,60
TOTAL PERSPEKTIF PENGEMBANGAN INVESTASI UNTUK INDONESIA		10,00						10,56
E. PERSPEKTIF PENGEMBANGAN TALENTA PERSPECTIVE OF TALENTS DEVELOPMENT								
1	Pemenuhan Standar Keahlian melalui Sertifikasi Fulfillment of Skill Standards through Certifications	8,00	%	109,89	100,00	109,89%	109,89%	8,79
2	Produktivitas Pegawai Employee Productivity	7,00	Rp/orang Rp/person	504.092.478	671.711.282	75,05%	75,05%	5,25
3	Pemenuhan Talent Pool BUMN Fulfillment of the SOE Talent Pool	5,00	%	52,17	20,00	280,87%	110,00%	5,50
TOTAL PERSPEKTIF PENGEMBANGAN TALENTA UNTUK INDONESIA		20,00						19,54
GRAND TOTAL		100,00						98,70

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

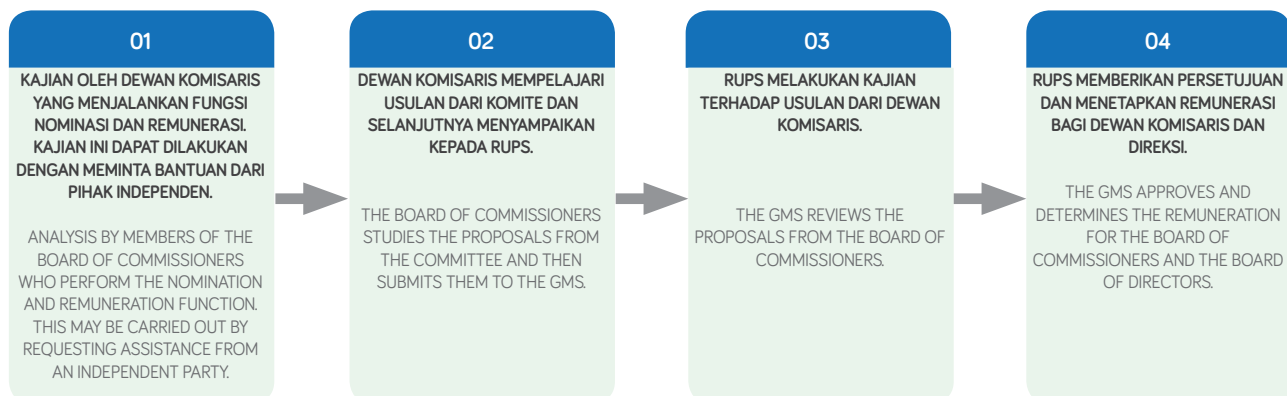
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara di mana Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, adalah:

1. PER-04/MBU/2014
2. PER-02/MBU/06/2016
3. PER-01/MBU/06/2017
4. PER-06/MBU/06/2018
5. PER-01/MBU/05/2019
6. PER-12/MBU/II/2020

Mekanisme Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Mekanisme pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:



REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

POLICIES ON REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The Policies on Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors refer to the Regulations of the Minister of SOE concerning Guidelines for the Determination of Remuneration for the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Board of Supervisors in State-Owned Enterprises, which stipulate that incomes in the form of fixed salary or honorarium, allowances and facilities are determined by taking into account the factors of business scale, business complexity, inflation rate, the Company's financial condition and capacity, as well as other relevant factors, and that the determination shall not conflict with laws and regulations.

Regulations of the Minister of SOE regarding Guidelines for the Determination of Remuneration for the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Board of Supervisors in State-Owned Enterprises, are:

1. PER-04/MBU/2014
2. PER-02/MBU/06/2016
3. PER-01/MBU/06/2017
4. PER-06/MBU/06/2018
5. PER-01/MBU/05/2019
6. PER-12/MBU/II/2020

Mechanism for Determining Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The mechanism for providing remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is as follows:



INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Indikator penetapan remunerasi Direksi telah ditetapkan oleh Pemegang Saham. Indikator yang dimaksud antara lain:

1. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI).
2. Prestasi kerja individu.
3. Kewajaran dengan *peer* perusahaan lainnya.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

STRUKTUR DAN KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 *jo* Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, struktur dan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

INDICATORS FOR DETERMINING REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The indicators for determining the remuneration of the Board of Directors have been set out by the Shareholders. These indicators include:

1. Financial performance and achievement of Key Performance Indicators (KPI).
2. Individual work performance.
3. Fairness with other company's peers.
4. Consideration of the Company's long-term targets and strategies.

STRUCTURE AND COMPONENTS OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Based on the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/05/2019 in conjunction with Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining Remuneration of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Board of Supervisors in State-Owned Enterprises, the structure and components of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration Structure	Struktur Remunerasi Direksi The Board of Directors' Remuneration Structure
<p>Honorarium Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama - Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama <p><i>The Board of Commissioners' Honorariums</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - The President Commissioner's salary is 45% of the President Directors' - The Board of Commissioners members' salary is 90% of the President Commissioner's 	<p>Gaji Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gaji Direksi sebagai acuan utama - Perhitungan gaji Wakil Direktur Utama sebesar 95% dari gaji Direktur Utama - Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia 90% dari gaji Direktur Utama - Anggota Direksi lainnya 85% dari gaji Direktur Utama <p><i>The Board of Directors' Salaries</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - The Board of Directors' salaries are used as the main reference - The Vice President Directors' salary is 95% of the President Directors' - The Director in charge of Human Resources' salary is 90% of the President Directors' - Other members of the Board of Directors' salaries are 85% of the President Directors'
<p>Tunjangan Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tunjangan Hari Raya (1 Kali Honorarium) - Asuransi Purna Jabatan (Premi yang ditanggung oleh Perseroan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun) - Tunjangan Transportasi (20% dari honorarium per bulan) <p><i>The Board of Commissioners Allowances</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Religious Holidays Allowance (Equal to One Month's Honorarium) - Post-Employment Insurance (Premiums borne by the Company are 25% of One Year's Salary) - Transportation Allowance (20% of monthly Honorarium) 	<p>Tunjangan Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tunjangan Hari Raya (1 Kali Gaji) - Asuransi Purna Jabatan (25% Gaji Setahun) - Tunjangan Perumahan Rp25.000.000 per bulan (apabila Perseroan menyediakan rumah jabatan maka wajib digunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Perumahan) <p><i>The Board of Directors' Allowances</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Religious Holidays Allowance (Equal to One Month's Salary) - Post-Employment Insurance (25% of One Year's Salary) - Housing Allowance amounting to Rp25,000,000 per month (if the Company provides official residences, they must be used until the Board of Directors' term of office ends, and Housing Allowance is not provided to the Director concerned)

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration Structure	Struktur Remunerasi Direksi The Board of Directors' Remuneration Structure
<p>Fasilitas Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan (Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan/at cost) - Bantuan Hukum (sebesar pemakaian/at cost) <p>The Board of Commissioners Facilities</p> <ul style="list-style-type: none"> - Health (In the form of health insurance or reimbursements of medical expenses/at cost) - Legal Aids (at cost) 	<p>Fasilitas Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan (1 unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500cc) - Kesehatan (Diberikan dalam bentuk Asuransi kesehatan atau Penggantian biaya Pengobatan) - Bantuan Hukum (Diberikan Sesuai Kebutuhan) <p>Fasilitas Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vehicles (1 unit of vehicle along with maintenance and operational costs, taking into account the Company's financial condition. The specifications and type of the vehicle are determined by the Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500cc) - Health (provided in the form of health insurance or reimbursements of medical expenses) - Legal Aids (at cost)
<p>Tantiem Dewan Komisaris The Board of Commissioners' Tantiems</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pajak atas gaji/honorarium dan tunjangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perusahaan - Taxes on salaries/honorariums and allowances of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are borne by and at the expense of the Company 	<p>Tantiem Direksi The Board of Directors' Tantiems</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pajak atas gaji/honorarium dan tunjangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perusahaan - Taxes on salaries/honorariums and allowances of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are borne by and at the expense of the Company

Sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham No. S-12/VWk2.MBU.F/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris besarnya gaji yang diterima Direktur Utama sebesar Rp195.000.000 per bulan.

Gaji Direktur Utama tersebut menjadi acuan bagi besaran perhitungan gaji Dewan Komisaris dan Direksi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 *jo.* Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Honorarium Komisaris Utama Perseroan ditetapkan sebesar 45% dari gaji Direktur Utama, yaitu sebesar Rp87.750.000 per bulan. Rincian jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

According to the Decision of the Shareholders No. S-12/VWk2.MBU.F/08/2020 of 4 August 2020 on the Determination of Incomes of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the amount of salary received by the President Director is Rp195,000,000 per month.

The President Directors' salary is a reference for calculating the salaries of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as stated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/05/2019 in conjunction with Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Incomes of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Board of Supervisors in SOE.

The Company's President Commissioner's honorarium is set at 45% of the President Directors', namely amounting to Rp87,750,000 a month. The detailed amounts of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:



REMUNERASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020
THE BOARD OF COMMISSIONERS' REMUNERATION IN 2020

Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Type/Calculation	Nominal (Rp) Amount (Rp)
Komisaris Utama President Commissioner	Honorarium Honorarium	Honorarium Komisaris Utama ditetapkan dengan faktor jabatan 45% dari Direktur Utama The President Commissioner's salary is determined by taking into account position factor at 45% of the President Directors'	87.750.000/bulan I month 1.053.000.000
	Tunjangan Allowances	Hari Raya (1 kali Gaji) Religious Holidays (Equal to 1 Month's Salary)	87.750.000/tahun I year
		Asuransi Purna Jabatan (25% gaji 1 tahun) Post-Employment Insurance (25% of 1 Year's Salary)	263.250.000/tahun I year
		Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	17.550.000/bulan I month 210.600.000
	Fasilitas Facilities	Kesehatan Health	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost). In the form of health insurance or reimbursements of medical expenses (at cost).
	Bantuan Hukum Legal Aids	Sebesar pemakaian (at cost). At cost	
Anggota Dewan Komisaris Members of the Board of Commissioners	Honorarium Honorarium	Gaji anggota Dewan Komisaris ditetapkan dengan faktor jabatan 90% dari Komisaris Utama The Board of Commissioners members' salaries are determined by taking into account position factor at 90% of the President Commissioner's	78.975.000/bulan I month
	Tunjangan Allowances	Hari Raya (1 kali Gaji) Religious Holidays (Equal to 1 Month's Salary)	78.975.000/tahun I year
		Asuransi Purna Jabatan (25% gaji 1 tahun) Post-Employment Insurance (25% of 1 Year's Salary)	263.250.000/tahun I year
		Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	15.795.000/bulan I month
	Fasilitas Facilities	Kesehatan Health	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost). In the form of health insurance or reimbursements of medical expenses/ at cost.
	Bantuan Hukum Legal Aids	Sebesar pemakaian (at cost). At cost.	

REMUNERASI DIREKSI TAHUN 2020
THE BOARD OF DIRECTORS' REMUNERATION IN 2020

Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Type/Calculation	Nominal (Rp) Amount (Rp)
Direktur Utama President Director	Gaji Salary	Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp195.000.000/bulan The President Directors' salary is determined to be Rp195,000,000/month	195.000.000/bulan month
		Hari Raya (1 kali Gaji) Religious Holidays (Equal to 1 Month's Salary)	195.000.000/tahun year
		Asuransi Purna Jabatan (25% gaji 1 tahun) Post-Employment Insurance (25% of 1 Year's Salary)	585.000.000/tahun year
	Tunjangan Allowances	Tunjangan Perumahan Rp25.000.000/ bulan (apabila Perseroan menyediakan rumah jabatan maka wajib digunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Perumahan) Housing Allowance of Rp25,000,000/month (if the Company provides official residences, they must be used until the Board of Directors' term of office ends, and Housing Allowance is not provided to the Director concerned).	25.000.000/bulan month
	Fasilitas Facilities	Kendaraan Vehicles	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc. 1 unit of vehicle along with maintenance and operational costs, taking into account the Company's financial condition. The specifications and type of the vehicle are determined by the Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500cc.
		Kesehatan Health	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost). In the form of health insurance or reimbursements of medical expenses (at cost).
		Bantuan Hukum Legal Aids	Sebesar pemakaian (at cost). At cost.
	Gaji Salary	Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia 90% dari gaji Direktur Utama The Director in charge of Human Resources' salary is 90% of the President Directors'	175.500.000/bulan month
		Hari Raya (1 kali Gaji) Religious Holidays (Equal to 1 Month's Salary)	175.500.000/tahun year
		Asuransi Purna Jabatan (25% gaji 1 tahun) Post-Employment Insurance (25% of 1 Year's Salary)	526.500.000/tahun year
Direktur SDM Director of HR	Tunjangan Allowances	Tunjangan Perumahan Rp25.000.000/bulan (apabila Perseroan menyediakan rumah jabatan maka wajib digunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Perumahan) Housing Allowance of Rp25,000,000/month (if the Company provides official residences, they must be used until the Board of Directors' term of office ends, and Housing Allowance is not provided to the Director concerned)	25.000.000/bulan month
	Fasilitas	Kendaraan Vehicles	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc. 1 unit of vehicle along with maintenance and operational costs, taking into account the Company's financial condition. The specifications and type of the vehicle are determined by the Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500cc.
		Kesehatan Health	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost). In the form of health insurance or reimbursements of medical expenses (at cost).
		Bantuan Hukum Legal Aids	Sebesar pemakaian (at cost). At cost.



REMUNERASI DIREKSI TAHUN 2020
THE BOARD OF DIRECTORS' REMUNERATION IN 2020

Jabatan Position	Remunerasi Remuneration	Jumlah Type/Calculation	Nominal (Rp) Amount (Rp)
Direktur Directors	Gaji Salary	Anggota Direksi lainnya 85% dari gaji Direktur Utama Other members of the Board of Directors' salaries are 85% of the President Directors'	165.750.000/bulan I month 1.989.000.000/tahun I year
		Hari Raya (1 kali Gaji) Religious Holidays (Equal to 1 Month's Salary)	165.750.000/tahun I year
		Asuransi Purna Jabatan (25% gaji 1 tahun) Post-Employment Insurance (25% of 1 Year's Salary)	497.250.000/tahun I year
	Tunjangan Allowances	Tunjangan Perumahan Rp25.000.000/ bulan (apabila Perseroan menyediakan rumah jabatan maka wajib digunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Perumahan) Housing Allowance of Rp25,000,000/month (if the Company provides official residences, they must be used until the Board of Directors' term of office ends, and Housing Allowance is not provided to the Director concerned)	25.000.000/bulan I month
		Kendaraan Vehicles	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc. 1 (one) unit of vehicle along with maintenance and operational costs, taking into account the Company's financial condition. The specifications and type of the vehicle are determined by the Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500cc.
	Fasilitas Facilities	Kesehatan Health	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost). In the form of health insurance or reimbursements of medical expenses (at cost).
	Bantuan Hukum Legal Aids	Sebesar pemakaian (at cost). At cost.	

TANTIEM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham No. S-12/VVK2.MBU.F/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris, Total Tantiem atau Insentif Kinerja (IK) untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 ditetapkan sebesar Rp14.780.000.000, yang terdiri dari Tantiem/IK tunai sebesar Rp11.222.961.058 dan alokasi *Long Term Incentive* (LTI) sebesar Rp3.557.038.942 yang akan dibayarkan pada tahun ketiga sejak surat ini ditetapkan, dengan ketentuan:

THE BOARD OF COMMISSIONERS' AND THE BOARD OF DIRECTORS' TANTIEMS

According to the Decision of the Shareholders No. S-12/VVK2.MBU.F/08/2020 of 4 August 2020 on the Determination of Incomes of the Board of Directors and the Board of Commissioners, Total Tantiems or Performance Incentives (PI) for the Board of Directors and the Board of Commissioners for Financial Year of 2019 was set for Rp14,780,000,000, which consisted of Tantiems/PI amounting Rp11,222,961,058 and Long Term Incentive (LTI) allocation amounting Rp3,557,038,942 which would be paid in the third year since the issuance of the said letter, with the following conditions:

- a. Tantiem/IK Direktur Utama, Direktur yang membidangi SDM, Anggota Direksi lainnya, Komisaris Utama, masing-masing sebesar 100%, 90%, 85%, dan 45% dari Tantiem/IK Direktur Utama, dan tantiem/IK anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari tantiem/IK Komisaris Utama. Besaran tantiem/IK dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku 2019.
- b. Pajak penghasilan (PPh) atas tantiem/IK menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya Perseroan.

BONUS NON-KINERJA DAN OPSI SAHAM

Tidak terdapat bonus non-kinerja dan opsi saham yang diberikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

- a. Tantiems/PI for the President Director, Director in charge of HR, other members of the Board of Directors, President Commissioner, are 100%, 90%, 85%, and 45% of the President Directors', respectively, and tantiems/PI for members of the Board of Commissioners are 90% of the President Commissioner's. The amount of tantiems/PI is calculated proportionally according to the term of office of each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the Financial Year of 2019.
- b. Income tax (PPh) on tantiems/PI is borne by the recipient and shall not be charged at the Company's expense.

NON-PERFORMANCE BONUSES AND SHARE OPTIONS

There are no non-performance bonuses and share options provided to each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors.





RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

RAPAT DEWAN KOMISARIS

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan *Board Manual* Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Disepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat internal. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal yang diselenggarakan di tahun 2020.

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

THE BOARD OF COMMISSIONERS' MEETINGS

According to the Board of Commissioners' Manual, the Board of Commissioners' meetings are held at least once a month. The Board of Commissioners' meetings consist of the Board of Commissioners' Internal Meetings and Joint Meetings.

Throughout 2020, the Board of Commissioners held 14 (fourteen) internal meetings. Below are the agenda and minutes of meetings, attendances, and a recapitulation of the attendance rates of the Board of Commissioners at internal meetings organized in 2020.

RISALAH DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT INTERNAL MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN INTERNAL MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Attendances	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Member's Reasons for Absence
29 Januari 2020 29 January 2020	Jakarta	1. Pembahasan Riviui Kinerja. 2. Pembahasan <i>In House Financial Statement</i> 2019 (<i>Unaudited</i>). 1. Discussion on Performance Review. 2. Discussion on the 2019 In-House Financial Statements (<i>Unaudited</i>).	1. Refly Harun 2. Bambang Setyo Wahyudi 3. Lukita Dinarsyah Tuwo 4. Heyadi	-
17 Februari 2020 17 February 2020	Jakarta	1. Pembahasan Riviui Kinerja. 2. Pembahasan Emisi Obligasi. 3. Pembahasan <i>Financial Report</i> 2019. 1. Discussion on Performance Review. 2. Discussion on Bonds Issuance. 3. Discussion on the 2019 Financial Report.	1. Refly Harun 2. Bambang Setyo Wahyudi 3. Lukita Dinarsyah Tuwo 4. Heyadi	-
26 Maret 2020 26 March 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan Kinerja Keuangan s.d Februari 2020. Discussion on Financial Performance up to February 2020.	1. Refly Harun 2. Bambang Setyo Wahyudi 3. Lukita Dinarsyah Tuwo 4. Heyadi	-
8 Mei 2020 8 May 2020	Via Zoom Meeting	Penjelasan dan Diskusi Laporan Keuangan Tahun Buku 2019. Elaboration and Discussion on the 2019 Financial Report.	1. Achmad Djamiludin 2. Winata Supriatna 3. Arman Depari 4. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan 5. Ahmad Perwira Mulia 6. Irma Suryani Chaniago	-
12 Mei 2020 12 May 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan mengenai gambaran umum tentang Pelindo 1 khususnya terkait dengan Tupoksi Direktur Operasi dan Komersial. Discussion on the general overview of Pelindo 1, particularly in relation to the main duties and functions of the Director of Operations and Commercial.	1. Achmad Djamiludin 2. Winata Supriatna 3. Arman Depari 4. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan 5. Ahmad Perwira Mulia 6. Irma Suryani Chaniago	-

RISALAH DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT INTERNAL
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN INTERNAL MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Attendances	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Member's Reasons for Absence
14 Mei 2020 14 May 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan mengenai gambaran umum Pelindo 1 khususnya terkait dengan Tupoksi Direktur Teknik. Discussion on the general overview of Pelindo 1, particularly in relation to the main duties and functions of the Director of Engineering.	1. Achmad Djamiludin 2. Winata Supriatna 3. Arman Depari 4. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan 5. Ahmad Perwira Mulia 6. Irma Suryani Chaniago	-
19 Mei 2020 19 May 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan mengenai gambaran umum Pelindo 1 khususnya terkait dengan Tupoksi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM). Discussion on the general overview of Pelindo 1, particularly in relation to the main duties and functions of the Director of Human Resources (HR).	1. Achmad Djamiludin 2. Winata Supriatna 3. Arman Depari 4. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan 5. Ahmad Perwira Mulia 6. Irma Suryani Chaniago	-
29 Juni 2020 29 June 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan Kinerja Keuangan s.d Mei 2020. Discussion on Financial Performance up to May 2020.	1. Achmad Djamiludin 2. Winata Supriatna 3. Arman Depari 4. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan 5. Ahmad Perwira Mulia 6. Irma Suryani Chaniago	-
24 Juli 2020 24 July 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan Usulan Revisi RKAP PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2020. Discussion on the Proposal for Revision to the 2019 WPB of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	1. Achmad Djamiludin 2. Winata Supriatna 3. Arman Depari 4. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan 5. Ahmad Perwira Mulia 6. Irma Suryani Chaniago	-
27 Agustus 2020 27 August 2020	Via Zoom Meeting	1. Pembahasan Usulan Revisi RKAP 2020. 2. Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya s.d Semester I Tahun 2020. 1. Discussion on the Proposal for Revision to the 2020 WPB. 2. Procurement Policies and Their Implementations up to Semester I 2020.	1. Achmad Djamiludin 2. Winata Supriatna 3. Arman Depari 4. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan 5. Ahmad Perwira Mulia 6. Irma Suryani Chaniago	-
30 September 2020 30 September 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan Laporan Kinerja s.d Agustus 2020. Discussion on Performance Reports up to August 2020.	1. Achmad Djamiludin 2. Winata Supriatna 3. Arman Depari 4. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan 5. Ahmad Perwira Mulia 6. Irma Suryani Chaniago	-
27 Oktober 2020 27 October 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan Usulan RKAP 2021. Discussion on the Proposal for the 2021 WPB.	1. Achmad Djamiludin 2. Winata Supriatna 3. Arman Depari 4. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan 5. Ahmad Perwira Mulia 6. Irma Suryani Chaniago	-
26 November 2020 26 November 2020	Via Zoom Meeting	1. Pembahasan <i>Pending Matters</i> 2. Kebijakan Mutu s.d Triwulan III Tahun 2020 1. Discussion on Pending Matters. 2. Quality Policies up to Quarter 3 2020.	1. Achmad Djamiludin 2. Winata Supriatna 3. Arman Depari 4. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan 5. Ahmad Perwira Mulia 6. Irma Suryani Chaniago	-



RISALAH DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT INTERNAL
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN INTERNAL MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda	Peserta Attendances	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Member's Reasons for Absence
29 Desember 2 29 December 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan Laporan Kinerja s.d November 2020. Discussion on Performance Reports up to November 2020.	1. Achmad Djamaludin 2. Winata Supriatna 3. Arman Depari 4. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan 5. Ahmad Perwira Mulia 6. Irma Suryani Chaniago	-

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat internal Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini.

A recapitulation of attendances of the Board of Commissioners members in internal meetings is presented below.

REKAPITULASI KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT INTERNAL
RECAPITULATION OF ATTENDANCES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN INTERNAL MEETINGS

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Refly Harun (Komisaris Utama)* President Commissioner*	2	2	100,00%
Achmad Djamaludin (Komisaris Utama) ** President Commissioner**	11	11	100,00%
Bambang Setyo Wahyudi (Komisaris)* Commissioner*	2	2	100,00%
Arman Depari (Komisaris)** Commissioner**	11	11	100,00%
Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris)* Commissioner*	2	2	100,00%
Heryadi (Komisaris Independen)* Independent Commissioner*	2	2	100,00%
Winata Supriyatna (Komisaris) Commissioner*	14	14	100,00%
Irma Suryani Chaniago (Komisaris Independen)** Independent Commissioner**	11	11	100,00%
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen)** Independent Commissioner**	11	11	100,00%
Ahmad Perwira Mulia Tarigan (Komisaris Independen)** Independent Commissioner**	11	11	100,00%
Rata-rata In Average			100,00%

*) Tidak lagi menjabat sejak 20 April 2020
No longer served as of 20 April 2020

**) Menjabat sejak 20 April 2020
Serving as of 20 April 2020

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 2020

Rapat gabungan merupakan rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi seperti membahas kinerja Perseroan dan masalah-masalah yang dihadapi Perseroan.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi yang diselenggarakan sebanyak 16 (enam belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan

JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS IN 2020

Joint meetings are collaborative meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, such as to discuss the performance of the Company and the issues faced by the Company.

Throughout 2020, the Board of Commissioners held Joint Meetings by inviting the Board of Directors, specifically 16 (sixteen) times. Below are the agenda and minutes of meetings,

risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan yang diselenggarakan di tahun 2020.

attendances, and a recapitulation of the attendance rates of the Board of Commissioners and the Board of Directors at Joint Meetings organized in 2020.

RISALAH DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT GABUNGAN
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN JOINT MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris/Direksi yang Tidak Hadir Board of Commissioners and Board of Directors Member's Reasons for Absence
30 Januari 2020 30 January 2020	Medan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Riviui Kinerja. • Pembahasan <i>In House Financial Statement 2019 (unaudited)</i>. • Discussion on Performance Review. • Discussion on the 2019 In-House Financial Statements (Unaudited). 	Dewan Komisaris Board of Commissioners Refly Harun Bambang Setyo Wahyudi Lukita Dinarsyah Tuwo Heyadi Direksi Board of Directors Dian Rachamawan M. Hamied Wijaya Syahputera Sembiring Hosadi Apriza Putra M. Nur Sodik Ihsanuddin Usman	-
18 Februari 2020 18 February 2020	Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Riviui Kinerja. • Pembahasan Emisi Obligasi. • Pembahasan <i>Financial Report 2019</i>. • Discussion on Performance Review. • Discussion on Bonds Issuance. • Discussion on the 2019 Financial Report. 	Dewan Komisaris Board of Commissioners Refly Harun Bambang Setyo Wahyudi Lukita Dinarsyah Tuwo Heyadi Direksi Board of Directors Dian Rachamawan M. Hamied Wijaya Syahputera Sembiring Hosadi Apriza Putra M. Nur Sodik Ihsanuddin Usman	-
26 Maret 2020 26 March 2020	Via Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Riviui Kinerja. • Pembahasan Program Antisipasi COVID-19. • Discussion on Performance Review. • Discussion on the COVID-19 Anticipation Program. 	Dewan Komisaris Board of Commissioners Refly Harun Bambang Setyo Wahyudi Lukita Dinarsyah Tuwo Heyadi Direksi Board of Directors Dian Rachamawan M. Hamied Wijaya Syahputera Sembiring Hosadi Apriza Putra M. Nur Sodik Ihsanuddin Usman	-



RISALAH DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT GABUNGAN
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN JOINT MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris/Direksi yang Tidak Hadir Board of Commissioners and Board of Directors Member's Reasons for Absence
21 April 2020 21 April 2020	Via Zoom Meeting	Pelaksanaan Program Pengenalan Perusahaan kepada Dewan Komisaris yang baru. Organization of Company Induction Program to the new Board of Commissioners.	Dewan Komisaris Board of Commissioners Achmad Djamiludin Winata Supriatna Arman Depari Herbert Timbo Parluhutan Siahaan Ahmad Perwira Mulia Irma Suryani Chaniago Direksi Board of Directors Dian Rachamawan M. Hamied Wijaya Syahputera Sembiring Hosadi Apriza Putra M. Nur Sodik Ihsanuddin Usman	-
28 Mei 2020 28 May 2020	Via Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Perusahaan s.d April 2020. Laporan Kesiapan RS PHCM dalam menangani Pasien COVID-19. Discussion on the Company's Performance up to April 2020. RS Prima Husada Cipta Medan (PHCM) Readiness Report in Handling COVID-19 Patients 	Dewan Komisaris Board of Commissioners Achmad Djamiludin Winata Supriatna Arman Depari Herbert Timbo Parluhutan Siahaan Ahmad Perwira Mulia Irma Suryani Chaniago Direksi Board of Directors Dian Rachamawan M. Hamied Wijaya Syahputera Sembiring Hosadi Apriza Putra M. Nur Sodik Ihsanuddin Usman	-
5 Juni 2020 5 June 2020	Via Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Lanjutan Pengembangan Kawasan Kuala Tanjung (Divestasi PPK, PMN untuk PPK, Eksekusi Penlok-1). Further Discussion on the Development of the Kuala Tanjung Area (Small Islands/ PPK Divestment, State Equity Participation for Small Islands/ PMN for PPK, Location Determination/ Penlok-1 Execution) 	Dewan Komisaris Board of Commissioners Achmad Djamiludin Winata Supriatna Arman Depari Herbert Timbo Parluhutan Siahaan Ahmad Perwira Mulia Irma Suryani Chaniago Direksi Board of Directors Dian Rachamawan M. Hamied Wijaya Syahputera Sembiring Hosadi Apriza Putra M. Nur Sodik Ihsanuddin Usman	-

RISALAH DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT GABUNGAN
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN JOINT MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris/Direksi yang Tidak Hadir Board of Commissioners and Board of Directors Member's Reasons for Absence
12 Juni 2020 12 June 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan Pengembangan Bisnis STS dan Pemanduan untuk meraih pasar di Selat Malaka. Discussion on Business Development of STS and Pilotage to reach the market in the Strait of Malacca.	Dewan Komisaris Board of Commissioners Achmad Djamiludin Winata Supriatna Arman Depari Herbert Timbo Parluhan Siahaan Ahmad Perwira Mulia Irma Suryani Chaniago Direksi Board of Directors Dian Rachamawan M. Hamied Wijaya Syahputera Sembiring Hosadi Apriza Putra M. Nur Sodik Ihsanuddin Usman	-
30 Juni 2020 30 June 2020	Via Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Direksi. • Pembahasan Kinerja Perusahaan s.d Mei 2020. • Introduction of the Board of Directors. • Discussion on the Company's Performance up to May 2020. 	Dewan Komisaris Board of Commissioners Achmad Djamiludin Winata Supriatna Arman Depari Herbert Timbo Parluhan Siahaan Ahmad Perwira Mulia Irma Suryani Chaniago Direksi Board of Directors Dani Rusli Utama Henry Naldi Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Henri Panggabean Prasetyo	-
27 Juli 2020 27 July 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan Usulan Revisi RKAP PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2020. Discussion on the Proposal for Revision to the 2020 WPB of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).	Dewan Komisaris Board of Commissioners Achmad Djamiludin Winata Supriatna Arman Depari Herbert Timbo Parluhan Siahaan Ahmad Perwira Mulia Irma Suryani Chaniago Direksi Board of Directors Dani Rusli Utama Henri Panggabean Ridwan Sani Siregar Henry Naldi Hosadi Apriza Putra Prasetyo	-





RISALAH DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT GABUNGAN
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN JOINT MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris/Direksi yang Tidak Hadir Board of Commissioners and Board of Directors Member's Reasons for Absence
30 Juli 2020 30 July 2020	Via Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Korporat sd. Semester I Tahun 2020. Laporan Progres Program Strategis Perusahaan. Corporate Performance up to Semester I 2020. Report on the Progresses of the Company's Strategic Programs. 	Dewan Komisaris Board of Commissioners Achmad Djamaludin Winata Supriatna Arman Depari Herbert Timbo Parluhutan Siahaan Ahmad Perwira Mulia Irma Suryani Chaniago Direksi Board of Directors Dani Rusli Utama Henry Naldi Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Henri Panggabean Prasetyo	-
28 Agustus 2020 28 August 2020	Via Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Pemaparan usulan revisi RKAP 2020 Laporan Pengendalian Internal (SPI) s.d. 15 Ags 2020. Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya s.d Semester I Thn 2020. Hal-hal lain yang berkembang. Presentation on the proposal for revision to the 2020 WWPB. Internal Control Unit (SPI) Report up to 15 August 2020. Procurement Policies and Their Implementations up to Semester I 2020. Other concerns that develop. 	Dewan Komisaris Board of Commissioners Achmad Djamaludin Winata Supriatna Arman Depari Herbert Timbo Parluhutan Siahaan Ahmad Perwira Mulia Irma Suryani Chaniago Direksi Board of Directors Dani Rusli Utama Henry Naldi Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Henri Panggabean Prasetyo	-
29 September 2020 29 September 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2020-2024. Discussion on the Company's Long-Term Plan for 2020-2024	Dewan Komisaris Board of Commissioners Achmad Djamaludin Winata Supriatna Arman Depari Herbert Timbo Parluhutan Siahaan Ahmad Perwira Mulia Irma Suryani Chaniago Direksi Board of Directors Dani Rusli Utama Henry Naldi Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo	Henri Panggabean meninggal dunia pada 30 Agustus 2020 Henri Panggabean passed away on 30 August 2020.

RISALAH DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT GABUNGAN
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN JOINT MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris/Direksi yang Tidak Hadir Board of Commissioners and Board of Directors Member's Reasons for Absence
30 September 2020 30 September 2020	Via Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja s.d Agustus 2020. Progres Program Strategis s.d September 2020. Performance Reports up to August 2020. Progresses of Strategic Programs up to September 2020. 	Dewan Komisaris Board of Commissioners Achmad Djamiludin Winata Supriatna Arman Depari Herbert Timbo Parluhutan Siahaan Ahmad Perwira Mulia Irma Suryani Chaniago Direksi Board of Directors Dani Rusli Utama Henry Naldi Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo	Henri Panggabean meninggal dunia pada 30 Agustus 2020 Henri Panggabean passed away on 30 August 2020.
27 Oktober 2020 27 October 2020	Via Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Usulan RKAP 2021. Kebijakan Mutu s.d Triwulan III Tahun 2020. Proposal for the 2021 WPB. Quality Policies up to Quarter 3 2020. 	Dewan Komisaris Board of Commissioners Achmad Djamiludin Winata Supriatna Arman Depari Herbert Timbo Parluhutan Siahaan Ahmad Perwira Mulia Irma Suryani Chaniago Direksi Board of Directors Dani Rusli Utama Henry Naldi Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Roy Leonard Prasetyo	-
27 November 2020 27 November 2020	Via Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja s.d Oktober 2020. Laporan SPI s.d 15 November 2020. Kebijakan Mutu s.d Triwulan III 2020. Performance Reports up to October 2020. Internal Control Unit (SPI) Report up to November 2020. Quality Policies up to Quarter 3 2020. 	Dewan Komisaris Board of Commissioners Achmad Djamiludin Winata Supriatna Arman Depari Herbert Timbo Parluhutan Siahaan Ahmad Perwira Mulia Irma Suryani Chaniago Direksi Board of Directors Dani Rusli Utama Henry Naldi Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Roy Leonard Prasetyo	-





RISALAH DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT GABUNGAN
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN JOINT MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances	Alasan Ketidakhadiran Dewan Komisaris/Direksi yang Tidak Hadir Board of Commissioners and Board of Directors Member's Reasons for Absence
30 Desember 2020 30 December 2020	Via Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> Progres Pencapaian Direktorat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Pembahasan Laporan Kinerja s.d November 2020 Achievement Progresses of the Directorate of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Discussion on Performance Reports up to November 2020 	Dewan Komisaris Board of Commissioners Achmad Djamaludin Winata Supriatna Arman Depari Herbert Timbo Parluhutan Siahaan Ahmad Pervira Mulia Irma Suryani Chaniago Direksi Board of Directors Dani Rusli Utama Henry Naldi Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Roy Leonard Prasetyo	-

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan dapat dilihat di bawah ini.

A recapitulation of attendances of the Board of Commissioners members in Joint Meetings is available below.

REKAPITULASI KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA RAPAT GABUNGAN
RECAPITULATION OF ATTENDANCES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS IN JOINT MEETINGS

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dewan Komisaris The Board of Commissioners			
Refly Harun (Komisaris Utama I President Commissioner)*	3	3	100,00%
Achmad Djamaludin (Komisaris Utama I President Commissioner)**	13	13	100,00%
Bambang Setyo Wahyudi (Komisaris I Commissioner)*	3	3	100,00%
Arman Depari (Komisaris I Commissioner)**	13	13	100,00%
Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris I Commissioner)*	3	3	100,00%
Heryadi (Komisaris Independen I Independent Commissioner)*	3	3	100,00%
Winata Supriatna (Komisaris I Commissioner)	16	16	100,00%
Irma Suryani Chaniago (Komisaris Independen I Independent Commissioner)**	13	13	100,00%
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Komisaris Independen I Independent Commissioner)**	13	13	100,00%
Ahmad Pervira Mulia Tarigan (Komisaris Independen I Independent Commissioner)**	13	13	100,00%
Direksi The Board of Directors			
Dian Rachmawan (Direktur Utama I President Director)***	7	7	100%
Dani Rusli Utama (Direktur Utama I President Director)***	9	9	100%
Syahputera Sembiring (Direktur Operasional & Komersial I Director of Operations and Commercial)***	7	7	100%
Ridwan Sani Siregar (Direktur Operasional & Komersial I Director of Operations and Commercial)***	9	9	100%
Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik I Director of Engineering)***	7	7	100%
Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik I Director of Engineering)****	9	9	100%

REKAPITULASI KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA RAPAT GABUNGAN
RECAPITULATION OF ATTENDANCES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS IN JOINT MEETINGS

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Ihsanuddin Usman (Direktur Transformasi & Pengembangan Usaha Director of Business Transformation & Development)***	7	7	100%
Prasetyo (Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Director of Business Transformation and Development)****	9	9	100%
M. Hamied Wijaya (Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Resources)***	7	7	100%
Henry Naldi (Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Director of Human Resources & General Affairs)****	9	9	100%
Mohamad Nur Sodik (Direktur Keuangan Director of Finance)***	7	7	100%
Roy Leonard (Direktur Keuangan Director of Finance)*****	3	3	100%
Rata-rata (In Average)			100%

*) Tidak lagi menjabat sejak 20 April 2020 | (No longer served as of 20 April 2020)
 **) Menjabat sejak 20 April 2020 | (Serving as of 20 April 2020)
) Tidak lagi menjabat sejak 22 Juni 2020 | () No longer served as of 22 June 2020
 ****) Mulai menjabat sejak 22 Juni 2020 | (****) Serving as of 22 June 2020
 *****) Mulai menjabat sejak 22 Oktober 2020 | (***** Serving as of 22 October 2020

RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN PEMEGANG SAHAM

Kehadiran dan tanggapan Dewan Komisaris dalam RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2020:

- a. Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris telah menghadiri rapat bersama dengan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dalam pelaksanaan RUPS tentang Pengesahan RKAP Tahun 2020 untuk memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No. 04 tanggal 23 Januari 2020.
- b. Kehadiran Dewan Komisaris
 Kehadiran Dewan Komisaris pada RUPS tentang Pengesahan RKAP Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020:

THE BOARD OF COMMISSIONERS' MEETINGS WITH THE SHAREHOLDERS

Attendances and responses of the Board of Commissioners in the GMS for Ratification of the 2020 WPB are described as follows:

- a. As an implementation of the provision in Article 21 of the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners had attended a joint meeting with the Shareholders or the Shareholders' Proxy by the organization of the GMS for the Ratification of the 2020 WPB, to comply with the provisions of Article 64 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 and Article 21 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, in accordance with the Minutes of the General Meeting of Shareholders of the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 04 of 23 January 2020.
- b. The Board of Commissioners' Attendances
 The attendances of the Board of Commissioners in the GMS for the Ratification of the 2020 WPB on 23 January 2020 were as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Kehadiran Frequency of Attendance
Refly Harun	Komisaris Utama/Komisaris Independen Commissioner/Independent Commissioner	1 kali atau 100% 1 time or 100%
Bambang Setyo Wahyudi	Komisaris Commissioner	1 kali atau 100% 1 time or 100%
Winata Supriatna	Komisaris Commissioner	1 kali atau 100% 1 time or 100%
Lukita Dinarsyah Tuwo	Komisaris Commissioner	1 kali atau 100% 1 time or 100%
Heryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	1 kali atau 100% 1 time or 100%



- c. Penilaian, Pendapat dan Saran Dewan Komisaris dalam RUPS
Penilaian, Pendapat dan Saran Dewan Komisaris sebagaimana disampaikan kepada Pemegang Saham melalui surat Dewan Komisaris No. KU.66/298/DK/PP.I/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal Penyampaian Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Usulan RKAP Tahun 2020 dan No. KU.60/157/DK/PP.I/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Usulan Revisi RKAP Tahun 2020.

- c. The Board of Commissioners' Evaluation, Opinions and Suggestions in the GMS
The Board of Commissioners' Evaluation, Opinions and are submitted to the Shareholders through the Letter of the Board of Commissioners No. KU.66/298/DK/PP.I/X/2019 of 31 October 2019 regarding the Submission of Opinions and Suggestions of the Board of Commissioners on the Proposal for the 2020 WPB and No. KU.60/157/DK/PP.I/VII/2020 of 30 July 2020 regarding the Opinions and Suggestions of the Board of Commissioners on the Proposal for Revision to the 2020 WPB.

RAPAT DIREKSI

RAPAT INTERNAL DIREKSI

Sesuai dengan *Board Manual* Direksi, rapat Direksi diadakan apabila dianggap perlu. Namun demikian dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengurusan Perseroan, Direksi menetapkan rapat Direksi diselenggarakan secara rutin minimal sekali dalam sebulan.

Di tahun 2020, Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

THE BOARD OF DIRECTORS' INTERNAL MEETINGS

According to the Board of Directors' Manual, meetings of the Board of Directors are held if deemed necessary. Nevertheless, in order to advance the coordination and effectiveness of the management of the Company, the Board of Directors stipulates that the Board of Directors' meetings are to be organized regularly at least once a month.

Throughout 2020, the Board of Directors organized 63 (sixty three) meetings. Below are the agenda and minutes of meetings, attendances, and a recapitulation of the attendance rates of the Directors at these meetings.

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances
9 Januari 2020 9 January 2020	Grha Pelindo Satu Ruang Rapat It. 8A Kantor Pusat Grha Pelindo Satu, Meeting Room, Floor 8A, Head Office	<ol style="list-style-type: none"> Arahan Direktur Utama Update Rencana Pengembangan New Belawan International Container Terminal, Update Rencana Kerja Sama dengan Zhejiang dan PoR dan Rencana Kilang Minyak & Petrokimia Kuala Tanjung <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Pejabat Struktural Pembahasan Evaluasi Pengelolaan SDM Anak Perusahaan" Pembahasan <i>Closing Front End</i> Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat 	<p>Dian Rachmawan M. Hamied Wijaya Hosadi Apriza Putra M. Nur Sodik Ihsanuddin Usman</p>
		<ol style="list-style-type: none"> President Director Direction Update on the Development Plan for the New Belawan International Container Terminal, Update on the Cooperation Plan with Zhejiang and PoR and the Plan for the Kuala Tanjung Oil Refinery & Petrochemicals <ol style="list-style-type: none"> Evaluation of Structural Officials Discussion on the Evaluation of Human Resources Management in Subsidiaries Discussion on Front-End Closing Other concerns that develop in the meeting 	

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances
15 Januari 2020 15 January 2020	Grha Pelindo Satu Ruang Rapat Lt. 8A Kantor Pusat Grha Pelindo Satu, Meeting Room, Floor 8A, Head Office	<ol style="list-style-type: none"> Arahan Direktur Utama Update dari Direktur Keuangan Update dari Direktur Transformasi dan Pengembangan Data Update dari Direktur Teknik Update dari Direktur Operasi dan Komersial Update dari Direktur SDM 	Mohaman Nur Sodiq Ihsanuddin Usman Hosadia A. Putra Syahputera Sembiring Hamied Wijaya
29 Januari 2020 29 January 2020	Grha Pelindo Satu Ruang Rapat Lt. 8A Kantor Pusat Grha Pelindo Satu, Meeting Room, Floor 8A, Head Office	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian Hasil Kajian Pembangunan TPK dan Pengembangan Kawasan di KID Dumai oleh Tim ITS serta Rencana Tindak Lanjut MoU dengan Wilmar Grup Review Performance Kinerja dan Inhouse Financial Statement 2019 (Un Audited) <ol style="list-style-type: none"> Submission of the Analysis Results on the Development of Container Terminal and Area Development of the Dumai Industrial Zone (KID) by the ITS Team as well as the Follow-Up Plan on the MoU with the Wilmar Group Performance Review and Review on the 2019 In-House Financial Statement (Unaudited) 	Dian Rachmawan
6 Februari 2020 6 February 2020	Grha Pelindo Satu Ruang Rapat Lt. 8A Kantor Pusat Grha Pelindo Satu, Meeting Room, Floor 8A, Head Office	<ol style="list-style-type: none"> BOD Briefing kepada Direksi Anak Perusahaan Membahas Draft Report Temuan Audit BPK <ol style="list-style-type: none"> The Company's BOD Briefing for the BOD of the Subsidiaries Discussing the Draft Report on the Audit Findings by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) 	Dian Rachmawan Mohamad Nur Sodiq Ihsanuddin Usman M. Hamied Wijaya Syahputera Sembiring
13 Februari 2020 13 February 2020	Grha Pelindo Satu Ruang Rapat Lt. 8A Kantor Pusat Grha Pelindo Satu, Meeting Room, Floor 8A, Head Office	<ol style="list-style-type: none"> Review Performance Kinerja Pembahasan Tindak Lanjut Tukar Guling Aset Tanah Milik PPK dengan INALUM Penyelesaian Tagihan Pekerjaan KT Bayu II An.Legianto <ol style="list-style-type: none"> Performance Review Discussion regarding Follow-Ups on the Assets Exchange of Lands Belonging to Small Islands (PPK) with INALUM Completion of Works on Tugboat (KT) Bayu II p.p. Legianto 	Dian Rachmawan Mohamad Nur Sodiq Ihsanuddin Usman Syahputera Sembiring
18 Februari 2020 18 February 2020	Kantor Perwakilan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Menara Ravindo Lantai 10, Jl. Kebun Sirih Kavling 75 - Jakarta Representative Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Ravindo Tower, 10th Floor, Kebun Sirih Street, Kavling 75 - Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Pembelian Saham PPK oleh Wika dan Inalum Check Posisi Bahan Materi Rapat Gabungan BOC-BOD <ol style="list-style-type: none"> Discussion on the Purchase of PPK Shares by Wika and Inalum Checking on the Position of Materials for the BOC-BOD Joint Meeting 	Dian Rachmawan Mohamad Nur Sodiq Ihsanuddin Usman
27 Februari 2020 27 February 2020	Grha Pelindo Satu Ruang Rapat Lt. 8A Kantor Pusat Grha pelindo Satu, Meeting Room, Floor 8A, Head Office	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja atas Pencapaian Program oleh Account Executive/AE Pembahasan Progres Pemanfaatan Aset Kantor Pusat Lama <ol style="list-style-type: none"> Progres Persiapan Groundbreaking TBBM di Kuala Tanjung Program Mudik Gratis <ol style="list-style-type: none"> Performance Evaluation on the Achievement of Programs by Account Executives/AE Discussion on the Progress of Assets Utilization of the Old Head Office Progress of Preparations for the Groundbreaking of Fuel Oil Terminal (TBBM) in Kuala Tanjung Free Homecoming (Mudik) Program 	Dian Rachmawan Mohamad Nur Sodiq Syahputera Sembiring



RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances
18 Maret 2020 18 March 2020	Grha Pelindo Satu Ruang Rapat Lt. 8A Kantor Pusat Grha Pelindo Satu, Meeting Room, Floor 8A, Head Office	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review Performance Kinerja 2. Program Antisipasi COVID-19 3. Pembahasan Rencana Pengembangan Pasar Bawah di Pekanbaru 4. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat 	Dian Rachmawan Mohamad Nur Sodiq M. Hamied Wijaya Syahputera Sembiring
26 Maret 2020 26 March 2020	Grha Pelindo Satu Ruang Rapat Lt. 8A Kantor Pusat Grha Pelindo Satu, Meeting Room, Floor 8A, Head Office	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Risiko COVID-19 terhadap Pelindo 1 2. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat 	Dian Rachmawan Mohamad Nur Sodiq M. Hamied Wijaya Syahputera Sembiring
8 April 2020 8 April 2020	Grha Pelindo Satu Kantor Pusat-Belawan, Kantor Perwakilan Jakarta dan Cabang PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Grha Pelindo Satu at Belawan Head Office, Jakarta Representative Office and Branches of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review Kinerja Operasional 2. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat 	Dian Rachmawan Mohamad Nur Sodiq Hosadia A. Putra Syahputera Sembiring M. Hamied Wijaya
15 April 2020 15 April 2020	Grha Pelindo Satu Kantor Pusat-Belawan, Kantor Perwakilan Jakarta dan Cabang PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Grha Pelindo Satu at Belawan Head Office, Jakarta Representative Office and Branches of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progress Program Antisipasi Penyebaran COVID-19 2. Evaluasi Progres Investasi terkait kondisi Wabah COVID-19 3. Proposal Evaluasi Capex & Opex arahan KBUMN 	Dian Rachmawan Mohamad Nur Sodiq Syahputera Sembiring Hosadi A. Putra
22 April 2020 22 April 2020	Grha Pelindo Satu Kantor Pusat-Belawan, Kantor Perwakilan Jakarta PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Grha Pelindo Satu at Belawan Head Office, Jakarta Representative Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relaksasi Masa Penumpukan di TPK Belawan 2. Laporan dan Penetapan Hasil RUPS Kinerja Anak Perusahaan 2019 3. Kebijakan Baru Talent Management BOD-1 (terbatas) 4. Penetapan Remunerasi Direksi anak Perusahaan 2020 (terbatas) 5. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat 	Dian Rachmawan Syahputera Sembiring Mohamad Nur Sodiq

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances
23 April 2020 23 April 2020	Grha Pelindo Satu Kantor Pusat-Belawan, Kantor Perwakilan Jakarta PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Grha Pelindo Satu at Belawan Head Office, Jakarta Representative Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan RS PHCM dalam Menangani Pasien COVID-19 2. Penetapan Anggaran Penanganan COVID-19 Tahun 2020 3. Penanganan Piutang Usaha Bermasalah 4. Tindak Lanjut Evaluasi Investasi 2020 5. Laporan Progres pendampingan cabang Batam (terbatas) 6. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat 	Dian Rachmawan Mohamad Nur Sodik Hosadi A. Putra Syahputera Sembiring
6 Mei 2020 6 May 2020	Grha Pelindo Satu Kantor Pusat-Belawan, Kantor Perwakilan Jakarta PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Grha Pelindo Satu at Belawan Head Office, Jakarta Representative Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja Sama Pengoperasian Terminal Curah Kering di Pelabuhan Belawan dan Laporan seleksi mitra kerja sama 2. Reorganisasi Kantor Pusat dan beberapa Cabang 3. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat 	Dian Rachmawan Syahputera Sembiring Mohamad Nur Sodik Hosadi A. Putra M. Hamied Wijaya
14 Mei 2020 14 Mei 2020	Grha Pelindo Satu Kantor Pusat-Belawan, Kantor Perwakilan Jakarta PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Grha Pelindo Satu at Belawan Head Office, Jakarta Representative Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progres Tindak Lanjut kerja sama pengoperasian BNCT 2. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat 	Dian Rachmawan M. Hamied Wijaya Syahputera Sembiring Hosadia A. Putra Mohamad Nur Sodik
14 Mei 2020 14 Mei 2020	Grha Pelindo Satu Kantor Pusat-Belawan, Kantor Perwakilan Jakarta PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Grha Pelindo Satu at Belawan Head Office, Jakarta Representative Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progres Pembebasan Penlok PMT dan Kerja Sama dengan Pertamina 2. Progress on the Land Acquisition regarding the Location Determination of PT Prima Multi Terminal (PMT) Penlok and Cooperation with Pertamina 	Dian Rachmawan
27 Mei 2020 27 May 2020	Grha Pelindo Satu Ruang Rapat It. 8A Kantor Pusat Grha Pelindo Satu, Meeting Room, Floor 8A, Head Office	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Korporat s.d April 2020 2. Laporan Kesiapan Impelementasi <i>New Normal</i> Pelindo 1 3. Kerja Sama Pemanfaatan Aset eks Kantor Pusat Pelindo 1 4. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat 	Dian Rachmawan Syahputera Sembiring Mohamad Nur Sodik Hosadi A. Putra
4 Juni 2020 4 June 2020	Grha Pelindo Satu Grha Pelindo Satu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Korporat s.d April 2020 2. Readiness Report on the Implementation of the New Normal in Pelindo 1 3. Cooperation in the Assets Utilization of the Pelindo 1 Former Head Office 4. Other concerns that develop in the meeting 	Dian Rachmawan Mohamad Nur Sodik
4 Juni 2020 4 June 2020	Grha Pelindo Satu Grha Pelindo Satu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Keuangan Korporat s.d April 2020 2. Readiness Report on the Implementation of the New Normal in Pelindo 1 3. Cooperation in the Assets Utilization of the Pelindo 1 Former Head Office 4. Other concerns that develop in the meeting 	Dian Rachmawan Mohamad Nur Sodik



RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances
24 Juni 2020 24 June 2020	Grha Pelindo Satu Grha Pelindo Satu	<ol style="list-style-type: none"> Pengisian Jabatan Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas <i>Fit and Proper</i> Kandidat Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas 	Dani Rusli Utama Henri Panggabean
		<ol style="list-style-type: none"> Filling of the Position of President Director of PT Prima Terminal Petikemas Fit and Proper Test for Candidates for President Director of PT Prima Terminal Petikemas 	
30 Juni 2020 30 June 2020	Via Zoom Via Zoom	<ol style="list-style-type: none"> Perkenala Direksi Kinerja Keuangan s.d Mei 2020 	Dani Rusli Utama Henri Panggabean Ridwan Sani Siregar Henry Naldi Prasetyo
		<ol style="list-style-type: none"> Introduction of the Board of Directors Financial Performance up to May 2020 	
7 Juli 2020 7 July 2020	Grha Pelindo Satu Kantor Pusat-Belawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Grha Pelindo Satu at Belawan Head Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> <i>Pending Matters</i> Prioritas Direktorat Operasional dan Komersial Pembahasan Terkait DP4 <i>Update</i> Informasi Pembayaran Retensi Kuala Tanjung <i>Revisi</i> rencana emisi obligasi berkelanjutan I Pelindo 1 Usulan Revisi RKAP Investasi Tahun 2020 	Dani Rusli Utama Henri Panggabean Ridwan Sani Siregar Prasetyo
		<ol style="list-style-type: none"> <i>Pending Matters</i> regarding the Priorities of the Directorate of Operations and Commercial Discussion on the Pension Fund in Port and Dredging Companies (DP4) Update on Information regarding Retention Payment of Kuala Tanjung Revision on the Plan for the Issuance of Continuous Bonds I of Pelindo 1 Proposal for Revision to the 2020 WPB for Investment 	
14 Juli 2020 14 July 2020	Grha Pelindo Satu dan Kantor Perwakilan Grha Pelindo Satu and Representative Office	Pembayaran Bonus Pegawai Tahun 2019 2019 Employee Bonus Payment	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Henry Naldi Hosadi Apriza Putra Henri Panggabean Prasetyo
14 Juli 2020 14 July 2020	Grha Pelindo Satu Kantor Pusat-Belawan, Kantor Perwakilan Jakarta PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Grha Pelindo Satu at Belawan Head Office, Jakarta Representative Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> CEO <i>Direction</i> (Terbatas) Pembahasan Bonus pegawai tahun 2019 (Terbatas) <i>Revisi</i> RKAP dan Investasi <i>Pending Matters</i> Direktorat <i>Transformasi</i> dan Pengembangan Bisnis (Pemenuhan GCG pemilihan mitra BNCT dan usulan konsep kerja sama pengembangan & pengelolaan pelabuhan dan kawasan industri Kuala Tanjung) Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat 	Dani Rusli Utama Henri Panggabean Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi Ridwan Sani Siregar
		<ol style="list-style-type: none"> CEO <i>Direction</i> (Limited) Discussion on Employee Bonuses in 2019 (Limited) Revision to the WPB and Investment <i>Pending Matters</i> of the Directorate of Business Transformation and Development (Fulfillment of GCG in the BNCT partners selection and the proposal for concept of cooperation in the development & management of the Kuala Tanjung Industrial Zone) Other concerns that develop in the meeting 	
16 Juli 2020 16 July 2020	Eks Kantor pusat lama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Former Head Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> Mekanisme Pembayaran TKBM di lingkungan Pelindo 1 PBB Cabang Belawan Penetapan Direktur Bina (Terbatas) Laporan Kondisi Kesiapan Armada milik Pelindo 1 	Dani Rusli Utama Henry Naldi Ridwan Sani Siregar Prasetyo Henri Panggabean Hosadi Apriza Putra
		<ol style="list-style-type: none"> Loading and Unloading Workers (TKBM) Payment Mechanism within Pelindo 1 Belawan Branch Land and Building Taxes (PBB) Appointment of the Director of Development (Limited) Report on Pelindo 1's Fleet Readiness 	

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances
17 Juli 2020 17 July 2020	Eks Kantor pusat lama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Former Head Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Penetapan Direktur Bina (Terbatas) Appointment of the Director of Development (Limited)	Dani Rusli Utama Henry Naldi
21 Juli 2020 21 July 2020	Grha Pelindo Satu Kantor Pusat-Belawan, Kantor Perwakilan Jakarta PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Grha Pelindo Satu at Belawan Head Office, Jakarta Representative Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan Kinerja PT PIL 2. Pemaparan Kinerja UGK 3. Perpanjangan Kontrak dengan PT PHCM tentang Perawatan Kesehatan Pegawai, Pensiun & Keluarga 4. Pemaparan RJPP Pelindo 1 5. Rencana Pengakhiran Relaksasi Pelayanan 6. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentation on the Performance of PT Prima Indonesia Logistik (PIL) 2. Presentation on the Performance of Shipyard Units (UGK) 3. Contract Extension with PT PHCM regarding Health Care for Employees, Their Families and Pension 4. Presentation on Pelindo 1's Long-Term Plan 5. Plan to End Relaxation of Services 6. Other concerns that develop in the meeting 	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo
23 Juli 2020 23 July 2020	Grha Pelindo Satu Kantor Pusat-Belawan, Kantor Perwakilan Jakarta PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Grha Pelindo Satu at Belawan Head Office, Jakarta Representative Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan lanjutan penetapan pemilihan mitra BNCT 2. Laporan realisasi program Risk Management s.d Semester I 2020 3. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat <ol style="list-style-type: none"> 1. Further Report on the Determination of BNCT Partners Selection 2. Report on the Realization of the Risk Management Program up to Semester I 2020 3. Other concerns that develop in the meeting 	Dani Rusli Utama Prasetyo Henry Naldi Henri Panggabean
28 Juli 2020 28 July 2020	Via Zoom Via Zoom	<ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction (Terbatas) 2. Kebijakan PKBL Pelindo 1 3. Somasi PT Bina Uli Graha atas pembayaran pekerjaan perluasan terminal penumpang Belawan 4. Prosedur pemilihan mitra persewaan peralatan 5. Proyeksi Cashflow tahun 2020 dan pembayaran deviden tahun 2020 6. Corporate performance Juni 2020 7. Penunjukan Direksi & Komisaris Anak Perusahaan 8. Sikap Pelindo 1 di PT TPI 9. Pembahasan materi Rakomdir 10. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat <ol style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian kelas jabatan BOD-1 b. Injeksi dana Pelindo 1 di PT PATNA, KEK Lhokseumawe <ol style="list-style-type: none"> 1. CEO Direction (Limited) 2. Pelindo 1's PKBL Policies 3. Legal notice of PT Bina Uli Graha regarding request for payment for the works on the Belawan passenger terminal expansion 4. Procedure for selecting equipment rental partners 5. Projection of 2020 cashflow and dividend payments in 2020 6. Corporate performance up to June 2020 7. Appointment of Directors & Commissioners of Subsidiaries 8. Pelindo 1's attitude toward PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI) 9. Discussion on materials for the Meeting of the Board of Commissioners Including the Board of Directors (Rakomdir) 10. Other concerns that develop in the meeting: <ol style="list-style-type: none"> a. Adjustment to BOD-1 classes of positions b. Pelindo 1 capital injection into PT PATNA, Lhokseumawe Special Economic Zone (KEK) 	Dani Rusli Utama Hosadi Apriza Putra Henri Panggabean Henry Naldi Ridwan Sani Siregar Prasetyo



RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances
27 Juli 2020 27 July 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	Pembahasan Usulan Revisi RKAP Tahun 2020 Discussion on the Proposal for Revision to the 2020 WPB	Dani Rusli Utama Henri Panggabean Henry Naldi Prasetyo Hosadi Apriza Putra
30 Juli 2020 30 July 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	1. Kinerja Korporat s.d Semester 1 Tahun 2020 2. Laporan Progres Program Strategis Perusahaan 1. Corporate Performance up to Semester I 2020 2. Report on the Progresses of the Company's Strategic Programs	Dani Rusli Utama Henri Panggabean Henry Naldi Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo
4 Agustus 2020 4 August 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	1. CEO Direction (Terbatas) 2. Modul Pajak yang Memerlukan Penyelesaian Pada Sistem Front-End dan SAP 3. Pending Matters Direktorat Operasional dan Komersial 4. Laporan Tim Task Force Implementasi New Normal 5. Kebijakan PKBL: CSR Komisi VI DPR RI dan Sponsoship PSMS 6. Pemaparan Peluang Bisnis Logistik di Pelindo 1 7. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat 1. CEO Direction (Limited) 2. Tax Modules Requiring Settlements in Front-End and SAP Systems 3. Pending Matters of the Directorate of Operations and Commercial 4. Task Force Team Report on the Implementation of New Normal 5. PKBL Policies: CSR by Commission VI of the HoR of the Republic of Indonesia (DPR RI) and Sponsorship for PSMS Medan 6. Presentation on Logistics Business Opportunities at Pelindo 1 7. Other concerns that develop in the meeting	Dani Rusli Utama Henry Naldi Prasetyo Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Henry Naldi
11 Agustus 2020 11 August 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	1. CEO Direction (Terbatas) 2. Laporan penbendialian Intern s.d Semester I Tahun 2020 3. Kebijakan pengadaan dan pelaksanaan s.d Semester I Tahun 2020 1. CEO Direction (Limited) 2. Internal control report up to Semester I 2020 3. Procurement policies and their implementation up to Semester I 2020	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi
11 Agustus 2020 11 August 2020	Kantor Pusat Lama – Jl. Krakatau Ujung No. 100 Medan Former Head Office – Krakatau Ujung Street no. 100 Medan	1. Persetujuan dan Penunjukan Pelaksana Harian Direktur Utama PT Prima Indonesia Logistik (PT PIL) 2. Penempatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan 3. Mutasi Pejabat Struktural 1. Approval and Appointment of Acting President Director of PT Prima Indonesia Logistik (PT PIL) 2. Assignment of Directors and Commissioners of the Subsidiaries 3. Mutation (Transfer) of Structural Officials	Dani Rusli Utama
13 Agustus 2020 13 August 2020	Kantor Pusat Lama – Jl. Krakatau Ujung No. 100 Medan Former Head Office – Krakatau Ujung Street no. 100 Medan	Pembahasan Pemberian Shareholders Loan (SHL) kepada PT Prima Multi Terminal (PMT) Discussion on the Granting of Shareholders Loans (SHL) to PT Prima Multi Terminal (PMT)	Dani Rusli Utama
19 Agustus 2020 19 August 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	Pembahasan Pemberian Shareholders Loan (SHL) kepada PT Prima Multi Terminal (PMT) Discussion on the Granting of Shareholders Loans (SHL) to PT Prima Multi Terminal (PMT)	Dani Rusli Utama

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances
19 Agustus 2020 19 August 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	Pembahasan Pemberian <i>Shareholders Loan</i> (SHL) kepada PT Prima Multi Terminal (PMT) Discussion on the Granting of Shareholders Loans (SHL) to PT Prima Multi Terminal (PMT)	Dani Rusli Utama
26 Agustus 2020 26 August 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Pengendalian Internal s.d Semester I Tahun 2020 Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya s.d Semester I Tahun 2020 Action Plan Pengadaan Tanah Kuala Tanjung, Khususnya Areal TBBM <i>Update Partner Selection</i> dan <i>Action Plan</i> <ol style="list-style-type: none"> Internal Control Report up to Semester I 2020 Procurement Policies and Their Implementation up to Semester I 2020 Action Plan for Land Acquisition in Kuala Tanjung, particularly the Fuel Oil Terminal (TBBM) area Updates on Partners Selection and Action Plans 	Dani Rusli Utama Prasetyo Henry Naldi Ridwan Sani Siregar
27 Agustus 2020 27 August 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	CSPA Conditional Sales & Purchase Agreement (CSPA)	Dani Rusli Utama Prasetyo Henry Naldi Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza
28 Agustus 2020 28 August 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	Standarisasi TPK <i>Rolling Plan</i> RJPP Standardization of Container Terminals (TPK) Rolling Plan for the Company's Long-Term Plan (RJPP)	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi
28 Agustus 2020 28 August 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> Kewenangan Pelaksana Harian Direktur Keuangan Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat <ol style="list-style-type: none"> Authorities of the Acting Director of Finance Other concerns that develop in the meeting 	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi
1 September 2020 1 September 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> CEO <i>Direction</i> (A1; Terbatas) Finalisasi Revisi RKAP 2020 (Plh A6; SVP PPA) Diklat Sertifikasi ANT-II bagi Pandu (A5;SVP MSSDM) Hal-hal Lain yang Berkembang <ol style="list-style-type: none"> CEO <i>Direction</i> (A1; Limited) Finalization of Revision to the 2020 WPB (Ag. A6; SVP of BPC) ANT-II Certification Training for Pilots (A5; SVP of HRSM) Other concerns that develop 	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi
8 September 2020 8 September 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> CEO <i>Direction</i> (A1; Terbatas) Perjanjian Kerja Sama dengan BP Batam (A2; SVP Marketing) Perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan Tanah an. PT Pusri dan PT Nubika Jaya (A2;SVP BP&PA) Pemanduan Selat Malaka dgn PT PUJ (A2;SVP Bismar) Asuransi Jiwasraya (A5;SVP MSSDM) Hal-hal Lain yang Berkembang <ol style="list-style-type: none"> CEO <i>Direction</i> (A1; Limited) Cooperation Agreement with BP Batam (A2; SVP of Marketing) Extension of Land Use Agreement p.p. PT Pusri and PT Nubika Jaya (A2; SVP of PB&AM) Pilotage in the Strait of Malacca with PT PUJ (A2; SVP of MB) Asuransi Jiwasraya Insurance (A5; SVP of HRSM) Other concerns that develop 	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi



RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances
11 September 2020 11 September 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> SHL ke PMT Tahap 2 (A6;Dirut PMT) HAI-hal Lain yang Berkembang Dalam Rapat <ol style="list-style-type: none"> SHL to PMT Phase 2 (A6; MD of PMT) Other concerns that develop in the meeting 	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi
15 September 2020 15 September 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> Usulan Addendum No. 3 Perjanjian Konsesi (A6;SVP Pajak) Progres Penyempurnaan Penerbitan Nota & Modul Pajak di Sistem <i>Front End</i> dan SAP (A6;SVP Pajak) Denda Pajak Karena Gagal Produksi PTP (A6;SVP Pajak) Hal-hal Lain yang Berkembang Dalam Rapat <ol style="list-style-type: none"> Proposal for Addendum No. 3 in Concession Agreement (A6; SVP of Tax) Progress on Improvement of Tax Notes & Modules Issuance in the Front-End and SAP System (A6; SVP of Tax) Tax Fines due to PTP Production Failure (A6; SVP of Tax) Other concerns that develop in the meeting 	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi
17 September 2020 17 September 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> Penataan Terminal Penumpang Tanjung Balai Karimun (A3;SVP Fasilitas) Batasan Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa (A3;SVP Pengadaan) Addendum Pemeliharaan dan Pengoperasian Terminal Tractor di TPK Belawan (A3;SVP Peralatan) <ol style="list-style-type: none"> Arrangement of Tanjung Balai Karimun Passenger Terminal (A3; SVP of Facilities) Limits of Authority for Goods and Services Procurement (A3; SVP of Procurement) Addendum on Maintenance and Operation of Tractor Terminal in Belawan Container Terminal (A3; SVP of Equipment) 	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi
22 September 2020 22 September 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction (A1; Terbatas) Rolling Plan RJPP 2020-2024 (A1; SVP MSP) Addendum Pek. Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Belawan (A3; SVP Fasilitas) Penataan CY TPK Perawang (A4; SVP PPB) <ol style="list-style-type: none"> CEO Direction (A1; Limited) Rolling Plan for the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2020-2024 (A1; SVP of CSM) Addendum on the Works of Dredging Channels and Ponds in the Port of Belawan (A3; SVP of Facilities) Arrangement of Container Yards (CY) in Perawang Container Terminal (TPK) (A4; SVP of BPD) 	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi
22 September 2020 22 September 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<p>Draft OE BNCT untuk Rencana Kerja Sama dengan Mitra Strategis (A4; PMO SCA)</p> <p>BNCT OE Draft for Cooperation Plans with Strategic Partners (A4; PMO of SCA)</p>	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi
30 September 2020 30 September 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<p>CEO Direction (A1; Terbatas)</p> <p>Rencana Kerja Sama Penggunaan Tanah dengan BUMN Kota Dumai (A2; SVP BisPro&PA)</p> <p>CEO Direction (A1; Limited)</p> <p>Plan for Land Use Cooperation with SOE in Dumai City (A2; SVP PB&AM)</p>	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Henry Naldi Prasetyo
1 Oktober 2020 1 October 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja PT PIL sd Agustus 2020 Posisi Kekuatan Armada Pelindo (A2;SVP Bismar) Pelayanan Pemanduan Selat Malaka (A2;SVP Bismar) <ol style="list-style-type: none"> Performance Evaluation of PT PIL up to August 2020 Pelindo Fleet Strength Position (A2; SVP of MB) Pilotage Services for the Strait of Malacca (A2; SVP of MB) 	Dani Rusli Utama Hosadi Apriza Putra Ridwan Sani Siregar Prasetyo Henry Naldi

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances
6 Oktober 2020 6 October 2020	RR. 8A Grha Pelindo Satu RR. 8A Grha Pelindo Satu	<ol style="list-style-type: none"> CEO <i>Direction</i> (terbatas) BNCT <i>Updates</i> : Penunjukan Konsultan <i>Review</i> Penetapan OE dan Kelanjutan Proses Pemilihan Mitra (A4;PMO SCA) Hal-hal Lain yang Berkembang (A5;SVP MSSDM;terbatas) <ol style="list-style-type: none"> CEO <i>Direction</i> (limited) BNCT <i>Updates</i> : Appointment of Consultants to Review the Determination of OE and Continuation of Partners Selection Process (A4; PMO of SCA) Other concerns that develop (A5; SVP of HRSM; limited) 	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi
20 Oktober 2020 20 October 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> CEO <i>Direction</i> (terbatas) Usulan RKAP 2021 (A6;SVP PPA) Reorganisasi Cabang dan Anak Perusahaan;Belawan, Batam, Malahayati, PT Prima Indonesia Logistik, dan PT Prima Multi Terminal (A5;SVP MSSDM) Restrukturisasi Unit Galangan Kapal (A3;SVP Peralatan) Lain-lain yang Berkembang <ol style="list-style-type: none"> CEO <i>Direction</i> (limited) Proposal for the 2021 WPB (A6; SVP of BPC) Reorganization of Branches and Subsidiaries; Belawan, Batam, Malahayati, PT Prima Indonesia Logistik and PT Prima Multi Terminal (A5; SVP of HRSM) Restructurization of Shipyard Units (A3; SVP of Equipments) Other concerns that develop 	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi
22 Oktober 2020 22 October 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	Finalisasi Materi Rakomdir usulan RKAP 2021 (A6;SVP PPA) Finalization of Materials for the Meeting of the Board of Commissioners Including the Board of Directors (Rakomdir) on the Proposal of the 2021 WPB (A6; SPV of BPC)	Dani Rusli Utama Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi Ridwan Sani Siregar
3 November 2020 3 November 2020	Grha Pelindo Satu Grha Pelindo Satu	<ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian Tagihan Pengadaan Meubelair Gedung Kantor Baru (A5; SVP Umum) Bantuan Penghasilan Pensiunan (A5; MSSDM) <ol style="list-style-type: none"> Settlement of Bills on the Procurement of Furnitures for the New Office Building (A5; SVP of GA) Income Support for Retirees (A5; HRSM) 	Dani Rusli Utama Hosadi Apriza Putra Ridwan Sani Siregar Prasetyo Henry Naldi Roy Leonard
3 November 2020 3 November 2020	Grha Pelindo Satu Grha Pelindo Satu	Update progres konsorsium Pelindo 1, Inalum & Wika untuk Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung (A4; PMO SCA) Updates on the progress of the consortium between Pelindo 1, Inalum & Wika for the Development of the Kuala Tanjung Industrial Zone (A4; PMO of SCA)	Dani Rusli Utama Prasetyo Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra Roy Leonard
3 November 2020 3 November 2020	Grha Pelindo Satu Grha Pelindo Satu	Rencana Pengadaan Tanah Sesuai Penetapan Lokasi 1.128 Ha (A4; PMO SCA) Plan for Land Acquisition according to Location Determination covering 1,128 Ha (A4; PMO of SCA)	Dani Rusli Utama Prasetyo Ridwan Sani Siregar Hosadi Apriza Putra
13 November 2020 13 November 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Tinjauan Manajemen Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat <ol style="list-style-type: none"> Management Review Meeting on the Implementation of Anti-Bribery Management System (ISO 37001: 2016) Other concerns that develop in the meeting 	Dani Rusli Utama Hosadi Apriza Putra Henry Naldi Ridwan Sani Siregar



RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances
17 November 2020 17 November 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction (A1;terbatas) Laporan Keu sd Okt 2020 (A6;SVP PPA) Rencana Penerbitan Saham Baru Perseroan PT PPK (A4;SCA) Updating persiapan acara ulang tahun Pelindo 1 (A4;Panpel) Lap Realisasi PKPT SPI sd Triwulan III 2020 (A6;SVP SPI) Persiapan Operasi Natal dan Tahun Baru (A2;SVP Bisterlog) Rencana Operasional Depo di Batam (A2;SVP Bisterlog) 	Dani Rusli Utama Roy Leonard Ridwan Sani Siregar Prasetyo Henry Naldi Hosadi Apriza Putra
24 November 2020 24 November 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> Review Organisasi PT PIL dan PT PMT. (A5;SVP MSSDM) Hal-hal lain yang berkembang. (Update progres Pending Matters dari Dekom; Corsec) 	Dani Rusli Utama Ridwan Sani Siregar Henry Naldi Roy Leonard Hosadi Apriza Putra Prasetyo
1 Desember 2020 1 December 2020	Griha Pelindo Satu Ruang Rapat It. 8A Kantor Pusat Griha Pelindo Satu, Meeting Room, Floor 8A, Head Office	Laporan hasil Studi Bisnis Logistik Pelindo 1 Report on the results of Logistics Business Study of Pelindo 1	Dani Rusli Utama Prasetyo Hosadi Apriza Putra Henry Naldi Roy Leonard Ridwan Sani Siregar
8 Desember 2020 8 December 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> CEO Direction Tindak Lanjut Status UGK Kontrak Manajemen BOD Sesuai Permen No.PER-11/MBU/2020 Usulan Investasi 	Dani Rusli Utama Hosadi Apriza Putra Prasetyo Henry Naldi Roy Leonard Ridwan Sani Siregar
9 Desember 2020 9 December 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	<ol style="list-style-type: none"> Usulan RKAP 2021 Revitalisasi Implementasi Manajemen Resiko Usulan Revisi Perdir Pengadaan 	Dani Rusli Utama Roy Leonard Ridwan Sani Siregar Prasetyo Hosadi Apriza Putra Henry Naldi
29 Desember 2020 29 December 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	Pembahasan Materi Rakomdir Discussion on Materials of the Meeting of the BOC Including BOD (Rakomdir)	Dani rusli Utama Prasetyo Ridwan Sani Siregar Henry Naldi Hosadi Apriza Putra
30 Desember 2020 30 December 2020	Zoom Meeting Zoom Meeting	Laporan Kinerja sd November 2020 Performance Report up to November 2020	Dani Rusli Utama Roy Leonard Ridwan Sani Siregar Henry Naldi Hosadi Apriza Putra Prasetyo

Rekapitulasi kehadiran anggota Direksi dapat dilihat di bawah ini.

A recapitulation of attendances of the Board of Directors members is presented below.

REKAPITULASI KEHADIRAN DIREKSI PADA RAPAT
RECAPITULATION OF ATTENDANCES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN MEETINGS

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dian Rachmawan (Direktur Utama I President Director)*	18	18	100%
Dani Rusli Utama (Direktur Utama I President Director)**	45	45	100%
Syahputera Sembiring (Direktur Operasional & Komersial I Director of Operations & Commercial)*	18	13	72,22%
Ridwan Sani Siregar (Direktur Operasional & Komersial I Director of Operations & Commercial)**	45	38	84,44%
Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik I Director of Engineering)*	63	41	65,08%
Hosadi Apriza Putra (Direktur Teknik I Director of Engineering)**	45	10	22,22%
Ihsanuddin Usman (Direktur Transformasi & Pengembangan Usaha I Director of Business Transformation & Development)*	18	4	22,22%
Prasetyo (Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis I Director of Business Transformation & Development)**	45	38	84,44%
M. Hamied Wijaya (Direktur Sumber Daya Manusia I Director of Human Resources)*	18	7	38,39%
Henry Naldi (Direktur Sumber Daya Manusia & Umum I Director of Human Resources & General Affairs)**	45	36	80,00%
Mohamad Nur Sodik (Direktur Keuangan I Director of Finance)*	18	15	83,33%
Roy Leonard (Direktur Keuangan I Director of Finance)**	11	8	72,73%
Rata-rata (In Average)			68,76%
*) Tidak lagi menjabat sejak 22 Juni 2020 No longer served as of 22 June 2020			
**) Mulai menjabat sejak 22 Juni 2020 Serving as of 22 June 2020			
***) Mulai menjabat sejak 22 Juni 2020 dan meninggal dunia pada 30 Agustus 2020 Serving as of 22 June 2020 and passed away on 30 August 2020			
****) Mulai menjabat sejak 22 Oktober 2020 Serving as of 22 October 2020			



PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

DISCLOSURE OF AFFILIATIONS BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND THE MAJORITY SHAREHOLDERS

Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan kerja sebagai organ utama tata kelola perusahaan yang masing-masing memiliki peran sebagai fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan Perusahaan.

The Board of Commissioners, the Board of Directors and Shareholders respect each other's implementation of duties, responsibilities, and authorities in accordance with laws and regulations and the Articles of Association. The relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a work relationship as the main organs of corporate governance in the Company, each of which has the role as supervisory function and management function, respectively.

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

AFFILIATIONS BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Familial relationships between a member of the Board of Commissioners and his/her fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and the Shareholders can be seen in below table.

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Organ Perseroan Familial Relationships with Organs of the Company						Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Lain Professional Affiliations with Another Company					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Sebagai Dewan Komisaris As Commissioner		Sebagai Direksi As Director		Sebagai Pemegang Saham As Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Achmad Djamaludin Komisaris Utama President Commissioner		X		X		X		X		X		X
Arman Depari Komisaris Commissioner		X		X		X		X		X		X
Winata Supriyatna Komisaris Commissioner		X		X		X		X		X		X
Irma Suryani Chaniago Komisaris Independen Independent Commissioner		X		X		X		X		X		X
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan Komisaris Independen Independent Commissioner		X		X		X		X		X		X
Ahmad Perwira Mulia Tarigan Komisaris Independen Independent Commissioner		X		X		X		X		X		X

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI

Hubungan keluarga anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

AFFILIATIONS BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Familial relationships between a member of the Board of Commissioners and his/her fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and the Shareholders can be seen in below table.

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Organ Perseroan Familial Relationships with Organs of the Company						Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Lain Professional Affiliations with Another Company					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Sebagai Dewan Komisaris As Commissioner		Sebagai Direksi As Director		Sebagai Pemegang Saham As Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dani Rusli Utama Direktur Utama President Director		X		X		X		X		X		X
Ridwan Sani Siregar Direktur Operasional & Komersial Director of Operations & Commercial		X		X		X		X		X		X
Hosadi Apriza Putra Direktur Teknik Director of Engineering		X		X		X		X		X		X
Prasetyo Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Director of Business Transformation and Development		X		X		X		X		X		X
Henry Naldi Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Director of Human Resources & General Affairs		X		X		X		X		X		X
Roy Leonard Direktur Keuangan Director of Finance		X		X		X		X		X		X



PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Direksi dalam Penerapan Praktik GCG Pelindo 1. Benturan kepentingan adalah situasi ketika Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi di mana kepentingan pribadi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai serta keluarga Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan (baik hubungan vertikal maupun *horizontal*) dengan kepentingan Perseroan berada dalam posisi yang saling bertentangan. Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai serta keluarga (baik hubungan vertikal maupun *horizontal*) tidak diizinkan untuk ikut serta dalam pengadaan di perusahaan, dan aktivitas-aktivitas lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.

Prinsip utama yang dianut oleh Perseroan yang harus diikuti untuk pencegahan terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkan antara lain:

1. Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait;
2. Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai serta keluarga Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai (baik hubungan vertikal maupun *horizontal*) harus menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Aktivitas yang dimaksud merupakan aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan Perseroan;
3. Pengungkapan kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris, Direksi beserta keluarganya dalam daftar khusus.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Perseroan serta keluarga Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Perseroan (baik hubungan vertikal maupun *horizontal*) tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan di Perseroan yang melibatkan suatu badan usaha di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut.

The management of conflicts of interest of the Board of Commissioners and the Board of Directors is provisioned in the Regulation of the Board of Directors on the Implementation of GCG Practices in Pelindo 1. Conflict of interest is a situation where the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) have or are reasonably suspected of having personal interests in any use of authority on their job title or position, affecting the quality of their decisions and/or actions.

The Company defines conflict of interest as a situation in which the personal interests of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Employees of the Company as well as each of their respective families (both vertically and horizontally) Company are in conflicting positions against the interests of the Company. The Board of Commissioners, the Board of Directors and Employees as well as their families (both in vertical and horizontal relationships) are not allowed to participate in the Company procurement and other activities that result in a conflict of interest.

The main principles adopted by the Company that shall be followed to prevent conflicts of interest and their subsequent implications which often occur include:

1. The Board of Commissioners, the Board of Directors and employees do not take advantages of their position for their own private interests or for the benefit of other related individuals or parties;
2. The Board of Commissioners, the Board of Directors and employees as well as each of their respective families (both vertically and horizontally) shall avoid any activities outside the Company that could negatively affect the independence and objectivity of considerations in decision-making. The activities referred to are activities that may conflict with the performance of a position or which may be detrimental to the Company;
3. Disclosure of shares ownership by the Board of Commissioners, the Board of Directors and their families in the special register.

MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST IN PROCUREMENT

The Board of Commissioners, the Board of Directors and Employees of the Company as well as each of their respective families (both vertical and horizontal relationships) shall not participate in any procurement activities in the Company that involve a business entity in which the person concerned or the family concerned has significant shares ownership or has financial interest in the transactions.

Perseroan mendefinisikan berpartisipasi dalam proses pengadaan sebagai berikut:

1. Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan badan usaha yang memiliki keterkaitan dalam hal kepemilikan saham dan kepentingan transaksi finansial dengan Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Perseroan dan keluarga Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai (baik secara vertikal maupun *horizontal*), yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi peserta atau pemenang pengadaan pekerjaan dari Perseroan;
2. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan tanpa hak dan bertentangan dengan kebijakan Perseroan.

BENTURAN KEPENTINGAN DAN AKTIVITAS SAMPIANGAN

Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai diizinkan melakukan aktivitas lain (kecuali aktivitas politik) di luar jam kerja, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan yang bersangkutan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan.

Keterlibatan dalam aktivitas lain tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan pegawai yang bersangkutan.

Setiap pegawai harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam segenap kegiatan sehari-hari. Apabila kemudian Direksi dan/atau pegawai Perseroan merasa akan menimbulkan benturan kepentingan dalam kegiatan yang dilaksanakan, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan dengan menggunakan formulir yang tersedia untuk maksud tersebut. Formulir permohonan izin untuk melakukan aktivitas sampingan yang mengakibatkan benturan kepentingan harus disampaikan dan mendapat persetujuan dari pejabat yang ditunjuk sebelum menjalankan pekerjaan sampingan tersebut.

The Company defines participation in procurement processes as follows:

1. Inviting, approving, or discussing future works with business entities affiliated by shares ownership and interests in financial transactions with the Board of Commissioners, the Board of Directors, employees of the Company and the families of the Board of Commissioners, Directors and employees as well as each of their respective families (both vertically and horizontally), who may in the future be a participant or winner of procurement works in the Company;
2. Trying to obtain or disclose information related to the procurement processes without rights and against the Company's policy.

CONFLICTS OF INTEREST AND SIDE ACTIVITIES

The Board of Commissioners, the Board of Directors and employees are permitted to carry out other activities (except political activities) outside of business hours, on conditions that such activities do not have a conflict of interest with the Company's interests or do not reduce the ability of those concerned to fulfill their duties as mandated.

Involvement in other activities shall not reduce independence and objectivity in making decisions or affect the effectiveness and timeliness of works completion of the employee concerned.

Every employee shall uphold performance standards without exception and act as objectively and independently as possible in the entire daily activities. If later the Board of Directors and/or employees of the Company feel that they may cause a conflict of interest in activities being carried out, then those concerned are obliged to notify using the form provided for that purpose. The application form for permission to carry out a side activity that results in a conflict of interest shall be submitted and approved by appointed official(s) prior to undertaking the side work in question.





PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DISCLOSURE OF SHARES OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

TABEL KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
TABLE OF SHARES OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

	Kepemilikan Saham Shares Ownership	
	Pelindo 1 in Pelindo 1	Perusahaan Lain in Other Companies
Dewan Komisaris The Board of Commissioners		
Achmad Djamaludin Komisaris Utama President Commissioner	Nihil None	Nihil None
Arman Depari Komisaris Commissioner	Nihil None	Nihil None
Winata Supriyatna Komisaris Commissioner	Nihil None	Nihil None
Irma Suryani Chaniago Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None
Ahmad Perwira Mulia Tarigan Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None
Direksi The Board of Directors		
Dani Rusli Utama Direktur Utama President Director	Nihil None	Nihil None
Ridwan Sani Siregar Direktur Operasional & Komersial Director of Operations & Commercial	Nihil None	Nihil None
Hosadi Apriza Putra Direktur Teknik Director of Engineering	Nihil None	Nihil None
Prasetyo Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Director of Business Transformation and Development	Nihil None	Nihil None
Henry Naldi Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Director of Human Resources & General Affairs	Nihil None	Nihil None
Roy Leonard Direktur Keuangan Director of Finance	Nihil None	Nihil None

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Program pengembangan kompetensi bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kepengurusan Perseroan dan memberikan nasihat strategis pada Direksi untuk kemajuan Perseroan. Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

The competency development program aims to enhance the insights and knowledge of the Board of Commissioners in order to improve the ability to carry out its duties, functions and responsibilities in supervising the Company's management and providing strategic advices to the Board of Directors for the Company's advance. The competence advancement activities in which the Board of Commissioners participated throughout 2020 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.





ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Agar dapat menjalankan tugas lebih efektif, apabila diperlukan Dewan Komisaris berhak mendapatkan saran profesional independen atas beban perusahaan untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawab profesional Dewan Komisaris. Apabila diperlukan, Dewan Komisaris berhak membentuk organ pendukung sebagai alat bantu dalam menjalankan tugasnya.

Organ pendukung tersebut bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas yang bersangkutan. Penetapan Kebijakan Dewan Komisaris tetap menjadi wewenang Dewan Komisaris kecuali untuk hal-hal yang telah didelegasikan kewenangannya dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut salah satu anggotanya adalah anggota Dewan Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite. Hingga akhir Desember 2020, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko bertugas melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas laporan yang dikelola oleh Manajemen Risiko & Pengendalian Mutu melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas progres dan tindak lanjut.

Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko juga memiliki tugas terkait dengan fungsi nominasi berupa memberikan rekomendasi mengenai komposisi jabatan, membantu penilaian kinerja, rekomendasi program pengembangan dan rekomendasi usulan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Adapun tugas terkait dengan fungsi remunerasi berupa memberikan rekomendasi mengenai struktur remunerasi, kebijakan dan besaran remunerasi serta membantu penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris. Tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris yaitu melaksanakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.

In order to perform its duties more effectively, the Board of Commissioners has the right to receive independent professional advices, if necessary, at the expense of the Company for matters that are of its professional responsibility. If necessary, the Board of Commissioners has the right to form supporting organs as a helping tool in carrying out its duties.

These supporting organs are responsible for assisting the Board of Commissioners in accordance with the scope of their duties. Establishment of the Board of Commissioners Policies remains as the authority of the Board of Commissioners, except for matters of which authorities have been delegated through the Decree of the Board of Commissioners. One of the members of these committees is a member of the Board of Commissioners who also serves as the Chairman of the Committee or Deputy Chairman of the Committee. Until the end of December 2020, the Board of Commissioners has formed the Audit Committee and the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee.

The Audit Committee is in charge of assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the performance of the external and internal auditors' duties. The Nomination, Remuneration and Risk Management Committee is tasked with reviewing and providing recommendations on reports managed by the Risk Management & Quality Control team through regular meetings or other means to discuss progresses and follow-ups.

The Nomination, Remuneration and Risk Management Committee also has duties related to the nomination function in the form of providing recommendations on the composition of positions, assisting in performance assessments, recommendations on development programs and recommendations on proposals for candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS. The duties related to the remuneration function include providing recommendations on remuneration structure, remuneration policies and amount as well as assisting in the performance assessments commensurate with the remuneration received.

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretary of the Board of Commissioners is appointed to assist the implementation feasibility of the Board of Commissioners' duties. He/she is responsible for carrying out administrative and secretarial activities related to all activities of the Board of Commissioners.

Fungsi dan penugasan Sekretaris Dewan Komisaris meliputi: mengadministrasikan undangan rapat Dewan Komisaris, sebagai penghubung Dewan Komisaris dan Direksi, membuat surat-surat keluar, mendokumentasikan surat-surat, menyusun risalah rapat Dewan Komisaris, tugas kesekretariatan lainnya, memberikan bantuan ringkasan laporan manajemen, menyiapkan bahan rapat Dewan Komisaris, mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris.

Secara garis besar, tugas Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris;
3. Mengoordinasikan tugas-tugas administratif, kesekretariatan dan protokoler Dewan Komisaris;
4. Mengoordinasikan dan tindak lanjut atas permintaan dan/atau pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan dan eksternal yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
5. Mengoordinasikan penyusunan rancangan anggaran dan menyampaikan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris;
6. Mengoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Mengoordinasikan dan tindak lanjut atas tugas lain yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite di bawah Dewan Komisaris; Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh Neneng Suryatiningsih berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KP 03 Tahun 2019 tanggal 23 April 2019.

The functions and assignments of the Secretary of the Board of Commissioners include: administering invitations for the Board of Commissioners' meetings, acting as a liaison officer between the Board of Commissioners and the Board of Directors, writing outgoing letters, archiving letters, writing the Board of Commissioners' Meetings minutes, carrying out other secretarial duties, providing summarizing assistance on management reports, preparing materials for the Board of Commissioners' meetings, gathering materials and information relevant to the implementation of the Board of Commissioners' duties and coordinating with the Corporate Secretary on matters related to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners.

In general, the duties of the Secretary of the Board of Commissioners are as follows:

1. Assisting the Board of Commissioners by writing minutes of the Board of Commissioners' meetings;
2. Coordinating the Board of Commissioners' meetings;
3. Coordinating administrative, secretarial and protocolary tasks of the Board of Commissioners;
4. Coordinating and following up requests and/or collection of data/information from and/or to the Company's management and external parties that are not included in the scope of the Committee's duties, including information on laws and regulations relevant to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
5. Coordinating the preparation of draft budget and presenting the Annual Budget of the Board of Commissioners;
6. Coordinating the compilation of recommendations and opinions on the agenda and materials of the General Meeting of Shareholders;
7. Coordinating and following up on other tasks that are not included in scope of duties of the Committees under the Board of Commissioners; Remuneration for the Secretary of the Board of Commissioners.

PROFILE OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The position of the Secretary of the Board of Commissioners is currently held by Neneng Suryatiningsih, based on the Decree of the Board of Commissioners No. KP 03 of 2019 dated 23 April 2019.





Neneng Suryatiningsih
Sekretaris Dewan Komisaris (Secretary of the Board of Commissioners)
Periode Jabatan (Term of Office): 23 April 2019 - Sekarang (23 April 2019 - Now)

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 46 tahun
Tempat/tanggal lahir Subang, 10 Juli 1974

Personal Information
Nationality: Indonesian
Age: 46 years old
Place and Date of Birth: Subang, 10 July 1974

Pendidikan (Education)

- D3 Akademi Keuangan dan Perbankan Indonesia, Keuangan dan Perbankan, Bandung (1994)
- S1 Sarjana Manajemen STIE-Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan, Bandung (1997)
- S2 Magister Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- D3 Akademi Keuangan dan Perbankan Indonesia, Keuangan dan Perbankan, Bandung (1994)
- S1 Sarjana Manajemen STIE-Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan, Bandung (1997)
- S2 Magister Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Pengalaman Kerja (Professional Experiences)

1. Kepala Sub Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Usaha Industri Strategis II (2008-2010)
2. Kepala Sub Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur iiiB1 (2010-2013)
3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Dok dan Kodja Bahari (2008-2012)
4. Kepala Sub Bidang Usaha Jasa lic1 (2013-2014)
5. Kepala Sub Bidang Usaha Pertanian (2014-2015)
6. Kepala Sub Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Iia-1 (2015-2017)
7. Kepala Sub Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Ia-1 (2017-2018)
8. Kepala Sub Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Ia-2 (2018-2019)
9. Kepala Sub Bidang Penyertaan Modal Negara BUMN (2019-sekarang)
10. Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IV (2016-Sekarang)
11. Sekretaris Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (2011-2016)

Pengalaman Kerja (Professional Experiences)

1. Kepala Sub Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Usaha Industri Strategis II (2008-2010)
2. Kepala Sub Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur iiiB1 (2010-2013)
3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Dok dan Kodja Bahari (2008-2012)
4. Kepala Sub Bidang Usaha Jasa lic1 (2013-2014)
5. Kepala Sub Bidang Usaha Pertanian (2014-2015)
6. Kepala Sub Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Iia-1 (2015-2017)
7. Kepala Sub Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Ia-1 (2017-2018)
8. Kepala Sub Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Ia-2 (2018-2019)
9. Kepala Sub Bidang Penyertaan Modal Negara BUMN (2019-sekarang)
10. Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IV (2016-Sekarang)
11. Sekretaris Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (2011-2016)

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dengan tujuan utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan dan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Komposisi anggota Komite Audit Perseroan tahun 2020 beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite, 1 (satu) Wakil Komite dan 2 (dua) anggota berasal dari pihak independen. Berikut ini, kronologi susunan Komite Audit di sepanjang tahun 2020 dan komposisi Komite Audit Perseroan per 31 Desember 2020:

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee was formed with the main objective of assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory responsibilities. The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners and carries out its functions in accordance with the regulations and instructions received from the Board of Commissioners.

COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE

The Company's Audit Committee in 2020 comprises 4 (four) members, particularly consisting of 1 (one) Chairperson of the Committee, 1 (one) Deputy Chairperson of the Committee and 2 (two) members from independent parties. The following are the chronology of the composition of the Audit Committee throughout 2020 and the composition of the Audit Committee as of 31 December 2020:

**KRONOLOGI SUSUNAN KOMITE AUDIT
DI SEPANJANG TAHUN 2020**
**CHRONOLOGY OF COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE
THROUGHOUT 2020**

1 Januari – 20 April 2020 1 January – 20 April 2020	20 April – 31 Desember 2020 20 April – 31 December 2020	Keterangan Description
Heryadi (Ketua Komite Audit) (Chairperson)		Heryadi tidak lagi menjabat dalam jajaran Komite Audit per 20 April 2020 Heryadi no longer served as member of the Audit Committee as of 20 April 2020
	Irma Suryani Chaniago (Ketua Komite Audit) (Deputy Chairperson)	Irma Suryani Chaniago menjabat dalam jajaran Komite Audit per 20 April 2020 Irma Suryani Chaniago has been serving as member of the Audit Committee as of 20 April 2020
Lukita Dinarsyah Tuwo (Wakil Ketua Komite Audit) (Deputy Chairperson)		Lukita Dinarsyah Tuwo tidak lagi menjabat dalam jajaran Komite Audit per 20 April 2020 Lukita Dinarsyah Tuwo no longer served as member of the Audit Committee as of 20 April 2020
	Arman Depari (Wakil Ketua Komite Audit) (Deputy Chairperson)	Arman Depari menjabat dalam jajaran Komite Kocak Audit per 20 April 2020 Arman Depari has been serving as member of the Audit Committee as of 20 April 2020
Eddy Hary Susanto (Anggota Komite Audit) (Member)		Eddy Hary Susanto tidak lagi menjabat dalam jajaran Komite Audit per 20 April 2020 Eddy Hary Susanto no longer served as member of the Audit Committee as of 20 April 2020
Saiful Bahri (Anggota Komite Audit) (Member)	Saiful Bahri (Anggota Komite Audit) (Member)	-
	Deni Sulisty (Anggota Komite Audit) (Member)	Deni Sulisty menjabat dalam jajaran Komite Audit per 20 April 2020 Deni Sulisty has been serving as member of the Audit Committee as of 20 April 2020

KOMPOSISI KOMITE AUDIT PER 31 DESEMBER 2020
COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE AS OF 31 DECEMBER 2020

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Irma Suryani Chaniago	Ketua Komite Audit Chairperson	Keputusan Dewan Komisaris No. KP 06 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Decree of the Board of Commissioners No. KP 06 of 2020 dated 22 April 2020 on Termination and Appointment of Members of the Audit Committee in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Commensurate with the term of office as Commissioner
Arman Depari	Wakil Komite Audit Deputy Chairperson	Keputusan Dewan Komisaris No. KP 06 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Decree of the Board of Commissioners No. KP 06 of 2020 dated 22 April 2020 on Termination and Appointment of Members of the Audit Committee in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris Commensurate with the term of office as Commissioner
Saiful Bahri	Anggota Komite Audit Member	Keputusan Dewan Komisaris No. KP 04 Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Decree of the Board of Commissioners No. KP 04 of 2019 dated 25 April 2019 on Appointment of Members(s) of the Audit Committee in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	25 April 2019 - Sekarang 25 April 2019 - Now
Deni Sulisty	Anggota Komite Audit Member	Keputusan Dewan Komisaris No. KP 06 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Decree of the Board of Commissioners No. KP 06 of 2020 dated 22 April 2020 on Termination and Appointment of Members of the Audit Committee in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	22 April 2020 - Sekarang 22 April 2020 - Now



PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

PROFILES OF THE AUDIT COMMITTEE MEMBERS

IRMA SURYANI CHANIAGO

KETUA KOMITE AUDIT/KOMISARIS
CHAIRPERSON OF THE AUDIT COMMITTEE/COMMISSIONER

Profil Ketua Komite Audit, Irma Suryani Chaniago telah disajikan sebagai Komisaris pada profil Dewan Komisaris yang terdapat dalam buku Laporan Tahunan ini.

Profile of the Chairperson of the Audit Committee, Irma Suryani Chaniago has been presented as Commissioner on the Profile of the Board of Commissioners section contained in this Annual Report book.

ARMAN DEPARI

WAKIL KETUA KOMITE AUDIT/KOMISARIS
DEPUTY CHAIRPERSON OF THE AUDIT COMMITTEE/COMMISSIONER

Profil Wakil Ketua Komite Audit, Arman Depari telah disajikan sebagai Komisaris pada profil Dewan Komisaris yang terdapat dalam buku Laporan Tahunan ini.

Profile of the Deputy Chairperson of the Audit Committee, Arman Depari has been presented as Commissioner on the Profile of the Board of Commissioners section contained in this Annual Report book.

SAIFUL BAHRI
ANGGOTA KOMITE AUDIT
MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE

Periode Jabatan

Term of Office
 25 April 2019, Periode Ke-1
 25 April 2019, 1st Period

Domisili

Domicile
 Bogor, Jawab Barat, Indonesia
 Bogor, West Java, Indonesia

Data Pribadi

Data Pribadi
 Warga Negara Indonesia
 Usia 45 tahun
 Nationality Indonesian
 45 years old

Pendidikan

Education
 Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas
 Gadjah Mada
 Bachelor (S1) in Accounting from
 Gadjah Mada University

Pengalaman Kerja

- Auditor di KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan (1998-2000)
- Chief Accounting di PT Cahaya Buana Group (2004)
- Administration Head di PT Suzuki Finance Indonesia (2005-2007)
- Branch Operation Manager di PT Finansia Multi Finance (2007-2011)
- Area Internal Auditor (Cluster Quality Assurance) di PT. Bahana Artha Ventura (2011-Sekarang)
- Komite Audit di PT. Perkebunan Nusantara I (2014-2019)

Professional Experiences

- Auditor at PAF Ishak, Saleh, Soewondo & Partners (1998-2000)
- Chief Accounting Officer at PT Cahaya Buana Group (2004)
- Administration Head at PT Suzuki Finance Indonesia (2005-2007)
- Branch Operation Manager at PT Finansia Multi Finance (2007-2011)
- Area Internal Auditor (Cluster Quality Assurance) at PT Bahana Artha Ventura (2011-Present)
- Audit Committee at PT. Perkebunan Nusantara I (2014-2019)



DENI SULISTYO
ANGGOTA KOMITE AUDIT
MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE

Periode Jabatan

Term of Office
22 April 2020, Periode Ke-1
22 April 2020, 1st Period

Data Pribadi

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 47 tahun
Nationality Indonesian
45 years old

Domisili

Domicile
Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
Indonesia
South Jakarta, SCR of Jakarta,
Indonesia

Pendidikan

Education
D-IV Spesialisasi Akuntansi
dari Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara tahun 2000
Diploma IV in Accounting
from the State College of
Accountancy (STAN) (2000)

Pengalaman Kerja

- Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1996-2001)
- Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan di KAP Soejatna, Mulyana dan Rekan (2000)
- Staf di KAP Zulfikri dan Rekan (2000-2002)
- *Senior Officer* di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2002-2004)
- *Senior Consultant* di PT XSYS Mitra Solusi Utama (2004-2006)
- Narasumber di Kementerian Perindustrian (2007-2008)
- *Local Consultant* di Global Procurement Consultants Limited, India (2009)
- Instruktur di PPAK STAN (2009)
- *Senior Consultant* di PT. Delta Multi Jasatama (2008-sekarang)
- Komite Audit di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2013-2018)
- Tenaga Ahli Akuntansi di BLU BP Set BPJT (2010-2018)
- Satuan Pemeriksa Intern di BLU BP Set BPJT (2018-2019)
- Komite Manajemen Risiko & SDM di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2019-sekarang)

Professional Experiences

- Auditor at the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) (1996-2001)
- Assistance in the Preparation of Financial Reports at PAF Soejatna, Mulyana and Partners (2000)
- Staff at PAF Zulfikri and Partners (2000-2002)
- Senior Officer at the Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) (2002-2004)
- Senior Consultant at PT XSYS Mitra Solusi Utama (2004-2006)
- Resource Person at the Ministry of Industry (2007-2008)
- Local Consultant at Global Procurement Consultants Limited, India (2009)
- Instructor at The Center for Development of Accountancy and Finance (PPA&K) of STAN (2009)
- Senior Consultant at PT. Delta Multi Jasatama (2008-present)
- Audit Committee at PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2013-2018)
- Accounting Expert at Public Service Agency for Funding, Secretariat of the Toll Road Regulatory Agency (BLU BP Set BPJT) (2010-2018)
- Internal Audit Unit at BLU BP Set BPJT (2018-2019)
- Risk Management & HR Committee at PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2019-present)

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen.

AUDIT COMMITTEE'S INDEPENDENCE

The Audit Committee carries out its functions and duties in a professional and independent manner, without interference from any party that is not in accordance with laws and regulations. This is shown from its composition which consists of 1 (one) Chairperson who is an Independent Commissioner and 3 (three) member(s) who are from an Independent Parties.

TABEL INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT
TABLE OF INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE MEMBERS

Aspek Independensi Aspect of Independence	Irma Suryani Chaniago	Arman Depari	Saiful Bahri	Deni Sulisty
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors	X	X	X	X
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi Has no professional affiliation at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), its subsidiaries and affiliate companies	X	X	X	X
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Has no shareholding relationship in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	X	X	X	X
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no familial relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or fellow members of the Audit Committee	X	X	X	X
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah Does not serve as administrator of a political party, local government officials	X	X	X	X

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya yaitu agar pengelolaan Pelindo 1 dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan dalam pelaporannya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

The main function of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in fulfilling its supervisory function, namely so that the management of Pelindo 1 can run effectively and efficiently. In performing its duties and in its reporting, the Audit Committee is independent and reports directly to the Board of Commissioners. In carrying out its duties, the Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners. The Audit Committee's responsibility to the Board of Commissioners is a manifestation of supervisory accountability on the management of the company in the terms of implementing GCG principles.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*) terdiri atas:

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor ekstern;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

The duties and responsibilities of the Audit Committee as stipulated in the Audit Committee Charter consist of:

1. Ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of performance of the external and internal auditors' duties;
2. Providing recommendations regarding the improvement of the Company's management control system and its implementation. Assessing activities during and results of audits carried out by the Internal Audit Unit and external auditors;
3. Providing recommendations regarding the improvement of the Company's management control system and its implementation;



4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Pelindo 1;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

4. Ensuring that there is satisfying review procedure for all information released by Pelindo 1;
5. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan sesuai dengan Pedoman Kerja Komite Audit serta program kerja Komite Audit yang sebelumnya telah disampaikan kepada Dewan Komisaris. Realisasi pelaksanaan tugas Komite Audit di tahun 2020, di antaranya:

1. Melakukan rapat-rapat baik rapat rutin maupun tidak rutin. Rapat rutin adalah rapat yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sedangkan rapat tidak rutin adalah rapat yang dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan tugas Komite Audit.
2. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor ekstern;
4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Pelindo 1;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2020

Throughout 2020, the Audit Committee carried out a number of activities in accordance with the Audit Committee Work Guidelines as well as work plans that were previously presented to the Board of Commissioners. Realizations of the Audit Committee's duties in 2020 are as follows:

1. Conducting meetings, both regular and non-regular meetings. Regular meetings are meetings that are held periodically and continuously, while non-regular meetings are meetings that are conducted as needed in accordance with the duties of the Audit Committee;
2. Ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external and internal auditors' duties;
3. Providing recommendations on the improvement of the company's management control system and its implementation. Assessing the activities and results of audits carried out by the Internal Audit Unit and external auditors;
4. Ensuring that there are satisfying review procedures for all information released by Pelindo 1;
5. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.

RAPAT KOMITE AUDIT

Di tahun 2020, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat-rapat tersebut.

AUDIT COMMITTEE'S MEETINGS

In 2020, the Audit Committee held 14 (fourteen) meetings. The following are the agenda and minutes of meetings, attendances, and a recapitulation of the attendance rates of the Audit Committee at these meetings.

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT MINUTES AND ATTENDANCES OF THE AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances
24 Januari 2020 24 January 2020	Ruang Rapat Kantor Perwakilan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Menara Ravindo Lantai 10 Meeting Room, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Representative Office, Ravindo Tower, 10th Floor	Pembahasan draft laporan keuangan tahun 2019 dan program audit KAP tahun 2019 Discussion on the 2019 draft Financial Statements and the 2019 PAF audit program	1. Heryadi 2. Lukita Dinarsyah Tuwo 3. Eddy H. Susanto 4. Saiful Bahri
11 Februari 2020 11 February 2020	Ruang Rapat Kantor Perwakilan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Menara Ravindo Lantai 10 Meeting Room, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Representative Office, Ravindo Tower, 10th Floor	Pembahasan Draft Final LAI KAP Heliantono atas Laporan Keuangan Tahun 2019 Discussion on the Final Draft Internal Audit Report (IAR) of PAF Heliantono on the 2019 Financial Statements	1. Heryadi 2. Lukita Dinarsyah Tuwo 3. Eddy H. Susanto 4. Saiful Bahri

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT
MINUTES AND ATTENDANCES OF THE AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda	Peserta Attendances
26 Maret 2020 26 March 2020	Via Zoom Meeting	Review Kinerja Performance Review	1. Heryadi 2. Lukita Dinarsyah Tuwo 3. Eddy H. Susanto 4. Saiful Bahri
23 April 2020 23 April 2020	Via Zoom Meeting	Rapat Internal KA pembahasan penghapusan aset dan usulan KAP tahun 2020 PA Internal Meeting, discussing asset write-offs and proposal for the 2020 PAF	1. Irma Suryani Chaniago 2. Arman Depari 3. Saiful Bahri 4. Eddy H. Susanto
5 Mei 2020 5 Mei 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan terkait PT Prima Multi Terminal (PMT) Discussion regarding PT Prima Multi Terminal (PMT)	1. Irma Suryani Chaniago 2. Arman Depari 3. Saiful Bahri 4. Deni Sulistyio
3 Juni 2020 3 June 2020	Via Zoom Meeting	Perkenalan dan Pemaparan Program Kerja SPI Tahun 2020 Introduction and Presentation of the 2020 IAU Work Plan	1. Irma Suryani Chaniago 2. Arman Depari 3. Saiful Bahri 4. Deni Sulistyio
4 Juni 2020 4 June 2020	Via Zoom Meeting	Penyampaian hasil telaah terkait anak perusahaan (PT Prima Multi Terminal) Presentation of analysis results regarding subsidiaries (PT Prima Multi Terminal)	1. Irma Suryani Chaniago 2. Arman Depari 3. Saiful Bahri 4. Deni Sulistyio
13 Juli 2020 13 July 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan Usulan Revisi RKAP PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2020 Discussion on the Proposal for Revision to the 2020 WBP of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	1. Irma Suryani Chaniago 2. Arman Depari 3. Saiful Bahri 4. Deni Sulistyio
24 Agustus 2020 24 August 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan Teknis Perubahan Usulan Revisi RKAP 2020 Technical Discussion on the Proposal for Revision to the 2020 WBP	1. Irma Suryani Chaniago 2. Arman Depari 3. Saiful Bahri 4. Deni Sulistyio
14 September 2020 14 September 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan Pengadaan KAP Tahun 2020 Discussion on the Appointment of PAF for 2020	1. Arman Depari 2. Saiful Bahri 3. Deni Sulistyio
29 September 2020 29 September 2020	Via Zoom Meeting	RJPP Pelindo 1 Pelindo 1's Long-Term Plan	1. Irma Suryani Chaniago 2. Arman Depari 3. Saiful Bahri 4. Deni Sulistyio
27 Oktober 2020 27 October 2020	Via Zoom Meeting	Usulan RKAP 2021 Proposal for the 2021 WBP	1. Irma Suryani Chaniago 2. Arman Depari 3. Saiful Bahri 4. Deni Sulistyio
27 November 2020 27 November 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan Laporan Kinerja s.d Oktober 2020 Discussion on Performance Reports up to October 2020	1. Irma Suryani Chaniago 2. Arman Depari 3. Saiful Bahri 4. Deni Sulistyio
29 Desember 2020 29 December 2020	Via Zoom Meeting	Pembahasan Laporan Kinerja s.d November 2020 Discussion on Performance Reports up to November 2020	1. Irma Suryani Chaniago 2. Arman Depari 3. Saiful Bahri 4. Deni Sulistyio





Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Audit dapat dilihat di bawah ini.

A recapitulation of attendances of the Audit Committee members is presented below.

REKAPITULASI KEHADIRAN KOMITE AUDIT PADA RAPAT RECAPITULATION OF ATTENDANCES OF THE AUDIT COMMITTEE IN MEETINGS

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Heryadi (Ketua I Chairperson)*	3	3	100,00%
Irma Suryani Chaniago (Ketua I Chairperson)**	11	10	90,91%
Lukita Dinarsyah Tuwo (Wakil Ketua I Deputy Chairperson)*	3	3	100,00%
Arman Depari (Wakil Ketua I Deputy Chairperson)**	11	11	100,00%
Eddy Hary Susanto (Anggota I Member)	3	3	100,00%
Saiful Bahri (Anggota I Member)	14	14	100,00%
Deni Sulistyio (Anggota I Member)**	11	10	90,91%
Rata-rata (In Average)			97,40%

*) Tidak lagi menjabat sejak 20 April 2020 (No longer served as of 20 April 2020)

**) Menjabat sejak 20 April 2020 (Has been serving as of 2020)

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang saham, dalam RUPS. Selain itu ketentuan tersebut juga mengacu pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* Pelindo 1. Pemilihan Direksi dilakukan melalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DIRECTORS SUCCESSION POLICY

The director(s) succession policy is carried out in accordance with the provisions stipulated by the Shareholders in the GMS. In addition, these provisions also refer to Pelindo 1's Articles of Association and Board Manual. The selection of the Director(s) is carried out in accordance with applicable regulations.

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan tujuan pengelolaan manajemen yang sehat dan secara konsisten yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dijiwai oleh nilai-nilai dan etika Perusahaan yang baik.

NOMINATION, REMUNERATION AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Nomination Remuneration and Risk Management Committee was formed to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners aiming for healthy and consistent management in accordance with the GCG principles which are imbued with noble corporate values and ethics.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris KP 05 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengalihan tugas Anggota-Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) komposisi Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko Perseroan tahun 2020 beranggotakan 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite, 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) anggota komite. Berikut adalah susunan keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko tahun 2020.

COMPOSITION OF THE NOMINATION, REMUNERATION AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Based on the Decree of the Board of Commissioners KP 05 of 2020 dated 22 April 2020 on the Termination, Appointment and Transfer of Members of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), the composition of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee in the Company in 2020 comprises 6 (six) members, particularly consisting of 1 (one) Chairperson, 1 (one) Secretary and 4 (four) Members. The following is the composition of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee in 2020.

**KRONOLOGI SUSUNAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN MANAJEMEN RISIKO
DI SEPANJANG TAHUN 2020**
**CHRONOLOGY OF COMPOSITION OF THE NOMINATION, REMUNERATION AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE
THROUGHOUT 2020**

1 Januari – 20 April 2020 1 January – 20 April 2020	20 April – 31 Desember 2020 20 April – 31 December 2020	Keterangan Description
Refly Harun (Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko) (Chairperson)		Refly Harun tidak lagi menjabat dalam jajaran Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko per 20 April 2020 Refly Harun no longer served as member of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee as of 20 April 2020
	Achmad Djamaludin (Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko) (Chairperson)	-
Winata Supriatna (Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko) (Deputy Chairperson)	Winata Supriatna (Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko) (Member)	Winata Supriatna mengalami perubahan jabatan dalam jajaran Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko per 20 April 2020 Winata Supriatna experienced change of position in the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee as of April 20, 2020
	Ahmad Perwira Mulia (Sekretaris Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko) (Secretary)	Ahmad Perwira Mulia menjabat dalam jajaran Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko per 20 April 2020 Ahmad Perwira Mulia has been serving as member of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee as of 20 April 2020
Bambang Setyo Wahyudi (Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko) (Deputy Chairperson)		Bambang Setyo Wahyudi tidak lagi menjabat dalam jajaran Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko per 20 April 2020 Bambang Setyo Wahyudi no longer served as member of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee as of 20 April 2020
Deni Sulisty (Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko) (Member)		Deni Sulisty tidak lagi menjabat dalam jajaran Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko per 20 April 2020 Deni Sulisty no longer served as member of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee as of 20 April 2020
Nasrul Chair (Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko) (Member)	Nasrul Chair (Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko) (Member)	-
	Herbert Timbo Parluhutan Siahaan (Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko) (Member)	Herbert Timbo Parluhutan Siahaan menjabat dalam jajaran Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko per 20 April 2020 Herbert Timbo Parluhutan Siahaan has been serving as member of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee as of 20 April 2020
	Eddy Hary Susanto (Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko) (Member)	Eddy Hary Susanto menjabat dalam jajaran Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko per 20 April 2020 Eddy Hary Susanto has been serving as member of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee as of 20 April 2020



KOMPOSISI KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN MANAJEMEN RISIKO PER 31 DESEMBER 2020
COMPOSITION OF THE NOMINATION, REMUNERATION AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE
AS OF 31 DECEMBER 2020

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Achmad Djamaludin	Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko Chairperson	Surat Keputusan Dewan Komisaris KP 05 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Decree of the Board of Commissioners KP 05 of 2020 dated 22 April 2020	22 April 2020 - Sekarang 22 April 2020 - Now
Ahmad Perwira Mulia	Sekretaris Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko Secretary	Surat Keputusan Dewan Komisaris KP 05 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Decree of the Board of Commissioners KP 05 of 2020 dated 22 April 2020	22 April 2020 - Sekarang 22 April 2020 - Now
Winata Supriatna	Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris KP 05 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Decree of the Board of Commissioners KP 05 of 2020 dated 22 April 2020	22 April 2020 - Sekarang 22 April 2020 - Now
Herbert Timbo Parluhutan Siahaan	Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris KP 05 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Decree of the Board of Commissioners KP 05 of 2020 dated 22 April 2020	22 April 2020 - Sekarang 22 April 2020 - Now
Nasrul Chair	Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris KP 13 Tahun 2019 tanggal 30 November 2019 Decree of the Board of Commissioners KP 13 of 2019 dated 30 November 2019	30 November 2019 30 November 2019
Eddy Hary Susanto	Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris KP 05 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Decree of the Board of Commissioners KP 05 of 2020 dated 22 April 2020	22 April 2020 - Sekarang 22 April 2020 - Now

PROFIL ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN MANAJEMEN RISIKO

PROFILES OF THE NOMINATION, REMUNERATION AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERS

ACHMAD DJAMALUDIN

KETUA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN MANAJEMEN RISIKO

CHAIRPERSON OF THE NOMINATION, REMUNERATION AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Profil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko, Achmad Djamaludin telah disajikan sebagai Komisaris Independen pada profil Dewan Komisaris yang terdapat dalam buku Laporan Tahunan ini.

Profile of the Chairperson of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee, Achmad Djamaludin has been presented as Independent Commissioner on the Profile of the Board of Commissioners section contained in this Annual Report book.

AHMAD PERWIRA MULIA

SEKRETARIS KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN MANAJEMEN RISIKO
SECRETARY OF THE NOMINATION, REMUNERATION AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Profil Sekretaris Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko, Ahmad Perwira Mulia telah disajikan sebagai Komisaris Independen pada profil Dewan Komisaris yang terdapat dalam buku Laporan Tahunan ini
Profile of the Secretary of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee, Ahmad Perwira Mulia has been presented as Independent Commissioner on the Profile of the Board of Commissioners section contained in this Annual Report book.

WINATA SUPRIATNA

ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN MANAJEMEN RISIKO
MEMBER OF THE NOMINATION, REMUNERATION AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Profil Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko, Winanta Supriatna telah disajikan sebagai Komisaris pada profil Dewan Komisaris yang terdapat dalam buku Laporan Tahunan ini.
Profile of the Member of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee, Winanta Supriatna has been presented as Commissioner on the Profile of the Board of Commissioners section contained in this Annual Report book.

HERBERT TIMBO PARLUHUTAN SIAHAAN

ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN MANAJEMEN RISIKO
MEMBER OF THE NOMINATION, REMUNERATION AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Profil Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko, Herbert Timbo Parluhutan Siahaan telah disajikan sebagai Komisaris Independen pada profil Dewan Komisaris yang terdapat dalam buku Laporan Tahunan ini
Profile of the Member of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee, Ahmad Perwira Mulia has been presented as Independent Commissioner on the Profile of the Board of Commissioners section contained in this Annual Report book.



NASRUL CHAIR

ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN MANAJEMEN RISIKO
MEMBER OF THE NOMINATION, REMUNERATION AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Periode Jabatan

Term of Office
30 November 2019, Periode Ke-1
30 November 2019, 1st Period

Domisili

Domicile
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
South Tangerang, Banten, Indonesia

Data Pribadi

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 47 tahun
Nationality Indonesian
47 years old

Pendidikan

Education
• Spesialis Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2000)
• Magister (S2) Manajemen dari Universitas Binus (2010)
• Specializing in Accounting from State College of Accountancy (STAN) (2000)
• Master (S2) of Management from Binus University (2010)

Pengalaman Kerja

- Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1996-2000)
- Audit & Cost Control Manager di Capital Managers Asia (2002-2004)
- Sr. Manager di PT Cakrawala Andalas Televisi (2004-2007)
- General Manager di PT Semesta Marga Raya (2007-2013)
- President Director & CEO di PT Lintasindo Operator (2012-2013)
- Chief Operation Officer di PT B-Generasi Asia (2013-2016)
- Chief Special Project di PT Jaringan Prima Global (2016-2018)
- Partner at ETC Consulting (2018-sekarang)

Professional Experiences

- Auditor at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) (1996-2000)
- Audit & Cost Control Manager at Capital Managers Asia (2002-2004)
- Sr. Manager at PT Cakrawala Andalas Televisi (2004-2007)
- General Manager at PT Semesta Marga Raya (2007-2013)
- President Director & CEO at PT Lintasindo Operator (2012-2013)
- Chief Operation Officer at PT B-Generasi Asia (2013-2016)
- Chief Special Project Officer at PT Jaringan Prima Global (2016-2018)
- Partner at ETC Consulting (2018-present)

EDDY HARY SUSANTO

ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN MANAJEMEN RISIKO
MEMBER OF THE NOMINATION, REMUNERATION AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Periode Jabatan

Term of Office
25 April 2019, Periode Ke-1
25 April 2019, 1st Period

Domisili

Domicile
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Data Pribadi

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 66 tahun
Nationality Indonesian
66 years old

Pendidikan

Education

- Sarjana (S-1) Manajemen dari Universitas Mulawarman Samarinda tahun 1983
- Diploma (D-III) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Surabaya tahun 1986
- Sarjana (S-1) Akuntansi dari Universitas Udayana Bali tahun 2001
- Magister (S-2) Manajemen dari Universitas Udayana Bali
- Magister (S-2) Hukum Bisnis dari Universitas Gajah Mada
- Bachelor (S1) in Management from Mulawarman University, Samarinda (1983)
- Diploma III in Accounting from the State College of Accountancy, Surabaya (1986)
- Bachelor (S1) in Accounting from Udayana University, Bali (2001)
- Master (S2) of Management from Udayana University, Bali
- Master (S2) of Business Law from Gajah Mada University

Pengalaman Kerja

- Auditor di BPKP (1983-1992)
- Pengendali Teknis di BPKP (1992-1997)
- Pengendali Mutu di BPKP (1997-2006)
- Kepala Biro di Komisi Yudisial RI (2006-2011)
- Analis di BPKP (2011)
- Inspektur di Provinsi Kalimantan Tengah (2011-2013)
- Anggota Komite Audit di PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2015-sekarang)

Professional Experiences

- Auditor at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) (1983-1992)
- Technical Controller at BPKP (1992-1997)
- Quality Control at BPKP (1997-2006)
- Head of Bureau at the Judicial Commission of Indonesia (2006-2011)
- Analyst at BPKP (2011)
- Inspector at Inspectorate of Central Kalimantan Province (2011-2013)
- Member of the Audit Committee at PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2015-present)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Terkait Fungsi Nominasi
 - Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan jabatan Direksi/Komisaris anak Perusahaan, Kepala SPI, dan Sekretaris Perusahaan;
 - Kebijakan evaluasi terhadap Direksi/Komisaris anak Perusahaan, Kepala SPI, dan Sekretaris Perusahaan;
 - Pemberian usulan mengenai calon Direksi/Komisaris anak Perusahaan, Kepala SPI, dan Sekretaris Perusahaan untuk disampaikan kepada Komisaris Utama;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION, REMUNERATION, AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee is in charge of and responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners as follows:

- Regarding Nomination Function
 - Preparing and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the determination of the positions of Directors/Commissioners in subsidiaries, the Head of IAU (SPI), and the Corporate Secretary;
 - Evaluation policies for Directors/Commissioners in subsidiaries, the Head of IAU (SPI), and the Corporate Secretary;
 - Providing proposals on candidates for Directors/Commissioners in subsidiaries, the Head of IAU (SPI), and the Corporate Secretary to be submitted to the President Commissioner;



b. Terkait Fungsi Remunerasi

1. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan sesuai perkembangan situasi dan kondisi Perusahaan.
2. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Komisaris Utama.

c. Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b di atas harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan

1. Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
2. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
3. Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Perusahaan;
4. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
 - a) Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan.
 - b) Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh komite minimal 1 kali dalam setahun.
 - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.

d. Terkait Fungsi Manajemen Risiko

1. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko perusahaan yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko, melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas progres dari tahapan-tahapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko.
2. Melakukan *review* atas penilaian risiko oleh Departemen Manajemen Risiko terhadap rencana investasi perusahaan yang material.

b. Regarding Remuneration Function

1. Evaluation of the remuneration policy and evaluation of the suitability of the policy according to the development of the Company's situation and condition.
2. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies, and amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the President Commissioner.

c. The structure, policy and amount of remuneration as referred to in points a and b above shall have feasibility, appropriateness and reasonable benchmarks by considering:

1. Remuneration that applies in the industrial sector of the Company's business activities from time to time;
2. Financial performance and fulfillment of the Company's financial obligations;
3. Individual work achievements of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;
4. Balance of fixed and variable rate allowances by taking into account feasibility and the overall remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors;
 - a) The Committee may consider input from members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners regarding the policies to be recommended.
 - b) The structure, policy, and amount of remuneration shall be evaluated by the committee at least once a year.
 - c) Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners relating to remuneration in accordance with applicable regulations.
 - d) In the event that a Committee member has a conflict of interest with the recommended proposal, then the proposal shall disclose the presence of the conflict of interest as well as the considerations underlying the proposal in question.

d. Regarding Risk Management Function

1. Reviewing and providing recommendations on the effectiveness of the implementation of corporate risk management by the Risk Management Department, through regular meetings or other means to discuss the progress of the stages of duties and responsibilities carried out by the Risk Management Department.
2. Reviewing the risk assessment conducted by the Risk Management Department regarding the Company's material investment plans.

3. Melakukan pengawasan atas kegiatan Departemen Manajemen Risiko dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko yang dilaporkan oleh unit-unit kerja terkait.
 4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi oleh Departemen Manajemen Risiko, melakukan analisis dan evaluasi atas usulan RKAP dan PKM serta review atas RJPP yang diajukan oleh Direksi.
 5. Melakukan evaluasi atas informasi risiko yang disampaikan oleh Departemen Manajemen Risiko perusahaan dalam laporan-laporan rutin berkala triwulanan dan tahunan dan non-rutin (program kerja) dipublikasikan, melalui proses diskusi bersama dengan manajemen dan review atas draft dari laporan yang akan dipublikasikan.
 6. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting pada unit-unit di lingkungan perusahaan sesuai kebutuhan, termasuk risiko pada perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang dalam lingkup kewenangan pengawasan Dewan Komisaris.
 7. Pemberian tugas khusus oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis.
 8. Tugas khusus dapat mencakup pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dari hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 9. Komite harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal, terbatas pada anggota Komite dan anggota Dewan komisaris.
- e. Tanggungjawab
1. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
 2. Pertanggungjawaban Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
 - a) Laporan hasil rapat (risalah rapat);
 - b) Laporan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite;
 - c) Laporan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite; dan
 - d) Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan, dan saran, jika ada.
 3. Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
3. Supervising the activities of the Risk Management Department in monitoring the implementation of risk mitigation reported by related work units.
 4. Supervising the implementation of recommendations by the Risk Management Department, analyzing and evaluating the proposals for the Company's WPB and Community Service (PKM) as well as reviewing the Company's LTP submitted by the Board of Directors.
 5. Evaluating the risk information submitted by the Risk Management Department in the regular quarterly and annual reports and non-regular reports (work programs) published, through the process of joint discussion with the management and by reviewing the draft reports to be published.
 6. Discussing important risks in units within the company as needed, including risks in cooperation agreements with third parties that are within the scope of supervisory authority of the Board of Commissioners.
 7. Assignment of special duties by the Board of Commissioners is carried out through a written order.
 8. Special duties may include examining allegations of errors in the decisions of the Board of Directors meetings or irregularities in the implementation of the decisions of the Board of Directors meetings in relation to their duties and responsibilities.
 9. The Committee shall submit a report on the implementation of special duties with the maximum level of confidentiality, limited to members of the Committee and members of the Board of Commissioners.
- e. Responsibilities
1. The Committee is responsible to the Board of Commissioners.
 2. The Committee's accountability is presented to the Board of Commissioners in the form of reports as follows:
 - a) Report on meeting results (minutes of meeting);
 - b) Report on the implementation of the Committee's quarterly activities;
 - c) Report on the implementation of the Committee's annual activities; and
 - d) Report on the results of field visits which include findings or facts from the field, evaluation, analysis, conclusions, and suggestions, if any.
 3. Committee members who currently, or no longer, serve as Committee members, are required to maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information obtained while serving as Committee members, both from internal and external parties, and only use them for the purpose of carrying out their duties.





4. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
5. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib menaati ketentuan peraturan yang berlaku dan COBP Perseroan serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan.
6. Anggota Komite dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
7. Anggota Komite harus melaksanakan tugas-tugas lain, selain yang disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta Program Kerja Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko yang sebelumnya telah disampaikan kepada Dewan Komisaris. Realisasi pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko di tahun 2020, di antaranya:

Terkait Fungsi Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan jabatan Direksi/Komisaris anak Perusahaan, Kepala SPI, dan Sekretaris Perusahaan;
2. Kebijakan evaluasi terhadap Direksi/Komisaris anak Perusahaan, Kepala SPI, dan Sekretaris Perusahaan;
3. Pemberian usulan mengenai calon Direksi/Komisaris anak Perusahaan, Kepala SPI, dan Sekretaris Perusahaan untuk disampaikan kepada Komisaris Utama;

Terkait Fungsi Remunerasi

1. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan sesuai perkembangan situasi dan kondisi Perusahaan.
2. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Komisaris Utama.

4. Committee members are prohibited from misusing important information relating to the Company for personal interests.
5. In carrying out their duties and responsibilities, Committee members are required to comply with applicable regulations and the Company's Code of Business Principles (COBP), and are prohibited from taking personal gains either directly or indirectly from the Company's activities.
6. Committee members are responsible to the Board of Commissioners and must act independently in carrying out their duties.
7. Committee members shall carry out other duties, apart from those mentioned above, given by the Board of Commissioners in accordance with their functions and duties from time to time as needed.

ACTIVITIES OF THE NOMINATION, REMUNERATION AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE IN 2020

Throughout 2020, the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee organized a number of activities pertaining to its duties and responsibilities and in accordance with its Work Program which was previously presented to the Board of Commissioners. Realizations of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee's duties in 2020 are as follows:

Regarding Nomination Function

1. Preparing and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the determination of the positions of Directors/Commissioners in subsidiaries, the Head of IAU, and the Corporate Secretary;
2. Evaluation policies towards the Directors/Commissioners of subsidiaries, the Head of IAU, and the Corporate Secretary;
3. Providing proposals regarding candidates for Directors/Commissioners in subsidiaries, the Head of IAU, and the Corporate Secretary to be presented to the President Commissioner.

Regarding Remuneration Function

1. Evaluating the remuneration policy and evaluating the suitability of the policy according to the development of the Company's situation and condition.
2. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies, and amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors to then be presented to the President Commissioner.

Terkait Fungsi Manajemen Risiko

1. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perseroan yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko, melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas progres dari tahapan-tahapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko.
2. Melakukan *review* atas penilaian risiko oleh Departemen Manajemen Risiko terhadap rencana investasi perusahaan yang material.
3. Melakukan pengawasan atas kegiatan Departemen Manajemen Risiko dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko yang dilaporkan oleh unit-unit kerja terkait.
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi oleh Departemen Manajemen Risiko, melakukan analisis dan evaluasi atas usulan RKAP dan PKM serta *review* atas RJPP yang diajukan oleh Direksi.
5. Melakukan evaluasi atas informasi risiko yang disampaikan oleh Departemen Manajemen Risiko perusahaan dalam laporan - laporan rutin berkala triwulanan dan tahunan dan non-rutin (program kerja) dipublikasikan, melalui proses diskusi bersama dengan manajemen dan *review* atas *draft* dari laporan yang akan dipublikasikan.
6. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting pada unit-unit di lingkungan perusahaan sesuai kebutuhan, termasuk risiko pada perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang dalam lingkup kewenangan pengawasan Dewan Komisaris.
7. Pemberian tugas khusus oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis.
8. Tugas khusus dapat mencakup pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dari hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya.
9. Komite harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal, terbatas pada anggota Komite dan anggota Dewan komisaris.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang saham, dalam RUPS. Selain itu ketentuan tersebut juga mengacu pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* Pelindo 1. Pemilihan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Regarding Risk Management Function

1. Reviewing and providing recommendations on the effectiveness of the implementation of corporate risk management by the Risk Management Department, through regular meetings or other means to discuss the progress of the stages of duties and responsibilities carried out by the Risk Management Department.
2. Reviewing the risk assessment conducted by the Risk Management Department regarding the Company's material investment plans.
3. Supervising the activities of the Risk Management Department in monitoring the implementation of risk mitigation reported by related work units.
4. Supervising the implementation of recommendations by the Risk Management Department, analyzing and evaluating the proposals for the Company's WPB and Community Service (PKM) as well as reviewing the Company's LTP proposed by the Board of Directors.
5. Evaluating the risk information submitted by the Risk Management Department in the regular quarterly and annual reports and non-regular reports (work programs) published, through the process of joint discussion with the management and by reviewing the draft reports to be published.
6. Discussing important risks in units within the company as needed, including risks in cooperation agreements with third parties that are within the scope of supervisory authority of the Board of Commissioners.
7. Assignment of special duties by the Board of Commissioners is carried out through a written order.
8. Special duties may include examining allegations of errors in the decisions of the Board of Directors meetings or irregularities in the implementation of the decisions of the Board of Directors meetings in relation to their duties and responsibilities.
9. The Committee shall submit a report on the implementation of special duties with the maximum level of confidentiality, limited to members of the Committee and members of the Board of Commissioners.

DIRECTORS SUCCESSION POLICY

The director(s) succession policy is carried out in accordance with the provisions stipulated by the Shareholders in the GMS. In addition, these provisions also refer to Pelindo 1's Articles of Association and Board Manual. The selection of the Director(s) is carried out in accordance with applicable regulations.





ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

THE BOARD OF DIRECTORS' SUPPORTING ORGANS

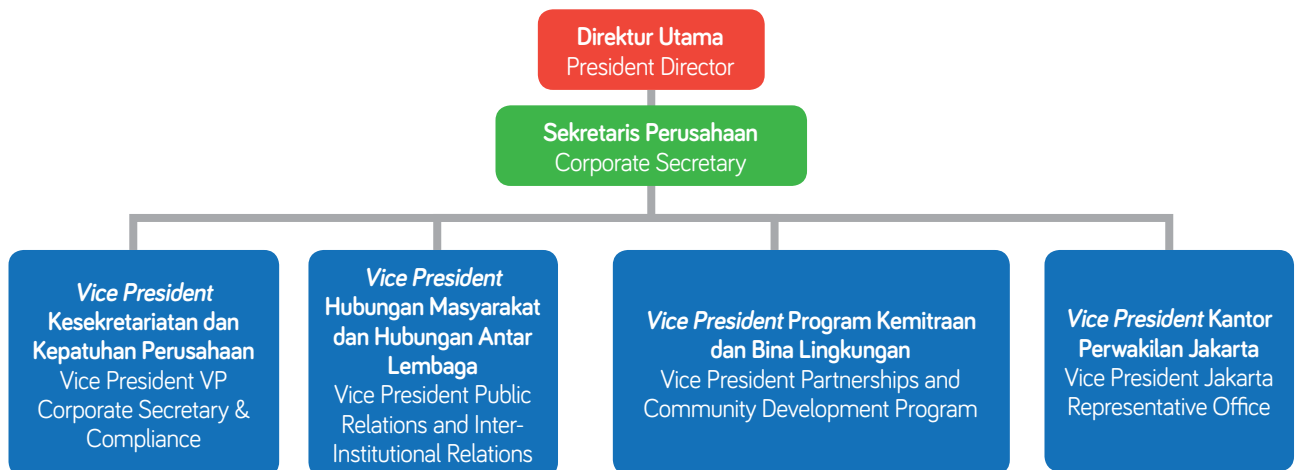
SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya dengan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dalam rangka mendukung pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

KEDUDUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan dilakukakan oleh pejabat setingkat *Senior Vice President* yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan mekanisme internal Perusahaan. Kedudukan Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direktur Utama.

Kedudukan Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi Perusahaan sebagai berikut.



Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan keputusan Direksi. Dalam struktur organisasi Perseroan, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Sekretaris Perusahaan mencakup:

- Mengikuti perkembangan dunia usaha;
- Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- Sebagai penghubung atau *contact person* antara perseroan dengan otoritas terkait serta masyarakat.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP.32/4/21/PI-20 tanggal 30 Maret 2020, Perusahaan telah menunjuk Imron Eryandy sebagai Sekretaris Perusahaan.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary functions as a liaison officer between the Company and shareholders and other stakeholders by building good communication and relationships in order to support the management of the company carried out by the Board of Directors.

Position of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary is demonstrated by an official at the level of Senior Vice President who is appointed and terminated based on the Board of Directors' Decision with the Board of Commissioners' approval according to the Company's internal mechanism. The position of the Corporate Secretary is under the President Director.

The Corporate Secretary's position in the Company's organizational structure is as follows:

The Corporate Secretary is appointed based on the the Board of Directors's decision. In the organizational structure of the Company, the Corporate Secretary reports directly to the President Director. In carrying out its functions and roles, the Corporate Secretary's duties includes:

- Keeping abreast with the latest developments in the business world;
- Providing relevant services for any information needed by stakeholders relating to the Company's conditions;
- Acting as a liaison officer or contact person between the company and relevant authorities and the public.

PROFILE OF THE CORPORATE SECRETARY

Based on the Decree of the Board of Directors No. KP.32/4/21/PI-20 of 30 March 2020, the Company appointed Imron Eryandy as Corporate Secretary.

IMRON ERYANDY

SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY



Usia

Age
45 tahun
45 years

Kewarganegaraan

Nationality
Indonesia
Indonesian

Domisili

Domicile
Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Medan, North Sumatera, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Professional Experiences

- SVP Unit Pusat Layanan (*Shared Service Unit*) Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2 September 2019 – 29 Maret 2020)
- SVP Manajemen Strategis SDM Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Februari 2015 – Agustus 2019)
- Asisten Kepala SMO, Bidang Perencanaan Strategis Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Mei 2013 – Januari 2015)
- Asisten *Senior Manager* Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Juli 2011 - April 2013)
- Asisten Manajer Pemasaran Cab. Pelabuhan Tanjungpinang PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Maret 2010 – Juni 2011)
- Asisten Manajer Pelayanan Pelanggan, Administrasi dan Jasa Usaha (PPAJU) Cab. Pelabuhan Tanjungpinang PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Maret 2009 – Februari 2010)
- SVP of the Shared Service Unit, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office (2 September 2019 – 29 March 2020)
- SVP of HR Strategic Management of HR, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office (February 2015 – August 2019)
- Assistant Head of SMO, Strategic Planning Division, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office (May 2013 – January 2015)
- Senior Assistant Manager of Planning and Organizational Development, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office (July 2011 - April 2013)
- Assistant Marketing Manager of Tanjungpinang Port Branch, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (March 2010 – June 2011)
- Assistant Manager of Customer Service, Administration and Business Services (PPAJU) of Tanjungpinang Port Branch, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (March 2009 – February 2010)

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

Applicable Training and/or Professional Certificates

- *Advanced Leadership Program (Complete 5 modules of 11)*, diselenggarakan oleh Executive Center for Global Leadership (ECGL) and Rotterdam School of Management, Erasmus University (2018 -2019)
- *The Advanced Course for Port and Logistics Professionals (Scholarship dari Busan Port Authority)*, diselenggarakan oleh Busan Port Authority, Dong-A University, Busan (2017)
- *Advanced Leadership Program (Completed 5 out of 11 modules)*, organized by the Executive Center for Global Leadership (ECGL) and Rotterdam School of Management, Erasmus University (2018-2019)
- *The Advanced Course for Port and Logistics Professionals (Scholarship from Busan Port Authority)*, organized by Busan Port Authority, Dong-A University, Busan (2017)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan, hubungan antara Perusahaan dengan *stakeholders* dan untuk mendukung peran tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi untuk merencanakan, mengarahkan, *memonitor*, membina, dan mengevaluasi kegiatan terkait dengan: Hubungan masyarakat (eksternal dan internal); Hubungan kelembagaan dan tata kelola perusahaan; Administrasi kesekretariatan *Board of Directors* dan *Board of Commissioners*; dan juga kegiatan Kemitraan dan Bina Lingkungan serta *Corporate Social Responsibility*.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary plays an important role in facilitating communications between the Company's organs, the Company's relationship with stakeholders, and to support this role, the Corporate Secretary has the functions of planning, directing, monitoring, developing and evaluating activities related to: Public relations (external and internal); Inter-institutional and managerial relations; Administration of the Board of Directors' and the Board of Commissioners' Secretariats; as well as activities regarding Partnership and Community Development activities and Corporate Social Responsibility.



Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Memberi arahan melalui formulasi kebijakan fungsional atas kegiatan fungsi sekretariat perusahaan serta memastikan kesesuaian kebijakan dengan arahan strategis perusahaan;
2. Sebagai *Liasion officer* perusahaan dengan pemegang saham regulator kelembagaan lain eksternal maupun internal perusahaan dan memastikan pelaksanaan pembinaan hubungan dengan pihak luar, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, institusi lain, serta pemegang saham;
3. Mengawasi kegiatan *corporate branding* di dalam maupun luar lingkungan kerja Perusahaan dan mengelola reputasi perusahaan;
4. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program Kesekretariatan Direksi, hubungan masyarakat, antar lembaga dan internasional, *corporate social responsibility* dan kemitraan dan bina lingkungan mengelola kegiatan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan pada masyarakat dan Kemitraan serta Bina Lingkungan;
5. Penyiapan, pembinaan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta memastikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan di dalam seluruh aktivitas perusahaan;
6. Penyiapan, pembinaan dan penyusunan program kerja serta penyelenggaraan kepatuhan korporasi terhadap regulasi dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan;
7. Menyusun strategi untuk optimalisasi kegiatan fungsi sekretariat perusahaan di wilayah kerja Perusahaan;
8. Memastikan pelaksanaan kegiatan resmi perusahaan serta analisa dan evaluasi bahan materi acara resmi perusahaan.

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2020

Selama tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

1. Menangani kegiatan Kesekretariatan Direksi;
2. Menjalankan fungsi hubungan (*liaison officer*) dengan masyarakat dan publikasi Perseroan, dan kegiatan antar lembaga;
3. Memastikan bahwa Perseroan senantiasa mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
4. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Providing directives through the formulation of functional policies on the activities of the corporate secretarial function as well as ensuring the conformity of the policies with the Company's strategic directives;
2. Acting as a *Liasion Officer* between the Company and the shareholders, regulators, other institutions whether external or internal, as well as ensuring the implementation of relationship-building with external parties, governmental and non-governmental agencies, other institutions and the shareholders;
3. Overseeing corporate branding activities inside and outside the Company's work environment and managing the company's reputation;
4. Supervising and controlling the implementation of the Board of Directors' Secretariat programs, public relations, inter-institutional and international relations, corporate social responsibility and partnership and environmental assistance programs;
5. Preparation, development, planning, implementation and monitoring as well as ensuring that the Good Corporate Governance principles are applied in all company activities;
6. Preparation, development and formulation of work programs as well as implementation of corporate compliance with government regulations and ordinances relating to the Company;
7. Developing strategies to optimize the activities of corporate secretarial function in the Company's working area;
8. Ensuring the execution of the Company's official activities as well as analyzing and evaluating materials for the Company's official events.

ACTIVITIES OF THE CORPORATE SECRETARY IN 2020

Throughout 2020, the Corporate Secretary has carried out the following duties and responsibilities:

1. Handling secretarial activities pertaining to the Board of Directors;
2. Performing the function of relation (*liaison officer*) with the public and the Company's publication, and inter-institutional activities;
3. Ensuring that the Company always complies with regulations regarding requirements for transparency in line with the implementation of GCG principles;
4. Providing information needed by the Board of Directors and the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;

- Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

KETERBUKAAN INFORMASI

Untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada publik, Sekretaris Perusahaan senantiasa melakukan pelaporan kepada regulator. Setiap tahun, Pelindo 1 menyusun Laporan Tahunan yang mengacu pada kriteria *Annual Report Award* (ARA).

Pelindo 1 juga memberi kemudahan pelayanan informasi kepada publik yang membutuhkan informasi, dimana publik dapat melakukan permintaan informasi secara *online* melalui portal PPID Pelindo 1, di alamat eppid.pelindo1.co.id.

AUDIT INTERNAL

Fungsi Audit Internal Perseroan dijalankan oleh Internal Audit yang diposisikan sebagai mitra strategis bagi manajemen yang dipercaya, profesional, objektif, dan independen yang dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Pelindo 1 dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan yang baik.

Internal Audit memiliki peran penting dalam perkembangan perusahaan yaitu bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen serta rekomendasi perbaikan kepada Direktur Utama serta manajemen terkait mengenai kegiatan atau operasional perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan tugasnya tersebut, Internal Audit harus dapat menilai kinerja Unit Kerja dan melakukan pemantauan untuk memberikan informasi dini kepada Direktur Utama bila terjadi penurunan atau penyimpangan terhadap kinerja dalam rangka mencapai sasaran perusahaan khususnya pelaksanaan RKAP tahun berjalan.

Perkembangan bisnis dalam era globalisasi saat ini sangat pesat, sehingga membuat keberadaan Internal Audit kini diakui dalam membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja Perseroan terutama dalam aspek pengendalian. Sehingga unit Internal Audit dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas kerja organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan perusahaan. Dengan demikian peran Internal Auditor lebih dibutuhkan sebagai *consulting/adviser*.

- Administering and keeping company documents, including but not limited to the Shareholders Register, Special Register and minutes of the Board of Directors' meetings, the Board of Commissioners meetings and the GMS.

DISCLOSURE OF INFORMATION

To fulfill the obligation on disclosure of information to the public, the Corporate Secretary constantly reports to regulators. Every year, Pelindo 1 prepares an Annual Report that refers to the Annual Report Award (ARA) criteria.

Pelindo 1 provides easy information services to the public who need information, where the public can request information online via Pelindo 1 PPID portal, at the address eppid.pelindo1.co.id.

INTERNAL AUDIT UNIT

The Company's Internal Audit function is performed by the Internal Audit Unit which is designated by the management as a trusted, professional, objective, and independent strategic partner capable of providing added value to the achievement of Pelindo 1's goals by increasing the effectiveness of risk management, control and good corporate governance processes.

Internal Audit Unit plays an important role in the development of the company, namely in charge of and responsible for providing professional and independent opinions and recommendations for improvement to the President Director and related management regarding company activities or operations in accordance with applicable regulations.

In relation to these duties, the Internal Audit Unit shall be able to assess the performance of Work Units and monitor them to provide early information to the President Director if there are performance declines or irregularities, in order to achieve the Company's targets especially in executing the WPB for the current year.

The rapid business development in the current era of globalization acknowledges the Internal Audit Unit in assisting management in improving the Company's performance, especially in the aspect of control. Accordingly, the Internal Audit Unit is able to provide added values and improve the work quality of organizations in achieving the Company's targets or objectives. Therefore, the role of the Internal Auditor is needed more as Consultant/Adviser.





Dalam kerangka pengendalian internal, manajemen harus melakukan penilaian risiko yang dihadapi pada setiap proses bisnis, sehingga mampu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul seiring berkembangnya usaha dan dengan langkah preventif yang tepat dapat sesegera mungkin diambil.

Perencanaan audit berbasis risiko merupakan upaya audit internal dalam rangka melaksanakan perannya untuk membantu manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan utama dalam perencanaan audit berbasis risiko adalah menentukan alokasi kegiatan audit agar lebih terarah pada area yang memiliki risiko besar yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

KEDUDUKAN UNIT INTERNAL AUDIT

Fungsi Audit Internal Perseroan dilakukan oleh Internal Audit *Senior Vice President* yang diangkat dan diberhentikan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan mekanisme internal Perusahaan. Kedudukan Internal Audit berada di bawah Direktur Utama.

Kedudukan Internal Audit dalam struktur organisasi Perusahaan sebagai berikut.

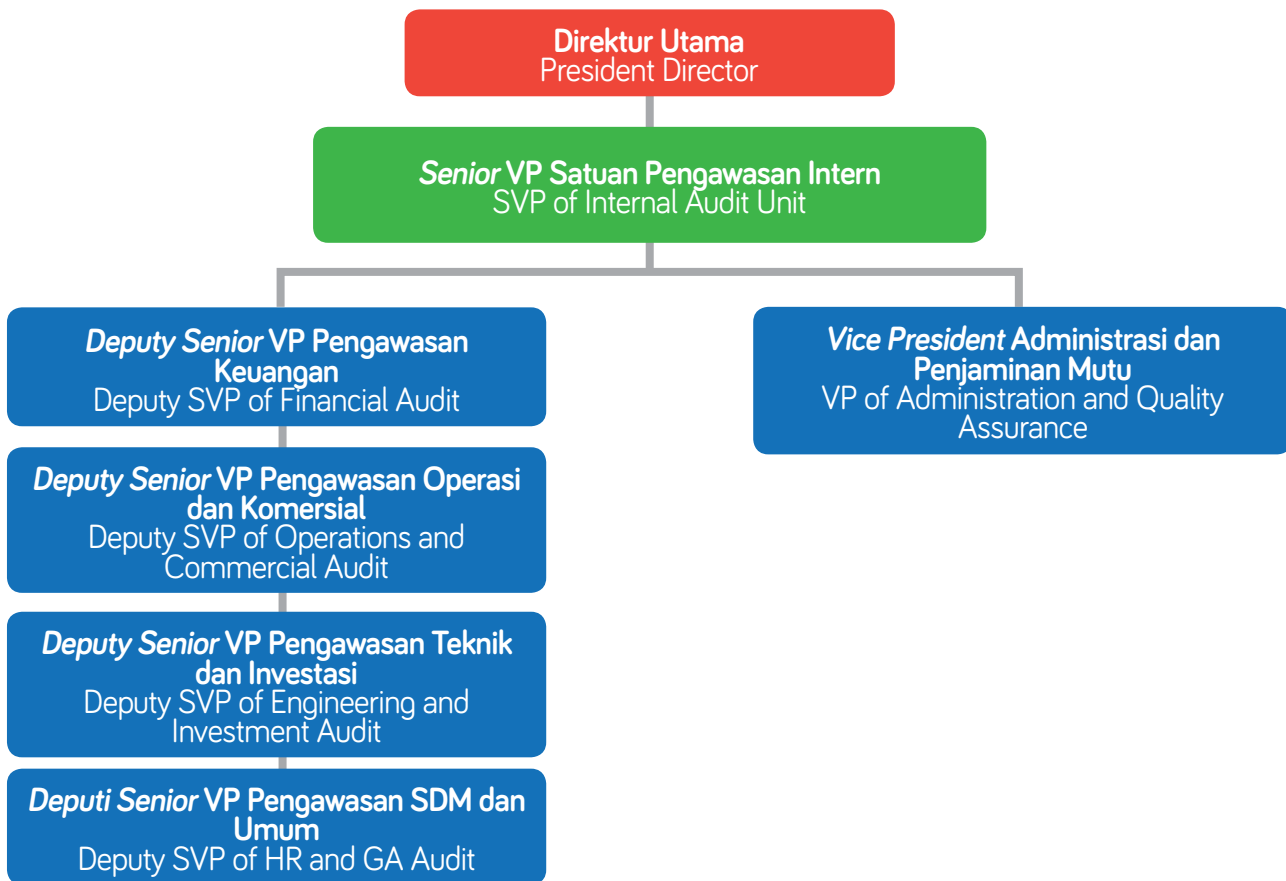
In the framework of internal control, the management shall perform risk assesemnt in every business process, so that it is able to identify risks that may arise as the business grows and correct preventive actions can be taken as immediately as possible.

Risk-based audit planning is an effort by the Internal Audit Unit in playing its role to assist the management in achieving organizational goals more easily. The main activity in risk-based audit planning is determining the allocation of audit activities to be more focused on areas with big risks that may obstruct the organization in achieving its goals.

POSITION OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The Company's Internal Audit function is executed by an Internal Audit Unit led by a Senior Vice President who is appointed and terminated by the Board of Directors with the Board of Commissioners' approval according to the Company's internal mechanism. The position of Internal Audit Unit is under the President Director.

The Internal Audit Unit's position in the Company's organizational structure is as follows:



Berdasarkan struktur organisasi di atas, Internal Audit mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas seluruh unit kerja unit kerja di lingkungan perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikan sesuai dengan rencana dan program serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan.

Unit Internal Audit merupakan aparat pengawas internal perusahaan yang dipimpin oleh seorang *Senior Vice President of Internal Audit* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Di mana dalam pelaksanaan tugasnya, *Senior Vice President of Internal Audit* dibantu oleh *Vice President of Operation & Service Audit*, *Vice President of Infrastructure & Facility Audit* dan *Vice President of Business & Supporting Audit* beserta para *Senior Auditor* dan *Junior Auditor*. Untuk mendukung independensi dan obyektivitas serta kelancaran pelaksanaan tugas, maka *Senior Vice President of Internal Audit* dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan hasil pengawasan.

As shown by the above organizational structure, the Internal Audit Unit has the duties to assist the President Director in supervising the performance of all work units within the company as well as providing suggestions for improvement based on the plans, programs and policies set by the Board of Directors in accordance with applicable provisions.

The Internal Audit Unit is an internal supervisory apparatus led by a Senior Vice President of Internal Audit who is directly responsible to the President Director. In performing his/her duties, the Senior Vice President of Internal Audit is assisted by the Vice President of Operations & Services Audit, the Vice President of Infrastructure & Facilities Audit and the Vice President of Business & Supporting Audit along with Senior Auditors and Junior Auditors. To support the independence and objectivity as well as the implementation feasibility of duties, the Senior Vice President of Internal Audit may communicate directly with the Board of Commissioners through the Audit Committee to inform them of various matters relating to audit results.



PROFIL SVP INTERNAL AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP.32/7/5/PI-2019 tanggal 27 Agustus 2019, Perusahaan telah menunjuk Emilda Andayani sebagai SVP Internal Audit.

PROFILE OF SVP OF INTERNAL AUDIT UNIT

Based on the Decree of the Board of Directors No. KP.32/7/5/PI-2019 of 27 August 2019, the Company appointed Emilda Andayani as SVP of Internal Audit.

EMILDA ANDAYANI SVP INTERNAL AUDIT SVP OF INTERNAL AUDIT UNIT



Periode Jabatan

Term of Office
28 Agustus 2019 - 5 Maret 2021,
Periode Ke-1
28 August 2019 - 5 March 2021, 1st
Periode

Domisili

Domicile
Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Medan, North Sumatera, Indonesia

Data Pribadi

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 48 tahun
Nationality Indonesian
48 years old

Pendidikan

Education

- Sarjana (S1) Manajemen dari Universitas Sumatera Utara (1995)
- Magister (S2) Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (2003)
- Bachelor (S1) in Management from the University of North Sumatra (1995)
- Master (S2) of Management from Gadjah Mada University (2003)

Pengalaman Kerja

- Staf Bidang Pembinaan Aneka Usaha, Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (1996-2003)
- Asisten Manajer Pelayanan Pelanggan Divisi Komersial, Unit Terminal Petikemas Belawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2004-2009)
- Asisten Manajer Pelayanan Pelanggan Divisi Komersial, Cabang Pelabuhan Belawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2009-2010)
- Asisten Senior Manajer Pengkajian Pasar dan Tarif, Bidang Pemasaran Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2010-2012)
- Asisten Senior Manajer Manajemen Risiko dan K3, Bidang Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2011-2013)
- Senior Manager Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu, Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2014-2016)
- Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2016-2019)
- Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern, Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-Sekarang)

Professional Experiences

- Staff in Miscellaneous Business Development Division, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office (1996-2003)
- Assistant Manager of Customer Service, Commercial Division, Container Terminal Unit Belawan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2004-2009)
- Assistant Manager of Customer Service, Commercial Division, Port of Belawan Branch, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2009-2010)
- Senior Assistant Manager of Market and Tariff Assessment, Marketing Division, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office (2010-2012)
- Senior Assistant Manager of Risk Management and OHS (K3), Risk Management and Quality Management Division, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office (2011-2013)
- Senior Manager of Risk Management and Quality Management, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office (2014-2016)
- Head of Risk Management Division, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office (2016-2019)
- Head of Internal Audit Unit, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office (2019-Present)

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

Applicable Training and/or Professional Certificates

Sertifikasi QIA Tingkat Lanjutan

Qualified Internal Auditor (QIA) Certification, Advanced Level

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN SVP INTERNAL AUDIT

SVP Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PARTIES APPOINTING AND TERMINATING SVP OF INTERNAL AUDIT UNIT

The SVP of Internal Audit Unit is appointed and terminated by the Board of Directors with the Board of Commissioners' approval.

JUMLAH PEGAWAI (KOMPOSISI) INTERNAL AUDIT

Hingga akhir tahun 2020, personil Unit Internal Audit terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang dengan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun komposisi Unit Internal Audit adalah sebagai berikut:

NUMBER OF EMPLOYEES (COMPOSITION) OF INTERNAL AUDIT UNIT

Until the end of 2020, the Internal Audit Unit consists of 27 (twenty seven) personnel with competencies in accordance with applicable regulations. The composition of the Internal Audit Unit is as follows:

Jabatan Position	Jumlah (orang) Number (persons)
Senior Vice President SPI Senior Vice President of IAU	1
DSVP Pengawasan Operasional & Komersial Bisnis DSVP of Business Operations & Commercial Audit	1
VP Internal Audit Operasional & Komersial VP of Operations & Commercial Internal Audit	1
DSVP Pengawasan Keuangan DSVP of Finance Audit	1
VP Internal Audit Keuangan VP of Finance Internal Audit	1
DSVP Pengawasan Teknik & Investasi DSVP of Engineering & Investment Audit	1
VP Internal Audit Teknik & Investasi VP of Engineering & Investment Internal Audit	1
DSVP Pengawasan SDM & Umum DSVP of HR and GA Audit	1
VP Internal Audit SDM & Umum VP of HR and GA Internal Audit	1
Auditor Senior Tk. I Senior Auditor Level I	7
Auditor Senior Tk. II Senior Auditor Level II	4
Auditor Junior Tk. I Junior Auditor Level I	1
Auditor Junior Tk. II Junior Auditor Level II	3
Pembantu Auditor Assistant Auditor	1
VP Adm & Penjaminan Mutu VP of Administration & Quality Assurance	1
TU Administrasi SPI IAU Administration Officer	1
Jumlah (Number)	27

SDM DAN SERTIFIKASI PROFESI

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan auditor, melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sehingga mampu memenuhi kualifikasi yang memadai. Daftar karyawan SPI yang telah mengikuti program sertifikasi adalah sebagai berikut.

HUMAN RESOURCES AND PROFESSIONAL CERTIFICATIONS

The Company is committed to constantly improving the auditors' competence and knowledge through continuous education and training to meet adequate qualifications. Presented below are lists regarding IAU employees who have participated in certification programs.

Jabatan Position	Jumlah Number	SMU High School	D3/d4 Diploma III/IV	S1 Bachelor	S2 Master
Senior Vice President SPI Senior Vice President of IAU	1	-	-	-	1
DSVP Pengawasan Operasional & Komersial Bisnis DSVP of Business Operations & Commercial Audit	1	-	-	-	1
VP Internal Audit Operasional & Komersial VP of Operations & Commercial Internal Audit	1	-	-	-	1
DSVP Pengawasan Keuangan DSVP of Finance Audit	1	-	-	1	-



Jabatan Position	Jumlah Number	SMU High School	D3/d4 Diploma III/IV	S1 Bachelor	S2 Master
VP Internal Audit Keuangan VP of Finance Internal Audit	1	-	-	-	1
DSVP Pengawasan Teknik & Investasi DSVP of Engineering & Investment Audit	1	-	-	1	-
VP Internal Audit Teknik & Investasi VP of Engineering & Investment Internal Audit	1	-	-	-	1
DSVP Pengawasan SDM & Umum DSVP of HR and GA Audit	1	-	-	-	1
VP Internal Audit SDM & Umum VP of HR and GA Internal Audit	1	-	-	-	1
Auditor Senior Tk. I Senior Auditor Level I	7	-	-	3	4
Auditor Senior Tk. II Senior Auditor Level II	4	-	-	4	-
Auditor Junior Tk. I Junior Auditor Level I	1	-	-	2	-
Auditor Junior Tk. II Junior Auditor Level II	3	-	2	1	-
Pembantu Auditor Assistant Auditor	1	-	1	-	-
VP Adm & Penjaminan Mutu VP of Administration & Quality Assurance	1	-	-	1	-
TU Administrasi SPI IAU Administrative Officer	1	1	-	-	-

KEGIATAN PELATIHAN DI TAHUN 2020
TRAINING ACTIVITIES IN 2020

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Diklat Name of Training Programs
1	Rizaldy Hasian Harahap	VP IA Teknik VP of Engineering IA	Diklat Sertifikasi Kalifikasi Internal Auditor Tingkat Manajerial Training on Qualified Internal Auditor Certification, Managerial Level
2	Muhammad Wahyu Okto Riendi	Auditor Junior Junior Auditor	Diklat Sertifikasi Kalifikasi Internal Auditor Tingkat lanjutan Training on Qualified Internal Auditor Certification, Advanced Level
3	Emilda Andayani	SVP SPI SVP of IAU	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
4	Kamal Akhyar	Deputy SDM Deputy HR	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
5	Syarief Husein	Deputy Keuangan Deputy Finance	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
6	T. M. Saldi	Deputy Teknik Deputy Engineering	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
7	Andri Lesmana	Deputy OK Deputy O&C	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
8	Trisna Wardani	VP Adm & Jamu VP of Adm. & QA	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
9	M. Ikhsan Panjaitan	VP IA Keuangan VP of Finance IA	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
10	Sutoro	VP IA OK VP of OC IA	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
11	Rizaldy Hasian Harahap	VP IA Teknik VP of Engineering IA	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
12	Muliawaty	VP IA SDM VP of HR IA	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2

KEGIATAN PELATIHAN DI TAHUN 2020
TRAINING ACTIVITIES IN 2020

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Diklat Name of Training Programs
13	Yonia Chairul	Auditor Senior Tk.I Senior Auditor Level I	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
14	Fitri Herayati Nasution	Auditor Senior Tk.I Senior Auditor Level I	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
15	Tanjung Halomoan Ambarita	Auditor Senior Tk.I Senior Auditor Level I	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
16	Mildawaty Noer	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
17	Akhmad Yani	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
18	Baihaqi	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
19	Ervina Lady Simatupang	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
20	Ramdhana Ferry Martin	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
21	Sapri Ependi	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
22	Ervina Lady Martha	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
23	Deski Rizaldi	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
24	Suhendra	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
25	Patria Prihanggadi	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
26	Samsul	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
27	Indra Ardiansah	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
28	Muhammad Wahyu Okto Riendi	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
29	Kurniawan Haryo Yudanto	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
30	Andoharjadi Ezer Purba	Auditor Senior Tk.II Senior Auditor Level II	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
31	Nursabriati	Adm Adm. Officer	Workshop Implementasi IDEA Level 2 Workshop on the Implementation of IDEA Level 2
32	Samsul	Auditor Junior Tk.I Junior Auditor Level I	Diklat Sertifikasi Kualifikasi Internal Auditor Tingkat Lanjutan Training on Qualified Internal Auditor Certification, Advanced Level
33	Emilda Andayani	SVP SPI SVP of IAU	Diklat Sertifikasi Kualifikasi Internal Auditor Tingkat Lanjutan Training on Qualified Internal Auditor Certification, Advanced Level
34	Patria Prihanggadi	Auditor Junior Tk.I Junior Auditor Level I	Diklat Sertifikasi Kualifikasi Internal Auditor Tingkat Lanjutan Training on Qualified Internal Auditor Certification, Advanced Level
35	Ervina Lady Simatupang	Auditor Junior Tk.II Junior Auditor Level II	Diklat Sertifikasi Kualifikasi Internal Auditor Tingkat Manajerial Training on Qualified Internal Auditor Certification, Managerial Level
36	Samsul	Auditor Junior Tk.I Junior Auditor Level I	Diklat Sertifikasi Kualifikasi Internal Auditor Tingkat Lanjutan Training on Qualified Internal Auditor Certification, Advanced Level
37	Indra Ardiansah	Auditor Junior Tk.I Junior Auditor Level I	Diklat Sertifikasi Kualifikasi Internal Auditor Tingkat Lanjutan Training on Qualified Internal Auditor Certification, Advanced Level
38	Kurniawan Haryo Yudanto	Auditor Junior Tk.I Junior Auditor Level I	Diklat Sertifikasi Kualifikasi Internal Auditor Tingkat Lanjutan Training on Qualified Internal Auditor Certification, Advanced Level
39	Andoharjadi Ezer Purba	Auditor Junior Tk.I Junior Auditor Level I	Diklat Sertifikasi Kualifikasi Internal Auditor Tingkat Lanjutan Training on Qualified Internal Auditor Certification, Advanced Level



Berdasarkan sertifikasi profesi di tahun 2020, berikut pelatihan yang diikuti Satuan Pengawasan Intern selama tahun 2020:

Based on professional certification programs organized in 2020, below are trainings participated by the Internal Audit Unit personnel throughout 2020:

No.	Jabatan Position	Sertifikasi Kualifikasi Internal Auditor Qualified Internal Auditor Certification				
		Dasar I Basic I	Dasar II Basic II	Lanjutan I Advanced I	Lanjutan II Advanced II	QIA QIA Certified
1	Senior Vice President SPI Senior Vice President of IAU	-	-	1	-	-
2	DSVP Pengawasan Operasional & Komersial Bisnis DSVP of Business Operations & Commercial Audit	-	-	-	-	1
3	VP Internal Audit Operasional & Komersial VP of Operations & Commercial Internal Audit	-	-	-	-	1
4	DSVP Pengawasan Keuangan DSVP of Finance Audit	-	-	-	-	1
5	VP Internal Audit Keuangan VP of Finance Internal Audit	-	-	-	-	1
6	DSVP Pengawasan Teknik & Investasi DSVP of Engineering & Investment Audit	-	-	-	1	-
7	VP Internal Audit Teknik & Investasi VP of Engineering & Investment Internal Audit	-	-	1	-	-
8	DSVP Pengawasan SDM & Umum DSVP of HR and GA Audit	-	-	-	1	-
9	VP Internal Audit SDM & Umum VP of HR and GA Internal Audit	-	-	-	-	1
10	Auditor Senior Tk. I Senior Auditor Level I	-	-	-	3	4
11	Auditor Senior Tk. II Senior Auditor Level II	-	-	3	-	1
12	Auditor Junior Tk. I Junior Auditor Level I	-	-	1	-	-
13	Auditor Junior Tk. II Junior Auditor Level II	-	-	3	-	-
14	Pembantu Auditor Assistant Auditor	-	-	1	-	-
15	VP Adm & Penjaminan Mutu Administration & Quality Assurance	-	-	-	-	-
16	TU Administrasi SPI Administrative Officer	-	-	-	-	-

PIAGAM INTERNAL AUDIT

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal yang disahkan pada tahun 2018. Isi dari Piagam Audit Internal sebagai berikut:

1. Visi
2. Misi
3. Sasaran
4. Ruang Lingkup Pekerjaan
5. Independensi
6. Kewenangan
7. Pelaporan
8. Tugas dan Tanggung Jawab
9. Perencanaan
10. Standar Pelaksanaan Pekerjaan

INTERNAL AUDIT CHARTER

The Company has an Internal Audit Charter ratified in 2018. Contents of the Internal Audit Charter are as follows:

1. Vision
2. Mission
3. Targets
4. Scope of Work
5. Independence
6. Authorities
7. Reporting
8. Duties and Responsibilities
9. Planning
10. Standard Operating Procedure

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, Internal Audit telah melaksanakan kegiatan terkait pelaksanaan audit. Berikut uraian kegiatan dan hasil audit yang dilakukan Internal Audit:

ACTIVITIES OF THE INTERNAL AUDIT UNIT IN 2020

Throughout 2020, the Internal Audit Unit carried out a number of activities related to auditing. These activities along with the audit results are elaborated as follows:

Kegiatan Activities	Hasil Audit Audit Results
<p>Audit rutin Kantor Pusat, dengan durasi audit lapangan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 April s.d. 05 Juni 2020. Regular audit at the Head Office, with a field audit duration of 25 (twenty five) business days from 13 April to 5 June 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 01/ LHA/KTRPST/IX/20-RH tanggal 16 September 2020. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 01/LHA/KTRPST/IX/20-RH of 16 September 2020.</p>
<p>Audit rutin Cabang Tanjungpinang, dengan durasi audit lapangan selama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 s.d. 31 Juli 2020. Regular audit at Tanjungpinang Branch, with a field audit duration of 10 (ten) calendar days from 22 to 31 July 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 03/ LHA/TPI/X/20-RH tanggal 22 Oktober 2020. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 03/LHA/TPI/X/20-RH of 22 October 2020.</p>
<p>Audit rutin Cabang Tanjung Balai Karimun, dengan durasi audit lapangan selama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 s.d. 31 Juli 2020. Regular audit at Tanjung Balai Karimun Branch, with a field audit duration of 10 (ten) calendar days from 22 to 31 July 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 05/ LHA/TBK/XI/20-RH tanggal 30 November 2020. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 05/LHA/TBK/XI/20-RH of 30 November 2020.</p>
<p>Audit rutin Cabang Sibolga dengan durasi audit lapangan selama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 s.d. 31 Juli 2020. Regular audit at Sibolga Branch, with a field audit duration of 10 (ten) calendar days from 22 to 31 July 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 04/ LHA/SBG/X/20-RH tanggal 22 Oktober 2020. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 04/LHA/SBG/X/20-RH of 22 October 2020.</p>
<p>Audit rutin Cabang Sei Pakning dengan durasi audit lapangan selama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 s.d. 31 Juli 2020. Regular audit at Sei Pakning Branch, with a field audit duration of 10 (ten) calendar days from 22 to 31 July 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 02/ LHA/SPN/X/20-RH tanggal 22 Oktober 2020. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 02/LHA/SPN/X/20-RH of 22 October 2020.</p>
<p>Audit rutin Cabang Belawan dengan durasi audit lapangan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 s.d. 29 September 2020. Regular audit at Belawan Branch, with a field audit duration of 14 (fourteen) business days from 10 to 29 September 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 12/ LHA/BLW/II/21-RH tanggal 19 Februari 2021. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 12/LHA/BLW/II/21-RH of 19 February 2021.</p>
<p>Audit rutin Cabang Pekanbaru dengan durasi audit lapangan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 s.d. 29 September 2020. Regular audit at Pekanbaru Branch, with a field audit duration of 14 (fourteen) business days from 10 to 29 September 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 15/ LHA/PKU/II/21-RH tanggal 19 Februari 2021. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 15/LHA/ PKU/II/21-RH of 19 February 2021.</p>
<p>Audit rutin Terminal Petikemas Belawan dengan durasi audit lapangan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 s.d. 29 September 2020. Regular audit at Belawan Container Terminal, with a field audit duration of 14 (fourteen) business days from 10 to 29 September 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 06/ LHA/TPK/XI/20-RH tanggal 30 November 2020. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 06/LHA/TPK/XI/20-RH of 30 November 2020.</p>



Kegiatan Activities	Hasil Audit Audit Results
<p>Audit rutin Cabang Dumai dengan durasi audit lapangan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 s.d. 29 September 2020. Regular audit at Dumai Branch, with a field audit duration of 14 (fourteen) business days from 10 to 29 September 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 07/LHA/DUM/XI/20-RH tanggal 30 November 2020. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 07/LHA/DUM/XI/20-RH of 30 November 2020.</p>
<p>Audit rutin Cabang Tanjung Balai Asahan dengan durasi audit lapangan selama 11 (sebelas) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Oktober s.d. 13 November 2020. Regular audit at Tanjung Balai Asahan Branch, with a field audit duration of 11 (eleven) business days from 20 October to 13 November 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 13/LHA/TBA/II/21-RH tanggal 19 Februari 2021. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 13/LHA/TBA/II/21-RH of 19 February 2021.</p>
<p>Audit rutin Cabang Lhokseumawe dengan durasi audit lapangan selama 11 (sebelas) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Oktober s.d. 13 November 2020. Regular audit at Lhokseumawe Branch, with a field audit duration of 11 (eleven) business days from 20 October to 13 November 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 14/LHA/LSM/II/21-RH tanggal 26 Februari 2021. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 14/LHA/LSM/II/21-RH of 26 February 2021.</p>
<p>Audit rutin Cabang Malahayati dengan durasi audit lapangan selama 11 (sebelas) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Oktober s.d. 13 November 2020. Regular audit at Malahayati Branch, with a field audit duration of 11 (eleven) business days from 20 October to 13 November 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 08/LHA/MLH/XII/20-RH tanggal 07 Desember 2020. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 08/LHA/MLH/XII/20-RH of 7 December 2020.</p>
<p>Audit rutin Cabang Batam dengan durasi audit lapangan selama 11 (sebelas) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Oktober s.d. 13 November 2020. Regular audit at Batam Branch, with a field audit duration of 11 (eleven) business days from 20 October to 13 November 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 11/LHA/BTM/II/21-RH tanggal 19 Februari 2021. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 11/LHA/BTM/II/21-RH of 19 February 2021.</p>
<p>Audit rutin PT Prima Indonesia Logistik dengan durasi audit lapangan selama 16 (enam belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 19 November s.d. 22 Desember 2020. Regular audit at PT Prima Indonesia Logistik, with a field audit duration of 16 (sixteen) business days from 19 November to 22 December 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 16/LHA/PIL/IV/21-RH tanggal 06 April 2021. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 16/LHA/PIL/IV/21-RH of 6 April 2021.</p>
<p>Audit rutin PT Prima Pengembangan Kawasan dengan durasi audit lapangan selama 16 (enam belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 19 November s.d. 22 Desember 2020. Regular audit at PT Prima Pengembangan Kawasan, with a field audit duration of 16 (sixteen) business days from 19 November to 22 December 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 17/LHA/PPK/IV/21-RH tanggal 06 April 2021. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 17/LHA/PPK/IV/21-RH of 6 April 2021.</p>
<p>Audit rutin PT Prima Terminal Petikemas dengan durasi audit lapangan selama 16 (enam belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 November s.d. 22 Desember 2020. Regular audit at PT Prima Terminal Petikemas, with a field audit duration of 16 (sixteen) business days from 25 November to 22 December 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 09/LHA/PTP/II/21-RH tanggal 17 Februari 2021. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 09/LHA/PTP/II/21-RH of 17 February 2021.</p>
<p>Audit rutin PT Prima Husada Cipta Medan dengan durasi audit lapangan selama 16 (enam belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 19 November s.d. 22 Desember 2020. Regular audit at PT Prima Husada Cipta Medan, with a field audit duration of 16 (sixteen) business days from 19 November to 22 December 2020.</p>	<p>Laporan Hasil Audit telah selesai dan telah dilaporkan sesuai laporan No. 10/LHA/PHCM/II/21-RH tanggal 19 Februari 2021. Audit Report had been prepared and reported according to Report No. 10/LHA/PHCM/II/21-RH of 19 February 2021.</p>

AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANTS

Audit Eksternal merupakan proses audit terhadap laporan keuangan Perseroan yang dilakukan oleh auditor independen dari luar Perseroan. Guna mendukung proses audit yang independen terhadap laporan keuangan di tahun buku 2020, Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagai auditor eksternal Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Kamis, 23 Januari 2020, Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagai auditor eksternal Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020. Penunjukan ini merupakan periode pertama dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan audit keuangan Pelindo 1.

Penunjukan KAP tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik selaku *Partner* paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

PERIODE PEMERIKSAAN AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan Kantor Akuntan Publik ditetapkan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Berikut daftar Kantor Akuntan Publik, nama akuntan, dan fee selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Fee Audit (Rp) Audit Fee (Rp)
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia)	Endang Pramuwati	1.926.650.000
2019	Helianto & Rekan Heliantono & Partners	Heliantono .Ak. CA. CPA. CMA. CFA. CBV. Cert.IFRS. CLI.	1.298.000.000
2018	Helianto & Rekan Heliantono & Partners	Sultana Amri	1.088.350.000
2017	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Suhartono, MPA, Ak., CA, CPA	1.020.140.000
2016	Helianto & Rekan Heliantono & Partners	Heliantono .Ak. CA. CPA. CMA. CFA. CBV. Cert.IFRS. CLI.	1.070.300.000

JASA LAIN YANG DIBERIKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) tidak memberikan jasa lainnya selain melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020.

External Audit is the audit process of the Company's financial reports carried out by independent auditors from outside the Company. In order to support independent audit process of the financial reports in financial year of 2020, the Company has appointed Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) as the Company's external auditor.

Based on the decision of the Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 23 January 2020, the Company appointed Public Accounting Firm (PAF) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) as the Company's external auditor to audit the Company's Consolidated Financial report in Financial Year of 2020. That appointment was the first period of the said PAF to audit Pelindo 1's finance.

The PAF appointment above has met the provisions in the Decision Letter of the Minister of Finance which states that public audit services on the financial reports of an entity could be provided by a PAF for a maximum of 5 (five) consecutive financial years and by a Public Accountant as a Partner for a maximum of 3 (three) consecutive financial years.

PUBLIC ACCOUNTANT AUDIT PERIOD

The appointment of Public Accounting Firm is determined in the Company's Annual GMS. The following is a list of the Public Accounting Firms, names of accountant, and fees for the past 5 (five) years.

OTHER SERVICES PROVIDED BY PUBLIC ACCOUNTING FIRM

The Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) does not provide services other than auditing the Financial Statements for the financial year of 2020.



MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, Perseroan senantiasa menerapkan sistem manajemen risiko yang menyeluruh. Perseroan telah memiliki berbagai kebijakan dan prosedur manual terkait manajemen risiko. Kebijakan yang memadai dan prosedur juga dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perseroan tidak menimbulkan potensi kerugian yang melebihi kemampuan atau mengganggu kesinambungan kegiatan operasional Perseroan.

ACUAN PENERAPAN

Penerapan manajemen risiko secara korporat mengacu pada standar internasional yaitu ISO 31000:2009, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KP.39/9/2/P.I-16. TU tanggal 28 Desember 2016 perihal Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Nomor KP.39/9/3/P.I-16.TU tanggal 28 Desember 2016 perihal Pedoman Prosedur dan Instruksi Kerja Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

STRUKTUR ORGANISASI

Pengelolaan manajemen risiko Pelindo 1 secara keseluruhan menjadi perhatian Direksi untuk dilaksanakan oleh unit yang telah dibentuk untuk mengawal implementasi manajemen risiko. Unit tersebut terdiri dari Divisi Manajemen Risiko yang berada langsung di bawah Direktur Utama, yang memiliki 2 (dua) Departemen yaitu Departemen Manajemen Risiko Operasional dan Departemen Manajemen Risiko Non-Operasional.

Pada bulan Agustus 2019 perusahaan melakukan restrukturisasi organisasi dan Divisi Manajemen Risiko mengalami *right sizing* serta berubah menjadi hanya satu Departemen yang berada di bawah Divisi Manajemen Strategis Perusahaan tanpa adanya pembagian jabatan antara risiko operasional dan non-operasional.

Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Direksi No. PR.02/5/1/P.I-19. TU tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Organisasi dan Tata Kerja pada Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Seluruh pejabat struktural mulai satu tingkat di bawah Direksi (GM/KADIV setingkat) sampai dengan Kepala Departemen/Manajer Setingkat ditingkat cabang dan kantor pusat ditetapkan sebagai *risk owner* (pemilik risiko), yang mempunyai kewajiban mengelola risiko di unit kerja masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, *risk owner* dibantu oleh *risk agent*, yaitu staf yang ditunjuk dan diberikan kompetensi dasar, sebagai perpanjangan tangan Divisi MSP/Departemen Manajemen Risiko dalam penerapan manajemen risiko pada setiap unit kerja di Kantor Pusat dan cabang, dengan level setingkat Kepala Departemen sampai dengan staf/pelaksana.

In order to achieve sustainability in its activities, the Company implements a comprehensive risk management system. The Company has enacted various policies and procedures related to risk management. Adequate policies and procedures are regularly re-examined to ensure that the Company's activities do not incur any potential loss that may exceed the ability or disturb the activities of the Company.

IMPLEMENTATION GUIDELINES

The corporate risk management implementation refers to the international standards of ISO 31000:2009, which is expressed in Board of Directors Decision Letter No. KP.39/9/2/P.I-16. TU of 28 December 2016 on Policy on Risk Management within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and No. KP.39/9/3/P.I-16. TU of 28 December 2016 on Guidelines on Risk Management Implementation Procedure Guidelines and Work Instruments within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Pelindo 1 risk management organization is one of the main priorities of the Board of Directors and entrusted to the established unit to supervise risk management implementation. Suh unit consists of the Risk Management Division which is directly responsible towards the President Director, with 2 (two) Departments under it, namely Operational Risk Management Department and Non-Operational Risk Management Department.

In August 2019, the company performed a organizational restructuring and the Risk Management Division experienced a right-sizing to just one Department under the Corporate Strategic Management Division without any differentiation between operational and non-operational risks.

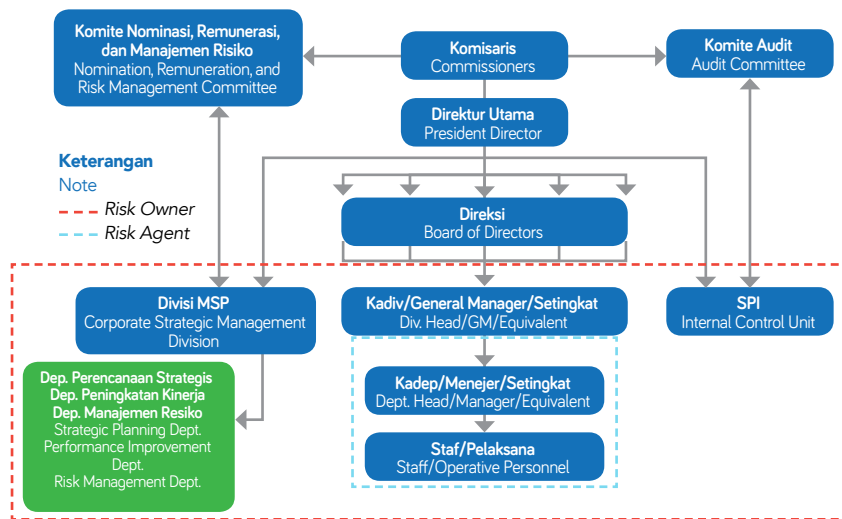
This change is stipulated in Board of Directors Regulation No. PR.02/5/1/P.I-19. TU of 27 August 2019 on Organizational and Methodical Structure at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office. All the structural officers starting from the level below the Directors (GM/Division Head or equivalent) up to Department Head/Manager or equivalent at the branches and the Head Office are established as risk owners with obligation to manage risk at their respective work units.

The risk owners are assisted by the risk agents, namely the staff appointed and given basic competency training, as direct extension of Corporate Strategic Management/ Risk Management Department in the implementation of risk management in each work unit at the Head Office and branches, with a level equivalent to Department Head down to staff/operative personnel.

Penerapan manajemen risiko di perusahaan juga menjadi perhatian bagi Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam pelaksanaan audit rutin melalui mekanisme *risk based audit*, dengan menjadikan hasil kajian risiko yang telah disusun sebagai bagian dalam penetapan fokus audit.

Secara korporat, penerapan manajemen risiko juga diawasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR), sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/DK/PP.II/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Pedoman Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Pada bulan Juli 2019, KPMR sendiri juga direstrukturisasi menjadi Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. KP 10 Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko, Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Komite Nominasi, dan Remunerasi.

Berikut struktur organisasi manajemen risiko:



Risk management implementation at the company is also a priority for the Internal Control Unit (SPI) in its regular audit through risk-based audit, with the resulting risk study making part of the establishment of audit focus.

Corporate risk management implementation is directly supervised by the Board of Commissioners through Risk Management Supervision Committee (LPMR) in accordance with Board of Commissioners Decision Letter No. 02/DK/PP.II/2018 of 29 January 2018 on Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Risk Management Supervision Committee. In July 2019, the Committee was reorganized into the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee in accordance with Board of Commissioners Decision No. KP 10 of 2019 dated 31 July 2019 on the Establishment of Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee, Termination and Transfer of Position of Members of Nomination, and Remuneration Committee.

The risk management organizational structure is as follows:

PROFIL KEPALA MANAJEMEN RISIKO

Perseroan telah menunjuk Sarmidi sebagai Kepala Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Direksi No. KP.32/2/8/PI-19, tanggal 8 Maret 2019.

RISK MANAGEMENT HEAD PROFILE

The Company appointed Sarmidi as Risk Management Head according to Board of Directors Decision No. KP.32/2/8/PI-19 of 8 March 2019.





SARMIDI
KEPALA MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT HEAD



Periode Jabatan

Term of Office
Periode Jabatan 8 Maret 2019-sekarang, Periode Ke-1
Term of Office 8 March 2019-now, 1st Period

Data Pribadi

Personal Data
Warga Negara Indonesia
Usia 47 tahun
Nationality Indonesian
47 years old

Domisili

Domicile
Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Medan, North Sumatera, Indonesia

Pendidikan

Education

- Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara (1997)
- Magister (S2) Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (2003)
- Bachelor's Degree (S1) in Accounting from Universitas Sumatera Utara (1997)
- MBA (S2) from Universitas Gadjah Mada (2003)

Pengalaman Kerja

- Koord PMO Implementasi ERP Kantor Pusat Pelindo 1 (2016-2018)
- Kepala Divisi Implementasi ERP Kantor Pusat Pelindo (2018-2019)
- Kadiv Manajemen Strategis Perusahaan Kantor Pusat Pelindo (2019)
- SVP Manajemen Strategis Perusahaan Kantor Pusat Pelindo 1 (2019-sekarang)

Work Experience

- Koord PMO for ERP Implementation at Pelindo 1 Head Office (2016-2018)
- Head of ERP Implementation Division at Pelindo Head Office (2018-2019)
- Head of Corporate Strategic Management Division at Pelindo Head Office (2019)
- SVP of Corporate Strategic Management Division at Pelindo 1 Head Office (2019-now)

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

Applicable Training and/or Professional Certificates

Sertifikasi QIA Tingkat Lanjutan

Qualified Internal Auditor (QIA) Certification, Advanced Level

JUMLAH SDM UNIT MANAJEMEN RISIKO

Hingga akhir tahun 2020, personil Unit Manajemen Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang dengan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun komposisi Unit Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

NUMBER OF HUMAN RESOURCES AT RISK MANAGEMENT UNIT

As of the end of 2020, the Risk Management Unit employed 3 (three) personnel with competencies in accordance with the prevailing stipulations. The composition of the Risk Management Unit is as follows:

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (people)
Kepala Departemen Department Head	1
Staf Manajemen Risiko Risk Management Staff	2
Jumlah Total	3

KOMPETENSI SDM

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Unit Manajemen Risiko dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Unit Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2020, Unit Manajemen Risiko telah mengikuti beberapa program pengembangan sebagai berikut:

HR COMPETENCY

The Company facilitates the development programs intended for Risk Management Unit in order to improve their competency. The program is expected to give a positive impact on the productivity and performance efficacy of the Risk Management Unit. Throughout 2020, the Risk Management Unit joined the following development programs:

1. Risk Awareness melalui majalah Gema dan E-mail Blast;
2. Asistensi untuk meningkatkan pemahaman manajemen risiko kepada para Risk Agent dengan menggunakan Whatsapp grup dan email "Risk Management" untuk mempermudah penerapan manajemen risiko di unit kerja selanjutnya;
3. Berkoordinasi dengan Divisi Corporate University dalam penyusunan bahan e-learning terkait penerapan dan implementasi Manajemen Risiko dilengkapi dengan bank soal untuk try out terhadap pemahaman peserta ujian;
4. Telah dilakukan pelatihan internal untuk pendalaman Ilmu Manajemen Risiko kepada Risk Agent, Risk Owner, dan Task Officer.

PELAKSANAAN KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO

Dengan memperhatikan target Perseroan yang tertuang dalam RKAP dan KPI, maka Perseroan perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi-potensi risiko yang mungkin terjadi dan menghambat/mengganggu pencapaian atau mengakibatkan tidak tercapainya target-target yang telah ditetapkan.

Setelah itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui penyebab risiko dan memperkirakan besaran kemungkinan terjadinya dan dampak yang mungkin ditimbulkan jika risiko terjadi, sehingga diketahui tingkat risiko awal/inherent risk.

Penetapan tingkat risiko dilaksanakan sesuai tabel peta risiko berikut:

1. Risk Awareness through Gema magazine and E-mail Blast;
2. Assistance to improve understanding of risk management to the Risk Agents using Whatsapp groups and Risk Management email to ease the risk management implementation in the work unit at the next level;
3. Coordinating with the Corporate University Division to write e-learning materials related to application and implementation of Risk Management with question bank for the try out for test participants' understandingl
4. Internal training to increase the Risk Management knowledge of the Risk Agents, Risk Owners, and Task Officers.

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT ACTIVITIES

Taking into account the Company's targets as stipulated by the RKAP and KPI, the Company needs to identify potential risks that may potentially hinders/obstructs the achievement or even render the target achievements impossible.

Then, another study is in order to know what causes the risks and to predict the probability of the risks happening and the impacts that might arise should the risks occur, so that the inherent risk level is known.

Determination of risk level is carried out according to the below risk map table:

INDEKS KEMUNGKINAN PROBABILITY INDEX							
SANGAT BESAR VERY HIGH	5						Indeks Dampak: ■ EKSTREM (17-25) EXTREME ■ TINGGI (11-16) HIGH ■ MODERAT (5-10) MODERATE ■ RENDAH (1-4) LOW
BESAR HIGH	4						
SEDANG MEDIUM	3						
KECIL LOW	2						
SANGAT KECIL VERY LOW	1						
		1	2	3	4	5	
		TIDAK BERAT NOT SEVERE	AGAK BERAT SLIGHTLY SEVERE	BERAT SEVERE	SANGAT BERAT VERY SEVERE	MALAPETAKA DISASTROUS	





Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rencana tindakan/mitigasi, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemungkinan ataupun dampak dari risiko tersebut, sehingga tingkat risiko dapat diturunkan ke tingkat moderat atau rendah, yaitu tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan.

Mekanisme penyusunan kajian risiko terhadap Program Kerja Manajemen (PKM) unit kerja cabang dan kantor pusat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja diminta untuk mengidentifikasi kondisi yang dapat menggagalkan PKM, dengan memperhatikan rencana kegiatan/*action plan* yang paling kritis;
2. Melakukan identifikasi atas sumber penyebab utama terjadinya risiko dan mengukur seberapa besar potensi terjadinya, juga dampak yang ditimbulkan jika risiko terjadi;
3. Menyusun rencana tindakan yang dimungkinkan untuk:
 - a. Meminimalisir tingkat kemungkinan terjadinya risiko;
 - b. Meminimalisir dampak jika penyebab risiko terjadi.
4. Evaluasi dan pembahasan bersama antara Departemen Manajemen Risiko dan unit kerja terkait atas hasil kajian awal yang disampaikan, untuk memastikan kembali kesesuaian atas setiap *item* kajian;
5. Kajian risiko yang telah disepakati bersama, selanjutnya dilaporkan ke departemen manajemen risiko untuk memudahkan pelaksanaan pelaporan atas hasil *monitoring* selanjutnya.

MITIGASI RISIKO

Pelaporan dan *monitoring* terhadap progress mitigasi risiko PKM dilakukan melalui MSE/*Email Corporate* setelah triwulan berjalan dengan melampirkan bukti pendukung yang relevan, sebagai bahan evaluasi Departemen Manajemen Risiko terhadap kesesuaiannya. Selanjutnya hasil mitigasi dimaksud dijadikan sebagai bahan penentu apakah tingkat risiko/eksposur setelah mitigasi terjadi penurunan, jika tidak maka akan di-*review* kembali untuk optimalisasi pelaksanaan mitigasi atau penyusunan rencana mitigasi yang baru.

Berdasarkan laporan dan hasil evaluasi mitigasi risiko di Pelindo 1, Perseroan telah menetapkan sejumlah risiko utama yang dihadapi Perseroan, sebagai berikut:

Realisasi Unit Kerja Cabang dan Kantor Pusat

Hasil kajian awal risiko unit kerja Kantor Pusat, sebagian besar memiliki nilai risiko Ekstrem dan Tinggi, hal ini dikaitkan dengan dampak yang mungkin ditimbulkan dari risiko tersebut, seperti kehilangan aset, kegagalan investasi, *image* perusahaan yang tidak baik serta dampak finansial secara korporat mengingat fungsi utamanya adalah mengawasi realisasi program yang sama pada beberapa cabang (akumulasi target secara korporat).

The next step is to devise action plan/mitigation, which has the purpose of reducing the risk probability and the impact that might be caused by the risks, so that the risk level may be reduced to a moderate or lower level, which are the risk levels acceptable to the company.

The mechanism of risk study on Management Work Program (PKM) of branch and Head Office work units is as follows:

1. Each work unit is asked to identify the conditions that might hinder the PKM, taking into account the most critical action plans;
2. Identifying the main source of risks and measuring the potential probability of the risks occurring, as well as the impacts that might be caused should the risks happen;
3. Devising a possible action plan to:
 - a. Minimize the risk probability;
 - b. Minimize the impact should the risk occur.
4. Evaluation and discussion between the Risk Management Department and the relevant Work Unit concerning the early study to ensure the compliance of study items;
5. The agreed risk study shall be reported to the Risk Management Department to facilitate the reporting of the next monitoring results.

RISK MITIGATIONS

The reporting and monitoring of the progress of PKM risk management is conducted through MSE/*Corporate Email* after the current quarter with attachment of the relevant evidence, whose compliance is to be evaluated by the Risk Management Department. The mitigation results will then determine whether the risk level/exposure decreases after the mitigation; if otherwise, then the mitigation shall be reviewed for mitigative action optimization or establishment of new mitigation plan.

According to the reports and risk mitigation evaluations at Pelindo 1, the Company has determined a few major risks faced by the Company, as follows:

Realization of Branch and Head Office Work Units

The inherent risk level study at the headquarters show that there are a few risks with Extreme and High exposure levels, which is related to the impacts that might be caused by such risks, such as asset loss, investment failure, damage to the company's image as well as financial and corporate impacts because the main function is to supervise the realization of the same program at several branches (accumulated corporate targets).

No.	Unit Kerja Work Unit	Jumlah PKM Number of PKM	Jumlah Risiko Number of Risks	Risiko Awal Inherent Risk				PKM Setelah Revisi PKM Post-Revision		Assessment TW III QIII Assessment				Assessment TW IV QIV Assessment				Risiko yang Diharapkan Desired Risk			
				Extreme Extreme	Tinggi High	Medium Medium	Low Low	Jumlah PKM Number of PKM	Jumlah Risiko Number of PKM	Extreme Extreme	Tinggi High	Medium Medium	Low Low	Extreme Extreme	Tinggi High	Medium Medium	Low Low	Extreme Extreme	Tinggi High	Medium Medium	Low Low
1	Dumai	5	5	1	2	2		5	5		1	2	2		1	2	2			3	2
2	Cabang Pekanbaru Pekanbaru Branch	3	7	5	2			6	15	8	7			5	10					15	
3	Cabang Sei Pakning Sei Pakning Branch	4	11			11		4	11			11				11				11	
4	Cabang Gunungsitoli Gunungsitoli Branch	3	4		4			3	4	4					4					4	
5	Cabang Sibolga Sibolga Branch	2	2		2			2	2			2			2				1		1
6	Cabang Tembilahan Tembilahan Branch	2	2	1	1			3	3	3				2	1					3	
7	Unit Galangan Kapal Shipyards Unit	2	3	2	1			3	4	3		1		3		1				3	1
8	Cabang Belawan Belawan Branch	4	4		3	1		4	4			3	1		2	2					4
9	Kuala Tanjung	1	1			1		1	1			1			1						1
10	Tanjung Balai Asahan	2	3	2	1			2	3	2	1			3					1	2	
11	Batam	3	3	1	2			3	3			3		1	2						3
12	Lhoksumawe	3	3	3				3	3	1	2			3							3
13	Malahayati	2	2			2		2	2			2			1	1					2
14	Tanjung Balai Karimun	3	3	3				3	3	2	1			1	2						3
15	Tanjungpinang	3	3	3				3	3	2	1			2		1					3
16	TPK Belawan	6	9	1	1	1	6	8	9	1	1	3	4	1	1	1	6			1	8
Jumlah Total		48	65	22	19	18	6	55	75	15	23	29	8	9	23	31	12	0	2	51	22

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa beberapa risiko mengalami perubahan eksposur dibanding triwulan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Eksposur Menurun: 18 Risiko

Disebabkan:

Terdapat PKM yang telah terealisasi dan saat ini dalam proses implementasi dan keseluruhan kontrol dilaksanakan.

2. Eksposur Meningkat: 1 Risiko

Disebabkan:

Terdapat revisi PKM 2020.

3. Eksposur Tetap: 56 Risiko

Disebabkan:

Realisasi Mitigasi yang telah dilaksanakan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan risiko di Triwulan IV.

According to the above table, it can be seen that a few risks experienced a change in exposure level compared to the previous quarter as follows:

1. Decreasing Exposure: 18 Risks

Due to:

Some PKMs were realized and currently in the implementation process, and all the control actions have been carried out.

2. Increasing Exposure: 1 Risk

Due to:

2020 Revisions to the PKM.

3. Unchanged Exposure: 56 Risks

Due to:

The realized Mitigation had yet to bring desired effect with regard to exposure level in Quarter IV.

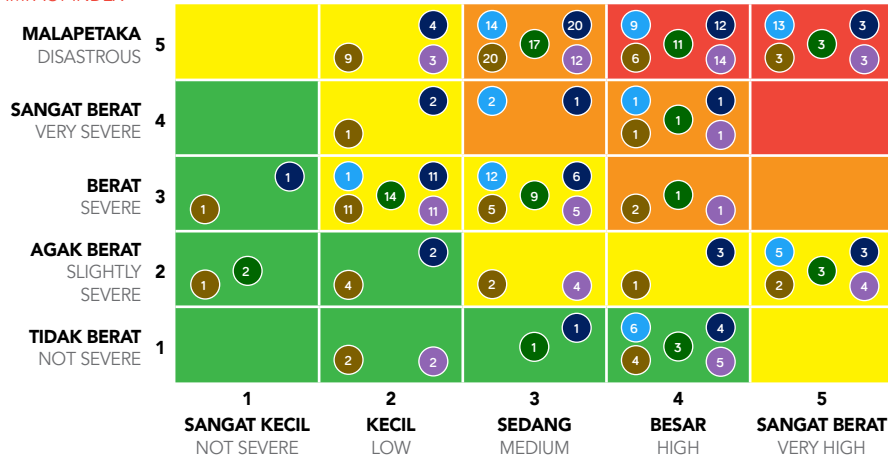




Perubahan tingkat eksposur risiko PKM Divisi/Unit Kerja Kantor Cabang di atas dapat dilihat pada peta risiko berikut:

Change to risk exposure level at the PKMS of Divisions/Units at the Branches above can be seen in the below risk map:

INDEKS DAMPAK
IMPACT INDEX



INDEKS KEMUNGKINAN
POSSIBILITY INDEX

Tingkat Risiko:
Risk Level

- Ekstrem (17-25)
Extreme
- Tinggi (11-16)
High
- Moderat (5-10)
Moderate
- Rendah (1-4)
Low

Keterangan:
Note

- Jumlah Risiko Awal 2020
Number of Inherit Risks in 2020
- Jumlah Risiko Triwulan I Tahun 2020
Number of Risks in Quarter I 2020
- Jumlah Risiko Triwulan II Tahun 2020
Number of Risks in Quarter II 2020
- Jumlah Risiko Triwulan III Tahun 2020
Number of Risks in Quarter III 2020
- Jumlah Risiko Triwulan IV Tahun 2020
Number of Risks in Quarter IV 2020

- Pergerakan Cabang
Branch Movement

Realisasi Mitigasi PKM Divisi Kantor Pusat

Realization of PKM Mitigation for Divisions at Head Office

No	Unit Kerja Work Unit	PKM Lama Original PKMs		Risiko Awal Inherent Risks				Assessment TW I Q1 Assessment				Assessment TW II Q2 Assessment			
				Tingkat Eksposur Exposure Level				Tingkat Eksposur TW I Q1 Exposure Level				Tingkat Eksposur TW II Q2 Exposure Level			
		Jumlah PKM Number of PKMs	Jumlah Risiko Number of Risks	Extreme	Tinggi High	Medium	Low	Extreme	Tinggi High	Medium	Low	Extreme	Tinggi High	Medium	Low
1	Teknologi Informasi Information Technology	6	17		17				17			9	8		
2	Fasilitas Facilities	8	24		24			3	21				24		
3	Pemasaran Marketing	6	7		7			6	1			5	1	1	
4	Bisnis Terminal dan Logistik Terminal and Logistics Business	7	10		10			7	3			7	3		
5	Bisnis Maritim Maritime Business	8	9	2	6	1		1	3	5		1	3	5	
6	Manajemen Transformasi Transformation Management	2	4		2	2			4			1	3		
7	PM Fasilitas PM Facilities	5	45		45				45				45		
8	Peralatan Equipment	5	25		25			19		6		15		10	
9	PM Peralatan PM Equipment	5	19		15	4		15	4			14	5		
10	PPB	3	7		5	2		2	4	1		3	3	1	
11	PMO SCA	5	8	5	3			7	1			7	1		
12	SISMAN & HSSE	4	4	2	2				4		1	2	1		
13	Sekretaris Perusahaan Company Secretary	3	4	3	1					4				4	
14	Umum General Affairs	3	6	6				6				6			
15	Pajak Tax	2	4	4				4					4		
16	Akuntansi Accounting	3	3	3				2		1		1	1	1	
17	Hukum Legal	8	8	8				1	7		1	6	1		
18	UPL UPL	2	2	2				1	1		1	1			
19	PPA	2	2	2				1	1		1			1	
20	Pengadaan Procurement	2	4	4					4			3	1		
21	BPPA	5	5	5				1	4		1	4			
22	Manajemen Strategis SDM HR Strategic Management	4	4	4					4			2	2		
23	Universitas Korporat Corporate University	5	5	5				2	3			2	2	1	
24	Treasuri Treasury	3	3	3					3			3			
25	SPI	3	4	4					4			4			
26	MSP	15	18	9	9			1	13	4		7	11		
	Jumlah Total	124	251	71	171	9	0	6	117	116	12	6	105	121	19



	PKM Setelah Revisi PKMs Post-Revision		Assessment TW I Q1 Assessment				Assessment TW II QII Assessment				Risiko yang diharapkan Desired Risks			
			Tingkat Eksposur TW I Q1 Exposure Level				Tingkat Eksposur TW II Q2 Exposure Level				Tingkat Eksposur Exposure Level			
	Jumlah PKM Number of PKMs	Jumlah Risiko Number of Risks	Extreme Extreme	Tinggi High	Medium Medium	Low Low	Extreme Extreme	Tinggi High	Medium Medium	Low Low	Extreme Extreme	Tinggi High	Medium Medium	Low Low
	7	21		15	6			15	6				21	
	8	24			24				24				24	
	6	7		2	4	1			7				7	
	7	10		4	6			2	8			1	9	
	8	9		2	7			2	7				9	
	2	4			4				4				4	
	5	45				45				45			9	36
	6	29		8	2	19		4	2	23				29
	5	19		10	9			14	4	1			14	5
	4	8		4	4			1	4	3		1	4	3
	5	8		7	1			7	1				8	
	4	4		2	2			2	2				4	
	3	4				4				4				4
	3	6		6					3	3				6
	2	4			4				4				4	
	5	5				5		2	2	1			1	4
	8	8		3	4	1			6	2			6	2
	2	2	1		1		1			1		1		1
	2	2		1		1				2				2
	1	2		1	1			1	1					2
	5	5	1	4			1	4				3	2	
	5	5		1	4				1	4			1	4
	5	5			4	1			1	4				5
	3	3			3					3				3
	3	4		4				4						4
	16	19		6	13			1	12	6			13	6
	130	262	2	80	103	77	2	59	99					

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa beberapa risiko mengalami perubahan eksposur dibanding triwulan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Eksposur Menurun: 44 Risiko
Disebabkan:
Terdapat PKM yang telah terealisasi dan saat ini dalam proses implementasi dan keseluruhan kontrol dilaksanakan.
2. Eksposur Meningkat: 5 Risiko
Disebabkan:
Terdapat revisi PKM 2020.
3. Eksposur Tetap: 210 Risiko
Disebabkan:
Realisasi Mitigasi yang telah dilaksanakan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan risiko di Triwulan IV.

Berdasarkan hasil capaian selama tahun 2020 didapat beberapa kesimpulan antara lain:

1. Upaya mitigasi yang dilakukan secara korporat dan cabang, belum sepenuhnya dapat mencegah terjadi risiko tidak tercapainya target cabang/unit.
2. Masih diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan:
 - a) Pengawasan atas realisasi program mitigasi;
 - b) Kompetensi SDM (cabang dan kantor pusat) dalam melaksanakan penyusunan kajian risiko terkait RKAP, PKM maupun investasi.

KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO LAINNYA

Untuk pengembangan ke depan, kegiatan manajemen risiko yang dilaksanakan terkait peningkatan implementasi manajemen risiko dan budaya sadar risiko, serta komunikasi dan interaksi dengan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Manajemen Risiko dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Kegiatan Activities	Pelaksanaan Activities	Tujuan Objectives
1	Menyusun Profil Risiko PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Risk Profile	TW IV 2020 4 th Trimester 2020	Untuk membantu manajemen dalam melaksanakan kebijakan strategis perusahaan dengan mempertimbangkan profil risiko yang tersedia. Assisting management to implement company's strategic policies by considering available risk profile.
2	Pelaksanaan Pengadaan Konsultan Penilai Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) Risk Maturity Index Consultant Hiring	TW IV 2020 4 th Trimester 2020	Untuk mengukur tingkat kematangan implementasi manajemen risiko. To measure Risk Maturity Index implementation.
3	Koordinasi Aplikasi ERM dengan Divisi TI ERM Application Coordination with IT Division	TW IV 2020 4 th Trimester 2020	Untuk memastikan agar pelaksanaan optimalisasi aplikasi ERM dapat terealisasi. To ensure ERM application optimisation implementation can be realised.
4	Evaluasi Realisasi Pendapatan dan Beban Cabang RKAP 2020 2020 Company Budget Plan Branch Revenue & Cost Realisation Evaluation	TW IV 2020 4 th Trimester 2020	Untuk mengevaluasi risiko terealisasinya pendapatan dan beban cabang sesuai RKAP 2020. To evaluate branch's revenue & cost realisation risk according to 2020 Company Budget Plan.
5	Penyusunan dan Finalisasi Key Risk Indicator (KRI) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Key Risk Indicator Composition & Finalisation	TW IV 2020 4 th Trimester 2020	Untuk mendapatkan berupa indikator kunci risiko yang perlu menjadi perhatian secara korporat untuk tahun 2020. To obtain key risk indicator by corporat for 2020.

According to the above table, it can be seen that a few risks experienced change to exposure level compared to the previous quarter as follows:

1. Decreasing Exposure: 44 Risks
Due to:
Some PKMs were realized and currently in the implementation process, and all the control actions have been carried out.
2. Increasing Exposure: 5 Risks
Due to:
2020 Revisions to the PKM.
3. Unchanged Exposure: 210 Risks
Due to:
The realized Mitigation had yet to bring desired effect with regard to exposure level in Quarter IV.

According to the achievements in 2020, there are a few conclusions to be drawn, among others:

1. The mitigation efforts at the corporate and branch levels were unable to prevent the risks of branch/unit not achieving targets.
2. The Company needs improvement in the implementation of:
 - a) Supervision on mitigation program realization;
 - b) HR Competency (branch and Head Office) in the making of risk study related to RKAP, PKM and investment.

OTHER RISK MANAGEMENT ACTIVITIES

For future development, risk management activities implemented to increase awareness, interaction & communication with Nomination, Remuneration, and Management Committee can be explained in tables below:



No.	Kegiatan Activities	Pelaksanaan Activities	Tujuan Objectives
6	Penyusunan <i>Top Risk</i> 2020 dan Realisasinya s.d. TW IV yang di dalamnya Terdapat Penanganan Pandemi COVID-19 2020 <i>Top Risk</i> Composition & Realisation up to 4 th Trimester which also Contains COVID-19 Pandemic Mitigation	TW IV 2020 4 th Trimester 2020	Untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan <i>Top Risk</i> . To assist management in making decision by considering <i>Top Risk</i> .
7	Dilaksanakan <i>E-mail Blast</i> , Majalah Gema, dan Instagram terkait Manajemen Risiko E-mail Blast, Gema Magazine, and Instagram Release on Risk Management	Setiap Bulan Monthly	Meningkatkan pemahaman dan budaya sadar risiko. Increasing understanding & awareness on risks.
8	Penyusunan dan Finalisasi <i>Draft</i> Revisi SK antara lain: 1. SK Kebijakan Manajemen Risiko, Keputusan Direksi No. KP.39/9/2/PI-16.TU tanggal 28 Desember 2016 2. SK Pedoman Manajemen Risiko, Keputusan Direksi No.39/9/3/PI-16.TU tanggal 28 Desember 2016 Composing & finalising Order Revision Draft of: 1. Risk Management Policy, Directors' Order No. KP.39/9/2/PI-16.TU on 28 December 2016 2. SK Pedoman Manajemen Risiko, Keputusan Direksi No.39/9/3/PI-16.TU tanggal 28 Desember 2016	TW IV 2020 4 th Trimester 2020	Untuk merevisi/memperbaharui SK disesuaikan dengan kondisi perkembangan bisnis dan manajemen risiko kedepannya serta mengajukan persetujuan ke Direksi. To revise/update the order in accordance to business development situation & future risks & proposing confirmation to the Directors.
9	Pelaksanaan Kajian Risiko Awal PKM Tahun 2021 2021 PK Risk Study	Cabang: 5 November-13 November 2020 Divisi: 11 November-20 November 2020 Branch: 5 November-13 November 2020 Division: 11 November-20 November 2020	Untuk mengevaluasi dan menetapkan nilai risiko awal PKM Cabang, Divisi, dan Anak Perusahaan yang akan dilakukan di tahun 2021. To evaluate and determine the initial risk value of Branch PKM, Divisions, and Subsidiaries to be carried out in 2021.
10	Pelaksanaan <i>Project Risk Assesment</i> dan Pelaksanaan <i>Task Management</i> TW IV Cabang dan Divisi 2020 Project Risk Assesment & Task Management of 4 th Trimester for Branches & Division 2020	14-18 Desember 2020 14-18 December 2020	Untuk menyampaikan/melengkapi nilai residual dari hasil tindakan mitigasi dan menyampaikan bukti tindakan mitigasi s.d. triwulan IV 2020. To report/complete residual value from mitigation result & reporting mitigation evidence up to 4 th Trimester 2020.
11	Pelaksanaan <i>Project Risk Assesment</i> dan <i>Task</i> Manajemen s.d. TW IV terhadap Kajian Risiko PKM Anak Perusahaan 2020 Project Risk Assesment & Task Management of 4 th Trimester for Subsidiaries 2020	14-18 Desember 2020 14-18 December 2020	Untuk menyampaikan dan mendampingi Anak Perusahaan dalam melakukan pengisian Kajian Risiko PKM dan dapat <i>monitoring</i> progress risiko sehingga PKM anak perusahaan dapat terealisasi. To report & assist Subsidiaries in filling PKM Risk Study & monitor risk progress thus Subsidiaries's PKM can be realised.
12	Penetapan <i>Risk Agent</i> dan <i>Task Officer</i> Tahun 2020 2020 Risk Agent & Task Officer Appointment	25 November 2020 25 November 2020	Untuk berkoordinasi dan melaporkan kepada Divisi Manajemen Risiko untuk penerapan manajemen risiko di unit kerja terkait. To coordiante & report risk management implementation in work units to Risk Management Division.
13	Penyusunan <i>Draft</i> SE Penyusunan Laporan Kajian Risiko untuk Kebutuhan Pihak Eksternal di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Composing Risk Study Report Draft for External Party in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	TW IV 2020 4 th Trimester 2020	Untuk pedoman penyusunan laporan kajian risiko untuk kebutuhan pihak eksternal. To guide report writing for external parties.

EVALUASI MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko, telah dilaksanakan *assessment/review* yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dengan membandingkan kesesuaian antara ketentuan yang disusun dengan implementasi di setiap unit kerja. Dari hasil *assessment/review*, terdapat beberapa masukan untuk perbaikan implementasi manajemen risiko selanjutnya. Adapun tindak lanjut atas hasil *review* adalah sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT EVALUATION

To evaluate the effectiveness of risk management implementation, assesment/review has been done by Public Accountant Office led by Heliantono Public Accountant by comparing suitability between terms & implementation in every work unit. From that action, there are several inputs to improve the next risk management implementation. The results are as follows:

No.	Hasil Review Review Result	Tindak Lanjut sampai dengan Triwulan IV 2020 Follow Up to 4 th Trimester 2020	Saran Recommendation	Status
1	Laporan Triwulanan masih ada yang perlu diperhatikan dalam hal penyajian eksposur dan pelaporan mitigasinya. Trimester Report still needs attention in exposure & mitigation report.	Penurunan dan kenaikan risiko telah dijelaskan pada laporan triwulanan 2019 (TW I hal 12 s.d. 13, TW II hal 12 s.d. 15, TW III hal 16 s.d. 18, TW IV hal 16 s.d. 18) dan <i>database</i> risiko telah memuat perkembangan risiko dari awal sampai dengan akhir tahun. Risk Increase & Decrease has been explained in 2019 Trimester Report (TM I pg 12 to 13, TM II pg 12 to 15, TM III page 16 to 18, TM IV pg 16 to 18) & risk database has loaded risk development from early to end of year.	a. Pelaporan mitigasi di dalam laporan triwulanan Manajemen Risiko, masih ada yang perlu diperhatikan agar lebih informatif dan dapat teridentifikasi mana yang penyelesaian eksposur awal yang telah/ belum ditindaklanjuti, mana yang merupakan tambahan risiko. b. Mungkin perlu dicari kemungkinan seperti melakukan revisi eksposur awal, agar setiap eksposur triwulanan dan eksposur tetap sama jumlahnya. Jika risiko tidak dilakukan mitigasi, tetap dilaporkan pada eksposur yang tidak berubah. a. Mitigation report in Risk Management trimester report still needs attention in order to make it more informative & identifiable on which exposure solution not yet followed up & additional risk. b. Early exposure revision is probably necessary to make trimester exposure & exposure are checked. If this is not performed, unchanged exposure still needs to be reported.	Selesai Completed
2	Untuk Departemen Manajemen Risiko (DMR) mengenai capaian pendapatan dari masing masing unit kerja, tidak ditindak lanjuti dengan <i>monitoring</i> secara tertulis mengenai tindak lanjut dari saran tersebut. Risk Management Departement for achievement from each work unit didn't follow up with written monitoring.	Monitoring sudah berjalan pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 evaluasi pendapatan cabang telah dilakukan dan telah di- <i>monitoring feedback</i> yang disampaikan dari cabang atau divisi terkait. Unit kerja telah melaporkan progres PKM, KPI, dan pendapatannya ke Divisi Manajemen Strategis Perusahaan (MSP) melalui aplikasi MKE Monitoring has been done since 2019, while for 2020, branch revenue evaluation has been done & has been feedback monitored by branches or division. Work unit has reported PKM, KPI, and its revenues to Corporate Strategic Management through MKE app	Departemen Manajemen Risiko seyogyanya perlu melakukan tindak lanjut atas tindak lanjut yang perlu diketahui secara langsung oleh Departemen Manajemen Risiko (untuk pendapatan Cabang), yaitu risiko yang berpotensi dapat dijadikan bahan revisi eksposur awal, atau tambahan risiko. Risk Management Department should've followed up with necessary action on potential risks which can be put into early exposure revision / additional risk.	Selesai Completed
3	Key Risk Indicator (KRI) belum diimplementasikan. Key Risk Indicator (KRI) has not been implemented.	Berkaitan tentang pedoman prosedur Key Risk Indicator akan dilakukan pelatihan terhadap pegawai Departemen Manajemen Risiko untuk mempermudah dalam penerapan Key Risk Indicator tersebut. In view of Key Risk Indicator procedural guidance, Risk Management Department staffs will be given training to ease up implementation process.	Direksi agar mengarahkan Divisi Manajemen Strategis, dalam hal ini Departemen Manajemen Risiko untuk melaksanakan Key Risk Indicator (KRI). Directors ordered Risk Management Department to implemet Key Risk Indicator (KRI).	Selesai Completed



No.	Hasil Review Review Result	Tindak Lanjut sampai dengan Triwulan IV 2020 Follow Up to 4 th Trimester 2020	Saran Recommendation	Status
4	Jumlah SDM untuk Departemen Manajemen Risiko kurang, dan sertifikasi masih perlu ditingkatkan. Insufficient personnel for Risk Management Department & certification is still needs to be expanded.	Tahun 2017, Perusahaan telah mengirimkan personil Divisi Manajemen Risiko (tahun 2019 dilebur masuk ke Divisi Manajemen Strategis Perusahaan, menjadi setingkat Departemen, yaitu Departemen Manajemen Risiko), dan dari divisi lain untuk mengikuti Konferensi Manajemen Risiko dan sertifikasi CRMO sebanyak 121 orang. Perusahaan juga mengadakan <i>workshop</i> perihal penanganan risiko operasional (alat) pada tahun 2018. Pemahaman manajemen risiko juga disosialisasikan melalui <i>email blast</i> dan dimuat di majalah internal Pelindo 1 "Gema". Tahun 2019, Perusahaan telah mengirim sekitar 20 orang untuk sertifikasi CRMO. Tahun 2020, 2 Pegawai Departemen Manajemen Risiko akan mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi <i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> yang diadakan di bulan Maret dan Juni. Dikarenakan pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini, maka hanya satu pegawai yang mengikuti pelatihan dan lulus ujian sertifikasi CRMP. In 2017, the Company has sent Risk Management Division personnel (in 2019, the division was merged into Corporate Strategic Management, equivalent to a Department, that was Risk Management Department), & from other division to participate Risk Management Conference & CRMO Certification for 121 people. The Company also held Operational Risk Assessment Workshop in 2018. Risk Management Awareness was also socialised through e-mail blast & published in Pelindo 1 internal magazine "Gema". In 2019, the Company sent 20 people for CRMO certification. In 2020, 2 employees of Risk Management Department participated in training & certification of Certified Risk Management Professional (CRMP) which was supposed to be held in March & June. Due to Covid-19 pandemic, currently only 1 employee participated in training and passed the certification.	<p>a. Tenaga SDM yang diperlukan di Departemen Risiko hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, terutama yang berkaitan dengan melakukan identifikasi dan mitigasi risiko mandiri secara menyeluruh oleh pelaksana di Departemen Manajemen Risiko. Hal ini dimaksudkan agar ada <i>check and balance</i> dengan identifikasi dan mitigasi risiko yang dilaksanakan oleh <i>risk agent/risk owner</i>.</p> <p>b. Segera melakukan kajian komprehensif tentang kecukupan tenaga SDM di Departemen Manajemen Risiko disesuaikan dengan kebutuhan menjalankan tupoksinya dengan baik.</p> <p>c. Selain itu sertifikasi <i>risk management</i> dan <i>risk governance</i> bagi atasan langsung dari Departemen Manajemen Risiko, seyogyanya perlu ada.</p> <p>a. HR Personnel needed in Risk Department should've been adjusted with required duties, especially concerning thorough risk self identification & mitigation by all performers in Risk Management Department. This is meant as a check & balance with risk identification & mitigation performed by risk agent/risk owner.</p> <p>b. Immediately compose comprehensive study on HR personnel sufficiency in Risk Management Department able to perform their duties well.</p> <p>c. Moreover, there need to be risk management certificate & risk management for Risk Management Department direct superior.</p>	On Progres

Dengan adanya evaluasi atas implementasi manajemen risiko serta tindak lanjut yang dilakukan menunjukkan bahwa Perseroan selalu mengupayakan peningkatan dalam penerapan manajemen risiko.

With evaluation on risk management implementation and with its follow up, this shows how the Company always working on risk management implementation improvement.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Internal yang diberlakukan di lingkup Perseroan yang berfungsi untuk membantu manajemen meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memastikan bahwa Perseroan telah memiliki kehandalan laporan dan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional.

Perseroan memiliki sistem pengendalian intern yang sesuai dengan kerangka kerja yang diakui secara internasional, yakni *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Menurut COSO sistem pengendalian intern merupakan proses yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, serta personil lainnya.

Perseroan melakukan evaluasi atau penilaian atas efektivitas pengendalian internal pada tingkat korporat maupun tingkat operasional/aktivitas dengan menerapkan dan memelihara sistem pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku.

Di tahun 2020, Sistem Pengendalian Internal Perseroan secara garis besar telah efektif yaitu telah distandardisasi dan secara periodik telah dilakukan evaluasi. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang masih perlu dilakukan perbaikan, baik perspektif Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, maupun *Monitoring*.

TUJUAN PENGENDALIAN

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Ketola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, maka BUMN wajib menetapkan suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan. Dengan demikian, Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perseroan memiliki tujuan, memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Perseroan memiliki tingkat kehandalan dalam pengendalian intern untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Perseroan dengan meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja operasional Perusahaan, yang bertujuan untuk:

1. Pencapaian tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan operasional Perseroan yang ekonomis, efektif, dan efisien;
2. Keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan, informasi, dan kinerja operasional yang disusun oleh Perseroan;
3. Pengamanan aset Perseroan; dan
4. Kepatuhan/ketaatan terhadap prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Internal Control System enacted within the Company is able to assist the management to increase Company's compliance to rules & regulations by ensuring that the Company has report & financial information reliability, compliance, and operational efficiency & effectivity.

The Company has internal control system based on internationally acknowledged framework from Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). According to COSO, internal control system is a process involving Board of Commissioner, Directors & other personnel.

The Company evaluates/assess the internal control effectivity on corporate & operational/activity level by implementing & maintaining internal control system & adequate financial reporting procedure in accordance regulation.

In 2020, Company Internal Control System has been standardised & evaluated periodically. However, there are still things needed to be improved like Controlling Environment Perspective, Risk Assessment, Controlling Activities, Information & Communication, Monitoring.

CONTROL GOALS

As mandated by Minister of State Owned Enterprise Order No. PER-01/MBU/2011 on 01 August 2011 on Good Corporate Governance within State Owned Enterprise, therefore SOE is obligated to implement proper Internal Control System to secure Company's investment & assets. Thus, Company's Internal Control System is aimed to provide sufficient insurance that its duties & confidence is reliable to achieve Company Vision, Mission, and goals to increase financial report reliability & Company operational performance, which in turn is aiming for:

1. Achieving program completion & Company operational economically, effectively, and efficiently;
2. Accurate & reliable financial report, information, and operational performance dictated by the Company;
3. Secured Company Assets;
4. Compliance to rules & regulations.





ORGANISASI PENGENDALIAN INTERNAL

Agar sistem pengendalian internal berjalan dengan efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab dan wewenang semua organ Perseroan diatur sebagai berikut:

- A. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan;
 2. Mengevaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan;
 3. Memberikan arahan untuk meningkatkan kecukupan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.
- B. Direksi
Direksi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menetapkan Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perusahaan;
 2. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang efektif;
 3. Berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Insan Perseroan, dengan cara menetapkan kebijakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Governance*).
- C. Unit Kerja Satuan Pengawasan Internal (SPI)
Unit Kerja Satuan Pengawasan Intern mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
1. Mengevaluasi kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan;
 2. Berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan secara berkesinambungan dengan cara pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat *independent* dan objektif dan memberikan rekomendasi perbaikan penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan;
 3. Melaksanakan audit internal yang independen dan menyampaikan laporan yang memadai secara berkala;
 4. Meningkatkan keahlian audit internal khususnya penerapan penilaian risiko dan audit berbasis risiko.
- D. Insan Perseroan
Setiap Insan Perseroan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
1. Memahami dan melaksanakan Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang telah ditetapkan oleh Perseroan;

INTERNAL CONTROL ORGANIZATION

In order to ensure internal control system run efficiently & effectively, all Company's organ duties, responsibilities & authorities are regulated as follows:

- A. Board of Commissioner
Board of Commissioners is responsible for:
1. Monitoring Internal Control System implementation;
 2. Evaluating Internal Control System implementation;
 3. Directing to increase Internal Control System sufficiency.
- B. Directors
Directors are responsible for:
1. Designating Company Internal Control System Guide;
 2. Conducting effective Internal Control System implementation;
 3. Actively participating to prevent deviation from Company People by implementing good governance.
- C. Internal Affairs Unit (SPI)
Internal Affairs Unit is responsible for:
1. Evaluating Company's Internal Affairs System sufficiency & effectivity;
 2. Actively participating to improve Internal Control System effectivity through assurance & independent objective consultation & recommending improvement on Internal Control System implementation enacted by company management;
 3. Conducting independent internal audit & providing reliable report periodically;
 4. Improving internal audit proficieny especially on risk assessment implementation & risk based audit.
- D. Company People
Every Company People is responsible for:
1. Understanding & enforcing Company mandated Internal Control System Guidance;

2. Mengkomunikasikan kepada manajemen yang tingkatannya lebih tinggi semua informasi mengenai adanya permasalahan, ketidaktaatan atas kebijakan/prosedur/pedoman/peraturan dan tindakan illegal.

E. Pihak-Pihak Eksternal

Pihak-pihak eksternal perusahaan antara lain: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Akuntan Publik, dan pihak-pihak lainnya yang berkemungkinan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang handal, efektif dan efisien.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PELINDO 1

Sistem Pengendalian Internal Pelindo 1 merujuk kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/11 yang terdiri atas 5 (lima) unsur yaitu Lingkungan Pengendalian Intern, Kajian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan, di mana kelima komponen ini juga sesuai dengan kerangka Sistem Pengendalian Internal yang diakui secara internasional, yaitu COSO-*Internal Control Framework*. Adapun unsur Sistem Pengendalian Internal di Pelindo 1 sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian Intern dalam Perseroan yang disiplin dan terstruktur;
2. Pengkajian dan Pengelolaan Risiko Usaha (*risk assessment*);
3. Aktivitas Pengendalian;
4. Sistem Informasi dan Komunikasi;
5. *Monitoring*.

Unsur di atas dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari setiap kegiatan Perseroan.

2. Communicating higher management on all problems, dissent on policies/procedures/guidance/regulations & illegal activities.

E. External parties

External Parties are: Audit Board of Indonesia (BPK), Public Accountant Office & other parties with interest on reliable, effective & efficient Internal Control System Implementation.

PELINDO 1 INTERNAL CONTROL SYSTEM

Pelindo 1 Internal Control System refers to Minister of SOE Order No. PER-01/MBU/11 which consisted of 5 elements namely Internal Control Environment, Risk Study, Controlling Activity, Information & Communication System, also Monitoring, where all these 5 components are also in accordance to internationally acknowledged Internal Control System of COSO-Internal Control Framework. Pelindo 1 Internal Control System are as follows:

1. Disciplined & structured Internal Control Environment;
2. Business Risk Studies & Assessment;
3. Controlling Activities;
4. Information & Communication System;
5. Monitoring.

Elements mentioned above is enforced in unison & is an integral part from all Company activities.





Lima Unsur Pengendalian Internal Pelindo 1 Berbasis PER-01/MBU/11 dan COSO Pelindo 1 - 5 Elements of Internal Control Based on PER-01/MBU/11 & COSO

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan faktor yang mempengaruhi keseluruhan Perseroan dan menjadi atmosfer bagi setiap Insan Perseroan dalam melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang menjadi bagiannya. Lingkungan pengendalian menjadi pondasi yang efektif bagi komponen pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:

- Integritas, nilai etika dan kompensasi pegawai;
- Filosofi dan gaya manajemen;
- Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
- Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

1. Pengkajian dan Pengelolaan Risiko Usaha (*Risk Assessment*)

- Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan.

b. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, sebagai berikut;

- Faktor internal meliputi antara lain:
 - Kualitas dan kuantitas pegawai;
 - Sifat kegiatan usaha Perseroan; dan
 - Karakteristik proses sistem informasi.
- Faktor eksternal meliputi antara lain:
 - Perubahan dampak lingkungan;
 - Perkembangan teknologi;
 - Perubahan pemerintahan, kondisi ekonomi, industri, dan peraturan perundang-undangan.

c. Analisis Risiko

Analisis risiko dilakukan dengan memperhitungkan tingkat kepentingan risiko (*significant risk*), dan pertimbangan pengelolaan risiko (dipindahkan, ditoleransi, dihilangkan atau diterima).

- Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko perusahaan yang menjadi prioritas untuk ditangani secara tepat, agar tingkatan risiko perusahaan dapat berkurang sampai pada tingkatan yang dapat diterima oleh Perusahaan.

e. Setiap Insan Perseroan dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya, wajib melakukan Penilaian Risiko.

f. Sebelum melakukan Penilaian Risiko, terlebih dahulu harus ditetapkan tujuan Perseroan sampai pada tingkatan kegiatan.

g. Penetapan tujuan Perseroan memuat:

- Pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu;
- Dikomunikasikan ke seluruh pegawai;
- Dalam usaha pencapaian tujuan Perseroan, Manajemen menetapkan strategi dan menerapkannya secara konsisten.

h. Pedoman Penilaian Risiko Perusahaan akan diatur dalam suatu pedoman tersendiri yang terpisah dari pedoman umum ini.

1. Controlling Environment

Controlling Environment is a factor affecting the entire Company and as an atmosphere for every Company People to do their activities & exercising controlling responsibilities. Controlling Environment is an effective foundation for other internal control components. A disciplined & structured controlling environment within the company is comprised of:

- Integrity, ethics, & employee compensation;
- Philosophy & management style;
- How management exercise authority & responsibility;
- Human resource Organization & development;
- Directors' awareness & guidance.

1. Risk Assessment

a. Risk Assessment is a process to identify, analyse, assess & manage business risks.

b. Risk Identification

Risk Identification is conducted by considering both internal & external factors which can affect company goals;

- Internal Factors are as follows:
 - Employee's quality & quantity;
 - Company's nature of business activities;
 - Information system characteristic process.
- External Factors are as follows:
 - Environmental changes effect;
 - Technological development;
 - Governmental, economical, industrial & legal changes.

c. Risk Analysis

Risk Analysis is conducted by considering significant risk & risk management consideration (transferred, tolerated, erased/accepted).

d. Risk Assessment is conducted to identify company's risks which are prioritised to be handled in correct fashion, to reduce company risk to acceptable level.

e. Every Company People is mandated to conduct Risk Assessment in performing their duties, authorities & functions.

f. Before performing Risk Assessment, Company Goals must be made up to activity level.

g. Company Goals Designation contains:

- Specific, measurable, achievable & strict on time statements & directions;
- Informed to all employees;
- In order to reach Company goals, Management designates strategies & implement them consistently.

h. Company Risk Assessment Guidance will be regulated in separately.

Lima Unsur Pengendalian Internal Pelindo 1 Berbasis PER-01/MBU/11 dan COSO Pelindo 1 - 5 Elements of Internal Control Based on PER-01/MBU/11 & COSO

2. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian dari prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perseroan.

- a. Direksi menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat perusahaan.
- b. Jajaran Manajerial wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Unit Kerja yang bersangkutan.
- c. Kebijakan kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa arahan Direksi dilaksanakan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Kegiatan pengendalian dilakukan pada seluruh kegiatan perusahaan;
 - Kegiatan pengendalian dikaitkan dengan proses penilaian risiko untuk memitigasi tingkatan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko;
 - Kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis melalui Surat Keputusan Direksi;
 - Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh Insan Perseroan.
- e. Kegiatan pengendalian dilakukan melalui:
 1. *Review* atas kinerja Perseroan;
 2. Pembinaan sumber daya manusia;
 3. Pengendalian atas pengelolaan sistem Informasi;
 4. Penetapan dan *review* atas Indikator dan ukuran kinerja;
 5. Pemisahan Fungsi:
 - Pemisahan fungsi diterapkan untuk memitigasi kesalahan, kecurangan dan pemborosan dalam Perseroan;
 - Pemisahan fungsi di lingkungan Perseroan dilakukan antara lain dengan:
 - a. Pelaksanaan pekerjaan dan/atau pengendalian aspek utama transaksi dan kejadian dari awal sampai akhir proses tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan hanya oleh 1 (satu) orang;
 - b. Pemisahan tanggung jawab, kewenangan, tugas terhadap transaksi/kejadian kepada Pegawai yang berbeda berkaitan dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, *review* dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset;
 - c. Pelimpahan tugas kepada lebih satu orang pegawai dilakukan secara sistematis untuk memberikan keyakinan adanya *check and balance*.
 6. Pengendalian fisik & aset;
 7. Pencatatan;
 8. Pembatasan akses dan akuntabilitas;
 9. Dokumen transaksi;
 10. Pelaksanaan Internal Audit:
 - Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Perseroan dilaksanakan oleh Aparat Satuan Pengawasan Intern (SPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Pengawasan Intern (SPI) menyusun *Audit Charter*/Piagam Audit Satuan Pengawasan Intern (SPI), yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direktur Utama;
 - Penyelenggaraan pengawasan intern bertujuan untuk membantu Perseroan dalam melakukan pengendalian intern;
 - Pemimpin Unit Kerja beserta jajarannya bersikap kooperatif sehingga terselenggaranya pengawasan intern yang baik.

2. Control Activities

Control Activities are actions conducted in controlling process on company activities in every level & unit within Organizational structure, namely concerning authorities, authorisation, verification, reconciliation, evaluation of work achievements, task management & company assets security.

- a. Directors conducted control activities by complying to size, complexities, & company's nature.
- b. Managerial Members is mandated to conduct control activities according to their size, complexities, & nature of their Work Units.
- c. Control activities policy is a policy & procedures made to ensure Directors' orders are enforced.
- d. Control activities must also consider the following:
 - Control activities conducted in the entire Company activities;
 - Control activities linked with risk assessment process to mitigate possibilities & risk effects;
 - Policy & procedures are Directors written Orders;
 - All policies & procedures must be enforced by the Company People.
- e. Control activities are conducted through:
 1. Company Performance Review;
 2. Human Resource Development;
 3. Information System Management Control;
 4. Designation & Review on Performance Indicators & Size;
 5. Separation of Function:
 - Separation of Function is applied to mitigate mistakes, frauds & overspending in the Company;
 - Separation of Function within the Company is conducted by:
 - a. Work and/or primary aspect transaction control & events from beginning to end of process is not allowed to be performed only by a single person;
 - b. Separation of responsibilities, authorities & tasks on transaction/event to different employee linked with authorisation, agreement, processing, recording, payment, funding, review, audit & asset handling & storing function;
 - c. Job delegation to more than 1 employee is done systematically to provide convincing check & balance.
 6. Assets & physical control;
 7. Recording;
 8. Access & Accountability Restriction;
 9. Transaction Documentation;
 10. Internal Audit:
 - Internal Audit is conducted by Internal Affairs (SPI) according to laws & regulations;
 - In its performance, the Internal Affairs (SPI) compose Audit Charter which approved by Board of Commissioners & authorised by President Director;
 - Internal Affairs aims to assist the Company to perform internal control;
 - Work Unit Leader and its members must be cooperative to create proper internal audit.



Lima Unsur Pengendalian Internal Pelindo 1 Berbasis PER-01/MBU/11 dan COSO

Pelindo 1 - 5 Elements of Internal Control Based on PER-01/MBU/11 & COSO

3. Sistem Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication System*)
 - a. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses pengkajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perseroan.
 - b. Jajaran Pemimpin Unit Kerja wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi (keuangan dan non-keuangan) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam waktu dan bentuk (*format*) yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawabannya.
 - c. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif baik komunikasi di lingkungan Perseroan maupun komunikasi dengan pihak luar yang terkait.
 - d. Penyelenggaraan komunikasi yang efektif.
3. Information and Communication System
 - a. Information & Communication System is a process to study reports on operational & financial activities, and also compliance on rules & regulations within the Company.
 - b. Work Unit Leaders must identify, record, & inform (financial & non-financial) linked with main duties & functions in appropriate time & form to ease up implementation, control, & accountability.
 - c. Communication & information must be effectively conducted with both internal & external parties.
 - d. Communicating effectively.
4. Pemantauan (*Monitoring*)
 - a. *Monitoring* adalah proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Pemantauan dilaksanakan melalui:
 - Pemantauan rutin terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*On Going Monitoring*), diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan-tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
 - Evaluasi oleh unit terpisah/independen (*Separate Evaluation*), diselenggarakan melalui penilaian mandiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.
 - Tanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan ada pada Satuan Pengawasan Intern Perseroan.
 - Satuan Pengawasan Intern Perusahaan dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan evaluasi atas kecukupan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan di bawah koordinasi Satuan Pengawasan Intern.
 - a. Dewan Komisaris dan Komite Audit
Untuk mewujudkan fungsi Dewan Komisaris dalam hal pengawasan organisasi, maka dibentuk Komite Audit.
 - b. *Control Self Assessment (CSA)* Sistem Pengendalian Intern
Penilaian Kontrol Mandiri (CSA) atas penerapan Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan untuk menguji dan menilai efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern di Perseroan.
 - c. Pelaporan Sistem Pengendalian Intern
Setiap Unit Kerja di lingkungan Perseroan menyusun dan menyampaikan laporan tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Perseroan di unit kerja masing-masing dan disampaikan kepada Direksi secara periodik.
4. Monitoring
 - a. Monitoring is a process to assess the quality of internal control system including internal audit function on every level & unit of Company's organizational structure in order to make everything run smoothly, under one condition where all anomalies are reported to Directors & Board of Commissioner.
 - b. Monitoring is conducted through:
 - Regular monitoring on all ongoing activities through routine management, supervision, comparison, reconciliation, & other actions.
 - Separated Evaluation through independent evaluation, review, & Company Internal Control System Effectivity Test.
 - Responsible evaluation to Company Internal Control System sufficiency.
 - Requesting external parties to evaluate Company Internal Control System sufficiency.
 - a. Board of Commissioners & Audit Committee
To provide Board of Organization means of Organization Monitoring, Audit Committee is formed.
 - b. Control Self Assessment (CSA) of Internal Control System
Control Self Assessment in a process to test & evaluate the effectivity of Company's Internal Control System.
 - c. Internal Control System Reporting
Every Work Unit within the Company must compose & deliver reports on Internal Control System implementation & delivered to Directors periodically.

HUBUNGAN DENGAN AUDITOR EKSTERNAL

Dalam hubungannya dengan Auditor Eksternal, Perseroan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Merupakan kewenangan RUPS untuk menunjuk eksternal auditor dari calon yang diajukan oleh Komisaris berdasarkan usul Direksi;
2. Direksi melalui Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium yang diusulkan untuk auditor eksternal;
3. Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perseroan;
4. Perseroan wajib menyediakan bagi auditor eksternal catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

RELATIONSHIP WITH EXTERNAL AUDITOR

Regarding relationship with External Auditor, the Company has decided on policies as follows:

1. External Auditor is appointed by General Meeting of Stakeholders & the candidate proposed by the Commissioner is based on Directors' input;
2. Director must announce the reason for proposing & the amount of wage for External Auditor to General Meeting of Stakeholders;
3. The External Auditor must be free from Commissioner, Directors & all Stakeholders interest in the Company;
4. The Company must provide accounting record & supporting data to External Auditor, enabling them to announce their opinion on fairness, compliance, and compatibility on Company's financial report based on Indonesian Accounting Standard.





CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perusahaan dalam membangun hubungan yang tumbuh bersama dengan pemangku kepentingan, baik dari internal seperti manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti masyarakat sekitar lokasi proyek dan konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perusahaan membaginya ke dalam dalam 7 (tujuh) aspek.

Corporate Social Responsibility (CSR) is a vessel for the Company to build reciprocal relationship with stakeholders, both internally like management & employees or externally like people living around the project area & consumers. Regarding CSR implementation, the Company breaks it into 7 aspects.



Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perseroan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Details on CSR implementation can be read in Corporate Social Responsibility chapter in this Annual Report.

PERKARA PENTING

IMPORTANT MATTERS

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan, anggota Dewan Pengawas dan Direksi serta entitas anak di sepanjang tahun 2020, disajikan dalam tabel berikut:

Liability and/or legal matters the Company, members of Board of Supervisors & Directors and Subsidiaries throughout 2020 are as follows:

Permasalahan Hukum Legal Matters	2020		2019	
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perdata Civil	Pidana Criminal
Perusahaan Company				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Settled & Has permanent legal force	5	-	4	-
Dalam proses penyelesaian On progress	5	-	3	-
Jumlah Total	10	-	7	-
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners & Directors				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Settled & Has permanent legal force	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian On progress	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-	-
Entitas Anak Subsidiaries				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Settled & Has permanent legal force	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian On progress	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan Subtotal	10	-	7	-

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Details of legal matters the Company has to settle in 2020 are as follows:



No	Pihak yang Berperkara Litigant	Pokok dan Nilai Perkara Substance & Merits	No. Perkara Case Number	Status Perkara Status	Upaya Manajemen Management Action	Risiko Yang Dihadapi Management Action
1	<p>Penggugat Plaintiff Tjahaja</p> <p>Tergugat Defendant 1. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 2. Hyundai Merchant Marine (HMM) 3. PT Sarana Jasa Bahari 4. PT Kemasindo Cepat Nusantara</p>	<p>Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kehilangan Reefer Part Petikemas pada area PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang menyebabkan kerugian terhadap CV Sumatera Sejahtera sebesar Rp7.522.211.000,- Unlawful act lawsuit due to the loss of container Reefer Part Petikemas in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) area, thus incurring loss to CV Sumatera Sejahtera for Rp7,522,211,000.-</p>	<p>No. 728/ Pdt.G/2016/ PN.Mdn No. 728/ Pdt.G/2016/ PN.Mdn</p>	<p>Atas putusan pada tingkat pertama di PN Medan yang diperkuat dengan Putusan Banding PT Medan. Sebagai tindak lanjut PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sedang melakukan perlawanan hukum Kasasi, namun hingga saat ini belum memperoleh putusan. Based on level one decree at Medan Court, reinforced with Appeal Decision. As a follow up PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is still doing a legal battle on appeal but as of now still has not received decree.</p>	<p>1. Melakukan mediasi di luar Pengadilan dengan Pihak Penggugat 2. Mengikuti jalannya persidangan dan melakukan upaya hukum lanjutan 3. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti 1. Mediating outside the Court with the Plaintiff 2. Participating in the trial & attempting to seek further legal action 3. Searching & collecting evidence</p>	<p>Kemungkinan biaya keluar atas sejumlah tuntutan Penggugat Possible expense due to Plaintiff's lawsuit</p>
2	<p>Penggugat Plaintiff PT Metito Indonesia</p> <p>Tergugat Defendant PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Tergugat</p>	<p>Gugatan wanprestasi (cidera janji) atas Perjanjian Kerjasama No. UM.58/41//18/P.I-04 – 001/AGR/PI-MI/04 tanggal 26 November 2004 antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Metito Indonesia tentang Kerjasama Operasi Pengusahaan Air Minum di Pelabuhan Belawan, Dumai, dan Tanjung Balai Karimun. Breach of contract on Cooperation Agreement No. UM.58/41//18/P.I-04 – 001/AGR/PI-MI/04 on 26 November 2004 between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) & PT Metito Indonesia on Drinking Water Business Operation Cooperation in Belawan, Dumai, and Tanjung Balai Karimun Port.</p>	<p>Perkara No. 281/ Pdt.G/2018/ PN.Mdn Case No. 281/ Pdt.G/2018/ PN.Mdn</p>	<p>Proses banding Appeal in progress</p>	<p>1. Melakukan mediasi di luar Pengadilan dengan Pihak Penggugat 2. Mengikuti jalannya persidangan dan melakukan upaya hukum lanjutan 3. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti 1. Mediating outside the Court with the Plaintiff 2. Participating in the trial & attempting to seek further legal action 3. Searching & collecting evidence</p>	<p>Kemungkinan biaya keluar atas sejumlah tuntutan Penggugat Possible expense due to Plaintiff's lawsuit</p>

No	Pihak yang Berperkar Litigant	Pokok dan Nilai Perkara Substance & Merits	No. Perkara Case Number	Status Perkara Status	Upaya Manajemen Management Action	Risiko Yang Dihadapi Management Action
3	<p>Penggugat Plaintiff Tamrin</p> <p>Tergugat Defendant 1. Agung Rachman 2. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)</p>	<p>Bahwa PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Tergugat II) telah melakukan kerjasama dengan sdr. Agung Rachman (Tergugat I) dengan No. perjanjian B.VII-518/BLW-US.25 tanggal 26 September 2018, untuk melakukan kerja sama penggunaan lahan di jalan Indrapura Ujung (samping dermaga KPLP) dengan luas lahan yang akan digunakan adalah 895.59 m². Atas hal tersebut, Penggugat mengklaim telah menjalankan usaha CV Kepiting Bang Tamrin Dermaga Seafood selama 5 tahun.</p> <p>PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Defendant II) had cooperated with Mr. Agung Rachman (Defendant I) under agreement No. B.VII-518/BLW-US.25 on 26 September 2018, to cooperate on land exploitation at Indrapura Ujung road (next to KPLP dock) with usable land size of 895.59 m². Due to that matter, Plaintiff claimed has ran CV Kepiting Bang Tamrin Dermaga Seafood business for 5 years.</p>	Perkara No. 672/ Pdt.G/2018/ PN.Mdn Case No. 672/ Pdt.G/2018/ PN.Mdn	Proses Kasasi Appeal in progress	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti jalannya persidangan Berkoordinasi dengan Pihak Pengadilan <ol style="list-style-type: none"> Participating in trial process Coordinating with the Court 	<p>Kemungkinan biaya keluar atas sejumlah tuntutan Penggugat</p> <p>Possible expense due to Plaintiff's lawsuit</p>
4	<p>Penggugat Plaintiff Roland P. Sinaga, Enny Ratna Sinaga, Vera L. Sinaga, Emliana Sirait</p> <p>Tergugat Defendant PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)</p>	<p>Kepemilikan atas tanah seluas 100 M x 200 M atau seluas 30.000 M² yang terletak di Jl. Korindo, Kel. Sei Lekop, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepri.</p> <p>Land ownership of 100 M x 200 M or 30,000 M² located at Korindo St, Sei Lekop, East Bintan Timur, Bintan, Riau Islands Province.</p>	Perkara No. 19/ Pdt.G/2019/ PN.Tpg Case No. 19/ Pdt.G/2019/ PN.Tpg	Adanya putusan Pengadilan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat (Roland Sinaga, Dkk) seluruhnya. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menang dan telah berkekuatan hukum tetap. The Court had decided to refuse the entire Plaintiff (Roland Sinaga, Asc) lawsuit. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) won & has permanent legal force.	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti jalannya persidangan Mencari bukti-bukti Mengumpulkan dan briefing saksi-saksi Berkoordinasi dengan Pihak Pengadilan <ol style="list-style-type: none"> Participating in trial process Searching for evidence Summoning & briefing witnesses Coordinating with the Court 	<p>Kemungkinan biaya keluar atas sejumlah tuntutan Penggugat</p> <p>Possible expense due to Plaintiff's lawsuit</p>



No	Pihak yang Berperkara Litigant	Pokok dan Nilai Perkara Substance & Merits	No. Perkara Case Number	Status Perkara Status	Upaya Manajemen Management Action	Risiko Yang Dihadapi Management Action
5	<p>Penggugat Plaintiff PT Dahlia Bina Utama</p> <p>Tergugat Defendant 1. Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai 2. Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 3. <i>General Manager</i> PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Dumai 4. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Dumai</p> <p>1. Ministry of Transportation cq. General Directorate of Sea Transportation cq. Port master & Authority Class I Dumai 2. Ministry of Transportation cq. General Directorate of Sea Transportation 3. General Manager PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Dumai Branch 4. President Director PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Dumai Branch</p>	<p>Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penerbitan Telegram Kementerian Perhubungan cq Dirjen Hubla No. 65/VI/DM/17 tanggal 16 Juni 2017 dan Surat Edaran No. 50/16/20/DUM.17.TU tanggal 08 September 2017</p> <p>Unlawful act lawsuit for Ministry of Transportation Telegram Release cq General Directorate of Sea Transportation No. 65/VI/DM/17 on 16 June 2017 & Order No. 50/16/20/DUM.17.TU on 08 September 2017</p>	<p>Perkara No. 6/ Pdt.G/2018/ PN.Dum Case No. 6/ Pdt.G/2018/ PN.Dum</p>	<p>Bahwa pada tingkat Kasasi, telah dinyatakan jika perkara dimaksud tidak memenuhi syarat formil. During appeal, the lawsuit were not eligible.</p>	<p>1. Mengikuti jalannya persidangan 2. Berkoordinasi dengan Pihak Pengadilan</p> <p>1. Participating in trial process 2. Coordinating with the Court</p>	<p>Kemungkinan biaya keluar atas sejumlah tuntutan Penggugat Possible expense due to Plaintiff's lawsuit</p>

No	Pihak yang Berperkar Litigant	Pokok dan Nilai Perkara Substance & Merits	No. Perkara Case Number	Status Perkara Status	Upaya Manajemen Management Action	Risiko Yang Dihadapi Management Action
6	<p>Penggugat Plaintiff Iskandar Hadipriatna</p> <p>Tergugat Defendant</p> <ol style="list-style-type: none"> Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan cukai Tipe madya Pabean C Banda Aceh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh PT Balai Lelang Artha sebagai Tergugat III Menteri Keuangan Republik Indonesia Kementerian Perdagangan Republik Indonesia PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sri Suhartiningsih selaku Direktur PT Berkat Tarikan Jaya PT Surveyor Indonesia Cabang Medan 	<p>Diduga atas keputusan Tergugat I yang menyatakan kendaraan yang diakui Penggugat beserta teman-temannya sebagai kepemilikannya menjadi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Keputusan tergugat I (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh) No. kep-48/WBC.01/KPP.MP02.2015 tanggal 29 Juli 2015 tentang Penetapan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara berupa kendaraan bermotor bukan baru. It is suspected due to Defendant I decision for claiming the vehicle claimed by Plaintiff with associates as State Owned Property based on Defendant I Decision (Banda Aceh Medium Customs and Excise Office Type C) No. kep-48/WBC.01/KPP.MP02.2015 on 29 July 2015 on Unclaimed Merchandised will be seized as State Owned Property in form of a used vehicle.</p>	<p>Perkara No. 27/Pdt.G/2019/PN.Bna Case No. 27/Pdt.G/2019/PN.Bna</p>	<p>Adanya putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO). The court decided Plaintiff's lawsuit is unacceptable (NO).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti jalannya persidangan Mencari bukti-bukti Mengumpulkan dan briefing saksi-saksi Berkoordinasi dengan Pihak Pengadilan <ol style="list-style-type: none"> Participating in trial process Searching for evidence Summoning & briefing witnesses Coordinating with the Court 	<p>Memperburuk reputasi nama perusahaan Tarnishing Company reputation</p>





No	Pihak yang Berperkara Litigant	Pokok dan Nilai Perkara Substance & Merits	No. Perkara Case Number	Status Perkara Status	Upaya Manajemen Management Action	Risiko Yang Dihadapi Management Action
7	Penggugat Plaintiff PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tergugat Defendant PT Cahaya Karangetang Abadi	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Penggugat, mengajukan gugatan terhadap PT Cahaya Karangetang Abadi atas dugaan perbuatan melawan hukum dari PT CKA yang tidak melakukan pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah diterima oleh kapal-kapal yang diageni oleh PT CKA di Cabang Pelabuhan Dumai. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as Plaintiff, sent a lawsuit to PT Cahaya Karangetang Abadi on suspicion of unlawful act from PT CKA which has not yet made any payment on port service received by ships under PT CKA in Dumai Port.	Perkara No. 661/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst Case No. 661/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst	Adanya putusan pengadilan yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat (PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan Putusan Verstek. (tergugat absentia dan tidak diketahui keberadaannya) The Court granted Plaintiff's lawsuit (PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with default judgment. (Defendant was absent & presence is unknown)	1. Mengikuti jalannya persidangan 2. Mencari bukti-bukti 3. Mengumpulkan dan briefing saksi-saksi 4. Berkoordinasi dengan Pihak Pengadilan 1. Participating in trial process 2. Searching for evidence 3. Summoning & briefing witnesses 4. Coordinating with the Court	Kemungkinan tidak dibayarkannya sejumlah sisa pembayaran terhadap Perseroan, sesuai dengan nilai pada gugatan There's a possibility the rest of the payment will not be paid to te Company.
8	Penggugat Plaintiff M. Rajab Fandi Parinduri Tergugat Defendant PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Gugatan pemutusan hubungan industrial yang diajukan oleh M. Rajab Parinduri (Penggugat) karena adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Penggugat merupakan pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang ditempatkan sebagai <i>Operator Container Crane Junior</i> TK.1 pada Divisi Operasional Belawan International Container Terminal. Industrial relations termination lawsuit from M. Rajab Parinduri (Plaintiff) due to employment termination made by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Plaintiff was an employee of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) posted as Junior Cointainer Operator Lv. 1 on Operational Division at Belawan International Container Terminal.	Perkara No. 95/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn Case No. 95/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah menang dengan adanya Putusan Kasasi MA RI yang pada intinya menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan M. Rajab Fandi Parinduri. Bahwa PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) juga harus membayarkan kepada M. Rajab Fandi Parinduri kekurangan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak seluruhnya sebesar Rp28.140.400,- dan tindak lanjut atas putusan dimaksud telah dilakukan pembayaran oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sesuai <i>aanmaning</i> dari PN Medan untuk pelaksanaan putusan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) won with Appeal Decision which in essence declared the employment termination was legal & lawful between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with M. Rajab Fandi Parinduri. Bahwa PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) also had to pay to M. Rajab Fandi Parinduri severance pay, long service pay, rightful pay of sum Rp 28,140,400.- & the follow up had been paid by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in accordance of reminder from Medan Court.	1. Mengikuti jalannya persidangan 2. Mencari bukti-bukti 3. Mengumpulkan dan briefing saksi-saksi 4. Berkoordinasi dengan Pihak Pengadilan 1. Participating in trial process 2. Searching for evidence 3. Summoning & briefing witnesses 4. Coordinating with the Court	Kemungkinan biaya keluar atas sejumlah tuntutan Penggugat Possible expense due to Plaintiff's lawsuit

No	Pihak yang Berperkara Litigant	Pokok dan Nilai Perkara Substance & Merits	No. Perkara Case Number	Status Perkara Status	Upaya Manajemen Management Action	Risiko Yang Dihadapi Management Action
9	Penggugat Plaintiff Kusnan/Kusnan II Tergugat Defendant PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Gugatan Perselisihan Hak yang menurut Penggugat timbul karena adanya pemutusan kerja sama antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Tergugat II) dengan PRIMKOPKARMAR (Tergugat I) sehingga para pekerja KOPKARMAR dialihkan kepada perusahaan lain. Pada saat proses peralihan tersebut, Penggugat merasa belum menerima hak-hak nya sesuai dengan ketentuan. Penggugat merasa belum menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan. Rights disputes lawsuit due to Plaintiff cooperation termination between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Defendant II) with PRIMKOPKARMAR (Defendant I) making KOPKARMAR employees transferred to other companies. During the transfer, Plaintiff felt his rights had not yet fulfilled as written in terms & conditions.	Perkara No. 95/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn Case No. 95/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn	Adanya putusan Pengadilan yang menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menghukum Tergugat I (PRIMKOPKARMAR) membayar hak-hak Penggugat. The Court decided to grant a part of Plaintiff's lawsuit & punished Defendant I (PRIMKOPKARMAR) to pay Plaintiff's rights	1. Mengikuti jalannya persidangan 2. Mencari bukti-bukti dan briefing saksi-saksi 3. Mengumpulkan dan briefing saksi-saksi 4. Berkoordinasi dengan Pihak Pengadilan 1. Participating in trial process 2. Searching for evidence to grant a part of Plaintiff's lawsuit & witnesses 3. Summoning & briefing witnesses 4. Coordinating with the Court	Kemungkinan biaya keluar atas sejumlah tuntutan Penggugat due to Plaintiff's lawsuit
10	Penggugat Plaintiff Robert Simanjuntak Tergugat Defendant PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Gugatan Perselisihan Hak yang menurut Penggugat timbul karena adanya pemutusan kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Tergugat II) dengan PRIMKOPKARMAR (Tergugat I) sehingga para pekerja KOPKARMAR dialihkan kepada perusahaan lain. Pada saat proses peralihan tersebut, Penggugat merasa belum menerima hak-hak nya sesuai dengan ketentuan. Penggugat merasa belum menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan. Rights disputes lawsuit due to Plaintiff cooperation termination between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Defendant II) with PRIMKOPKARMAR (Defendant I) making KOPKARMAR employees transferred to other companies. During the transfer, Plaintiff felt his rights had not yet fulfilled as written in terms & conditions.	Perkara No. 96/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn Case No. 96/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn	Adanya putusan Pengadilan yang menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menghukum Tergugat I (PRIMKOPKARMAR) membayar hak-hak Penggugat. Tergugat II mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut. The Court decided to grant a part of Plaintiff's lawsuit & punished Defendant I (PRIMKOPKARMAR) to pay Plaintiff's rights. Defendant II filed appeal.	1. Mengikuti jalannya persidangan 2. Mencari bukti-bukti dan briefing saksi-saksi 3. Mengumpulkan dan briefing saksi-saksi 4. Berkoordinasi dengan Pihak Pengadilan 1. Participating in trial process 2. Searching for evidence 3. Summoning & briefing witnesses 4. Coordinating with the Court	Kemungkinan biaya keluar atas sejumlah tuntutan Penggugat due to Plaintiff's lawsuit

SANKSI ADMINISTRASI DARI REGULATOR

Hingga akhir tahun 2020, tidak terdapat sanksi administrasi yang diberikan kepada Perseroan oleh Regulator.

ADMINISTRATIVE SANCTION FROM REGULATOR

Until the end of 2020, there wasn't any Administrative Sanction given to the Company by the Regulator.



AKSES DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

COMPANY DATA AND INFORMATION ACCESS

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada para pemangku kepentingan untuk mengakses data dan informasi Perseroan secara jelas dan terbuka, Perseroan memiliki berbagai sarana komunikasi yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi.

Ketersediaan data dan informasi Perseroan kepada pemangku kepentingan telah sepenuhnya sesuai dengan *best practices* penerapan GCG. Perseroan telah menyampaikan informasi kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya secara berkala dan tepat waktu. Perseroan juga secara berkala memperbarui data dan informasi Perseroan melalui media tersebut.

Perseroan menyediakan akses komunikasi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu akses komunikasi eksternal dan akses komunikasi internal. Perseroan senantiasa berupaya menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan Perseroan dengan membangun iklim komunikasi yang baik antara pegawai melalui sejumlah kegiatan tatap muka antara manajemen dan karyawan maupun melalui media elektronik.

Sementara itu, komunikasi antara Perseroan dan Pemegang Saham dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat ini menjadi sarana penyampaian informasi mengenai perusahaan, dan memungkinkan pemegang saham berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham.

Komunikasi eksternal dengan pemangku kepentingan lainnya senantiasa dibangun Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik terutama prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Perseroan selalu menyampaikan informasi penting yang perlu diketahui oleh publik sebagai bentuk transparansi bagi para pemangku kepentingan dalam surat kabar nasional, *online* maupun elektronik. Perseroan telah menyediakan sarana penyampaian informasi, antara lain:

In order to make the stakeholder has easier access to Company's data & information transparently & openly, the Company has various communication infrastructures which function as information disclosure facilities.

Company's data & information availability to stakeholders is entirely part of best practices of GCG implementation. The Company has informed the Shareholders & Stakeholders periodically & punctually. The Company also periodically update data & information through that media.

The Company provides communication access in 2 forms, external communication access & internal communication access. The Company always striving to create harmonious relationship within the Company by building good communication climate through several face-to-face activities between management & employee and also through electronic media.

Meanwhile, communication between the Company & the Shareholders is done through General Meeting of Stakeholders. This meeting is a means to inform the Company & allows the Shareholders to participate in the process of deciding which needs their approval.

External communication with Stakeholders is always built by implementing Good Corporate Governance principles especially information transparency & openness. The Company always provides important information for public as a commitment to transparency for all stakeholders in national newspapers, online media & electronic. The Company has provided several means of information, namely:

KONTAK PERSEROAN

Company Contact

Kantor Pusat
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
GRHA PELINDO SATU
Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan,
Medan - 20411 Sumatera Utara - Indonesia
(+62-61) 41000055
(+62-61) 88800059

E-mail: pelabuhan1@pelindo1.co.id
Head Office

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
GRHA PELINDO SATU
Lingkar Pelabuhan No. 1 Street Belawan, Medan - 20411 North Sumatra
- Indonesia
(+62-61) 41000055
(+62-61) 88800059
E-mail: pelabuhan1@pelindo1.co.id



WEBSITE RESMI PERSEROAN

Company Official Website

Melalui website resmi Perseroan www.pelindo1.co.id khalayak umum dapat mengakses data dan informasi Perseroan. Through Company Official Website at www.pelindo1.co.id public can access data & information of the Company.

E-PPID

E-PPID

e-PPID merupakan layanan permohonan informasi yang dapat diakses oleh publik secara *online* melalui portal eppid.pelindo1.co.id
e-PPID is an information request service available online to the public at eppid.pelindo1.co.id



LAPORAN TAHUNAN

Annual Report

Laporan Tahunan Perseroan menjadi salah satu media resmi Perseroan dalam menyampaikan data dan informasi secara berkala, tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Company Annual Report is one of the official media to report data & information periodically, punctually, accurately, and accountable.



MAJALAH E-GEMA

E-GEMA Magazine

Majalah Gema Pelabuhan I yang ditampilkan secara *online* berisikan tentang segala jenis informasi dan event yang berlangsung di Pelindo 1.

Gema Pelabuhan I Magazine displayed online contains information & events occurring in Pelindo 1.



MEDIA SOSIAL

Social Media

Instagram : [pelindo1](https://www.instagram.com/pelindo1)

Twitter : [@pelindo_1](https://twitter.com/pelindo_1)

Youtube : Pelindo 1

Facebook : PT Pelabuhan Indonesia I - Persero

Website : www.pelindo1.co.id





TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY

Teknologi informasi dikembangkan Perseroan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta efisiensi operasi pelabuhan yang berstandar internasional serta selaras dengan Visi, Misi, dan Sasaran Perseroan. Teknologi informasi Perseroan diarahkan untuk menjadi tulang punggung operasi pelabuhan yang terkoneksi secara global serta mampu meningkatkan daya saing Perseroan kancah global.

Information Technology is developed by the Company in order to increase service quality & port operational efficiency with international standard in line with Company Vision, Mission, and Goals. Company Information Technology is directed to be port operation backbone which connected globally to increase competitiveness.

Karena itu, Perseroan menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif serta menyusun dan melakukan evaluasi secara berkala, *master plan* teknologi informasi yang berfungsi sebagai pedoman pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mencapai tujuan Perseroan.

Therefore, the Company designated effective IT governance & also periodically evaluating IT masterplan which functions as a guidance for utilisation & development to reach Company's goals.

Perseroan secara berkesinambungan melakukan meningkatkan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas, menjamin keamanan dan keandalan sistem, serta ketersediaan layanan berbasis TI.

The Company is constantly improving IT system to increase accessibility, ensuring system security & reliability & IT based service availability.

IT MASTER PLAN

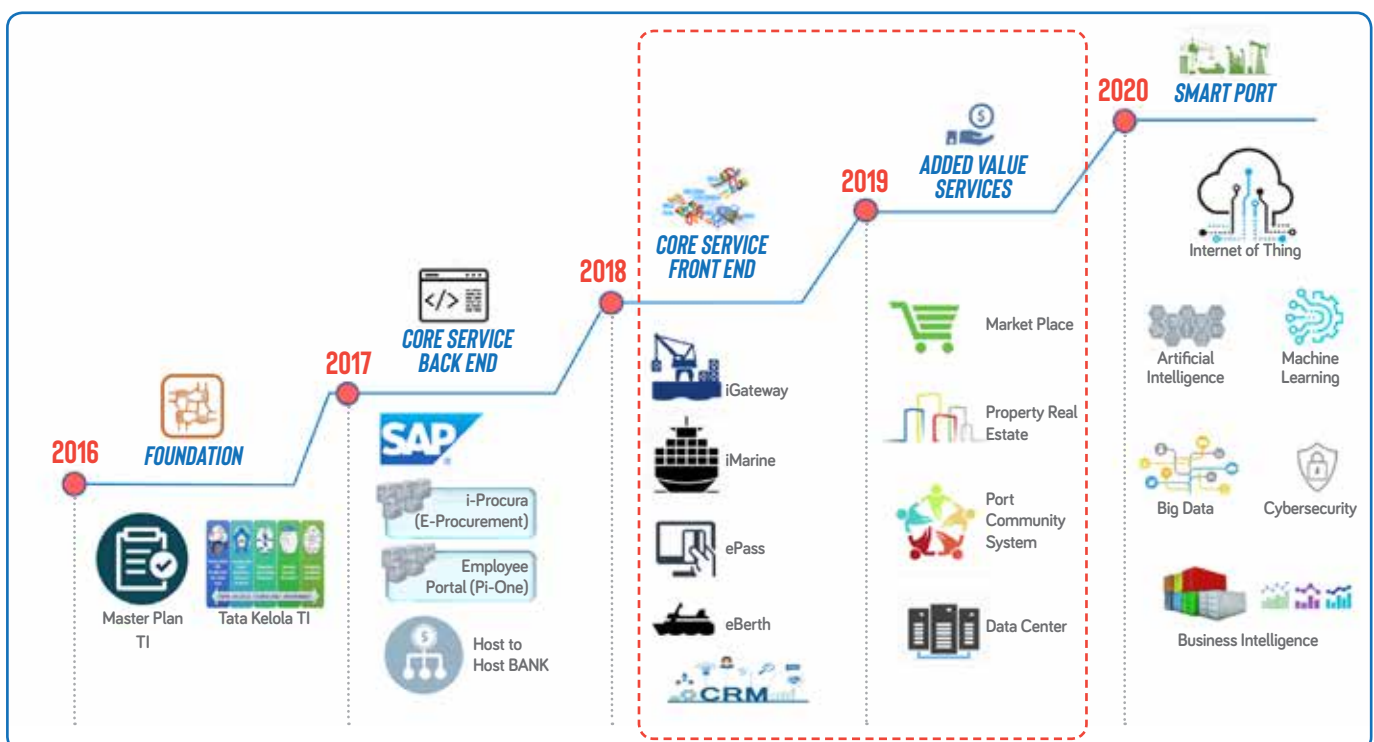
IT MASTER PLAN

Penerapan Teknologi Informasi mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang diturunkan menjadi IT Master Plan 2018-2021, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

IT Implementation refers to Company Long Term Plan (RJPP) which then derived to IT Master Plan 2018-2021, which already been explained in Company Budget Plan (RKAP).

ROADMAP PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI

IT IMPLEMENTATION ROADMAP



Dimulai pada tahun 2016, mulai menyusun *Master Plan* Teknologi Informasi mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang diturunkan menjadi *IT Master Plan* dan juga menerapkan Tata Kelola TI sebagai pedoman dalam penerapan Teknologi Informasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Pada tahun 2017, penerapan ERP (*Enterprise Resource Planning*) yaitu sistem informasi yang diperuntukkan bagi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi. ERP yang digunakan adalah SAP yang didukung oleh sistem pembayaran *host to host* dengan *Bank Partner*. Kemudian pada tahun 2018, Sebuah sistem operasi terminal *multipurpose* yang multifungsi, mudah disesuaikan, dapat dioperasikan melalui berbagai perangkat pintar dan terintegrasi dengan sistem eksternal dan internal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). IGMT merupakan implementasi *Front End* terbaik yang sukses teruji diterapkan di 70 pelabuhan di seluruh dunia dan pertama kali diterapkan di Asia Tenggara oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Penerapan aplikasi IGMT PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ini memudahkan para pengguna jasa untuk dapat mengajukan permintaan secara *online* kapan saja dan di mana saja yang terintegrasi dengan sistem internal dan eksternal di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), pantauan kegiatan operasional secara *real time*, pengecekan kegiatan operasional terkontrol, dan pelayanan jasa kepelabuhanan di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang terstandarisasi. IGMT ini mengintegrasikan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan bagi pengguna jasa secara *online* di semua cabang pelabuhan. Keuntungan penggunaan IGMT PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, kontrol dapat dilakukan 24 jam, *monitoring* status pelayanan jasa kepelabuhanan secara *online*, serta pranota dan nota dapat dilihat di *Web Portal* tanpa harus datang ke kantor PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Di tahun 2018 juga untuk *core service front end*, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menerapkan *ePass* dan *eBerth* di pelabuhan-pelabuhan yang terdapat terminal penumpang.

RENCANA PENGEMBANGAN PERAN TEKNOLOGI INFORMASI

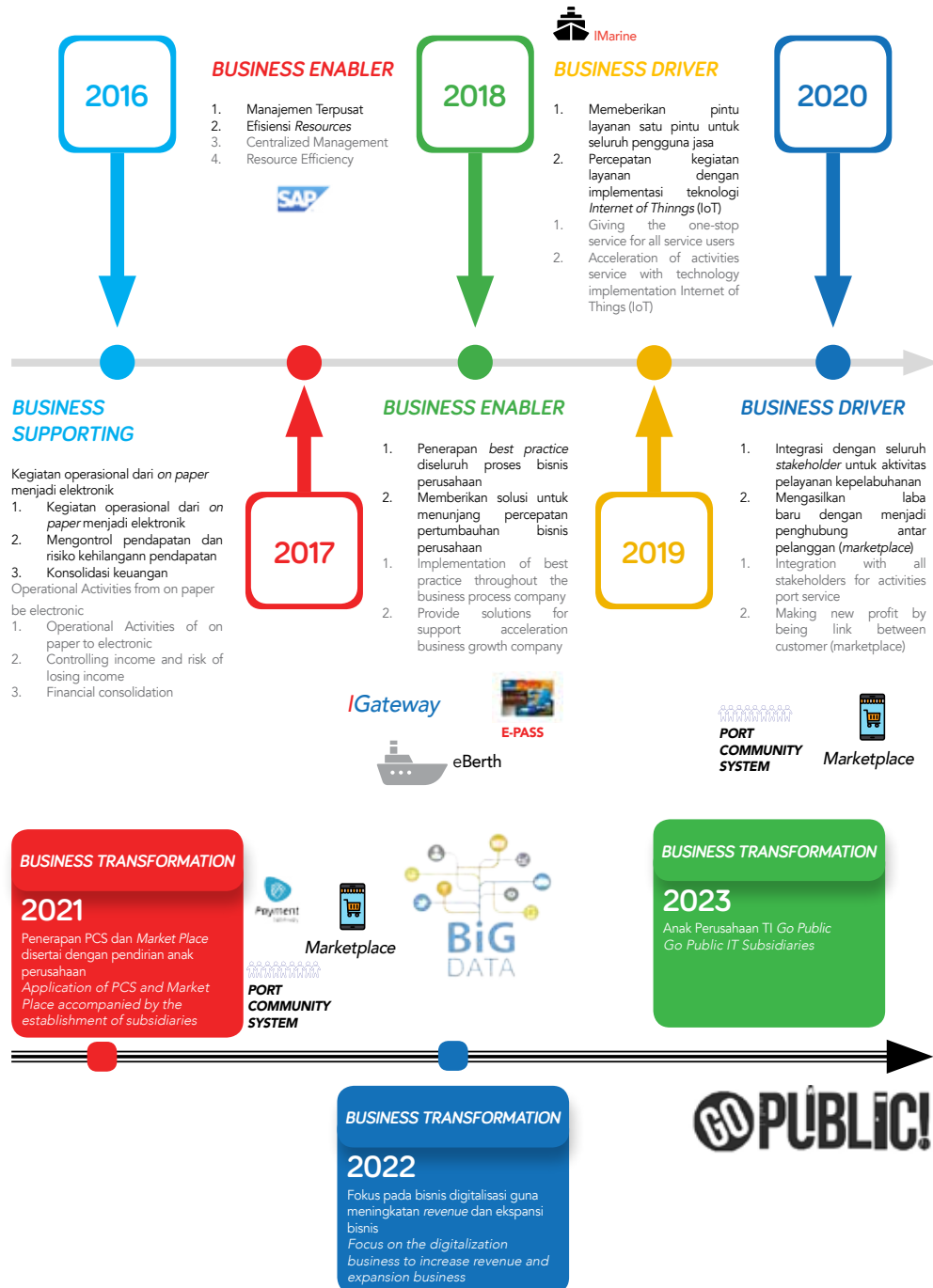
Penerapan Sistem TI yang baik diharapkan dapat memberikan dukungan langsung pada operasional Perseroan dalam menghasilkan kinerja yang optimal pada semua pemangku kepentingan. Di tahun 2020, Perseroan menargetkan penerapan teknologi informasi akan menjadi *Business Driver* di mana terdapat integrasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk aktivitas pelayanan kepelabuhanan serta mampu menghasilkan laba baru dengan menjadi penghubung antar pelanggan (*marketplace*).

Beginning in 2016, IT Master Plan was composed based on Company Long Term Plan (RJPP) which then derived to IT Master Plan & also implementing IT Governance as a guidance in IT Implementation within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). In 2017, ERP (Enterprise Resource Planning) was implemented. This is a information system made especially for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) which has role in integrating & automating business processes linked with operation, production & distribution aspect. ERP utilised is SAP, supported with host to host payment system with Partner Bank. Then, in 2018, multipurpose terminal operation system with multi functionality, easily adjustable, is operable using various smart equipments & intergrated with external & internal system of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). IGMT impelmentation by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) made the service users easier to make online request anytime & anywhere as long as its integrated with internal & external system of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), real time operational monitoring, controlled operational activities checking & standardised ports service in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). IGMT integrates ports service system to all users online in all port branches. The advantage of this for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is requisitioning can be done anytime & anywhere, control can be performed 24/7, ports service status can be monitored online, & all notes can be seen in Web Portal without having to come to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) offices. In 2018, also for core service front end, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) implemented *ePass* & *eBerth* in ports with passenger terminals.

IT ROLE DEVELOPMENT PLAN

Good IT System implementation is expected to provide direct support to Company operational in creating optimal performance to all stakeholders. In 2020, the Company targets IT Implementation as Business Driver where there's integration with all stakeholders for ports service activities & also capable to produce new profite by becoming hubs for consumers or in short, a marketplace.

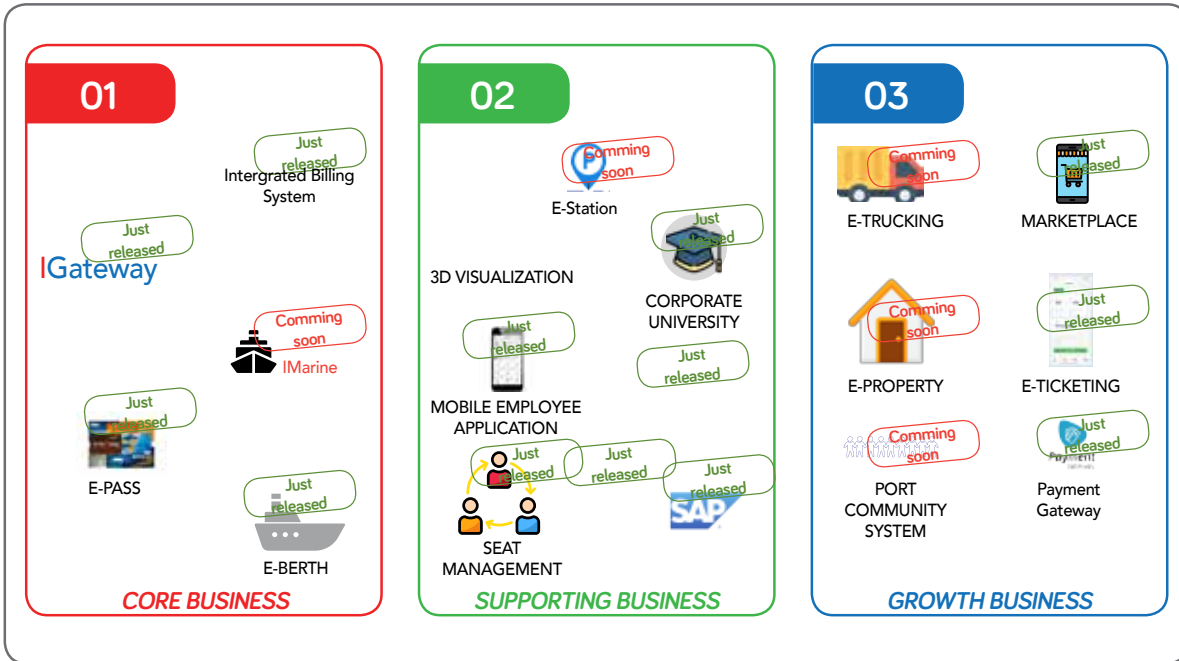




Pada tahun 2021, Perseroan menargetkan penerapan teknologi informasi akan menjadi *business transformation* di mana dimulai dengan penerapan PCS (*Port Community System*), *Market Place* dan *Payment Gateway* yang berfokus pada bisnis digitalisasi guna meningkatkan *revenue* dan ekspansi bisnis.

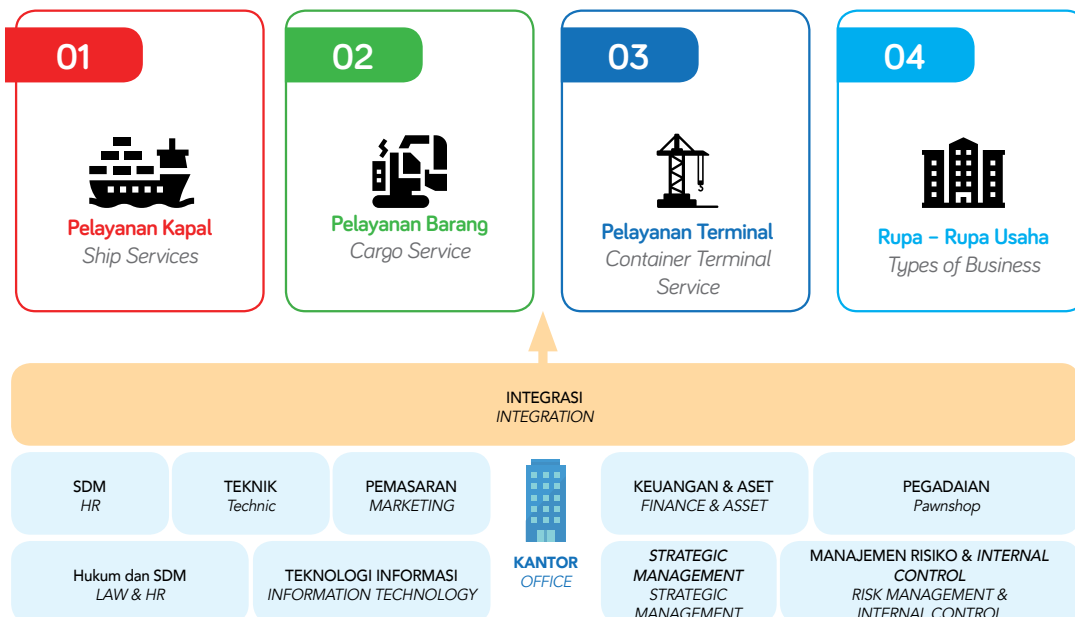
STRATEGI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI

IT IMPLEMENTATION STRATEGY



Pelaksanaan Teknologi Informasi digunakan untuk menunjang bisnis perusahaan, yang terdiri dari Bisnis Inti/Core, Bisnis Penunjang dan Bisnis Adjacencies/Growth yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada perusahaan. Penerapan Teknologi Informasi diharapkan dapat menciptakan integrasi antara Fungsi Core dan Supporting Bisnis sebagaimana terlihat dari gambar ilustrasi berikut ini:

IT implementation is applied to support Company's business which consisted of Core Business, Supporting Business & Adjacencies/Growth business, expected to provide added values for the Company. It is hoped that this will also integrate between Core Function & Supporting Business like explained below:



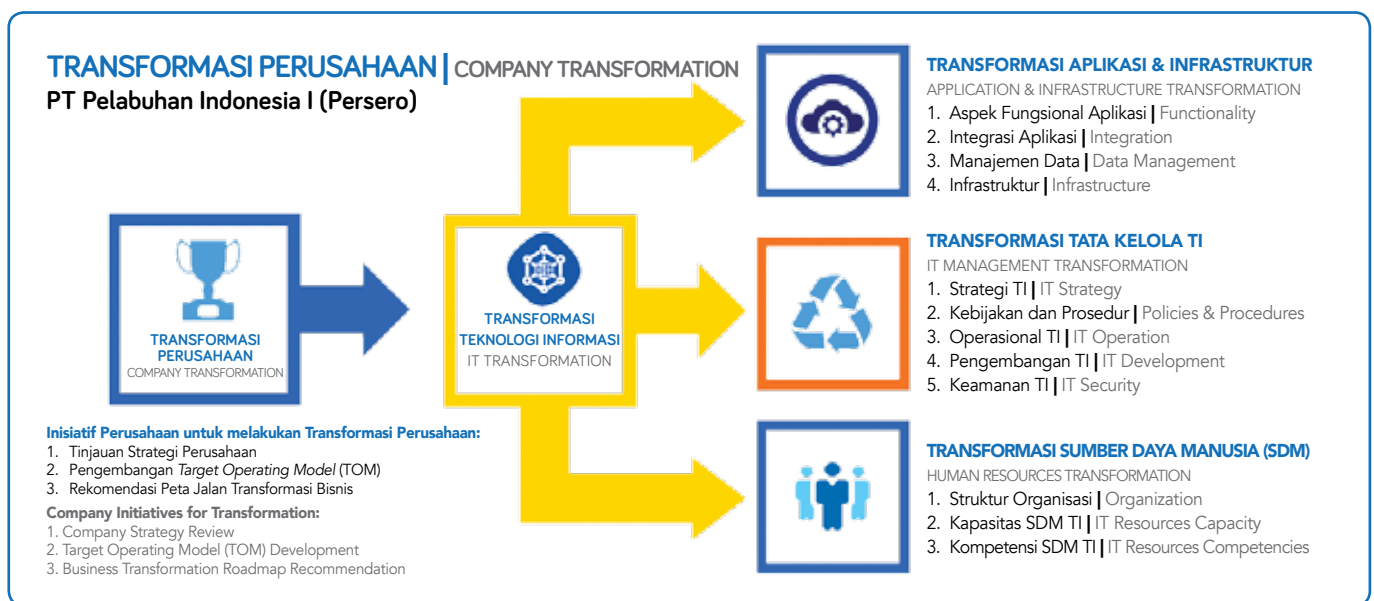


TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan melakukan transformasi teknologi informasi untuk menunjang operasional bisnis Perseroan serta transformasi ini dilakukan dengan mengacu pada strategi Perseroan yang dikembangkan untuk mencapai tujuan Perseroan. Pelaksanaan transformasi perusahaan yang dapat dilihat sebagai berikut:

IT TRANSFORMATION

The Company implements IT Transformation to support business operation. This transformation is performed based on Company strategies developed to reach Company's goals. Implementation of IT Transformation is explained as follows:



HASIL KAJIAN TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan hasil kajian transformasi perusahaan terlihat bahwa pengembangan aplikasi *Front End* belum dilakukan dengan dasar di bawah ini.

IT STUDY RESULT

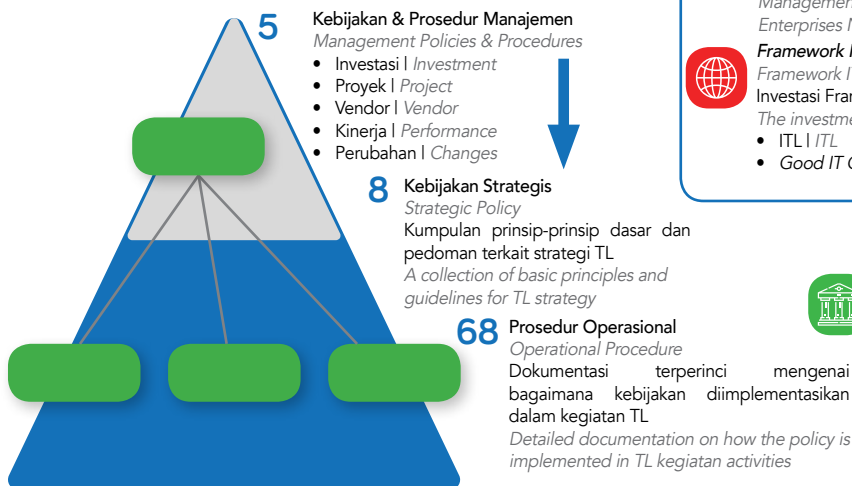
Based on Company transformation study result, Front End applications is not yet been conducted due to.

<p>Pemutakhiran Aset dan Teknologi Asset and Technology Updating</p>	<p>Perlu dilakukan pendataan ulang mengenai aset perangkat lunak dan <i>database</i> yang dimiliki oleh Pelindo 1, yang diikuti dengan kajian versi yang digunakan dibandingkan dengan versi terakhir yang diproduksi oleh vendor</p> <p>It is necessary to re-collect data on software assets and databases owned by Pelindo 1, which is followed by a review of the version used compared to the last version produced by vendors</p>
<p>Pengembangan aplikasi yang "Fit for Purpose" Application development "Fit For" Purpose</p>	<p>Sejalan dengan MPTI, semua pengembangan aplikasi/sistem informasi harus tetap dijalankan mengikuti perkembangan kebutuhan bisnis dan pengguna. Divisi TI harus dilibatkan secara aktif dalam menganalisa risiko dan dampak dari perubahan bisnis dan regulasi terhadap sistem. Kejain risiko dan manfaat atas setiap inisiatif perubahan pada sistem informasi harus didokumentasikan dan disetujui oleh IT <i>Steering Committee</i></p> <p>In line with MPTI, all application/information system development must continue to follow evolving business and user needs. The IT division must be actively involved in analyzing risks and the impact of business and regulatory changes on the system. Assess the risks and benefits of each initiative Changes to the information system must be documented and approved by the IT Steering Committee</p>
<p>Penerapan sistem pendukung di semua cabang Implementation of support systems in all branch</p>	<p>Seluruh cabang menggunakan sistem informasi yang tersentralisasi, sehingga dapat menerapkan standarisasi proses bisnis dan meningkatkan pelayanan pelabuhan</p> <p>All branches use a centralized information system, so they can apply standardization business processes and improve port services</p>

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Tata Kelola Teknologi Informasi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN No. PER-03/MBU/02/2013.

SK KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TI NOMOR: PR.03/4/4/PI-12 TANGGAL 14 NOVEMBER 2012
 DECREE OF IT POLICIES AND PROCEDURES NUMBER:
 PR.03/4/4/PI-12 NOVEMBER 14, 2012



KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TI
NOMOR: KP.31/30/11/PI-18.TU TANGGAL 11 JULI 2018
 IT POLICIES AND PROCEDURES NUMBER: KP.31/30/11/
 PI-18.TU JULY 11 2018

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2020

Perseroan telah melakukan berbagai pengembangan dan implementasi teknologi informasi 2020 yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan. Adapun pengembangan teknologi informasi di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

INTEGRATED BILLING SYSTEM

Integrated Billing System (IBS) merupakan sebuah web portal elektronik yang didesain khusus bagi para pelanggan PT Pelabuhan Indonesia I, yang dapat diakses secara aman dan mudah (*online*). Sehingga dapat memberikan sebuah kemudahan bagi para pelanggan PT Pelabuhan Indonesia I dalam bertransaksi. IBS merupakan bagian dari program Kementerian BUMN untuk mengintegrasikan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan di seluruh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk pengguna jasa secara *online* sehingga akan didapatkan sistem pelayanan yang terpadu dan efisien guna menekan biaya logistik.

IT GOVERNANCE

IT Governance refersto Minister of SOE Order on IT Management Composing Guidance No. PER-03/MBU/02/2013.

Standar IT Governance
 Peraturan Menteri BUMN tentang Panduan penyusunan pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Mlik Negara Nomor: PER-03/MBU/002/2018
*IT Governance Standard
 Regulation of the Minister of SOEs on Guidelines for Preparation Management of Information Technology of State Owned Enterprises Number: PER-03/MBU/002/2018*

Framework IT Governance
Framework IT Governance
 Investasi Frame work yang digunakan adalah sebagai berikut:
The investment framework used is as follows:

- ITL | ITL
- Good IT Governance



GOOD IT GOVERNANCE



2020 IT DEVELOPMENT

The Company has conducted various development & implementation of IT during 2020 which compatible with business necessities. The development are as follows:

INTEGRATED BILLING SYSTEM

Integrated Billing System (IBS) is an electronic web portal specifically designed for PT Pelabuhan Indonesia I customers, conveniently & securely accessible (*online*). Thus enabling the customers to make transaction withPT Pelabuhan Indonesia I easier. IBS is a part of Ministry of SOE program to integrate all ports service system throughout PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) for online users in order to realise integrated & efficient service system with low logistical cost.





Sistem Pembayaran *Integrated Billing System* (IBS) merupakan sistem pembayaran yang memudahkan kegiatan jasa kepelabuhanan secara terpusat melalui satu pintu atau *single window* sehingga didapatkan sistem pelayanan yang terpadu dan efisien guna mengoptimalkan biaya operasional.

IGATEWAY

Sebuah sistem operasi terminal *multipurpose* yang multifungsi, mudah disesuaikan, dapat dioperasikan melalui berbagai perangkat pintar dan terintegrasi dengan sistem eksternal dan internal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). IGMT merupakan implementasi *Front End* terbaik yang sukses teruji diterapkan di 70 pelabuhan di seluruh dunia dan pertama kali diterapkan di Asia Tenggara oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Penerapan aplikasi IGMT PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ini memudahkan para pengguna jasa untuk dapat mengajukan permintaan secara *online* kapan saja dan dimana saja yang terintegrasi dengan sistem internal dan eksternal di PT Pelabuhan Indonesia I, pantauan kegiatan operasional secara *real time*, pengecekan kegiatan operasional terkontrol, dan pelayanan jasa kepelabuhanan di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang terstandardisasi.

IGMT ini mengintegrasikan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan bagi pengguna jasa secara *online* di semua cabang pelabuhan. Keuntungan penggunaan IGMT PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, kontrol dapat dilakukan 24 jam, *monitoring* status pelayanan jasa kepelabuhanan secara *online*, serta pranota dan nota dapat dilihat di *Web Portal* tanpa harus datang ke kantor PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

E-PASSENGER

Sistem yang terintegrasi dengan sistem bank untuk membaca *electronic money card* (*e-money*) sehingga memudahkan para pelanggan untuk dapat masuk ke dalam terminal penumpang.

E-BERTHING

Sebuah portal yang terhubung dengan sistem yang terintegrasi dengan sistem bank untuk membaca *electronic money card* (*e-money*) sehingga memudahkan bagi operator kapal ferry untuk dapat sandar di terminal penumpang.

PORTRAIT CORPORATE UNIVERSITY

Sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan, perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara daring. Dimensi untuk belajar sistem manajemen meliputi *students self-service* (misalnya, registrasi mandiri yang dipimpin instruktur pelatihan), pelatihan alur kerja (misalnya, pemberitahuan pengguna,

Integrated Billing System (IBS) is a centralised single window payment system, hence an integrated & efficient service system can be realised to optimise operational cost.

IGATEWAY

Is a multipurpose operation system with easy adjustability, can be used in various smart equipments & integrated with internal & external system of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). IGMT is the best Front End implementation successfully tested & implemented in 70 ports all around the world & firstly implemented in Southeast Asia by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

IGMT PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) implementation is enabling the users to make online request anytime & anywhere integrated with PT Pelabuhan Indonesia I internal & external system, real time operational monitor, controlled operation checking & standardised ports service in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

IGMT integrates ports service system to all users in all branches. The advantage is PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) request can be made anytime & anywhere, 24/7 control, online monitoring for ports service, and also prenotes & notes visible on Web Portal without having to come to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) office.

E-PASSENGER

Is a system integrated with banking system to read electronic money card (*e-money*). Enabling customers to enter passenger terminal easier.

E-BERTHING

Is a system integrated with banking system to read electronic money card (*e-money*). Enabling ferry operator to dock in passenger terminal easier.

PORTRAIT CORPORATE UNIVERSITY

Is a system to manage education & training records. Its software can also be used to distribute programs using internet with online co-op feature. Management learning system covers students self-service (for example, self registration led by instructor), work flow training (for example, user notification, manager confirmation, management waiting list), online

persetujuan manajer, daftar tunggu manajemen), penyediaan pembelajaran daring (misalnya, pelatihan berbasis komputer, membaca & memahami), penilaian daring, manajemen pendidikan profesional berkelanjutan (CPE), pembelajaran kolaboratif (misalnya, berbagi aplikasi, diskusi), dan pelatihan manajemen sumber daya (misalnya, instruktur, fasilitas, peralatan).

MOBILE EMPLOYEE APPLICATION

Sebuah sistem *self service* yang ditujukan kepada para pegawai Pelindo 1 untuk dapat melakukan berbagai aktivitas terkait dengan kepegawaian termasuk di dalamnya adalah melakukan manajemen kinerja yang dihubungkan dengan KPI individu dan PKM Divisi/Cabang.

CRM

Sistem yang terpusat yang menyimpan semua data kontak bisnis pelanggan, seperti: kontak pelanggan, calon pelanggan, mitra/vendor, pers, dan kolega. Seiring waktu, sistem tersebut membangun riwayat interaksi perusahaan dengan setiap kontak, termasuk *email*, panggilan, catatan rapat, dan transaksi penjualan dengan pelanggan. Semua yang dibutuhkan tersimpan di satu tempat sehingga memberi sebuah visibilitas yang jelas tentang aktivitas penggunaan jasa dan hubungan langsung ke pelanggan.

SEAT MANAGEMENT

Sistem dalam mengkoordinir semua *workstation* dalam sebuah jaringan yang bekerja dengan cara mengawasi proses instalasi, operasi, serta pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak di setiap *workstation*. Mengurangi biaya dalam penyediaan perangkat IT. Termasuk juga di dalamnya ada portal intranet yang dapat digunakan sebagai komunikasi internal ke para pegawai.

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

Perangkat lunak yang dapat menunjang sistem pengelolaan arsip dinamis dan arsip pasif secara digital dan juga berguna dalam proses alih media untuk dokumen kertas (Fisik) perusahaan menjadi dokumen digital, di dalam sistem pengelolaan diperlukan kondisi dokumen dalam bentuk *softcopy* sehingga langkah awal dari penggunaan sistem ini adalah alih media, setelah semua dokumen menjadi dokumen digital maka penggunaan sistem ini sudah bisa dilakukan.

learning materials (Computer based learning, reading & understanding), online evaluation, sustainable professional management (CPE), co-op learning (apps sharing, discussion), & resource management training (Instructor, facilities, equipments).

MOBILE EMPLOYEE APPLICATION

Is a self service system aimed at Pelindo 1 employees for personnel activities including performance management with individual KPI & Division/Branch PKM.

CRM

Is a centralised system which stores all customer's business contact data like : contacts, future customers, partner/vendor, press & colleagues. Over time, it will create Company's interaction history including e-mails, calls, meeting records & sale records. Everything is stored in one place, creating clear visibility on service activities & direct interaction with customers.

SEAT MANAGEMENT

Is system which manage all workstation in a working network by monitoring installation process, operation & hardware software maintenance. Reducing cost in IT wares procurement. Included also is an Intranet Portal which can be used as internal communication channel for employees.

Document Management System

This refers to software that can support a system to manage dynamic archives and passive archives digitally and are also useful in the process of media transfer from paper (physical) documents into digital documents. In the management system, it is necessary to have documents in the form of soft copies, so the first step in using this system is through media transfer. After all documents are in their digital forms already, then this system is ready to use.





INTEGRATED WEBSITE KORPORAT DAN CABANG

Situs korporat yang di dalamnya adalah informasi-informasi seputar Pelindo 1 yang ditujukan untuk konsumsi publik terintegrasi juga dengan situs-situs dari Cabang/Unit Pelindo 1 yang disajikan secara komprehensif, aktual, dan terpercaya.

MANAJEMEN SURAT ELEKTRONIK

Aplikasi pengelolaan surat menyurat secara digital/elektronik yang berguna untuk mempercepat penyampaian informasi surat dan disposisi kepada pihak yang dituju.

SAP

Perangkat lunak yang berbasis ERP atau *Enterprise Resources Planning* yang digunakan untuk menjalankan manajemen aktivitas harian perusahaan. Tujuannya jelas, SAP membuat semua aktivitas manajemen, pemantauan, dan pengolahan informasi menjadi jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.

MARKET PLACE

Aplikasi *online* yang memfasilitasi proses penawaran jasa *trucking* petikemas dari berbagai agent/mitra Pelindo 1.

E-TICKETING

Aplikasi penjualan tiket kapal ferry *online* di Kepulauan Riau melingkupi Tanjungpinang, Batam, dan Tanjung Balai Karimun.

PAYMENT GATEWAY

Solusi pembayaran *online all-in-one* yang aman dan mudah untuk segala aktivitas transaksi bisnis Pelindo 1.

Corporate & Branch Integrated Website

Company sites with information on Pelindo 1, aimed for general public. Integrated with Pelindo 1 Branches/Unit sites. Made to be comprehensive, actual & reliable.

E-Mail Management

Mail management apps which useful for sending information & disposition to receivers.

SAP

ERP/Enterprise Resources Planning based program used for daily management activity. SAP made all information management, monitoring, and processing much more effective & efficient than before.

MARKETPLACE

Online Apps which facilitates container trucking offers from all Pelindo 1 agents & partners.

E-TICKETING

Online ferry boat ticket apps in Riau Islands which covers Tanjungpinang, Batam, and Tanjung Balai Karimun.

PAYMENT GATEWAY

Secured & easy online all-in-one payment solution for Pelindo 1 business transactions.

KODE ETIK

CODE OF CONDUCT

Perseroan memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* (CoC) yang diberlakukan bagi seluruh insan Perseroan. CoC Perseroan disusun sebagai panduan untuk mencapai perilaku bisnis dan etika kerja dengan mendukung setiap tingkatan manajemen untuk menempatkan kemampuan Perseroan dalam berbisnis, kepada pihak-pihak internal ataupun eksternal, sejalan dengan pelarangan dalam melakukan pelanggaran atas etika, hukum, dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari CoC adalah untuk memberikan arahan dalam berperilaku profesional kepada seluruh insan Pelindo 1 dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kode Etik Bisnis Perusahaan disahkan melalui Surat Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.30/50/22/PI-19.TU tanggal 22 November 2019.

POKOK-POKOK ISI KODE ETIK PELINDO 1

Code of Conduct Pelindo 1 terdiri dari: Penyusunan *code of conduct* telah disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, dan dinamika bisnis Pelindo 1. *Code of Conduct* yang berlaku untuk seluruh insan Pelindo 1 terdiri atas:

- Lembar Pemberlakuan dan Maklumat Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
- Bab I: Pendahuluan
- Bab II: Etika Bisnis
- Bab III: Etika Kerja dan Tata Perilaku
- Bab IV: Donasi, Hadiah, dan Jamuan
- Bab V: Penegakan Etika
- Bab VI: Penutup

Di samping itu, Kode Etik Bisnis Perusahaan juga memuat Pernyataan Kepatuhan insan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) lengkap dengan lembar tanda tangan.

KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH INSAN PELINDO 1

Kode Etik diberlakukan kepada semua insan Pelindo 1 mulai dari karyawan hingga manajemen Pelindo 1. Guna memberikan pemahaman mengenai kode etik, Perseroan secara berkala melakukan sosialisasi standar etika ini kepada seluruh insan Pelindo 1. Pernyataan komitmen Perseroan yang diberlakukan kepada semua insan Pelindo 1 dinyatakan dengan membuat pernyataan kepatuhan terhadap kode etik dengan menandatangani Pernyataan Kepatuhan Tahunan. Dokumen Pernyataan Kepatuhan Tahunan yang ditandatangani merupakan salah syarat bagi kelanjutan masa bakti insan Pelindo 1 di Perseroan.

The Company has Code of Conduct (CoC) applied for all Company People. Company CoC is composed as a guidance to reach business behaviour & work ethics by supporting every level of management to allocate all Company's abilities to business, both internally & externally, in line with restrictions on violation on ethics, law & regulations. CoC is aimed to provide direction in conducting professionally to all Pelindo 1 personnel in performing their duties.

Company CoC is legalised through Directors' Order of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.30/50/22/PI-19.TU on 22 November 2019.

PELINDO 1 CODE OF CONDUCT ESSENCE

Pelindo 1 Code of Conduct consists of: Composing on legal, social & business basis. Code of Conduct which are mandatory for all Pelindo 1 personnel are:

- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Board of Commissioners & Directors Commitment & Enactment Memorandum
- Chapter I : Prologue
- Chapter II : Business Ethics
- Chapter III : Work Ethics & Behaviour
- Chapter IV : Donation, Reward & Party
- Chapter V : Ethics Enforcement
- Chapter VI : Epilogue

Moreover, Company CoC also contains Compliance Statement of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) complete with signature sheet.

CODE OF CONDUCT APPLIES FOR ALL PELINDO 1 PERSONNEL

Code of Conduct applies to all from employees to management. To provide understanding on CoC, the Company periodically held standard ethics socialisation to all Pelindo 1 personnel. Company compliance statement is declared by making a statement of code of conduct & signing the Annual Compliance Statement. This annual signed document is one of the requirements needed for to prolong work duration of Pelindo 1 personnel in the Company.





PENEGAKAN KODE ETIK: SOSIALISASI/PENYEBARLUASAN DAN INTERNALISASI

PENEGAKAN PEDOMAN:

- Dalam hubungan kerja yang dibangun oleh Perseroan, semua pegawai harus mematuhi undang-undang yang berlaku, peraturan eksternal dan internal, Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini dan setiap kebijakan dan tata cara internal yang berlaku, dengan komitmen perorangan terhadap kejujuran, kesetiaan kepada Perusahaan dan keterbukaan dalam semua tindakan yang berkaitan dengan pekerjaan.
- Sebagai pernyataan komitmen terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini, semua pegawai menandatangani 'Pernyataan Kepatuhan'.
- Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini harus disosialisasikan kepada seluruh insan Perseroan agar semuanya memahami dan dapat menjalankan etika usaha dan tata perilaku yang diatur dalam Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) secara benar dan konsisten.
- Apabila pegawai merasa ragu-ragu dengan tindakannya apakah akan melanggar Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*), ia dapat berkonsultasi dengan atasannya.

PELAPORAN:

- Semua insan Perseroan wajib melaporkan apabila menemukan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*).
- Laporan tentang pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) tersebut dapat disampaikan secara tertulis atau lisan.
- Mekanisme pelaporan:
 - Pegawai yang mengetahui adanya kemungkinan pelanggaran terhadap Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) wajib melaporkan secara tertulis dan sebaiknya memberikan identitas diri yang jelas.
 - Laporan akan dipelajari dan dilakukan investigasi untuk mengungkap kebenaran pelanggaran tersebut.
 - Setelah terkumpul bukti-bukti yang cukup maka akan dibuat laporan hasil investigasi dan diberikan ke Direktur Utama untuk diambil tindakan sesuai tingkat pelanggaran dan kewenangan penjatihan sanksi.
- Setiap pegawai yang memberikan laporan yang salah satu atau tuduhan pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang keliru (fitnah) tidak akan dilindungi oleh Perusahaan, sebaliknya akan dikenakan tindakan disiplin.
- Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan pelapor dan melindungi pelapor dan saksi mata yang bermaksud baik dan memastikan bahwa mereka tidak akan menjadi korban balas dendam.

CODE OF CONDUCT ENFORCEMENT: SOCIALISATION, DISSEMINATION & INTERNALISATION

ENFORCEMENT GUIDANCE:

- In the work relationship established by the Company, all employees shall comply with applicable laws, external and internal regulations, Business Ethics and this Code of Conduct and any prevailing internal policies and procedures, with an individual commitment to honesty, loyalty to the Company and transparency in all work-related actions.
- As a commitment statement to this Code of Conduct, all employees must sign 'Compliance Statement'.
- Code of Conduct must be socialised to all Company people to provide understanding & able to enforce it properly & consistently.
- If an employee hesitates whether his/her action breaks Code of Conduct, he/she can consult his superior officer.

REPORTING:

- All Company people must report all forms of Code of Conduct breach.
- Report on Code of Conduct breach can be made written or orally.
- Reporting Mechanism:
 - Employee who knows of possibility of Code of Conduct breach must report in written form & provide clear identity.
 - The report will be studied & investigated to verify the breach.
 - After enough evidence is collected, investigation report will be made & delivered to President Director to decide the punishment according to the breach & authority.
- Every employee who reported falsely will not be given protection by the Company. Instead, disciplinary measures will be given.
- The Company must keep informants & witnesses anonymity & ensuring that they won't be a revenge target.

- f. Pelapor dan saksi mata yang merupakan pegawai akan diberikan perlindungan selama masa tinjauan maupun investigasi bila diperlukan untuk menjaga keamanan dan kepentingan mereka. Perlindungan sementara tersebut dapat termasuk pengalihan tugas sementara ke posisi kerja lain dan jika diperlukan memberikan cuti administratif berbayar untuk jangka waktu tertentu. Jika investigasi masih berlangsung, perpanjangan cuti dapat diajukan untuk periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses investigasi.
- g. Pelapor dan saksi mata yang bukan merupakan pegawai juga berhak mendapatkan perlindungan dari Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Pelapor dan saksi mata yang merupakan pegawai namun terlibat dalam pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) tidak akan terhindar dari tindakan disiplin meskipun mereka untuk mendapatkan perlindungan. Meskipun demikian, sesuai kondisi yang ada, tindakan mereka untuk melapor dan bekerja sama akan menjadi pertimbangan dalam menentukan tindakan disiplin maupun tindakan perbaikan yang dibutuhkan.
- i. Dalam menindaklanjuti pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*), Perusahaan wajib memberlakukan asas praduga tak bersalah.

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI KODE ETIK:

Perseroan akan terus melakukan tahapan sosialisasi dan implementasi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) secara berkesinambungan. Kegiatan sosialisasi akan terus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pihak internal maupun eksternal perusahaan. Sosialisasi terhadap pihak internal dititikberatkan pada adanya pemahaman, timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) secara konsisten. Sosialisasi kepada pihak eksternal ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) yang berlaku di Perseroan.

Penerapan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) akan terus dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran Manajemen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan lainnya.

- f. Informants & witnesses who happen to be employees will be given protection during the duration of analysis & investigation if necessary. Temporary protection can include temporary transfer to other work position & can be given administrative leave. If investigation resumes, leave extension can be proposed for another period needed to finish investigation.
- g. Informants & witnesses who aren't employee also deserve protection from the Company in accordance of rules & regulations.
- h. Informant & witnesses who happen to be employee but involved in Code of Conduct breach will still receive disciplinary measures regardless of protection. However, considering the circumstances, their act of reporting & cooperating will be a leverage to decide the measures taken or any form of correctional action.
- i. In its action on investigating Code of Conduct breach, the Company must always hold on presumed innocence principle.

CODE OF CONDUCT SOCIALISATION & INTERNALISATION:

The Company will continue to take steps on the stages of socialization and implementation of the Guidelines on Business Ethics and Code of Conduct on an ongoing basis. Socialization activities will continue to be carried out continuously to both internal and external parties of the company. Socialization to internal parties is emphasized on understanding as well as raising the awareness and the need to implement the Guidelines on Business Ethics and Code of Conduct consistently. Socialization to external parties is intended to provide an understanding of work procedures in accordance with the Good Corporate Governance Code (*GCG Code*) prevailing in the Company.

Code of Conduct implementation will be enforced with full commitment from the entire management & supported by other stakeholders.





PENGUKURAN TINGKAT PEMAHAMAN KODE ETIK:

Perseroan melakukan pengukuran tingkat pemahaman yang baik terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) oleh Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pegawai perusahaan melalui media survei atau sejenisnya. Kegiatan pengukuran tingkat pemahaman terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dilakukan secara berkala. Pelaksanaan kegiatan pengukuran tingkat pemahaman terhadap panduan ini, terlebih dahulu dilakukan dengan kegiatan sosialisasi atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi, dan pegawai perusahaan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

- Setiap pelanggaran terhadap Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini dianggap tindakan indisipliner dan pelaku pelanggaran akan mendapatkan sanksi.
- Untuk setiap tingkatan pelanggaran terhadap Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dan penegakan sanksinya diatur dalam Surat Keputusan Direksi tersendiri.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK DAN SANKSI YANG DIBERIKAN

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai Perseroan.

CODE OF CONDUCT LEVEL OF UNDERSTANDING MEASUREMENT:

Code of Conduct Level of Understanding is measured by survey media & other ways for the Board of Commissioners & its supporting organs, Directors & employees. This measuring is done periodically. Prior to the process, there will be a socialisation on Code of Conduct to the Board of Commissioners & its supporting organs, Directors, and employees.

SANCTIONS ON CODE OF CONDUCT BREACH

- Every Code of Conduct breach is considered indisciplinary act & the perpetrator will be punished.
- The enforcement of sanctions is regulated in separate Directors Order.

NUMBER OF CODE OF CONDUCT VIOLATIONS AND SANCTIONS IMPOSED

Throughout 2020, there were no cases of violations of the Code of Conduct committed by the Company's employees.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

ANTI CORRUPTION POLICY

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh insan Pelindo 1 senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair* atau adil, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perseroan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

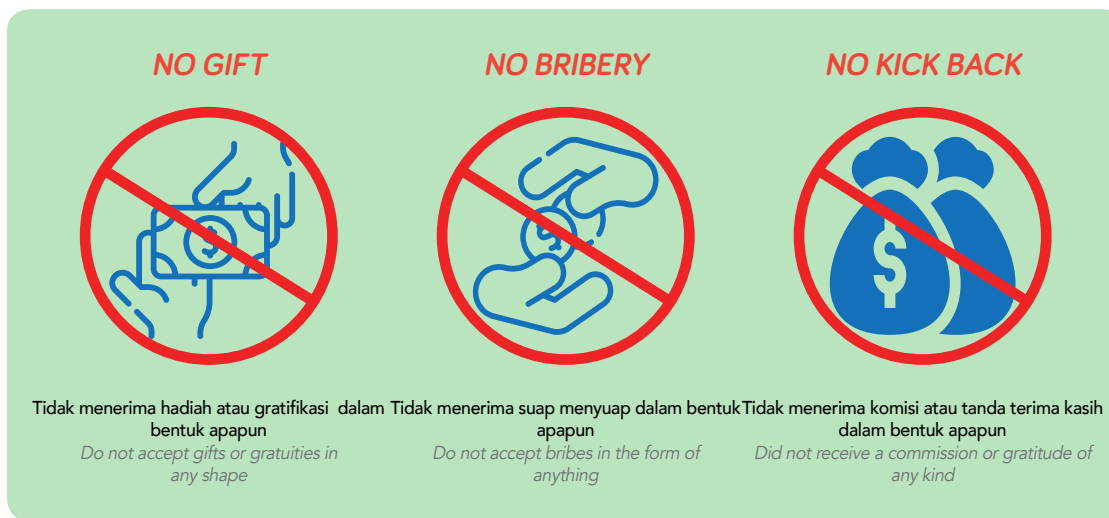
Board of Commissioner, Directors and the entire Pelindo 1 people always hold on fair competition, sportivity, professionalism & good corporate governance. The Company also committed to create healthy business climate, while avoiding actions which will lead to clash of interests, corruption, collusion, nepotism & always prioritising Company's interest above personal, family, groups, or class. The Company also aware on anti corruption policy based on Law No. 20 Year 2001 on amendment of Law No. 31 on 1999 on eradication of corruption.

KOMITMEN ANTI PENYUAPAN

ANTI BRIBERY COMMITMENT

Untuk dapat mendorong penerapan praktik GCG, Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan mengimplementasikan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Seluruh manajemen Pelindo 1 berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai integritas, berpegang teguh pada pedoman GCG, *Board Manual*, Kode Etik serta 3 prinsip "No" (3 No's), yaitu:

To encourage GCG, the Company implemented Anti Bribery Management System by implementing ISO 37001:2016 about Anti Bribery Management System. The entire Pelindo 1 management are committed to put integrity above all else, and also firmly held GCG guidance, Board Manual, Code of Conduct & the 3 "No" principles, namely:



Komitmen Anti Penyuapan Perseroan tertuang dalam Surat Peraturan Direksi Nomor UM.50/40/17/PI.19 TU tanggal 22 November 2019 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Perseroan mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apapun yang bernilai manfaat ekonomi yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau sikap yang memihak, secara tidak sah.

Perseroan melarang Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai/Serikat Pekerja setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan, atau usaha untuk mendapatkan suap. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat pada tindakan disiplin oleh Perseroan termasuk hukuman pemecatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Company's Anti-Bribery Commitment is contained in the Regulation Letter of the Board of Directors No. UM.50/40/17/PI.19 TU of 22 November 2019 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). The Company defines bribes as all forms of money, commissions, loans, gifts, entertainment, facilities and anything of economic value that are given or requested as compensation either directly or indirectly, with the intention of obtaining preferential treatment or favorable attitude, illegally.

The Company prohibits the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees/worker unions from any form of giving, requesting, receiving, or attempting to obtain bribes. Violation of this rule may result in disciplinary action by the Company including employment termination in accordance with applicable regulations.



PENGELOLAAN GRATIFIKASI

GRATUITY MANAGEMENT

Untuk dapat mendorong penerapan praktik GCG secara komprehensif, perseroan memiliki kebijakan pengelolaan gratifikasi yang ditetapkan melalui Surat Edaran Direksi No.UM.50/20/22/PI-19.TU tanggal 16 Mei 2019 tentang Larangan Mengirim atau Menerima Gratifikasi dan Menggunakan Fasilitas Dinas untuk Kepentingan Pribadi terkait Hari Raya Keagamaan.

Secara definisi, Pengertian Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 pasal 12B adalah pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan atau diterima oleh insan Perseroan yang terjadi karena berkaitan dengan jabatan/wewenangnya di Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mempengaruhi independensinya dalam bekerja.

Perseroan melarang setiap insan Pelindo 1 untuk memberikan dan menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung berupa hadiah, suap dan sejenisnya kepada penyelenggara negara, mitra kerja, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perseroan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi dan menggerakkan pihak-pihak tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

insan Perseroan dilarang menerima apapun yang tidak sah dari *stakeholders* dengan maksud untuk memberikan keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan Perseroan, meminta hadiah, *entertainment* atau dalam bentuk lainnya.

BATASAN GRATIFIKASI

1. Batasan Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan. Batasan Pemberian Hadiah, Cinderamata dan/atau Hiburan oleh Komisaris, Direksi dan Pegawai Pelindo 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian hadiah/cendera mata dan/atau jamuan makan dan/atau hiburan, diperbolehkan sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu hal kepada Perseroan yang tidak menjadi hak Perseroan secara hukum. Contoh pemberian dimaksud misalnya jamuan makan, kegiatan olah raga, tiket pertunjukan kesenian, buku, rekaman musik, dan sebagainya.
 - b. Pemberian hadiah/cendera mata dan/atau jamuan makan dan/atau hiburan tidak diperbolehkan dalam bentuk uang tunai.

To encourage the implementation of GCG practices comprehensively, the company has a gratification management policy stipulated through the Circular Letter of the Board of Directors No. UM.50/20/22/PI-19.TU of 16 May 2019 concerning the Prohibition of Sending or Receiving Gratuities and Using Business Facilities for Personal Interests in relation to Religious Holidays.

The definition of Gratuity according to Article 12B of Law No. 20 of 2001 is the act of giving and/or receiving any gift/souvenir and other amenity in or outside the country by any electronic means or any non-electronic means given or received by any person related to the Company in relation with their position/ authority within the Company that may give rise to a conflict of interest and/or compromise their independence in work.

The Company expressly forbids Pelindo 1 People from directly and indirectly giving and promising any gift, bribe and other amenities to state organizers, work partners, and any other party related to the Company, insofar as such gift may be found or suspected to be used to influence and push such parties to carry out or not to carry out something related to their authority that go against their obligations.

The Company's People are forbidden from receiving any illegal kickback from the stakeholders for personal gains against the Company's interests, receiving gifts, entertainment or any other form of gratuity.

LIMITATION OF GRATUITY

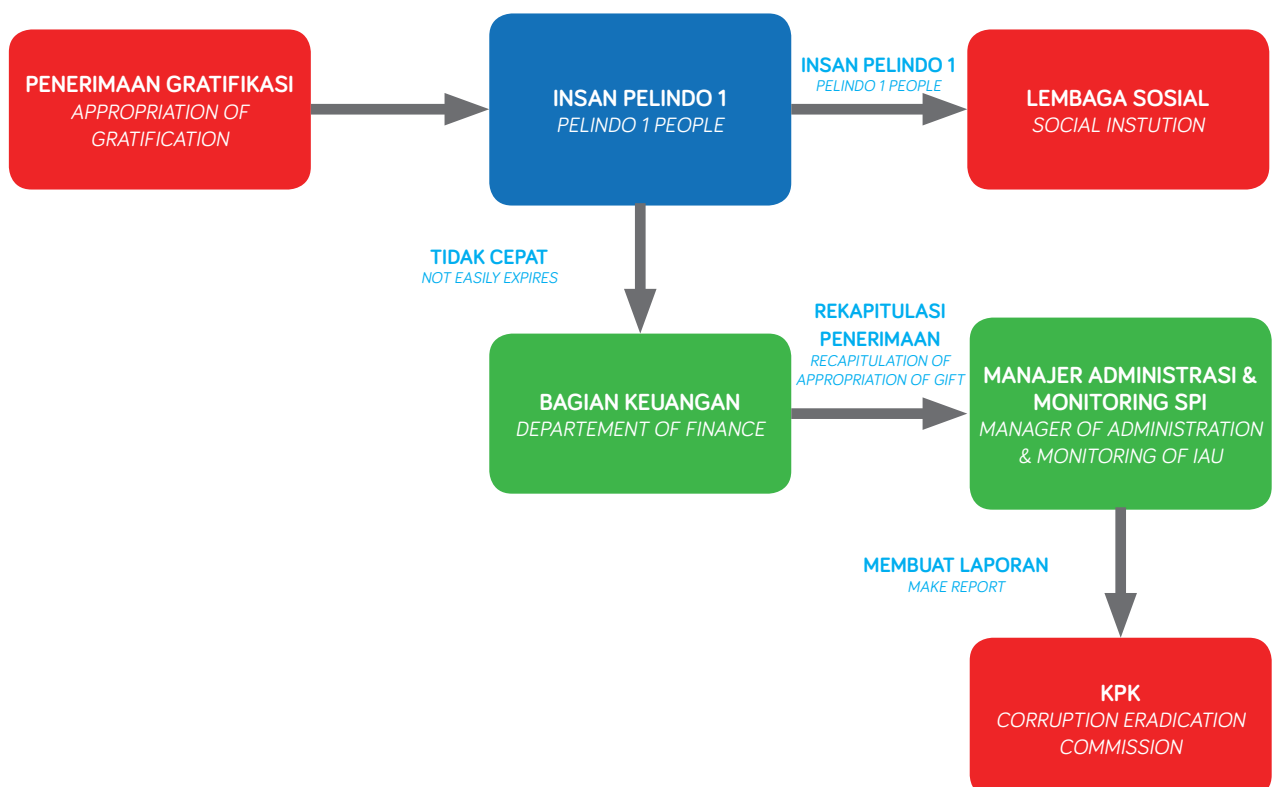
1. Limitation of Gift/Souvenir and Entertainment Appropriation. Limitations of Gift, Souvenir and/or Entertainment Appropriation by the Boards of Commissioners and Directors and Employees of Pelindo 1 are as follows:
 - a. The act of giving of gifts/souvenirs and/or banquets and/or entertainments is allowed as long as such courtesies are intended to foster a good relationship within reasons and carried out as equals with respect without any intention of bribing the concerned party to give something to the Company that is not within its legal rights. The examples of such gifts are among others banquets, sports activities, tickets to an arts show, books, music recordings, etc.
 - b. Gifts/souvenirs and/or entertainment shall not be handed out in cash.

- c. Pemberian hadiah/cendera mata dan/atau jamuan makan dan/atau hiburan tidak diperbolehkan dalam bentuk-bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum.
 - d. Pemberian hadiah/cendera mata berupa barang yang dimaksudkan untuk promosi Perusahaan, wajib mencantumkan logo Perseroan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud.
 - e. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada perusahaan atas undangan resmi dari perusahaan.
 - f. Pemberian hadiah/cendera mata berupa barang/uang/setara uang, diperbolehkan, dalam hal Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Pelindo 1 menghadiri acara Pernikahan, Khitanan, Kelahiran, atau Musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi pihak penerima, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
 - g. Jamuan makan tidak perlu dibatasi, sejauh memenuhi kewajaran dan dilakukan di tempat yang terhormat dan tetap menjaga citra positif perusahaan.
2. Batasan penerimaan hadiah/cendera mata dan hiburan yang boleh diterima Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima hadiah/cendera mata mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut:
 - Logo, nama perusahaan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi perusahaan pemberi dan merupakan benda-benda yang lazim sebagai bentuk promosi perusahaan.
 - Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang tinggi, seperti buku, *compact disc*, dan sebagainya.
 - Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum.
 - b. Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh Pihak Ketiga diperbolehkan, sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Komisaris, Direksi, dan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
- c. Gifts/souvenirs and/or entertainment shall not be handed out in a way that violates ethics and the law.
 - d. Gift/souvenirs in form of Goods intended to promote the Company shall have the logo of the Company as an inseparable part of such Goods.
 - e. The act of giving meeting honorarium to a Third Party is allowed provided that such act of giving is intended as a form of appreciation for the opinions and expertise given to the company at the Company's invitation.
 - f. The act of giving Gifts/Souvenirs in the form of goods/cash/cash equivalents is allowed in case the Commissioners, Directors, and Employees of Pelindo 1 attend a Wedding, Circumcision, Birth or Grief Ceremony, with the maximum allowed value of Rp1,000,000 (one million rupiahs) for each ceremony, provided that such gift is not intended to influence the receiver to do and/or not to do something related to their authority/position.
 - g. Banquets are not limited, provided that they are within reasons and carried out at a respectable place to maintain the positive image of the Company.
2. Limitations of receipt of gifts/souvenirs and entertainment allowed for the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) are as follows:
 - a. Receipt of gifts/souvenirs displaying the logo/name of the benefactor company with the following limitations imposed:
 - The logo and the name of the company/the benefactor of such goods constitutes an inseparable part of a policy/promotion of such company and is a reasonably common goods used for any given company's promotion.
 - Goods without a particularly high financial value, such as books, compact discs, etc.
 - Goods that do not violate any ethics or law.
 - b. Receiving honorarium as a speaker in an official event held by a Third Party is allowed, as appreciation for shared opinions and expertise, provided that such act of giving is not intended to influence the Commissioner, Director, and Employee to do or not to do something related to their authority/position.





- c. Menerima hadiah/cendera mata berupa barang/ uang/setara uang, diperbolehkan, dalam hal Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Pelindo 1 menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Pelindo 1, untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
- d. Menerima hiburan yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi batasan-batasan secara keseluruhan, sebagai berikut:
- Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemberi kepada Komisaris, Direksi dan Pegawai Pelindo 1 atau anggota keluarganya.
 - Bila penolakan terhadap hiburan dimaksud dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan bisnis secara institusi antara Perseroan dengan Pihak Ketiga yang menawarkan hiburan.
 - Tidak mengganggu waktu kerja Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Pelindo 1 yang bersangkutan.
 - Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal Perseroan yang dapat menimbulkan kecurangan dan benturan kepentingan.
- c. Receiving gifts/souvenirs in form of goods/cash/cash equivalents is allowed in case the Commissioner, Director or Employee of Pelindo 1 hold a marriage, circumcision, childbirth, or grief ceremony, with a maximum value of Rp1,000,000 (one million rupiahs) per event, provided that such act of giving is not intended to influence the Commissioner, Director or Employee of Pelindo 1 to do and/or not to do something related to their authority/position.
- d. Receiving entertainment within reasons, fulfilling all the following limitations:
- The entertainment is not given in a continuous manner by the benefactor to the Commissioner, Director or Employee of Pelindo 1 or their family member.
 - The refusal of such entertainment does not jeopardize the institutional business relationship between the Company and the third party offering the entertainment.
 - The entertainment is not offered during the work hours of the Commissioner, Director, or Employee.
 - The benefactor does not discuss disclosure of any internal information which could potentially lead to fraud or conflict of interest.



SOSIALISASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Perseroan melakukan sosialisasi kebijakan gratifikasi dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai batasan-batasan gratifikasi serta mendorong pengelolaan Perseroan yang bersih sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sosialisasi dilakukan melalui tatap muka, seperti forum dan rapat-rapat internal, dan juga melalui saluran komunikasi internal seperti intranet, *website* resmi Perseroan dan media sosial.

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat laporan gratifikasi.

SOCIALIZATION OF THE POLICY ON GRATUITY

The Company carries out socialization of the gratuity policy with the aim of providing an in-depth understanding of the limits of gratuity and encouraging a clean management of the Company in accordance with the Good Corporate Governance principles and the prevailing laws and regulations.

Socialization is carried out face-to-face, such as in forums and internal meetings, as well as through internal communication channels such as the intranet, the Company's official website and social media.

GRATUITY REPORT IN 2020

Throughout 2020, there were no reports regarding gratuity.

INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

INFORMATION ON FUNDING FOR POLITICAL ACTIVITIES

Dalam Surat Peraturan Direksi No.UM.50/40/17/PI.19 TU tanggal 22 November 2019 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), ditegaskan, Kebijakan Perseroan mengharuskan Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang mewakili Perseroan dalam setiap urusan pemerintah dan politik patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan politik. Perseroan tidak akan memberikan sumbangan untuk partai politik manapun kecuali sepanjang dibenarkan oleh undang-undang. Perseroan tidak akan berlaku diskriminatif dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Perseroan tidak akan dan tidak memperbolehkan seorang pun melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Kebijakan Perseroan untuk meminta agar pegawai yang aktif dalam partai politik dan atau menjadi anggota legislatif untuk mengundurkan diri dari Perseroan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

In the Regulation Letter of the Board of Directors No. UM.50/40/17/PI.19 TU of 22 November 2019 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), it was emphasized that the Company's policy requires the Board of Commissioners, the Board of Directors and Employees who represent the Company in every governmental and political affairs to comply with all laws and regulations pertaining to the Company's involvement in political affairs. The Company will not make donations to any political party except to the extent justified by law. The Company will not take discriminatory position in implementing this policy.

The Company will not and will not allow any individual to force others so as limiting the rights of the individual concerned to address their political aspirations. The Company's policy demands employees who are active in political parties and or become members of the legislature to resign from the Company in accordance with the prevailing laws and regulations.





LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

STATE ORGANIZER WEALTH REPORT (LHKPN)

PRINSIP DASAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, Perseroan memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam rangka mendorong agar penerapan GCG, khususnya pada aspek transparansi, dapat berjalan lebih efektif, Perusahaan memiliki kebijakan mengenai penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.31/55/22/PI-17-TU tentang Penetapan Pejabat Struktural Yang Wajib Mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Administrasi Pengelola Data Wajib Laporan LHKPN di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) serta Pedoman Pengisian dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Negara yang disahkan dengan No. UM.50/27/16/PI15.TU.

BASIC PRINCIPLES FOR STATE ORGANIZER WEALTH REPORT

As a State-Owned Enterprise whose stocks are entirely owned by the State, the Company is obliged to observe the binding laws and regulations. One of the regulations grounded in the anti-corruption spirit and internal irregularity control is the obligation to submit State Organizer Wealth Report (LHKPN).

State Officials Wealth Report (LHKPN) is a list of all State Officials' Wealth as outlined in the LHKPN form established by the Corruption Eradication Commission (KPK), as stipulated in the Regulation of the Corruption Eradication Commission No. 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Officials' Wealth, as amended by the Regulation of the Corruption Eradication Commission no. 02 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Corruption Eradication Commission No. 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Officials' Wealth.

Law No. 28 of 1999 on State Organizers Who Are Clean and Free From Corruption, Collusion and Nepotism also obliges every state organizer to report and publish their wealth before and after assuming their position. Article 2 (7) of Law No. 28 of 1999 states that other officials having strategic functions in relation to state organization include the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other structural officers at State Owned Enterprises (BUMN) and Local-Owned Enterprises (BUMD).

In order to drive the implementation of GCG, especially in the aspect of transparency, to run more effectively, the Company has policies regarding the submission of the State Officials Wealth Report, namely the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KP.31/55/22/PI-17-TU on Determination of Structural Officials Obligated to Fill in the State Officials Wealth Report (LHKPN) and Administrator Unit for the LHKPN Mandatory Data within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as well as the Guidelines for Filling and Submission of the State Officials Wealth Report ratified with No.UM.50/27/16/PI15.TU.

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat, dan bertanggung jawab.

PENGELOLA LHKPN

Sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas No. KP.31/74/8/PI-17.TU tanggal 22 Juni 2017 tentang Penetapan Pejabat Struktural yang Wajib Mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Administrator Pengelola Data Wajib Laporan LHKPN di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), maka pengelola LHKPN yang bertugas sebagai Admin Perseroan untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), membuat akun admin, melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar Wajib LHKPN, adalah:

No	Nama Name	Tugas Assignment
1	Helmi, S.E., M.Si	Koordinator Coordinator
2	Satya Wani	Anggota Member
3	Kathrin Teresia Purba, S.E.	Pembantu Anggota Assistant Member

WAJIB LAPOR LHKPN

Berdasarkan Kebijakan Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Wajib Laporan LHKPN di Pelindo 1 adalah:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Pejabat Struktural 1 dan 2 tingkat di bawah Direksi.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2020

Sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. B/1306/LHK.00/01-12/03/2018 tanggal 07 Maret 2018 perihal Penyampaian LHKPN 2018, bahwa penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tiap tahun. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya melalui Aplikasi e-LHKPN <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

LHKPN Audit by the KPK is intended to create State Organizers that adhere to the general principles of state organization that is free of corruption, collusion, and nepotism practices as well as other forms of crime. All State Organizers are expected to report their wealth through the LHKPN form provided by the KPK to be filled out in an honestly, truthfully and completely, therefore the KPK may analyze, evaluate and assess the total amount, type and value of the reported Wealth correctly, quickly, precisely, accurately, and responsibly.

LHKPN ADMINISTRATORS

According to the Assignment Letter No. KP.31/74/8/PI-17.TU of 22 June 2017 concerning Determination of Structural Officials Obligated to Fill in the State Officials Wealth Report (LHKPN) and Administrator Unit for the LHKPN Mandatory Data within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), it is stipulated that the LHKPN administrators who serve as the Company's Admins to run e-LHKPN application within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), create admin accounts, validate the creation/update of the LHKPN Mandatory list, are:

LHKPN MANDATORIES

Based on the Policy concerning Submission and Administration of State Officials Wealth Report (LHKPN), the LHKPN Mandatories in Pelindo 1 are:

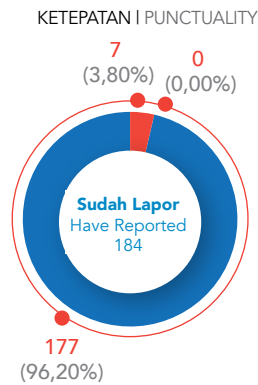
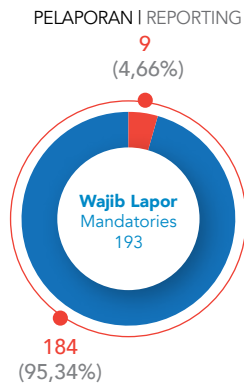
1. The Board of Commissioners;
2. The Board of Directors;
3. Structural Officials 1 and 2 levels under the Board of Directors.

TRANSPARENCY OF LHKPN OF THE COMPANY'S OFFICIALS IN 2020

According to the Circular Letter of the Corruption Eradication Commission (KPK) No. B/1306/LHK.00/01-12/03/2018 of 7 March 2018 regarding the Submission of LHKPN in 2018, it is stipulated that during the LHKPN Mandatories' term of office, the LHKPN shall be submitted out periodically every 1 (one) year on Wealth obtained as of January 1 to December 31 each year. The LHKPN report as referred to above shall be submitted no later than March 31 of the following year through the e-LHKPN Application <https://elhkpn.kpk.go.id/>.



Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat Pelindo 1 Tahun 2020
Disclosure of LHKPN Submission by Pelindo 1 Officials in 2020



Belum Laporkan Have Not Yet Reported	Sudah Laporkan Have Reported	Wajib Laporkan Mandatories
9 4,66%	184 95,34%	193 100,00%

Null Null	Tepat Waktu On Time	Terlambat Late	Sudah Laporkan Have Reported
0 0,00%	177 96,20%	7 3,80%	184 100,0%

- Null | Null
- Belum Laporkan | Have Not Yet Reported
- Sudah Laporkan | Have Reported
- Terlambat | Late
- Tepat Waktu | On Time

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

POLICY ON GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

Dalam rangka menunjang proses pelaksanaan aktivitas bisnisnya, Perseroan memiliki kebijakan terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang terakhir kali diperbaharui pada tanggal 6 Maret 2020. Kebijakan ini juga merupakan salah satu wujud implementasi GCG yakni transparansi untuk mewujudkan kegiatan pengadaan yang efektif, aman, cepat, transparan, efisien, dan akuntabel dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan barang dan jasa untuk mengoptimalkan *value for money*;
2. Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan;
3. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
4. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri;
5. Memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil;
6. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa;
7. Memanfaatkan teknologi informasi;
8. Memberikan kesempatan kepada anak perusahaan dan/atau sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN;
9. Melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif; dan/atau;
10. Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelola risiko.

Pengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan dilakukan oleh Unit Pusat Layanan Pengadaan yang dapat melibatkan Perencana Program dan Konsultan atau Tim *Counterpart* untuk melakukan evaluasi teknis pengadaan barang dan jasa. Sebelum melakukan transaksi, Perseroan senantiasa memastikan setiap *vendor* untuk menandatangani pakta integritas sebagai salah satu persyaratan *vendor* dari pengelola pengadaan. Seluruh proses pengadaan mengikuti prosedur yang berlaku dan sesuai yang telah ditetapkan Pelindo 1.

In order to support its business activities, the Company adopts a special policy with regard to Goods and Services Procurement that was last updated on 6 March 2020. This policy is one channel in which the Company implements GCG, especially with regard to transparency to achieve effective, safe, quick, transparent, efficient, and accountable procurement practices by paying heed to the following aspects:

1. To improve the quality of consolidated planning and goods and services procurement strategy to optimize value for money;
2. To harmonize procurement goals and Company goals;
3. To carry out out a more transparent, competitive and accountable goods, and services procurement;
4. To give priority to local products according to stipulations on local product utilization;
5. To provide opportunity for national business actors and small businesses;
6. To strengthen the institutional and human resource capacity of goods and services procurement;
7. To derive benefit from information technology;
8. To provide opportunity for subsidiaries and/or synergy between SOEs/Subsidiaries/SOE Affiliated Companies;
9. To carry out strategic, modern, innovative procurement; and/or;
10. To improve assessment on procurement and risk management performance.

The organizer of goods and services procurement within the Company is the Central Procurement Unit with help of Program Planners and Consultants or Counterpart Teams to evaluate the technical aspects of Goods and Services procurement. Before finalizing any transaction, the Company ensures that each vendor signs an integrity pact as requirement for said vendor imposed by the procurement organizer. All procurements are to follow the procedure in effect as stipulated by Pelindo 1.





WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perseroan telah mengembangkan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai wadah pengaduan dan pengungkapan informasi secara rahasia dan independen atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Perseroan terhadap peraturan internal yang berlaku seperti penyimpangan dan kecurangan terkait dengan aspek yang diatur dalam *Code of Conduct*, Peraturan Perusahaan, kepatuhan hukum, Anggaran Dasar, perjanjian/kontrak, kerahasiaan Perseroan, kebijakan tentang transaksi benturan kepentingan, dan kejadian penting lainnya yang relevan yang dapat merugikan Perusahaan maupun pemangku kepentingan. Pelaporan ditujukan melalui suatu mekanisme baku untuk selanjutnya diambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut.

PELINDO 1 CLEAN (SALURAN PENGADUAN GRATIFIKASI)

Dalam setiap aktivitas pekerjaan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran. Pedoman Penerapan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tanggal 22 November 2019 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Pedoman Penerapan GCG tersebut ditetapkan untuk mengatur tentang nilai-nilai baru yang ada di lingkungan strategis Perusahaan, Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara antara lain mengenai *whistleblower* dan gratifikasi.

Pedoman pelaksanaan GCG ini mencakup: Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS, Kebijakan GCG, Penerapan GCG atas organ Komisaris, Komite Komisaris, Direksi, Satuan Pengawas Intern (SPI), dan *Corporate Secretary*, Pengungkapan Informasi (*Disclosure*) dan Komitmen.

Apabila diketahui terdapat penyimpangan yang diduga dilakukan oleh Karyawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (karyawan jenjang SVP Setingkat, *General Manager*, Kepala Unit, Asisten Manajer, Manajer Divisi, Staf dan Pelaksana) dapat dilaporkan melalui:

Email: lapor.gratifikasi@pelindo1.co.id dengan melampirkan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan atas penyimpangan yang dilaporkan tersebut.

The Company has developed a Whistleblowing System (WBS) as a confidential and independent means of complaint making and information disclosure for any violation committed by the Company's employees of the prevailing internal regulations, such as irregularity and fraud related to aspects subject to the Code of Conduct, Company Regulations, legal compliance, Articles of Association, agreement/contract, Company confidentiality, policies on transactions with conflict of interest, and other significant events that may damage the Company or the stakeholders. The reporting is carried out through an official mechanism, after which the violation shall be followed up on.

PELINDO 1 CLEAN (GRATUITY COMPLAINT CHANNEL)

In any of its activities, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) observes the Good Corporate Governance principles as follows: Transparency, Accountability, Responsibility, Self-Sufficiency and Fairness. Guidance on GCG Implementation within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is stipulated in Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dated 22 November, 2019 regarding the Implementation of Good Corporate Governance Practices at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). The Guidance was established to oversee the values in the Company's strategic environment, namely Ministry of SOE's Decision which sets for rules on, among others, whistleblowers and gratuities.

The Guidance on GCG Implementation governs: Right and Obligations of Shareholders/GMS, GCG Policies, GCG Implementation on Board of Commissioners, Committees of Board of Commissioners, Board of Directors, Internal Control Unit (SPI), and Corporate Secretary, Information Disclosure and Commitment.

If any irregularity is found for which a PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is proven responsible (SVP, General Manager, Unit Head, Assistant Manager, Division Manager, Staff and Officials, or equivalent), such irregularity can be reported to:

Email: lapor.gratifikasi@pelindo1.co.id with attachment of evidences such as documents related to the suspected irregularity.

Atau dengan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar langsung atau melalui pos dengan alamat:

Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

u.p Pengelola Pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan.

Atau dengan mengisi *form* yang ditayangkan di *website* resmi Pelindo 1, yaitu <https://www.pelindo1.co.id/id/gcg/Pages/Pelindo-1-Clean.aspx>.

SOSIALISASI DAN EVALUASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perseroan melaksanakan sosialisasi *Whistleblowing System* secara berkelanjutan kepada seluruh insan Perseroan dan secara berkala akan melaksanakan pemutakhiran dan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan. Sosialisasi ini dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi penerapan GCG.

JAMINAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Perseroan berkomitmen memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor dengan menyediakan fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, *email*) yang independen, bebas, dan rahasia bagi pelapor, agar terlaksana proses pelaporan yang aman. Selain itu, WBS juga menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pelapor dan anggota keluarga atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Informasi pelaksanaan tindak lanjut laporan akan disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang identitasnya lengkap.

PENANGANAN PENGADUAN

Perseroan berkomitmen untuk menindaklanjuti Laporan/pengaduan yang masuk dengan memverifikasi terlebih dahulu laporan yang masuk sebelum diputuskan kelanjutannya.

PENGELOLA PELAPORAN PELANGGARAN

Pelaporan pelanggaran ditujukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional oleh Unit Internal Auditor sebagai Unit Pengelola Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS) sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP.02.03/00/01/2014/082 tanggal 22 Januari 2014.

JUMLAH PENGADUAN

Di sepanjang tahun 2020 Perseroan tidak mendapatkan adanya laporan yang masuk melalui mekanisme WBS yang tersedia.

Or by an official letter to the Board of Directors, with an in-person delivery or by mail to:

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Board of Directors

c/o Reporting Official on suspected irregularity at the Company Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan.

Or by filling out the form on Pelindo 1 official website: <https://www.pelindo1.co.id/id/gcg/Pages/Pelindo-1-Clean.aspx>.

WHISTLEBLOWING SYSTEM DISSEMINATION AND EVALUATION

The Company disseminate its whistleblowing system continually to the parties related to the Company and regularly updates and improves the system in line with the Company's business development. Such a dissemination is carried out along with GCG implementation dissemination.

WHISTLEBLOWER PROTECTION PROGRAM

The Company is committed to protect the whistleblower by providing independent, free and confidential means of reporting (telephone, mail, email) in order to have a safe means of reporting. WBS also keeps confidential the identity of the whistleblower to protect the whistleblower and their family members from retaliatory actions by the reported person or organization. Information on the report follow-up procedure will be given to whistleblowers who provide complete identity.

COMPLAINT HANDLING

The Company is committed to follow up any report/complaint by verifying the report before deciding on the matter.

ORGANIZER OF VIOLATION REPORTING

The violation reporting using an official mechanism and is managed professionally by Internal Audit Unit as Whistleblowing System Organizing Unit in accordance with Board of Directors Decision Letter No. KEP.02.03/00/01/2014/082 of 22 January 2014.

NUMBER OF COMPLAINTS

Throughout 2020 the Company did not receive any incoming reports through the available WBS mechanism.





KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Peseroan menyadari keberagaman latar belakang profesi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat memperkuat kolektivitas dan memberikan perspektif yang luas dalam merumuskan langkah-langkah strategis bagi Perseroan.

The Company understands that diversity in the professional backgrounds of the members of the Boards of Commissioners and Directors may add to the collectivity and perspective in deciding the strategic measures of the Company.

Pada tahun 2020, keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana yang terlampir pada tabel di bawah ini.

In 2020, the diversity in the professional backgrounds of the members of the Boards of Commissioners and Directors is reflected in the diverse educational background, work experience, age, and gender, as can be seen in the table below.

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Achmad Djamiludin Komisaris Utama President Commissioner	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> (1980-1984) Military education at Indonesian Naval Academy (1995) Indonesian Naval School of Technology (STTAL) <i>Batch</i> 14 and Indonesian Naval School of Staff and Commando (Seskoal) <i>Batch</i> 35 (1999) Sesko TNI <i>Batch</i> 35 (2013) National Defense Institute/Lemhanas PPSA (1980-1984) Military education at Indonesian Naval Academy (1995) Indonesian Naval School of Technology (STTAL) <i>Batch</i> 14 and Indonesian Naval School of Staff and Commando (Seskoal) <i>Batch</i> 35 (1999) Sesko TNI <i>Batch</i> 35 (2013) National Defense Institute/Lemhanas PPSA 	<ul style="list-style-type: none"> Asisten Pateksen KRI Nala 0363 (1984) Kajur TMNI STAAL Kodikal (1996) Kasubpok Sista Sahli Kasal E Teklog (2002) Komandan STTAL Kobangdikal (2011) Bandep Lingstra Regional Dejiandra Setjen Wantannas (2012) Waasrena Kasal (2014) PA Sahli Tk.II Bid. Intekmil Panglima TN (2016) Staf Khusus Panglima TNI (2017) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam (2017) Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (2019) Assistant Pateksen KRI Nala 0363 (1984) Kajur TMNI STAAL Kodikal (1996) Kasubpok Sista Sahli Kasal E Teklog (2002) STTAL Kobangdikal Commander (2011) Bandep Lingstra Regional Dejiandra Setjen Wantannas (2012) Waasrena Kasal (2014) PA Sahli Tk.II Bid. Intekmil Panglima TN (2016) Panglima TNI Special Staff (2017) Deputy for National Defence Coordination at Kemenko Polhukam (2017) Secretary General at National Resilience Council of Indonesia (2019) 	Militer Military	58	Laki-laki Male

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Ahmad Perwira Mulia Tarigan Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Teknik Geodesi, Institut Teknologi Bandung (1990) • Magister (S2) Coastal and Oceanographic Engineering, University of Florida (1996) • Doktor (S3) Coastal Engineering/Civil Engineering, Universiti Teknologi Malaysia (2002) • (1990) Bachelors Degree in Geodetic Engineering at Institut Teknologi Bandung • (1996) Masters in Coastal Engineering at University of Florida, USA • (2020) Doctorate in Coastal Engineering/Civil Engineering at Universiti Teknologi Malaysia 	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Pengajar Departemen Teknik Sipil USU (1992) • Sekretaris Departemen Teknik Sipil USU (2005-2008) • Kepala Laboratorium Ilmu Ukur Tanah dan Geospasial Departemen Teknik Sipil USU (2009-2010) • Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik USU (2010-2016) • Ketua Program Studi S2/S3 Fakultas Teknik USU (2017-Sekarang) • Teaching Staff at Civil Engineering Dept. of USU (1992) • Secretary at Civil Engineering Dept. of USU (2005-2008) • Head of Surveying and Geospatial Laboratorium at Civil Engineering Dept. of USU (2009-2010) • Vice Dean 3 at Engineering Faculty of USU (2010-2016) • Head of Masters/Doctorate Sutides Engineering Faculty of USU (2017-Now) 	Teknik Geodetic, dan Teknik <i>Civil</i> Geodetic Engineering and Civil Engineering	54	Laki-laki Male
Herbert Timbo Parluhan Siahaan Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Hukum, Universitas Indonesia (1979) • (1979) Bachelor of Law at the Faculty of Law of Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Redaktur Pelaksana Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) (2002-2003) • Direktur Utama Majalah Pilar (2003-2004) • Pemimpin Redaksi Jak TV (2005-Sekarang) • Managing Partner di Kantor Hukum Timbo Siahaan & Associates (2010-sekarang) • Komisaris Utama PT Citilink Indonesia (2015-2018) • Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Tbk (2018-2020) • Managing Editor at Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) (2002-2003) • President Director at Pilar Magazine (2003-2004) • Chief Editor at Jak TV (2005-Sekarang) • Managing Partner at Timbo Siahaan & Associates Law Firm (2010-sekarang) • President Commissioner at PT Citilink Indonesia (2015-2018) • Independent Commissioner at PT Garuda Indonesia Tbk (2018-2020) 	Hukum Laws	61	Laki-laki Male



Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Irma Suryani Chaniago Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Diploma, Akademi Manajemen Perusahaan Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (AMP/YKPN) Yogyakarta (1990) Ekonomi Manajemen STIE Jakarta (2001) (1986-1990) Diploma in Management at Akademi Manajemen Perusahaan Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (AMP/YKPN) Yogyakarta (1999-2001) Bachelors Degree in Management from STIE Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Cabang PT Kemusuk Tri Dharma (1990-1992) General Affair PT Jakarta International Container Terminal (1998-2014) Anggota DPR/MPR RI Fraksi Nasdem (2014-2019) Direktur Utama PT Mainjau Putra Persada (2011-sekarang) Branch Head at PT Kemusuk Tri Dharma (1990-19920) General Affairs at PT Jakarta International Container Terminal (1998-2014) Member of DPR/MPR RI, Nasdem Fraction (2014-2019) President Director at PT Mainjau Putra Persada (2011-now) 	Ekonomi Economics	54	Perempuan Female
Winata Supriyatna Komisaris Commissioner	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen, Universitas Padjajaran (1984) Magister (S2) Manajemen, Universitas Satyagama (1999) (1984) Bachelor's Degree in Management from Universitas Padjajaran (1999) MBA from Universitas Satyagama 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Bagian Anggaran Pembangunan di Biro Anggaran Sekretariat Sekretaris Negara (1999) Kepala Rumah Tangga Kepresidenan (2011) Kepala Sekretaris Presiden (2011) Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Otonomi Daerah Kementerian Sekretariat Negara (2014) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Maritim, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Sekretaris Negara (2015) Head of Development Budget Division at the Budget Bureau of State Secretary (1999) Head of Presidential Housekeeping (2011) Head of Presidential Secretary (2011) Expert Staff on State Apparatus and Regional Autonomy at Ministry of State Secretariat (2014) Expert Staff on Economics, Maritime Affairs, Human Development and Culture at Ministry of State Secretariat (2015) 	Ekonomi Economics	61	Laki-laki Male

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Arman Depari Komisaris Commissioner	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan militernya di Akademi Polisi (1985) • Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (1996) • Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (2000) • Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (2009) • (1985) Military Education at Police Academy • (1996) Indonesian School of Police Science (PTIK) • (2000) Sespimol • (2009) Sespati 	<ul style="list-style-type: none"> • Ipda (1985) • AKP (1991) • AKBP (2000) • Kasatkrimum Polda Riau dan Polda Sumatera Utara, dan diangkat sebagai Kapolres Langkat (2002) • Kaden 88 / AT Polda Sumatera Utara dan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya (2006) • Dirlipidnarkoba Bareskrim Polri (2009) • Kapolda Kepulauan Riau (2014) • Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI (2016) • (1985) Ipda • (1991) AKP • (2000) AKBP • (2002) Kasatkrimum at Riau dan North Sumatra Utara Regions, and appointed Chief of Langkat Resort Police • (2006) Kaden 88 / AT North Sumatra Regional Police and Dirresnarkoba at Polda Metro Jaya • (2009) Dirlipidnarkoba at Bareskrim Polri • (2014) Chief at Riau Island Regional Police • (2016) Deputy for Counterdrug at National Anti Narcotics Agency (BNN) RI 	Militer Military	58	Laki-laki Male

Direksi Board of Directors

Dani Rusli Utama Direktur Utama President Director	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1994) • Magister (S2) Manajemen Infrastruktur, Yokoama National University (1999) • (1994) Bachelor's Degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung • (1999) Masters in Infrastructure Management from Yokoama National University, Japan 	<ul style="list-style-type: none"> • General Manager Cabang Pelabuhan Palembang PT Pelabuhan Indonesia II (2009-2010) • Direktur SDM PT Jakarta International Container Terminal (2010-2011) • Kepala Biro Strategi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2011-2012) • Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2012-2015) • Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (2015-2016) • Direktur Teknik & Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2019) • Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020) • General Manager at Palembang Port Branch, PT Pelabuhan Indonesia II (2009-2010) • Director of Human Resources at PT Jakarta International Container Terminal (2010-2011) • Head of Corporate Strategy Bureau at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2011-2012) • President Director at PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2012-2015) • President Director at PT Jakarta International Container Terminal (2015-2016) • Director of Engineering & Risk Management at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2019) • Director of Engineering at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020) 	Teknik Sipil dan Manajemen Infrastruktur Civil Engineering and Infrastructure Management Engineering	49	Laki-laki Male
---	-----------	---	---	--	----	-------------------



Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Ridwan Sani Siregar Direktur Operasional & Komersial Director of Operations & Commercial	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara (1995) • Magister (S2) Manajemen, Universitas Sumatera Utara (2001) • Bachelor's Degree (S1) in Economics, Universitas Islam Sumatera Utara (1995) • MBA (S2), Universitas Sumatera Utara (2001) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer Logistik di Cabang Belawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2010-2014) • Senior Manager Bina Usaha dan General Manager Belawan International Container Terminal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2014-2015) • SVP Management Asset PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2015-2019) • Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas (2019-2020) • Logistics Managet at Belawan Port Branch, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2010-2014) • Senior Manager of Business Development and General Manager at Belawan International Container Terminal, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2014-2015) • SVP for Asset Management, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2015-2019) • President Director, PT Prima Terminal Petikemas (2019-2020) 	Ekonomi dan Manajemen Economics and Management	50	Laki-laki Male
Hosadi Apriza Putra Direktur Teknik Director of Engineering	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) fakultas, Institut Teknologi Bandung (1996) • Bachelor's Degree from Institut Teknologi Bandung (1996) 	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten Manajer Fasilitas di BICT (2011-2012) • Manajer Teknik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pekanbaru (2012-2013) • Sekretaris PMO Pengembangan TPK Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung (2013) • Koordinator PMO Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2013-2014) • Direktur Utama PT Prima Multi Terminal (2014-2018) • Assistant Manager of Facilities at BICT (2011-2012) • Manager of Engineering at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Pekanbaru Branch(2012-2013) • Secretary of PMO for Development of TPK Belawan and Port of Kuala Tanjung (2013) • Coordinator of PMO for Development of Port of Kuala Tanjung PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2013-2014) • President Director at PT Prima Multi Terminal (2014-2018) 	Teknik Engineering	48	Laki-laki Male

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Prasetyo Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Director of Business Transformation and Development	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Teknik Arsitektur, Institut Teknologi Surabaya (1994) • Master of Business Administration, SBM ITB (2019) • (1994) Bachelor's Degree in Architectural Engineering from Institut Teknologi Sepuluh November • (2019) Master of Business Administration from SBM Institut Teknologi Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer Teknik Cabang Gresik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2009) • Ass. Senior Manager Perencanaan Usaha (2010) • Senior Manager Pemeliharaan Bangunan dan Ass. Kepala Biro Perencanaan (2011) • General Manager Pelabuhan Benoa dan Senior Manajer Supervisi Teknik (2013) • Direktur Utama PT Pelindo Properti Indonesia (2014) • Kepala Biro Perencanaan Strategis dan Kinerja Korporat (2017-2020) • Manajer of Engineering at Gresik Branch, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2009) • Ass. Senior Manager of Business Planning (2010) • Senior Manager of Building Maintenance and Ass. Head of Planning Bureau (2011) • General Manager of Port of Benoa and Senior Manajer of Engineering Supervision (2013) • President Director at PT Pelindo Properti Indonesia (2014) • Head of Bureau for Strategic Planning and Corporate Performance (2017-2020) 	Teknik Arsitektur dan Administrasi Bisnis Architectural Engineering and Business Administration	50	Laki-laki Male
Henry Naldi Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Director of Human Resources & General Affairs	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1992) • Magister (S2) Manajemen, Universitas Sumatera Utara (2001) • Bachelor's Degree (S1) in Civil Engineering, Institut Teknologi Bandung (1992) • MBA (S2), Universitas Sumatera Utara (2001) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer Teknik Cabang Pelabuhan Belawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2003-2006) • Pengawas Bidang pada Satuan Pengawas Intern (2006-2008) • Senior Manajer Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2008-2009) • Senior Manajer Teknologi Informasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2009-2015) • Kepala Strategic Management Office PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2015-2019) • SVP Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020) • SVP Manajemen Transformasi (2020-Sekarang) • Engineering Manager at Belawan Port Branch, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2003-2006) • Supervisor at Internal Control Unit (2006-2008) • Senior Manager of Risk Management and Quality Management at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2008-2009) • Senior Manager of Information Technology at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2009-2015) • Head of Strategic Management Office, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2015-2019) • SVP for Transformation Management and SVP for Business Planning and Development at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020) 	Teknik Sipil dan Manajemen Civil Engineering and Infrastructure Management	53	Laki-laki Male





Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Roy Leonard Direktur Keuangan Director of Finance	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Indonesia (2002) • Bachelor's Degree (S1) in Economics, Universitas Indonesia (2002) 	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor KPMG (2002-2003) • Assurance Manager Pricewaterhouse Coopers (2008-2014) • Senior Manager PricewaterhouseCoopers (masa menjabat) • CFO/Executive Vice President Lazada Group Indonesia (2014-2015) • CFO New Priok Container Terminal One, Indonesia (2015-2020) • Auditor at KPMG (2002 - 2003) • Assurance Manager and Senior Manager at PricewaterhouseCoopers(2008 - 2014) • CFO/Executive Vice President at Lazada Group Indonesia (2014-2015) • CFO at New Priok Container Terminal One, Indonesia (2015 - 2020) 	Ekonomi Economics	42	Laki-laki Male

TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

TRANSPARENCY IN BAD GOVERNANCE PRACTICES

Perseroan senantiasa melaksanakan kegiatan dan aktivitas operasionalnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2020 tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap praktik Tata Kelola Perusahaan di Perseroan, seperti perkara tindak pidana korupsi yang dihadapi oleh Direksi, Dewan Komisaris, pencemaran lingkungan, adanya permohonan pailit, pembekuan usaha utama Perseroan dan sebagainya.

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Di sepanjang tahun 2020, tidak ada laporan atas aktivitas perusahaan yang mencemari lingkungan.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Perseroan senantiasa memegang teguh komitmen dalam memenuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya perpajakan.

Hingga tahun 2020, Perseroan senantiasa taat pajak. Perseroan berkontribusi terhadap negara melalui pembayaran pajak. Jumlah setoran pajak yang diberikan Perseroan di tahun 2020 sebesar Rp597,94 miliar, mengalami penurunan 31,52% dari pembayaran pajak di tahun 2019 sebesar Rp873,19 miliar.

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan senantiasa mengacu dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Standar Akuntansi Keuangan.

KASUS TERKAIT DENGAN BURUH DAN KARYAWAN

Tidak ada kasus dengan buruh dan karyawan di sepanjang Tahun 2020 Seluruh pengelolaan Sumber Daya Manusia

The Company endeavors to carry out its activities and operations in accordance with the prevailing laws and regulations. No violation to Good Corporate Governance principles was recorded in 2020: no instance of corruption practices of the Boards of Directors and Commissioners, environmental pollution, bankruptcy claim, revocation of the license Company's main business activity took place in 2020.

REPORT ON ENVIRONMENTALLY DAMAGING ACTIVITY BY THE COMPANY

Throughout 2020, no environmentally damaging activity by the Company was reported.

DISCLOSURE ON TAX COMPLIANCE

The Company is committed to observe the prevailing laws and regulations, including its obligations related to taxes.

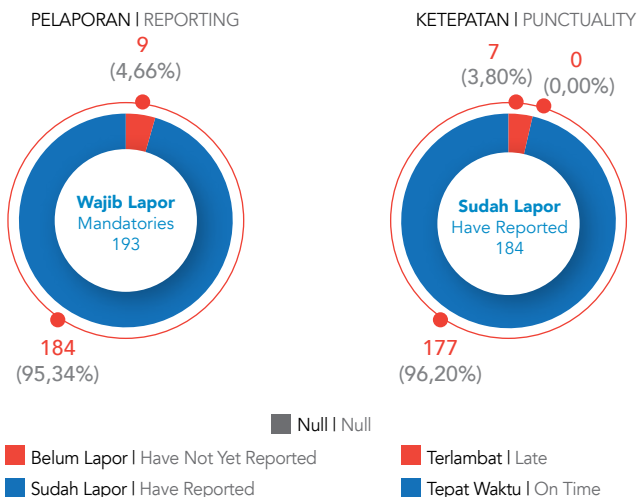
Until 2020, the Company has always been tax-compliant. The Company contributes to the country through tax payments. The total tax paid by the Company in 2020 amounted to Rp597.94 billion, a 31.52% decrease from tax payments in 2019 of Rp873.19 billion.

NON-CONFORMITY OF ANNUAL REPORTS AND FINANCIAL STATEMENTS WITH THE PREVAILING REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

The Company's Annual Reports and Financial Statements refer to and conform to the prevailing regulations, and Financial Accounting Standards.

CASES RELATED TO WORKERS AND EMPLOYEES

No legal case related to workers and employees occurred in 2020. The Company's Human Resources Management in its



Belum Laporan Have Not Yet Reported	Sudah Laporan Have Reported	Wajib Laporan Mandatories
9 4,66%	184 95,34%	193 100,00%

Null Null	Tepat Waktu On Time	Terlambat Late	Sudah Laporan Have Reported
0 0,00%	177 96,20%	193 100,00%	184 100,0%



dalam kegiatan operasional dan usaha Perseroan senantiasa memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; termasuk memenuhi standar praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja.

PENGUNGKAPAN SEGMENT OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perseroan telah menerapkan PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi dan untuk kepentingan Manajemen, Perseroan meyakinkannya menurut pengelompokan (segmen) jenis usaha dan berdasarkan geografis, sebagaimana disampaikan dalam Laporan Keuangan Audited tahun buku 2020 catatan "Informasi Segmen".

Segmen Operasi berdasarkan jenis usaha terdiri dari:

1. Petikemas;
2. Kepelabuhanan;
3. Lainnya.

Segmen Operasi berdasarkan wilayah geografis terdiri dari:

1. Sumatera Utara;
2. Riau dan Kepulauan Riau;
3. Aceh.

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Laporan Tahunan digital Perusahaan baik yang disampaikan kepada Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs resmi Perseroan, telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang diterbitkan oleh Perseroan.

business and operations always conforms to the prevailing laws and regulations; including therein standard Labor and Occupational Health, and Safety practices.

DISCLOSURE ON OPERATION SEGMENT IN FINANCIAL STATEMENT

The Company's Financial Statement implements PSAK No. 5 (Adjustment 2015) on Operation Segments and for the interest of the Management, the Company presented such statement in categories based on business type (segment) and geographical locations, as described in the Audited Financial Statement of financial year 2020 in the "Segment Information" note.

The Operation Segments categorized by business type consist of:

1. Container;
2. Port;
3. Others.

The Operation Segments categorized by geographical location consist of:

1. North Sumatra;
2. Riau and Riau Islands;
3. Aceh.

CONFORMITY OF ANNUAL REPORT BOOK AND DIGITAL ANNUAL REPORT

The Company's digital annual report as presented to the Shareholders and Stakeholders and uploaded on the Company's official website conform to the Annual Report book published by the Company.





06

— Tanggung Jawab Sosial Perusahaan —

Corporate Social Responsibility

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama seluruh Pemangku Kepentingan. Perseroan terus berupaya merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam seluruh kegiatan usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan seraya menjunjung tinggi prinsip-prinsip praktik usaha yang baik.

The Company has a high commitment to build a better quality of life with all Stakeholders. The Company constantly strive to realize its social and environmental responsibilities in all business activities to actualize sustainable development goals while upholding the principles of good business practices.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Saat ini para pelaku bisnis dituntut untuk tidak hanya memikirkan *profit* semata, namun juga memperhatikan lingkungan sekitar dan turut mengembangkan sosial kemasyarakatannya dalam bentuk program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yakni suatu konsep bahwa sebuah organisasi, memiliki bentuk tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingannya dalam segala aspek operasional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pelindo 1 berkomitmen untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai bagian dari kontribusi Perseroan terhadap pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, lingkungan maupun Perseroan yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan dalam menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi dengan aspek sosial kemasyarakatan, lingkungan, dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan. Melalui program CSR diharapkan terjalin kesinambungan antara Perseroan dengan program pembangunan berkelanjutan. Sehingga Perseroan sangat menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan ini harus didukung.

Dalam mengimplementasikan CSR, Perseroan mengadopsi ISO 26000 yang merupakan Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*). Panduan ini merupakan salah satu referensi yang menjadi standar di dunia internasional. Di Indonesia, ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

Di dalam ISO 26000 terdapat 7 (tujuh) aspek yang digunakan untuk memastikan keberlanjutan aktivitas Perseroan, subjek yang terdapat di dalam ISO 26000 yang meliputi:

- Tata kelola organisasi yang baik;
- Penegakkan hak asasi manusia;
- Praktik ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan;
- Pengelolaan kegiatan perusahaan terhadap Lingkungan;
- Prosedur operasi yang wajar;
- Tanggung jawab terhadap konsumen;
- Pelibatan dalam pengembangan masyarakat.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITMENT AND PROGRAM IMPLEMENTATION POLICY

In this age of ours, business actors are expected not to focus only on profit, but also on the surrounding environment and on community development in the form of Corporate Social Responsibility (CSR) programs, a concept according to which organizations are responsible towards its stakeholders in every facet of its operation, including the economic, social, and environmental aspects.

Pelindo 1 is committed to implement its Corporate Social Responsibility programs as part of its contribution towards national economic development, as well as to improve the living standards of the community, environment and the Company itself in accordance with the Company's vision and mission to create a balance between the economic aspect and the social, environmental, and labor right aspects. Through its CSR programs, the Company expects to achieve synergy between the Company itself and sustainable development programs. The Company understands that sustainable development is a noble goal to be supported.

The Company adopts Guidance on Social Responsibility as provided by ISO 26000 in its CSR program implementation. The guidance is one of the standard international references on Corporate Social Responsibility. ISO 26000 was ratified by the Indonesian government in 2010 and established as National Standard in 2012.

ISO 26000 lists 7 (seven) core subjects to ensure a company's sustainability as follows:

- Good organizational governance;
- Human rights enforcement;
- Humane and fair labor practices;
- Management of the environmental aspects of company's activities;
- Fair operating practices;
- Responsibility towards the customers;
- Community involvement and development.





**SUBYEK INTI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
BERDASARKAN ISO 26000**
CORE SUBJECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
ACCORDING TO ISO 26000



Perseroan percaya bahwa bisnis akan berkelanjutan apabila memberikan perhatian yang seimbang kepada aspek keuntungan (*profit*), kemanusiaan (*people*) dan lingkungan (*planet*). Oleh karena itu Perseroan menjadikan CSR sebagai bagian tidak terpisahkan dari operasional Perseroan untuk mendukung keberlanjutan usaha.

It is in the Company's belief that sustainable business can be achieved by giving equal consideration towards profit, people and planet. Therefore, the Company establishes CSR as an inseparable part of its operation to achieve business sustainability.

**PRINSIP DASAR PELAKSANAAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

Dasar pelaksanaan program CSR Perseroan dijalankan berdasarkan amanat yang telah tertuang dalam aspek hukum, di antaranya sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil;
- Peraturan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 Tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 Tanggal 23 Februari 2012 Tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 Bulan September 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007;

**GROUNDS FOR CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION**

The Company's CSR program implementation is carried out in accordance with the legally-binding mandates, including:

- Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Corporate Social and Environmental Responsibilities;
- Law No. 9 of 1995 on Small Enterprises;
- Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. KEP-100/MBU/2002 of 4 June 2002 on Financial Health Assessment of State-Owned Enterprises
- Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-05/MBU/2007 of 27 April 2007 on Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Enterprises and Environmental Assistance Program;
- Minister of State-Owned Enterprises Circular Letter No. SE-02/MBU/Wk/2012 of 23 February 2012 on Establishment of Accounting Guidance of Partnership and Environmental Assistance Programs;
- Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-08/MBU/2013 of September 2013 on the Fourth Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-05/MBU/2007;

- Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership and Environmental Assistance Programs as amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 of 16 December 2016 on Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on State-Owned Enterprise Partnership and Environmental Assistance Programs, Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 on Second Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on State-Owned Enterprise Partnership and Environmental Assistance Programs, Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/04/2020 of 2 April 2020 on Third Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on State-Owned Enterprise Partnership Program and Environmental Assistance Program.

METODE DAN LINGKUP DUE DILLIGENCE TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN

Pelindo 1 senantiasa melakukan identifikasi dan penelaahan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan oleh setiap aktivitas bisnis yang dijalankan Perseroan. Metode dan lingkup *due diligence* dilakukan dengan melibatkan unit terkait guna memetakan skala prioritas atas isu-isu keberlanjutan yang diangkat. Hasil metode *due diligence* ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi Perseroan dalam menyusun kebijakan dan program yang dirancang khusus untuk membidik dampak-dampak tersebut. Perencanaan program harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan nyata pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan.

Lingkup pelaksanaan program CSR Pelindo 1, merujuk pada kebijakan yang mengutamakan 7 (tujuh) aspek sebagaimana yang tercantum dalam ISO 26000. Adapun kebijakan Perseroan dan program CSR di tahun 2020 terkait ISO 26000, yang merupakan lingkup *due diligence* terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas Perseroan adalah sebagai berikut:

DUE DILIGENCE METHOD AND SCOPE ON THE SOCIAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

Without fail, Pelindo 1 identifies and analyze the social, economic, and environmental impacts resulting from any business activity carried out by the Company. Due diligence method and scope are applied involving the relevant unit to map out the priority scale concerning the raised sustainability issues. The results of such due diligence method are then utilized as a reference for the Company in formulating policies and programs specifically aimed at the impacts. Programs are to be planned according to the real needs of the stakeholders with consideration to the Company's ability.

Pelindo 1 CSR program implementation scope is based on the 7 (seven) aspects as specified by ISO 26000. The Company's policies and CSR programs in 2020 as guided by ISO 26000 concerning the due diligence scope on the social, economic, and environmental impacts of the Company's activities are as follows:





Tata Kelola Organisasi yang Baik Good Corporate Governance	Penegakkan Hak Asasi Manusia Human Rights Enforcement	Praktik Ketenagakerjaan yang Manusiawi dan Berkeadilan Humane and Fair Labor Practices	Pengelolaan Kegiatan Perusahaan terhadap Lingkungan Management of Environmental Aspects of Activities	Prosedur Operasi yang Wajar Fair Operating Practices	Tanggung Jawab terhadap Konsumen Responsibility towards the Customers	Pelibatan dalam Pengembangan Masyarakat Involvement in Community Development
Kebijakan Perusahaan Menjalankan Good Corporate Governance The Company policy of adherence to Good Corporate Governance	Program CSR Fokus Bantuan Kepada Warga Masyarakat Terdampak COVID-19 di Bidang Ekonomi CSR Program focusing on relief for COVID-19 afflicted community	Kebijakan Perusahaan Memprioritaskan Keselamatan dan Kesejahteraan Pekerja Prioritizing workers' health and safety	Program CSR Mendukung Perlindungan terhadap Ekosistem Alam Pesisir CSR Program supporting conservation of coastal natural ecosystems	Program CSR Program Kemitraan yang Transparan, Adil, dan Bertanggung Jawab Transparent, fair, and responsible CSR Partnership Program	Kebijakan Perusahaan Peningkatan Layanan Konsumen Melalui Digitalisasi Operasional The Company policy of improving customer service through digitalization	Program CSR Fokus Pengembangan Kampung Wisata Terpadu CSR Program focusing on development of integrated tourism village
<p>Pelindo 1 selalu menjalankan tata kelola organisasi yang berpegang pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap aktivitas korporasi.</p> <p>Keberhasilan pelaksanaan GCG di Pelindo 1 ditandai dengan skor GCG tahun 2020 yang mencapai 95,63% atau meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 94,42%.</p> <p>Pelindo 1 endeavors to observe the Good Corporate Governance principles in its corporate activities.</p> <p>The success of GCG implementation at Pelindo 1 is shown at the 2020 GCG score of 95.63%, increasing by the 94.42% achieved in 2019</p>	<p>Pada era pandemi, Pelindo 1 memfokuskan bantuan kepada warga masyarakat terdampak COVID-19 khususnya di bidang ekonomi.</p> <p>During the ongoing pandemic, Pelindo 1 focuses on economic relief for COVID-19 affected community.</p>	<p>Pelindo 1 melindungi dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerjanya di masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan dan mekanisme dukungan bagi pekerja yang terinfeksi COVID-19.</p> <p>Di antaranya adalah penerapan Prokes operasional kepelabuhanan, <i>rapid & swab test</i> pegawai, serta menanggung pengobatan pekerja terinfeksi COVID-19.</p> <p>Pelindo 1 protects and ensures the safety and the well-being of the employees during the pandemic by implementing health protocol and support mechanism for the employees who contract COVID-19.</p> <p>The Company implements health protocol for port operations, provides <i>rapid & swab tests</i> for the employees, adopts WFH policy, and pays for the treatment for COVID-19 infected employees.</p>	<p>Lingkungan Hidup menjadi salah satu fokus utama CSR Pelindo 1 melalui berbagai aksi penghijauan dan perlindungan ekosistem alam pesisir melalui edukasi masyarakat dan generasi muda terhadap pentingnya menjaga kelestarian ekosistem pesisir.</p> <p>Pelindo 1 juga menjalin koordinasi dengan berbagai komunitas yang bergerak di bidang lingkungan.</p> <p>The environment is one of the main foci for Pelindo 1 CSR, which is manifested in coastal natural ecosystem reforestation and conservation programs through awareness campaign targeted at the community and the youth on the importance of coastal natural ecosystems.</p> <p>Pelindo 1 also work together with several environmental communities.</p>	<p>Program Kemitraan yang dijalankan sebagai bagian dari CSR Pelindo 1 dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab.</p> <p>Setiap penerima Program Kemitraan melalui seleksi ketat dan secara berkala dilakukan evaluasi secara mendalam untuk memastikan Program Kemitraan ini dapat memberikan nilai kemanfaatan positif untuk mengembangkan usaha penerima Program Kemitraan tersebut.</p> <p>The CSR Partnership Program carried out by Pelindo 1 implements the principles of transparency and responsibility.</p> <p>The recipient candidates must go through a tight selection process and comprehensive regular evaluation in order to make sure that the Partnership Program can bring positive impacts in the development of the enterprises run by the Partnership Program recipients.</p>	<p>Pelindo 1 selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan terhadap konsumen, terutama di masa pandemi yang secara signifikan mengubah bentuk interaksi penyedia dan pengguna jasa.</p> <p>Untuk itu Pelindo 1 telah mengembangkan digitalisasi layanan dan operasional yang mendukung layanan terhadap konsumen secara <i>digital</i> dan <i>real time</i>, seperti <i>Customer Relationship Management App</i>, <i>E-Berthing</i>, hingga transaksi <i>cashless</i>.</p> <p>Pelindo 1 endeavors to improve the quality of its services, especially during the pandemic that considerably alters the dynamics of the interaction between service providers and customers.</p> <p>For that purpose, Pelindo 1 has developed digitalization of services and operations supporting provision of digital and real time services for the customers through Customer Relationship Management App, E-Berthing, and cashless transactions.</p>	<p>Pengembangan Masyarakat menjadi salah satu fokus utama CSR Pelindo 1 yang ditunjukkan melalui berbagai program pengembangan Kampung Wisata di Tomok, Belawan, hingga Tanjungpinang.</p> <p>Melalui Program Pengembangan Kampung Wisata, Pelindo 1 mendorong peningkatan nilai ekonomi serta kualitas hidup masyarakatnya, termasuk kesadaran untuk menjaga budaya dan lingkungan.</p> <p>Community Development is one of the main foci of Pelindo 1 CSR as shown by development of tourism villages in Tomok, Belawan and Tanjungpinang.</p> <p>The Tourism Village Development Program is expected to improve the economy and living standard of the community, as well as their cultural and environmental awareness.</p>

PENGELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Program CSR Pelindo 1 dilakukan dalam berbagai inisiatif yang berfokus pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3), penerapan hak asasi manusia, pengelolaan operasi yang adil, serta perlindungan dan pelayanan prima kepada konsumen. Di samping itu, Pelindo 1 juga berupaya merealisasikan program tanggung jawab sosial dalam rangka mengembangkan kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja Pelindo 1 agar berkembang dan sejahtera selaras dengan meningkatnya skala usaha Perseroan.

Untuk dapat melaksanakan keseluruhan program CSR, Perseroan telah menyusun penanggungjawab program sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab masing-masing, sebagaimana terlampir berikut ini.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM MANAGERS

Pelindo 1 CSR programs are manifested in several initiatives focusing on sustainable environment management, community social and economic development, improvement of occupational health, and safety management, human rights enforcement, fair operating practice management, and quality protection and service for the customers. Pelindo 1 also undertakes to realize other corporate social responsibility programs in order to improve the living standards and welfare of the community immediately surrounding its working areas in line with the growth in the business scale of the Company.

to implement all of its CSR programs, the Company has appointed program directors, each with their respective functions and responsibilities, as follows:

Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup Responsibility towards the environment	»	VP Pengelolaan Lingkungan VP for Environmental Management
Tanggung jawab terhadap pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat Responsibility towards community social development and empowerment	»	VP Program Kemitraan dan Bina Lingkungan VP for Partnership Program and Environmental Assistance Program
Tanggung jawab terhadap konsumen Responsibility towards the customers	»	VP Peng. Pelanggan & Komunitas Pelabuhan VP for Customer and Port Community Management
Tanggung jawab terhadap ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja Responsibility towards occupational health and safety	»	VP Perencanaan Strategis Manajemen SDM dan Organisasi VP for Human Resource Management Strategic Planning and Organization
Tanggung jawab terhadap hak asasi manusia Responsibility towards human rights	»	<ul style="list-style-type: none"> • VP Pengelolaan Lingkungan • VP Program Kemitraan dan Bina Lingkungan • VP Peng. Pelanggan & Komunitas Pelabuhan • VP Perencanaan Strategis Manajemen SDM dan Organisasi • VP for Environmental Management • VP for Partnership Program and Environmental Assistance Program • VP for Customer and Port Community Management • VP for Human Resource Management Strategic Planning and Organization
Tanggung jawab terhadap operasi yang adil Responsibility towards fair operating practices	»	<ul style="list-style-type: none"> • VP Pengelolaan Lingkungan • VP Program Kemitraan dan Bina Lingkungan • VP Peng. Pelanggan & Komunitas Pelabuhan • VP Perencanaan Strategis Manajemen SDM dan Organisasi • VP for Environmental Management • VP for Partnership Program and Environmental Assistance Program • VP for Customer and Port Community Management • VP for Human Resource Management Strategic Planning and Organization



STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Pelindo 1 senantiasa melakukan identifikasi kepentingan & harapan *stakeholders* terkait dampak aktivitas/keputusan Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah operasional Pelindo 1. Perseroan juga senantiasa melakukan sinergi untuk saling mendukung kelancaran proses bisnis serta operasional pelabuhan laut dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung berkembangnya suatu daerah yang secara langsung juga akan berdampak terhadap berkembangnya perekonomian daerah yang secara langsung juga akan berdampak pada berkembangnya kepada perekonomian daerah/wilayah setempat.

Pelindo 1 senantiasa menjaga hubungan baik dan selalu berupaya menjawab isu utama masing-masing pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan diidentifikasi berdasarkan tingkat kepentingan hubungan yang mempengaruhi kinerja Perseroan, demikian juga sebaliknya.

IMPORTANT STAKEHOLDERS IMPACTED BY OR IMPACTING COMPANY ACTIVITIES

Without fail, Pelindo 1 identifies the interests and expectations of the stakeholders concerning the impacts of Company's activities/decision to boost the economic growth of its operating areas. The Company also seeks to improve synergy to support its business processes and port operations, considering that it is one of the main supporting factors for the development of a region, which can directly impact the economic growth of said region, which can in turn impact the economy of the local areas.

Pelindo 1 aims to keep good relationships and provides answers to each and every issue raised by the stakeholders. The stakeholders are categorized by the extent to which a good relationship with them would impact the Company's performance and vice-versa.

Pemangku Kepentingan Stakeholder	Topik Utama Main Issues	Harapan Pemangku Kepentingan Stakeholder's Expectations	Pendekatan Interaksi Interaction Approach
Karyawan Employees	<ul style="list-style-type: none"> Kesepakatan kerja antara manajemen Perseroan dengan pegawai. Penyelesaian masalah kepegawaian. Kesempatan peningkatan kompetensi dan karier. Employment agreement between the Company management and employees Labor dispute settlement Opportunity for competency and career improvement 	<ul style="list-style-type: none"> Kejelasan hak dan kewajiban. Pemberian paket remunerasi sesuai kinerja. Kesetaraan dalam jenjang karier dan remunerasi. Jaminan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Kenyamanan lingkungan kerja. Clarity with regard to rights and obligations Remuneration package based on performance Equality in career opportunity and remuneration Occupational health and safety insurance Workplace comfort 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) melalui dialog dengan Serikat Karyawan. Pertemuan rutin antara karyawan dengan Manajemen Perseroan sebagai forum dialog langsung. Pengembangan kompetensi karyawan serta menyiapkan manajemen/pemimpin Perseroan yang profesional. Formulation and establishment of Collective Bargaining Agreement through dialogue with Workers' Union Regular meetings between employee representative and management Development of employee competency and professional corporate management/ leadership

Pemangku Kepentingan Stakeholder	Topik Utama Main Issues	Harapan Pemangku Kepentingan Stakeholder's Expectations	Pendekatan Interaksi Interaction Approach
Komunitas Masyarakat/ Lembaga Swadaya Community/Non- Governmental Organizations	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat. Community economic empowerment Community living standard improvement 	<ul style="list-style-type: none"> Terjalannya hubungan yang serasi dan harmonis. Partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Melaksanakan program revegetasi dan reboisasi. Kontribusi positif terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat sekitar. Good working relationship Participation in natural conservation programs Revegetation and reforestation programs Positive contribution towards the economic, social, and environmental aspects of nearby community 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan konsultasi publik dan <i>social mapping</i>. Sosialisasi rencana CSR dan koordinasi pelaksanaan CSR Perseroan. Public consultation and social mapping Dissemination of CSR plans and coordination of CSR implementation
Pelanggan Customers	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen keluhan pelanggan. Pusat pelayanan pelanggan. Customer complaint mechanism Customer service center 	<ul style="list-style-type: none"> Mutu pelayanan pelabuhan yang terjaga. Perlengkapan dan keamanan bagi penggunaan pelabuhan. Pertolongan yang sigap pada kejadian kecelakaan. Mutu pelayanan pelabuhan yang terjaga. Perlengkapan dan keamanan bagi penggunaan pelabuhan. Pertolongan yang sigap pada kejadian kecelakaan. Consistently good port service quality Port equipment and security Rapid response in case of accident 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan informasi kondisi cuaca kepada pelanggan. Realisasi program pemeliharaan dan perbaikan kondisi pelabuhan secara teratur. Fasilitas akses layanan pada pelanggan. Pelaksanaan kegiatan Temu Pelanggan. Provision of weather information for customers Realization of regular port maintenance and repair program Service access facility for customers Customer Gathering events
Lingkungan Environment	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan ekosistem alam. Pelestarian lingkungan. Natural ecosystem repair Natural conservation 	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Pencegahan pencemaran lingkungan. Participation in natural conservation activities Prevention of damage to nature 	<ul style="list-style-type: none"> Program penghijauan. Program perbaikan ekosistem darat dan laut. Reforestation program Land and marine ecosystem repair programs

ISU-ISU PENTING SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu mengamati perkembangan informasi, terutama isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan, khususnya yang terkait langsung akan perkembangan bisnis Perseroan. Untuk itu, Perseroan selalu mempersiapkan mitigasi risiko atas isu-isu penting sosial ekonomi maupun lingkungan yang muncul sehingga dapat diberikan solusi yang memadai.

IMPORTANT SOCIAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL ISSUES CONCERNING THE IMPACTS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

In the course of running its business, the Company pays constant attention to latest development and information concerning important social, economic and environmental issues, especially those that directly impact the Company's business development. The Company always stands ready with risk mitigation measures related to the raised important social, economic and environmental issues to provide adequate solutions.



Adapun isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan Perseroan, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Perbaikan ekosistem alam dan pelestarian lingkungan.
3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen Perseroan dengan pegawai, penyelesaian masalah kepegawaian, dan kesempatan peningkatan kompetensi dan karier.
4. Manajemen Keluhan pelanggan dan pusat pelayanan pelanggan

Such important social, economic and environmental issues concerning the impacts of the Company's activities are:

1. Community economic empowerment and improvement in community's living standards.
2. Improvement to natural ecosystem and environmental preservation.
3. Collective Bargaining Agreement (CBA) between the Company's management and its employees, labor dispute resolution, and opportunity to improve competencies and careers.
4. Customer complaint management and customer service centers.

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA PERUSAHAAN MENANGANI ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Perseroan berkomitmen agar kehadirannya dapat membawa dampak positif yang berkesinambungan bagi para pemangku kepentingan dalam jangka panjang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan isu-isu prioritas hasil uji tuntas, Perseroan memfokuskan strategi maupun program kerja yang dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan.

THE COMPANY'S STRATEGIES AND WORK PROGRAMS CONCERNING SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES

The Company is committed to bring direct and indirect positive, sustainable impacts for the stakeholders in the long term. According to priority issues in the due diligence enquiry, the Company focuses on the strategies and work programs that can bring social, economic, and environmental benefits.

Aspek Aspect	Strategi Strategies	Program Kerja Work Programs
Sosial Social	Menekankan pada strategi tanggung jawab sosial berupa program PKBL serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya dalam bentuk bantuan dan pengembangan masyarakat. CSR strategy based on PKBL programs and other social initiatives for community assistance and development.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi usaha kecil sehingga dapat menjadi tangguh dan mandiri. - Memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk bantuan korban bencana alam, peningkatan kesehatan, pendidikan & kesehatan, pengembangan sarana/prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian lingkungan, BUMN Peduli, dll. - Improving the competency and self-sufficiency of small enterprises - Providing concrete benefits for the community in form of natural disaster relief, health improvement, health care & education, development of public facilities, praying facilities, natural conservation, BUMN Peduli initiative, etc
Ekonomi Economic	Pencapaian dan kinerja Perseroan bergantung pada pengelolaan SDM, konsumen dan hubungan dengan mitra kerja. Untuk memperkuat kinerja Perseroan, dilakukan strategi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Menekankan tidak terdapatnya konflik kepentingan dalam setiap keputusan bisnis, terkait dengan operasi yang adil. - Menekankan pada strategi pemenuhan hak-hak pegawai termasuk pemenuhan hak asasi manusia terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja pegawai. - Menekankan pada strategi kepuasan konsumen/pelanggan termasuk pemenuhan hak konsumen/pelanggan. <p>The success of the Company depends on the management of human resource, customers and relationship with working partners. To improve performance, the Company employes below strategies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensuring the absence of conflict of interest in any business decision, which is related to fair operating practices - Focusing on the fulfillment of employee rights including enforcement of human rights related to labor and occupational health, and safety - Focusing on customer satisfaction, including fulfillment of customer rights 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Gratifikasi, WBS, dan Kode Etik perusahaan. - Pengelolaan pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. - Pengelolaan program kesejahteraan pegawai. - Menciptakan suasana yang kondusif bagi pegawai. - Pengelolaan program pelatihan dan pendidikan bagi pegawai. - Pengelolaan program kesehatan dan keselamatan kerja. - Melakukan survei kepuasan konsumen. - Menjaga mutu dan kualitas produk dan layanan. - Program-program lainnya yang relevan. - Gratuity management, WBS, Code of Conduct - Management of Goods and/or Services Procurement - Management of employee welfare program - Creating a conducive workplace for employees - Managing employee training and education programs - Managing occupational health and safety programs - Holding customer satisfaction surveys - Maintaining the quality of products and services - Other relevant programs

Aspek Aspect	Strategi Strategies	Program Kerja Work Programs
Lingkungan Environmental	Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan semua aspek yang timbul dalam proses usaha Perseroan untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul terhadap pegawai dan lingkungan sekitar atas kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan. Perform planning, improvement and monitoring of all facets of business process to minimize the risks of negative impacts towards the employees and the surrounding environment	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. - Pengelolaan limbah. - Pengelolaan penggunaan energi. - Melakukan pemantauan kualitas lingkungan kerja. - Pengelolaan tanaman dan lingkungan dengan melakukan pelestarian keanekaragaman hayati. - Program-program lainnya yang relevan. - Performing environmental impact assessment - Waste management - Energy consumption management - Monitoring of environment quality - Management of plants and environment by way of biodiversity conservation - Other relevant programs

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAIK YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL PERUSAHAAN DAN RELEVAN DENGAN BISNIS YANG DIJALANKAN

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES: THE COMPANY'S OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES BEYOND THE THE COMPANY'S MINIMUM RESPONSIBILITIES RELEVANT WITH ITS BUSINESS ACTIVITIES

As a State-Owned Enterprise, the Company has responsibilities and obligations to implement the Partnership and Environmental Assistance Programs as stipulated by Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership and Environmental Assistance Programs as amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 of 16 December 2016 on Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on State-Owned Enterprise Partnership and Environmental Assistance Programs, Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 on Second Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership and Environmental Assistance Programs, Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/04/2020 of 2 April 2020 on Third Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on State-Owned Enterprise Partnership Program and Environmental Assistance Program.





Sementara itu, Pelindo 1 juga telah melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang melebihi tanggung jawab minimal Perseroan dan relevan dengan bisnis yang dijalankan, salah satunya adalah melakukan program-program CSR unggulan yang dilaksanakan di sepanjang tahun 2020, yakni sebagai berikut:

1. Pengembangan Kampung Wisata Ramah Anak Belawan Bahari;
2. Perbaikan Jalan di Riau;
3. Renovasi Sekolah;
4. Konservasi Hutan Mangrove;
5. Digitalisasi Layanan *Customer*;
6. Khitanan Massal dan Pembuatan Sarana Air Bersih; serta
7. Pengadaan Bantuan COVID-19.

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan program unggulan di era pandemi & kenormalan baru yang dilaksanakan disepanjang tahun 2020, yakni sebagai berikut:

1. Penerapan Protokol Kesehatan di Area Operasional Perseroan;
2. Disinfeksi Fasilitas Publik;
3. Menjaga Kesehatan Pegawai Sepanjang Pandemi;
4. Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Pandemi;
5. Pemberian Bantuan Peralatan Pendukung untuk Tenaga Medis; serta
6. Melakukan Koordinasi dengan *Stakeholder* di Era Pandemi & Kenormalan Baru.

REALISASI BIAYA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Realisasi biaya program tanggung jawab sosial perusahaan melekat di setiap kegiatan operasional Perseroan yang relevan, seperti biaya ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, biaya umum, biaya pelayanan konsumen dan lainnya. Di samping itu, Perseroan juga menyalurkan dana untuk kegiatan tanggung jawab sosial dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dengan total realisasi sebesar Rp22,654 di tahun 2020. Dana PKBL tersebut terbagi dalam dua program yakni Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, dengan rincian yakni Program Kemitraan sebesar Rp15,157 miliar dan Program Bina Lingkungan senilai Rp7,497 miliar.

Selain itu, di tahun 2020, Pelindo 1 juga memberi bantuan untuk penanggulangan COVID-19 di berbagai daerah yang menjadi wilayah kerja Perseroan dengan nilai sebesar Rp7,380 miliar. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang sedang kesulitan atau terdampak pandemi, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pelindo 1 has also carried out corporate social responsibility programs beyond the the Company's minimum responsibilities relevant with its business activities, including select CSR programs carried out throughout 2020, which include:

1. Development of Belawan Bahari Child-Friendly Tourism Village;
2. Road Repair in Riau;
3. School Renovation;
4. Mangrove Forest Conservation;
5. Customer Service Digitalization;
6. Mass Circumcision and Clean Water Facility Construction; and
7. COVID-19 Assistance Program.

Additionally, the Company carried out select programs during the pandemic and the new normal in 2020, including:

1. Implementation of Health Protocol in the Company's Operating Areas;
2. Disinfection of Public Facilities;
3. Ensuring the Health of the Employees during the Pandemic;
4. Aid for the Pandemic-Afflicted Members of the Community;
5. Medical Equipment Supports for Medical Professionals; and
6. Coordination with Stakeholders During the Pandemic and the New Normal.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM FUND REALIZATION

The funds for corporate social responsibility programs are realized through the Company's relevant operating activities, such as labor costs, occupational health, and safety costs, general costs, customer service costs etc. In addition, the Company also spent some fund for corporate social responsibility activities in form of Partnership and Environmental Assistance Programs, with a total realized amount of Rp22.654 billion in 2020. The fund was divided among two programs, namely Partnership Program and Environmental Assistance Program, of which Rp15.57 billion was spent on Partnership Program and Rp7.497 billion was spent on Environmental Assistance Program.

Pelindo 1 also send COVID-19 aid amounting to Rp7.380 billion to various regions within the Company's operating regions. This measure was taken to alleviate the impacts of the pandemic on the community, as well as to accelerate national economic recovery.

TANGGUNG JAWAB ATAU KOMITMEN PERUSAHAAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

THE COMPANY'S RESPONSIBILITY AND COMMITMENT TOWARDS HUMAN RIGHTS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Sebagai sebuah korporasi, Pelindo 1 berkomitmen untuk memastikan setiap kegiatan yang dilakukan telah memenuhi aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Perseroan mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak mendasar bagi setiap individu yang terlibat maupun yang terkena dampak dari kegiatan operasi dan usaha yang dilakukan Perseroan.

Cakupan definitif tersebut telah dilaksanakan oleh Perseroan, baik dalam kegiatan operasional yang melibatkan karyawan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Penerapan kebijakan HAM dalam lingkup internal, dititikberatkan pada aspek ketenagakerjaan, dimana Pelindo 1 memiliki komitmen yang tinggi akan penegakan HAM kepada setiap karyawan yang diwujudkan melalui pembentukan Serikat Pekerja Pelindo 1, tersedianya lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan tekanan (pelecehan), serta memberikan kebebasan yang sama kepada seluruh karyawan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing karyawan.

Selain itu, Perseroan juga senantiasa berupaya untuk memenuhi prinsip-prinsip HAM pada lingkungan masyarakat, terutama masyarakat di lingkungan operasional Perseroan, maupun pemangku kepentingan lainnya.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAM

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM di lingkup operasi dan bisnisnya. Perseroan menekankan pemenuhan HAM terhadap karyawan, mitra kerja, konsumen atau pelanggan, serta masyarakat sekitar, sebagai pemangku kepentingan yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terkait pemenuhan HAM atas kegiatan operasi dan bisnis yang dilakukan Perseroan.

Adapun ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait pelaksanaan HAM di lingkungan Perseroan di antaranya meliputi penegakkan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh karyawan, kebebasan berserikat, pelaksanaan sistem remunerasi dan kesejahteraan karyawan, serta hal terkait lainnya.

COMMITMENT AND POLICY

As a corporation, Pelindo 1 is committed to ensure that human rights protection is enforced in every activity it undertakes. The Company defines human rights as basic rights to which any individual involved or afflicted by the Company's operating and business activities is entitled.

Such a definitive scope has been enforced by the Company in any operating activity involving the employees and other stakeholders. Implementation of internal human rights policies is focused on the aspect of labor rights, where Pelindo 1 is committed to enforce the human rights of each employee as can be seen in the establishment of Pelindo 1 Workers' Union, the workplace that is free of any form of discrimination and harassment, and the freedom to practice any religion and belief followed by each employee.

Pelindo 1 strives to always abide by human rights principles in its relationship with the community, especially the community immediately surrounding the workplace of the company, as well as that with other stakeholders.

THE STAKEHOLDERS AND THE SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING HUMAN RIGHTS

The Company is committed to respecting the human rights in its scope of operation and business. The Company emphasizes the human rights of the employees, partners, customers or consumers, as well as the surrounding community as stakeholders impacting or impacted by the human rights aspect of the operating and business activities undertaken by the Company.

The scope of the corporate social responsibility of the Company concerning human rights enforcement within the Company includes among others the upholding of the principle of equality and diversity for all employees, freedom of assembly, implementation of employee remuneration and welfare system, and other related matters.





DAMPAK DAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PEMENUHAN HAM TERHADAP KARYAWAN
IMPACT AND SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING THE ENFORCEMENT OF THE EMPLOYEES' HUMAN RIGHTS

Hubungan Industrial Industrial Relations	Kesetaraan Gender & Kesempatan Kerja Gender Equality & Work Opportunity	Kesehatan & Keselamatan Kerja Occupational Health & Safety	Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Competency Development
<ul style="list-style-type: none"> Mampu menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban, melalui komunikasi intensif dan keterlibatan antara Pelindo 1 dan karyawan dalam mencapai target Perseroan. Mampu menyelesaikan permasalahan hubungan industrial maupun penyelesaian keluhan karyawan. Achieving balance between rights and obligations fulfillment through regular communications and involvement of Pelindo 1 employees to reach the Company's targets. Settlement of industrial disputes and employee complaints 	<ul style="list-style-type: none"> Pelindo 1 tidak melakukan diskriminasi gender dalam hal manajemen sumber daya manusia. Hal ini berlaku dari proses rekrutmen dan pengembangan hingga berakhirnya masa jabatan seseorang. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan gender dalam proses rekrutmen. Pelindo 1 does not discriminate by gender in human resource management. This is true at the recruitment, development, and termination stages of employment. No discrimination based on ethnicity, religion, race, social group or gender during recruitment. 	<p>Terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif Achieving safe, efficient, and productive workplace.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan karyawan dengan kompetensi tertentu guna mendukung portofolio bisnis Perseroan. Menyiapkan kompetensi karyawan agar mampu menyikapi perubahan. Providing employees with certain competency to enhance Company business portfolio Preparing employee competency to be ready for change

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAM

Pelaksanaan tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

- Setiap pegawai dapat bergabung menjadi anggota Serikat Pekerja.
- Diberikan pilihan untuk menentukan mengenai Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- Berhak mendapatkan cuti yang meliputi:
 - Cuti tahunan;
 - Cuti bersama;
 - Cuti bersalin/keguguran kandungan;
 - Cuti haid;
 - Cuti besar;
 - Cuti di luar tanggungan Perseroan;
 - Cuti Ibadah Haji ke-2.
- Mendapatkan Fasilitas Kesejahteraan antara lain:
 - Fasilitas kesehatan (perawatan dan pengobatan);
 - Fasilitas beribadah;
 - Fasilitas olahraga;
 - Fasilitas koperasi;
 - Fasilitas kantin;
 - Fasilitas ruangan menyusui.

PLANNING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING HUMAN RIGHTS

Corporate social responsibility in this matter is manifested in the following provisions:

- Employees are allowed to join Workers' Union.
- Employees are given options regarding Retirement Preparation.
- Employees are given the following leaves:
 - Annual leave;
 - Collective leave;
 - Maternity/miscarriage leave;
 - Menstrual leave;
 - Long leave;
 - Unpaid leave;
 - Second Hajj leave.
- Employees are given the following facilities:
 - Health facility (treatment and medication).
 - Praying facility;
 - Sports facility;
 - Co-operative facility;
 - Canteen facility;
 - Lactation room.

PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAM

Dalam penerapannya, pemenuhan prinsip-prinsip HAM di lingkungan Perseroan dititikberatkan pada aspek ketenagakerjaan, tanpa melepas tanggung jawab HAM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan telah menerapkan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh karyawan sesuai dengan prinsip dasar ketenagakerjaan yang termuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perseroan menerapkan prinsip kesetaraan dari mulai penerimaan karyawan, program pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan, pengembangan karier karyawan, hingga dalam pemberian remunerasi dan kesejahteraan karyawan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan keberagaman lainnya.

Dalam hal kebebasan berserikat, Perseroan memfasilitasi pembentukan serikat sebagai wadah komunikasi yang efektif antara manajemen Perseroan dengan seluruh karyawan. Sedangkan terkait dengan remunerasi dan kesejahteraan karyawan, Perseroan menerapkan pola penghargaan yang adil dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh karyawan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan keberagaman lainnya, melainkan berdasarkan pencapaian kinerja dan tanggung jawab jabatan yang diemban.

DAMPAK KEGIATAN DAN PENCAPAIAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAM

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan terkait HAM, sebagian besar menitikberatkan pada isu ketenagakerjaan. Adapun capaian yang dihasilkan dari penerapan tanggung jawab sosial perusahaan terkait HAM terlihat dari produktivitas karyawan yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, hingga akhir tahun 2020, tidak terdapat laporan, baik dari karyawan maupun masyarakat terkait pelanggaran HAM di lingkup Perseroan.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES CONCERNING HUMAN RIGHTS

The implementation of human rights enforcement within the Company is focused on the labor aspect without neglecting the human rights responsibilities towards the community and other stakeholders. The Company observes the principle of diversity and equality for all employees as defined by the basic principles of manpower as specified in Law No. 13 of 2003 on Manpower. The Company follows the principle of quality in employee recruitment, training and competence development, career development, and remuneration and welfare system without discrimination of any kind based on gender, religion, ethnicity, race or any other status.

As regards freedom of assembly, the Company facilitated the establishment of a union as an effective means of communication between the Company management and all employees. Furthermore, concerning employee remuneration and welfare, the Company uses a fair and equitable reward system based on performance and responsibilities of the position without discrimination of any kind based on gender, ethnicity, race, religion, skin color or any other status for all employees.

IMPACTS AND ACHIEVEMENTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES CONCERNING HUMAN RIGHTS

As described above, the implementation of corporate social responsibility concerning human rights is focused mostly on labor issues. On that count, the result of the implementation of corporate social responsibility concerning human rights is manifested in employee productivity, which has been noticeably improving throughout the years. In addition, as of the end of 2020, there was no employee or community report of human rights violation within the company.





TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

THE COMPANY'S RESPONSIBILITY TOWARDS FAIR OPERATING PRACTICES

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Penerapan operasi yang adil tak lepas dari pengelolaan Perseroan yang dilandasi pada prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Pelindo 1 memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik operasi yang adil, di mana Perseroan menjamin bahwa setiap pemangku kepentingan, berhak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan terus berupaya untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan, dengan menciptakan aktivitas dan iklim bisnis yang adil sebagai bagian dari tanggung jawab Perseroan.

Praktik operasi yang adil di lingkup Perseroan didukung oleh kebijakan yang berorientasi pada praktik usaha yang bersih dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain praktik terbaik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kebijakan Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, dan pengelolaan perangkat kepatuhan yang dimiliki, seperti Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Kode Etik Perusahaan.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Lingkup tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil telah tertuang dalam kebijakan-kebijakan internal Perseroan yang mengatur segala sesuatunya terkait kegiatan usaha Perseroan. Di mana Manajemen Pelindo 1 bertanggung jawab pada pemegang saham atas pengelolaan Perseroan yang transparan dan akuntabel. Perseroan juga senantiasa memperlakukan semua rekanan atau mitra kerja dan konsumen atau pelanggan secara adil dan transparan. Selain itu, Perseroan juga terus berupaya untuk memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi seluruh insan Pelindo 1 sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga senantiasa menjaga hubungan baik dengan lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar lingkungan operasi, dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan terhadap masyarakat sekitar atas kegiatan operasi yang dilakukan Perseroan.

COMMITMENT AND POLICY

The implementation of fair operating practices is part and parcel of Good Corporate Governance (GCG) which covers transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality. Pelindo 1 endeavors to engage in fair operating practices, ensuring that every stakeholder gets fair treatment in accordance with the prevailing laws and regulations. The Company strives to maintain good relationships with the stakeholders by implementing fair business practices and business climate as part of the Company's responsibilities.

Fair operating practices within the Company is supported by adopting policies geared to creating clean business practices according to the prevailing laws and regulations, including Occupational Health and Safety best practices, Anti-Corruption and Anti-Gratuity Policies, management of conflict of interest, management of compliance tools, including Whistle Blowing System and Corporate Code of Conduct.

THE STAKEHOLDERS AND THE SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING FAIR OPERATING PRACTICES

The scope of corporate social responsibility concerning fair operating practices is expressed in the Company's internal policies regulating matters related to the Company's business activities. Pelindo 1 Management is answerable to the shareholders for the transparent and accountable corporate management. The Company also endeavors to give fair and transparent treatment to all partners and customers. In addition, the Company strives to provide good and safe work conditions for everyone employed by Pelindo 1 to the best of the Company's ability in accordance with the prevailing laws and regulations. The Company maintains good relationships with the community, especially the community immediately surrounding the operating environment, by adhering to equitability in its dealings with the surrounding community as regards the Company's operations.

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Perseroan senantiasa menargetkan dalam perencanaan tahunannya untuk menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik dan aktivitas bisnis yang didasarkan pada operasi yang adil dan ditujukan untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, serta profesionalisme Perseroan dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan. Pemenuhan aspek operasi yang adil juga ditargetkan pada semakin baiknya kualitas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bebas dari praktik-praktik *fraud* yang dapat merugikan Perseroan dan merusak kepercayaan pemangku kepentingan. Perseroan juga berupaya untuk terus meningkatkan penerapan GCG pada setiap aspek bisnis yang dijalankan, dengan harapan mampu menciptakan operasi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap operasi yang adil, Pelindo 1 secara tegas menerapkan kebijakan yang berlaku, baik kebijakan internal maupun eksternal. Praktik operasi yang adil telah diatur dalam berbagai kebijakan yang berlaku di Perseroan, salah satunya adalah *Code of Conduct*, pelanggaran atas *Code of Conduct* akan dikenakan sanksi secara tegas. Pengaturan sanksi diatur dalam peraturan, sesuai dengan kebijakan Perseroan. Pelindo 1 selalu mematuhi peraturan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Pada proses pengadaan barang dan jasa, telah terdapat kebijakan yang berlaku di Perseroan, sehingga proses pengadaan dilakukan secara terbuka dengan menerapkan persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan jasa. Guna terwujudnya operasi yang adil, para mitra kerja yang bekerja sama dengan Pelindo 1 menandatangani perjanjian dan nota kesepahaman sebagai upaya mewujudkan integritas diantara para pihak sehingga mencegah terjadinya praktik kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam mencegah terjadinya konflik ataupun sebagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi, Perseroan menyediakan sarana bagi seluruh pihak untuk dapat menyampaikan permasalahan dan keluhan berkaitan dengan Pelindo 1. Permasalahan dan keluhan dapat disampaikan kepada Perseroan melalui surat, telepon, *email*, *social media*, ataupun sarana pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

PLANNING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING FAIR OPERATING PRACTICES

The Company ensures that the policies concerning business practices and activities formulated in its annual planning is always based on fair operating practices for the purpose of improving the integrity, accountability and professionalism of the Company in performing its responsibility towards the stakeholders. The implementation of fair operating practices is also aimed to improve the Company's compliance to the prevailing laws and regulations and to make sure that the Company is free of fraud practices that may potentially damage the Company and breach the confidence of the stakeholders. The Company seeks to keep improving GCG implementation in every business aspect, aiming to create fair and accountable operating practices.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL CORPORATE RESPONSIBILITY INITIATIVES CONCERNING FAIR OPERATING PRACTICES

In order to perform corporate social responsibility concerning fair operating practices, Pelindo 1 strictly enforces the prevailing internal and external policies. Implementation of fair operating practices is regulated through various policies within the Company, including the Code of Conduct, the breach of which would result in a severe penalty. The penalties are stipulated by the Company Regulation, in accordance with the Company's policies. Pelindo 1 always conforms to the prevailing regulations and implements GCG principles.

A policy on goods and services procurement has been adopted, according to which the procurement process should be carried out openly with fair competition between the goods and services providers. In order to create fair operating practices, the partners working together with Pelindo 1 are obliged to sign relevant agreements and memoranda of understanding in an effort to ensure the integrity of the parties and to prevent fraud and breach of agreement.

In order to prevent conflict, or as an effort to resolve a conflict, the Company has provided all stakeholders with the means to communicate their problems or complaints concerning Pelindo 1. Problems and complaints may be communicated to the Company by letter, phone, email, social media or whistle blowing system.





Selain itu, Perseroan juga telah resmi memperoleh Sertifikat Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang diberikan oleh PT TUV NORD Indonesia pada tanggal 30 November 2020.

DAMPAK KEGIATAN DAN PENCAPAIAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Komitmen Pelindo 1 dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil turut berkontribusi pada semakin kuatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Sementara itu, Perseroan juga mencatikan berbagai capaian, di antaranya adalah keberhasilan dalam mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, terselenggaranya persaingan yang adil, perilaku karyawan yang bertanggung jawab, serta keterlibatan yang bertanggung jawab di ruang publik.

Sementara itu, Perseroan juga berhasil meraih penghargaan terkait dengan penerapan operasi yang adil yang di dapat di tahun 2020, yakni penghargaan BUMN *Performance Excellence Award 2020* untuk kategori "*Emerging Industry Leader*" yang didapat pada tanggal 4 Maret 2020.

The Company was officially awarded the ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System Certificate by PT TUV NORD Indonesia on 30 November 2020.

IMPACTS AND ACHIEVEMENTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES CONCERNING FAIR OPERATING PRACTICES

Pelindo 1 commitment to implement corporate social responsibility concerning fair operating practices contributes to strengthen the confidence of the stakeholders in the Company. The Company has also attained many achievements, among which are the success in preventing corruption, collusion and nepotism practices, creation of fair competition, responsible employee behavior, and accountable involvement in public space.

The Company won an award on the implementation of fair operating practices in 2020, namely 2020 BUMN *Performance Excellence Award* for the category of "*Emerging Industry Leader*" on 4 May 2020.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING THE ENVIRONMENT

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perseroan menyadari bahwa lingkungan hidup menjadi salah satu indikator dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, Perseroan senantiasa memerhatikan keseimbangan lingkungan hidup, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya. Perseroan selalu berupaya untuk menjaga pencemaran lingkungan serta melestarikan lingkungan dalam setiap kegiatan operasional.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan jasa kepelabuhanan, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan kapal, pelayanan barang, serta pelayanan lainnya di pelabuhan. Perseroan menyadari bahwa aktivitas operasional pelabuhan dapat berdampak pada lingkungan sekitar, yang juga dapat timbul dari adanya perluasan pelabuhan maupun pembukaan lahan untuk pembangunan. Terlebih dalam melaksanakan kegiatan bisnis di suatu wilayah, Perseroan berkedudukan dan berdampingan dengan kehidupan dan aktivitas lainnya yang berada di sekitar wilayah operasional Perseroan, yang dalam setiap kegiatannya, tentu akan memiliki dampak pada lingkungan sekitar, baik positif maupun negatif.

Pelindo 1 berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan lingkungan serta berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial di lingkungan sekitar wilayah operasi. Sebagai bentuk tindak lanjut atas komitmen tersebut, Pelindo 1 menerapkan tata kelola lingkungan yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. PP.27/1/10/PI-15.TU tanggal 23 Oktober 2015 tentang Pedoman Penerapan *Green Port* di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Sertifikasi ISO 14001 di beberapa Pelabuhan. Penetapan ini, turut menegaskan bahwa Pelindo 1 turut mewujudkan pelabuhan berwawasan lingkungan.

DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN YANG RELEVAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN BESERTA PENGELOLAANNYA

Aktivitas dan proses bisnis Perseroan dalam melaksanakan operasional kepelabuhanan, baik langsung maupun tidak langsung tentunya berdampak terhadap lingkungan yang di antaranya adalah terjadinya perubahan atau modifikasi lahan. Dampak terhadap lingkungan yang baik langsung maupun tidak langsung juga ditimbulkan dari aktivitas dan proses bisnis Perseroan adalah antara lain, penggunaan energi listrik pada aktivitas Perseroan baik perkantoran maupun lapangan, penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional mesin maupun kendaraan, penggunaan kertas dalam administrasi perkantoran, serta penggunaan alat pendingin pada aktivitas Perseroan.

COMMITMENT AND POLICY

The Company fully understand the the environment is among the indicators of successful sustainable development. For that reason, the Company endeavors to maintain the balance of the environment by adhering to the principle of caution in the course of running its business operations. The Company seeks to prevent environmental damage and preserve the environment in any of its business activities.

As a company providing ports service management, especially those related to ship services, commodity services, and other port services. The Company realizes that port operation may have impacts on the surrounding environment arising from port expansion or land clearing for construction. Especially when carrying out business activity in a region, the Company's sites and facilities are often situated right in the thick of life of the community residing in and around the operating area of the Company, whose activity can surely have both positive and negative impact on the surrounding environment.

Pelindo 1 is committed to preserve the environment and to improve the social welfare of the community surrounding the operating area. To follow up on that commitment, Pelindo 1 implements environmental management as stipulated in Board of Directors' Decision No. PP.27/1/10/PI-15.TU of 23 October 2015 on Guidance on Implementation of *Green Port* within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and ISO 14001 Certificate in several Ports. This stipulation is proof that Pelindo 1 is committed to realize green-oriented ports.

ENVIRONMENTAL IMPACTS AND RISKS RELEVANT TO THE COMPANY'S BUSINESS ACTIVITIES AND THE MANAGEMENT THEREOF

The Company's business activity and process in the course of operating the ports certainly have direct or indirect impacts on the environment, especially when such activity or process involves land clearing or modification. The direct or indirect impacts on the environment that may result from the Company's business activity and process are influenced by among others electricity consumption occurring during the Company's in-office and field activities, fuel consumption by the machines or vehicles, paper consumption for office administration and usage of air conditioning for the Company's activities.





Untuk itu, Perseroan telah menerapkan program-program tanggung jawab di bidang lingkungan yang difokuskan pada praktik-praktik bisnis berwawasan lingkungan, peningkatan efisiensi kegiatan bisnis yang dijalankan, dan berupaya untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan operasional Perseroan.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Pelindo 1 selalu berupaya mewujudkan keseimbangan antara nilai ekonomi yang diperoleh dengan kepedulian Perseroan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Perseroan menyadari bahwa bidang industri yang digeluti berkaitan erat dengan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan atas kegiatan operasional Perseroan.

Di tahun 2020, Perseroan telah menetapkan target dan rencana kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terkait lingkungan hidup, di antaranya:

- Melakukan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) 2 (dua) kali dalam setahun.
- Membuat kebijakan lingkungan Perseroan.
- Membuat himbauan untuk penghematan energi dan listrik.
- Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pelabuhan.
- Penyusunan ANDALALIN Pelabuhan.
- Penilaian dan penyusunan Prosedur OSCP Pelabuhan.
- Melakukan *Assesment Greenport* dan Proper.
- Melakukan Sosialisasi Pengelolaan lingkungan Pelabuhan.
- Penghijauan di areal pelabuhan.
- Memastikan ketersediaan tempat sampah, kesiapan RF, dan TPS dalam mengelola limbah B3.

PROGRAM DAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Dalam setiap aktivitas bisnisnya, Perseroan selalu berupaya memperhatikan aspek lingkungan hidup sebagai bentuk implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di atur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bentuk implementasi tersebut dilakukan Perseroan melalui berbagai kegiatan, sebagai berikut:

PENGELOLAAN PENGGUNAAN KERTAS

Perseroan menyadari bahwa pembuatan kertas membutuhkan bubur kayu dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebab itu, untuk mengurangi jumlah pohon yang ditebang untuk membuat kertas, Perseroan melakukan langkah-langkah untuk

For that reason, the Company has implemented corporate social responsibility programs concerning the environment focused on environment-oriented business practices, improvement in the energy efficiency of business activities, and has sought to minimize the negative impacts on the environment that may result from the Company's operating activities.

TARGETS AND PLANS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING THE ENVIRONMENT

Pelindo 1 endeavors to achieve balance between economic profit and concern for the environment. The Company realizes that its operating activities and industry as a whole are prone to cause environmental impacts.

The Company set defined targets and planning for corporate social responsibility activities concerning the environment in 2020, including:

- Performing 2 (two) annual environmental monitorings
- Formulating Company environmental policies.
- Posting warning signs concerning energy and electricity saving.
- Writing Port Environmental Documents.
- Writing Traffic Impact Analysis.
- Evaluation and establishment of Port OSCP Procedure.
- Performing Green Port Assessment and Proper (Company Performance Rating Assessment Program)
- Performing Dissemination of Port Environment Management.
- Coastal plantation in port areas.
- Ensuring availability of trash bins, reception facilities, and temporary dumpsite for hazardous waste.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS AND ACTIVITIES CONCERNING THE ENVIRONMENT

In any of its business activity, the Company always pays attention to the environmental aspect as implementation of Environmental Management as stipulated by Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Such implementation is carried out by the Company through various activities, including:

PAPER CONSUMPTION MANAGEMENT

The Company realizes that production of paper uses a not insignificant amount of wood pulp. For that reason, to reduce the number of trees used to make paper, the Company takes several measures to reduce paper consumption and to shift

menghemat penggunaan kertas dan menuju pada *paperless administration*. Sementara dalam kondisi penggunaan kertas tak bisa dihindari, maka semaksimal mungkin dilakukan pengecekan naskah secara teliti sebelum dicetak sehingga tidak perlu mencetak ulang.

Di samping itu, melalui penghematan penggunaan kertas, Perseroan memperoleh manfaat lainnya yaitu peningkatan produktivitas, penghematan biaya, serta efisiensi tempat. Wujud konkret atas penghematan penggunaan kertas, dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut:

1. Pengembangan teknologi informasi, sehingga penggunaan kertas secara bertahap dialihkan melalui aplikasi teknologi.
2. Dokumen Perseroan dikonversi dalam bentuk digital, dan diarsipkan dalam aplikasi teknologi yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya yang ada di Perseroan, sehingga dokumen dalam bentuk kertas dapat diminimalkan penggunaannya.
3. Pembatasan penggunaan kertas pada aktivitas administrasi di setiap unit kerja di Perseroan.

Adapun volume penggunaan kertas di tahun 2020 tercatat sebanyak 711,5 Rim. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melakukan penghematan dalam penggunaan kertas sebagai bentuk kepedulian Perseroan terhadap pelestarian lingkungan hidup.

PENGELOLAAN PENGGUNAAN ENERGI

Salah satu komitmen menjaga kelestarian lingkungan hidup diwujudkan Perseroan melalui kebijakan penggunaan energi yang efektif dan efisien, khususnya penggunaan energi listrik, bahan bakar, dan air. Perseroan senantiasa berupaya untuk menggunakan energi seefektif dan seefisien mungkin dalam setiap melaksanakan aktivitas bisnisnya. Adapun pengelolaan penggunaan energi yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan Listrik

Pelindo 1 menjadi salah satu perusahaan yang turut mendukung penghematan listrik dalam operasional Perseroan. Di samping itu, Pelindo 1 juga telah memperoleh sertifikat laik operasi untuk pusat listrik tenaga diesel (*generator set*), berdasarkan laporan inspeksi teknik kelaikan operasi yang berlaku hingga tanggal 5 Juni 2023 oleh Lembaga Inspeksi Teknik PT Nalendra Halilintar Samudra.

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan dalam mengurangi penggunaan energi listrik, diwujudkan melalui aktivitas sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan Perseroan terkait penggunaan dan penghematan energi listrik pada aktivitas Perseroan, serta melakukan *monitoring* atas penerapannya.

towards *paperless administration*. While the usage of paper is inevitable, the Company always does its best to check and proofread the documents it produced to make sure that reprinting is unnecessary.

Furthermore, the Company obtains other benefits of paper consumption reduction, namely improvement in productivity, cost-saving, and space efficiency. The concrete realization of paper consumption reduction is observable in the following activities:

1. Development of information technology, with which the paper consumption is to be gradually reduced and replaced by technology usage.
2. The Company's documents are converted into digital format and archived in an application that is integrated with other applications used within the company, so that the usage of paper documents can be reduced.
3. Limitation of paper usage in the administration of each work unit within the Company.

The paper consumption volume in 2020 was 711.5 Rims. The Company is committed to reduce paper consumption as manifestation of the Company's concern for environmental preservation.

ENERGY CONSUMPTION MANAGEMENT

The Company's commitment to preserve the environment is proven through the policy of effective and efficient energy consumption policy, especially the consumption of electricity, fuel, and water. The Company always seeks to use energy as effectively and efficiently as possible in carrying out its business activities. The energy consumption management measures taken by the Company are as follows:

1. Electricity Consumption

Pelindo 1 is among the companies contributing to electricity saving in its operating practices. In addition, Pelindo 1 has obtained the commissioning certificate valid until 5 June 2023 for its diesel generator set according to commissioning technical inspection performed by Technical Inspection Institution PT Nalendra Halilintar Samudra.

The Company's effort to reduce electricity consumption is shown in the following measures:

- a. Adoption of a company-wide policy regarding electricity consumption and saving in the Company's activities and the monitoring of the implementation thereof.





- b. Sosialisasi kepada seluruh karyawan akan pentingnya penggunaan listrik sesuai dengan kebutuhan, guna mendukung efisiensi penggunaan energi listrik.
- c. Penggunaan lampu hemat energi untuk penerangan kantor.

- b. Dissemination to employees on the importance of using electricity as needed in order to support electricity consumption efficiency.
- c. Usage of energy saving light bulbs at the offices.

Adapun perbandingan volume penggunaan listrik di tahun 2020 dan 2019, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Comparison between the electricity consumption in 2020 and 2019 is available in the below table.

PERBANDINGAN PENGGUNAAN LISTRIK 2019-2020
2019-2020 ELECTRICITY CONSUMPTION COMPARISON

	2020 (Kwh)	2019 (Kwh)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease (%)
Volume Penggunaan Listrik Electricity Consumption Volume	26.368.693	21.932.275	30,45%

Pada tahun 2020 konsumsi listrik mengalami peningkatan konsumsi listrik sebesar 30,45% dibanding tahun 2019. Hal ini diakibatkan peningkatan konsumsi listrik untuk kebutuhan sendiri dan kebutuhan *tenant* di kawasan Pelindo 1. Peningkatan konsumsi listrik untuk kebutuhan sendiri disebabkan pemakaian gedung baru Graha Pelindo 1 secara penuh selama tahun 2020 dan peningkatan utilisasi gedung oleh anak perusahaan Pelindo 1. Selain itu peningkatan konsumsi listrik juga diakibatkan peningkatan kebutuhan *tenant* yang dapat disebabkan peningkatan aktivitas industri di kawasan Pelindo 1.

The 2020 electricity consumption rose by 30.45% from 2019. This was due to increasing electricity consumption level for Pelindo 1 internal needs and tenants in Pelindo 1 estates. The internal electricity consumption increased due to the fact that the new building Graha Pelindo 1 started to be fully used in 2020 as well as general increase in building utilization by Pelindo 1 subsidiaries. Another factor contributing to increasing electricity consumption is the increasing needs of tenants, which among others was caused by the increasing industrial activities in Pelindo 1 estates.

2. Penggunaan Bahan Bakar

2. Fuel Consumption

Sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan hidup, Pelindo 1 telah menerapkan kebijakan untuk menggunakan jenis bahan bakar yang tepat dan lebih ramah terhadap lingkungan. Kebijakan ini telah diterapkan Pelindo 1 untuk penggunaan bahan bakar pada kendaraan operasional Perseroan. Dimana Pelindo 1 telah menerapkan penggunaan bahan bakar jenis Pertamina pada setiap kendaraan operasional Perseroan, baik roda dua maupun roda empat. Penggunaan Pertamina diyakini lebih dapat memberikan gas buangan yang ramah lingkungan jika dibandingkan dengan bahan bakar jenis bensin ataupun solar.

As proof of the Company's responsibility towards the environment, Pelindo 1 has implemented a policy concerning usage of correct and more environment-friendly fuel types. Such policy has been implemented for Pelindo 1 operational vehicles. Pelindo 1 has been exclusively using the Pertamina fuel type for all operational vehicles of the Company, which includes motorcycles and cars. Pertamina is chosen for its allegedly more environment-friendly gas emission compared to diesel and other types of gasoline.

Adapun perbandingan volume penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamina di tahun 2020 dan 2019, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Comparison between the fuel consumption in 2020 and 2019 is available in the below table.

PERBANDINGAN PENGGUNAAN BBM 2019 - 2020
2019-2020 FUEL CONSUMPTION COMPARISON

	2020 (Liter)	2019 (Liter)	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease (%)
Volume Penggunaan BBM Fuel Consumption Volume	10.998.700	11.861.100	7,27%

Konsumsi penggunaan BBM di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,27% dibanding tahun 2019 yang lebih dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah produksi alat bongkar muat dan kapal. Sementara itu, terdapat cabang yang mengalami peningkatan dan penurunan konsumsi BBM. Adapun penurunan paling besar terdapat pada Cabang Dumai.

3. Penggunaan Air

Pelindo 1 bekerja sama dengan Perusahaan Air Minum (PAM) setempat, dalam menyediakan pasokan air bersih di Perseroan baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, maupun di Kantor Cabang. Perseroan menghimbau agar seluruh insan Pelindo 1 menggunakan air dengan hemat dan sesuai kebutuhan, untuk menjaga ketersediaan air bersih. Meski merupakan suatu kebutuhan, penggunaan air senantiasa dilakukan pembatasan agar tidak terjadi pemborosan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu, Perseroan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan Perseroan terkait penggunaan dan penghematan air di Perseroan, serta melakukan *monitoring* atas penerapannya.
- Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh karyawan akan pentingnya penghematan air di Perseroan.
- Penetapan anggaran penggunaan air di Perseroan setiap tahunnya guna keperluan air di kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang, yang telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan dan cadangan Perseroan.

Adapun perbandingan volume penggunaan air di tahun 2020 dan 2019, adalah sebagaimana terlampir berikut ini:

PERBANDINGAN PENGGUNAAN AIR 2019 - 2020 2019-2020 WATER CONSUMPTION COMPARISON

	2020 (M ³)	2019 (M ³)	Kenaikan/ Penurunan (%)
Volume Penggunaan Air	459.641	525.407	12,52% 

Penggunaan air di di kawasan Pelindo 1 diklasifikasikan berdasarkan jenis pelanggan industri, niaga, rumah tangga, instansi pemerintah, sosial, dinas Pelindo 1, dan penjualan air untuk kapal. Pada tahun 2020 perjanjian kerja sama pemeliharaan dan pengoperasian instalasi air dengan PT Metito telah berakhir dan kembali dioperasikan oleh pihak Cabang masing-masing.

Secara umum, setiap klasifikasi konsumsi air di tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga konsumsi secara keseluruhan mengalami penurunan 12,52% dibanding tahun 2019.

The fuel consumption volume in 2020 decreased by 7.27% from the figure recorded in 2019, which was partly caused by the decreasing amount of loading/unloading equipment production and ships. Some port branches increased their fuel consumption, while others had reduced fuel consumption. The Dumai Port Branch showed the largest decrease in fuel consumption.

3. Water Consumption

Pelindo 1 collaborates with the respective local water supply company (PAM) to supply clean water to the Head Office, Regional Offices and Branch Offices of the Company. The Company calls on all employees to use water sparingly and as necessary to ensure the availability of clean water. While essential, water consumption needs to be limited to avoid waste and unnecessary usage. For that purpose, the Company has taken the following measures:

- Adoption of a company-wide policy regarding water consumption and saving in the Company's activities and the monitoring of the implementation thereof.
- Dissemination and education to all employees on the importance of water saving.
- Allocation for water consumption in the Company's annual budget in the Head Office, regional offices, and branch offices is calculated according to necessity and the Company's reserve.

Comparison between the water consumption in 2020 and 2019 is available in the below table:

Water consumption in Pelindo 1 estates is classified by type of user: industrial customers, business, housekeeping, government bodies, social, Pelindo 1 offices, and sale of water to ships. The water installation maintenance and operation agreement with PT Metito ended in 2020, after which the water operations are performed by the respective branch.

In general, each category of water consumption decreased in 2020, with the total water consumption decreasing by 12.25% from 2019.



PENGELOLAAN LIMBAH

Pelindo 1 terus berupaya dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan pengelolaan limbah untuk meminimalisir dampak pencemaran lingkungan dan menjaga kesehatan karyawan. Perseroan senantiasa berupaya melakukan pengurangan jumlah limbah anorganik yang berasal dari aktivitas Perseroan. Salah satu upaya yang dilakukan Perseroan adalah dengan melakukan koordinasi antara Perseroan dengan Pemerintah Daerah setempat dan bekerja sama dengan pengelola sampah, agar pembuangan limbah anorganik dapat dilaksanakan sesuai prosedur. Selain itu, Perseroan juga telah merancang pengelolaan limbah terpadu di area pelabuhan agar dapat memperlancar kegiatan operasional pelabuhan.

Sementara itu, setiap tahunnya, Perseroan juga telah mengalokasikan anggaran untuk dipergunakan dalam upaya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Anggaran ini merupakan dana yang telah dipersiapkan oleh Perseroan, guna menangani dan mengelola lingkungan hidup yang terdampak oleh aktivitas Perseroan, sehingga kualitas lingkungan hidup dapat terjaga. Adapun program yang dilaksanakan oleh Perseroan, mencakup penyusunan dokumen kebijakan lingkungan hidup dan pelestariannya, serta melakukan perawatan terhadap peralatan bongkar muat, guna memastikan peralatan dalam keadaan optimal sehingga pencemaran gas buang dapat ditekan seminimal mungkin.

ANALISIS DAN PEMANTAUAN DAMPAK LINGKUNGAN

Perseroan telah melakukan pemantauan lingkungan pada setiap wilayah kerja Pelindo 1, yang dilaksanakan melalui pengambilan sampel air dan udara ambien, guna memastikan kesesuaian antara parameter lingkungan dengan baku mutu yang telah dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan. Perseroan juga telah melakukan upaya pengendalian lingkungan, melalui pengurangan limbah dari aktivitas bongkar muat, mengoperasikan *road sweeper* secara rutin untuk menyapu debu di badan jalan, mengelola limbah pelabuhan, dan melakukan penghijauan melalui penanaman pohon.

Sebagai wujud kepedulian Perseroan atas pentingnya pengelolaan lingkungan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang ijin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Perseroan telah memiliki dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) pada seluruh pelabuhan Pelindo 1.

WASTE MANAGEMENT

Pelindo 1 endeavors to maintain a clean and healthy environment, and to that end the Company manages the waste it produces to minimize the impact to the environment and to keep the employees healthy. The Company strives to reduce the inorganic waste resulting from the Company's activities. One of the measures taken by the Company is coordinating with the Local Government and making agreements with waste management companies to make sure that inorganic waste is disposed properly. Furthermore, the Company has designed integrated waste management facilities at port areas to support port operational activities.

The Company has allocated part of the annual budget to be spent on effort to maintain a clean and healthy environment. This budget allocation is used by the Company to handle and manage the environmental impacts of the Company's activities, for the purpose of maintaining environment quality. The programs implemented by the Company include formulation of environment and preservation policy documents and maintenance of loading/unloading equipment to make sure that the equipment stay in optimum condition to minimize pollution from gas emission.

ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS AND MONITORING

The Company has started environmental monitoring in each of Pelindo 1 operating areas, which is conducted by water and ambient air sampling, to ensure the compliance of environmental parameters with the quality standards defined in environmental documents. The Company has also made concrete effort to control the environmental aspects of its operations by reducing the waste resulting from loading/unloading activities, periodically using road sweepers to clean dust on road, managing port waste and improving plantation by planting trees.

To prove the Company's awareness of the importance of environmental management, and to conform to the prevailing laws and regulations, especially Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permits and Minister of Environment Regulation No. 16 of 2012 on Formulation of Environmental Documents, the Company has possessed Environmental Impact Analysis for all Pelindo 1 ports.

PERTIMBANGAN ASPEK LINGKUNGAN TERKAIT KERJA SAMA DENGAN MITRA KERJA, KONSUMEN ATAU PELANGGAN

Dalam kegiatan usaha yang dilakukan, Perseroan kerap melakukan proses kerja sama dengan beberapa mitra kerja, yang pada setiap prosesnya, Perseroan senantiasa mempertimbangkan kualitas material yang akan digunakan oleh mitra kerja. Perseroan pun senantiasa menganalisa setiap material yang akan digunakan oleh mitra kerja untuk meminimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan. Begitupun dengan konsumen atau pelanggan, Perseroan senantiasa mempertimbangkan aspek lingkungan melalui himbauan atau kebijakan agar para konsumen atau pelanggan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas yang dilakukan di kawasan Pelindo 1. Selain itu, baik mitra kerja, konsumen atau pelanggan, diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, sebagai upaya Perseroan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

PELAKSANAAN INISIATIF PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Pelindo 1 senantiasa melaksanakan inisiatif program tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup sebagai bentuk kontribusi Perseroan dalam memberikan manfaat yang lebih luas bagi peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan turut mendukung aksi penanaman pohon yang dilakukan oleh Yayasan Budaya Hijau Indonesia (YBHI) di Demplot Pertanian Organik YBHI Simalingkar B, Medan, pada tanggal 11 Juni 2020. Sebanyak 800 batang pohon produksi buah di tanam di demplot ini, tepatnya di wilayah selatan Kota Medan yang merupakan zona penyangga air/zona resapan air untuk kebutuhan Kota Medan.

Pelindo 1 terus berkomitmen memberikan dukungan bagi program pengembangan lingkungan hidup maupun pengelolaan lahan pertanian, yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat luas. Dimana selain penanaman pohon, juga dilakukan penanaman bibit Jagung Bisma Komposit di lahan seluas 4 Ha, nantinya 100% jagung ini akan dikembangkan menjadi bibit unggul. Penanaman perdana Jagung Bisma Komposit ini dirawat total tanpa menggunakan bahan kimia dan hanya mengandalkan *Eco Enzyme* dan Pupuk Organik Cair (POC).

CONSIDERATION OF ENVIRONMENTAL FACTORS IN COOPERATION AGREEMENTS WITH PARTNERS AND CUSTOMERS

During the course of running its business activities, the Company often need to sign cooperation agreements with business partners, in which the Company always gives due consideration for the quality of the materials to be used by the business partners. The Company analyzes each material to be used by the business partners to minimize the environmental impacts of such materials. Likewise, in its relations with the customers, the Company always consider the environmental aspects by posting warning signs and adopting relevant policies to make sure that the customers pay attention to the environment in every activity carried out in Pelindo 1 estates. Both business partners and customers are obliged to follow the prevailing laws and regulations concerning the environment, which proves the Company's commitment to preserve the environment.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES CONCERNING THE ENVIRONMENT

Pelindo 1 created corporate social responsibility programs concerning the environment as contribution to provide a wider benefit for the sustainable improvement of the environment. One of such programs is supporting the tree plantation project carried out by the Yayasan Budaya Hijau Indonesia (YBHI) at the YBHI Simalingkar B Organic Demonstration Plot, Medan, on 11 June 2020. 800 fruit producing trees were planted at the plot located in the southern part of the city of Medan, which is the water catchment area of the city.

Pelindo 1 is committed to support environmental development programs and farm lands, which is expected to provide benefits for the community and the environment itself. Aside from tree plantation, the Company also planted Bisma composite corn seeds in a 4 Ha land, of which 100% of the corn produced will be developed into quality seeds. The first planting of the Bisma composite corn seeds was carried out without any chemicals, relying solely on *Eco Enzyme* and liquid organic fertilizer.





Pelindo 1 turut serta dalam aksi penanaman pohon yang dilakukan Yayasan Budaya Hijau Indonesia (YBHI) di Demplot Pertanian Organik YBHI Simalingkar B, Medan, pada 11 Juni 2020
Pelindo 1 participated in the tree plantation project by Yayasan Budaya Hijau Indonesia (YBHI) at YBHI Organic Demonstration Plot Simalingkar B, Medan, on 11 June 2020

Pelindo 1 terus mewujudkan kepedulian dan komitmennya untuk berkontribusi nyata bagi kelestarian lingkungan hidup, khususnya kelestarian ekosistem laut di wilayah pesisir Belawan yang menjadi wilayah kerja Pelindo 1. Salah satunya melalui kegiatan penanaman 2.020 bibit *mangrove*, yang dilakukan Perseroan pada tanggal 12 Agustus 2020 yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Perseroan dalam rangka menyambut HUT RI ke-75 tahun. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 bertempat di Danau Siombak, yang bekerja sama dengan Rumah Mangrove Indonesia dan Rumah Baca Merah Putih.

Pelindo 1 translates its awareness and commitment into concrete initiatives to the environment, especially the maritime ecosystem in the coastal area of Belawan, which is one of Pelindo 1 operating areas. Among such initiatives was the planting of 2,020 mangrove seeds on 12 August 2020, which was part of the Company's 75th Indonesian independence day celebration. This activity was carried out on 12 August 2020 at the Siombak Lake, in cooperation with Rumah Mangrove Indonesia and Rumah Baca Merah Putih.

Mangrove sendiri merupakan ekosistem yang memberikan banyak manfaat bagi keseimbangan lingkungan, pencegah abrasi dan erosi, dan memperbaiki kawasan pesisir yang rusak agar hijau kembali. Penanaman *mangrove* ini dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu di sepanjang pesisir Danau Siombak, Kec. Medan Marelan dan muara sungai Bagan Deli, Kec. Medan Belawan. Diharapkan dengan penanaman mangrove ini dapat memperkuat pesisir dan mengurangi abrasi pantai. *Mangrove* sangat berfungsi sebagai pagar terdepan menjaga garis pantai, kemudian juga berguna sebagai tempat berkembangbiak biota laut, hingga menyediakan ekosistem alami serta memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya.

Mangrove is the part of the ecosystem which provides various benefits for environmental balance, among others prevention of abrasion and erosion and reforestation of damaged coastal regions. The mangrove planting took place in 2 (two) locations: along the coast of the Siombak Lake, District Medan Marelan and the estuary of the Bagan Deli river, District Medan Belawan. The mangrove trees are expected to strengthen the coastline and reduce coastal abrasion. Mangrove trees also function as fence of the coast, breeding place for marine biota, and natural ecosystem for various flora and fauna, as well as providing economic benefits for the nearby community.



Kegiatan penanaman 2.020 bibit mangrove pada 12 Agustus 2020, bertempat di Danau Siombak, yang bekerja sama dengan Rumah Mangrove Indonesia dan Rumah Baca Merah Putih
Planting of 2,020 mangrove seeds on 12 August 2020 at the Siombak Lake in cooperation with Rumah Mangrove Indonesia and Rumah Baca Merah Putih

DAMPAK KUANTITATIF ATAS KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Pelindo 1 telah melakukan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terkait lingkungan hidup untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan, sebagai bentuk kepedulian Perseroan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Atas kegiatan dan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan terkait lingkungan hidup yang telah dilaksanakan Perseroan, menjadikan tingkat/kondisi lingkungan hidup di area kerja pelabuhan dapat terkontrol dan terkendali dengan baik. Hal tersebut terlihat dari hasil pemantauan lingkungan yang menunjukkan:

1. Aspek Sosial ekonomi budaya
Tidak menunjukkan adanya gangguan terhadap persepsi masyarakat, pendapatan, kesempatan bekerja, berusaha dan perekonomian masyarakat di areal pelabuhan.
2. Aspek Kesehatan
Untuk semua cabang relatif tidak memiliki masalah tetapi memperlihatkan timbulnya potensi-potensi gangguan kesehatan untuk beberapa pelabuhan.
3. Aspek Fisika-Kimia
Tidak ada yang melewati baku mutu
4. Aspek Biologi
Tidak ada yang melewati baku mutu

Dampak kuantitatif atas pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terkait lingkungan hidup juga dapat dilihat dari aspek penggunaan kertas dan energi dalam operasional Perseroan. Sepanjang tahun 2020, penggunaan kertas rata-rata tercatat sebanyak 711,5 Rim yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan yang bersifat administratif dalam kondisi penggunaan kertas tak bisa dihindari. Sementara konsumsi listrik sepanjang tahun 2020 rata-rata tercatat sebesar 26.368.693 kWh, mengalami peningkatan, sebesar 30,45% dibanding tahun 2019 yakni rata-rata sebesar 21.932.275 kWh. Hal ini seiring dengan meningkatnya aktivitas industri di kawasan Pelindo 1. Kemudian konsumsi BBM sepanjang tahun 2020 rata-rata tercatat sebesar 10.998.700 Liter, mengalami penurunan sebesar 7,27% dibanding tahun 2019 yakni rata-rata sebesar 11.861.100 Liter. Adapun penggunaan air sepanjang tahun 2020 rata-rata tercatat sebesar 459.641 M³, mengalami penurunan sebesar 12,52% dibanding tahun 2019 yakni rata-rata sebesar 525.407 M³.

QUANTITATIVE IMPACTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES CONCERNING THE ENVIRONMENT

Pelindo 1 has carried out corporate social responsibility programs concerning the environment to create a positive impact on the environment, as proof of the Company's awareness of the importance of environmental preservation. Thanks to the environmental corporate social responsibility activities and management of the Company, the environmental health and conditions in and around are now well and controlled. This was obvious in the results of environmental monitoring that show:

1. Social, economic and cultural aspects
No observable disturbance with regard to community perception, opinion, chance to work and do business, and the economy of the coastal community near the ports.
2. Health aspect
No serious health problem in any of the branches, but some branches show potential health problems.
3. Physical-chemical aspect
No quality standard breach
4. Biological aspect
No quality standard breach

The quantitative impacts of corporate social responsibility activities concerning the environment can also be seen in the paper and energy consumption in the Company's operations. Throughout 2020, the average paper consumption rate was recorded at 711.5 rims, most of which is used for administrative needs, where the use of paper is inevitable. The average electricity consumption in 2020 was 26,368,693 kWh, increasing by 30.45% from 2019, in which the electricity consumption was recorded at 21,932,375 kWh. The increase was due to the increasing industrial activities in Pelindo 1 estates. The average fuel consumption in 2020 was 10,998,700 liters, decreasing by 7.27% from 2019, in which the fuel consumption was recorded at 11,861,100 liters. The average water consumption in 2020 was 459,641 M³, decreasing by 12.52% from 2019, in which the water consumption was recorded at 525,407 M³.





MEKANISME DAN SARANA PENGADUAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Pelindo 1 membuka kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pengaduan terkait pelanggaran pencemaran lingkungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan Perseroan. Terkait hal tersebut, Perseroan telah memiliki sistem yang mengatur mengenai penanganan dan penyelesaian terhadap pengaduan atau keluhan terkait permasalahan lingkungan. Setiap pengaduan dapat langsung disampaikan kepada Divisi Sistem Manajemen sebagai bagian yang bertanggung jawab, yang setelah diproses dan diteliti akan dilakukan tindak lanjut terkait pengaduan tersebut. Sementara itu, Perseroan juga telah memiliki Tim Tanggap Darurat Lingkungan yang disosialisasikan kepada setiap orang yang akan memulai pekerjaan di Pelabuhan. Sosialisasi dilakukan dengan *safety briefing* dan menempelkan pengumuman terkait Tim Tanggap Darurat, Nomor darurat instansi terkait pada setiap pos pengamanan seperti KP3, Pemadam Kebakaran, POMAL, Dinas Kesehatan, Otoritas Pelabuhan, Kesyabandaran dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk tahap penanganan masalah lingkungan, Perseroan juga sudah memiliki peralatan penanggulangan seperti *Oil Boom*, Hidran, APAR dan Mobil Damkar.

Perseroan juga telah memiliki sarana pengaduan permasalahan lingkungan, yang dapat disampaikan melalui nomor kontak *call center* pada masing-masing cabang, atau melalui *email* dengan alamat environmental-dept@pelindo1.co.id maupun ke *instagram* dengan alamat [@hsse_pelindo1](https://www.instagram.com/hsse_pelindo1).

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak menerima pengaduan, pelaporan, dan keluhan dari pihak manapun, yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN

Mengelola perusahaan sesuai dengan standar kelayakan merupakan salah satu langkah Pelindo 1 dalam meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Pelindo 1 telah memiliki sertifikasi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Melalui sertifikasi ini, Perseroan berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan tanggap terhadap perubahan kondisi lingkungan dalam menyeimbangkan kebutuhan sosial-ekonomi Perseroan dan lingkungan sekitar.

COMPLAINT HANDLING MECHANISM CONCERNING THE ENVIRONMENT

Pelindo 1 is open to complaints from any party regarding environmental damage resulting from the Company's business activities. For that purpose, the Company employs a system to regulate the handling or resolution of complaints related to the environment. Each complaint may be directly communicated to the Division of Management System as the responsible department to then be processed, examined and followed up on. The Company also has an Environmental Emergency Response Team, which all the employees are made to be aware of before deployment at Ports. The dissemination is carried out by way of safety briefing and posting signposts containing information on the Response Team and the emergency number of the related government bodies such as KP3, Fire Fighters, POMAL, Health Office, Port Authority, Harbormaster's Office and Office of Environment and Forestry. In order to better handle environmental problems, the Company has at its disposal the necessary equipments, such as Oil Boom, Hydrant, fire extinguisher and fire truck.

Additionally, the Company has a functional complaint handling mechanism for environmental problems, which can be communicated through the call center contact number of the respective branch, by email at environmental-dept@pelindo1.co.id or via Instagram at [@hsse_pelindo1](https://www.instagram.com/hsse_pelindo1).

As of the end of 2020, the Company has not received any complaint or report from any party related to environmental problems.

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION

Managing the company in accordance with the prevailing quality standards is one of the measures taken by Pelindo 1 to improve the confidence of the stakeholders. In the course of running its business activities, Pelindo 1 has been awarded ISO 14001:2015 certificate on Environmental Management System. With such certificate at hand, the Company is committed to protect the environment and ready to respond to any environmental change to achieve balance between the Company's social-economic necessities and the environment.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING LABOR AND OCCUPATIONAL, HEALTH, AND SAFETY

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Pelindo 1 menyadari sepenuhnya, bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset strategis yang memiliki peranan sangat penting untuk kelangungan usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa memenuhi kepentingan seluruh karyawan dengan menitikberatkan pada kualitas penerapan prinsip Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3), yang baik, demi memperoleh produktivitas terbaik serta hasil kerja yang optimal dari aktivitas usaha yang dijalankan.

Perseroan memandang keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional tidak lepas dari komitmen dan integritas yang tinggi dari segenap karyawan Pelindo 1. Oleh karena itu, karyawan sebagai *human capital* memiliki peran penting dalam kelangungan bisnis Perseroan. Untuk itu, dalam usaha meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional tidak lepas dari komitmen dan integritas yang tinggi dari segenap karyawan Perseroan.

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan terkait Ketenagakerjaan, dan K3, Pelindo 1 mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan serikat karyawan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditanda tangani oleh manajemen Perseroan dengan Serikat Pekerja Pelindo 1 tanggal 26 April 2019 Bab XIII Pasal 73 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

DAMPAK DAN RISIKO KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA YANG RELEVAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

Dampak dan risiko terkait kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan bidang ketenagakerjaan dan K3 utamanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan dan hubungan industrial, antara lain kesetaraan *gender* dalam kesempatan kerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan, penggunaan tenaga kerja lokal, remunerasi dan kesejahteraan karyawan, promosi, kebebasan berserikat dan pelatihan pensiun, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Pelindo 1 memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dampak dan risiko tersebut.

COMMITMENT AND POLICY

Pelindo 1 understands that human resources are a strategic asset that plays a crucial role in the Company's success. For that reason, the Company endeavors to meet the needs of all employees by focusing on the quality of Occupational, Health, and Safety principles, for the purpose of maximizing productivity and obtaining the best results out of the business activities.

The Company recognizes that the commitment and integrity of Pelindo 1 employees are vital for the success of its operation. Therefore, employees as human capital are indispensable to the Company's economic success. If the Company are to improve upon its operational success, then it has to recognize that the commitment and integrity of Pelindo 1 employees are required.

Pelindo 1 implementation of corporate social responsibility initiatives concerning labor and occupational health and safety refers to Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement, Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety and Collective Bargaining Agreement (CBA) between management and employees, and the Collective Bargaining Agreement signed by the Company management and Pelindo 1 Workers' Union on 26 April 2019 Chapter XIII Article 73 on Occupational Health and Safety Management System.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IMPACTS AND RISKS RELEVANT TO THE COMPANY'S BUSINESS ACTIVITIES

The impacts and risks related to corporate social responsibility initiatives concerning labor and occupational health and safety mainly pertain to labor and industrial relations aspects, such as gender equality and equal work opportunity, equal training and education programs, employment of local candidates, employee remuneration and welfare, promotion, freedom of assembly, retirement preparation training, and obviously, occupational health and safety. Pelindo 1 ensures that the Company adheres to the laws and regulations relevant to those impacts and risks.



Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, Pelindo 1 juga melakukan penilaian kinerja bagi seluruh karyawan tetap. Penilaian kinerja memiliki dua tujuan yaitu tujuan evaluasi kinerja dan kompetensi karyawan, dan tujuan pengembangan yakni setelah mengetahui kemampuan kerja karyawan maka Perseroan akan mencoba meningkatkan kompetensi karyawan. Hal tersebut sejalan dengan standar penilaian kerja bagi insan Pelindo 1 yang terdiri atas penilaian kinerja dan evaluasi kompetensi.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Berikut ini merupakan target dan rencana kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, di antaranya sebagai berikut:

- Terpenuhinya hak-hak karyawan;
- Terjaminnya kesetaraan *gender* dalam kesempatan kerja, maupun kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pelatihan bagi seluruh karyawan;
- Tumbuhnya loyalitas dan produktivitas terbaik;
- Terciptanya kondisi kerja *zero accident* dan *zero* penyakit akibat kerja;
- Memastikan lokasi kerja yang aman bagi para pekerja dengan rutin melaksanakan inspeksi K3;
- Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai kebutuhan bagi setiap tenaga kerja;
- Memastikan ketersediaan alat-alat tanggap darurat seperti APAR, *smoke detector* dilokasi kerja;
- Melaksanakan *Drill* tanggap darurat K3;
- Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi tenaga kerja berisiko tinggi; serta
- Melakukan Audit Internal untuk memastikan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

In order to improve the quality of human resources, Pelindo 1 also carries out regular performance evaluation on all permanent employees. The performance evaluation has two main goals, evaluation goal, which means evaluating the performance and competency of the employees and development goal, which means that after the competency level of the employees is known, the Company will seek to improve the competency of the employees. This is in line with Pelindo 1 work performance evaluation, which consists of performance evaluation and competency evaluation.

TARGETS AND PLANS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES CONCERNING LABOR AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Below are the targets and plans of corporate social responsibility activities concerning labor and occupational health and safety:

- Fulfillment of employee rights;
- Guarantee of gender equality and equal opportunity, as well as equality in obtaining training and education for all employees;
- Best possible loyalty and productivity;
- Work conditions leading to zero accident and zero disease;
- Ensuring that the workplaces are safe for the employees by conducting regular occupational health and safety inspection;
- Provision of the necessary personal protective equipment for each worker;
- Provision of rapid response equipment such as fire extinguishers and smoke detectors at the workplace;
- Performing rapid response occupational health and safety drills;
- Provision of regular medical check-ups for high-risk employees; and
- Performing internal audit to ensure that the programs are implemented as planned.

PROGRAM KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

PENGELOLAAN SDM

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelindo 1, dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Strategis SDM yang mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, menyusun program kerja, menyelenggarakan serta mengendalikan perencanaan strategis *human capital* Perseroan yang meliputi dan tidak terbatas pada perencanaan organisasi, pengembangan sistem manajemen *human capital*, analisa-analisa terkait sumber daya manusia (*People Analytic*), pengembangan potensi dan karier pegawai, manajemen bakat, remunerasi, kesejahteraan pegawai, pengelolaan tenaga kerja *outsourcing*, PKWT dalam rangka menunjang pencapaian tujuan Perseroan, memonitoring Rencana Kerja Bulanan (RKB) Individu pegawai Perseroan agar selaras dengan KPI Individu dan PKM Unit Kerja, serta pengembangan sistem teknologi pengelolaan manajemen *human capital*.

Selain itu, Perseroan juga memiliki Divisi Universitas Korporat yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan pegawai Perseroan, *Training Need Analysis (TNA)*, *Learning Management System*, *Knowledge Management*, kurikulum dan konten pembelajaran, program *in-house training* dan *public training* bagi pegawai Perseroan, melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai Perseroan secara periodik, pengembangan metode belajar, konsep pendidikan dan pelatihan, implementasi dan monitoring budaya dan tata nilai Perseroan ke dalam proses pekerjaan secara berkelanjutan, mencari peluang pendapatan serta pengembangan sistem teknologi pengelolaan Universitas Korporat.

Adapun pengelolaan SDM Pelindo 1 dilakukan dengan mengacu pada beberapa kebijakan, antara lain:

1. Pola Karier Pegawai;
2. Sistem Manajemen Kinerja;
3. *Training and Development*;
4. Sistem Manajemen Karier;
5. Tata Cara Rekrutmen; serta
6. Masa Persiapan Pensiun.

Sesuai dengan *Roadmap Human Capital PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 2019-2023* dengan tujuan utama di tahun 2023 ialah SDM Pelindo 1 mencapai level "*High Performing Organization=Well being Employee*", yang mana di tahun 2020 untuk pengelolaan SDM berfokus pada Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas HC dengan Penerapan *Data Analytic* melalui program yang telah direncanakan, di antaranya:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS CONCERNING LABOR AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Pelindo 1 Human Resource Management falls under the responsibility of the Division of Human Resource Strategic Management tasked with preparing development programs, formulating work programs, conducting and monitoring Company human capital strategic planning including but not limited to organizational planning, human capital management system development, people analytics, employee potential and career development, talent management, remuneration, employee welfare, outsourced labor management, temporary work appointment agreements, in order to contribute to achieving the Company's goals, monitoring individual employee monthly work programs to ensure conformity with individual key performance indicators and work unit PKM, as well as development of human capital management technology system.

The Company also has at its disposal the Division of Corporate University, which is tasked to plan, formulate, implement and evaluate employee training and education programs, as well as to prepare Training Need Analysis, Learning Management System, Knowledge Management, learning curriculum and content, in-house training and public training programs for the employees, regular report of employee training and education program implementation, learning method development, training and education concepts, implementation and regular monitoring of the integration of company culture and value into the work processes, search for income opportunity and development of Corporate University management technology system.

Pelindo 1 human resource management is carried out in conformity to certain policies, namely:

1. Employee Career Pattern;
2. Performance Management System;
3. Training and Development;
4. Career Management System;
5. Recruitment Procedure; and
6. Retirement Preparation Program.

In accordance with 2019-2021 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Human Capital Roadmap with the end goal of achieving "*High Performing Organization = Employee Well Being*" in 2023, for which in 2020 the human resource management was focused on human capital capacity and capability development focusing on data analytics implementation through the planned programs including:



- a. Pengembangan kapabilitas Pegawai sebagai data analis;
- b. Implementasi *Career Management System (Succession plan)*;
- c. Pengembangan Aplikasi *Human Capital Analytic*;
- d. Penyusunan *Fast track career Path*;
- e. *Talent Acquisition*;
- f. Melengkapi data pada Aplikasi ITMS sebagai salah satu bahan *People Analytic* (data assessment, sosiometri, passion, social recognition, achievement, dll);
- g. TNA yang *inline* dengan strategi Perusahaan;
- h. Pengembangan LMS dan bisnis proses Corpu;
- i. Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan proses Penilaian Kinerja;
- j. Menciptakan ruang dan lingkungan kerja yang mendorong munculnya inovasi pegawai dan ramah milenial.

PERENCANAAN SDM DAN SISTEM REKRUTMEN

Perseroan telah memiliki dan menyusun *Man Power Planning* sebagai dasar pertimbangan kebutuhan tenaga kerja dengan mempertimbangkan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, dengan mempertimbangkan perkembangan usaha, Perseroan menerapkan strategi pemenuhan SDM yang tepat, akurat dan cepat, dengan tetap memperhatikan kualitas ataupun kompetensi dasar para kandidat. Mekanisme rekrutmen dilaksanakan secara selektif yang dilakukan oleh lembaga profesional atau Perusahaan sendiri, dengan tahapan seleksi melalui tes administrasi, wawancara, psikotes/asesmen serta tes kesehatan yang selanjutnya disetujui oleh pejabat berwenang memutus sesuai ketentuan.

Strategi rekrutmen yang diterapkan Perseroan antara lain melalui proses rekrutmen yang terkelola dengan baik diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam melakukan rekrutmen, Perseroan membuka kesempatan seluas-luasnya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Di sepanjang tahun 2020, Pelindo 1 tidak melakukan rekrutmen karyawan baru, hal ini dikarenakan Perseroan melakukan efisiensi dan optimalisasi jumlah karyawan yang ada. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi, Perseroan melakukan program-program *Quick Win* terkait pengelolaan SDM lainnya dalam mengantisipasi dampak pandemi di antaranya:

1. Menjalankan Protokol kesehatan yang diberikan oleh Tim *Task Force COVID-19*;
2. Pembatasan jumlah tenaga di kantor dengan kebijakan 50% *Work From Home* disesuaikan kebutuhan unit kerja/cabang;
3. Mengadakan rapat-rapat secara *online*;
4. Mengoptimalkan pelatihan melalui *e-learning*;
5. Mengoptimalkan penggunaan media dan teknologi dalam bekerja dan lainnya.

- a. Development of employee capability as data analyst;
- b. Implementation of career management system (succession plan);
- c. Development of human capital analytics application;
- d. Formulation of fast track career paths;
- e. Talent acquisition;
- f. Submission of complete data at ITMS application as material for people analytics (data assessment, sociometry, passion, social recognition, achievement, etc);
- g. TNA in line with Company strategy;
- h. Development of LMS and Corpu process business;
- i. Evaluation of Implementation of Performance Evaluation System and process;
- j. Creating work space and environment that are conducive to employee innovation and millennial-friendly.

HUMAN RESOURCE PLANNING AND RECRUITMENT SYSTEM

The Company has written a Manpower Planning as foundation on which the company's recruitment is based, with due consideration given to short-term and long-term planning. Taking into consideration the planned business development, the Company uses a precise, accurate and quick human resource recruitment strategy, without neglecting the quality and competency of the candidates. The recruitment mechanism is carried out selectively by an external recruitment professionals or by the Company itself, with stages of recruitment process comprising administrative test, interview, psychological test/assessment and medical check-ups, the results of which shall be approved by the relevant officers.

The recruitment strategy employed by the Company is to use well-managed recruitment process, which is expected to bring competent employees into the fold as necessity demands. The Company offers recruitment opportunity without discrimination of any kind based on ethnicity, religion, race or any other status.

Pelindo 1 did not recruit any new employee throughout 2020 due to the efficiency measures and optimization of the existing employees. On account of the impacts of the ongoing COVID-19 pandemic, the Company carries out Quick Win programs with regard to human resource management, including:

1. Implementation of health protocol as instructed by the COVID-19 Task Force;
2. Limiting the number of employees working from office with the 50% Work From Home policy adapted to the needs of respective work unit/branch;
3. Holding online meetings;
4. Performing corporate training with E-learning;
5. To optimize the utilization of media and technology for work and any other purpose.

Selain program-program tersebut perusahaan juga tetap melakukan inovasi dan implementasi program-program strategis SDM meliputi:

1. Implementasi Sistem Terintegrasi Manajemen Karier dan Talenta;
2. Seleksi dan penetapan *talent* sesuai kebutuhan organisasi;
3. Ratifikasi kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan SDM;
4. *Review* dan evaluasi organisasi kantor pusat dan Cabang pelabuhan;
5. *Survey* pegawai tahun 2020;
6. Implementasi dan sosialisasi Tata Nilai BUMN "AKHLAK";
7. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait rencana penyatuan Layanan BUMN kepelabuhanan dan lainnya.

KESETARAAN GENDER DALAM KESEMPATAN KERJA

Perseroan memberikan hak dan kesempatan kepada siapapun yang ingin bekerja di Pelindo 1 tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, *gender*, ataupun kondisi fisik lainnya. Perseroan menerapkan sistem rekrutmen secara terbuka untuk umum tanpa diskriminasi sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Demikian juga dalam hal program pengembangan karier, dimana Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dengan berfokus pada kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki.

PENGEMBANGAN SDM

Pelindo 1 menyadari bahwa SDM merupakan aset yang sangat penting untuk peningkatan kinerja Perseroan. SDM menjadi aset utama yang harus dikelola dan dikembangkan secara terus menerus. Melalui pendekatan *human capital*, Pelindo 1 memiliki komitmen dalam pengembangan SDM melalui berbagai program guna mendukung kapabilitas dan pertumbuhan Perseroan. Pengembangan SDM Perseroan dilakukan secara menyeluruh baik proses seleksi, penilaian kinerja, serta pelatihan dan pendidikan.

Untuk mencapai peningkatan kinerja yang telah ditargetkan, Perseroan mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan potensi karyawan secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses pembelajaran, antara lain menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan *workshop* baik secara internal maupun secara eksternal bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja, pengelolaan risiko, budaya Perseroan, serta profesionalitas.

Aside from the above programs, the Company also endeavors to innovate and implement other strategic human resource programs, such as:

1. Implementation of Integrated Career and Talent Management System;
2. Talent selection and determination according to the need of the organization;
3. Ratification of policies and regulations concerning human resource management;
4. Review and evaluation of Head Office and port branch organizations;
5. 2020 employee survey;
6. Implementation and dissemination of SOE Value "AKHLAK";
7. Coordination with relevant parties concerning integration of ports services and other SOE services.

GENDER EQUALITY AND EQUAL OPPORTUNITY

The company offers equal right and opportunity to anyone willing to work at Pelindo 1 without any kind of discrimination based on religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or any other physical attribute. The Company employs open recruitment system without any kind of discrimination according to necessity.

Likewise, with regard to career development, the Company gives equal rights and opportunities to the employees when it comes to promotion according to the employees' competencies and qualifications.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Pelindo 1 recognizes that human resources are indispensable for the purpose of improving the Company's performance. Human resources constitute an important asset that has to be managed and developed well. With the human capital approach, Pelindo 1 is committed to develop its human resources through various programs for the purpose of supporting the Company's capability and growth. The Company's Human Resource Development is carried out in a comprehensive manner, starting from the recruitment process, performance evaluation, and training and education.

To achieve the targeted performance improvement, the Company is committed to continually and sustainably develop the potential of its employees through the necessary learning process, among others by providing training, education and workshop internally or externally with help of third-party educational institutions. The education and training are expected to improve the knowledge and the skills of the employees, which would in turn improve productivity, risk management, company culture, and professionalism.





Pengembangan portal pembelajaran *online* serta media pelatihan melalui *webinar* juga merupakan salah satu solusi yang dilakukan dalam pengembangan SDM untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi. Seluruh program pembelajaran dan pengembangan kapabilitas disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi, organisasi, dan melalui proses *Training Needs Analysis* (TNA).

PROGRAM PELATIHAN DAN PEMBERIAN KESEMPATAN YANG SAMA KEPADA SELURUH KARYAWAN

Selain program pengembangan yang dilaksanakan secara *in-house*, Perseroan juga memfasilitasi karyawan untuk mengikuti *public training*, dengan memperhatikan hasil TNA dan kebutuhan dan mengacu pada strategi bisnis yang diterapkan Perseroan. Pelindo 1 memberikan kesempatan setara kepada seluruh karyawan untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensinya. Perseroan juga menyelenggarakan program pelatihan dan manajemen talenta bagi calon pemimpin masa depan yang disiapkan melalui program pengembangan manajemen.

Selain itu, Perseroan juga terus mengembangkan metode pembelajaran secara *digital* melalui program-program dari Universitas Korporat (*Corporate University*) yang meliputi *E-Learning*, *Community of Practice* (CoP), dan *Webinar*. Hal tersebut bertujuan agar proses serta hasil pembelajaran dapat lebih efektif, efisien dan maksimal dalam mengimplementasikan program-program pengembangan kapabilitas dan kompetensi karyawan.

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan sebanyak 221 pelatihan untuk 1.394 orang karyawan.

SISTEM PENGEMBANGAN KARIER

Perseroan menerapkan sistem pengembangan karier dengan menggunakan jenjang karier jabatan (berdasarkan struktur organisasi dan syarat jabatan) dan jenjang karier individu yang dilakukan dengan mengedarkan angket jenjang karier individu sesuai minat, bakat dan kompetensi karyawan. Jenjang karier jabatan dibuat dalam peta jenjang karier dan jenjang karier individu dibuat dalam matrik jenjang karier individu. Perseroan juga melaksanakan pendidikan berjenjang yaitu *Leadership Development Program* (LDP) Tingkat Muda dan Tingkat Madya. Selain itu, setiap tahunnya Perusahaan memberikan beasiswa kepada karyawan terbaiknya berupa beasiswa sekolah S-2 ke luar negeri.

Sejak tahun 2017, Perseroan juga telah melaksanakan penerimaan karyawan melalui jalur *Management Trainee* (MT). Di mana dengan adanya program tersebut, maka akan memudahkan dalam pemilihan *talent pool* pada Perseroan. Sementara sejak tahun 2019, Perseroan juga telah mengembangkan aplikasi pengelolaan karier dan talenta yang terintegrasi dengan *Human Capital Information System* (HCIS) dan SAP. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan *fairness* dan transparansi dalam pengelolaan karier di lingkungan Perseroan.

The development of an online learning portal and training medium via webinars are among the human resource development solutions utilized to improve efficacy and efficiency. The training and capability development programs are adapted to the competency, and organizational needs through Training Needs Analysis (TNA).

TRAINING PROGRAMS AND EQUAL OPPORTUNITY FOR ALL EMPLOYEES

In addition to in-house development programs, the Company also provides its employees with public training in accordance with the TNA, Company needs, and Company business strategies. Pelindo 1 offers equal opportunity for its employees to develop as dictated by their competency development needs. The Company also carries out talent development and management programs for future leaders prepared with management development program.

Pelindo 1 also continues to develop digital learning methods through Corporate University programs, including E-Learning, Community of Practice (CoP) and Webinars. This is intended to further optimize the efficacy, efficiency and benefit of learning process and results in the implementation of employee capability and competency development programs.

The Company carried out a total of 221 training programs for 1,394 employees.

CAREER DEVELOPMENT SYSTEM

In its career development system, the Company uses a position-based career path (according to organizational structure and position requirements) and individual career path, which is researched by individual career path surveys according to employee's interest, talent and competency. Position-based career path is laid out in a career path map, while individual career path is explained upon using individual career path metrics. The Company also carries out gradual education with junior and senior level leadership development program. The Company awards foreign scholarship to the best employees who wish to pursue Masters degrees abroad.

Since 2017, the Company has recruited new employees through the Management Trainee (MT) path. The programs is expected to make it easier for the Company to pick talents out of the available talent pool. The company has also developed a career and talent management application integrated with the Human Capital Information System and SAP since 2019. This is expected to improve fairness and transparency in the Company's career management.

SISTEM MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA

Perseroan telah menerapkan penilaian kinerja terhadap karyawan yang merupakan tanggung jawab bersama untuk mendukung kesuksesan kinerja bisnis Perseroan dan keberhasilan setiap individu karyawan. Sistem manajemen penilaian kinerja merupakan alat evaluasi pencapaian target dan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh karyawan maupun satuan kerja yang disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang Perseroan.

Penilaian kinerja masing-masing individu karyawan yang dilaksanakan secara objektif, berjenjang, periodik, dan transparan. Perseroan juga telah membangun Manajemen Kinerja Elektronik (MKE) yaitu aplikasi TI untuk pengelolaan kinerja pegawai. Komponen dalam penilaian kinerja pegawai adalah: Rencana Kinerja Bulanan (RKB), Kompetensi pegawai, *Key Performance Indicator* (KPI), dan Program Kerja Manajemen (PKM). MKE menggantikan fungsi pengelolaan kinerja pegawai yang sebelumnya dilakukan penilaian kinerja tahunan diubah menjadi penilaian kinerja bulanan. Manajemen mengambil langkah transformasi dalam pengelolaan kinerja pegawai dengan tujuan membangun budaya kinerja untuk meningkatkan performansi.

SISTEM REMUNERASI

Untuk memberikan kesejahteraan bagi para pegawainya, Perseroan telah menetapkan remunerasi pegawai telah mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya. Remunerasi yang diberikan kepada pegawai merupakan wujud komitmen kepatuhan Perseroan terhadap kewajiban atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di samping tentunya merupakan upaya Perseroan dalam membangun hubungan kemitraan dengan karyawan sebagai pemangku kepentingan internal. Kebijakan remunerasi pegawai, ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan (*fairness*) dan kompetitif (*competitiveness*), dan disesuaikan dengan faktor internal yakni bobot kerja atau jenjang jabatan serta faktor eksternal yaitu peraturan pengupahan pegawai berdasarkan standar Upah Minimum Regional (UMR).

KESEJAHTERAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang ketenagakerjaan serta mempertahankan karyawan, Perseroan senantiasa berupaya terus meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui berbagai aspek antara lain:

- Pemberian dan perbaikan remunerasi dan benefit, kepesertaan jaminan sosial BPJS Kesehatan, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan serta Asuransi;

PERFORMANCE EVALUATION MANAGEMENT SYSTEM

The Company applies an employee performance evaluation management system, which is a shared responsibility to boost the Company's business success as well as the employees' individual success. The performance evaluation management system is an assessment tool for the targets and goals to be achieved by the individual employees and work units, which is formulated in conformity with the Company's vision, mission, and long-term goals.

Performance evaluation on any individual employee is carried out regularly, objectively, and transparently based on position. The Company has developed an Electronic Performance Management (MKE) in form of an application for employee evaluation management. The components of employee performance evaluation are as follows: Monthly Performance Plan (RKB), Employee competency, Key Performance Indicators (KPI), and Management Work Program (PKM). The Electronic Performance Management makes it possible to replace the annual performance evaluation with monthly performance evaluation. The management took such a transformative measure in employee performance management in order to build a performance-oriented work culture.

REMUNERATION SYSTEM

To support the employees' welfare, the Company employs a remuneration system in accordance with the prevailing labor laws and regulations. Employee remuneration is proof of the Company's adherence to its obligations and to the prevailing laws and regulations, which is also the Company's way to build a good working relationship with its employees as internal stakeholders. The employee remuneration policy is adopted using the principles of fairness and competitiveness, and adapted to internal factors such as work load and position as well as external factors such as Regional Minimum Wage (UMR) regulations.

WELFARE AND SOCIAL SECURITY

In order to conform with labor laws and to retain its employees, the Company endeavors to improve the employee welfare through various means, among others:

- Provision and increase of remuneration and benefit, BPJS healthcare subscription, BPJS social security subscription, health facilities and Insurance;





- Program pengembangan karyawan seperti program peningkatan jenjang pendidikan, dukungan pada kebutuhan karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- Dukungan pada kebutuhan karyawan untuk melaksanakan kegiatan olah raga dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan olah raga;
- Bantuan bagi karyawan yang mengalami duka cita.

PROGRAM PENSIUN

Pemberian jaminan hari tua atau pensiun merupakan salah satu bentuk penghargaan Perseroan atas loyalitas karyawan. Jaminan ini juga memberi ketenangan bagi seluruh karyawan yang bekerja di Pelindo 1, dengan demikian mereka lebih termotivasi dalam berkarya. Pensiun karyawan Pelindo 1 ditetapkan pada usia 56 tahun, dan bagi karyawan yang telah berusia 55 tahun dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Dalam Masa Persiapan Pensiun, Perseroan memberikan pelatihan wirausaha dan pelatihan purna bakti, sehingga diharapkan dengan para karyawan dapat mempersiapkan diri di masa mendatang.

Karyawan yang telah memasuki usia purna bakti (56 tahun), diberikan kompensasi sesuai peraturan. Sedangkan karyawan tetap yang diikutsertakan dalam Program Hari Tua (JHT) mendapatkan Kompensasi Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

TURNOVER KARYAWAN

Tingkat *turnover* karyawan merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja di lingkup Perseroan yang dapat menjadi indikator keberhasilan Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Tingkat *turnover* karyawan pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,00%, atau tetap stabil jika dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun pegawai berkurangnya pegawai tercatat karena adanya personel yang memasuki masa pensiun.

SURVEY KETERIKATAN PEGAWAI

Berdasarkan hasil *survey* pegawai tahun 2020, Indeks Keterikatan Pegawai berada di angka rata-rata 4,19. Sejumlah 84% dari responden memiliki Keterikatan Pekerja yang tergolong *ENGAGED* dengan rerata (*Mean*) 4,19 pada skala 1-5. Terdapat sekitar 12% responden yang memiliki tingkat keterikatan *Nearly Engaged*. Hanya sekitar 3% pekerja Pelindo 1 yang tergolong *Passively Disengaged* dan *Disengaged*. Dengan rincian masing-masing aspek seperti tergambar berikut:

- Employee development programs such as education level improvement program, praying facilities for the employees according to their religions and beliefs and budget allocation for religious activities;
- Sport facilities for the employees to satisfy their need to exercises and budget allocation for sport activities;
- Support for grieving employees.

RETIREMENT PROGRAM

The provision of pension benefits is the Company's way to reward employee loyalty. The security offered by the benefit obviously gives reassurance to Pelindo 1 employees, which motivates them to give their best at work. Pelindo 1 employee retirement is set at the age of 56 years, meaning that employees of 55 years of age may join the Retirement Preparation Program (MPP). In the Retirement Preparation Program, Pelindo 1 provides entrepreneurship and post-career trainings, which are expected to prepare the employees for life after retirement.

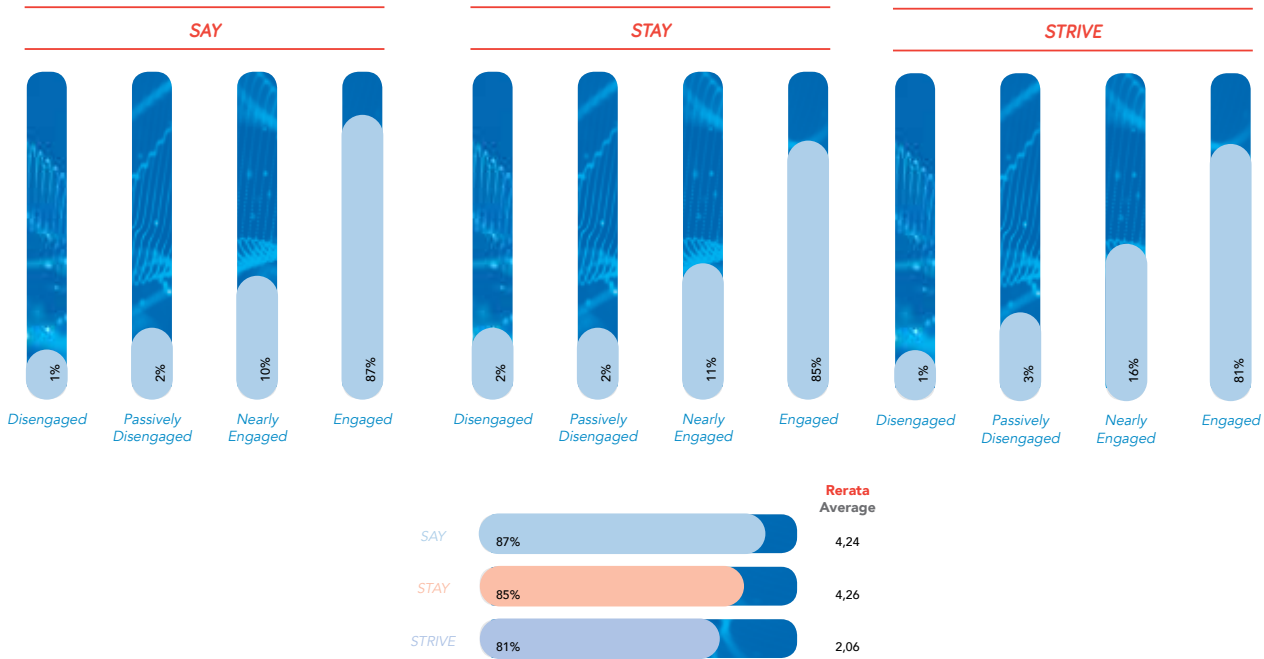
The employees reaching retirement age (56 years) are to be compensated as ordained by relevant regulations. The employees participating in the Old Age Program (JHT) are to receive pension compensation as mandated by the prevailing Labor Laws.

EMPLOYEE TURNOVER RATE

The employee turnover rate is a reflection of the Company culture and employment system, which can be used as gauge with which to measure the company's success in creating conducive work environment. The 2020 employee turnover rate was 0.00%, the same rate as the previous year. Reduction in number of registered employees is due to retiring employees.

EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY

According to 2020 employee survey, Employee Engagement Index was at an average of 4.19. Around 84% of the respondents had an *ENGAGED* index score, with a mean of 4.19 on 1-5 scale. Around 12% of the respondents had a *Nearly Engaged* index score. Only around 3% of Pelindo 1 employees were categorized as *Passively Disengaged* and *Disengaged*. The categories are illustrated below:



Jika dibandingkan dengan Indeks Keterikatan Pegawai di Tahun 2019 dengan nilai 4.2. Secara overall masih dianggap stabil/tetap jika dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan sebesar 0,1. Hal ini dapat disebabkan akibat pembulatan angka, selain itu dapat juga disebabkan karena standar metode dan penambahan aspek yang diukur dibandingkan survey sebelumnya. Namun hal tersebut akan menjadi masukan bagi Divisi Manajemen Strategis SDM untuk tetap meningkatkan keterikatan pegawai baik melalui layanan SDM atau kebijakan-kebijakan strategis pendukung.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perseroan senantiasa membina hubungan industrial sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Setiap perselisihan hubungan industrial diselesaikan dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Perseroan senantiasa memperhatikan setiap pengaduan atau keluhan karyawan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan praktik kepegawaian.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan yang merupakan hasil perundingan antara Perseroan dengan Serikat Pekerja dan berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, dan berisikan tentang aturan-aturan Perseroan untuk karyawan. Bahwa Peraturan Disiplin Pegawai merupakan tindak lanjut dari Pasal 63 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi dan Serikat Pekerja. Peraturan Disiplin Pegawai memuat Matriks Hukuman Disiplin yang menetapkan klausul pelanggaran disiplin dan hukuman disiplin untuk setiap pelanggaran disiplin.

In comparison, the 2019 Employee Engagement Index was 4.2. Overall, the 2020 figure can be considered stable/constant compared to the previous year, as the decrease in index score was only 0.1. This is likely caused by rounding, as well as the different method standard employed and addition of measured aspects to the previous year's survey. But this shall push the Division of Human Resource Strategic Management to keep improving in the employee engagement department by using human resource services or by adopting supporting strategic policies.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Company maintain industrial relations in accordance with the prevailing labor regulations. Any industrial dispute that occurs is to be settled as stipulated by the prevailing laws and regulations. The Company heeds any report or complaint from the employees concerning industrial relations and employment practices.

Collective Bargaining Agreement is an agreement resulting from the discussion between the Company and the Workers' Union carried out in accordance with the prevailing labor laws and regulations, containing the Company regulations to be followed by the employees. The Employee Disciplinary Rules are an extension of Article 63 of the Collective Bargaining Agreement between the Board of Directors and Workers' Union. The Employee Disciplinary Rules contain the Disciplinary Sanction Metrics stipulating the disciplinary violation clauses and disciplinary sanctions for any violation.





Adapun bagi pegawai yang indisipliner, akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan disiplin pegawai, dimana bidang hubungan industrial memeriksa dan menindaklanjuti laporan dari atasan langsung atau cabang-cabang terhadap pegawai yang indisipliner.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Sebagai upaya memberikah kesejahteraan bagi pegawai khususnya untuk kesehatan dan keselamatan kerja, Pelindo 1 melaksanakan pemeriksaan kesehatan (*General Check Up*) kepada setiap karyawan, melalui Rumah Sakit yang ditunjuk. Sedangkan untuk operasional (operator, ABK, dan pandu), pemeriksaan rutin dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun melalui klinik yang ditunjuk.

Selain itu, Pelindo 1 juga berkomitmen untuk menjaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dengan menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan efisien, serta meminimalisir tingkat kecelakaan kerja bahkan sampai *zero accident*.

Bila mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. PER-01/ MEN/I/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), selama periode 2019-2020, tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja (Kecelakaan Nihil) di lingkup Perseroan. Ada pun kecelakaan kerja yang terjadi bukan bersifat fatal yang dapat menyebabkan hilangnya jam kerja, rusaknya alat produksi dan korban.

DAMPAK KUANTITATIF ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Dampak kuantitatif atas pelaksanaan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan, terlihat dari hasil indeks keterikatan pegawai untuk tahun 2020, yang tercatat sebesar 4,19 atau relatif stabil dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 4,20. Selisih Indeks sebesar 0,1 lebih disebabkan karena standar metode dan penambahan aspek yang diukur, antara tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Adapun tingkat *turnover* karyawan pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,00% tetap stabil jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif terhadap para pegawainya.

Sementara dampak kuantitatif atas pelaksanaan tanggung jawab sosial bidang K3, terlihat dari jumlah kecelakaan kerja di tahun 2020 yang mana tidak terdapat kecelakaan kerja (nihil), atau sama dengan tahun 2019 yang juga tidak terdapat kecelakaan kerja.

Employees committing a violation are to be sanctioned according to the employee disciplinary rules, in which the industrial relations department shall examine and follow up on reports from direct superiors or branches concerning violating employees.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

As an effort to look after the employees' well-being especially concerning occupational health and safety, Pelindo 1 provides regular general check-ups for all employees at the affiliated hospital. The operating personnel (operators, ship crew, pilots), the general check-ups are carried out at least once a year at the affiliated clinic.

Pelindo 1 is committed to maintain the quality of occupational health and safety (K3) by implementing Occupational Health and Safety Management Systems (SMK3) in conformity with Government Regulation No. 50 of 2012 on Occupational Safety and Health Management Systems (SMK3). The purpose of the implementation is to create a safe, productive and efficient work environment, as well as to reduce workplace accident rate to zero.

As per the definition contained in Government Regulation No. PER-01/ MEN/I/2007 on Guidance on Occupational Health and Safety Award, during the 2019-2020 period no workplace accident was recorded within the Company (Zero Accident). The workplace accident that did occur was not as severe so as to cause loss of working hours, damage to production equipment and victims.

QUANTITATIVE IMPACTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES CONCERNING LABOR AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

The quantitative impacts of the implementation of corporate social responsibility concerning labor include the employee engagement index, which in 2020 was recorded at 4.19, which is relatively unchanged from 4.20 in the previous year. The index score difference of 0.1 is caused by the new method standards employed and new measured aspects used in 2020. The 2020 employee turnover rate was 0.00%, the same rate as the previous year. This shows that the Company has succeeded in creating a work environment that is conducive to its employees.

As regards the quantitative impacts of corporate social responsibility initiatives in occupational health and safety, one needs to look no further than the fact that there was no recorded workplace accident occurring in 2020 (zero), which was also the case in 2019.

Disepanjang tahun 2020, juga tidak terdapat sertifikasi terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja yang dicabut akibat tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

MEKANISME DAN SARANA PENGADUAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Sebagai bentuk keterbukaan terhadap kritik dan saran, Perseroan telah menyediakan sarana pengaduan untuk karyawan dalam hal penyelesaian masalah ketenagakerjaan, yang mana telah diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan dan karyawan.

Selain itu, pelaporan juga dapat dilakukan melalui sarana lainnya yakni *Whistleblowing System* (WBS) yang dikelola bagian *human capital* dan atasan langsung dari karyawan yang melaporkan.

Berikut disampaikan jumlah laporan yang diterima Perseroan, dan jumlah laporan yang telah ditindaklanjuti untuk tahun 2020 dan 2019.

Uraian Description	2020 (laporan) (reports)	2019 (laporan) (reports)
Jumlah Laporan Number of Reports	1	-
Laporan yang sudah ditindaklanjuti Reports Addressed	1	-
Presentase (%) Percentage (%)	100,00%	-

Di tahun 2020, Perseroan mendapati adanya 1 (satu) pelaporan yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan kapasitas Perseroan dan peraturan yang berlaku.

No certificate related to labor and occupational health and safety was revoked for non-compliance to the relevant provisions in 2020.

COMPLAINT HANDLING MECHANISM CONCERNING LABOR AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

In order to be open to criticisms and suggestions, the Company provides a complaint handling mechanism for the employees to settle labor disputes as stipulated by the Collective Bargaining Agreement between the Company and the employees.

The employees may also file a report by another means, namely the Whistleblowing System (WBS) managed by the division of human capital and the direct superiors of the reporting employees.

Below is the number of reports received by the Company, and the number of reports addressed during the calendar years of 2019 and 2020.

In 2020, the Company received one (1) report which has been addressed to the best of the Company's ability in accordance with the regulations.



SERTIFIKASI BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CERTIFICATES

SERTIFIKASI BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA YANG MASIH BERLAKU DI TAHUN 2020 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CERTIFICATES VALID IN 2020

No	Cabang Pelabuhan Port Branch	Jenis Sertifikat Certificate Type	Dikeluarkan Oleh Issued By	Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date of Certificate Issuance	Masa Berlaku Hingga Valid Until
1	Belawan	SMK3	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	29 Maret 2019 29 March 2019	28 Maret 2022 28 March 2022
2	Terminal Petikemas (TPK) Belawan Container Terminal (TPK) Belawan	Surat Keterangan Hasil Audit SMK3 Report of SMK3 Audit	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	29 September 2020 29 September 2020	-
3	Dumai	ISO 45001: 2018 Surat Keterangan Hasil Audit SMK3 Report of SMK3 Audit	TUV NORD Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	21 Desember 2020 21 December 2020 29 September 2020 29 September 2020	20 Desember 2023 20 December 2023 -
4	Pekanbaru/ Perawang	SMK3	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	29 Maret 2019 29 March 2020	28 Maret 2022 28 March 2022
5	Tanjung Balai Karimun	Surat Keterangan Hasil Audit SMK3 Report of SMK3 Audit	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 November 2020 17 November 2020	-
6	Kuala Tanjung	Surat Keterangan Hasil Audit SMK3 Report of SMK3 Audit	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 November 2020 17 November 2020	-
7	Batam	ISO 45001: 2018 Surat Keterangan Hasil Audit SMK3 Report of SMK3 Audit	TUV NORD Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	30 November 2020 30 November 2020 17 November 2020 17 November 2020	29 November 2023 29 November 2023 -
8	Sei Pakning	Surat Keterangan Hasil Audit SMK3 Report of SMK3 Audit	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 November 2020 17 November 2020	-
9	Sibolga	Surat Keterangan Hasil Audit SMK3 Report of SMK3 Audit	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 November 2020 17 November 2020	-
10	Malahayati	SMK3	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	29 Maret 2019 29 March 2020	28 Maret 2022 28 March 2022
11	Lhoksemawe	SMK3	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	29 Maret 2019 29 March 2020	28 Maret 2022 28 March 2022
12	Tanjung Balai Asahan	Surat Keterangan Hasil Audit SMK3 Report of SMK3 Audit	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 November 2020 17 November 2020	-
13	Tembilahan	Surat Keterangan Hasil Audit SMK3 Report of SMK3 Audit	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 November 2020 17 November 2020	-
14	Gunungsitoli	Surat Keterangan Hasil Audit SMK3 Report of SMK3 Audit	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 November 2020 17 November 2020	-
15	Unit Galangan Kapal Dock Shipyard Unit	SMK3	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	29 Maret 2019 29 March 2020	28 Maret 2022 28 March 2022

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KONSUMEN ATAU PELANGGAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING THE CUSTOMERS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Melihat kondisi persaingan usaha yang semakin kompetitif sehingga menuntut Pelindo 1 untuk senantiasa berinovasi secara berkelanjutan yang mana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari layanan yang disediakan Perseroan kepada pelanggannya. Perseroan terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas layanan, seperti penambahan kapasitas fasilitas produksi, peningkatan kinerja operasional, pengembangan aplikasi inovasi dalam teknologi informasi, dan *billing* untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Perseroan dalam memberikan layanan yang berkualitas, diawali dengan pemenuhan prosedur dan *feedback* dari pelanggan, dengan demikian konsumen akan merasa dihargai dan diperhatikan kebutuhannya, sehingga kepuasan pelanggan akan terwujud dan loyalitas pelanggan terhadap produsen akan terjaga dengan baik.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN ATAU PELANGGAN

Dalam merealisasikan program tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen atau pelanggan, maka Pelindo 1 telah menyusun target dan rencana kegiatan di tahun 2020, di antaranya:

1. Penyelesaian terhadap keluhan pelanggan secara maksimal dengan membentuk program yang tepat;
2. Menyediakan saluran *feedback performance*, melalui beberapa jalur komunikasi untuk mengakomodasi penilaian dari para pelanggan terhadap layanan Perseroan;
3. Menyelenggarakan *customer gathering* secara berkala dimana dalam acara ini terjadi komunikasi dua arah dari Perseroan menyampaikan berbagai informasi yang perlu diketahui pelanggan dan dari Pelanggan untuk menyampaikan berbagai masukan dan keluhan secara langsung.

COMMITMENT AND POLICY

Considering the ever-increasing competitiveness in the industry, Pelindo 1 has to constantly innovate to improve the quality and quantity of the services offered to the customers. The Company endeavors to improve service quality, among others by increasing the capacity of production facilities, improving operational performance, developing innovative information technology applications, and billing applications to further improve the services.

One of the measures taken by the Company to improve the quality of its services was the implementation of complaint procedure and the addressing of customer feedback, for which the customers felt valued because their needs are actually met, which in turn improved and maintained the customer satisfaction and loyalty.

TARGETS AND PLANS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES CONCERNING THE CUSTOMERS

In order to carry out corporate social responsibility programs towards the customers, Pelindo 1 devised activity plans and targets for the 2020 calendar year, including:

1. Best resolution to customer complaints by planning the right programs;
2. Providing performance feedback mechanism with multiple means of communications to receive customer evaluation;
3. Holding regular customer gathering events in which there is a two-way communication between the Company and the customers, so that the Company may relay the information that the customers need to know, and the customers may directly give their suggestions and file their complaints.





PROGRAM DAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN ATAU PELANGGAN

JAMINAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN

Perseroan berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan standar yang berlaku dan menjadikan aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan sebagai prioritas utama. Dalam praktik operasi dan bisnis yang dijalankan, Perseroan memiliki kebijakan produk atau layanan yang berorientasi terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Perseroan juga senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas produk dan layanan sesuai dengan kemampuan Perseroan melalui penerapan sistem yang terencana serta memberikan layanan yang memadai.

Sebagai wujud dari tanggung jawab Perseroan kepada konsumen, maka Pelindo 1 menyediakan berbagai fasilitas agar kesehatan dan keselamatan masing-masing pihak tetap terjaga, dengan begitu Perseroan juga telah berupaya untuk memenuhi kinerjanya dengan tetap memberikan pelayanan yang optimal bagi konsumen.

KEJELASAN INFORMASI PRODUK

Perseroan menyadari, bahwa pelabuhan tidak hanya difungsikan untuk sebuah kapal bersandar, lebih luas daripada itu, dalam perkembangannya, pelabuhan juga menjadi tempat bongkar muat dan tempat penyimpanan Petikemas. Dalam kegiatan usahanya, Pelindo 1 menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa usaha lainnya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Adapun Jasa kepelabuhanan yang dikelola oleh Pelindo 1 terbagi dalam 5 (lima) pilar utama, yaitu:

1. Bidang Usaha Jasa Pelayanan Kapal.
2. Bidang Usaha Jasa Pelayanan Petikemas.
3. Bidang Usaha Jasa Pelayanan Non-Petikemas.
4. Bidang Usaha Jasa Pelayanan Penumpang.
5. Bidang Usaha Jasa Penunjang.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS AND ACTIVITIES CONCERNING THE CUSTOMERS

CUSTOMER HEALTH AND SAFETY INSURANCE

The Company is committed to provide products and services in compliance with the prevailing standards and prioritize the health and safety of the customers. In its operating and business practices, the Company adopts a policy that dictates the provision of products and services oriented towards customer health and safety. The Company endeavors to keep improving the quality of the products and services to the best of the Company's ability by implementing planned systems and providing satisfactory services.

As proof of the Company's responsibility towards the customers, Pelindo 1 provides several facilities to ensure the health and safety of all parties involved, which also means the Company has improved its performance by providing the customers with optimum services.

PRODUCT INFORMATION CLARITY

The Company recognizes that a port is more than a place for ships to moor: in these days and age, a port is also utilized for commodity loading/unloading and container storage yard. In the course of running its business, Pelindo 1 provides ports services and other related services as stipulated by Minister of Transport's Decision Letter No. KP 133 of 2011 dated 2 March 2011 on Business Permit of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

The ports services provided by Pelindo 1 can be classified in 5 (five) main categories, namely:

1. Ship Services.
2. Container Services.
3. Non-Container Services.
4. Passenger Services.
5. Supporting Services.

PENERAPAN APLIKASI DIGITAL

Pelindo 1 selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan terhadap konsumen, terutama di tengah kondisi pandemi yang secara signifikan mengubah bentuk interaksi penyedia dan pengguna jasa. Perseroan telah mengembangkan digitalisasi layanan dan operasional yang mendukung layanan terhadap konsumen secara *digital* dan *real time*, seperti *Customer Relationship Management App*, *E-Berthing*, hingga transaksi *cashless*.

SURVEI KEPUASAN, KETERIKATAN, DAN LOYALITAS PELANGGAN

Pelindo 1 berkomitmen untuk senantiasa memberikan layanan jasa kepelabuhanan yang prima dan sesuai dengan harapan pelanggan. Dalam memujudkan hal tersebut, Perseroan memerlukan *feedback* (umpan balik) dari pelanggan yang akan dijadikan sebagai barometer tingkat pelayanan yang sudah dilakukan Pelindo 1, dan mengukur apakah kualitas layanan yang sudah diberikan telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Selain itu, saran dan masukan yang diberikan juga akan dijadikan sebagai bahan dalam melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*). Oleh sebab itu, Perseroan senantiasa melakukan survei kepuasan pelanggan, keterikatan dan loyalitas pelanggan dilaksanakan setiap tahun secara berkelanjutan.

Untuk tahun 2020, survei dilakukan di 8 (delapan) Cabang Pelabuhan, yakni Cabang Pelabuhan Belawan, Cabang Pelabuhan Dumai, Cabang Pelabuhan Pekanbaru, Cabang Pelabuhan Terminal Petikemas (TPK) Belawan, Cabang Pelabuhan Tanjungpinang, Cabang Pelabuhan Sibolga, Cabang Pelabuhan Malahayati, dan Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Asahan. Responden yang terdistribusi secara proporsional pada masing-masing cabang pelabuhan akan dijadikan sebagai target survei, untuk menggambarkan kondisi layanan secara korporat.

Segmen layanan Perseroan diklasifikasikan menjadi; segmen pelayanan kapal, segmen pelayanan barang, segmen pelayanan bongkar muat, segmen pelayanan Terminal Petikemas, dan segmen pelayanan Terminal Penumpang. Atribut layanan di masing-masing segmen pelayanan merupakan pengembangan dari 5 (lima) dimensi yang terdapat dalam metode *Service Quality* (SERVIQUAL), yakni *Tangible*, *Empathy*, *Responsiveness*, *Reliability*, dan *Assurance*.

Survei kepuasan, keterikatan dan loyalitas pelanggan sendiri, merupakan *tools* yang digunakan untuk mengetahui indeks kepuasan, keterikatan dan loyalitas pelanggan serta memperoleh masukan pengguna jasa atas layanan yang telah diberikan. Diharapkan dengan adanya hasil survei, Pelindo 1 sebagai organisasi dapat merumuskan strategi pelayanan yang lebih baik.

IMPLEMENTATION OF DIGITAL APPLICATION

Pelindo 1 aspires to improve the quality of customer services, especially during the pandemic that considerably changes the dynamics of interaction between service providers and users. The Company has developed service and operation digitalization that allows for digital and real time services for the customers, such as *Customer Relationship Management App*, *E-Berthing*, and *cashless* transactions.

CUSTOMER SATISFACTION, ENGAGEMENT AND LOYALTY SURVEY

Pelindo 1 is committed to provide premium ports services as desired by the customers. For that purpose, the Company needs customer feedback which is necessary to improve the level of services provided by Pelindo 1, and to measure whether the existing services have pleased the customers. Customer suggestions and recommendations also help the Company in carry out continuous improvement. To that end, the Company holds an annual customer satisfaction, engagement and loyalty survey.

The 2020 survey was carried out in 8 (eight) Port Branches, namely Belawan Port Branch, Dumai Port Branch, Pekanbaru Port Branch, Belawan Container Terminal Port Branch, Tanjungpinang Port Branch, Sibolga Port Branch, Malahayati Port Branch, and Tanjung Balai Asahan Port Branch. The number of survey respondents is distributed proportionally in each port branch to illustrate the customer conditions in a corporate level.

The Company services are classified into several segments; ship service segment, commodity service segment, cargo loading/unloading service segment, container terminal service segment, and passenger terminal service segment. The service attributes of each service segment are developed with the 5 (five) dimensions of the *Service Quality* method (SERVIQUAL), namely *Tangible*, *Empathy*, *Responsiveness*, *Reliability* and *Assurance*.

The customer satisfaction, engagement and loyalty survey is itself a tool used to measure the customer satisfaction, engagement and loyalty index scores, as well as to receive the suggestions of the customers with regard to the existing services. The survey results are expected to help Pelindo 1 as an organization in the formulation of better service strategies.



Berikut hasil survei kepuasan, keterikatan, dan loyalitas pelanggan untuk tahun 2020 sebagaimana terlampir di bawah ini.

Below are the results of 2020 customer satisfaction, engagement and loyalty survey.

NILAI CSI, CDI, KETERIKATAN DAN LOYALITAS PELANGGAN PELINDO 1 SECARA KORPORAT TAHUN 2020
2020 PELINDO 1 CORPORATE CSI, CDI, CUSTOMER ENGAGEMENT AND CUSTOMER LOYALTY SCORES

Jenis Penilaian Assessment Type	Total	Segmen Pelayanan Service Segment				
		Kapal Ship	Barang Commodity	Bongkar Muat Loading/ Unloading	Terminal Petikemas Container Terminal	Terminal Penumpang Passenger Terminal
CSI	78,64%	80,90%	75,51%	77,69%	83,88%	78,16%
CDI	21,36%	19,10%	24,49%	22,31%	16,12%	21,84%
Keterikatan Pelanggan Customer Engagement	87,05%	85,63%	87,33%	85,30%	88,53%	88,20%
Loyalitas Pelanggan Customer Loyalty	83,20%	85,22%	81,08%	82,06%	82,39%	87,51%

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Customer Satisfaction Index* (CSI) Perseroan tahun 2020 diperoleh sebesar 78,64% atau 3,93 dalam skala *likert* 5, atau masuk dalam kategori "Memuaskan". Sementara nilai *Customer Dissatisfaction Index* (CDI) diperoleh sebesar 1,13 dalam skala *likert* 5 atau sebesar 21,36% dan dalam kategori "Baik". Ada pun nilai keterikatan responden terhadap jasa layanan Perseroan diperoleh sebesar 4,35 dalam skala *likert* 5 atau sebesar 87,05%. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa responden terikat terhadap jasa layanan yang diberikan oleh Perseroan. Untuk nilai loyalitas responden terhadap jasa layanan Perseroan, diperoleh sebesar 4,35 dalam skala *likert* 5 atau sebesar 83,20%. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa responden loyal terhadap jasa layanan yang diberikan Perseroan.

According to the above table, the Company's Customer Satisfaction Index (CSI) Score in 2020 was 78.64% or 3.93 in 5-point likert scale, which is categorized as "Satisfactory". On the other hand, the Company's Customer Dissatisfaction Index (CDI) Score was 1.13 in 5-point likert scale, equal to 21.36%, belonging in the "Good" category. The respondent engagement to the Company's services was scored at 4.35 in 5-point likert scale, equal to 87.05%. In this regard, it can be concluded that the customers are engaged in the services provided by the Company. The respondent loyalty to the Company's services was scored at 4.35 in 5-point likert scale, equal to 83.20%. In this regard, it can be concluded that the customers are loyal to the services provided by the Company.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN ATAU PELANGGAN

QUANTITATIVE IMPACTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES CONCERNING THE CUSTOMERS

Dampak kuantitatif atas program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen atau pelanggan, dapat dilihat dari perolehan hasil survei kepuasan, keterikatan, dan loyalitas pelanggan, untuk tahun 2020 dibanding tahun 2019, dengan rincian sebagaimana terlampir berikut ini.

The quantitative impacts of the corporate social responsibility programs and activities concerning the customers are palpable in the results of the customer satisfaction, engagement and loyalty survey of the year 2020 compared to that of 2019, as detailed in table below.

NILAI CSI, CDI, KETERIKATAN DAN LOYALITAS PELANGGAN 2019-2020
2019-2020 CUSTOMER ENGAGEMENT AND CUSTOMER LOYALTY SCORES

Jenis Penilaian Assessment Type	Total Nilai Total Score	
	2020	2019
CSI	78,64%	78,17%
CDI	21,36%	24,64%
Keterikatan Pelanggan Customer Engagement	87,05%	80,00%
Loyalitas Pelanggan Customer Loyalty	83,20%	82,13%

Untuk tahun 2020, nilai *Customer Satisfaction Index (CSI)* Perseroan adalah sebesar 78,64% dan masuk dalam kategori "Memuaskan". Nilai tersebut meningkat sebesar 0,47% dibanding tahun 2019 yang sebesar 78,17%. Meski di tengah kondisi pandemi, Pelindo 1 senantiasa memperhatikan kepuasan pelanggan, hal tersebut terlihat dari tingkat kepuasan pelanggan Pelindo 1 yang semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara nilai *Customer Dissatisfaction Index (CDI)* tahun 2020 adalah sebesar 21,36% dan dalam kategori "Baik". Nilai tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2019, yang sebesar 24,64%. Ada pun nilai keterikatan pelanggan untuk tahun 2020 adalah sebesar 87,05% atau meningkat sebesar 7,05% dibanding tahun 2019, yang sebesar 80,00%. Begitupun dengan nilai loyalitas pelanggan yang mengalami peningkatan sebesar 1,07% menjadi sebesar 83,20% di tahun 2020, dibanding tahun 2019 yang sebesar 82,13%.

MEKANISME DAN JUMLAH KELUHAN PELANGGAN

Pelindo 1 memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pelanggan untuk menyampaikan saran atau keluhan atas pelayanan yang diberikan Perseroan, baik melalui kantor pusat atau cabang pelabuhan yang dikelola Pelindo 1. Di tahun 2020, Perseroan telah menerima beberapa keluhan dan klaim yang disampaikan oleh pelanggan, baik kantor pusat maupun cabang pelabuhan, yang kesemuanya telah ditindaklanjuti sesuai dengan bentuk atau jenis keluhan yang disampaikan. Berikut rincian jumlah keluhan atau klaim yang disampaikan pelanggan disepanjang tahun 2020.

The Company's 2020 Customer Satisfaction Index score was 78.64%, belonging in the "Satisfactory" category. The score increased by 0.47% from the 78.17% score achieved in 2019. Notwithstanding the current pandemic, Pelindo 1 still holds customer satisfaction in highest regard, as can be seen in the customer satisfaction index that was improving from the previous year. On the other hand, the Customer Dissatisfaction Index (CDI) score of 2020 was 21.36%, classified into the "Good" category. The score decreased from the 24.64% score achieved in 2019. The 2020 customer engagement index score was 87.05%, improving by 7.05% from the 80.00% recorded in 2019. Likewise, the customer loyalty index score increased by 1.07% to 83.20% recorded in 2020 from the 82.13% score in 2019.

CUSTOMER COMPLAINT MECHANISM AND NUMBER

Pelindo 1 gives full freedom to its customers to voice their suggestions and complaints regarding the Company's services, which may be addressed to the Head Office or port branches under Pelindo 1 control. Throughout 2020, the Company received several complaints and claims by the customers through the Head Office and port branches, of which all have been addressed according to the form and type of the complaints. Below is a table illustrating the customer complaints and claims received by the Company in 2020.

No	Korporat/Cabang Pelabuhan Corporation/Port Branch	Jumlah Number	
		Keluhan Pelanggan Customer Complaints	Klaim Pelanggan Customer Claims
1	Pelindo 1 (Korporat) Pelindo 1 (Corporate)	1.145	18
2	Belawan	32	0
3	Dumai	29	0
4	Pekanbaru	2	6
5	Tanjungpinang	0	0
6	TPK Belawan	1.070	12
7	Malahayati	2	0
8	Sibolga	10	0
9	Tanjung Balai Asahan	0	0



SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN

CERTIFICATES AND AWARDS

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU DI TAHUN 2020

CERTIFICATES VALID IN 2020

No	Cabang Pelabuhan Port Branch	Jenis Sertifikat Certificate Type	Dikeluarkan Oleh Issued By	Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Issued On	Masa Berlaku Hingga Valid Until
1	Belawan	International Ship and Port Security Code (ISPS Code)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Maritime Transportation	23 Maret 2018 23 March 2018	11 Maret 2023 11 March 2023
2	Dumai	International Ship and Port Security Code (ISPS Code)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Maritime Transportation	10 September 2020 10 September 2020	9 Februari 2021 9 February 2021
	Tanjungpinang	International Ship and Port Security Code (ISPS Code)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Maritime Transportation	8 Oktober 2020 8 October 2020	23 Mei 2024 23 May 2024
3	Sri Bintan Pura	International Ship and Port Security Code (ISPS Code)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Maritime Transportation	8 Oktober 2020 8 October 2020	23 Mei 2024 23 May 2024
	Sei Kolak Kijang	International Ship and Port Security Code (ISPS Code)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Maritime Transportation	23 Mei 2018 23 May 2018	8 Mei 2023 8 May 2023
4	Pekanbaru/ Perawang	International Ship and Port Security Code (ISPS Code)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Maritime Transportation	27 September 2021 27 September 2021	7 September 2021 7 September 2021
5	Malahayati	International Ship and Port Security Code (ISPS Code)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Maritime Transportation	17 Oktober 2016 17 October 2016	6 September 2021 6 September 2021
6	Lhoksemawe	International Ship and Port Security Code (ISPS Code)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Maritime Transportation	4 Oktober 2016 4 October 2016	5 September 2021 5 September 2021
7	Tanjung Balai Asahan	International Ship and Port Security Code (ISPS Code)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Maritime Transportation	27 September 2016 27 September 2016	14 September 2021 14 September 2021
8	Unit Galangan Kapal	International Ship and Port Security Code (ISPS Code)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Maritime Transportation	29 Maret 2019 29 September 2021	28 Maret 2022 28 March 2022

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH DI TAHUN 2020

AWARDS WON IN 2020

Tanggal Date	Penghargaan Award	Institusi yang Memberikan Awarding Body
28 September 2020 September 28, 2020	2nd RRI iConomics BUMN Brand Award 2020 "Millenial's Choice" dengan predikat "Gold Winner" pada kategori "Social Economy Contribution" Title in the "Social Economy Contribution" category	RRI dan The iConomics

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING SOCIAL DEVELOPMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Komitmen Perseroan terhadap pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang rutin dilaksanakan dan dilaporkan setiap tahunnya. Sebagai entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hadir di tengah komunitas lokal, Perseroan memiliki peran dan tanggung jawab yang nyata untuk berkontribusi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri, baik dari segi kemampuan dan kompetensi maupun kemandirian ekonomi. Perseroan berharap, pelaksanaan program PKBL yang dilakukan, dapat membantu usaha Pemerintah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat, mengurangi jumlah pengangguran, dan juga pengurangan jumlah penduduk miskin yang pada akhirnya mampu berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pelaksanaan kegiatan PKBL yang dilaksanakan Perseroan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan kegiatan PKBL Perseroan juga telah diatur dalam Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. KU.65/3/22/PI/03 tanggal 13 Februari 2003 tentang Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Di tengah pandemi COVID-19, Pelindo 1 tetap menunjukkan komitmennya membantu masyarakat dan lingkungan melalui penyaluran dana PKBL. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang sedang kesulitan atau terdampak pandemi, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

PENGELOLAAN ISU-ISU DAN RISIKO SOSIAL YANG TIMBUL DARI OPERASI DAN BISNIS PERUSAHAAN

Pelindo 1 memiliki komitmen untuk mendukung, mengimplementasikan, dan mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program-program pengembangan kemasyarakatan yang dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat, dan mampu menjawab isu-isu sosial serta risiko sosial yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan. Untuk itu, Perseroan berupaya untuk melibatkan masyarakat, khususnya

COMMITMENT AND POLICY

The Company's commitment towards social development and community empowerment is manifested by the Partnership and Environmental Assistance Programs (PKBL) which are carried out and reported annually. As a State-Owned Enterprise (BUMN) who operates amidst the local community, the Company has a role and a responsibility to make a real contribution towards prosperous and independent community with regard to ability, competency and self-sufficiency. The Company wishes that the PKBL programs may contribute to the government's effort to improve community self-sufficiency, reduction of unemployment, and reduction of poverty, which in turn will contribute towards economic growth.

The Company's PKBL activities are subject to the prevailing laws and regulations, namely Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/04/2020 of 2 April 2020 on Third Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on State-Owned Enterprise Partnership Program and Environmental Assistance Program. The Company's PKBL activities are also regulated by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Board of Directors' Decision No. KU.65/3/22/PI/03 of 13 February 2003 on Partnership and Environmental Assistance Programs.

Even during the COVID-19 pandemic, Pelindo 1 shows its commitment in helping the community and environment through PKBL funds. This measure was taken to alleviate the impacts of the pandemic on the community, as well as to accelerate national economic recovery.

MANAGEMENT OF SOCIAL ISSUES AND RISKS RESULTING FROM THE COMPANY'S OPERATIONS AND BUSINESS

Pelindo 1 is committed to support, implement and develop corporate social responsibility through community development programs that give added value to the community and answer to the social issues and social risks resulting from the Company's business activities. To that end, the Company endeavors to involve the community, especially the community near the Company's sites,





masyarakat sekitar lokasi operasi, baik melalui rekrutmen maupun dalam pelaksanaan program pengembangan sosial kemasyarakatan yang bersifat langsung berupa program kegiatan PKBL maupun program CSR lainnya, yang bertujuan untuk memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Lingkup dan perumusan tanggung sosial perusahaan terhadap pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat meliputi program peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan PKBL atau program CSR lainnya yang diarahkan pada upaya untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Perseroan dengan masyarakat, memberikan dampak positif yang terhubung dengan Perseroan melalui pelaksanaan program yang tepat guna dan berdampak jangka panjang secara bertahap dan berkelanjutan.

Selain merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan PKBL ataupun program CSR lainnya memiliki tujuan yang melebihi kepatuhan, yaitu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di bidang pengentasan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penyediaan lapangan kerja, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Substansi pelaksanaan program tanggung jawab dalam bidang pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PKBL ditetapkan berdasarkan pelaksanaan *social mapping* sehingga sasaran dan kegiatan yang dilakukan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perseroan telah menyusun rencana dan target kegiatan terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan melalui kegiatan PKBL yang terdiri dari beberapa program kegiatan, antara lain:

through recruitment and implementation of direct social development programs, including the PKBL program and other CSR programs intended to bring direct impacts to the community.

SCOPE AND FORMULATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING SOCIAL DEVELOPMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT

The scope and formulation of corporate social responsibility concerning social development and community empowerment include community living standard improvement programs comprising the PKBL program and other CSR programs intended to build a good and beneficial relationship between the Company and the community and bring positive impacts for the Company by means of implementation of efficient programs that leave long and sustainable impacts.

The PKBL and other CSR programs have many purposes beyond compliance with the prevailing laws and regulations, namely achievement of sustainable development goals in poverty alleviation, provision of clean water and sanitation, as well as provision of employment, and community self-sufficiency.

TARGETS AND PLANS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCERNING SOCIAL DEVELOPMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT

The substance of corporate social responsibility program implementation in social development and community empowerment through PKBL activities is based on the social mapping to ensure that the targets and activities are appropriate and adapted to the community needs. The Company has formulated the plans and targets of social development and community empowerment through PKBL activities consisting of various activity programs, among others:

Sektor Program Kemitraan Partnership Program Sector	Sektor Program Bina Lingkungan Environmental Assistance Program Sector
<ul style="list-style-type: none"> • Industri Industrial • Perdagangan Commerce • Pertanian Agriculture • Peternakan Livestock • Perkebunan Plantation • Perikanan Fishery • Jasa Services • Cluster • Lainnya Others 	<ul style="list-style-type: none"> • Bencana Alam Natural Disaster • Pendidikan dan Pelatihan Training and Education • Peningkatan Kesehatan Health Improvement • Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Development of Public Facilities • Sarana Ibadah Praying Facilities • Pelestarian Alam Nature Conservation • Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Poverty Alleviation

PROGRAM DAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR OPERASI

Perseroan memiliki komitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera, khususnya bagi masyarakat sekitar wilayah operasi. Perseroan memberikan prioritas pengisian karyawan baru di sekitar wilayah operasi dengan menggunakan metode rekrutmen dan seleksi yang dapat mengoptimalkan waktu, mengoptimalkan pencarian karyawan yang berkompeteren dan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja Perseroan selalu diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar wilayah operasi. Di samping itu, penggunaan tenaga kerja lokal juga akan menciptakan efisiensi biaya dan pengelolaan SDM yang efektif, dan secara tidak langsung berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran.

KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA MASYARAKAT

Tanggung jawab atas nilai-nilai Anti Korupsi tidak hanya dijalankan dalam pengelolaan organisasi untuk menopang kegiatan operasi dan bisnis semata. Perseroan memiliki komitmen untuk membagikan nilai-nilai Anti Korupsi kepada masyarakat, dengan harapan bahwa nilai kebaikan ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi pembentukan masyarakat madani, serta dapat meningkatkan nilai Perseroan.

Salah satu bentuk sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat yang dilakukan Perseroan, tercermin dengan diberlakukannya pakta integritas yang berisikan komitmen manajemen dan seluruh insan Perseroan untuk senantiasa mencegah dan menghindari tindakan korupsi, agar seluruh insan Perseroan dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan, terutama dalam berhubungan dengan masyarakat. Perseroan juga memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat luas untuk melaporkan setiap kasus korupsi dan/atau gratifikasi yang terjadi di lingkungan Perseroan, baik yang dilakukan oleh pejabat maupun pegawai Perseroan.

PROGRAM KEMITRAAN

Pelaksanaan program kemitraan yang dilaksanakan Perseroan, memiliki fokus kerja dalam aspek pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang diimplementasikan melalui pinjaman dana kemitraan untuk modal kerja dan investasi serta bantuan pembinaan berupa bantuan pelatihan manajemen usaha, bantuan pemasaran, dan bantuan pembinaan lainnya. Program kemitraan ini juga lebih menasar pada para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS AND ACTIVITIES CONCERNING COMMUNITY EMPOWERMENT AND INVOLVEMENT

EMPLOYMENT OF LOCAL CANDIDATES AND EMPOWERMENT OF COMMUNITY NEAR OPERATION SITES

The Company is committed to regularly run community development and empowerment programs to help realize self-sufficient and prosperous community, especially with regard to the community near the operation sites. The Company prioritizes candidates from regions near to the operation sites by using a recruitment and selection method that saves time, optimizes the search for competent employees, and employs the local candidates. Work opportunity for the community near the Company's operation sites is the Company's way to improve the economic life of the community near the Company's operation sites. In addition, employment of local candidates may save costs, allow for effective human resource management, and indirectly contribute to reduce unemployment.

ANTI-CORRUPTION POLICY AND DISSEMINATION TO THE COMMUNITY

Corporate social responsibility concerning the fight against corruption is not only intended to support operating and business activities. The Company is committed to share anti-corruption values with the community in hope that the values will become a strong foundation to achieve civil society, and strengthen the Company values.

The anti-corruption value dissemination by the Company is reflected in the integrity pact containing the commitment of both Company management and employees to always prevent and avoid practices of corruption, in hope that everyone involved in the Company does their job in conformity with the agreed code of conduct, particularly in their relations with the community. The Company also offers equal opportunity to the public at large to report any practice of corruption and/or gratuity within the Company, be it committed by the Company's management or employee.

PARTNERSHIP PROGRAMS

The implementation of the partnership programs by the Company is focused on community empowerment and economic improvement, which are carried out by partnership loans for working capital and investment and development assistance through business management workshop, marketing assistance and other forms of development assistance. The partnership programs are aimed to small and medium enterprises (UKM), with the goals of improving competency and capacity, increasing





kapasitasnya, untuk dapat memperbesar skala bisnisnya, di samping juga menciptakan peluang-peluang baru atas usaha yang dijalaniya, serta mampu menyerap tenaga kerja baru.

Pelindo 1 telah sejak lama melaksanakan pembinaan terhadap usaha kecil yang masuk dalam wilayah binaan Perseroan. Pembinaan tersebut dimulai sejak tahun 1991, mencakup 4 (empat) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau, di mana terdapat 17 daerah binaan dengan rincian, yaitu 1 daerah binaan Kantor Pusat, 12 daerah binaan Cabang, dan 4 daerah binaan Perwakilan. Sejak tahun 2003, Kantor Pusat telah memutuskan untuk tidak menambah mitra binaan baru (peminjam), melainkan fokus untuk meneruskan pembinaan kepada mitra binaan yang telah ada yang belum melunasi pinjamannya, sedangkan Cabang Pelabuhan dan Perwakilan setempat, secara rutin tetap melaksanakan pola pembinaan dan tetap mengelola Program Kemitraan. Hingga akhir tahun 2020, Pelindo 1 memiliki 1.379 mitra binaan yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk pinjaman modal untuk para pelaku usaha mikro kecil di berbagai sektor seperti industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan jasa. Di tahun 2020, Perseroan telah menyalurkan dana Program Kemitraan sebesar Rp15.157.415.000 atau mencapai 95,93% terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Program Kemitraan tahun 2020 yakni sebesar Rp15.800.000.000.

Dana Program Kemitraan ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi usaha mikro kecil agar bisa bangkit kembali mengembangkan usahanya, yang selama ini terdampak pandemi COVID-19. Perseroan berharap dana tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar di wilayah kerja Pelindo 1.

Berikut adalah sebaran mitra binaan penerima penyaluran dana Program Kemitraan berdasarkan sektor usaha, untuk tahun 2020.

Sektor Usaha Business Sector	Target		Realisasi Realization	
	Jumlah Mitra Binaan Number of Development Partners	Jumlah Pinjaman (Rp) Amount of Loans (Rp)	Jumlah Mitra Binaan Number of Development Partners	Jumlah Pinjaman (Rp) Amount of Loans (Rp)
Industri Industrial	41	2.200.000.000	21	1.173.500.000
Perdagangan Commerce	122	6.250.000.000	164	10.214.000.000
Pertanian Agriculture	8	400.000.000	1	75.000.000
Peternakan Livestock	19	950.000.000	7	321.000.000
Perkebunan Plantation	18	900.000.000	7	410.000.000
Perikanan Fishery	11	550.000.000	4	211.000.000
Jasa Services	35	1.850.000.000	40	2.700.000.000

business scale, providing new opportunities for their enterprises and providing new employment opportunities.

Pelindo 1 has long provided development assistance for small enterprises located in the Company's development regions. The development assistance program was started in 1991, covering 4 (four) provinces namely the Province Aceh, North Sumatra, Riau, and Riau Islands, in which there are 17 development areas, of which 1 is Head Office development area, 12 Branch development areas, and 4 Representative development area. Since 2003, the Company has decided no to add any new development partner (borrower) and focused on continuing the development assistance to the existing partners who have not paid off their loans, while the local Port Branches and Representatives maintain the development method and manage the partnership programs. As of the end of 2020, Pelindo 1 had 379 development partners located in Aceh, North Sumatra, Riau, and Riau Islands.

The Partnership Program funds are channeled in form of capital loans to small and micro enterprises in various sectors, including industry, commerce, agriculture, livestock, plantation, fishery and services. Throughout 2020, the Company loaned out partnership program fund totaling Rp15,157,415,000, equal to 95.93% of the total target as defined in the 2020 Work and Budget Plan, which was Rp15,800,000,000.

The partnership program funds were expected to stimulate the small enterprises to bounce back from the adverse effects of the COVID-19 pandemic. The Company hopes that the funds are used as efficiently as possible so that it may impact the economy of the community located near Pelindo 1 working areas.

Below is the distribution of the Partnership Program funds categorized by business sector for the year 2020.

Sektor Usaha Business Sector	Target		Realisasi Realization	
	Jumlah Mitra Binaan Number of Development Partners	Jumlah Pinjaman (Rp) Amount of Loans (Rp)	Jumlah Mitra Binaan Number of Development Partners	Jumlah Pinjaman (Rp) Amount of Loans (Rp)
Cluster Cluster	-	-	-	-
Lainnya Others	-	2.700.000.000	-	52.915.000
Jumlah Amount	254	15.800.000.000	244	15.157.415.000

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020, sektor usaha yang paling banyak memperoleh bantuan program kemitraan adalah sektor Perdagangan dengan jumlah akumulasi pinjaman sebesar Rp10.214.000.000. Adapun sebaran penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan berdasarkan wilayah geografis untuk tahun 2020, adalah sebagai berikut.

According to the above table, the business sector receiving the most amount of loan under the guise of partnership program in 2020 was the commerce sector with an accumulated loan of Rp10,214,000,000. Below is the distribution of the Partnership Program funds categorized by region for the year 2020.

Provinsi Province	Target		Realisasi	
	Jumlah Mitra Binaan Number of Development Partners	Jumlah Pinjaman (Rp) Amount of Loans (Rp)	Jumlah Mitra Binaan Number of Development Partners	Jumlah Pinjaman (Rp) Amount of Loans (Rp)
Aceh	31	1.700.000.000	36	1.940.000.000
Sumatera Utara	92	4.700.000.000	94	6.409.000.000
Riau	90	4.600.000.000	86	4.931.500.000
Kepulauan Riau	41	2.100.000.000	28	1.824.000.000
Jumlah Amount	254	15.800.000.000	244	15.157.415.000

Dalam pelaksanaan program kemitraan, Pelindo 1 tidak hanya memberikan pinjaman dana semata, namun juga melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mengoptimalkan kompetensi mitra binaan Pelindo 1 dalam menekuni bidang usahanya. Pelindo 1 juga turut memberikan pelatihan kepada mitra binaan, khususnya tentang *marketing digital* untuk memperluas pangsa pasar secara *online*. Harapannya, program ini bisa membantu mengembangkan industri rumahan.

Pelindo 1 does not only provide loans in the partnership programs, but also development assistance and training to maximize the competency of Pelindo 1 development partners in their respective field of business. Pelindo 1 also provides digital marketing training for development partners aimed to expand to the online market. It is hoped that the program will help develop home industries.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program bina lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat, dengan cakupan kegiatan meliputi pemberian bantuan untuk bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Program ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif secara berkelanjutan melalui pelaksanaan program yang tepat guna dan mampu membidik isu-isu sosial kemasyarakatan yang relevan.

ENVIRONMENTAL ASSISTANCE PROGRAM

The Environmental Assistance Program is a community empowerment program encompassing natural disaster relief, training and education, health improvement, development of public facilities, praying facilities, nature conservation, and poverty alleviation. The program is intended to bring sustainable positive impacts through efficient implementation of the program aimed at the relevant social issues.

Di tahun 2020, Perseroan telah menyalurkan dana Program Bina Lingkungan senilai Rp7.497.255.623. Penyaluran dana tersebut dilakukan di empat provinsi yang merupakan lingkup area operasional Pelindo 1 yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau melalui cabang-cabang Pelindo 1 di daerah tersebut.

Throughout 2020, the Company distributed Environmental Assistance Program funds totaling Rp7,497,255,623. The fund is allocated in four provinces within Pelindo 1 operating areas, namely Aceh, North Sumatra, Riau, and Riau Islands through Pelindo 1 branches located in the provinces.





ANGGARAN DAN BIAYA PROGRAM BINA LINGKUNGAN TAHUN 2020
BUDGET AND FUND FOR 2020 ENVIRONMENTAL ASSISTANCE PROGRAM

Sektor Sector	RKAP Tahun 2020 2020 Budget Plan (Rp)	Realisasi Tahun 2020 2020 Realization (Rp)	Pencapaian Realisasi terhadap Target Realization to Target Ratio (%)
Bencana Alam Natural Disaster	100.000.000	859.570.123	859,57%
Pendidikan dan Pelatihan Training and Education	1.855.000.000	827.000.000	44,58%
Peningkatan Kesehatan Training and Education	430.000.000	243.500.000	56,63%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Development of Public Facilities	2.440.000.000	1.310.000.000	53,69%
Sarana Ibadah Praying Facilities	2.258.000.000	2.596.138.000	114,98%
Pelestarian Alam Nature Conservation	460.000	205.197.500	44,61%
Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Poverty Alleviation	2.630.000.000	1.455.850.000	55,36%
Jumlah Amount	10.173.000.000	7.497.255.623	73,71%

Terkait program Bina Lingkungan, pada tahun 2020, Pelindo 1 telah menyalurkan dana untuk program-program bina lingkungan unggulan seperti pengembangan kampung wisata ramah anak di Belawan yang meliputi penghijauan melalui pertanian hidroponik, menyediakan fasilitas rumah baca, mengembangkan usaha ternak lele, batik daun *ecoprint*, layanan kesehatan termasuk untuk penanggulangan COVID-19, dan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kampung Wisata Ramah Anak.

The year 2020 saw Pelindo 1 allocate funds for select environmental assistance programs such as the development of child-friendly tourism village in Belawan, which includes reforestation with hydroponic agriculture, provision of a reading home facility, development of catfish farms, *ecoprint* batik, health care including COVID-19 handling, and establishment of a tourism awareness group within the child-friendly tourism village.

Berikut rincian Program Bina Lingkungan Unggulan Pelindo 1 yang dilaksanakan di sepanjang tahun 2020.

Below is Pelindo 1 select environmental assistance programs carried out in 2020.

No	Sektor Sector	Nama Program Program Name	Unit Bantuan Assistance Units	Nilai Bantuan Amount (Rp)	Lokasi Location
1	Bencana Alam Natural Disaster	Bantuan Penanggulangan COVID-19 COVID-19 Relief	11	766.870.123	Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau Aceh, North Sumatera, Riau, and Riau Islands
2	Pendidikan dan Pelatihan Training and Education	Renovasi Sekolah (Pembuatan ruang kelas, MCK) Bantuan Mobiler School Renovation (Construction of Classroom, Sanitation), Mobiler Assistance	18	600.000.000	Sumatera Utara North Sumatera
3	Peningkatan Kesehatan Health Improvement	Khitanan Massal, Pembuatan Sarana Air Bersih Mass Circumcision and Clean Water Facility Construction	3	102.500.000	Sumatera Utara North Sumatera
4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Developmet of Public Facilities	Perbaikan jalan Road repair	1	489.000.000	Riau

No	Sektor Sector	Nama Program Program Name	Unit Bantuan Assistance Units	Nilai Bantuan Amount (Rp)	Lokasi Location
5	Sarana Ibadah Praying Facilities	Renovasi sarana ibadah (Masjid, Mushollah, Gereja) Renovation of Houses of Worship (Mosques, Mushollas, Churches)	30	2.321.138.000	Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau Aceh, North Sumatera, Riau, and Riau Islands
6	Pelestarian Alam Nature Conservation	Konservasi Hutan Mangrove, Penanaman Bibit Mangrove Mangrove Forest Conservation, Mangrove Seed Planting	3	75.780.000	Sumatera Utara dan Riau North Sumatera and Riau
7	Sosial Masyarakat dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Poverty Alleviation	Bantuan Hidroponik, bibit ikan, bibit ayam, bantuan Pemdand dan <i>steeling</i> kuliner Assistance in form of hydroponics, breeder fish, breeder chicken, and culinary <i>steeling</i>	7	203.400.000	Sumatera Utara North Sumatera

BANTUAN PENANGGULANGAN COVID-19

Sebagai bentuk kepedulian Pelindo 1 terhadap kondisi pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia sejak Maret 2020, Perseroan memberi bantuan untuk penanggulangan COVID-19 di berbagai daerah yang menjadi wilayah kerja Pelindo 1 dengan total nilai sebesar Rp7,380 miliar. Bantuan tersebut berupa APD dan Masker, PCR dan *Rapid Test*, obat-obatan, alat kesehatan, pemberian 11.894 paket sembako, bantuan uang tunai pensiunan Pelindo 1, dan disinfektan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang sedang kesulitan atau terdampak pandemi.

DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan terkait pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Pelindo 1 secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap Perseroan dan lingkungan masyarakat. Selain meningkatkan citra Perseroan di mata masyarakat, program kegiatan ini juga memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan program tersebut. Terlebih pada kondisi pandemi COVID-19, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan terkait pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Pelindo 1 secara tidak langsung dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi serta sekaligus merupakan wujud kontribusi Perseroan dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional.

COVID-19 RELIEF

As proof of Pelindo 1 concern for the COVID-19 pandemic which has been present in Indonesia since March 2020, the Company provides COVID-19 relief in Pelindo 1 operating areas with a total amount of Rp7.380 billion. The relief was given in the form of PPE and masks, PCR and rapid tests, medicine, medical equipment, 11,894 staple packages, cash relief for Pelindo 1 retirees and disinfectant. The relief is hoped to ease the burden of the pandemic-afflicted community.

IMPACTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS AND ACTIVITIES CONCERNING SOCIAL DEVELOPMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT

The corporate social responsibility programs concerning social development and community empowerment carried out by Pelindo 1 indirectly brings positive impacts to the community and the Company itself. Aside from improving the image of the Company, such programs also bring many benefits to the community targeted by such program activities. Especially during the ongoing COVID-19 pandemic, the corporate social responsibility programs concerning social development and community empowerment carried out by Pelindo 1 may indirectly ease the burden of the pandemic-afflicted community, and become an avenue through which the Company contributes to accelerate national economic growth.



Pelindo 1 juga secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran, melalui program penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Perseroan. Di samping itu, keberadaan Perseroan juga dapat menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Secara umum, kegiatan program tanggung jawab sosial perusahaan terkait pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pelindo 1 telah memberikan manfaat terhadap pembangunan berkelanjutan khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan terkait pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di sepanjang tahun 2020, Pelindo 1 berhasil meraih pencapaian yang cukup gemilang berupa penghargaan di bidang CSR, di antaranya adalah:

1. Penghargaan TOP CSR Awards 2020 untuk kategori TOP CSR Awards 2020 "Bintang 4" dan TOP Leader on CSR Commitment 2020 yang diselenggarakan oleh Top Business Magazine, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan CSR Society, di Sultan Hotel, Jakarta, pada tanggal 29 Juli 2020.
2. Penghargaan Gold Winner untuk kategori Social Economy Contribution pada apresiasi 2nd RRI iConomics BUMN Brand Award yang diselenggarakan oleh RRI dan The iConomics pada tanggal 28 September 2020.
3. Penghargaan Silver Winner untuk kategori Community Based Development pada apresiasi PR Indonesia Awards (PRIA) 2020 untuk penataan Pulau Penyengat, yang diselenggarakan oleh Majalah PR Indonesia pada tanggal 26 November 2020.

Pelindo 1 also indirectly contributes in the reduction of unemployment through employment program for local candidates and other community empowerment programs carried out by the Company. Furthermore, the mere presence of the Company opens up new business opportunities for the nearby community. In general, the corporate social responsibility activities concerning social development and community empowerment carried out by Pelindo 1 have brought concrete benefits with regard to sustainable development, especially in poverty alleviation and community education quality improvement.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACHIEVEMENTS AND AWARDS CONCERNING SOCIAL DEVELOPMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT

For the corporate social responsibility programs concerning social development and community empowerment carried out in 2020, Pelindo 1 won many achievements in the form of several CSR awards, namely:

1. 2020 Top CSR Awards for 2020 Top CSR Awards category "4 Star" and 2020 TOP Leader on CSR Commitment by Top Business Magazine, Governance Policy National Committee (KNKG), and the CSR Society, at Sultan Hotel, Jakarta, on 29 July 2020.
2. Gold Winner award for the Social Economy Contribution category at 2nd RRI iConomics BUMN Brand Award held by RRI and The iConomics on 28 September 2020.
3. Silver Winner for the Community Based Development at 2020 PR Indonesia Awards (PRIA) for the planning of the Penyengat Island, held by the PR Indonesia magazine on 26 November 2020.





08

LAMPIRAN

APPENDIX

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada
Tanggal 1 Januari 2019/ 31 Desember 2018**

***PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019 and
Consolidated Statements of Financial Position
As of January 1, 2019/ December 31, 2018***

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 serta Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi pada Tanggal 1 Januari 2019/ Desember 31, 2018		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2020 and 2019 Consolidated Financial Position Statement As of January 1, 2019/ December 31, 2018</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss And Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
SERTA LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
1 JANUARI 2019/ 31 DESEMBER 2018**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION AS OF JANUARY 1, 2019/
DECEMBER 31, 2018**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We the undersigned :

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| 1. Nama : | Dani Rusli Utama | : | <i>Name 1.</i> |
| Alamat Kantor : | Grha Pelindo Satu Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411 | : | <i>Office Address</i> |
| Alamat Domisili sesuai KTP atau Identitas : | Jl. Batik Kumeli No. 39, RT. 10 RW. 07 Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung | : | <i>Domicile as stated in ID Card</i> |
| Nomor Telepon : | (061) 41000055 | : | <i>Phone Number</i> |
| Jabatan : | Direktur Utama / <i>President Director</i> | : | <i>Position</i> |
| 2. Nama : | Roy Leonard | : | <i>Name 2.</i> |
| Alamat Kantor : | Grha Pelindo Satu Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan 20411 | : | <i>Office Address</i> |
| Alamat Domisili sesuai KTP atau Identitas : | Jl. Kakap Raya No. 10, RT. 015 /RW. 005 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung | : | <i>Domicile as stated in ID Card</i> |
| Nomor Telepon : | (061) 41000055 | : | <i>Phone Number</i> |
| Jabatan : | Direktur Keuangan / <i>Finance Director</i> | : | <i>Position</i> |

Menyatakan bahwa:

State that:

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak (Grup). | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and Subsidiaries (Group).</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. <i>The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar. | 3. a. <i>All information contained in the consolidated financial statements of the Group are complete and correct.</i> |

GRHA PELINDO SATU

Jl. Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan,
Medan 20411

Telp. (061) - 41000055 (Hunting)

Fax. (061) - 88800059

E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id

Website : www.pelindo1.co.id



PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

- b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

b. The consolidated financial statements of the Group do not contain any incorrect information or material facts and nor do they omit material information or facts.

- 4. We are responsible for the Group's internal control system.*

This is our declaration, which has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*
Medan, 27 Februari 2021/ *February 27, 2021*

Dani Rusli Utama
Direktur Utama/
President Director

Roy Leonard
Direktur Keuangan /
Finance Director



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/ Number : 00005/3.0310/AU.1/05/0500-1/1/III/2021

RSM Indonesia
SOHO SKYLOFT
Unit 1888-1898
Ciputra World Surabaya
Jl. Mayjen Sungkono No. 89
Surabaya - 60224

T +62 319953 3999, +62 319953 3333
F +62 319953 2121

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Hal lain

Laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2021 menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2019 dan 2018.

Other matter

The consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and its subsidiaries as of and for the year ended December 31, 2019 were audited by other independent auditor whose report dated February 25, 2021 expressed an unmodified opinion with an emphasis of a matter paragraph regarding restatement of the 2019 and 2018 consolidated financial statements.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Endang Pramuwati

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0500/
Public Accountant License Number: AP.0500

Surabaya, 27 Februari 2021/ February 27, 2021

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta
1 Januari 2019/ 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2020 and 2019 and
January 1, 2019/ December 31, 2018
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Note	2020 Rp	2019*) Rp	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018/ January 1, 2019/ December 31, 2018*) Rp	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	5, 35, 36	1,565,080,858,350	1,767,548,879,083	1,999,187,810,035	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha					Account Receivables
Pihak Berelasi	6, 35, 36	11,876,312,566	18,111,394,049	19,862,922,891	Related Parties
Pihak Ketiga	6, 36	37,628,434,744	102,578,835,091	128,344,759,035	Third Parties
Persediaan	7	24,320,421,565	18,285,397,823	25,388,282,754	Inventories
Pajak Dibayar di Muka	18.a	370,872,432,580	513,720,664,592	277,103,058,715	Prepaid Taxes
Uang Muka		12,298,232,820	30,567,021,098	14,538,229,477	Advances
Biaya Dibayar di Muka		11,529,761,873	10,802,022,747	6,022,726,033	Prepaid Expenses
Piutang Lain-lain	8, 36	12,748,999,709	140,247,755,871	152,502,106,674	Other Receivables
Jumlah Aset Lancar		2,046,355,454,207	2,601,861,970,354	2,622,949,895,614	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada Entitas Asosiasi	9	49,376,851,450	49,104,901,998	50,361,736,861	Investment in Associates
Properti Investasi - Bersih	10	421,403,835,085	416,965,309,815	416,270,074,823	Investment Properties - Net
Aset Tetap - Bersih	11	6,173,831,565,523	6,118,441,232,921	5,714,241,312,891	Fixed Assets - Net
Aset Takberwujud - Bersih	12	6,803,184,823,107	6,649,202,795,568	4,883,081,150,924	Intangible Assets - Net
Aset Hak Guna	13	185,908,147,497	--	--	Right of Use Assets
Aset Pajak Tangguhan	18.d	214,614,702,227	98,301,867,821	37,053,926,881	Deferred Tax Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	14	68,784,413,346	33,322,993,759	83,031,279,132	Other Non-current Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	15, 36	2,682,469,344	2,171,080,675	20,049,725,276	Other Non-current Financial Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		13,919,786,807,579	13,367,510,182,557	11,204,089,206,788	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		15,966,142,261,786	15,969,372,152,911	13,827,039,102,402	TOTAL ASSETS

*) Reklasifikasi (Catatan 44)

*) As Reclassified (Note 44)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta
1 Januari 2019/ 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**

As of December 31, 2020 and 2019 and
January 1, 2019/ December 31, 2018

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Note	2020 Rp	2019*) Rp	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018/ January 1, 2019/ December 31, 2018*) Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Jangka Pendek	35, 36	--	--	17,992,184,312	Short term Bank Loans
Utang Usaha					Account Payables
Pihak Berelasi	16, 35, 36	107,235,762,901	198,122,846,257	321,505,188,327	Related Parties
Pihak Ketiga	16, 36	690,958,119,601	1,692,574,184,059	1,453,653,391,682	Third Parties
Uang Panjar	36	5,090,823,228	6,882,913,253	9,201,376,083	Advance from Customer
Uang Titipan	36	25,616,668,977	28,794,888,017	22,354,600,138	Fund Retained
Beban Akrual	17, 36	212,182,969,344	126,585,980,305	502,756,307,640	Accrued Expenses
Utang Pajak	18.b	73,167,416,298	78,534,281,525	77,508,016,452	Taxes Payables
Utang Lain-lain					Other Payables
Pihak Berelasi	35, 36	84,100,000,000	--	--	Related Parties
Pihak Ketiga	36	6,439,906,928	5,687,533,567	4,170,747,659	Third Parties
Bagian Lancar dari Liabilitas Jangka Panjang:					Current Portion of Long-Term Liabilities:
Liabilitas Sewa	21, 36	3,092,006,632	--	--	Lease Liabilities
Utang Bank	19, 36	410,495,386,081	214,549,156,365	175,000,140,000	Bank Loans
Utang Obligasi	20, 36	499,768,052,410	--	50,000,000,000	Bonds Payables
Pendapatan Diterima di Muka	23	75,572,947,543	62,827,108,376	42,756,096,092	Unearned Income
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2,193,720,059,943	2,414,558,891,724	2,676,898,048,385	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Jangka Panjang	19, 36	6,149,254,631,216	5,751,017,927,371	3,364,720,079,181	Long-Term Bank Loan
Utang Obligasi	20, 36	449,208,310,134	948,223,476,755	947,431,699,211	Bonds Payables
Liabilitas Sewa	21, 36	174,120,268,700	--	--	Lease Liabilities
Pendapatan Diterima di Muka	23	211,116,483,637	234,342,579,167	234,184,192,281	Unearned Incomes
Liabilitas Imbalan Kerja	22	431,079,806,893	395,256,776,193	281,353,710,808	Employee Benefit Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	18.d	16,143,682	--	3,004,567,975	Deferred Tax Liability
Provisi	24	97,094,046,289	30,410,559,634	--	Provisions
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		7,511,889,690,551	7,359,251,319,120	4,830,694,249,456	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		9,705,609,750,494	9,773,810,210,844	7,507,592,297,841	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000					Share Capital - Par Value Rp1.000.000
Per Saham Masing-masing untuk					Per Share for Serie A Golden Stock and
Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B					Serie B, Respectively
Modal Dasar - 6.800.000 Saham Terdiri dari:					Authorized Capital - 6.800.000 Shares are
1 Saham Seri A Dwiwarna dan					as Follows: 1 Share of Serie A Golden
6.799.999 Saham Seri B					Stock and 6,799,999 Shares of Series B
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					Issued and Fully Paid Capital
1.700.000 Saham pada 2020 dan 2019					1.700.000 Shares in 2020 and 2019 are
Terdiri dari: 1 Saham Seri A Dwiwarna					as Follows: 1 Share of Serie A Golden
dan 1.699.999 Saham Seri B	25	1,700,000,000,000	1,700,000,000,000	1,700,000,000,000	Stock and 1,699,999 Shares of Series B
Tambahan Modal Disetor	26	527,133,217,252	527,133,217,252	527,133,217,252	Other Additional Paid in Capital
Saldo Laba:					Retained Earnings:
Ditentukan Penggunaannya		3,133,238,001,980	2,964,202,637,380	2,417,571,145,154	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		309,298,348,908	285,263,383,703	892,685,591,490	Unappropriated
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja		(221,734,832,975)	(219,825,654,767)	(156,632,343,276)	Remeasurement of Employee Benefits Liability
Ekuitas yang dapat Diatribusikan Kepada					Equity Attributable to Owner of the Parent
Pemilik Entitas Induk		5,447,934,735,165	5,256,773,583,568	5,380,757,610,620	Entity
Kepentingan Non Pengendali	28	812,597,776,127	938,788,358,499	938,689,193,941	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		6,260,532,511,292	6,195,561,942,067	6,319,446,804,561	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		15,966,142,261,786	15,969,372,152,911	13,827,039,102,402	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Reklasifikasi (Catatan 44)

*) As Reclassified (Note 44)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Note	2020 Rp	2019*) Rp	
Pendapatan Operasi	29, 35	3,083,846,945,033	3,104,233,009,111	Operating Revenues
Reduksi Pendapatan	29	(80,531,064)	(186,734,654)	Revenue Reduction
Pendapatan Bersih		3,083,766,413,969	3,104,046,274,457	Net Revenue
Pendapatan Konstruksi	30	758,143,856,767	2,535,336,461,063	Construction Revenue
Beban Operasi	31	(2,407,778,400,729)	(2,505,837,092,694)	Operating Expenses
Beban Konstruksi	30	(758,143,856,767)	(2,535,336,461,063)	Construction Expenses
LABA USAHA		675,988,013,240	598,209,181,763	OPERATING INCOME
Pendapatan (Beban) Non-Usaha - Bersih	32	10,622,527,353	(29,984,043,453)	Non-Operating Incomes (Expenses) - Net
Rugi Penjualan Aset Tidak Lancar Lainnya		(2,869,692,607)	(1,241,661,903)	Loss on Sale of Other Non-Current Assets
Pendapatan Keuangan	33	54,804,981,286	83,524,481,960	Finance Income
Beban Keuangan	33	(526,995,276,449)	(361,773,502,212)	Finance Cost
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi	9	271,949,452	(756,834,865)	Equity in Profit/ (Loss) of Associates
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		211,822,502,275	287,977,621,290	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban Pajak Penghasilan	18.c	(28,702,132,305)	(81,801,152,446)	Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan		183,120,369,970	206,176,468,844	Profit for the Year
Penghasilan Komprehensif Lainnya				Other Comprehensive Income
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				Items that Will Not be Reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	22	(2,373,484,648)	(84,262,989,457)	Remeasurement of Defined Benefits Obligations
Pajak Penghasilan Terkait		459,722,900	21,060,834,110	Related Income Tax
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak		(1,913,761,748)	(63,202,155,347)	Other Comprehensive Income for the Year Net of Tax
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		181,206,608,222	142,974,313,497	Total Comprehensive Income for the Year
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada:				Profit for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		309,298,348,909	285,263,383,703	Owners of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	28	(126,177,978,939)	(79,086,914,859)	Non-Controlling Interest
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		183,120,369,970	206,176,468,844	Total Comprehensive Income for the Year
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada:				Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		307,389,170,700	222,070,072,212	Owners of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	28	(126,182,562,478)	(79,095,758,715)	Non-Controlling Interest
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		181,206,608,222	142,974,313,497	Total Comprehensive Income for the Year
Laba Per Saham Dasar	34	181,940	167,802	Basic Earning Per Share

*) Reklasifikasi (Catatan 44)

*) As Reclassified (Note 44)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Note	Modal Ditempatkan dan Ditetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Tambahkan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Stannya (BPYBDS)/ Government Grant with Unspecified Used (BPYBDS)		Saldo Laba/ Retained Earnings		Pengukuran Kembali Imbalan Kerja/ Remeasurement of Employee Benefits		Jumlah Total	Kepentingan Non Pengendali/ Non- controlling Interest	Jumlah Total	
				Used (BPYBDS)	Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetorkan Penggunaannya/ Unappropriated	Employee Benefits	controlling Interest					
Saldo 31 Desember 2018/ 1 Januari 2019		511.960.000.000	1.188.040.000.000	527.133.217.252	2.468.202.043.804	911.814.406.602	(158.092.343.897)	5.449.056.723.761	1.030.521.665.623	6.479.577.389.384			Balance of December 31, 2018/ January 1, 2019
Reklasifikasi		1.188.040.000.000	(1.188.040.000.000)	-	(50.630.898.650)	(19.128.815.112)	1.460.600.621	(68.299.113.141)	(91.631.471.682)	(160.130.594.823)			Reclassification
Saldo 31 Desember 2018/ 1 Januari 2019 *)		1.700.000.000.000	-	527.133.217.252	2.417.571.145.154	892.685.591.490	(156.632.343.276)	5.380.757.610.620	938.889.193.941	6.319.446.004.561			Balance of December 31, 2018/ January 1, 2019*)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	285.263.383.703	-	285.263.383.703	(79.088.914.859)	206.176.468.844			Profit for the Year
Perhasilan Komprehensif Lain		-	-	-	-	-	(63.193.311.491)	(63.193.311.491)	(8.843.866)	(63.202.155.347)			Other Comprehensive Income
Tambahan Setoran Modal		-	527.133.217.252	-	-	-	-	527.133.217.252	79.200.000.000	606.333.217.252			Paid in Capital
Dividen		-	-	-	-	(319.135.000.000)	-	(319.135.000.000)	-	(319.135.000.000)			Dividends
Cadangan Umum		-	-	(527.133.217.252)	592.679.406.602	(592.679.406.602)	-	(527.133.217.252)	-	(527.133.217.252)			General Reserve
Penyesuaian Cadangan Umum		-	-	-	(46.047.914.376)	19.128.815.112	-	(26.919.099.264)	(5.076.727)	(26.924.175.991)			General Reserve Adjustments
Saldo 31 Desember 2019		1.700.000.000.000	527.133.217.252	-	2.964.202.637.390	285.263.383.703	(219.825.654.767)	5.256.773.583.588	938.788.358.499	6.195.561.942.067			Balance of December 31, 2019
Dampak Peraturan Awal PSKK 71 dan 73	3c	-	-	-	-	(56.177.065.510)	-	(56.177.065.510)	(8.019.883)	(56.185.085.403)			Impact on Initial Implementation PSKK 71 and 73
Saldo 31 Desember 2019/ 1 Januari 2020 *)		1.700.000.000.000	527.133.217.252	-	2.964.202.637.390	229.086.318.193	(219.825.654.767)	5.200.596.518.058	938.780.338.616	6.139.376.856.664			Balance of December 31, 2019/ January 1, 2020*)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	309.298.348.909	-	309.298.348.909	(126.177.978.939)	183.120.369.970			Profit for the Year
Perhasilan Komprehensif Lain		-	-	-	-	-	(1.909.178.208)	(1.909.178.208)	(4.583.540)	(1.913.761.748)			Other Comprehensive Income
Dividen		-	-	-	-	(60.050.953.594)	-	(60.050.953.594)	-	(60.050.953.594)			Dividends
Cadangan Umum		-	-	-	309.460.760.856	(309.460.760.856)	-	-	-	-			General Reserve
Penyesuaian Cadangan Umum		-	-	-	(140.425.386.256)	140.425.386.256	-	-	-	-			General Reserve Adjustments
Saldo 31 Desember 2020		1.700.000.000.000	527.133.217.252	-	3.133.238.001.980	309.298.348.908	(221.734.832.975)	5.447.834.735.165	812.597.776.127	6.260.532.511.292			Balance of December 31, 2020

*) Reklasifikasi (Catatan 44)

*) As Reclassified (Note 44)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019*) Rp	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	6, 23, 29	3,093,927,923,463	3,154,912,013,643	Cash Receipts from Customers
Pembayaran Kepada Pemasok, Karyawan dan Lainnya	8, 16, 17, 31, 32	(2,510,783,382,685)	(2,473,780,660,630)	Payment to Suppliers, Employees and Others
Pembayaran Pajak Penghasilan	18	(98,164,769,227)	(198,399,235,972)	Income Tax Paid
Penghasilan Bunga	33	55,811,388,982	85,557,939,556	Interest Received
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		540,791,160,533	568,290,056,597	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap, Properti Investasi dan Aset Lainnya	10, 11, 13	(507,986,496,553)	(681,942,982,867)	Acquisition of Fixed Assets, Investment Properties and Other Assets
Perolehan Aset Takberwujud	12	(292,118,799,206)	(1,821,464,850,631)	Acquisition of Intangible Assets
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(800,105,295,759)	(2,503,407,833,498)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM FINANCING
AKTIVITAS PENDANAAN				ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman Bank	19	938,629,323,916	2,548,638,368,700	Receipt of Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank	19	(385,957,543,847)	(194,473,234,614)	Payment of Bank Loans
Pembayaran Utang Obligasi	20	--	(50,000,000,000)	Payment of Obligation Liabilities
Pembayaran Beban Keuangan	33	(519,874,711,982)	(360,751,288,137)	Payment of Financial Expenses
Penerimaan Setoran Modal pada Entitas Anak		--	79,200,000,000	Receipt of Paid-in Capital in Subsidiaries
Pembayaran Dividen	27	(60,050,953,594)	(319,135,000,000)	Payment of Dividend
Penerimaan Pinjaman Lainnya	35	84,100,000,000	--	Receipt of Other Loans
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		56,846,114,493	1,703,478,845,949	Net Cash Flows Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(202,468,020,733)	(231,638,930,952)	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		1,767,548,879,083	1,999,187,810,035	CASH AND CASH EQUIVALENTS BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		1,565,080,858,350	1,767,548,879,083	CASH AND CASH EQUIVALENTS END OF THE YEAR

*) Reklasifikasi (Catatan 44)

*) As Reclassified (Note 44)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum

1. General

a. Pendirian Perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("Perusahaan") dahulu pada masa penjajahan Belanda adalah sebuah Perusahaan dengan nama "Haven Badriff". Selanjutnya, setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, Perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada tahun 1969, Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PN Pelabuhan. Pada periode tahun 1969 sampai dengan tahun 1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan ("BPP"). Pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983, BPP diubah menjadi Perseroan Umum Pelabuhan I ("Perumpel I"). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991, Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 November 1994, tambahan No. 87.

Perusahaan secara resmi telah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No.KP.133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang pemberian ijin usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Izin BUP tersebut memberikan kewenangan pada Perusahaan untuk mengelola pelabuhan beserta fasilitasnya.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir mengenai perubahan jenis saham. Perubahan terakhir tersebut telah diaktakan dengan Akta No. 17 tanggal 13 September 2019 oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri

a. The Company Establishment

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("the Company") was formerly known as "Haven Badriff" in the period of Dutch Colonialism. Furthermore, after the independency of the Republic of Indonesia in 1945 until 1950, the Company has changed its status into Jawatan Pelabuhan. In 1969, the Jawatan Pelabuhan was changed into the State Owned Enterprise ("BUMN") under the name of Perusahaan Negara Pelabuhan known as PN Pelabuhan. From 1969 to 1983, PN Pelabuhan then changed into Lembaga Pengusaha Pelabuhan under the name of Badan Pengusahaan Pelabuhan ("BPP"). In 1983, based on the Government Regulation No. 11 year 1983, BPP was changed into Perseroan Umum Pelabuhan I ("Perumpel I"). Based on the Government Regulation No. 56 year 1991, the Perumpel I changed the status into PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

The change of the Company's name into PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) was based on the Notarial Deed No. 1 dated December 1, 1992 of Imas Fatimah, SH., Notary in Jakarta and has approved by the Minister of Justice of Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. C2-8519.HT.01.01 Year 1992 dated June 1, 1992 and stated on the State Gazette of Republic of Indonesia No. 8612 on November 1, 1994, Supplement No. 87.

The Company officially became a Port Business Entity (BUP) based on Ministry of Transportation Decree No.KP.133 Year 2011 dated March 2, 2011 on the issuance of license to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a Port Business Entity (BUP). The BUP license authorizes the Company to manage sea ports and its facilities.

The Company's Articles of Association have been amended for several times, the latest amendment regarding change in the types of share. The latest amendment was notarized under Deed No. 17 dated September 13, 2019 of Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan. Such amendment was approved by the Ministry

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-0079552.AH.01.02.2019 tanggal 7 Oktober 2019.

b. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat petikemas, curah cair, curah kering, *multi purpose*, barang termasuk hewan (*general cargo*), dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan;
- Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering (*general cargo*) dan kendaraan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, *multi purpose*, penumpang, pelayanan rakyat dan Ro-Ro;
- Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda;
- Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instalasi limbah serta pembuangan sampah;

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0079552.AH.01.02.2019 dated October 7, 2019.

b. The Purpose and Objective

In accordance with the article 3 of the Company's article of association, the objectives and purposes of the Company are conducting operation in port services and optimization of its sources in generate high quality and competitive goods and services for obtaining profit to obtain benefits in order to increase the value of the Company by applying the principles of limited liability corporation.

In order to achieve the above objectives and purposes, the Company may engaged in following business activities:

- Providing and/or servicing the port harbor for traffic and ship quayside areas;
- Providing and/or servicing the related pilotage and tugboats;
- Providing the services of quayside and other facilities such as moorings, containers loading, liquid bulk, dry bulk, multi-purposes, goods including animals (*general cargo*), and passenger station and/or vehicle facility;
- Providing the loading services and unloading container, liquid bulk, dry bulk (*general cargo*) and vehicle;
- Providing the services of container terminal (*general cargo*), liquid bulk, dry bulk, multi purposes, passenger, roll on roll of shipyard and cruise passengers;
- Providing the services of warehousing, open storage, tank, place of stockpiling, loading and discharging tool and port equipment;
- Providing the services of land rental for buildings and fields, industries and buildings related to the smoothness of multi-mode transportation;
- Providing the services of electricity, fresh water, waste installation and garbage dump services;

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
- Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultansi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
- Pengusahaan dan penyelenggaraan depo petikemas dan perbaikan, *cleaning*, fumigasi serta pelayanan logistik; dan
- Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perusahaan juga dapat melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Kegiatan usaha lainnya tersebut meliputi jasa angkutan, jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan, jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang pelabuhan, jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (*ship to ship transfer*), properti di luar kegiatan utama kepelabuhanan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan kehotelan, jasa konsultan dan *surveyor* kepelabuhanan, jasa komunikasi dan informasi, jasa konstruksi kepelabuhanan, jasa *forwarding*/ekspedisi, jasa kesehatan, perbekalan dan katering, tempat tunggu kendaraan bermotor dan *shuttle bus*, jasa penyelaman, jasa *tally*, jasa pas pelabuhan dan jasa timbangan.

Untuk menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan memiliki 15 (enam belas) Pelabuhan Cabang dan 11 (sebelas) Pelabuhan Kawasan (Perwakilan), serta 1 (satu) unit usaha. Wilayah Kerja Cabang-cabang operasional pelabuhan adalah sebagai berikut:

1. Cabang Utama Kelas : Belawan
2. Cabang Kelas Satu : Dumai, Terminal Petikemas Belawan
3. Cabang Kelas Dua A (IIA) : Pekanbaru
4. Cabang Kelas Dua B (II B) : Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Kuala Tanjung
5. Cabang Kelas Tiga : Batam, Sei Pakning, Sibolga

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- *Providing the services of refueling for ship and vehicle at port;*
- *Providing the services of consolidated activities, goods distribution including animals;*
- *Providing the management of education and training consultancy services related to ports;*
- *Providing the container depot services and repairmen, cleaning, fumigation, and logistic; and*
- *Providing the custom area and temporary dump.*

Beside the above main scope of business, the Company could also conduct other business activities to support the Company's objectives and in optimizing its resources utilization. Other scope of business are including transportation services, equipment rental and repair facilities, ships and equipment maintenance in port services, ship to ship transfer services, property outside the main port activities, industrial area, tourism and hotel facility, consultant and port surveyor services, communication and information services, port construction services, forwarding/expedition services, health care services, supplies and catering, vehicle stop station and shuttle bus area, diving services, tally services, port ticket and weight scale services.

In providing its services, the Company has 15 (sixteen) Port Branches and 11 (eleven) Representative Office Branches, and 1 (one) business unit. Work areas of operational branches of port are as follows:

1. *Prime Class of : Belawan Branch*
2. *First Class of : Dumai, Terminal Branch Petikemas Belawan*
3. *Second Class of : Pekanbaru Branch A (IIA)*
4. *Second Class of : Tanjungpinang, Branch B (II B) Tanjung Balai Karimun, Kuala Tanjung*
5. *Third Class of : Batam, Sei Branch Pakning, Sibolga*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

6. Cabang Kelas : Malahayati,
Empat Lhoksumawe,
Tanjung Balai
Asahan
7. Cabang Kelas Lima : Tembilahan,
Gunung Sitoli
8. Unit Galangan kapal di Belawan, Medan

6. *Fourth Class of : Malahayati,
Branch Lhoksumawe,
Tanjung Balai
Asahan*
7. *Fifth Class of : Tembilahan,
Branch Gunung Sitoli*
8. *Shipyards unit in Belawan, Medan*

c. Manajemen Perusahaan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut:

c. The Company's Management

The composition of the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

Jabatan	Nama/ Name		Position
	2020	2019	
Komisaris Utama	Achmad Djamaludin	Refly Harun	<i>President Commissioner</i>
Komisaris	Arman Depari	Lukita Dimarsyah Tuwo	<i>Commissioners</i>
	Herbert Timbo Parluhutan Siahaan	Heryadi	
	Ahmad Perwira Mulia Tarigan	Bambang Setyo Wahyudi	
	Irma Suryani Chaniago	Winata Supriatna	
Direktur Utama	Winata Supriatna	-	
	Dani Rusli Utama	Dian Rachmawan	<i>President director Operational and</i>
Direktur Operasi dan Komersial	Ridwan Sani Siregar	Syahputera Sembiring	<i>Commercial Director</i>
Direktur Teknik	Hosadi A. Putra	Hosadi A. Putra	<i>Technical Director</i>
Direktur Keuangan	Roy Leonard	M. Nur Sodik	<i>Finance Director</i>
Direktur Sumber Daya Manusia	Henry Naldi	M. Hamied Wijaya	<i>Human Resource Director</i>
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Prasetyo	Ihsanuddin Usman	<i>Transformation and Business Development Director</i>

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2020 di atas telah diaktakan masing- masing dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 18 Mei 2020 dan No. 5 tanggal 11 November 2020 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan.

The amendment of composition of the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2020 above was notarized under deed No. 3 dated May 18, 2020 and No. 5 dated November 11, 2020 of Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan.

Susunan Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerisasi dan Manajemen Risiko Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee and Nomination, Remuneration and Risk Management Committee as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Jabatan	Nama/ Name		Position
	2020	2019	
Ketua	Heryadi	Heryadi	<i>Chairman</i>
Wakil Ketua	Lukita Dinarsyah Tuwo	Lukita Dinarsyah Tuwo	<i>Vice Chairman</i>
Anggota	Eddy Hary Susanto	Eddy Hary Susanto	<i>Members</i>
	Saiful Bahri	Saiful Bahri	

Personil manajemen kunci meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kompensasi imbalan kerja jangka pendek yang dibayarkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp22.620.561.934 dan Rp21.981.273.209.

Key management personnel are the Company's Board of Commissioners and Directors. Short term compensation paid to the key management personnel of the Company for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp22,620,561,934 and Rp21,981,273,209, respectively.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan mempunyai masing-masing 1.341 dan 1.377 karyawan tetap (tidak diaudit).

As of December 31, 2020 and 2019, the Company had 1,341 and 1,377 permanent employees (unaudited), respectively.

Kantor Pusat Perusahaan berlokasi di Grha Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan, Sumatera Utara.

The Company's headquarter is located at Grha Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan, North Sumatera.

d. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Pada tanggal 10 Juni 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-281/D.04/2016 untuk melaksanakan penawaran umum obligasi Perusahaan dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah utang obligasi yang belum dilunasi atau belum jatuh tempo sebesar Rp950.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut (Catatan 20):

d. Public Offering if the Company's Bonds

On June 10, 2016, the Company has obtained the effective statement from the Financial Services Authority (OJK) Board of Commissioners Decree No. S-281/D.04/2016 to conduct its bond public offering with the amount of Rp1,000,000,000,000. As of December 31, 2020 and 2019, the total outstanding of bonds payable was amounting to Rp950,000,000,000 which consists of the following bond series (Note 20):

No	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Par Value (Rp)	Tenor (Tahun)/ (Year)	Tanggal Penerbitan/ Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date
1	Obligasi Seri B/ Bonds Tranche B	500,000,000,000	5	21/06/2016	21/06/2021
2	Obligasi Seri C/ Bonds Tranche C	400,000,000,000	7	21/06/2016	21/06/2023
3	Obligasi Seri D/ Bonds Tranche D	50,000,000,000	10	21/06/2016	21/06/2026
		950,000,000,000			

e. Struktur Grup

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup". Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, struktur Grup adalah sebagai berikut:

e. Group Structure

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group". As of December 31, 2020 and 2019 the structure of the Group is as follows:

Nama Perusahaan/Name of Companies	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Type of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Presentase Kepemilikan/Percentase of Ownership			
				Jumlah Aset/ Total Asset		2019	
				%	Rp Jutaan/ Million	%	Rp Jutaan/ Million
<u>Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership</u>							
PT Prima Indonesia Logistik	Medan	Jasa Logistik/ Logistic Service	2015	99,67	391,773	99,67	372,424
PT Prima Pengembangan Kawasan	Medan	Pengembangan Kawasan/ Region Developer	2019	90	899,389	90	898,145
PT Prima Husada Cipta Medan	Medan	Layanan Jasa Kesehatan/ Health Care Services	2016	99,68	38,321	99,68	22,107
PT Prima Terminal Petikemas	Medan	Layanan Terminal Petikemas/ Container Port Services	-	70	3,233,654	70	3,223,796
PT Prima Multi Terminal	Medan	Terminal Konvensional/ Multicargo Terminal	2019	55	3,971,707	55	4,232,028

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Nama Perusahaan/ Name of Companies	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Type of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Presentase Kepemilikan/ Percentase of Ownership				
				Jumlah Aset/ Total Asset		Jumlah Aset/ Total Asset		
				2020	2019	2020	2019	
		Rp		Rp				
		%		%		Jutaan/ Million		
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership</u>								
<u>Dimiliki Melalui/ Owned Through PT Prima Indonesia Logistik</u>								
PT Prima Multi Peralatan	Medan	Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan/ Equipment Maintenance and Repair Service	2019	99	28,098	99	13,148	
<u>Entitas Asosiasi/ Associates Entities</u>								
PT Terminal Petikemas Indonesia	Jakarta	Layanan Terminal Petikemas/ Container Port Service	-	25	134,140	25	133,111	
<u>Dimiliki Melalui/ Owned Through PT Prima Indonesia Logistik</u>								
PT Prima Tangki Indonesia			2019	20	212,363	20	221,720	

PT Prima Indonesia Logistik (“PIL”)

PIL didirikan berdasarkan akta No. 34 tanggal 26 September 2014 oleh Rahmad Nauli Siregar, SH., Notaris di Medan pada dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27882.40.10.2014 tanggal 6 Oktober 2014. Anggaran dasar PIL telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 7 tertanggal 15 Oktober 2020 oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH., di Medan tentang pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Utama. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0407025 tanggal 12 November 2020. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2019. PIL berdomisili di Jl. Raya Pelabuhan, Pos II Road VI Ujung Baru, Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PIL pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp204.820.000.000 dan atau sebesar 99,67%, sedangkan 0,33% lainnya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Peti Kemas Kota Medan (“Kopkapel UTPK”).

PT Prima Indonesia Logistik (“PIL”)

PIL was established based on deed No. 34 dated September 26, 2014 by Rahmad Nauli Siregar, SH., Notary in Medan, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-27882.40.10.2014 dated October 6, 2014. PIL's articles of association have been amended, most recently by Notarial Deed No. 17 dated October 15, 2020 the Notary Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan concerning dismissal and appointment of the President Commissioner of the PIL. The amendment deed was reported to and accepted by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Acknowledgement Letter No. AHU-AH.01.03-0407025 dated November 12, 2020. The Company is domiciled in Jl. Raya Pelabuhan, Pos II Road VI Ujung Baru, Belawan, Kota Medan, North Sumatera 20411.

The value of the Company's shares in PT Prima Indonesia Logistik as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp204,820,000,000 or 99,67%, while the remaining 0.33% were owned by the Employee Cooperative Port of Medan City Container Business Unit (“UTPK Kopkapel”).

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT Prima Pengembangan Kawasan (“PPK”)

PPK didirikan berdasarkan akta No. 15 tanggal 8 September 2015 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2455231.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 8 September 2015. Anggaran dasar PPK telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Februari 2020 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., di Medan tentang perubahan anggaran dasar PPK. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0122011 tanggal 4 Maret 2020.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PPK pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp759.000.000.000 atau sebesar 90%, sedangkan sisanya sebesar 10% dimiliki oleh PMT

PT Prima Husada Cipta Medan (“PHCM”)

PHCM didirikan berdasarkan akta No. 4 tanggal 8 November 2016 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0052052.AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 22 November 2016. Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir kali diubah melalui Akta Notaris No. 7 tanggal 19 November 2020 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., di Medan tentang pemberhentian Direksi PT PHCM. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0421276 tanggal 18 Desember 2020.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PHCM pada 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp15.840.000.000 atau sebesar 99,68%, sedangkan 0,32% lainnya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I Medan.

PT Prima Terminal Petikemas (“PTP”)

PTP didirikan berdasarkan akta No. 162 tanggal 30 Juli 2013 oleh Rahmad Nauli Siregar, SH., Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Prima Pengembangan Kawasan (“PPK”)

PPK was established based on Deed No. 15 dated September 8, 2015 by Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-2455231.AH.01.01. Tahun.2015 dated September 8, 2015. The PPK's articles of association have been amended, most recently by Notarial Deed No. 1 dated February 1, 2020 by Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan, concerning amendments to the articles of association. This change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0122011 dated March 4, 2020.

The value of the Company's investment in PPK as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp759,000,000,000 or 90%, respectively, while the remaining 10% was owned by PMT.

PT Prima Husada Cipta Medan (“PHCM”)

PHCM was established based on deed No. 4 dated November 8, 2016 by Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0052052. AH.01.01. Year 2016 dated November 22, 2016. The articles of association have been amended several times, the latest being amended through deed No. 7 dated November 19, 2020 by Notary Risna Rahmi Arifa, SH., the amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights with Decree No. AHU-AH.01.03-0421276 dated December 18, 2020.

The value of the Company's investment in PHCM as of December 31, 2020 and 2019, each amounting to Rp15,840,000,000 or 99.68%, respectively, while the other 0.32% is owned by the Employees Cooperative of the Headquarters of PT Pelabuhan Indonesia I Medan.

PT Prima Terminal Petikemas (“PTP”)

PTP was established based on deed No. 162 by July 30, 2013 Rahmad Nauli Siregar, SH., Notary in Medan on, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Keputusan No. AHU-46327.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 3 September 2013. Akta Notaris No. 33 tanggal 19 November 2020 oleh Henry Tjong, SH. di Medan tentang pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama PT PTP. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0417536 tanggal 10 Desember 2020. Perusahaan masih dalam tahap pengembangan dan belum memulai kegiatan usaha secara komersial.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PTP pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp855.724.000.000 atau sebesar 70%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Wijaya Karya (Persero) sebesar 15% dan PT Hutama Karya (Persero) sebesar 15%.

PT Prima Multi Terminal ("PMT")

PMT didirikan berdasarkan akta No. 04 tanggal 26 September 2014 oleh Tuti Sumarni, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-26883.40.10.2014 tanggal 29 September 2014. Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir kali diubah melalui Akta Notaris No. 9 tanggal 16 Oktober 2020 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., di Medan tentang pemberhentian dan pengangkatan Komisaris PMT. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0401701 tanggal 26 Oktober 2020.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PMT pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp807.048.000.000 atau sebesar 55%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. sebesar 25% dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 20%.

PT Prima Multi Peralatan ("PMP")

PMP didirikan berdasarkan akta No. 74 tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris Hj. Bambang Suprianto, SH., Sp.N., M.H di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006164.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019. Anggaran dasar telah

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

46327.AH.01.01.Year 2013 dated September 3, 2013. The PTP's articles of association have been amended the last time amended through No. 33 dated November 19, 2020 Deed by Notary Henry Tjong, SH.,. Notary in Medan. concerning dismissal and appointment of the President Director of PTP. The amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on December 10, 2020 under Decree No. AHU-AH.01.03-0417536. The company is still in the development stage and has not commenced its commercial operations.

The value of the Company's shares in PTP as of December 2020 and 2019 amounted to Rp855,724,000,000 or 70%, respectively, while the remainder was owned by PT Wijaya Karya (Persero) by 15% and PT Hutama Karya (Persero) by 15%.

PT Prima Multi Terminal ("PMT")

PMT was established based on deed No. 04 dated September 26, 2014 by Tuti Sumarni, SH., Notary in Jakarta, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-26883.40.10.2014 dated September 29, 2014. The PMT's articles of association have been amended, most recently by Notarial Deed No. 9 dated October 16, 2020 by Notary Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan, concerning dismissal and appointment of the Commissioners of the PMT, and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-AH.01.03-0401701 dated October 26, 2020.

The value of the Company's investment in PMT as of December 31, 2020 and 2019 was Rp807,048,000,000 or 55%, respectively, while the remainder was owned by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. by 25% and PT Waskita Karya (Persero) Tbk by 20%.

PT Prima Multi Peralatan ("PMP")

PMP was established based on deed No. 74 dated December 28, 2018 made by Notary Hj. Bambang Suprianto, SH., Sp.N., MH in Jakarta and got approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0006164.AH.01.01.Year 2019 dated February 6, 2019. The PMP's articles of association have been amended, most recently

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir kali diubah melalui Akta Notaris No. 22 tanggal 11 September 2020 oleh Abidin S Panggabean, SH., di Medan. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0062790.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 11 September 2020.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PIL memiliki 99% atau sebanyak 12.375 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.375.000.000.
- PMT memiliki 1% atau sebanyak 125 saham dengan nilai nominal sebesar Rp125.000.000.

PT Terminal Petikemas Indonesia (“TPI”)

TPI didirikan berdasarkan akta No. 36 tanggal 10 April 2013 oleh Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.K., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21873.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 April 2013 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 2013.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 25% atau sebanyak 37.500 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000.
- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000.
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000.

PT Prima Tangki Indonesia (“PTI”)

PTI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 12 Desember 2013 oleh Rahmad Nauli Siregar SH., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

by Notarial Deed No. 22 dated September 11, 2020 by Abidin S Panggabean, SH Notary in Medan, concerning dismissal and appointment of the Commissioners of the PMT, and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0062790.AH.01.02 dated September 11, 2020.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- PIL owns 99% or 12,375 shares with total amount of Rp12,375,000,000.
- PMT owns 1% or 125 shares with total amount of Rp125,000,000.

PT Terminal Petikemas Indonesia (“TPI”)

TPI was established based on deed No. 36 Jakarta dated April 10, 2013 by Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.K., Notary in, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-21873.AH.01.01.Year 2013 April 24, 2013 and was announced in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 10, 2013.

The capital share ownership of issued and fully paid capital are as follows:

- The Company owns 25% or 37,500 shares with nominal amount of Rp37,500,000,000.
- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) owns 25% or 37,500 shares with nominal amount of Rp37,500,000,000.
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25% or 37,500 shares with nominal amount of Rp37,500,000,000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25% or 37,500 shares with nominal amount of Rp37,500,000,000.

PT Prima Tangki Indonesia (“PTI”)

PTI was established under Notarial Deed No. 41 dated December 12, 2013 of Public Notary Rahmad Nauli Siregar, SH., and was approved by the Minister of Justice of the Republic of

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Keputusan No. AHU-68302.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013.

Berdasarkan Akta No. 65 tanggal 27 April 2016 oleh Ashoya Ratam, SH., M.kn, Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT PIL telah menyertakan saham sebanyak 18.000 lembar saham PT PTI, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0008200.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 April 2016.

Anggaran Dasar PTI telah mengalami perubahan, berdasarkan Akta Notaris No. 18 tertanggal 18 September 2019 dari Notaris Melisa Wljaya SH, di Jakarta. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0346754 tanggal 17 Oktober 2019.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Charleston Logistics Pte. Ltd. memiliki 49% atau sebanyak 88.200 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp44.100.000.000.
- PT Tason Putra Mandiri memiliki 22,80% atau sebanyak 41.040 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp20.520.000.000.
- PIL memiliki 20% atau 36.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000.000.
- Tuan Gaotama Setiawan memiliki 8,20% atau 14.760 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.380.000.000.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Indonesia in his Decision Letter No. AHU-68302.AH.01.01.Year 2013 dated December 27, 2013.

Based on Deed No. 65 dated April 27, 2016 by Ashoya Ratam, SH., M.kn, Notary in Jakarta concerning the Declaration of Decisions Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders', PT PIL has approved the purchase of 18,000 shares in PT PTI, and the deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0008200.AH.01.02.Year 2016 dated April 28, 2016.

PTI's Articles of Association have been amended, most recently under Notarial Deed No. 18 dated September 18, 2019 made by Melisa Wljaya SH, Notary in Jakarta. This deed of amendment was approved and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-AH.01.03-0346754 dated October 17, 2019.

The capital share ownership of issued and fully paid capital are as follows:

- Charleston Logistics Pte. Ltd. owns 49% or 88,200 shares with nominal amount of Rp44,100,000,000.
- PT Tason Putra Mandiri owns 22,80% or 41,040 shares with nominal amount of Rp20,520,000,000.
- PIL owns 20% or 36,000 shares with nominal amount of Rp18,000,000,000.
- Mr. Gaotama Setiawan owns 8,20% or 14,760 shares with nominal amount of Rp7,380,000,000.

2. Ketentuan Kepelabuhanan

Perusahaan pelabuhan di Indonesia pada umumnya dan yang dikelola oleh Perusahaan pada khususnya tunduk pada Undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, beberapa peraturan penting antara lain adalah:

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, tanggal 7 Mei 2008.

2. Port Regulations

Port businesses in Indonesia in general and those managed by the Company must comply with laws and regulations set out by the Minister of Transportation. Some of the important regulations are as follows:

- a. Act No. 17 Year 2008 regarding Shipping Affairs, dated May 7, 2008.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- b. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, tanggal 20 Oktober 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015.
 - c. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sebagai BUP (Catatan 1a).
 - d. Surat Menteri Perhubungan No. HK.003/1/11. Phb 2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero).
 - e. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
 - f. Peraturan menteri Perhubungan No. PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2014.
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan.
 - h. Peraturan Menteri No. PM 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
 - i. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 69 Tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- b. *Government Regulation No. 61 Year 2009 concerning Port, dated October 20, 2009, as amended by Government Regulation No. 64 Year 2015.*
 - c. *Decree of the Minister of Transportation of Republic Indonesia No.KP 133 tahun 2011 dated March 2, 2011 regarding issuance of business permit to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a BUP (Note 1a).*
 - d. *Minister of Transportation's Letter No. HK.003/1/11. Phb 2011 dated May 6, 2011 regarding the application of Act No. 17 Year 2008 for Shipping Affairs for PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero).*
 - e. *Government Regulation No. 11 Year 2015 regarding Type and Tarif on Non-Tax Revenues types that apply to the Ministry of Transportation.*
 - f. *Regulation of the Minister of Transportation No. PM 6 Year 2013 on Type, Structure, and Group Rates Ports Services, as amended by Regulation of the Minister of Transportation No. 15 of 2014.*
 - g. *Regulation of the Minister of Transportation No 15 Year 2015 on Concessions and Other Forms of Cooperation between the Government and Business Entity Ports Sector.*
 - h. *Ministerial Regulation No. PM 51 Year 2015 on Implementation Seaport.*
 - i. *Regulation of the Minister of Transportation No. PM 69 Year 2015 on Implementation Guidelines Type and Tariff for Non Tax Revenue that apply At the Directorate General of Sea Transportation.*

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan diatas, Direksi Perusahaan menjabarkan dan menetapkan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku untuk daerah perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

Based on the decrees of the Minister of Transportation above, the Company's Directors defined and established port services rates on working area as stated in the Board of Directors' Resolution.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan

3. Significant Accounting Policies

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI). Laporan keuangan juga

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

disusun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan yang terlampir dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

Institute of Accountant (DSAK - IAI). Financial reports are also prepared in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority/Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning guidelines for the presentation of financial statements attached in the attachment to the decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 concerning the presentation and disclosure of financial statements of issuers or public companies.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada/atau setelah 1 Januari 2020 yaitu:

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are revision, amendments and adjustments of standards and interpretation of standard effectively applied for the year starting on or after 1 January 2020, are as follows:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"

- PSAK 71, "Financial Instruments"
- PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers"
- PSAK 73, "Lease"

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba
- PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- *PSAK 62 (Amendment 2017): Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract*
- *Amendment of PSAK 15, "Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures"*
- *PSAK 71 (Amendment 2018): Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation*
- *ISAK 35: Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements*
- *PSAK 1 (Amendment and Improvement 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements*
- *PSAK 25 (Amendment 2019): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*
- *PSAK 102 (Revised 2019): Accounting for Murabahah*
- *ISAK 101: Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership*
- *ISAK 102: Impairment on Murabahah Receivable*
- *ISAK 36: Interpretation of the Interaction between the Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases*
- *PPSAK 13: Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting*
- *Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform*

Except for the changes described below, the implementation of these standards does not result in substantial changes to the Group's accounting policies and has no material impact on the consolidated financial statements in the current period or the previous year

PSAK 71: Financial Instruments

PSAK 71 replaces PSAK 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

financial instruments using an expected credit loss model, which replaces incurred credit loss model and provides a simpler approach for hedge accounting.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Grup memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

In accordance with the transitional requirements on PSAK 71, the Group chose to apply retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Grup pada awal penerapan PSAK 71.

Changes in the approach to calculating impairment of financial assets have an impact on the carrying value of the Group's financial assets at the beginning of the implementation of PSAK 71.

Berikut adalah tabel nilai tercatat aset keuangan berdasarkan ketentuan PSAK 55 dan PSAK 71, serta penyesuaian saldo laba pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020:

The following is a table of the carrying values of financial assets based on the provisions of PSAK 55 and PSAK 71, as well as adjustments to retained earnings on the initial application date of January 1, 2020:

1 Januari/January 2020				
Nilai Tercatat Berdasarkan Ketentuan PSAK 55/ <i>Carrying Values Based on the Provisions of PSAK 55</i>	Nilai Tercatat Berdasarkan Ketentuan PSAK 71/ <i>Carrying Values Based on the Provisions of PSAK 71</i>	Penyesuaian Saldo Laba/ <i>Adjustments to Retained Earnings</i>		
Piutang usaha	120,690,229,140	43,568,047,736	(77,122,181,404)	Trade receivables
Dampak Pajak Terkait	--	19,504,216,001	19,504,216,001	Related Tax Impact

PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

PSAK 72 menggantikan PSAK 23: "Pendapatan" dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers"

PSAK 72 replaces PSAK 23: "Revenue" and introduces 5 (five)-step model of revenue recognition and determines that the revenue is recognized when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

Grup menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

The Group applies PSAK 72 retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

Based on the review that the Group has conducted on revenue contracts with customers with reference to the 5 (five) stages in PSAK 72, there is no significant impact on the financial statements so it does not require adjustments in the opening balance on January 1, 2020.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: "Sewa" yang mensyaratkan Grup sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa yang aset dasarnya bernilai rendah.

Grup telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Grup menerapkan cara praktis berikut yang diperkenankan oleh standar:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- akuntansi sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal;
- menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa alternatif kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa;
- untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar; dan
- mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

Dampak penerapan awal PSAK 73 terhadap saldo awal 1 Januari 2020 untuk aset hak-guna sebesar Rp6.052.035.155, liabilitas sewa sebesar Rp3.381.176.345 dan saldo laba ditahan Rp1.440.899.893.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PSAK 73: Leases

PSAK 73 replace PSAK 30: "Leases", which requires the Group as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases where the underlying assets are low value.

The Group has implemented PSAK 73 using a modified retrospective approach without restating the comparative period. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, which are discounted using the Group's incremental loan interest rate as of January 1, 2020. Right-of-use assets are measured at the same amount as the lease liabilities adjusted for the amount of prepayments or lease payments accrued in connection with a lease recognized in the statement of financial position as of December 31, 2019.

In applying PSAK 73 for the first time, the Group has used the following practical expedients permitted by the standard:

- a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;
- the accounting for operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as at 1 January 2020 as short-term lease;
- initial direct costs for the measurement of the right-of-use asset at the date of initial application;
- hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease;
- not to separate non-lease components from lease components on lease by class of underlying assets; and
- rely on the assessment of whether leases are onerous based on PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" immediately before the date of initial application as an alternative to perform an impairment review.

The impact of the initial implementation of PSAK 73 on the beginning balance on January 1, 2020 for right-of-use assets amounting to Rp6,052,035,155, lease liabilities amounting to Rp3,381,176,345 and retained earning Rp1,440,899,893.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Grup telah memilih untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak mengandung sewa atau tidak pada tanggal penerapan awal untuk kontrak yang telah ada sebelum tanggal transisi yang dimana Grup telah menggunakan penilaian yang dibuat sesuai dengan PSAK 30, "Sewa" dan ISAK 8, "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa".

The Group has also elected not to reassess whether a contract contains a lease or not at the date of initial application for the contracts entered into before the transition date that the Group has made assessment under PSAK 30, "Leases" and ISAK 8, "Determining whether an Arrangement contains a Lease".

d. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.e.

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Group as described in Note 1.e.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

A subsidiary is an entity controlled by the Group, ie the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

The existence and effect of potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

The Group's financial statements comprise the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated since the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until such control ceases.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh, untuk mencerminkan Posisi Keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

A parent entity prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation, to reflect the Financial Position as a single business entity.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non controlling

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);
- c. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika ada, dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d. Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e. Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- f. Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the noncontrolling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- a. Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- b. Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- c. Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- d. Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- e. Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*
- f. Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada akhir periode pelaporan pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah menggunakan kurs penutup yaitu Kurs tengah Bank Indonesia, pada 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp	
Dolar Amerika Serikat (USD)	14,105	14,011	United State of America Dollar (USD)

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dan entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

e. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Group is Rupiah.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currencies amount the spot exchange rate between Rupiah and foreign currencies at the date transactions. At the end of reporting year, foreign currencies monetary items are translated to Rupiah using the closing rate: i.e middle rate of Bank of Indonesia, as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

f. Related Parties Transactions and Balances

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity.

- a. *The person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if the person:*
 - i. *Having control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *Has significant influence over the reporting party or reporting entity; or*
 - iii. *Key management personnel of the reporting entity or parent and reporting entity.*
- b. *An entity is related to a reporting entity if one of the following conditions is met:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group, of which the other entity is a member);*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah penyelenggara suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

**g. Instrumen Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is the organizer of a post-retirement benefit plan for employee benefits from one of the reporting entities or entities that are related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity.
- vi. An entity that is controlled or jointly controlled by a person identified in the letter (a);
- vii. The person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or the entity's key management personnel (or the parent entity of the entity).
- viii. The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the BUMN's Ministry as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

**g. Financial Instruments
Initial Recognition and Measurement**

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures financial assets and financial liabilities, at its fair value. In the case of a

keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan dan menerbitkan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan untuk diperdagangkan atau yang ada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

- (ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
- a. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang ada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

financial asset of financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Accounting treatment before January 1, 2020

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

- (i) *Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instrument that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

- (ii) *Loans and Receivables*
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market other than:
- a. *Those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- c. Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- b. Those that upon initial recognition designated as available for sale; or
- c. Those for which the holder may recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Held-to-Maturity (HTM) investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value in recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets in derecognized. At that time, the cumulative gains losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- (i) **Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi**
Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
 - Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Accounting treatment since January 1, 2020

At initial recognition, financial assets are classified in the three categories as follows: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

- (i) **Financial Assets Measured at Amortized Costs**
A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:
- The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*
 - Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- (ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")
Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

- (iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Perusahaan dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- (ii) *Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")*
The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:
- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset; and*
 - the contractual terms of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

- (iii) *Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")*
Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Company may irrevocably designated an investment in an equity instrument which is

instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI.

Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Pengakuan Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untuk dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

not held for trading in any time soon as FVTOCI.

This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Accounting treatment before January 1, 2020

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

- (i) *Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*
Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is part of a managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the value are recognized in profit or loss.

- (ii) *Other Financial Liabilities*
Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- (i) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (ii) Liabilitas keuangan yang timbul Ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- (iii) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - a. Jumlah penyisihan kerugian dan
 - b. Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- (iv) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis Ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (i) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
- (ii) sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Accounting treatment since January 1, 2020

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- (i) financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
- (ii) financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.
- (iii) financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:
 - a. the amount of the loss allowance
 - b. the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.
- (iv) contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- (i) it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or
- (ii) a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about

dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

the group is provided internally on that basis to the Grup's key management personnel.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognized a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rightst to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognize the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfers nor retains substantially all risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

The Group removes a financial liability, and only when, it is extinguished, ie when the obligation speciferd in the contract is discharged or cancelled or expires.

Impairment of Financial Assets Accounting treatment before January, 1 2020

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment lossess are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occured after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- d. Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- a. Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- b. A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- c. It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- d. Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Grup mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. nilai waktu uang; dan
- iii. informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Accounting Treatment since 1 January, 2020

Group recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized cost.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition.

However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 month expected credit loss (stage 1) is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. an unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;
- ii. time value of money; and
- iii. reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Perusahaan dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Company may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with 'investment grade' according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimate cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi

Perlakuan Akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau keuangan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali setelah seluruh jumlah pokok diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan jika dan hanya jika, terjadi perubahan model bisnis.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal

Reclassification

Accounting Treatment before January 1, 2020

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify its financial assets at fair value through profit or loss, if the financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing the asset in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investment, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Accounting Treatment since January 1, 2020

The Group can reclassify all its financial assets if and only if, a change in the business model.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through profit or loss, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through other comprehensive income, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through profit or loss into fair value through other comprehensive income, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into fair value through profit or loss, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan penyelesaian liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengakuan dapat diobservasi dan signifikan input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to sell off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quotation price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- (ii) Inputs other than quotation prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Persediaan rusak, tidak lengkap komponennya, atau secara ekonomis tidak dapat dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok "aset lai-lain".

j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode manfaat masing-masing biaya.

k. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari

h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

i. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realisable value, is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs. Inventories are damaged, incomplete components, or economically unusable are separated into the "other assets" group.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized on straight-line basis over the estimated beneficial periods of the prepayment.

k. Investment in Associate

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies. (significant influence).

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

investee mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- a. jika investasi menjadi entitas anak.
- b. jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- c. ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

I. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

investee is recognised in profit or loss. Distributions received from an *investee* reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the *investee* arising from changes in the *investee*'s other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- a. if the investment becomes a subsidiary.
- b. If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value.
- c. When the Group discontinue the use of the equity method, the Group account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the *investee* had directly disposed of the related assets or liabilities.

I. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognised as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (2-50 tahun).

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

m. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

After initial recognition, the Group choose to use cost model and measure its investment property at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Landrights are not depreciated and are carried at costs. Buildings are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives (2-50 years).

Maintenance and repairment costs are charged to profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalized.

Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sale.

An investment property is derecognizes on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

m. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Lands are recognised at its cost and are not depreciated.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets starts when its available for use and its computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

Jenis Aset/ Types of Assets	Masa Manfaat/ Useful Life (Tahun/ Year)	Nilai Sisa/ Residual values
Bangunan Fasilitas Pelabuhan/ <i>Port Facility Buildings</i>	10 - 50	Rp1.000.000 atau/ or 2%
Kapal/ <i>Ships</i>	10 - 20	2%
Alat Fasilitas Pelabuhan/ <i>Port Facilities Equipments</i>	5 - 20	2%
Instalasi Fasilitas Pelabuhan/ <i>Port Facility Installation</i>	10 - 25	2%
Jalan dan Bangunan/ <i>Roads and Buildings</i>	10 - 40	Rp1.000.000 atau/ or 2%
Peralatan/ <i>Equipments</i>	4 - 25	2%
Kendaraan/ <i>Vehicles</i>	5	20%
Emplasmen/ <i>Emplacements</i>	3 - 25	Rp1.000.000 atau/ or 2%

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Konstruksi" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under "Assets Under Construction" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the Company made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

n. Aset Takberwujud

Aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Biaya perolehan meliputi biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh aset bersangkutan.

Seluruh aset yang diklasifikasikan sebagai aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasikan. Jumlah yang dapat disusutkan aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residunya. Amortisasi atas aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas menggunakan metode garis lurus. Metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan. Nilai residu aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang, dan dilakukan penyesuaian jika diperlukan, pada setiap tanggal pelaporan. Umur manfaat untuk setiap aset takberwujud dengan umur manfaat 2, 5 dan 10 tahun.

Nilai tercatat suatu aset takberwujud diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan aset takberwujud bersangkutan, jika nilai tercatat aset takberwujud tersebut lebih besar daripada nilai terpulihkannya. Penurunan nilai aset takberwujud diakui sebagai kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada pos "pendapatan/ (beban) lain-lain-bersih". Aset takberwujud yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomi manfaat depan atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset takberwujud berikut akumulasi amortisasinya.

Aset Hak Konsesi

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" sehubungan dengan hak konsesi.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

n. Intangible Assets

Intangible assets are recorded at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Cost includes costs that are directly attributable to the acquisition of the asset.

All assets classified as intangible assets with a limited useful life are amortized. The amount that can be depreciated intangible assets with a limited useful life is the acquisition cost minus the residual value. Amortization of intangible assets with a limited useful life using the straight-line method. The method of amortization of intangible assets with a limited useful life is always reviewed at each reporting date. The residual value of intangible assets with a limited useful life is always reviewed, and adjustments are made if necessary, at each reporting date. The useful life of an intangible asset with a useful life of 2, 5 and 10 years.

The carrying value of an intangible asset is reduced to the recoverable value of the intangible asset concerned if the carrying value of the intangible asset is greater than the recoverable value. Impairment of intangible assets is recognized as an impairment loss in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the "other/net income/ (expense)" item. Intangible assets that have no future economic benefits or are sold are removed from the group of intangible assets and accumulated amortization.

Concession Rights Assets

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" related to the concession rights

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jasa kepelabuhanan yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian Terminal Multipurpose di Kuala Tanjung dan Terminal Petikemas di Belawan Fase 2. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi Terminal Multipurpose di Kuala Tanjung dan Terminal Petikemas di Belawan Fase 2 diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset hak konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tanpa syarat.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (qualifying assets), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are sea port services concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung and container terminal at Belawan Phase 2. During the construction period, the accumulated Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung and Container Terminal at Belawan Phase 2 construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession rights assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kementerian Perhubungan Republik Indonesia for no consideration.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

The Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

o. Penurunan Nilai Aset

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

**p. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Perlakuan Akuntansi sebelum 1 Januari 2020**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Grup dan pendapatan dapat diukur dengan andal. Kriteria khusus berikut ini harus dipenuhi juga sebelum pendapatan diakui:

1. Penjualan Barang
Pendapatan atau penjualan barang diakui pada saat resiko dan hak atas kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pembeli.
2. Penjualan Jasa
Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat jasa telah diberikan kepada pelanggan.

o. Impairment of Assets

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

**p. Revenue and Expense Recognition
Accounting Treatment before January 1, 2020**

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

1. Sales of Goods
Income or sales of goods are recognized when the risks and rights of ownership of goods have passed significantly to the buyer.
2. Sales of Services
Revenue from sales of services is recognized when the services are rendered to customers.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. Pendapatan Kerjasama Mitra
Perusahaan bekerja sama dengan mitra bisnis untuk melakukan pekerjaan tertentu atau operasi tanah dan wadah kegiatan bongkar muat. Kerjasama dengan mitra usaha berdasarkan perjanjian kontrak dengan periode waktu yang disepakati bersama.

Pendapatan dari mitra usaha patungan diakui berdasarkan faktur bruto (*invoice*) yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga.

Biaya yang berkaitan dengan pendapatan usaha bersama mitra disajikan dalam "biaya operasional".

4. Pendapatan Bunga
Penghasilan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang sesuai.
5. Beban
Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dengan melakukan analisis transaksi melalui metode lima langkah pengakuan pendapatan sebagai berikut:

- i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan dengan kriteria sebagai berikut;
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan
 - Kontrak memiliki substansi komersial
 - Besar kemungkinan Grup akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan
- ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. Revenue of Partner Cooperation
The Company is cooperating with business partners to carry out a particular job or operation of land and container loading and unloading activities. Cooperation with business partners is based on contractual agreements with mutually agreed time period.

Revenue from joint venture partners are recognized based on gross invoices (*invoices*) issued by the Company to third parties.

Expenses which relate to the revenue of the joint venture partners are presented as "operating expenses".

4. Interest Income
Interest income is accrued on time basis, with reference to the outstanding principal and the applicable interest rate.
5. Expenses
Expenses are recognized when incurred on accrual basis.

Accounting Treatment since January 1, 2020

The Group recognizes revenues in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", by performing transaction analysis through the five steps of income recognition model as follows:

- i. Identify contract(s) with a customer with certain criteria as follows:
 - The contract has been agreed by the parties involved in the contract
 - The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred
 - The contract has commercial substance
 - It is probable that the Group will receive benefits for goods or services which is diverted.
- ii. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
- iii. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

- iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin;
- v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

q. Sewa

Perlakuan Akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Grup sebagai Penyewa:

Pada awal masa sewa, Grup mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;

- iv. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin;*
- v. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

q. Leases

Accounting Treatment before 1 January 2020

The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

The Group as Lessees:

At the commencement of the lease term, the Group recognize finance leases as assets and liabilities in the statement of financial position at amounts equal to the fair value of leased asset or the present value of the minimum lease payments, if the present value is lower than fair value. Assessment is determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Biaya langsung awal yang dikeluarkan penyewa ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Pesewa:

Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai Pesewa dalam sewa pembiayaan.

Grup menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontingen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Jual dan Sewa-Balik

Aset yang dijual berdasarkan transaksi jual dan sewa-balik diperlakukan sebagai berikut:

- Jika suatu transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan atas nilai tercatat akan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.
- Jika transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa operasi dan transaksi tersebut dilakukan pada nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera, Jika harga jual dibawah nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera, kecuali kerugian tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka kerugian tersebut ditangguhkan dan

minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to determine, if not, the lessee's incremental borrowing is used. Any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognized as an asset. The depreciation policy for depreciable leased assets is consistent with the fixed assets that are owned.

Under an operating lease, the Group recognize lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company as Lessor:

The Company and subsidiaries recognize assets under a finance lease as a receivable in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Collection of lease receivable is treated as principal payments and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group net investment in the finance lease as lessor

The Group presents assets subject to operating lease in the statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, is recognized as income in the period incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight-line basis over the lease term

Sale and Leaseback

Assets sold under a sale and leaseback transaction are accounted for as follows:

- *If the sale and leaseback transaction results in a finance lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount of the asset is deferred and amortized over the lease term.*
- *If the sale and leaseback transaction result in an operating lease and the transaction is established at fair value, any profit or loss is recognized immediately. If the sale price is recognized immediately except that, if the loss is compensated by future lease payments at below market price, it is deferred and amortized in proportion to the lease payments over the period for which the asset is expected to be*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Jika harga jual diatas nilai wajar, maka selisih lebih atas nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama perkiraan periode penggunaan aset.

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup Sebagai Penyewa

Pada permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup akan menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna pada saat di awal, diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau nonsewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

used. If the sale price is above fair value, the excess over fair value is deferred and amortized over the period for which the asset is expected to be used.

Accounting Treatment since January 1, 2020

The Group as a Lessee

At inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group will assess whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset.*

At the commencement date of the lease, the Group recognises a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises:

- *the initial amount of the lease liability;*
- *lease payment made at or before the commencement date, less any lease incentive;*
- *initial direct cost incurred; and*
- *an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.*

For a contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Short-term leases and low-value leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and low-value leases. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Pada tanggal efektif modifikasi, tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup untuk sisa masa sewa;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if:

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- remeasures and allocates the consideration in the modified contract;
- determines the lease term of the modified lease;
- remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. At the effective date of the modification, the revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate for the remainder of the lease term;
- decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2020 and 2019

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Klasifikasi sewa sebagai pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang secara individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan adalah:

1. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa.
2. Penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.
3. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan.
4. Pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, dan;
5. Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu dimodifikasi secara material.

Indikator dari situasi yang secara individual atau gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai pembiayaan adalah:

1. Jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka rugi pesewa yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh penyewa.
2. Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada penyewa (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa), dan
3. Penyewa memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental.

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if the lease does not transfer substantially all the risks and benefits related to ownership of the asset.

The classification of leases as financing or operating leases is based on the substance of the transaction and not on the form of the contract. Examples of situations that individually or in combination under normal conditions leading to leases classified as financing are:

1. *Leases transfer ownership of assets to the lessee at the end of the lease period.*
2. *The lessee has the option to purchase assets at a price that is quite low compared to the fair value at the date the option can be exercised so that at the beginning of the lease it is certain that the option will be implemented.*
3. *The lease period is for the majority of the economic life of the asset even though the ownership rights are not transferred.*
4. *At the beginning of the lease, the present value of the minimum lease payments is substantially close to the fair value of the leased asset, and;*
5. *Leased assets are special and where only the lessee can use them without needing to be modified materially.*

Indicators of situations that individually or collectively can also show that leases are classified as financing are:

1. *If the lessee can cancel the lease, the lessor's loss related to the cancellation is borne by the lessee.*
2. *Gains or losses from fluctuations in the fair value of residuals are charged to the lessee (for example, in the form of a discounted rental price and which is equivalent to the majority of the proceeds of residual sales at the end of the lease), and*
3. *The lessee can continue leasing for a second period with a rental value that is substantially lower than the rental market value.*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

r. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

s. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi provisi.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

r. Borrowing Cost

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

s. Provisions

A provision is recognized when Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount of the obligation can be estimated reliably.

The amount recognized as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, by taking into account the risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances. Where a provision is measured using the estimated cash flows to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

If some or all of the expenditure to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when, it is virtually certain that reimbursement will be received when the Group settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of the provisions.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the most current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

t. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

t. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a. pengakuan awal *goodwill*; atau
- b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

- a. *the initial recognition of goodwill; or*
- b. *the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a. *the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b. *the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *the same taxable entity; or*
 - ii. *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred*

depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

u. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset

tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b. *intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

u. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- (a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

v. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

w. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- (a) When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and*
- (b) When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.*

v. Earning Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculationg diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

w. Operating Segment

Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

An operating segment is a component of the entity:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- for which separate financial information is available.*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

x. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Aset tetap

Aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya dan disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar. Biaya perolehan meliputi nilai wajar aset dan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung agar aset tetap bersangkutan dalam kondisi siap digunakan sesuai keinginan dan maksud manajemen. Aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui berdasarkan bukti serah terima.

Apabila aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah tidak dapat diukur dengan nilai wajar maka biaya perolehannya diukur sesuai dengan nilai transaksi pasar yang serupa.

Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diperoleh dari donasi Pemerintah dicatat secara terpisah dari modal saham Perusahaan dan diakui sebesar nilai wajar kas dan/atau aset keuangan dan/atau aset non keuangan yang diterima.

PMN berupa aset yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui berdasarkan bukti obyektif bahwa Grup telah memenuhi kondisi dan persyaratan donasi tersebut dan donasi tersebut akan diperoleh.

PMN berupa aset dan didukung oleh berita acara serah terima diakui bagian dari ekuitas sebagai bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya sampai dengan Peraturan Pemerintah atas PMN tersebut sudah terbit.

4. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

x. Government Grant With Unspecified Used (BPYBDS)

Fixed assets

Fixed assets obtained from Government donations are recognized and measured at cost and presented in the statement of financial position as non-current assets. Cost includes the fair value of assets and costs that are directly attributable so that the property, plant, and equipment are in a condition ready for use following the wishes and intentions of management. Fixed assets obtained from Government donations are recognized based on proof of handover.

If the fixed assets obtained from Government donations cannot be measured at fair value, the acquisition costs are measured following similar market transaction values.

State Capital Participation

The State Capital Participation (PMN) obtained from Government donations is recorded separately from the Group's share capital and is recognized at the fair value of cash and/or financial assets and/or non-financial assets received.

PMN in the form of assets obtained from Government donations is recognized based on objective evidence that the Company has fulfilled the conditions and conditions of the donation and that donations will be obtained.

PMN in the form of assets and supported by the minutes of handover are recognized as part of the equity as Government assistance that has not been determined until the Government Regulation on PMN has been issued.

4. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgments

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

a. Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan nilai pertanggungan dari *letter of credit* dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

b. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Provision for expected credit losses (“ECLs”) of trade receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g., by geography, product type, customer type and/or rating, and coverage by letters of credit and other forms).

The provision matrix is initially based on the Group’s historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, and forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group’s historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer’s actual default in the future.

b. Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman incremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

c. Pajak Penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasi. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP").

Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan

right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

c. Income Taxes

The calculations of income tax expense for the Group require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxes ("DGT").

As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax position taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Penghasilan yang diperoleh Perusahaan dalam Grup kadang-kadang dapat dikenakan pajak final dan non final. Penentuan penghasilan yang dikenakan pajak final dan non final dan juga biaya pengurang pajak sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak non final memerlukan pertimbangan dan estimasi.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, penyisihan modal, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas, dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

d. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah pensiun yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

on the income tax and deferred income tax reserve in the year in which this determination is made.

The revenue of the companies within the Group is sometimes also subject to both final and non-final income tax. Determining the amount of revenue subject to final and nonfinal tax as well as expenses relating to revenue from the non-final income tax regime requires judgments and estimates.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and other temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which depends on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by Management's estimates and assumptions regarding the expected production levels, sales volume, commodity prices, etc, which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

d. Post-employment Benefits Liabilities

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

e. Perjanjian Konsesi Jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

Otoritas Pelabuhan ("OP") memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 39). Pada akhir masa konsesi jasa, Grup harus menyerahkan terminal multipurpose di Kuala Tanjung dan terminal petikemas di Belawan Fase 2 kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian multipurpose di Kuala Tanjung dan terminal petikemas di Belawan Fase 2

Grup berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset hak konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligation. In determining the appropriate discount rate, the Group considers to use the interest rates of high quality corporate bonds (or Government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Other key assumptions for pension obligation benefits are based in part on current market conditions.

e. Service Concession Arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

Otoritas Pelabuhan ("OP") granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 39). Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the multipurpose terminal at Kuala Tanjung and container terminal at Belawan Phase 2 free of any form of charge to OP, including reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the multipurpose terminal at Kuala Tanjung and container terminal at Belawan Phase 2.

The Group has made judgment that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession rights asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset hak konsesi atau peningkatan kemampuan aset hak konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Grup mengakui pendapatan konstruksi aset hak konsesi dan biaya konstruksi atas aset hak konsesi sesuai dengan PSAK 72. Grup mengukur pendapatan konstruksi atas aset hak konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa margin.

f. Provisi

Grup melakukan penelaahan atas provisi biaya *maintenance dredging* dan perhitungan *re-investment* pemeliharaan dan beban bunga aset konsesi pada akhir periode laporan.

Dalam penentuan jumlah provisi untuk biaya *maintenance dredging* dan perhitungan *re-investment* pemeliharaan dan beban bunga aset konsesi diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah terhutang pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk sedimentasi kolam pelabuhan dan aktivitas aset konsesi, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya dibandingkan dengan tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah provisi pada akhir periode pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya perbaikan masa mendatang yang diperlukan.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession rights assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Group recognizes construction revenue of concession rights asset and construction costs of concession rights asset in accordance with PSAK 72. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

f. Provision

The Group assesses its provision for the cost of maintenance dredging and calculates the re-investment in maintenance and interest expense on concession assets at the end of the reporting period.

Significant estimates and assumptions are made in determining the provision for the cost of maintenance dredging and repair of concession assets as there are numerous factors that will affect the ultimate liability payable. These factors include estimates of the extent and costs of port pool sedimentation and concession asset activities, technological changes, regulatory changes, cost increases as compared to the inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure different from the amounts currently provided. The provision at end of reporting period represents management's best estimate of the present value of the future restoration costs required.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. Kas dan Setara Kas

5. Cash and Cash Equivalents

	2020	2019
	Rp	Rp
Kas/ Cash	1,782,077,451	1,709,296,106
Bank/ Banks		
Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	70,646,054,129	254,121,216,889
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	46,288,822,744	301,405,759,831
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	40,371,396,624	28,969,962,888
PT Bank Syariah Mandiri	634,472,977	3,809,419,931
<u>Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollar</i></u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30,647,501,679	2,640,161,898
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	744,583,047	733,973,758
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	465,318,016	322,411,266
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	<u>189,798,149,216</u>	<u>592,002,906,461</u>
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2,065,374,033	1,838,336,354
PT Bank Central Asia (Persero) Tbk	1,535,478,121	1,462,792,076
PT Bank Bukopin Tbk	1,343,008,533	735,942,460
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah/ <i>Sharia Business Unit</i>	7,623,276	7,709,829
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	<u>4,951,483,963</u>	<u>4,044,780,719</u>
Jumlah Bank/ <i>Total Banks</i>	<u>194,749,633,179</u>	<u>596,047,687,180</u>
Deposito/ <i>Deposits</i>		
Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	500,941,559,342	444,905,036,690
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	381,900,000,000	307,674,082,991
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	315,495,299,116	261,412,610,936
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	98,584,000,000	44,584,000,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah/ <i>Sharia Business Unit</i>	39,500,000,000	57,500,000,000
PT Bank Syariah Mandiri	16,000,000,000	6,000,000,000
<u>Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollar</i></u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9,615,109,350	9,498,936,000
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	<u>1,362,035,967,808</u>	<u>1,131,574,666,617</u>
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank BTPN Syariah Tbk	6,513,179,912	13,217,229,180
PT Bank Bukopin Tbk	--	24,000,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	--	1,000,000,000
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	<u>6,513,179,912</u>	<u>38,217,229,180</u>
Jumlah Deposito/ <i>Total Deposits</i>	<u>1,368,549,147,720</u>	<u>1,169,791,895,797</u>
Jumlah/ Total	<u>1,565,080,858,350</u>	<u>1,767,548,879,083</u>
Tingkat Bunga Kontraktual Deposito Berjangka Per Tahun/ <i>Contractual Interest Rates of Time Deposits Per Annum</i>		
Rupiah	3.5%-7.65%	4.75%-8.25%
Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollar</i>	0.5%-1.75%	1.45%-1.75%

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Deposito berjangka merupakan deposito berjangka waktu 1 - 3 bulan.

Time deposits represent time deposits of 1 - 3 months

6. Piutang Usaha

6. Account Receivables

	2020	2019	
	Rp	Rp	
a. Berdasarkan Pelanggan			a. By Customer
Pihak Berelasi (Catatan 35)	30,191,004,430	18,111,394,049	Related Parties (Note 35)
Cadangan Kerugian			Allowance for Impairment
Penurunan Nilai	(18,314,691,864)	--	Losses
Sub Jumlah	<u>11,876,312,566</u>	<u>18,111,394,049</u>	Sub Total
Pihak Ketiga	128,493,804,992	170,130,999,967	Third Parties
Cadangan Kerugian			Allowance for Impairment
Penurunan Nilai	(90,865,370,248)	(67,552,164,876)	Losses
Sub Jumlah	<u>37,628,434,744</u>	<u>102,578,835,091</u>	Sub Total
Jumlah	<u>49,504,747,310</u>	<u>120,690,229,140</u>	Total
b. Berdasarkan Umur (Hari)			b. By Age (Days)
Belum Jatuh Tempo	46,469,621,681	74,266,888,852	Current
Jatuh Tempo:			Overdue:
1 - 30 Hari	42,889,517,413	35,503,812,157	1 - 30 Days
31 - 90 Hari	13,408,281,590	20,055,012,192	31 - 90 Days
91 - 180 Hari	4,321,375,758	6,805,644,626	91 - 180 Days
> 180 Hari	51,596,012,980	51,611,036,189	> 180 Days
Sub Jumlah	158,684,809,422	188,242,394,016	Sub Total
Cadangan Kerugian			Allowance for Impairment
Penurunan Nilai	(109,180,062,112)	(67,552,164,876)	Losses
Jumlah	<u>49,504,747,310</u>	<u>120,690,229,140</u>	Total
c. Berdasarkan Mata Uang			c. By Original Currency
USD	6,284,135,033	6,354,486,791	USD
Rupiah	152,400,674,389	181,887,907,225	Rupiah
Sub Jumlah	158,684,809,422	188,242,394,016	Sub Total
Cadangan Kerugian			Allowance for Impairment
Penurunan Nilai	(109,180,062,112)	(67,552,164,876)	Losses
Jumlah	<u>49,504,747,310</u>	<u>120,690,229,140</u>	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment losses are as follows:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	67,552,164,876	66,549,227,057	Beginning Balances
Dampak Penerapan			Effect on Initial Implementation
Awal PSAK 71 (Catatan 4)	77,122,181,404	--	of PSAK 71 (Note 4)
Saldo, Setelah Dampak			Balance, After Effect on Initial
Penerapan PSAK 71	144,674,346,280	66,549,227,057	Implementation PSAK 71
Penambahan/ (Pemulihan)			
- Bersih	(35,494,284,168)	1,002,937,819	Addition/ (Reversal) - Net
Saldo Akhir	<u>109,180,062,112</u>	<u>67,552,164,876</u>	Ending Balances

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Grup telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

The Group applies the simplified approach in calculating expected credit losses prescribed by PSAK 71 on January, 1 2020, which permits the use of the lifetime expected loss allowance for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Management believes the allowance is for expected credit loss of trade receivables adequate to cover loss on uncollectible receivables.

Piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka panjang (Catatan 19).

Trade receivables of the Group are used as collateral on long-term bank loans (Note 19).

7. Persediaan

7. Inventories

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Suku Cadang	19,142,057,723	14,460,828,316	Spareparts
Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	4,252,351,743	2,883,421,536	Fuel and Lubricants
Obat dan Alat Medis	505,577,995	372,396,808	Medical Medicines
Lain-lain	420,434,104	568,751,163	Other
Jumlah	24,320,421,565	18,285,397,823	Total

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, persediaan Grup tidak diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa persediaan Grup tidak memerlukan perlindungan asuransi sesuai dengan kondisi persediaan yang ada.

As of December 31, 2020 and 2019, the Group's inventories were not insured. Management believes that the Group's inventories do not require insurance coverage in accordance with the conditions of the inventory at hand.

Manajemen Grup berpendapat bahwa semua persediaan dapat digunakan. Manajemen juga berpendapat nilai realisasi neto persediaan masih melebihi nilai tercatat persediaan, sehingga tidak diperlukan adanya provisi persediaan usang dan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The Group's management is of the opinion that the inventories can be either used. Management also believes that the net realizable value of inventories exceeds the carrying amount of inventories, and therefore, a provision for obsolete stock and decline in value is not considered necessary as of December 31, 2020 and 2019.

8. Piutang Lain-lain

8. Other Receivables

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Pihak Ketiga	15,127,904,399	141,367,632,165	Third Parties
Piutang Pegawai Aktif	2,600,393,640	2,590,040,640	Employees Receivables
Sub Jumlah	17,728,298,039	143,957,672,805	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4,979,298,330)	(3,709,916,934)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah	12,748,999,709	140,247,755,871	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment losses are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal	3,709,916,934	3,630,954,640	Beginning Balances
Penambahan/ (Pemulihan) - Bersih	1,269,381,396	78,962,294	Addition/ (Reversal) - Net
Saldo Akhir	4,979,298,330	3,709,916,934	Ending Balances

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that the allowance for impairment of other receivables is adequate to cover any possible losses on uncollectible accounts.

9. Investasi pada Entitas Asosiasi

9. Investment in Associates

2020					
Nama Perusahaan/ Company	%	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Beginning Balances	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deductions)	Bagian atas Laba (Rugi) Bersih Entitas/ Share in Net Profit (Loss)	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Carrying Value at the End of the Year
PT Terminal Petikemas Indonesia	25	34,017,153,038	--	115,198,203	34,132,351,241
PT Prima Tangki Indonesia	20	15,087,748,960	--	156,751,249	15,244,500,209
Jumlah/ Total		49,104,901,998	--	271,949,452	49,376,851,450

2019					
Nama Perusahaan/ Company	%	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Beginning Balances	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deductions)	Bagian atas Laba (Rugi) Bersih Entitas/ Share in Net Profit (Loss)	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Carrying Value at the End of the Year
PT Terminal Petikemas Indonesia	25	33,635,880,464	--	381,272,574	34,017,153,038
PT Prima Tangki Indonesia	20	16,225,856,399	--	(1,138,107,439)	15,087,748,960
PT Patriot Nusantara Aceh		500,000,000	(500,000,000)	--	--
Jumlah/ Total		50,361,736,863	(500,000,000)	(756,834,865)	49,104,901,998

Informasi tambahan sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Additional information on the investments in associates are as follows:

2020				
	Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities	Jumlah Pendapatan/ Total Revenues	Jumlah Laba Komprehensif/ Total Comprehensive Income
PT Terminal Petikemas Indonesia	134,140,778,253	1,187,863,253	--	460,792,811
PT Prima Tangki Indonesia	212,363,760,488	139,183,428,775	36,865,204,907	783,756,242

2019				
	Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities	Jumlah Pendapatan/ Total Revenues	Jumlah Laba Komprehensif/ Total Comprehensive Income
PT Terminal Petikemas Indonesia	131,715,919,780	1,363,300,274	--	1,525,090,298
PT Prima Tangki Indonesia	221,721,121,118	148,976,539,555	10,224,424,565	(5,690,537,195)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Grup.

The financial statements of the associates are prepared for the same reporting period with the Group.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak tersedia informasi nilai pasar terkait investasi pada entitas asosiasi.

As of December 31, 2020 and 2019, there was no market price information available related to the investments in associates.

10. Properti Investasi - Bersih

10. Investment Properties - Net

	2020					
	Saldo Awal/ Beginning	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Penyesuaian/ Reclassification /Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
<u>Harga Perolehan</u>						<u>Acquisition Cost</u>
Tanah	413,324,770,114	4,607,354,542	--	--	417,932,124,656	Lands
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2,296,262,937	--	--	--	2,296,262,937	Port Facility Buildings
Jalan dan Bangunan	5,003,038,903	--	--	--	5,003,038,903	Roads and Buildings
Emplasemen	1,526,174,545	--	--	--	1,526,174,545	Emplacements
Jumlah Nilai Perolehan	<u>422,150,246,499</u>	<u>4,607,354,542</u>	--	--	<u>426,757,601,041</u>	<u>Total Acquisition Cost</u>
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulation Depreciation</u>
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	1,447,757,172	23,463,427	--	--	1,471,220,599	Port Facility Buildings
Jalan dan Bangunan	2,981,754,664	81,662,422	--	--	3,063,417,086	Roads and Buildings
Emplasemen	755,424,848	63,703,423	--	--	819,128,271	Emplacements
Jumlah Akumulasi Penyusutan	<u>5,184,936,684</u>	<u>168,829,272</u>	--	--	<u>5,353,765,956</u>	<u>Total Accumulated Depreciation</u>
Nilai Buku	<u>416,965,309,815</u>				<u>421,403,835,085</u>	Book Value
	2019					
	Saldo Awal/ Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Penyesuaian/ Reclassification /Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
<u>Harga Perolehan</u>						<u>Acquisition Cost</u>
Tanah	412,454,461,619	870,308,495	--	--	413,324,770,114	Lands
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2,296,262,937	--	--	--	2,296,262,937	Port Facility Buildings
Jalan dan Bangunan	4,996,306,399	6,732,504	--	--	5,003,038,903	Roads and Buildings
Emplasemen	1,526,174,545	--	--	--	1,526,174,545	Emplacements
Jumlah Nilai Perolehan	<u>421,273,205,500</u>	<u>877,040,999</u>	--	--	<u>422,150,246,499</u>	<u>Total Acquisition Cost</u>
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulation Depreciation</u>
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	1,411,203,008	36,554,164	--	--	1,447,757,172	Port Facility Buildings
Jalan dan Bangunan	2,900,206,244	81,548,420	--	--	2,981,754,664	Roads and Buildings
Emplasemen	691,721,425	63,703,423	--	--	755,424,848	Emplacements
Jumlah Akumulasi Penyusutan	<u>5,003,130,677</u>	<u>181,806,007</u>	--	--	<u>5,184,936,684</u>	<u>Total Accumulated Depreciation</u>
Nilai Buku	<u>416,270,074,823</u>				<u>416,965,309,815</u>	Book Value

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Beban penyusutan properti investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp168.829.272 dan Rp181.806.007 dicatat sebagai bagian dari beban operasi (Catatan 31).

Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang ada di wilayah pelabuhan milik Perusahaan seluas 1.489.688 m² pada tahun 2020 dan tahun 2019, yang disewakan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.

Pada tahun 2019 Grup melakukan penilaian nilai wajar aset tetap dan properti investasi sebesar Rp1.882.297.959.929 untuk wilayah Medan dan sekitarnya dan sebesar Rp5.141.007.324.797 untuk wilayah selain Medan dan sekitarnya. Masing-masing nilai wajar tersebut didukung oleh laporan penilai publik independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) NR dan Rekan dan KJPP Yanuar Bei dan Rekan. KJPP NR dan Rekan dan KJPP Yanuar Bei dan Rekan adalah penilai publik independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Adapun Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VI - 2015, dengan menggunakan pendekatan pasar.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari properti investasi, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, properti investasi bersama dengan aset tetap, kecuali tanah dan aset takberwujud, telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, *property all risk* dan risiko lainnya (Catatan 11).

Penghasilan sewa properti investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp131.935.578.307 dan Rp146.632.973.896.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Depreciation expense of investment properties as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp168,829,272 and Rp181,806,007 are recorded as part of operating expenses, respectively (Note 31).

Investment properties consist of land and building in the port area which belongs to the Company covering 1,489,688 sqm in 2020 and 2019, which are leased to a third party under the lease agreements.

In 2019, Group performed the fair value of fixed assets and investment properties amounting to Rp1,882,297,959,929 for Medan and surrounding areas and Rp5,141,007,324,797 for areas other than Medan and its surroundings. The fair value which supported by an independent public appraisal reports from appraisal (KJPP) NR and Partners and KJPP Yanuar Bei and Partners. KJPP NR dan Rekan dan KJPP Yanuar Bei dan Rekan are an independent public appraisal registered in The Ministry of Finance and the Financial Services Authority ("OJK").

The valuation standard that has been used is Indonesian Valuation Standards edition VI - 2015, which used market approach.

Based on the review of the recoverable value of investment property, the Company's management believes that there are no events or changes that indicate a decline in value of assets as of December 31, 2020

As of December 31, 2020 and 2019, the Group's investment properties with fixed assets, except land and intangible assets, were covered by insurance against the risk of fire all property risk and other risk (Note 11).

Rental income from investment property for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp131,935,578,307 and Rp146,632,973,896, respectively.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Beban penyusutan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp412.955.537.908 dan Rp325.332.645.306 dicatat sebagai bagian dari beban operasi (Catatan 31).

Depreciation expense of fixed assets as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp412,955,537,908 and Rp325,332,645,306 are recorded as part of operating expenses, respectively (Note 31).

Pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019, Grup telah mengasuransikan aset tetap, properti investasi dan aset takberwujud yang dimiliki, kecuali tanah, terhadap, risiko kebakaran, *property all risk, industrial all risk* dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp9.571.194.228.717 dan USD16,402,000 dan Rp6.299.520.811.442, kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

As of December 31, 2020 and 2019, the Group insured its fixed assets, investment properties and intangible assets, except land, against the risk of fire, all property risk, all industrial risks and any other risks with sum insured amounting to Rp9,571,194,228,717 and USD16,402,000 and Rp6,299,520,811,442, to third parties, namely PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), and PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), which according of the management, is adequate to cover possible losses.

Rincian aset dalam konstruksi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Details of assets under construction as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Aset Dalam Konstruksi/ Assets Under Construction	Persentase Penyelesaian/ Completion Percentage	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Biaya Perolehan/ At Cost
2020			
Tanah/ Lands	0,09%-99%	Januari 2021-Desember 2024 January 2021-December 2024	5,436,227,504
Bangunan Fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Buildings	10%-77%	Januari 2021-Desember 2021 January 2021-December 2021	115,282,594,991
Kapal/ Ships	27%-80%	Januari 2021-Juni 2021 January 2021-June 2021	229,062,492,711
Alat Fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Equipments	20%-93%	Januari 2021-Mei 2021 January 2021-May 2021	3,001,923,447
Instalasi Fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Installations	20%-99%	Februari 2021-Juli 2021 February 2021-July 2021	6,597,879,721
Jalan dan Bangunan/ Roads and Buildings	8%-99%	Januari 2021-Agustus 2021 January 2021-August 2021	13,102,760,249
Peralatan/ Equipments	90%	April 2021	352,537,000
Lainnya/ Other	90%	April 2021	125,378,000
Jumlah/ Total			372.961.793.623

Aset Dalam Konstruksi/ Assets Under Construction	Persentase Penyelesaian/ Completion Percentage	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Biaya Perolehan/ At Cost
2019			
Tanah/ Lands	99%	Januari 2020/ January 2020	471,113,172
Bangunan Fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Buildings	10%-99%	Januari 2020-Mei 2021 January 2020-May 2021	94,897,380,834
Kapal/ Ships	31%-99%	Januari 2020-Juni 2021 January 2020-June 2021	204,215,861,526
Alat Fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Equipments	94%-99%	Januari 2020-April 2020 January 2020-April 2020	256,597,660,713
Instalasi Fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Installations	4%-99%	Januari 2020-Juli 2021 January 2020-July 2021	52,499,727,605
Jalan dan Bangunan/ Roads and Buildings	5%-99%	Januari 2020-Maret 2021 January 2020-March 2021	254,083,113,122
Peralatan/ Equipments	99%	Januari 2020/ January 2020	2,827,129,000
Kendaraan/ Vehicles	41%	April 2020	3,737,650,000
Jumlah/ Total			869.329.635.972

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Hak atas tanah Grup berupa Sertifikat Hak Pengelolaan ("HPL") dan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB"). SHGB memiliki masa berlaku antara tahun 2020 hingga 2049 Manajemen berpendapat bahwa SHGB tersebut dapat diperpanjang.

Hak atas tanah seluas 315.131 m² masih atas nama pemilik lama dan saat ini masih dalam proses balik nama menjadi nama Perusahaan dan hak atas tanah seluas 24.970 m² saat ini masih dalam proses perpanjangan hak.

Penghapusbukuan aset tetap dikarenakan aset dalam kondisi fisik rusak, tidak ditemukan dan atau aset sudah tidak digunakan. Penghapusbukuan aset tetap berupa penghapusan secara administratif dan atau pemindah tangganan karena dijual (Aset tersedia untuk dijual).

Nilai buku atas aset tetap yang dihapus untuk tahun 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.869.692.607 dan Rp1.241.661.903.

Beberapa aset tetap dijaminkan ke beberapa bank atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Grup (Catatan 19).

Penilaian kembali dilakukan pada bulan April 2019, KJPP NR & R menghitung nilai wajar aset tetap Grup yang berada di wilayah Medan dan sekitarnya sebesar Rp1.882.297.959.929, sedangkan KJPP Yanuar Bei dan Rekan yang menilai aset di wilayah selain Medan dan sekitarnya menghitung nilai wajar aset Grup sebesar Rp5.141.007.324.797.

Pada tahun 2020, jumlah reklasifikasi bersih harga perolehan aset tetap adalah sebesar Rp26.107.350.123, yang terdiri dari Rp43.511.404.125 merupakan reklasifikasi dari aset takberwujud (Catatan 12) dan Rp17.404.054.744 merupakan reklasifikasi ke aset tidak lancar lainnya (Catatan 14).

Cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp14.996.946.125 dan nihil. Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk menutupi kerugian dari penurunan nilai aset tetap.

The Group's land rights such as Rights Management Certificate ("HPL") freehold land ("SHM") and land-use rights ("SHGB"). The SHGB will expire between 2020 and 2049 Management believes that the SHGB are extendable.

Land rights measuring 315,131 sqm is still in the name of the former owner and is currently still in the process of being transferred to the Company's name and rights to the land area of 24,970 sqm are still in the process of renewal of property rights as of to date.

Write - off of a fixed asset is due to the asset is physically damaged, was not found or asset is no longer used. Write - off of fixed assets in the form of administrative removal and / or transfer due for sale (Assets available for sale).

The book value of fixed assets written - off as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp2,869,692,607 and Rp1,241,661,903, respectively.

Some fixed assets are pledged to several banks for loan facilities obtained by the Group (Note 19).

The revaluation was conducted in April 2019, KJPP NR & R calculated the fair value of the Group's fixed assets in the Medan and surrounding areas at Rp1,882,297,959,929, while KJPP Yanuar Bei and Partners who valued assets in areas other than Medan and its surroundings calculated fair values Group assets amounting to Rp5,141,007,324,797.

In 2020, the total reclassification of the acquisition cost of fixed assets amounted to Rp26,107,350,123, which consists of Rp43,511,404,125 representing the reclassification of intangible assets (Note 12) and Rp17,404,054,744 which are reclassifications to other non-current assets (Note 14).

Allowances for impairment of fixed assets as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp14,996,946,125 and nil, respectively. Management believes that the allowance is adequate to cover losses from impairment of fixed assets.

12. Aset Takberwujud

12. Intangible Assets

	31 Desember 2020/ December 31, 2020					
	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Biaya Perolehan:						At Cost:
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>						<u>Intangible Assets - Concession right</u>
Kuala Tanjung	3,503,073,713,160	31,670,504,723	--	--	3,534,744,217,883	Kuala Tanjung
Belawan Fase 2	2,228,302,147,910	--	--	758,143,856,767	2,986,446,004,677	Belawan Phase 2
<u>Aset Takberwujud Lainnya</u>						<u>Other Intangible Assets:</u>
Piranti Lunak	154,470,769,857	12,421,634	--	191,987,430,794	346,470,622,285	Computer Software
Sertifikasi	814,434,917	232,859,430	--	1,044,074,074	2,091,368,421	Certification
Konsultan dan Appraisal	647,870,000	379,636,100	91,500,000	6,527,032,013	7,463,038,113	Consultant and Appraisal
Pendidikan dan Sarana	33,026,871,470	--	--	9,175,093,203	42,201,964,673	Education and Facilities
Pendirian dan Perubahan Anggaran						Establishment and Amendments to
Dasar	4,927,571,277	--	--	--	4,927,571,277	Articles of Association
Lainnya	118,593,247,131	3,583,945,600	63,255,691,923	(54,372,695,003)	4,548,805,805	Others
<u>Aset Takberwujud Dalam Penyelesaian</u>						<u>Intangible Assets Under Contructions</u>
Hak Konsesi - Kuala Tanjung	56,063,099,425	7,050,604,891	--	--	63,113,704,316	Hak Konsesi - Kuala Tanjung
Hak Konsesi - Belawan Fase 2	501,663,379,589	298,910,742,114	--	(758,143,856,767)	42,430,264,936	Hak Konsesi - Belawan Phase 2
Lainnya	246,259,280,582	35,300,643,073	10,272,319,210	(197,872,339,948)	73,415,264,497	Others
Sub Jumlah	6,847,842,385,318	377,141,357,565	73,619,511,133	(43,511,404,867)	7,107,852,826,883	Sub Total
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>						<u>Intangible Assets - Concession rights</u>
Kuala Tanjung	36,067,683,018	54,101,524,528	--	--	90,169,207,546	Kuala Tanjung
<u>Aset Takberwujud Lainnya</u>						<u>Other Intangible Assets</u>
Piranti Lunak	53,898,199,548	55,621,720,407	--	59,998,608,550	169,518,528,505	Computer Software
Sertifikasi	1,163,189,417	348,754,501	--	--	1,511,943,918	Certification
Konsultan dan Appraisal	1,737,464,210	1,464,619,555	53,410,200	--	3,148,673,565	Consultant and Appraisal
Pendidikan dan Sarana	22,511,398,166	8,411,786,935	--	--	30,923,185,101	Education and Facilities
Pendirian dan Perubahan Anggaran						Establishment and Amendments to
Dasar	4,630,324,862	297,246,415	--	--	4,927,571,277	Articles of Association
Lainnya	78,631,330,529	24,977,236,250	39,141,064,365	(59,998,608,550)	4,468,893,864	Others
Sub Jumlah	198,639,589,750	145,222,888,591	39,194,474,565	--	304,668,003,776	Sub Total
Jumlah	6,649,202,795,568				6,803,184,823,107	Total

Pada tahun 2020 jumlah reklasifikasi bersih harga perolehan aset takberwujud tercatat negatif sebesar Rp43.511.404.867 direklasifikasikan ke aset tetap karena seharusnya diklasifikasikan sebagai aset tetap menurut PSAK 16 (Catatan 11).

In 2020, the net reclassification of the acquisition cost of intangible assets was recorded negatively amounting to Rp43,511,404,867 which was reclassified to fixed assets because they should be classified as fixed assets under PSAK 16 (Note 11).

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2019/December 31, 2019					
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Biaya Perolehan:						At Cost:
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>						<u>Intangible Assets - Concession right</u>
Kuala Tanjung	215,360,546	307,372,153,161	--	3,195,486,199,453	3,503,073,713,160	Kuala Tanjung
Belawan Fase 2	--	--	--	2,228,302,147,910	2,228,302,147,910	Belawan Phase 2
<u>Aset Takberwujud Lainnya</u>						<u>Other Intangible Assets</u>
Piranti Lunak	14,217,474,689	53,975,099,286	--	86,278,195,882	154,470,769,857	Computer Software
Sertifikasi	814,434,917	--	--	--	814,434,917	Certification
Konsultan dan Appraisal	556,370,000	91,500,000	--	--	647,870,000	Consultant and Appraisal
Pendidikan dan Sarana	32,340,626,508	1,024,084,962	337,840,000	--	33,026,871,470	Education and Facilities
Pendirian dan Perubahan Anggaran						Establishment and Amendments to
Dasar	4,927,571,277	--	--	--	4,927,571,277	Articles of Association
Lainnya	114,069,974,404	500,000,000	--	4,023,272,727	118,593,247,131	Others
<u>Aset Takberwujud Dalam Penyelesaian</u>						<u>Intangible Assets Under Constructions</u>
Hak Konsesi - Kuala Tanjung	3,251,549,298,878	--	--	(3,195,486,199,453)	56,063,099,425	Concession right - Kuala Tanjung
Hak Konsesi - Belawan Fase 2	1,301,486,343,557	1,428,479,183,942	--	(2,228,302,147,910)	501,663,379,589	Concession right - Belawan Phase 2
Lainnya	254,896,251,594	72,285,405,564	2,047,877,839	(78,874,498,737)	246,259,260,582	Others
Sub Jumlah	4,975,073,706,370	1,863,727,426,915	2,385,717,839	11,426,969,872	6,847,842,385,318	Sub Total
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>						<u>Intangible Assets - Concession rights</u>
Kuala Tanjung	--	36,067,683,018	--	--	36,067,683,018	Kuala Tanjung
<u>Aset Takberwujud Lainnya</u>						<u>Other Intangible Assets</u>
Piranti Lunak	17,212,861,077	36,685,338,471	--	--	53,898,199,548	Computer Software
Sertifikasi	576,891,399	586,298,018	--	--	1,163,189,417	Certification
Konsultan dan Appraisal	396,718,305	1,340,745,905	--	--	1,737,464,210	Consultant and Appraisal
Pendidikan dan Sarana	14,734,791,296	7,776,606,870	--	--	22,511,398,166	Education and Facilities
Pendirian dan Perubahan Anggaran						Establishment and Amendments to
Dasar	3,842,251,460	788,073,402	--	--	4,630,324,862	Articles of Association
Lainnya	55,229,041,909	23,402,288,620	--	--	78,631,330,529	Others
Sub Jumlah	91,992,555,446	106,647,034,304	--	--	198,639,589,750	Sub Total
Jumlah	4,883,081,150,924				6,649,202,795,568	Total

Beban amortisasi aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp145.222.888.591 dan Rp106.647.034.304 yang dicatat sebagai bagian dari beban operasi (Catatan 31).

Amortization expense of intangible assets as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp145,222,888,591 and Rp106,647,034,304 are recorded as part of operating expenses, respectively (Note 31).

Kapitalisasi biaya pinjaman pada aset takberwujud dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

Capitalized borrowing costs in the intangible assets under construction are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	29,080,054,798	50,587,601,964	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Sindikasi (Mandiri, BNI, BRI)	--	65,790,197,788	Syndicate Bank (Mandiri, BNI, BRI)
Bank Sindikasi (Mandiri, IIF)	12,451,098,694	3,101,944,192	Syndicate Bank (Mandiri, IIF)
Jumlah	41,531,153,492	119,479,743,944	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kantor Kesyahbandaran dan Otorisasi Pelabuhan (KSOP) kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal *Multi Purpose* Kuala Tanjung dan Terminal Petikemas Belawan Fase 2.

Perusahaan telah memperoleh hak konsesi Kuala Tanjung berdasarkan perjanjian No. HK.107/1/1/KSOP.KIG-15 tanggal 16 November 2016 dengan jangka waktu 69 tahun dan hak konsesi Belawan Fase 2 berdasarkan perjanjian No. PR.801/1/9/OP.BLW-14 tanggal 4 April 2014 dengan jangka waktu 70 tahun.

Pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019, Grup telah mengasuransikan aset takberwujud bersama-sama dengan aset tetap, terhadap, risiko kebakaran, *property all risk, industrial all risk* dan risiko lainnya. (Catatan 14).

Assets of concession rights are assets built on the rights granted by the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia Harbourmaster Office and Port Authority (KSOP) to the Company to build and operate Terminal Multi Purpose Kuala Tanjung and Container Terminal Belawan Phase 2.

The Company had obtained a concession right of Kuala Tanjung based on agreement No. HK.107/1/1/KSOP.KIG-15 dated November 16, 2016 with a term of 69 years and a concession right of Belawan Phase 2 based on agreement No. PR.801/1/9/OP.BLW-14 dated April 4, 2014 with a term of 70 years.

As of December 31, 2020 and 2019, the Group has insured intangible assets together with fixed assets, against, fire risk, property all risk, industrial all risk and other risks (Note 14).

13. Aset Hak Guna

13. Right of Use Assets

2020						
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Dampak PSAK 73/ Impact of PSAK 73 Rp	Saldo awal yang disesuaikan/ Adjusted Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
<u>Harga perolehan</u>						<u>Acquisition Cost</u>
Tanah	-	-	174,268,830,703	-	174,268,830,703	Land
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	3,613,720,654	3,613,720,654	13,986,414,906	-	17,600,135,560	Building and Facilities
Kendaraan	2,438,314,501	2,438,314,501	1,032,822,254	-	3,471,136,755	Vehicles
Jumlah	6,052,035,155	6,052,035,155	189,288,067,863	-	195,340,103,018	Total
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulation Depreciations</u>
Tanah	-	-	674,449,578	-	674,449,578	Land
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	-	-	6,622,879,922	-	6,622,879,922	Building and Facilities
Kendaraan	-	-	2,134,626,021	-	2,134,626,021	Vehicles
Jumlah	-	-	9,431,955,521	-	9,431,955,521	Total
Nilai Buku	6,052,035,155	6,052,035,155	179,856,112,342	-	185,908,147,497	Book Value

Laporan laba rugi menyajikan saldo berkaitan dengan sewa:

Statement of profit or loss shows the following amounts related to leases:

	2020 Rp	
Beban Penyusutan:		<i>Depreciation Expenses:</i>
Tanah	674,449,578	Land
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	6,622,879,922	Building and Facilities
Kendaraan	2,134,626,021	Vehicles
Sub Jumlah (Catatan 31)	9,431,955,521	Sub Total (Note 31)
Beban Bunga (Catatan 33)	4,900,319,871	<i>Interest Expense (Note 33)</i>
Jumlah	14,332,275,392	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. Aset Tidak Lancar Lainnya

14. Other Non-Current Assets

	2020 Rp	2019 Rp	
<u>Persediaan Tidak Produktif</u>			<u>Idle Inventories</u>
Pelumas	9,200,378	9,200,378	Lubricants
<u>Estimasi Tagihan Pajak</u>			<u>Estimated Claim for Tax Refund</u>
Pajak Bumi dan Bangunan (Catatan 39b)	56,479,833,734	--	Land and Building Tax (Note 39b)
<u>Aset Tetap Belum Dimanfaatkan</u>			<u>Unutilized Fixed Assets</u>
Tanah	805,851,797	805,851,797	Lands
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	20,874,229,471	20,874,229,471	Building Port Facilities
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	170,500,000	170,500,000	Installations of Port Facilities
Jalan dan Bangunan	2,908,140,000	2,908,140,000	Roads and Buildings
Kendaraan	634,024,224	634,024,224	Vehicles
Sub Jumlah	25,392,745,492	25,392,745,492	Sub Total
Penurunan Nilai	(21,498,120,123)	--	Impairment
Sub Jumlah	3,894,625,369	25,392,745,492	Sub Total
<u>Aset Tetap Tidak Produktif</u>			<u>Idle Fixed Assets</u>
Tanah	5,137,300	5,137,300	Lands
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2,894,033,759	20,877,039	Building Port Facilities
Kapal	1,291,625,396	2,284,419,124	Ships
Alat fasilitas pelabuhan	116,415,142,579	121,124,453,070	Equipment of Port Facilities
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	3,001,886,620	2,416,763,438	Installations of Port Facilities
Jalan dan Bangunan	3,658,856,955	2,616,111,644	Roads and Buildings
Peralatan	2,534,545,104	662,652,959	Equipments
Kendaraan	12,550,111	12,550,111	Vehicles
Emplasmen	368,864,365	368,864,365	Emplacements
Sub Jumlah	130,182,642,189	129,511,829,050	Sub Total
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tidak Produktif	(121,781,888,324)	(121,590,781,161)	Accumulation Depreciations of Idle Fixed Assets
Sub Jumlah	8,400,753,865	7,921,047,889	Sub Total
Nilai Buku	68,784,413,346	33,322,993,759	Book Value

Aset tetap tidak produktif merupakan aset tetap yang tidak dapat dioperasikan lagi dalam kegiatan operasional Grup, yang sebagian besar terdiri atas kapal, dan alat-alat fasilitas pelabuhan seperti *Transtainer, Rubber Tired Gantry Crane, Forklift, Reach Staker*, dan *Harbour Mobile Crane*.

Unproductive fixed assets are fixed assets that cannot be operated anymore in the Group's operational activities, which mostly consist of ships and port facilities such as Transtainer, Rubber Tired Gantry Crane, Forklift, Reach Staker, and Harbour Mobile Crane.

15. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

15. Other Non-Current Financial Assets

	2020 Rp	2019 Rp	
Uang Jaminan	2,682,469,344	2,171,080,675	Security Deposits
Piutang Lain-lain Pihak Ketiga	31,375,405,126	23,692,863,940	Other Receivables - Third Parties
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Lain-lain Pihak Ketiga	(31,375,405,126)	(23,692,863,940)	Allowance for Impairment Losses Other Receivables Third Parties
Jumlah	2,682,469,344	2,171,080,675	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 merupakan piutang usaha tak tertagih dan telah dibentuk cadangan penurunan nilai.

Other receivable balances as of 31 December 2020 and 2019 were uncollectible and an allowance for impairment losses was established.

Saldo uang jaminan pada 31 Desember 2020 merupakan terutama berasal dari uang jaminan langganan yang dibayarkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atas perubahan daya listrik yang sebelumnya 865 KVA menjadi 10.380 KVA.

The security deposit balances as at December 31, 2020 is mainly derived from subscription security deposits paid to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) for changes in electrical power from 865 KVA to 10,380 KVA.

Saldo uang jaminan pada tanggal 31 Desember 2019 merupakan deposito yang dijaminan untuk kredit modal kerja pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 19) oleh entitas anak PT PIL. Deposito tersebut berjangka waktu 1-3 bulan, dengan tingkat suku bunga pada tahun 2019 sebesar 6-6,25%.

The security deposit balances as at December 31, 2019 represents deposits pledged for working capital loans to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 19) by PT PIL's subsidiary. These deposits have a maturity of 1-3 months, with interest rates in 2019 of 6-6.25%.

16. Utang Usaha

16. Account Payables

	2020	2019	
	Rp	Rp	
a. Berdasarkan Pemasok:			a. By Supplier
Pihak Berelasi (Catatan 35)	107,235,762,901	198,122,846,257	Related Parties (Note 35)
Pihak Ketiga	690,958,119,601	1,692,574,184,059	Third Parties
Jumlah	798,193,882,502	1,890,697,030,316	Total
b. Berdasarkan Mata Uang			b. By Original Currency
USD	68,015,683,425	425,264,084,733	USD
Rupiah	730,178,199,077	1,465,432,945,583	Rupiah
Jumlah	798,193,882,502	1,890,697,030,316	Total

17. Beban Akruai

17. Accrued Expenses

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Pegawai	78,605,920,482	61,156,026,248	Employee
Kerja Sama Mitra Usaha	30,293,247,230	15,385,970,149	Partnerships
Sewa	20,301,201,420	17,247,933,809	Rental
Umum	23,876,202,957	7,087,776,399	General
Sanksi Administrasi PPN	16,817,750,600	--	Administrative Sanction of VAT
Kontribusi Kepada Pihak Lain	11,898,643,413	12,264,733,620	Contributions to Other Parties
Bunga	9,715,422,806	--	Interest
Pemeliharaan	5,884,865,422	9,217,345,687	Maintenance
Lainnya (dibawah Rp5 miliar)	14,789,715,014	4,226,194,393	Others (under Rp5 billion)
Jumlah	212,182,969,344	126,585,980,305	Total

18. Perpajakan

18. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2020	2019	
	Rp	Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>Parent Entity</u>
PPH Pasal 23	--	2,383,664,805	Income Taxes Article 23
PPN Masukan Dapat Dikreditkan	10,270,318,339	49,638,825,880	Creditable VAT Input
PPH Pasal 28A Tahun 2019	156,095,449,043	156,095,449,043	Income Taxes Article 28A Year 2019
Sub Jumlah	<u>166,365,767,382</u>	<u>208,117,939,728</u>	Sub Total
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
PPH Pasal 22	848,959,215	875,744,859	Income Taxes Article 22
PPH Pasal 23	1,333,629,065	985,576,505	Income Taxes Article 23
PPH Pasal 25	5,029,290,036	4,906,712,228	Income Taxes Article 25
PPN Masukan Dapat Dikreditkan	197,294,786,882	298,834,691,272	VAT Input - can be Credited
Sub Jumlah	<u>204,506,665,198</u>	<u>305,602,724,864</u>	Sub Total
Jumlah	<u>370,872,432,580</u>	<u>513,720,664,592</u>	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2020	2019	
	Rp	Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>Parent Entity</u>
PPH Pasal 21	4,255,451,124	4,920,049,863	Income Taxes Article 21
PPH Pasal 22	755,910,089	1,001,543,373	Income Taxes Article 22
PPH Pasal 23	1,442,194,073	3,106,244,535	Income Taxes Article 23
PPH Pasal 4 Ayat (2)	449,817,071	612,674,386	Income Taxes Article 4 (2)
PPH Pasal 25	5,216,039,502	22,420,070,394	Income Taxes Article 25
PPH Pasal 26	9,447,710	9,447,710	Income Taxes Article 26
PPH Pasal 29	18,134,450,399	--	Income Taxes Article 29
PPH Pasal 15	145,057,622	131,894,947	Income Taxes Article 15
PPN keluaran	22,416,199,376	26,480,288,286	VAT out
PPN Masukan Dapat Dikreditkan	11,278,946,938	12,851,472,375	Creditable VAT Input
PPN Masukan Tidak Dapat Dikreditkan	2,016,652,096	2,143,753,976	Non-Creditable VAT Input
Sub Jumlah	<u>66,120,166,000</u>	<u>73,677,439,845</u>	Sub Total
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
PPH Pasal 21	596,444,921	710,106,951	Income Taxes Article 21
PPH Pasal 23	126,681,886	113,474,194	Income Taxes Article 23
PPH Pasal 4 Ayat (2)	2,280,054,182	2,375,020,950	Income Taxes Article 4 (2)
PPH Pasal 25	--	107,178,327	Income Taxes Article 25
PPH Pasal 29	3,995,364,309	--	Income Taxes Article 29
PPN Keluaran	48,705,000	1,551,061,258	VAT Out
Sub Jumlah	<u>7,047,250,298</u>	<u>4,856,841,680</u>	Sub Total
Jumlah	<u>73,167,416,298</u>	<u>78,534,281,525</u>	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

c. Pajak Penghasilan

c. Income Tax

	2020 Rp	2019 Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>Parent Entity</u>
Pajak Kini	(119,557,244,180)	(124,992,827,250)	Current Tax
Pajak Tangguguhan Tahun Berjalan	1,577,432,886	(1,625,745,531)	Deferred Tax for the Current Year
Sub Jumlah	<u>(117,979,811,294)</u>	<u>(126,618,572,781)</u>	Sub Total
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak Kini	(5,477,639,948)	--	Current Tax
Pajak Tangguguhan Tahun Berjalan	110,340,104,335	44,817,420,335	Deferred Tax for the Current Year
Efek Perubahan Tarif Pajak	(15,584,785,398)	--	Effect on Changes on Tax Rate
Sub Jumlah	<u>89,277,678,989</u>	<u>44,817,420,335</u>	Sub Total
<u>Konsolidasian</u>			<u>Consolidated</u>
Pajak Kini	(125,034,884,128)	(124,992,827,250)	Current Tax
Pajak Tangguguhan Tahun Berjalan	111,917,537,221	43,191,674,804	Deferred Tax for the Current Year
Efek Perubahan Tarif Pajak	(15,584,785,398)	--	Effect on Changes on Tax Rate
Jumlah	<u>(28,702,132,305)</u>	<u>(81,801,152,446)</u>	Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Laba Sebelum Pajak			Income Before Income Tax
Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	211,822,502,275	287,977,621,290	According to Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	341,731,847,279	218,647,501,281	Profit Before Income Tax of Subsidiaries
Penyesuaian Eliminasi Konsolidasian	156,751,248	(1,138,107,439)	Adjusted for Consolidated Elimination
Bagian Laba (Rugi) Investasi kepada Entitas Asosiasi	(271,949,452)	756,834,865	Investment Gain (Loss) to Associates
Jumlah	<u>553,439,151,349</u>	<u>506,243,849,997</u>	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Perbedaan Temporer	7,887,164,423	(6,502,982,124)	<i>Temporary Difference</i>
Beban (Pendapatan) yang Tidak Dapat Diperhitungkan			<i>Nondeductible Expenses</i>
Menurut Fiskal	140,906,821,046	139,497,517,508	<i>(Nontaxable Income)</i>
Pendapatan yang Dikenakan Pajak Final	<u>(158,791,117,180)</u>	<u>(139,267,075,559)</u>	<i>Income Subject to Final Tax</i>
Jumlah	<u>(9,997,131,712)</u>	<u>(6,272,540,175)</u>	<i>Total</i>
Laba Kena Pajak Tahun Berjalan	<u>543,442,019,638</u>	<u>499,971,309,822</u>	<i>Taxable Income for The Year</i>
Laba Kena Pajak Tahun Berjalan (Pembulatan)	543,442,019,000	499,971,309,000	<i>Taxable Income for The Year (Rounded)</i>
Tarif Pajak (%)	22%	25%	<i>Tax Rate (%)</i>
Beban Pajak Kini			<i>Current Tax Expense of</i>
Perusahaan	<u>119,557,244,180</u>	<u>124,992,827,250</u>	<i>The Company</i>
Beban Pajak Kini			<i>Current Tax Expense</i>
Entitas Anak			<i>of Subsidiaries</i>
PTP	393,721,614	--	<i>PTP</i>
PHCM	2,244,006,974	--	<i>PHCM</i>
PIL	2,839,911,360	--	<i>PIL</i>
Sub Jumlah	<u>5,477,639,948</u>	<u>--</u>	<i>Sub Total</i>
Jumlah Beban Pajak Kini	<u>125,034,884,128</u>	<u>124,992,827,250</u>	<i>Total Current Tax Expense</i>
Beban Pajak Kini			<i>Current Tax Expense</i>
Perusahaan	119,557,244,180	124,992,827,250	<i>of The Company</i>
Dikurangi Pajak Dibayar Di Muka			<i>Less Prepaid Taxes</i>
Perusahaan			<i>The Company</i>
Pasal 22	2,996,924,000	7,677,136,000	<i>Article 22</i>
Pasal 23	4,125,946,896	4,370,295,564	<i>Article 23</i>
Pasal 25	<u>94,299,922,885</u>	<u>269,040,844,729</u>	<i>Article 25</i>
Jumlah	<u>101,422,793,781</u>	<u>281,088,276,293</u>	<i>Total</i>
(Lebih) Kurang Bayar			<i>(Overpayment) Underpayment</i>
Pajak Penghasilan:			<i>of Income Tax:</i>
Perusahaan	<u>18,134,450,399</u>	<u>(156,095,449,043)</u>	<i>The Company</i>
Entitas Anak			<i>Subsidiaries</i>
PTP	393,636,465	--	<i>PTP</i>
PIL	(475,824,462)	(5,591,254,690)	<i>PIL</i>
PHCM	1,922,465,433	(1,092,604,942)	<i>PHCM</i>
PMP (Entitas Anak PIL)	<u>1,679,255,851</u>	<u>(72,446,559)</u>	<i>PMP (Subsidiary of PIL)</i>
Sub Jumlah	<u>3,519,533,287</u>	<u>(6,756,306,191)</u>	<i>Sub Total</i>
(Lebih) Kurang Bayar			<i>(Overpayment) Underpayment</i>
Pajak Penghasilan-Neto	<u>21,653,983,686</u>	<u>(162,851,755,234)</u>	<i>of Income Tax-Net</i>

Perhitungan penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 tersebut di atas didasarkan pada perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari laba kena pajak yang

The calculation of taxable income (fiscal loss) for the year ending December 31, 2020, above is based on an interim calculation. This amount may differ from the taxable income reported in the annual corporate income tax return. The

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan badan tahunan. Perhitungan laba kena pajak (rugik fiskal) hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

calculation of taxable profit (fiscal loss) from the reconciliation results above becomes the basis for filling the Annual Corporate Income Tax Return.

d. Aset (Liabilitas) pajak tangguhan

d. Deferred Tax Assets (Liabilities)

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penyesuaian Dampak Penerapan PSAK 71/ Adjustment for the impact of the Application of PSAK 71	Penyesuaian Tarif Pajak/ Tax Rate Adjustment	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugik Credited (Charged) to profit or loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the year	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tangguhan							Deferred Tax Assets
<u>Perusahaan</u>							<u>The Company</u>
Penyusutan Aset Tetap dan Properti Investasi	(116,690,270,281)	--	--	(25,097,329,186)	--	(141,787,599,467)	Depreciation of Fixed Assets and Investment Properties
Amortisasi Aset Takberwujud	11,259,969,845	--	--	4,158,121,737	--	15,418,091,582	Amortisation of Intangible Assets
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	23,237,842,037	18,359,242,743	--	(5,957,009,614)	--	35,640,075,166	Allowance for Impairment of Receivables
Imbalan Kerja	98,622,979,004	--	--	6,637,970,033	457,313,751	105,718,262,788	Employee Benefits
Bonus	--	--	--	13,800,000,000	--	13,800,000,000	Bonus
Provisi	--	--	--	736,666,666	--	736,666,666	Provision
Cadangan Penurunan Nilai Aset	--	--	--	7,299,013,250	--	7,299,013,250	Allowance for Impairment of Assets
Sub Jumlah	16,430,520,605	18,359,242,743	--	1,577,432,886	457,313,751	36,824,509,985	Sub Total
<u>Entitas Anak</u>							<u>Subsidiaries</u>
PIL	139,685,688	1,144,973,258	(256,931,789)	1,583,743,308	--	2,611,470,465	PIL
PPK	5,022,662,389	--	--	26,970,407	--	5,049,632,796	PPK
PHCM	69,731,095	--	--	658,018,455	--	727,749,550	PHCM
PMT	76,639,268,044	--	(15,327,853,609)	108,087,515,847	2,409,149	169,401,339,431	PMT
Sub Jumlah	81,871,347,216	1,144,973,258	(15,584,785,398)	110,356,248,017	2,409,149	177,790,192,242	Sub Total
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	98,301,867,821	19,504,216,001	(15,584,785,398)	111,933,680,903	459,722,900	214,614,702,227	Deferred Tax Assets - Net
Liabilitas Pajak Tangguhan							Deferred Tax Liabilities
<u>Entitas Anak</u>							<u>Subsidiaries</u>
PTP	--	--	--	(16,143,682)	--	(16,143,682)	PTP
Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih	--	--	--	(16,143,682)	--	(16,143,682)	Deferred Tax Liabilities - Net

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak/ Tax Base Adjustment	Penyesuaian Tarif Pajak/ Tax Rate Adjustment	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugik Credited (Charged) to profit or loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the year	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tangguhan							Deferred Tax Assets
<u>Perusahaan</u>							<u>The Company</u>
Penyusutan Aset Tetap dan Properti Investasi	(96,828,761,126)	--	--	(19,861,509,155)	--	(116,690,270,281)	Depreciation of Fixed Assets and Investment Properties
Amortisasi Aset Takberwujud	5,928,739,750	--	--	5,331,230,095	--	11,259,969,845	Amortisation of Intangible Assets
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	16,318,319,893	--	--	6,919,522,144	--	23,237,842,037	Allowance for Impairment of Receivables
Imbalan Kerja	71,577,133,509	--	--	5,985,011,385	21,060,834,110	98,622,979,004	Employee Benefits
Sub Jumlah	(3,004,567,974)	--	--	(1,625,745,531)	21,060,834,110	16,430,520,605	Sub Total
<u>Entitas Anak</u>							<u>Subsidiaries</u>
PIL	1,159,431,689	--	--	(1,019,746,001)	--	139,685,688	PIL
PPK	5,021,353,377	--	--	1,309,012	--	5,022,662,389	PPK
PHCM	--	--	--	69,731,095	--	69,731,095	PHCM
PTP	12,383,117,397	--	--	(12,383,117,397)	--	--	PTP
PMT	18,490,024,418	--	--	58,149,243,626	--	76,639,268,044	PMT
Sub Jumlah	37,053,926,881	--	--	44,817,420,335	--	81,871,347,216	Sub Total
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	34,049,358,907	--	--	43,191,674,804	21,060,834,110	98,301,867,821	Deferred Tax Assets - Net

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense to the consolidated profit or loss and other comprehensive income tax expense calculate using prevailing tax rate are as follows:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Laba Sebelum Pajak			<i>Income Before Income Tax</i>
Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	211,822,502,275	287,977,621,290	<i>According to Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	341,731,847,279	218,647,501,281	<i>Income (Loss) Before Income Tax Subsidiaries</i>
Penyesuaian Eliminasi Konsolidasian	156,751,248	(1,138,107,439)	<i>Adjusted for Consolidated Elimination</i>
Bagian Laba (Rugi) Investasi kepada Entitas Asosiasi	(271,949,452)	756,834,865	<i>Investment Gain (Loss) to Associates</i>
Jumlah	<u>553,439,151,349</u>	<u>506,243,849,997</u>	<i>Total</i>
Tarif Pajak (%)	22%	25%	<i>Tax Rate (%)</i>
Tahun 2020	(121,756,613,297)	--	<i>Year 2020</i>
Tahun 2019	--	(126,560,962,499)	<i>Year 2019</i>
Sub Jumlah	<u>(121,756,613,297)</u>	<u>(126,560,962,499)</u>	<i>Sub Total</i>
Pengaruh Pajak atas Pendapatan (Beban) yang Tidak Dapat Diperhitungkan Menurut Fiskal	(30,999,500,489)	(34,874,379,172)	<i>Tax Effect of Nontaxable Income (Nondeductible Expense)</i>
Pendapatan yang Dikenakan Pajak Final	34,934,045,780	34,816,768,890	<i>Income Subject to Final Tax</i>
Selisih Tarif Pajak Tangguhan	(157,743,288)	--	<i>Deferred Tax Rate Difference</i>
Sub Jumlah	<u>3,776,802,003</u>	<u>(57,610,282)</u>	<i>Sub Total</i>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Perusahaan	(117,979,811,294)	(126,618,572,781)	<i>Income Tax Benefit (Expense) The Company</i>
Entitas Anak	89,277,678,989	44,817,420,335	<i>Subsidiaries</i>
Jumlah Beban Pajak	<u>(28,702,132,305)</u>	<u>(81,801,152,446)</u>	<i>Total Tax Expense</i>

19. Utang Bank Jangka Panjang

19. Long-Term Bank Loans

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Utang Bank Jangka Panjang	6,559,750,017,297	5,965,567,083,736	<i>Bank Loans</i>
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang	(410,495,386,081)	(214,549,156,365)	<i>Current Maturities of Long-Term Liabilities</i>
Bagian Utang Bank Jangka Panjang	<u>6,149,254,631,216</u>	<u>5,751,017,927,371</u>	<i>Long-Term Bank Loans</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rincian utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

Details of long-term bank loans are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
<u>Perusahaan/ the Company</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	208,209,389,591	208,209,389,591
<u>Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated Bank Loans</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	620,535,884,602	581,666,200,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	611,735,805,409	571,666,200,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	611,735,805,409	571,666,200,000
Sub Jumlah/ Sub Total	2,052,216,885,011	1,933,207,989,591
<u>Entitas Anak/ Subsidiaries</u>		
PT Bank Syariah Mandiri	77,903,571,192	89,500,349,698
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	417,173,317,946	416,657,417,711
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,102,929,032,761	1,075,917,777,963
<u>Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated bank loans</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	397,016,148,251	145,451,536,946
PT Indonesia Infrastructure Finance	397,016,148,251	145,451,536,946
<u>Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated bank loans</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	705,164,971,295	719,793,491,627
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	705,164,971,295	719,793,491,627
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	705,164,971,295	719,793,491,627
Sub Jumlah/ Sub Total	4,507,533,132,286	4,032,359,094,145
Jumlah/ Total	6,559,750,017,297	5,965,567,083,736

Rincian bagian lancar liabilitas jangka panjang adalah sebagai berikut:

Details of the current maturities of long-term liabilities are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
<u>Perusahaan/ the Company</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	148,806,322,516	70,416,713,333
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	124,142,809,500	70,000,046,667
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	124,142,809,500	70,000,046,667
Sub Jumlah/ Sub Total	397,091,941,516	210,416,806,667
<u>Entitas Anak/ Subsidiaries</u>		
PT Bank Syariah Mandiri	13,403,444,565	4,132,349,698
Sub Jumlah/ Sub Total	13,403,444,565	4,132,349,698
Jumlah/ Total	410,495,386,081	214,549,156,365

Entitas/ Entity	Kreditur/ Creditor	Jenis Fasilitas/ Facility Type	Jumlah Fasilitas/ Amount Facility	Jatuh Tempo/ Due Date	Saldo Outstanding/ Outstanding Balance	Suku Bunga Pertahun/ Annual Interest Rate	Jaminan/ Collateral
<u>Perusahaan/ The Company</u>							
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Kredit Sindikasi/ Syndicated Credit 2017: - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kredit Investasi/ Investment Credit	Rp 1,050,000,000,000	23 Desember 2024/ December 23, 2024	Rp 699,997,200,000	WATD 3 Bulan/ Months + 3%	Negative Pledge
	Kredit Sindikasi/ Syndicated Credit 2018: - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kredit Investasi/ Investment Credit	Rp 1,300,000,000,000	23 Desember 2025/ December 23, 2025	Rp 1,144,010,295,420	WATD 3 Bulan/ Months + 3.5%	Negative Pledge
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kredit Investasi/ Investment Credit	Rp 700,000,000,000	23 Desember 2029/ December 23, 2029	Rp 208,209,389,591	WATD 3 Bulan/ Months + 3%	Negative Pledge

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Entitas/ Entity	Kreditur/ Creditor	Jenis Fasilitas/ Facility Type	Jumlah Fasilitas/ Amount Facility	Jatuh Tempol/ Due Date	Saldo Outstanding / Outstanding Balance	Suku Bunga Pertahun/ Annual Interest Rate
Entitas Anak/ Subsidiaries						
PT Prima Terminal Petikemas	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kredit Investasi/ <i>Investment Credit</i> Jaminan (Catatan 12) 1. Tanah, bangunan dermaga dan <i>container yard</i> serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Petikemas Belawan Fase 2 dan dan diikat dengan <i>Security Coverage Ratio</i> minimal 120% dari limit fasilitas kredit. 2. Seluruh hasil klaim atas garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur Dermaga dan Terminal Petikemas Belawan Fase 2	Rp 1,152,000,000,000	28 September 2030/ September 28, 2030	Rp 1,102,949,032,761	JIBOR 3 Bulan/ Months + 3.35%
		Colateral (Note 12) 1. Land, jetty buildings and container yards as well as other objects attached to the land of the Belawan Container Terminal Phase 2 and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit. 2. All results of claims for guarantees and insurance on infrastructure development projects of Jetty and Belawan Container Terminal Phase 2.				
	Kredit Sindikasi/ <i>Syndicated Credit</i> : - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - PT Indonesia Infrastructure Finance	1. Kredit Investasi/ <i>Investment Credit</i> 2. Kredit/ <i>Credit</i> NCL (Non Cash Loan) 3. Kredit bunga masa konstruksi <i>Interest during construction</i> Jaminan (Catatan 12) 1. Fidusia atas hasil klaim/proceed atas jaminan pembayaran (<i>bank guarantee</i>) dan/atau SBLC, dan/atau asuransi atas proyek. 2. Fidusia atas peralatan dan perlengkapan terminal petikemas BICT Fase II atas nama PT Prima Terminal Petikemas yang dibiayai oleh kreditur sindikasi. 3. Seluruh agunan tersebut wajib diasuransikan dengan mencantumkan <i>banker's clause</i> dengan nama agen jaminan atau nama kreditur sindikasi sebagai tertanggung oleh perusahaan asuransi rekanan kreditur sindikasi.	\$ 70,174,000 \$ 70,174,000 \$ 2,410,000	28 September 2030/ September 28, 2030	\$ 56,294,345	LIBOR 3 Bulan/ Months + 3.85%
		Colateral (Note 12) 1. Fiduciary over the results of claims/proceed for bank guarantees and/or SBLC, and/or insurance for the project. 2. Fiduciary on BICT Phase II container terminal equipment and supplies on behalf of PT Prima Terminal Petikemas financed by syndicated creditors. 3. All collateral must be insured by including the <i>banker's clause</i> with the name of the collateral agent or the name of the syndicated creditor as insured by the syndicated creditor's partner insurance company.				
PT Prima Multi Terminal	Kredit Sindikasi/ <i>Syndicated Credit</i> : - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kredit Investasi/ <i>Investment Credit</i> Jaminan (Catatan 12) 1. Tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Multipurpose (TMP) dan diikat dengan <i>Security Coverage Ratio</i> minimal 120% dari limit fasilitas kredit. 2. Jaminan fidusia atas Fasilitas Pelabuhan berikut seluruh peralatan dan perlengkapan Fasilitas Pelabuhan terkait dengan TMP dengan <i>Security Coverage Ratio</i> minimal 120% dari limit kredit. 3. Jaminan Fidusia seluruh hasil klaim atas bank garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur TMP dengan <i>Security Coverage Ratio</i> 100% dari nilai bank garansi dan klaim asuransi. 4. Pengalihan (<i>cessie</i>) atas rekening penampungan.	Rp 2,194,278,000,000	23 Maret 2026/ March 23, 2026	Rp 2,115,494,913,885	JIBOR 3 Bulan/ Months + 3.25%
		Colateral (Note 12) 1. Land and buildings and other objects attached to the land of the Multipurpose Terminal and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit. 2. Fiduciary guarantee for Port Facilities along with all Port Facility equipment related to TMP with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit limit. 3. Fiduciary guarantee of all results of claims for bank guarantees and insurance on infrastructure development projects of TMP with a Security Coverage Ratio of 100% of the value of bank guarantees and insurance claims. 4. Transfer (<i>cessie</i>) of escrow accounts.				

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Entitas/ Entity	Kreditur/ Creditor	Jenis Fasilitas/ Facility Type	Jumlah Fasilitas/ Amount Facility	Jatuh Tempol/ Due Date	Saldo Outstanding/ Outstanding Balance	Suku Bunga Tahunan/ Annual Interest Rate
Entitas Anak/ Subsidiaries						
PT Prima Multi Terminal	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1. Kredit Investasi/ Investment Credit	Rp 461,000,000,000	28 Maret 2031/ March 28, 2031	Rp 417,173,317,948	JIBOR 3 Bulan/ Months + 5.25%
		2. Kredit bunga konstruksi/ Interest during construction	Rp 18,600,000,000			
		Jaminan (Catatan 12)		Colateral (Note 12)		
		1. Hak tanggungan untuk seluruh tanah dan bangunan serta benda-benda yang melekat di atas tanah TMP Kuala Tanjung.		1. Deferred rights for all land and buildings as well as objects attached to the Kuala Tanjung TMP land.		
		2. Jaminan fidusia atas seluruh fasilitas TMP Kuala Tanjung berikut seluruh peralatan dan perlengkapan fasilitas.		2. Fiduciary guarantee for all TMP Kuala Tanjung facilities as well as all equipment and facilities.		
		3. Jaminan fidusia atas seluruh hasil klaim bank garansi dan/atau klaim asuransi debitur atas pekerjaan pembangunan infrastruktur TMP yang diterima dari kontraktor dan/atau vendor, atau pemasok.		3. Fiduciary guarantee for all results of bank guarantee claims and/or debtor insurance claims on TMP infrastructure construction work received from contractors and/or vendors, or suppliers.		
		4. Pengalihan (cassie) atas rekening penampungan.		4. Transfer (cassie) of escrow accounts.		
		5. Gadai deposito atas rekening debt service reserve account (DSRA).		5. Pledge deposit on debt service reserve account (DSRA).		
		6. Surat pernyataan dan kesanggupan (Letter of Undertaking) dari para pemegang saham debitur.		6. Letter of Undertaking from debtor shareholders.		
PT Prima Indonesia Logistik	PT Bank Syariah Mandiri	Kredit Investasi/ Investment Credit	Rp 91,000,000,000	20 April 2025/ April 20, 2025	Rp 77,903,571,192	Margin 9%
		Jaminan (Catatan 11)		Colateral (Note 11)		
		2 Unit Harbor Mobile Crane (HMC) yang diikat Fidusia senilai Rp103.299.200.000.		2 Units of Harbor Mobile Cranes (HMC) bound by Fiduciary, worth Rp.103,299,200,000.		

20. Utang Obligasi

20. Bonds Payable

	2020 Rp	2019 Rp	
Nilai Nominal			Nominal
Utang Pokok Obligasi	950,000,000,000	950,000,000,000	Bond Principal Payable
Biaya Emisi yang Belum Diamortisasi	(1,023,637,456)	(1,776,523,245)	Unamortized of Bond Issuance Cost
Sub Jumlah	948,976,362,544	948,223,476,755	Sub Total
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(499,768,052,410)	--	Current Maturities in One Year
Jumlah	449,208,310,134	948,223,476,755	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rincian obligasi per seri:

Details of Bond per tranches are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Seri B			Tranche B
Utang Pokok Obligasi Seri B	500,000,000,000	500,000,000,000	Bond Principal - Tranche B
Biaya Emisi yang Belum Diamortisasi	(231,947,590)	(696,675,843)	Unamortized Bond Issuance Cost
Sub Jumlah	499,768,052,410	499,303,324,157	Sub Total
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(499,768,052,410)	--	Current Maturities in One Year
Jumlah Obligasi Seri B	--	499,303,324,157	Total Bonds Payable - Tranche B
Seri C			Tranche C
Utang pokok obligasi seri C	400,000,000,000	400,000,000,000	Bond principal - Tranche B
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(663,870,376)	(928,901,022)	Unamortized Bond issuance cost
Sub Jumlah	399,336,129,624	399,071,098,978	Sub Total
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	--	--	Current maturities in One Year
Jumlah Obligasi Seri C	399,336,129,624	399,071,098,978	Total Bonds Payable - Tranche C
Seri D			Tranche D
Utang Pokok Obligasi Seri D	50,000,000,000	50,000,000,000	Bond principal - Tranche B
Biaya Emisi yang Belum Diamortisasi	(127,819,490)	(150,946,380)	Unamortized Bond Issuance Cost
Sub Jumlah	49,872,180,510	49,849,053,620	Sub Total
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	--	--	Current Maturities in One Year
Jumlah Obligasi Seri D	49,872,180,510	49,849,053,620	Total Bonds Payable - Tranche D
Jumlah	449,208,310,134	948,223,476,755	Total

Obligasi/ Bonds	Pokok Utang/ Debt Principal	Tanggal Terbit/ Issue Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Periode Pembayaran Bunga/ Interest Payment Period	Tingkat Bunga Pertahun/ Interest Rate per Annum
Seri B/ Tranche B	Rp 500,000,000,000	21 Juni 2016/ June 21, 2016	21 Juni 2021/ June 21, 2021	Setiap 3 (tiga) bulan/ Quarterly	9.00%
Seri C/ Tranche C	Rp 400,000,000,000	21 Juni 2016/ June 21, 2016	21 Juni 2023/ June 21, 2023	Setiap 3 (tiga) bulan/ Quarterly	9.25%
Seri D/ Tranche D	Rp 50,000,000,000	21 Juni 2016/ June 21, 2016	21 Juni 2026/ June 21, 2026	Setiap 3 (tiga) bulan/ Quarterly	9.50%

Seluruh obligasi dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk sebagai wali amanat.

All bonds are sold at nominal value and listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) with PT Bank Tabungan Negara Tbk as the bank trustee.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP. Hak pemegang obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur emiten lainnya

These bonds are not guaranteed by special collaterals, but are guaranteed by all the Company's assets, both moving and immovable goods, both existing and existing in the future to become collateral for bondholders in accordance with the provisions in articles 1131 and 1132 of the KUHP. The rights of bondholders are *pari passu* without preferential rights with the creditor rights of other issuers both now and in the future, except for the

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Grup telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") dan PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") dengan peringkat: AA (idn) / idAA (Double A).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan pemegang obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya sertifikat jumbo obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan obligasi bagi pemegang obligasi adalah konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Perusahaan dapat melakukan pembelian kembali (*Buy Back*) obligasi, dapat ditunjukkan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, pelaksanaan pembelian kembali obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, pembelian kembali obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan sebagaimana disebutkan dalam prospektus.

Company's creditors' rights which are specifically guaranteed with the assets of the existing and future companies. In the context of the issuance of these bonds, the Company has obtained a rating on long-term bonds (bonds) from PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") and PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") with ratings: AA (idn)/idAA (Double A).

These bonds are issued scrippless, except for the jumbo certificate of bonds issued to be registered in the name of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as proof of debt for the benefit of bondholders. These bonds are registered in the name of KSEI for the benefit of account holders in KSEI, which are subsequently for the interest of bondholders and are registered on the date the Company's jumbo bond certificate is submitted to KSEI. Proof of bond ownership for bondholders is written confirmation issued by KSEI, Securities Company or Custodian Bank.

The Company can Buy Back the bonds, which intended as repayment or redeposited for later resale at market prices, the implementation of bond buybacks is carried out through the Stock Exchange or outside the Stock Exchange, the buyback of new bonds can be done 1 (one) year after the allotment date as stated in the prospectus.

21. Liabilitas Sewa

21. Lease Liabilities

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Future minimum lease payments together with the present value of the minimum lease payments as at 31 Desember 2020 was as follows:

	2020	
	Rp	
Liabilitas Sewa Bruto -		Gross Lease Liabilities -
Pembayaran Sewa Minimum		Minimum Lease Payments
- Lebih dari 1 Tahun dan		Later than 1 Year and -
Kurang dari 5 Tahun	20,150,512,584	not Later than 5 Years
- Lebih dari 5 Tahun	2,324,844,843,188	Later than 5 Years -
Sub Jumlah	2,344,995,355,772	Sub Total
Beban Keuangan di Masa		Future Finance Charges
Depan atas Sewa	(2,167,783,080,441)	on Leases
Nilai Kini Liabilitas Sewa	177,212,275,331	Present Value of Lease Liabilities

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<u>2020</u> <u>Rp</u>	
Nilai Kini Liabilitas Sewa adalah sebagai berikut:		The Present Value of Lease Liabilities is as follows:
- Lebih dari 1 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	21,313,908,690	Later than 1 Year and - Not Later than 5 Years
- Lebih dari 5 Tahun	<u>155,898,366,642</u>	Later than 5 Years -
Sub Jumlah	177,212,275,332	Sub Total
Dikurangi: Bagian Lancar	<u>(3,092,006,632)</u>	Less: Current Portion
Bagian Jangka Panjang	<u>174,120,268,700</u>	Non-Current Portion

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan.

Some leases contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period.

22. Liabilitas Imbalan Kerja

Program Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Grup menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") dan imbalan kerja lainnya. Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja lainnya pada tahun 2020 dan 2019 dicatat berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal (d/h PT Bestama Aktuaria).

a. Program Dana Pensiun Manfaat Pasti

Program Dana Pensiun Manfaat Pasti dikelola oleh Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. KEP-248/KM.6/2002 tanggal 21 Oktober 2002. DP4 merupakan dana pensiun yang didirikan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan mitra pendiri dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan PT Pengerukan Indonesia (Persero).

b. Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon

Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, manfaat PPUKP dapat dikompensasikan terhadap semua kewajiban Perusahaan kepada karyawannya dalam memenuhi ketentuan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 pada saat karyawan memasuki usia pensiun maupun karyawan yang terkait dengan kasus Pemutusan

22. Employee Benefits Liability

Post-employment Benefit Plans and Other Long-term Employee Benefit

The Group has Defined Benefit Pension Plan ("PPMP") and other benefits. Post-employment benefits liabilities and other employee benefits in 2020 and 2019 is recorded based on actuarial calculations by actuary Actuary Consultant Office Enny Diah Awal (formerly PT Bestama Aktuaria).

a. Defined Benefit Pension Fund Program

Defined Benefit Pension Fund Program is managed by the Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4), whose establishment deed was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decree No. KEP-248/KM.6/2002 dated October 21, 2002. DP4 is a pension fund established by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with founding partners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and PT Pengerukan Indonesia (Persero).

b. Severance Compensation Pension Program

Severance Compensation Pension Program (PPUKP) managed by the Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Financial Institution Pension Fund) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, the benefits of PPUKP can be compensated for all of the Company's obligations to its employees in complying with Labor Laws No 13/2003 when employees get into retirement age or employees related to cases of Termination of Employment Relationship

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Hubungan Kerja (PHK), sepanjang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan.

(PHK), insofar as provided for in the Collective Labor Agreement (PKB) or Company Regulations.

c. Program Pensiun Iuran Pasti

PT Prima Multi Terminal, entitas anak, memberikan Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") kepada karyawannya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah iuran yang diakui sebagai beban untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp13.828.235 dan nihil.

c. Defined Contribution Pension Plan

PT Prima Multi Terminal, a subsidiary, provides a Defined Contribution Pension Plan ("PPIP") to its employees managed by the Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The contribution amount recognized as an expense for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp13,828,235 and nil, respectively.

d. Program Imbalan Pascakerja di Entitas Anak

Ketentuan imbalan pascakerja yang dihitung di Entitas Anak, PT Prima Indonesia Logistik, PT Prima Husada Cipta Medan dan PT Prima Multi Terminal, mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 Undang-undang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Perusahaan atau Keputusan Direksi masing-masing perusahaan.

d. Post-employment Benefit Plans of Subsidiaries

Provision of post-employment benefits calculated in subsidiaries, PT Prima Indonesia Logistik, PT Prima Husada Cipta Medan and PT Prima Multi Terminal, referring to UU No. 13 year 2003 Labour Laws, and Company Regulations or Board of Directors' Decision in each company.

e. Manfaat Kesehatan Pascakerja

Perusahaan memiliki skema imbalan kesehatan pascakerja, meliputi para pensiunan Perusahaan, sejak pensiunan memasuki usia pensiun sampai meninggal dunia. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun imbalan pasti. Entitas anak tidak memiliki skema imbalan kesehatan pascakerja.

e. Post-retirement Healthcare Benefits

The Company has post-retirement healthcare benefits schemes, involve the Company's retired employees, from the date of the employees' retirement until death. The method of accounting, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes. The subsidiaries have no post-employment healthcare benefit schemes.

f. Imbalan Jangka Panjang Lain

PT Prima Multi Terminal, entitas anak, memberikan Program Masa Persiapan Pensiun bagi pekerja yang akan memasuki masa pensiun.

f. Other Long-Term Benefits

PT Prima Multi Terminal, a subsidiary, provide a Pension Preparation Period Program for workers who are about to retire.

Liabilitas Imbalan Kerja

Tabel berikut menyajikan ikhtisar liabilitas imbalan kerja sebagaimana tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian:

Employee Benefits Liabilities

The table below presents a summary of the employee benefits liabilities and expenses reported in the consolidated statement of financial position:

	2020 Rp	2019 Rp	
Perusahaan:			The Company:
Imbalan Pascakerja	429,968,334,934	394,491,916,016	Post-employment benefits
Entitas Anak:			Subsidiaries:
Imbalan Pascakerja	985,551,718	692,775,595	Post-employment benefits
Imbalan Kerja			Other Long-term Employee
Jangka Panjang Lain	125,920,241	72,084,582	Benefits
Liabilitas Imbalan Kerja	431,079,806,893	395,256,776,193	Employee Benefit Liabilities

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Perubahan imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lain Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Changes in the post-employment benefit programs and other long-term employment benefits of the Group as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
Perusahaan:			The Company:
Liabilitas Bersih			<i>Net Liability at the Beginning</i>
Awal Tahun	394,491,916,016	280,281,439,516	<i>of the Year</i>
Beban Tahun Berjalan	71,012,698,710	44,589,877,968	<i>Expense for the Year</i>
Pembayaran luran			<i>Current Year</i>
Tahun Berjalan	(33,829,856,248)	(10,994,506,663)	<i>Contribution Payment</i>
Pembayaran Manfaat	(3,992,992,300)	(3,628,231,250)	<i>Benefit Payment</i>
(Keuntungan)/Kerugian			<i>Actuarial (Gain)/Loss in</i>
Aktuarial pada Penghasilan			<i>Other Comprehensive</i>
Komprehensif Lain	2,286,568,756	84,243,336,445	<i>Income</i>
Sub Total	<u>429,968,334,934</u>	<u>394,491,916,016</u>	<i>Sub Total</i>
Entitas Anak:			Subsidiaries:
Liabilitas Imbalan			<i>Net Defined Benefit Liability</i>
Pasti Neto Awal tahun	764,860,177	351,437,669	<i>at Beginning of the year</i>
Beban Tahun Berjalan	397,381,386	413,422,508	<i>Expense for the Year</i>
Pengakuan Kewajiban atas			<i>Recognition of Liabilities from</i>
Masa Kerja Lalu	(132,945,996)	(19,653,012)	<i>Past Period</i>
Pembayaran Manfaat	(4,739,500)	--	<i>Benefit Payment</i>
(Keuntungan)/Kerugian			<i>Actuarial (Gain)/Loss in</i>
Aktuarial pada Penghasilan			<i>Other Comprehensive</i>
Komprehensif Lain	86,915,892	19,653,012	<i>Income</i>
Sub Total	<u>1,111,471,959</u>	<u>764,860,177</u>	<i>Sub Total</i>
Liabilitas Imbalan Kerja	<u>431,079,806,893</u>	<u>395,256,776,193</u>	Employee Benefits Liabilities

Rincian biaya imbalan kerja bersih Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Details of the net employee-benefit expense for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
Perusahaan:			The Company:
Biaya Jasa Kini	19,208,152,543	17,525,600,306	<i>Current Service Fees</i>
Beban Bunga Neto	31,569,437,367	24,392,410,558	<i>Other post-employment benefits</i>
Biaya jasa lalu	20,617,967,595	3,106,067,870	<i>Past service costs</i>
luran Peserta	(382,858,795)	(434,200,766)	<i>Net Interest Expense</i>
Sub Total	71,012,698,710	44,589,877,968	<i>Sub Total</i>
Entitas Anak:			Subsidiaries:
Beban Tahun Berjalan	397,381,386	413,422,508	<i>Expense for the Year</i>
Sub Total	<u>397,381,386</u>	<u>413,422,508</u>	<i>Sub Total</i>
Total	<u>71,410,080,096</u>	<u>45,003,300,476</u>	Total

Jumlah kumulatif dalam penghasilan komprehensif lain Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Details of the cumulative amount in other comprehensive income for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
Perusahaan:			The Company:
Akumulasi Keuntungan/ (Kerugian) Aktuarial Awal Tahun	239,287,372,095	155,044,035,650	Cumulative Gains/(Losses) Recognized in OCI at Beginning of the Year
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial Tahun Berjalan	<u>2,286,568,756</u>	<u>84,243,336,445</u>	Gains/(Losses) Recognized in OCI in Current Year
Sub Total	<u>241,573,940,851</u>	<u>239,287,372,095</u>	Sub Total
Entitas Anak :			Subsidiaries :
Akumulasi Keuntungan/ (Kerugian) Aktuarial Awal Tahun	(3,062,340)	(22,715,352)	Cumulative Gains/(Losses) Recognized in OCI at Beginning of the Year
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial Tahun Berjalan	<u>86,915,892</u>	<u>19,653,012</u>	Gains/(Losses) Recognized in OCI in Current Year
Sub Total	<u>83,853,552</u>	<u>(3,062,340)</u>	Sub Total
Saldo Akhir	<u>241,657,794,403</u>	<u>239,284,309,755</u>	Ending Balance

Asumsi-asumsi Aktuarial

Asumsi-asumsi aktuarial signifikan yang diterapkan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja Grup adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Tingkat Diskonto	Tergantung program, berada di kisaran/ Depending on program, but within the range of 7.3 - 7.8%	Tergantung program, berada di kisaran/ Depending on program, but within the range of 8.20%	Discount rate
Kenaikan Upah	4% - 10%	4% - 10%	Salary increase
Tabel Mortalitas	The 1949 Annuity Mortality Table	The 1949 Annuity Mortality Table	Mortality Table
Tingkat Cacat	1,00% dari Tingkat Mortalitas/ 1.00% of the Mortality Rate	1,00% dari Tingkat Mortalitas/ 1.00% of the Mortality Rate	Disability Rate
Tingkat Pengunduran Diri	1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia pensiun normal/ 1.00% at the age of 20 years and decreases linearly up to 0% at normal retirement age	1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia pensiun normal/ 1.00% at the age of 20 years and decreases linearly up to 0% at normal retirement age	Resignation Rate

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji sebagai berikut:

- Risiko Tingkat Bunga**
Nilai kini kewajiban pension imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada obligasi pemerintah jangka Panjang. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.
- Risiko Gaji**
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Actuarial Assumptions

Significant actuarial assumptions applied in the calculation of post-employment benefit obligations and other long-term employment benefits for the Group are as follows:

A defined benefit plan provides the Group's exposure to interest rate risk and salary risk, as follows:

- Interest Rate Risk**
The present value of the defined pension obligation is calculated using discount rate determined by reference to yields on Indonesian Government bonds. Decrease interest rate would increase the liability bond program.
- Salary Risk**
The present value of the defined benefit pension obligation is calculated by reference to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase program participants will increase the program's liabilities.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Diasumsikan bahwa tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa depan berdampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laba rugi. Satu persen perubahan diasumsikan pada tingkat diskonto dan kenaikan gaji akan memiliki dampak terhadap nilai kini kewajiban ibalan pasti pada 31 Desember 2020 sebagai berikut:

An assumption has been made that discount rate and salary growth rates have a significant effect on the amounts recognised in profit or loss. One percent of change in the assumption of discount rate and salary growth will have impact to present value of defined benefit obligation as of December 31, 2020 as following:

	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ Present Value of Defined Benefits Obligations	Perubahan/ Movement
Tingkat Diskonto/ <i>Discount Rate</i>	521,918,643,526 566,892,020,340	+0.50% - 1% -0.5% - 1%
Tingkat Kenaikan Gaji/ <i>Salary Increase Rate</i>	555,208,480,763 531,974,325,773	+0.50% - 1% -0.5% - 1%

Manajemen berkeyakinan bahwa perkiraan liabilitas dan imbalan kerja karyawan yang diberikan dari keseluruhan program pension Grup, yang didasarkan pada estimasi perhitungan aktuaris, telah melebihi kewajiban minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Management believes that the estimated liabilities and employee benefits from all of the Group's pension programs, based on the estimated calculation provided by the actuaries, exceeds the minimum liability that is stated by Labor Law No. 13/2003.

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits is as follows:

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ Present Value of Defined Benefits Obligations	Manfaat Jatuh Tempo/ Benefits of Maturity	Tahun Ke/ Year to
23,715,032,598	24,988,513,793	< 1
14,776,174,445	17,393,963,656	1 - < 2
21,028,372,966	27,609,412,420	2 - < 3
20,023,417,089	29,459,792,857	3 - < 4
18,975,560,296	30,482,150,563	4 - < 5
201,359,077,453	1,367,511,367,663	>= 5

23. Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang

23. Long-Term Unearned Income

	2020 Rp	2019 Rp	
Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang	286,689,431,180	297,169,687,543	<i>Unearned Income</i>
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(75,572,947,543)	(62,827,108,376)	<i>Current Maturities in One Year</i>
Jumlah Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang	211,116,483,637	234,342,579,167	Total Long-Term Unearned Income

Pendapatan diterima di muka jangka panjang merupakan pendapatan dari kontrak pelanggan atas perjanjian sewa properti investasi milik Grup (Catatan 10).

Term upfront income represents income from the customer's contract for the Group's investment property rental agreement (Note 10).

24. Provisi

24. Provisions

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	30,410,559,634	--	<i>Beginning Balances</i>
Penambahan	66,683,486,655	30,410,559,634	<i>Addition</i>
Saldo Akhir	97,094,046,289	30,410,559,634	<i>Ending Balances</i>

Akun ini merupakan provisi atas maintenance dredging dan provisi konsesi atas perhitungan re-investment pemeliharaan dan beban bunga terkait penerapan ISAK 16 tentang Konsesi Jasa.

This account represents a provision for maintenance dredging and a concession provision for the calculation of re-investment in maintenance and interest expense related to the application of ISAK 16 concerning Concession Right.

25. Modal Saham

25. Share Capital

Tahun 2020 dan 2019/ Year 2020 and 2019	Lembar Saham/ Shares	Nominal/ Nominal	Prosentase/ Percentage
Negara Republik Indonesia/ Republic of Indonesia	1,700,000	1,000,000	100.00%

Berdasarkan Akta No. 207 tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH., mengenai peningkatan modal dasar dari Rp1.800.000.000.000 yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp6.800.000.000.000 yang terbagi atas 6.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan dari Rp511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp1.700.000.000.000 yang terbagi atas 1.700.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU.05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014, terdiri atas:

Based on Notarial Deed No. 207 dated June 30, 2014 made by Notary Risna Rahmi Arifa, SH., concerning increase of authorized capital from Rp1,800,000,000,000 consists of 1,800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share into Rp6,800,000,000,000 consists of 6,800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share, and Company's issued and fully paid capital from Rp511,960,000,000 consists of 511,960 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share into Rp1,700,000,000,000 consists of 1,700,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share. The amendment deed was accepted and recorded in Administrative System for Legal Entities by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Acknowledgement Letter No. AHU.05403.40.20.2014 dated July 11, 2014, are as follows:

Setoran Modal Lama sesuai dengan Akta No 88
Tanggal 16 Agustus 2012 dibuat
oleh Notaris Rahmad Nauli Siregar, SH.

511,960,000,000

*Issued and Paid up Capital in Accordance with
Notary Deed of Notaris No. 88
Dated August 12, 2012
of Notary Rahmad Nauli Siregar, SH.*

Peningkatan Modal Disetor Tahun 2014
berasal dari :

*Increase in Paid up Capital in 2014
came from :*

• Kapitalisasi Sebagian Cadangan
sampai dengan Tahun Buku 2013

1,188,040,000,000

*Capitalization of Unappropriated
Retained Earnings up to Year 2013*

Total Modal Ditempatkan dan Disetor

1,700,000,000,000

Total Issued and Paid up Capital

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 17 tanggal 13 September 2019 dari Notaris Risna Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan, para pemegang Saham telah menyetujui untuk konversi jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri

Based on the Company's Notarial Deed of Shareholder Resolution No. 17 dated September 13, 2019 from Notary Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan the Shareholders have agreed to convert type of shares from no series type to consist of A Golden Stock series shares and

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

dari saham seri A Dwiwarna dan saham Seri B yang perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU- 0079552.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 dengan susunan permodalan menjadi sebagai berikut:

B Series shares whose changes have been reported to and accepted by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Acknowledgement letter No. AHU- 0079552.AH.01.02. Year 2019 dated October 7, 2019 the composition of capital stock are as follows:

	2020			
	Jumlah Saham/ <i>Number of Shares</i>	Nilai Nominal/ <i>Par Value</i>	Jumlah Modal/ <i>Total Share Capital</i>	
Seri A Dwiwarna	1	1,000,000	1,000,000	Series A Golden stock
Seri B	1,699,999	1,000,000	1,699,999,000,000	Series B
Jumlah	1,700,000		1,700,000,000,000	Total

Tidak ada perbedaan dari saham seri A Dwiwarna dan, B dalam hak suara dan wewenang, hak dividen dan hak likuiditas.

There were no differences between A series, and B series, series shares in power and authority, dividend rights and rights of liquidity.

26. Tambahan Modal Disetor Lainnya

26. Other Additional Paid In Capital

Tambahan modal disetor lainnya merupakan ekuitas yang berasal dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) (Catatan 28), yang melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I tanggal 22 Februari 2019, pasal 1 (satu) menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Rincian dari nilai tambahan modal disetor lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Other additional paid-in capital is equity originating from the Government Assistance of Unspecified Status (BPYBDS) (Note 28), which through Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 10 of 2019 concerning Addition of State Capital of the Republic of Indonesia to the Capital Stock of the Company (Persero) PT Port of Indonesia I dated February 22, 2019, article 1 (one) states that the State of the Republic of Indonesia made additional capital investments into the share capital of the Company (Persero) of PT Pelabuhan Indonesia I whose status as a Company Company (Persero) was determined based on Government Regulation No. 56 the Year 1991 concerning the Transfer of the Form of a Public Corporation (Perum) Port I to a Limited Liability Company (Persero). Details of other additional paid-in capital values as at December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020 dan/and 2019		
	Rp		
Fasilitas Pelabuhan Dumai	414,128,745,519		Dumai Port Facility
Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli	19,203,989,000		Gunung Sitoli Port Facility
Dua Unit Kapal Tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe	53,560,436,197		Two Units of Tugboat in Malahayati and Lhokseumawe Port
Satu Unit Forklift Merk Patria Kapasitas 3 Ton	196,900,000		One Unit of Forklift Patria with 3 Tons Capacity
Satu Unit Forklift Merk Patria Kapasitas 5 Ton	365,200,000		One Unit of Forklift Patria with 5 Tons Capacity
Tiga Unit Forklift Kapasitas 3 Ton	590,700,000		Three Units of Forklift with 3 Tons Capacity
Tiga Unit Forklift Kapasitas 5 Ton	1,095,600,000		Three Units of Forklift with 5 Tons Capacity
Satu Unit Forklift 3 Ton dan Pendukung Lainnya (8,3 x 43,5 m) di Sibolga	37,991,646,536		Construction of the South Side Dock and Other Supporting Facilities (8.3 x 43.5 m) in Sibolga
Jumlah Tambahan Modal Disetor	527,133,217,252		Total Government Grants with Unspecified Used

Tambahan modal disetor akan dipindahkan ke modal saham setelah disahkan melalui RUPS.

Additional paid-in capital will be transferred to share capital after being approved by the GMS.

27. Dividen

27. Dividend

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 3 tanggal 6 Juli 2020, penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2019 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar 16,25% atau Rp60.050.953.594.
b. Cadangan sebesar 83,75% atau Rp309.460.760.856.

Based on the results of the General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 3 dated 3 June 2020, the use of the Company's net profit for the fiscal year 2019 is determined as follows:

- a. Dividend of 16.25% or Rp60,050,953,594.
b. Reserves of 83,75% or Rp309,460,760,856.*

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 12 tanggal 29 April 2019, penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2018 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar 35% atau Rp319.135.000.000.
b. Cadangan sebesar 65% atau Rp592.679.406.602.

Based on the results of the General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 12 dated April 29, 2019, the use of the Company's net profit for the fiscal year 2018 is determined as follows:

- a. Dividend of 35% or Rp319,135,000,000
b. Reserves of 65% or Rp592,679,406,602*

28. Kepentingan Nonpengendali

28. Non-Controlling Interest

a. Kepentingan Nonpengendali atas Ekuitas Entitas Anak

Penyertaan pemegang saham minoritas pada entitas anak adalah sebagai berikut:

a. Non-Controlling Interest in Equity of Subsidiaries

The interest of the minority shareholders in subsidiaries are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
PT Prima Terminal Petikemas			<i>PT Prima Terminal Petikemas</i>
Nilai Tercatat - Awal	354,307,330,188	281,345,851,695	<i>Carrying Amount - Beginning</i>
Tambahan Setoran Modal	--	79,200,000,000	<i>Additional Share</i>
Bagian Laba Bersih Periode Berjalan	490,324,708	(6,238,521,507)	<i>Net Income for Current Period</i>
Sub Jumlah	<u>354,797,654,896</u>	<u>354,307,330,188</u>	<i>Sub Total</i>
PT Prima Multi Terminal			<i>PT Prima Multi Terminal</i>
Nilai Tercatat - Awal	583,616,898,224	656,456,869,777	<i>Carrying Amount - Beginning</i>
Bagian Laba Bersih Periode Berjalan	(126,719,228,867)	(72,831,127,697)	<i>Net Income for Current Period</i>
Penghasilan Komprehensif Lain	(4,336,468)	(8,843,856)	<i>Other Comprehensive Income</i>
Sub Jumlah	<u>456,893,332,889</u>	<u>583,616,898,224</u>	<i>Sub Total</i>
Sub Jumlah (Dipindahkan)	<u>811,690,987,785</u>	<u>937,924,228,412</u>	<i>Sub Total (Transferred)</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
Sub Jumlah (Pindahan)	811,690,987,785	937,924,228,412	<i>Sub Total (To Transfer)</i>
PT Prima Indonesia Logistik			<i>PT Prima Indonesia Logistik</i>
Nilai Tercatat - Awal	815,028,329	816,763,592	<i>Carrying Amount -</i>
Bagian Laba Bersih			<i>Beginning</i>
Periode Berjalan	15,822,461	3,341,464	<i>Net Income for</i>
			<i>Current Period</i>
			<i>Appropriation of</i>
Pencadangan Saldo Laba	--	(5,076,727)	<i>Retained Earnings</i>
Dampak Penerapan			<i>Impact on Implementation</i>
PSAK 71 dan 73	(8,023,422)	--	<i>PSAK 71 and 73</i>
Penghasilan			<i>Other Comprehensive</i>
Komprehensif Lain	(247,071)	--	<i>Income</i>
Sub Jumlah	<u>822,580,297</u>	<u>815,028,329</u>	<i>Sub Total</i>
PT Prima Husada Cipta Medan			<i>PT Prima Husada Cipta Medan</i>
Nilai Tercatat - Awal	49,101,758	69,708,877	<i>Carrying Amount -</i>
Bagian Laba Bersih			<i>Beginning</i>
Periode Berjalan	35,102,759	(20,607,119)	<i>Net Income for</i>
Dampak Penerapan			<i>Current Period</i>
PSAK 71 dan 73	3,528	--	<i>Impact on Implementation</i>
			<i>PSAK 71 and 73</i>
Sub Jumlah	<u>84,208,045</u>	<u>49,101,758</u>	<i>Sub Total</i>
Jumlah	<u>812,597,776,127</u>	<u>938,788,358,499</u>	Total

b. Kepentingan Non Pengendali atas Laba Bersih Entitas Anak

b. Non-Controlling Interest in Net Income of Subsidiaries

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
PT Prima Terminal Petikemas	490,324,708	(6,238,521,507)	<i>PT Prima Terminal Petikemas</i>
PT Prima Multi Terminal	(126,719,228,867)	(72,831,127,697)	<i>PT Prima Multi Terminal</i>
PT Prima Indonesia Logistik	15,822,461	3,341,464	<i>PT Prima Indonesia Logistik</i>
PT Prima Husada			<i>PT Prima Husada</i>
Cipta Medan	35,102,759	(20,607,119)	<i>Cipta Medan</i>
Jumlah	<u>(126,177,978,939)</u>	<u>(79,086,914,859)</u>	Total

c. Kepentingan Nonpengendali atas Laba Komprehensif Entitas Anak

c. Non-Controlling Interest in the Total Comprehensive Income of Subsidiaries

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
PT Prima Terminal			<i>PT Prima Terminal</i>
Petikemas	490,324,708	(6,238,521,507)	<i>Petikemas</i>
PT Prima Multi Terminal	(126,723,565,335)	(72,839,971,553)	<i>PT Prima Multi Terminal</i>
PT Prima Indonesia Logistik	15,575,390	3,341,464	<i>PT Prima Indonesia Logistik</i>
PT Prima Husada			<i>PT Prima Husada</i>
Cipta Medan	35,102,759	(20,607,119)	<i>Cipta Medan</i>
Jumlah	<u>(126,182,562,478)</u>	<u>(79,095,758,715)</u>	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. Pendapatan Operasi

29. Operating Revenues

Akun pendapatan usaha merupakan pendapatan atas operasi perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The operating income account is the company's operating income for the years ended December 31, 2020, and 2019 is as follows:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Pendapatan Usaha Bruto:			Gross Revenues:
Pendapatan Pelayanan			
Peti Kemas	1,478,312,411,581	1,449,963,747,487	Container Service Revenues
Pendapatan Pelayanan			Revenue from Non-Container
Barang Non Peti Kemas	412,241,451,655	436,106,340,739	Goods Services
Pendapatan Pelayanan Kapal	359,724,133,959	382,818,675,781	Vessels Service Revenue
Pendapatan Pelabuhan			
Tersus/Pelus/Dersus/ Terminal UKS	407,710,458,818	313,737,775,879	Tersus/Pelus/Dersus/ Terminal UKS Port Revenues
Pendapatan Sewa Lahan dan Bangunan/Bagian			Land and Building Rental Income/part of Building
Bangunan	131,935,578,307	146,632,973,896	Logistic Service Revenues/ Goods Consolidation and Distribution
Pendapatan Pelayanan			Asset Rental Income, Equipment and Room Electricity/power Plant and Water Service Revenues
Logistik/Konsolidasi dan Distribusi Barang	60,192,936,186	67,072,111,726	Revenue from Health Care Service (Polyclinic and Hospital Shipping Income
Pendapatan Sewa Aset, Peralatan dan Ruang (Non PI)	49,603,231,509	44,081,045,168	
Pendapatan Jasa Listrik/ Power Plant dan Air	52,956,888,045	44,050,336,559	Shipyards Revenue (Dock) Others
Pendapatan Jasa Kesehatan (Poliklinik dan Rumah Sakit)	30,513,001,028	58,928,918,995	
Pendapatan Pelayaran	4,829,957,174	3,995,656,769	
Pendapatan Galangan (Dock) Kapal	938,181,000	632,563,500	
Lain-lain	94,888,715,771	156,212,862,612	
Sub Jumlah	<u>3,083,846,945,033</u>	<u>3,104,233,009,111</u>	Sub Total
Reduksi Pendapatan :			Revenues Reduction:
Pendapatan Pelayanan Kapal	42,231,190	168,979,719	Vessels Service Revenue
Pendapatan Pelabuhan			
Tersus/Pelus/Dersus/ Terminal UKS	31,340,784	17,754,935	Tersus/Pelus/Dersus/ Terminal UKS Port Revenues
Pendapatan Usaha Rupa-rupa	6,959,090	--	Other Service
Sub Jumlah	<u>80,531,064</u>	<u>186,734,654</u>	Sub Total
Jumlah	<u>3,083,766,413,969</u>	<u>3,104,046,274,457</u>	Total

Sebesar 0,62% dan 1,38% dari pendapatan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dilakukan dengan pihak yang berelasi (Catatan 35).

Approximately 0.62% and 1.38% of revenue in December 31, 2020 and 2019 respectively carried out with related parties (Note 35).

30. Pendapatan dan Beban Konstruksi

30. Construction Revenues And Expenses

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Grup dalam pembangunan terminal Multipurpose di Kuala Tanjung dan terminal petikemas di Belawan Fase 2. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya, yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for constructing the multipurpose terminal at Kuala Tanjung and container terminal at Belawan Phase 2. Construction revenue is measured using cost method, which is all cost directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Pendapatan Konstruksi	758,143,856,767	2,535,336,461,063	Construction Revenue
Beban Konstruksi	(758,143,856,767)	(2,535,336,461,063)	Construction Expenses

31. Beban Operasi

31. Operating Expenses

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Penyusutan dan Amortisasi (Catatan 10, 11, 12 dan 13)	567,779,211,292	432,159,958,534	Depreciation and Amortization (Notes 10, 11, 12 and 13)
Kerja Sama Mitra Usaha	564,506,162,286	627,460,273,593	Partnership
Pegawai	525,594,846,197	614,100,905,979	Employee
Bahan Bakar dan Bahan Habis Pakai	183,276,377,270	184,189,062,300	Fuels and Supplies
Pemeliharaan Umum	153,157,055,430	144,002,885,259	Maintenance General
Asuransi	117,811,684,998	157,402,546,598	Insurance
Administrasi Kantor	67,441,010,092	49,077,162,764	Office Administration
Penyisihan Penurunan Nilai	61,947,958,224	128,934,568,805	Allowance for Impairment
Beban pajak & retribusi	40,289,093,446	12,606,020,782	Tax and retribution
Lain-lain (dibawah Rp3 miliar)	42,233,588,582	66,905,037,495	Others (under Rp3 billion)
Jumlah	2,407,778,400,729	2,505,837,092,694	Total

32. Pendapatan Non - Usaha - Bersih

32. Non - Operating Income - Net

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih	35,173,972,508	(6,781,750,021)	Foreign Exchange Gain (Loss) - Net
Kelebihan Pembayaran PBB	44,093,769,439	--	Overpayment of PBB
Pendapatan Denda/ Penalti	5,898,800,367	6,395,342,866	Penalty/ Compensation Income
Penghapusan Utang	--	9,939,634,081	Write-off of Payables
Beban atas Penerimaan Negara Bukan Pajak	(31,713,558,026)	(29,829,845,672)	Expense on Non-Tax State Revenue (PNBP)
Beban Konsesi	(47,691,422,076)	(52,830,515,568)	Concession Expenses
Beban Biaya Materai	(1,298,407,675)	(1,439,719,644)	Stamp Duty Costs
Lain-lain - Bersih	6,159,372,816	44,562,810,505	Others - Net
Jumlah	10,622,527,353	(29,984,043,453)	Total

33. Pendapatan dan Beban Keuangan

33. Finance Income and Cost

	2020 Rp	2019 Rp	
<u>Pendapatan Keuangan</u>			<u>Finance Income</u>
Bunga Deposito Berjangka	52,775,941,797	81,692,985,210	Interest of Time Deposits
Bunga Bank	2,029,039,489	1,831,496,750	Interest of Cash in Bank
Jumlah	54,804,981,286	83,524,481,960	Total
<u>Beban Keuangan</u>			<u>Finance Cost</u>
Beban Bunga dari Pinjaman Bank	433,124,711,984	271,938,788,137	Interest Expenses from Bank Loans
Beban Bunga dari Pinjaman Utang Obligasi	87,502,885,724	89,604,277,544	Interest Expenses from Bonds Payable
Beban Bunga dari Liabilitas Sewa	4,900,319,871	--	Interest Expenses from Lease Liabilities
Beban Administrasi Bank	1,467,358,870	230,436,531	Bank administration charges
Jumlah	526,995,276,449	361,773,502,212	Total

34. Laba Per Saham Dasar

34. Basic Earnings Per Share

Labanya per saham dasar merupakan laba yang diperoleh pemegang saham untuk setiap lembar modal saham yang dimiliki. Perhitungan laba per saham dasar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Basic earnings per share are profits earned by shareholders for each share capital owned. The calculation of basic earnings per share as of December 31, 2020, and 2019 is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Labanya untuk Perhitungan laba per Saham Dasar (Rupiah)	309,298,348,909	285,263,383,703	Profit for Calculation of Basic Earnings per Share (Rupiah)
Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Biasa untuk Perhitungan Laba per Saham Dasar	1,700,000	1,700,000	Total Weighted Average Number of Ordinary Shares for Computation of Basic Earnings per Share
Labanya per Saham dasar (Rupiah)	181,940	167,802	Basic Earnings per Share (Rupiah)

35. Informasi Mengenai Pihak-Pihak Berelasi

35. Related Parties Information

a. Sifat Hubungan dan Transaksi

a. Nature of Relationship and Transactions

Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Transaksi/ Transactions
- Pemegang Saham/Shareholder	- Pemerintah Republik Indonesia/ Government of Republic of Indonesia	Hak Konsesi atas Terminal Multipurpose Kuala Tanjung dan Terminal Petikemas Belawan, serta sewa lahan Fase 1 Belawan/ Concession rights on Multipurpose Terminal Kuala Tanjung and Container Terminal Belawan, and rent of land Phase 1 Belawan

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Transaksi/ Transactions
- Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Relate the Government of the Republic of Indonesia</i>	- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan giro, deposito berjangka, fasilitas kredit, biaya keuangan dan pendapatan bunga/ <i>Placement of current accounts, time deposits, loans facility, finance charges and interest income</i>
	- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan giro, deposito berjangka, piutang usaha, fasilitas kredit, pendapatan sewa lahan, biaya keuangan dan pendapatan bunga/ <i>Placement of current accounts, time deposits, trade receivable, loans facility, rent of land revenue, finance charges and interest income</i>
	- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan deposito berjangka, biaya keuangan dan pendapatan bunga/ <i>Placement of current accounts, time deposits, finance charges and interest income</i>
	- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah/ <i>Sharia Business Unit</i>	Penempatan deposito berjangka, biaya keuangan dan pendapatan bunga/ <i>Placement of current accounts, time deposits, finance charges and interest income</i>
	- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<i>Penempatan giro, deposito berjangka, piutang usaha, fasilitas kredit, pendapatan sewa lahan, biaya keuangan dan pendapatan bunga/ Placement of current accounts, time deposits, trade receivable, loans facility, rent of land revenue, finance charges and interest income</i>
	- PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan giro, deposito berjangka, biaya keuangan dan pendapatan bunga/ <i>Placement of current accounts, time deposits, finance charges and interest income</i>
	- PT Pertamina (Persero)	Piutang usaha, utang usaha, penjualan jasa kepelabuhan, sewa lahan dan suplay bahan bakar/ <i>Trade receivable, trade payables, sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>
	- PT Pertamina Trans Kontinental	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhan, sewa lahan dan suplay bahan bakar/ <i>Trade receivable, sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>
	- PT Perta Arun Gas	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhan, sewa lahan dan suplay bahan bakar/ <i>Trade receivable, sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>
	- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Piutang usaha, penjualan usaha rupa-rupa/ <i>Trade receivables, miscellaneous income</i>
	- PT Sarana Agro Nusantara	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhan, sewa lahan dan suplay bahan bakar/ <i>Trade receivable, sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>
	- PT Semen Padang	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhan, sewa lahan dan suplay bahan bakar/ <i>Trade receivable, sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>
	- PT Arun NGL	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhan, sewa lahan dan suplay bahan bakar/ <i>Trade receivable, sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>
	- PT Kereta Api Logistik	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhan, sewa lahan dan suplay bahan bakar/ <i>Trade receivable, sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>
	- PT Brantas Abipraya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Transaksi/ Transactions
	- PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset takberwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset takberwujud fasilitas pelabuhan dan penjualan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities and sales</i>
	- PT Wijaya Karya (Persero)Tbk.	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset takberwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Utama Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset takberwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset takberwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Nindya Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset takberwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Superintending Company of Indonesia (Persero) (Sucofindo)	Jasa konsultan dan penjualan/ <i>Consultant service and sales</i>
	- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Vendor dalam pekerjaan piranti lunak dan penjualan/ <i>Vendor of software work and sales</i>
	- PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Jasa konsultan dan penjualan/ <i>Consultant service and sales</i>
	- PT Surveyor Indonesia (Persero)	Jasa konsultan dan penjualan/ <i>Consultant service and sales</i>
	- Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha (BPPU) ITS	Jasa konsultan/ <i>Consultant service</i>
	- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	<i>Sharing Biaya/ Expense sharing</i>
	- PT Danareksa Sekuritas	Jasa konsultan/ <i>Consultant service</i>
	- PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT ASDP Indonesia Ferry	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT Pos Indonesia (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Transaksi/ Transactions
	- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ Sales of harbor service and rental of land
	- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ Sales of harbor service and rental of land
	- PT Pegadaian (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ Sales of harbor service and rental of land
	- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pembelian energi listrik, penjualan sewa lahan dan kerjasama operasi/ Electrical energy supply, land rental sales and joint operations
	- PT Perusahaan Daerah Air Minum	Pembelian air/ Purchase of water
	- TNI/ABRI	Penjualan jasa pelayanan kepelabuhanan/ Sales of services Ports
	- Koperasi Karyawan Pelindo I	Jasa Keamanan/ Security Services
- Entitas Asosiasi/ Associates	- PT Terminal Petikemas Indonesia	Investasi saham/ Investment in share
	- PT Prima Tangki Indonesia	Investasi saham/ Investment in share
	- PT Prima Pengembangan Kawasan	Investasi saham/ Investment in share
	- PT Prima Multi Peralatan	Investasi saham/ Investment in share
	- Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	Penempatan Dana Imbalan kerja Karyawan/ Placement of employee Benefit Funds

b. Transaksi-Transaksi Pihak Berelasi

Rincian penjualan dan pembelian kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%*)	Jumlah/ Total	%*)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	541,778,273,982	3.39	474,197,410,844	2.97
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	453,290,637,176	2.84	562,529,273,638	3.52
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	402,046,732,889	2.52	574,957,468,665	3.60
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	98,584,000,000	0.62	44,584,000,000	0.28
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah/ Sharia Business Unit	39,500,000,000	0.25	57,500,000,000	0.36
PT Bank Syariah Mandiri	16,634,472,977	0.10	9,809,419,931	0.06
Jumlah/ Total	1,551,834,117,024	9.72	1,723,577,573,078	10.78

*) Persentase terhadap Total Aset/ Percentage of Total Assets

b. Transactions with Related Parties

The details of sales to and purchases from related parties are as follows:

a. Cash and Cash Equivalents

b. Piutang Usaha

	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%*)	Jumlah/ Total	%*)
PT Pertamina Trans Kontinental	16,696,828,746	0.10	7,743,660,149	0.05
PT Pupuk Sriwidjaja	6,859,847,638	0.04	--	0.00
PT Pertamina Patra Niaga	3,825,774,000	0.02	--	0.00
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	175,762,372	0.00	1,889,080,128	0.01
PT Pertamina (Persero)	105,678,919	0.00	3,800,565,403	0.02
PT Perta Arun Gas	27,287,954	0.00	3,886,991,785	0.02
Lainnya Di bawah Rp1 Miliar/ Other - Under Rp1 Billion	2,499,824,801	0.02	791,096,584	0.00
Sub Jumlah/ Sub Total	30,191,004,430	0.19	18,111,394,049	0.11
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(18,314,691,864)		--	
Jumlah/ Total	11,876,312,566	0.07	18,111,394,049	0.11

*) Persentase terhadap Total Aset/ Percentage of Total Assets

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

c. Utang Usaha

	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%*)	Jumlah/ Total	%*)
PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)	17,947,727,882	0.18	13,703,333,132	0.14
PT Brantas Abipraya (Persero)	15,399,700,156	0.16	53,001,460,718	0.54
PT Pertamina (Persero)	13,993,842,389	0.14	17,021,822,914	0.17
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	12,420,000,000	0.13		0.00
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	7,990,599,059	0.08	30,077,316,172	0.31
PT Sucofindo (Persero)	6,725,266,362	0.07	10,703,910,150	0.11
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	6,464,688,807	0.07	8,953,377,680	0.09
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	5,702,630,526	0.06	3,988,466,136	0.04
PT Hutama Karya (Persero)	5,227,722,259	0.05	15,220,573,337	0.16
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	4,477,500,000	0.05	1,017,500,000	0.01
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2,673,163,821	0.03	12,092,446,289	0.12
PT Surveyor Indonesia (Persero)	2,022,002,092	0.02	3,106,595,782	0.03
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	1,473,623,069	0.02		0.00
BPPU ITS	434,301,465	0.00	2,396,926,421	0.02
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	1,148,833	0.00	25,968,997,511	0.27
Lainnya Di bawah Rp1 Miliar/ Other - Under Rp1 Billion	4,281,846,181	0.04	870,120,015	0.01
Jumlah/ Total	107,235,762,901	1.10	198,122,846,257	2.03

*) Persentase terhadap Total Kewajiban/ Percentage of Total Liabilities

d. Uang titipan

	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%*)	Jumlah/ Total	%*)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara	8,650,516	0.00	8,650,516	0.00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5,974,853	0.00	5,974,853	0.00
TNI Angkatan Laut	5,240,859	0.00	436,792	0.00
PT Asuransi Jiwa Taspen	--	0.00	47,187,172	0.00
Distrik Navigasi	--	0.00	18,562,500	0.00
Bea Cukai Belawan	--	0.00	8,771,074	0.00
Lainnya Di bawah Rp5 Juta/ Other - Under Rp5 Million	8,187,480	0.00	42,464,848	0.00
Jumlah/ Total	58,429,032	0.00	157,639,939	0.00

*) Persentase terhadap Total Kewajiban/ Percentage of Total Liabilities

e. Uang Panjar

	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%*)	Jumlah/ Total	%*)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	73,974,777	0.00	73,974,777	0.00
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	50,915,876	0.00	50,915,876	0.00
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35,699,590	0.00	35,699,590	0.00
Balai Besar Karantina Belawan	17,795,068	0.00	17,795,068	0.00
PT Pertamina (Persero)	11,202,720	0.00	11,202,720	0.00
Lainnya Di bawah Rp10 Juta/ Other - Under Rp10 Million	40,882,658	0.00	63,244,543	0.00
Jumlah/ Total	230,470,689	0.00	252,832,574	0.00

*) Persentase terhadap Total Kewajiban/ Percentage of Total Liabilities

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

f. Utang Lain-lain

	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%*)	Jumlah/ Total	%*)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	47,100,000,000	0.49	--	0.00
PT Waskita Karya (Persero)	37,000,000,000	0.38	--	0.00
Jumlah/ Total	84,100,000,000	0.87	--	0.00

*) Persentase terhadap Total Kewajiban/ Percentage of Total Liabilities

Pada tanggal 14 Agustus 2020 dan 14 September 2020, PMT menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka waktu sampai dengan 31 Desember 2020, masing-masing sebesar Rp19.600.000.000 dan Rp27.500.000.000 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga 11,7% per tahun. Pada tanggal 18 Agustus 2020 dan 18 September 2020, PMT menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka waktu sampai dengan 31 Desember 2020, masing-masing sebesar Rp15.680.000.000 dan Rp21.320.000.000 dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga 11,7% per tahun.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, perjanjian pinjaman atas perubahan jangka waktu tersebut masih dalam proses.

On August 14, 2020 and September 14, 2020, PMT entered into loan facility agreement that valid until December 31, 2020 amounted to Rp19,600,000,000 and Rp27,500,000,000 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, respectively. The facility bears interest rate at 11,7% per annum. On August 18, 2020 and September 18, 2020, PMT entered into loan facility agreement that valid until December 31, 2020 amounted to Rp15,680,000,000 and Rp21,320,000,000 with PT Waskita Karya (Persero) Tbk. The facility bears interest rate at 11,7% per annum.

Until the date of completion of the financial statements, the loan agreement for the change in term is still in process.

g. Utang Bank

	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%*)	Jumlah/ Total	%*)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,413,339,541,898	24.87	1,669,509,868,376	17.08
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,316,900,776,704	13.57	811,597,363,876	8.30
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,316,900,776,704	13.57	811,597,363,876	8.30
PT Sarana Multi Infrastruktur	417,173,317,946	4.30	416,657,417,711	4.26
Jumlah/ Total	5,464,314,413,252	56.30	3,709,362,013,838	37.95

*) Persentase terhadap Total Kewajiban/ Percentage of Total Liabilities

h. Pendapatan Operasi

	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%*)	Jumlah/ Total	%*)
PT Pertamina (Persero)	17,373,151,051	0.56	34,389,744,109	1.11
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	899,096,461	0.03	6,577,588,334	0.21
Lainnya Di bawah Rp1 Miliar/ Other - Under Rp1 Billion	854,395,408	0.03	1,802,502,861	0.06
Jumlah/ Total	19,126,642,920	0.62	42,769,835,304	1.38

*) Persentase terhadap Total Pendapatan/ Percentage to Total Revenue

**36. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan**

**36. Financial Instrument and Financial Risks
Management**

a. Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam transaksi normal Grup, secara umum terekspos risiko keuangan sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
3. Risiko Tingkat Suku Bunga
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Harga
6. Risiko Investasi

Catatan ini menjelaskan mengenai eksposur Grup terhadap masing-masing risiko di atas dan pengungkapan secara kuantitatif termasuk seluruh eksposur risiko serta merangkum kebijakan dan proses-proses yang dilakukan untuk mengukur dan mengelola risiko yang timbul.

Direksi Grup bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup dan secara keseluruhan program manajemen risiko keuangan Grup difokuskan pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Grup.

Kebijakan manajemen Grup mengenai risiko keuangan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko dimana Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan investasi. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Untuk meringankan risiko ini, Grup menetapkan kebijakan untuk transaksi Penjualan jasa kepada pelanggan dengan mengharuskan pemakai jasa pelanggan untuk memberikan uang muka sebelum bertransaksi, sehingga Grup lebih mudah memantau pendapatannya. Selain itu saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan

a. Risk Management Policy

In normal transaction, the Group is generally exposed to financial risks as follows:

1. Credit Risk
2. Foreign Exchange Rate Risk
3. Interest Rate Risk
4. Liquidity Risk
5. Price Risk
6. Investment Risk

This Note describes the exposure of the Group to each of the above risks and quantitative disclosures including risk exposures and summarizes the policies and processes for measuring and managing the risks that arised.

The Group's directors are responsible for implementing risk management policies and overall financial risk management program which focuses on uncertainty of financial market and minimize potential losses that will have an impact to the Group's financial performance.

The Group's policy on financial risk mangagement are as follows:

1. Credit Risk
Credit risk is the risk that the Group will incur loss arising from their customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. The Group's financial instruments that have potential credit risk are cash and cash equivalent, trade accounts receivable, other accounts receivable and investments. Maximum total credit risks exposure are equal to the carrying amount of the respective accounts.

To minimize this risk, the Group established a policy to deal with the sale of services to customers by requiring service users / customers to pay deposit's before entering transaction and hence allow the Group to monitor their income easier. In addition, receivable balances are monitored on a continuous basis to reduce the possibility of uncollectible receivables. When a customer

piutang yang tidak tertagih. Ketika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan, Grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Grup akan menghentikan pelayanan jasa kepada pelanggan sebagai akibat gagal bayar.

Tergantung pada penilaian Grup, penyisihan khusus dibuat jika terdapat bukti objektif tidak tertagih.

Nilai tercatat dari aset keuangan mencerminkan nilai eksposur kredit maksimum. Nilai eksposur kredit maksimum pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	Belum Jatuh Tempo/ Neither Past Due	Telah Jatuh Tempo/ Past Due	Penurunan Nilai/ Impairment	Jumlah/ Total	
31 Desember 2020					December 31, 2020
<u>Pinjaman yang Diberikan dan Piutang:</u>					<u>Loans and Receivables:</u>
Kas dan Setara Kas	1,565,080,858,350	--	--	1,565,080,858,350	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	46,469,621,681	112,215,187,741	(109,180,062,112)	49,504,747,310	Trade Receivables
Piutang Lain-lain	17,728,298,039	--	(4,979,298,330)	12,748,999,709	Other Receivables
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2,682,469,344	31,375,405,126	(31,375,405,126)	2,682,469,344	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	1,631,961,247,414	143,590,592,867	(145,534,765,568)	1,630,017,074,713	Total
31 Desember 2019					December 31, 2019
<u>Pinjaman yang Diberikan dan Piutang:</u>					<u>Loans and Receivables:</u>
Kas dan Setara Kas	1,767,548,879,083	--	--	1,767,548,879,083	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	74,266,888,852	113,975,505,164	(67,552,164,876)	120,690,229,140	Trade Receivables
Piutang Lain-lain	143,957,672,805	--	(3,709,916,934)	140,247,755,871	Other Receivables
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2,171,080,675	23,692,863,940	(23,692,863,940)	2,171,080,675	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	1,987,944,521,415	137,668,369,104	(94,954,945,750)	2,030,657,944,769	Total

is unable to make payments within the specified time, the Group will contact the customer to follow up on receivables that are past due. If the customer does not pay the receivables within a specified time period, the Group will discontinue services to customers as a result of the default.

Depending on the assessment of the Group, specific allowance is made when there is an objective evidence that it will not be collected.

The carrying amount of the financial asset reflects the value of the maximum credit exposure. The maximum credit exposure value on the statements of financial position are as follows:

2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko nilai tukar mata uang terutama terdiri dari kas dan setara kas, investasi dan pinjaman.

2. Foreign Exchange Rate Risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's financial instruments that potentially containing foreign exchange rate risk are cash and cash equivalent, investments and loans.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Grup tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing. Bagaimanapun, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf di atas, fluktuasi dalam nilai tukar Rupiah dan Dolar AS menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai tukar Grup.

Eksposur risiko nilai tukar mata uang Grup terutama disebabkan oleh kas dan setara kas, investasi sementara, piutang usaha, pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan.

Pinjaman dikompensasi dengan kenaikan nilai Kas dan Setara Kas yang sebagian besar didenominasikan dalam mata uang asing yang sama. Perubahan nilai tukar telah, dan akan diperkirakan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Grup. Beberapa liabilitas dan belanja modal Grup diperkirakan akan terus didenominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Dalam mengelola risiko mata uang, Grup tidak melakukan *hedging*, karena transaksi dalam valuta asing tersebut dilakukan dalam jangka pendek. Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko signifikan atas fluktuasi mata uang asing dalam transaksi tersebut.

Dalam mengatasi risiko fluktuasi mata uang asing, pihak Manajemen melakukan hal sebagai berikut:

- a. Memperoleh sebagian modal kerja dalam mata uang asing.
- b. Melakukan pembelian valas secara spot atau terhadap yang kemudian ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka USD.
- c. Memperoleh pendapatan dalam mata uang asing yang diharapkan dapat mengkompensasi liabilitas dalam mata uang asing.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup yang terutama berdenominasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat:

The Group does not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, in relation to the matters discussed in the preceding paragraph, the fluctuations in the exchange rates between the Rupiah and US Dollar provide some degree of natural hedge for the Group foreign exchange exposure.

Exposure of currency exchange risk of the Group is mainly from cash and cash equivalents, temporary deposits, trade accounts receivables, bank loans and security issued.

Bank loans is offset by increasing of Cash and Cash Equivalents denominated in the same foreign currencies. Foreign exchange had been, and would be expected give influence towards operation result and cash flow of the Group. Several liabilities and capital expenditures are expected to continue denominated in United States Dollar.

The Group manages the foreign exchange rate risk without hedging, because transactions have short term period. The Group believes that there are no significant risk of foreign exchange fluctuations on its transactions.

In addressing the risk of fluctuations in foreign currency the Management considers the following:

- a. *Obtains part of working capital in foreign currency.*
- b. *Purchases foreign currency at spot or gradually to be placed in the form of time deposito in USD.*
- c. *Obtains revenues in foreign currency which are expected to compensate liabilities on foreign currency.*

The following table presents the Group financial assets and liabilities denominated in foreign currency, mainly in United States Dollar:

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

		2020			
		Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent	Rp	
Aset					Assets
	Kas dan Setara Kas	USD	2,940,270	41,472,512,092	Cash and Cash Equivalents
	Piutang Usaha	USD	445,525	6,284,135,033	Account Receivables
Jumlah			3,385,796	47,756,647,125	Total
Liabilitas					Liabilities
	Utang Usaha	USD	4,822,097	68,015,683,425	Account Payables
	Utang Panjar	USD	14,181	200,024,598	Advance from Customers
	Utang Titipan	USD	48	678,806	Fund Retained
	Utang Bank	USD	56,294,345	794,032,296,502	Bank Loans
Jumlah			61,130,671	862,248,683,331	Total
		2019			
		Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent	Rp	
Aset					Assets
	Kas dan Setara Kas	USD	938,434	13,195,482,922	Cash and Cash Equivalents
	Piutang Usaha	USD	451,947	6,354,486,791	Account Receivables
Jumlah			1,390,381	19,549,969,713	Total
Liabilitas					Liabilities
	Utang Usaha	USD	30,352,158	425,264,084,733	Account Payables
	Utang Panjar	USD	25,720	360,368,254	Advance from Customers
	Utang Titipan	USD	13,276	186,003,745	Fund Retained
	Utang Bank	USD	20,762,478	290,903,073,892	Bank Loans
Jumlah			51,153,631	716,713,530,624	Total

Analisis Sensitivitas

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan pada tabel. Analisis ini dilakukan berdasarkan varians nilai tukar mata uang asing yang dipertimbangkan dapat terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan dengan semua variabel lain adalah konstan.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas perubahan kurs Dolar Amerika Serikat terhadap laba bersih dan ekuitas Grup:

Sensitivity Analysis

Movement that may occur towards Rupiah exchange rate against United States Dollar at year end that could increase (decrease) the equity or profit or loss amount are presented in table. The analysis was conducted based on the variance of foreign currency exchange rates that were considered to happen on the reporting date with all other variables are held constant.

The following table shows the sensitivity of the United States Dollar exchange rate changes on net income and the Group equity:

		Sensitivitas/Sensitivity			
		Perubahan Nilai Tukar Change in Exchange Rates	Basis Poin/ Basis Point	Ekuitas/ Equity Rp	Laba (Rugi)/ Profit (Loss) Rp
31 Desember 2020/ December 31, 2020	Meningkat/ Appreciates		100	(5,774,491,572)	(5,774,491,572)
	Terdepresiasi/ Depreciates		100	5,774,491,572	5,774,491,572
31 Desember 2019/ December 31, 2019	Meningkat/ Appreciates		100	(4,975,830,140)	(4,975,830,140)
	Terdepresiasi/ Depreciates		100	4,975,830,140	4,975,830,140

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Grup melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak *negative* terhadap Grup.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisa pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

	2020 Rp	2019 Rp	
Aset Keuangan	1,580,512,327,403	1,909,967,715,629	Financial Assets
Liabilitas Keuangan	8,227,254,946,814	8,966,751,372,382	Financial Liabilities
Jumlah Aset (Liabilitas)			Total Assets (Liabilities)
- Bersih	9,807,767,274,217	10,876,719,088,011	- Net

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan sifat bunga:

	2020 Rp	2019 Rp	
Tingkat Bunga Tetap			Fixed Rate
Aset Keuangan	1,580,512,327,403	1,909,967,715,629	Financial Assets
Liabilitas Keuangan	8,227,254,946,814	8,966,751,372,382	Financial Liabilities
Jumlah	9,807,767,274,217	10,876,719,088,011	Total
Tingkat Bunga Mengambang			Variable Rate
Aset Keuangan	1,612,122,573,951	1,948,167,069,942	Financial Assets
Liabilitas Keuangan	8,391,800,045,750	9,146,086,399,830	Financial Liabilities
Jumlah Aset (Liabilitas)			Total Assets (Liabilities)
- Bersih	10,003,922,619,701	11,094,253,469,772	- Net

Analisis sensitivitas terhadap risiko suku bunga:

Kenaikan suku bunga 2% akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp214.685.388.239 dan Rp226.005.330.765. Penurunan 2% suku bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 akan memiliki sama tetapi berlawanan efek, atas dasar bahwa semua variabel lainnya tetap konstan.

3. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate.

The Group monitors the impact of interest rate movements to minimize the negative impact on the Group.

To measure market risk on interest rate movement, the Group analyzed the interest rate movement margin and maturity profile of asset and liabilities based on interest rate change schedule.

The following table analyzes the financial liabilities by type of interest:

Sensitivity analysis on interest rate risk:

A 2% increase in interest rates would have decreased equity and profit or loss for the periods ended December 31, 2020 and 2019 by Rp214,685,388,239 and Rp226,005,330,765 respectively. A 2% decrease in interest rates for the periods ended December 31, 2020 and 2019 would have the equal but opposite effect, on the basis that all other variables remained constant.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
 DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
 AND SUBSIDIARIES
 NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
 STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
 December 31, 2020 and 2019
 (Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan Entitas Anak untuk mengatasi dampak evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Rincian jatuh tempo liabilitas keuangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020	Kurang dari 3	3 bulan sampai	Lebih dari 1	Total	December 31, 2020
	bulan/Less than 3 months	1 tahun/ 3 months up to 1 year	tahun/More than 1 years		
Utang Usaha	798,193,882,502	--	--	798,193,882,502	Trade Accounts Payable
Uang Panjar	5,090,823,228	--	--	5,090,823,228	Advance from Customer
Uang Titipan	25,616,668,977	--	--	25,616,668,977	Fund Retained
Beban Akruwal	212,182,969,344	--	--	212,182,969,344	Accrued Expenses
Utang Bank	--	410,495,386,081	6,149,254,631,216	6,559,750,017,297	Bank Loans
Utang Obligasi	--	499,768,052,410	449,208,310,134	948,976,362,544	Bonds Payables
Liabilitas Sewa	--	3,092,006,632	174,120,268,700	177,212,275,332	Lease Liabilities
Jumlah	1,041,084,344,051	913,355,445,123	6,772,583,210,050	8,727,022,999,224	Total

31 Desember 2019	Kurang dari 3	3 bulan sampai	Lebih dari 1	Total	December 31, 2019
	bulan/Less than 3 months	1 tahun/ 3 months up to 1 year	tahun/More than 1 years		
Utang Usaha	1,890,697,030,316	--	--	1,890,697,030,316	Trade Accounts Payable
Uang Panjar	6,882,913,253	--	--	6,882,913,253	Advance from Customer
Uang Titipan	28,794,888,017	--	--	28,794,888,017	Fund Retained
Beban Akruwal	126,585,980,305	--	--	126,585,980,305	Accrued Expenses
Utang Bank	--	214,549,156,365	5,751,017,927,371	5,965,567,083,736	Bank Loans
Utang Obligasi	--	--	948,223,476,755	948,223,476,755	Bonds Payables
Jumlah	2,052,960,811,891	214,549,156,365	6,699,241,404,126	8,966,751,372,382	Total

5. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitannya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

4. Liquidity Risk

Liquidity risk is the arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

In the managing liquidity risk, the Management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Company and Subsidiaries operations and to mitigate the affects of fluctuation in cash flows. The Management also regularly evaluates the projected and markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

Details of the maturities of financial liabilities are as follows:

5. Price Risk

Price risk is a risk of fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in market price, whether those changes are caused by factors specific to the individual instrument or its issues or factors affecting all instruments traded in the market.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Grup terkena dampak risiko harga yang terutama diakibatkan oleh pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan peralatan yang merupakan komponen utama biaya produksi. Harga pengadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain permintaan pasokan, nilai tukar kondisi geografis dan nilai tukar. Dampak risiko harga tersebut mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Grup tidak serta merta dapat mengalihkan kenaikan harga tersebut kepada pelanggannya.

Kebijakan Grup untuk meminimalkan risiko harga adalah antara lain dengan melakukan kerjasama usaha dan pembelian bersama antara Grup kepada pemasok agar mendapatkan harga yang menguntungkan.

6. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Besarnya tingkat risiko yang dimasukkan dalam penilaian investasi akan mempengaruhi besarnya hasil yang diharapkan pemodal.

Perusahaan melaksanakan penawaran umum obligasi Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari 4 (empat) seri dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000.

Tingkat bunga sebesar 8,25%-9,25% per tahun dan dibayar setiap 3 bulanan, dimulai 21 September 2016 sampai 21 Juni 2026.

Kebijakan Grup untuk meminimalkan risiko investasi adalah antara lain dengan melakukan penempatan sisa utang obligasi yang belum digunakan pada rekening untuk pembayaran proyek Grup yang akan jatuh tempo.

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan
Estimasi nilai wajar**

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Company and subsidiaries are affected by price risk that are primarily attributable to the procurement and maintenance of port facilities and equipment which are the major component of production costs. Procurement prices are influenced by several factors, such as rising demand and exchange rates. The impact of this price risk, results in the increasing production costs. The Company and subsidiaries are unable to transfer these price increases directly to its customers.

Company and subsidiaries set policies to minimize price risk, such as by conducting joint operations and joint purchase between the Company and subsidiaries to suppliers in order to obtain a favorable price.

6. Investment Risk

Level of investment risk is the potential loss arising from the acquisition of the expected investment returns are not achieved as planned. The level of risk that is included in the valuation of investment will affect the expected results financiers.

The Company has conduct Pelindo 1 Gerbang Nusantara Bond I 2016 is issued scrippless and is guaranteed in full commitment consisting of 4 (four) tranches with the amount of Rp1,000,000,000,000.

An interest rate of 8.25%-9.25% per annum and payable every 3 months, starting September 21, 2016 until June 21, 2026.

The Group policy is to minimize investment risks are, among others, with the placement of the rest of the bonds that have not been used to account for the payment of the maturing project of the Group.

**b. Fair Value of Financial Instruments
Fair value estimation**

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- a. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
- c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Grup untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- a. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- b. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (Level 2); and
- c. Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (Level 3).

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Group is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- *The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;*
- *Other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The table below shows the carrying values and fair values of the assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position for the periods ended December 31, 2020 and 2019:

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang, utang dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Fair value of cash and cash equivalents, receivables, payables and accruals expenses approximate their carrying amount largely due to short-term maturities of these instruments.

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

Telah menjadi kebijakan Grup bahwa tidak akan ada perdagangan dalam instrumen keuangan yang akan dilakukan.

It is has been the subsidiaries' policy that trading in financial instruments shall be undertaken.

	2020		2019		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair Value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan:					Financial Assets:
Kas dan Setara Kas	1,565,080,858,350	1,565,080,858,350	1,767,548,879,083	1,767,548,879,083	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha - Bersih	49,504,747,310	49,504,747,310	120,690,229,140	120,690,229,140	Account Receivables - Net
Piutang Lain-lain	12,748,999,709	12,748,999,709	140,247,755,871	140,247,755,871	Other Receivables
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2,682,469,344	2,682,469,344	2,171,080,675	2,171,080,675	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	1,630,017,074,713	1,630,017,074,713	2,030,657,944,769	2,030,657,944,769	Total
Liabilitas Keuangan:					Financial Liabilities:
Utang Usaha	798,193,882,502	798,193,882,502	1,890,697,030,316	1,890,697,030,316	Account Payables
Uang Panjar	5,090,823,228	5,090,823,228	6,882,913,253	6,882,913,253	Advance from Customer
Uang Titipan	25,616,668,977	25,616,668,977	28,794,888,017	28,794,888,017	Fund Retained
Beban Akrual	212,182,969,344	212,182,969,344	126,585,980,305	126,585,980,305	Accrued Expenses
Utang Lain-lain	90,539,906,928	90,539,906,928	5,687,533,567	5,687,533,567	Other Payables
Liabilitas Sewa	177,212,275,332	177,212,275,332	--	--	Trade Accounts Payable
Utang Bank	6,559,750,017,297	6,559,750,017,297	5,965,567,083,736	5,965,567,083,736	Bank Loans
Utang Obligasi	449,208,310,134	449,208,310,134	948,223,476,755	948,223,476,755	Bonds Payables
Jumlah	8,317,794,853,742	8,317,794,853,742	6,913,790,560,491	6,913,790,560,491	Total

37. Pengelolaan Permodalan

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

37. Capital Management

The Company's objective in managing capital is to protect the Company's ability to maintain business continuity and maximize benefits for shareholders and other stakeholders, and maintain an optimal capital structure to reduce capital costs.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Perusahaan memonitor modal berdasarkan rasio pinjaman bank terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi total pinjaman bank dengan total modal. Modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas yang ada sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Company actively and routinely reviews and manages its capital to ensure an optimal capital structure and return for shareholders, taking into account the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditure, considering future capital requirements.

The Company monitors capital based on the ratio of bank loans to capital. This ratio is calculated by dividing the total bank loans by total capital. Capital consists of all equity components that are present as amounts in the consolidated statement of financial position.

38. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting

38. Agreements and Commitments

- a. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.58/41/18/P.I-04, tanggal 26 November 2004 dengan PT Metito Indonesia untuk Kerjasama Operasi Pengusahaan Air Minum. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2021.
- a. *Belawan Harbor Branch have signed the cooperation agreement No. UM.58/41/18/P.I-04, on November 26, 2004, with PT Metito Indonesia for the Cooperation in Drinking Water Operations. This cooperation is valid from January 1, 2007 to December 31, 2021.*
- b. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.VIII-373/BLW-US.13, tanggal 18 Juli 2012 dengan PT Indoterminal Belawan Perkasa untuk Maintenance Instalasi Rak dan Pipa Serta Fasilitas Pendukung Terminal Minyak Kelapa Sawit di Dermaga 105 - 106 Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2023.
- b. *Belawan Harbor Branch have signed cooperation agreement No. B.VIII-373/BLW-US.13, on July 18, 2012, with PT Indoterminal Belawan Perkasa for Maintenance of Rack and Pipe Installation and Supporting Facilities for Palm Oil Terminal at Pier 105 - 106 Belawan Harbor. This cooperation is valid from January 1, 2012 to December 31, 2023.*
- c. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.XV-521/BLW-US.15, tanggal 30 Agustus 2017 dengan PT Lemo Tatagraha Mas untuk Kerjasama Sewa Menyewa Alat Bongkar Muat 2 (dua) Unit Harbour Mobile Crane di Cabang Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 29 Agustus 2022.
- c. *Belawan Harbor Branch have signed cooperation agreement No. B.XV-521/BLW-US.15, on August 30, 2017 with PT Lemo Tatagraha Mas for the Leasing Cooperation of Leasing Unloading Equipment of 2 (two) Harbor Mobile Crane Units in Belawan Harbor Branch. This cooperation is valid from August 30, 2017 to August 29, 2022.*
- d. Belawan Internasional Container Terminal menandatangani perjanjian kerjasama No. HK.45/1/6/BICT-18.TU, tanggal 14 Mei 2018 dengan PT Graha Segara untuk Kerjasama Penanganan Pemeriksaan Petikemas Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK) pada Lokasi TPFT PT Graha Segara. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 26 April 2018 sampai dengan 25 April 2023.
- d. *Belawan Internasional Container Terminal signs the cooperation agreement No. HK.45/1/6/BICT - 18.TU, dated May 14, 2018, with PT Graha Segara for the Handling cooperation of Quarantine Container Examination at the Quarantine Checkpoint (TPK) at PT Graha Segara TPFT Location. This collaboration is valid from April 26, 2018 to April 25, 2023.*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- e. Cabang Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. B-XV.28/Dum-US.15 tanggal 20 Februari 2016 dengan PT Sari Dumai Sejati untuk Operasi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Khusus (Tersus) di Lubuk Gaung Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 19 Februari 2022.
- f. Cabang Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. US.12/II/DUM-18 tanggal 15 Januari 2018 dengan PT Kawasan Industri Dumai untuk kerjasama Pemanduan dan Penundaan di Terminal Khusus (Tersus) PT Kawasan Industri Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 14 Januari 2021. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, perjanjian tersebut masih dalam proses perpanjangan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, perjanjian tersebut masih dalam proses perpanjangan.
- g. Cabang Pelabuhan Batam menandatangani perjanjian kerjasama No. US. 12/1/4/BTM-18.TU tanggal 14 Mei 2018 dengan PT Maxsteer Dyrnusa Perdana untuk Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian *Ship to Ship Transit Anchorage* di Perairan Nipah. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 11 November 2016 sampai dengan 10 November 2021.
- h. Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Kuala Tanjung. Berdasarkan Perjanjian kerjasama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Pihak Pertama) dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Pihak Kedua), tanggal 23 Januari 2015 No. HK.107/1/1/KSOP.KIG-15 atau No. US.15/1/7/PI-15.TU tentang Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung, yang diperbaharui berdasarkan Addendum Nomor 1 tanggal 16 November 2016 yang mengubah judul Perjanjian Kerjasama dari sebelumnya "Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung" menjadi "Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Kuala Tanjung", serta mengubah penyebutan istilah "Dermaga pada Terminal Curah Cair" menjadi "Terminal *Multipurpose*". Perusahaan telah memperoleh penetapan Hak Pengusahaan (Hak Konsesi) melakukan kegiatan pengusahaan dermaga pada

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- e. *Dumai Port Branch signed a cooperation agreement No. B-XV.28/Dum-US.15 dated February 20, 2016, with PT Sari Dumai Sejati for Port Service Operations at the Special Terminal (Tersus) in Lubuk Gaung Dumai. This cooperation is valid from February 20, 2017 until February 19, 2022.*
- f. *Dumai Port Branch signed cooperation agreement No. US.12/II/DUM-18 dated January 15, 2018, with PT Kawasan Industri Dumai for the piloting and tugging cooperation at the Special Terminal (Tersus) of PT Kawasan Industri Dumai. This cooperation is valid from January 15, 2018 until January 14, 2021. Until the date of financial statements, this agreement still on progress of renewal. Until the date of financial statements, this agreement still on progress of renewal.*
- g. *Batam Port Branch signs cooperation agreement No. US12/1/4/BTM-18.TU dated May 14, 2018, with PT Maxsteer Dyrnusa Perdana for the Cooperation to Manage and Operate the Ship to Ship Transit Anchorage in Nipah Waters. This cooperation is valid from November 11, 2016 to November 10, 2021.*
- h. *Concession Agreement between the Belawan Main Port Authority Office and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) regarding Port Service Operation at Kuala Tanjung Port.*

Based on the cooperation agreement between the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (First Party) and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Second Party), dated January 23, 2015 No. HK.107/1/1/KSOP.KIG-15 or No. US.15/1/7/PI-15.TU concerning the Exploitation of Wharves at the Liquid Bulk Terminal at Kuala Tanjung Port, which was updated based on Addendum Number 1 dated November 16, 2016 which changed the title of the Cooperation Agreement from the previous "Jetty Exploitation at the Liquid Bulk Terminal at Kuala Tanjung Port" becomes "Port Service Operations at Kuala Tanjung Port", and changes the term "Jetty at Liquid Bulk Terminal" become "Multipurpose Terminal". The Company has obtained the stipulation of Concession Rights to carry out dock concession activities at the Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung Port from the

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Terminal *Multipurpose* di Pelabuhan Kuala Tanjung dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan ketentuan dalam perjanjian ini, sebagai berikut:

- 1) Pemberian Hak Konsesi
 - a) Pihak Pertama dengan ini memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan perusahaan dermaga pada Terminal *Multipurpose* di Pelabuhan Kuala Tanjung dan PIHAK KEDUA dengan ini menerima pemberian hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Hak Konsesi tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- 2) Ruang Lingkup Perjanjian meliputi:
 - a) Pemberian Hak Konsesi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selama Jangka Waktu Konsesi untuk Perusahaan Dermaga Pada Terminal *Multipurpose* di Pelabuhan Kuala Tanjung yang meliputi Dermaga Terminal *Multipurpose*, Trestle, Peralatan, Utilitas dan Instalasi pipa;
 - b) Melakukan pungutan atas tarif jasa dermaga pada Terminal *Multipurpose* oleh PIHAK KEDUA;
 - c) Penyerahan Aset Terminal *Multipurpose* Kuala Tanjung.
- 3) Periode Perjanjian Kerjasama:

Periode Perjanjian Kerjasama untuk Jangka waktu selama 69 (Enam Puluh Sembilan) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:

 - a) Masa Prakonstruksi dan Masa Konstruksi paling lambat selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak penandatangan Perjanjian Kerjasama; dan
 - b) Masa Operasi terhitung sejak diterimanya izin pengoperasian Terminal *Multipurpose* sampai dengan berakhirnya periode Perjanjian Kerjasama.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia, with the provisions of this agreement, as follows:

- 1) *Grant of Concession Rights*
 - a) *The First Party hereby grants the Second Party the right to carry out dock operations at the Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung Port and the Second Party hereby accepts this right in accordance with the provisions of this Cooperation Agreement and the provisions of laws and regulations;*
 - b) *The concession rights cannot be transferred to other parties.*
- 2) *The scope of the Agreement includes:*
 - a) *Granting of Concession Rights from the First Party to the Second Party during the Concession Period for the Concession of Wharves at the Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung Port which includes Multipurpose Dock Terminal, Trestle, Equipment, Utilities and Pipe Installation;*
 - b) *Conducting levies on dock services at Multipurpose Terminals by the Second Party;*
 - c) *Hand over Assets at the Kuala Tanjung Multipurpose Terminal.*
- 3) *Cooperation Agreement Period:*

Cooperation Agreement Period for a period of 69 (Sixty-nine) years from the date of signing the Cooperation Agreement, with the following details:

 - a) *The pre-construction period and construction period is no later than 48 (forty eight) months, starting from the signing of the Cooperation Agreement; and*
 - b) *Operation Period commencing from the receipt of the Multipurpose Terminal operating license until the end of the Cooperation Agreement period.*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- 4) Pendapatan Konsesi:
Hasil Konsesi dan Tata Cara Pembayaran adalah sebagai berikut:
- a) Hasil konsesi (*concession fee*) yang diperoleh Pihak Pertama merupakan kompensasi yang diterima dari Pihak Kedua sehubungan dengan pemberian konsesi Pengusahaan Dermaga Pada Terminal Multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung yang meliputi Dermaga Terminal Multipurpose, Trestle, Peralatan, Utilitas dan Instalasi pipa di Kuala Tanjung.
 - b) *Fee* konsesi adalah sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pengoperasian diluar PPN.
 - c) Hasil konsesi tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atas nama Pihak Pertama setiap bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan berikutnya.
- 5) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama
Dalam waktu paling lambat 180 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Konsesi para pihak harus segera menyetujui dan mengambil semua Langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengalihan pengelolaan Dermaga Pada terminal Multipurpose dari Pihak Kedua kepada pihak pertama.
- 6) Kerjasama Dengan Pihak Lain
Bahwa Direktur Kepelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sesuai surat No. PP.40/3/6/DP.16 tanggal 01 Februari 2016, telah memberikan hak kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dan/atau bermitra dengan anak perusahaan atau badan usaha yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melakukan suatu bagian atau bagian-bagian kegiatan perusahaan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung.

Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Penugasan, Mitra kerjasama PT Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) adalah PT Prima Multi Terminal yang merupakan Anak Perusahaan BUMN dengan Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 55%, PT Waskita Karya (Persero) Tbk 20% dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) 25%.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- 4) *Concession Income:*
Concession Results and Payment Methods are as follows:
- a) *The concession fee obtained by the First Party constitutes compensation received from the Second Party in connection with the granting of a Pier Concession at the Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung Port which includes the Multipurpose Terminal Pier, Trestle, Equipment, Utilities and Pipeline Installation in Kuala Tanjung.*
 - b) *Concession fee is 2.5% of gross operating income excluding VAT.*
 - c) *The results from the concession shall be deposited into the State Treasury as non-tax state revenue on behalf of the First Party every month not later than 15 days in the following month.*
- 5) *The Termination of Cooperation Agreement Within 180 days at the latest before the end of the concession period the parties must immediately agree and take all necessary steps to complete the process of transferring management of the Dock at the Multipurpose terminal from the Second Party to the first party.*
- 6) *Cooperation with Other Parties*
That the Port Director of the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation in accordance with letter No. PP.40/3/6/DP.16 dated February 1, 2016, has granted the First Party the right to be able to collaborate with other parties and/or partner with subsidiaries or entities. businesses that have the ability and competence to carry out a part or parts of the Kuala Tanjung Multipurpose Terminal business activities.

As stated in the Assignment Agreement, the cooperation partner of PT Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) is PT Prima Multi Terminal which is a BUMN Subsidiary with 55% Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), 55% from PT Waskita Karya (Persero) Tbk and 25% from PT Pembangunan Perumahan (Persero).

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2020 and 2019

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- i. Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dengan Perusahaan tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan (Pihak Pertama) dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Pihak Kedua), tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tanggal 9 November 2015 No. HK.107/1/2/OP.BLW-15 dan No. US.12/2/9/PI-15.TU, dan telah diperbaharui dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Tanggal 16 Juni 2016 No. HK.107/1/4/OP.BLW-16 dan No. UM.58/22/8/PI-16.TU dan diperbaharui Kembali dengan Addendum kedua tanggal 12 Juli 2017. Pihak Pertama memberikan hak konsesi kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di wilayah atau lokasi dimana terdapat terminal dan fasilitas pelabuhan eksisting milik Perusahaan yang telah diusahakan oleh Perusahaan untuk kegiatan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka Waktu Perjanjian adalah selama 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan diperpanjang selama Area Konsesi digunakan sebagai Fasilitas Pelabuhan dan Perusahaan masih menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tentang Pendirian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- b. Ruang Lingkup Konsesi
Pemberian hak dan kewenangan dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan pengusahaan jasa kepelabuhanan di area Konsesi yang telah diselenggarakan oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 2. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 3. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan (Pas Penumpang, Pas orang dan pas kendaraan);

- i. *Concession Agreement between the Belawan Main Port Authority Office and the Company regarding Port Service Business Activities in the Port that the Company Operates.*

Based on the Concession Agreement between the Belawan Main Port Authority Office (First Party) and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Second Party), regarding Port Service Business Activities at Ports managed by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dated November 9, 2015 No. HK.107/1/2/OP.BLW-15 and No. US.12/2/9/PI-15.TU, and has been renewed with an Additional Agreement (Addendum dated June 16, 2016 No: HK.107/1/4/OP.BLW-16 and No: UM.58/22/8/PI-16.TU and updated again with the second Amendment dated July 12, 2017. The First Party grants concession rights to the Company to carry out port service business activities in areas or locations where there are existing port terminals and facilities owned by the Company that have been operated by the Company for Port Services business activities, with the following conditions:

- a. *The term of the agreement is for 30 (thirty) years, commencing upon the date of signing of this agreement and extended as long as the concession area is used as a port facility and the company is still carrying out business activities as referred in the government regulation concerning company establishment and other applicable laws and regulations.*
- b. *Scope of Concession*
The granting of rights and authority from the first party to the second party to carry out port services in the concession area that has been carried out by the Second Party are as follows:
1. *Provision and/or dock services for berthing;*
 2. *Provision and/or shipping of refueling and clean water services;*
 3. *Provision and/or service of passenger and/or vehicle boarding facilities (Passenger Pass, Person Pass and Vehicle Pass);*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas;
 5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa Gudang dan tempat penimbunan barang alat bongkar muat, serta peralatan Pelabuhan;
 6. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas curah cair, curah kering dan Ro-Ro;
 7. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.
- c. Pendapatan Konsesi;
1. Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama atas Pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi pada masing-masing pelabuhan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan Pihak Pertama.
 2. Besaran Pendapatan Konsesi pada Area Konsesi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 2,5% per tahun dari pendapatan kotor/bruto dari pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 3. Pembayaran pendapatan konsesi untuk pertama kalinya adalah terhadap kegiatan jasa kepelabuhanan yang berlangsung untuk periode tanggal 9 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan untuk pembayaran pendapatan konsesi tahun 2016 dan seterusnya dilakukan per triwulan yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan pertama triwulan berikutnya.
 4. Pembayaran pendapatan konsesi dilaksanakan berdasarkan Berita Acara hasil Pencocokan dengan penelitian (Coklit) data pendapatan perusahaan jasa kepelabuhanan yang ditandatangani oleh para pihak dengan kode Billing yang diterbitkan dan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada pihak kedua.
 5. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilaksanakan setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan pertama triwulan berikutnya. Berita Acara Coklit wajib

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. To provide and/or equip dock services for the loading and unloading of goods and containers;
 5. Provision and/or warehouse services and storage places for loading and unloading equipment and port equipment;
 6. Provision and/or terminal services for liquid bulk, dry bulk and Ro-Ro containers;
 7. Provision and/or service of loading and unloading goods.
- c. Concession Income;
1. The Second Party pays to the First Party the concession income obtained from the operations from the Concession Area at each port as Non-Tax State Revenue (PNBP) which is deposited into the State Treasury through the First Party's Revenue Treasurer.
 2. The amount of Concession Income in the Concession Area as referred to in paragraph (1) is 2.5% per year of the gross income from the implementation of Concession Activities in the Concession Area in accordance with the provisions of this Agreement.
 3. Payment of concession income for the first time is for port service activities that take place for the period November 9, 2015 to December 31, 2015 and payment of concession income for 2016 and henceforward is made quarterly paid at the 25th day of the first month of the following quarter by the latest.
 4. Payment of concession income is carried out based on the results of Matching and research (Coklit) revenue data of petroleum services signed by the parties with the Billing code issued and submitted by the First Party to the second party.
 5. The activity of Matching and research (Coklit) is carried out every month and not later than the 20th (twentieth) of the first month of the following quarter. The Coklit Minutes must be signed by the

ditandatangani oleh para pihak dan kode billing diserahkan oleh Pihak Pertama kepada pihak kedua.

6. Melaksanakan kegiatan Audit Laporan Keuangan Tahunan secara menyeluruh selambat lambatnya tanggal 14 (empat belas) April tahun berikutnya dengan Auditor Independen yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- d. Pelaporan
1. Pihak Kedua wajib melaporkan kepada pihak pertama meliputi berupa laporan pemenuhan standar kinerja operasional pelabuhan, laporan pelaksanaan pungutan tarif jasa kepelabuhanan dan data kegiatan serta laporan pendapatan atas pelaksanaan perusahaan jasa kepelabuhanan berdasarkan format dan blanko yang telah disepakati para pihak sebagaimana dalam lampiran perjanjian konsesi.
 2. Pihak kedua wajib menyampaikan surat pengantar dan/atau laporan pendapatan setiap bulan secara resmi yang ditandatangani dan/atau menggunakan barcode oleh masing-masing General Manager (GM) dilingkungan kerja Pihak kedua kepada pihak pertama paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
 3. Para pihak dalam menyampaikan surat pengantar dan/atau laporan pendapatan setiap bulannya dapat melalui surat elektronik (E-mail) dari masing-masing cabang/unit kerja dilingkungan kerja pihak kedua dari dan/atau ke pihak pertama
 4. Pihak kedua wajib menyampaikan kepada pihak pertama laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Auditor Independen yang ditunjuk oleh Pihak kedua selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun berikutnya.
- e. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama
- Dalam Jangka waktu 360 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Konsesi Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan menyelesaikan proses pengalihan Aset dan proses perusahaan Terminal dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

parties and the billing code submitted by the First Party to the second party.

6. *Carry out comprehensive Annual Financial Report Audit activities no later than 14 (fourteen) of April of the following year with an Independent Auditor appointed by the Second Party.*

d. Reporting

1. *The Second Party is obliged to report to the first party in the form of reports on the fulfillment of port operational performance standards, reports on the implementation of port service charges and activity data as well as income reports on the implementation of port service operations based on the format and form agreed by the parties as in the attachment to the concession agreement.*
2. *The second party is obliged to submit a letter of replacement and/or income statement every month officially signed and/or using a barcode by the respective General Manager (GM) of the Second Party's work environment to the First Party no later than the 10th of each month.*
3. *The Parties may submit monthly cover letters and/or income reports via electronic mail (E-mail) from each branch/work unit within the second party's work environment from and / or to the first party*
4. *The second party must submit to the first party an annual financial report that has been audited by an Independent Auditor appointed by the Second Party by no later than April 30 of the following year.*

e. End of Cooperation Agreement

Within the period of 360 days prior to the expiration of the concession period, the Parties must take the necessary steps to terminate the Cooperation Agreement and complete the transfer of Assets and the process of operating the Terminal from the Second Party to the First Party.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

39. Kontinjensi

39. Contingencies

Perusahaan

a. Berdasarkan Surat Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) kepada Pendiri dan Mitra Pendiri No. UM.2/17/10/1/DP4-19 tanggal 17 Oktober 2019 Perihal Kinerja, luran dan Evaluasi Program Pensiun DP4, bahwa sejak tahun 2013 RKD DP4 mengalami penurunan sampai saat ini, karena kegagalan dalam penempatan investasi. Dimana telah ditanggapi melalui Surat Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) kepada Direktur Utama DP4 No. KP.30/2/7/PI-19 tanggal 6 Nopember 2019 Perihal Kinerja, luran dan Evaluasi Program Pensiun DP4, Pelindo I (Persero) meminta DP4 untuk melakukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Audit Investigasi terkait kajian investasi terhadap pembelian tanah, penyertaan modal pada anak perusahaan PT Indoport Prima dan Indoport Utama.
2. Melakukan appraisal atas 4 (empat) bidang tanah di Sawangan, Jagaraksa, Salatiga dan Jakabaring.
3. Melakukan upaya hukum atas kesalahan investasi.

Selanjutnya dilakukan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Direktur SDM Pelindo I, II, III, IV tanggal 30 Juni 2020 telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas pengelolaan DP4 tahun 2012 s.d 2019
2. Disepakati untuk perhitungan Valuasi Aktuaria tahun 2018 dan 2019 adalah suku bunga teknis sebesar 9,85 dan tabel mortalitas GAM71

DP4 mengirim surat ke Pendiri dan Mitra Pendiri sesuai surat No. UM.2/14/9/1/DP4-20 tanggal 14 September 2020 Perihal Persetujuan Laporan Valuasi Aktuaria Tahun 2018 (Perubahan Asumsi). Berdasarkan valuasi Dana Pensiun oleh aktuaris untuk tahun 2018 terdapat kekurangan (defisit solvabilitas) pada DP4, untuk porsi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebesar Rp108,3 milyar.

Pada September 2020, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah mengirimkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran luran berdasarkan Valuasi Tahun 2018. Namun Pelindo III dan Pelindo IV, belum

The Company

a. Based on the Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Letter to the Founders and Founding Partners No. UM.2/17/10/1/DP4-19 dated October 17, 2019 Regarding Performance, Fees and Evaluation of the DP4 Pension Program, that since 2013 RKD DP4 has decreased until now, due to failure in investment placement. Whereas has been responded through letter of Finance Director of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to the President Director of DP4 No. KP.30/2/7/PI-19 dated November 6, 2019 Regarding Performance, Contribution and Evaluation of the DP4 Pension Program, Pelindo I (Persero) asked DP4 to take the following steps:

1. Conducting an Investigative Audit related to investment studies on land purchases, equity participation in the subsidiaries of PT Indoport Prima and Indoport Utama.
2. Conducting appraisal on 4 (four) plots of land in Sawangan, Jagaraksa, Salatiga and Jakabaring.
3. Taking a legal action towards investment mistakes.

Furthermore, a Coordination Meeting was held which was attended by the HR Directors of Pelindo I, II, III, IV on June 30, 2020, having agreed on the following matters:

1. A Specific Purpose Audit (ATT) will be conducted on the management of DP4 from 2012 to 2019
2. It was agreed that for the 2018 and 2019 Actuarial Valuation calculations, the technical interest rate was 9.85 and the GAM71 mortality table

DP4 sent a letter to the Founder and Founding Partners in accordance with letter No. UM.2/14/9/1/DP4-20 dated September 14, 2020 regarding Approval of the 2018 Actuarial Valuation Report (Change in Assumptions). Based on the pension fund valuation by actuaries for 2018 there is a deficit (solvency deficit) in DP4, for the portion of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is Rp108.3 billion.

In September 2020, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has sent a Declaration Ability to Pay Contribution based on the 2018 Valuation. However, Pelindo III and Pelindo IV have not signed a declaration of commitment to

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

menandatangani pernyataan Kesanggupan iuran berdasarkan Valuasi Aktuaria Tahun 2018.

Sesuai Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-555/NB.212/2020 tanggal 1 Nopember 2020 Perihal Pengelolaan Dana Pensiun, menyatakan DP4 belum menyerahkan Laporan Valuasi Aktuaria tahun 2018, 2019 dan Laporan Keuangan Auditan tahun 2019.

Berdasarkan hasil temuan Audit Tujuan Tertentu dari BPKP sesuai dengan Laporan BPKP No. LHATT -11/D502/2/2020 tanggal 14 Desember 2020, pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Kesalahan dalam Pengelolaan investasi Dana Pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) diantaranya terdapat kerugian investasi surat berharga negara (SBN) sebesar Rp2,9 milyar, kerugian atas pelepasan dua rekasadana Pratama Dana Investasi Saham (PDIS) dan Reksadana Pratama Dana Andalan Saham (PDAS) sebesar Rp120,6 milyar serta penempatan dana pendirian anak perusahaan sebesar Rp89,9 milyar dan investasi tanah di Tigaraksa sebesar Rp141,6 milyar yang tidak memberikan return.
2. Indikasi adanya *Fraud* dalam Penempatan Dana Investasi diantaranya terdapat kelebihan pembayaran atas pembelian Tanah di Salatiga sebesar Rp2,2 milyar serta indikasi kemahalan harga pembelian tanah seluas 217.124 m² di Tigaraksa sebesar Rp30.3 milyar.
3. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan diantaranya harga wajar reksadana *Insight Peduli* sebesar Rp 88,3 milyar dan Reksadana *Insight Community* sebesar Rp99,2 milyar, likuidasi atas penempatan Investasi pada Reksadana Harvestindo sebesar Rp11,9 milyar dan penempatan pada Reksadana Penyertaan terbatas (RDPT) Indosurya Syariah mengalami gagal bayar dan Penurunan kekayaan untuk pendanaan (KUP) berisiko pada gagal bayar manfaat pensiun serta penempatan Investasi pada portfolio saham setiap tahun mengalami penurunan nilai rata-rata 88,14%.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

contribute based on the 2018 Actuarial Valuation.

In accordance with the Financial Services Authority Letter No. S-555/NB.212/2020 dated November 1, 2020 regarding Pension Fund Management, it states that DP4 has not submitted the 2018, 2019 Actuarial Valuation Report and the 2019 Audited Financial Statements..

Based on the findings of the Audit of Specific Objectives from the BPKP in accordance with the BPKP Report No. LHATT-11/D502/2/2020 dated December 14, 2020, in principal it states that:

1. Mistakes in the management of pension fund investments in Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) include a loss of investment in government securities (SBN) of Rp2.9 billion, a loss on the release of two rekasadana Pratama Equity Investment Fund (PDIS) and Pratama Mutual Funds Andalan Stocks (PDAS) amounting to Rp120.6 billion and the placement of funds for the establishment of a subsidiary amounting to Rp89.9 billion and land investment in Tigaraksa amounting to Rp141.6 billion which does not provide return.
2. Indications of fraud in the Placement of Investment Funds include overpayments for the purchase of land in Salatiga of Rp2,2 billion and indications of overpriced land purchase prices for land area of 217,124 sqm in Tigaraksa amounting to Rp30.3 billion.
3. Other things that need to be considered include the fair price of *Insight Peduli* mutual funds of Rp88.3 billion and *Insight Community* mutual funds of Rp99.2 billion, liquidation of investment placements in Harvestindo mutual funds of Rp11.9 billion and placement in limited participation mutual funds (RDPT) Indosurya Syariah experienced default and decreased wealth for funding (KUP) was at risk of default on pension benefits and investment placements in the stock portfolio each year experienced a decline in value by an average of 88.14%.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Simpulan Hasil ATT diatas BPKP merekomendasikan untuk menindaklanjuti indikasi *fraud*, melakukan *due diligence* atas penempatan investasi pada anak perusahaan, menjaga agar dana pensiun berada dalam keadaan Dana Terpenuhi, dengan memperhatikan kewajiban pembayaran defisit pendanaan dll.

Berdasarkan Laporan BPKP tersebut dilakukan Rapat Koordinasi Tim Teknis DP4 dalam rangka memberikan masukan SE Kementerian BUMN tentang Prinsip Investasi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, disampaikan Usulan Agar dilakukan pembahasan terkait Laporan hasil Audit Tujuan Tertentu dari BPKP.

Dampak dari kesalahan investasi aset tersebut akan berpengaruh besar terhadap posisi pendanaan DP4. Untuk itu sebagaimana ketentuan OJK dan Peraturan Dana Pensiun maka pendiri dan mitra pendiri dana pension harus berkomitmen penuh untuk mengatasi persoalan tersebut untuk menjaga dan melindungi kepentingan seluruh peserta DP4.

- b. Perusahaan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali PBB kepada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berdasarkan surat sebagai berikut:
1. Surat No. KU.62/5/12/Blw-18 tanggal 4 Juni 2018 perihal Permohonan Peninjauan Kembali PBB Tahun 2018.
 2. Surat No. KU.62/5/5/Blw-19 tanggal 16 Juli 2019 perihal Permohonan Peninjauan dan Pengurangan PBB Terhutang 2019.
 3. Surat No. KU.62/1/6/Blw-20 tanggal 21 Januari 2020 perihal Permohonan Peninjauan dan Pengurangan PBB Tahun 2020.

Perusahaan juga telah mendapatkan jawaban dan juga menyelenggarakan rapat dengan Tim Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, namun belum sepakat dengan BPPRD terkait peninjauan Kembali PBB tersebut.

Perusahaan mengirimkan surat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. KU.62/4/3/PI-20 tanggal 30 Juli 2020 perihal Permohonan Pendapat, Reviu dan

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Based on the ATT Result Conclusions above, BPKP recommends to following up fraud indications, conducting due diligence on investment placements in subsidiaries, keeping pension funds in a Fulfilled Fund state, by taking into account the obligation to pay deficit funding etc.

Based on the BPKP Report, a DP4 Technical Team Coordination Meeting was held in order to provide input from the Minister of BUMN regarding Investment Principles in Management of Pension Funds for Defined Benefit Pension Programs within the Ministry of State-Owned Enterprises, Suggestions for discussions regarding the Audit Report of Specific Objectives from BPKP.

The impact of the investment mistakes in these assets will have a major effect on the funding position of DP4. For this reason, as stipulated by the OJK and the Pension Fund Regulations, the founders and partners founding pension funds shall fully committed to overcoming this problem to safeguard and protect the interests of all DP4 participants.

- b. *The Company has submitted an application for PBB reconsideration to the Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan based on the letter as follows:*
1. *Letter No. KU.62/5/12/Blw-18 dated June 4, 2018 regarding the 2018 UN Review Application.*
 2. *Letter No. KU.62/5/5/Blw-19 dated July 16, 2019 regarding the 2019 UN Debt Review and Reduction Application.*
 3. *Letter No. KU.62/1/6/Blw-20 dated January 21, 2020 regarding the UN Review and Reduction Application Year 2020.*

The company has also received answers and also held a meeting with the Medan City Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) Team, but has not agreed with the BPPRD regarding the PBB review.

The company sent a letter to the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Representative of North Sumatra Province No. KU.62/4/3/PI-20 dated July 30, 2020 regarding requests for opinions, reviews and

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pendampingan atas Tagihan PBB PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan. BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah memberikan Pendapat dan Saran atas Tagihan PBB PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan Tahun 2018, 2019 dan 2020 berdasarkan Lapornya No. S-1281/PW2/4.1/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang menyatakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bahwa Perusahaan sudah tidak menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas areal perairan Alur Laut, dan saat ini telah dikenakan PNBP oleh Otoritas Pelabuhan berupa Jasa Pemanduan dan Jasa Penundaan dari pemanfaatan areal atas dan bawah perairan Alur Laut, serta Jasa Labuh.
2. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 1982 tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) Belawan, bahwa DLKr seluas 2.217,95 Ha, bukan merupakan objek Bumi dalam penetapan SPPT PBB Perusahaan, karena masih merupakan Kawasan yang diperuntukan bagi Kementerian Perhubungan. Peruntukan lahan yang akan diusahakan Perusahaan dialokasikan tersendiri dan telah diterbitkan HPL-nya oleh BPN, yaitu seluas 289,36 Ha (2.893.600 m²) dan telah tercatat dalam Daftar Aset Tetap Perusahaan Cabang Belawan, sehingga luasan areal bumi, perairan dan bangunan yang menjadi objek PBB adalah sebagai berikut:

No	Obyek Pajak Bumi Bangunan/ <i>Object of Land and Building Tax</i>	Tahun/ Luas (m ²) / Year/ Area		
		2018	2019	2020
1	Bumi/ <i>Land</i> (HPL)	2,893,600	2,893,600	2,893,600
2	Wilayah Perairan/ <i>Territorial Waters</i> (Kolam Pelabuhan/ <i>Harbour Pond</i>)	626,310	626,310	626,310
	Total Luasan Bumi dan Perairan	3,519,910	3,519,910	3,519,910
3	Bangunan/ <i>Building</i>	384,969	404,884	411,981

3. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Perusahaan telah memperoleh 2 Nomor Objek Pajak (NOP). Luasan objek Bumi

assistance on PBB bills for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan Branch. BPKP Representatives of North Sumatra Province have provided Opinions and Suggestions on the Belawan Branch of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan Branch PBB Bills in 2018, 2019 and 2020 based on its Report No. S-1281/PW2/4.1/2020 dated December 22, 2020, which stated the following conclusions:

1. Based on PP. 15 of 2016 concerning Types and Rates of Types of Non-Tax State Revenue (PNBP), that the Company does not control and / or benefit from the sea lane area, and is currently subject to PNBP by the Port Authority in the form of Guiding Services and Postponing Services from utilization the upper and lower areas of the Sea Channel waters, as well as Labuh Services.
2. Based on the Joint Decree of the Minister of Home Affairs and the Minister of Transportation No. 14 of 1982 concerning the Boundaries of the Port Work Environment Area (DLKr) of Belawan, that DLKr covering an area of 2,217.95 Ha, is not a Land object in the determination of the Company PBB SPPT, because it is still an area designated for the Ministry of Transportation. The allocation of land to be cultivated by the Company is allocated separately and the HPL has been issued by BPN, which is an area of 289.36 Ha (2,893,600 sqm) and has been recorded in the Belawan Branch Company Fixed Asset List, so that the area of land, waters and buildings that become UN objects are as follows:

3. Based on Law no. 12 of 1985 concerning the Land and Building Taxes, Law no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions and Regional Regulation of the City of Medan No. 3 of 2011 concerning Rural and Urban Land and Building Tax, the company has obtained 2 Tax Object Numbers (NOPs).

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

dan Bangunan yang ditetapkan oleh BPPRD Kota Medan dalam SPPT PBB Tahun 2018 sampai dengan 2020, masing-masing bumi dan perairan seluas 101.769.308 m² dan bangunan seluas 382.211 m², serta masuk dalam kelas 082 dengan tarif NJOP Rp82.000/m² untuk bumi dan kelas 016 dengan tarif NJOP Rp3.100.000/m² untuk bangunan.

Memenuhi seluruh ketentuan di atas dan berdasarkan data luasan obyek bumi/ perairan dan bangunan yang dimiliki Perusahaan, BPKP menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan luasan bangunan dalam SPPT PBB, sebagai berikut:

- Luasan bumi/ perairan yang tertulis seluas 98.249.398 m² seharusnya seluas 3.519.910 m².
- Luasan bangunan untuk tahun 2018 sampai dengan 2020 yang tertulis masing-masing seluas 2.758 m², 22.673 m² dan 29.770 m² seharusnya masing-masing seluas 384.969 m², 404.884 m² dan 44.981 m².

Kelebihan perhitungan luasan obyek bangunan/ perairan dan kekurangan perhitungan luasan bangunan dalam penetapan SPPT PBB tersebut, mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB sebesar Rp56.479.833.732 dan kelebihan perhitungan SPPT PBB Tahun 2020 tagihan kedua sebesar Rp9.515.430.386.

Atas kelebihan pembayaran PBB Tahun 2018 – 2020 tersebut, Perusahaan akan mengajukan pengembalian kepada BPPRD dan mencatat sebagai Estimasi Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan dalam akun Aset Tidak Lancar Lainnya (Catatan 14).

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The area of land and building objects determined by the BPPRD of Medan City in SPPT PBB 2018 to 2020, respectively land and water covering an area of 101,769,308 sqm and buildings covering an area of 382,211 sqm, and included in class 082 with a NJOP rate of Rp82,000 / sqm for earth and class 016 with NJOP rate of Rp3,100,000 / sqm for buildings.

In compliance with all the provisions above and based on data area on land/ water and buildings object owned by the Company, BPKP concluded that there were differences in land/ water and building area in the SPPT PBB, as follows:

- The area of land/ waters written as 98,249,398 sqm be supposed 3,519,910 sqm.
- The building area for 2018 to 2020 written as 2,758 sqm, 22,673 sqm and 29,770 sqm, respectively, be supposed 384,969 sqm, 404,884 sqm and 44,981 sqm respectively.

The excess calculation of the area of the building / water object and the lack of calculation of the area of the building in the determination of the PBB SPPT resulted in an overpayment of PBB amounting to Rp56,479,833,732 and an excess calculation of the PBB SPPT 2020 for the second bill of Rp9,515,430,386.

For the overpayment of PBB for 2018 - 2020, the Company will submit a refund to BPPRD and record it as an Estimated Land and Building Tax Bill in the Other Non-current Asset account (Note 14).

40. Peristiwa Hukum

- a. Perkara Perdata No. 728/Pdt.G/2016/PN.Mdn dengan Tjahaya sebagai Penggugat lawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Tergugat I terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kehilangan *reefer part* petikemas pada area PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang menyebabkan kerugian terhadap CV Sumatera Sejahtera. Adapun Putusan pada tingkat Pertama adalah Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp2.002.000.000 dan saat ini perkara dimaksud dalam proses banding di Peradilan Tinggi Medan.

40. Legal Lawsuits

- a. Civil Case No. 728/Pdt.G/2016/PN.Mdn with Tjahaya as Plaintiff against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as Defendant I related to Lawsuit Against Laws over the loss of container *reefer parts* in the area of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) which causing losses to CV Sumatera Sejahtera. The verdict at the first level penalize the Defendant to provide compensation amounting to Rp2,002,000,000. Currently, the case is referred to in the appeal process in the Medan High Court.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Perkara No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pengembalian *Down Payment* (DP) yang telah diserahkan oleh CV SAA Inti Karya Tehnik sebesar Rp240.709.000. Saat ini sudah *inkracht*/selesai namun belum diperoleh surat perintah eksekusi.
- c. Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan No. 43/TUN/2009/PTUN-Mdn tanggal 25 Agustus 2009 *jo.* 119/B/2009/PT.TUN-MDN tanggal 13 Januari 2010 *jo.* 152K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010 *jo.* 37 PK/TUN/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Gugatan T. Aswandin kepada Kantor Pertanahan Medan untuk pembatalan sebagian sertifikat HPL No. 1 tahun 1993 atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero):
1. Tanah seluas 66.800 m² di Jln. Bagan Deli Belawan.
 2. Tanah seluas 7.100 m² di Jln. Pelabuhan (d/h Kampung Purwodadi) Belawan II.
 3. Tanah seluas 10 Ha di Jln Bagan Deli (d/h Kampung Skoni) Bagan Deli.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) kalah pada PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara (PT TUN), Kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Hasil peradilan yaitu:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi.
 2. Menyatakan batal Sertifikat HPL No.1/Belawan I khusus terhadap tanah Penggugat yang disebutkan di atas.
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut sertifikat HPL No. 1/Belawan I khusus terhadap tanah Penggugat.
- d. Perkara No. 281/Pdt.G/2018/PN.Mdn tentang Gugatan wanprestasi (cidera janji) atas Perjanjian Kerjasama No. UM.58/41//18/P.I-04 – 001/AGR/PI-MI/04 tanggal 26 November 2004 antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Metito Indonesia tentang Kerjasama Operasi Pengusahaan Air Minum di Pelabuhan Belawan, Dumai, dan Tanjung Balai Karimun. Persidangan menunggu hasil putusan dari majelis hakim dan sampai dengan saat ini belum adanya surat panggilan (relaas) pemberitahuan putusan.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- b. Case No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn regarding *Lawsuits Against the Law for the Return of Down Payment (DP)* which has been submitted by CV SAA Inti Karya Tehnik in the amount of Rp240,709,000. Currently, *inkracht* has been completed but no execution warrant has been obtained.
- c. Medan State Administrative Court (PTUN) Lawsuit No. 43/TUN/2009/PTUN-Mdn on August 25, 2009 *jo.* 119/B/2009/PT.TUN-MDN dated January 13, 2010 *jo.* 152K/TUN/2010 September 28, 2010 *jo.* 37 PK/TUN/2013 dated April 24, 2013 concerning the lawsuit of T. Aswandin to the Medan Land Office for the partial cancellation of HPL certificate No. 1 of 1993 on behalf of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero):
1. Land area of 66,800 sqm on St. Belawan Deli Chart.
 2. Land area of 7,100 sqm on St. Pelabuhan (d/h Kampung Purwodadi) Belawan II.
 3. Land area of 10 Ha on St. Bagan Deli (d/h Kampung Skoni) Bagan Deli.

The National Land Agency (BPN) and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) lost to the PTUN, the State Administrative Court (PT TUN), Cassation and Review (PK) in the Supreme Court (MA). Judicial results are:

1. Refuse an appeal for cassation.
 2. Declares void HPL Certificate No. 1/Belawan I specifically for the Plaintiff's land mentioned above.
 3. Ordered the Defendant to revoke the HPL No. 1/Belawan I certificate specifically against the Plaintiff's land.
- d. Case No. 281/Pdt.G/2018/PN.Mdn regarding breach of default (breach of contract) for Cooperation Agreement No. UM.58/41/18/PI-04-001/AGR/PI-MI/04 dated November 26, 2004, between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and PT Metito Indonesia concerning the Collaboration of Drinking Water Operations at the Port of Belawan, Dumai, and Tanjung Balai Karimun. The trial still awaits the decision result of the panel of judges and to date, there has been no summons (notification) of the decision.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- e. Perkara Perdata No. 672/Pdt.G/2018/PN. Mdn tanggal 08 Oktober 2018 dengan Tamrin selaku Penggugat lawan Agung Rachman Hidayat selaku Tergugat I dan Yarham Harid selaku Tergugat II terkait Pembatalan surat perjanjian No. B.VII-518/BLW-US.25 tanggal 26 September 2018 untuk melakukan kerjasama penggunaan lahan di jalan Indrapura Ujung (samping dermaga Kesatuan Penjagaan Laut & Pantai (KPLP)) dengan luas lahan yang akan digunakan adalah 895,59 m². Atas hal tersebut, Penggugat mengklaim telah menjalankan usaha CV Kepiting Bang Tamrin Dermaga Seafood selama 5 tahun. Telah adanya putusan dari majelis hakim, yang memutus bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- f. Perkara No. 95/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn tentang prosedur pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hak. Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan berkas Kasasi ke Mahkamah Agung.
- g. Perkara No. 40/Pdt.G/2018/PN.Kis antara Asminah Sitorus selaku Penggugat lawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Tergugat II tentang kepemilikan atas tanah seluas 10.000 m² di Dusun II Alai Desa Kuala Tanjung, Perwakilan Kecamatan Sei Suka, dahulu Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Telah adanya putusan dari PN Kisaran, dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Perkara telah *inkracht*/selesai.
- h. Perkara No. 49/Pdt.G/2018/PN.Kis antara Nurasiah Dkk, selaku Penggugat lawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Tergugat IV tentang kepemilikan atas tanah seluas ±447 m² di Dusun III Alai Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, dahulu Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Telah adanya putusan dari PN Kisaran, dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Perkara ini telah *inkracht*/selesai.
- i. Perkara No. 56/Pdt.G/2018/PN.Kis tentang Keberatan atas Penetapan Konsinyasi atas lahan seluas ±21.481,16 m² berlokasi di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara. Adanya pencabutan pemeriksaan tingkat kasasi perkara oleh Penggugat sehingga perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap.
- e. *Civil Case No. 672/Pdt.G/2018/PN.Mdn dated October 8, 2018, with Tamrin as the Plaintiff against Agung Rachman Hidayat as Defendant I and Yarham Harid as Defendant II related to the cancellation of agreement letter No. B.VII-518/BLW-US.25 dated September 26, 2018, to conduct land use cooperation on the Indrapura Ujung road (next to the Pier of the Sea & Coast Guard Unit) with an area of land to be used is 895.59 m². For this matter, the Plaintiff claimed to have been running the business of Crab Bang Tamrin Pier Seafood for 5 years. There has been a decision from the panel of judges, who decided that the Plaintiff's claim could not be accepted.*
- f. *Case No. 95/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn concerning procedures for termination of employment and disputes of rights. Medan District Court (PN) has sent an appeal file to the Supreme Court.*
- g. *Case No. 40/Pdt.G/2018/PN.Kis between Asminah Sitorus as Plaintiff against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as to Defendant II regarding ownership of 10,000 m² of land in Alai Hamlet II in Kuala Tanjung Village, Representative of Sei Suka District, formerly Asahan District now Batubara Regency, North Sumatra Province. There has been a decision from the Kisaran District Court, with the verdict rejecting the Plaintiff's claim in its entirety. The case has been *inkracht*/finished.*
- h. *Case No. 49/Pdt.G/2018/PN.Kis between Nurasiah et al, as Plaintiffs against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as to Defendant IV regarding ownership of ± 447 m² of land in Hamlet III Alai, Kuala Tanjung Village, Sei Suka District, formerly Asahan Regency, now Batubara Regency, North Sumatra Province. There has been a decision from the Kisaran District Court, with the verdict rejecting the Plaintiff's claim in its entirety. This case has been *inkracht* / finished.*
- i. *Case No. 56/Pdt.G/2018/PN.Kis regarding Objection on the Consignment Establishment of ±21,481.16 m² located in Kuala Tanjung Village, Sei Suka District, Batubara District. The Plaintiff has revoked the case review rate so that the case in question has permanent legal force.*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- j. Perkara No. 6/Pdt.G/2018/PN.Dum tanggal 07 Februari 2018 antara PT Dahlia Bina Utama lawan General Manager Cabang Dumai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Kantor Pusat PT Pelindo I selaku Tergugat III dan IV tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penerbitan Telegram Kementerian Perhubungan cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. 65/VI/DM/17 tanggal 16 Juni 2017 dan Surat Edaran No. 50/16/20/DUM.17.TU tanggal 8 September 2017. Saat ini diajukan upaya hukum Kasasi oleh Penggugat ke Mahkamah Agung RI.
- k. Perkara Perdata No. 672/Pdt.G/2019/PN. Mdn antara Tamrin sebagai Penggugat lawan Agung Rachman Hidayat (Tergugat I) dan Yarham Harid sebagai General Manager Cabang Belawan (Tergugat II). Dengan Objek Gugatan adalah atas kerjasama pemanfaatan lahan milik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang terletak di Jalan Indra Pura No. 14 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan, provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan Agung Rachman, yang dengan adanya kerjasama tersebut Penggugat (CV Kepiting Bang Tamrin) merasa dirugikan. Posisi Terakhir saat ini adalah penggugat melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI atas putusan tingkat banding dari PT Medan.
- l. Perkara Perdata No. 95/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn antara Muhammad Rajab Parinduri dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Tergugat dengan objek gugatan mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hak. Telah adanya Putusan Kasasi MA RI yang pada intinya menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan M. Rajab Fandi Parinduri. Bahwa PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) juga harus membayarkan kepada M. Rajab Fandi Parinduri kekurangan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak seluruhnya sebesar Rp28.140.400.
- m. Perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2019/PN. Tpg antara Roland P. Sinaga sebagai Penggugat lawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terkait Kepemilikan atas tanah seluas 100 M x 200 M atau seluas 30.000 M² yang terletak di Jl. Korindo, Kel. Sei Lekop, Kec. Bintang Timur, Kab. Bintang, Provinsi Kepri. Posisi perkara saat ini telah adanya putusan Pengadilan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat (Roland Sinaga, Dkk) seluruhnya.
- j. Case No. 6/Pdt.G/2018/PN.Dum dated February 7, 2018, between PT Dahlia Bina Utama against General Manager of the Dumai Branch of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and the Central Office of PT Pelindo I as Defendants III and IV concerning the Lawsuit Against the Law against the Telegram Issuance of the Ministry of Transportation cq. Director-General of Sea Transportation No. 65/VI/DM/17 dated June 16, 2017, and Circular No. 50/16/20/DUM.17.TU dated September 8, 2017. At this time the Plaintiff's legal action has been submitted to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
- k. Civil Case No. 672/Pdt.G/2019/PN. Mdn between Tamrin as Plaintiff against Agung Rachman Hidayat (Defendant I) and Yarham Harid as General Manager of Belawan Branch (Defendant II). With the object of the Lawsuit is the cooperation in the use of land owned by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) which is located on Jalan Indra Pura No. 14 Ex. Belawan I Kec. Medan Belawan Medan City, North Sumatra province, which was carried out by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with Agung Rachman, through which the Plaintiff (CV Kepiting Bang Tamrin) felt aggrieved. The latest position is the plaintiff filed for an Cassation appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia over the decision on the appeal level from PT Medan.
- l. Civil Case No. 95/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn between Muhammad Rajab Parinduri as the Plaintiff against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as the Defendant with the object of lawsuit concerning procedures for employment termination and disputes over rights. There has been a Supreme Court Cassation Decision which stated the Termination of Work Relations between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and M. Rajab Fandi Parinduri. The injunction states that PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) also has to pay M. Rajab Fandi Parinduri shortage of severance pay, tenure awards, compensation for rights at total amount of Rp28,140,400.
- m. Civil Case No. 19/Pdt.G/2019/PN. Tpg between Roland P. Sinaga as the Plaintiff against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) concerning about land ownership with an area of 100 M x 200 M or an area of 30,000 M² that is located on Jl. Korindo, Kel. Sei Lekop, Kec. East Bintang, Kab. Bintang, Kepri Province. The current case position is that there is a Court Verdict stating that the Plaintiff (Roland Sinaga, Dkk) claim is completely rejected.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- n. Perkara Perdata No. 281/Pdt.G/2019/PN. Mdn antara PT Metito Indonesia sebagai Penggugat lawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Tergugat dengan objek gugatan dugaan wanprestasi (cidera janji) atas Perjanjian Kerjasama No. UM.58/41//18/P.I-04 - 001/AGR/PI-MI/04 tanggal 26 November 2004 antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Metito Indonesia tentang Kerjasama Operasi Pengusahaan Air Minum di Pelabuhan Belawan, Dumai, dan Tanjung Balai Karimun. Posisi perkara saat ini adanya perlawanan hukum Banding oleh Penggugat.
- o. Perkara No. 19/Pdt.G/2019/PN.Tpg tentang kepemilikan atas tanah seluas 100 M x 200 M atau seluas 30.000 M² yang terletak di Jl. Korindo, Kel. Sei Lekop, Kec. Bintang Timur, Kab. Bintang, Provinsi Kepri. Agenda persidangan terakhir adalah pemeriksaan saksi Penggugat.
- p. Perkara No. 27/Pdt.G/2019/PN.Bna atas keputusan Tergugat I yang menyatakan kendaraan yang diakui Penggugat beserta teman-temannya sebagai kepemilikannya menjadi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Keputusan tergugat I (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh) No. kep-48/WBC.01/KPP.MP.02.2015 tanggal 29 Juli 2015 tentang Penetapan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai menjadi Barang Yang Menjadi Milik Negara berupa kendaraan bermotor bukan baru. Posisi perkara saat ini adanya putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).
- q. Perkara No. 661/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Penggugat, mengajukan gugatan terhadap PT Cahaya Karangetang Abadi (PT CKA) atas dugaan perbuatan melawan hukum dari PT CKA yang tidak melakukan pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah diterima oleh kapal-kapal yang diageni oleh PT CKA di Cabang Pelabuhan Dumai. Posisi perkara saat ini adanya agenda putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat (PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)) dengan putusan verstek.
- r. Perkara Perdata No. 95/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn antara Kusnan/Kusnan- II sebagai Penggugat melawan Koperasi Karyawan Maritim Indonesia (KOPKARMAR) sebagai Tergugat I dan PT Pelabuhan

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- n. *Civil Case No. 281/Pdt.G/2019/PN. Mdn between PT Metito Indonesia as the Plaintiff against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as the Defendant with the object of the lawsuit of alleged default (default) on Cooperation Agreement No. UM.58/41//18/P.I-04 - 001/AGR/PI-MI/04 dated November 26, 2004 between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with PT Metito Indonesia regarding Joint Operation for Drinking Water Concession at the Ports of Belawan, Dumai and Tanjung Balai Karimun. The latest position of the case is that the Plaintiff initiate for a legal appeal.*
- o. *Case No. 19/Pdt.G/2019/PN.Tpg regarding ownership of land covering an area of 100 M x 200 M or an area of 30,000 M² located on St. Korindo, Kelurahan Sei Lekop, Sub-district Bintang Timur, District Bintang, Riau Islands Province. The agenda of the final trial was the examination of the Plaintiff's witnesses.*
- p. *Case No. 27/Pdt.G/2019/PN.Bna on the decision of Defendant I which stated that the vehicle recognized by the Plaintiff and his friends as ownership became State Property (BMN) based on Defendant Decree I (Head of the Office of Customs and Excise Control in Banda TMP C Banda Aceh) No. kep-48/WBC.01/KPP.MP.02.2015 dated July 29, 2015, concerning Determination of Goods That Are Declared Not Mastered to become State-Owned Goods in the form of non-new motorized vehicles. The final trial agenda is Duplicate Reading.*
- q. *Case No. 661/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as the Plaintiff, filed a lawsuit against PT Cahaya Karangetang Abadi (PT CKA) for alleged unlawful acts from PT CKA that did not make payment for port services. which has been received by vessels authorized by PT CKA in the Dumai Port Branch. The current position of the case is that there is a decision agenda stating that the plaintiff's claim has been glared through default judgement.*
- r. *Civil Case No. 95/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn between Kusnan/Kusnan-II as the Plaintiff against Indonesian Maritime Employee Cooperative (KOPKARMAR) as Defendant I and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Indonesia I (Persero) sebagai Tergugat II. Dengan objek gugatan adalah mengenai Gugatan Perselisihan Hak yang menurut Penggugat timbul karena adanya pemutusan kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Tergugat II) dengan Koperasi Karyawan Maritim Indonesia (KOPKARMAR) (Tergugat I) sehingga para pekerja KOPKARMAR dialihkan kepada perusahaan lain. Pada saat proses peralihan tersebut Penggugat merasa belum menerima hak-hak nya sesuai dengan ketentuan. Posisi terakhir adalah penyerahan konklusi.

- s. Perkara Perdata No. 96/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn antara Robert Simanjuntak sebagai Penggugat melawan Koperasi Karyawan Maritim Indonesia (KOPKARMAR) sebagai Tergugat I dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Tergugat II. Dengan objek gugatan adalah mengenai Gugatan Perselisihan Hak yang menurut Penggugat timbul karena adanya pemutusan kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Tergugat II) dengan Koperasi Karyawan Maritim Indonesia (KOPKARMAR) (Tergugat I) sehingga para pekerja KOPKARMAR dialihkan kepada perusahaan lain. Pada saat proses peralihan tersebut Penggugat merasa belum menerima hak-hak nya sesuai dengan ketentuan. Posisi terakhir adalah penyerahan konklusi.

Manajemen berkeyakinan bahwa peristiwa hukum tidak berdampak material pada laporan keuangan Perusahaan.

Defendant II. The object of the lawsuit is regarding Rights Dispute which according to the Plaintiff arose due to the termination of cooperation between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Defendant II) and the Indonesian Maritime Employee Cooperative (KOPKARMAR) (Defendant I), which consequently resulting on KOPKARMAR workers being transferred to other companies. At the time of the transition process, the Plaintiff declares that he had not received his rights according to the provisions. The latest case position is submission of conclusions.

- s. *Civil Case No. 96/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn between Robert Simanjuntak as the Plaintiff against the Indonesian Maritime Employee Cooperative (KOPKARMAR) as Defendant I and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as Defendant II. With the object of the lawsuit regarding Rights Dispute which according to the Plaintiff arose due to the termination of cooperation between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Defendant II) and the Indonesian Maritime Employee Cooperative (KOPKARMAR) (Defendant I), which consequently resulting on KOPKARMAR workers being transferred to other companies. At the time of the transition process, the Plaintiff declares that he had not received his rights according to the provisions. The latest case position is submission of conclusions.*

Management believes that legal events have no material impact on the Company's financial statements.

41. Segmen Operasi

Manajemen telah menentukan segmen operasi didasarkan pada laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang digunakan dalam mengambil keputusan strategis, Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis dan geografis. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi, informasi menurut segmen sebagai berikut:

- a. Pendapatan usaha berdasarkan kegiatan utama

	Petikemas/ Container	Kepelabuhan/ Port	Lainnya/ Others	Konsolidasi/ Consolidated	
Pendapatan Usaha	1,455,387,171,802	1,605,580,268,130	780,942,830,804	3,841,910,270,736	Operating revenue
Beban Usaha	525,729,556,836	1,098,723,674,717	1,541,469,025,943	3,165,922,257,496	Operating expense
Laba (Rugi) Usaha	929,657,614,966	506,856,593,413	(760,526,195,139)	675,988,013,240	Operating Profit/(Loss)

41. Operating Segment

Management has determined the operating segment based on the reports reviewed by the Directors, which are used in making strategic decisions, the Directors consider business operations from a business and geographical perspective. Transactions across transactions between segments have been eliminated, information according to segments are as follows:

- a. *Revenues based on Main Business Activities*

2020

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2019				
	Petikemas/ Container	Kepelabuhan/ Port	Lainnya/ Others	Konsolidasi/ Consolidated	
Pendapatan Usaha	1,445,395,013,759	1,576,848,261,452	2,617,139,460,309	5,639,382,735,520	Operating revenue
Beban Usaha	584,926,778,152	1,057,924,438,690	3,398,322,336,915	5,041,173,553,757	Operating expense
Laba (Rugi) Usaha	860,468,235,607	518,923,822,762	(781,182,876,606)	598,209,181,763	Operating Profit/(Loss)

b. Aset Segmen dan Liabilitas Segmen Berdasarkan Kegiatan Utama **b. Segment Assets and Segment Liabilities Based on Main Activities**

	2020				
	Petikemas/ Container	Kepelabuhan/ Port	Lainnya/ Others	Konsolidasi/ Consolidated	
Aset					Assets
Aset Segmen	917,111,720,037	3,307,266,031,630	8,170,545,659,254	12,394,923,410,921	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan	--	--	--	3,571,218,850,865	Assets that cannot be allocated
Jumlah Aset	917,111,720,037	3,307,266,031,630	8,170,545,659,254	15,966,142,261,786	Total Assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas Segmen	131,468,788,531	621,075,894,973	4,842,534,093,259	5,595,078,776,763	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	--	--	--	4,110,530,973,731	Liabilities that cannot be allocated
Jumlah Liabilitas	131,468,788,531	621,075,894,973	4,842,534,093,259	9,705,609,750,494	Total Liabilities

	2019				
	Petikemas/ Container	Kepelabuhan/ Port	Lainnya/ Others	Konsolidasi/ Consolidated	
Aset					Assets
Aset Segmen	1,024,679,026,682	3,219,406,028,041	7,514,953,136,804	11,759,038,191,527	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan	--	--	--	4,210,333,961,384	Assets that cannot be allocated
Jumlah Aset	1,024,679,026,682	3,219,406,028,041	7,514,953,136,804	15,969,372,152,911	Total Assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas Segmen	108,452,840,502	669,002,566,032	5,051,170,827,729	5,828,626,234,263	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	--	--	--	3,945,183,976,581	Liabilities that cannot be allocated
Jumlah Liabilitas	108,452,840,502	669,002,566,032	5,051,170,827,729	9,773,810,210,844	Total Liabilities

Segmen Operasi berdasarkan wilayah geografis:

Operating Segments based on Geographical Areas:

a. Aset

a. Aseets

	2020 Rp	2019 Rp
Sumatera Utara	14,893,138,615,507	14,863,319,045,958
Riau dan/ and Kepulauan Riau	1,050,063,479,319	1,107,556,120,624
Aceh	22,940,166,960	(1,503,013,671)
Jumlah/ Total	15,966,142,261,786	15,969,372,152,911

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

b. Liabilitas

Sumatera Utara
Riau dan/ and Kepulauan Riau
Aceh
Jumlah/ Total

c. Pendapatan Usaha

Sumatera Utara
Riau dan/ and Kepulauan Riau
Aceh
Jumlah/ Total

d. Laba Usaha

Sumatera Utara
Riau dan/ and Kepulauan Riau
Aceh
Jumlah/ Total

b. Liabilities

2020 Rp	2019 Rp
9,449,663,974,266	9,476,511,247,284
238,666,872,803	284,552,083,551
17,278,903,425	12,746,880,009
9,705,609,750,494	9,773,810,210,844

c. Revenues

2020 Rp	2019 Rp
2,875,863,398,383	4,708,067,152,326
926,514,037,748	892,183,881,458
39,532,834,605	39,131,701,736
3,841,910,270,736	5,639,382,735,520

d. Net Profit

2020 Rp	2019 Rp
365,038,905,629	282,365,765,354
313,443,140,263	313,053,009,020
(2,494,032,652)	2,790,407,389
675,988,013,240	598,209,181,763

42. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Perusahaan

Perusahaan menerima Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.CB2/293/2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. B.153-SJK/SJS/02/2021 dan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BIN/2.4/078, yang secara bersama-sama disebut *Joint Mandated Lead Arranger*, masing-masing pada tanggal 18 Februari 2021 perihal Surat Indikatif Penawaran Pemberian Kredit atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Penawaran pemberian fasilitas kredit *term loan* maksimal sebesar Rp5 Triliun dengan tujuan penggunaan *general purposes* termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan fasilitas eksisting dan *capital expenditure* Perusahaan dengan jangka waktu fasilitas selama 10 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit.

PT Prima Terminal Petikemas

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. KP.38/1/18/PI-21.TU tanggal 4 Februari 2021, memutuskan pengangkatan Rafdinal sebagai Direktur Keuangan dan Umum, menggantikan Mokhtar yang diberhentikan sebagai Direktur Keuangan dan Umum.

42. Subsequent Events

The Company

The Company received Letter from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.CB2/293/2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. B.153-SJK/SJS/02/2021 dan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BIN/2.4/078, collectively called *Joint Mandated Lead Arranger*, dated February 18, 2021, respectively, regarding of *Indicative Letter of Credit Offer on behalf of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)*. Offering a maximum term loan credit facility amounting to Rp5 trillion with general purposes but but not limited to repayment of the Company's existing facilities and capital expenditure with a facility period of 10 years from the signing of the credit agreement.

PT Prima Terminal Petikemas

Based on the Shareholders Circular Decree No. KP.38/1/18/PI-21.TU dated February 4, 2021, decided to appoint Rafdinal as Director of Finance and General, replacing Mokhtar who was dismissed as Director of Finance and General Affairs

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Prima Husada Cipta Medan

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. KP.38/2/2/PI-21.TU dan No. 9/Srt/III/KOP.KP-21 tanggal 18 Februari 2021, menyetujui keputusan pemberhentian Rudi Susanto sebagai Direktur Perusahaan dan mengangkat Imron Eryandy sebagai Direktur Perusahaan.

PT Prima Husada Cipta Medan

Based on the Shareholders Decision Outside the General Meeting of Shareholders No. KP.38/2/2/PI-21.TU and No. 9/Srt/III/KOP.KP-21 dated February 18, 2021, approved the decision to dismiss Rudi Susanto as Director of the Company and appointed Imron Eryandy as Director of the Company.

44. Reklasifikasi

44. Reclassification

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2019 dan 2018 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagai berikut:

Certain accounts of Consolidated Financial Statements in the 2019 and 2018 have been reclassified to conform with the presentation of Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2020, as follows:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019			
	Sebelum	Reklasifikasi/	Setelah	
	Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reclassification Reclassification	Reklasifikasi/ After Reclassification	
	Rp	Rp	Rp	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Piutang Usaha				Account receivables
Pihak Berelasi	32,863,292,671	(14,751,898,622)	18,111,394,049	Related Parties
Pihak Ketiga	49,867,653,599	52,711,181,492	102,578,835,091	Third Parties
Piutang Lain - lain	--	140,247,755,871	140,247,755,871	Other receivables
Aset Keuangan Lancar Lainnya	178,207,038,741	(178,207,038,741)	--	Other Current Financial Assets
Jumlah	260,937,985,011	--	260,937,985,011	Total
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset Tetap - Bersih	5,249,111,596,949	869,329,635,972	6,118,441,232,921	Fixed Assets - Net
Aset Dalam Penyelesaian	869,329,635,972	(869,329,635,972)	--	Assets Under Construction
Jumlah	6,118,441,232,921	--	6,118,441,232,921	Total
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha				Account Payables
Pihak Berelasi	56,306,817,456	141,816,028,801	198,122,846,257	Related Parties
Pihak Ketiga	1,123,998,629,991	568,575,554,068	1,692,574,184,059	Third Parties
Uang Panjar	--	6,882,913,253	6,882,913,253	Advance from Customer
Uang Titipan	--	28,794,888,017	28,794,888,017	Fund Retained
Utang Lain-lain	--	5,687,533,567	5,687,533,567	Other Payables
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	5,687,533,567	(5,687,533,567)	--	Other Short-term Financial Liabilities
Bagian Lancar dari Liabilitas Jangka Panjang:				Current Portion of Long-term Liabilities:
Pendapatan Diterima di Muka	98,504,909,646	(35,677,801,270)	62,827,108,376	Unearned Income
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,284,497,890,660	710,391,582,869	1,994,889,473,529	Total Short-Term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya				Other Long-term Financial Liabilities
Pihak Berelasi	141,816,028,802	(141,816,028,802)	--	Related Parties
Pihak Ketiga	568,575,554,067	(568,575,554,067)	--	Third Parties
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	710,391,582,869	(710,391,582,869)	--	Total Non Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	1,994,889,473,529	--	1,994,889,473,529	TOTAL LIABILITIES
	31 Desember 2018/ December 31, 2018			
	Sebelum	Reklasifikasi/	Setelah	
	Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reclassification Reclassification	Reklasifikasi/ After Reclassification	
	Rp	Rp	Rp	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Piutang Usaha				Account Receivables
Pihak Ketiga	82,381,146,735	45,963,612,300	128,344,759,035	Third Parties
Piutang Lain - lain	--	152,502,106,674	152,502,106,674	Other Receivables
Aset Keuangan Lancar Lainnya	198,465,718,974	(198,465,718,974)	--	Other Current Financial Assets
Jumlah	280,846,865,709	--	280,846,865,709	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended

December 31, 2020 and 2019

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31 Desember 2018/ December 31, 2018			
Sebelum Reklasifikasi/ Before reclassification Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Setelah Reklasifikasi/ after reclassification Rp	
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Aset Tetap - Bersih	3,196,331,883,366	2,517,909,429,525	5,714,241,312,891
Aset Dalam Penyelesaian	2,517,909,429,525	(2,517,909,429,525)	--
Jumlah	5,714,241,312,891	--	5,714,241,312,891
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha			Account Payables
Pihak Berelasi	53,506,850,534	267,998,337,793	321,505,188,327
Pihak Ketiga	582,342,297,799	871,311,093,883	1,453,653,391,682
Uang Panjar	--	9,201,376,083	9,201,376,083
Uang Titipan	--	22,354,600,138	22,354,600,138
Bagian Lancar dari Liabilitas Jangka Panjang:			Current Portion of Long-term Liabilities:
Pendapatan Diterima di Muka	74,312,072,313	(31,555,976,221)	42,756,096,092
Utang Lain-lain	--	4,170,747,659	4,170,747,659
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	4,170,747,660	(4,170,747,660)	--
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	714,331,968,306	1,139,309,431,675	1,853,641,399,981
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya			Other Long-term Financial Liabilities
Pihak Berelasi	287,207,945,000	(287,207,945,000)	--
Pihak Ketiga	852,101,486,675	(852,101,486,675)	--
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1,139,309,431,675	(1,139,309,431,675)	--
JUMLAH LIABILITAS	1,853,641,399,981	--	1,853,641,399,981

31 Desember 2019/ December 31, 2019			
Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification Rp	
Pendapatan Operasi	--	3,104,233,009,111	3,104,233,009,111
Reduksi Pendapatan	--	(186,734,654)	(186,734,654)
Pendapatan Usaha	3,104,046,274,457	(3,104,046,274,457)	--
Beban Operasi	--	2,505,837,092,694	2,505,837,092,694
Beban Pokok	1,942,982,362,949	(1,942,982,362,949)	--
Beban Pemasaran	31,112,096,589	(31,112,096,589)	--
Beban Umum dan Administrasi	531,742,633,156	(531,742,633,156)	--
Pendapatan Non-usaha - Bersih	--	(29,984,043,453)	(29,984,043,453)
Rugi Penjualan Aset Tidak Lancar Lainnya	--	(1,241,661,903)	(1,241,661,903)
Pendapatan Non-usaha	170,167,440,168	(170,167,440,168)	--
Pendapatan Keuangan	--	83,524,481,960	83,524,481,960
Beban Non-usaha	(118,890,877,639)	118,890,877,639	--
Beban Keuangan	(360,751,288,137)	(1,022,214,075)	(361,773,502,212)
Jumlah	5,300,408,641,543	--	5,300,408,641,543

31 Desember 2019/ December 31, 2019			
Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification Rp	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan Kas dari Pelanggan	3,078,864,025,692	76,047,987,951	3,154,912,013,643
Pembayaran Kepada Pemasok, Karyawan dan Lainnya	(2,273,264,483,943)	(200,516,176,687)	(2,473,780,660,630)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(124,992,827,250)	(73,406,408,722)	(198,399,235,972)
Penghasilan Bunga	--	85,557,939,556	85,557,939,556
Penerimaan Kas Lain-lain	165,904,546,213	(165,904,546,213)	--
Pembayaran Kas Kepada Karyawan dan Manajemen	(61,157,253,711)	61,157,253,711	--
Pembayaran Imbalan Pasca Kerja	(14,340,587,931)	14,340,587,931	--
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	771,013,419,070	(202,723,362,473)	568,290,056,597

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019			
	Sebelum	Reklasifikasi/	Setelah	
	Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reclassification Reclassification	Reklasifikasi/ After Reclassification	
	Rp	Rp	Rp	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Perolehan Aset Tetap, Properti				Acquisition of Fixed Assets, Investment
Investasi dan Aset Lainnya	(2,747,801,942,394)	2,065,858,959,527	(681,942,982,867)	Properties and Other Assets
Perolehan Aset Takberwujud	(177,476,871,404)	(1,643,987,979,227)	(1,821,464,850,631)	Acquisition of Intangible Assets
Pengeluaran Investasi	500,000,000	(500,000,000)	--	Investment Expenditure
Penanaman Investasi Jangka Panjang	(125,000,000)	125,000,000	--	Long-term Investments
Penghapusan Aset Takberwujud	81,816,075,950	(81,816,075,950)	--	Intangible Assets Write-Off
Penghapusan Aset Tetap	105,684,116,101	(105,684,116,101)	--	Fix Assets Write-Off
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2,737,403,621,747)	233,995,788,249	(2,503,407,833,498)	Total Net Cash Flows Used for Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan Pinjaman Bank	2,386,297,848,190	162,340,520,510	2,548,638,368,700	Receipt of Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank	(17,992,184,312)	(176,481,050,302)	(194,473,234,614)	Payment of Bank Loans
Pembayaran Beban Keuangan	(342,205,990,032)	(18,545,298,105)	(360,751,288,137)	Payment of Financial Expenses
Penerimaan Setoran Modal pada Entitas Anak	79,319,923,273	(119,923,273)	79,200,000,000	Receipt of Paid-in Capital in Subsidiaries
Pembayaran Dividen	(320,668,325,394)	1,533,325,394	(319,135,000,000)	Payment of Dividend
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1,784,751,271,725	(31,272,425,776)	1,753,478,845,949	Total Net Cash Flows Provided from Financing Activities
Jumlah Arus Kas Bersih	(181,638,930,952)	--	(181,638,930,952)	Total Net Cash Flows

45. Informasi Penting Lainnya

Undang-Undang Cipta Kerja

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi menerbitkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Perpres berupa aturan turunan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 sebagai Undang-Undang No. 11/2020. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian diotorisasi, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

45. Other Important Information

Job Creation Law

In February 2021, the Government officially issued 45 Government Regulations (PP) and 4 Perpres in the form of delegated legislation of the Job Creation Law which was previously ratified on November 2, 2020 as Law No. 11/2020. As at the authorisation date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of the implementing regulations of the Job Creation Law, as well as the impact on the Group's consolidated financial statements.

46. Standar Akuntansi yang Sudah Diterbitkan namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 73 (Amandemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19.

46. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2020.

Amendments to standard effective for periods beginning on or after June 1, 2020, with early adoption is permitted is:

- PSAK 73 (Amendment 2020): Leases regarding Rent Concessions related to Covid-19.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf";
- PSAK 22 (Amendemen 2019): "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis".
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2.

Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual; dan
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

**47. Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan
Laporan Keuangan Konsolidasian**

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi Direksi untuk terbit tanggal 27 Februari 2021.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows :

- PSAK 112: "Accounting for Endowments";
- PSAK 22 (Amendment 2019): "Business Combinations regarding Definition of Business".
- PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa'd; and
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows :

- Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks; and
- Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs

New standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows :

- PSAK 74: Insurance Contract.

Until the date of the financial statements is authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

**47. Responsibility and Issuance
Authorization of for Consolidated Financial
Statement**

The management of the Group is responsible for the preparation and content of the consolidated financial statements authorized by the Board of Directors for publication on February 27, 2021.



REFERENSI PERATURAN OJK NO. 29/POJK.04/2016:

OJK Reference No. 29/POJK.04/2016:

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Annual Report of Public Company and SEOJK NO 30/SEOJK.04/2016: Form and Content of Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Ketentuan Umum		I. General Provision
1. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	√	1. Annual Report of a listed company is one of the most important sources as the base for investors or shareholders in making investment decision, and is a means of monitoring issuers or public company
2. Seiring dengan perkembangan Pasar Modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	√	2. Along with the development of Capital Market and the growing needs of investors or shareholders regarding information disclosure, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to improve the quality of information disclosure through annual report.
3. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	√	3. Annual Report should be prepared in an orderly manner and should be informative to provide conveniences for the investors or shareholders in getting the information they need.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan.	√	4. This Circular Letter of the Financial Service Agency serves a guidelines for Issuers or Public Companies that should be applied in preparing their Annual Report.
II. Bentuk Laporan Tahunan		II. Format of Annual Re
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	√	1. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy.
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	√	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.
3. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	√	3. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into pdf format.
III. Isi Laporan Tahunan		III. Content Of Annual Report
1. Ketentuan Umum	√	1. General Provision
a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:		a. Annual Report should contain at least the following information:
1) ikhtisar data keuangan penting;	12-19	1) summary of key financial information;
2) informasi saham (jika ada);	20-21	2) stock information (if any);
3) laporan Direksi;	40-57	3) the Board of Directors report;
4) laporan Dewan Komisaris;	28-39	4) the Board of Commissioners report;
5) profil Emiten atau Perusahaan Publik;	62-182	5) profile of Issuer or Public Company;
6) analisis dan pembahasan manajemen;	186-303	6) management discussion and analyis
7) tata kelola Emiten atau Perusahaan Publi	306-530	7) corporate governance applied by the Issuer or Public Company;
8) tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	534-585	8) corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;
9) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	588-728	9) audited annual report; and
10) surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	58-59	10) statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report;
b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami;	√	b. Annual Report may present the information in form of images, charts, tables, and diagrams are presented by mentioning the title and/or clear description, that is easy to read and be understood;



Keterangan	Halaman Page	Description
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		2. Description of Content of Annual Report
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat	12-19	a. Summary of Key Financial Information Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1) pendapatan/penjualan;	√	1) income/sales;
2) laba bruto;	√	2) gross profit;
3) laba (rugi);	√	3) profit (loss);
4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√	4) total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and noncontrolling interest;
5) total laba (rugi) komprehensif;	√	5) total comprehensive profit (loss);
6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√	6) total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
7) laba (rugi) per saham;	√	7) earning (loss) per share;
8) jumlah aset;	√	8) total assets
9) jumlah liabilitas;	√	9) total liabilities;
10) jumlah ekuitas;	√	10) total equities
11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	√	11) profit (loss) to total assets ratio;
12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas	√	12) profit (loss) to equities ratio;
13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	√	13) profit (loss) to income ratio;
14) rasio lancar;	√	14) current ratio;
15) rasio liabilitas terhadap ekuitas;	√	15) liabilities to equities ratio;
16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	√	16) liabilities to total assets ratio; and
17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	√	17) other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;
b. Informasi Saham	20-21	b. Stock Information
Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:		Stock Information (if any) at least contains:
1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:		1) shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering
a) jumlah saham yang beredar;	N.A	a) number of outstanding shares;
b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan	N.A	b) market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on;
c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	N.A	c) highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and
d) volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;		d) share volume at the Stock Exchange where the shares listed on;
Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;	√	Information in point a) should be disclosed by the Issuer, the public company whose shares is listed or not listed in the Stock Exchange;
Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;	√	Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;
2) dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai	20	2) in the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on;

Keterangan	Halaman Page	Description
a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	-	a) date of corporate action;
b) rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham;	-	b) stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;
c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	-	c) number of outstanding shares prior to and after corporate action; and
d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	-	d) share price prior to and after corporate action;
3) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>), dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; dan	-	3) in the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and
4) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau penghapusan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut;	-	4) in the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;
c. Laporan Direksi	40-57	c. The Board of Directors Report
Laporan Direksi paling sedikit memuat:		The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1) uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:		1) the performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	√	a) strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;
b) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	√	b) comparison between achievement of results and targets; and
c) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c) challenges faced by the Issuer or Public Company;
2) gambaran tentang prospek usaha;	√	2) description on business prospects;
3) penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√	3) implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company; and
4) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	√	4) changes in the composition of the Board of Directors and the reason behind (if any);
d. Laporan Dewan Komisaris	28-39	d. The Board of Commissioners Report
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:		The Board of Commissioners Report should at least contain the following items
1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	√	1) assessment on the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company;
2) pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	2) supervision on the implementation of the strategy of the Issuer or Public Company;
3) pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	√	3) view on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;
4) pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	√	4) view on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;
5) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	√	5) changes in the composition of the Board of Commissioners and the reason behind (if any); and
6) frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	√	6) the frequency and procedure of providing advice to members of the Board of Directors;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik	62-182	e. Profile of the Issuer or Public Company
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:		Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1) nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	63	1) name of Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the change of name during the year under review;





Keterangan	Halaman Page	Description
2) akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi	63	2) access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a) alamat;	√	a) address;
b) nomor telepon;	√	b) telephone number;
c) nomor faksimile;	√	c) facsimile number;
d) alamat surat elektronik; dan	√	d) e-mail address; and
e) alamat Situs Web;	√	e) website address;
3) riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	64-65	3) brief history of the Issuer or Public Company;
4) visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	82-83	4) vision and mission of the Issuer or Public Company;
5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/ atau jasa yang dihasilkan;	68-69	5) line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;
6) struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	96-97	6) structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;
7) profil Direksi, paling sedikit memuat:	104-111	7) the Board of Directors profiles include:
a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	√	a) name and short description of duties and functions;
b) foto terbaru;	√	b) latest photograph
c) usia;	√	c) age;
d) kewarganegaraan	√	d) citizenship
e) riwayat pendidikan;	√	e) education;
f) riwayat jabatan, meliputi informasi	√	f) history position, covering information on:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	(1) legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	(2) dual position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan	√	g) competency enhancement education and/or training program for member of the Board of Directors during the year under review (if any); and
h) hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;	√	h) disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party;
8) profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat	98-103	8) the Board of Commissioners profiles, at least include:
a) nama;	√	a) name;
b) foto terbaru;	√	b) latest photograph;
c) usia;	√	c) age;
d) kewarganegaraan;	√	d) citizenship;
e) riwayat pendidikan;	√	e) education;
f) riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f) history position, covering information on:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	(1) legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners who is not Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
(2) dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	(2) legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
(3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	(3) dual position; as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other position (if any); and
(4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(4) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada);	√	g) competency enhancement education and/or training program for member of the Board of Commissioner during the year under review (if any);
h) hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan	√	h) affiliation with other members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party; and
i) pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	√	i) statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods (if any)
9) dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	36-38, 53-55	9) in the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;
10) jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku;	120-126	10) number of employees and description of distribution of education level and age of the employee in the year under review;
11) nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	146-147	11) names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	√	a) shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;
b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√	b) Commissioners and Directors who own shares of the Issuers or Public Company; and
c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik	√	c) groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;
12) jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	146-147	12) number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:
a) kepemilikan institusi lokal	√	a) ownership of local institutions;
b) kepemilikan institusi asing;	√	b) ownership of foreign institutions;
c) kepemilikan individu lokal; dan	√	c) ownership of local individual; and
d) kepemilikan individu asing;	√	d) ownership of foreign individual;
13) informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	147	13) information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;
14) nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada);	148-162	14) name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any);
Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;	172-173	For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;



Keterangan	Halaman Page	Description
15) kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	158	15) chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;
16) kronologi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada);	158	16) chronology of securities listing in addition to the said security in point 15), which at least should contain the name of the Securities, year of issuance, date of maturity, bid price, and rating of the securities (if any);
17) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal;	159-160	17) name and address of capital market supporting institutions and/or professionals;
18) dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	159-160	18) in the event that the capital market supporting professionals provide services on a regular basis to the Issuer or the Public Company, then information on the services provided, fee and period of assignment should be disclosed; and
19) penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	161-165	19) awards and/or certification of national and international scales bestowed on the Issuer or Public Company during the last fiscal year (if any), covering:
a) nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√	a) name of award and/or certification;
b) badan atau lembaga yang memberikan; dan	√	b) organization/institution that gives the awards; and
c) masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (kalau ada);	√	c) award/certificate validity period (if any);
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen	181-297	f. Management Discussion and Analysis
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:		Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1) tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	194-205	1) operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	√	a) production, including process, capacity, and growth;
b) pendapatan/penjualan; dan	√	b) income/sales; and
c) profitabilitas;	√	c) profitability;
2) kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	√	2) comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	181-297	a. current assets, non-current assets, and total assets;
b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;		b) short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
c) ekuitas;	194-205	c) equities;
d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	√	d) sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and
e) arus kas;	√	e) cash flows;
3) kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	√	3) the capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4) tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	256-257	4) accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;
5) struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	257-258	5) capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;

Keterangan	Halaman Page	Description
6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	258	6) discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a) tujuan dari ikatan tersebut;	-	a) the purpose of such ties;
b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	-	b) source of funds expected to fulfill the said ties;
c) mata uang yang menjadi denominasi; dan	-	c) currency of denomination; and
d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	-	d) steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;
7) bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	253-254	7) discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a) jenis investasi barang modal;	√	a) type of investment of capital goods;
b) tujuan investasi barang modal; dan	√	b) objective of the investment of capital goods; and
c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	√	c) value of the investment of capital goods;
8) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	272-273	8) material information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);
9) prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	263-265	9) information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry, economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;
10) perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	254-263	10) comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a) pendapatan/penjualan	√	a) income/sales
b) laba (rugi);	√	b) profit (loss);
c) struktur modal (capital structure); atau	√	c) capital structure; or
d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	d) others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
11) target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	263-271	11) target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a) pendapatan/penjualan;	√	a) income/sales;
b) laba (rugi);	√	b) profit (loss);
c) struktur modal (capital structure);	√	c) capital structure; or
d) kebijakan dividen; atau	√	d) dividend policy;
e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik	√	e) or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
12) aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	206-207	12) marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;
13) uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	273-274	13) description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a) kebijakan dividen;	√	a) dividend policy;
b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	√	b) the date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	√	c) amount of cash per share (cash and/or non cash); and
d) jumlah dividen per tahun yang dibayar;	√	d) amount of dividend per year paid;
14) realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	276-278	14) use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	-	a) during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and



Keterangan	Halaman Page	Description
b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	-	b) in the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;
15) informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	278	15) material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, among others include:
a) tanggal, nilai, dan objek transaksi	-	a) transaction date, value, and object;
b) nama pihak yang melakukan transaksi;	-	b) name of transacting parties;
c) sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	-	c) nature of related parties (if any);
d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	-	d) description of the fairness of the transaction; and
e) pemenuhan ketentuan terkait;	-	e) compliance with related rules and regulations;
16) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	285	16) changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and
17) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	285	17) changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any);
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	297-525	g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:
1) Direksi, mencakup antara lain:	371-382	1) the Board of Directors, covering:
a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	√	a) the tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors;
b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	√	b) statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;
c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;	394-396, 398-399	c) procedure, legal basis, structure, and amount of remuneration of each member of the Board of Directors, relation between remuneration and performance of the Issuer or Public Company;
d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;	403-410, 411-422	d) the policies and the frequency of the meeting of the Board of Directors, including the joint meeting with Board of Commissioners, and attendance of member of the Board of Directors in the said meeting;
e) informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi:	338-346	e) information on the resolution from the AGM of the previous 1 (one) year, covering:
(1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	√	(1) AGM resolutions that were realized during the fiscal year; and
(2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan;	√	(2) explanation for the unrealized resolution;
f) informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:	324-337	f) information regarding the AGM resolution in the year under review, including
(1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	√	(1) AGM resolutions that were realized during the fiscal year; and
(2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan	√	(2) explanation for the unrealized resolution
g) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;	382	g) assessment on the performance of the committee under the Board of Directors;
2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	347-367	2) the Board of Commissioners, among others include:
a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	√	a) duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris	√	b) statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;

Keterangan	Halaman Page	Description
c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris;	394-397	c) procedure, legal basis, structure, and amount of remuneration for each member of Board of Commissioners;
d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;	401-411	d) policies and frequency of meeting of the Board of Commissioners, including meeting with the Board of Directors, and attendance of each member of the Board of Commissioners in the said meetings;
e) kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:	388-393	e) policies of the Issuer or Public Company regarding the assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners and the implementation, at least covering:
(1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja	√	(1) procedure for the implementation of performance assessment;
(2) kriteria yang digunakan; dan	√	(2) criteria for assessment; and
(3) pihak yang melakukan penilaian;	√	(3) assessor
f) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan	366-367	f) assessment on the performance of the committees under the Board of Commissioners; and
g) dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:	429	g) in the event that the Board of Commissioners does not establish the Nomination and Remuneration Committee, than should contain at least:
(1) alasan tidak dibentuknya komite; dan	-	(1) reason not to establish the committee; and
(2) prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;	394-396	(2) procedure of nomination and remuneration performed in the year under review;
3) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	N.A	3) Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:
a) nama;	-	a) name
b) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	-	b) duty and responsibility of Sharia Supervisory Board; and
c) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	-	c) frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles by the Issuer or Public Company in the Capital Market;
4) Komite Audit, mencakup antara lain:	431-439	4) Audit Committee, among others covering:
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	√	a) name and position in the committee;
b) usia;	√	b) age;
c) kewarganegaraan	√	c) citizenship
d) riwayat pendidikan;	√	d) education background;
e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	e) history of position; including:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	√	(1) legal basis for the appointment as member of the committee;
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	(2) dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	√	f) period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) pernyataan independensi Komite Audit;	√	g) statement of independence of the Audit Committee
h) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	√	h) policies and implementation of the frequency of meeting of the Audit Committee and attendance of member of Audit Committee;





Keterangan	Halaman Page	Description
i) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	√	i) education and/or training during the year under review (if any); and
j) pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;	√	j) the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;
5) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:	439-448	5) other committee of the Issuer or the Public Company formed to support the function and duty of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, such as Nomination and Remuneration Committee, containing:
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	√	a) name and position in the Committee
b) usia;	√	b) age;
c) kewarganegaraan;	√	c) citizenship
d) riwayat pendidikan	√	d) education background
e) riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	e) history of position, including:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	√	(1) legal basis for the appointment as member of the committee;
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	(2) dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) periode dan masa jabatan anggota komite;	√	f) period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) uraian tugas dan tanggung jawab;	√	g) description of duty and responsibility;
h) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	√	h) statement that the Committee has already have the Charter;
i) pernyataan independensi komite;	√	i) statement of independence of the Committee;
j) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	√	j) policies and frequency of meeting of the committee, and attendance of each member of the committee in the said meetings;
k) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	√	k) education and/or training during the year under review (if any); and
l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	√	l) brief description on the activities of the committee;
6) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	449-452	6) Corporate Secretary, including:
a) nama;	√	a) name;
b) domisili;	√	b) domicile;
c) riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	c) history of position, including
(1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	√	(1) legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and
(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(2) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
d) riwayat pendidikan;	√	d) education background;
e) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	√	e) education and/or training during the year under review; and
f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	√	f) brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;

Keterangan	Halaman Page	Description
7) Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	452-461	7) Internal Audit Unit, among others including:
a) nama kepala Unit Audit Internal;	√	a) name of Head of Internal Audit Unit;
b) riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	b) history of position, including:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan	√	(1) legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and
(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(2) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	√	c) qualification or certification as internal auditor (if any);
d) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	√	d) education and/or training during the year under review;
e) struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	√	e) structure and position of Internal Audit Unit;
f) uraian tugas dan tanggung jawab;	√	f) description of duties and responsibilities;
g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Unit Audit Internal; dan	√	g) statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter; and
h) uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	√	h) brief description on the implementation of duty of Internal Audit Unit during the year under review;
8) uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	√	8) description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:
a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	√	a) financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and
b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal	√	b) review on the effectiveness of internal control systems;
9) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	463-475	9) risk management system implemented by the company, at least includes:
a) gambaran umum mengenai system manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	√	a) general description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;
b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	√	b) types of risk and the management; and
c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik	√	c) review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company
10) perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	484-490	10) important cases faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, current members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, among others include:
a) pokok perkara/gugatan	√	a) substance of the case/claim;
b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan	√	b) status of settlement of case/claim; and
c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c) potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company
11) informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	490	11) information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
12) informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	502-505	12) information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a) pokok-pokok kode etik;	√	a) key points of the code of conduct
b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	√	b) socialization of the code of conduct and enforcement; and
c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	√	c) statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issue of Public Company;
13) informasi mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada);	86-87	13) information about corporate culture (if any) of the Issuer or Public Company;





Keterangan	Halaman Page	Description
14) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai:	276	14) description of employee or management stock ownership program of the Issuer or Public Company, among others contains:
a) jumlah saham dan/atau opsi;	-	a) number of share and/or option;
b) jangka waktu pelaksanaan;	-	b) period
c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	-	c) requirement for eligible employee and/or management; and
d) harga pelaksanaan	-	d) exercised price;
15) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	515-516	15) description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include:
a) cara penyampaian laporan pelanggaran;	√	a) mechanism for violation reporting;
b) perlindungan bagi pelapor;	√	b) protection for the whistleblower;
c) penanganan pengaduan;	√	c) handling of violation reports;
d) pihak yang mengelola pengaduan; dan	√	d) unit responsible for handling of violation report; and
e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	√	e) results from violation report handling, at least includes:
(1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	√	(1) number of complaints received and processed during the fiscal year; and
(2) tindak lanjut pengaduan	√	(2) follow up of complaints;
16) penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	-	16) implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:
a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	-	a) statement regarding recommendation that have been implemented; and/or
b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada)	-	b) description of recommendation that have not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any)
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	527-579	h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company
1) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:		1) Information on social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company that covers policies, types of programs, and cost, among others related to:
a) lingkungan hidup, antara lain:	544-553	a) environment, among others
(1) penggunaan material dan energy yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang;	√	(1) the use of environmentally friendly and recyclable materials and energy;
2) sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(2) the waste treatment systems of the Issuer or Public Company;
(3) mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan	√	(3) mechanism for filling complaint on environmental issues; and
(4) sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;	√	(4) environmental certification
b) praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	554-565	b) employment practices, occupational health and safety, among others
(1) kesetaraan gender dan kesempatan kerja;	√	(1) gender equality and equal work opportunity
(2) sarana dan keselamatan kerja;	√	(2) work and safety facilities;
(3) tingkat perpindahan (<i>turnover</i>) karyawan	√	(3) employee turnover;
(4) tingkat kecelakaan kerja;	√	(4) work incident rate
(5) pendidikan dan/atau pelatihan;	√	(5) education and/or train
(6) remunerasi; dan	√	(6) remuneration; and

Keterangan	Halaman Page	Description
(7) mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;	√	(7) mechanism for filling complaint on employment issues;
c) pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:	√	c) social and community development, among others:
(1) penggunaan tenaga kerja lokal;	√	(1) the use of local work force
(2) pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi;	√	(2) empowerment of local communities among others through the use of raw material produced by the community or by providing education;
(3) perbaikan sarana dan prasarana sosial	√	(3) improvement of public social facilities and infrastructure;
(4) bentuk donasi lainnya; dan	√	(4) other form of donation; and
(5) komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada);	√	(5) dissemination of the policies and procedures of anti-corruption at the Issuers or Public Company, and training on anti-corruption (if any);
d) tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:	566-571	d) products and/or services responsibilities, among others:
(1) kesehatan dan keselamatan konsumen	√	(1) consumers' health and safety;
(2) informasi barang dan/atau jasa; dan	√	(2) products and/or services information; and
(3) sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.	√	(3) facilities, number, and resolution of consumer complaint.
2) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan; dan	√	2) In the event that the Issuer or the Public Company imparts information on social and environmental responsibility as referred to in point 1) in separate report such corporate social and environmental responsibility report, or sustainability report, then the Issuers or the Public Company is excluded from disclosing information on social and environmental responsibility in Annual Report; and
3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan;	√	3) The said report in point 2) should be submitted to the Financial Service Authority along with the Annual Report;
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	√	i. Audited Annual Financial Statement
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	√	Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislations in the Capital Markets sector governing the responsibility of the Board of Directors on the financial report or the legislations in the Capital Markets sector governing the periodic reports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company; and
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	√	j. Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting
Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	√	Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority.



Menuju Jaringan Logistik Global melalui Lompatan Besar _



GRHA PELINDO SATU

Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan,
Medan - 20411

Sumatera Utara - Indonesia

 (+62-61) 41000055

 (+62-61) 88800059

 pelabuhan1@pelindo1.co.id



www.pelindo1.co.id